SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memajukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif;
b. bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan birokrasi pemerintah berbasis teknologi informasi melalui pengintegrasian proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menyusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah KabupatendalamLingkunganPemerintahProvinsiJawaTimur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 2 Tahun 1965 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya danDati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalahKabupatenSitubondo.
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintahKabupatenSitubondo.
3. BupatiadalahBupatiSitubondo.
4. AparaturSipil Negara yang selanjutnyadisingkat ASN adalahprofesibagiPegawaiNegeriSipildanpegawaipemerintah denganperjanjiankerja yang bekerjapadainstansipemerintah.
5. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilan Rakyat

Daerah dalampenyelenggaraanUrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

6. SistemPemerintahanBerbasisElektronik yang selanjutnyadisingkat SPBE adalahpenyelenggaraanpemerintahan yang memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasiuntukmemberikanlayanankepadaPengguna SPBE.
7. Aplikasiadalahinstrumen yang mampumengolah data atauinformasisecaraotomatissedemikianrupasehinggamemberikankemudahandankecepatanbagipenggunadalammemperoleh data atauinformasi yang diperlukan.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal2

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE bertujuan untuk:

a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu;
b. mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE;
c. mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; dan
d. menjamin keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi dan Komunikasi.

BAB II
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

BagianKesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Nasional.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah.
(2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal5

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
    a. referensi arsitektur SPBE;

b. domain arsitektur SPBE.

(2) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur SPBE.

(3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal6

(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.

(2) Arsitektur SPBE menjadi pedoman untuk:
   a. penyusunan proses bisnisPemerintah Daerah;
   b. penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Daerah;
   c. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah;
   d. pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE;
   e. penerapanintegrasilayanan SPBE padaPemerintah Daerah;
   f. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur Pemerintah Daerah;
   g. pengelolaankeamananpadaPemerintah Daerah;
   h. pelaksanaanintegrasi domain arsitekturuntukmenghasilkanlayanan SPBE yang terpadu;
   i. penyusunanpetarencana SPBE Pemerintah Daerah; dan
   j. penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Dokumen Arsitektur SPBE terdiri dari:
   a. Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo;
   b. Arsitektur Proses Bisnis dan SOP;
   c. Arsitektur Data dan Informasi dan layanan SPBE;
   d. Arsitektur Aplikasi SPBE;
   e. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
   f. Arsitektur Keamanan SPBE;
   g. Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen SPBE, dan Penyelenggaraan SPBE; dan
   h. *Executive Summary* SPBE.

Bagian Ketiga
PetaRencana SPBE

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
   a. Peta Rencana SPBE Nasional;
   b. Arsitektur SPBE; dan/atau
   c. RPJMD.
(2) Peta Rencana SPBE memuat:
   a. Tata Kelola SPBE;
   b. Manajemen SPBE;
   c. Layanan SPBE;
   d. Infrastruktur SPBE;
   e. Aplikasi SPBE;
   f. Keamanan SPBE; dan
   g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(3) Dokumen Peta Rencana SPBE terdiri dari Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Kegiatan SPBE.

BAB III
PENYUSUNAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 8

(1) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
(4) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
REVIU DAN EVALUASI ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 9

(1) Arsitektur SPBEdapat dilakukan reviu dan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(2) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Perubahan terhadap Arsitektur SPBE.
(3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:

a. perubahanArsitektur SPBE Nasional;
b. perubahanunsur SPBE;
c. perubahan domain arsitektur SPBE;
d. perubahanRencanaInduk SPBE PemerintahDaerah;
e. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah dan/atau;
f. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE;
g. perubahan RPJMD; dan/atau
h. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Peta Rencana SPBE dapat dilakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu, tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(2) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan terhadap Peta Rencana SPBE.
(3) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
    a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    b. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah;
    c. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE;
    d. perubahan RPJMD; dan/atau
    e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 12

Rincian Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 53

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Executive Summary

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Executive Summary

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Visi dan Misi SPBE 1
1.2 Tujuan dan Sasaran SPBE 1
1.3 Pengertian Umum 2
1.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2
1.3.2 Pengertian Arsitektur SPBE 2
1.4 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE 3
1.4.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait 3
1.4.2 Referensi Arsitektur SPBE 5
1.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE 7
1.6 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE 8
1.7 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE 10
BAB 2 METODOLOGI 11
2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis 11
2.1.1 Identifikasi Referensi Proses Bisnis 11
2.1.2 Identifikasi Urusan Pemerintah 11
2.1.3 Identifikasi Metadata Proses Bisnis 11
2.1.4 Identifikasi Peta Proses Bisnis Setiap OPD 11
2.1.5 Identifikasi Peta Relasi 11
2.1.6 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP) 12
2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi 12
2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi 12
2.2.2 Identifikasi Gap Data dan Informasi 12
2.2.3 Identifikasi Data dan Informasi Tiap OPD 12
2.2.4 Identifikasi Integrasi Data dan Informasi 12
2.2.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 12
2.3 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE 13
2.3.1 Identifikasi Referensi Layanan SPBE 13
2.3.2 Identifikasi *Gap* Layanan SPBE Eksisting 13
2.3.3 Identifikasi Usulan Layanan SPBE 13
2.4 Arsitektur Aplikasi SPBE 13
2.4.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE 13

2.4.2 Identifikasi Metadata Eksisting Aplikasi SPBE 13
2.4.3 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE 14
2.4.4 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE 14
2.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur Infrastruktur SPBE 15
2.5.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE 15
2.5.2 Identifikasi Metadata Infrastruktur SPBE 16
2.5.3 Identifikasi GAP Infrastruktur SPBE 16
2.5.4 Identifikasi Usulan Infrastruktur SPBE 16
2.6 Metodologi Penyusunan Arsitektur Keamanan SPBE 16
2.6.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE 16
2.6.2 Identifikasi Metadata Keamanan SPBE 17
2.6.3 Identifikasi GAP Keamanan SPBE 17
2.6.4 Analisis Usulan Keamanan SPBE 17
2.7 Metodologi Arsitektur Tata Kelola SPBE 18
2.7.1 Identifikasi Referensi Hukum Tata Kelola SPBE 18
2.7.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE 18
2.7.3 Identifikasi Kondisi Eksisting 18
2.7.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE 18
2.7.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE 18
2.7.6 Analisis Usulan OPD Mandiri TIK 19
2.7.7 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI 19
2.7.8 Analisis Usulan Audit TIK 19
2.8 Metodologi Penyusunan Arsitektur Manajemen SPBE 19
2.8.1 Identifikasi Referensi Hukum Manajemen SPBE 19
2.8.2 Identifikasi Kondisi Eksisting 19
2.8.3 Identifikasi *Gap* Manajemen SPBE 19
2.8.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE 20
2.9 Metodologi Penyusunan Penyelenggara SPBE 20
2.9.1 Identifikasi Referensi Hukum Penyelenggara SPBE 20
2.9.2 Identifikasi Kondisi Eksisting 20
2.9.3 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE 20
2.9.4 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE 20
2.9.5 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE 21
BAB 3 KONDISI EKSISTING DAN GAP ANALISIS 21
3.1 Proses Bisnis 21
3.1.1 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Situbondo 21
3.1.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis 22
3.1.3 Ketersediaan SOP 22

3.1.4 Metadata Proses Bisnis SPBE 23
3.1.5 Analisis Gap Proses Bisnis SPBE 23
3.2 Data dan Informasi 23
3.2.1 Bentuk Data yang dimiliki 24
3.2.2 Tempat Penyimpanan Data 24
3.2.3 Aplikasi *Database* yang Digunakan 24
3.2.4 Jenis Akses Data 24
3.2.5 Integrasi Data dan Informasi Eksisting 25
3.2.6 Metadata Data dan Informasi 25
3.2.7 Permasalahan Data dan Informasi 25
3.2.8 Analisis Gap 26
3.3 Layanan SPBE 26
3.3.1 Layanan yang Dimiliki Seluruh OPD 26
3.3.2 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik 27
3.3.3 Layanan Publik Berbasis Elektronik 27
3.3.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program 27
3.3.5 Metadata Layanan SPBE 28
3.3.6 Permasalahan Layanan SPBE 28
3.3.7 Analisis Gap Layanan SPBE 29
3.4 Aplikasi SPBE 29
3.4.1 Ketersediaan Aplikasi SPBE 29
3.4.2 Status Pengembangan Aplikasi 29
3.4.3 Area Referensi Arsitektur 29
3.4.4 Status Penggunaan Aplikasi 30
3.4.5 Unit Pengembangan Aplikasi SPBE 30
3.4.6 Basis Aplikasi SPBE 30
3.4.7 Metadata Aplikasi SPBE 30
3.4.8 Permasalahan Aplikasi SPBE 31
3.4.9 Analisis Gap 31
3.5 Infrastruktur SPBE 31
3.5.1 Jaringan Intra Pemerintah 32
3.5.2 Ketersediaan Pusat Data atau *Server* 34
3.5.3 Komputasi 35
3.5.4 Sistem Penghubung Layanan 36
3.5.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 36
3.5.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE 41
3.5.7 Analisis *Gap* 43
3.6 Keamanan SPBE 43
3.6.1 Metadata Keamanan SPBE 43

3.6.2 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE 44
3.6.3 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE 44
3.6.4 Keamanan Teknis 45
3.6.5 Audit Keamanan SPBE 45
3.6.6 Permasalahan Keamanan 45
3.6.7 Analisis Gap Keamanan SPBE 46
3.7 Tata Kelola dan Manajemen SPBE 46
3.7.1 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE 46
3.7.2 Manajemen SPBE 48
3.7.3 Rencana Anggaran SPBE 52
3.7.4 Analisis Gap Tata Kelola dan Manajemen 53
3.8 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan SPBE dan SDM TIK 54
3.8.1 Penyelenggara SPBE 54
3.8.2 SDM TIK 54
3.8.3 Analisis Gap Penyelenggaraan SPBE dan SDM TIK 57
BAB 4 ARSITEKTUR PROSES BISNIS 57
4.1 Arsitektur Proses Bisnis 57
4.2 Urusan Pemerintah 57
4.3 Metadata Proses Bisnis 58
4.3.1 Atribut Metadata Proses Bisnis 58
4.4 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo 58
4.5 Peta Proses Bisnis Level OPD 59
4.5.1 Pengkodean Proses Bisnis Level OPD 59
4.5.2. Hasil Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap OPD 60
4.6 Peta Relasi Kabupaten Situbondo 60
4.7 Usulan Standar Operasional Prosedur 60
BAB 5 ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI 61
5.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi 61
5.2 Identifikasi Gap Data dan Informasi 61
5.3 Identifikasi Data dan Informasi Tiap OPD 61
5.4 Usulan Integrasi Data dan Informasi 62
5.4.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan 62
5.4.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian 62
5.4.3 Usulan Integrasi Data Keuangan 62
5.4.4 Usulan Integrasi Data Spasial 63
5.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 63
BAB 6 ARSITEKTUR LAYANAN SPBE 66

6.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE....66
6.2 Identifikasi Gap Layanan SPBE....66
6.3 Identifikasi Usulan Layanan SPBE....67
6.3.1 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE....67
6.3.2 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD....68
6.3.3 Usulan Layanan Terhadap Usulan Aplikasi....68
BAB 7 ARSITEKTUR APLIKASI SPBE....70
7.1 Identifikasi Referensi Aplikasi SPBE....70
7.2 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE....71
7.3 Identifikasi *Gap* Aplikasi SPBE....71
7.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik....71
7.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual....72
7.6 Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Hasil Survei....72
7.7 Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Pengembangan....72
7.8 Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Hasil Pemetaan Dari Tupoksi Masing-Masing OPD Terhadap Kelompok Urusan....73
7.9 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE....73
7.10 Pengelompokan Usulan Aplikasi SPBE....73
7.10.1 Jumlah Aplikasi berdasarkan Jenis Pengembangan....74
7.10.2 Jumlah Aplikasi berdasarkan Fungsi Aplikasi SPBE....74
7.10.3 Jumlah Usulan Aplikasi berdasarkan Basis Aplikasi....74
7.10.4 Jumlah Aplikasi berdasarkan Pengguna Aplikasi....74
BAB 8 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE....76
8.1 Usulan Infrastruktur SPBE....76
8.1.1 Jaringan Intra Pemerintah....76
8.1.2 Ruang *Server* (Data Center)....79
8.1.3 Sistem Penghubung Layanan....81
8.1.4 Komputasi Awan....83
8.1.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak....83
BAB 9 ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE....88
9.1 Usulan Keamanan SPBE....88
9.1.1 Perencanaan Keamanan SPBE....89
9.1.2 Implementasi Keamanan SPBE....91
9.1.3 Evaluasi Keamanan SPBE....91
9.1.4 Tindak Lanjut Keamanan SPBE....92
BAB 10 ARSITEKTUR TATA KELOLA, MANAJEMEN SPBE DAN PENYELENGGARA SPBE....94

10.1 Arsitektur Tata Kelola 94
10.1.1 Analisis Usulan Kebijakan SPBE 94
10.1.2 Analisis Usulan OPD Mandiri TIK 94
10.1.3 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI 96
10.1.4 Analisis Usulan Audit TIK 96
10.2 Arsitektur Manajemen SPBE 97
10.2.1 Manajemen Risiko 97
10.2.2 Manajemen Keamanan Informasi 98
10.2.3 Manajemen Data 98
10.2.4 Manajemen Aset TIK 99
10.2.5 Manajemen Sumber Daya Manusia 100
10.2.6 Manajemen Pengetahuan 100
10.2.7 Manajemen Perubahan 101
10.2.8 Manajemen Layanan SPBE 102
10.2.9 Kesimpulan Manajemen SPBE 102
10.3 Arsitektur Penyelenggara SPBE 103
10.3.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE 103
10.3.2 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Situbondo 104
10.3.3 Analisis Kompetensi SDM SPBE 104
10.3.4 Pengadaan SDM TIK 105
10.3.5 Analisis Kebutuhan *Training* SDM 105
10.3.6 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM 106
BAB 11 PETA RENCANA DAN RENCANA ANGGARAN SPBE 108
11.1 Membangun Sistem Layanan dan *Service Desk* 108
11.2 Penguatan Kebijakan SPBE 108
11.3 Peta Rencana Pengadaan SDM SPBE 109
11.4 Analisis Kebutuhan *Training* SDM 110
11.5 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM 110
11.6 Peta Rencana Manajemen SPBE 110
11.7 Peta Rencana Integrasi Data 111
11.7.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan 111
11.7.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian 111
11.7.3 Usulan Integrasi Data Keuangan 111
11.7.4 Usulan Integrasi Data Spasial 112
11.7.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 112
11.8 Peta Rencana Layanan SPBE 112
11.8.1 Peta Rencana Layanan SPBE sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 113
11.8.2 Peta Rencana Pembuatan Standar Operasional Prosedur 113

11.8.3 Usulan SOP Pada Layanan Eksisting 113
11.8.4 Usulan SOP Pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD 113
11.8.5 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program 114
11.9 Peta Rencana Aplikasi SPBE 114
11.10 Peta Rencana Infrastruktur SPBE 114
11.10.1 Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya 115
11.10.2 Peta Rencana Ruang *Server* (Data Center) dan Pelengkapnya 116
11.10.3 Peta Rencana Sistem Penghubung Layanan 116
11.10.4 Peta Rencana Komputasi 117
11.10.5 Peta Rencana Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 118
11.10.6 Peta Rencana Command Center 119
11.11 Peta Rencana Keamanan SPBE 119
11.13.1 Perencanaan Keamanan SPBE 120
11.13.2 Implementasi Keamanan SPBE 122
11.13.3 Evaluasi Keamanan SPBE 122
11.13.4 Tindak Lanjut Keamanan SPBE 123
11.12 Peta Rencana Audit SPBE 124
BAB 12 RENCANA DAN ANGGARAN 126
12.1 Rencana Anggaran Penyelenggaraan SPBE 126
12.1.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggaraan SPBE 126
12.1 Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE 126
12.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE 127
12.3 Rencana Anggaran Layanan SPBE 127
12.4 Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE 128
12.4 Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur 128
12.4.1 Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya 128
12.4.2 Anggaran Ruang *Server* (*Data Center*) dan Pelengkapnya 128
12.4.3 Anggaran Komputasi 129
12.4.4 Anggaran Perangkat Keras *(Hardware)* 129
12.4.5 Anggaran *Command Center* 137
12.5 Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE 138
12.6 Rencana Anggaran Audit TIK 141
12.7 Rencana Anggaran Pelaksanaan Peta Rencana 142

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1 Total Keseluruhan Usulan Perangkat Keras Utama 85
Tabel 10.1 Usulan OPD Mandiri TIK 95
Tabel 11.1 Jumlah Pembangunan Aplikasi SPBE Setiap Tahun 114
Tabel 12.1 Rencana Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya 128
Tabel 12.2 Rencana Anggaran Ruang Server (Data Center) dan Pelengkapnya 129
Tabel 12.3 Rencana Anggaran Komputasi dan Pelengkapnya 129
Tabel 12.4 Rencana Anggaran Perangkat Keras (Hardware) 129
Tabel 12.5 Rencana Anggaran Command Center 137
Tabel 12.6 Rencana Anggaran Keamanan SPBE 138
Tabel 12.7 Kisaran Anggaran Audit TIK 141
Tabel 12.8 Total Rencana Anggaran 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Kerja SPBE 6
Gambar 5.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi 61
Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE 66
Gambar 7.1 Arsitektur Aplikasi SPBE 70

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 menjabarkan secara umum sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dilanjutkan dengan menjabarkan pengertian Arsitektur SPBE, referensi hukum dan arsitektur, metodologi tahapan penyusunan dan diakhiri dengan penjelasan luaran yang akan dihasilkan pada kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1.1 Visi dan Misi SPBE

Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo disusun berdasarkan visi misi Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027 yaitu **" Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, Dan Berdaya".** Untuk mewujudkan dan mendukung visi SPBE, adapun misi SPBE Kabupaten Situbondo yakni sebagian berikut:

- **Misi 1:** Membangun pelayanan publik berbasis elektronik terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat Situbondo yang Beriman Dalam Keberagaman.
- **Misi 2**: Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan sebagai bentuk pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- **Misi 3:** Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing dengan dukungan fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
- **Misi 4**: Membangun penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik profesional, bersih, dan tangguh berbasis elektronik terpadu.

1.2 Tujuan dan Sasaran SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027 adalah

1) Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat Situbondo yang beriman dalam keberagaman.
2) Pemberdayaan Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan sebagai bentuk pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3) Terwujudnya Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing dengan dukungan fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.

4) Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik profesional, bersih, dan tangguh berbasis elektronik terpadu.

1.3 Pengertian Umum

Pengertian umum menjelaskan beberapa pengertian mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Arsitektur SPBE berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

1.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE yang dimaksud adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Pelaksanaan SPBE harus dilakukan dengan 7 prinsip, yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. **Efektivitas** yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. **Keterpaduan** merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. **Kesinambungan** sebagai keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. **Efisiensi** menjadi bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. **Akuntabilitas** menjadi wujud kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. **Interoperabilitas** merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. **Keamanan** menjadi wujud kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

1.3.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **Arsitektur SPBE** adalah sebuah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada level Pemerintah Daerah menerapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 tahun dan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Proses penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. Selain menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah juga

berkewajiban melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan. Proses reviu yang dilakukan harus berdasarkan pada:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE) atau
d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur SPBE terdiri dari referensi hukum dan referensi arsitektur SPBE yang dapat dijelaskan pada sub bab berikut ini.

1.4.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dibuat dengan mengacu dan memenuhi peraturan - peraturan pemerintah terkait dan terkini, meliputi:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik***.**
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014** tentang *Pemerintahan Daerah*.
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012** tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014** tentang *Jaringan Informasi Geospasial Nasional.*
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*
6. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang *Satu Data Indonesia.*
7. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
8. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003** tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
9. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016** tentang *Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.*
10. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016** tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika*
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*.

12. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** tentang *Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.*
13. **Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019** tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.*
14. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang *Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
15. **Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020** tentang *Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
16. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
17. **Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang *Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.*
18. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.*
19. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang *Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE*.
20. **Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021** tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026*.
21. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021** tentang *Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.*
22. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022** tentang *Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.*
23. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2022** tentang *Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.*
24. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/70/P/001.3/2022** tentang *Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.*
25. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022** tentang *Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.*

    Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022 tentang *Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.*

1.4.2 Referensi Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE harus memuat 2 hal, yakni referensi arsitektur dan domain arsitektur. Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Referensi Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku, mendukung pengambilan keputusan organisasi, mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai, meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Meskipun pada perpres 95/2018 tidak secara langsung menyebutkan jika arsitektur pemerintah daerah harus memuat referensi arsitektur, akan tetapi dikarenakan arsitektur SPBE Pemerintah daerah mengacu pada arsitektur nasional, maka arsitektur SPBE Pemerintah daerah juga harus memuat referensi arsitektur. Referensi arsitektur juga diperkuat dengan indikator 11 pada Permen PAN-RB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE baru akan bisa mencapai tingkat 3 apabila dokumen arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur SPBE. Berikut akan diilustrasikan terkait susunan kerangka kerja SPBE seperti pada **Gambar 1.1.**

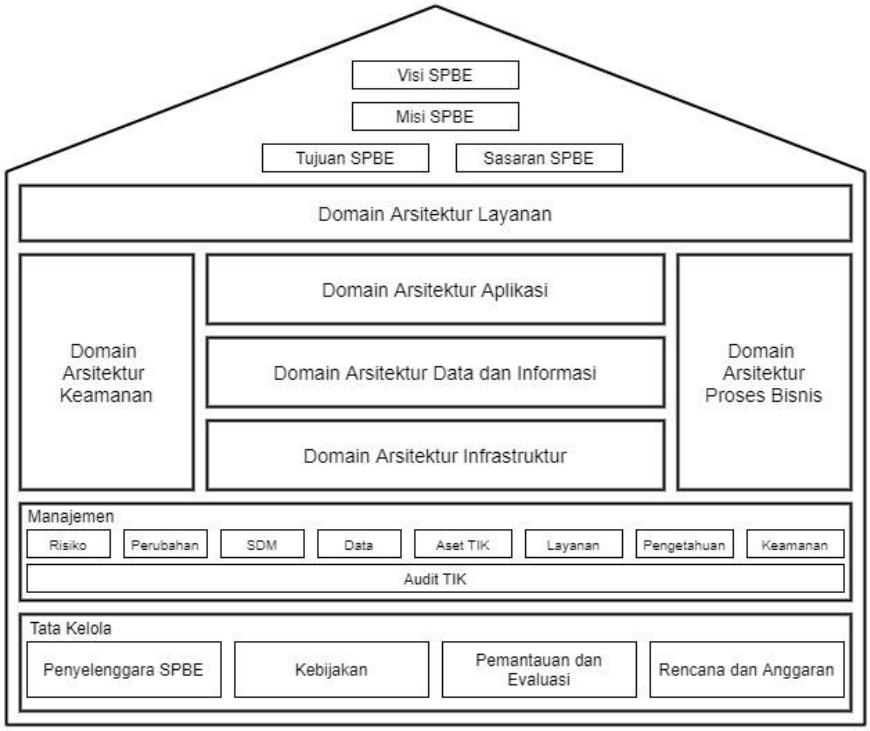

Gambar 1.1 Kerangka Kerja SPBE

(*sumber: Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional)*

Berdasarkan Gambar 1.1, Unsur-unsur SPBE ini antara lain rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. **Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)**
   RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua).
2. **Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)**
   RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua).
3. **Referensi Arsitektur Layanan (RAL)**
   RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua).

4. **Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)**
   RAA adalah kerangka kerja untuk mengategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi pakai, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 4 (empat) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi.
5. **Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)**
   Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (tujuh) area di tingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK.
6. **Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)**
   RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2.

1.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027 disesuaikan dengan Perpres 95/2018, dan mencakup 6 (enam) domain, yakni:

a. Domain **Layanan SPBE,**
b. Domain **Proses Bisnis,**
c. Domain **Data dan Informasi,**
d. Domain **Aplikasi SPBE,**
e. Domain **Infrastruktur SPBE**, dan
f. Domain **Keamanan SPBE**.

Masing-masing penyusunan domain juga akan memiliki **Referensi Arsitektur**, yakni:

a. Referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk seluruh Domain arsitektur,
b. Referensi arsitektur Layanan SPBE akan menggunakan **Perpres 95/2018** dan **Permenpan-RB 59/2020**,
c. Referensi arsitektur Proses Bisnis akan menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang **Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,**
d. Referensi arsitektur Data dan Informasi akan menggunakan kerangka kerja **Data Management Association (DAMA)**,
e. Referensi arsitektur Aplikasi akan menggunakan standar **90003:2018** tentang *computer software guideline***,**

f. Referensi infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE akan menggunakan standar **ISO 27001-series**.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:

a. Studi pustaka (*literature review*) untuk referensi metodologi, perangkat pengumpulan data dan pengukuran, serta analisisnya.
b. Survei *online* dan *offline* dengan menggunakan aplikasi berbasis web.
c. Observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dll).
d. Wawancara.
e. *Focus Group Discussion* dan *Desk Evaluation* untuk konfirmasi temuan dan rekomendasi akhir.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo, dirumuskan berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai praktik terbaik (*best practice*) di dunia, yakni:

1. Kerangka kerja (*framework*) TOGAF 9.1.
2. Warren McFarlan's Strategic Matrix (1983), khususnya untuk prioritasi sistem informasi.
3. ITIL 2011, khususnya untuk analisis struktur dan tupoksi unit TI.

1.6 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan ini terdiri dari **15 (lima belas)** proses untuk menghasilkan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo. Detail dari masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1) Inisiasi Kegiatan.

Inisiasi kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan kesepakatan luaran dokumen

2) Pembuatan Dokumen Administrasi

Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran kegiatan sampai serah terima pekerjaan

3) Pembentukan Tim Proyek

Pembentukan tim proyek terdiri dari *project owner, project manager*, analis dan *surveyor* yang terlibat dalam kegiatan.

4) Pengumpulan Dokumen eksisting

Dokumen eksisting didapatkan dari laman web Kabupaten Situbondo serta dokumen dari Dinas Komunikasi, dan Informatika. Dokumen dari Diskominfo dapat berupa RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, tupoksi, dan regulasi terkait.

5) Sosialisasi Seluruh OPD

Sosialisasi dilakukan pada Hari Rabu, 2 November 2022 secara daring. Kegiatan ini mengundang perwakilan dari 17 Dinas, 6 Badan, 1 RSUD, 9 Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Inspektorat, 2 Kecamatan, dan 2 Puskesmas. Proses sosialisasi dilakukan

pukul 09.00 – 14.00 WIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing perwakilan OPD tentang SPBE dan detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing OPD untuk kegiatan ini.

6) **Penjelasan Aplikasi Survei dengan Seluruh OPD**
Kegiatan ini dilakukan pada Hari Rabu, 2 November 2022 secara daring yang dihadiri oleh seluruh OPD. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan pengisian form survei berbasis web. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman ke OPD terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan saat survei nantinya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan terhadap *surveyor* lapangan untuk berkoordinasi dengan PIC OPD terkait jadwal visitasi ke OPD.

7) **Pengisian Data Survei Secara Mandiri**
Pengisian data secara mandiri dilakukan oleh masing-masing PIC OPD, bekerja sama dengan seluruh bidang pada setiap OPD. Pengisian ini dilakukan pada laman web *http://survey-situbondo.pttati.co.id/*. Masing-masing OPD memiliki *username* dan *password* untuk melakukan pengisian. Pengisian secara mandiri dilakukan pada tanggal 2 – 11 November 2022.

8) **Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap OPD**
Survei lapangan dan Verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survei satu-per-satu tiap OPD. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian mandiri yaitu pada tanggal 14 - 18 November 2022. Sebelum melakukan verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti dokumen apa yang harus di unggah.

9) **Rekapitulasi data Hasil survei**
Rekapitulasi data hasil survei ini bertujuan untuk melihat kesenjangan data yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada tahap ini, tim proyek akan menghubungi PIC OPD terkait bilamana ada data yang dibutuhkan.

10) **Analisis Gap dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE**
Analisis *gap* dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi eksisting disusun berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari setiap domain.

11) **Verifikasi Data Eksisting dengan Seluruh OPD**
Verifikasi data eksisting ini dilakukan via zoom setelah data hasil survei sudah dianalisis menjadi dokumen eksisting Kabupaten Situbondo. Tujuannya untuk melakukan konfirmasi data eksisting agar valid dan sesuai dengan kondisi setiap OPD.

12) **Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE**

Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini adalah penyusunan Buku 2 hingga Buku 8. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan analisis eksisting dan hasil gap yang telah didapatkan. Hasil dari tahapan ini menghasilkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027.

13) **FGD dan Desk Evaluation data Peta Rencana**
FGD (*Forum Group Discussion)* bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran data peta rencana yang telah dianalisis kepada masing-masing OPD. FGD dilakukan secara *online* dengan perwakilan PIC dari seluruh OPD. Kegiatan ini melakukan verifikasi kesesuaian hasil analisis usulan peta rencana SPBE dalam kurun 5 tahun dengan kebutuhan tiap OPD.

14) **Presentasi Akhir**
Presentasi akhir dilakukan ketika keseluruhan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo telah selesai dianalisis. Presentasi mendatangkan perwakilan dari seluruh OPD di Kabupaten Situbondo.

15) **Revisi Dokumen & Penyerahan Dokumen Akhir**
Hasil dari presentasi akhir, tidak menutup kemungkinan untuk adanya revisi dokumen. Tim proyek akan melakukan pengecekan ulang dokumen berdasarkan revisi yang telah diberikan. Kemudian, hasil dari revisi akhir merupakan dokumen akhir **Arsitektur dan Peta Rencana SPBE** Kabupaten Situbondo **Tahun 2023-2027**.

1.7 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen **Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** Kabupaten Situbondo **2023-2027**, yang mencakup:

1) Buku 1: **Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo**
2) Buku 2: **Arsitektur Proses Bisnis dan SOP SPBE**
3) Buku 3: **Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE**
4) Buku 4: **Arsitektur Aplikasi SPBE**
5) Buku 5: **Arsitektur Infrastruktur SPBE**
6) Buku 6: **Arsitektur Keamanan SPBE**
7) Buku 7: **Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE**, dan **Penyelenggara SPBE**
8) Buku 8: **Peta Rencana**, dan **Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE**
9) ***Executive Summary***
10) **Draf Perbup SPBE Kabupaten Situbondo**

BAB 2
METODOLOGI

Bab ini akan menjelaskan terkait metodologi yang digunakan dalam penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di Kabupaten Situbondo pada seluruh domain SPBE.

2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis

Pada metodologi penyusunan arsitektur proses bisnis ini menjelaskan terkait 7 tahapan penyusunan arsitektur proses bisnis yaitu identifikasi referensi proses bisnis, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi metadata proses bisnis, identifikasi peta proses bisnis pada masing masing OPD, identifikasi peta relasi, identifikasi peta lintas fungsi dan identifikasi usulan standar operasional prosedur (SOP).

2.1.1 Identifikasi Referensi Proses Bisnis

Mengacu pada Lampiran PEPRES tentang Arsitektur SPBE Referensi Arsitektur Proses Bisnis, bahwa identifikasi referensi proses bisnis merupakan proses klasifikasi jenis fungsi yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk identifikasi kesesuaian proses bisnis yang ada pada Kabupaten Situbondo.

2.1.2 Identifikasi Urusan Pemerintah

Identifikasi urusan pemerintah merupakan proses identifikasi urusan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pemerintahan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui urusan apa saja yang dikelola oleh Kabupaten Situbondo dan apakah urusan tersebut sudah sesuai dengan referensi proses bisnis SPBE.

2.1.3 Identifikasi Metadata Proses Bisnis

Identifikasi metadata proses bisnis merupakan identifikasi proses bisnis yang ada pada pemerintah daerah, kemudian data yang ada tersebut akan diidentifikasi berdasarkan kepemilikan proses bisnis metadata, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siapa penanggung jawab proses bisnis tersebut.

2.1.4 Identifikasi Peta Proses Bisnis Setiap OPD

Mengacu pada Permen PAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang pedoman peta proses bisnis instansi pemerintah. Identifikasi peta proses bisnis merupakan proses identifikasi proses bisnis pada setiap OPD yang bertujuan untuk mengetahui proses bisnis manajerial dan utama level 0 dan level 1 pada masing masing OPD.

2.1.5 Identifikasi Peta Relasi

Peta relasi merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses. Identifikasi peta relasi bertujuan untuk memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai luaran yang ditentukan.

2.1.6 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Identifikasi usulan standar operasional prosedur merupakan identifikasi usulan SOP berdasarkan fungsi yang ada pada setiap OPD. Namun SOP belum tersedia untuk mendukung proses bisnis OPD tersebut.

2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi

Penyusunan arsitektur data dan informasi terdapat 5 tahapan yaitu identifikasi referensi arsitektur data dan informasi, identifikasi gap data dan informasi, identifikasi data dan informasi tiap OPD, identifikasi usulan integrasi data dan informasi, serta usulan tata kelola data dan informasi.

2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.2.2 Identifikasi Gap Data dan Informasi

Identifikasi gap data dan informasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan data dan informasi yang ada pada suatu pemerintahan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara, membandingkan kondisi data dan informasi yang ada sekarang, dengan parameter dan referensi nasional serta kondisi ideal yang diharapkan.

2.2.3 Identifikasi Data dan Informasi Tiap OPD

Identifikasi data dan informasi tiap OPD merupakan proses identifikasi data yang ada pada setiap OPD kemudian data tersebut dipetakan sesuai taksonomi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data yang dikelola pada setiap OPD, bentuk data tersebut, tempat penyimpanan data tersebut, aplikasi *database* dan jenis akses data yang digunakan pada setiap masing-masing OPD.

2.2.4 Identifikasi Integrasi Data dan Informasi

Identifikasi integrasi data dan informasi merupakan pembahasan terkait usulan untuk mengintegrasikan atau menghubungkan sekelompok data-data penting yang dikelola Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sekelompok data-data yang dimaksud berupa data mengenai kependudukan, data mengenai kepegawaian, data mengenai keuangan dan data untuk sistem informasi geografis.

2.2.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Usulan tata kelola data dan informasi merupakan pembahasan kegiatan-kegiatan untuk menunjang program Satu Data Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait kegiatan, jenis kegiatan dan OPD yang terkait kegiatan tersebut.

2.3 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE

Pada metodologi penyusunan arsitektur layanan SPBE ini menjelaskan terkait 3 tahapan penyusunan arsitektur layanan SPBE yaitu meliputi identifikasi referensi arsitektur layanan SPBE, identifikasi *gap* layanan SPBE eksisting dan identifikasi usulan layanan SPBE.

2.3.1 Identifikasi Referensi Layanan SPBE

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi.

2.3.2 Identifikasi *Gap* Layanan SPBE Eksisting

Identifikasi gap layanan merupakan suatu proses membandingkan data layanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini dengan parameter dan referensi nasional. Dari hasil identifikasi tersebut maka dapat diketahui kesenjangan atau gap apa saja yang kurang pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

2.3.3 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Identifikasi usulan layanan SPBE bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan proses layanan pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan layanan SPBE yang diperoleh dari analisis layanan eksisting dan program pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026. Sehingga dapat diketahui usulan layanan apa saja yang sesuai untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.4 Arsitektur Aplikasi SPBE

Pada metodologi penyusunan arsitektur aplikasi SPBE, dilakukan 5 tahapan penyusunan arsitektur aplikasi SPBE dimulai dari identifikasi referensi arsitektur aplikasi SPBE, lalu identifikasi metadata aplikasi SPBE, identifikasi *gap* aplikasi SPBE, identifikasi usulan aplikasi SPBE, dan identifikasi usulan integrasi aplikasi.

2.4.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Identifikasi Referensi Aplikasi SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Kebijakan ini memaparkan bahwa aplikasi layanan publik dan administrasi dapat dijabarkan menjadi 4 (empat) referensi arsitektur aplikasi SPBE yaitu RAA 01.01 Aplikasi Layanan Publik, RAA 01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, RAA 02.01 Aplikasi Misi Tertentu, RAA 02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu.

2.4.2 Identifikasi Metadata Eksisting Aplikasi SPBE

Identifikasi metadata aplikasi eksisting SPBE dilakukan dengan tujuan untuk pendataan tentang aplikasi eksisting yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah di

Pemerintah Kabupaten Situbondo. Data eksisting aplikasi ini didapatkan dari hasil survei *online* dan survei lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen kondisi eksisting aplikasi SPBE beserta metadatanya secara lengkap dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo, BAB 6, Subbab 6.4 hingga Subbab 6.7.**

2.4.3 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE

Identifikasi *gap* atau kesenjangan ditentukan berdasarkan perbandingan kondisi eksisting aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo dengan kondisi ideal yang ingin di capai. Dari kondisi eksisting didapatkan data aplikasi eksisting yang dipetakan ke dalam beberapa identifikasi yang dapat dilakukan. Pemetaan dilakukan berdasarkan Program Prioritas RPJMD Pemerintahan Kabupaten Situbondo, kondisi eksisting layanan, urusan hingga data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisis *gap* ini berfungsi agar dapat mengetahui program, data dan informasi, serta layanan yang belum didukung aplikasi.

2.4.4 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE

Usulan aplikasi SPBE dapat dianalisis dengan melakukan 6 (enam) cara yakni identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual, identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei, identifikasi usulan aplikasi berdasarkan pengembangan, serta identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan. Terakhir juga dibahas mengenai identifikasi usulan integrasi aplikasi. Adapun cara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

2.4.4.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik

Identifikasi ini didasari pada layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Hal ini ditentukan dengan melakukan pemetaan pada aplikasi eksisting. Pemetaan aplikasi eksisting dilakukan berdasarkan 10 layanan administrasi berbasis elektronik dan 14 layanan publik sektoral berbasis elektronik yang terdapat pada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut dapat ditentukan layanan mana yang operasionalnya sudah didukung aplikasi dan mana yang masih beroperasi secara manual.

2.4.4.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Pada tahap identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual dilakukan pemetaan seluruh aplikasi eksisting yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan seluruh layanan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini bertujuan untuk mengetahui layanan mana yang belum didukung aplikasi, sehingga dapat diusulkan aplikasi untuk mendukung layanan manual tersebut.

2.4.4.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

Pada identifikasi usulan berdasarkan hasil survei dilakukan pendataan hasil survei pada bagian usulan aplikasi yang didapatkan dari penyebaran kuesioner di

lapangan serta wawancara bersama narasumber untuk masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Usulan hasil survei ini kemudian dipertimbangkan untuk menjadi rekomendasi usulan aplikasi SPBE karena dapat mewakili beberapa permasalahan dari masing-masing OPD yang telah disampaikan pada saat pengumpulan data.

2.4.4.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

Pada identifikasi ini, usulan aplikasi dibuat berdasarkan pengembangan merupakan usulan aplikasi yang berasal dari aplikasi yang sudah digunakan oleh Kabupaten Situbondo, namun dilakukan pengembangan dari aplikasi tersebut karena terdapat fitur yang perlu ditambahkan, serta penggabungan beberapa aplikasi untuk diusulkan menjadi satu kesatuan aplikasi yang terintegrasi.

2.4.4.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Pemetaan Dari Tupoksi Masing-Masing OPD Terhadap Kelompok Urusan

Pada bagian ini dilakukan pemetaan tupoksi dari masing-masing OPD terhadap aplikasi SPBE eksisting, layanan, serta program RPJMD. Setiap OPD akan dipetakan berdasarkan urusan, bidang, serta seksinya. Pemetaan ini akan memenuhi gap mengenai bidang yang belum memiliki dukungan aplikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

2.4.4.6 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi

Identifikasi usulan integrasi aplikasi dilakukan dengan analisis aplikasi eksisting dan juga aplikasi usulan. Penentuan integrasi didasarkan pada kebutuhan aplikasi dan juga usulan dari kebutuhan OPD saat dilakukan survei.

2.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur Infrastruktur SPBE

Pada metodologi arsitektur infrastruktur SPBE ini menjelaskan terkait 3 tahapan penyusunan arsitektur infrastruktur SPBE yang meliputi analisis kondisi eksisting analisis kesenjangan dan analisis usulan infrastruktur SPBE.

2.5.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 202**2 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang mana menjelaskan bahwa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (Tiga) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam

pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

2.5.2 Identifikasi Metadata Infrastruktur SPBE

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk mengetahui terkait kondisi terkini penerapan infrastruktur yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Proses analisis kondisi eksisting terdiri dari *input* berupa data yang dihasilkan pelaksanaan survei *online* dan *offline*, yang kemudian di proses dengan melakukan Analisa dan reviu data.

2.5.3 Identifikasi GAP Infrastruktur SPBE

Analisis kesenjangan merupakan proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi terkait tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau tindakan terkait Infrastruktur SPBE pada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang nantinya bertujuan untuk mencapai kinerja yang diharapkan di masa mendatang. Analisis kesenjangan juga membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal terkait infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Input* yang digunakan pada tahap ini yaitu berupa data terkait dengan kondisi eksisting dan selanjutnya dilakukan proses membandingkan dari hasil analisis antara kondisi eksisting dengan kondisi infrastruktur SPBE yang diharapkan di masa mendatang.

2.5.4 Identifikasi Usulan Infrastruktur SPBE

Analisis usulan infrastruktur SPBE merupakan saran perbaikan atau rekomendasi pengembangan untuk peningkatan penerapan Infrastruktur dan nilai indeks SPBE domain infrastruktur SPBE yang akan diterapkan pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo. *Input* pada tahap ini merupakan hasil dari analisis kesenjangan yang telah didapatkan dan selanjutnya dilakukan proses Analisa untuk mendapatkan solusi berupa usulan prioritas infrastruktur. Dari usulan prioritas infrastruktur, nantinya digunakan untuk membantu meningkatkan nilai indeks SPBE yang ingin dicapai pada setiap indikatornya. Adapun indikator capaian keberhasilan pembangunan infrastruktur sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.6 Metodologi Penyusunan Arsitektur Keamanan SPBE

Pada metodologi arsitektur keamanan SPBE ini menjelaskan terkait 3 (tiga) tahapan penyusunan arsitektur keamanan SPBE yang meliputi analisis kondisi eksisting, analisis kesenjangan dan analisis usulan keamanan SPBE.

2.6.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**,

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

2.6.2 Identifikasi Metadata Keamanan SPBE

Analisis kondisi eksisiting dilakukan untuk menganalisis keadaan arsitektur keamanan SPBE saat ini di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Tahapan *input* berupa data yang diperoleh dari hasil survei *online* dan *offline*, yang kemudian diolah melalui analisis dan verifikasi data.

2.6.3 Identifikasi GAP Keamanan SPBE

Analisis kesenjangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang dari kondisi eksisting yang dibandingkan dengan kondisi ideal untuk Keamanan SPBE. Proses analisis kesenjangan terdiri dari, ***Input*** yaitu analisis kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dan hasil analisis penentuan ekspektasi atau target yang ingin dituju terkait Keamanan SPBE. **Proses** merupakan tahapan yang dilakukan dengan membandingkan antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan target atau tujuan kondisi keamanan infrastruktur yang ingin dituju. ***Output*** merupakan suatu proses yang menghasilkan berupa daftar Kesenjangan/ *GAP* dari ketidaksesuaian antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan kondisi yang ingin dituju pada setiap indikatornya.

2.6.4 Analisis Usulan Keamanan SPBE

Analisis Keamanan SPBE ini melakukan analisis terkait kebutuhan yang mendukung penerapan Keamanan SPBE. Proses analisis usulan keamanan SPBE meliputi ***Input***, pada analisis kesenjangangan, berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapat sebelumnya akan digunakan sebagai input data pada tahapan awal. **Proses**, setiap indikator yang ada diperoleh dari kesenjangan, kemudian proses selanjutnya dilakukan pencarian terkait solusi berupa usulan untuk memenuhi kondisi yang ingin dicapai dari setiap indikator Keamanan SPBE. ***Output***, hasil dari tahapan ini adalah daftar berupa rekomendasi kebutuhan Keamanan SPBE yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.7 Metodologi Arsitektur Tata Kelola SPBE

Pada metodologi arsitektur tata kelola SPBE ini menjelaskan terkait 8 tahapan penyusunan arsitektur tata kelola SPBE yang akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

2.7.1 Identifikasi Referensi Hukum Tata Kelola SPBE

Tahapan Identifikasi Referensi Hukum Tata Kelola SPBE dilakukan pengidentifikasian dasar hukum yang akan digunakan dalam penyusunan arsitektur tata kelola SPBE. referensi hukum yang diambil dapat berasal dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati.

2.7.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE

Tahapan Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE akan dibandingkan antara kondisi tata kelola SPBE yang sudah diterapkan dengan kondisi ideal tata kelola SPBE. Identifikasi gap tata kelola SPBE diperlukan untuk mengetahui kesenjangan kondisi antar tata kelola SPBE di Kabupaten Situbondo.

2.7.3 Identifikasi Kondisi Eksisting

Tahapan identifikasi kondisi eksisting dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi pelaksanaan tata kelola SPBE saat ini pada Kabupaten Situbondo. Hal ini dilakukan agar kedepannya dapat dibandingkan dengan kondisi tata kelola SPBE yang ideal.

2.7.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE

Tahapan identifikasi kondisi tata kelola SPBE dilakukan untuk mengetahui kesenjangan kondisi tata kelola SPBE pada Kabupaten Situbondo. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi tata kelola SPBE saat ini dengan kondisi tata kelola SPBE yang ideal

2.7.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE

Kebijakan internal SPBE adalah komponen penting dalam penerapan SPBE pada suatu Pemerintah Daerah. Kebijakan internal SPBE berperan sebagai landasan hukum yang dijadikan pedoman hukum yang mengatur dan mengelola penyelenggaraan kebijakan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek kebijakan SPBE terdiri dari Kebijakan internal tata kelola SPBE. Analisa meliputi ketentuan bagaimana kebijakan internal SPBE yang perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memenuhi indikator pada domain Kebijakan SPBE. Analisis urusan kebijakan SPBE dilakukan untuk memberikan saran terhadap perbaikan kebijakan SPBE pada Kabupaten Situbondo. Usulan dan Saran yang di berikan ini didasarkan pada analisis Gap Kebijakan Tata Kelola SPBE pada tahap sebelumnya. Rencana pembangunan kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.7.6 Analisis Usulan OPD Mandiri TIK

Pada bagian ini menganalisis usulan OPD Mandiri TIK dilakukan dengan memberikan saran bagi PPD Mandiri TIK yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisa usulan OPD Mandiri TIK ini diharapkan agar OPD yang diusulkan dapat menerapkan sejumlah tata kelola dan manajemen demi meningkatkan kualitas OPD Mandiri. Tahapan ini dilakukan untuk mencapai kondisi ideal dari OPD Mandiri TIK

2.7.7 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Pada Bagian ini menganalisis usulan audit TIK bertujuan untuk membagi peran terhadap pengelolaan TI bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam membagi peran pengelola TI yang ideal. Hasil kegiatan ini yaitu pembagian penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo

2.7.8 Analisis Usulan Audit TIK

Pada bagian ini menganalisis Usulan Audit TIK dilakukan mendukun pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kegiatan audit TIK mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan. Hasil dari kegiatan ini yaitu penjelasan mengenai bentuk kegiatan dan standar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo demi meningkatkan kualitas layanan SPBE.

2.8 Metodologi Penyusunan Arsitektur Manajemen SPBE

Bagian penyusunan Manajemen SPBE dimulai dari mengidentifikasi referensi hukum yang berkaitan dengan manajemen SPBE hingga menganalisis usulan manajemen SPBE yang tepat untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.8.1 Identifikasi Referensi Hukum Manajemen SPBE

Bagian identifikasi referensi hukum bertujuan untuk mengetahui acuan atau dasar hukum yang digunakan pada penyusunan arsitektur manajemen SPBE. Referensi hukum yang digunakan berasal dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati.

2.8.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Bagian ini identifikasi dilakukan untuk mengetahui penerapan manajemen SPBE di Pemkab. Situbondo saat ini. Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar dalam memberikan usulan atau rekomendasi bagi Pemkab. Situbondo agar mencapai kondisi ideal manajemen SPBE

2.8.3 Identifikasi *Gap* Manajemen SPBE

Bagian identifikasi gap manajemen SPBE bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kondisi manajemen SPBE di Kab. Situbondo. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi manajemen SPBE saat ini dengan kondisi manajemen SPBE yang ideal, yakni berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE yang mencakup pada 8 jenis manajemen

2.8.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE

Setelah membahas proses analisa gap, selanjutnya yaitu menjabarkan hasil analisis usulan manajemen SPBE untuk Pemkab. Situbondo. Manajemen SPBE menurut Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE terdapat 8 jenis manajemen yang selanjutnya akan dibahas pada sub-bab ini, diantaranya Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

2.9 Metodologi Penyusunan Penyelenggara SPBE

Bagian ini menyusun Arsitektur Penyelenggara SPBE dimulai dari identifikasi hukum yang berkaitan dengan penyelenggara SPBE hingga analisis usulan terhadap sumber daya manusia SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.9.1 Identifikasi Referensi Hukum Penyelenggara SPBE

Bagian ini mengidentifikasi referensi yang bertujuan mengetahui pedoman atau landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan arsitektur manajemen SPBE. Referensi hukum yang digunakan berasal dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati. Detail mengenai referensi hukum dalam penyelenggara SPBE dapat dilihat pada **Buku 7 Aristektur Tata Kelola Manajemen SPBE dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Bab 5 Sub Bab 5.1 tentang identifikasi referensi hukum SPBE.**

2.9.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Bagian ini identifikasi dilakukan untuk mengetahui penerapan penyelenggara SPBE di Pemkab. Situbondo saat ini. Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar dalam memberikan usulan atau rekomendasi bagi Pemkab. Situbondo agar mencapai kondisi ideal Penyelenggara SPBE.

2.9.3 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE

Bagian identifikasi gap penyelenggara SPBE bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kondisi penyelenggara SPBE di Pemkab. Situbondo. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi penyelenggara SPBE saat ini dengan kondisi penyelenggara SPBE yang ideal, yakni berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.

2.9.4 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE

Pada bagian ini dilakukan analisa secara garis besar terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan SPBE dengan hasil analisis GAP yang dilaksanakan. Proses ini dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan kondisi yang dilaksanakan sekarang dengan kondisi ideal yang harus dicapai maupun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisa arsitektur penyelenggaraan SPBE ini terdiri dari beberapa bagian yakni Analisis Tim Koordinasi dan Analisa struktur anggota atau Staf dalam beberapa organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.9.5 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE

Pada bagian ini berisi hasil kondisi eksisting sumber daya manusia SPBE secara garis besar dengan disertai hasil analisis GAP yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi masa kini dengan kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisa Sumber Daya Manusia SPBE terdiri dari analisa kompetensi SDM SPBE. Pengadaan SDM SPBE, Analisa kebutuhan *training* SDM, dan Analisa kebutuhan sertifikasi SDM.

BAB 3
KONDISI EKSISTING DAN GAP ANALISIS

Pada bab ini akan menjelaskan kondisi saat ini mengenai domain proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, tata kelola dan manajemen SPBE, serta yang terakhir penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Setelah mengetahui kondisi saat ini, selanjutnya akan dibahas kondisi yang ideal untuk dicapai, setelah itu akan didapatkan gap yang ada di antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menemukan strategi pembangunan yang tepat selama 5 (lima) tahun mendatang.

3.1 Proses Bisnis

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, menjelaskan bahwa yang dimaksud Proses Bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses Bisnis mencerminkan seberapa efisien dan efektif operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi, Keamanan dan Layanan SPBE. Proses Bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan, Proses Bisnis juga disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Menurut **Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018** Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

3.1.1 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Situbondo

Urusan di Pemerintahan Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 8 Kelompok Urusan. Delapan kelompok urusan tersebut yaitu terdapat **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 5 urusan dan 9 OPD), **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

(terdapat 19 urusan dan 14 OPD), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (terdapat 6 urusan dan 5 OPD), **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** (terdapat 2 urusan dan 10 OPD), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (terdapat 5 urusan dan 4 OPD), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD), **Unsur Kewilayahan** (terdapat 1 urusan dan 2 OPD), **Unsur Pemerintahan Umum** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD). Detail Identifikasi Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub Sub Bab 3..4.1 Tabel 3.2.**

Pada kondisi eksisting, urusan di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 40 urusan dari total 45 urusan Referensi Arsitektur Proses bisnis sesuai Peraturan Presiden, Sehingga terdapat 5 Referensi Arsitektur Proses Bisnis yang terbagi ke dalam urusan yaitu **Hubungan Luar Negeri, Perkebunan, Pertambangan, Energi, dan Kehutanan**. Pada **Tabel 3.2** terdapat kelompok urusan yang memiliki jenis urusan paling banyak di antara kelompok urusan yaitu kelompok **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** dengan jumlah 18 jenis urusan.

3.1.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis

Berdasarkan hasil survei pada kondisi eksisting di Pemerintahan Kabupaten Situbondo hampir seluruh OPD telah memiliki Peta Proses Bisnis. Terdapat 38 Perangkat Daerah (OPD) (95%) di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang **sudah memiliki Peta Proses Bisnis** dari keseluruhan 40 OPD terdapat. Sedangkan 2 OPD (5%) **belum memiliki Peta Proses Bisnis**. Tetapi dari 38 OPD (95%) yang memiliki peta proses bisnis Seluruhnya telah sesuai dengan **Permen PAN-RB No 19 Tahun 2018.** Sedangkan 2 OPD (5%) Tidak memiliki peta proses bisnis. Karena untuk penyusunan peta proses bisnis level OPD di naungi oleh satu OPD yaitu Bagian Organisasi, dan dalam penyusunannya ada kaitannya dengan peta proses bisnis level Kabupaten. Terdapat 2 OPD yang belum memiliki peta proses bisnis karena tergabung dalam OPD lainya. Adapun 2 OPD yang tidak memiliki peta proses bisnis tersebut yaitu **RSUD dr. Abdoer Rahem** dan **Puskemas Bungatan** karena tergabung dengan **Dinas Kesehatan**. Selanjutnya berikut dapat diambil contoh, **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub Sub Bab 3.4.3 Gambar 3.3.** Peta Proses Bisnis yang telah mengacu pada Peraturan MENPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 yaitu milik **Dinas Sosial**.

3.1.3 Ketersediaan SOP

Berdasarkan hasil survei, yang telah dilakukan terdapat **640** total **Ketersediaan SOP** yang dimiliki oleh 40 OPD. Ketersediaan SOP seharusnya **mendukung** setiap layanan yang dimiliki Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Tetapi hanya terdapat 338 **(53%) SOP** yang **telah mendukung** layanan eksisting Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Sementara terdapat **302 (47%) SOP** yang **belum mendukung layanan** dikarenakan terdapat beberapa OPD yang menyatakan bahwa tidak terdapat layanan yang aktif untuk SOP tersebut, dan terdapat ketidaksesuaian Layanan dengan SOP yang mendukung. Tetapi terdapat perbedaan

hasil perhitungan ketersediaan SOP pada kondisi layanan eksisting yaitu terdapat **398 layanan** yang belum **didukung SOP**. Detail persentase ketersediaan SOP dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub Sub Bab 3.4.3 Gambar 3.1.**

Menurut hasil kalkulasi yang dilakukan, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Ketersediaan SOP paling banyak yakni sebanyak **104 SOP**, dan seluruh Ketersediaan SOP tersebut telah mendukung seluruh layanan ekisiting.

3.1.4 Metadata Proses Bisnis SPBE

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili Referensi Arsitektur proses bisnis. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari 9 (Sembilan) atribut yaitu terdiri dari ID proses bisnis, Nama Bisnis/Urusan, Uraian Bisnis/Urusan, Kode Model Referensi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai IKU Target, Nilai IKU Realisasi, dan ID metadata terkait. Referensi Arsitektur di Metadata Proses Bisnis di Identifikasikan dari **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Detail dari metadata Proses(SE). Detail Metadata Proses Bisnis SPBE yang telah dianalisis dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo LAMPIRAN 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE.**

3.1.5 Analisis Gap Proses Bisnis SPBE

Setelah mengetahui kondisi eksisting pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan dilakukan analisis, kondisi tersebut akan dibandingkan dengan kondisi ideal proses bisnis. Hasilnya akan ditemukan GAP antara kondisi eksisting dan kondisi ideal di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan analisis GAP dijabarkan pada tabel 3.2. **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub Bab 3.6 Tabel 3.5.**

3.2 Data dan Informasi

Data dan informasi dijelaskan pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 sebagai semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antara instansi pusat dan/atau Pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Penggunaan data dan informasi di Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Menurut hasil survei, saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo mengelola data dan informasi sejumlah **total 361 data**. Pada bagian ini akan menjelaskan kondisi data dan informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini.

Kondisi data dan informasi akan dibahas dari segi bentuk data, tempat penyimpanan, aplikasi *database*, jenis akses dan integrasi data yang ada.

3.2.1 Bentuk Data yang dimiliki

Bentuk data dibagi menjadi 3 jenis, yaitu *online*, *offline* serta *online* dan *offline*. Data yang berbentuk *online* merupakan data yang disimpan pada *database* suatu aplikasi yang digunakan oleh OPD. Data yang *offline* berarti data tersebut hanya tersimpan di komputer milik OPD terkait. Serta untuk data yang berbentuk *online* dan *offline* berarti OPD mengelola data tersebut pada suatu aplikasi dan pada komputer OPD. Dari **total 360 data** yang ada di pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagian besar data telah berbentuk *online*. Sebanyak **184 data (51%) berbentuk *online*, 163 data (45%) berbentuk *offline*** dan ada **13 data (4%)** yang **berbentuk *online* dan *offline***. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD yang memiliki data *online* paling banyak, yaitu 19 data. Untuk OPD yang memiliki data *offline* paling banyak adalah Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu sebanyak 13 data.

3.2.2 Tempat Penyimpanan Data

Tempat penyimpanan data yang berbentuk *offline* tersimpan pada komputer OPD yang bersangkutan. Sedangkan untuk data *online* dapat tersimpan pada *server* Diskominfo, *server* OPD di Diskominfo, *server* OPD di ruang *server* OPD, *server* pusat, *server* pemprov, jaringan lokal atau pada layanan *cloud*. Penyimpanan data yang dilakukan secara *online* juga tidak menutup kemungkinan untuk disimpan pada beberapa lokasi penyimpanan. Penyimpanan data berbentuk *online* **paling banyak** tersimpan pada ***server* Diskominfo** yaitu sebanyak **56 data (16%),** pada ***server* pusat 48 data (13%) , pada *server* OPD di ruang *server* OPD sebanyak 41 data (11%),** serta terbanyak terakhir yaitu pada ***server* OPD di Diskominfo** sebanyak **24 data (7%).** Untuk data berbentuk *offline* yaitu sebanyak **163 data (45%)** semua tersimpan pada **komputer OPD**. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang paling banyak disimpan pada *server* internal OPD di ruang *server* OPD, yaitu sebanyak 15 data.

3.2.3 Aplikasi *Database* yang Digunakan

Penggunaan aplikasi *database* untuk penyimpanan data *online* terdapat beberapa macam yaitu, MySQL *Server*, Microsoft SQL *Server*, MySQL (untuk data pada jaringan lokal), Google Drive (untuk data pada *cloud*) serta *database* Oracle. Sedangkan untuk data berbentuk *offline* dikelola pada aplikasi Microsoft Office dan aplikasi pengelola Pdf. **Sebagian besar *database*** yang digunakan untuk penyimpanan data *online* adalah **MySQL *Server*** yaitu sebanyak **159 data (44%)** serta **Microsoft SQL *Server*** yang digunakan pada **17 data (5%).** Untuk data ***offline*** mayoritas atau **163 data (45%)** dikelola menggunakan aplikasi **Microsoft Office**.

3.2.4 Jenis Akses Data

Akses data terbagi menjadi tiga jenis yaitu, hanya OPD, bagi pakai OPD dan publik. Untuk akses data hanya OPD berarti hanya OPD pemilik data yang dapat mengakses data tersebut. Akses data bagi pakai OPD berarti data dapat diakses oleh

beberapa OPD yang diberikan akses oleh OPD pemilik data. Sedangkan data berakses publik berarti data dapat diakses oleh masyarakat umum. Sebagian besar data pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **208 data (58%) berakses hanya untuk OPD** pemilik data atau internal OPD. Sisanya sebanyak **81 data (22%) berakses publik** dan **71 data (20%)** berakses **bagi pakai antar OPD** yang bersangkutan. Terkait akses data, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman memiliki data berakses hanya OPD yang paling banyak, yaitu 17 data. Untuk data berakses bagi pakai antar OPD yang paling banyak dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu 9 data. Terakhir, untuk data berakses publik paling banyak dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu sebanyak 15 data.

3.2.5 Integrasi Data dan Informasi Eksisting

Integrasi data dapat terjadi dengan pelaksanaan integrasi aplikasi-aplikasi yang mengelola data yang sama. Saat ini terdapat beberapa aplikasi eksisting Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah terintegrasi. Hal tersebut menjadikan terjadinya integrasi data di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk daftar data yang terintegrasi dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 4.4.5 Tabel 4.2.**

Integrasi data dapat terjadi dengan aplikasi milik OPD yang sama, aplikasi milik OPD lain, aplikasi milik lembaga atau kementerian pusat serta aplikasi milik pemerintah provinsi. Pada tabel 3.3 terdapat total **34 data yang telah terintegrasi**. Data tersebut **diampu oleh 13 OPD pada 23 aplikasi**. Selanjutnya, 23 aplikasi tersebut telah **terintegrasi dengan 34 aplikasi** milik kementerian/pemprov/lembaga pusat/OPD (total 21 instansi).

3.2.6 Metadata Data dan Informasi

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022, atribut metadata data dan informasi terdiri dari ID, nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, sifat data, jenis data, validitas data, penghasil data/produsen data, penanggung jawab data/wali data, informasi yang terkait (*output*), informasi yang terkait (*input*), interoperabilitas, serta id metadata terkait. Rincian mengenai metadata arsitektur data dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. Sedangkan pemetaan metadata arsitektur data dan informasi terhadap data eksisting milik Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Lampiran 4.1**.

3.2.7 Permasalahan Data dan Informasi

Dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh OPD-OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa masalah yang kerap dialami terkait pengelolaan data dan informasi:

1) Data hilang
2) Redudansi data

3) Data tidak *update*
4) Belum ada *server* replikasi *database*
5) Proses *backup* data dari *server database* utama ke *database* cadangan masih manual
6) *Server backup* kurang
7) Peretasan sistem

3.2.8 Analisis Gap

Analisis gap dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini dari data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan kondisi idealnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 4.7 Tabel 4.4.**

3.3 Layanan SPBE

Menurut peraturan pemerintah yang ada, terdapat dua pengertian dari layanan SPBE. Pertama menurut Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengartikan layanan SPBE sebagai luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Selain itu disebutkan pula bahwa layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE dibagi menjadi 2 jenis, yaitu layanan administrasi dan layanan publik.

Pada bagian ini, akan dibahas kondisi dari layanan eksisting di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi yang akan dibahas adalah kepemilikan layanan di seluruh OPD, ketersediaan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, serta ketersediaan layanan yang mendukung program RPJMD Kabupaten Situbondo.

3.3.1 Layanan yang Dimiliki Seluruh OPD

Bagian ini akan menjelaskan rangkuman dari layanan yang dikelola oleh OPD-OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan akan dimulai dari penjabaran singkat ketersediaan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo, lalu persebaran status akses layanan SPBE dan terakhir adalah penjabaran terkait sebaran jenis layanan SPBE yang ada.

Menurut hasil survei, saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo mengelola layanan sebanyak **768 layanan**. Semua layanan tersebut merupakan layanan aktif yang tersebar di **40 OPD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, saat ini **semua OPD** di Pemerintah Kabupaten Situbondo **memiliki layanan yang aktif** dikelola. **Sebagian besar layanan** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo masih **berstatus manual**. Dari **total 768 layanan**, **425 layanan (55%) berakses manual**. Sisanya, sebanyak **284 layanan (37%) berakses *online*** dan **59 layanan (8%) berakses *online* dan manual**. Dari **total 768 layanan** yang ada, **593 layanan (77%)** merupakan **layanan publik**. Sisanya, sebanyak **175 layanan (23%)** merupakan layanan **administrasi pemerintahan**.

3.3.2 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Pemetaan daftar layanan administrasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 5.4.2 Tabel 5.3.**

Semua jenis layanan administrasi berbasis elektronik **telah terpenuhi** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Begitu juga dengan aplikasi pendukung layanan, **semua jenis layanan administrasi telah didukung oleh aplikasi**. Namun, masih **terdapat empat jenis layanan** yang masih **hanya menggunakan aplikasi khusus** atau aplikasi milik daerah. Layanan tersebut merupakan layanan mengenai keuangan, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, serta layanan mengenai kinerja pegawai.

3.3.3 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pemetaan daftar layanan publik SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 5.4.3 Tabel 5.5.**

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki semua jenis layanan publik dan layanan publik sektoral. Namun, **terdapat satu layanan yang belum terpenuhi, yaitu layanan pertanahan pada jenis layanan publik sektor pengelolaan bangunan dan tanah**. Pada layanan publik, semua layanan telah didukung oleh aplikasi. Sedangkan pada layanan publik sektoral **terdapat 11 sektor layanan yang masih bersifat manual** atau belum memiliki aplikasi pendukung.

Terkait penggunaan aplikasi umum, masih **banyak layanan yang belum menggunakan aplikasi umum**. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh belum tersedianya aplikasi umum pada sektor atau jenis layanan tersebut. Untuk layanan publik, yang **telah menggunakan aplikasi umum** adalah layanan mengenai **pengaduan layanan publik**. Pada layanan publik sektoral, telah **terdapat 10 sektor layanan yang telah menggunakan aplikasi umum** atau pusat dalam mendukung layanannya.

3.3.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo 2021-2026,

maka diperlukan adanya layanan yang dapat mendukung program tersebut. Pemetaan layanan eksisting dan program pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 dapat dilihat secara lengkap pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD.** Sebagian besar program pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 telah didukung oleh layanan. Pada RPJMD Kabupaten Situbondo terdapat total 140 program. Dari semua program tersebut, **109 program (78%)** telah **didukung oleh 585 layanan eksisting** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sisanya, sebanyak **31 program (22%)** masih **belum didukung layanan** dan terdapat 183 layanan yang tidak memiliki program terkait di RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026.

3.3.5 Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata layanan SPBE menurut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 terdiri dari ID, nama layanan, tujuan layanan, fungsi layanan, model referensi layanan, unit pelaksana, kementerian / lembaga terkait, urusan pemerintahan terkait, target layanan, metode layanan, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko serta id metadata terkait. Penjabaran metadata layanan dapat menunjukkan bahwa layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE nasional. Detail metadata arsitektur layanan SPBE dapat dilihat pada Tabel 5.6. Sedangkan penjabaran hasil pemetaan metadata arsitektur layanan dengan layanan eksisting milik Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE.**

3.3.6 Permasalahan Layanan SPBE

Dalam penyelenggaraan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh OPD-OPD penyelenggara layanan SPBE. Dari hasil survei, didapatkan beberapa masalah yang kerap dialami oleh OPD-OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Permasalahan tersebut dirangkum sebagai berikut:

1) Gangguan jaringan
2) Data tidak terintegrasi
3) Data tidak *update*
4) Pengumpulan data memakan waktu lama
5) Anggaran terbatas
6) Layanan masih manual
7) Kurangnya koordinasi antar OPD berkaitan
8) Kurangnya sosialisasi layanan terhadap masyarakat
9) Aplikasi *error*
10) *Server down*

3.3.7 Analisis Gap Layanan SPBE

Setelah pembahasan kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo di atas, maka dilakukan analisis kesenjangan atau gap atas kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil analisis gap layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 5.7 Tabel 5.7.**

3.4 Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE merupakan aplikasi yang digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus. **Aplikasi Umum** merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Aplikasi umum ini harus digunakan oleh setiap pemerintah daerah. Sedangkan **aplikasi khusus** merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah atau instansi pusat. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

3.4.1 Ketersediaan Aplikasi SPBE

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei pada **40 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo**, diperoleh **207 (dua ratus tujuh) aplikasi** yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan layanan dan program OPD. Secara keseluruhan ditemukan bahwa **37 OPD (92%)** sudah memiliki aplikasi untuk mendukung layanan yang dimiliki OPD tersebut. Sedangkan, untuk OPD yang belum didukung aplikasi ada sebanyak **3 OPD (8%)**. Adapun OPD yang belum memiliki aplikasi yakni Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3.4.2 Status Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan status pengembangannya aplikasi SPBE terpisah menjadi 2 yakni sedang dikembangkan dan selesai dikembangkan. Status pengembangan aplikasi sedang dikembangkan adalah aplikasi yang sedang dalam tahap pengembangan baik dalam bentuk perbaikan atau peningkatan fitur tertentu dalam aplikasi. Status pengembangan aplikasi selesai dikembangkan merupakan aplikasi yang tidak dalam tahap pengembangan atau perbaikan fitur dan sedang beroperasional mendukung layanan OPD. Adapun persentase status pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebanyak 204 aplikasi (99%) adalah aplikasi yang sudah dikembangkan sementara sisanya yakni 2 aplikasi (1%) adalah aplikasi yang sedang dikembangkan.

3.4.3 Area Referensi Arsitektur

Referensi arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 kode referensi, yaitu **RAA 01.01 Aplikasi Umum layanan publik, RAA 01.02 Aplikasi Umum administrasi**

pemerintahan, RAA 02.01 Aplikasi Khusus Misi dan RAA 02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu. Adapun data pengelompokan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan referensi aplikasi, sebanyak 93 (45%) aplikasi adalah Aplikasi Administrasi Pemerintahan, 88 (43%) aplikasi adalah Aplikasi Layanan Publik, 20 (10%) aplikasi adalah Aplikasi Fungsi tertentu, dan 5 (2%) aplikasi adalah Aplikasi Misi Tertentu.

3.4.4 Status Penggunaan Aplikasi

Berdasarkan status penggunaan, pengelompokan aplikasi terbagi menjadi 3 yaitu tidak digunakan, belum digunakan, dan masih digunakan. Status Penggunaan Aplikasi Tidak digunakan merupakan aplikasi yang sudah tidak lagi digunakan untuk mendukung layanan, Status Penggunaan Aplikasi belum digunakan merupakan aplikasi yang masih proses pengembangan dan belum digunakan untuk mendukung layanan, dan Status Penggunaan Aplikasi masih digunakan merupakan aplikasi yang sampai saat ini masih digunakan untuk mendukung layanan. Adapun persentase status pengembangan aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebanyak 178 aplikasi (86%) adalah aplikasi yang masih digunakan, 26 aplikasi (13%) adalah aplikasi yang sudah tidak digunakan, dan sisanya yakni 2 aplikasi (1%) adalah aplikasi yang belum digunakan.

3.4.5 Unit Pengembangan Aplikasi SPBE

Terdapat 4 jenis unit pengembang aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni aplikasi yang dikembangkan pusat, aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika, aplikasi yang dikembang Mandiri OPD dan aplikasi yang dikembangkan pihak ketiga (pihak swasta). Adapun uraian jumlah dan persentase dari Unit Pengembang Aplikasi dari total **207 (dua ratus tujuh) aplikasi** pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebanyak 81 (39%) aplikasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Mandiri OPD, 59 (29%) aplikasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat, 25 (12%) aplikasi adalah aplikasi dengan unit pengembang tidak diinformasikan, 23 (11%) aplikasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinkominfo, dan sisanya yakni 18 (9%) aplikasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pihak ketiga.

3.4.6 Basis Aplikasi SPBE

Basis Aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 macam yakni aplikasi berbasis *mobile*, aplikasi berbasis *website*, aplikasi *dekstop*, dan aplikasi berbasis *cloud*. Detail pembagian basis aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo, sebanyak 188 (91%) aplikasi adalah aplikasi berbasis *website,* 10 (5%) aplikasi adalah aplikasi berbasis *dekstop,* 6 (3%) aplikasi adalah aplikasi berbasis *mobile,* 1 (0,5%) aplikasi adalah aplikasi berbasis *website* dan *mobile,* serta sisanya yakni 1 (0,5%) aplikasi adalah aplikasi berbasis *desktop* dan *mobile.* Perlu diketahui bahwa Kabupaten Situbondo tidak memiliki aplikasi berbasis *cloud.*

3.4.7 Metadata Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi dianalisis **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** Tentang

Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Pada surat edaran tersebut, termuat metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan untuk Menyusun arsitektur aplikasi SPBE. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali. Secara lebih detail Metadata aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Lampiran 6.1 Daftar Aplikasi SPBE** dan **Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE.**

3.4.8 Permasalahan Aplikasi SPBE

Dalam pelaksanaan layanan yang ada, OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi. Dari hasil survei yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan layanan di Pemerintah Kabupaten Situbondo, di antaranya:

1. Aplikasi berjalan lambat
2. Aplikasi mengalami mal fungsi
3. Data hilang, ganda, atau tidak *update*
4. *Server* aplikasi bermasalah
5. Aplikasi tidak diberikan pembaruan berkala
6. Aplikasi belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat
7. Terjadinya peretasan terhadap aplikasi

3.4.9 Analisis Gap

Setelah analisis kondisi eksisting, dilakukan analisis gap untuk membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Analisa *gap* dilakukan dengan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan bidang pada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu akan dilakukan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Untuk penjabaran lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub Bab 6.6 Tabel 6.2.**

3.5 Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang mana merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (Tiga) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan inter koneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. **Pusat Data nasional** merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya. RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterapaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (tujuh) area ditingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk IPPD.

Kondisi Eksisting Infrastruktur sebagaimana dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 7.** Bahwasanya seluruh data Kondisi Eksisting didapatkan dari Hasil Survei Online, Survei Lapangan dan dokumen bukti pendukung yang diberikan oleh seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi Eksiting yang akan dijelaskan pada sub-sub dibawah ini terkait dengan pembahasan infrastruktur yang terdiri dari jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang *server*, komputasi, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak serta dilengkapi dengan permasalahan dan Analisis Kesenjangan dari kondisi eksisting yang didapatkan. Penjabaran kondisi eksisting Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

3.5.1 Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi **ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan *bandwidth*** yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo . Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo **cukup baik** dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah **terpusat** yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan **Fiber Optik dan Wireless PTP** dalam integrasi Jaringan yang digunakan, **keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** . Keseluruhan data eksisting terkait infrastruktur Jaringan didapatkan dari proses pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh *surveyor* berdasarkan dengan kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjabaran kondisi eksisting jaringan intra pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

3.5.1.1 Ketersediaan Topologi Jaringan

Kondisi eksisting terkait dengan ketersediaan topologi jaringan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah terintegrasi menggunakan Jaringan Intra Pemerintah melalui **Kabel Fiber Optik** dan **Wireless PTP** yang terhubung pada seluruh OPD dan Kecamatan. Saat ini Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat 2 Topologi yaitu Topologi Umum dan Topologi Distribusi. Untuk Topologi Distribusi terdiri dari 4 pendetailan distribusi jaringan yang terdiri dari Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet OPD, Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik Lingkungan Kantor Bupati, Topologi Distribusi *Wireless* Kecamatan dan Topologi Pusat *Server* (*Data Center*). Adapun detail terkait dengan Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.1**.

3.5.1.2 Ketersediaan *Bandwidth*

Kondisi eksisting yang didapatkan dari pengumpulan data survei yang dilakukan sebelumnya, diperoleh data terkait dengan ketersediaan *bandwidth* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penerapan jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan *provider* yang diperuntukkan sebagai kebutuhan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah. Terdapat 2 *Provider* (ISP) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Integrasi Jaringan Intra Pemerintah antara lain yaitu:

1. **Provider (ISP) Biznet dengan kapasitas 610 Mbps** yang mana penggunaan terbagi dari 460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) + 150 untuk WIFI Publik.

2. **Provider (ISP) Megadata dengan kapasitas 250Mbps** yang mana penggunaannya terbagi dari 100 Mbps untuk *server* (*Dedicated*) + 150 Mbps untuk area publik (*Broadband*).

Adapun Kondisi Eksisting terkait dengan ketersediaan *Bandwidth* pada Pemerintah Kabupaten Situbondo antra lain:

1. Alokasi bandwidth yang ada di seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telat terpusat dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
2. Distribusi *Bandwidth* pada masing-masing OPD melalui Jaringan Intra Pemerintah dengan menggunakan media *Fiber Optic* dan *Wireless*.
3. Masih terdapat OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD dikarenakan Alokasi *Bandwidth* yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo melalui Jaringan Intra Pemerintah tidak mencukupi.
4. Tidak adanya pemusataan Anggaran yang dilakukan oleh OPD terkait dengan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* mandiri sehingga terdapat meningkatnya anggaran dan tidak adanya optimalisasi penggunaan *bandwidth* .

Detail terkait dengan Ketersediaan *Bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah pada masing-masing OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.2 Tabel 7.12** dan Daftar OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.2 Tabel 7.13.**

3.5.2 Ketersediaan Pusat Data atau *Server*

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022, Ruang *Server* memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Kondisi Eksisting terkait Ruang *Server* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan *Server* pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang *server* yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa OPD yang telah meletakkan pada Ruang *Server* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat *server* yang dititipkan oleh OPD dan **Belum menerapkan penyimpanan pada Pusat Data Nasional (PDN)**. Penjelasan secara detail terkait dengan Daftar *server* dan Aspek pusat data akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

3.5.2.1 Daftar *Server*

Kondisi eksisting terkait dengan data *server* yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa daftar *server* yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa OPD. Dari hasil pengumpulan data survei yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat **43 *Server*** yang dimiliki oleh **14 OPD.** Detail penjabaran daftar *server* yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.5.1 Tabel 7.14.**

3.5.2.2 Aspek Pusat Data (Ruang *Server*)

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pusat Data atau *Server* memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Tolak ukur kelayakan atau kesiapan sebuah ruang *server* dalam memenuhi fungsinya salah satunya adalah Aspek pusat data. Terutama apabila ruang *server* tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data pemerintah daerah. Aspek ruang *server* perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada **TIA-942 untuk standar yang baik dalam pembuatan serta pemusatan data pada Ruang *Server***. Kondisi Eksisting saat ini terkait penerapan Aspek Ruang *Server* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu terdapat **10 OPD** yang memiliki Ruang *Server* dan menerapkan Aspek pada ruang *server*. Detail terkait Aspek Pusat Data yang diterapkan pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika dan beberapa OPD yang memiliki ruang *server* dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.5.2 Tabel 7.15.**

3.5.3 Komputasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 pada sub domain Infrastruktur disebutkan komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu **komputasi awan dan fasilitas komputasi**. **Komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem *cloud*. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih kompleks seperti halnya *cloud computing* ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem *cloud*.

3.5.3.1 Komputasi Awan

Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS). Salah

satu yang sering ditemukan dan paling populer adalah *Google Drive*, yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya. Kondisi eksisting terdapat data penggunaan Komputasi Awan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain penggunaan Google Drive, NAS, dan One Drive. **Penggunaan Google Drive** sebesar **84%** pada **11 OPD, Penggunaan NAS** sebesar **8%** pada **1 OPD**, dan **Penggunaan Cloud** sebesar **8%** pada **1 OPD.** Detail penerapan penggunaan Komputasi Awan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di masing-masing OPD dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.1 Tabel 7.16 dan** Grafik Persentase Total Penerapan Penggunaan Komputasi Awan dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.1 Gambar 7.5.**

3.5.3.2 Fasilitasi Komputasi(*Server*)

Kondisi eksisting OPD yang terdapat pada Kabupaten Situbondo hingga saat ini terkait penerapan komputasi awan **belum menyeluruh menerapkan dan hanya terdapat beberapa OPD yang telah menggunakan dan menerapkan**. Detail Penerapan Fasilitas Komputasi dapat diihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.2 Tabel 7.17.**

3.5.4 Sistem Penghubung Layanan

Kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Situbondo Belum **menerapka**n Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan Web Service**. Detail sistem penghubung layanan Komputasi dapat diihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.7 Tabel 7.18.**

3.5.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. **Pengklasifikasian infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perangkat keras dan perangkat lunak**. Perangkat Keras terdiri dari perangkat keras utama, perangkat keras periferal, perangkat jaringan dan perangkat media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada masing-masing OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo .

3.5.5.1 Ketersediaan Perangkat Keras

Ketersediaan perangkat keras pada Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan untuk menunjang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketersediaan Perangkat Keras dibedakan menjadi 4 poin pembahasan yaitu Perangkat Periferal Utama, Perangkat Periferal Pendukung, Perangkat Jaringan dan Perangkat Media Penyimpanan. Berikut penjelasan detail terkait macam-macam perangkat keras

a. Perangkat Keras Utama

Kondisi eksisting perangkat ***Personal Computer*** **(PC)** yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **1105 PC** dimana mayoritas PC berusia >5 tahun yaitu sejumlah **727 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat PC terbanyak yaitu **RSUD dr. Abdoer Rahem** dengan total perangkat **173 Unit**. Saat ini **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan PC**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan**. Secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.19.**

Kondisi eksisting perangkat ***Laptop*** yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **953 Unit Laptop** dimana mayoritas Laptop berusia >5 tahun yaitu sejumlah **449 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat Laptop terbanyak yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan total perangkat **116** Unit. Saat ini **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan Laptop**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan**. Secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.20.**

Kondisi eksisting perangkat ***Printer*** yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat Printer sejumlah **1307 Unit Printer** dimana mayoritas Laptop berusia >5 tahun yaitu sejumlah **670 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat PC terbanyak yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan total perangkat **153 Unit**. Saat ini **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan Printer**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan.** Secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.21.** Jumlah total perangkat keras dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.22,** terdapat

perangkat keras dengan usia penggunaan lebih dari 5 tahun. Hal tersebut dapat menjadi dasar usulan untuk pengadaan pembaharuan perangkat, dengan usia penggunaan diatas 5 tahun untuk mendukung kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari. Perangkat dengan usia penggunaan tersebut adalah usia optimal untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru, keadaptifan dalam membuka browser atau melakukan hal berat pada perangkat keras dengan membuka aplikasi baru, serta menurunnya performa perangkat keras.

b. Perangkat Keras Periferal

Perangkat Keras Periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai, mikrofon dan pengeras suara. Detail terkait dengan Perangkat Periferal yang diperoleh dari hasil survei pada 40 OPD disajikan pada keras dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.2 Tabel 7.23**.

c. Perangkat Keras Jaringan

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 pada pasal 27 ayat (1) huruf b** menjelaskan bahwa jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra pusat dan pemerintah daerah. Agar terlaksananya jaringan intra pemerintah harus memenuhi infrastruktur terkait perangkat konektivitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya infrastruktur jaringan intra pemerintah, Adapun perangkat yang digunakan meliputi ***Modem, Hub/Switch, Gateway-Router, Access Point, Repeater Wifi dan Antena Outdoor.*** Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan modem dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 22 (Dua puluh dua) OPD yang menggunakan perangkat jaringan modem**. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Modem Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.24.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan hub/switch dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh lima) OPD, **terdapat 21 (Dua Puluh Satu) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Hub/Switch**. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Hub/Switch Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.25**.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan gateway/router dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh lima) OPD, **terdapat 27 (Dua puluh tujuh) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Gateway/Router**. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Gateway/Router Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.26.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan access point dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 26 (Dua puluh enam) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Access Point**. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Access Point Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3Tabel 7.27.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan repeater wifi dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 6 (Enam) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Repeater Wifi**. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Repeater Wifi Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3Tabel 7.28.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan antena outdoor dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 8 (Delapan) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Antena Outdoor**. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Antena Autdoor Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.29.**

Disimpulkan dari kondisi eksisting perangkat jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo bahwa tidak seluruh perangkat Jaringan terdapat pada masing-masing OPD dan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat pada masing-masing OPD. Detail data keseluruhan perangkat keras Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.28.**

d. Perangkat Keras Media Penyimpanan

Kondisi Eksisting yang didapatkan dari hasil survei, pada beberapa OPD terdapat perangkat media penyimpanan yang digunakan antara lain seperti

Hardisk Eksternal dan Flashdisk yang bertujuan untuk menyimpan backup data perkantoran ataupun data penting. Detail perangkat media penyimpanan yang ada pada OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1 Tabel 7.31.**

3.5.5.2 Ketersediaan Lunak

Dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang infrastruktur SPBE adalah tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo . Pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Nasional** disebutkan bahwa **perangkat lunak platform terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi perkantoran** (pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, *tools programming*, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan *video conference*).

Ketersediaan perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Sistem operasi terdiri dari windows, linux, mac, dual os, dan lainnya. Sedangkan aplikasi perkantoran terdiri dari Ms. Office, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan lainnya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan lebih detail di bawah ini.

a. Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program booting. bahwa mayoritas penggunaan Sistem Operasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu menggunakan **Windows dengan Persentase 72%.** Adapun penggunaan sistem operasi lainnya yang digunakan oleh beberapa OPD yaitu **Linux** dengan **Persentase 21%**, **Mac** dengan **Persentase 5%** dan **Dual OS** dengan **Persentase 2%.** Detail terkait dengan penggunaan Sistem Operasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.2.1 Gambar 7.10.**

b. Aplikasi Perkantoran

Perangkat lunak aplikasi perkantoran digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dari masing-masing OPD. Penggunaan perangkat lunak aplikasi perkantoran dibagi beberapa bagian yaitu Aplikasi perkantoran pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, tools programming, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan video *conference*. Mayoritas penggunaan aplikasi perkantoran yaitu ***Browser*** yang terdiri dari penggunaan (*Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explore* dan beberapa Aplikasi

Browser lainnya) dengan persentase **20%**. Adapun aplikasi perkantoran lainnya yang digunakan yaitu **Editing Foto** dengan **persentase 15%**, **Pemrosesan Kata dan Permrosesan Angka** dengan **persentase 14%**, **Pemrosesan Visual** dengan persentase **11%**, **Video Conference** dengan **Persentase 9%, Tools Programming** dengan **persentase 8%, Tools DBMS** dengan **persentase 6%** dan **Editing Foto** dengan **persentase 3%**. Detail terkait dengan penggunaan Aplikasi Perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.2.2 Gambar 7.11.**

3.5.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kabupaten Situbondo yang didapatkan dari Hasil Pengumpulan Data Survei terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah, Permasalahan Ruang *Server*/*Server*, Permasalahan Sistem Penghubung Layanan, Permasalahan Perangkat Keras dan Lunak (Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran). Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur dibahas pada sub bab berikut.

a. Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Permasalahan Jaringan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Jaringan Intra yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Putus, Jaringan Internet Lambat, dan Kerusakan Perangkat Keras Jaringan. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase terjadinya jaringan internet lambat 44%, Internet Putus sebanyak 36**%**, kerusakan perangkat keras lainnya 11% dan kerusakan Modem 9**%**.Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Jaringan yang mayoritas dihadapi oleh OPD di Kabupaten Situbondo yaitu **Permasalahan terkait jaringan internet lambat** dengan persentase **44%**. Detail terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.1 Gambar 7.12.**

b. Permasalahan Ruang *Server*

Permasalahan Ruang *Server* / *Server* yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Ruang *Server* yang dimiliki saat ini, antara lain seperti *Server Down*, Kelistrikan, Kehilangan data, Perangkat dan Peralatan Rusak, Ruang *Server* tidak memenuhi Aspek dan Permasalahan Jaringan. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Ruang *Server* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase terjadinya **Perangkat dan Peralatan *Server* Rusak** sebanyak **36%**, **Ruang *Server* tidak memenuhi aspek** sebanyak **23%**, **Permasalahan Jaringan**

sebanyak **14%**, ***Server* Down (*Down Time*)** sebanyak **9%**, **Kelistrikan (sering mati)** sebanyak **9%**, dan **Kehilangan Data** sebanyak **9%**. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Ruang *Server* yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Perangkat dan Peralatan *Server* Rusak** dengan Persentase sebanyak **36%** dan **Ruang *Server* Kurang Memenuhi Aspek** dengan Persentase sebanyak **23%**. Detail terkait dengan permasalahan Ruang *Server* di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.2 Gambar 7.13**.

c. Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk saat ini yang dialami cukup signifikan dikarenakan **belum menerapkan** Sistem Penghubung layanan yang melalui Web API secara menyeluruh serta efisien dan **belum menerapkan penggunaan SPLP** yang disediakan oleh pusat (Kemkominfo).

d. Permasalahan Perangkat Keras

Permasalahan Perangkat Keras yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Kerusakan Keyboard/mouse, Kerusakan Komputer, Kerusakan Laptop, Kerusakan Printer. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Keras yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu persentasi **kerusakan printer** sebanyak **27%**, **kerusakan laptop** sebanyak **26%**, **kerusakan komputer** sebanyak **25%** dan **kerusakan keyboard/mouse** sebanyak **22%**, Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Keras yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Kerusakan Printer** dengan persentase sebanyak **27%**. Detail terkait dengan permasalahan Perangkat Keras di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.4 Gambar 7.14.**

e. Permasalahan Perangkat Lunak

Permasalahan Perangkat Lunak yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Aplikasi Perkantoran yang *hang* dan Update OS terlalu sering. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase Update OS terlalu sering sebanyak 53% dan Aplikasi Perkantoran yang *hang* sebanyak 47%. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Lunak yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Update OS terlalu sering** dengan Persentase sebanyak 53%. Detail terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.5 Gambar 7.15.**

3.5.7 Analisis *Gap*

Analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisis kesenjangan diperlukan untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.10 Tabel 7.32.**

3.6 Keamanan SPBE

Keamanan SPBE Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pengendalian keamanan yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan *(nonrepudiation)* sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam penerapan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

3.6.1 Metadata Keamanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur untuk memudahkan mendeskripsikan, menjelaskan, menjadi suatu informasi yang mudah ditemukan kembali. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat keamanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian pada aspek Manajemen Keamanan merupakan penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit keamanan secara keseluruhan. Penjabaran atribut Metadata Keamanan yang dalam penyusunan metadata keamanan SPBE dijabarkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Tabel 1.2 sampai Tabel 1.9**

3.6.2 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018, seluruh instansi pemerintah wajib Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana telah dijelaskan bahwa faktor keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*Nonrepudiation)* terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Secara umum Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **belum menerapkan secara keseluruhan** terkait standar keamanan yang sesuai dengan standar keamanan baik standar nasional maupun internasional. Dari segi **keamanan fisik**, Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah menerapkan** adanya penggunaan ***firewall*** untuk keamanan jaringan dan *Server*, perangkat keamanan pendukung dan Prosedur/SOP keamanan serta dilengkapi dengan implementasi **CCTV** di setiap OPD dan beberapa titik area publik sebagai bentuk sarana pendukung keamanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dari segi Tata Kelola Keamanan, Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan** menggunakan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.** Begitu pun dengan Peraturan Keamanan yang **belum diterapkan** oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **Peraturan Keamanan seperti Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.** Beberapa Peraturan tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan implementasi keamanan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengampu utama terkait dengan Keamanan SPBE.

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **Telah** melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan **Indeks KAMI**. Detail terkait dengan penerapan Indeks KAMI pada pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo**.

3.6.3 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur dan memastikan terselenggaranya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE. Sedangkan Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

3.6.3.1 Standar Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan kondisi eksiting yang didapatkan dari hasil Survei Lapangan dan pengumpulan Bukti Pendukung yang diberikan serta dikonfirmasi

oleh Seluruh OPD terkait penerapan Standar Keamanan Informasi bahwasanya saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum Menerapkan Standar Keamanan.** Sehingga hingga saat ini **terdapat Keluhan yang dialami oleh Seluruh OPD** terkait apa standar yang wajib diterapkan dan bagaimana penerapannya dikarenakan **belum adanya sosialisi pada seluruh OPD** terkait pentingnya Penerapan Standar Keamanan.

3.6.3.2 Prosedur/SOP Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan kondisi eksisting terkait dengan Prosedur/SOP Keamanan Informasi yang didapatkan dari hasil survei Lapangan dan pengumpulan Bukti Pendukung yang diberikan oleh beberapa OPD serta telah dikonfirmasi, bahwasanya saat ini yang **Telah Menerapkan Prosedur / SOP Keamanan Informasi hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika**. Detail terkait Prosedur / SOP Keamanan Informasi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo subbab 8.4.2.**

3.6.4 Keamanan Teknis

Berdasarkan dengan pengumpulan data hasil survei terkait Penerapan Keamanan Teknis yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, saat ini **telah menerapkan Keamanan Teknis** pada beberapa Aspek Keamanan, diantaranya dengan adanya perangkat keamanan pendukung yaitu CCTV, Fingerlock, Firewall, Fingerprint, Sensor Pintu/*Access Kontrol.* Detail penerapan keamanan teknis pada masing-masing OPD yang dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.5 Tabel 8.9.**

3.6.5 Audit Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari hasil survei yang dilakukan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, hingga saat ini masih banyak yang belum melakukan Audit. Kegiatan Penilaian mandiri terkait penerapan Keamanan **Telah diterapkan** menggunakan **Indeks KAMI** pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD. Evaluasi menggunakan Indeks KAMI bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi dan tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail Kegiatan Penerapan Indeks KAMI pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.6 Tabel 8.10.**

3.6.6 Permasalahan Keamanan

Permasalahan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi eksisting keamanan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan keamanan SPBE yang didapatkan. Permasalahan Keamanan SPBE terdapat 7 (Tujuh) Permasalahan Keamanan SPBE yang ada pada OPD di Kabupaten Situbondo antara lain Terkena virus/malware/trojan horse dengan persentase 25 %, Kehilangan Data

dengan persentase 24%, Terkena ransomware dan sejenisnya dengan persentase 15%, Hacker dengan persentase 14%, Ketidaksesuaian Data dengan persentase 13%, Kebocoran Data dengan persentase 5%, dan Penyalahgunaan Data dengan persentase 4%. Detail terkait dengan Permasalah Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.7 Tabel 8.11 dan Gambar 8.3.**

3.6.7 Analisis Gap Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksiting terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur Keamanan SPBE yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas keamanan yang semuanya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan usulan yang dilakukan untuk perbaikan Keamanan yang ada dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.8 Tabel 8.10.**

3.7 Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tujuan pembangunan arsitektur tata kelola SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Fungsi tata kelola SPBE pada pemerintah daerah adalah kepala daerah dan sekretaris daerah. Penyusunan arsitektur tata kelola SPBE selanjutnya harus memenuhi 3 aspek dengan sejumlah indikator pada masing-masing aspek. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan SPBE, OPD Mandiri TIK, Pembagian peran terhadap pengelolaan TIK dan Audit TIK yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.7.1 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menyatakan bahwa Tata Kelola SPBE sendiri merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu**. Secara umum Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah melaksanakan** pengaturan, pengarahan dan pengendalian berkaitan dengan SPBE. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan SPBE. Detail mengenai Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE dapat dilihat **pada**

Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 9.

3.7.1.1 Kebijakan SPBE

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, pada Domain Kebijakan Internal SPBE, terdapat 10 Indikator tentang Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Dari hasil survei di Kabupaten Situbondo, 10 Indikator mengenai Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE di Kabupaten Situbondo saat ini kebijakan internal telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Bupati Situbondo Tahun 49 Tahun 2022 **Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.** Kebijakan lain yang mendukung mengenai Tata Kelola SPBE yaitu Peraturan Bupati dan juga Keputusan Bupati yang mengatur Manajemen Data kebijakan yang mengatur tersebut adalah **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo** dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/179/P/001.3/2022 tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.** Selain itu terdapat kebijakan yang mengatur Manajemen Keamanan Informasi dimana kebijakan tersebut berupa **Keputudan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor 188/75/431.216.1/SK/2021 tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo.** Sedangkan mengenai Penyelenggara SPBE atau Tim Koordinasi Pemerintah Kabupaten Situbondo mengatur kebijakan mengenai Tim Koordinasi dan Tim Evaluator kebijakannya yakni **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022** dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Kebijakan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 Kondisi Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan Analisis GAP sub Bab 9.2.1 Kebijakan SPBE**.

3.7.1.2 Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, **Pemantauan** SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan **Evaluasi** SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian

Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa tujuan Pemantauan Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil survei, saat ini **mayoritas OPD di Kabupaten Situbondo belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE maupun Aplikasi SPBE. OPD yang telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebesar 18% atau sebanyak 7 OPD.** Sedangkan OPD yang belum pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE setidaknya terdapat **sebanyak 5 OPD (13%) menyatakan telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE.** Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Pemantauan dan Evaluasi SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 subBab 9.2.2 Pemantauan dan Evaluasi SPBE.**

3.7.1.3 Audit TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi, informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi, informasi dan komunikasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil survei didapatkan audit aplikasi dilaksanakan oleh 5 OPD, audit infrastruktur dilaksanakan oleh 4 OPD, dan audit keamanan dilaksanakan oleh 4 OPD. Namun berdasarkan hasil wawancara dan diskusi bersama, **Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan menggunakan indeks KAMI**. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan indeks KAMI ini **dilaksanakan mulai dari tahun 2021 dan telah dilakukan pada 30 OPD.** Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Audit TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.2.3 Audit TIK.**

3.7.2 Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi saat ini dari manajemen SPBE pada 40 OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Berdasarkan analisa Laporan Hasil Evaluasi kondisi Manajemen SPBE dari 8 Sub manajemen lain seperti manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen

aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.

Berdasarkan hasil kondisi eksisting manajemen SPBE di Kabupaten Situbondo dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo **belum terdapat OPD yang melaksanakan 8 sub manajemen SPBE**. Hasil eksisting manajemen SPBE dari 40 OPD terdapat **2 OPD yang melaksanakan 6 sub manajemen SPBE** atau dapat dikatakan hampir memenuhi Manajemen SPBE secara sempurna. **2 OPD yakni Puskesmas Bungatan dan Puskesmas Situbondo.** 6 Sub Manajemen yang dilaksanakan oleh Puskesmas Bungatan adalah Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM TIK, dan Manajemen layanan SPBE. Sedangkan 6 Sub manajemen yang dilaksanakan oleh Puskesmas Situbondo adalah Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen ASET TIK, Manajemen SDM TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Layanan SPBE. Sedangkan 38 OPD hanya melaksanakan Manajemen SPBE di bawah 6 sub manajemen SPBE. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Audit TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.1. Manajemen SPBE.**

3.7.2.1 Manajemen Risiko SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen risiko merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini dari 40 OPD terdapat 10 OPD (25%) yang telah melaksanakan manajemen risiko sedangkan 30 OPD (75%) belum melaksanakan manajemen risiko. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen Risiko SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 subBab 9.3.2 Manajemen Risiko SPBE.**

3.7.2.2 Manajemen Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Keamanan Informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan. Tujuan manajemen keamanan informasi yaitu untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi SPBE. Berdasarkan hasil survei saat ini dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat **4 OPD atau 10% yang melaksanakan manajemen Keamanan Informasi SPBE**, sedangkan yang OPD yang belum melaksanakan manajemen keamanan informasi sebanyak 36 OPD atau 90% OPD. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen Keamanan SPBE dapat

dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 subBab 9.3.2 Manajemen Keamanan SPBE.**

3.7.2.3 Manajemen Data SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Tujuan dari Manajemen Data SPBE sendiri adalah terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Berdasarkan hasil survei saat ini dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat **5 OPD yang melaksanakan manajemen data** SPBE diantaranya **Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kecamatan Situbondo dan Puskesmas Bungatan**. Sedangkan terdapat 34 OPD atau 85 % OPD yang belum menerapkan manajemen data. Dari 5 OPD tersebut seluruh OPD belum memiliki standar yang Untuk penerapan manajemen SPBE. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen Data SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.3. Manajemen Data SPBE.**

3.7.2.4 Manajemen Aset TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Aset TIK merupakan serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Tujuan dari Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Berdasarkan hasil survei saat ini, dari 40 OPD Kabupaten Situbondo terdapat 9 OPD atau 22% yang sudah melaksanakan Manajemen Aset TIK yakni **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, Puskesmas Situbondo, Puskesmas Bungatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.** Sedangkan terdapat 31 OPD atau 78% OPD belum menerapkan manajemen ASET TIK. Dari 9 OPD tersebut terdapat 6 OPD yang melaksanakan Manajemen Aset TIK namun belum memiliki standar pelaksanaan manajemen aset TIK. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen Aset TIK SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.4. Manajemen Aset TIK.**

3.7.2.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri adalah untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE. 3 OPD yang telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia antara lain adalah **Dinas Kesehatan, Puskesmas Situbondo, dan Puskesmas Bungatan**. 3 OPD tersebut sudah menjalankan Manajemen Sumber Daya Manusia namun standar yang digunakan acuan belum ditentukan. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.5. Manajemen Sumber Daya Manusia.**

3.7.2.6 Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Pengetahuan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Tujuan dari Manajemen Pengetahuan adalah untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 2 OPD yang melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE. 2 OPD tersebut adalah **Dinas Kesehatan dan Puskesmas Situbondo**. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Situbondo tidak dilaksanakan dengan mengikuti standar yang digunakan untuk manajemen pengetahuan. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen pengetahuan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.6. Manajemen Pengetahuan.**

3.7.2.7 Manajemen Perubahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Perubahan merupakan serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Tujuan dari Manajemen Perubahan sendiri adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 4 OPD yang melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE. OPD yang melaksanakan Manajemen perubahan adalah **Badan**

Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen perubahan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.7. Manajemen Perubahan.**

3.7.2.8 Manajemen Layanan SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Layanan SPBE merupakan serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Tujuan lain dari Manajemen Layanan SPBE adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE serta mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini **terdapat 2 OPD atau 7% yang sudah melaksanakan Manajemen Layanan SPBE**, sedangkan OPD yang belum melaksanakan manajemen layanan sebanyak 38 OPD atau sebanyak 93%. OPD yang menerapkan Manajemen Layanan adalah **Puskesmas Bungatan dan Dinas Ketenagakerjaan**. Detail lebih lengkap mengenai Kondisi eksisting Manajemen Layanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.3.8. Manajemen Layanan SPBE.**

3.7.3 Rencana Anggaran SPBE

Dari total 40 OPD yang telah disurvei, terdapat **6 OPD yang masih belum memiliki anggaran untuk 3 kegiatan pembangunan aplikasi**, pengadaan maupun pemeliharaan perangkat keras. 6 OPD tersebut yakni Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Puskesmas Bungatan, Puskesmas Situbondo. Berdasarkan data, ada 15 OPD yang telah melaksanakan kegiatan dengan penganggaran dana untuk pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan *software* komersial. Penganggaran lain untuk pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi telah dijalankan oleh 31 OPD. Sedangkan sebanyak 31 OPD juga telah memiliki anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan *software* komersial.

Total anggaran pengadaan aplikasi dan perangkat lunak terbesar dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan total anggaran sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta ribu rupiah) anggaran ini digunakan untuk pengembangan atau pembuatan Aplikasi Kepegawaian (SIDAK) dan Aplikasi SIAP. Sedangkan anggaran pengadaan aplikasi dan perangkat lunak terendah dimiliki oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) dimana anggaran ini digunakan untuk pembelian akun zoom 1 tahun sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Anggaran untuk pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan pengeluaran terbesar dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 2.052.175.829 (dua miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh lima delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sedangkan penganggaran terendah untuk anggaran ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ini dilaksanakan untuk pembelian perangkat keras pendukung sarana prasarana SPBE. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam anggaran dilakukan untuk belanja alat tulis dan bahan komputer. Sedangkan anggaran Terakhir untuk anggaran kegiatan pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial penganggaran terbesar dilaksanakan oleh RSUD dr. Abdoer Rahem dengan total anggaran sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana anggaran ini digunakan untuk Pemeliharaan *billing* sistem informasi farmasi dan informasi persediaan. Sedangkan untuk pengadaan anggaran terendah dilaksanakan oleh oleh Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut dilakukan untuk pemeliharaan wifi.

Total Anggaran untuk pembangunan aplikasi pengadaan maupun pemeliharaan perangkat keras, pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, dan pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial paling besar dilaksanakan oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran dana sebesar Rp. 2.616.900.100 (dua miliar enam ratus enam belas ribu sembilan ratus ribu seratus rupiah). Sedangkan total anggaran dana terendah milik OPD Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Detail anggaran dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub Bab 9.4.2. Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE.** serta pada Error! Reference source not found.. **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo**

3.7.4 Analisis Gap Tata Kelola dan Manajemen

Bagian ini menjelaskan tentang analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari komponen tata kelola SPBE. Untuk penjelasan gap tata kelola dari Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.. Analisa lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 9 sub-Bab 9.5.1. tentang Analisa Gap Tata Kelola dan 9.5.2 tentang Analisa Gap Manajemen SPBE Kabupaten Situbondo.**

3.8 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan SPBE dan SDM TIK

Bagian ini akan menjelaskan terkait kondisi eksisting dari penyelenggaraan SPBE di 40 OPD Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

3.8.1 Penyelenggara SPBE

Berdasarkan kondisi eksisting penyelenggaraan SPBE, Kabupaten Situbondo telah memiliki Tim Koordinasi yang tertuang pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo** yang telah didukung oleh **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo,** kemudian ketersediaan Tim Evaluator yang tertuang dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Kemudian, terkait dengan ketersediaan SDM TIK dari **40 OPD** sebanyak **32 OPD (80%) telah memiliki SDM TIK,** sedangkan **8 OPD (20%) belum memiliki SDM TIK.** Dari 32 OPD (80%) jumlah keseluruhan SDM TIK adalah sebanyak **223 SDM TIK** di Kabupaten Situbondo. Penjabaran secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10.**

3.8.2 SDM TIK

Pada bagian ini akan menjelaskan terkait kondisi eksisting dari SDM TIK di 40 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi Eksisting SDM TIK ini mencakup Ketersediaan SDM TIK, Pendidikan Terakhir SDM TIK, Kompetensi SDM TIK yang dimiliki, Status Kepegawaian SDM TIK, Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

3.8.2.1 Ketersediaan SDM TIK

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat survei, dapat diketahui ada atau tidaknya SDM TIK di setiap OPD Kabupaten Situbondo. dapat disimpulkan bahwa dari 40 OPD yang ada di Kabupaten Situbondo **80%** atau sebanyak **32 OPD telah memiliki SDM TIK**. Sedangkan **20%** atau sebanyak **8 OPD belum memiliki SDM TIK** di dalam kepengurusan organisasi. Setidaknya terdapat **223 SDM TIK** di Kabupaten Situbondo dari **32 OPD**. Detail lengkap mengenai ketersediaan SDM TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10 Sub Bab 10.4.1 tentang Ketersediaan SDM TIK.**

3.8.2.2 Kompetensi SDM TIK

Kompetensi SDM TIK yang dimiliki oleh 39 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui Gambar 10.5. Pada beberapa OPD di Kabupaten Situbondo terdapat satu orang yang memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi SDM TIK sendiri dikelompokkan menjadi 9 kelompok yaitu teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan*, service/help desk, programmer, operator/user* sistem, analisis sistem dan desain, admin *website*, admin *database* serta admin keamanan TI. dapat diketahui

bahwa kompetensi yang memiliki SDM TIK terendah adalah **admin keamanan TI dan service/help desk dengan nilai sebesar 5% atau 12 orang SDM TIK**. Sedangkan untuk **admin database dan analisa sistem dan *design* sebesar 7% atau sebanyak 15 orang SDM TIK**. **Teknisi Komputer sebesar 8% atau sebanyak 17 orang**. Kompetensi staff TIK ***programmer* sebanyak 10% atau sebanyak 23 orang. Teknisi dan Admin jaringan** jumlah SDM TIK sebesar **11% atau sebanyak 25 orang**. Kompetensi tertinggi ada pada **admin *website* yaitu sebesar 12% atau sebanyak 26 orang**. Sedangkan kompetensi yang paling banyak dimiliki oleh SDM TIK pada OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah **Operator/User System** yakni sebesar **35%** atau sebanyak **78 SDM.** Detail lengkap mengenai kompetensi SDM TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10 Sub Bab 10.4.3 tentang Kompetensi Staff TI.**

3.8.2.3 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 39 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya adalah tingkat SMA, D1, D2, D3, D4, S1 dan S2. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Terakhir SDM TIK dari 40 OPD terdapat sebanyak 1% pada masing masing pendidikan terakhir yaitu **D1, D2, dan S2 sebanyak masing-masing 1 orang SDM TIK**. **SMA sebesar 9% atau sebanyak 20 orang SDM TIK** kemudian **D4 sebesar 11% atau sebanyak 23 orang SDM TIK**, selanjutnya pendidikan SDM TIK tertinggi kedua adalah **D3 sebesar 26% atau sebanyak 56 orang SDM TIK, pendidikan terakhir SDM TIK terbesar 53% atau sebanyak 117 orang.** Sebanyak **4 SDM TIK tidak menyebutkan pendidikan terakhir** mereka. 4 SDM TIK yang tidak menyebutkan pendidikan terakhir 3 staff dari Badan Pendapatan Daerah dimana 1 staff memiliki lebih dari satu kompetensi pekerjaan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk kompetensi Teknisi Komputer tidak disebutkan lengkap mengenai pendidikan terakhir. Detail lengkap mengenai Pendidikan Terakhir SDM TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitekktur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10 SubBab 10.4.2 tentang Pendidikan Terakhir SDM TIK.**

3.8.2.4 Status Kepegawaian SDM TIK

Setiap pegawai TIK di 39 OPD di Kabupaten Situbondo memiliki status kepegawaian yang dapat dibagi menjadi 2 status, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak **138 (60%)** pegawai SDM TIK di Kabupaten Situbondo merupakan pegawai dengan status **Honorer**. Sedangkan untuk Status **PNS dan CPNS** terdapat sebanyak **84 (36%)** pegawai SDM TIK dan **1 SDM TIK tidak menuliskan status kepegawaian**, Hal ini dikarenakan pada bidang kompetensi teknisi komputer OPD Badan Keuangan Dan Aset Daerah di laksanakan oleh beberapa SDM yang memiliki background TI dan bisa memperbaiki komputer sehingga tidak dituliskan keterangan lebih lanjut mengenai status kepegawaian. Dari

data tersebut dapat Disimpulkan bahwa berdasarkan hasil survei pegawai SDM TIK di Kabupaten Situbondo saat ini didominasi pegawai dengan status **Honorer.** Detail lengkap mengenai Status kepegawaian SDM TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitekktur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10 Sub Bab 10.4.4 tentang Status Kepegawaian SDM TIK.**

3.8.2.5 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Penunjukan SDM TIK dapat dilakukan melalui SK sehingga SDM TIK dapat dikelompokkan berdasarkan ketersediaan tupoksi yaitu SDM yang ditunjuk melalui SK dan SDM yang ditunjuk secara adhoc tanpa adanya SK. Dari jumlah keseluruhan 223 SDM TIK yang ada di Kabupaten Situbondo baik SDM TIK secara struktur dan fungsi, **terdapat 163 (72%) orang yang memiliki tupoksi**. OPD yang memiliki SDM TIK dengan memiliki ketersediaan Tupoksi adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD dr. Abdoer Rahem, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Bungatan, Puskesmas Situbondo, dan Puskesmas Bungatan. Sedangkan SDM TIK yang **tidak memiliki Tupoksi** ada sekitar **54 (28%) orang**. Selain itu terdapat 1 Orang SDM TIK atau staff yang menaungi 3 kompetensi pekerjaan dari OPD Dinas Lingkungan Hidup yang tidak menuliskan kepemilikan tupoksi dan 1 Kompetensi teknisi komputer OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki tupoksi karena staff untuk kompetensi ini dilakukan oleh seluruh pegawai yang memiliki latar belakang TI. Detail lengkap mengenai Ketersediaan Tupoksi SK/SDM TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10 Sub Bab 10.4.5 tentang Ketersediaan Tupoksi SK/SDM TIK**

3.8.2.6 Kompetensi *Training* dan Sertifikasi SDM TIK

Kompetensi SDM TIK pada 39 OPD di Kabupaten Situbondo dapat dilihat juga dari pengalaman keikutsertaan *training* di bidang TIK atau kepemilikan sertifikasi di bidang TIK. Dari hasil survei dari 223 SDM TIK di Kabupaten Situbondo, terdapat **13 (6%) SDM TIK memiliki pengalaman** mengikuti *training* di bidang TIK, sisanya yakni **94%** atau sebesar **210 SDM TIK belum memiliki** pengalaman *training* di bidang TIK. Dari 13 orang *training* yang diikuti antara lain adalah Bimtek dan Diklat Pengelolaan JDIH, *Training Cyber Scurity Esensia*l dari Cisco 2021, *Data Science Fundamental* Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Pelatihan dasar *microtic* manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Situbondo 2020, pelatihan *data*

science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, pelatihan *basic coding* dari UNEJ 2022, dan Pelatihan inixindo *hardware* dan jaringan. Sedangkan untuk sertifikasi SDM TIK. dari 223 SDM TIK di Kabupaten Situbondo terdapat **7 atau sekitar 3% pegawai yang telah bersertifikasi di bidang TIK,** sedangkan sisanya **97% atau sebanyak 216 SDM TIK** menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengalaman sertifikasi berkaitan dengan TIK. Staff yang bersertifikasi diantaranya berkompetensi sebagai Admin *Database*, Admin Website, dan Programmer. Serifikasi yang didapat berupa Sertifikat Peserta Diklat dan Sertifikat untuk *training* Bimtek dan Diklat Programmer dan sertifikat pelatihan inixindo *hardware* dan jaringan. Detail lengkap mengenai Kompetensi *Training* dan Sertifikasi SDM TIK dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitekktur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10 SubBab 10.4.6 tentang Kompetensi *Training* dan Sertifikasi SDM TIK**

3.8.3 Analisis Gap Penyelenggaraan SPBE dan SDM TIK

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari Penyelenggara SPBE dan SDM TIK. Untuk penjelasan gap penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel

BAB 4
ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Pada bab ini membahas terkait proses penyusunan yang dimulai dari referensi arsitektur proses bisnis SPBE, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi metadata proses bisnis PSBE, identifikasi peta proses bisnis tiap perangkat daerah, identifikasi peta relasi, serta identifikasi usulan standar operasional prosedur (SOP).

4.1 Arsitektur Proses Bisnis

Hasil identifikasi Arsitektur Proses Bisnis SPBE di Kabupaten ini telah mengacu pada referensi proses bisnis Arsitektur SPBE Nasional. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Referensi Proses Bisnis (RB), bahwa RB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan.

4.2 Urusan Pemerintah

Menurut **UU Nomor 23 Tahun 2014** Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian Berdasarkan **Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 pasal 25** dalam penyusunan proses bisnis kepala daerah berkoordinasi, sehingga dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah pada bidang aparatur negara dan dalam negeri. Pada Urusan di

Pemerintahan Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 8 Kelompok Urusan. Delapan kelompok urusan tersebut yaitu terdapat **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 5 urusan dan 9 OPD), **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 18 urusan dan 14 OPD), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (terdapat 6 urusan dan 5 OPD), **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** (terdapat 2 urusan dan 10 OPD), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (terdapat 5 urusan dan 4 OPD), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD), **Unsur Kewilayahan** (terdapat 1 urusan dan 2 OPD), **Unsur Pemerintahan Umum** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD). Detail pengelompokan urusan dijabarkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Analisis GAP Sub Sub Bab 3.4.1 Tabel 3.2.**

4.3 Metadata Proses Bisnis

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari 9 (Sembilan) atribut yaitu terdiri dari ID proses bisnis, Nama Bisnis/Urusan, Uraian Bisnis/Urusan, Kode Model Referensi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai IKU Target, Nilai IKU Realisasi, dan ID metadata terkait. Referensi Arsitektur di Metadata Proses Bisnis di Identifikasikan dari **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Detail dari metadata Proses(SE). Lebih detail Metadata Proses Bisnis SPBE yang telah dianalisis dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Analisis GAP LAMPIRAN 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE**

4.3.1 Atribut Metadata Proses Bisnis

Proses identifikasi atribut metadata proses bisnis dianalisis berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional, pada tiap urusan yang ada pada setiap OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo dipetakan ke dalam Referensi Proses Bisnis (RB). Hasil pemetaan metadata Proses Bisnis dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP Sub Bab 3.4 Tabel 3.2.** Pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Arsitektur SPBE Nasional terdapat 9 sektor pemerintahan dengan total 45 urusan. Pada Kondisi Eksisting Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki urusan di 8 sektor pemerintahan dengan total 40 urusan. Berdasarkan hasil analisis, saat ini Terdapat 5 Referensi Arsitektur Proses Bisnis yang terbagi ke dalam urusan yaitu Hubungan Luar Negeri, Perkebunan, Pertambangan, Energi, dan Kehutanan.

4.4 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo

Berdasarkan **Permen-PANRB 19 Tahun 2018**, Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai

tambah bagi pemangku kepentingan. Menurut **peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 19 Tahun 2018**, tentang penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Berdasarkan pada kondisi eksisting Kabupaten Situbondo memiliki Peta proses bisnis menggunakan jenis gambar dan sudah mengacu permen-PANRB 19 Tahun 2018. Proses bisnis milik Kabupaten Situbondo telah mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang terdiri dari proses pendukung atau manajerial, proses inti, dan proses lainya. Detail peta proses bisnis level Kabupaten dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP Sub Bab 3.2 Gambar 6.**

Berdasarkan kondisi eksisting pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah memiliki peta proses bisnis level kabupaten. Namun, pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Situbondo Pada **indikator 14 tingkat kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE** mendapatkan nilai **tingkat kematangan 2**. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu Menyusun Peta Proses bisnis mengacu pada **Peraturan Menteri PANRB no 19 tahun 2018**, Sehingga sebagai bentuk langkah perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Lebih detail bentuk gambar perbaikan peta proses bisnis milik Kabupaten Situbondo, Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo terdiri dari 3 Proses yaitu Proses Utama terdiri dari 11 proses, Proses Manajerial terdiri dari 3 proses, dan Proses Pendukung terdiri dari 2 proses. Dari setiap prosesnya diambil dari elaborasi visi, misi, dan tujuan yang diturunkan ke sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Proses utama diidentifikasikan dari sasaran yang merupakan proses yang menunjukkan aliran utama, Proses manajerial berasal dari sasaran yang dapat memastikan proses utama dapat berjalan dengan baik, dan Proses pendukung berasal dari sasaran yang dapat mendukung proses utama agar berjalan dengan baik dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP Sub Bab 3.2 Gambar 7.**

4.5 Peta Proses Bisnis Level OPD

Tahap pengembangan peta proses bisnis ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan SPBE berdasarkan salah satu domain yakni Proses Bisnis. Proses pengembangan dilakukan dengan cara pengkodean dan identifikasi peta proses bisnis pada setiap OPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan efisiensi dalam visualisasi pada masing-masing proses bisnis.

4.5.1 Pengkodean Proses Bisnis Level OPD

Pengkodean untuk setiap OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo pada masing-masing proses dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP Sub Sub Bab 3.5.1 Tabel 3.4**. Terdapat pula pengkodean Proses Bisnis untuk masing-masing OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. **3** menjelaskan Pengkodean dari setiap OPD yang ada pada Kabupaten Situbondo. Pengkodean untuk

Proses Bisnis tiap OPD diawali dengan STB- diikuti dengan urutan OPD. Terdapat 45 kode proses bisnis dari total 40 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

4.5.2. Hasil Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap OPD

Hasil Identifikasi peta proses bisnis pada tiap OPD berpedoman pada SOTK. Seluruh Identifikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diidentifikasi sesuai bidang dari masing-masing OPD dan disesuaikan dengan urusan. Hasil Identifikasi Peta Proses Bisnsi tiap OPD dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP Sub Sub Bab 3.5.2**.

4.6 Peta Relasi Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang digambarkan pada peta proses bisnis. bertujuan untuk memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai luaran yang ditentukan. Berdasarkan kondisi eksisting, pada penyusunan peta proses bisnis Pemerintahan Situbondo digambarkan atau digunakan menggunakan **jenis level atau tingkatan**, sehingga hanya cukup sampai dengan **pengidentifikasian level n**. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan terkait dengan identifikasi peta relasi pada Kabupaten Situbondo **belum tersedia** karena penyesuaian dengan peraturan yang saat ini berlaku.

4.7 Usulan Standar Operasional Prosedur

Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki 640 layanan yang dimiliki 40 OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun, hanya terdapat 338 (47%) SOP yang **telah mendukung** layanan eksisting. Adanya SOP dapat memberikan panduan bagi Instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah, sehingga dibutuhkan usulkan SOP untuk mendukung layanan tersebut. Usulan SOP dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP Sub Bab 3.7.1 Tabel 3.95.**

BAB 5
ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

Bab 5 akan menjelaskan rangkuman usulan perbaikan dari data dan informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahap awal akan dijelaskan metadata data dan informasi yang akan digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait gap data dan informasi serta identifikasi data dan informasi tipa OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan akan ditutup dengan penjabaran usulan integrasi data dan informasi.

5.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi sebagaimana pada Gambar 5.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data tingkat nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.1**.

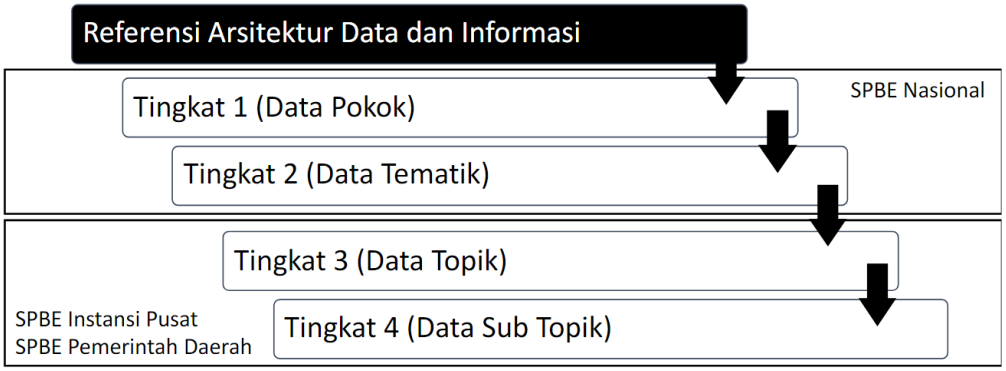

Gambar 5.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

RAD SPBE Nasional di tingkat 1 (satu) terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok yaitu informasi pertahanan dan luar negeri hingga data pendukung umum. Sedangkan untuk data tematik di tingkat 2 (dua) terdiri dari 49(empat puluh sembilan) data. Data tersebut merupakan data yang memiliki kode RAD 01.01 hingga RAD 10.04.

5.2 Identifikasi Gap Data dan Informasi

Analisis gap dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini dari data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan kondisi idealnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 4.7 Tabel 4.4**.

5.3 Identifikasi Data dan Informasi Tiap OPD

Bagian ini akan menjabarkan terkait data-data yang dimiliki tiap OPD. Data akan dijelaskan dari segi uraian data dan referensi arsitektur data. Saat ini

Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki total 361 data yang tersebar pada 40 OPD. Selengkapnya dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.4**.

5.4 Usulan Integrasi Data dan Informasi

Integrasi data adalah proses menghubungkan atau menggabungkan beberapa set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu tempat penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk **mengurangi duplikat atau redudansi** dari data yang ada. Sesuai dengan tujuan dari **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta **mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah**. Pada bagian ini, akan diusulkan integrasi antar data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial. Data yang akan **diusulkan** dilakukan **integrasi** diambil dari **data yang ada pada aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Situbondo.**

5.4.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Integrasi data kependudukan merupakan proses penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan**. Untuk daftar data yang diusulkan untuk diintegrasikan dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.5.1.** Terdapat **14 data** terkait kependudukan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi. Data tersebut diampu oleh **9 OPD** yang memiliki data terkait kependudukan. Usulan ini dapat digunakan dalam pembangunan *dashboard* pemerintahan yang bersangkutan dengan kependudukan.

5.4.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Integrasi data kepegawaian merupakan penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Pegawai**. Untuk detail usulan data-data terkait kepegawaian yang harus diintegrasikan dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.5.2.** Terdapat **14 data** terkait kepegawaian yang diusulkan untuk dilakukan integrasi. Data tersebut diampu oleh **4 OPD** yang memiliki data terkait kepegawaian. Usulan ini dapat digunakan dalam pembangunan *dashboard* pemerintahan yang bersangkutan dengan kepegawaian.

5.4.3 Usulan Integrasi Data Keuangan

Integrasi data keuangan merupakan proses penggabungan atau penghubungan antar **data-data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, pendapatan daerah dan aset atau barang milik daerah**. Untuk data terkait keuangan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.5.3**. Terdapat **16 data** terkait keuangan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi. Data tersebut diampu oleh **4 OPD** yang memiliki data terkait keuangan. Usulan ini dapat digunakan dalam pembangunan *dashboard* pemerintahan yang bersangkutan dengan keuangan daerah.

5.4.4 Usulan Integrasi Data Spasial

Sistem Informasi Geospasial (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasial atau geografi. Salah satu contoh manfaat pemanfaatan SIG adalah visualisasi. Dengan adanya SIG, data yang termuat dalam peta administrasi dapat divisualisasikan lebih jelas seperti batas-batas administrasi tiap dusun, aksesibilitas jalan dan transportasi, dan data-data lainnya. SIG nantinya akan dikelola oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**. Saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo masih belum memiliki SIG sehingga, diperlukan penataan data-data spasial yang ada untuk pembangunan SIG kedepannya.

Pada SIG terdapat dua macam data yang dikelola yaitu data spasial dan data statistik. Data Spasial adalah data yang berupa data keruangan seperti peta yang menampilkan data berupa simbol titik, garis atau poligon. Sedangkan data statistik adalah data yang berupa tabel yang isinya berupa presentasi baik data kuantitatif atau kualitatif. Jika digabungkan antara data spasial dan data statistik maka jadilah basis data yang merupakan sumber atau *input* data dalam organisasi. **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.5.4** merupakan usulan untuk data spasial, dimana terdapat **31 data usulan**. Data tersebut diampu oleh **10 OPD** yang memiliki data yang dapat diubah menjadi data spasial.

5.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengesahkan beberapa peraturan terkait SDI.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengatur SDI Kabupaten Situbondo pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo**. Peraturan tersebut memuat prinsip satu data, penyelenggara satu data, penyelenggaraan hingga ke pendanaan satu data Kabupaten Situbondo. Selain itu terdapat **Surat Keputusan Bupati Situbondo No.179 Tentang Penyelenggaran, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo** yang mengatur terkait Forum Satu Data Kabupaten Situbondo. SK tersebut memuat susunan anggota Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data. Dari kondisi eksisting di atas, maka diusulkan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan SDI. Penyusunan usulan ini diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Detail usulan dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 3.6**.

Terdapat total **5 tahapan** yang diusulkan untuk **penyelenggaraan SDI di Kabupaten Situbondo**. OPD penanggung jawab sebagian besar diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal tersebut dikarenakan pada Forum Satu Data menjabat sebagai ketua walidata dan koordinator. Susunan OPD penanggung jawab pada usulan telah disesuaikan dengan

jabatan pada Surat Keputusan Bupati Situbondo No.179 Tentang Penyelenggaraan, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.

BAB 6
ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Bab 6 akan membahas sekilas mengenai kondisi eksisting layanan SPBE dan rangkuman usulan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan dimulai dengan pendefinisian referensi arsitektur serta metadata layanan SPBE. Kondisi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dibahas singkat pada identifikasi gap layanan SPBE. Pembahasan ditutup dengan penjabaran usulan-usulan untuk layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

6.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan telah ditentukan pada Gambar 6.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat nasional. Selanjutnya, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) tingkat nasional yang terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). Referensi arsitektur layanan SPBE dijelaskan lebih detail pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 4.1**.

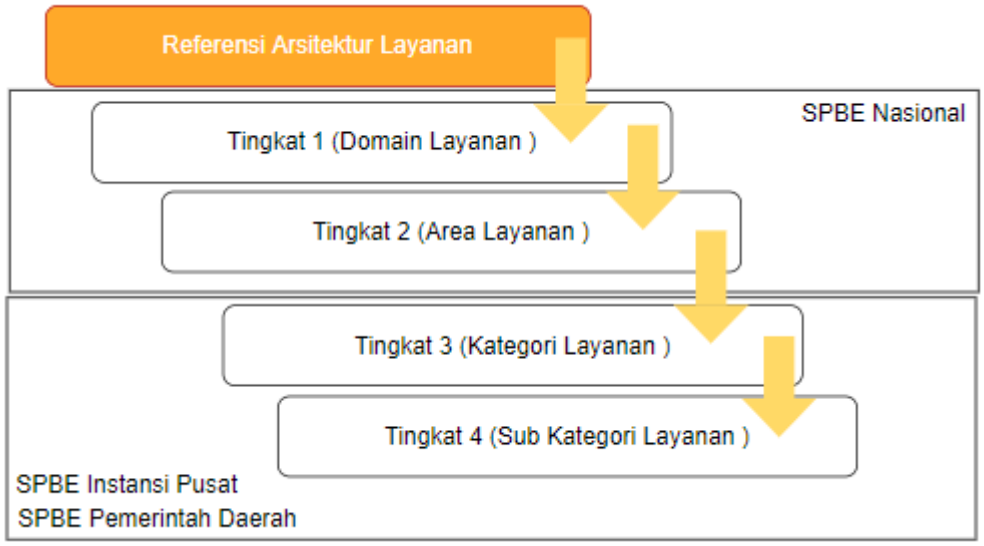

Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

RAL SPBE Nasional di tingkat 1 terdiri dari 2 domain layanan yaitu layanan publik dan layanan administrasi pemerintah. Sedangkan pada tingkat 2, domain layanan publik terdiri atas 44 area layanan dan domain layanan administrasi pemerintah terdiri atas 9 area layanan.

6.2 Identifikasi Gap Layanan SPBE

Setelah pembahasan kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo di atas, maka dilakukan analisis kesenjangan atau gap atas kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil

analisis gap layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 5.7 Tabel 5.7.**

6.3 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Bagian ini akan membahas usulan-usulan layanan yang diambil dari beberapa sumber. Pertama, usulan layanan akan diambil dari layanan administrasi dan publik yang masih belum didukung layanan. Selanjutnya, usulan layanan diambil dari program pada RPJMD yang belum didukung layanan. Terakhir, akan dibahas usulan layanan yang diambil dari usulan aplikasi yang belum didukung layanan.

6.3.1 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE

Pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu **Layanan Administrasi Berbasis Elektronik** dan **Layanan Publik Berbasis Elektronik.** Aspek layanan administrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terdiri dari **10 indikator layanan** di dalamnya, antara lain:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Keuangan;
4. Pengadaan barang dan jasa;
5. Kepegawaian;
6. Kearsipan dinamis;
7. Pengelolaan barang milik Daerah;
8. Pengawasan internal pemerintah;
9. Akuntabilitas kinerja organisasi, dan
10. Kinerja pegawai.

Sedangkan aspek layanan publik berbasis elektronik dari hasil analisis terdiri dari:

1. Layanan pengaduan layanan publik;
2. Layanan data terbuka;
3. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan
4. Layanan publik sektoral (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, kependudukan, pariwisata, perizinan dst.).

Hasil pemetaan ketersediaan layanan terhadap aspek layanan diatas secara lengkap dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Kabupaten Situbondo Sub Bab 4.4**. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah memenuhi semua aspek layanan administrasi** berbasis elektronik. Sehingga **tidak ada usulan untuk layanan administrasi berbasis elektronik**. Untuk **layanan publik berbasis elektronik**, Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah memenuhi semua aspek kecuali layanan terkait pertanahan**. Layanan pertanahan termasuk dalam layanan publik sektoral di sektor pengelolaan bangunan dan tanah. Sehingga **diusulkan** layanan terkait

pertanahan berupa **Layanan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah** yang diampu oleh **Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman**.

6.3.2 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 terdapat program-program yang harus dijalankan oleh OPD. Pelaksanaan program dilakukan dengan penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan program RPJMD. Namun, ada beberapa program yang masih belum didukung oleh layanan eksisting pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, setelah dilakukan pemetaan program terhadap layanan, didapatkan usulan layanan yang dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 4.4.2**.

Pada RPJMD Kabupaten Situbondo terdapat **total 140 program**. Dari semua program tersebut, **109 program** telah **didukung oleh 585 layanan eksisting** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sisanya, sebanyak **31 program** masih **belum didukung layanan**. Sehingga, terdapat total **31 usulan layanan** pada Tabel 4.4. Usulan layanan tersebut ditujukan **untuk 12 OPD** yang memiliki program tanpa layanan pendukung. OPD yang memiliki usulan terbanyak adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yaitu dengan 8 usulan layanan.

6.3.3 Usulan Layanan Terhadap Usulan Aplikasi

Usulan aplikasi diambil dari hasil analisis dan survei terhadap OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa aplikasi usulan yang tidak memiliki layanan pendukung baik secara eksisting maupun usulan layanan yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya. Lebih jelasnya usulan layanan tersebut dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Sub-Bab 4.4.3**.

Terdapat **usulan 14 layanan** terhadap 14 usulan aplikasi. Tabel 4.5 menunjukkan usulan layanan dan aplikasi tersebut ditujukan **untuk 10 OPD**. Usulan layanan di atas akan berjalan bersama dengan implementasi usulan aplikasi terkait.

BAB 7
ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Bab ini membahas tentang usulan aplikasi secara ringkas dan padat, dimulai dari usulan aplikasi berdasarkan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, usulan aplikasi berdasarkan layanan manual, usulan aplikasi berdasarkan survei, usulan aplikasi berdasarkan pengembangan, usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan, dan usulan integrasi aplikasi. Namun sebelum pemaparan usulan tersebut dibahas juga identifikasi terkait referensi aplikasi SPBE, identifikasi metadata aplikasi eksisting SPBE, dan identifikasi *gap* aplikasi SPBE.

7.1 Identifikasi Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) SPBE merupakan proses menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan. Substansi aplikasi SPBE diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkatan ke dalam tingkatan struktur arsitektur aplikasi SPBE. SPBE Nasional mendefinisikan tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua), sementara SPBE Instansi Pusat dan SPBE Pemerintah Daerah mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat). **Gambar 1.1** merupakan ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE. Referensi arsitektur aplikasi SPBE dijelaskan lebih detail pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Sub-Bab 1.2 dan Sub-Bab 1.3**.

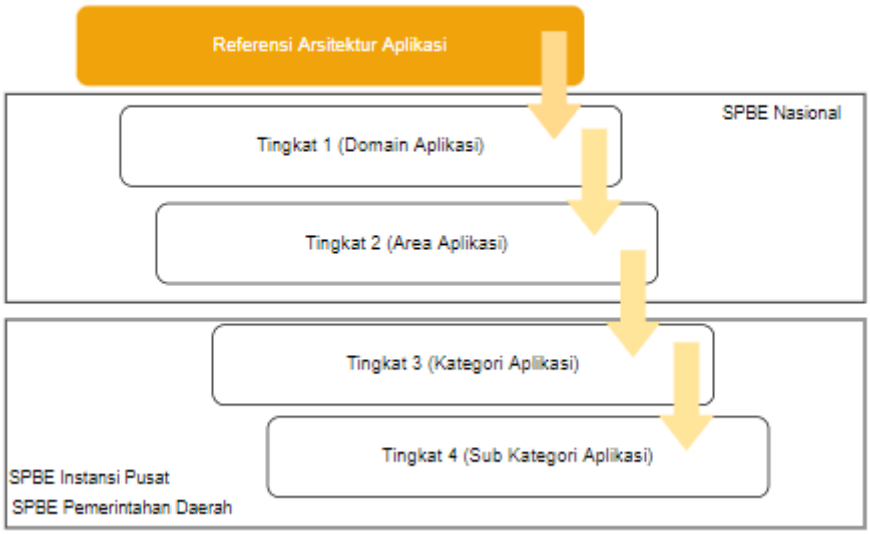

Gambar 7.1 Arsitektur Aplikasi SPBE

7.2 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE

Metadata aplikasi dianalisis berdasarkan Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dokumen ini dijadikan sebagai acuan dalam penerapan SPBE yang berkaitan dengan Aplikasi, maka di dalamnya terdapat metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadi suatu informasi yang mudah untuk dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali. Secara lebih detail metadata aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada **Lampiran 5.2 Metadata Aplikasi SPBE Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo.**

7.3 Identifikasi *Gap* Aplikasi SPBE

Setelah analisis kondisi eksisting, dilakukan analisis gap untuk membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Kondisi ideal dari Arsitektur Aplikasi adalah seluruh Bidang dan Layanan yang ada pada masing-masing OPD didukung oleh aplikasi, sementara analisa gap dilakukan dengan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan bidang pada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil analisis gap aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Gap Sub Bab 6.7 Tabel 6.3.**

7.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik

Berdasarkan hasil *gap* layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa seluruh layanan administrasi dan layanan publik di Kabupaten Situbondo sudah didukung oleh aplikasi, namun terdapat **11 (sebelas) layanan publik sektoral** yang belum didukung oleh aplikasi yakni:

1. Pengajaran;
2. Tempat Tinggal;
3. Energi;
4. Sumber Daya Alam;
5. Sosial;
6. Koperasi;
7. Penanggulangan Bencana dan Linmas;
8. Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
9. Pemuda dan Olahraga;
10. Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
11. Pemadam Kebakaran.

Sehingga pada tahap ini diusulkan aplikasi untuk mendukung layanan publik sektoral, usulan aplikasi berupa pengembangan untuk aplikasi eksisting

sebelumnya dan usulan aplikasi baru yang dapat mendukung layanan publik dan administrasi yang masih manual. Berdasarkan kondisi ini maka diberikan total **14 (empat belas) usulan aplikasi** pada layanan publik sektoral. Dari 14 usulan aplikasi, 10 aplikasi merupakan aplikasi baru, 3 adalah usulan pengembangan ke aplikasi, dan 1 aplikasi adalah usulan penggunaan aplikasi dari OPD lain. Layanan administrasi dan layanan publik pada bagian ini belum diusulkan aplikasi karena berdasarkan kondisi eksisting, seluruh layanan yang bersangkutan sudah memiliki aplikasi pendukung. Detail usulan aplikasi pada layanan administrasi dan layanan publik dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub-Bab 3.3**.

7.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual merupakan proses identifikasi layanan eksisting pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo yang belum didukung oleh aplikasi. Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo terdapat total **425 (empat ratus dua puluh lima) layanan eksisting yang masih manual,** sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan aplikasi untuk mendukung layanan yang masih manual. Usulan aplikasi tidak diberikan kepada seluruh layanan yang masih manual, hal ini menimbang adanya beberapa layanan manual yang operasionalnya tidak membutuhkan aplikasi sama sekali. Berkaitan dengan hal tersebut, sebanyak total 113 layanan manual tidak diberikan usulan aplikasi. Untuk sisanya yakni 312 layanan diberikan usulan aplikasi dengan jumlah **94 (sembilan puluh empat) usulan aplikasi**. Dalam **satu usulan aplikasi dapat memuat beberapa layanan manual**. Dari total 94 usulan aplikasi yang mendukung layanan ini, terdapat **27 (dua puluh tujuh) aplikasi untuk 20 OPD** di Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mendukung layanan yang masih manual. Dari total 27 aplikasi ini, terdapat **22 (dua puluh dua) aplikasi baru** yang diusulkan, **2 (dua) aplikasi yang diaktifkan** dari aplikasi sebelumnya berstatus nonaktif, serta **3 (tiga) aplikasi penggunaan dari aplikasi milik OPD lain**. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub-Bab 3.4**.

7.6 Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Hasil Survei

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei merupakan proses identifikasi usulan aplikasi yang didapatkan dari hasil survei pada masing-masing OPD di Pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk mendukung layanan pada OPD tersebut. Dari data hasil penyebaran survei didapatkan **total 35 (tiga puluh lima) aplikasi baru dan 4 (empat) aplikasi bagi pakai dengan OPD lain dari hasil survei** untuk 22 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub-Bab 3.5**.

7.7 Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Pengembangan

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan pengembangan merupakan usulan pengembangan aplikasi pada aplikasi eksisting di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari pengembangan aplikasi tersebut yaitu agar penggunaan

aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo lebih efisien dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada, dan dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung beberapa layanan yang masih manual. Berdasarkan hasil analisis, terdapat **total 28 (dua puluh delapan) usulan pengembangan aplikasi**. Usulan pengembangan aplikasi tersebut ditujukan untuk total 19 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub-Bab 3.6**.

7.8 Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Hasil Pemetaan Dari Tupoksi Masing-Masing OPD Terhadap Kelompok Urusan

Setelah pelaksanaan identifikasi pada subbab 7.3-7.6 didapatkan **total 95 (sembilan puluh lima) usulan aplikasi.** Usulan aplikasi tersebut terdiri dari **28 (dua puluh delapan) usulan yang berasal dari hasil analisis layanan manual, 39 (tiga puluh sembilan) usulan aplikasi dari hasil survei, dan 28 (dua puluh delapan) usulan pengembangan aplikasi**. Data usulan yang dihasilkan, dipetakan ke dalam identifikasi bidang, program, layanan, dan aplikasi eksisting. Identifikasi dilakukan dengan melakukan pemetaan urusan, serta tupoksi pada masing-masing OPD untuk menghasilkan data dan informasi. Sebelumnya, aplikasi eksisting harus dipetakan terlebih dulu pada pemetaan data dan informasi yang telah di lakukan. Tujuannya agar aplikasi yang di usulkan nantinya tidak tumpang tindih dengan aplikasi eksisting yang dimiliki masing-masing OPD. Selain itu, identifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan hingga bidang dapat didukung oleh aplikasi. Hasilnya dapat melihat bidang mana yang telah didukung aplikasi dan bidang mana yang belum didukung penggunaan aplikasi.

Hasil identifikasinya menghasilkan keseluruhan usulan aplikasi untuk seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan pemetaan usulan aplikasi di setiap OPD dengan **total usulan aplikasi sejumlah 95 (sembilan puluh lima) aplikasi**. Pembahasan usulan aplikasi akan dijelaskan pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Sub Bab 3.7.1 – 3.7.40.**

7.9 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

Setelah dilakukan analisis terhadap SOTK serta uraian serta fungsi masing-masing aplikasi yang dimiliki, diketahui bahwa terdapat beberapa aplikasi yang memiliki fungsi yang sama, mengelola data yang sama, maupun secara fungsi sebaiknya di integrasikan agar meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan layanan. Oleh karena itu, terdapat **63 (enam puluh tiga)** usulan integrasi aplikasi dari 58 aplikasi eksisting dan aplikasi usulan. Berdasarkan 63 integrasi ini, 33 integrasi aplikasi adalah integrasi eksisting, dan sisanya yakni 30 usulan integrasi aplikasi adalah integrasi usulan. Daftar usulan integrasi aplikasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub-Bab 3.8**.

7.10 Pengelompokan Usulan Aplikasi SPBE

Setelah dilakukan penjabaran terkait usulan aplikasi pada pembahasan sebelumnya, pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengelompokan usulan

aplikasi yang ada. Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 4 kelompok usulan aplikasi berdasarkan jenis pengembangan, fungsi aplikasi, basis aplikasi dan pengguna aplikasi. Daftar usulan aplikasi berdasarkan kategori ini lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub-Bab 4.2.**

7.10.1 Jumlah Aplikasi berdasarkan Jenis Pengembangan

Kategori aplikasi berdasarkan jenis usulan dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu aplikasi usulan hasil survei, aplikasi usulan hasil analisis, aplikasi pengembangan, dan usulan penggunaan aplikasi pusat. Dari total usulan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) aplikasi, terdapat usulan aplikasi dari **hasil survei** sebanyak **39 (41%)** usulan aplikasi, usulan aplikasi dari **pengembangan aplikasi eksisting** sebanyak **28 (30%)** usulan aplikasi, dan usulan aplikasi dari **hasil analisis** sebanyak **27 (29%)** usulan aplikasi.

7.10.2 Jumlah Aplikasi berdasarkan Fungsi Aplikasi SPBE

Kategori aplikasi berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu aplikasi layanan administrasi pemerintahan, aplikasi layanan publik, Aplikasi Misi Tertentu, dan Aplikasi Fungsi Tertentu. Dari total 94 (sembilan puluh empat) aplikasi, fungsi aplikasi yang paling banyak diusulkan adalah **Aplikasi Administrasi Pemerintahan (RAA 01.02) dengan 46 (49%)** usulan aplikasi. Untuk fungsi aplikasi usulan lainnya yaitu fungsi **Aplikasi Layanan Publik (RAA 01.01)** terdapat **40 (43%)** usulan aplikasi, **dan Aplikasi Fungsi Tertentu (RAA 02.02)** terdapat sebanyak **8 (8%)** usulan aplikasi. Pada usulan aplikasi ini belum terdapat usulan aplikasi yang memiliki fungsi sebagai Aplikasi Misi Tertentu (RAA 02.01).

7.10.3 Jumlah Usulan Aplikasi berdasarkan Basis Aplikasi

Basis aplikasi terbagi menjadi 3 basis, yaitu ***Mobile, Dekstop,*** dan ***Website***. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi usulan memiliki lebih dari 1 basis. Berdasarkan kategori ini, mayoritas basis aplikasi pada usulan aplikasi di Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah usulan aplikasi berbasis *website* dengan jumlah **83 (88%)** usulan aplikasi, sedangkan untuk usulan aplikasi berbasis *website* dan *mobile* yakni **8 (9%)** usulan aplikasi, usulan aplikasi berbasis *mobile* dengan jumlah **2 (2%)** usulan aplikasi, dan usulan aplikasi berbasis dekstop yakni **1 (1%)** usulan aplikasi.

7.10.4 Jumlah Aplikasi berdasarkan Pengguna Aplikasi

Pengguna aplikasi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu **Publik, Internal OPD, dan Seluruh OPD**. Berdasarkan kategori ini, usulan aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo paling banyak merupakan **aplikasi yang dapat diakses oleh publik**, yaitu sebanyak **47 (49%) usulan aplikasi.** Selanjutnya sebanyak **38 (40%)** usulan aplikasi merupakan aplikasi yang hanya dapat diakses oleh internal OPD yang bersangkutan. Sisanya sebanyak **10 (11%)** usulan aplikasi merupakan aplikasi yang dapat diakses seluruh OPD.

BAB 8
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Bab ini menjelaskan terkait dengan Usulan Arsitektur Infrastruktur SPBE yaitu jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang *server* (*data center)*, sistem penghubung layanan, komputasi, perangkat keras dan perangkat lunak. Detail Usulan Arsitektur Infrastruktur SPBE akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

8.1 Usulan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan hasil analisis yang didapatkan dari pengumpulan data kondisi eksisiting Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka terdapat usulan terkait dengan Infrastruktur SPBE yang terdiri dari **jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang *server*, komputasi awan, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak.** Rekomendasi Usulan terkait dengan Infrastruktur SPBE yang berkaitan dengan Ruang *Server* yaitu berdasarkan dengan standar **TIA-942 dan SNI Pusat Data terkait Standar Pusat Data**. Dalam usulan infrastruktur didasari dengan kondisi infrastruktur yang digunakan saat ini dengan mempertimbangkan usia perangkat dan efisiensi penggunaannya, maka dari itu diperlukan peremajaan infrastruktur. Terdapat prioritas usulan infrastruktur SPBE yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam membangun Infrastruktur SPBE yang lebih baik, efisien, dan berintegrasi sesuai dengan tujuan selama 5 tahun kedepan.

8.1.1 Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapatkan dari data survei dan analisis terkait Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah menerapkan jaringan intra pemerintah yang telah terintegrasi dan didistribusikan pada seluruh OPD yang ditunjukkan dengan adanya Topologi Jaringan dalam bentuk Fisik ataupun *Logic*, kepemilikan perangkat Jaringan yang dimiliki, penggunaan *fiber optic* dan *Wireless* dalam integrasi Jaringan, dan pemusatan jaringan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Detail usulan jaringan intra yang ditampilkan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1 Jaringan Intra Pemerintah Tabel 3.1** dan Penjelasan lebih detail setip usulan akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

8.1.1.1 Usulan DED Jaringan Intra Pemerintah

Detail Engineering Design (DED) adalah perencanaan yang lebih rinci dan lengkap dalam bentuk gambar-gambar desain beserta spesifikasinya yang siap dilaksanakan di lapangan yang hasilnya berupa produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED Jaringan Intra juga digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan infrastruktur jaringan yang akan terbangun. Perancangan DED Jaringan Inta Pemerintah harus sesuai dengan kondisi riil yang ada pada lapangan. Detail

terkait dengan usulan DED Jaringan Intra dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.1.1.**

8.1.1.2 Usulan Pengelompokan Area Demilitarized Zone (DMZ)

Penerapan DMZ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu sebagai sebagai penyaring bagi jaringan internal karena peretas hanya memiliki akses host di DMZ saja dan untuk mencegah serta melindungi sistem internal dari hacker yang menyerang *server* yang disimpan di dalam DMZ, hanya dapat mendapatkan akses host yang berada di DMZ, bukan pada jaringan internal. Rekomendasi terkait dengan **Penerapan Demilitarized Zone (DMZ) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat diterapkan pada rentan Tahun 2023 hingga 2024.** Detail penggunaan DMZ yang dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.1.2 Gambar 3.1.**

8.1.1.3 Usulan Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan kondisi eksiting diperlukan kegiatan **Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah** yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana kesesuaian dan tingkat optimal dari penerapan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa dokumen perencanaan jaringan intra pemerintah. Dengan adanya Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo maka dapat mengetahui kebutuhan yang akan mendatang terkait ketidaksesuaian Jaringan Intra Pemerintah yang telah diterapkan dan permasalahan yang terjadi selama ini. Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah di dalamnya membahas beberapa **pembahasan teknis yang meliputi Analisis topologi jaringan intra yang dimiliki saat ini, Optimalisasi penggunaan perangkat jaringan, penerapan DMZ, optimalisasi penerapan jaringan pada seluruh OPD, integrasi koneksi jaringan pada OPD yang belum terkoneksi dan menentukan kebutuhan *bandwidth* masing-masing OPD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. **Kajian penerapan Jaringan Intra Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo diusulkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023** oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo selaku penanggungjawab penerapan Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Situbondo.

8.1.1.4 Usulan Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan Topologi Jaringan Eksisting yang dimiliki saat ini terdapat beberapa Rekomendasi Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang didapatkan dari hasil analisis untuk lebih efisien terkait penerapan Topologi Jaringan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau penerapan dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan beberapa usulan yang diberikan. Detail terkait dengan usulan optimalisasi topologi jaringan intra pemerintah dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.1.4 Gambar 3.2.**

8.1.1.5 Usulan Belanja Internet Terpusat dan Optimalisasi *Bandwidth*

Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Terkait *bandwidth* internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Kebutuhan *bandwidth* berbeda-beda untuk jaringan komputer yang berbeda. Dalam konteks koneksi Internet, makin banyak Pengguna yang membutuhkan Kecepatan Koneksi Internet yang sama, makin Besar *Bandwidth* yang dibutuhkan kantor tersebut.

Berdasarkan Kondisi Eksisting terkait *bandwidth* yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini dapat dikatakan masih kurang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pada masing-masing OPD, maka dari itu diperlukan usulan penambahan *bandwidth* pada masing-masing OPD secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing OPD yang sangat banyak dan melihat jumlah SDM pada OPD tersebut. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pembagian di seluruh OPD antara lain yaitu banyak yang mengeluhkan untuk akses internet (*banwidth*) yang lambat, kondisi OPD yang jauh (terhubung *wireless*) dan beberapa keluhan tersebut dikarenakan kurang adanya Tim IT pada OPD.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan pengusulan **penambahan jumlah *bandwidth* idealnya** sebesar **10%** berdasarkan *best practice* untuk setiap tahunnya guna mengetahui apakah penambahan *bandwidth* sudah ideal atau belum. Detail terkait dengan usulan pemetaan pembagian *bandwidth* dimasing-masing OPD dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.1.5 Tabel 3.2.**

8.1.1.6 Usulan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,** setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah.

Dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, penilaian terkait kebijakan dan tata kelola jaringan intra pemerintah diatur pada **Indikator 6** terkait "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah". Mengacu pada peraturan tersebut, kebijakan internal jaringan intra pemerintah harusnya mengatur terkait

pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penilaian terkait kebijakan dan tata kelola jaringan intra pemerintahan dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal. Detail terkait dengan Usulan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.1.6.**

8.1.2 Ruang *Server* (Data Center)

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait Ruang *Server* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan Data Center** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, kondisi ruang *server* yang belum memenuhi aspek secara menyeluruh dan belum dilengkapi dengan adanya standar keamanan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang diterapkan pada ruang *server*.** Pedoman untuk penggunaan dan penerapan pusat data secara umum adalah TIA 942 dan SNI Pusat data. Kedua standar tersebut dapat menjadi acuan dalam standarisasi Gedung pusat data dan penerapan aspek-aspek pusat data. Usulan terkait dengan Ruang *server* terdiri dari usulan DED Ruang *Server*, Pemenuhan Aspek Ruang *Server*, Manajemen dan Tata Kelola Ruang *Server*, Pengadaan Perangkat Penyimpanan/Storage, Pemusatan *Server* pada Data Center, Pengadaan Perangkat Keamanan dan Penerapan standar Keamanan. Seluruh Usulan Ruang *Server* (*Data Center*) akan dijelaskan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subbab 3.3.2 Tabel 3.3** dan penjelasan sub sub bab di bawah ini.

8.1.2.1 Usulan DED Ruang *Server*

Pembangunan/Pemenuhan aspek pada Ruang *Server* sebagai pusat data yang ada di Pemerintahan Kabupaten Situbondo harus memenuhi beberapa aspek terkait dengan ruang *server*. Maka dari itu diperlukan peningkatan yang dapat dilakukan pada ruang *server* yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Situbondo diantaranya dengan Melakukan Pemenuhan Aspek Standar Ruang *Server* sesuai dengan standar TIA 942 untuk pengamanan Ruang *Server*.

Adapun beberapa usulan pemenuhan aspek pada Ruang *Server* / Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo diperlukan usulan terkait dengan perangkat pendukung yang dibutuhkan untuk pemenuhan aspek penggunaan data center dan sebagai perangkat pendukung untuk melakukan monitoring *Server*. Berikut merupakan usulan terkait perangkat pendukung Ruang *Server*/ Data Center yang ditampilkan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.2.1 Tabel 3.4.**

8.1.2.2 Usulan Pemusatan *Server* OPD pada Data Center

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 menjelaskan bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib melakukan pemusatan *server* pada Ruang *Server* Dinas Komunikasi dan Informatika (Data Center). Tujuan dari pemusatan Data Center sebagai bentuk upaya penerapan Pusat Data (Data Center) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dan sesuai dengan arahan Pusat Data Nasional bahwasanya Wajib bagi seluruh OPD pada masing-masing pemerintahan daerah/kota yang memiliki *server* untuk memusatkan *server*nya pada Ruang *Server* Dinas Komunikasi dan Informatika atau Data Center Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail Usulan Pemusatan *Server* OPD pada Data Center dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.2.2**

8.1.2.3 Usulan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Ruang *Server* (Data Center)

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. dengan menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data.

Dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan terkait Kebijakan Layanan Pusat Data yang merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. Penilaian terkait kebijakan dan tata kelola pusat data atau ruang *server* dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal. Penilaian terkait kebijakan dan tata kelola pusat data diatur pada **Indikator 5** terkait "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data". Detail terkait usulan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Ruang *Server* (Data Center) dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.2.3.**

8.1.2.4 Usulan Penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*)

DRC (*Disaster Recovery Center*) dapat diartikan sebagai salah satu perencanaan kontingensi dalam menghadapi situasi bencana dan kejadian luar

biasa lainnya, dengan penempatan perangkat TI, sistem, aplikasi dan data – data cadangan Instansi Pemerintah pada suatu tempat atau lokasi yang terpisah untuk mengantisipasi kerusakan atau kehilangan data. DRC (*Disaster Recovery Center*) harus berada di lokasi yang cukup berjarak dari Data Center utama, namun tidak terlalu jauh. Pemilihan lokasi yang tidak terlalu jauh ini berguna untuk memastikan agar latensi jaringan tidak terlalu tinggi sehingga proses backup dan restore data dapat berlangsung tanpa halangan. Detail terkait dengan usulan penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*) dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.2.4 Gambar 3.7 dan Tabel 3.6.**

8.1.2.5 Usulan Penerapan Pusat Data Nasional

Berdasarkan dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwasanya penggunaan menjelaskan bahwa Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** dan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022,** Pusat Data nasional atau PDN merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung dimana akan diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun Rekomendasi Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional (PDN) yang dapat dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.2.5 Tabel 3.7.**

8.1.3 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan kondisi eksisting terkait dengan penggunaan Sistem Penghubung Layanan saat ini **Telah Menerapkan** Sistem Penghubung Layanan dengan menggunakan teknologi Layanan Berbasis Web (*Web services*) dan Web API pada beberapa aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun penggunaan dan penerapan Sistem Penghubung Layanan dari Pusat atau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) masih **Belum Diterapkan** oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Usulan terkait Sistem Penghubung Layanan ditujukan untuk dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan penerapan Sistem Penghubung Layanan guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal.

Detail terkait rekomendasi sistem penghubung layanan dapat dilihat **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subbab 3.3.3 Tabel 3.8** dan penjelasan sub sub bab di bawah ini.

8.1.3.1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE dimana setiap instansi pusat dan daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah. Salah satu tujuan utama penerapan sistem penghubung layanan adalah adanya keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah. Dalam konteks ini, sistem penghubung layanan akan difokuskan pada **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan yang telah dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo** bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo **belum menerapkan Sistem Penghubung Layanan**. Detail rekomendasi terkait dengan penerapan SPLP pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.3.1 Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.**

8.1.3.2 Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Dimana penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Untuk dapat menerapkan Sistem Penghubung Layanan pemerintah, harus memenuhi syarat dimana adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

Dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan yaitu tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point), tersedia metadata *repository*, dan tersedia *service directory*. Kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan yang mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tercantum pada **Indikator 7** terkait "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah". Penilaian kebijakan dan tata kelola Sistem Penghubung Layanan dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung

Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal. Detail terkait dengan usulan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Pnghubung Layanan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.3.2.**

8.1.4 Komputasi Awan

Komputasi Awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet. Pemanfaatan komputasi awan dapat mendukung kebutuhan operasional organisasi baik dari sisi teknis maupun non teknis. Salah satu contoh komputasi awan yang cukup familiar dengan masyarakat diantaranya adalah Google Drive ataupun One Drive. Dimana kedua perangkat komputasi tersebut selain dapat digunakan sebagai media penyimpanan, dapat juga digunakan sebagai media pemrosesan angka, kata dan visual.

Rekomendasi usulan Komputasi dapat menggunakan *Cloud Computing* dimana digunakan sebagai sistem komputerisasi yang dapat mencakup semua peralatan *(gadget)*, dan dapat digunakan dimana saja yang nantinya akan disimpan dalam sebuah *Storage (data center).* Komputasi awan dapat digunakan untuk mempermudah dalam membuka sebuah file dimana saja dan kapan saja dan semuanya disimpan dalam sebuah *storage (data center).* Pertimbangan usulan tambahan terhadap penggunaan komputasi dapat menggunakan **Google Drive, One Drive, dan OwnCloud** dimana ketiga platform tersebut merupakan fasilitas komputasi yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan data dan pelayanan sinkronisasi, yang dimana setiap pengguna dapat menggunakan *cloud computing* berbentuk file sharing dan Kolaborasi edit untuk *file sharing*, penyimpanan data, dan sistem peng-edit-an sebuah file dengan cara berkolaborasi, serta dapat memanfaatkan penggunaan dari **Media Penyimpanan NAS/SAN yang dimiliki saat ini**. Detail terkait usulan kegiatan penerapan Komputasi Awan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subbab 3.3.4 Tabel 3.14**.

8.1.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Usulan terkait perangkat keras mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah dari SDM yang ada dan usulan SDM yang baru, selain itu untuk mengusulkan perangkat baru ini dikategorikan berdasarkan usia dari perangkat yang lebih dari 5 tahun akan tetapi perlu dicek kembali ke masing-masing OPD tentang kondisi pada perangkat keras yang dimiliki. Apabila terdapat kerusakan, dapat untuk dilakukan pengusulan pergantian perangkat yang baru. Sedangkan untuk Perangkat Lunak diusulkan sebagai acuan dalam penggunaan perangkat lunak yang dapat mendukung pengoperasian layanan yang terpasang pada perangkat keras.

Usulan terkait dengan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak terbagi menjadi 5 usulan perangkat yaitu Perangkat Keras Periferal Utama, Perangkat

Keras Periferal Lainnya, Perangkat Keras Jaringan, Perangkat Keras Media Penyimpanan dan Perangkat Lunak Platform. Berikut merupakan penjabaran secara detail terkait Usulan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak akan dijelaskan pada Sub subbab di bawah ini.

8.1.5.1 Perangkat Keras Periferal Utama

Usulan Perangkat Keras Utama bertujuan untuk menunjang pelaksanaan layanan yang ada di masing-masing OPD, dan usulan terkait perangkat keras utama terdiri dari 3 perangkat yaitu Perangkat Komputer (PC), Perangkat Laptop, dan Perangkat Printer.

Berdasarkan data keseluruhan pengusulan Komputer (PC) di atas, dapat didapatkan bahwa dari 40 OPD membutuhkan penganggaran untuk peremajaan perangkat Komputer (PC) dikarenakan banyak terdapat perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak. Beberapa OPD lain memiliki kebutuhan perangkat Komputer (PC) yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 40 OPD yaitu **sebesar 1316 Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur perangkat yang lebih dari 5 tahun. Usulan terbanyak pada **tahun 2023 dan 2026**, OPD terbanyak **yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem.** Detail usulan perangkat keras komputer (pc) dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.1 Tabel 3.13.**

Berdasarkan data keseluruhan **pengusulan Laptop**, dapat didapatkan bahwa dari 40 OPD membutuhkan penganggaran untuk peremajaan perangkat Laptop dikarenakan banyak terdapat perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak. Beberapa OPD lain memiliki kebutuhan perangkat Laptop yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 40 OPD yaitu **sebesar 1291 Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur perangkat yang lebih dari 5 tahun. Usulan terbanyak pada **tahun 2026**, OPD terbanyak **yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem.** Detail usulan perangkat keras Laptop dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.1 Tabel 3.14.**

Berdasarkan data keseluruhan **pengusulan printer**, dapat didapatkan bahwa dari 40 OPD membutuhkan penganggaran untuk peremajaan perangkat Printer dikarenakan banyak terdapat perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak. Beberapa OPD lain memiliki kebutuhan perangkat Printer yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 40 OPD yaitu **sebesar 1250Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur perangkat yang lebih dari 5 tahun. Usulan terbanyak pada **tahun 2023.**, OPD terbanyak **yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem.**. Detail usulan perangkat keras Laptop dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.1 Tabel 3.15.**

Total Keseluruhan dari usulan pengadaan Perangkat Keras Utama yang terdiri dari Perangkat Keras Komputer, Laptop dan Printer pada seluruh OPD Kabupaten Situbondo dijelaskan pada **Tabel 8.1.**

Tabel 8.1 Total Keseluruhan Usulan Perangkat Keras Utama

No	Perangkat Keras Utama	Total
1	Komputer (PC)	1316 Unit
2	Laptop	1291 Unit
3	Printer	1250 Unit
Total		**2262 Unit**

8.1.5.2 Perangkat Keras Periferal Pendukung

Usulan perangkat keras periferal yang akan diusulkan berdasarkan dengan hasil analisis terhadap pemenuhan kebutuhan yang berguna sebagai penunjang penyediaan operasional pada masing-masing OPD. Perangkat pendukung yang diusulkan terkait tambahan perangkat periferal yang terdiri dari LED TV, Proyektor, Scanner, Kamera, Monitor, HT. Berikut merupakan usulan mengenai perangkat keras periferal yang ditampilkan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.5.2 Tabel 3.17.**

8.1.5.3 Perangkat Keras Jaringan

Usulan perangkat keras jaringan yang akan diusulkan berdasarkan dengan hasil analisis terhadap usia pakai perangkat tersebut dan kebutuhan perangkat yang digunakan, terdapat kategori yang bisa di lakukan pembaruan perangkat keras jaringan seperti umur sudah lebih dari 5 tahun. Perangkat Jaringan Intra yang digunakan di seluruh OPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dikarenakan pengadaan Internet telah terpusat maka dari itu diperlukan usulan terkait tambahan perangkat Jaringan untuk mendukung distribusi Jaringan. **Perangkat Jaringan yang dimaksud yaitu terdiri dari Perangkat Jaringan Modem, Gateway-Router, Hub Switch, Access Point, Repeater Wifi, dan Antena Outdoor**. Detail usulan mengenai perangkat keras jaringan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.3 Tabel 3.18 hingga Tabel 3.23.**

8.1.5.4 Perangkat Keras Media Penyimpanan

Rekomendasi penggunaan *Storage Area Network* (SAN) sebagai solusi konfigurasi masa depan dalam media penyimpanan data dalam jumlah besar (Tera Byte) dalam berbagai servis yang berbasis *online* di Internet maupun Intranet yang dapat di terapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai bentuk implementasi Komputasi awan secara terpusat yang nantinya disediakan oleh Diskominfo terkait optimalisasi penggunaan Cloud melalui NAS. *Storage Area Network* (SAN) adalah sebuah jaringan berkecepatan sangat tinggi yang khusus, terdiri dari *server* dan penyimpan (*storage*). Tujuan utama SAN adalah untuk

menangani trafik data dalam jumlah besar antara *server* dan peralatan penyimpan, tanpa mengurangi *bandwidth* yang ada di LAN/WAN. Media penyimpanan SAN tersambung melalui Fiber Channel, sebuah teknologi komunikasi data berkecepatan sangat tinggi yang nantinya menjadikan SAN sebuah jaringan dedicated yang platform-independent yang beroperasi di belakang *server*. Detail Rekomendasi Penggunaan SAN yaitu dengan tipe **IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)** yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penggunaan SAN pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, detail gambar perangkat SAN dengan tipe **IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)** dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.4 Gambar 3.8 Tabel 3.25**.

8.1.5.5 Perangkat Lunak Platform

Berdasarkan dengan hasil Analisa dari data eksisting yang didapatkan melalui proses survei pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam bentuk *free Trial* dan masih belum berlisensi pada perangkat yang ada di setiap OPD dan terdapat beberapa perangkat lunak yang terpasang serta digunakan bersifat *crack*. Penggunaan perangkat trial juga tidak boleh dilakukan proses *crack* yang merupakan bentuk kegiatan ilegal dan perangkat lunak dengan lisensi trial akan bergantung pada masa trial yang normalnya relatif pendek. Jika sudah berakhir masa trial maka perangkat tersebut tidak dapat digunakan atau fitur yang tersedia akan dibatasi penggunaannya. Berikut merupakan usulan terkait dengan Perangkat Lunak Platform berdasarkan dengan prioritas penggunaan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.5.5 Tabel 3.26.**

BAB 9
ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Pada Bab 9 ini menjelaskan mengenai usulan untuk keamanan SPBE pada Kabupaten Situbondo. Usulan ini berdasarkan kesenjangan kondisi eksisting dengan kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu dalam bab 9 membahas juga tentang usulan penerapan keamanan yang berkaitan dengan perencanaan, Implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut.

9.1 Usulan Keamanan SPBE

Keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam banyak bidang. Begitu pula dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada sub bab ini akan dibahas terkait salah satu domain SPBE yaitu Keamanan SPBE. sebagaimana yang tertuang pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **harus** menerapkan Keamanan SPBE. Pelaksanaan keamanan SPBE ini mengacu kepada Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No. 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No.10 Tahun 2019 dan ISO 27001; 2013. Penerapan keamanan SPBE yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.**
   Dalam peraturan BSSN 10/2019 lebih membahas terkait dengan persandian serta pengamanan data dan informasi. Beberapa keamanan yang disebutkan dalam BSSN 10/2019 diantaranya adalah keamanan Sumber Daya TI, akses kontrol, jaringan, surat elektronik dan lainnya. Dalam setiap konteks keamanan dapat diturunkan menjadi bentuk kegiatan kecil seperti halnya pembagian hak akses, penerapan standar kata sandi dan lain sebagainya.

b) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.**
   Peraturan BSSN 4/2021 secara spesifik membahas terkait dengan Keamanan SPBE. Dimana panduan yang disebutkan didalamnya mengacu pada konsep *Plan, Do, Check,* dan *Act* (PDCA). Pada masing masing tahapan terdapat strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan keamanan.

c) **ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.**
   ISO 27001:2022 merupakan standar internasional yang juga merupakan acuan dari pembentukan banyak standar lain seperti Indeks KAMI dan bahkan Peraturan BSSN 4/2021.

Dalam penerapan Keamanan SPBE menggunakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 sebagai pedoman pada aspek Manajemen Keamanan yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Usulan Keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari **5 aspek** yaitu Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE, Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE, Peningkatan Keamanan SPBE, Penanganan Keamanan SPBE, dan Kelaikan Keamanan SPBE.

9.1.1 Perencanaan Keamanan SPBE

Tahap perencanaan menjadi komponen penting dalam pemantauan dan evaluasi indeks SPBE, dimana mengacu pada **2 pedoman** yang pertama yaitu **ISO 27001** klausul 4 hingga 6 serta **Peraturan BSSN 4/2021 Pasal 8 dan Pasal 9**. Pelaksanaan edukasi kesadaran merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap aspek keamanan. **Kegiatan edukasi kesadaran perlu dilakukan pada setiap kegiatan** dengan menerapkan perencanaan, dimana salah satu kegiatan yang dapat dilakukan selain membentuk Tim Audit adalah dengan menentukan ruang lingkup pada fase perencanaan. Dengan adanya isu isu terkait keamanan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini, maka **perlu dilaksanakan peningkatan kesadaran keamanan** pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam Tahapan Perencanaan Keamanan SPBE terbagi menjadi 4 kategori:

a) Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran atau yang sering kali dikenal dengan ***awareness*** dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu. Pelaksanaan edukasi kesadaran diharapkan dapat mengurangi ancaman yang berasal dari internal organisasi. Detail kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.1 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE Tabel 3.1.**

b) Standar Keamanan SPBE

Dalam Penerapan Standar Keamanan SPBE diperlukan beberapa Peraturan yang dibuat sebagai pedoman atau acuan serta memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan **inventarisir** ulang standar keamanan yang sudah dimiliki masing-masing O**PD**, sehingga dapat dilakukan pemenuhan standar keamanan yang dibutuhkan atau melakukan pembaharuan dokumen standar keamanan yang sudah ada. Standar keamanan yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Innformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik** dan **Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis**

Elektronik. Detail kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.2 Standar Keamanan SPBE Tabel 3.2.**

c) Ruang Lingkup Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tahapan pertama yang dilakukan dalam hal perencanaan adalah **menentukan ruang lingkup**. Penentuan ruang lingkup untuk menentukan fokus atau arah kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terbentuk rencana strategis dan solusi pengembangan yang fokus pada penyelesaian masalah. Detail terkait dengan ruang lingkup keamanan SPBE yang dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.4.1.3 Ruang Lingkup Keamanan SPBE Tabel 3.3.**

d) Keamanan Teknis SPBE

Dengan adanya standar keamanan yang sudah dibuat dan ditetapkan, maka diharapkan setiap pelaksana keamanan mematuhi dan menggunakan standar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terlebih dalam hal penanganan insiden. Setiap terjadi insiden, perlu adanya pencatatan dalam bentuk catatan aktivitas sistem, sehingga terdapat pencatatan atau dokumentasi terkait dengan insiden yang terjadi. Adapun detail **penerapan** ataupun **implementasi keamanan Teknis** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk pendukung seluruh penerapan Keamanan SPBE dapat dilihat **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.4.1.4 Keamanan Teknis SPBE Tabel 3.4.**

e) Perangkat Keamanan SPBE

Perangkat keras keamanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang lebih tepatnya untuk kebutuhan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk mendukung penerapan Keamanan pada Pusat Data/ Data Center. Detail usulan Perangkat Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub subbab 3.4.1.5 Perangkat Keamanan SPBE Tabel 3.5.**

f) Pedoman / SOP Keamanan SPBE

Penerapan Pedoman Keamanan atau SOP Keamanan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini masih belum maksimal karena kurang adanya dukungan terkait kebijakan yang mewajibkan setiap penerapan harus didukung dengan adanya pedoman atau SOP. Terdapat 2 kelompok usulan pembuatan SOP sebagai **pedoman** dalam **pelaksanaan Keamanan SPBE** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu terkait **Ruang**

server dan **Jaringan Intra Pemerintah**. Detail usulan pedoman/SOP dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.4.1.6 Pedoman / SOP Keamanan SPBE Tabel 3.6. untuk Ruang *Server* dan Tabel 3.7 untuk Jaringan Intra Pemerintah.**

Usulan Detail kegiatan di setiap kategori dalam **Tahapan Perencanaan Keamanan SPBE** dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub subbab 3.4.1 Tahapan Perencanaan.**

9.1.2 Implementasi Keamanan SPBE

Pada tahap implementasi yaitu merupakan tahapan yang dimana didalamnya terdapat beberapa elemen pendukung dimana terdiri dari **Standar Keamanan, Peningkatan Keamanan dan Perangkat Keamanan**. Dalam tahapan implementasi keamanan dapat dilakukan dengan menentukan dan membuat standar yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE. Acuan dapat berupa Peraturan dari pusat seperti halnya Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020, Standar Internasional seperti ISO 27001, Peraturan Bupati atau Surat Keputusan dan lainnya.

Berdasarkan ketentuan format ABACUS, setiap insiden yang terjadi perlu dicatat sehingga terdapat dokumentasi insiden apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana kerentanan yang terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kerentanan keamanan SPBE yang ada di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subbab 3.4.2 Tahapan Implementasi pada sub sub bab 3.4.2.1 Kerentanan Keamanan SPBE Tabel 3.9**.

9.1.3 Evaluasi Keamanan SPBE

Tahapan Evaluasi Keamanan SPBE dilakukan dengan menerapkan Audit SPBE pada Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE, hal tersebut telah tertuang pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan kegiatan Audit Internal dan Eksternal dalam meningkatkan Kelaikan Keamanan SPBE, dimana secara pedoman dan perangkat audit telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagaimana penerapan Indeks KAMI dapat dilakukan sebagai bentuk penilaian mandiri dalam melihat kesiapan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelum menerapkan sertifikasi ISO 27001.

Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Kelaikan keamanan terhadap

Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Secara menyeluruh usulan Kegiatan Evaluasi Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub subbab 3.4.3 Tahapan Evaluasi Sub subbab 3.4.3.1 Kelaikan SPBE Tabel 3.9**

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Audit SPBE merupakan audit yang dilakukan terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE. Terdapat 3 jenis audit yaitu Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan, dimana Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE diamanatkan kepada BPPT sedangkan Audit Keamanan SPBE diamanatkan kepada BSSN. Pelaksanaan audit dan perangkat audit yang digunakan mengacu pada perangkat audit BPPT (untuk audit infrastruktur dan aplikasi).

Audit dilaksanakan dalam bentuk Audit Internal dan Audit Eksternal. Audit eksternal adalah Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah dan Swasta Terakreditasi, sedangkan Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pegawai IPPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Utama Instansi. Untuk **Audit Aplikasi** terdiri dari **124 Indikator** penilaian dimana setiap indikator memiliki 4 level penilaian dimulai dengan **level 0** hingga **level 3.** Sedangkan untuk **Audit Infrastruktur** terbagi ke dalam 3 kategori yaitu, Pusat Data dimana terdiri dari **183 Indikator**, Jaringan Intra Pemerintah terdiri dari **47 Indikator**, dan Sistem Penghubung Layanan sebanyak **49 Indikator**. Setiap kategori terdiri dari **2 Domain** yaitu Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data serta Aspek Lain Pusat Data.

Audit SPBE ini bersifat lebih rinci (detail) dan bersifat lebih teknis jika dibandingkan dengan Evaluasi SPBE. Usulan pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah dijelaskan pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub subbab 3.4.3.1 Kelaikan Keamanan SPBE Gambar 3.2 Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit.**

9.1.4 Tindak Lanjut Keamanan SPBE

Tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang dilakukan setelah tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahapan ini terdapat 3 identifikasi untuk mengidentifikasi seluruh Keamanan SPBE yang telah diterapkan dan dilakukan penanganan atau tindak lanjut dari hasil permasalahan keamanan yang didapatkan serta mencegah adanya serangan keamanan.

a) Pengujian Keamanan SPBE

Pengujian Keamanan (*Security Testing*) bertujuan untuk mengetahui kerentanan keamanan dari sistem yang dikembangkan juga memastikan bahwa data dan informasi serta sumber daya yang berada di dalam sistem

telah memiliki perlindungan yang baik dari pada penyusup. Dengan menemukan seluruh celah dan keamanan dari sistem yang diterapkan atau sedang dikembangkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat melakukan pencegahan terhadap hilangnya data dan informasi yang penting serta kerugian lainnya. Rekomendasi terkait dengan area utama yang dapat dilakukan Pengujian keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub subbab 3.4.4.1 Pengujian Keamanan SPBE Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.**

b) Penanganan Insiden

Penanganan Insiden terjadi berdasarkan dengan waktu terjadinya insiden dan jika hanya terdapat insiden keamanan, setiap insiden yang terjadi **harus** tetap **didokumentasikan** mulai dari kegiatan insiden hingga penanganan insiden yang dapat disusun dalam bentuk excel maupun word. Pendokumentasian insiden keamanan juga dapat mengacu pada pedoman ISO 27001. Adapun beberapa **contoh** terkait dengan Penanganan Insiden Keamanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten sub subbab 3.4.4.2 Penanganan Insiden Tabel 3.12.**

c) Peningkatan Keamanan SPBE

Berdasarkan kerentanan Keamanan SPBE yang dapat terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan menimbulkan beberapa insiden yang terjadi dan **wajib dicatat** hingga pada tahap kematangan untuk penanganan insiden Keamanan SPBE dan detail kegiatan. Berikut merupakan rekomendasi kegiatan peningkatan keamanan SPBE yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub subbab 3.4.4.3 Peningkatan Keamanan SPBE Tabel 3.13 dan Gambar 3.3 – Gambar 3.5.**

BAB 10
ARSITEKTUR TATA KELOLA, MANAJEMEN SPBE DAN PENYELENGGARA SPBE

Pada bab ini akan membahas ringkasan usulan terkait domain arsitektur tata kelola, manajemen SPBE dan penyelenggara SPBE. Pembahasan dimulai dari penjabaran singkat dari usulan tata kelola SPBE. Pembahasan dilanjutkan dengan penjabaran singkat terkait usulan manajemen SPBE dan ditutup dengan penjabaran singkat terkait usulan penyelenggara SPBE.

10.1 Arsitektur Tata Kelola

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi eksisting arsitektur tata kelola SPBE hingga usulan terhadap arsitektur tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo. Usulan dan saran yang akan diberikan pada bab ini meliputi usulan kebijakan SPBE, usulan OPD Mandiri TIK, usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TIK serta usulan audit TIK.

10.1.1 Analisis Usulan Kebijakan SPBE

Berdasarkan hasil analisis terdapat kondisi eksisiting, kondisi ideal yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, dan juga Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo. Dari Indikator 1 sampai 10. Berdasarkan buku Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Indikator yang telah disebutkan memperoleh nilai tingkat kematangan dari rentang 1 hingga 3. Dimana Indikator yang mendapatkan nilai tingkat kematangan 1 adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Indikator yang mendapatkan nilai tingkat kematangan 2 adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE. Untuk itu pada bagian ini akan diberikan hasil analisis usulan untuk mencapai kondisi yang ideal berdasarkan atau mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020. **Detail lebih lengkap dapat dilihat pada Buku 7 Arsitektur Tata kelola Manajemen SPBE dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Arsitektur Tata kelola SPBE Subbab 3.5 tentang Analisis usulan Kebijakan SPBE.**

10.1.2 Analisis Usulan OPD Mandiri TIK

Berdasarkan analisis kondisi eksisting SDM TIK. Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo terdapat 11 OPD yang harus dan wajib OPD Mandiri TIK. Berdasarkan hasil survei dengan Dinas Komunikasi dan Informatika OPD Tertentu yang memiliki wewenang membuat aplikasi sendiri, *set-up* jaringan LAN sendiri termasuk belanja infrastruktur jaringan LAN dan *server* sendiri, dan *set-up* operasional dan pengembangan, dapat membangun aplikasi dan mengembangkan

khusus aplikasi sendiri maka termasuk ke dalam OPD Mandiri TIK. Adapun syarat-syarat OPD Mandiri TIK adalah sebagai berikut:

1. Minimal 1 orang staff memiliki 3 Kompetensi (*Programming*, Teknisi Jaringan dan Admin Keamanan TI)
2. Minimal memiliki pengalaman *training* dan sertifikasi *programming*, teknisi komputer dan jaringan.
3. Memiliki pengalaman membuat aplikasi sendiri dan set up jaringan sendiri.

11 OPD wajib Mandiri TIK yakni **Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. Abdoer Rahem, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.**

Berdasarkan analisa berkaitan dengan syarat-syarat OPD Mandiri TIK di atas dapat diketahui bahwa, Dari 40 OPD dan 11 OPD yang wajib TIK dapat diketahui bahwa terdapat 7 OPD Wajib dan Layak menjadi Mandiri TIK, 4 OPD Harus tapi tidak layak dan 1 OPD layak tapi tidak harus. 7 OPD yang harus dan layak Mandiri TIK yakni Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RSUD dr. Abdoer Rahem. Kategori Harus dan Layak OPD Mandiri TIK merupakan OPD yang memenuhi syarat diantaranya adalah terpenuhinya kompetensi perkerjaan yang berkaitan dengan TIK, Kepemilikan SK, Kepemilikan sertifikasi dan pengalaman *training* pada masing-masing staff TIK dan Pengalaman membuat aplikasi. 4 OPD yang Harus tapi tidak layak OPD mandiri TIK dikarenakan kurang memenuhi syarat Mandiri TIK yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selain hal tersebut terdapat 1 OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman yang memenuhi syarat OPD Mandiri TIK namun tidak harus Mandiri TIK. Ringkasan mengenai usulan OPD Mandiri TIK dapat dilihat pada **Tabel 10.1.**

Tabel 10.1 Usulan OPD Mandiri TIK

Kode OPD	Nama OPD

18	Dinas Kesehatan
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	RSUD dr. Abdoer Rahem
15	Badan Pendapatan Daerah
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Dinas Perhubungan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

10.1.3 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Analisa Usulan Pembagian Peran terhadap pengelolaan TI ini dilaksanakan untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat pemenuhan permintaan sistem berbasis elektronik di semua OPD. Usulan yang digunakan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dan Peta Okupasi TIK. Pemetaan Kompetensi dilaksanakan dengan SI/TI yang ada pada peta Okupasi TIK. Berdasarkan tanggung jawab yang ada dalam pengelolaan TI, maka terdapat 4 peran yang direkomendasikan yaitu: Pembangunan, Operator, Pemeliharaan, dan juga Pengembangan sistem. Penjelasan untuk masing masing peran dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub Bab 3.7 Analisis Usulan Pembagian Peran Terhadap Pengelolaan TI.**

10.1.4 Analisis Usulan Audit TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit TIK terdiri atas Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo. Indikator 29 hingga 31 masing-masing Indikator memiliki Nilai Tingkat kematangan yang berbeda, Nilai Tingkat

Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebesar 1, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebesar 1, dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebesar 1. Dari 3 Indikator tersebut rata-rata nilai tingkat kematangannya adalah 1. Menurut Peraturan Menteri **Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebelum dilakukan audit oleh eksternal, dapat dilakukan audit oleh internal oleh auditor internal pemerintah daerah. Audit internal dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Inspektorat. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 3 Sub Bab 3.8 Analisis Usulan Audit TIK.**

10.2 Arsitektur Manajemen SPBE

Pada Bagian ini akan dijelaskan, mengenai kondisi eksisiting dari arsitektur manajemen SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan yang akan dibahas pada bab ini meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen Aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan.

10.2.1 Manajemen Risiko

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo. Indikator Manajemen SPBE yakni indikator 21 hingga 28 memperoleh rata-rata 1.37. Dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik didapatkan bahwa nilai tingkat kematangan untuk manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan adalah 1. Sedangkan Manajemen layanan SPBE sudah memiliki nilai tingkat kematangan 4. Selian itu berdasarkan kondisi hasil eksisting di Kabupaten Situbondo saat ini. Terdapat sebanyak 10 OPD telah melaksanakan Manajemen Risiko sedangkan berdasarkan dari **PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh unit OPD. Mengacu pada peraturan tersebut bahwa seluruh OPD** perlu melakukan manajemen risiko untuk pada layanannya. Sedangkan OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah **inspektorat.** Hal ini selaras dengan fungsi inspektorat yakni melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, **Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis manajemen risiko**. Hal ini selaras dengan fungsinya yaitu melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan**

Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.1 tentang Manajemen Risiko.

10.2.2 Manajemen Keamanan Informasi

Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dapat menggunakan standar ISO/IEC 27001. Standar ini menetapkan persyaratan untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, peningkatan dan pemeliharaan Sistem Manajemen keamanan informasi (SMKI). ISO/IEC 27001 mengadopsi model Plan (Perencanaan dan mengimplementasikan), Do (Memonitoring dan melakukan pengecekan), *Check* (melihat, meninjau dan melakukan peningkatan dan mengembangkan), dan *Act* (memelihara SKMI). PDCA yang diterapkan untuk membentuk seluruh proses SMKI. Aspek dari SMKI juga ditinjau untuk meningkatkan dan menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi yang ada. Selain itu berdasarkan hasil kondisi eksisting pelaksanaan manajemen keamanan di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat sebanyak 4 OPD yang melaksanakan Manajemen Keamanan sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nilai tingkat kematangan untuk manajemen keamanan informasi adalah 1. Kondisi ideal yang untuk penerapan manajemen keamanan informasi mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk naik ke tingkat 2 dan 3 dapat dilaksanakan pengendalian keamanan informasi pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan terpenuhi, terkendalinya keamanan informasi dilakukan melalui strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh tim Koordinasi**. OPD yang bertanggung jawab atas manajemen keamanan informasi adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika.** Hal ini selaras dengan tugas dari **Bidang Persandian yaitu sebagai pelaksana** perumusan kebijakan pengelolaan keamanan data informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.2 tentang Manajemen Keamanan Informasi.**

10.2.3 Manajemen Data

Pelaksanaan manajemen data telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Situbondo saat ini. Terdapat sebanyak 5 OPD telah melaksanakan Manajemen Risiko sedangkan berdasarkan dari **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh unit OPD. Mengacu pada peraturan tersebut bahwa** kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan

program kegiatan yang terarah dan terencana. dan **seluruh OPD**, mengimplementasikan mengacu pada pedoman manajemen keamanan data, data induk, arsitektur data, data referensi, basis data dan kualitas data. Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo terdapat Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo. Pada peraturan ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pelaksanaan Satu Data Indonesia. Jadi berdasarkan hasil analisa Seluruh OPD memiliki kewajiban untuk melakukan manajemen data. Selain itu perumusan kebijakan pengelolaan keamanan data informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk penanggung jawab pelaksanaan manajemen data adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.** Hal tersebut selaras dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dari **Bidang Persandian** yaitu perumusan kebijakan pengelolaan keamanan data informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. sedangkan untuk **tugas dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dari Bagian Umum dan Kepegawaian** merupakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi kepegawaian. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.3 tentang Manajemen Data.**

10.2.4 Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen Aset TIK merupakan manajemen yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK dalam SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan manajemen aset TIK adalah **ITIL 4.0 "*Asset Management*".** Pelaksanaan manajemen aset TIK berdasarkan ITIL meliputi semua perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, *cloud services* dan perangkat client. Manajemen aset mencangkup pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pembuangan dari aset organisasi yang kritikal. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur daur hidup aset dan pengeluaran biaya dari peralatan dan infrastruktur TI. Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 9 OPD yang melaksanakan manajemen Aset TIK. berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nilai tingkat kematangan untuk manajemen keamanan informasi adalah 1. Kondisi ideal yang untuk penerapan manajemen keamanan informasi mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen Aset TIK harus dilaksanakan pada seluruh OPD. Sedangkan OPD yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen aset TIK adalah **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. Hal tersebut selaras dengan Tugas dari OPD Badan Keuangan dan Aset daerah yaitu melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata**

Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.4 tentang Manajemen Aset TIK.

10.2.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan manajemen Sumber Daya Manusia adalah ITIL 4.0 "*Workforce & Talent Management*" dan Peta Okupasi Nasional area fungsi TIK BNSP. Praktik manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dan dalam peran yang benar untuk mendukung tujuan bisnisnya. Hal ini bermanfaat bagi organisasi untuk mengurangi *backlog*, meningkatkan kualitas, menghindari pengerjaan ulang yang disebabkan oleh cacat, dan mengurangi waktu tunggu sambil juga menutup kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Sumber Daya Manusia adalah 1. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Sumber Daya Manusia mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** menyatakan bahwa kriteria ideal merupakan terpenuhinya kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. OPD yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**. Hal ini selaras dengan tugas dari **Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** dengan tugas sebagai pelaksanaan urusan kepegawaian. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.5 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.**

10.2.6 Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan TIK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah ITIL 4.0 "Knowledge Management". Pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam ITIL bertujuan untuk membantu membuat keputusan selama proses layanan dengan mengontrol dan mengelola aliran informasi. Berdasarkan kondisi eksisting

Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan manajemen Pengetahuan, berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Pengetahuan adalah 1. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Pengetahuan mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** bahwa kondisi ideal untuk manajemen pengetahuan yaitu dengan telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa **seluruh PD** harus melaksanakan manajemen pengetahuan. Penanggung jawan dari pelaksanaan manajemen pengetahuan adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika** khususnya Bidang Persandian yakni mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar, **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan tugas sesuai SOTK yakni melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Penanggung jawab lain yakni **Sekretariat di setiap PD**. Hal tersebut selaras dengan tugas dari **Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur** yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur, kesejahteraan aparatur. Sekretariat sendiri memiliki tugas untuk pengelolaan urusan kepegawaian. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.6 tentang Manajemen Pengetahuan.**

10.2.7 Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan TIK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 menyatakan bahwa manajemen perubahan merupakan manajemen yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan adalah **adalah ITIL 4.0 *"Change Control"* dan *"Organization Change Management"*.** Misi dari proses manajemen perubahan TI adalah untuk menerapkan perubahan dengan cara yang paling efisien, sambil meminimalkan dampak negatif pada pelanggan ketika perubahan diterapkan. Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 4 OPD yang melaksanakan manajemen Perubahan, berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Perubahan adalah 1. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Penrubahan mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** menyatakan bahwa Kegiatan Manajemen Perubahan dilaksanakan oleh **seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait.** Dengan Penanggung jawab **Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat di**

setiap OPD. Hal ini selaras dengan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta fungsi Sekretariat yaitu melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika kepada Pemerintah Daerah. Pada Manajemen Perubahan ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia sistem atau platform untuk OPD -OPD melaksanakan manajemen pengetahuan secara tersistem atau elektronik. Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 SubBab 4.4.7 tentang Manajemen Perubahan.**

10.2.8 Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Dalam rangka mewujudkan layanan SPBE yang baik, dapat menggunakan *best pratice* yang disediakan oleh ITIL. Pelaksanaan manajemen layanan dapat mengacu dari beberapa proses yang ada di ITIL 4.0 yaitu ***service desk, incident management, problem management, monitoring & event management*** **dan** ***service request management***. Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan manajemen Layanan SPBE berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Layanan SPBE adalah 4. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Layanan SPBE mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** bahwa kondisi ideal pelaksanaan manajemen layanan SPBE antara lain yakni terpenuhi dan terlaksananya manajemen Layanan SPBE pada seluruh unit pelaksana daerah. OPD penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen layanan SPBE adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut selaras dengan fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik** yaitu pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab harus memiliki *service desk tier 2* yang dapat menangani masalah TI secara mendalam. Sedangkan OPD lainnya cukup memiliki *service desk tier 1* yang menangani masalah TI dasar. . Detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.8 tentang Manajemen Layanan SPBE.**

10.2.9 Kesimpulan Manajemen SPBE

Daris hasil analisis dapat diketahui bahwa berdasarkan SOTK pada masing-masing OPD Kabupaten Situbondo memiliki tugas untuk mengemban menjadi penanggung jawab untuk setiap Manajemen SPBE. Penanggung jawab untuk setiap sub Manajemen SPBE berbeda. Manajemen Risiko penanggung jawabnya ialah Inspektorat, Manajemen Keamanan Informasi yakni Dinas Komunikasi dan

Informatika, Manajemen Data yakni Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Manajemen Aset TIK yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Manajemen Sumber Data Manusia SPBE yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Manajemen Pengetahuan yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat OPD, Manajemen Perubahan yakni Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh OPD, serta Manajemen Layanan dengan penanggung jawab yakni Dinas Komunikasi dan Informatika. Detail lebih lengkap mengenai program kerja pada masing masing manajemen SPBE dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 4 Sub Bab 4.4.9 tentang Kesimpulan Manajemen SPBE.**

10.3 Arsitektur Penyelenggara SPBE

Pada Bagian ini akan dijelaskan, mengenai kondisi eksisiting dari Penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan yang akan dibahas pada bab ini meliputi tim koordinasi dan sumber daya manusia SPBE. Berdasarkan kondisi eksisting penyelenggaraan SPBE, Kabupaten Situbondo telah memiliki Tim Koordinasi yang tertuang pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo** yang telah didukung oleh **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo,** kemudian ketersediaan Tim Evaluator yang tertuang dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Kemudian, terkait dengan ketersediaan SDM TIK dari **40 OPD** sebanyak **32 OPD (80%) telah memiliki SDM TIK,** sedangkan **8 OPD (20%) belum memiliki SDM TIK.** Dari 32 OPD (80%) jumlah keseluruhan SDM TIK adalah sebanyak **223 SDM TIK** di Kabupaten Situbondo. Penjabaran secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10.**

10.3.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo yakni pada Nilai Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah atau Indikator 19 memperoleh nilai tingkat kematangan 2. Berdasarkan Kondisi Hasil Survei dan Eksisting saat ini, **Kabupaten Situbondo telah memiliki Tim Koordinasi SPBE dengan Tugas dan Wewenang yang telah ditetapkan oleh Bupati Situbondo melalui Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Kabupaten Situbondo Tahun 2022. Selain itu kebijakan mengenai Tim Koordinasi juga diatur pada Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun dalam Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Bupati Situbondo, tidak disebutkan dengan jelas mengenai tugas jabatan dalam dinas pada Tim Koordinator. Sedangkan **berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menyatakan bahwa Tim Koordinasi Tingkat Pratama terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan SPBE.** Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional berdasarkan struktur Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat pertama di bagi menjadi 9 Kelompok kerja. Detail Lengkap mengenai Usulan Tugas Tim Koordinasi berdasarkan Kepmen 965 Tahun 2021 dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.4.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE**

10.3.2 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Situbondo

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, menyatakan bahwa tugas dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur sebagaimana pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Situbondo.** Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa peran yakni Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang teknologi dan Komunikasi dan Bidang Persandian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk detail mengenai struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dengan ITIL dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.4.2 tentang Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.**

10.3.3 Analisis Kompetensi SDM SPBE

Bagian ini membahas mengenai Kompetensi SDM SPBE yang dibuat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Okupasi. Dalam peraturan tersebut didapatkan menyatakan bahwa kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Kompetensi tersebut jika dijabarkan menurut Peta Okupasi TIK Detail atau penjelasan lebih rinci mengenai kompetensi dan penjelasan kompetensi sesuai Peta Okupasi dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.5.1.**

10.3.4 Pengadaan SDM TIK

Setelah analisis kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka pada bagian ini akan dijabarkan usulan penanggung jawab dan pengadaan SDM TIK yang wajib ada pada setiap OPD yakni Kompetensi Perencanaan SPBE, Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan, dan Pengelolaan TIK yang terintegrasi Aman, dan Andal. Dimana untuk pengelolaan SDM TIK yang Terintegrasi, Aman dan Andal ini juga merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Namun pelaksanaan dari pengelolaan TIK haruslah dilakukan oleh semua OPD di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Untuk kedepannya pemenuhan kebutuhan pengelolaan sistem digital akan meningkat, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan dalam pengelolaan TIK. Dalam hal ini penambahan kompetensi tidak sama dengan penambahan pegawai, karena bisa saja satu pegawai menguasai beberapa kompetensi TIK yang diperlukan. Untuk OPD yang sudah termasuk ke dalam OPD mandiri TIK, terdapat 9 kompetensi yang harus dimiliki yaitu Teknisi Komputer, Teknisi & Admin Jaringan, *Service/Help Desk, Admin Website, Admin Database*, Analis Sistem & Desain, *Programmer*, Operator/User Sistem, Dan Admin Keamanan TI. Sedangkan untuk OPD yang masih belum termasuk ke dalam OPD mandiri TIK, terdapat kompetensi yang setidaknya dimiliki yaitu operator/user sistem, Teknisi Komputer, Admin *Website* dan *service/help desk*. Detail mengenai usulan pengadaan SDM TIK pada masing masing OPD dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.5.2.**

10.3.5 Analisis Kebutuhan *Training* SDM

Training atau pelatihan dibutuhkan untuk untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK sehingga setiap OPD dapat memiliki SDM TIK yang handal. Dari kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Situbondo diketahui bahwa masih sedikit SDM TIK yang telah melakukan *training* terkait bidang TIK. Berikut pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.5.3** dijabarkan usulan *training* dari kompetensi SPBE yang telah dianalisis sebelumnya.

10.3.6 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM TIK di bidang masing-masing maka diperlukan sertifikasi SDM TIK. Dari kondisi eksisting di Pemerintahan Kabupaten Situbondo masih sedikit SDM TIK yang telah melakukan sertifikasi terkait bidang TIK. Berikut pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.5.4** adalah usulan sertifikasi dari kompetensi SPBE yang telah dianalisis sebelumnya.

BAB 11
PETA RENCANA DAN RENCANA ANGGARAN SPBE

Bab ini membahas tentang Rencana Anggaran Penyelenggaran SPBE, Rencana Anggaran Manajemen SPBE, Rencana Anggaran Layanan SPBE, Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE, Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur, Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE, Rencana Anggaran Audit TIK dan Rencana Anggaran Pelaksanaan Peta Rencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

11.1 Membangun Sistem Layanan dan *Service Desk*

Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif merupakan tanggung jawab setiap OPD terhadap layanan yang dimiliki masing-masing. Kondisi eksisting di Kabupaten Situbondo masih banyak OPD yang belum memiliki *service/help desk* guna menangani insiden dalam layanan. Untuk itu diusulkan dua jenis service desk yang ada di Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

a. Service Desk Tier 1

Service desk tier 1 berfungsi untuk menangani **masalah yang bersifat dasar**. *Service desk* ini digunakan untuk dukungan masalah tingkat dasar seperti memecahkan masalah penggunaan dan memenuhi permintaan *service desk* yang memerlukan keterlibatan TI. Jika tidak ada solusi yang tersedia, personil *tier* 1 mengeskalasi insiden ke tingkat yang lebih tinggi. Personil yang dibutuhkan pada tier 1 adalah personil teknis tingkat bawah yang dilatih untuk memecahkan masalah yang diketahui dan untuk memenuhi permintaan layanan dengan mengikuti SOP atau panduan. *Service desk tier* 1 harus ada di setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

b. Service Desk Tier 2

Service desk tier 2 ini berfungsi untuk dukungan **teknis yang mendalam.** Personil yang dibutuhkan pada tier 2 adalah teknisi yang berpengalaman dan berpengetahuan menilai masalah dan memberikan solusi untuk masalah yang tidak dapat ditangani oleh tingkat 1 serta personel dengan pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan. *Service desk* tier 2 harus diadakan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Situbondo. Berikut rekomendasi pengadaan *Service Desk* untuk OPD Kabupaten Situbondo. Detail mengenai target pelaksanaan *Service Desk Tier 1* dan *Service Desk Tier 2* dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 3 Subbab 3.1.1.**

11.2 Penguatan Kebijakan SPBE

Penguatan kebijakan SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dengan tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Rekomendasi pembuatan kebijakan yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan**

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan nilai indeks pada domain kebijakan SPBE yang tertuang pada **Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Tahun 2021 Kabupaten Situbondo**. Rekomendasi penguatan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 3 Subbab 3.1.3.**

11.3 Peta Rencana Pengadaan SDM SPBE

Setelah melakukan analisis kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka selanjutnya perlu dilakukan pengusulan penanggung jawab dan pengadaan SDM TIK yang harus ada di setiap OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo

1. **Kompetensi Perencanaan SPBE**

   Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** rencana SPBE dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanggung jawab terkait perencanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo. Untuk perencanaan kompetensi SDM maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

2. **Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan**

   Rekayasa proses bisnis pemerintahan dikelola oleh **Bagian Organisasi** pada Sekretariat Daerah yaitu menyusun pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Oleh karena itu, Kepala Sekretariat Biro Organisasi dan Kepala Sekretariat Daerah harus memiliki kompetensi terkait rekayasa proses bisnis pemerintahan dalam melaksanakan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkoordinasi dan berperan dalam menentukan prosedur pendokumentasian terkait proses bisnis pemerintahan.

3. **Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal**

   Rekayasa proses bisnis pemerintahan dikelola oleh **Bagian Organisasi** pada Sekretariat Daerah yaitu menyusun pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Oleh karena itu, Kepala Sekretariat Biro Organisasi dan Kepala Sekretariat Daerah harus memiliki kompetensi terkait rekayasa proses bisnis pemerintahan dalam melaksanakan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkoordinasi dan berperan dalam menentukan prosedur pendokumentasian terkait proses bisnis pemerintahan. Detail lebih lengkap mengenai usulan penambahan kompetensi SDM TIK dapat dilihat c

11.4 Analisis Kebutuhan *Training* SDM

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini **dari 223 SDM TIK hanya 13 orang SDM TIK yang memiiki pengalaman mengikuti *training***. Dan **210 SDM TIK belum memiliki pengalaman *training* di bidang TIK**. Dari 13 orang *training* yang diikuti antara lain adalah Bimtek dan Diklat Pengelolaan JDIH, *Training* Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Science Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Pelatihan dasar microtic manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, pelatihan basic coding dari UNEJ 2022, dan Pelatihan inixindo hardware dan jaringan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak SDM TIK yang belum memiliki pengalaman *training* di bidang TIK. Detail mengenai Prioritas usulan kebutuhan *training* mulai dari kompetensi pekerjaan ususlan SDM TIK, Detail, Usulan *Training* Spesifik Kompetensi, Target SDM hingga tahun pelaksanaan dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 3 Subbab 3.1.3.**

11.5 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini dari 223 SDM TIK hanya **terdapat 7 atau sekitar 3% pegawai yang telah bersertifikasi di bidang TIK, sedangkan sisanya 97% atau sebanyak 216 SDM TIK menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengalaman sertifikasi berkaitan dengan TIK.** Staff yang bersertifikasi diantaranya berkompetensi sebagai Admin Database, Admin Website, dan Programmer. Sertifikasi yang didapat berupa Sertifikat Peserta Diklat dan Sertifikat untuk *training* Bimtek dan Diklat Programmer dan sertifikat pelatihan inixindo hardware dan jaringan. Detail mengenai Prioritas usulan kebutuhan *training* mulai dari kompetensi pekerjaan ususlan SDM TIK, Detail, Usulan sertifikasi Spesifik Kompetensi, Target SDM hingga tahun pelaksanaan dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 3 Subbab 3.1.3.**

11.6 Peta Rencana Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai usulan prioritasi untuk setiap manajemen SPBE. Usulan tersebut berdasarkan dari analisis gap dan bertujuan untuk menjadikan kondisi manajemen SPBE yang ada saat ini mampu untuk mencapai kondisi yang ideal. Usulan-usulan diambil dari beberapa *best pratice* dan peraturan-peraturan terkait. Pada Peta Rencana Manajemen SPBE setiap sub manajemen SPBE telah dianalisis mengenai program kerja pada setiap sub manajemen SPBE yang berlandaskan dengfan referensi sesuai denngan sub manajemen SPBE. Selain itu pada program kerja masing-masing sub manajemen juga dipilih penanggung jawab sesuai dengan SOTK. Detail mengenai Peta Rencana Manajemen SPBE dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan**

Biaya Kabupaten Situbondo Bab 3 Subbab 3.2 tentang Peta Rencana Manajemen SPBE.

11.7 Peta Rencana Integrasi Data

Integrasi data adalah proses menghubungkan atau menggabungkan beberapa set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu tempat penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk **mengurangi duplikat atau redudansi** dari data yang ada. Sesuai dengan tujuan dari **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta **mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah**. Pada bagian ini, akan diusulkan peta rencana integrasi antar data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial.

11.7.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Integrasi data kependudukan merupakan proses penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan**. Untuk usulan peta rencana integrasi data kependudukan dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Bab 3.3.1** Total terdapat 14 usulan integrasi data terkait kependudukan. Pelaksanaan integrasi data kependudukan pada tahun **2023 diusulkan untuk 7 data**. Pada tahun **2024 diusulkan untuk** melakukan integrasi pada **4 data** dan pada tahun **2025 diusulkan** melakukan integrasi **untuk 3 data**. Usulan tahun diambil berdasarkan tingkat kepentingan dan kemiripan data.

11.7.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Integrasi data kepegawaian merupakan penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Pegawai**. Untuk detail peta rencana usulan data-data terkait kepegawaian yang harus diintegrasikan dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Bab 3.3.2.** Total terdapat 14 usulan integrasi data terkait kepegawaian. Pelaksanaan integrasi data kepegawaian pada tahun **2023 diusulkan untuk 8 data**. Pada tahun **2024 diusulkan untuk** melakukan integrasi pada **3 data** dan pada tahun **2025 diusulkan** melakukan integrasi **untuk 3 data**. Usulan tahun diambil berdasarkan tingkat kepentingan dan kemiripan data.

11.7.3 Usulan Integrasi Data Keuangan

Integrasi data keuangan merupakan proses penggabungan atau penghubungan antar **data-data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, pendapatan daerah dan aset atau barang milik daerah**. Untuk peta rencana data terkait keuangan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Bab 3.3.3.** Total terdapat 16 usulan integrasi data terkait keuangan. Pelaksanaan

integrasi data keuangan pada tahun **2023 diusulkan untuk 5 data**. Pada tahun **2024 diusulkan untuk** melakukan integrasi pada **7 data** dan pada tahun **2025 diusulkan** melakukan integrasi **untuk 4 data**. Usulan tahun diambil berdasarkan tingkat kepentingan dan kemiripan data.

11.7.4 Usulan Integrasi Data Spasial

Sistem Informasi Geospasial (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasial atau geografi. SIG nantinya akan dikelola oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**. Saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo masih belum memiliki SIG sehingga, diperlukan penataan data-data spasial yang ada untuk pembangunan SIG kedepannya. Pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Bab 3.3.4** akan menjelaskan peta rencana usulan data spasial yang akan diintegrasikan pada aplikasi SIG.

Terdapat **31 data usulan** yang diampu oleh **10 OPD**. Tahun integrasi diusulkan berdasarkan peta rencana pembangunan SIG pada Kabupaten Situbondo. Pada peta rencana aplikasi, **SIG diusulkan dibangun pada tahun 2023**. Sehingga, semua data spasial yang akan ada pada SIG diusulkan dilakukan integrasi pada tahun 2023.

11.7.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. Dari kondisi eksisting SDI Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka diusulkan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan SDI. Penyusunan usulan ini diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Detail usulan dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Bab 3.4.**

Terdapat total **5 tahapan** yang diusulkan untuk **penyelenggaraan SDI di Kabupaten Situbondo**. Masing-masing tahapan diusulkan untuk dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, kecuali tahapan penyimpanan dan penyebarluasan data yang diusulkan dilakukan dalam tahun yang sama. Sehingga pada tahun 2023-2025 melakukan tahapan perencanaan data hingga ke pemeriksaan data. Dilanjutkan pada tahun 2026 dilakukan tahapan penyimpanan dan penyebarluasan data.

11.8 Peta Rencana Layanan SPBE

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan SPBE adalah serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Pada bagian ini akan membahas Peta Rencana layanan SPBE yang meliputi Peta Rencana Layanan

Administrasi, Layanan Publik SPBE, dan Peta Rencana Layanan terhadap Program RPJMD.

11.8.1 Peta Rencana Layanan SPBE sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018

Pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu Layanan Administrasi Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Hasil pemetaan ketersediaan layanan terhadap aspek layanan diatas secara lengkap dapat dilihat pada Buku 1. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memenuhi semua aspek layanan administrasi berbasis elektronik. Sehingga **tidak ada peta rencana untuk layanan administrasi berbasis elektronik**.

Untuk layanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memenuhi semua aspek kecuali layanan terkait pertanahan. Sehingga diusulkan layanan terkait pertanahan berupa Layanan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman. Namun, **peta rencana dari usulan layanan** tersebut **akan dimasukkan pada peta rencana usulan layanan terhadap program**. Hal tersebut dikarenakan kesamaan usulan layanan.

11.8.2 Peta Rencana Pembuatan Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk memberikan panduan pada Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintahan.

11.8.3 Usulan SOP Pada Layanan Eksisting

Pada kondisi eksisting Layanan SPBE yang telah didokumentasikan pada Buku 1, bahwa Pemerintahan Kabupaten Situbondo memiliki **640 Ketersediaan SOP** yang dimiliki oleh 40 OPD, tetapi hanya terdapat 338 (47%) SOP yang **telah mendukung** layanan eksisting sedangkan terdapat 302 (53%) Layanan yang belum didukung SOP. Dari kondisi tersebut dibutuhkan usulan SOP untuk mendukung layanan eksisting tersebut. Adanya SOP dapat memberikan panduan bagi Instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Detail usulan SOP Pada Layanan Eksisting SPBE dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Sub Bab 3.5.2 Tabel 3.9.**

11.8.4 Usulan SOP Pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Pada bagian ini akan ditinjau mengenai usulan SOP pada Layanan terhadap Program RPJMD. Usulan ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja terkait program yang ada. Program RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk jangka periode 5 (lima) tahun. Sebanyak 37 SOP yang diusulkan untuk mendukung usulan layanan terhadap

program RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Detail Peta Rencana usulan SOP dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Sub Bab 3.5.2 Tabel 3.10.**

11.8.5 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program

Pada Buku 1 telah diidentifikasi layanan-layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, hasilnya masih terdapat beberapa program pada RPJMD yang belum didukung oleh layanan. Selanjutnya pada Buku 3 diusulkan layanan terhadap program RPJMD yang belum didukung oleh layanan. Pada bagian ini akan dibahas prioritisasi pengadaan usulan layanan yang telah diberikan. Secara lengkap dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Sub Bab 3.5.3.** Terdapat total **31 usulan layanan**. Pada tahun 2023 diusulkan untuk mengadakan 16 layanan. Selanjutnya pada tahun 2024, diusulkan untuk mengadakan 9 layanan. Tahun 2025 diusulkan untuk mengadakan 3 layanan dan 3 layanan pada tahun 2026.

11.9 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Prioritas aplikasi disusun dengan memerhatikan setidaknya dua faktor, yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Prioritasi ini menjadi acuan bagi masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penerapan aplikasi. Untuk lebih detailnya terkait usulan aplikasi pada masing-masing SKPD Pemerintahan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 8 Prioritas Paket Kegiatan, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE Sub Bab 3.5.**

Tabel 11.1 Jumlah Pembangunan Aplikasi SPBE Setiap Tahun

Jenis/Tahun		2023	2024	2025	2026
Jumlah Aplikasi Usulan	Aplikasi Usulan Baru	29	12	14	11
	Aplikasi Pengembangan	8	8	7	5
Jumlah Usulan Pembangunan Aplikasi		**37**	**20**	**21**	**16**

11.10 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data eksisting, kesenjangan dan usulan yang telah dijabarkan secara detail pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo** dan **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Situbondo**. Maka, perlu dilakukan Peta Rencana untuk Infrastruktur yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

detail Prioritas Usulan Infrastruktur SPBE dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Tabel 3.11.**

11.10.1 Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya

Berdasarkan dengan Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo cukup **baik** dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah **terpusat** yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan **Fiber Optik dan Wireless PTP** dalam integrasi Jaringan yang digunakan, **keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo**.

Ketersediaan **Topologi Jaringan Intra Pemerintah** yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat **2 Topologi** yaitu **Topologi Umum dan Topologi Distribusi**. Untuk **Topologi Distribusi terdiri dari 4 pendetailan distribusi** jaringan yang terdiri dari Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet OPD, Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik Lingkungan Kantor Bupati, Topologi Distribusi *Wireless* Kecamatan dan Topologi Pusat *Server* (*Data Center*). Detail penjelasan kondisi eksisting Topologi Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.1**.

Ketersediaan ***Bandwidth*** yang digunakan untuk Jaringan Intra Pemerintah saat ini menggunakan 2 Provider (ISP), yaitu **Provider (ISP) Biznet dengan kapasitas 610 Mbps** yang mana penggunaan terbagi dari 460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) + 150 untuk WIFI Publik dan **Provider (ISP) Megadata dengan kapasitas 250Mbps** yang mana penggunaannya terbagi dari 100 Mbps untuk *server* (Dedicated) + 150 Mbps untuk area publik (Broadband). Detail penjelasan kondisi eksisting ketersediaan *Bandwidth* dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.2 Tabel 7.13.**

Peta Rencana Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah ini telah dianalisis berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapatkan dari dokumen hasil survei, dan dokumen eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga didapatkan **Peta Rencana terkait infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang terdiri dari DED Jaringan intra Pemerintah, Pengelompokan Area Demilitarized Zone (DMZ) *Server*, Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah, Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah, Belanja Internet Terpusat dan Optimalisasi *Bandwidth* , dan Reviu Kebijakan dan Tata kelola Jaringan Intra Pemerintah** dimana nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan ataupun menyesuaikan dengan kondisi kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo yang bertujuan agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan penerapan jaringan

intra pemerintah dalam mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail dari setiap usulan Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.1 Jaringan Intra Pemerintah** dan Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.1 Tabel 3.11.**

11.10.2 Peta Rencana Ruang *Server* (Data Center) dan Pelengkapnya

Berdasarkan Kondisi Eksisting terkait Ruang *Server* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan *Server* pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang *server* yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa OPD yang telah meletakkan pada Ruang *Server* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat *server* yang dititipkan oleh OPD. Saat ini terdapat terdapat **43 *Server*** yang dimiliki oleh **14 OPD** dan terdapat **10 OPD** yang memiliki Ruang *Server* dan menerapkan Aspek pada ruang *server*. Pemerintah Kabupaten Situbondo hingga saat ini **Belum menerapkan penyimpanan pada Pusat Data Nasional (PDN)**. Detail terkait kondisi Eksisting Ruang *Server* (Data Center) dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.5.**

Peta Rencana Infrastruktur Ruang *Server* (Data Center) ini telah dianalisis berdasarkan dengan Kondisi Eksisting pada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dokumen hasil survei dan dokumen eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga didapatkan **Peta Rencana terkait infrastruktur Ruang *Server* yang terdiri dari Usulan DED Ruang *Server*, Pemusatan *Server* OPD pada Data Center, Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Ruang *Server* (Data Center), Penerapan Penggunaan DRC (*Disaster Recovery Center*) dan Penggunaan fasilitas Pusat Data Nasional (PDN)**. Seluruh Peta Rencana Usulan Ruang *Server* nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan ataupun menyesuaikan dengan kondisi kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana peta rencana tersebut bertujuan agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan aspek pada ruang *server* guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail terkait dengan usulan Ruang *Server* (Data Center) dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.2 Ruang *Server* (Data Center)** dan Peta Rencana Ruang *Server* (Data Center) dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.2 Tabel 3.11.**

11.10.3 Peta Rencana Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan dengan Kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan** Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang

disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan Web Service**. Detail sistem penghubung layanan Komputasi dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.7 Tabel 7.18.**

Peta Rencana Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan ini telah dianalisis berdasarkan dengan kondisi eksisting pada pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dokumen hasil survei, dan dokumen Eksisting. Seluruh Peta Rencana Usulan Sistem Penghubung Layanan nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan ataupun menyesuaikan dengan kondisi kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana bertujuan agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan penerapan Sistem Penghubung Layanan guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail terkait dengan usulan Sistem Penghubung Layanan yang terdiri dari Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.3 Sistem Penghubung Layanan** dan Peta Rencana Sistem Penghubung Layanan dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.3 Tabel 3.11.**

11.10.4 Peta Rencana Komputasi

Berdasarkan kondisi eksisting, **Tidak semua** OPD menerapkan Komputasi awan yang disebabkan karena **kurangnya pemahaman** dari pentingnya penggunaan komputasi awan, saat ini **Penggunaan Google Drive** sebesar **84%** pada **11 OPD, Penggunaan NAS** sebesar **8%** pada **1 OPD**, dan **Penggunaan Cloud** sebesar **8%** pada **1 OPD.** Adapun OPD yang menerapkan **Penyimpanan melalui NAS**, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan mayoritas Pemanfaatkan Komputasi hanya sebatas penyimpanan data OPD. Detail Kondisi eksisting Komputasi dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.**

Peta Rencana usulan terkait dengan penggunaan komputasi awan yang dapat diterapkan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **dengan menerapkan penyimpanan pada *Cloud, Google Drive* yang dibuat dengan akun resmi dinas dan beberapa penggunaan *Cloud* berlisensi lainnya serta memanfaatkan penggunaan NAS/SAN sebagai media penyimpanan**. Tujuan penggunaan Komputasi awan yaitu untuk mempermudah dalam penyimpanan data yang dapat diakses secara *realtime* dan kapan saja apabila dibutuhkan secara cepat dan membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan penerapan Komputasi Awan guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail terkait dengan usulan Komputasi Awan yang mencakup Masterplan Penggunaan dan Penerapan

Komputasi Awan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.4 Komputasi Awan** dan Peta Rencana Komputasi dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.4 Tabel 3.11.**

11.10.5 Peta Rencana Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Usulan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak mempertimbangkan beberapa aspek dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah jumlah SDM yang ada dan usulan SDM terbaru hasil analisis yang dijabarkan pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE dan Penyelenggara SPBE**. Selain itu, usulan perangkat juga mempertimbangkan jumlah perangkat dan usia perangkat yang dimiliki oleh OPD saat ini. Usulan pengadaan/peremajaan perangkat keras bertujuan mengoptimalkan perangkat yang digunakan untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD Kabupaten Situbondo dan mendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan dari setiap usulan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.** Adapun Peta Rencana dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini

1) Peta Rencana Perangkat Keras

Peta rencana Perangkat Keras terdiri dari Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras Periferal Utama, Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras Periferal Pendukung, Pengadaan Perangkat Keras Media Penyimpanan, Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras Jaringan. Detail peta rencana Perangkat Keras dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.5 Tabel 3.12.** Penjelasan detail setiap usulan perangkat keras untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.5.1 -3.3.5.4.**

2) Peta Rencana Perangkat Lunak

Peta rencana perangkat lunak diberikan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan secara legal dengan lisensi resmi. **Terdapat 38** usulan perangkat lunak bersifat *Free* dan berlisensi yang nantinya dapat dijadikan referensi penggunaan Perangkat Lunak pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan perangkat lunak dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada sub subbab 3.3.5. Tabel 3.26** dan Peta Rencana Perangkat Lunak dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.5 Tabel 3.11.**

11.10.6 Peta Rencana Command Center

Berdasarkan kondisi eksisting, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah memiliki *Command Center*** dengan aspek dan perangkat yang memadai. Usulan terkait *Command Center* ditujukan untuk dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan Infrastruktur SPBE terkait dengan mengoptimalkan *Command Center* di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail terkait dengan usulan *Command Center* yang mencakup peremajaan Perangkat Command Center dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.6** dan Peta Rencana *Command Center* dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.7.6 Tabel 3.11.**

11.11 Peta Rencana Keamanan SPBE

Keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam banyak bidang. Begitu pula dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada sub bab ini akan dibahas terkait salah satu domain SPBE yaitu Keamanan SPBE. sebagaimana yang tertuang pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **harus** menerapkan Keamanan SPBE. Pelaksanaan keamanan SPBE ini mengacu kepada Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019 dan ISO 27001; 2013. Penerapan keamanan SPBE yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.**

   Dalam peraturan BSSN 10/2019 lebih membahas terkait dengan persandian serta pengamanan data dan informasi. Beberapa keamanan yang disebutkan dalam BSSN 10/2019 diantaranya adalah keamanan Sumber Daya TI, akses kontrol, jaringan, surat elektronik dan lainnya. Dalam setiap konteks keamanan dapat diturunkan menjadi bentuk kegiatan kecil seperti halnya pembagian hak akses, penerapan standar kata sandi dan lain sebagainya.

b) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.**

   Peraturan BSSN 4/2021 secara spesifik membahas terkait dengan Keamanan SPBE. Dimana panduan yang disebutkan didalamnya mengacu pada konsep *Plan, Do, Check,* dan *Act* (PDCA). Pada masing masing tahapan terdapat strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan keamanan.

c) **ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.**

ISO 27001:2022 merupakan standar internasional yang juga merupakan acuan dari pembentukan banyak standar lain seperti Indeks KAMI dan bahkan Peraturan BSSN 4/2021.

Dalam penerapan Keamanan SPBE menggunakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 sebagai pedoman pada aspek Manajemen Keamanan yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Usulan Keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari **5 aspek** yaitu Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE, Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE, Peningkatan Keamanan SPBE, Penanganan Keamanan SPBE, dan Kelaikan Keamanan SPBE yang dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo sub bab 3.8 Tabel 3.12.**

11.13.1 Perencanaan Keamanan SPBE

Tahap perencanaan menjadi kompoonen penting dalam pemantauan dan evaluasi indeks SPBE, dimana mengacu pada **2 pedoman** yang pertama yaitu **ISO 27001** klausul 4 hingga 6 serta **Peraturan BSSN 4/2021 Pasal 8 dan Pasal 9**. Pelaksanaan edukasi kesadaran merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap aspek keamanan. **Kegiatan edukasi kesadaran perlu dilakukan pada setiap kegiatan** dengan menerapkan perencanaan, dimana salah satu kegiatan yang dapat dilakukan selain membentuk Tim Audit adalah dengan menentukan ruang lingkup pada fase perencanaan. Dengan adanya isu isu terkait keamanan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini, maka **perlu dilaksanakan peningkatan kesadaran keamanan** pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam Tahapan Perencanaan Keamanan SPBE terbagi menjadi 4 kategori:

a) Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran atau yang sering kali dikenal dengan ***awareness*** dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu. Pelaksanaan edukasi kesadaran diharapkan dapat mengurangi ancaman yang berasal dari internal organisasi. Detail kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dapat dilihat pada Buku **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.1 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE Tabel 3.1.**

b) Standar Keamanan SPBE

Dalam Penerapan Standar Keamanan SPBE diperlukan beberapa Peraturan yang dibuat sebagai pedoman atau acuan serta memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan **inventarisir** ulang standar keamanan yang sudah dimiliki masing-masing O**PD**, sehingga dapat dilakukan pemenuhan standar keamanan yang dibutuhkan atau melakukan pembaharuan dokumen standar keamanan yang sudah ada. Standar keamanan yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah**

Daerah dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Innformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik** dan **Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Detail kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.2 Standar Keamanan SPBE Tabel 3.2.**

c) Ruang Lingkup Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Innformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tahapan pertama yang dilakukan dalam hal perencanaan adalah **menentukan ruang lingkup**. Penentuan ruang lingkup untuk menentukan fokus atau arah kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terbentuk rencana strategis dan solusi pengembangan yang fokus pada penyelesaian masalah. Detail terkait dengan ruang lingkup keamanan SPBE yang dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.3 Ruang Lingkup Keamanan SPBE Tabel 3.3.**

d) Keamanan Teknis SPBE

Dengan adanya standar keamanan yang sudah dibuat dan ditetapkan, maka diharapkan setiap pelaksana keamanan mematuhi dan menggunakan standar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terlebih dalam hal penanganan insiden. Setiap terjadi insiden, perlu adanya pencatatan dalam bentuk catatan aktivitas sistem, sehingga terdapat pencatatan atau dokumentasi terkait dengan insiden yang terjadi. Adapun detail **penerapan** ataupun **implementasi keamanan Teknis** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk pendukung seluruh penerapan Keamanan SPBE dapat dilihat **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.4 Keamanan Teknis SPBE Tabel 3.4.**

e) Perangkat Keamanan SPBE

Perangkat keras keamanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang lebih tepatnya untuk kebutuhan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk mendukung penerapan Keamanan pada Pusat Data/ Data Center. Detail usulan Perangkat Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.1.5 Perangkat Keamanan SPBE Tabel 3.5**.

f) Pedoman / SOP Keamanan SPBE

Penerapan Pedoman Keamanan atau SOP Keamanan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini masih belum maksimal karena kurang adanya

dukungan terkait kebijakan yang mewajibkan setiap penerapan harus didukung dengan adanya pedoman atau SOP. Terdapat 2 kelompok usulan pembuatan SOP sebagai **pedoman** dalam **pelaksanaan Keamanan SPBE** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu terkait **Ruang *server*** dan **Jaringan Intra Pemerintah**. Detail usulan pedoman/SOP dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.5 Pedoman / SOP Keamanan SPBE Tabel 3.6. untuk Ruang *Server* dan Tabel 3.7 untuk Jaringan Intra Pemerintah.** Usulan Detail kegiatan disetiap kategori dalam **Tahapan Perencanaan Keamanan SPBE** dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.1 Tahapan Perencanaan**.

11.13.2 Implementasi Keamanan SPBE

Pada tahap implementasi yaitu merupakan tahapan yang dimana didalamnya terdapat beberapa elemen pendukung dimana terdiri dari **Standar Keamanan, Peningkatan Keamanan dan Perangkat Keamanan**. Dalam tahapan implementasi keamanan dapat dilakukan dengan menentukan dan membuat standar yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE. Acuan dapat berupa Peraturan dari pusat seperti halnya Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020, Standar Internasional seperti ISO 27001, Peraturan Bupati atau Surat Keputusan dan lainnya.

Berdasarkan ketentuan format ABACUS, setiap insiden yang terjadi perlu dicatat sehingga terdapat dokumentasi insiden apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana kerentanan yang terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kerentanan keamanan SPBE yang ada di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subbab 3.3.2 Tahapan Implementasi pada sub sub bab 3.4.2.1 Kerentanan Keamanan SPBE Tabel 3.8.**

11.13.3 Evaluasi Keamanan SPBE

Tahapan Evaluasi Keamanan SPBE dilakukan dengan menerapkan Audit SPBE pada Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE, hal tersebut telah tertuang pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan kegiatan Audit Internal dan Eksternal dalam meningkatkan Kelaikan Keamanan SPBE, dimana secara pedoman dan perangkat audit telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagaimana penerapan Indeks KAMI dapat dilakukan sebagai bentuk penilaian mandiri dalam melihat kesiapan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelum menerapkan sertifikasi ISO 27001.

Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Secara menyeluruh usulan Kegiatan Evaluasi Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subsubbab 3.4.3 Tahapan Evaluasi Subsubsubbab 3.4.3.1 Kelaikan SPBE Tabel 3.9.**

11.13.4 Tindak Lanjut Keamanan SPBE

Tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang dilakukan setelah tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahapan ini terdapat 3 identifikasi untuk mengindentifikasi seluruh Keamanan SPBE yang telah diterapkan dan dilakukan penanganan atau tindak lanjut dari hasil permasalahan keamanan yang didapatkan serta mencegah adanya serangan keamanan.

a) Pengujian Keamanan SPBE

Pengujian Keamanan (*Security Testing*) bertujuan untuk mengetahui kerentanan keamanan dari sistem yang dikembangkan juga memastikan bahwa data dan informasi serta sumber daya yang berada di dalam sistem telah memiliki perlindungan yang baik dari pada penyusup. Dengan menemukan seluruh celah dan keamanan dari sistem yang diterapkan atau sedang dikembangkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat melakukan pencegahan terhadap hilangnya data dan informasi yang penting serta kerugian lainnya. Rekomendasi terkait dengan area utama yang dapat dilakukan Pengujian keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.4.1 Pengujian Keamanan SPBE Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.**

b) Penanganan Insiden

Penanganan Insiden terjadi berdasarkan dengan waktu terjadinya insiden dan jika hanya terdapat insiden keamanan, setiap insiden yang terjadi **harus** tetap **didokumentasikan** mulai dari kegiatan insiden hingga penanganan insiden yang dapat disusun dalam bentuk excel maupun word. Pendokumentasian insiden keamanan juga dapat mengacu pada pedoman ISO 27001. Adapun beberapa **contoh** terkait dengan Penanganan Insiden Keamanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subsubbab 3.4.4.2 Penanganan Insiden Tabel 3.12.**

c) Peningkatan Keamanan SPBE

Berdasarkan kerentanan Keamanan SPBE yang dapat terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan menimbulkan beberapa insiden yang terjadi dan **wajib dicatat** hingga pada tahap kematangan untuk penanganan insiden Keamanan SPBE dan detail kegiatan. Berikut merupakan rekomendasi kegiatan peningkatan keamanan SPBE yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub subbab 3.4.4.3 Peningkatan Keamanan SPBE Tabel 3.13.**

11.12 Peta Rencana Audit SPBE

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Audit SPBE merupakan audit yang dilakukan terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE. Terdapat 3 jenis audit yaitu Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan, dimana Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE diamanatkan kepada BPPT atau BRIN. Sedangkan Audit Keamanan SPBE diamanatkan kepada BSSN. Pelaksanaan audit dan perangkat audit yang digunakan mengacu pada perangkat audit BPPT atau BRIN (untuk audit infrastruktur dan aplikasi).

Audit dilaksanakan dalam bentuk Audit Internal dan Audit Eksternal. Audit eksternal adalah Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah dan Swasta Terakreditasi yang mana Proses Pelaksanaannya **setiap 2 tahun sekali**, sedangkan Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pegawai IPPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Utama Instansi yang mana Proses Pelaksanaannya di **setiap tahunnya**. Untuk **Audit Aplikasi** terdiri dari **124 Indikator** penilaian dimana setiap indikator memiliki 4 level penilaian dimulai dengan **level 0** hingga **level 3.** Sedangkan untuk **Audit Infrastruktur** terbagi ke dalam 3 kategori yaitu, Pusat Data dimana terdiri dari **183 Indikator**, Jaringan Intra Pemerintah terdiri dari **47 Indikator**, dan Sistem Penghubung Layanan sebanyak **49 Indikator**. Setiap kategori terdiri dari **2 Domain** yaitu Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data serta Aspek Lain Pusat Data.

Audit SPBE ini bersifat lebih rinci (detail) dan bersifat lebih teknis jika dibandingkan dengan Evaluasi SPBE. Usulan pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah dijelaskan pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub bab 3.4.3.1 Kelaikan Keamanan SPBE Tabel 3.9 Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE.**

BAB 12
RENCANA DAN ANGGARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan singkat terkait kisaran anggaran atas pengadaan usulan-usulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Rangkuman rencana anggaran yang dibahas dimulai dari rencana anggaran terkait penyelenggara SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE serta kisaran anggaran mengenai audit SPBE. Pembahasan akan ditutup dengan penjabaran singkat terkait rencana anggaran pelaksanaan peta rencana.

12.1 Rencana Anggaran Penyelenggaraan SPBE

Rencana anggaran Penyelenggara SDM SPBE merupakan kisaran rincian anggaran dalam pemenuhan dan penyelenggaraan SDM yang diusulkan. Kisaran anggaran ini diperoleh berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kisaran anggaran ini agar dapat memberikan tunjangan terkait SDM usulan dan membantu proses manajemen pada masing-masing Pemerintah Kabupaten Situbondo. Anggaran tertulis dalam dokumen ini bisa disesuaikan Kembali dengan kompleksitas kebutuhan dan manajemen dari setiap OPD.

12.1.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggaraan SPBE

Rencana anggaran Penyelenggara SDM SPBE merupakan kisaran rincian anggaran dalam pemenuhan dan penyelenggaraan SDM yang diusulkan. Kisaran anggaran ini diperoleh berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kisaran anggaran ini agar dapat memberikan tunjangan terkait SDM usulan dan membantu proses manajemen pada masing-masing Pemerintah Kabupaten Situbondo. Anggaran tertulis dalam dokumen ini bisa disesuaikan Kembali dengan kompleksitas kebutuhan dan manajemen dari setiap OPD Kisaran Biaya Pengadaan SDM Penyelenggaraan SPBE. Setiap Kompetensi terbagi menjadi 3 *job level* yakni *Entry Level, Experience* dan Senior. Detail lengkap mengenai kompetensi dan kisaran biaya untuk pengadaan SDM penyelenggara SPBE dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 4 Subbab 4.1.1 tentang Rencana Anggaran Pengadaan Penyelenggara SPBE.**

12.1 Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

Rencana Anggaran pengembangan Kompetensi SDM SPBE merupakan acuan dalam perencanaan anggaran untuk pengembangan Kompetensi SDM TIK. Pengembangan SDM TIK sendiri terdiri dari 2 kegiatan yakni Pelatihan atau *Training* dan Sertifikasi. Tujuan diadakannya *Training* dan sertifikasi sendiri adalah untuk mengembangkan kompetensi yang ada guna untuk menunjang tugas dari teknisi dalam melakukan operasional TIK. Kisaran Anggaran mengenai pelatihan dan sertifikasi dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan**

Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 4 Subbab 4.1.2 tentang Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE,

12.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

Kisaran anggaran manajemen didapat melalui *benchmark* dari beberapa vendor Konsultan TI. Aktivitas Manajemen SPBE yang dilakukan berupa pendampingan penyiapan dokumen kebutuhan manajemen, anggaran pemberian bimtek (bimbingan teknis) terhadap SDM terkait. . Kisaran harga berlaku untuk pelaksanaan manajemen di satu OPD. Harga dapat bertambah tergantung dari lingkup pelaksanaan manajemen tersebut. Penjelasan rincian anggaran Manajemen Risiko kisaran Anggarannya yakni 100-150jt, Manajemen Keamanan Informasi yakni 150-175jt, Kisaran anggaran manajemen Data yakni 150-175jt, Manajemen Aset TIK yakni 100-150jt, Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) yakni sebesar 100-150jt, Manajemen Pengetahuan dengan kisaran harga 100-150jt, selanjutnya Manajemen Perubahan sebesar 100-150jt, dan terakhir Manajemen Layanan SPBE kisaran anggaran yakni sebesar 150-175jt.

12.3 Rencana Anggaran Layanan SPBE

Rencana anggaran dalam pembuatan SOP didasarkan pada seberapa kompleks alur proses bisnis yang akan direncanakan. Umumnya anggaran dalam pembuatan SOP berkisar di angka 36 sampai 50 juta. Kisaran anggaran ini didapatkan dari benchmark beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran ini untuk, penyusunan form, jumlah user pengguna aplikasi, berapa kali proses pelaksanaan sosialisasi SOP dan jumlah SOP pelengkapnya. Penentuan kisaran SOP terbagi menjadi 3 yaitu kompleksitas sedang rendah dan tinggi. Penjelasannya seperti di bawah ini:

- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **rendah**, maka anggarannya berkisar **antara 36-40 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 2 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **sedang**, maka anggarannya berkisar antara **40-45 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 3 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **tinggi**, maka anggarannya berkisar antara **45-50 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 4 SOP pendukung, karena SOP ini pendukung layanan yang didukung oleh aplikasi dengan memiliki beberapa modul dan beberapa alur yang berbeda namun tetap dalam satu layanan SPBE.

12.4 Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE

Rencana anggaran arsitektur aplikasi SPBE di bawah merupakan perkiraan anggaran, di mana dalam dokumen ini bersifat prediksi dan dibuat dengan metode perbandingan dengan harga saat ini (*benchmark*) sehingga tentu secara fleksibel dapat berubah menyesuaikan standar harga pada tahun berjalan. Hasil prakiraan diperoleh dari hasil analisis dengan sembilan indikator perhitungan, yaitu potensi integrasi dengan OPD lain, jumlah tabel *database,* jumlah aplikasi yang terintegrasi, jumlah kelompok pengguna, jumlah fitur, jumlah pengguna, besar data per transaksi, panjang alur proses bisnis, serta konsistensi *maintenance*.

Hasil perkiraan rencana anggaran aplikasi dikelompokkan berdasarkan 4 bentuk kompleksitas yakni kompleksitas pengembangan minor dengan perkiraan biaya 0 juta rupiah, kompleksitas dasar dengan perkiraan biaya 75-100 juta rupiah, kompleksitas sedang dengan perkiraan biaya 101-175 juta rupiah, serta kompleksitas sangat kompleks dengan perkiraan biaya 176-300 juta rupiah. Adapun secara detail rencana anggaran untuk masing-masing aplikasi dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo, Bab 4, Subbab 4.4.**

12.4 Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasul analisis dan hasil usulan yang ada yang telah dijelaskan pada Buku 5. Rencana dan anggaran terbagi menjadi anggaran pengadaan *server* dan pelengkapnya serta anggaran untuk pengadaan hardware. Lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini.

12.4.1 Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya

Anggaran Jaringan Intra Pemerintah didasarkan pada kebutuhan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 5 tahun kedepan. Detail Kisaran Anggaran ditampilkan pada **Tabel 12.1.**

Tabel 12.1 Rencana Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	DED Jaringan Intra Pemerintah	Pembuatan DED Jaringan terkait dengan Rekomendasi Jalur Jaringan, Perangkat, dan Monitoring Jaringan	Rp 250.000.000
2	Pengkajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah kab Situbondo telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya	Rp 200.000.000

12.4.2 Anggaran Ruang *Server* (*Data Center*) dan Pelengkapnya

Anggaran *server* didasarkan pada kebutuhan *server* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 5 tahun kedepan, **Tabel 12.2** menjelaskan rencana anggaran untuk pengadaan *server,* dan perangkat pendukung.

Tabel 12.2 Rencana Anggaran Ruang Server (Data Center) dan Pelengkapnya

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	DED Ruang *Server*	Melakukan perancangan DED Ruang *Server* yang bertujuan untuk mengetahui Bluprint Ruang *server* dan aspek yang sesuai dengan TIA 942 dan SNI Pusat Data	Rp 185.000.000
2	Pengadaan /Peremajaan Perangkat Pendukung Ruang *Server* dan Pemenuhan Aspek	Pemenuhan Bangunan dan Interior Ruang *Server*	Rp 250.000.000
		Pengadaan/Peremajaan Cadangan Baterai UPS (4 Unit)	Rp 20.000.000
		Pengadaan / Peremajaan Monitor LED Smart TV(1 unit 74 inch)	Rp 75.000.000

12.4.3 Anggaran Komputasi

Anggaran Komputasi didasarkan pada kebutuhan dalam penerapan komputasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 5 tahun kedepan, **Tabel 12.3** menjelaskan rencana anggaran untuk penerapan Komputasi.

Tabel 12.3 Rencana Anggaran Komputasi dan Pelengkapnya

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	Masterplan Penggunaan dan Penerapan Komputasi Awan	Melakukan Perancangan masterplank dalam pnenerapan Komputasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	Rp 180.000.000

12.4.4 Anggaran Perangkat Keras *(Hardware)*

Anggaran *hardware* merupakan kebutuhan perangkat yang digunakan yang terdiri dari rencana anggaran untuk pengadaan printer, PC, Laptop, Printer dan beberapa perangkat keras lainnya dengan berbagai tipe. Kisaran anggaran ini didapatkan dari perbandingan e-katalog dan juga dari web resmi brand tersebut untuk harga dari perangkat *hardware*. Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 12.4.**

Tabel 12.4 Rencana Anggaran Perangkat Keras (Hardware)

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
Perangkat Keras Periferal Utama			
1	PC	Type : PC HP SLIMOperating System : WIN 10 HOME Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache)	Rp21.888.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack Type : PC HP SLIM Operating System : WIN 10 HOME Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack	
2	PC	ASUS PC DESKTOP D500TC-511400033T ProcessorIntel Core i5-10400 Processor 2.9 GHz (12M Cache, up to 4.3 GHz, 6 cores) RAM8GB DDR4 U-DIMM Storage1TB SATA 7200RPM 3.5 HDD VGAIntegrated Graphic Sistem OperasiWindows 10 Home DeskripsiInclude Monitor 23,8 inch FHD / Size : 20L (Mini Tower) / Color : Black / Form Factor : Tower / Processor : Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (12M Cache, up to 4.3 GHz, 6 cores) / Operating System : Windows 10 Home / Chipset : Intel® B560 Chipset / DIMM Memory : 8GB DDR4 U-DIMM / Memory Max. : 64GB / Graphic : UMA / Storage : 1TB SATA 7200RPM 3.5"" HDD / Optical Drive : DVD reader 8X / LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro / Audio : High Definition 7.1 Channel Audio / Wireless : Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 / Power Supply : 300W power supply (peak 350W) / Rear I/O Port : 1x RJ45 Gigabit Ethernet + 1x HDMI 1.4 + 1x VGA Port + 1x DVI-D + 2x PS2 + 1x Serial port + 3 x Audio jacks + 2x USB 2.0 Type-A + 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / Front I/O Port : 1x Headphone + 1x MIC in + 2x USB 2.0 Type-A + 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / Drive	Rp11.999.000,00

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		Bay : 3.5" x 2 / Serial ATA : 4 x SATA 6.0Gb/s ports / Expansion Slot(includes used) : 1x PCIe® 4.0 x 16 + 2x PCIe® 3.0 x 1 + 1x M.2 connector for WiFi + 1x M.2 connector for storage + 2x DDR4 U-DIMM slot / Keyboard & Mouse : Wired keyboard + Wired optical mouse / Accessory (Optional) : 1 x COM port + 1 x Parallel port / Dimension (WxDxH) : 16 x 38 x 35.5 cm / Weight : 7kg / My ASUS features : System diagnosis , Fan profile / AppDeals : Link to MyASUS / Built-in Apps : MyASUS + ASUS Business Manager / Security : BIOS Booting User Password Protection + HDD User Password Protection and Security + Kensington Security Slot™ + Trusted Platform Module (Firmware TPM) Keterangan LainnyaWarranty 3 years (3/3/3) Type/ModelExpertCentre D500TC	
3	Laptop	ASUS A409FJ-EK751T Processor Intel® Core™ i7-8565U 1.8 GHz Memory 4GB (onboard) + 4GB (DRAM DDR4) Hard Disk Storage PCIEG3x2 NVME 512GB M.2 SSD Display Size 14.0' Graphic NVIDIA® GeForce® MX230 Resolution 1920x1080 Optical Drive - Operating System Windows 10 Dimension (W x D x H) 32.5(W) x 21.6(D) x 2.29 (H) cm Est. Weight 1.65 KG Warranty 2 Year I/O Port "1x USB 3.1 Gen 1 Type A 1x USB 3.1 Gen1 Type-C " Audio - Camera VGA Web Camera (Fixed type) Interface - Wifi 802.11ac Bluetooth Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 Power 32WHrs, 2S1P Battery 2-cell Li-ion	Rp13.650.000
4	Printer	- Up to 24 pages per minute print speed - Automatic 2-sided print - 9.3cm colour touchscreen - Wired and wireless network - 50 sheet Auto Document Feeder - Inbox toners - Bk: 1,000 pages, CMY: 1,000 pages	Rp8.400.000
Perangkat Keras Periferal Pendukung			
1	LCD Proyektor	Projector NEC MC331XG MC331XG Type : LCD Brightness [ANSI Lumen] : 3300 Contrast :	Rp12.500.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		15000:1 Resolution : 1280 x 800 Light Source : Lamp Lamp Life [h] : 6000	
2	SMART TV (LED)	- Screen size : 50 inch - Resolution : 4K UHD (3,840 x 2,160) - HDR 10+ : Yes - Object Tracking Sound : OTS Lite - Dolby Digital Plus : Yes - HDMI : 3 - USB : 2 - Audio Out : Optical - Sistem operasi : TIZEN OS - Aplikasi yang tersedia : YouTube, Netflix, Browser Web	Rp9.009.000
3	Camera Digital	Spesifikasi: 24.1MP APS-C CMOS Sensor DIGIC 8 Image Processor UHD 4K and HD 720p120 Video Recording Dual Pixel CMOS AF with Eye Detect AF 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen Wi-Fi and Bluetooth; Webcam Capability Extended ISO 51200, 10 fps Shooting Combination 5-Axis Image Stabilization EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lens	Rp10.180.000
4	Webcam	Spesifikasi: Resolusi Maks.: 1080 p/30 fps - 720p/ 30 fps Kamera mega pixel: 3 Jenis fokus: Autofocus Jenis lensa: Kaca Mikrofon internal: Stereo Jangkauan mikrofon: Maksimal 1 m Bidang pandang diagonal (dFoV):: 78° Universal clip yang kompatibel dengan tripod ini cocok dengan berbagai laptop, LCD, atau monitor 1Tripod tidak disertakan Dimensi termasuk fixed mounting clip Tinggi: 43,3 mm Lebar: 94 mm Tebal: 71 mm Panjang kabel: 1,5 m Berat: 162 g	Rp1.850.000
5	Drone	Spesifikasi: Dengan menampilkan sensor CMOS 1 inci, fungsi otonom canggih, dan bodi kompak dengan berat kurang dari 600 g, DJI Air 2S adalah drone terbaik yang dirancang bagi para fotografer udara yang senang berpergian. Rasakan pengalaman merekam dunia yang menakjubkan. Sistem Kamera Luar Biasa Dilengkapi dengan	Rp34.806.825

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		sensor gambar 1 inci dan piksel 2,4µm yang besar, DJI Air 2S mampu menghasilkan video 5.4K / 30fps dan 4K / 60fps. Abadikan momen apa pun dengan kejernihan yang memukau. Aksesoris Hebat Untuk Kreativitas Tanpa Batas The Fly More Combo mencakup aksesoris praktis seperti Battery Charging Hub, tas bahu, ND Filters Set, tiga baterai penerbangan cerdas, dan lainnya. Nikmati peningkatan fleksibilitas ND Filter ND 4/8/16/32 dan ND 64/128/256/512. DJI Smart Controller mempermudah melihat hasil rekaman dari drone dengan tingkat kecerahan layar 1080p 5.5 inci. Kompatibel dengan DJI GO 4 dan DJI FLY ataupun aplikasi pihak ketiga. Aircraft x1 DJI RC-N1 Remote Controller x1 Intelligent Flight Battery x3 Battery Charger x1 AC Power Cable x1 Low-Noise Propellers (Pair) x6 Gimbal Protector x1 Type-C Cable x1 DJI RC-N1 RC Cable (USB Type-C Connector) x1 DJI RC-N1 RC Cable (Lightning Connector) x1 DJI RC-N1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) x1 Spare DJI RC-N1 Control Sticks (Pair) x1 ND Filters Set (ND4/8/16/32) x1 Battery Charging Hub x1 Battery to Power Bank Adaptor x1 Shoulder Bag x1	
6	- Fingerprint Scanner BIOMORF Scan Tenprint 1051 - Iris Scanner Cmitech BMT 20 - Signature Pad - Topaz LCD 1X5 T-L (BK) 462	Fingerprint Scanner : Perangkat perekaman sidik jari ini mampu mmerekam 4 jari sekaligus.Finger sacnner : Plain four finger up to 3,2""x3,0"" - Two plan thumb up to 3,2""x3,0"" - Rolled finger up to 1,6""x1,6"". Interface/Power Supply : USB 2.0. Dimension 148 x 152 x 148 mm. Weight : 1,5 kg. Support OS : Microsoft Windows XP, Vista and 7, Linux Iris Scanner : Perangkat ini berfungsi untuk merekam IRIS mata, alat perekaman ini memiliki fitur flash yang hanya membutuhkan waktu 1 detik untuk pengambilan gambar. Deskripsi: Meets or exceeds ISO 19794-6 Typically arround 1 second, from time of	Rp61.930.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		head placement (0 to 50°C) USB 2.0 High Speed | USB 2.0 (500 Ma AT 5v) No additional power required Windows 7, 8 and 8,1 (32 and 64-bit) Linux Ubuntu 12.04 distributions Android 4.0 and above Signature Pad : Topas SignatureGeM TM LCD 1X5 adalah sistem untuk menangkap tanda tangan yang digunakan di meja, desktop, atau aplikasi portabel. LCD ini juga dapat digunakan untuk menampilkan teks dan grafis dari komputer host dan pen-tap hot spot yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi atau memeriksa opsi pilihan. Topas SignatureGeM TM LCD 1X5 memiliki fitur menangkap tanda tangan elektronik pad dengan fitur tambahan dari sebuah layar LCD interaktif, yang memungkinkan pengguna untuk melihat ""tinta elektronik"" di bawah ujung pena. Memiliki layar kaca tempered membuat alat ini serbaguna. Spesifikasi Signature Pad - Topaz LCD 1X5 T-L (BK) 462 : - Jenis Sensor: Permukaan kaca tempered, Nilai hingga 2 juta tanda tangan, Digitizer E / M berkinerja tinggi - Jenis Pena: Pena tanpa baterai E / M yang kokoh dan berdaya rendah - Resolusi & Tingkat Konversi Melebihi standar industri PPI yang Dapat Diprogram - Kemampuan Otentikasi: Data .SIG kualitas forensik yang mampu diperiksa dan diautentikasi dengan perangkat lunak Topaz - Merk : TOPAZ - Type : TM LCD 1x5 - Jenis : Signaturepad - Platform : TOPAZ signatureGem - Interface : USB 2.0 powered (standard cable) - Sensor : Active electromagnetic Sensor - Pen type : Active Energized - Part Number: T-LBK462-HSB-R	

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		- Sensor type: Active Electromagnetic - Pen type: Active Energized - Data conversion: 377 - Resolutions: 410 - Supported OS: Windows/Linux - Data interface: USB Standards	
7	LCD	SCREEN PROJEKTOR Wall Layar Proyektor merupakan layar proyektor berukuran 70 x 70 Inch (178 x 178 cm) untuk digantung di dinding. Layar proyektor ini terbuat dari bahan yang tidak mudah robek. Layar proyektor ini mudah dipasang dan mudah diatur panjang-pendeknya. Mudah dipasang dan mudah diatur panjang-pendeknya	Rp1,210,000
8	Scanner	Merek : EPSON EPSON WORKFORCE DS-530II A4 SHEET-FED DOCUMENT SCANNER" A4 Duplex Sheet-fed Document Scanner. Scanning speed of up to 35 ppm / 70 ipm. Automatic Document Feeder (ADF) of up to 50 sheets. Daily duty cycle of 4,000 One-pass duplex scanning. Paper protection function and image sensor glass dirt detection. Max Document Size: 215.9 x 6096 mm. 50 sheets (80g/m2)	Rp11,657,000
9	Scanner EPSON SCANNER ES50 (A4)	SCANNER ES50 (A4), Document Scanner	Rp2,810,000
Perangkat Keras Jaringan			
1	Modem Advan CPE Start 4G LTE	Secure WPS Encryption + 1 Device 3 SSID, jangkauan sinyal yang lebih luas hingga 125m dengan Router Advan CPE Start, frekuensi 2.4GHz	Rp2,000,000
2	Gateway Router	DHCP, VLAN. CCR2216-1G-12XS-2XQ	Rp41.488.980
3	Gateway Router	Architecture ARM 64bit CPU AL32400 CPU core count 4 CPU nominal frequency 1700 MHz Dimensions 443 x 224 x 44 mm RouterOS license 6 Operating System RouterOS v7 Size of RAM 4 GB Storage size 128 MB Storage type NAND MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -20°C to 60°C	Rp8.984.500
4	Switch Management *Bandwidth*	SFP Port, 2Port. CCR2216-1G-12XS-2XQ	Rp41.488.980

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
5	Distribution switch	VLAN, 1GB,4-SFP, 24port. CRS328-24P-4S+RM	Rp7.260.060
6	Router	Managed, 12Port, VLAN. CCR1016-12S-1S+ (Rp12,099,572) dan CCR1036-12G-4S (Rp16,259,655)	Rp28.359.227
7	Access Point	SKU: UAP-AC-SHD-US 802.11ac Wave 2 WiFi technology 5 GHz (4x4 MU-MIMO) band with a 1.7 Gbps throughput rate 2.4 GHz (4x4 MIMO) band with a 800 Mbps throughput rate Dedicated security radio for persistent network threat management Powered with PoE+* (2) GbE RJ45 ports (1) USB port	Rp8.400.000
8	Antenna Outdoor	Assembled Sleeve30 dimensions 700x700x220mm Box dimensions 720x715x230mm Weight netto 2.95 kg Weight bruto 5.520kg Box contents aluminum shell, front cover, fasteners, silicone sealan	Rp2.249.900
9	Repeater Wifi	Kecepatan maksimal : 300 Mbps Frekuensi : 2.4 GHz Ports : 1 x Ethernet port Fitur : SSID Hiding	Rp307.000
10	MIKROTIK CRS317-1G-16S+RM	RouterBoard CRS317-1G-16S+RM Adalah Switch Layer 3 dari Mikrotik yang berbasis SFP+ (10G). Switch ini Bisa menggunakan SwOS/RouterOS untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan 10G Anda. Sudah menggunakan standart Rackmount Case. Spesifikasi CRS317-1G-16S+RM Product Code CRS317-1G-16S+RM Architecture ARM CPU Marvell 98DX8216B0 800MHz Dual Core Current Monitor No Main Storage/NAND 16 MB RAM 1 GB SFP Ports 16 LAN Ports 1 Gigabit Yes Switch Chip 1 MiniPCI 0 Integrated Wireless No MiniPCIe 0 SIM Card Slots No USB No Memory Cards No Power Jack Yes 802.3af Support No POE Input Yes (Ether1) POE Output No Serial Port Yes (RJ45) Voltage Monitor No Temperature Sensor Yes Dimentions 443 x 224 x 44 mm Operating System RouterOS/SwOS Temperature Range -30C .. +70C RouterOS License Level6	Rp15.210.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
Perangkat Media Penyimpanan			
1	IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)	1x FlashSystem 5015 LFF Control Enclosure 6x 4TB 7.2K 3.5Inch NL HDD 1x 16Gb FC Card Adapter Pair	Rp146.318.500

12.4.5 Anggaran *Command Center*

Anggaran *Command Center* didasarkan pada kebutuhan peremajaan perangkat pada *Command Center* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. **Tabel 12.5** menjabarkan kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan peremajaan perangkat pada *Command Center*.

Tabel 12.5 Rencana Anggaran Command Center

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Harga Perangkat
1	Pengkajian atau Roadmaps Penerapan Command Center	Melakukan Pengkajian terhadap Penggunaan dan Penerapan Command Center (Intelegent Room dan Pendopo) dan menganalisis semua kebutuhan serta permasalahan yang ada saat ini	Rp 150.000.000
2	TV Videowall	Brightness (Typ.) : 500 cd/m^2 Bezel : 2.25 mm (T/L), 1.25 mm (B/R) Depth : 93.1 mm Interface : HDMI (2)/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR 55" 49"	Rp 55.800.000
3	TV Touchscreen	Brightness : 1,500 cd/㎡ (Typ.) Life Time : 50,000 hours Bezel : 10.9 mm (L/R), 16.1 mm (T), 23.2 mm (B) Depth : 95 mm Interface: HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR	Rp 66.500.000
4	PC	Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack Type : PC HP SLIM Operating System : WIN 10 HOME Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives	Rp 17.000.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Harga Perangkat
		: 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack	
5	UPS (kapasitas 2.2 KVA)	Smart-UPS SRT 2200VA 230V Capacity1980Watt/2200VA Spesifikasi Teknis But Half : 11 menit, But Full : 3 menit Waktu pemindahan0 ms Battery capacity12V 5.1Ah x 6 Waktu pengisian baterai3 hours DeskripsiAPC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Keterangan LainnyaSurge Energy : 340 Joules, Topology : Double Conversion Online, Waveform : Sinewave, Output : 230V, Input : 230V, Port : USB, Smart Slot, Output Connection : 8 x C13 | 2 x C19, Warranty : 36 bulan (excld. Battery), 24 bulan (battery), Weight : 30.84 KG	Rp 36.380.300

12.5 Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE

Rencana anggaran Keamanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo** Informasi kisaran anggaran didapatkan dari beberapa perbandingan *e-commerce.* Penyusunan kebijakan ini menjadi satu kesatuan dengan pengadaan SOP pendukungnya. Kisaran rencana anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 12.6.**

Tabel 12.6 Rencana Anggaran Keamanan SPBE

No	Usulan Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Kisaran Harga
1	Firewall	SOPHOS XGS 4500	Rp1,014,480,000
		SOPHOS XGS 6500	Rp965,250,000
		SOPHOS XGS 5500	Rp1,135,890,000
		FORTINET Fortigate FG-201F	Rp287,573,500
		FORTINET ForManager-300 Centralized Management Firewall	Rp1,370,944,000
		NGFW Firewall - N8420	Rp1,646,196,020
		NGFW Firewall - N7210	Rp905,412,020.00
2	Akses Masuk (Finger Lock)	ZKTeco F18 (Access Control)	Rp2,371,600

No	Usulan Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Kisaran Harga
3	Pemenuhan Bangunan dan Interior Ruang *Server*	1. PARTISI & PINTU: -. Dinding Gypsum Tahan Api (Jayaboard Fire Stop 13MM) -. Dinding Kaca Tempered (Partisi Kaca ketebalan 15mm) -. Pintu Kaca Tempered Single Door (Partisi Kaca ketebalan 15mm) -. Pintu Kayu Single Door bersertifikat tahan API (Pintu Utama Platindo WPC Amazon DUCO - S) 2. CEILING: -.Metal Ceiling dan Drop Ceiling (Penempatan Pada Ruang Monitoring) 3. PENGECATAN: -. Plafon dan dinding dengan ketahanan cat minimal 5 tahun (Untuk Lapisan Luar Gedung dan Dalam Gedung/Dinding)	Rp250,000,000
4	Pembelian Cadangan Baterai UPS	Nominal Voltage: 12V Nominal Capacity: 7AH Terminal F1\F2 Unit Utama	Rp5,000,000
5	Sistem Kebakaran	A. DETECTION & CONTROL SYSTEM (Paket Fire Alarm Conventional - ALBOX): -. 1 unit Master Control Fire Alarm 10 Zone ALBOX -. 2 pcs Battery Back up 12V-7.2A -. 1 unit Annuanciator -. 2 pcs RoR Heat Sensor -. 25 pcs Smoke Detector Sensor -. 2 pcs Emergency Push Button -. 2 pcs Emergency Lamp -. 2 pcs Sirene Bell 6 inch -. 2 Roll Kabel NYA Hitam + 2 Roll Kabel NYA Merah -. 2 Roll Kabel NYA 3.5x1.5mm -. 1 lot Matterial Instalasi -. Instalasi Pemasangan, Setting, Testing and	Rp145,000,000

No	Usulan Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Kisaran Harga
		Commisioning	
		B. ALAT PEMADAM (APAR): -. SERVVO Fire Extinguisher FE-36 Metronic System SMT 1100 SV 36 -. TONATA Apar ABC Powder 12 kg Set Komplit TNT-12P	Rp50,000,000
6	Monitor LED	SAMSUNG 75 Inch Smart TV QLED 4K UHD QA75Q95T	Rp60,000,000
		LG 75 Inch Smart TV NanoCell 4K UHD 75NANO91	Rp75,000,000
7	Sistem Monitoring *Server*	-	Rp100,000,000
8	Pengadaan SSL	SSL certificate from THAWTE (*software* 1 tahun)	Rp5,000,000
9	Pengadaan Antivirus *Server*	Antivirus Kaspersky Small Office Security 10 PC+ 10 *Server* 1 Year	Rp5,000,000
10	Pengadaan Antivirus Client	Antivirus Kapersky Small Office Security (10 Client + 1 *Server*) 1 Year	Rp2,700,000
11	Kebijakan Keamanan Informasi	Konsultan Keamanan Informasi	Rp200,000,000
12	SOP	Pelatihan atau pembekalan untuk SDM dalam rangka meningkatkan Keamanan SPBE	Rp50,000,000 s/d Rp150,000,000

12.6 Rencana Anggaran Audit TIK

Kisaran rencanan anggaran audit TIK pada sub bab ini didapat dari pengumpulan data dan *benchmark* ke beberapa vendor penyedia jasa Konsultasi TI. Detail kisaran anggaran dijelaskan pada **Tabel 12.7.**

Tabel 12.7 Kisaran Anggaran Audit TIK

Audit TIK	Jenis Kegiatan	Kisaran Anggaran
Audit Infrastruktur SPBE	Audit *Server*	200 – 250 jt
	Audit Jaringan	200 – 250 jt
Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi Khusus	200 – 250 jt
Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan Infrastruktur	200 – 250 jt
	Audit keamanan aplikasi khusus	200 – 250 jt

12.7 Rencana Anggaran Pelaksanaan Peta Rencana

Rencana dan anggaran masing-masing OPD disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Buku 2 sampai dengan Buku 6. Rencana dan anggaran pada terbagi menjadi anggaran pembangunan aplikasi, pengadaan perangkat keras (Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya, Perangkat Ruang *Server* (*Data Center*), dan pelengkapnya, Perangkat Komputasi, Perangkat Periferal, Perangkat Pendukung, dan Media Penyimpanan), audit TIK, pengadaan SDM, *training*, dan sertifikasi. Untuk detail lebih lengkap dapat dilihat pada **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo Bab 4 Subbab 4.8** Dan **Lampiran 1 Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Situbondo**. Berikut merupakan Rencana Anggaran dari Tahun 2023 hingga 2027 pada 40 OPD di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Tabel 12.8.

Tabel 12.8 Total Rencana Anggaran

Tahun	Total Rencana Anggaran
2023	Rp13.590.049.424
2024	Rp23.953.698.276
2025	Rp14.028.158.251
2026	Rp10.507.229.350
2027	Rp8.866.978.000
Total Anggaran 5 Tahun	**Rp70.946.113.301**

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 1

KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS GAP SPBE PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 1

KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS GAP SPBE PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1
1.2 Pengertian Arsitektur SPBE 1
1.3 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE 2
1.3.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait 2
1.3.2 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE 4
1.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE 7
1.5 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE 8
1.6 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE 10
BAB 2 KONDISI YANG INGIN DICAPAI 11
2.1 Pemerintah Kabupaten Situbondo 11
2.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Situbondo 11
2.1.2 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Arsitektur SPBE 12
2.2 Visi dan Misi SPBE 12
2.3 Tujuan dan Sasaran SPBE 13
2.4 Hasil Penilaian SPBE Kabupaten Situbondo 13
2.5 Indeks SPBE yang Ingin Dicapai Pemerintah Kabupaten Situbondo 15
BAB 3 KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP 19
3.1 Pengertian Proses Bisnis 19
3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis (RAB) 19
3.3 Referensi Proses Bisnis (RAB) 20
3.4 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Situbondo 23
3.4.1 Daftar Urusan 23
3.4.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Kabupaten 28
3.4.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level OPD 30
3.4.4 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) 33

3.5 Metadata Proses Bisnis SPBE 34
3.6 Analisis GAP 35
BAB 4 KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI DAN ANALISIS GAP 37
4.1 Pengertian Data dan Informasi 37
4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi 38
4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi 39
4.4 Kondisi Eksisting Data dan Informasi 41
4.4.1 Bentuk Data yang dimiliki 41
4.4.2 Tempat Penyimpanan Data 42
4.4.3 Aplikasi *Database* yang digunakan 43
4.4.4 Jenis Akses Data 44
4.4.5 Integrasi Data dan Informasi Eksisting 45
4.5 Metadata Data dan Informasi 49
4.6 Permasalahan Data dan Informasi 50
4.7 Analisis Gap 51
BAB 5 KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP 53
5.1 Pengertian Layanan SPBE 53
5.2 Struktur Arsitektur Layanan SPBE 53
5.3 Referensi Arsitektur Layanan SPBE 55
5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE 57
5.4.1 Layanan yang dimiliki Seluruh OPD 57
5.4.2 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik 59
5.4.3 Layanan Publik Berbasis Elektronik 62
5.4.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program 89
5.5 Metadata Layanan SPBE 90
5.6 Permasalahan Layanan SPBE 91
5.7 Analisis Gap 92
BAB 6 KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP 96
6.1 Pengertian Aplikasi SPBE 96
6.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE 96
6.3 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE 98
6.4 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE 99

6.4.1 Status Pengembangan Aplikasi 100
6.4.2 Status Penggunaan Aplikasi 100
6.4.3 Area Arsitektur Aplikasi SPBE 102
6.4.4 Unit Pengembang Aplikasi SPBE 103
6.4.5 Basis Aplikasi SPBE 105
6.5 Metadata Aplikasi SPBE 106
6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE 107
6.7 Analisis Gap 108
BAB 7 KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP 112
7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE 112
7.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur 112
7.3 Metadata Infrastruktur SPBE 113
7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah 120
7.4.1 Ketersediaan Topologi Jaringan 120
7.4.2 Ketersediaan *Bandwidth* 126
7.5 Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server 134
7.5.1 Daftar Server 134
7.5.2 Aspek Pusat Data 141
7.6 Komputasi 143
7.6.1 Komputasi Awan 143
7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server) 146
7.7 Sistem Penghubung Layanan 147
7.8 Perangkat Keras dan Lunak 150
7.8.1 Ketersediaan Perangkat Keras 150
7.8.2 Ketersediaan Perangkat Lunak 189
7.9 Permasalahan Infrastruktur SPBE 191
7.9.1 Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah 191
7.9.2 Permasalahan Ruang Server 192
7.9.3 Permasalahan Sistem Penghubung Layanan 193
7.9.4 Permasalahan Perangkat Keras 193
7.9.5 Permasalahan Perangkat Lunak 194
7.10 Analisis Gap 194

BAB 8 KONDISI EKSISTING KEAMANAN SPBE DAN ANALISIS GAP 203
Pengertian Keamanan SPBE 203
8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE 203
8.2 Metadata Keamanan SPBE 205
8.3 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE 208
8.4 Tata Kelola dan Manajemen Keamanan SPBE 209
8.4.1 Standart Keamanan Informasi 209
8.4.2 Prosedur/SOP Keamanan Informasi 210
8.5 Keamanan Teknis 211
8.6 Audit Keamanan SPBE 214
8.7 Permasalahan Keamanan SPBE 216
8.8 Analisis Gap 219
BAB 9 KONDISI EKSISTING TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE DAN ANALISIS GAP 223
9.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen SPBE 223
9.2 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE 223
9.2.1 Kebijakan SPBE 224
9.2.2 Pemantauan dan Evaluasi 227
9.2.3 Audit TIK 229
9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE 231
9.3.1 Manajemen Risiko SPBE 233
9.3.2 Manajemen Keamanan Informasi SPBE 234
9.3.3 Manajemen Data SPBE 236
9.3.4 Manajemen Aset TIK 237
9.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia 239
9.3.6 Manajemen Pengetahuan 240
9.3.7 Manajemen Perubahan 241
9.3.8 Manajemen Layanan SPBE 242
9.4 Kondisi Eksisting Rencana dan Anggaran SPBE 243
9.4.1 Kondisi Eksisting Tim Anggaran Pemerintah Daerah 243
9.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE 245
9.5 Analisis Gap 249

9.5.1 Analisis Gap Tata Kelola SPBE 249
9.5.2 Analisis Gap Manajemen SPBE 257
9.5.3 Analisis Gap Rencana Anggaran SPBE 260
BAB 10 KONDISI EKSISTING PENYELENGGARA SPBE DAN SDM TIK DAN ANALISIS GAP 263
10.1 Pengertian Penyelenggara SPBE 263
10.2 Referensi Penyelenggara SPBE dan SDM TIK 263
10.3 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE 264
10.3.1 Ketersediaan Tim Koordinasi 264
10.3.2 Ketersediaan Tim Evaluasi 266
10.3.3 Komitmen Pimpinan Daerah 268
10.4 Kondisi Eksisting SDM TIK 272
10.4.1 Ketersediaan SDM TIK 272
10.4.2 Pendidikan Terakhir SDM TIK 272
10.4.3 Kompetensi SDM TIK yang dimiliki 273
10.4.4 Status Kepegawaian SDM TIK 274
10.4.5 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK 275
10.4.6 Kompetensi Training dan Sertifikasi SDM TIK 276
10.5 Metadata SDM TIK 277
10.6 Analisis Gap 281
LAMPIRAN 284
Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE 285
Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data dan Informasi 319
Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD 346
Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE 364
Lampiran 6.1 Daftar Aplikasi SPBE 403
Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE 431
Lampiran 7.1 Ketersediaan *Bandwidth* Kominfo 464
Lampiran 7.2 Kondisi Eksisting Data Server 490
Lampiran 7.3 Kondisi Eksisting Komputasi Awan 502
Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Fasilitasi Komputasi 505
Lampiran 7.5 Sistem Penghubung Layanan 507

Lampiran 7.6 Kondisi Eksisting Perangkat Periferal 508
Lampiran 7.7 Kondisi Eksisting Permaslahaan Perangkat dan Jaringan 511
Lampiran 8.1 Kondisi Eksisting Standar Keamanan 528
Lampiran 8.2 Kondisi Eksisting Audit Kemanan SPBE 528
Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Anggaran SPBE tahun 2022 542
Lampiran 10.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan SDM TIK 558

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis 20
Gambar 3.2 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo 30
Gambar 3.3 Gambar Peta Proses Bisnis OPD Dinas Sosial 32
Gambar 3.4 Ketersediaan SOP Terhadap Layanan 33
Gambar 4.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi 38
Gambar 4.2 Kondisi Eksisting Bentuk Data 42
Gambar 4.1 Kondisi Eksisting Tempat Penyimpanan Data 43
Gambar 4.4 Kondisi Eksisting *Database* yang Digunakan 44
Gambar 4.5 Kondisi Eksisting Jenis Akses Data 44
Gambar 7.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE 113
Gambar 7.2 Topologi Umum Jaringan Intra Pemerintah 121
Gambar 7.3 Topologi Distribusi Jaringan Intra Pemerintah (JarKomDat) 122
Gambar 7.4 Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet OPD 123
Gambar 7.5 Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik 124
Gambar 7.6 Topologi Jaringan Kecamatan Wilayah Barat 124
Gambar 7.7 Topologi Jaringan Kecamatan Wilayah Timur 125
Gambar 7.8 Topologi Jaringan Pusat Server 126
Gambar 7.9 Penggunaan Komputasi Awan 145
Gambar 7.10 Kondisi Eksisting Penggunaan Sistem Operasi 190
Gambar 7.11 Persentase Penggunaan Aplikasi Perkantoran 190
Gambar 7.12 Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah 191
Gambar 7.13 Permasalahan Ruang Server 192
Gambar 7.14 Permasalahan Perangkat Keras 193
Gambar 7.15 Permasalahan Perangkat Lunak 194
Gambar 8.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE 205
Gambar 8.2 Diagram Hasil Evaluasi Indeks KAMI 215
Gambar 8.3 Diagram Permasalahan Keamanan SPBE 217
Gambar 9.1Penerapan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE 227
Gambar 9.2 Penerapan Audit TIK 229
Gambar 9.3 Penerapan Manajemen Risiko SPBE 233
Gambar 9.4 Grafik Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 235
Gambar 9.5 Penerapan Manajemen Data 236
Gambar 9.6 Penerapan Manajemen ASET TIK 238
Gambar 9.7 Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia 239
Gambar 9.8 Penerapan Manajemen Pengetahuan 240
Gambar 9.9 Penerapan Manajemen Perubahan 241
Gambar 9.10 Penerapan Manajemen Layanan SPBE 242
Gambar 10.1 Dukungan Bupati 269
Gambar 10.2 Dukungan Kepala Dinas 270

Gambar 10.3 Dukungan Sekertaris Dinas 271
Gambar 10.4 Ketersediaan SDM TIK..... 272
Gambar 10.5 Pendidikan Terakhir SDM TIK..... 273
Gambar 10.6 Kompetensi Staff TIK 274
Gambar 10.7 Status Kepegawaian..... 275
Gambar 10.9 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK 276

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Referensi Proses Bisnis 20
Tabel 3.2 Daftar Urusan Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo 23
Tabel 3.3 Jumlah Kelompok Urusan, Urusan dan OPD Kabupaten Situbondo 28
Tabel 3.4 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis 34
Tabel 3.5 Analisis GAP Proses Bisnis SPBE 35
Tabel 7.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) 114
Tabel 7.2 Atribut Metadata Komputasi Awan 114
Tabel 7.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform 115
Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server 115
Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan 116
Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Jaringan 117
Tabel 7.7 Atribut Metadata Perangkat Keamanan 117
Tabel 7.8 Atribut Perangkat Keras Periferal 118
Tabel 7.9 Atribut Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 118
Tabel 7.10 Atribut Jaringan Intra Pemerintah 119
Tabel 7.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi 119
Tabel 7.12 Eksisting Ketersediaan *Bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah 127
Tabel 7.13 Eksisting Ketersediaan *Bandwidth* Mandiri pada masing-masing OPD 130
Tabel 7.14 Eksisting Ketersedian *Server* Kabupaten Situbondo 135
Tabel 7.15 Kondisi Eksisting Aspek Ruang Server 141
Tabel 7.16 Eksisting Komputasi Awan 143
Tabel 7.17 Eksisting Fasilitas Komputasi 146
Tabel 7.18 Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan 147
Tabel 7.19 Eksisting Perangkat Keras PC 151
Tabel 7.20 Eksisting Perangkat Keras Laptop 153
Tabel 7.21 Eksisting Perangkat Keras Printer 155
Tabel 7.22 Total Eksisting Perangkat Keras Utama 157
Tabel 7.23 Eksisting Perangkat Keras Periferal 158
Tabel 7.24 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Modem* 172
Tabel 7.25 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Hub/Switch 173
Tabel 7.26 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Gateway *Router* 175
Tabel 7.27 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Access Point* 177
Tabel 7.28 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Repeater Wifi 180
Tabel 7.29 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Antena Outdoor 182
Tabel 7.30 Eksisting Perangkat Jaringan 185
Tabel 7.31 Kondisi Eksisting Perangkat Media Penyimpanan 185
Tabel 7.32 Analisis GAP Infrastruktur SPBE 195
Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE 203
Tabel 8.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan 205
Tabel 8.3 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE 206

Tabel 8.4 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE 206
Tabel 8.5 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE 206
Tabel 8.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE 207
Tabel 8.7 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE 207
Tabel 8.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan 208
Tabel 8.9 Eksisting Perangkat Keras Pendukung Keamanan Teknis 211
Tabel 8.10 Eksisting Pelaksanaan Kegiatan Indeks KAMI 214
Tabel 8.11 Eksisting Permasalan Keamanan SPBE 217
Tabel 8.12 Analisis GAP Keamanan SPBE 220
Tabel 9.1 Hasil Penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting 224
Tabel 9.2 Daftar Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo 244
Tabel 9.3 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE tiap OPD 245
Tabel 9.4 Analisis GAP Tatakelola SPBE 249
Tabel 9.5 Analisis GAP Manajemen SPBE 257
Tabel 9.6 Analisis GAP Rencana dan Anggaran SPBE 260
Tabel 10.1 Pemetaan Kompetensi SDM TIK dan Peta Okupasi 263
Tabel 10.2 Daftar Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo 265
Tabel 10.3 Daftar Tim Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo 267
Tabel 10.4 Metadata SDM TIK 278
Tabel 10.5 Analisa Gap Penyelenggara SPBE 281

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 menjabarkan secara umum sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dilanjutkan dengan menjabarkan pengertian Arsitektur SPBE, referensi hukum dan arsitektur, metodologi tahapan penyusunan dan diakhiri dengan penjelasan luaran yang akan dihasilkan pada kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE yang dimaksud adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Pelaksanaan SPBE harus dilakukan dengan 7 prinsip, yaitu efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. **Efektivitas** yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. **Keterpaduan** merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. **Kesinambungan** sebagai keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. **Efisiensi** menjadi bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. **Akuntabilitas** menjadi wujud kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. **Interoperabilitas** merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. **Keamanan** menjadi wujud kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

1.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **Arsitektur SPBE** adalah sebuah kerangka dasar yang mendeskripsian integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada level Pemerintah Daerah menerapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 tahun dan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Proses penyusunan arsitektur

SPBE Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. Selain menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, setiap Pemeintah Daerah juga berkewajiban melakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan. Proses reviu yang dilakukan harus berdasarkan pada:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE) atau
d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.3 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur SPBE terdiri dari referensi hukum dan referensi arsitektur SPBE yang dapat dijelaskan pada sub bab berikut ini.

1.3.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dibuat dengan mengacu dan memenuhi peraturan - peraturan pemerintah terkait dan terkini, meliputi:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik***.**
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014** tentang *Pemerintahan Daerah*.
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012** tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014** tentang *Jaringan Informasi Geospasial Nasional.*
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*
6. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang *Satu Data Indonesia.*
7. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
8. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003** tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
9. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016** tentang *Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.*
10. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016** tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika*

11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*.
12. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** tentang *Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.*
13. **Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019** tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.*
14. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang *Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
15. **Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020** tentang *Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
16. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
17. **Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang *Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.*
18. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.*
19. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang *Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE*.
20. **Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021** tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026*.
21. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021** tentang *Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.*
22. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022** tentang *Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.*
23. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2022** tentang *Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Peerintah Kabupaten Situbondo.*

24. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/70/P/001.3/2022** tentang *Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.*
25. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022** tentang *Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.*
26. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022** tentang *Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.*

1.3.2 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE harus memuat 2 hal, yakni **referensi arsitektur** dan **domain arsitektur**. Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Referensi Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku, mendukung pengambilan keputusan organisasi, mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai, meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **referensi arsitektur** mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Meskipun pada perpres 95/2018 tidak secara langsung menyebutkan jika arsitektur pemerintah daerah harus memuat referensi arsitektur, akan tetapi dikarenakan arsitektur SPBE Pemerintah daerah mengacu pada arsitektur nasional, maka arsitektur SPBE Pemerintah daerah juga harus memuat referensi arsitektur. Referensi arsitektur juga diperkuat dengan **indikator 11** pada **Permen PAN-RB 59/2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE baru akan bisa mencapai tingkat 3 apabila dokumen arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur SPBE. Berikut akan diilustrasikan terkait susunan kerangka kerja SPBE seperti pada **Gambar 1.1.**

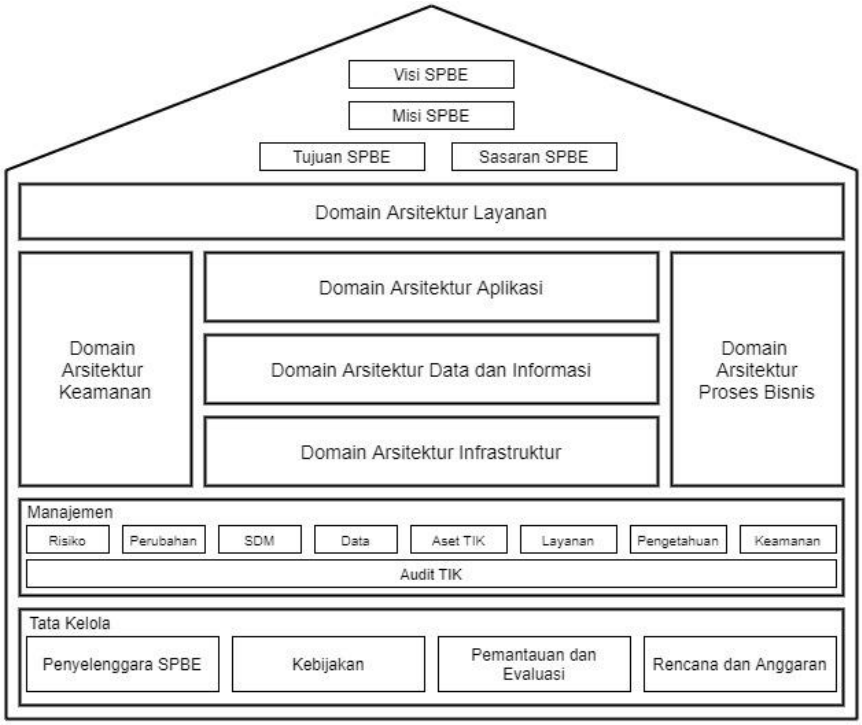

Gambar 1.1 Kerangka Kerja SPBE

(*sumber: Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional)*

Berdasarkan Gambar 1.1, Unsur-unsur SPBE ini antara lain rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. **Referensi Proses Bisnis (RAB)**
   RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua).
2. **Referensi Data dan Informasi (RAD)**
   RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua).
3. **Referensi Layanan (RAL)**
   RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua).

4. **Referensi Aplikasi SPBE (RAA)**
   RAA adalah kerangka kerja untuk mengategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 4 (empat) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi.
5. **Referensi Infrastruktur SPBE (RAI)**
   Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (tujuh) area di tingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK
6. **Referensi Keamanan SPBE (RAK)**
   RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2.

Arsitektur SPBE Nasional terdapat **6 (enam) domain referensi arsitektur** yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari **domain proses bisnis**, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan diatas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa referensi arsitektur yang saat ini sudah ada, seperti *Federal Enterprise Architecture Framework* Version 2 (FEAF v2) dan *The Australian Government Architecture* (AGA). Setelah melakukan studi literatur pada kedua referensi arsitektur tersebut, referensi yang paling sesuai yaitu FEAF v2. Oleh karena kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo, menggunakan *Federal Enterprise Architecture Framework* Version 2 (FEAF v.2) sebagai referensi arsitektur. Kerangka ini menjelaskan domain arsitektur yang selaras dengan domain arsitektur SPBE berdasarkan Perpres 95/2018. Tidak hanya itu, dalam FEAF v.2 juga sudah disebutkan artefak dan *reference model* untuk setiap domainnya.

1.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027 disesuaikan dengan Perpres 95/2018, dan mencakup 6 (enam) domain, yakni:

a. Domain **Layanan SPBE,**
b. Domain **Proses Bisnis,**
c. Domain **Data dan Informasi,**
d. Domain **Aplikasi SPBE,**
e. Domain **Infrastruktur SPBE**, dan
f. Domain **Keamanan SPBE**.

Masing-masing penyusunan domain juga akan memiliki **Referensi Arsitektur**, yakni:

a. Referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk seluruh Domain arsitektur,
b. Referensi arsitektur Layanan SPBE akan menggunakan **Perpres 95/2018** dan **Permenpan-RB 59/2020**,
c. Referensi arsitektur Proses Bisnis akan menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang **Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,**
d. Referensi arsitektur Data dan Informasi akan menggunakan kerangka kerja **Data Management Association (DAMA)**,
e. Referensi arsitektur Aplikasi akan menggunakan standar **90003:2018** tentang *computer software guideline***,**
f. Referensi infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE akan menggunakan standar **ISO 27001-series**.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:

a. Studi pustaka (*literature review*) untuk referensi metodologi, perangkat pengumpulan data dan pengukuran, serta analisisnya.
b. Survey *online* dan *offline* dengan menggunakan aplikasi berbasis web.
c. Observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dll).
d. Wawancara*.*
e. *Focus Group Discussion* dan *Desk Evaluation* untuk konfirmasi temuan dan rekomendasi akhir.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo, dirumuskan berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai praktik terbaik (*best practice*) di dunia, yakni:

1. Kerangka kerja (*framework*) TOGAF 9.1.
2. Warren McFarlan's Strategic Matrix (1983), khususnya untuk prioritasi sistem informasi.
3. ITIL 2011, khususnya untuk analisis struktur dan tupoksi unit TI.

1.5 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan ini terdiri dari **15 (lima belas)** proses untuk menghasilkan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo. Detail dari masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1) **Inisiasi Kegiatan.**
   Inisiasi kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan kesepakatan luaran dokumen
2) **Pembuatan Dokumen Administrasi**
   Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran kegiatan sampai serah terima pekerjaan
3) **Pembentukan Tim Proyek**
   Pembentukan tim proyek terdiri dari *project owner, project manager*, analis dan surveyor yang terlibat dalam kegiatan.
4) **Pengumpulan Dokumen eksisting**
   Dokumen eksisting didapatkan dari laman web Kabupaten Situbondo serta dokumen dari Dinas Komunikasi, dan Informatika. Dokumen dari Diskominfo dapat berupa RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, tupoksi, dan regulasi terkait.
5) **Sosialisasi Seluruh OPD**
   Sosialisasi dilakukan pada Hari Rabu, 2 November 2022 secara daring. Kegiatan ini mengundang perwakilan dari 17 Dinas, 6 Badan, 1 RSUD, 9 Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Inspektorat, 2 Kecamatan, dan 2 Puskesmas. Proses sosialisasi dilakukan pukul 09.00 – 14.00 WIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing perwakilan OPD tentang SPBE dan detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing OPD untuk kegiatan ini.
6) **Penjelasan Aplikasi Survei dengan Seluruh OPD**
   Kegiatan ini dilakukan pada Hari Rabu, 2 November 2022 secara daring yang dihadiri oleh seluruh OPD. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan pengisian form survei berbasis web. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman ke OPD terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan saat survei nantinya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan terhadap surveyor lapangan untuk berkoordinasi dengan PIC OPD terkait jadwal visitasi ke OPD.

7) **Pengisian Data Survei Secara Mandiri**

Pengisian data secara mandiri dilakukan oleh masing-masing PIC OPD, bekerjasama dengan seluruh bidang pada setiap OPD. Pengisian ini dilakukan pada laman web *http://survey-situbondo.pttati.co.id/*. Masing-masing OPD memiliki *username* dan *password* untuk melakukan pengisian. Pengisian secara mandiri dilakukan pada tanggal 2 – 11 November 2022.

8) **Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap OPD**

Survei lapangan dan Verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survei satu-per-satu tiap OPD. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian mandiri yaitu pada tanggal 14 - 18 November 2022. Sebelum melakukan verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti dokumen apa yang harus di unggah.

9) **Rekapitulasi data Hasil survei**

Rekapitulasi data hasil survei ini bertujuan untuk melihat kesenjangan data yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada tahap ini, tim proyek akan menghubungi PIC OPD terkait bilamana ada data yang dibutuhkan.

10) **Analisis Gap dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE**

Analisis *gap* dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi eksisting disusun berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari setiap domain.

11) **Verifikasi Data Eksisting dengan Seluruh OPD**

Verifikasi data eksisting ini dilakukan via *zoom* setelah data hasil survei sudah dianalisis menjadi dokumen eksisting Kabupaten Situbondo. Tujuannya untuk melakukan konfirmasi data eksisting agar valid dan sesuai dengan kondisi setiap OPD.

12) **Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE**

Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini adalah penyusunan Buku 2 hingga Buku 8. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan analisis eksisting dan hasil gap yang telah didapatkan. Hasil dari tahapan ini menghasilkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027.

13) **FGD dan Desk Evaluation data Peta Rencana**

FGD (*Forum Group Discussion)* bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran data peta rencana yang telah dianalisis kepada masing-masing OPD. FGD dilakukan secara *online* dengan perwakilan PIC dari seluruh OPD. Kegiatan ini melakukan verifikasi kesesuaian hasil analisis usulan peta rencana SPBE dalam kurun 5 tahun dengan kebutuhan tiap OPD.

14) **Presentasi Akhir**
Presentasi akhir dilakukan ketika keseluruhan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Situbondo telah selesai dianalisis. Presentasi mendatangkan perwakilan dari seluruh OPD di Kabupaten Situbondo.

15) **Revisi Dokumen & Penyerahan Dokumen Akhir**
Hasil dari presentasi akhir, tidak menutup kemungkinan untuk adanya revisi dokumen. Tim proyek akan melakukan pengecekan ulang dokumen berdasarkan revisi yang telah diberikan. Kemudian, hasil dari revisi akhir merupakan dokumen akhir **Arsitektur dan Peta Rencana SPBE** Kabupaten Situbondo **Tahun 2023-2027**.

1.6 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen **Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** Kabupaten Situbondo **2023-2027**, yang mencakup:

1) Buku 1: **Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo**
2) Buku 2: **Arsitektur Proses Bisnis dan SOP SPBE**
3) Buku 3: **Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE**
4) Buku 4: **Arsitektur Aplikasi SPBE**
5) Buku 5: **Arsitektur Infrastruktur SPBE**
6) Buku 6: **Arsitektur Keamanan SPBE**
7) Buku 7: **Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE**, dan **Penyelenggara SPBE**
8) Buku 8: **Peta Rencana**, dan **Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE** ***Executive Summary***
9) **Draf Perbup SPBE Kabupaten Situbondo**

BAB 2
KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Bab 2 ini menjelaskan tentang deskripsi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan harapan predikat penilaian yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan RPJMD. Pencapaian indeks SPBE selanjutnya melibatkan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.1 Pemerintah Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km2 atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7^{o} 35' - 7^{o} 44' Lintangselatan dan 113^{o} 30' - 114^{o} 42' Bujur Timur. Secara administrative, sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, Sebelah Selatan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km^2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km^2. Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0º-45º, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km^2 (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km^2 (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km^2 (0,53%) selalu tergenang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian;dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

2.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Situbondo

Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

" Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, dan Berdaya."

Misi Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2021–2026, sebagai penjabaran dari visi, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Misi 1:** Membangun Masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman.
2. **Misi 2**: Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan.
3. **Misi 3:** Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing.
4. **Misi 4**: Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh.

2.1.2 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur SPBE diharapkan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE selaras dengan misi nomor 4 (empat) yaitu "**Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh.**" Dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan kinerja tata Kelola pemerintahan yang baik dan melayani. Salah satu upaya yang dapat dicapai yaitu dengan adanya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo 2023-2027.

2.2 Visi dan Misi SPBE

Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo disusun berdasarkan visi misi Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027 yaitu **" Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, Dan Berdaya".** Untuk mewujudkan dan mendukung visi SPBE, adapun misi SPBE Kabupaten Situbondo yakni sebagian berikut:

- **Misi 1:** Membangun pelayanan publik berbasis elektronik terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat Situbondo yang Beriman Dalam Keberagaman.
- **Misi 2**: Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan sebagai bentuk pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- **Misi 3:** Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing dengan dukungan fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
- **Misi 4**: Membangun penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik profesional, bersih, dan tangguh berbasis elektronik terpadu.

2.3 Tujuan dan Sasaran SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027 adalah

1) Penyelenggaraan pelayanan public berbasis elektronik terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat Situbondo yang beriman dalam keberagaman.
2) Pemberdayaan Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan sebagai bentuk pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3) Terwujudnya Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing dengan dukungan fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
4) Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik profesional, bersih, dan tangguh berbasis elektronik terpadu.

2.4 Hasil Penilaian SPBE Kabupaten Situbondo

Berdasarkan indikator penilaian pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.* Kemen PAN-RB melakukan evaluasi SPBE bersekala nasional, dimana seluruh (K/L/D/I) memiliki indeks penilain masing-masing. Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya. Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks. Nilai ini dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Detail nilai indeks dan predikat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

(sumber: Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE)

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh Kemen PAN-RB, hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan nilai **indeks 2,43 dengan predikat Cukup.** Detail hasil penilaian dapat dilihat pada **Gambar 2.1.**

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	2,43 (Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,43
Domain Kebijakan SPBE	2,70
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,27
Penerapan Manajemen SPBE	1,38
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

Gambar 2.1 Indeks SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan predikat "cukup" dengan nilai indeks SPBE adalah 2,43. Nilai indeks ini diperoleh dari beberapa domain dalam indeks penilaian SPBE ini yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tatakelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Dalam hasil penilaian indeks SPBE terdapat aspek target dan hasil indeks SPBE, hal ini bertujuan untuk melihat gap ketercapaian dari masing-masing domain. Terdapat beberapa domain yang masih belum terpenuhi dan dibawah nilai target yang ditentukan. **Domain Kebijakan SPBE** yang mencakup aspek Kebijakan Internal terkait tata Kelola SPBE (**nilai 2,70**). Domain

Tata Kelola SPBE (**nilai 2,00**) yang mencakup aspek perencanaan Strategi SPBE (**nilai 2,25**), aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (**nilai 2,00**), dan Penyelenggara SPBE (**nilai 1,50**). Domain Manajemen SPBE (**nilai 1,27**) yang mencakup aspek penerapan manajemen (**nilai 1,38**) dan aspek Audit TIK (**nilai 1,00**). Domain Layanan SPBE (**nilai 3,00**) yang mencakup aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (**nilai 3,00**) dan aspek layanan publik berbasis elektronik (**nilai 3,00**).

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat pada Penggunaan Aplikasi SIPD, LPSE, dan SP4N Lapor menjadi kekuatan dalam memberikan layanan khususnya pada Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan, dan Pelaporan dikarenakan menggunakan aplikasi dari Instansi Pusat yang telah terintegrasi baik secara vertikal ke Instansi Pusat seperti Kementerian Dalam negeri, LKPP, dan Kementerian PANRB. Kab. Situbondo juga telah menggunakan aplikasi mandiri yang telah terintegrasi untuk Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Publik Sektor (SIPESAT dan e-Berkah). Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Situbondo masih terdapat kelemahan, khususnya pada aspek penerpaan Manajemen dan Audit TIK. Di kedua aspek tersebut belum adanya perencanaan kegiatan pelaksanaan secara definitif yang dapat dicantumkan pada Peta Rencana SPBE, sehingga ketika Indikator 12 telah terpenuhi secara lengkap maka domain manajemen dapat dilakukan dengan komprehensif. Oleh karenanya kegaiatan perencanaan baik itu dalam penerapan manajemen SPBE dan Audit diperlukan agar kegiatan bisa dikendalikan dan dievaluasi capaiannya. Sedangkan kelemahan pada aspek penyelenggara SPBE belum adanya bukti dukung. Dengan demikian untuk dapat menyelesaikan kelemahan yang ada dapat dilakukan dengan penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027. Arsitektur SPBE ini nantinya akan berfungsi sebagai dasar dari Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan pengembangan SPBE selama 5(lima) tahun kedepan. Apa yang akan dilakukan nantinya, sudah memiliki dasar yang telah direncanakan, sehingga pembangunan akan terus terarah.

2.5 Indeks SPBE yang Ingin Dicapai Pemerintah Kabupaten Situbondo

Mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memuat 47 indikator yang dijadikan pedoman penilaian Indeks SPBE. Berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2018-2023, telah menyebutkan Target Indeks SPBE pada indikator kinerja dari Misi ke 2 sasaran ke 2 yaitu meningkatnya kinerja pemerintah dalam pelayanan publik yang berkualitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berbasis teknologi. Target nilai indeks SPBE disajikan pada **Gambar 2.2.**

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian		Target					Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
4	Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh	Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	68,74	69,52 - 70,02 *	70,03 - 70,53	70,54 - 71,04	71,05 - 71,55	71,56 - 72,06	72,07 - 72,57	72,07 - 72,57		
		Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital	Indeks SPBE	Indeks	3,48	2,43	3,48 – 3,49	3,50 – 3,59	3,60 – 3,79	3,80 – 4,19	4,20 – 4,25	4,20 – 4,25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
													URUSAN STATISTIK	
													URUSAN PERSANDIAN	
													URUSAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,66	80,63	79,01 - 80,00	80,01 - 81,00	81,01 - 82,00	82,01 - 83,00	83,01 - 84,00	83,01 - 84,00	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
													URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
													URUSAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													URUSAN KOORDINASI DAN KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
													URUSAN KEWILAYAHAN DAN KOORDINASI	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Gambar 2.2 Target Indeks SPBE pada RPJMD Kabupaten Situbondo

Berdasarkan nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 yaitu **2,43,** dimana hasil dari laporan hasil evaluasi yang di diterbitkan oleh Kemen PAN-RB **telah memenuhi target RPJMD**. Sedangkan untuk target nilai SPBE ditahun **2022 sebesar 2,63**. Sesuai hasil diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengharapkan untuk mendapatkan nilai indeks sebesar **3,63** pada tahun **2027**. Target Indeks SPBE yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dijabarkan pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2 Target Nilai Indeks SPBE Pemkab Situbondo 2023-2027

2023	2024	2025	2026	2027
2,83	3,03	3,23	3,43	3,63

Adapun aspek-aspek yang harus didongkrak oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ada 5 aspek yaitu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Indikator yang harus ditingkatkan pada masing-masing aspek yaitu

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (aspek 1)
   - Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 4)
   - Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (indikator 8)
2. Perencanaan Strategis SPBE (aspek 2)
   - Arsitektur SPBE Pemerintah Dearah (indikator 11)
   - Rencana dan Anggaran SPBE (indikator 13)
   - Inovasi Proses Bisnis SPBE (indikator 14)
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (aspek 3)
   - Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 15)

- Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (indikator 18)

4. Penyelenggara SPBE (aspek 4)
   - Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah (indikator 19)
   - Kolaborasi Penerapan SPBE (Indikator 20)
5. Penerapan Manajemen SPBE (aspek 5)
   - Penerapan Manajemen Risiko SPBE (indikator 21)
   - Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22)
   - Penerapan Manajemen Data (indikator 23)
   - Penerapan Manajemen Aset TIK (indikator 24)
   - Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (indikator 25)
   - Penerapan Manajemen Pengetahuan (indikator 26)
   - Penerapan Manajemen Perubahan (indikator 27)
6. Pelaksanaan Audit TIK (Aspek 6)
   - Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (Indikator 29)
   - Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (Indikator 30)
   - Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (Indikator 31)
7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (aspek 7)
   - Layanan Kepegawaian (Indikator 36)
   - Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (indikator 38)
   - Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Indikator 39)
   - Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Indikator 40)
   - Layanan Kinerja Pegawai (Indikator 41)
8. Layanan Publik Berbasis Elektronik (aspek 8)
   - Layanan Data Terbuka (Indikator 43)
   - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH (indikator 44)

Dokumen Arsitektur SPBE merupakan dokumen yang akan dievaluasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai evaluasi SPBE hingga 3,63 ditahun 2027. Aspek penilaian SPBE yang masih memiliki kekurangan seperti Perencanaan Strategis SPBE dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat lebih ditingkatkan lagi.

BAB 3
KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP

Pada bab 3 menjelaskan kondisi saat ini mengenai **Proses Bisnis** pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Setelah mengetahui kondisi saat ini, selanjutnya akan dibahas kondisi yang ideal untuk dicapai, setelah itu akan didapatkan gap yang ada diantara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menemukan strategi pembangunan yang tepat selama 5 (lima) tahun mendatang.

3.1 Pengertian Proses Bisnis

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, menjelasakan bahwa yang dimaksud Proses Bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses Bisnis mencerminkan seberapa efisien dan efektif oprasional dalam pelaksanaan kegiatan, Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi, Keamanan dan Layanan SPBE. Proses Bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan, Proses Bisnis juga disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Menurut **Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018** Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Berdasarkan **Rancangan Draf Arsitektur SPBE Hasil Harmonisasi** Pada domain Arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

c. fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusatdan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3(tiga) dan 4(empat) oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur proses bisnis pada kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat terlihat pada Gambar 3.1. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui Referensi Arsitektur Proses Bisnis dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

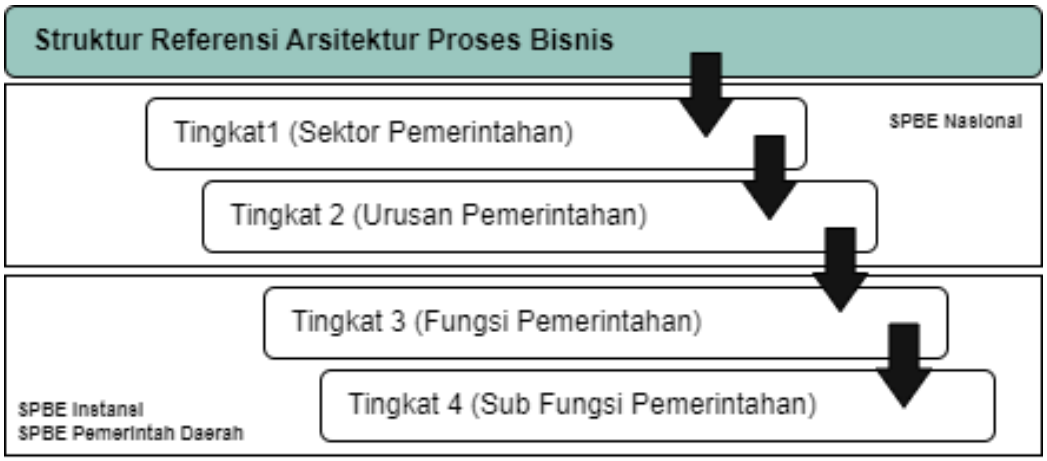

Gambar 3.1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.3 Referensi Proses Bisnis (RAB)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional telah dijelaskan pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis, bahwa Domain proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di tingkat nasional yang mengacu pada Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait proses bisnis dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Referensi Proses Bisnis

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
0102	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tunggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
	Perempuan	pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidangkeolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretarian Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara.

3.4 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Situbondo

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kondisi Proses Bisnis Pemerintahan Kabupaten Situbondo pada saat ini. Hal-hal yang akan dijelaskan yaitu mengenai urusan pemerintahan Kabupaten Situbondo, ketersediaan peta proses bisnis level kota pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo, ketersediaan peta proses bisnis level OPD di Pemerintahan Kabupaten Situbondo dan Ketersediaan dokumen standar operasional (SOP) di pemerintahan Kabupaten Situbondo.

3.4.1 Daftar Urusan

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 pasal 25 dalam penyusunan proses bisnis kepala daerah berkoordinasi, sehingga dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah pada bidang aparatur negara dan dalam negeri. Pada Urusan di Pemerintahan Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 8 Kelompok Urusan. Delapan kelompok urusan tersebut yaitu terdapat **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 5 urusan dan 9 OPD), **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 18 urusan dan 14 OPD), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (terdapat 6 urusan dan 5 OPD), **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** (terdapat 2 urusan dan 10 OPD), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (terdapat 5 urusan dan 4 OPD), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD), **Unsur Kewilayahan** (terdapat 1 urusan dan 2 OPD), **Unsur Pemerintahan Umum** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD). Masing-masing dari kelompok urusan tersebut diuraikan pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Daftar Urusan Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	RAB 06.01 Pendidikan
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pelayanan Dasar		Rsud Dr. Abdoer Rahem	RAB 04.01 Kesehatan
		Puskesmas Situbondo	RAB 04.01 Kesehatan
		Puskesmas Bungatan	RAB 04.01 Kesehatan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 04.01 Kesehatan
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 03.04 Perumahan
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	RAB 05.02 Keamanan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB 05.02 Keamanan
	Sosial	Dinas Sosial	RAB 04.02 Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	RAB 06.02 Ketenagakerjaan
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	RAB 02.03 Pertanian
	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 03.06 Pertanahan
	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 03.01 Pekerjaan Umum
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAB 07.05 Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB 03.07 Kependudukan
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAB 03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
	Pengendalian	Dinas Pemberdayaan	RAB 03.07

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
	Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Kependudukan
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAB 03.03 Transportasi
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	RAB 09.03 Informasi RAB 09.04 Komunikasi
	Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	RAB 02.09 Koperasi RAB 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB 02.08 Investasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata	RAB 06.04 Pemuda RAB 06.05 Olahraga
	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	RAB 09.03 Informasi
	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	RAB 01.01 Pertahanan
	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB 08.02 Kebudayaan
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi RAB 06.01 Pendidikan
	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi RAB 09.06 Aparatur Negara
Urusan Pemerintahan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAB 02.06 Perikanan RAB 07.04 Kelautan RAB 02.05 Peternakan
	Pariwisata	Dinas Pariwisata	RAB 02.11 Pariwisata

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAB 02.03 Pertanian
		Dinas Pertanian dan Pangan	RAB 02.03 Pertanian
	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	RAB 02.02 Perdagangan
	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	RAB 02.01 Industri
	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	RAB 03.02 Transmigrasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 08.01 Agama
		Bagian Hukum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 05.01 Hukum
		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 02.07 Badan Usaha Milik Negara
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAB 09.01 Dalam Negeri
		Bagian Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
		Bagian Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
			Nasional
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.04 Komunikasi
		Bagian Perencanaan dan Keuangan	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.02 Keuangan
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAB 09.02 Keuangan
	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	RAB 09.02 Keuangan
	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	RAB 09.06 Aparatur Negara
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB 06.01 Pendidikan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	Inspektorat	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 09.06 Aparatur Negara
Unsur Kewilayahan	Kecamatan	Kecamatan Bungatan	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
		Kecamatan Situbondo	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB 01.01 Pertahanan RAB 05.02 Keamanan

Pada kondisi eksisting, urusan di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 40 urusan dari total 45 urusan Referensi Arsitektur Proses bisnis sesusi Peraturan Presiden, Sehingga terdapat 5 Referensi Arsitektur Proses Bisnis yang terbagi ke dalam urusan yaitu **Hubungan Luar Negeri, Perkebunan, Pertambangan, Energi, dan Kehutanan**. Pada **Tabel 3.2** terdapat kelompok urusan yang memiliki jenis urusan paling banyak diantara kelompok urusan yaitu kelompok **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** dengan jumlah 18 jenis urusan. Jumlah dari masing-masing jenis urusan dan jumlah OPD yang mengampu dalam masi-masing urusan diuraikan pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Jumlah Kelompok Urusan, Urusan dan OPD Kabupaten Situbondo

Kelompok Urusan	Jumlah Urusan	Jumlah OPD
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	5	9
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	19	14
Urusan Pemerintahan Pilihan	6	5
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	10
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	4
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	1
Unsur Kewilayahan	1	2
Unsur Pemerintahan Umum	1	1

Pada Tebel 3.3 terdapat 5 (lima) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, 18 (delapan belas) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, 6 (enam) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pemerintahan Pilihan**, 2 (dua) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pendukung Pemerintahan**, 5 (lima) jenis urusan pada **kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, 1 (satu) jenis urusan pada 3 kelompok urusan yaitu **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan**, dan **kelompok Unsur Pemerintahan Umum**. Diantara 8 Kelompok Urusan terdapat 3 kelompok urusan yang memiliki jenis urusan paling sedikit yaitu kelompok **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan** yang memiliki jenis urusan **Inspektorat Daerah**, kelompok **Unsur Kewilayahan** yang memiliki jenis urusan **Kecamatan**, dan **kelompok Unsur Pemerintahan Umum** yang memiliki jenis urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik**.

3.4.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Kabupaten

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, serta strategi organisasi. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018**, penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0
   Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
b. Level 1
   Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
c. Level Selanjutnya (Level n)
   Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Berdasarkan hasil survei pada kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki peta proses bisnis level kabupaten yang mana pembuatan peta proses bisnis ini telah mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 Tentang** Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Peta proses bisnis level kabupaten milik Pemerintah Kabupaten Situbondo diidentifikasikan ke dalam 3 proses yaitu Proses Bisnis Utama, Proses Bisnis Manajerial dan Proses Bisnis Pendukung. Penggambaran peta proses bisnis ini telah sesuai dengan prinsip *Definitif,* Urutan, Pelanggan, Nilai Tambah, Keterkaitan, Fungsi Silang, Sederhana, *Konsensus Subyektif.* Berikut merupakan gambar peta proses bisnis level Kabupaten Pemerintah Situbondo.

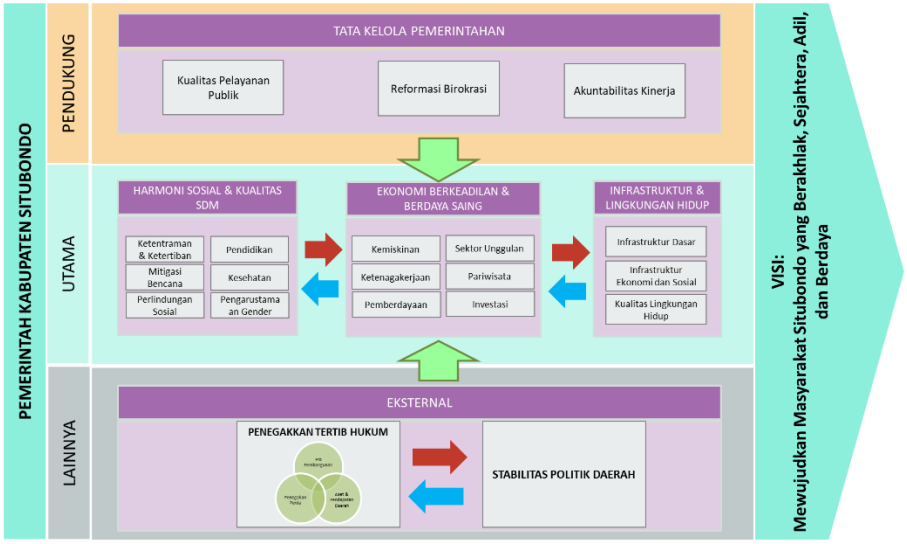

Gambar 3.2 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo

Pada **Gambar 3.2** merupakan peta proses bisnis Level Kabupaten milik Kabupaten Situbondo, Penyusunan peta proses bisnis tersebut menggunakan jenis gambar Penyusunan peta proses bisnis tersebut telah mengacu Permenpan no 19 Tahun 2018, dan diidentifikasikan dengan mengacu pada RPJMD. Proses bisnis di atas terdiri dari proses pendukung atau manajerial, proses inti, dan proses lainya. Pada proses pendukung atau manajerial diidentifikasi dari sasaran RPJMD yang merupakan proses untuk oprasional atau manajemen, serta dapat memastikan proses inti berjalan dengan baik OPD. Pada proses inti diidentifikasi dari sasaran RPJMD yang dapat menjadi aliran utama dalam sebuah proses. Dan proses lainnya diidentifikasi dari non OPD atau ekternal yang tidak berperan langsung pada proses inti tetapi memberi manfaat. Peta proses bisnis disusun sampai level 0, karena level 1 hingga level n diserahkan pada masing-masing OPD Kabupaten Situbondo.

3.4.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level OPD

Berdasarkan hasil survei pada kondisi eksisting di Pemerintahan Kabupaten Situbondo hampir seluruh OPD telah memiliki Peta Proses Bisnis. Terdapat 38 Perangkat Daerah (OPD) (95%) di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang **sudah memiliki Peta Proses Bisnis** dari keseluruhan 40 OPD terdapat. Sedangkan 2 OPD (5%) **belum memiliki Peta Proses Bisnis**. Berikut merupakan visualisasi ketersediaan peta proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

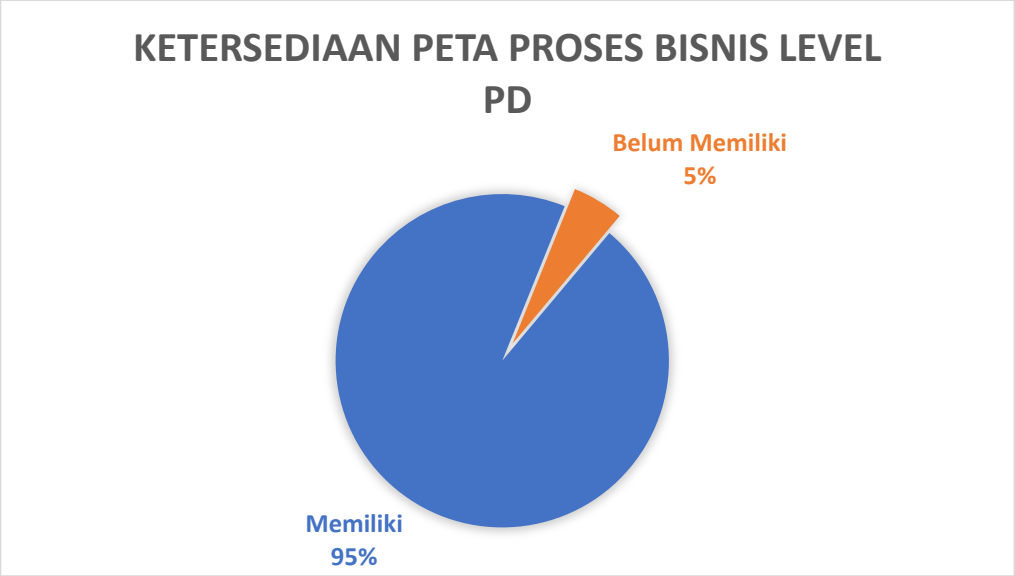

Gambar 3.1 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level OPD

Berdasarkan Gambar 3.1 dari 38 OPD (95%) yang memiliki peta proses bisnis Seluruhnya telah sesuai dengan **Permen PAN-RB No 19 Tahun 2018.** Sedangkan 2 OPD (5%) Tidak memiliki peta proses bisnis. Karena untuk penyusunan peta proses bisnis level OPD di naungi oleh satu OPD yaitu Bagian Organisasi, dan dalam penyusunannya ada kaitannya dengan peta proses bisnis level Kabupaten.

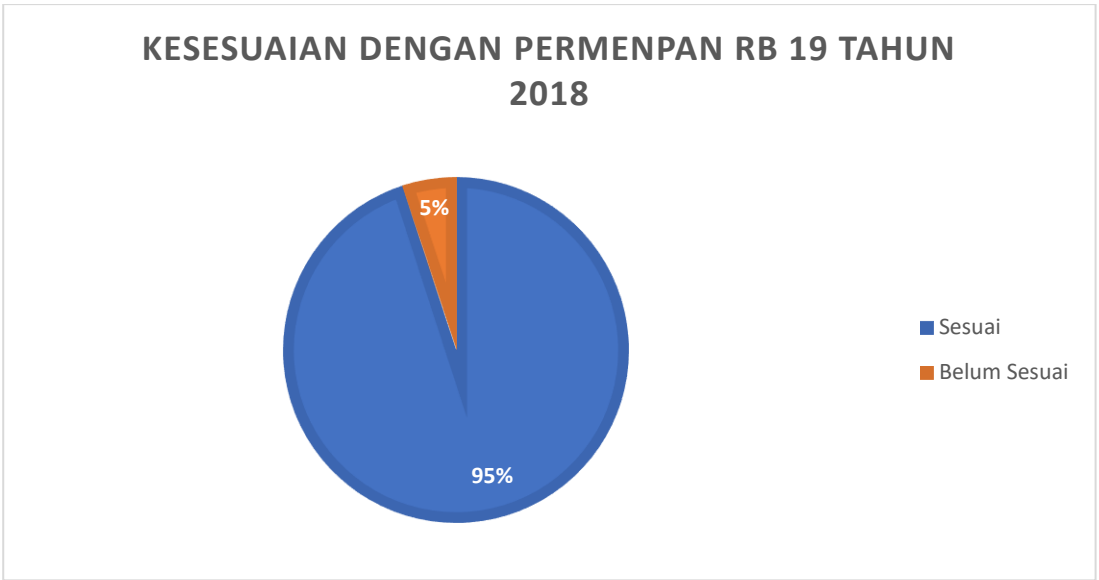

Gambar 3.2 Kesesuaian Dengan Permepan RB 19 Tahun 2018

Berdasarkan kondisi eksisting Gambar 3.2 merepresentasikan hampir seluruh perangkat daerah telah memiliki peta proses bisnis yang telah mengacu pada **Permen PAN-RB No 19 Tahun 2018.** Terdapat 38 OPD yang memiliki peta proses bisnis dari keseluruhan 40 OPD**,** serta terdapat 2 OPD yang belum memiliki peta proses bisnis karena tergabung dalam OPD lainya. Adapun 2 OPD

yang tidak memiliki peta proses bisnis tersebut yaitu **RSUD dr. Abdoer Rahem** dan **Puskemas Bungatan** karena tergabung dengan **Dinas Kesehatan**. Selanjutnya berikut dapat diambil contoh, Peta Proses Bisnis yang telah mengacu pada Peraturan MENPAN-RB Nomer 19 Tahun 2018 yaitu milik **Dinas Sosial**. Untuk proses bisnis Dinas Sosial jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.3.**

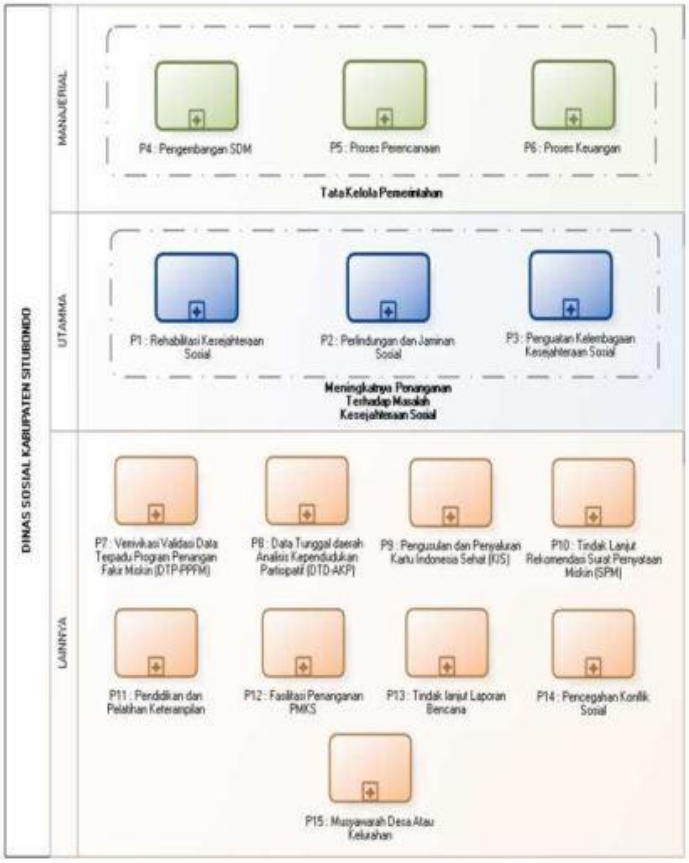

Gambar 3.3 Gambar Peta Proses Bisnis OPD Dinas Sosial

Gambar 3.3 merupakan Peta Proses Bisnis dari **Dinas Sosial.** Peta proses bisnis yang telah dibuat merupakan peta proses bisnis level 0 dari **Dinas Sosial** dimana terdapat proses utama yang juga didukung oleh proses manajerial dan proses lainnya. Pada Gambar 3.5 Peta Proses Bisnis OPD Dinas Sosial terdiri dari 3 proses manajerial ,3 proses utama dan 9 proses lainnya. Pada proses utama didukung oleh sub proses serta proses lainnya serta proses manajerial yang berkaitan dengan proses tersebut guna dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan utama. Penyusunan peta proses bisnis level OPD merupakan level satu dari peta proses bisnis level kabupaten, Pada proses manajerial diidentifikasikan dari Renstra tiap OPD pada bagian urusan penunjang pemerintahan daerah, kemudian pada proses inti diidentifikasikan dari urusan di masing-masing OPD, dan pada proses lainnya berasal dari instansi lintas sektor yang berkaitan untuk mendukung proses inti.

3.4.4 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur atau yang biasa dikenal dengan singkatan SOP merupakan serangkaian instruksi atau prosedur tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, untuk memberi informasi terkait bagaimana dan kapan harus dilakukannya sebuah aktivitas serta di mana dan oleh siapa dilakukan. Menurut Peraturan MENPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 ada empat faktor yang bisa dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi yaitu berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur, berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur, siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP dan apa tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan SOP ini.

Format terbaik SOP adalah format yang sederhana sehingga dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOP. Beberapa manfaat dari penyusunan SOP di setiap layanan yang dimiliki adalah SOP dapat menjamin konsistensi pelayanan terhadap masyarakat, SOP membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan layanan, serta SOP juga membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Ketersediaan SOP terhadap layanan pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo telah divisualisasikan pada Gambar 3.4.

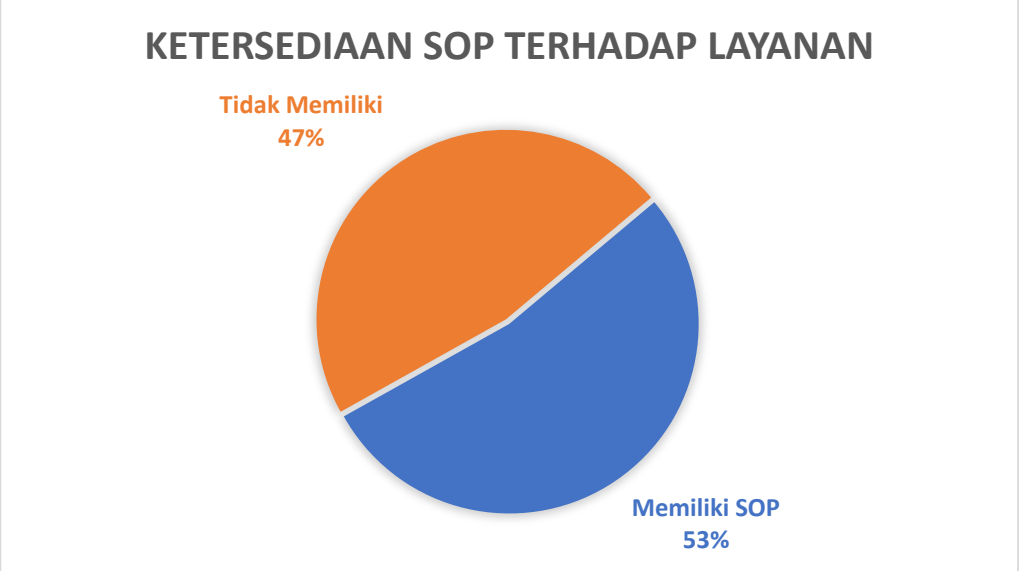

Gambar 3.4 Ketersediaan SOP Terhadap Layanan

Representasi data berdasarkan Gambar 3.4 diatas dijelaskan ketersediaan Dokumen SOP Terhadap layanan. Sebagaimana tujuan SOP ini adalah sebagai

pedoman kepada masyarakat dalam memberikan proses pelayanan. Berdasarkan hasil survei, yang telah dilakukan terdapat **640** total **Ketersediaan SOP** yang dimiliki oleh 40 OPD. Katersediaan SOP seharusnya **mendukung** setiap layanan yang dimiliki Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Tetapi hanya terdapat 338 **(53%) SOP** yang **telah mendukung** layanan eksisting Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Sementara terdapat **302 (47%) SOP** yang **belum mendukung layanan** dikarenakan terdapat beberapa OPD yang menyatakan bahwa tidak terdapat layanan yang aktif untuk SOP tersebut, dan terdapat ketidaksesuaian Layanan dengan SOP yang mendukung. Tetapi terdapat perbedaan hasil perhitungan ketersediaan SOP pada kondisi layanan eksisting yaitu terdapat **398 layanan** yang belum **didukung SOP**. Menurut hasil kalkulasi yang dilakukan, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Ketersediaan SOP paling banyak yakni sebanyak **104 SOP**, dan seluruh Ketersediaan SOP tersebut telah mendukung seluruh layanan ekisiting.

3.5 Metadata Proses Bisnis SPBE

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili Referensi Arsitektur proses bisnis. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari 9 (Sembilan) atribut yaitu terdiri dari ID proses bisnis, Nama Bisnis/Urusan, Uraian Bisnis/Urusan, Kode Model Referensi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai IKU Target, Nilai IKU Realisasi, dan ID metadata terkait. Referensi Arsitektur di Metadata Proses Bisnis di Identifikasikan dari **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Detail dari metadata Proses(SE). Detail Metadata Proses Bisnis SPBE yang telah dianalisis dapat dilihat pada **LAMPIRAN 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE**

Tabel 3.4 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis

No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

3.6 Analisis GAP

Setelah mengetahui kondisi eksisting pada pemerintah Kabupaten Situbondo dan dilakukan analisis, kondisi tersebut akan dibandingkan dengan kondisi ideal proses bisnis. Hasilnya akan ditemukan GAP antara Kondisi eksisting dan kondisi ideal di pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan analisis GAP dijabarkan pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.5 Analisis GAP Proses Bisnis SPBE

Parameter	Referensi	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Kabupaten	Peraturan MENPAN-RB No 19 Tahun 2018	Memiliki Peta Proses Binis Level Kabupaten menggunakan level atau tingkatan. Peta Proses Bisnis terdiri dari 3 proses Pendukung atau Manajerial 3 utama , dan 2 proses lainnya.	**Memiliki** Peta Proses Bisnis Level Kabupaten yang sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 19 Tahun 2021	Kabupaten Situbondo memiliki peta proses bisnis level kabupaten yang masih belum sesuai dengan PERMENPAN-RB o. 19 Tahun 2018.
Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level OPD	Peraturan MENPAN-RB No 19 Tahun 2018	Terdapat 38 OPD yang **memiliki Peta Proses Bisnis.** Diantara 38 OPD memiliki Peta Proses Bisnis **yang sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 19 Tahun 2018**	Semua OPD memiliki Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 19 Tahun 2018	Terdapat 2 OPD yang masih **belum memiliki Peta Proses Bisnis.** 2 OPD tersebut adalah RSUD dr. Abdoer Rahem dan Puskemas Bungatan.
Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur Terhadap Layanan	Peraturan MENPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012	terdapat 338 (53%) SOP yang **telah mendukung** layanan eksisting Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.	Layanan SPBE sebaiknya didkung dengan adanya SOP sehingga lebih terstruktur dalam melaksanan pelayanan	terdapat 302 (47%) SOP yang **belum mendukung layanan**. Dan terdapat perbedaan hasil perhitungan ketersediaan SOP pada kondisi layanan eksisting yaitu terdapat 398 layanan

			urusan pemerintahan.	yang belum **didukung SOP**. Berapa OPD yang masih belum memiliki SOP yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bagian Umum, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pertanian dan Keahanan Pangan.

BAB 4
KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI DAN ANALISIS GAP

Pada bab 4 akan dibahas mengenai kondisi terkini domain data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan akan dimulai dari penjelasan pengertian, struktur referensi dan referensi arsitektur data dan informasi. Setelah itu, akan masuk ke penjabaran kondisi dan masalah terkait data dan informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini. Pembahasan akan diakhiri dengan analisis gap kondisi data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

4.1 Pengertian Data dan Informasi

Pengertian data dan informasi dijelaskan pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 sebagai semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antara instansi pusat dan/atau Pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi. Penggunaan data dan informasi di Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang menjelaskan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

Penjelasan Satu Data juga dimuat pada Peraturan Bupati Situbondo nomor 32 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Dengan adanya Satu Data Indonesia, harapannya data dapat dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat. Tujuan Satu data Indonesia tersebut dapat dicapai melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia pada Kabupaten Situbondo, saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo telah membentuk Forum Satu Data Indonesia. Hal tersebut dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor 179 tentang Penyelenggaran, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo yang mengatur terkait Forum Satu Data Kabupaten Situbondo. SK tersebut memuat susunan anggota Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data.

4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan SDI. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD. Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan
2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).

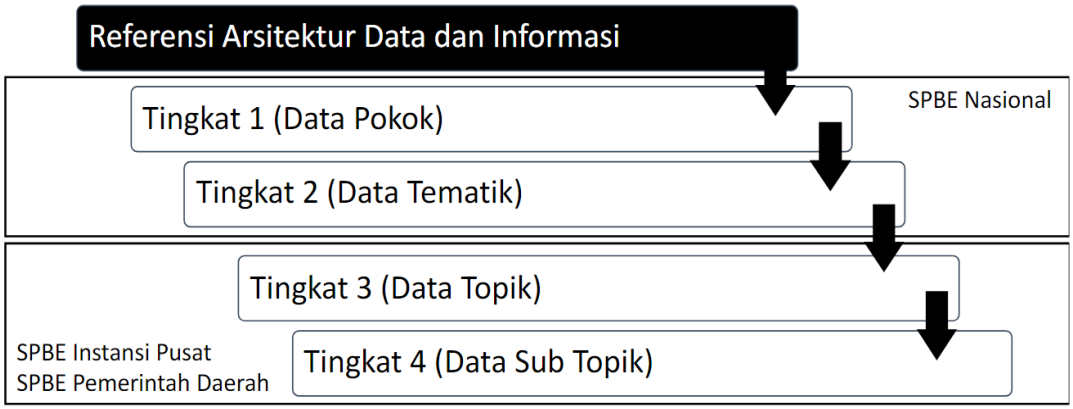

Gambar 4.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

IPPD, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya yaitu tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimana pada Gambar 4.1.

1) Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (tiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional.
2) Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi sebagaimana pada Gambar 4.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data tingkat nasional yang mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil Dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tunggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretarian Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Tabel 4.1 menjabarkan terkait RAD SPBE Nasional di tingkat 1 (satu) yang terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok yaitu informasi pertahanan dan luar negeri hingga data pendukung umum. Sedangkan untuk data tematik di tingkat 2 (dua) terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) data. Data tersebut merupakan data yang memiliki kode RAD 01.01 hingga RAD 10.04.

4.4 Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Menurut hasil survei, saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo mengelola data dan informasi sejumlah **total 360 data**. Pada bagian ini akan menjelaskan kondisi data dan informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini. Kondisi data dan informasi akan dibahas dari segi bentuk data, tempat penyimpanan, aplikasi *Database*, jenis akses dan integrasi data yang ada.

4.4.1 Bentuk Data yang dimiliki

Bentuk data dibagi menjadi 3 jenis, yaitu *online*, *offline* serta *online* dan *offline*. Data yang berbentuk *online* merupakan data yang disimpan pada *Database* suatu aplikasi yang digunakan oleh OPD. Data yang *offline* berarti data tersebut hanya tersimpan di komputer milik OPD terkait. Serta untuk data yang berbentuk *online* dan *offline* berarti OPD mengelola data tersebut pada suatu aplikasi dan pada komputer OPD. Untuk kondisi sebaran bentuk data pada Pemerintah Kabupaten SItubondo dapat dilihat pada Gambar 4.2.

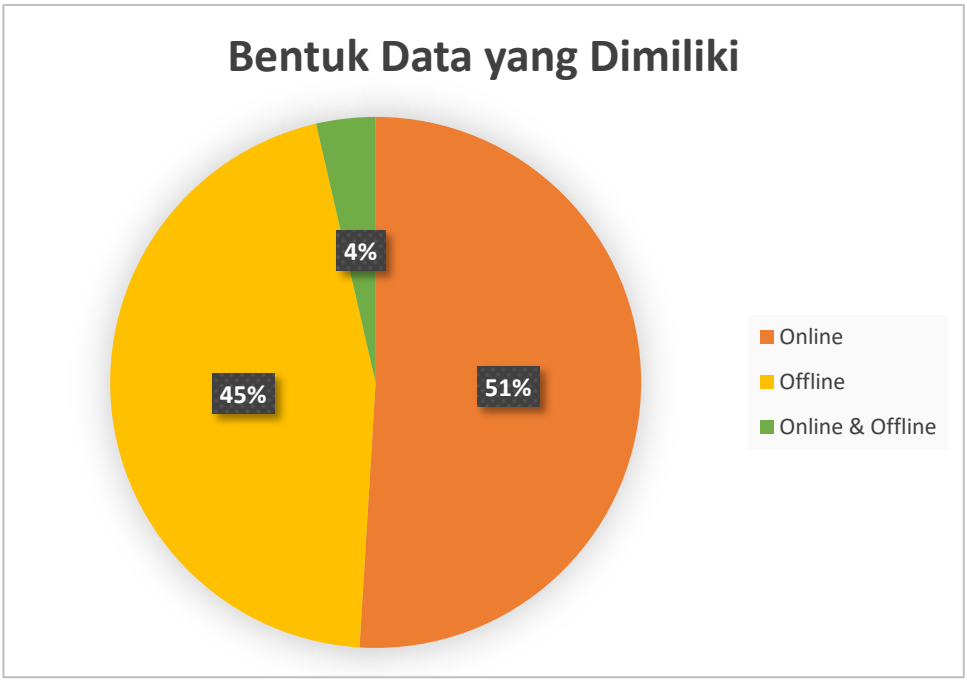

Gambar 4.2 Kondisi Eksisting Bentuk Data

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari **total 360 data** yang ada di pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagian besar data telah berbentuk *online*. Sebanyak **184 data (51%) berbentuk *online*, 163 data (45%) berbentuk *offline*** dan ada **13 data (4%)** yang **berbentuk *online* dan *offline***. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD yang memiliki data *online* paling banyak, yaitu 19 data. Untuk OPD yang memiliki data *offline* paling banyak adalah Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu sebanyak 13 data.

4.4.2 Tempat Penyimpanan Data

Tempat penyimpanan data yang berbentuk *offline* tersimpan pada komputer OPD yang bersangkutan. Sedangkan untuk data *online* dapat tersimpan pada *server* Diskominfo, *server* OPD di Diskominfo, *server* OPD di ruang *server* OPD, *server* pusat, *server* pemprov, jaringan lokal atau pada layanan *Cloud*. Penyimpanan data yang dilakukan secara *online* juga tidak menutup kemungkinan untuk disimpan pada beberapa lokasi penyimpanan. Penyebaran penyimpanan **360 data** yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Gambar 4.3

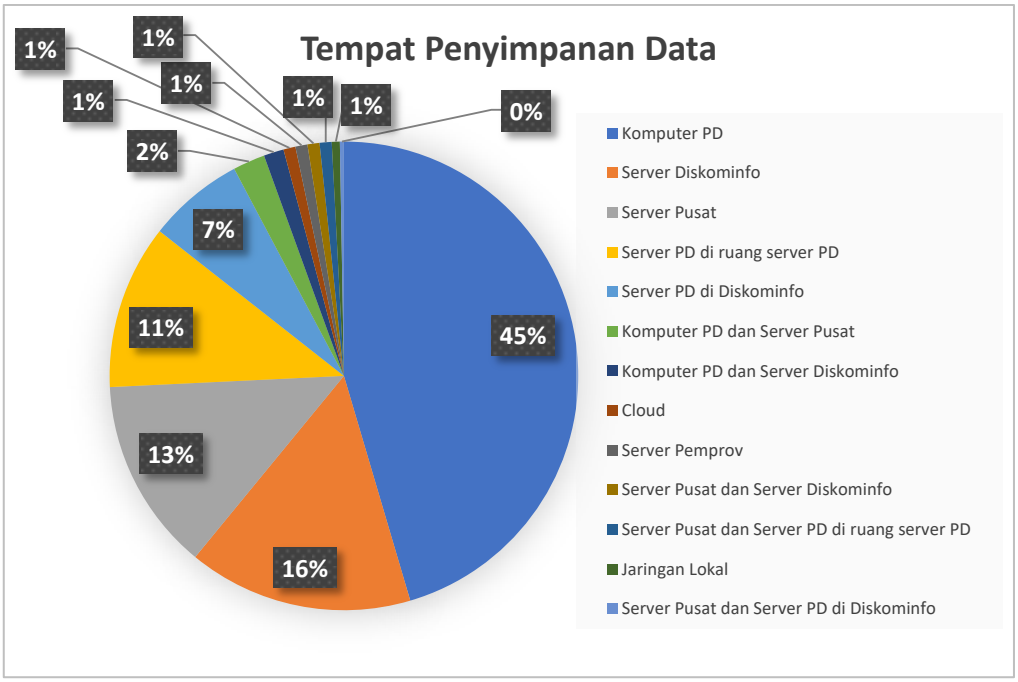

Gambar 4.3 Kondisi Eksisting Tempat Penyimpanan Data

Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa penyimpanan data *online* tersebar di berbagai macam tempat penyimpanan. Penyimpanan data berbentuk *online* **paling banyak** tersimpan pada ***server* Diskominfo** yaitu sebanyak **56 data (16%),** pada ***server* pusat 48 data (13%) , pada *server* OPD di ruang *server* OPD sebanyak 41 data (11%),** serta terbanyak terakhir yaitu pada ***server* OPD di Diskominfo** sebanyak **24 data (7%).** Sisanya, sebanyak 28 data *online* disimpan pada dua tempat atau *server* yang berbeda. Untuk data berbentuk *offline* yaitu sebanyak **163 data (45%)** semua tersimpan pada **komputer OPD**. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang paling banyak disimpan pada *server* internal OPD di ruang *server* OPD, yaitu sebanyak 15 data.

4.4.3 Aplikasi *Database* yang digunakan

Penggunaan aplikasi *Database* untuk penyimpanan data *online* terdapat beberapa macam yaitu, MySQL *Server*, Microsoft SQL *Server*, MySQL (untuk data pada jaringan lokal), *Google Drive* (untuk data pada *Cloud*) serta *Database* Oracle. Sedangkan untuk data berbentuk *offline* dikelola pada aplikasi Microsoft Office dan aplikasi pengelola Pdf. Sebaran penggunaan aplikasi *Database* dari **360 data** yang dikelola Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Gambar 4.4.

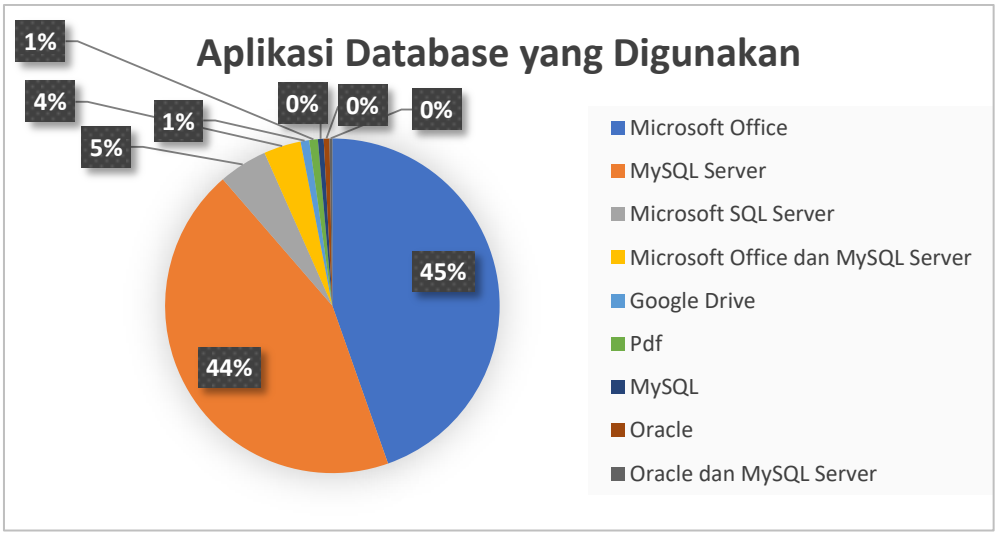

Gambar 4.4 Kondisi Eksisting *Database* yang Digunakan

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa **sebagian besar *Database*** yang digunakan untuk penyimpanan data *online* adalah **MySQL *Server*** yaitu sebanyak **159 data (44%)** serta **Microsoft SQL *Server*** yang digunakan pada **17 data (5%).** Untuk data ***offline*** mayoritas atau **163 data (45%)** dikelola menggunakan aplikasi **Microsoft Office**. Sisanya, sebanyak 21 data disimpan pada dua *Database* yang berbeda atau aplikasi *Database* yang tidak disebutkan diatas.

4.4.4 Jenis Akses Data

Akses data terbagi menjadi tiga jenis yaitu, hanya OPD, bagi pakai OPD dan publik. Untuk akses data hanya OPD berarti hanya OPD pemilik data yang dapat mengakses data tersebut. Akses data bagi pakai OPD berarti data dapat diakses oleh beberapa OPD yang diberikan akses oleh OPD pemilik data. Sedangkan data berakses publik berarti data dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk penyebaran akses **360 data** pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Gambar 4.5.

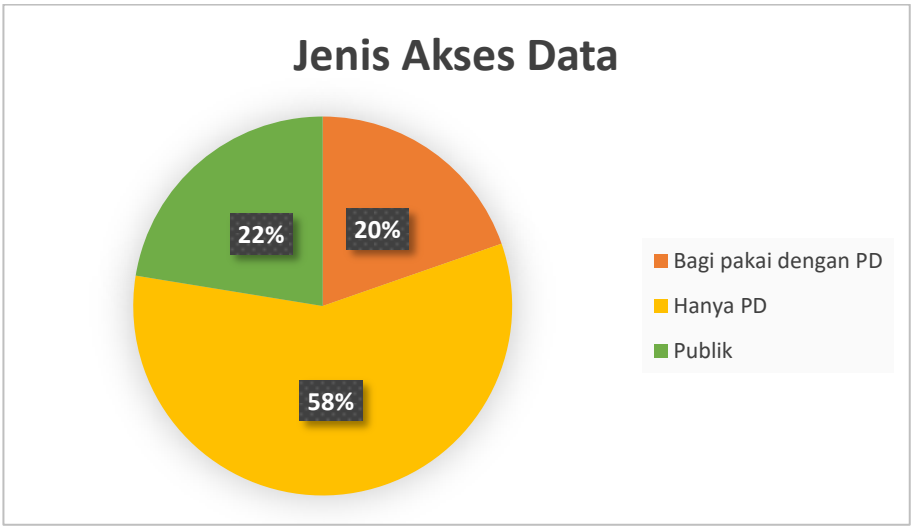

Gambar 4.5 Kondisi Eksisting Jenis Akses Data

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar data pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **208 data (58%) berakses hanya untuk OPD** pemilik data atau internal OPD. Sisanya sebanyak **81 data (22%) berakses publik** dan **71 data (20%)** berakses **bagi pakai antar OPD** yang bersangkutan. Terkait akses data, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman memiliki data berakses hanya OPD yang paling banyak, yaitu 17 data. Untuk data berakses bagi pakai antar OPD yang paling banyak dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu 9 data. Terakhir, untuk data berakses publik paling banyak dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu sebanyk 15 data.

4.4.5 Integrasi Data dan Informasi Eksisting

Integrasi data dapat terjadi dengan pelaksanaan integrasi aplikasi-aplikasi yang mengelola data yang sama. Saat ini terdapat beberapa aplikasi eksisting Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah terintegrasi. Hal tersebut menjadikan terjadinya integrasi data di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk daftar data yang terintegrasi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kondisi Eksiting Integrasi Data dan Informasi

Kode OPD	Nama OPD	Nama Aplikasi	Nama Data yang terintegrasi	OPD yang terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi
3	Bagian Hukum	JDIH Kabupaten Situbondo	Data Peraturan Daerah	KEMENKUM HAM	JDIHN, Website Kabupaten Situbondo
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	e-Katalog	Data Pelaku Pengadaan Data Penyedia Data Produk Data Perencanaan Pengadaan Data Transaksi	LKPP	SIKAP, SIRUP, SPSE
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIKAP	Data Pelaku Pengadaan Data Penyedia Data Produk Data Perencanaan Pengadaan Data Transaksi	LKPP	SIRUP, SPSE, E-Katalog
5	Bagian Pengadaan Barang dan	SIRUP	Data Pelaku Pengadaan Data	LKPP	SIKAP, E-Katalog, SPSE

Kode OPD	Nama OPD	Nama Aplikasi	Nama Data yang terintegrasi	OPD yang terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi
	Jasa		Penyedia Data Produk Data Perencanaan Pengadaan Data Transaksi		
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	Data Pelaku Pengadaan Data Penyedia Data Produk Data Perencanaan Pengadaan Data Transaksi	LKPP	SIKAP, SIRUP, e-Katalog
15	Badan Pendapatan Daerah	SIMPADA	Data transaksi pajak	Badan Pendapatan Daerah	e-PDL
15	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Geografis Pajak	Data Objek Pajak Data BPHTB	Badan Pendapatan Daerah	E-BPHTB, VTAX
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIBESTI	Data Tunggal Daerah Analisa Kependudukan Partisipatif (Dtd-Akp)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DTD-AKP
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIBESTI	Data Kemiskinan	KEMENDESA	SID
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPAM	Data Tunggal Daerah Analisa Kependudukan Partisipatif (Dtd-Akp)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DTD-AKP
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SILAO	Data Kependudukan	KEMENDAGRI	SIAK

Kode OPD	Nama OPD	Nama Aplikasi	Nama Data yang terintegrasi	OPD yang terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi
18	Dinas Kesehatan	SIKDA	Data Kunjungan Pasien Data Pasien	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Center View Dinkes Provinsi
18	Dinas Kesehatan	SIMESSEM	Data Agregat Ibu Hamil Data Klasifikasi Ibu Hamil	Dinas Komunikasi dan Informatika	Intelligence Room Bupati Situbondo
18	Dinas Kesehatan	SIMESSEM	Data Pasien	Ekohort KIA	Aplikasi eKohort KIA Kemenkes
18	Dinas Kesehatan	SIMESSEM	Data Obat-Obatan	GFK	DPI
18	Dinas Kesehatan	SIKDA	Data Pasien	BPJS	P-CARE E-Claim
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Data Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Data Peraturan Daerah	Bagian Hukum	JDIH
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Data Harga Kebutuhan Pokok	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Sikembarkepo
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Data Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan TIC
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Data Hasil produksi perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	SIKEMBARIKAN
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Data Covid-19 di Kabupaten SItubondo	Dinas Komunikasi dan Informatika	SIAGACOVID
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIPINTER	Data Perizinan Non Usaha Data Perseorangan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SiTajin

Kode OPD	Nama OPD	Nama Aplikasi	Nama Data yang terintegrasi	OPD yang terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi DAPODIK	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	sisgur
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Pengaduan	Data Pengaduan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Portal website dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	E-Lapor	Data Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sisgur
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Website Dispendik	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Web Sekolah
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TALI PUSAR	Data Buku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inlislite
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TALI PUSAR	Data e-book	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PUSDA
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	SIMLUHTAN	Data Luasan Tanaman Data Petani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	E-RDKK
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Aplikasi Billing System	Data Rekam Medis Pasien RSUD	BPJS	Vclaim BPJS, Aplicare BPJS
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Sistem Persediaan Farmasi	Data Penggunaan Obat Pasien	RSUD dr. Abdoer Rahem	Aplikasi billing system
38	Puskesmas Situbondo	Website Puskesmas Situbondo	Data Titik Lokasi Dan Layanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Web DINKES

Integrasi data dapat terjadi dengan aplikasi milik OPD yang sama, aplikasi milik OPD lain, aplikasi milik lembaga atau kementerian pusat serta aplikasi milik pemerintah provinsi. Pada tabel 4.2 terdapat total **34 data yang telah terintegrasi**. Data tersebut **diampu oleh 13 OPD pada 23 aplikasi**. Selanjutnya, 23 aplikasi tersebut telah **terintegrasi dengan 34 aplikasi** milik kementerian/pemprov/lembaga pusat/OPD (total 21 instansi).

4.5 Metadata Data dan Informasi

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022, atribut metadata data dan informasi terdiri dari ID, nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, sifat data, jenis data, validitas data, penghasil data/produsen data, penanggung jawab data/wali data, informasi yang terkait (*output*), informasi yang terkait (*input*), interoperabilitas, serta id metadata terkait. Rincian mengenai metadata arsitektur data dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. Sedagkan pemetaan metadata arsitektur data dan informasi terhadap data eksisting milik Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data dan Informasi.**

Tabel 4.3 Metadata Arsitektur Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang diplih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan penghasil data
10	Penanggung Jawab Data/WaIi Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi yang terkait (*output*)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi yang terkait (*input*)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

4.6 Permasalahan Data dan Informasi

Dalam pelaksanaan pengelolaa data dan informasi, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh OPD-OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa masalah yang kerap dialami terkait pengelolaan data dan informasi:

1) Data hilang
2) Redudansi data
3) Data tidak *update*
4) Belum ada *server* replikasi *Database*
5) Proses *backup* data dari *server Database* utama ke *Database* cadangan masih manual
6) *Server backup* kurang
7) Peretasan sistem

Sebagai saran penyelesaian masalah data hilang dapat dilakukakan pemutakhiran data secara rutin. Untuk OPD yang datanya masih disimpan secara *online* dapat dilakukan pengadaan aplikasi untuk penyimpanan data secara *online*. Masalah redudansi data dapat diminimalisir dengan melakukan integrasi data. Data yang tidak update terkadang dikarenakan pihak OPD yang tidak melakukan input data secara *online*, sehingga diusulkan untuk dilakukan update data secara berkala. Masalah tidak adanya *server* replikasi *Database* dapat menyebabkan kehilangan data karena saat *server* rusak hanya mengandalkan *server* backup. Oleh karena itu perlu adanya *server* tambahan yang mendukung teknologi replikasi data. Selanjutnya, untuk masalah backup data ke *server* yang masih manual, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan lisensi. Sehingga diusulkan untuk diadakan pengganggaran pembelian lisensi *server* secara berkala.

Selain masalah-masalah umum yang telah disebutkan diatas, Dinas Kesehatan juga menyoroti beberapa masalah dan saran solusi penanggulangan dari masalah yang dialami. Salah satu masalah yang dihadapi adalah *bottleneck* pada saat *query execution*. Untuk mengatasi hal tersebut disarankan adanya standarisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika terkait *security* untuk pengamanan data yang disimpan di *Database*, sehingga keamanan data dapat dipertanggungjawabkan. Masalah kedua adalah *Database* gagal menyimpan data. Saran perbaikannya berupa pelaksanaan audit terkait implementasi *Database* dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Masalah ketiga adalah terkait *rollback* data serta *backup* rutin *Database* yang gagal. Diusulakan untuk mulai menggunakan standar internasional seperti ISO di semua OPD.

Terakhir, beberapa bulan yang lalu telah terjadi peratasn sistem yang berdampak ke kebocora data di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sistem yang diretas adalah *website* SIORMAS milik BAKESBANGPOL dan *website* DPMPTSP milik DPMPTSP. Untuk penanganannya telah dilakukan pengecekan pada *server* maupun jaringan, *suspend website* sementara serta mencari celah keamanan dan

bug pada aplikasi. Selanjutnya dilakukan juga pemulihan data, dan peningkatan performa dan keamanan pada aplikasi tersebut.

4.7 Analisis Gap

Analisis gap dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini dari data dan informasi di Kabupaten Situbondo dengan kondisi idealnyai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.4.**

Tabel 4.4 Gap Arsitektur Data dan Informasi

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Bentuk data yang dimiliki	Sebanyak 184 data (51%) berbentuk *online*, 163 data (45%) berbentuk *offline* dan ada 13 data (4%) yang berbentuk *online* dan *offline*.	Data berbentuk *online* untuk mendukung Satu Data Indonesia	Terdapat 163 data yang berbentuk *offline*.
Tempat Penyimpanan data	• Komputer OPD:163 • *Server* Diskominfo:56 • *Server* Pusat:48 • *Server* OPD di ruang *server* OPD:41 • *Server* OPD di Diskominfo:24 • Komputer OPD dan *Server* Pusat:8 • Komputer OPD dan *Server* Diskominfo:5 • *Server* Pusat dan *Server* Diskominfo:3 • *Cloud*:3 • *Server* Pusat dan *Server* OPD di ruang *server* OPD:3 • *Server* Pemprov:3 • Jaringan Lokal:2 • *Server* Pusat dan *Server* OPD di Diskominfo:1	Penyimpanan data dan informasi dilakukan terpusat pada *server* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga penyimpanan data dan informasi terpusat pada satu *Data Center* untuk memudahkan data terkontrol dan menjaga keamanan data.	Terdapat 163 data yang berbentuk *offline* atau hanya tersimpan di komputer OPD. Untuk penggunaan ruang *server* atau *Data Center* di lingkup Pemerintah Daerah masih belum terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika semua.
Aplikasi *Database*	• Microsoft Office:163 • MySQL *Server*:159	Pengelolaan data dan informasi menggunakan aplikasi *Database*	Terdapat 163 data yang belum menggunkan aplikasi

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	• Microsoft SQL *Server*:17 • Microsoft Office dan MySQL *Server*:13 • Pdf: 3 • *Google Drive*:3 • Oracle: 2 • MySQL: 2 • Oracle dan MySQL *Server*:1	yang digunakan dapat mendukung penggunaan Sistem Penghubung Layanan dan untuk mempermudah pengolahan data.	*Database online*.
Jenis akses data	Sebagian besar data pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu 208 data (58%) berakses hanya untuk OPD pemilik data atau internal OPD. Sisanya sebanyak 81 data (22%) berakses publik dan 71 data (20%) berakses bagi pakai antar OPD yang bersangkutan.	Jenis akses data dapat digunakan sesuai kebutuhan, namun apabila data milik OPD tertentu dibutuhkan oleh OPD lain atau publik maka seharusnya dapat diakses atau berbagi data dengan pihak lain.	Sebagian besar data hanya dapat diakses oleh OPD pemilik data sendiri (208 data).
Integrasi Data	Terdapat total 34 data yang telah terintegrasi. Data tersebut diampu oleh 13 OPD pada 23 aplikasi.	Setiap OPD memiliki data yang telah terintegrasi dengan instansi lain yang terkait.	Terdapat 27 OPD yang belum melakukan integrasi data.

BAB 5
KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Pada bab 5 ini akan dibahas mengenai kondisi terkini dari domain arsitektur layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan dimulai dari penjabaran pengertian layanan SPBE dan penjelasan arsitektur layanan SPBE. Dilanjutkan dengan peninjauan kondisi eksisiting layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo hingga ke permasalahan yang dihadapi terkait layanan SPBE. Pembahasan ditutup dengan analisis gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari layanan SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

5.1 Pengertian Layanan SPBE

Menurut peraturan pemerintah yang ada, terdapat dua pengertian dari layanan SPBE. Pertama menurut Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengartikan layanan SPBE sebagai luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Selain itu disebutkan pula bahwa layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.Layanan SPBE dibagi menjadi 2 jenis, yaitu layanan administrasi dan layanan publik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

5.2 Struktur Arsitektur Layanan SPBE

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah

yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022, RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen*/G2C dan *Government to Business*/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government*/ G2G, *Government to Employee*/G2E).

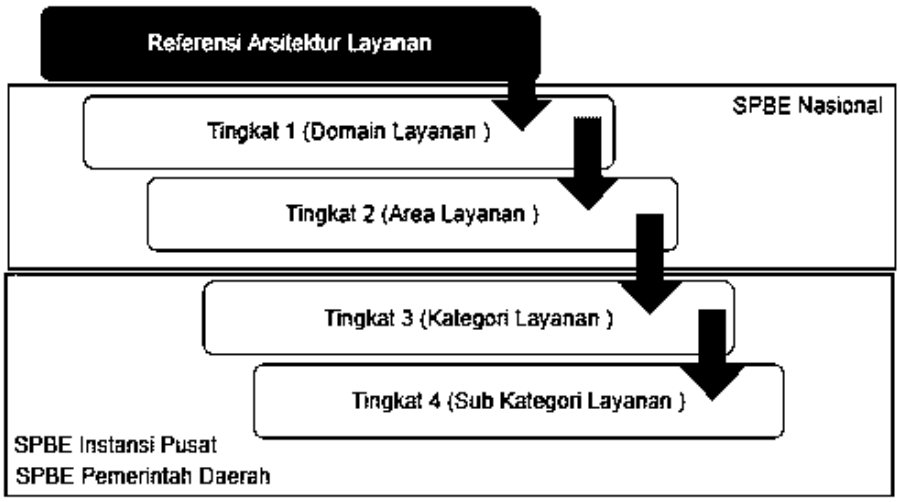

Gambar 5.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Gambar 5.1 menjelaskan struktur RAL SPBE Nasional yang terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) sesuai Gambar 5.1.

1) Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
2) Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

5.3 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada Gambar 5.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat nasional. Selanjutnya, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) tingkat nasional yang terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). Referensi arsitektur layanan SPBE dijelaskan lebih detail pada **Tabel 5.1.**

Tabel 5.1 Referensi Arsitektur Layanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman moda
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan
01.33	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

Tabel 5.1 menjabarkan terkait RAL SPBE Nasional di tingkat 1 yang terdiri dari 2 domain layanan yaitu layanan publik dan layanan administrasi pemerintah. Sedangkan pada tingkat 2, domain layanan publik terdiri atas 44 area layanan dan domain layanan administrasi pemerintah terdiri atas 9 area layanan.

5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Pada bagian ini, akan dibahas kondisi dari layanan eksisting di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi yang akan dibahas adalah kepemilikan layanan di seluruh OPD, ketersediaan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, serta ketersediaan layanan yang mendukung program RPJMD Kabupaten Situbondo.

5.4.1 Layanan yang dimiliki Seluruh OPD

Bagian ini akan menjelaskan rangkuman dari layanan yang dikelola oleh OPD-OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan akan dimulai dari penjabaran singkat ketersediaan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo, lalu persebaran status akses layanan SPBE dan terakhir adalah penjabaran terkait sebaran jenis layanan SPBE yang ada.

a) Ketersediaan Layanan SPBE

Menurut hasil survei, saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo mengelola layanan sebanyak **768 layanan**. Semua layanan tersebut merupakan layanan aktif yang tersebar di **40 OPD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, saat ini **semua OPD** di Pemerintah Kabupaten Situbondo **memiliki layanan yang aktif** dikelola.

b) Status Akses Layanan SPBE

Seluruh layanan SPBE yang dimiliki oleh OPD-OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki 3 status akses yaitu :

- **Manual**, dimana pelayanan yang dilakukan masih menggunakan cara konvensional tanpa dibantu oleh aplikasi.
- ***Online***, dimana pelayanan telah didukung tools aplikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- **Manual dan *Online***, dimana OPD memberikan pelayanan secara *online* namun masih ada pelayanan manual yang diterima untuk menanggulangi masyarakat yang belum tersosialisasi dengan baik.

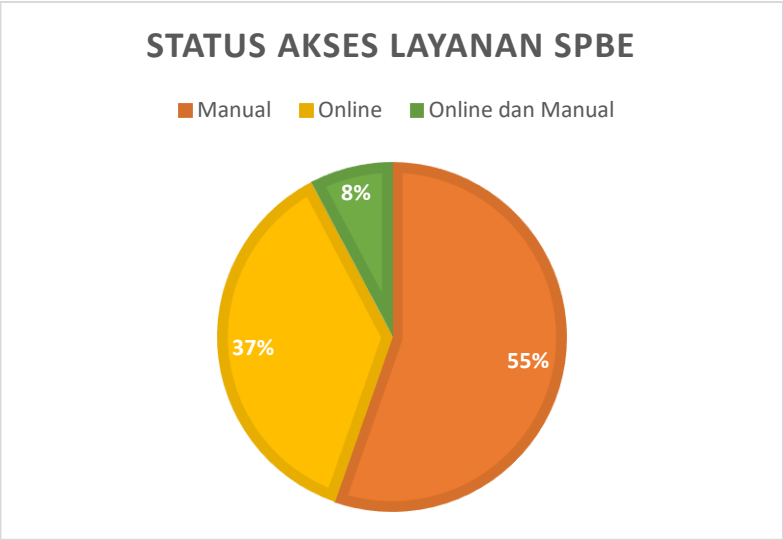

Gambar 5.2 Persentase Status Akses Layanan SPBE

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa **sebagian besar layanan** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo masih **berstatus manual**. Dari **total 768 layanan**, **425 layanan (55%) berakses manual**. Sisanya, sebanyak **284 layanan (37%) berakses online** dan **59 layanan (8%) berakses online dan manual**.

c) Jenis Layanan Berdasarkan Domain Layanan

Layanan SPBE dibagi menjadi 2 jenis, yaitu layanan administrasi dan layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Persebaran jenis domain layanan pada layanan di Pemerintah Kabupaten

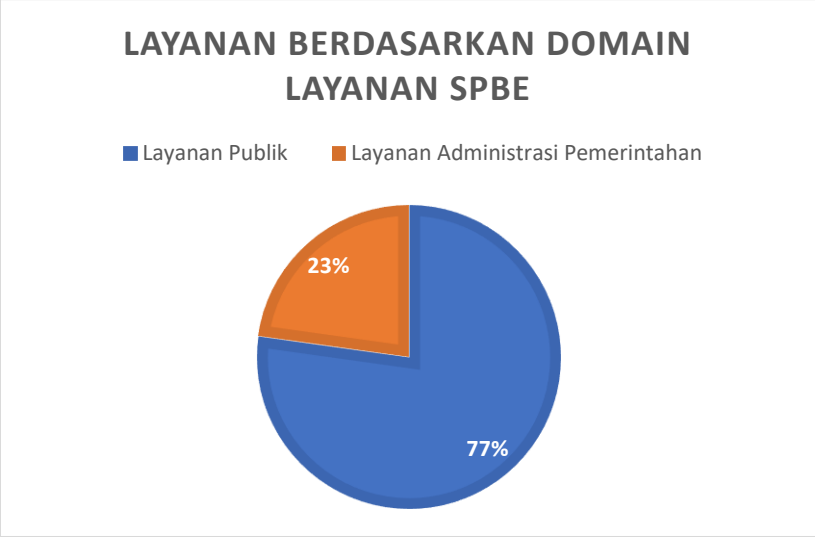

Situbondo dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3 Persentase Layanan Berdasarkan Domain Layanan SPBE

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan layanan publik. Dari **total 768 layanan** yang ada, **593 layanan (77%)** merupakan **layanan publik**. Sisanya, sebanyal **175 layanan (23%)** merupakan layanan **administrasi pemerintahan**.

5.4.2 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Pada PERMENPAN 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik layanan administrasi telah ditetapkan bahwa terdapat 10 indikator *pada Aspek 7* tentang Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Indikator Layanan Administrasi pada Permen 59/2020

Indikator	Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik

Indikator	Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE
	Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Layanan administrasi berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, jika layanan administrasi yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka **Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, untuk mendukung layanan administrasi tersebut.** Untuk layanan administrasi berbasis elektronik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 5.3.**

Tabel 5.3 Kondisi Eksisting Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
1	Perencanaan	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan perencanaan daerah	SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat
2	Penganggaran	RAL 02.02 Keuangan	Layanan penganggaran	SIPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pusat
		RAL 02.02 Keuangan	Layanan Penyusunan Rka Dpa	SIPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pusat
3	Keuangan	RAL 02.02 Keuangan	Layanan pembukuan kas	SIRKA	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Daerah
4	Pengadaan Barang dan Jasa	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengelolaan Pengadaan	e-Katalog SPSE Embiz	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat dan Daerah
		RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan fasilitasi rencana umum pengadaan	SIRUP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat
5	Kepegawaian	RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Data Kepegawaian	Milea Simpeg MySAPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pusat dan Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Diklat ASN	ABANGSI TUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
					Sumberdaya Manusia	
6	Kearsipan Dinamis	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Tanggap Terjamin Dalam Penyelarasan Pencatatan dan Pelaporan Arsip Aset (Tajin Palappa)	Tajin Palappa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daerah
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAL 02.02 Keuangan	Layanan manajemen barang daerah	E-MASDA SIMBADDA	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Audit	E-Auditee BPK SISWASKEUDES	Inspektorat	Pusat
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan pengendalian pemerintah	SPIP	Inspektorat	Pusat
9	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Analisis Kinerja dan Beban Kerja	SIMONA	Bagian Organisasi	Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	E-Sakip	Bagian Organisasi	Pusat
10	Kinerja Pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Kinerja Pegawai	E-Kinerja SIKALAP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Daerah

Berdasarkan Tabel 5.3, **semua jenis layanan administrasi** berbasis elektronik **telah terpenuhi** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Begitu juga dengan aplikasi pendukung layanan, **semua jenis layanan administrasi telah didukung oleh aplikasi**. Namun, masih **terdapat empat jenis layanan** yang masih **hanya menggunakan aplikasi khusus** atau aplikasi milik daerah. Layanan tersebut merupakan layanan mengenai keuangan, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, serta layanan mengenai kinerja pegawai.

5.4.3 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan PERMENPAN 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik layanan publik terdapat 6 indikator yang ditetapkan pada Aspek 8, Tabel 5.4 merupakan nama indikator domain layanan publik SPBE.

Tabel 5.4 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aspek/Indikator	Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE layanan publik diterapkan dengan **mengutamakan penggunaan aplikasi umum**. Namun, jika layanan publik yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, hasil identifikasi Layanan Publik Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Sektoral dapat dilihat pada **Tabel 5.5.**

Tabel 5.5 Kondisi Eksisting Layanan Publik Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
1	Pengaduan Layanan Publik	RAL 01.24 Pemerintahan daerah	Layanan Pengaduan Lembaga Pemerintah Kabupaten Situbondo	KLIK-ON WBS	Inspektorat	Daerah
		RAL 01.24 Pemerintahan daerah	Layanan pengaduan	SP4N Lapor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat
2	Data Terbuka	RAL 01.43	Layanan data	PPID	Dinas	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Informasi	terbuka		Komunikasi dan Informatika	
		RAL 01.43 Informasi	Layanan satu data	Satu Data Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	RAL 01.28 Hukum	Layanan Dokumentasi Hukum Kabupaten Situbondo	JDIH Kabupaten Situbondo	Bagian Hukum	Daerah
Layanan Publik Sektoral						
1	Pendidikan	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan beasiswa unggul	Singgul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan penjaminan mutu pendidikan	PMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan BOS	ARKAS, MASKAS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Peningkatan Mutu PAUD	SISPENA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan manajemen data siswa dan guru	Sisgur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan angka kredit guru	Sipagu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan manajemen data paud dan pendidikan masyarakat	Simpadi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengelolaan Dapodik	DAPODIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan manajemen data paud dan pendidikan	Simpadi	Dinas Pendidikan dan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
			masyarakat		Kebudayaan	
2	Pengajaran	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Fasilitasi Diklat Calon Kepala Sekolah	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Fasilitasi Pengembangan PTK	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Peningkatan Kapasitas PTK PAUD	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah
3	Pekerjaan dan Usaha	RAL 01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	Layanan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	BPUM Online, SISMABPUM	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pusat dan Daerah
		RAL 01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	Layanan Pelatihan IKM	SIMPELDAGIN	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
4	Tempat Tinggal	RAL 01.20 Perumahan	Layanan RTLH	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Daerah
		RAL 01.20 Perumahan	Layanan Perumahan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.20 Perumahan	Layanan Permukiman Kumuh	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
5	Komunikasi dan Informasi	RAL 01.43 Informasi	Layanan Data Statistik Sektoral	PUSDA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah
		RAL 01.43 Informasi	Layanan informasi kegiatan desa dan kelurahan	SINEWS	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah
		RAL 01.43 Informasi	Layanan informasi kelompok masyarakat	KIM	Dinas Komunikasi dan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
					Informatika	
6	Lingkungan Hidup	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan pengaduan lingkungan hidup	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
		RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan sosialisasi lingkungan hidup	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
		RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan pengolahan sampah	SIPESAH	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
		RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan pengendalian limbah B3	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
		RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Uji Lab Lingkungan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
		RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pengawasan Lingkungan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
7	Kesehatan	RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Rumah Pemulihan Gizi	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Kesehatan	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Pengurusan P-Irt	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Kesehatan	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan rekam medis	V-Klaim BPJS Aplikasi Billing System SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pusat dan Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan penganggaran rumah sakit	ERENGGAR	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan pengelolaan farmasi	Sistem Persediaan Farmasi	RSUD dr. Abdoer Rahem	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan pengelolaan barang non-farmasi	Aplikasi Persediaan non farmasi	RSUD dr. Abdoer Rahem	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan pengelolaan rumah sakit	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pusat dan Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
				SIRS ONLINE		
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Vaksinasi	P-CARE Vaksin	Puskesmas Situbondo	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Pendaftaran Pasien dan Rekam Medis	P-CARE E-Claim	Puskesmas Situbondo	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layana Pemeriksaan Umum	SIKDA	Puskesmas Situbondo	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Tindakan dan Kegawatdaruratan	SIKDA	Puskesmas Situbondo	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	SIKDA	Puskesmas Situbondo	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan KIA, KB, dan Imunisasi	SIKDA ASIK	Puskesmas Situbondo	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Farmasi	DPI	Puskesmas Situbondo	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Laboratorium	ALRECORD ANTIGEN	Puskesmas Situbondo	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan TB	ALRECORD ANTIGEN SITB	Puskesmas Situbondo	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Claim BPJS	P-CARE E-Claim	Puskesmas Situbondo	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan rawat jalan dan inap	SIKDA	Puskesmas Bungatan	Daerah
8	Jaminan Sosial	RAL 01.26 Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Sosial	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Pemberian Bantuan kepada Fakir Miskin	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Sosial	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Rekomendasi Sehati	SIKS-NG	Dinas Sosial	Pusat
9	Energi	RAL 01.37 Energi	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Bagian Perekonomian , Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Daerah
10	Perhubungan dan Lalu Lintas	RAL 01.29 Keamanan	Layanan cctv	RTTMC	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Layanan Jadwal Trasportasi	Website DISHUB	Dinas Perhubungan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.19 Transportasi	Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Jangkar	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Pelayanan Jasa Pelabuhan Besuki/Kalbut	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Pelayanan Jasa Terminal Tipe C (Besuki)	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Layanan Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Jangkar	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Pelayanan Jasa Pelabuhan Besuki/Kalbut (Pas Masuk Orang/Kendaraan)	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Layanan pengelolaan rambu lalu lintas	SIRALIN	Dinas Perhubungan	Daerah
11	Sumber Daya Alam	RAL 01.37 Energi	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Bagian Perekonomian , Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Daerah
		RAL 01.36 Pertambangan	Layanan Pemberian Rekomendasi Penambangan Bahan Galian C Untuk Ijin Pertambangan Rakyat	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
12	Pariwisata	RAL 01.15 Pariwisata	Layanan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Daerah
		RAL 01.15 Pariwisata	Layanan Promosi Pariwisata	Website Layanan TIC	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Daerah
		RAL 01.15 Pariwisata	Layanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
			Ekonomi Kreatif			
13	Sosial	RAL 01.26 Sosial	Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Sosial	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Hibah dan Bansos	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Bagian Umum	Daerah
14	Koperasi	RAL 01.13 Koperasi	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.13 Koperasi	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
15	Penanggulangan Bencana dan Linmas	RAL 01.26 Sosial	Layanan Informasi Peringatan Dini	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan kedaruratan dan bantuan logistik	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Perhitungan Kerugian	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.29 Keamanan	Layanan Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah
		RAL 01.29 Keamanan	Layanan Sosialisasi	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah
		RAL 01.29 Keamanan	Layanan Penyuluhan, Pencegahan,	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
			Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba			
		RAL 01.29 Keamanan	Layanan Pengamanan Hari Besar Agama Dan Hari Besar Nasional	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah
		RAL 01.29 Keamanan	Layanan Operasi Rutin Pkl,Orgil,Gepeng Dan Anjal /Punk	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah
16	Perdagangan, perindustrian, PM, dan PTSP	RAL 01.06 Perdagangan	Layanan Monitoring Eksport Dan Import	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.06 Perdagangan	Pelayanan Kemetrologian	SIPENAMAS	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.06 Perdagangan	Layanan Sistem Resi Gudang	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.06 Perdagangan	Layanan Pengawasan Kemetrologian	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.06 Perdagangan	Layanan Penarikan Dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.05 Industri	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Daerah
		RAL 01.12 Investasi	Layanan Promosi Penanaman Modal	SiPoint	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.12 Investasi	Layanan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Investasi	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.12 Investasi	Layanan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.12 Investasi	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha tanaman Pangan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha tanaman Holtikultural	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha tanaman Perkebunan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha tanaman Peternakan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pendaftaran usaha tanaman pangan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pendaftaran usaha tanaman Holtikultural	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pendaftaran usaha tanaman perkebunan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pendaftaran usaha tanaman peternakan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Surat Pernyataan (SPPL)	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin Lingungan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3 untuk jasa	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3 untuk usaha penghasil	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin pembuangan air (IPAL)	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu	Pusat dan Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
					Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin usaha jasa kontruksi (IUJK)	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan surat izin usaha perikanan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan surat izin penangkapan ikan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan surat izin kapal pengangkut ikan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen tanda daftar usaha hasil perikanan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin mendirikan rumah sakit C dan D	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin operasional rumah sakit C dan D	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu	Pusat dan Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
					Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin operasional klinik	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin laboratorium umum dan khusus	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin apotek	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin toko obat	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin operasional tokok alat kesehatan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen izin untuk usaha penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan	Pusat dan Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
					Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha industri	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin perluasan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha kawasan industri	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha perdagangan (IUP)	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Tanda daftar perusahaan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Tanda daftar Gudang	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Pemenuhan Komitmen Surat	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi	Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen izin penyelenggaraan angkutan orang	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen izin angkutan sungai dan danau	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen tanda daftar usaha pariwisata	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen tanda daftar usaha pariwisata pendirian program atau satuan pendidikan	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen izin penempatan tenaga kerja swasta	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan izin usaha mikro dan kecil	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman	Pusat dan

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi			Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan izin usaha koperasi simpan pinjam	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan pemenuhan komitmen izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	OSS, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat dan Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Izin Penyelenggaraan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi	Reklame		Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Surat Izin Praktik *Internsip*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Surat Izin Praktik Dokter	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Dokter Gigi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Dokter Spesialis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Perawat	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Bidan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi	Praktik Apoteker		Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Refraksionis Optisien	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik *Fisioterapis*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik *Optometris*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Penata *Anestesi*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik *Ortotis Prostetis*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Izin Praktik Terapis Gigi dan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi	Mulut		Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Terapis Wicara	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Okupasi Terapis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Elektromedis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Akupunktur Terapis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Tenaga Gizi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Praktik Teknik *Kardiovaskuler*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Izin Kerja *Fisioterapis*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi			Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja Ortotis Prostetis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja Terapis Wicara	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja Teknisi Gigi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja Okupasi Terapis	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja *Radiografer*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja Tenaga Gizi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Kerja Tenaga Sanitarian	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Izin Tukang Gigi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi			Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Surat Daftar Penyehat Tradisional *Empiris*	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Unit *Transfusi* Darah (UTD)	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Penyelenggaraan Optikal	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Penyelenggaraan Griya Sehat	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Usaha Depot Air Minum (DAM)	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Izin Salon Kecantikan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi			Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator.	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Retribusi	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin untuk Usaha Veteriner	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH)	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin Usaha Pemotongan Hewan dan-atau Penanganan Daging	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan	Layanan Izin untuk Praktik Dokter	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Akreditasi	Hewan (Surat Tanda *Registrasi*)		Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Izin untuk Kerja Perekam Medik	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Perluasan Usaha Kawasan Industri	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja	SIPINTER, SITAJIN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
17	Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pemangkasan pohon	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
		RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Prokasi (Program Kali Bersih)	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
18	Ketenagakerjaan	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan kartu tenaga kerja luar negeri	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan AK1	AK 1 Online	Dinas Ketenagakerjaan	Pusat
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan antar kerja	Web Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan informasi Ketenagakerjaan	Web Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan Pasar Kerja Online	Web Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan Pelatihan Kerja	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32	Layanan Pembinan	Tidak Ada	Dinas	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		Ketenagakerjaan	warga resettlemen	Aplikasi Pendukung	Ketenagakerjaan	
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan pembuatan lampiran teknis	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan Pendirian LPK	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan Perjanjian kerja (PKWTT)	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Ketenagakerjaan	Daerah
19	Cipta Karya dan Tata Ruang	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Penyediaan Air Minum	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Pembuatan *Drainase*	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Jalan Lingkungan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Air Limbah Rumah Tangga	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Sewa Lahan, Rumah Dinas Dan Kios	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
20	Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAL 01.07 Pertanian	Layanan penyuluhan pertanian	SIMLUHTAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pengadaan Alat Mesin Pertanian	SIPD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pembangunan Jaringan Irigasi	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pembangunan Jalan Usaha Tani	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal atau Dalam	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pengambangan Luasan Tanaman Fanili	SIPD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Penyediaan Perlengkapan Alat Jemur Tanaman Tembakau	E-DBHCHT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Daerah
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pembangunan Irigasi Air Tanam dalam dan Dangkal	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pembangunan Jalan Produksi	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang	IRDKK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Penyediaan Sarana Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Penyediaan Jenis Lumbung Pangan Masyarakat	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.07 Pertanian	Layanan Penyediaan Jenis Lantai Jemur	BIMA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pusat
21	Bina Marga dan Pematusan	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Pembangunan Jalan dan Jembatan	SIPDJD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pusat
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Preservasi Jalan dan Jembatan	SIPDJD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pusat
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Perencanaan Teknis Bina Marga	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Pembinaan Jalan Dan Jembatan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Pembangunan Dan Perencanaan Teknis Pengairan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Daerah
22	Pengelolaan Bangunan dan Tanah	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Pembangunan Bangunan dan Gedung	SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pusat
		RAL 01.22 Pertanahan	Tidak Ada Layanan Pendukung			
23	Pemadam Kebakaran	RAL 01.26 Sosial	Layanan Call Center Pemadam dan Penyelamatan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah
24	Perpustakaan	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pendaftaran Anggota Perpustakaan	INLISLITE	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pusat
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Online Publik Akses Katalog	INLISLITE	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pusat
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan E-Book	E-Pusda Situbondo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
25	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.34 Pemuda	Layanan Pembinaan Kepemudaan	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Daerah
		RAL 01.35 Olahraga	Layanan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Daerah
26	Kependudukan Catatan Sipil	RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Pelayanan Administrasi Cetak Di Kecamatan	SIPESAT	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Penerbitan KK	SILAO, PETIR, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Penerbitan KTP	SILAO, PETIR, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Penerbitan SKPWNI	SILAO, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Penerbitan SKDWNI	SILAO, SIAK.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan penerbitan Akta Kelahiran	SILAO, PETIR, BALADA AKHIR, SIAK.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan penerbitan Akta Kematian	SILAO, PETIR, SIAK.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan penerbitan Akta Perceraian	SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Penerbitan Akta Perkawinan	SIAK, SIKANDA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan penerbitan KIA	SIAK, SILAO, KENDEDES.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat dan Daerah
27	Kesatuan Bangsa dan Politik	RAL 01.03 Kenegaraan	Layanan pendataan ormas / LSM	SIORMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Daerah
		RAL 01.03 Kenegaraan	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Daerah
		RAL 01.41 Agama	Layanan Forum Kerukunan Umat Beragama	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Daerah
		RAL 01.29 Keamanan	Layanan Prosedur kewaspadaan dini di daerah	Tidak Ada Aplikasi Pendukung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Daerah
28	Perpajakan	RAL 01.04 Ekonomi	Layanan manajemen pajak daerah	Simpada	Badan Pendapatan Daerah	Daerah
		RAL 01.04 Ekonomi	Layanan pengelolaan PBB	VTAX	Badan Pendapatan Daerah	Daerah
		RAL 01.04 Ekonomi	Layanan pengelolaan BPHTB	E-BPHTB	Badan Pendapatan Daerah	Daerah
		RAL 01.04 Ekonomi	Layanan pengelolaan pajak selain PBB dan BPHTB	E-PDL	Badan Pendapatan Daerah	Daerah
		RAL 01.04 Ekonomi	Layanan pendaftaran pajak katering	PAJAK KATERING ONLINE	Badan Pendapatan Daerah	Daerah
		RAL 01.04 Ekonomi	Layanan pelacakan berkas pengajuan PBB	SITERAS	Badan Pendapatan Daerah	Daerah

Dari Tabel 5.5, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki semua jenis layanan publik dan layanan publik sektoral. Namun, **terdapat satu layanan yang belum terpenuhi, yaitu layanan pertanahan pada jenis layanan publik sektor pengelolaan bangunan dan tanah**. Pada layanan publik, semua layanan telah didukung oleh aplikasi. Sedangkan pada layanan publik sektoral **terdapat 11 sektor layanan yang masih bersifat manual** atau belum memiliki aplikasi pendukung.

Terkait penggunaan aplikasi umum, masih **banyak layanan yang belum menggunakan aplikasi umum**. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh belum tersedianya aplikasi umum pada sektor atau jenis layanan tersebut. Untuk layanan publik, yang **telah menggunakan aplikasi umum** adalah layanan mengenai **pengaduan layanan publik**. Pada layanan publik sektoral, telah **terdapat 10 sektor layanan yang telah menggunakan aplikasi umum** atau pusat dalam mendukung layanannya.

5.4.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo 2021-2026, maka diperlukan adanya layanan yang dapat mendukung program tersebut. Pemetaan layanan eksisting dan program pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 dapat dilihat secara lengkap pada **Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD.** Jumlah ketersediaan layanan yang mendukung program RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 secara singkat dapat dilihat pada Gambar 5.4.

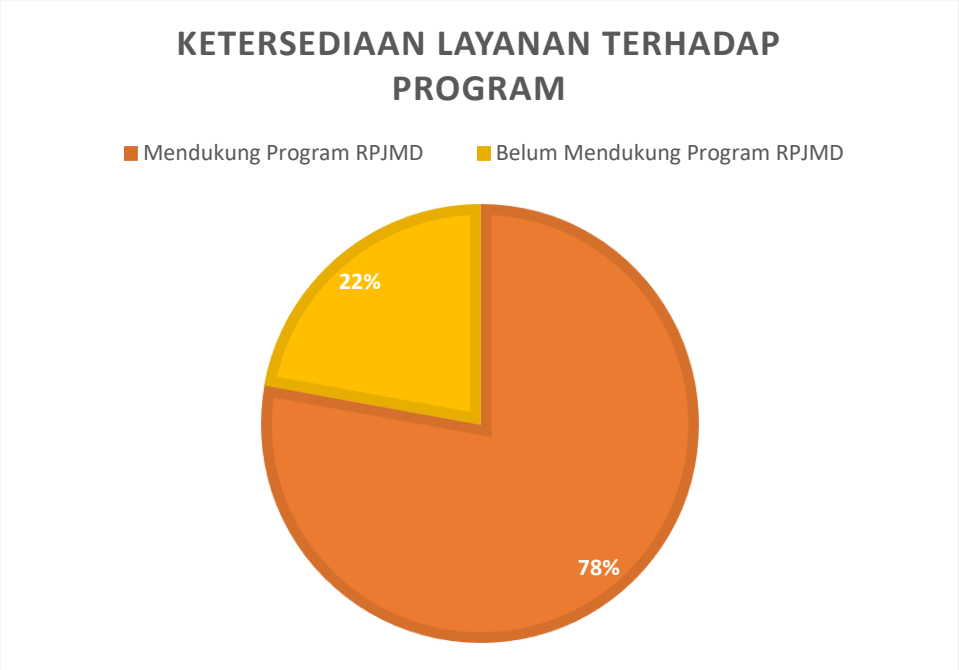

Gambar 5.4 Persentase Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Gambar 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar program pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 telah didukung oleh layanan. Pada RPJMD Kabupaten Situbondo terdapat total 140 program. Dari semua program tersebut, **109 program (78%)** telah **didukung oleh 585 layanan eksisting** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sisanya, sebanyak **31 program (22%)** masih **belum didukung layanan** dan terdapat 183 layanan yang tidak memiliki program terkait di RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026.

5.5 Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata layanan SPBE menurut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 terdiri dari ID, nama layanan, tujuan layanan, fungsi layanan, model referensi layanan, unit pelaksana, kementerian / lembaga terkait, urusan pemerintahan terkait, target layanan, metode layanan, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko serta id metadata terkait. Penjabaran metadata layanan dapat menunjukkan bahwa layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE nasional. Detail metadata arsitektur layanan SPBE dapat dilihat pada Tabel 5.6. Sedangkan penjabaran hasil pemetaan metadata arsitektur layanan dengan layanan eksisting milik Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE.**

Tabel 5.6 Metadata Arsitektur Layanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
	Terkait	
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	Potensi manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE
14	Mitigasi risiko	Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE
15	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

5.6 Permasalahan Layanan SPBE

Dalam penyelenggaraan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh OPD penyelenggara layanan SPBE. Dari hasil survei, didapatkan beberapa masalah yang kerap dialami oleh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Permasalahan tersebut dirangkum sebagai berikut:

1) Gangguan jaringan
2) Data tidak terintegrasi
3) Data tidak update
4) Pengumpulan data memakan waktu lama
5) Anggaran terbatas
6) Layanan masih manual
7) Kurangnya koordinasi antar OPD berkaitan
8) Kurangnya sosialisasi layanan terhadap masyarakat
9) Aplikasi error
10) Server down

Masalah yang didapatkan dari hasil survei paling banyak merupakan masalah terkait layanan yang telah berakses *online*. Pertama terkait masalah gangguan jaringan seperti gangguan internet. Hal tersebut menimbulkan layanan terhambat atau menjadikan layanan berakses manual. Masalah ini dapat dicegah dengan audit *bandwidth* dan jaringan secara berkala. Selanjutnya masalah terkait data, tidak terintegrasinya data yang sama dalam aplikasi yang berbeda akan menimbulkan redudansi data hingga ke masalah selanjutnya yaitu data tidak *update*. Sehingga untuk menyelesaikan dua masalah tersebut dapat diadakan

integrasi aplikasi yang saling berkaitan, sehingga data yang ada tidak *redundant* dan selalu *update*. Data tidak *update* juga bisa disebabkan dari SDM yang tidak melakukan *input* data. Hal tersebut dapat disebabakan pengumpulan data yang memakan waktu lama. Disarankan untuk melakukan pengumpulan data dan *input* data secara berkala.

Beberapa OPD juga masih mengalami kekurangan anggaran dalam pelaksanan layanannya. Anggaran bisa berupa nggaran untuk pembelian sarana dan prasarana ataupun anggaran terkait aplikasi. Sehingga pelayanan yang ada masih bersifat manual. Terkait anggaran untuk pengelolaan atau pembangunan aplikasi, OPD diharapkan penganggaran khusus terkait IT di setiap tahunnya. Pelaksanaan pelayanan juga dapat terhambat dikarena kurangnya sosialisasi baik antar OPD atau dengan masyarakat. Untuk menangani hal tersebut sebaiknya dilakukan sosialisasi secara berkala melalui sosial media atau pelaksanaan pertemuan dengan OPD yang bersangkutan.

Masalah terakhir mengenai aplikasi *error* dan *server down*. Dua masalah tersebut bisa saja menjadi masalah yang saling berkaitan. Aplikasi yang ada akan berjalan lambat saat terjadinya *server down*. Sehingga saran penanganannya dapat dilakukan audit rutin terhadap aplikasi yang ada. Untuk *server* selain dilakukan audit, dapat juga dilakukan penambahan *server* agar dapat memenuhi *traffic* yang ada.

5.7 Analisis Gap

Setelah pembahasan kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo di atas, maka dilakukan analisis kesenjangan atau gap atas kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil analisis gap layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 5.7.**

Tabel 5.7 Analisis GAP Layanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan layanan	Pemerintah Kabupaten Situbondo mengelola layanan sebanyak 768 layanan. Semua layanan tersebut merupakan layanan aktif yang tersebar di 40 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, saat ini semua OPD di	Seluruh instansi pemerintahan memiliki layanan dan atau mendukung layanan OPD lain	Kondisi ideal telah terpenuhi.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki layanan yang aktif dikelola.		
Akses layanan	Dari total 768 layanan, 425 layanan (55%) berakses manual. Sisanya, sebanyak 284 layanan (37%) berakses online dan 59 layanan (8%) berakses online dan manual.	Layanan didukung oleh aplikasi umum berbagi pakai dan atau aplikasi khusus (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Terdapat 425 layanan (55%) masih berakses manual.
Layanan administrasi	Semua jenis layanan administrasi telah didukung oleh aplikasi. Namun, masih terdapat empat jenis layanan yang masih hanya menggunakan aplikasi khusus atau aplikasi milik daerah.	Layanan didukung oleh aplikasi bagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Terdapat empat jenis layanan yang masih hanya menggunakan aplikasi khusus atau aplikasi milik daerah.
Layanan Publik	Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki semua jenis layanan publik yang semuanya telah didukung aplikasi. Untuk layanan publik, yang telah menggunakan aplikasi umum adalah layanan mengenai pengaduan layanan publik.	Layanan didukung oleh aplikasi bagi pakai dan pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Terdapat 2 layanan publik yang belum menggunakan aplikasi umum.
Layanan Publik Sektoral	Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki semua jenis layanan publik sektoral. Namun, terdapat satu layanan yang belum terpenuhi, yaitu layanan pertanahan pada jenis layanan publik sektor pengelolaan bangunan dan tanah. Pada layanan publik sektoral terdapat 11 sektor layanan yang masih bersifat manual.	Layanan didukung oleh aplikasi bagi pakai dan pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Layanan terkait pertanahan masih belum tersedia. Terdapat 11 sektor layanan yang masih bersifat manual. Dari layanan yang telah didukung aplikasi, masih

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Selanjutnya pada layanan publik sektoral, telah terdapat 10 sektor layanan yang telah menggunakan aplikasi umum atau pusat dalam mendukung layanannya.		terdapat 7 sektor yang hanya menggunakan aplikasi khusus dalam mendukung layanan.
Ketersediaan layanan terhadap program	Pada RPJMD Kabupaten Situbondo terdapat total 140 program. Dari semua program tersebut, 109 program (78%) telah didukung oleh 585 layanan eksisting di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sisanya, sebanyak 31 program (22%) masih belum didukung layanan dan terdapat 183 layanan yang tidak memiliki program terkait di RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026.	Seluruh program yang tercantum pada RPJMD telah didukung oleh layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Terdapat 31 program yang masih belum didukung layanan.

BAB 6
KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP

Kelancaran pelaksanaan program dan layanan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah (OPD) memiliki kaitan yang erat terhadap keberadaan aplikasi atau sistem informasi. Hal ini karena dukungan aplikasi atau sistem informasi meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan perluasan jangkauan layanan milik OPD. Pada BAB 6 ini akan dibahas mengenai kondisi terkini atau kondisi eksisting dari penggunaan aplikasi untuk mendukung layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan akan dimulai dari pendefinisian aplikasi SPBE, referensi SPBE, pembahasan kondisi eksisting aplikasi SPBE, metadata SPBE, permasalahan aplikasi SPBE kemudian diakhiri dengan analisis gap aplikasi SPBE.

6.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE merupakan aplikasi yang digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE menurut **PERPRES No. 95 Tahun 2018** terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus. **Aplikasi Umum** merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Aplikasi umum ini harus digunakan oleh setiap pemerintah daerah. Sedangkan **aplikasi khusus** merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah atau instansi pusat. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

6.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Pada domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional terkait aplikasi pemerintahan, diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE dalam 4 tingkatan struktur domain arsitektur aplikasi SPBE. Adapun tingkatan ini digambarkan sesuai **Gambar 6.1** yang penjelasannya sebagai berikut:

a. **Domain aplikasi**, yakni struktur yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah. Struktur ini menjadi tingkat 1 (pertama) di tingkat nasional;
b. **Area aplikasi**, yakni struktur yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan. Struktur ini merupakan struktur tingkat 2 (kedua) di tingkat nasional;
c. **Kategori aplikasi**, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);

d. **Sub kategori aplikasi**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

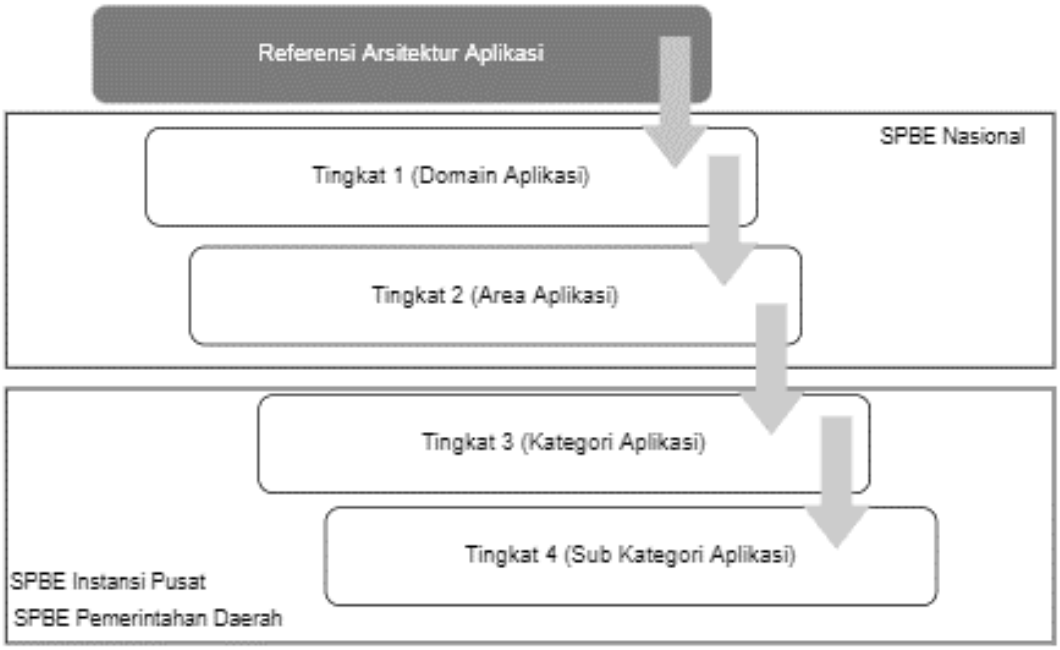

Gambar 6.1 Arsitekur Aplikasi SPBE

Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi. Hubungan atau keterkaitan domain aplikasi dengan domain lainnya digambarkan pada **Gambar 6.2.**

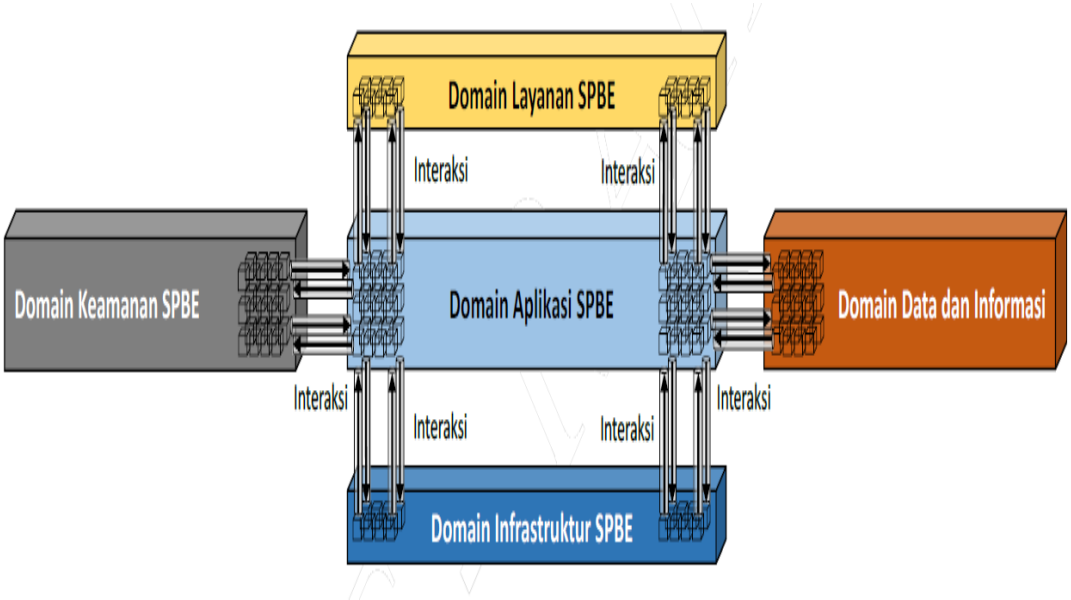

Gambar 6.2 Keterkaitan domain Aplikasi SPBE

6.3 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022, Domain Aplikasi SPBE memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di tingkat nasional. Tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat) merupakan struktur di tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah. Referensi arsitektur aplikasi SPBE dijelaskan lebih detail pada **Tabel 6.1**

Tabel 6.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
		Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

6.4 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei pada **40 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo**, diperoleh **207 (dua ratus tujuh) aplikasi** yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan layanan dan program OPD. Adapun OPD yang memiliki aplikasi paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni sebanyak **26 (dua puluh enam) aplikasi**. Disusul oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sama-sama memiliki **16 (enam belas) aplikasi**. Kemudian OPD yang memiliki aplikasi paling sedikit adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Bungatan, dan Puskesmas Bungatan yakni sebanyak **1 (satu) aplikasi**. Penggambaran dari kepemilikan aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Gambar 6.**

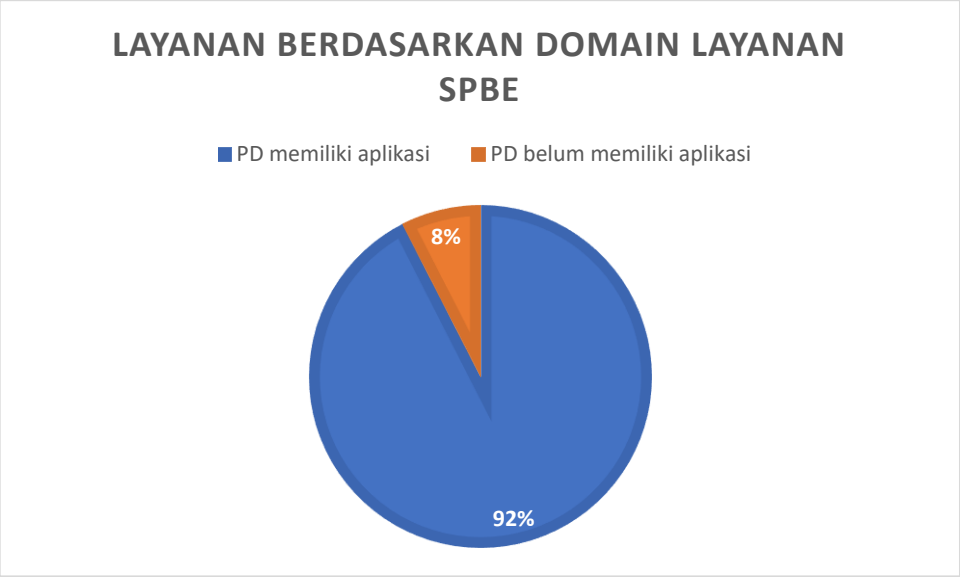

Gambar 6.3 Persentase Kepemilikan Aplikasi SPBE

Berdasarkan diagram pada **Gambar 6.3,** dapat diketahui bahwa **37 OPD (92%)** sudah memiliki aplikasi untuk mendukung layanan yang dimiliki OPD tersebut. Sedangkan, untuk OPD yang belum didukung aplikasi ada sebanyak **3 OPD (8%)**. Adapun OPD yang belum memiliki aplikasi yakni Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan pembagian dari aplikasi SPBE yang telah dianalisis. Pengelompokan terbagi menjadi 5 yaitu berdasarkan status pengembangan aplikasi, status penggunaan aplikasi, referensi arsitektur SPBE, unit pengembang aplikasi, dan basis aplikasi.

6.4.1 Status Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan status pengembangannya aplikasi SPBE terpisah menjadi 2 yakni sedang dikembangkan dan selesai dikembangkan. Status pengembangan aplikasi sedang dikembangkan adalah aplikasi yang sedang dalam tahap pengembangan baik dalam bentuk perbaikan atau peningkatan fitur tertentu dalam aplikasi. Status

pengembangan aplikasi selesai dikembangkan merupakan aplikasi yang tidak dalam tahap pengembangan atau perbaikan fitur dan sedang beroperasional mendukung layanan OPD. Persentase status pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo dijabarkan sebagai berikut.

- 204 aplikasi (99%) sudah dikembangkan
- 2 aplikasi (1%) sedang dikembangkan

Gambar 6.4 Persentase Status Pengembangan Aplikasi

Dari grafik pada **Gambar 6.4** dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah aplikasi berstatus selesai dikembangkan. Hanya terdapat **2 aplikasi** yang masuk dalam kategori aplikasi berstatus sedang dikembangkan yakni aplikasi AlaKO milik Inspektorat dan DAKENA (Data Kejadian Bencana) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6.4.2 Status Penggunaan Aplikasi

Berdasarkan status penggunaan, pengelompokan aplikasi terbagi menjadi 3 yaitu tidak digunakan, belum digunakan, dan masih digunakan. Status Penggunaan Aplikasi Tidak digunakan merupakan aplikasi yang sudah tidak lagi digunakan untuk mendukung layanan, Status Penggunaan Aplikasi belum digunakan merupakan aplikasi yang masih proses pengembangan dan belum

digunakan untuk mendukung layanan, dan Status Penggunaan Aplikasi masih digunakan merupakan aplikasi yang sampai saat ini masih digunakan untuk mendukung layanan. Persentase status pengembangan aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Situbondo dijabarkan sebagai berikut.

- 178 aplikasi (86%) masih digunakan
- 26 aplikasi (13%) sudah tidak digunakan
- 2 aplikasi (1%) belum digunakan

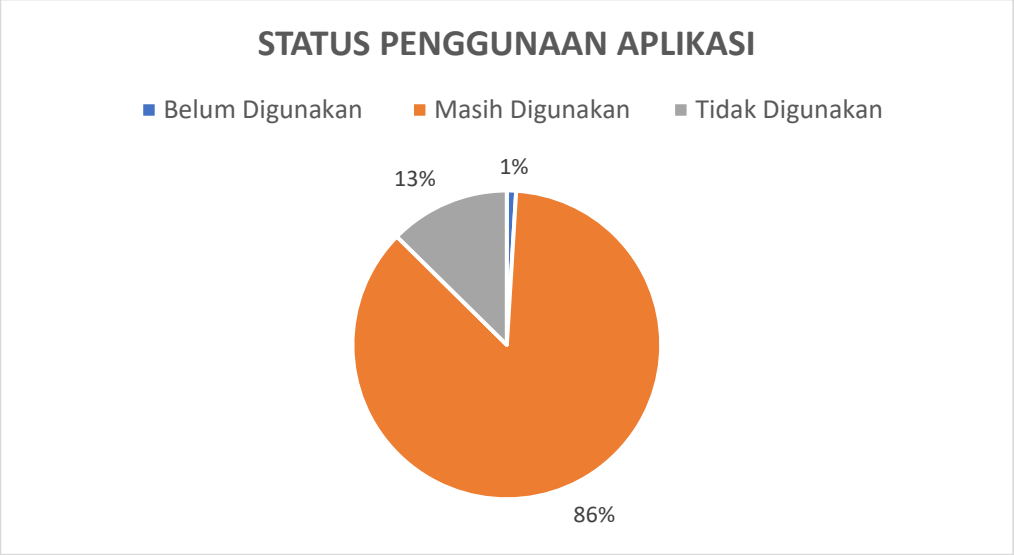

Gambar 6.5 Persentase Status Penggunaan Aplikasi

Data persentase pada **Gambar 6.5** menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan aplikasi yang masih aktif digunakan oleh OPD. Adapun aplikasi yang sudah tidak digunakan adalah:

a. UKPBJ milik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
b. E-Berkah, SIMDA, dan Website Setda yang dimiliki oleh Bagian Umum
c. Website DPRD yang dimliki oel Sekretariat Dewan Perwalikan Rakyat Daerah
d. KLIK-ON, SPIP, dan WBS milik Inspektorat
e. Apresiasi, Dilan, dan SIKALAP milik BadangKepegawaian dan Pengembagnan Sumber Daya Manusia
f. ALADIN milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. SISDAMALI milik Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
h. SIPESAH milik Dinas Lingkungan Hidup
i. Website TIC milik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
j. Website DP3A milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
k. Aplikasi Buta Aksara, Padatiweb, SARPRAS, SiBudi, Sinabung, dan Web file (*Cloud*) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
l. SIRALIN milik Dinas Perhubungan
m. Sikembar Ikan milik Dinas Peternakan dan Perikanan

n. E-Claim milik Puskesmas Situbondo
o. Logistik Covid-19 milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Seluruh aplikasi di atas sudah tidak digunakan karena beberapa alasan seperti perpindahan menggunakan aplikasi lain, sudah digabungkan dengan aplikasi lainnya, hingga karena tidak ada SDM TIK yang dapat mengoperasikan aplikasi.

6.4.3 Area Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 kode referensi, yaitu **RAA 01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik, RAA 01.02 Aplikasi Umum Adminitrasi Pemerintahan, RAA 02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu dan RAA 02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu**. **Aplikasi Umum Layanan Publik** adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh OPD untuk mendukung pelayanan publik. **Aplikasi Umum Adminitrasi Pemerintahan** adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh OPD untuk mendukung administrasi pemerintahan. **Aplikasi Khusus Misi Tertentu** adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh OPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan OPD lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. **Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu** adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh OPD untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Data pengelompokan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan referensi aplikasi SPBE dijabarkan sebagai berikut.

- 93 (45%) Aplikasi Umum Adminitrasi Pemerintahan
- 88 (43%) Aplikasi Umum Layanan Publik
- 20 (10%) Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
- 5 (2%) Aplikasi Khusus Misi Tertentu

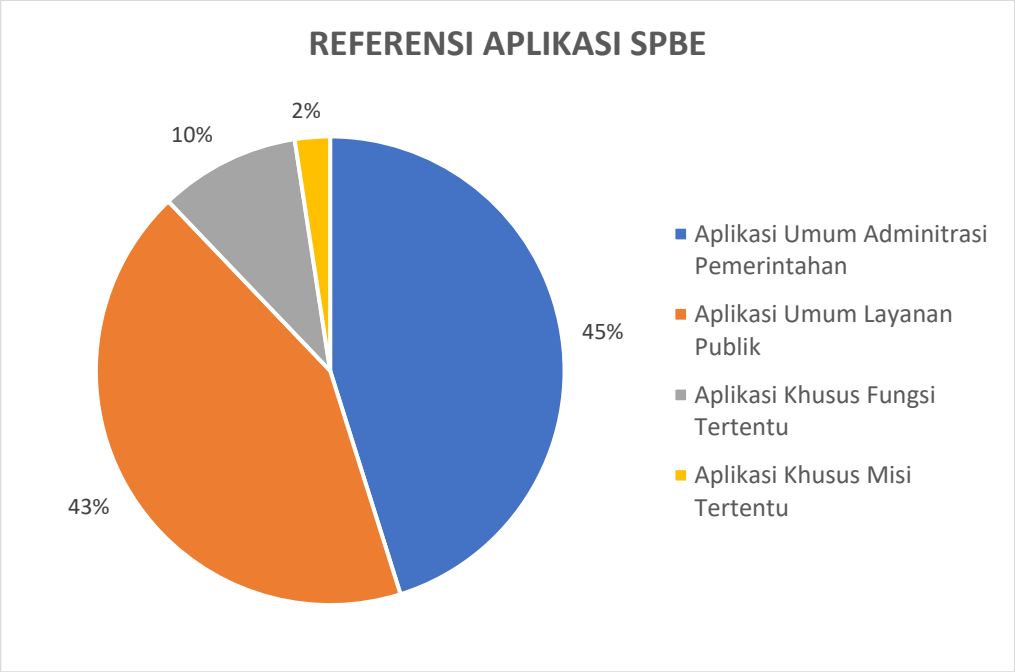

Gambar 6.6 Persentase Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan grafik pada **Gambar 6.6** di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi administrasi pemerintah adalah aplikasi dengan jumlah terbanyak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Aplikasi kedua terbanyak adalah aplikasi publik, dilanjutkan dengan aplikasi fungsi tertentu, dan aplikasi dengan jumlah paling sedikit adalah aplikasi misi tertentu. Adapun contoh dari aplikasi misi tertentu adalah aplikasi Web Covid milik Dinas Komunikasi dan Informatika, P-CARE Vaksin milik Puskesmas Situbondo, serta Logistik Covid-19 milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk keperluan penuntasan masalah terkait Covid-19. Jika dilihat pada masing-masing referensi arsitektur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas dengan jumlah Aplikasi Administrasi Pemerintahan paling banyak yaitu **16 (enam belas) aplikasi**. OPD dengan Aplikasi Layanan Publik paling banyak adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah **9 (sembilan) aplikasi.** Aplikasi Fungsi tertentu paling banyak dipegang oleh Puskesmas Situbondo yakni sebanyak **4 (empat) aplikasi.** Terakhir yakni Aplikasi Misi Tertentu paling banyak dipegang oleh Puskesmas Situbondo dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mana masing-masingnya memegang **2 (dua) aplikasi**.

6.4.4 Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Terdapat 4 jenis unit pengembang aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni aplikasi yang dikembangkan pusat, aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika, aplikasi yang dikembang Mandiri OPD dan aplikasi yang dikembangkan pihak ketiga (pihak swasta). Aplikasi yang dikembangkan pusat adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian atau

Pemerintah Provinsi. Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk mendukung layanan OPD. Aplikasi yang dikembangkan oleh Mandiri OPD merupakan aplikasi yang dibangun sendiri oleh SDM TI OPD yang bersangkutan. Sedangkan untuk aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga merupakan aplikasi milik OPD yang dikembangkan oleh pihak di luar pemerintah. Adapun uraian jumlah dan persentase dari Unit Pengembang Aplikasi dari total **207 (dua ratus tujuh) aplikasi** pada Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- 81 (39%) Aplikasi Dikembangkan Mandiri OPD
- 59 (29%) Aplikasi Dikembangkan Pusat
- 25 (12%) Aplikasi dengan unit pengembang tidak diinformasikan
- 23 (11%) Aplikasi Dikembangkan Dinkominfo
- 18 (9%) Aplikasi Dikembangkan Pihak ketiga

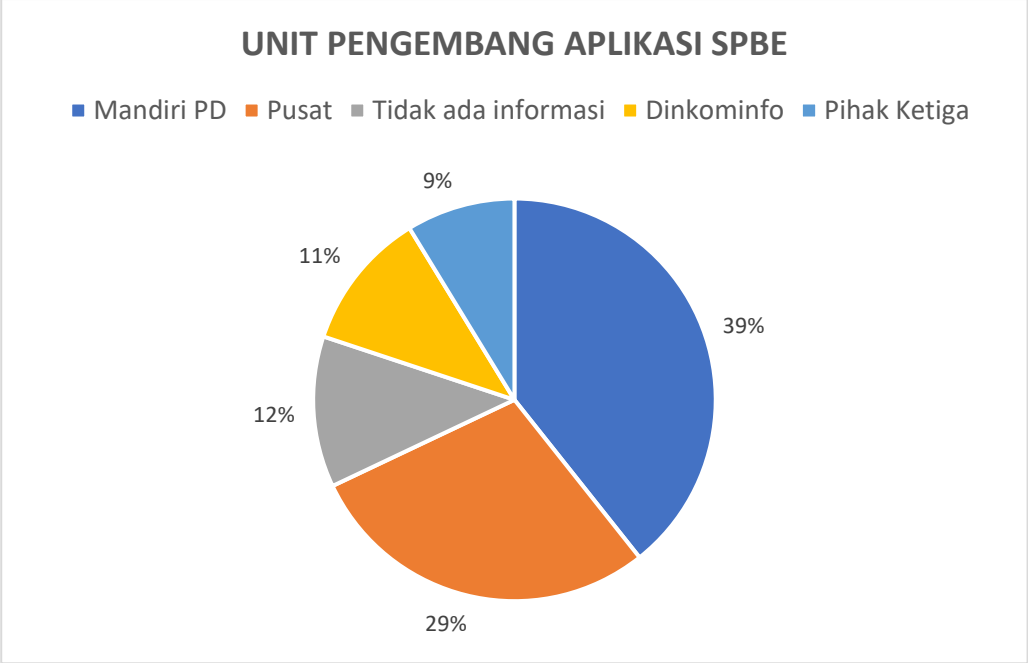

Gambar 6.7 Persentase Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Dari **Gambar 6.7** dapat diketahui bahwa sebagian besar aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mandiri OPD. Kondisi ini perlu disesuaikan lagi mengingat Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa aplikasi yang digunakan untuk mendukung layanan sebaiknya merupakan aplikasi umum bagi pakai seperti aplikasi yang dikembangkan pusat. Sementara pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, jumlah **aplikasi Pusat** yang digunakan oleh OPD menempati jumlah kedua terbanyak setelah **aplikasi Mandiri OPD** yakni sebanyak **59 (lima puluh sembilan) aplikasi**. Sementara jumlah aplikasi Mandiri OPD menempati jumlah terbanyak yakni **81 (delapan puluh satu) aplikasi**. Selain itu, jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika merupakan jumlah aplikasi ketiga terbanyak yang digunakan oleh OPD. Kemudian, pada pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga merupakan aplikasi yang paling sedikit digunakan di Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

Ketika dikaji lebih lanjut, aplikasi yang dikembangkan oleh mandiri OPD paling banyak adalah aplikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mengembangkan **19 (sembilan belas) aplikasi**. Aplikasi Mandiri OPD paling banyak kedua diduduki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah mengembangkan **14 (empat belas) aplikasi**. Selain itu pada bagian Aplikasi Pihak Ketiga, OPD yang paling banyak mengembangkan aplikasi pada unit pengembang ini adalah Badan Pendapatan Daerah dengan jumlah kepemilikan **5 (lima) aplikasi**, dan OPD kedua setelahnya adalah RSUD Dr. Abdoer Rahem dengan jumlah kepemilikan **4 (empat) aplikasi**.

6.4.5 Basis Aplikasi SPBE

Basis Aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 macam yakni aplikasi berbasis *mobile*, aplikasi berbasis *website*, aplikasi *dekstop*, dan aplikasi berbasis *Cloud*. Aplikasi berbasis *mobile* adalah aplikasi yang dibangun dan disematkan pada perangkat *mobile* (*smartphone*). Aplikasi berbasis *Cloud* adalah aplikasi yang dibangun pada komputasi awan (*Cloud*). Aplikasi berbasis *desktop* adalah aplikasi yang berjalan di satu atau beberapa komputer. Aplikasi berbasis *website* adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang berjalan dari sisi *client* dan membutuhkan web *server*, serta *browser* untuk menjalankannya. Detail pembagian basis aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- 188 (91%) aplikasi berbasis *website*
- 10 (5%) aplikasi berbasis *dekstop*
- 6 (3%) aplikasi berbasis *mobile*
- 1 (0,5%) aplikasi berbasis *website* dan *mobile*
- 1 (0,5%) aplikasi berbasis *desktop* dan *mobile*
- 0 (0%) aplikasi berbasis *Cloud*

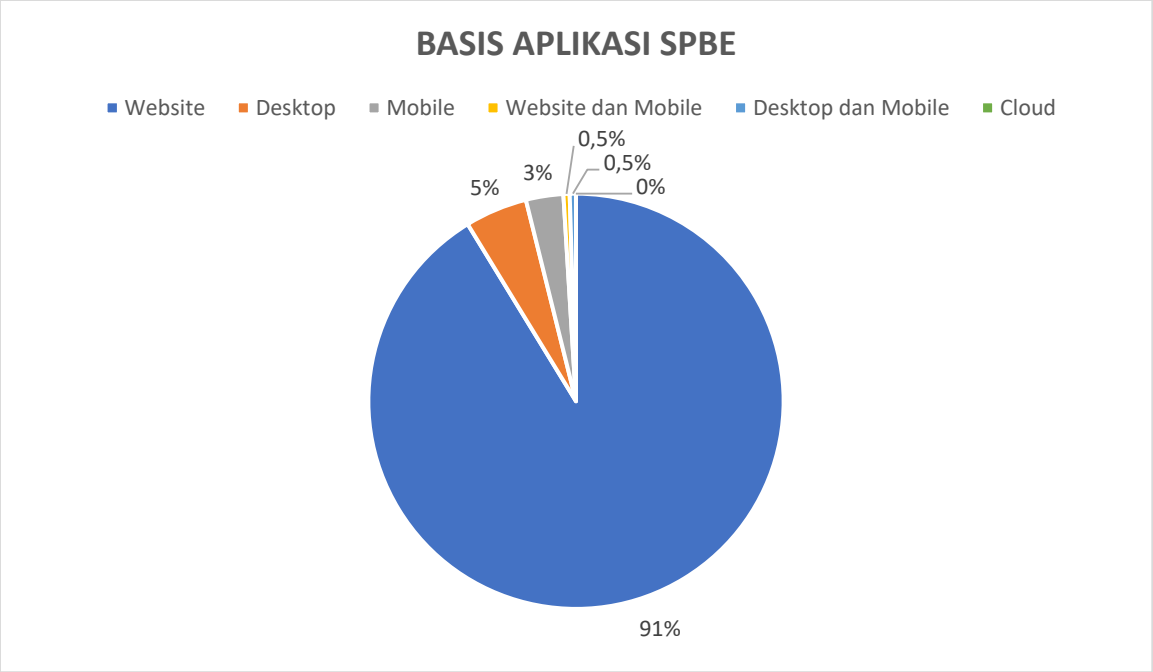

Gambar 6.8 Persentase Basis Aplikasi SPBE

Pada **Gambar 6.8** dapat diketahui bahwa mayoritas aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah aplikasi berbasis *website*. Sedangkan basis aplikasi yang paling sedikit digunakan pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah aplikasi berbasis Mobile. Pemerintahan Kabupaten Situbondo memiliki 2 aplikasi yang berbasis ganda, yaitu MySAPK milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan basis *Website* dan *Mobile*, serta RTTMC milik Dinas Perhubungan dengan basis *Desktop* dan *Mobile*.

6.5 Metadata Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi dianalisis **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Pada surat edaran tersebut, termuat metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan untuk Menyusun arsitektur aplikasi SPBE. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali. Secara umum metadata aplikasi meliputi atribut metadata seperti pada **Tabel 6.2.**

Tabel 6.2 Atribut Metadata Aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data.
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan.
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data.
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (*Desktop*; *Web; Cloud; atau Mobile*)
14	*Server* Aplikasi	*Server* yang digunakan oleh aplikasi, pilihan *server* yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras *server*.
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (*Open Source/Proprietary*).
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau *Framework* yang digunakan oleh aplikasi.
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
21	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Atribut pada **Tabel 6.2** digunakan untuk analisis metadata Aplikasi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Secara lebih detail Metadata aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada **Lampiran 5.1 Daftar Aplikasi SPBE** dan **Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE.**

6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE

Dalam pelaksanaan layanan yang ada, OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi. Dari hasil survei yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan layanan di Pemerintah Kabupaten Situbondo, di antaranya:

1. Aplikasi berjalan lambat
2. Aplikasi mengalami mal fungsi
3. Data hilang, ganda, atau tidak *update*
4. Server aplikasi bermasalah
5. Aplikasi tidak diberikan pembaruan berkala

6. Aplikasi belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat
7. Terjadinya peretasan terhadap aplikasi

Masalah yang sering menjadi penyebab permasalahan aplikasi ini adalah kendala jaringan internet yang bermasalah saat penggunaan aplikasi. Hal lain yang menjadi penyebab kendala operasional aplikasi adalah kurang terpenuhinya kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang melibatkan aplikasi. Kurangnya SDM atau kompetensi TI serta anggaran TI yang memadai juga menjadi penyebab kurang maksimalnya operasional aplikasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Terakhir, keberadaan standar keamanan TI yang juga perlu diperhatikan untuk mengatasi terjadinya peretasan aplikasi.

6.7 Analisis Gap

Setelah analisis kondisi eksisting, dilakukan analisis gap untuk membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Analisa *gap* dilakukan dengan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan bidang pada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu akan dilakukan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Untuk penjabaran lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Tabel 6.3 Analisa *Gap* Aplikasi SPBE

Kode OPD	Nama OPD	Kesimpulan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 9 layanan yang belum didukung aplikasi
3	Bagian Hukum	Terdapat 7 layanan yang belum didukung aplikasi
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Seluruh layanan dan Bidang belum didukung oleh aplikasi
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh layanan dan Bidang sudah didukung oleh aplikasi
6	Bagian Umum	Seluruh layanan dan Bidang belum didukung oleh aplikasi
7	Bagian Organisasi	Seluruh layanan dan Bidang sudah didukung oleh aplikasi
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Seluruh layanan dan Bidang belum didukung oleh aplikasi
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Terdapat 6 layanan yang belum didukung aplikasi
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terdapat 2 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
11	Inspektorat	Terdapat 1 layanan yang belum didukung aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	Kesimpulan
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Terdapat 20 layanan yang belum didukung aplikasi
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat 5 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 17 layanan yang belum didukung aplikasi
15	Badan Pendapatan Daerah	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 9 layanan yang belum didukung aplikasi
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terdapat 1 layanan yang belum didukung aplikasi
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terdapat 10 layanan yang belum didukung aplikasi
18	Dinas Kesehatan	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
19	Dinas Ketenagakerjaan	Terdapat 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 13 layanan yang belum didukung aplikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terdapat 10 layanan yang belum didukung aplikasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Terdapat 6 layanan yang belum didukung aplikasi
22	Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 12 layanan yang belum didukung aplikasi
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 5 layanan yang belum didukung aplikasi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Terdapat 6 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 21 layanan yang belum didukung aplikasi
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terdapat 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 3 layanan yang belum didukung aplikasi
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Terdapat 5 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 4 layanan yang belum didukung aplikasi
27	Dinas Penanaman Modal	Terdapat 3 layanan yang belum didukung

Kode OPD	Nama OPD	Kesimpulan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	aplikasi
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat 25 layanan yang belum didukung aplikasi
29	Dinas Perhubungan	Terdapat 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 22 layanan yang belum didukung aplikasi
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terdapat 1 layanan yang belum didukung aplikasi
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Terdapat 26 layanan yang belum didukung aplikasi
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Terdapat 29 layanan yang belum didukung aplikasi
33	Dinas Sosial	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 3 layanan yang belum didukung aplikasi
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Terdapat 6 Bidang, 4 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 19 layanan yang belum didukung aplikasi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Terdapat 13 layanan yang belum didukung aplikasi
36	Kecamatan Situbondo	Terdapat 6 Bidang, 5 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 20 layanan yang belum didukung aplikasi
37	Kecamatan Bungatan	Terdapat 15 layanan yang belum didukung aplikasi
38	Puskesmas Situbondo	Terdapat 6 Bidang, 3 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 27 layanan yang belum didukung aplikasi
39	Puskesmas Bungatan	Terdapat 12 layanan yang belum didukung aplikasi
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terdapat 5 layanan yang belum didukung aplikasi

BAB 7
KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab 7 menjelaskan terkait kondisi eksisting infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini dan Analisis GAP terhadap kondisi Infrastruktur SPBE ideal yang ingin dicapai. Penjelasan dimulai dari pengertian Infrastruktur SPBE yang didukung dengan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE, dan Permasalahan Infrastruktur serta Penjelasan dari hasil Analisis GAP antara kondisi eksisting dengan kondisi yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat digunakan untuk menemukan strategi pembangunan infrastruktur SPBE yang tepat dan baik selama 5 (lima) tahun mendatang.

7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (tiga) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Jaringan Intra Pemerintah** adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan Pemerintah Daerah. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Pemerintah Daerah. **Pusat Data nasional** merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

7.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur

Berdasarkan dengan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** menjelaskan bahwa Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Tujuan dari disusunnya Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya, agar infrastruktur SPBE dapat

dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur adalah:

1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2) Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur TIK;
3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5) Berbasis standar umum (*open standard*);
6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

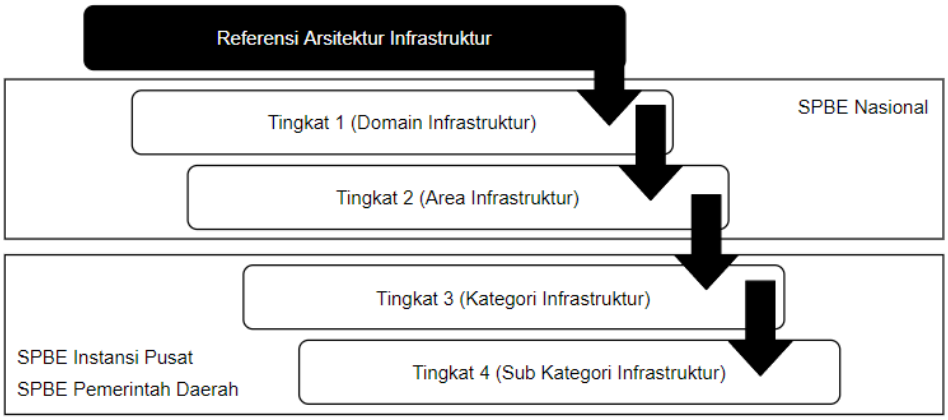

Gambar 7.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

RAI berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan. Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas yaitu:

1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama); dan
2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain arsitekturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan di tingkat bawahnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

7.3 Metadata Infrastruktur SPBE

Berasarkan dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional** menjelaskan terkait dengan metadata arsitektur infrastruktur SPBE yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur infrastruktur SPBE dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dalam penggunaannya, ketiga entitas

metadata arsitektur infrastruktur SPBE saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan terjadi hubungan internal dalam metadata arsitektur infrastruktur ini, untuk itu entitas ini perlu dilakukan dekomposisi, dengan atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE. Berikut pada **Tabel 7.1 – 7.11** merupakan penjabaran atribut yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata infrastruktur SPBE.

Tabel 7.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitasi Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara sub sistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan *virtualisasi* sebagai layanan platform berdasarkan teknologi *Cloud* untuk lingkungan kerja aplikasi.

Tabel 7.2 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Government Cloud*	Nama *government Cloud* yang digunakan.
3.	Deskripsi *Government Cloud*	Penjelasan dari *government Cloud* yang digunakan.
4.	Tipe *Government Cloud*	Jenis dari *government Cloud* yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS).
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *government Cloud* yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *government Cloud* yang digunakan,

No.	Nama Atribut	Keterangan
		diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	BiayaLayanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan *government Cloud.*
8.	Unit Pengembang *Government Cloud*	Unit yang melakukanpembangunan dan pengembangan *government Cloud.*
9.	Unit Operasional *Government Cloud*	Unit operasional *government Cloud* yang digunakan.
10.	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan *government Cloud.*
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Perangkat Lunak	Nama perangkat lunak yang digunakan.
3.	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari perangkat lunak yang digunakan.
4.	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari perangkat lunak yang digunakan (sistem operasi, sistem utilitas atau sistem *Database*).
5.	Jenis Sistem Operasi	(*Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS* atau Lainnya)
6.	Jenis Sistem Utilitas	(*Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS,* atau Lainnya)
7.	Jenis Sistem *Database*	(*Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS*, atau Lainnya)
8.	Jenis Lisensi	Jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan (lisensi seumur hidup, lisensi periodik, atau kode sumber terbuka).
9.	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak.
10.	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3.	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4.	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut antara lain *web server, mail server*, aplikasi, *Database*, file server, *active directory*, dan keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
		informasi.
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *data storage* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola *Server*	Unit pengelola server yang digunakan.
8.	Lokasi *Data Storage*	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihanlokasididapatdari metadata fasilitas.
9.	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10.	Kapasitas Penyimpanan	Kapasitas memori atau *Random Access Memory* (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB).
11.	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: *High End, Mid End, Low End*.
12.	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
13.	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID.
14.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Data Storage*	Nama dari *data storage* yang digunakan.
3.	Deskripsi *Data Storage*	Berisi deskripsi dari *data storage* yang digunakan.
4.	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data dan informasi.
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *data storage* yang digunakan, diisijika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola *Data Storage*	Unit pengelola *data storage* yang digunakan.
8.	Lokasi *Data Storage*	Lokasi dari *data storage* yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9.	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh *data storage*, pilihan perangkat lunak didapat dari

No.	Nama Atribut	Keterangan
		metadata perangkat lunak.
10.	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada *data storage*, satuan kapasitas penyimpanan dalam *Gigabyte* (GB).
11.	Metode Akses Data *Sharing*	Metodeakses data *Sharing* yang digunakan pada *data storage* (*Direct Attached Storage*/DAS atau *Network Attached Storage*/NAS).
12.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Network/ Communication Device*	Nama *Network/Communication Device* yang digunakan
3.	Deskripsi *Network/ Communication Device*	Penjelasan dari *Network/Communication Device* yang digunakan
4.	Tipe *Network/ Communication Device*	Jenis dari *Network/Communication Device* yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, *Router*, *Wireless* equipment, atau Transmission equipment)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *Network/Communication Device* yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *Network/ Communication Device* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7.	Unit Pengelola *Network/ Communication Device*	Unit pengelola *Network/ Communication Device* yang digunakan
8.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.7 Atribut Metadata Perangkat Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Security Device*	Nama dari *Security Device* yang digunakan
3.	Deskripsi *Security Device*	Penjelasan dari *Security Device* yang digunakan
4.	Tipe *Security Device*	Jenis dari *security device* yang digunakan (*Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System,*

No.	Nama Atribut	Keterangan
		Unified Threat Management, atau Network Access Control)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *Security Device* yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *Security Device* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola *Security Device*	Unit pengelola *Security Device* yang digunakan
8.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.8 Atribut Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Periferal	Nama periferal yang digunakan.
3.	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari periferal yang digunakan.
4.	Tipe Periferal	Jenis dari periferal yang digunakan (*input, output, input/output*).
5.	Lokasi Penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6.	Unit Pengelola *Network/ Communication Device*	Unit pengelola periferal yang digunakan
7.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.9 Atribut Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3.	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4.	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / sistem penghubung non pemerintah).
5.	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Nama Jaringan Intra	Nama jaringan intra yang digunakan oleh

No.	Nama Atribut	Keterangan
	yang Digunakan	sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra pemerintah.
8.	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.10 Atribut Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3.	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan.
4.	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan.
5.	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan.
6.	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan.
7.	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan.
8.	*Bandwidth*	Merupakan jumlah *bandwidth* yang tersedia.
9.	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan.
10.	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 7.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3.	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih.
4.	*Bandwidth* Intranet	Merupakan jumlah *bandwidth* internet yang tersedia selama 1 tahun.
5.	*Bandwidth* Internet	Merupakan jumlah *bandwidth* internet yang tersedia selama 1 tahun.
6.	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas.
7.	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas.
8.	Unit Kerja Penanggungjawab	Merupakan unit kerja/perangkatdaerah yang bertanggungjawab atas fasilitas.
9.	Klasifikasi *Tier* Fasilitas	Merupakan klasifikasi *tier* fasilitas.
10.	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Keseluruhan data Eksisting terkait infrastruktur SPBE didapatkan dari proses survei yang dilakukan oleh surveyor berdasarkan dengan Kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo . Kondisi Eksisting yang dimaksud meliputi Jaringan Intra, Pusat Data dan Ruang *Server* , Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, Komputasi, Sistem Penghubung Layanan, Permasalahan Infrastruktur dan Analisis Kesenjangan.

7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan *bandwidth* yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah cukup baik dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah terpusat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan **Fiber Optik dan *Wireless* PTP** dalam integrasi Jaringan yang digunakan, **keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo**. Keseluruhan data eksisting terkait infrastruktur Jaringan didapatkan dari proses pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh surveyor berdasarkan dengan kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjabaran kondisi eksisting jaringan intra pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada subbab dibawah ini.

7.4.1 Ketersediaan Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara komputer satu dengan yang lainnya. Secara umum topologi jaringan memiliki beberapa jenis seperti topologi cincin, bus, bintang dan lainnya. Kondisi eksisting terkait dengan ketersediaan topologi jaringan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah terintegrasi menggunakan Jaringan Intra Pemerintah melalui **Kabel Fiber Optik** dan ***Wireless* PTP** yang terhubung pada seluruh OPD dan Kecamatan. Penerapan jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan *Provider* yang

diperuntukan sebagai kebutuhan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah. Terdapat 2 *Provider* (ISP) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Integrasi Jaringan Intra Pemerintah antara lain yaitu:

1. ***Provider* (ISP) Biznet dengan kapasitas 610 Mbps** yang mana penggunaan terbagi dari 460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) + 150 untuk WIFI Publik.
2. ***Provider* (ISP) Megadata dengan kapasitas 250Mbps** yang mana penggunaannya terbagi dari 100 Mbps untuk server (*Dedicated*) + 150 Mbps untuk area publik (*Broadband*).

Adapun detail terkait dengan Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada subsubbab dibawah ini.

7.4.1.1 Topologi Umum

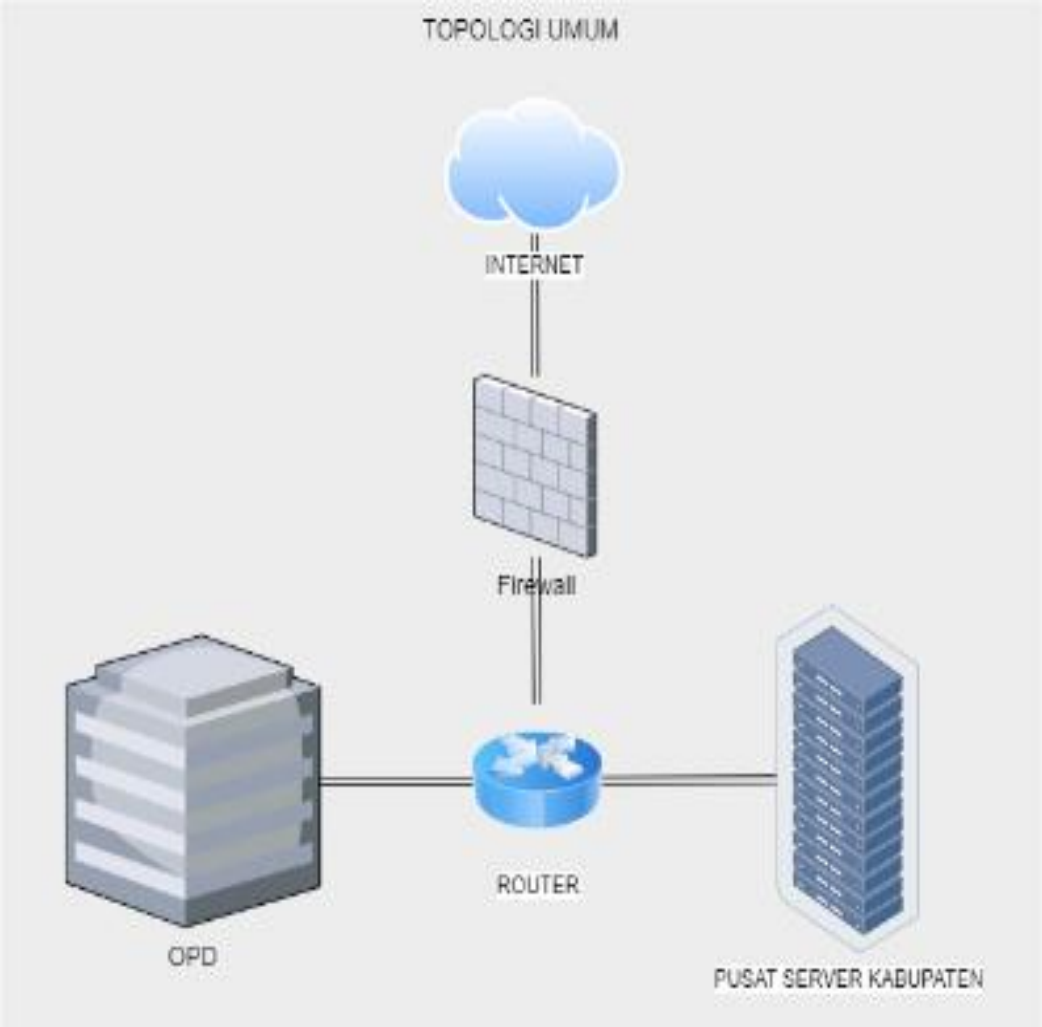

Gambar 7.2 Topologi Umum Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan **Gambar 7.2**, menjelaskan bahwa terdapat Topologi Jaringan Intra Pemerintah secara umum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail penjelasan terkait dengan Topologi Jaringan Umum yaitu:

1. Terdapat *Cloud* ISP yang mana digambarkan sebagai internet yang nantinya digunakan untuk Distribusi Jaringan Intra Pada OPD dan Pusat Server Kabupaten Situbondo.
2. *Firewall* diletakkan setelah akses internet turun dan sebelum *router* distribusi, yang mana digambarkan sebagai penerapan prosedur keamanan yang nantinya sebagai langkah awal pengamanan pada Jaringan Internet yang disediakan oleh *Provider* sebelum nantinya akan masuk pada *router* distribusi dan disebarkan pada OPD dan *Data Center* Kabupaten Situbondo.
3. Terdapat *Core Router* yang nantinya digunakan sebagai pusat distribusi jaringan pada OPD dan Pusat Data Kabupaten.

Maka dari itu penjelasan diatas merupakan gambaran secara umum terkait topologi yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

7.4.1.2 Topologi Distribusi

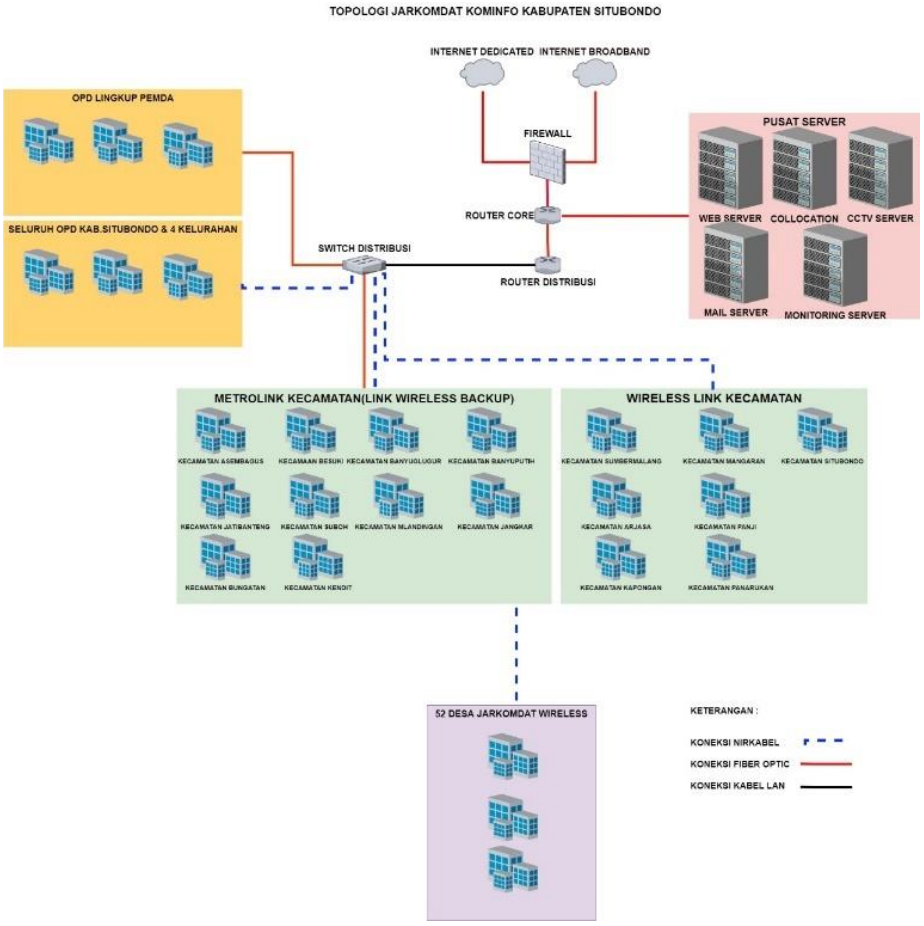

Gambar 7.3 Topologi Distribusi Jaringan Intra Pemerintah (JarKomDat)

Berdasarkan dengan **Gambar 7.3**, menjelaskan terkait dengan Topologi Distribusi Jaringan Intra Pemerintah (Jaringan Komunikasi Data) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan detail penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 7 Layer pengelompokan dari distribusi jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu *Layer Core* Distribusi (ISP terdapat 2 ISP yang digunakan, *Firewall, Core Router, Router Distribusi, dan Switch Distribusi*), Pusat data Server/*Data Center* (Web Server, *Collocation*, CCTV Server, Mail Server dan Monitoring Server), OPD Lingkup Sekretariat Daerah, Seluruh OPD dan 4 Kelurahan, Metrolink Kecamatan (*Link Wireless Backup*), *Wireless* Link Kecamatan, dan Jaringan Komunikasi Data *Wireless* pada 52 Desa.
2. Penggunaan Media Distribusi Jaringan Intra Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat 3 media yaitu Koneksi *Nirkabel*, Fiber Optik dan Kabel LAN (*Local Area Network*).

Adapun beberapa pendetailan terkait Topologi distribusi pada OPD, Kecamatan, dan Pusat Data yang ditampilkan pada **Gambar 7.4 – Gambar 7.8** serta akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini.

A. Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet OPD

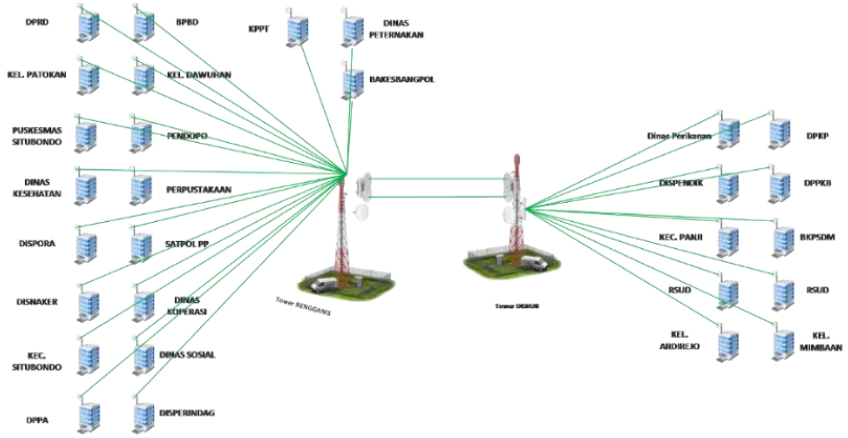

Gambar 7.4 Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet OPD

Berdasarkan **Gambar 7.4**, dijelaskan bahwa Semua OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah terkoneksi jaringan komunikasi data intranet dengan menggunakan media jaringan *wireless* dengan menempatkan 2 *backbone* utama yaitu di tower rengganis (Sekretariat Daerah) dan di tower Dinas Perhubungan dengan kapasitas link *Up To* 300Mbps. Pada tower rengganis terdapat 3 OPD, KPPT, 2 Kelurahan, 1 Kecamatan, 1 Puskesmas dan Pendopo. Pada tower Dinas Perhubungan terdapat 5 OPD, 1 Kecamatan, 2 RSUD dan 2 Kelurahan. Distribusi Jaringan yang digunakan dengan menerapkan PTP (*Point to Point*) antar *tower* dari *tower* rengganis dengan tower Dinas Perhubungan yang saling terhubung.

B. Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik Lingkungan Kantor Bupati

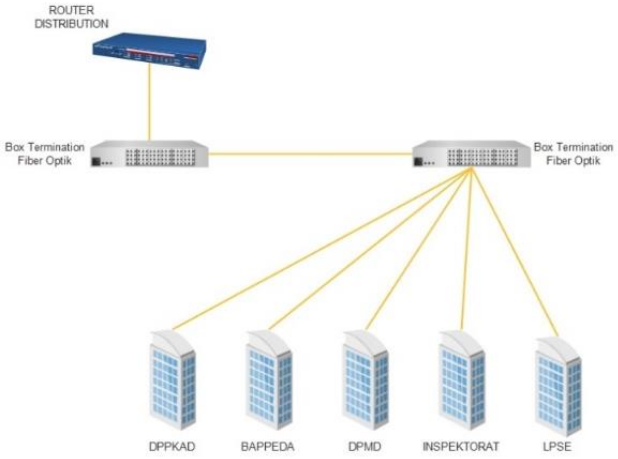

Gambar 7.5 Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik

Berdasarkan dengan **Gambar 7.5**, menjelaskan bahwa terdapat 5 OPD yang terhubung dengan jaringan *Fiber Optic* lingkup Kantor Bupati dengan kecepatan *bandwidth* maksimum 1 Gbps yang terhubung langsung ke pusat data server (*Data Center*). OPD yang terhubung yaitu DKKPAD, BAPPEDA, DPMD, Inspektorat dan LPSE.

C. Topologi Distribusi *Wireless* Kecamatan

Pada distribusi jaringan *wireless* Kecamatan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di bagi menjadi 2 wilayah yaitu kecamatan di wilayah barat dan wilayah timur. Pada wilayah barat terpusat pada kecamatan besuki sebagai *backbone* utama yang melalui repeater di pelabuhan kalbut terkoneksi melalui jaringan *wireless*. Sedangkan pada wilayah timur terpusat pada dinas perhubungan sebagai *backbone* utama yang terkoneksi menggunakan jaringan *wireless*. Dengan kapasitas link *Up To* 300Mbps. Seluruh kecamatan memiliki link backup yaitu menggunakan layanan *metro link* di setiap kecamatan. Detail terkait penjelasan Topologi distribusi *wireless* kecamatan akan dijelaskan dibawah ini.

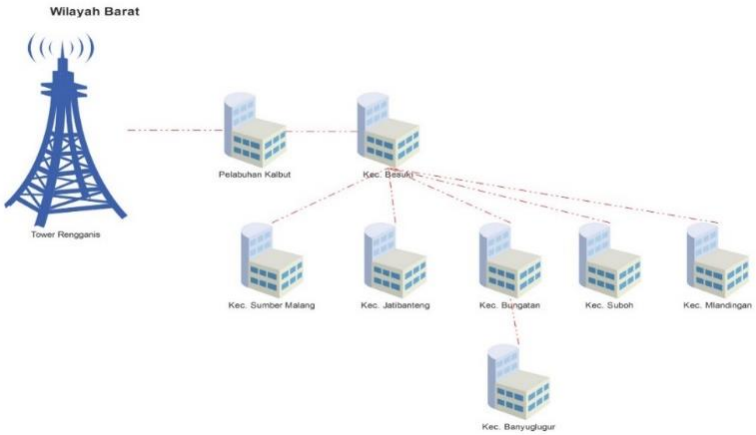

Gambar 7.6 Topologi Jaringan Kecamatan Wilayah Barat

Berdasarkan dengan **Gambar 7.6**, menjelaskan terkait dengan jaringan kecamatan pada wilayah barat terdapat 7 Kecamatan dan 1 Pelabuhan. Kecamatan yang terhubung yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Sumber Malang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Banyuglugur. Pelabuhan yang terhubung yaitu Kalbut.

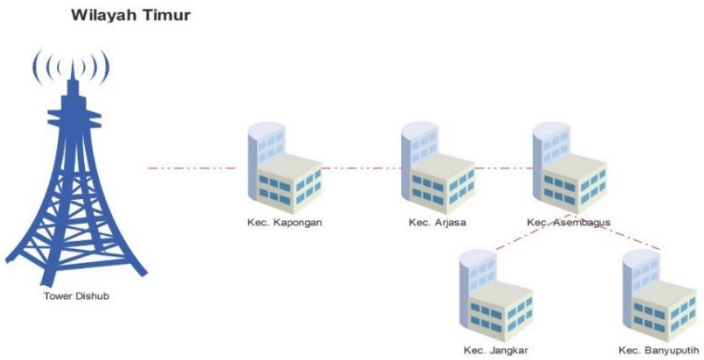

Gambar 7.7 Topologi Jaringan Kecamatan Wilayah Timur

Berdasarkan dengan **Gambar 7.7**, menjelaskan terkait dengan jaringan kecamatan pada wilayah timur terdapat 5 Kecamatan. Kecamatan yang terhubung yaitu Kecamatan Kapongan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Banyuputih.

D. Topologi Jaringan Pusat Server (*Data C*

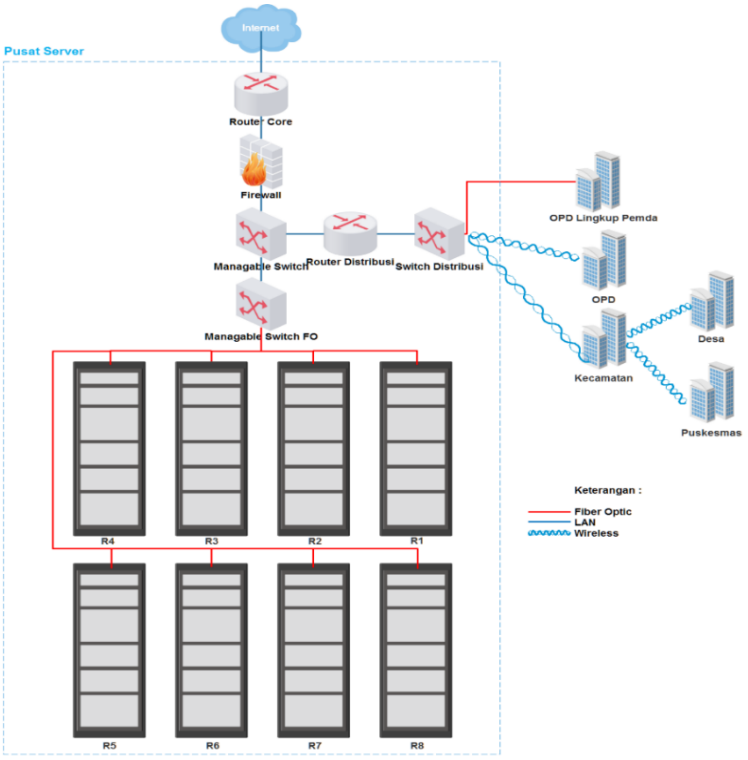

Gambar 7.8 Topologi Jaringan Pusat Server

Berdasarkan dengan **Gambar 7.8**, menjelaskan terkait Topologi Jaringan komunikasi data di pusat server kabupaten menggunakan 3 metode koneksi yaitu menggunakan koneksi fiber optik, koneksi lan, dan koneksi *wireless* radio. Pusat server kabupaten memiliki 8 rak server yang terhubung ke jaringan intranet kabupaten & jaringan publik yang seluruhnya menggunakan koneksi *Fiber Optic* sebelum ditransmisikan ke jaringan intranet maupun publik. Terdapat 2 *router* utama yaitu *Router* Distribusi sebagai penyedia jaringan intranet kabupaten yang terhubung langsung dengan OPD, Kecamatan, Desa, dan Puskesmas. *Router* Core difungsikan untuk akses dari jaringan publik.

7.4.2 Ketersediaan *Bandwidth*

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari pengumpulan data survei yang dilakukan sebelumnya, diperoleh data terkait dengan ketersediaan *bandwidth* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Adapun Kondisi Eksisting terkait dengan ketersediaan *Bandwidth* pada Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain:

1. Saat ini alokasi *bandwidth* yang ada di seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telat terpusat dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

2. Distribusi *Bandwidth* pada masing-masing OPD melalui Jaringan Intra Pemerintah dengan menggunakan media *Fiber Optic* dan *Wireless*.
3. Masih terdapat OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD dikarenakan Alokasi *Bandwidth* yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo melalui Jaringan Intra Pemerintah masih kurang mencukupi.
4. Tidak adanya pemusataan Anggaran yang dilakukan oleh OPD terkait dengan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* mandiri sehingga terdapat meningkatnya anggaran dan tidak adanya optimalisasi penggunaan *bandwidth*.

Berikut merupakan detail terkait dengan Ketersediaan *Bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah pada masing-masing OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo ditampilkan pada **Tabel 7.12.** dan Daftar OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri ditampilkan pada **Tabel 7.13.**

Tabel 7.12 Eksisting Ketersediaan *Bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah

Kode OPD	Nama OPD	*Bandwidth* (Mbps)		Jenis Koneksi
		Upload	*Download*	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
3	Bagian Hukum	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
6	Bagian Umum	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
7	Bagian Organisasi	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
11	Inspektorat	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*

Kode	Nama OPD	*Bandwidth* (Mbps)		Jenis Koneksi
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
15	Badan Pendapatan Daerah	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic* (Metrolink)+*Wireless*
18	Dinas Kesehatan	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
19	Dinas Ketenagakerjaan	20 Mbps	30 Mbps	*Wireless*
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Mbps	100 Mbps	*Fiber Optic*
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
22	Dinas Lingkungan Hidup	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic*
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	30 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
29	Dinas Perhubungan	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic* (Metrolink)+*Wireless*
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
33	Dinas Sosial	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
34	Satuan Polisi Pamong Praja	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	10 Mbps	10 Mbps	*Wireless*

Kode	Nama OPD	*Bandwidth* (Mbps)		Jenis Koneksi
36	Kecamatan Situbondo	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*
37	Kecamatan Bungatan	20 Mbps	20 Mbps	*Fiber Optic* (Metrolink)+*Wireless*
38	Puskesmas Situbondo	10 Mbps	10 Mbps	*Wireless*
39	Puskesmas Bungatan	10 Mbps	10 Mbps	*Wireless*
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20 Mbps	20 Mbps	*Wireless*

Berdasarkan dengan **Tabel 7.12** menjelaskan bahwa pendistribusian dari Bandwidt Jaringan Intra Pemerintah pada masing-masing OPD menggunakan 2 media yaitu Kabel *Fiber Optic* dan *Wireless*. Adapun total OPD yang terhubung menggunakan media Kabel ***Fiber Optik*** berjumlah **14 OPD**, yang terhubung menggunakan ***Wireless*** berjumlah **23 OPD** dan yang terhubung ***Wireless* dan Fiber Optik** berjumlah **4 OPD**.

Tabel 7.13 Eksisting Ketersediaan *Bandwidth* Mandiri pada OPD

Kode OPD	Nama OPD	Nama Jaringan	*Bandwidth*	Tipe Media jaringan	*Dedicated/ Broadband*
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Indihome	10 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
3	Bagian Hukum	Indihome	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Biznet	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Indihome	30 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet	30 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Icon+	70 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
6	Bagian Umum	IndiHome	100 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		IndiHome	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		IndiHome	40 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
7	Bagian Organisasi	IndiHome	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	IndiHome	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IndiHome	60 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
11	Inspektorat	Megadata	*Download* 10,38 Mbps *Upload* 14,50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	IndiHome	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IndiHome	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Speedy	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Megadata	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)

Kode OPD	Nama OPD	Nama Jaringan	*Bandwidth*	Tipe Media jaringan	*Dedicated/ Broadband*
15	Badan Pendapatan Daerah	Indihome	120 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Mega Data	30 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Telkom	100 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet	100 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Biznet	80 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
18	Dinas Kesehatan	Telkom	1 Gbps / 1000 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
19	Dinas Ketenagakerjaan	Telkom	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Biznet	610 Mbps	Kabel+Nirkabel (Radio) Untuk OPD	*Broadband*
		Megadata	250 Mbps	Kabel	*Broadband* dan *Dedicated*
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Biznet	85Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Indihome (Keuangan, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Metrologi, Perdagangan, Perindustrian)	30 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Indihome	50 Mbps x 6 unit	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	IndiHome	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Telkom	300 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		IndiHome	120 Mbps (100Mbps +	Kabel	*Up To* (*Broadband*)

Kode OPD	Nama OPD	Nama Jaringan	*Bandwidth*	Tipe Media jaringan	*Dedicated/ Broadband*
			20 Mbps)		
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Telkom	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet	150 Mbps (2 x 75 Mbps)	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Astinet	50Mbps Internasional (IX) 20Mbps Domestik (IIX)	Kabel	*Dedicated*
		Biznet	200Mbps	Kabel	*Dedicated*
		IndiHome	180Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet	200Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
29	Dinas Perhubungan	IndiHome	200 Mbps (100 Mbps + 100 Mbps)	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IndiHome	60 Mbps (10 Mbps untuk Sekretariat + 50 Utuk Pelayanan)	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Biznet	120 Mbps (50 Mbps Kepala Dinas+ 70 Mbps Keuangan)	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		IndiHome	30 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Biznet	75 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		IndiHome	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
33	Dinas Sosial	IndiHome	100 Mbps (50Mbps Seluruh Ruangan, 50Mbps Untuk	Kabel	*Up To* (*Broadband*)

Kode OPD	Nama OPD	Nama Jaringan	*Bandwidth*	Tipe Media jaringan	*Dedicated/ Broadband*
			Conference dan Server)		
34	Satuan Polisi Pamong Praja	IndiHome	20 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Biznet Metro	100Mbps	Kabel	*Dedicated*
		Telkom Indihome	*Up To* 100Mbps (50 Mbps Client + 50 Mbps Server INACBG)	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
		Biznet Healthnet	100Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
36	Kecamatan Situbondo	IndiHome	100 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
37	Kecamatan Bungatan	IndiHome	72 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
38	Puskesmas Situbondo	IndiHome	20 Mbps (10 Mbps Untuk Lantai 1 10 Mbps Untuk Lantai 2)	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
39	Puskesmas Bungatan	IndiHome	50 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IndiHome	100 Mbps	Kabel	*Up To* (*Broadband*)

Dari data **Tabel 7.13** telah dijelaskan bahwa terdapat 35 OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri. Terdapat beberapa kendala di beberapa OPD terkait dengan Jaringan yang lambat dan sering putus yang berdampak pada kinerja yang ada di masing-masing OPD sehingga dari beberapa permasalahan tersebut menjadi alasan pada 35 OPD melakukan Pengadaan Belanja Internet /Sewa *Bandwidth* Mandiri. Total Dari seluruh OPD yang melakukan pengadaan Internet/Sewa *Bandwidth* yaitu:

1. *Provider* Indihome dengan total sewa sebesar 3582 Mbps atau setara 3,582 Gbps dan OPD yang melakukan pengadaan internet/sewa *bandwidth* mandiri sebanyak 31 OPD
2. *Provider* Biznet dengan total sewa sebesar 5130 Mbps atau setara 5,130 Gbps dan OPD yang melakukan pengadaan internet/sewa *bandwidth* mandiri sebanyak 12 OPD

3. *Provider* Megadata dengan total sewa sebesar 380 Mbps dan OPD yang melakukan pengadaan internet/sewa *bandwidth* mandiri sebanyak 4 OPD
4. *Provider* Icon+ dengan total sewa sebesar 70 Mbps dan OPD yang melakukan pengadaan internet/sewa *bandwidth* mandiri sebanyak 1 OPD
5. *Provider* Astinet dengan total sewa sebesar 50 Mbps dan OPD yang melakukan pengadaan internet/sewa *bandwidth* mandiri sebanyak 1 OPD
6. *Provider* Speedy dengan total sewa sebesar 20 Mbps dan OPD yang melakukan pengadaan internet/sewa *bandwidth* mandiri sebanyak 1 OPD

7.5 Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022, Ruang Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Kondisi Eksisting terkait Ruang Server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan Server pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang server yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa OPD yang telah meletakkan pada Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server yang dititipkan oleh OPD dan **Belum menerapkan penyimpanan pada Pusat Data Nasional (PDN)**. Penjelasan secara detail terkait dengan Daftar server dan Aspek pusat data akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

7.5.1 Daftar Server

Berdasarkan dengan kondisi eksisting terkait dengan data server yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa daftar server yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa OPD. Dari hasil pengumpulan data survei yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat **43 Server** yang dimiliki oleh **14 OPD.** Detail penjabaran daftar server yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Situbondo ditampilkan pada **Tabel 7.14.**

Tabel 7.14 Eksisting Ketersedian *Server* Kabupaten Situbondo

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server
3	Bagian Hukum	I.PKS.001	IBM	Server aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo	Web Server	Internal OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data Dinkominfo
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	I.PKS.002	Server Production	Aplikasi SPSE	Aplikasi	Internal OPD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Internal OPD
		I.PKS.003	Server Penyimpanan	Digunakan untuk menyimpan data transaksi pengadaan dan kontrak pengadaan	*Database*	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD
		I.PKS.004	Server Backup	Digunakan untuk menyimpan data backup dari data kontrak dan transaksi pengadaan	*Database*	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD
		I.PKS.005	Server Sekretariat	Digunakan untuk menyimpan dokumen administrasi meliputi perencanaan, penganggaran, standarisasi LPSE	Aplikasi dan *Database*	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD
		I.PKS.006	Server Monitoring	Digunakan untuk	Web Server	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server
				pemantauan server PBJ				
11	Inspektorat	I.PKS.007	PC Server	Storage Data Aplikasi dan *Database* Server	Webserver, Aplikasi dan *Database*	Inspektorat	Diskominfo	Pusat Data Dinkominfo
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	I.PKS.008	Atttendance	Sebagai server yang menyimpan informasi finger seluruh ASN	*Database*	Internal OPD	BKPSDM	Internal OPD
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	I.PKS.009	server kominfo	pusat data	Web serfer	internal OPD	diskominfo	pusat data diskominfo
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	I.PKS.010	Proxy SIAK 24	Sebagai proxy SIAK Terpusat untuk layanan adminduk kabupaten	Proxy Server	Internal OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo	Internal OPD
		I.PKS.011	Server KTP elektronik	Digunakan sebagai penyimpanan data KTP Elektronik	*Database*	.	.	.
		I.PKS.012	Server Hosting	Digunakan untuk aplikasi SILAO, SIKANDA, BALADA AKHIR, PEVITA, KENDEDES	Aplikasi dan *Database*	OPD	OPD	OPD
		I.PKS.013	Proxy SIAK	Sebagai proxy SIAK Terpusat untuk layanan adminduk	Proxy	OPD	OPD	OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server
				kabupaten				
		I.PKS.014	Server Konsolidasi	Digunakan sebagai penyimpanan data aplikasi konsolidasi data penduduk	*Database*	OPD	OPD	OPD
18	Dinas Kesehatan	I.PKS.015	HP Proliant DL380 Gen 8	Server utama untuk seluruh aplikasi Dinas Kesehatan	Web Server/*Data base*	Internal OPD	Dinas Kesehatan	Internal OPD
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.PKS.016	KOMINFO_DELL ST: 4T3SZL	"DELL Power Edge R730 (ST: 4T3SZL2), Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.017	KOMINFO_DELL ST: 77CL9M2	"DELL Power Edge R730 (ST: 77CL9M2), Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.018	KOMINFO_DELL ST: 2HJJ6Q2	"DELL Power Edge R530 (ST: 2HJJ6Q2), Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.019	KOMINFO_DELL R430	"DELL R430, Intel(R) Xeon(R)	Server VPS	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server
				CPU E5-2603 v4 @ 1.70GHz"				
		I.PKS.020	KOMINFO_DELL R730	"DELL R730, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.021	KOMINFO_HP DL380	HP DL380 Gen9, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server *Database*	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.022	KOMINFO_DELL R540	DELL R540, Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz"	Server Aplikasi	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.023	DELL_CPANEL	Cpanel Server WHM, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz"	Cpanel	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.024	KOMINFO_IBM	IBM, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407"	Server Aplikasi	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.025	KOMINFO_DELL R540_1	DELL R540, Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz"	Server Aplikasi	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo
		I.PKS.026	KOMINFO_DELL R540_2	DELL R540, Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU	Server Aplikasi	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server
				@ 1.70GHz"				
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I.PKS. 027	Server DPMPTSP	Digunakan untuk website DPMPTSP, SIPINTER, SiTajin	Web server dan *Database*	Internal OPD	Diskominfo	Pusat Data Dinkominfo
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I.PKS. 028	Server Node A	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART A DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	Internal OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal OPD
		I.PKS. 029	Server Node B	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART B DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	Internal OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal OPD
		I.PKS. 030	Server Node C	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART C DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	Internal OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal OPD
		I.PKS. 031	Server NODE D	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART D DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	Internal OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal OPD
		I.PKS. 032	Server *Database*	Server *Database*	*Database*	Internal OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal OPD
		I.PKS. 033	Server Sync	Server Sync	Sinkronisasi data	Internal OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal OPD
29	Dinas Perhubungan	I.PKS. 034	Server *Database*	Sebagai server penyimpanan sementara rekaman RTTMC	*Database*	Internal OPD	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
33	Dinas Sosial	I.PKS.	CPANEL	Server	Web Server,	Pusat Data	Dinas Sosial	Pusat

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server
		035		kontrol panel hosting Aplikasi	Aplikasi, *Database*	Dinkominfo	Situbondo	Data Dinkominfo
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	I.PKS.036	Server billing system	MSSQL *Database* server untuk billing system RS	*Database*	internal	RSUD dr. Abdoerrahem + pihak ketiga	Internal
		I.PKS.037	Server Farmasi & Persediaan non Farmasi	Server *Database* untuk aplikasi Farmasi dan persediaan non Farmasi	*Database*	Internal	rsud dr. Abdoerrahem + pihak ketiga	Internal
		I.PKS.038	DNS Server	Server untuk DNS	DNS	Internal	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal
		I.PKS.039	Server Eklaim	Server Aplikasi Eklaim	Aplikasi	Internal	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal
		I.PKS.040	Server Promedika	Server untuk aplikasi SIMRS	Aplikasi dan *Database*	Internal OPD	Internal OPD + pihak ketiga	Internal OPD
		I.PKS.040	Server Radius	Server untuk authentikasi radius	aplikasi	Internal	Internal	Internal
		I.PKS.042	Server BLUD	Server untuk aplikasi keuangan BLUD	Web server + *Database*	Internal	Pihak ketiga	Pusat Data Diskominfo
37	Kecamatan Bungatan	I.PKS.043	LocalHost	Server yang digunakan untuk layanan hosting domain	Web Server	-	Kecamatan Bungatan	Pusat Data Diskominfo

7.5.2 Aspek Pusat Data

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pusat Data atau Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Tolak ukur kelayakan atau kesiapan sebuah ruang server dalam memenuhi fungsinya salah satunya adalah Aspek pusat data. Terutama apabila ruang server tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data pemerintah daerah. Aspek ruang server perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada **TIA-942 untuk standar yang baik dalam pembuatan serta pemusatan data pada Ruang Server**. Berikut merupakan Aspek Pusat Data yang diterapkan pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika dan beberapa OPD yang memiliki ruang server yang ditampilkan pada **Tabel 7.15.**

Tabel 7.15 Kondisi Eksisting Aspek Ruang Server

Kode OPD	Nama OPD	Aspek Pusat Data
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	CCTV
		AC
		Cadangan listrik (*power backup*)
		Master sleve AC
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		Ruangan khusus untuk memonitoring server
		Pintu masuk lebih dari satu
		Raised floor
		UPS
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	AC
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		Pintu masuk lebih dari satu
		UPS
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	AC
		Cooling system
		UPS
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cadangan listrik (*power backup*)
		Labelling kabel
		Pintu masuk lebih dari satu
		UPS
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AC
		Cadangan listrik (*power backup*)
		Cooling system
		UPS
18	Dinas Kesehatan	AC
		Master sleve AC

Kode OPD	Nama OPD	Aspek Pusat Data
		CCTV
		Labelling kabel
		Raised floor
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	AC
		Cadangan listrik (*power backup*)
		CCTV
		Labelling kabel
		Master sleve AC
		Cooling system
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		Raised floor
		Pintu masuk lebih dari satu
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
		Ruangan khusus untuk memonitoring server
		UPS
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	AC
		Cadangan listrik (*power backup*)
		UPS
		Raised floor
		CCTV
		Cooling system
		Labelling kabel
		Master sleve AC
29	Dinas Perhubungan	AC
		Cooling system
		Labelling kabel
		UPS
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	*Cooling system*
		AC
		Labelling kabel
		Master sleve AC
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		UPS
		Cadangan listrik (*power backup*)

Berdasarkan dengan **Tabel 7.15** menjelaskan bahwa Kondisi Eksisting saat ini terkait penerapan Aspek Ruang Server yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu terdapat **10 OPD** yang memiliki Ruang Server dan menerapkan Aspek pada ruang server.

7.6 Komputasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 pada sub domain Infrastruktur disebutkan komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu **komputasi awan dan fasilitas komputasi**. **Komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem *Cloud*. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih komplek seperti halnya *Cloud computing* ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem *Cloud*.

7.6.1 Komputasi Awan

Mengacu **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional.** Pada sub domain Infrastruktur disebutkan komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu **komputasi awan dan fasilitas komputasi**. **Komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem *Cloud*. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih komplek seperti halnya *Cloud computing* ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem *Cloud*.

Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS). Salah satu yang sering ditemukan dan paling populer adalah *Google Drive*, yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya. Detail penerapan penggunaan Komputasi Awan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di masing-masing OPD ditampilkan pada **Tabel 7.16** dan Grafik Persentase Total Penerapan Penggunaan Komputasi Awan pada **Gambar 7.5.**

Tabel 7.16 Eksisting Komputasi Awan

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Government *Cloud*	Deskripsi Government *Cloud*	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	I.KA. 001	*Google Drive*	Digunakan untuk penyimpanan yang didapatkan	Internal OPD (Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama)	*Google* (Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama)	Gratis

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Government *Cloud*	Deskripsi Government *Cloud*	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan
				dari lisensi email *Google*			
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	I.KA. 002	*Google Drive*	Digunakan untuk menyimpan Data Bagian Kesejahteraan	Internal OPD (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	*Google* (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Gratis
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	I.KA. 003	*Google Drive*	Digunakan untuk penyimpanan yang didapatkan dari lisensi email *Google*	Internal OPD (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	*Google* (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	8.214.000/ tahun (4user)
11	Inspektorat	I.KA. 004	*Google Drive*	Digunakan untuk Penyimpanan SK dan Data Pegawai	Internal OPD (Inspektorat)	*Google* (Inspektorat)	Gratis
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	I.KA. 005	*Google Drive*	Penyimpanan data perencanaan, dokumentasi foto acara	Internal OPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	*Google* (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Gratis
19	Dinas Ketenagakerjaan	I.KA. 006	*Google Drive*	Digunakan untuk penyimpanan data ketenagakerjaan	Internal OPD (Dinas Ketenagakerjaan)	*Google* (Dinas Ketenagakerjaan)	Gratis
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.KA. 007	NAS	Digunakan untuk Penyimpanan	Internal OPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Berbayar dan Lisensi
22	Dinas Lingkungan Hidup	I.KA. 008	*Google Drive*	Digunakan untuk Penyimpanan Data Lingkungan Hidup	Internal OPD (Dinas Lingkungan Hidup)	*Google* (Dinas Lingkungan Hidup)	Gratis
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	I.KA. 009	*Google Drive*	Digunakan untuk Penyimpanan Data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Internal OPD (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	*Google* (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	Gratis
		I.KA.	*One Drive*	Digunakan	Internal OPD	Microsoft	Gratis

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Government *Cloud*	Deskripsi Government *Cloud*	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan
		010		untuk Penyimpanan Data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	(Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I.KA. 011	*Google Drive*	*Cloud* Computing dalam Paket G-Suite	Internal OPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	*Google* (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Gratis
38	Puskesmas Situbondo	I.KA. 012	*Google Drive*	Digunakan untuk penyimpanan data puskesmas situbondo	Internal OPD (Puskesmas Situbondo)	*Google* (Puskesmas Situbondo)	Gratis
39	Puskesmas Bungatan	I.KA. 013	*Google Drive*	Digunakan untuk penyimpanan data puskesmas Bungatan	Internal OPD (Puskesmas Bungatan)	*Google* (Puskesmas Bungatan)	Gratis

Dari hasil pengumpulan data survei yang ditampilkan pada **Gambar 7.7** terkait dengan kondisi eksisting terdapat data penggunaan Komputasi Awan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain penggunaan *Google Drive*, NAS, dan *One Drive*. **Penggunaan *Google Drive*** sebesar **84%** pada **11 OPD, Penggunaan NAS** sebesar **8%** pada **1 OPD**, dan **Penggunaan *Cloud*** sebesar **8%** pada **1 OPD.**

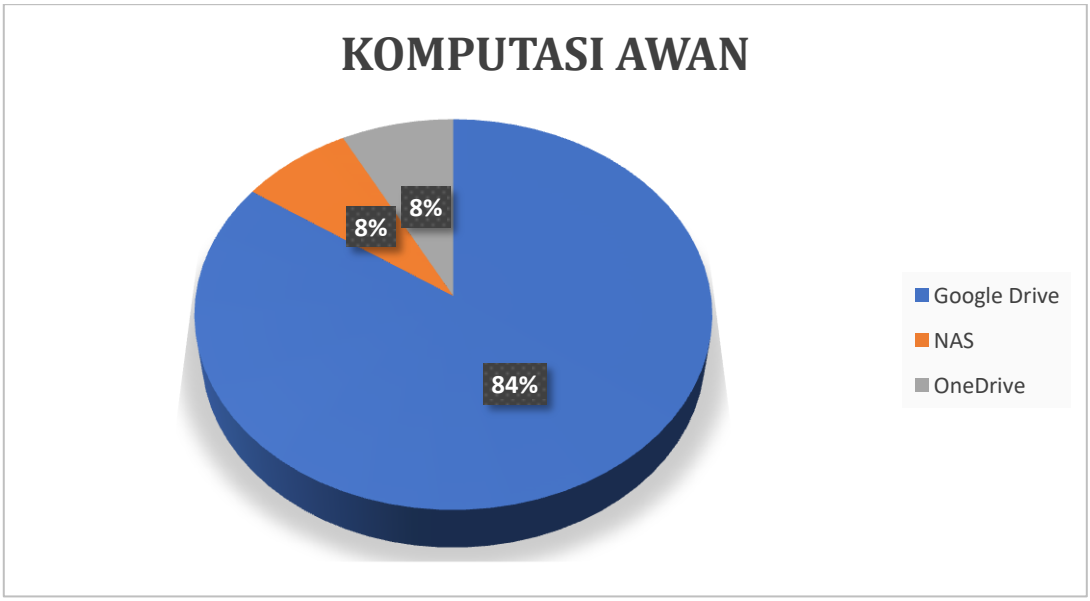

Gambar 7.9 Penggunaan Komputasi Awan

7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server)

Mengacu **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional**, fasilitas komputasi awan berupa pusat data nasional, pusat data komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional dan dari Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, fasilitas komputasi awan berupa pusat data nasional, pusat data komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini berupa fasilitas komputasi milik IPPD yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Dalam ruang lingkup daerah, pusat data ini dapat diwakilkan dengan ruang server, sedangkan untuk pusat komputasi kendali dapat berupa *command center.* Pemanfaatan pusat komputasi lebih membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga tidak banyak yang menerapkan untuk tingkat OPD. Namun kelebihan dari fasilitas komputasi yang memadai salah satunya adalah bisa digunakan secara berbagi dengan OPD lain seperti penggunaan *Google Drive, Onedrive* dan *OwnCloud*. Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting OPD yang terdapat pada Kabupaten Situbondo hingga saat ini terkait penerapan komputasi awan **belum menyeluruh menerapkan dan hanya terdapat beberapa OPD yang telah menggunakan dan menerapkan**. Detail Penerapan Fasilitas Komputasi dapat diihat pada **Tabel 7.17.**

Tabel 7.17 Eksisting Fasilitas Komputasi

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Fasilitas	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Sistem Pengaman Fasilitas
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	I.FK. 001	VPS	Dinas Komunikasi dan Informatika	BKPSDM	Diskominfo dan BKPSDM	Enkripsi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.FK. 002	NAS	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Enkripsi

Berdasarkan dengan **Tabel 7.17**, terdapat **2 OPD** yang telah menerapkan Fasilitas Komputasi yaitu **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan **menggunakan fasilitas VPS (*Virtual Private Server*)** dan **Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan **menggunakan fasilitas NAS**

(*Network Attached Storage*) yang diletakkan pada Pusat Data/*Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika.

7.7 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang menjelaskan terkait sistem Penghubung Layanan. **Sistem Penghubung layanan** merupakan perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan. Sistem penghubung layanan bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan integrasi layanan yang telah didukung dengan aplikasi. Sistem penghubung layanan dapat direalisasikan ke dalam bentuk *Web Service*, API (*point to point maupun gateway*), dan *Database*. Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapka**n Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan *Web Service***. Berikut merupakan detail sistem penghubung layanan yang ditampilkan pada **Tabel 7.18.**

Tabel 7.18 Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Aplikasi yang Dihubungkan
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	I.SPL.001	API	Digunakan untuk menghubungkan data transaksi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah	API	Internal	Web API - BKAD
11	Inspektorat	I.SPL.002	Notifikasi Whatsapp	Untuk keperluan Notifikasi / Pemberitahan aplikasi melalui nomor Whatsapp	Web API Whatsapp	Diskominfo	Aplikasi AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)
13	Badan Kesatuan Bangsa	I.SPL.003	E-Sakip	untuk memberikan penilaian pada	E-Sakip	pemkab. situbondo	ke semua opd

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Aplikasi yang Dihubungkan
	dan Politik			ASN. seperti SKP			
15	Badan Pendapatan Daerah	I.SPL.004	Integrasi Data BPHTB Bapenda dengan BPN	Sistem yang mendukung pertukaran data BPHTB antara BPN dengan Bapenda	*Web Service* Host to Host	Bapenda	BPHTB
		I.SPL.005	Pembayaran Elektronik PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya dengan Bank Jatim	Sitstem yang mendukung Pembayaran Elektronik PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya antara Bank Jatim dengan Bapenda	WebService Host to Host	Bapenda	BPHTB, PBB dan Pajak Daerah Lainnya
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	I.SPL.006	Data Warehouse Kependudukan (DWH)	-	*Web Service*	Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Data Warehouse Kependudukan (DWH)
18	Dinas Kesehatan	I.SPL.007	*Web Service* Aplikasi IR	*Web Service* untuk menghubungkan data dari aplikasi SIMESSEM ke Ruang IR	*Web Service*	Diskominfo	SIMESSEM
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.SPL.008	Satu Data	Sistem Penghubung Layanan berupa service API, data didapatkan bersumber dari aplikasi satudata yang dikelola oleh Bidang	Service API	OPD	satudata.situbondokab.go.id

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Aplikasi yang Dihubungkan
				Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo			
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	I.SPL.009	DP3AP2KB KABUPATEN SITUBONDO (http://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/agenda/)	terhubungan ke website sibesti	WEB API	OPD	SIBESTI (https://sibesti.situbondokab.go.id/)
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I.SPL.010	*Web Service* (NIK)	Untuk menghubungkan penggunaan data perorangan dengan menggunakan NIK	Web	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIPINTER - Portal Dispenduk
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I.SPL.011	API KEMENDIKBUDRISTEK API SISGUR API ABSENSI	Sistem penghubung dibuat sebagai integrasi data untuk mendapatkan data valid yang terbarukan.	*Web Service* / Host To Host / G TO G	KEMENDIKBUDRISTEK Dispendikbud Disdukcapil	SISGUR (SISTEM INFORMASI SISWA DAN GURU) ABSENSI (SISTEM ABSENSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN)
35	RSUD dr. Abdoer	I.SPL.01	Ketersediaan Kamar	bridging ketersediaan	*Web Service*	BPJS	SIMRS-Aplicare BPJS

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Aplikasi yang Dihubungkan
	Rahem	2		kamar SIMRS dengan BPJS			
		I.SP L.01 3	Bridging vclaim	Bridging simrs dengan vclaim BPJS	*Web Service*	BPJS	Billing system - vclaim bpjs
39	Puskesmas Bungatan	I.SP L.01 4	Bridging vclaim	bridging sikda dengan vclaim BPJS	*Web Service*	BPJS Dan Dinkes	KIOSK DAN VCLAIM BPJS
		I.SP L.01 5	SIMESSEM	Bridging Sikda Dengan Si Messem	*Web Service*	BPJS Dan Sikda	SIKDA DENGAN SI MESSEM

7.8 Perangkat Keras dan Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. **Pengklasifikasian infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perangkat keras dan perangkat lunak**. Perangkat Keras terdiri dari perangkat keras utama, perangkat keras periferal, perangkat jaringan dan perangkat media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada masing-masing OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

7.8.1 Ketersediaan Perangkat Keras

Ketersediaan perangkat keras pada Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan untuk menunjang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketersediaan Perangkat Keras dibedakan menjadi 4 poin pembahasan yaitu Perangkat Periferal Utama, Perangkat Periferal Penduku, Perangkat Jaringan dan Perangkat Media Penyimpanan. Berikut penjelasan detail terkait macam-macam perangkat keras

7.8.1.1 Perangkat Periferal Utama

Perangkat keras utama adalah perangkat keras yang digunakan untuk menunjang pekerjaan pada masing-masing OPD yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu PC, Laptop, dan Printer.

A. Personal Computer (PC)

Kondisi eksisting perangkat *Personal Computer* (PC) yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5

tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **1105 PC** dimana mayoritas PC berusia >5 tahun yaitu sejumlah **727 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat PC terbanyak yaitu **RSUD dr. Abdoer Rahem** dengan total perangkat **173 Unit**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 7.19.**

Tabel 7.19 Eksisting Perangkat Keras PC

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras PC			Jumlah PC
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
I.PKU.001	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	7	0	0	**7**
I.PKU.001	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	0	3	**8**
I.PKU.001	3	Bagian Hukum	10	0	0	**10**
I.PKU.001	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	4	0	**4**
I.PKU.001	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	29	0	0	**29**
I.PKU.001	6	Bagian Umum	15	4	0	**19**
I.PKU.001	7	Bagian Organisasi	13	1	0	**14**
I.PKU.001	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	11	0	**11**
I.PKU.001	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10	0	0	**10**
I.PKU.001	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40	14	0	**54**
I.PKU.001	11	Inspektorat	7	1	0	**8**
I.PKU.001	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	56	10	0	**66**
I.PKU.001	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	3	0	**15**
I.PKU.001	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	60	28	0	**88**
I.PKU.001	15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKU.001	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31	13	0	**44**
I.PKU.001	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23	29	0	**52**
I.PKU.001	18	Dinas Kesehatan	40	10	21	**72**
I.PKU.001	19	Dinas Ketenagakerjaan	5	1	1	**7**
I.PKU.001	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	44	17	0	**61**
I.PKU.001	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan	39	21	33	**93**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras PC			Jumlah PC
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
		Perdagangan				
I.PKU.001	22	Dinas Lingkungan Hidup	5	2	1	**8**
I.PKU.001	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	5	1	**8**
I.PKU.001	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	30	8	9	**47**
I.PKU.001	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	4	0	**17**
I.PKU.001	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	10	3	0	**13**
I.PKU.001	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27	0	0	**27**
I.PKU.001	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	7	3	**14**
I.PKU.001	29	Dinas Perhubungan	-	-	-	**0**
I.PKU.001	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	6	0	**14**
I.PKU.001	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	7	0	**7**
I.PKU.001	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	13	0	**13**
I.PKU.001	33	Dinas Sosial	3	6	0	**9**
I.PKU.001	34	Satuan Polisi Pamong Praja	17	4	0	**21**
I.PKU.001	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	120	40	13	**173**
I.PKU.001	36	Kecamatan Situbondo	4	6	2	**12**
I.PKU.001	37	Kecamatan Bungatan	8	5	0	**13**
I.PKU.001	38	Puskesmas Situbondo	7	4	1	**12**
I.PKU.001	39	Puskesmas Bungatan	3	1	1	**5**
I.PKU.001	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	0	1	**20**
Total Personal Computer (PC)			**727**	**288**	**90**	**1105**

Berdasarkan dengan Tabel 7.19 terkait dengan Kondisi Eksisting Perangkat Keras *Personal Computer* (PC) yaitu **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan PC**, berikut OPD yang

masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan**.

B. Perangkat Laptop

Kondisi eksisting perangkat *Laptop* yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat Laptop sejumlah **953 Unit Laptop** dimana mayoritas Laptop berusia >5 tahun yaitu sejumlah **449 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat Laptop terbanyak yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan total perangkat **116**Unit. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 7.20.**

Tabel 7.20 Eksisting Perangkat Keras Laptop

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
I.PKU.002	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	1	0	0	**1**
I.PKU.002	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	2	0	**2**
I.PKU.002	3	Bagian Hukum	4	0	0	**4**
I.PKU.002	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	4	1	1	**6**
I.PKU.002	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	15	0	**15**
I.PKU.002	6	Bagian Umum	0	2	0	**2**
I.PKU.002	7	Bagian Organisasi	1	9	0	**10**
I.PKU.002	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	3	0	**3**
I.PKU.002	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3	2	0	**5**
I.PKU.002	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	16	0	**22**
I.PKU.002	11	Inspektorat	8	19	4	**31**
I.PKU.002	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	6	0	**6**
I.PKU.002	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	9	0	**18**
I.PKU.002	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77	32	7	**116**
I.PKU.002	15	Badan Pendapatan Daerah				**0**
I.PKU.002	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	23	2	**45**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
I.PKU.002	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	25	0	**45**
I.PKU.002	18	Dinas Kesehatan	33	40	6	**80**
I.PKU.002	19	Dinas Ketenagakerjaan	9	8	1	**18**
I.PKU.002	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	12	0	**21**
I.PKU.002	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	25	62	1	**88**
I.PKU.002	22	Dinas Lingkungan Hidup	10	6	2	**18**
I.PKU.002	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6	9	2	**17**
I.PKU.002	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	40	10	3	**54**
I.PKU.002	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	4	0	**18**
I.PKU.002	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	17	8	0	**25**
I.PKU.002	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	4	1	**33**
I.PKU.002	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	11	4	**21**
I.PKU.002	29	Dinas Perhubungan	-	-	-	**0**
I.PKU.002	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	7	0	**17**
I.PKU.002	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	21	0	**21**
I.PKU.002	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	8	42	0	**50**
I.PKU.002	33	Dinas Sosial	21	12	6	**39**
I.PKU.002	34	Satuan Polisi Pamong Praja	6	9	0	**15**
I.PKU.002	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	12	9	4	**25**
I.PKU.002	36	Kecamatan Situbondo	0	5	0	**5**
I.PKU.002	37	Kecamatan Bungatan	5	3	0	**8**
I.PKU.	38	Puskesmas Situbondo	15	4	3	**22**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
002						
I.PKU.002	39	Puskesmas Bungatan	5	2	0	**7**
I.PKU.002	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	0	4	**20**
Total Laptop			**449**	**453**	**51**	**953**

Berdasarkan dengan Tabel 7.20 terkait dengan Kondisi Eksisting Perangkat Keras Laptop yaitu **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan Laptop**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan**.

C. Perangkat Printer

Kondisi eksisting perangkat *Printer* yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat Printer sejumlah **1307 Unit Printer** dimana mayoritas Printer berusia >5 tahun yaitu sejumlah **670 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat printer terbanyak yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan total perangkat **153 Unit**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 7.21.**

Tabel 7.21 Eksisting Perangkat Keras Printer

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
I.PKU.003	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	4	0	0	**4**
I.PKU.003	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	3	0	**8**
I.PKU.003	3	Bagian Hukum	4	0	0	**4**
I.PKU.003	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1	4	0	**5**
I.PKU.003	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	5	0	**16**
I.PKU.003	6	Bagian Umum	0	12	0	**12**
I.PKU.003	7	Bagian Organisasi	1	11	0	**12**
I.PKU.003	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	8	0	**8**
I.PKU.003	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	3	0	**11**
I.PKU.003	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	46	30	0	**76**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
		Daerah				
I.PKU.003	11	Inspektorat	4	13	4	**21**
I.PKU.003	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	37	13	0	**50**
I.PKU.003	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	0	0	**24**
I.PKU.003	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	153	0	0	**153**
I.PKU.003	15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKU.003	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25	19	6	**50**
I.PKU.003	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	96	0	**112**
I.PKU.003	18	Dinas Kesehatan	75	42	15	**132**
I.PKU.003	19	Dinas Ketenagakerjaan	5	16	0	**21**
I.PKU.003	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	7	0	**22**
I.PKU.003	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	35	45	2	**82**
I.PKU.003	22	Dinas Lingkungan Hidup	13	6	1	**20**
I.PKU.003	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	10	4	**21**
I.PKU.003	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	8	18	11	**37**
I.PKU.003	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	7	0	**21**
I.PKU.003	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	15	2	1	**18**
I.PKU.003	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	4	0	**39**
I.PKU.003	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	6	0	**8**
I.PKU.003	29	Dinas Perhubungan	0	0	0	**0**
I.PKU.003	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	8	0	**10**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
I.PKU.003	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	12	0	**12**
I.PKU.003	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	23	31	0	**54**
I.PKU.003	33	Dinas Sosial	6	15	6	**27**
I.PKU.003	34	Satuan Polisi Pamong Praja	8	11	0	**19**
I.PKU.003	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	40	78	20	**138**
I.PKU.003	36	Kecamatan Situbondo	4	4	2	**10**
I.PKU.003	37	Kecamatan Bungatan	9	6	0	**15**
I.PKU.003	38	Puskesmas Situbondo	2	10	5	**17**
I.PKU.003	39	Puskesmas Bungatan	2	3	0	**5**
I.PKU.003	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	0	2	**13**
Total Perangkat Keras Printer			**670**	**558**	**79**	**1307**

Berdasarkan dengan Tabel 7.21 terkait dengan Kondisi Eksisting Perangkat Keras Printer yaitu **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan Printer**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan.** Dapat disimpulkan jumlah keseluruhan perangkat keras yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, dijabarkan pada **Tabel 7.22.**

Tabel 7.22 Total Eksisting Perangkat Keras Utama

No	ID	Nama Perangkat Keras	Jumlah
1	I.PKU.001	PC	**1105 Unit**
2	I.PKU.002	Laptop	**953 Unit**
3	I.PKU.003	Printer	**1307 Unit**
Total Perangkat Umum			**3365 Unit**

Dari hasil jumlah perangkat keras yang terdata pada saat survei, terdapat perangkat keras dengan usia penggunaan lebih dari 5 tahun. Hal tersebut dapat menjadi dasar usulan untuk pengadaan pembaharuan perangkat, dengan usia penggunaan diatas 5 tahun untuk mendukung kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari. Perangkat dengan usia penggunaan tersebut adalah usia optimal untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru, keadaptifan dalam membuka *browser* atau melakukan hal berat pada

perangkat keras dengan membuka aplikasi baru, serta menurunnya performa perangkat keras.

7.8.1.2 Perangkat Periferal Pendukung

Perangkat Keras Periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai, mikrofon dan pengeras suara. Daftar Perangkat Periferal yang diperoleh dari hasil survei pada 40 OPD disajikan pada **Tabel 7.23.**

Tabel 7.23 Eksisting Perangkat Keras Periferal

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	-	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Proyektor	Penampil Gambar	-	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		TV	Penampil Gambar	-	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	-	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		HT	Alat Komunikasi	-	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Sound System	Pengeras Suara	-	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Bagian Hukum	Proyektor	Penampil Gambar	External	1	Bagian Hukum
		Monitor	Penampil Gambar	External	10	Bagian Hukum
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	External	3	Bagian Hukum
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber	Proyektor + Monitor	Penampil Gambar	-	1	Ruang Gudang

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
	Daya Alam					
5	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Lcd Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Gedung Ukpbj Dan Ruang Lab Komputer Lpse
		Tv	Penampil Gambar	-	2	Gedung Ukpbj 1, Lpse 1
		Camera	Penangkap Gambar Dan Video	-	1	LPSE
		Lensa	Lensa Kamera	-	1	LPSE
6	Bagian Umum	LED Tv	Penampil Gambar	Panasonic	4	Ruang Tu, Ruang Rt, Ruang Ka.Bag, Ruang Tengah Bagian Umum
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Canon	2	Ruang Tu Dan Perlengkapan
		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	1	Ruang Tu
		Speaker	Pengeras Suara	Logitec	3	Masing Masing Ruang Sub Koordinator
7	Bagian Organisasi	HT	HT	HT	3	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
		Smart TV	Smart TV	LG Smart TV	1	Ruang Rapat Bagian Organisasi
		Proyektor	Proyektor	Sony Proyektor	1	Ruang Rapat Bagian Organisasi
		Scanner	Scanner	Fujitsu Scanner	1	Ruang Kerja Bagian

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
						Organisasi
		Webcam	Webcam	Logitech Webcam	1	Ruang Rapat Bagian Organisasi
		Telfon	Digunakan Sebagai Alat Komunikasi Antar Bagian	-	4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
8	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Scanner	Untuk Scam Data	Ujiksu 1425	1	R Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
		Speaker	Disetia Ruangan Sub Bagian	-	3	R. Sub Bagian Protokol R. Sub Bagian Komunikasi R. Sub Bagian Dokumentasi
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Led Tv	Penampil Gambar	Lg	10	Sekretariat DPRD
		Proyektor	Penampil Gambar	Panasonic	4	Sekretariat DPRD
		Scanner	Pemindai Dokumen Dan Gambar	Epson	2	Sekretariat DPRD
		Kamera	Penangkap Gambar	Canon	6	Sekretariat DPRD
		Speaker	Pengeras Suara	Simbada	22	Sekretariat DPRD
11	Inspektorat	Scanner	Epson	Ds-400	10	Inspektorat Daerah Kabupate Situbondo
		Scanner Portable	Alfa Link	Izzi Scaner As1212	4	Iinspektorat Daerah Kabupaten Situbondo

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
		Scanner	Plustek	Pl2550	2	Inspektorat Daerah Kabupetan Situbondo
		Server	Hp	Ml350pg8-675 Server	1	KOMINFO
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Led Tv	Penampil Gambar	Samsung	4	BKPSDM
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Fujitsu Dan Brother	5	BKPSDM
		Proyektor	Penampil Gambar	Epson Dan Sony	4	BKPSDM
		Kamera	Penangkap Gambar	Canon	5	BKPSDM
		Handycam	Penangkap Video	Sony	2	BKPSDM
		Speaker	Pengeras Suara	Sekaku	1	BKPSDM
		Finger Print	Alat Sensor	Solution	7	BKPSDM
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Smart Tv	Perangkat Tambahan	Layar Monitor	1	Ruang Aula
		Proyektor	Penampil Gambar	Infocus	1	Sekretariat
		Kamera	Penangkap Gambar	Canon	1	Sekretariat
		Finger Print	Mesin Absensi	Zeem600	1	Sekretariat
14	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Lcd Projektor	Penampil Gambar	Lg, Epson, Infocus, Sony, Benq	17	-
		Finger Print	Mesin Absensi	Solution X401	8	-
		Mesin Perforator	Alat Untuk Melubangi Kertas/Kartu	Star Perforator	1	-
		Led Tv	Sarana	Panasonic,	24	-

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
			Hiburan Dan Penampil Gambar	Samsung, Lg, Sony, Sharp		
		Tape Recorder	Perekam Suara	Sony	7	-
		Sound System	Penghantar Suara	Sony	8	-
		Megaphone	Penghantar Suara	Toa	3	-
		Handy Cam	Perekam Gambar	Cannon, Sony	6	-
		Camera	Penangkap Gambar	Lg, Cannon, Sony, Ricoh	11	-
		Camera Conference	Penangkap Gambar	Logitech	1	-
		Telephone (Pabx)	Sarana Komunikasi	Panasonic,	3	-
		Handy Talky (Ht)	Sarana Komunikasi	Bofeng, Alinco	10	-
		Scanner	Pemindai Gambar dan Dokumen	Panasonic	11	-
15	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fingerprint	Untuk Absensi Pegawai Asn Dan Non Asn	Fingerprint Magicom 200	1	Lantai 1 BAPPEDA
		Led Tv	Penampil Gambar	Samsung	7	BAPPEDA
		Proyektor	Penampil Gambar	Panasonic, Infocus	3	BAPPEDA
		Sound Sistem	Pengeras Suara	Sony	3	BAPPEDA
17	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan	Fingerprint	Alat Sensor	Hybrid	2	Sekretariat
		Proyektor	Penampil Gambar	Benq	1	Sekretariat

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
	Sipil	Led Monitor	Led Monitor	Monitor	14	Internal Pd
		Led Tv	Penampil Gambar	Samsung Dan Polytron	8	Ruang Kadis, Ruang Pelayanan, Sekretariat, Ruang Bidang Piak, Ruang Sekretaris Dinas, Ruang Bidang Pelayanan
		Scanner	Scanner	Scanner	3	Internal OPD
18	Dinas Kesehatan	Led Monitor	Led Monitor	Monitor	14	Internal OPD
		Tv	Tv	Tv	5	Internal OPD
		Scanner	Scanner	Scanner	3	Internal OPD
19	Dinas Ketenagakerjaan	Tv	Penampil Gambar	-	2	R.Kabag, R.Kadis
		Proyektor	Penampil Gambar	-	2	R Kesekratiat
		Monitor	Penampil Gambar	-	2	R Subah Umum
		Speaker	Pengeras Suara	-	9	Diseluruh Ruangan
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Drone	Digunakan Untuk Menggambil Gambar Atau Video	Dji Mavic 2 Pro Gimbal-Stabilized 12mp / 4k	2	Dinas Kominfo Situbondo
		Televisi	Digunakan Sebagai Media Conference/ Streaming	Lg 60 Inch 4k	12	Dinas Kominfo Situbondo
		Monitor	Untuk Menampilkan Data Grafis	Lg 21 Inch Full Hd	5	Dinas Kominfo Situbondo
		Proyektor	Sebagai Media Atau	Benq-Ms531	12	Dinas Kominfo Situbondo

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
			Alat Bantu Untuk Menampilkan Gambar/Grafis	3300 Lumens Ansi Svga		
		Ht	Alat Komunikasi	Kenwood	6	-
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson	4	Seluruh Bidang
		Video Wall	Penampil Gambar	Dw	18	Ruang Rapat Bupati (Command Center)
		Video Tron Standing	Penampil Gambar	Tidak Ada Merk	72 Module	Pendopo Kabupaten Situbondo
		Mobile Video Tron	Penampil Gambar	Tidak Ada Merk	Modul 24m2	Dinas Kominfo Situbondo
		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	Sony Dan Canon	7	Dinas Kominfo Situbondo
		Kamera Webcam	Penangkap Gambar Dan Video	Logitec	2	Dinas Kominfo Situbondo
		Tablet	Penampil Gambar	Samsung	4	Dinas Kominfo Situbondo
		Speaker	Pengeras Suara	Yamaha	3	Dinas Kominfo Situbondo
		Signature Pen	Alat Penulis Digital	Wacom	1	Dinas Kominfo Situbondo
		Finger Print	Alat Sensor	Fingerspot	2	Dinas Kominfo Situbondo
		Lemari Penyimpanan Kamera	Penyimpanan	Tidak Ada Merk	1	Dinas Kominfo Situbondo
21	Dinas Koperasi, Perindustrian,	Cctv	Alat Pemantau	Hikvision	28	OPD, Upt Pasar

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
	Dan Perdagangan	Lcd/Proyektor	Penampil Gambar	Nec, Benq, Toshiba	6	Internal OPD
		Tv	Penampil Gambar	Panasonic, Polytron, Lg, Sharp	26	OPD, Upt Pasar
		Camera Conferense	Penangkap Gambar Dan Video	Logitech	2	OPD
		Soundsystem	Pengeras Suara	Jbl, Bmb, Tens	10	OPD, Upt Pasar
		Camera Digital	Penangkap Gambar Dan Video	Canon, Sony	11	OPD
		Telepon	Alat Komunikasi	Panasonic	1	OPD
		Ht	Alat Komunikasi	Keenwood, Alinco	9	OPD
		Genset	Alat Cadangan Listrik	Krisbow, Honda, Kubota, Daimaru	12	OPD
22	Dinas Lingkungan Hidup	Cctv	Alat Pemantau	-	22	OPD
		Lcd/Proyektor	Penampil Gambar	-	2	OPD
		Tv	Penampil Gambar	Polytron	6	OPD
		Loudspeaker	Pengeras Suara	-	2	OPD
		Soundsystem	Pengeras Suara	-	1	OPD
		Camera Digital	Penangkap Gambar Dan Video	-	9	OPD
		Telepon	Alat Komunikasi	-	1	OPD
		Ht	Alat Komunikasi	-	35	OPD

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
		Genset	Alat Cadangan Listrik	-	5	OPD
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Mesin Absensi	Alat Sensor Presensi	-	1	OPD
		Lcd	Penampil Gambar	-	2	OPD
		Tv	Penampil Gambar	-	5	OPD
		Loudspeaker	Pengeras Suara	-	3	OPD
		Soundsystem	Pengeras Suara	-	16	OPD
		Handy Cam	Alat Kamera Penangkap	-	3	OPD
		Mic	Pengeras Suara	-	17	OPD
		Camera Digital	Penangkap Gambar Dan Video	-	10	OPD
		Telepon	Alat Komunikasi	-	1	OPD
		Ht	Alat Komunikasi	-	12	OPD
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Scanner	Scan Dokumen	Brother	2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
		Lcd Projector	Untuk Menampilkan Tampilan Komputer Ke Layar	Ben-Q, Epson	4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
		Serial Printer	Mencetak Di Kertas Rangkap	Epson	9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Finger Print	Mesih Absen	Magic M 20	1	Loby DPMD
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson	1	DPMD
		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	2	Ruang Sekretariat DPMD
		Kamera	Penangkap Gambar	Fuji Film Dan Canon	2	Ruang Sekretariat DPMD
		Handy Cam	Penangkap Video	Sony	1	Ruang Sekretariat DPMD
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Scannner	Scanner	Plustex Pl Duplex Series	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
		Finger Print	Mesin Absensi	-	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	-	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lcd	Penampil Gambar	-	1	OPD
		Tv	Penampil Gambar	-	8	OPD
		Sound	Pengeras Suara	-	2	OPD
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	-	2	OPD
28	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Smart Tv Lg	Smart Tv Lg	Tv	3	Dispendikbud - Ruang Sungram Dispendikbud - Ruang Paud Dispendikbud - Ruang Kadis
		Cctv	Cctv	Cctv	35	Lingkungan Dispendikbud
		Scanner	Scanner	Scanner	9	Dispendikbud
29	Dinas Perhubungan	Fingerprint	Alat Sensor Jari	Fingerspot	2	Kantor Induk Dan Pelabuhan Jangkar
		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	1	Aula
30	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Proyektor	Proyektor	External	2	Pelayanan Perpustakaan Dan Aula Pertemuan
		Scanner	Mesin Scanner	External	5	Tiap-Tiap Bidang
		Led Tv	Penampil Gambar	Lg	3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	Sony Dan Canon	2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Speaker	Pengeras Suara	Tens Dan Tum	2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
31	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Proyektor	Penampil Gambar	-	6	-
		Tv	Penampil Gambar	-	5	-
		Speaker	Pengeras Suara	-	7	-
32	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Aula
		Printer	Alat Pencetak Dokumen	-	20	Bidang - Bidang
		Speaker	Pengeras Suara	-	2	Aula
		Layar Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Aula
33	Dinas Sosial	Lcd Projector/In focus	Penampil Gambar	Epson	1	Ruang Kepala Dinas
		Televisi, Monitor	Penampil Gambar	Panasonic, Lg	4	R. Kepala Dinas, Resepsionis, Umum
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson, Plustek	2	Umum, Keuangan
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Led Tv	Penampil Gambar	Akari	2	Satpol PP
		Finger Print	Alat Sensor Jari	-	3	Satpol PP
		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	Canon Dan Sony	6	Satpol PP
		Speaker	Pengeras Suara	Toa (4) Sunway (1)	5	Satpol PP
35	Rsud Dr. Abdoer Rahem	Scanner	Scanner Untuk Keperluan Administrasi Kantor,	Scanner Document	13	Bagian Kantor

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
			Klaim			
		Proyektor	Penampil Gambar	Epson Eb 400	3	Bagian Keuangan, Diklat, Ruang Pertemuan
36	Kecamatan Situbondo	Tv	Penampil Gambar	Polytron	2	OPD
		Cctv	Alat Kamera Pemantau	-	4	OPD
		Proyektor	Penampil Gambar	Benq	2	OPD
37	Kecamatan Bungatan	Tv	Perangkat Untuk Menonton Layanan Televisi	Elektronik	2	Pelayanan
		Speaker Aktif	Perangkat Elektronik	Elektronik	2	Sekretariat Dan Kepala Seksi
		Monitor	Monitor Perangkat Komputer	Perangkat Komputer	2	Sekretariat
		Proyektor	Penampil Gambar	-	1	OPD
38	Puskesmas Situbondo	Tv	Tv	Samsung	1	Puskesmas Situbondo
		Tv	Tv	Lg	2	Puskesmas Situbondo
		Tv	Tv	Sanyo	1	Puskesmas Situbondo
		Kamera Cctv	Cctv	Telkom Indonesia	12	Puskesmas Situbondo
		Layar Lcd	Lcd	Panasonic	1	Puskesmas Situbondo
		Lcd Proyektor	Lcd Proyektor	Panasonic	1	Puskesmas Situbondo
		Cctv	Cctv	Aytech	8	Puskesmas Situbondo

Kode OPD	OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan
39	Puskesmas Bungatan	Switch Dan Hub	Perangkat Keras Yang Dihubungkan Ke Komputer Untuk Meningkatkan Kegunaannya Dan Membantu Pekerjaan	Tp-Link Dan D-Link	Switch 1 Dan Hub 1	Unit Layanan Dan Tata Usaha
		Fingerprint	Alat Sensor	Fingerspot	1	Unit Layanan
		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	1	Ruang Pertemuan
		Led Tv	Penampil Gambar	Lg Dan Samsung	Lg 2, Samsung 1	Unit Layanan Dan Rawat Inap
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Led Tv	Penampil Gambar	Lg	1	BPBD
		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson	3	BPBD
		Proyektor	Penampil Gambar	Samsung	1	BPBD
		Kamera	Penangkap Gambar	-	2	BPBD
		Speaker	Pengeras Suara	-	1 Set	BPBD

7.8.1.3 Perangkat Jaringan

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 pada pasal 27 ayat (1) huruf b** menjelaskan bahwa jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra pusat dan pemerintah daerah. Agar terlaksananya jaringan intra pemerintah harus memenuhi infrastruktur terkait perangkat konektivitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya infrastruktur jaringan intra pemerintah, Adapun perangkat yang digunakan meliputi ***Modem, Hub/Switch, Gateway-Router, Access Point, Repeater Wifi dan Antena Outdoor***. Berikut merupakan perangkat

keras jaringan yang dimiliki oleh masing-masing OPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dijelaskan pada sub-sub bab dibawah ini.

A. *Modem*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) 0PD, penggunaan perangkat jaringan *Modem* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 22 (Dua puluh dua) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Modem***. Untuk rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Modem* Kabupaten Situbondo disajikan dalam **Tabel 7.24.**

Tabel 7.24 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Modem*

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	*Modem*			Jumlah *Modem*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.001	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	1	0	0	**1**
I.PKJ.001	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	3	Bagian Hukum	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	0	**4**
I.PKJ.001	6	Bagian Umum	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	7	Bagian Organisasi	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	3	0	**6**
I.PKJ.001	11	Inspektorat	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3	0	0	**3**
I.PKJ.001	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	8	1	**9**
I.PKJ.001	15	Badan Pendapatan Daerah	4	3	0	**7**
I.PKJ.001	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	0	**1**
I.PKJ.001	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	0	**1**
I.PKJ.001	18	Dinas Kesehatan	0	7	0	**7**
I.PKJ.001	19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	0	0	**3**
I.PKJ.001	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1	0	0	**1**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	*Modem*			Jumlah *Modem*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.001	22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6	0	0	**6**
I.PKJ.001	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	5	0	**5**
I.PKJ.001	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	**2**
I.PKJ.001	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	4	0	**4**
I.PKJ.001	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	3	0	**3**
I.PKJ.001	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	0	0	**9**
I.PKJ.001	29	Dinas Perhubungan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	3	0	**3**
I.PKJ.001	33	Dinas Sosial	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	2	0	**2**
I.PKJ.001	36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.001	38	Puskesmas Situbondo	0	10	0	**10**
I.PKJ.001	39	Puskesmas Bungatan	1	0	0	**1**
I.PKJ.001	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	0	**1**
Total Perangkat *Modem*			**40**	**48**	**1**	**89**

B. *Hub/switch*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Hub/switch* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh lima) OPD, **terdapat 21 (Dua Puluh Satu) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Hub/Switch**. Untuk rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Hub/switch* Kabupaten Situbondo disajikan dalam **Tabel 7.25.**

Tabel 7.25 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Hub/Switch

ID	Kode	OPD Pemilik	Hub/Switch	Jumlah

	OPD		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.002	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	3	Bagian Hukum	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5	0	0	**5**
I.PKJ.002	6	Bagian Umum	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	7	Bagian Organisasi	4	0	0	**4**
I.PKJ.002	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	0	0	**5**
I.PKJ.002	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	1	**1**
I.PKJ.002	11	Inspektorat	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4	0	0	**4**
I.PKJ.002	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	**1**
I.PKJ.002	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	1	0	**3**
I.PKJ.002	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	18	Dinas Kesehatan	0	5	0	**5**
I.PKJ.002	19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	2	0	**9**
I.PKJ.002	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1	0	0	**1**
I.PKJ.002	22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	**1**
I.PKJ.002	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	4	0	**4**
I.PKJ.002	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	2	0	**2**
I.PKJ.002	26	Dinas Pemberdayaan	0	0	0	**0**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Hub/Switch			Jumlah Hub/Switch
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana				
I.PKJ.002	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	0	0	**10**
I.PKJ.002	29	Dinas Perhubungan	0	10	0	**10**
I.PKJ.002	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	33	Dinas Sosial	0	10	0	**10**
I.PKJ.002	34	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0	0	**1**
I.PKJ.002	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	30	10	5	**45**
I.PKJ.002	36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.002	38	Puskesmas Situbondo	0	4	0	**4**
I.PKJ.002	39	Puskesmas Bungatan	1	0	0	**1**
I.PKJ.002	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	**1**
Total Perangkat Hub/Switch			**71**	**50**	**6**	**127**

C. *Gateway/router*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Gateway/router* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh lima) OPD, **terdapat 27 (Dua puluh tujuh) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Gateway/router***. Untuk rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Gateway/router* Kabupaten Situbondo disajikan dalam **Tabel 7.26.**

Tabel 7.26 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Gateway *Router*

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Gateway *Router*			Jumlah Gateway *Router*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.003	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	2	0	0	**2**
I.PKJ.003	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	3	Bagian Hukum	2	0	0	**2**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Gateway *Router*			Jumlah Gateway *Router*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.003	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	2	0	**2**
I.PKJ.003	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	0	0	**1**
I.PKJ.003	6	Bagian Umum	0	5	0	**5**
I.PKJ.003	7	Bagian Organisasi	1	0	0	**1**
I.PKJ.003	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	0	0	**2**
I.PKJ.003	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	2	**2**
I.PKJ.003	11	Inspektorat	0	3	0	**3**
I.PKJ.003	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	7	0	**7**
I.PKJ.003	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	**1**
I.PKJ.003	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	8	1	**9**
I.PKJ.003	15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	0	**2**
I.PKJ.003	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	0	**2**
I.PKJ.003	18	Dinas Kesehatan	0	2	0	**2**
I.PKJ.003	19	Dinas Ketenagakerjaan	1	0	0	**1**
I.PKJ.003	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	33	9	0	**42**
I.PKJ.003	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1	0	0	**1**
I.PKJ.003	22	Dinas Lingkungan Hidup	1	6	0	**7**
I.PKJ.003	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	28	Dinas Pendidikan dan	8	0	0	**8**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Gateway *Router*			Jumlah Gateway *Router*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
		Kebudayaan				
I.PKJ.003	29	Dinas Perhubungan	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	0	**2**
I.PKJ.003	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	33	Dinas Sosial	0	1	0	**1**
I.PKJ.003	34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	4	0	**4**
I.PKJ.003	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	16	0	0	**16**
I.PKJ.003	36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	37	Kecamatan Bungatan	1	0	0	**1**
I.PKJ.003	38	Puskesmas Situbondo	0	1	0	**1**
I.PKJ.003	39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.003	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	**1**
Total Perangkat Gateway *Router*			**71**	**54**	**3**	**128**

D. *Acess Point*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Access Point* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 26 (Dua puluh enam) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Access Point***. Untuk rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Access Point* Kabupaten Situbondo disajikan dalam **Tabel 7.27.**

Tabel 7.27 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Access Point*

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	*Access Point*			Jumlah *Access Point*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.004	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	3	Bagian Hukum	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	5	Bagian Pengadaan	6	0	0	**6**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	*Access Point*			Jumlah *Access Point*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
		Barang dan Jasa				
I.PKJ.004	6	Bagian Umum	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	7	Bagian Organisasi	0	2	0	**2**
I.PKJ.004	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	6	0	**6**
I.PKJ.004	11	Inspektorat	0	1	0	**1**
I.PKJ.004	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2	0	0	**2**
I.PKJ.004	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5	0	**5**
I.PKJ.004	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	15	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	**1**
I.PKJ.004	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	4	0	**7**
I.PKJ.004	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	18	Dinas Kesehatan	3	6	0	**9**
I.PKJ.004	19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	43	1	0	**44**
I.PKJ.004	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1	0	0	**1**
I.PKJ.004	22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	**1**
I.PKJ.004	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	0	0	**1**
I.PKJ.004	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	0	0	**0**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	*Access Point*			Jumlah *Access Point*
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.004	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	0	0	**4**
I.PKJ.004	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	0	0	**11**
I.PKJ.004	29	Dinas Perhubungan	20	0	0	**20**
I.PKJ.004	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	0	**1**
I.PKJ.004	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5	0	0	**5**
I.PKJ.004	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	4	0	**4**
I.PKJ.004	33	Dinas Sosial	0	10	0	**10**
I.PKJ.004	34	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0	0	**1**
I.PKJ.004	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	20	20	2	**42**
I.PKJ.004	36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	**0**
I.PKJ.004	37	Kecamatan Bungatan	1	0	0	**1**
I.PKJ.004	38	Puskesmas Situbondo	0	1	0	**1**
I.PKJ.004	39	Puskesmas Bungatan	0	1	0	**1**
I.PKJ.004	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	**1**
Total Perangkat *Access Point*			122	64	2	**188**

E. Reapeter Wifi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan repeater wifi dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat

puluh) OPD, **terdapat 6 (Enam) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Repeater Wifi**. Untuk rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Repeater Wifi Kabupaten Situbondo disajikan dalam **Tabel 7.28.**

Tabel 7.28 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Repeater Wifi

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Repeater Wifi			Jumlah Repeater Wifi
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.005	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	1	0	**1**
I.PKJ.005	3	Bagian Hukum	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	6	Bagian Umum	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	7	Bagian Organisasi	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	11	Inspektorat	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	**1**
I.PKJ.005	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	16	Badan Perencanaan	0	0	0	**0**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Repeater Wifi			Jumlah Repeater Wifi
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
		Pembangunan Daerah				
I.PKJ.005	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	18	Dinas Kesehatan	0	4	0	**4**
I.PKJ.005	19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1	1	0	**2**
I.PKJ.005	22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	29	Dinas Perhubungan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	**0**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Repeater Wifi			Jumlah Repeater Wifi
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.005	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	33	Dinas Sosial	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	34	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	0	**2**
I.PKJ.005	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	38	Puskesmas Situbondo	0	0	1	**1**
I.PKJ.005	39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.005	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	**0**
Total Perangkat Repeater Wifi			**3**	**7**	**1**	**11**

F. Antena Outdoor

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan antena outdoor dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 8 (Delapan) OPD yang menggunakan perangkat jaringan Antena Outdoor**. Untuk rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan Antena Autdoor Kabupaten Situbondo disajikan dalam **Tabel 7.29.**

Tabel 7.29 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Antena Outdoor

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Antena Outdoor			Jumlah Antena Outdoor
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.006	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	3	Bagian Hukum	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	**0**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Antena Outdoor			Jumlah Antena Outdoor
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
I.PKJ.006	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	6	Bagian Umum	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	7	Bagian Organisasi	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	11	Inspektorat	0	1	0	**1**
I.PKJ.006	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	**1**
I.PKJ.006	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	18	Dinas Kesehatan	0	1	0	**1**
I.PKJ.006	19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	42	0	**47**
I.PKJ.006	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	**1**
I.PKJ.006	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	24	Dinas Pekerjaan	0	1	0	**1**

ID	Kode OPD	OPD Pemilik	Antena Outdoor			Jumlah Antena Outdoor
			>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
		Umum dan Perumahan Permukiman				
I.PKJ.006	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	**3**
I.PKJ.006	29	Dinas Perhubungan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	33	Dinas Sosial	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	38	Puskesmas Situbondo	0	1	0	**1**
I.PKJ.006	39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	**0**
I.PKJ.006	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	**0**
Total Perangkat *Modem*			**6**	**47**	**0**	**53**

Berdasarkan dengan tabel diatas disimpulkan bahwa tidak seluruh perangkat Jaringan terdapat pada masing-masing OPD dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat pada masing-masing OPD. Berikut merupakan data keseluruhan perangkat keras Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Tabel 7.28.**

Tabel 7.30 Eksisting Perangkat Jaringan

ID	Nama Perangkat	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Jumlah
I.PKJ.001	***Modem***	40	48	1	**89**
I.PKJ.002	**Hub/Switch**	71	50	6	**127**
I.PKJ.003	***Gateway/router***	71	54	3	**128**
I.PKJ.004	***Access Point***	122	64	2	**188**
I.PKJ.005	**Repeater Wifi**	3	7	1	**11**
I.PKJ.006	**Antena Outdoor**	6	47	0	**53**

7.8.1.4 Perangkat Media Penyimpanan

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapatkan dari hasil survei, pada beberapa OPD terdapat perangkat media penyimpanan yang digunakan antara lain seperti Hardisk Eksternal dan Flashdisk yang bertujuan untuk menyimpan backup data perkantoran ataupun data penting. Berikut merupakan detail perangkat media penyimpanan yang ada pada OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo ditampilkan pada **Tabel 7.31.**

Tabel 7.31 Kondisi Eksisting Perangkat Media Penyimpanan

Kode OPD	OPD	ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan Data Storage
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	I.PMP.001	Harddisk external	untuk penyimpanan data	Data Pribadata, Hibah dll	Milik OPD
3	Bagian Hukum	I.PMP.002	SSD External (2 Unit)	Penyimpanan Dengan Menggunakan Device Ssd External Portable	Data Hukum	Milik OPD
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan	I.PMP.003	Flashdisk	Untuk Penyimpanan Data	Data BLUD	Milik OPD

Kode OPD	OPD	ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan Data Storage
	Sumber Daya Alam					
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	I.PM P.004	HDD Eksternal	Digunakan untuk penyimpanan backup *Database*	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Milik OPD
6	Bagian Umum	I.PM P.005	Hardisk Ekternal (1)	Penyimpan Data	Data Bagian Umum	Milik OPD
7	Bagian Organisasi	I.PM P.006	Hard Disk Eksternal	Hard Disk Eksternal 2 TB	Data Anjab dan Kelembagaan	Milik OPD
		I.PM P.007	Harddisk Internal (PC)	Seagate HDD 250GB	Data Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Anjab dan Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Milik OPD
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	I.PM P.008	Hardisk	digunakan untuk menyimpan dokumentasi pimpinan, dan memiliki 2 hardisk	Data dokumentasi agenda pimpinan	Milik OPD

Kode OPD	OPD	ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan Data Storage
11	Inspektorat	I.PM P.009	ML350pG 8-675 Server	Server ini yang dikelola di pusat server dinas kominfo kab situbondo	Data Identitas Pegawai yang mengajukan mutasi, data konsultasi dengan OPD	Milik OPD
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	I.PM P.010	Hardisk Eksternal (7) Seagate	Alat Penyimpan Data	Data Kepegawaian (BKPSDM)	Milik OPD
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	I.PM P.011	Harddisk	Harddisk merk Seagate	Data yg berhubungan dengan bidang Ekonomi	Milik OPD
18	Dinas Kesehatan	I.PM P.012	Harddisk External	Harddisk	Data Kesehatan	Milik OPD
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.PM P.013	NAS (2)	untuk menyimpan dan membagikan data di beberapa komputer	Data Backup	Milik OPD
		I.PM P.014	HDD External (9)	Penyimpanan data	Data Backup dan administrasi pegawai	Milik OPD

Kode OPD	OPD	ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan Data Storage
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	I.PM P.015	Hardisk External	Penyimpanan Data Eksternal	Data Koperasi, Data Perdagangan, dan Data Perindustrian	Milik OPD
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	I.PM P.016	Hard Disk Eksternal	Hard Disk Eksternal 1 TB	Data yang berhubungan dengan pekerjaan	Milik OPD
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I.PM P.017	dikbudsit	Server Active Directory	Data Pendidikan	Milik OPD
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	I.PM P.018	External/ Portable Harddisk	SSD Seaget Expansion 1TB	Data Perpustakaan dan Kearsipan	Milik OPD
33	Dinas Sosial	I.PM P.019	Flashdisk	Hitam	Data Dinas Sosial mulai Bantuan dll	Milik OPD
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	I.PM P.020	Hardisk eksternal	Hardisk eksternal	Backup berbagai data	Milik OPD
38	Puskesmas Situbondo	I.PM P.021	Harddisk External	*Database* File Akreditasi Puskesmas	Data Puskesmas	Milik OPD
39	Puskesmas Bungatan	I.PM P.022	Harddisk	Untuk penyimpanan data	Data Puskesmas	Milik OPD
40	Badan Penanggulangan	I.PM P.023	Hardisk Eksternal	Penyimpan Data	Seluruh Data BPBD	Milik OPD

Kode OPD	OPD	ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan Data Storage
	Bencana Daerah					

7.8.2 Ketersediaan Perangkat Lunak

Dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang infrastruktur SPBE adalah tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Nasional** disebutkan bahwa **perangkat lunak platform terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi perkantoran** (pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, *tools programming*, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan *video conference*).

Ketersediaan perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Sistem operasi terdiri dari windows, linux, mac, dual os, dan lainnya. Sedangkan aplikasi perkantoran terdiri dari Ms. Office, *Google* Doc, *Google* Sheet, *Google* Slide, dan lainnya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan lebih detail di bawah ini.

7.8.2.1 Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program booting. Berikut merupakan kondisi eksisting dari penggunaan sistem operasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Gambar 7.10.**

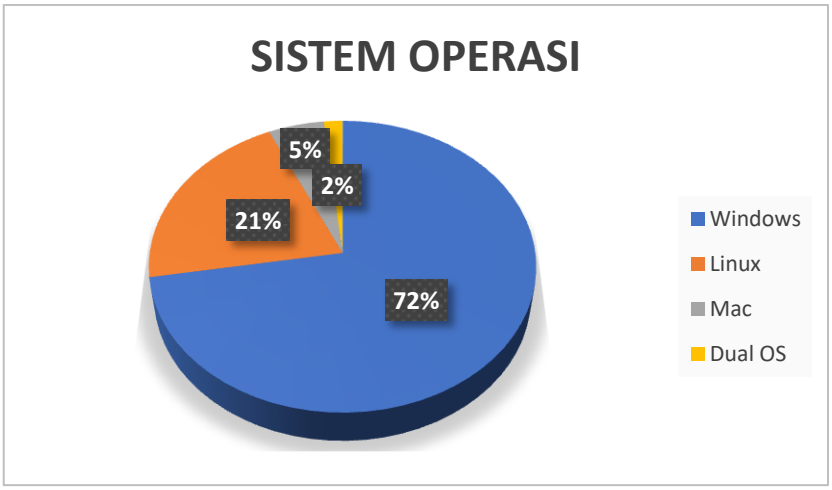

Gambar 7.10 Kondisi Eksisting Penggunaan Sistem Operasi

Berdasarkan dengan **Gambar 7.10**, dijelaskan bahwa mayoritas penggunaan Sistem Operasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu menggunakan **Windows dengan Persentase 72%.** Adapun penggunaan sistem operasi lainnya yang digunakan oleh beberapa OPD yaitu **Linux** dengan **Persentase 21%**, **Mac** dengan **Persentase 5%** dan **Dual OS** dengan **Persentase 2%.**

7.8.2.2 Aplikasi Perkantoran

Perangkat lunak aplikasi perkantoran digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dari masing-masing OPD. Penggunaan perangkat lunak aplikasi perkantoran dibagi beberapa bagian yaitu Aplikasi perkantoran pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, tools programming, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan video conference. Ilustrasi penggunaan aplikasi perkantoran dapat dilihat pada **Gambar 7.11.**

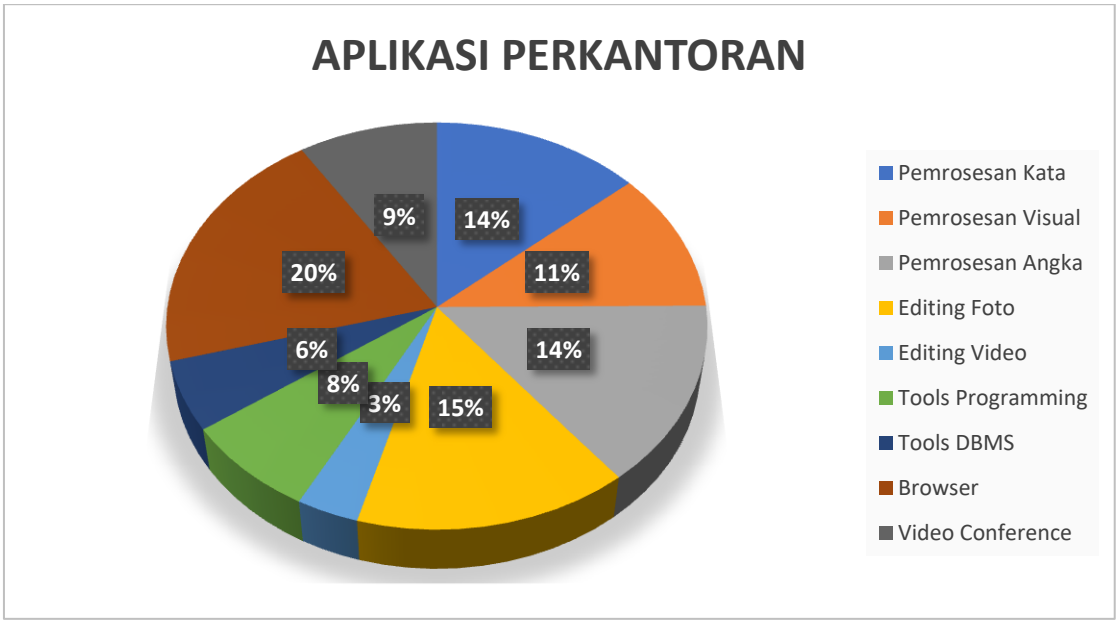

Gambar 7.11 Persentase Penggunaan Aplikasi Perkantoran

Berdasarkan dengan **Gambar 7.11**, dijelaskan bahwa mayoritas penggunaan aplikasi perkantoran yaitu ***Browser*** yang terdiri dari penggunaan (Crome,Mozilla Firefox, Internet Explore dan beberapa Aplikasi *Browser* lainnya) dengan persentase **20%**. Adapun aplikasi perkantoran lainnya yang digunakan yaitu **Editing Foto** dengan **persentase 15%**, **Pemrosesan Kata dan Permrosesan Angka** dengan **persentase 14%**, **Pemrosesan Visual** dengan persentase **11%**, **Video Conference** dengan **Persentase 9%, Tools Programming** dengan **persentase 8%, Tools DBMS** dengan **persentase 6%** dan **Editing Foto** dengan **persentase 3%**.

7.9 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kabupaten Situbondo yang didapatkan dari Hasil Pengumpulan Data Survei terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah, Permasalahan Ruang Server/Server, Permasalahan Sistem Penghubung Layanan, Permasalahan Perangkat Keras dan Lunak (Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran). Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur dibahas pada sub bab berikut.

7.9.1 Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Permasalahan Jaringan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Jaringan Intra yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Putus, Jaringan Internet Lambat, dan Kerusakan Perangkat Keras Jaringan. Ilustrasi permasalahan Jaringan dapat dilihat pada **Gambar 7.10.**

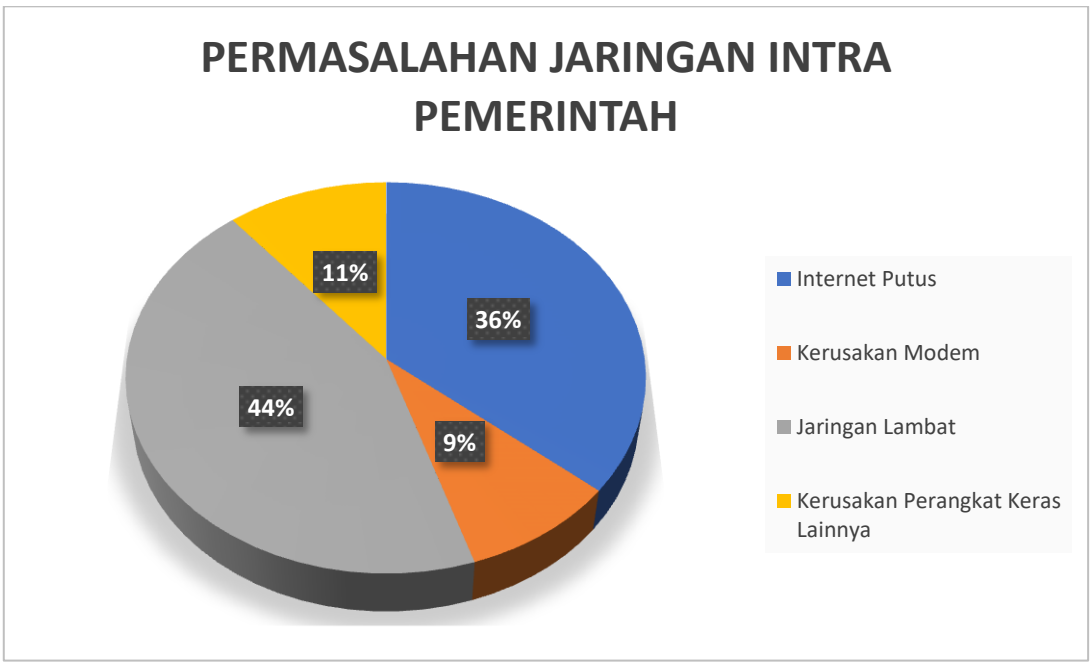

Gambar 7.12 Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan **Gambar 7.10** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase terjadinya **jaringan internet lambat 44%**, **Internet Putus** sebanyak **36%**, **kerusakan perangkat keras lainnya 11%** dan **kerusakan *Modem* 9%**. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Jaringan yang mayoritas dihadapi oleh OPD di Kabupaten Situbondo yaitu **Permasalahan terkait jaringan internet lambat** dengan persentase **44%**.

7.9.2 Permasalahan Ruang Server

Permasalahan Ruang Server / Server yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Ruang Server yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Server Down, Kelistrikan, Kehilangan data, Perangkat dan Peralatan Rusak, Ruang Server tidak memenuhi Aspek dan Permasalahan Jaringan. Ilustrasi permasalahan Ruang Server dapat dilihat pada **Gambar 7.11.**

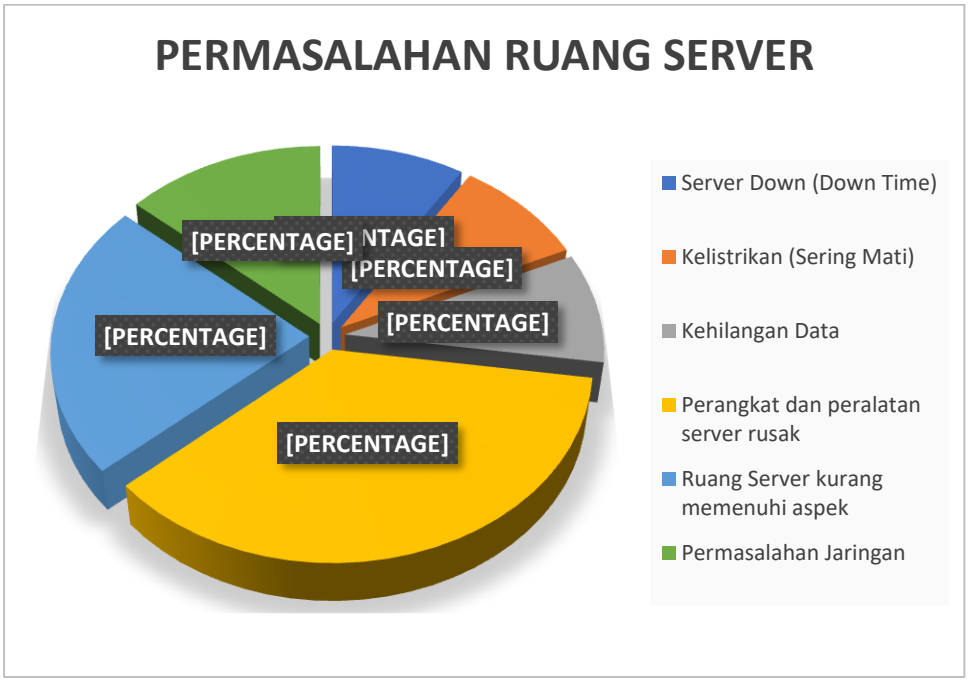

Gambar 7.*13* Permasalahan Ruang Server

Berdasarkan dengan **Gambar 7.11,** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Ruang Server yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase terjadinya **Perangkat dan Peralatan Server Rusak** sebanyak **36%**, **Ruang Server tidak memenuhi aspek** sebanyak **23%**, **Permasalahan Jaringan** sebanyak **14%**, **Server Down (*Down Time*)** sebanyak **9%**, **Kelistrikan (sering mati)** sebanyak **9%**, dan **Kehilangan Data** sebanyak **9%**. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Ruang Server yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Perangkat dan Peralatan**

Server Rusak dengan Persentase sebanyak **36%** dan **Ruang Server Kurang Memenuhi Aspek** dengan Persentase sebanyak **23%**.

7.9.3 Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk saat ini yang dialami cukup signifikan dikarenakan **belum menerapkan** Sistem Penghubung layanan yang melalui Web API secara menyeluruh serta efisien dan **belum menerapkan penggunaan SPLP** yang disediakan oleh pusat (Kemkominfo).

7.9.4 Permasalahan Perangkat Keras

Permasalahan Perangkat Keras yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Kerusakan Keyboard/mouse, Kerusakan Komputer, Kerusakan Laptop, Kerusakan Printer. Ilustrasi permasalahan Perangkat Keras dapat dilihat pada **Gambar 7.12.**

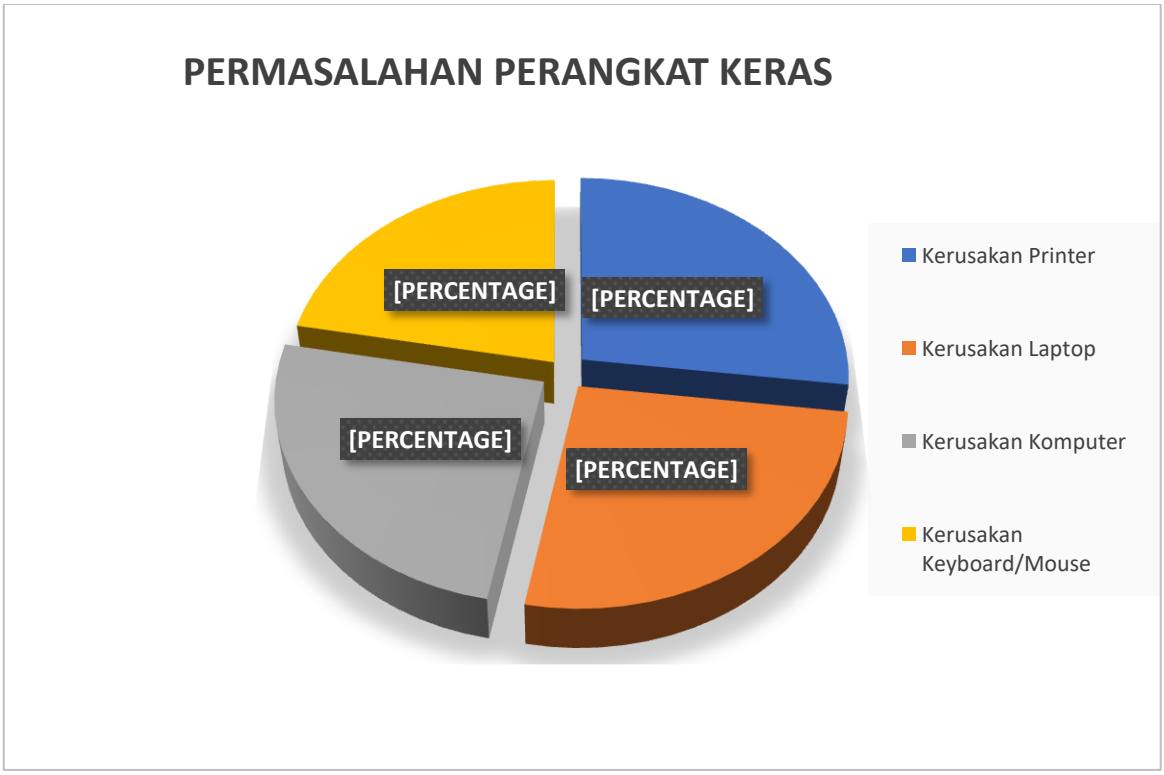

Gambar 7.14 Permasalahan Perangkat Keras

Berdasarkan dengan **Gambar 7.12** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Keras yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo

antara lain yaitu persentasi **kerusakan printer** sebanyak **27%**, **kerusakan laptop** sebanyak **26%**, **kerusakan komputer** sebanyak **25%** dan **kerusakan keyboard/mouse** sebanyak **22%**, Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Keras yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Kerusakan Printer** dengan persentase sebanyak **27%**.

7.9.5 Permasalahan Perangkat Lunak

Permasalahan Perangkat Lunak yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Aplikasi Perkantoran yang *hang* dan Update OS terlalu sering. Ilustrasi permasalahan Perangkat Lunak dapat dilihat pada **Gambar 7.13.**

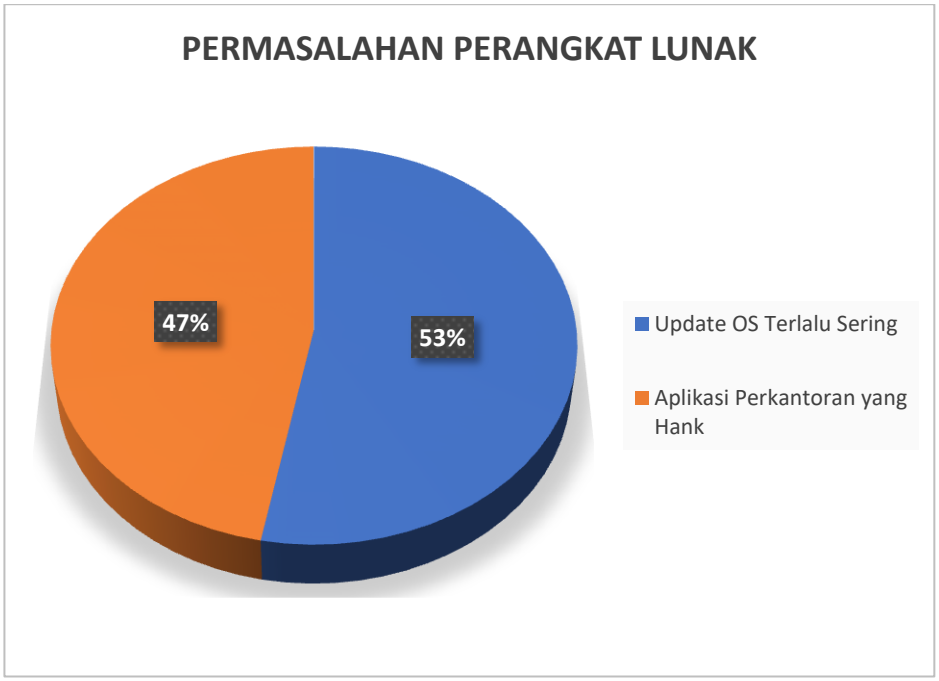

Gambar 7.15 Permasalahan Perangkat Lunak

Berdasarkan dengan **Gambar 7.13** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase **Update OS terlalu sering** sebanyak **53%** dan **Aplikasi Perkantoran yang *hang*** sebanyak **47%.** Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Lunak yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Update OS terlalu sering** dengan Persentase sebanyak 53%.

7.10 Analisis Gap

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisis kesenjangan diperlukan untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Penjelasan mengenai analisis kesenjangan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 7.32.**

Tabel 7.32 Analisis GAP Infrastruktur SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Jaringan Intra Pemerintah			
Topologi Jaringan	Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki Topologi Jaringan Intra Pemerintah dengan ada Topologi Fisik dan Logic. Terdapat Topologi Umum dan Topologi Distribusi.	Jaringan Intra Pemerintah tersedia dan tersebarluas pada seluruh OPD di Kabupaten Situbondo untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diwujudkan dengan adanya Topologi Fisik dan Logic.	Kondisi saat ini telah terpenuhi sesuai dengan kondisi ideal terkait penerapan jaringan Pemerintah dengan adanya Topologi Jaringan Intra Pemerintah secara Logic dan Fisik. Topologi jaringan terbagi menjadi 2 yaitu Topologi Umum dan Topologi Distribusi.
Bandwidth	**Seluruh OPD telah mendapatkan alokasi *Bandwidth*** Jaringan Intra Pemerintah dari Dinas Komunikasi dan Informatika. **Alokasi *Bandwidth* berasal dari 2 *Provider* yang berbeda yaitu Biznet** (460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data + 150 untuk WIFI Publik) **dan Megadata** (100 Mbps *Dedicated* untuk Server + 150 Mbps *Broadband* untuk area *public*). **Adapun 35 OPD** melakukan	Seluruh OPD mendapatkan alokasi yang cukup untuk kebutuhan Operasional dan Tidak adanya belanja internet/sewa internet mandiri.	Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah melakukan distribusi jaringan Intra Pemerintah pada Seluruh OPD** dengan Media Fiber Optik dan *Wireless* dan telah dilakukan pemusatan internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika, namun masih terdapat 35 OPD yang melakukan pengadaan Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Pengadaan Belanja Internet /Sewa *Bandwidth* Mandiri.		
Ruang Server			
Daftar Server	Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini memiliki **43 Server** yang dimiliki oleh **14 OPD.** Terdapat 25 Server yang diletakkan pada Internal OPD, dengan kepemilikan oleh 7 OPD. Sedangkan terdapat 18 Server yang diletakkan pada Pusat Data Diskominfo dengan kepemilikan oleh 8 OPD.	Pengadaan perangkat server tambahan pada Pusat Data (*Data Center*) Diskominfo untuk backup server dan mencukupi ke melakukan pengelolaan server terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum melakukan Pemusatan/meletakkan Server secara keseluruhan dikarenakan masih terdapat Server yang berada pada Internal OPD.
Aspek Ruang Server	Penerapan Aspek Ruang Server yang diterapkan pada Pusat Data (*Data Center*) yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan 9 OPD bahwasanya saat ini masih belum memenuhi standard Pusat Data sesuai dengan Standard TIA 942 atau SNI Pusat Data.	Peningkatan aspek ruang server untuk memenuhi aspek Ruang Server, keamanan dan performa server pada Pusat Data Diskominfo dan ruang server OPD yang digunakan untuk menyimpan server pusat maka wajib menyamakan terkait penerapan Aspek yang diterapkan oleh pusat data sesuai standard TIA 942 dan SNI Pusat Data.	Penerapan Aspek Ruang Server yang diterapkankan pada Pusat Data (*Data Center*) Diskominfo dan untuk dapat segera merealisasikan Pemusatan Server pada Data Center terutama 9 OPD yang masih belum memusatkan server, serta OPD yang memiliki Ruang Server yang digunakan untuk menyimpan Server Pusat dapat segera memenuhi Aspek yang sesuai dengan Standard TIA 942 atau SNI Pusat Data.
Komputasi			
Komputasi	Penerapan	Menerapkan	Pemerintah Kabupaten

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Awan	Komputasi Awan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain penggunaan *Google Drive*, dan *Cloud*. **Penggunaan *Google Drive*** sebesar **84%** pada **11 OPD,** dan **Penggunaan *Cloud*** sebesar **8%** pada **1 OPD**. **Belum adanya penerapan Komputasi Awan** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022	penggunaan Komputasi untuk media penyimpanan sebagai penerapan teknologi komputasi awan sebagai penunjang operasional.	Situbondo belum menerapkan Komputasi awan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomo 132 Tahun 2022 dan saat ini mayoritas menggunakan *Google Drive* (11 OPD) dan *Cloud* (1 OPD)
Fasilitas Komputasi	Pemerintah Kabupaten Situbondo hingga saat ini terkait penerapan Fasilitas Komputasi **belum menyeluruh menerapkan.** Saat ini yang telah menerapkan fasilitas komputasi yaitu terdapat 2 OPD yaitu BKPSDM menggunakan VPS dan Diskominfo menggunakan NAS.	Melakukan penerapan penggunaan fasilitas komputasi untuk penunjang operasional dalam penyimpanan.	Pemerintah Kabupaten Situbondo Belum menyeluruh menggunakan Fasilitas Komputasi dan saat ini yang telah menggunakan terdapat 2 OPD yaitu Diskominfo menggunakan NAS dan BKPSDM menggunakan VPS.
Sistem Penghubung Layanan			
Sistem Penghubung Layanan	Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapka**n Sistem Penghubung	Implementasi sistem penghubung layanan SPLP untuk mendukung integrasi aplikasi	Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum menerapkan SPLP yang disediakan Oleh Pusat (KEMKOMINFO) dan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan *Web Service***.		hanya menggunakan Sistem Penghubung melalui API dan *Web Service*.
Perangkat Keras			
Perangkat Keras Periferal Utama	Kondisi eksisting perangkat Periferal Utama yang ada pada Seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo banyak yang berusia lebih dari 5 Tahun. **Komputer** Jumlah total **1105 Unit** dan yang >5 tahun yaitu sejumlah **727 Unit.** **Laptop** Jumlah total **953 Unit** dan yang >5 tahun yaitu sejumlah **449 Unit** **Printer** Jumlah total **1307 Unit** dan yang >5 tahun yaitu sejumlah **670 Unit**	Peremajaan / Pengadaan Perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun untuk menunjang kinerja Seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo serta menerapkan Manajemen Aset dalam bentuk inventarisasi aset secara berkala dalam pengelolaan perangkat keras.	Seluruh OPD memiliki perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan belum dilakukan peremajaan/pengadaan secara menyeluruh pada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo serta belum adanya manajemen aset dalam bentuk inventarisasi aset secara berkala di seluruh OPD Kabupaten Situbondo .

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Perangkat Keras Periferal Pendukung	Perangkat Keras periferal yang dimiliki oleh Seluruh OPD belum memenuhi dikarenakan masih banyak perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun yaitu terdapat 36 OPD, dan terdapat 4 OPD yang tidak memiliki Perangkat Periferal.	Peremajaan / Pengadaan Perangkat periferal pendukung pada OPD yang masih belum memiliki perangkat serta pada OPD memiliki perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun untuk menunjang kinerja Seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo serta menerapkan Manajemen Aset dalam bentuk inventarisasi aset secara berkala dalam pengelolaan perangkat keras.	Penggunaan Perangkat Keras Periferal Pendukung pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dikatakan belum memenuhi dikarenakan masih banyak Perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan terdapat 4 OPD yang belum memiliki perangkat periferal pendukung.
Perangkat Jaringan	Perangkat Keras Jaringan yang ada pada Seluruh OPD **telah disediakan** oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk Distribusi Jaringan Intra serta terdapat OPD yang memiliki perangkat jaringan sendiri untuk penyebaran jaringan intra yang diberikan.	Peremajaan / Pengadaan perangkat jaringan yang berusia lebih dari 5 tahun untuk menunjang integrasi dan distribusi jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Situbondo serta menerapkan Manajemen Aset dalam bentuk inventarisasi aset secara berkala dalam pengelolaan perangkat keras.	Perangkat keras jaringan yang ada pada OPD **telah disediakan** oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk distribusi jaringan Intra Pemerintah dan terdapat OPD yang memiliki perangkat jaringan sendiri untuk penyebaran jaringan intra yang diberikan.
Perangkat Lunak			
Sistem Operasi	mayoritas penggunaan Sistem Operasi pada	Menggunakan Sistem Operasi yang berlisensi dan	Penggunaan Sistem Operasi yang ada pada seluruh OPD di

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu menggunakan **Windows dengan Persentase 72% dengan total 40 OPD** Adapun penggunaan sistem operasi lainnya yang digunakan oleh beberapa OPD yaitu **Linux** dengan **Persentase 21% oleh 3 OPD, Mac** dengan **Persentase 5% Oleh 2 OPD** dan **Dual OS** dengan **Persentase 2% Oleh 1 OPD.** Mayoritas Seluruh OPD masih menggunakan Sistem Operasi yang sifatnya tidak berlisensi.	berbayar untuk mencegah terjadinya kerusakan dan serangan keamanan pada perangkat yang digunakan.	Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu Windows dan terdapat beberapa sistem operasi lainnya yang digunakan. Masih banyak OPD yang menggunakan sistem operasi yang crak/Tidak Berlisensi dan disarankan tidak menggunakan sistem operasi yang crack yang dapat menyebabkan kerentanan keamanan atau kerusakan perangkat.
Aplikasi Perkantoran	mayoritas penggunaan aplikasi perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu ***Browser*** dan beberapa aplikasi perkantoran yang mendukung operasional. Mayoritas Seluruh OPD yang menggunakan aplikasi	Menggunakan aplikasi perkantoran yang resmi agar tidak terjadinya eror dan tidak mudah terserang virus bawaan dari aplikasi yang tidak resmi (crack).	Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini terkait Penggunaan Aplikasi Perkantoran yang mayoritas adalah penggunaan ***Browser* dan beberapa aplikasi penunjang lainnya**. Serta masih terdapat banyak aplikasi perkantoran yang tidak berlisensi/Crack.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Perkantoran yang sifatnya Crak/Tidak berlisensi.		

BAB 8
KONDISI EKSISTING KEAMANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Terkait kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada Bab 8. Dimulai dari pengertian keamanan SPBE, referensi arsitektur keamanan SPBE, metadata keamanan SPBE, kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan terkait dengan analisis kesenjangan antara kondisi eksisting (*as is*) dengan kondisi yang ingin dicapai (*to be*).

8.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **Keamanan SPBE** mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

8.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 terkait denganReferensi Keamanan SPBE (RAK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
01.02	Standar Keamanan	Standar internasional yang digunakan sebagai

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Internasional	pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi Lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuain penerapan standar keamanan SPBE
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022, didalamnya memuat beberapa hal yang bertujuan untuk melengkapi rencana penerapan SPBE. Pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Arsitektur SPBE, terdapat Taksonomi atau pengelompokan Referensi Arsitektur SPBE dimana salah satunya adalah taksonomi Keamanan SPBE.

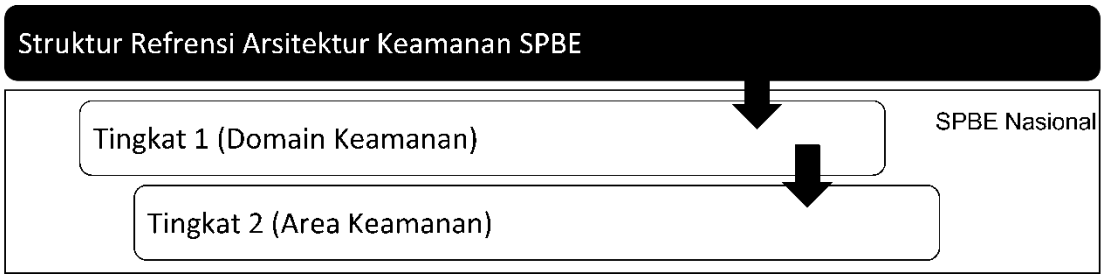

Gambar 8.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RK tingkat 1 (pertama); dan
2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen didalamnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

8.3 Metadata Keamanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur untuk memudahkan mendeskripsikan, menjelaskan, menjadi suatu informasi yang mudah ditemukan kembali. Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** Metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat kemanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian pada aspek Manajemen Keamanan merupakan penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit keamanan secara keseluruhan. Penjabaran atribut Metadata Keamanan yang dalam penyusunan metadata keamanan SPBE dijabarkan pada **Tabel 8.2 dan Tabel 8.8.**

Tabel 8.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama *Security Device*	Nama dari Security Device yang digunakan
3	Deskripsi *Security Device*	Penjelasan dari Security Device yang digunakan
4	Tipe *Security Device*	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, *Wireless* intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau *Network* Access Control)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah

No	Nama Atribut	Keterangan
		Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
7	Unit Pengelola *Security Device*	Unit pengelola *Security Device* yang digunakan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 8.3 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: 1. standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE; 2. standar internasional terkait keamanan informasi; 3. Regulasi lainnya.
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.4 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.5 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
5	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.7 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE.
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari: a. belum/tidak dilaksanakan; b. memadai; c. perlu peningkatan; d. tidak memadai.
4	Jenis Audit Keamanan	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri

No	Nama Atribut	Keterangan
	SPBE	dari: a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti; b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%; c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%; d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan keamanan
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

8.4 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018, seluruh instansi pemerintah wajib Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana telah dijelaskan bahwa faktor keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*Nonrepudiation)* terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Secara umum Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **belum menerapkan secara keseluruhan** terkait standar keamanan yang sesuai dengan standar keamanan baik standar nasional maupun internasional. Dari segi keamanan fisik, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan adanya penggunaan ***firewall*** untuk keamanan jaringan dan Server, perangkat keamanan pendukung dan Prosedur/SOP keamanan serta dilengkapi dengan implementasi

CCTV di setiap OPD dan beberapa titik area publik sebagai bentuk sarana pendukung keamanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dari segi Tata Kelola Keamanan, Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan** menggunakan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.** Begitupun dengan Peraturan Keamanan yang **belum diterapkan** oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **Peraturan Keamanan seperti Peraturan BSSN No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan BSSN No 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.** Beberapa Peraturan tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan implementasi keamanan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengampu utama terkait dengan Keamanan SPBE.

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **Telah** melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan **Indeks KAMI**. Secara detail terkait dengan usulan Keamanan SPBE akan dibahas pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Situbondo.**

8.5 Tata Kelola dan Manajemen Keamanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur dan memastikan terselenggaranya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE. Sedangkan Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

8.5.1 Standart Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan kondisi eksiting yang didapatkan dari hasil Survey Lapangan dan pengumpulan Bukti Pendukung yang diberikan serta dikonfirmasi oleh Seluruh OPD terkait penerapan Standar Keamanan Informasi bahwasanya saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum Menerapkan Standar Keamanan.** Sehingga hingga saat ini **terdapat Keluhan yang dialami oleh Seluruh OPD** terkait apa standar yang wajib diterapkan dan bagaimana penerapannya dikarenakan **belum adanya sosialisi pada seluruh OPD** terkait pentingnya Penerapan Standar Keamanan.

8.5.2 Prosedur/SOP Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan kondisi eksiting terkait dengan Prosedur/SOP Keamanan Informasi yang didapatkan dari hasil Survey Lapangan dan pengumpulan Bukti Pendukung yang diberikan oleh beberapa OPD serta telah dikonfirmasi, bahwasanya saat ini yang **Telah Menerapkan Prosedur / SOP Keamanan Informasi hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika**. Berikut merupakan daftar Prosedur/SOP yang diterapkan antara lain:

1. **Prosedur / SOP Aplikasi**

   Terdapat 2 SOP yang saat ini diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dalam Operasional yang berhubungan dengan Aplikasi, antara lain yaitu:

   a. SOP Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi E-Government
   b. SOP Layanan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aplikasi dan Soft Program Komputerisasi.

2. **Prosedur / SOP Jaringan**

   Terdapat 5 SOP yang saat ini diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dalam Operasional yang berhubungan dengan Jaringan, antara lain yaitu:

   a. SOP Layanan Perbaikan Jaringan LAN
   b. SOP Pengelolaan Whistle Blowing System
   c. SOP Maintenance Jaringan Internet
   d. SOP Layanan Pemasangan Infrastruktur Jaringan Internet pada OPD
   e. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Jaringan LAN

3. **Prosedur / SOP Keamanan Data**

   Terdapat 10 SOP yang saat ini diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dalam Operasional yang berhubungan dengan Keamanan Data, antara lain yaitu:

   a. SOP Penerbitan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
   b. SOP Pencabutan Tanda Tangan Elektronik
   c. SOP Penanganan Konten Negatif Media Sosial atau Media Elektronik
   d. SOP Pengendalian Hak Akses Data
   e. SOP Manajemen Data Pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Situbondo
   f. SOP Layanan Data Terbuka
   g. SOP Penyelenggaraan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo
   h. SOP Keamanan E-Government
   i. SOP Agendaris Berita Radiogram / Telegram Diterima
   j. SOP Agendaris Berita Radiogram / Telegram Diterima

4. **Prosedur / SOP Pusat Data (*Data Center*)**

Terdapat 4 SOP yang saat ini diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dalam Operasional yang berhubungan dengan Pusat Data (*Data Center)*, antara lain yaitu:

a. SOP Co-Location / Penempatan Server dan Hosting Aplikasi di DISKOMINFO dan Persandian Kabupaten Situbondo
b. SOP Pemeliharaan dan Akses *Data Center*
c. SOP Fasilitasi Pusat Data
d. SOP Operasional Sistem Keamanan/Firewall

8.6 Keamanan Teknis

Berdasarkan dengan pengumpulan data hasil survei terkait Penerapan Keamanan Teknis yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, saat ini **telah menerapkan Keamanan Teknis** pada beberapa Aspek Keamanan, diantaranya dengan adanya perangkat keamanan pendukung yaitu CCTV, Fingerlock, Firewall, Fingerprint, Sensor Pintu/*Access Kontrol.* Berikut merupakan detail penerapan keamanan teknis pada masing-masing OPD yang dapat dilihat pada **Tabel 8.9.**

Tabel 8.9 Eksisting Perangkat Keras Pendukung Keamanan Teknis

Kode OPD	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	CCTV	DI lobby	Bagian perekonomian, pembangunan, dan SDA	Bagian perekonomian, pembangunan, dan SDA	Bagian umum
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	CCTV	Digunakan di gedung LPSE sebanyak 9 unit	OPD	OPD	OPD
6	Bagian Umum	CCTV	Kamera Pematauan	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum
11	Inspektorat	CCTV	-	opd	Inspektorat	Inspektorat
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Camera Control Television System	Kamera pengawasan area OPD	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CCTV (terdapat 16 kamera)	pengawasan	Mandiri	BKAD	sub bagian Umum dan kepegawaian
		finger Lock	Untuk pengamanan	Madiri	BKAD	Sub bagian umum dan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
			ruang kepala			kepegawaian
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	CCTV RUSAK (4 Unit Kamera)	Kamera Pemantauan	Bappeda	Bappeda	Bappeda
18	Dinas Kesehatan	CCTV (16)		Internal OPD	Dinkes	Dinkes
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Firewall (1)	Perangkat firewall untuk server di pusat server Dinas Kominfo	Milik Sendiri	Dinas Kominfo	Bidang Persandian Dinas Kominfo
		CCTV (26)	Kamera Pemantauan	Diskominfo	Diskominfo	Diskominfo
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	CCTV	Rekaman Visual	Milik OPD	Diskoperindag	Diskoperindag
22	Dinas Lingkungan Hidup	CCTV (22)	Kmera Pemantau	Milik OPD	Milik OPD	sub bagian Umum dan kepegawaian
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	CCTV	Alat Pemantauan	OPD	OPD	OPD
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	CCTV (4)	Kamera Pemantau	DPUPP	DPUPP	DPUPP
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	CCTV (1 PAKET)	Kamera Pemantauan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	CCTV	Digunakan untuk pemantauan ruang sebanyak 6 unit	OPD	OPD	OPD
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	sophos xg 330 firewall	*Network* & Web Firewall	dispendikbud	dispendikbud	dispendikbud
		CCTV	Digunakan untuk	dispendikbud	dispendikbud	dispendikbud

Kode OPD	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
			didalam ruangan dan depan ruangan seluruh kantor			
29	Dinas Perhubungan	CCTV	Digunakan untuk pemantauan ruang dan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	CCTV	Digunakan untuk pengwasan, yang terdapat di Luar ruangan dan di dalam ruangan	OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Dinas Sosial	CCTV (Camera Control Television System)	Ada 15 Camera dan 1 Monitor untuk memantau segala aktivitas kedinasan	Tetap	Dinas Sosial	Umum
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	CCTV	Pemantauan ruangan	RSUD dr. Abdoer Rahem	RSUD dr. Abdoer Rahem	Bidang Penunjang
36	Kecamatan Situbondo	CCTV	Digunakan untuk pemantauan ruangan pendopo kec, ruang camat, rumah dinas, ruang pelayanan	Kecamatan situbondo	Kecamatan situbondo	Tidak Ada
38	Puskesmas Situbondo	CCTV Avtech HD Indoor DG103	Camera CCTV Untuk Indoor	Milik Puskesmas	Puskesmas Situbondo	Staff IT
39	Puskesmas Bungatan	Microtik	untuk keamanan sistem jaringan dan mengatur	Mandiri	Puskesmas Bungatan	Pengurus barang

Kode OPD	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
			sistem jaringan yang dipakai			
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CCTV (4)	Kamera Pemantau	BPBD	BPBD	BPBD

8.7 Audit Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari hasil survei yang dilakukan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, hingga saat ini masih banyak yang belum melakukan Audit. Kegiatan Penilaian mandiri terkait penerapan Keamanan **Telah diterapkan** menggunakan **Indeks KAMI** pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian serta seluruh OPD. Evaluasi menggunakan Indeks KAMI bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi dan tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kegiatan Penerapan Indeks KAMI pada Pemerintah Kabupaten Situbondo ditampilkan pada **Tabel 8.10.**

Tabel 8.10 Eksisting Pelaksanaan Kegiatan Indeks KAMI

No	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi Kuisioner Indeks KAMI Versi 4.1	15 Sept s/d 2 Nov 2021
2.	Pendampingan pengisian Kuisioner Indeks KAMI Versi 4.1	3 Nov s/d 8 Des 2021
3.	Rekapitulasi dan Penyusunan laporan evaluasi Indeks KAMI	9 s/d 15 Des 2021

Obyek kegiatan evaluasi Indeks KAMI adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 30 OPD. Pertanyaan Indeks KAMI dikelompokkan untuk 2 keperluan. **Pengelompokan Pertama**, pertanyaan dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan kelengkapan kontrol yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Dalam pengelompokan ini responden diminta untuk memberi tanggapan mulai dari area yang terkait dengan bentuk kerangka kerja dasar keamanan informasi (pertanyaan diberi label "1"), efektifitas dan konsistensi penerapannya (label "2"), sampai dengan kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja keamanan informasi (label "3"). Tingkat terakhir ini sesuai dengan kesiapan minimum yang diprasyaratkan oleh proses sertifikasi standar ISO/IEC 27001:2013.

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat **kematangan** penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan

kematangan yang digunakan oleh keangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

1. Tingkat I - Kondisi Awal
2. Tingkat II - Penerapan Kerangka Kerja Dasar
3. Tingkat III - Terdefinisi dan Konsisten
4. Tingkat IV - Terkelola dan Terukur
5. Tingkat V – Optimal

Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detil, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara - I+, II+, III+, dan IV+, sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan. Sebagai awal, semua responden akan diberikan kategori kematangan Tingkat I. Sebagai padanan terhadap standar ISO/IEC 2700:2013, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+.

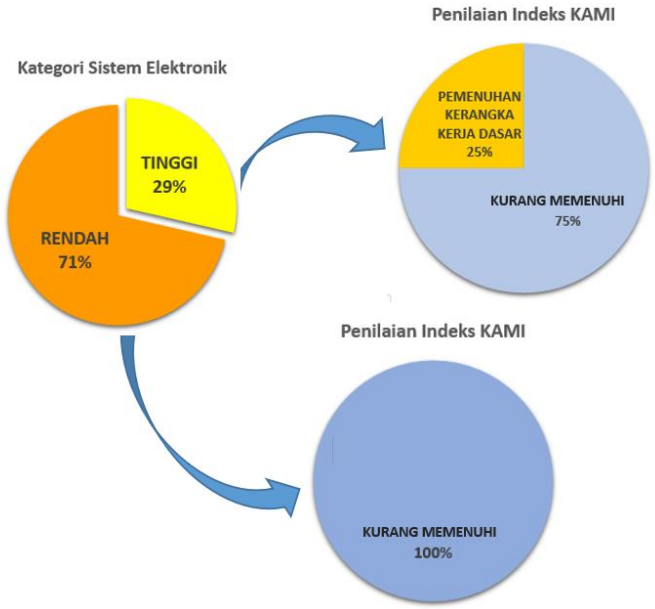

Gambar 8.2 Diagram Hasil Evaluasi Indeks KAMI

Pada **Gambar 8.2**, menjelaskan bahwa hasil evaluasi pengisian kuisioner Indeks KAMI Versi 4.1 pada seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu:

1. Dari 28 OPD yang telah melakukan pengisian Kuisioner, penilaian berdasarkan Kategori Sistem elektronik sebagai berikut:
    a. 8 OPD atau 29% memiliki kebutuhan pengamanan informasi "**TINGGI**"
    b. 20 OPD atau 71% memiliki kebutuhan pengamanan informasi "**RENDAH**"

c. 2 OPD "**TIDAK DAPAT DIEVALUASI**" karena tidak memberikan hasil pengisian Kuisioner Indeks KAMI sampai batas waktu terakhir penilaian.

2. Dari 8 OPD yang memiliki kebutuhan pengamanan informasi "**TINGGI**", penilaian evaluasi Indeks KAMI sebagai berikut:
   a. Terdapat 2 OPD yang berada pada Level 2 dari 4 Level dengan hasil **"PEMENUHAN KERANGKA DASAR"**, OPD yang dimaksud yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   b. Terdapat 6 OPD yang berada pada Level 1 dari 4 Level dengan hasil **"KURANG MEMENUHI"**, OPD yang dimaksud yaitu Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja.
3. Dari 20 OPD yang memiliki kebutuhan pengamanan informasi "**RENDAH**", hasil evaluasi Indeks KAMI semua OPD berada pada level 1 dari 4 level yaitu "**KURANG MEMENUHI**".
4. Dari 30 OPD terdapat 2 OPD yang **"TIDAK DAPAT DIEVALUASI"** dikarenakan tidak memberikan hasil pengisian Kuisioner Indeks KAMI sampai batas waktu terakhir penilaian, OPD tersebut yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

8.8 Permasalahan Keamanan SPBE

Permasalahan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi eksisting keamanan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan keamanan SPBE yang didapatkan. Berikut terkait permasalahan keamanan SPBE yang disajikan dalam bentuk diagram pada **Gambar 8.3. dan Tabel 8.11.**

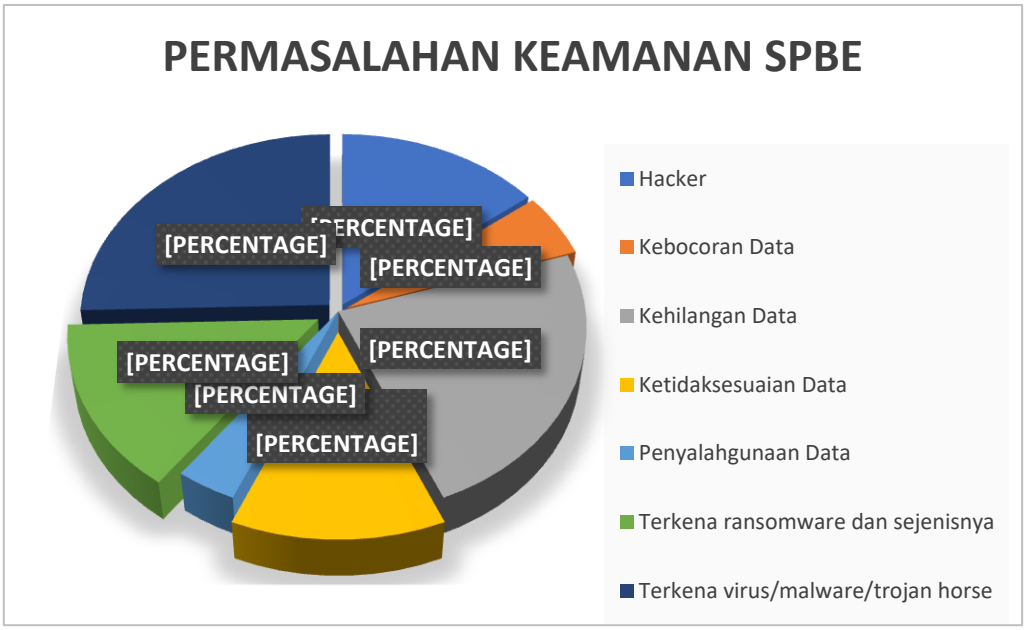

Gambar 8.3 Diagram Permasalahan Keamanan SPBE

Berdasarkan dari **Gambar 8.3** Permasalahan Keamanan SPBE terdapat 7 (Tujuh) Permasalahan Keamanan SPBE yang ada pada OPD di Kabupaten Situbondo antara lain Terkena virus/malware/trojan horse dengan persentase 25 %, Kehilangan Data dengan persentase 24%, Terkena ransomware dan sejenisnya dengan persentase 15%, Hacker dengan persentase 14%, Ketidaksesuaian Data dengan persentase 13%, Kebocoran Data dengan persentase 5%, dan Penyalahgunaan Data dengan persentase 4%.

Tabel 8.11 Eksisting Permasalahan Keamanan SPBE

Kode OPD	Nama OPD	Permasalahan keamanan	Frekuensi terjadinya masalah
3	Bagian Hukum	Kehilangan data	diakibatkan oleh forcemajore/banjir
		Hacker	1 kali
		Terkena virus/malware/trojan horse	Sering Terjadi
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kebocoran Data	Sering Terjadi
7	Bagian Organisasi	Terkena virus/malware/trojan horse	Sering Terjadi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Hacker	Sering Terjadi
		Kehilangan data	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
13	Badan Kesatuan Bangsa	Hacker	Jarang Terjadi

Kode OPD	Nama OPD	Permasalahan keamanan	Frekuensi terjadinya masalah
	dan Politik	Kehilangan data	
		Penyalahgunaan data	
		Ketidaksesuaian data	
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
		Permasalahan keamanan lainnya..	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Ketidaksesuaian data	Sering Terjadi
15	Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan keamanan lainnya (Phising)	Jarang Terjadi
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hacker	Jarang Terjadi
		Kebocoran data	
		Kehilangan data	
		Ketidaksesuaian data	
		Penyalahgunaan data	
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
18	Dinas Kesehatan	Hacker	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Hacker	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
		Permasalahan keamanan lainnya..	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
22	Dinas Lingkungan Hidup	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan	

Kode OPD	Nama OPD	Permasalahan keamanan	Frekuensi terjadinya masalah
		horse	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
		Kebocoran data	
		Kehilangan data	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hacker	Jarang Terjadi
29	Dinas Perhubungan	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Hacker	
		Ketidaksesuaian data	
		Permasalahan keamanan lainnya..	
		Terkena ransomware dan sejenisnya	
		Terkena virus/malware/trojan horse	
38	Puskesmas Situbondo	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	
		Ketidaksesuaian data	
39	Puskesmas Bungatan	Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	

8.9 Analisis Gap

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur Keamanan SPBE yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas keamanan yang semuanya

dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan usulan yang dilakukan untuk perbaikan Keamanan yang ada dapat dilihat pada **Tabel 8.12.**

Tabel 8.12 Analisis GAP Keamanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Tata kelola dan Manajemen Keamanan			
Standar Keamanan Informasi	Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum Menerapkan** standar keamanan Informasi baik pada Seluruh OPD.	**Melakukan manajemen keamanan Informasi** mengacu pada BSSN 10/2019 dan BSSN 4/2021	Penerapan Standar keamanan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo Masih belum adanya penerapan Standar Keamanan Informasi yang mengacu pada BSSN 10/2019 dan BSSN 4/2021.
Prosedur / SOP Keamanan Informasi	Saat ini penerapan Prosedur Keamanan mayoritas diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 4 fokus keamanan. Keamanan Aplikasi dengan 2 SOP, Keamanan Jaringan dengan 5 SOP, Keamanan Data dengan 10 SOP dan Pusat data dengan 4 SOP.	**Pembuatan Prosedur / SOP Keamanan Informasi** sesuai dengan masing-masing implementasi Keamanan untuk mendukung setiap penerapannya dan terdokumentasi secara resmi yang didukung kuat dengan adanya regulasi / payung hukum.	Penerapan Prosedur/SOP hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan terdapat 4 Fokus Prosedur/SOP yaitu Aplikasi, Jaringan, Keamanan Data, dan Pusat Data. Diperlukan Pembuatan SOP tambahan sesuai dengan penerapan dan terdokumentasi secara resmi
Keamanan Teknis			
Perangkat Keamanan	Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan Keamanan Teknis** secara menyeluruh, adapun perangkat keamanan yang dimaksud yaitu CCTV, Fingerlock, Firewall,	Seluruh OPD melakukan Inventarisasi dan Pengadaan/Peremaan Perangkat Keamanan pada OPD yang belum memiliki perangkat keamanan yang bertujuan untuk penerapan keamanan teknis, memastikan seluruh perangkat	Penerapan perangkat keamanan pada seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dikatakan belum menerapkan perangkat keamanan teknis secara menyeluruh .

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Fingerprint, Sensor Pintu/*Access Kontrol.* Total OPD yang memiliki perangkat keamanan yaitu 24 OPD	berfungsi dengan baik dan selalu termonitoring.	
Penerapan Kegiatan Keamanan	Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan Kegiatan Keamanan seperti adanya Penerapan TTE dan Pengujian Keamanan pada Aplikasi (Pentest)	Implementasi keamanan SPBE sesuai dengan standar/framework. Melakukan Kegiatan *Awareness* dan Sosialiasi ataupun Bimtek tentang Keamanan Informasi yang nantinya dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.	Kondisi saat ini penerapan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu dengan adanya Penerapan TTE pada seluruh OPD dan Pengujian Aplikasi (Pentest), penerapan sosialisasi terkait pentingnya keamanan Informasi pada seluruh OPD belum dilakukan secara maksimal.
Audit Keamanan SPBE			
Indeks KAMI	Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan Penilaian Mandiri menggunakan Indeks KAMI pada 30 OPD sejak tahun 2021 yang menyesuaikan dengan ISO27001:2013 dan hasilnya masih kurang dari kata sempurna/baik.	Melakukan Penilaian Mandiri ulang menggunakan Indeks KAMI sebagai evaluasi Penerapan Keamanan pada Seluruh OPD	Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan Indeks KAMI pada Tahun 2021 di 30 OPD dengan menyesuaikan ISO 27001:2013.
Audit Keamanan	Saat ini belum melakukan Audit Keamanan sesuai dengan Perpres tetapi telah melakukan menggunakan	**Melakukan** Audit keamanan yang dilakukan secara rutin baik internal yang dilakukan dalam setiap tahunnya dan audit eksternal setiap 2 tahun	Pemerintah Kabupaten Situbondo belum melakukan Audit Rutin Setiap 2 Tahun Sekali melalui Perangkat BRIN/BPPT.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Indeks Kami yang mengacu pada ISO27001:2013.	sekali. Meminimalisir terjadinya permasalahan keamanan dengan implementasi audit keamanan	

BAB 9
KONDISI EKSISTING TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE DAN ANALISIS GAP

Pada bab ini akan membahas kondisi tata kelola dan manajamen SPBE Kabupaten Situbondo pada saat ini. Selanjutnya akan dilakukan analisa kesenjangan atau analisa gap antar kondisi saat ini dengan kondisi ideal tata kelola dan manajemen SPBE pada Kabupaten Situbondo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

9.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Meliputi Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Tata kelola SPBE juga diperlukan pengelolaan kapasitas dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan kapasitas dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu adalah dengan melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi pusat dan pemerintah daerah, membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah daerah, melakukan penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

Sedangkan, Manajemen SPBE adalag serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Manajemen SPBE meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE.

9.2 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi tata kelola SPBE pada 45 OPD di Kabupaten Situbondo.

9.2.1 Kebijakan SPBE

Sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, pada Domain Kebijakan Internal SPBE, terdapat 10 Indikator tentang Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Penjabaran hasil penilaian indikator dan kebijakan internal tersebut yang telah ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dijabarkan pada **Tabel 9.1.**

Tabel 9.1 Hasil Penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
1	Arsitektur SPBE	**Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 1 ayat 14** menjelaskan tentang kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
2	Peta Rencana SPBE	• **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 11 ayat 1** menjelaskan tentang pedoman peta rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. • **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 1 Ayat 16** tentang peta rencana yang merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
3	Manajemen Data	• **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 48 ayat 2** menjelaskan tentang manajemen data yang dilakukan melalui pengelolaan aristektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data. • **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.** • **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022 tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten**

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
		Situbondo
4	Pembangunan Aplikasi SPBE	**Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 34 ayat 1** menjelaskan tentang pembangunan aplikasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Aplikasi khusus, pemerintah daerah melakukan perencananaan, pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
5	Layanan Pusat Data	**Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 pasal 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 29 Ayat 1** menjelaskan tentang penempatan atau penyimpanan data pada setiap lingkungan pemerintah daerah pada servernya di pusat data. pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait untukkeperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data
6	Layanan Jaringan Intra	**Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 ayat 1** mengenai penggunaan jaringan intra pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam pemerintah daerah.
7	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	**Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** menjelaskan tentang penggunaan sistem layanan sebagai penghubung layanan untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE
8	Manajemen Keamanan Informasi	• **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 47 ayat 1** menjelaskan tentang tujuan manajemen keamanan data informasi yaitu untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
		• **Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo Tahun 2021**
9	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	**Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1** menjelaskan tentang audit teknologi, informasi dan komunikasi secara berkala demi memastikan kehandalan dan keamanan data. audit teknologi, informasi dan komunikasi meliputi audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE
10	Tim Koordinasi SPBE	• **Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 61 ayat 1** menjelaskan terkait dengan pembentukan Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah. • **Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten SItubondo Tahun 2022** • **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022**

Dari Tabel 9.1 diperoleh bahwa seluruh indikator telah terpenuhi di Kabupaten Situbondo. Dari keseluruhan kebijakan internal SPBE di Kabupaten Situbondo mengacu pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk kebijakan internal mengenai manajemen data kebijakan didukung oleh Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022 Tentang Penyelenggara, Forum dan Sekertariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten

Situbondo. Layanan pusat data kebijakan internal didukung oleh Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 pasal 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Kebijakan internal mengenai Manajemen Keamanan Informasi kebijakan didukung oleh Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang *Computer Security Incident Respons Team* Kabupaten Situbondo Tahun 2021. Selanjutnya kebijakan internal mengenai Tim Koordinasi SPBE kebijakan ini didukung oleh Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten SItubondo Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

9.2.2 Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, **Pemantauan** SPBE adalah

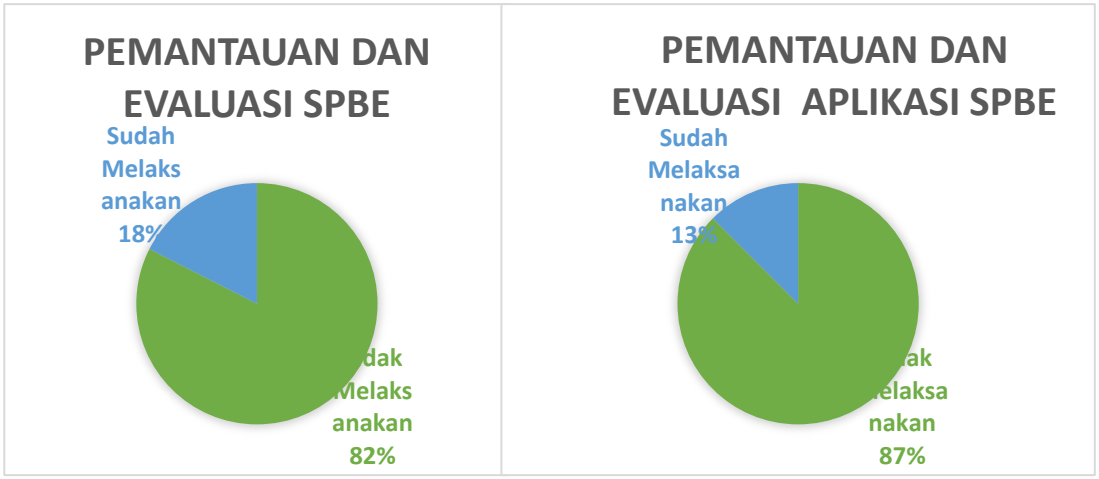

Gambar 9.1Penerapan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE

proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan **Evaluasi** SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa tujuan Pemantauan Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil survei, saat ini **mayoritas OPD di Kabupaten Situbondo belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE maupun Aplikasi SPBE.** Dari gambar diatas diketahui bahwa **OPD yang telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebesar 18% atau sebanyak 7 OPD** yang telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. 7 OPD yang telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE yakni, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Kesatuan dan Politik, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Puskesmas Bungatan. Pelaksanaan dan evaluasi SPBE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan pantauan langsung dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). Monitoring pelaksanaan dan evaluasi SPBE pada Bagian Kesatuan dan Politik dilaksanakan dengan melakukan pencocokan data yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun sekali. Dinas Ketenagakerjaan menyatakan bahwa evaluasi SPBE dilakukan dengan diskusi terkait dengan pengembangan layanan Dinas Ketenagakerjaan. Berbeda dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa monitoring evaluasi dilaksanakan berdasarkan PANRB. OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa monitoring evaluasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan diskusi rutin terhadap penerapan SPBE. Sedangkan Puskemas Bungatan melaksanakan evaluasi dengan melakukan Audit Hardware, Software, dan Brainware di yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

Sebanyak 5 OPD (13%) menyatakan telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE yakni Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Puskesmas Bungatan. Pelaksanaan dan evaluasi SPBE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan pantauan langsung dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). Dinas Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa monitoring evaluasi dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE secara konvensional dalam kurun waktu satu tahun sekali. OPD lain seperti Dinas Pendidikan melaksanakan evaluasi SPBE ketika terjadi kerusakan pada aplikasi dengan koordinasi dan diskusi rutin terkait penerapan aplikasi SPBE. Puskemas Bungatan menyatakan bahwa Monitoring evaluasi dan audit aplikasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. OPD lain seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Evaluasi dalam kurun waktu 1 tahun sekali namun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tidak disebutkan secara jelas.

9.2.3 Audit TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objectif terhadap aset teknologi, informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi, informasi dan komunikasi dengan kriteria dan standart yang telah ditetapkan. Audit TIK mencangkup pemeriksaan hal pokok teknis diantaranya:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi, informasi dan komunikasi,
2. Fungsionalitas teknologi, informasi dan komunikasi,
3. Hasil kinerja teknologi, informasi dan komunikasi,
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pada pelaksanaan Audit TIK dibagi menjadi 3 yaitu audit aplikasi SPBE, audit infrastruktur SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil survei didapatkan hasil seperti pada gambar 9.2. Pada gambar diilustrasikan berapa banyak pelaksanaan audit aplikasi, audit infrastruktur SPBE, dan audit keamanan SPBE. Berdasarkan hasil wawancra dan diskusi bersama, **Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan menggunakan indeks KAMI**. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan indeks KAMI ini **dilaksanakan mulai dari tahun 2021 dan telah dilakukan pada 30 OPD.**

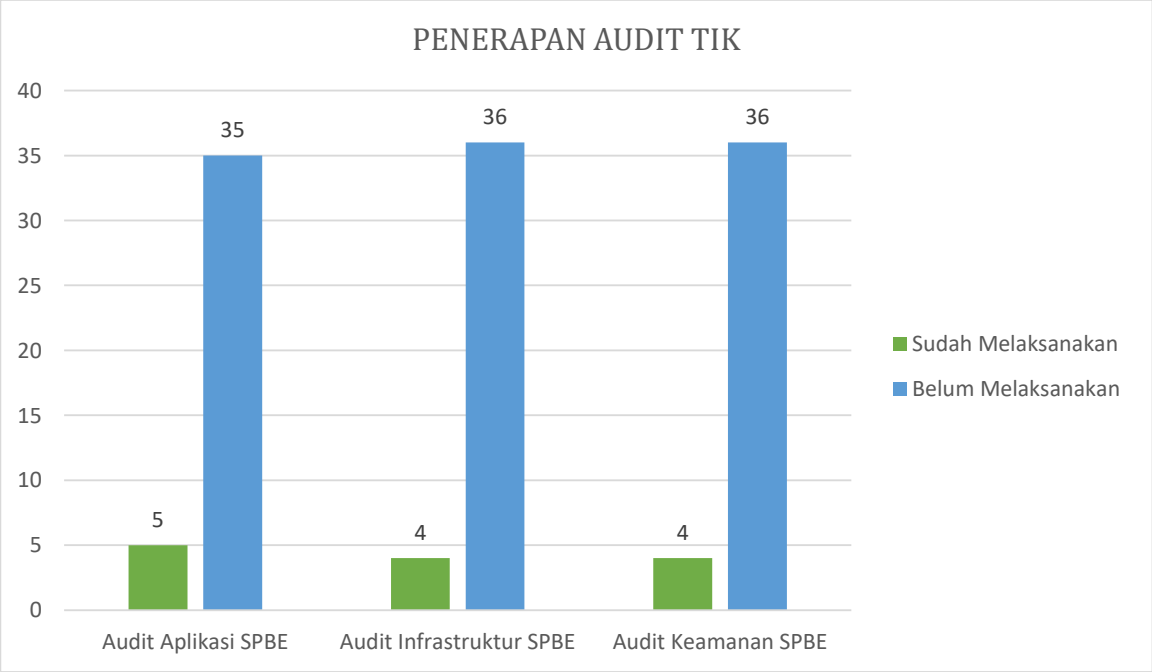

Gambar 9.2 Penerapan Audit TIK

Pada Pelaksanaan Audit TIK, dibagi menjadi 3 yaitu audit aplikasi SPBE, audit infrastruktur SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Berdasarkan gambar 9.2, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Audit TIK masih belum dilaksanakan oleh seluruh OPD. Pelaksanaan audit aplikasi dilaksanakan oleh 5 OPD, audit infrastruktur dilaksanakan oleh 4 OPD, dan audit keamanan dilaksanakan oleh 4 OPD. Penjabaran lebih detail, akan dibahas pada poin-poin di bawah ini.

a) Audit Aplikasi

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Audit Aplikasi mengenai pengkajian ulang dan penerapan aplikasi pada instansi pemeritah daerah. Berdasarkan hasil analisa saat ini dari 40 OPD, **5 OPD di Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan audit aplikasi SPBE dan sekitar 35 OPD belum melakukan audit aplikasi SPBE.** 5 PD yang telah melaksanakan audit aplikasi SPBE yaitu **Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan serta Puskesmas Bungatan**. Audit aplikasi OPD Badan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan LKPP dimana pengadaan aplikasi ditinjau langsung oleh LKPP atau (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan frekuensi yang tidak diketahui. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan audit aplikasi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun sekali *framework* kegiatan yang digunakan merupakan pencocokan data dengan data yang diinputkan di aplikasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan OPD lain terkait penyesuaian fitur, DTD-AKP atau (Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif), berdasarkan hasil koordinasi penambahan fitur akan dilaksanakan sesuai dengan hasil validasi dan kebutuhan intervensi. Audit aplikasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sekali dengan bantuan audit oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. OPD terakhir yang melaksanakan audit aplikasi adalah Puskesmas Bungatan standart yang diterapkan audit palikasi adalah pengecekan, monitoring evaluasi hardware, software dan brainware.

b) Audit Infrastruktur SPBE

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Audit Infrastruktur SPBE mengenai pengkajian pemerintahan di bidang dan penerapan teknologi. Berdasarkan hasil analisa saat ini dari 40 OPD, **4 OPD sudah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan 37 OPD belum melaksanakan audit infrastruktur SPBE**. Beberapa OPD yang telah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Puskesmas Bungatan. Pelaksanaan audit aplikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pengecekkan kabel jaringan, acces point, server pada lingkungan kerja pengecekkan

dilaksanakan setiap terjadi kesalahan atau kerusakan. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan melaksanakan audit infrastruktur dengan bantuan dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap perangkat keras komputer dan kelengkapan lain selama satu tahun sekali. Sementara itu Puskesmas Bungatan hanya menyatakan bahwa audit infrastruktur hanya dilaksanakan pengecekan infrastruktur secara berkala namun tidak disebutkan rentang waktu pengecekan atau audit infrastruktur dilaksanakan.

c) Audit Keamanan SPBE

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Audit Keamanan SPBE mengenai penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Berdasarkan hasil analisa saat ini dari 40 OPD, **terdapat 4 OPD sudah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan 36 OPD belum melaksanakan audit Keamanan SPBE**. 4 OPD yang telah melaksanakan Audit Keamanan SPBE adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dan Puskesmas Bungatan. Audit keamanan OPD Badan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan LKPP dimana pengadaan jasa atau kegiatan pengamanan SPBE ditinjau langsung oleh LKPP dengan frekuensi yang tidak diketahui. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan audit keamanan dengan mengkaji ulang penerapan teknoloogi keamanan SPBE bersama BPPT atau (Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi) dan juga melaksanakan audit keamanan dengan menggunakan Indeks KAMI yanng merupakan aplikasi alat bantu untuk asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi audit bersama tersebut dilakukan sekali. Dinas Koperasi Perindustriab dan Perdagangan melaksanakan audit keamanan SPBE dengan bantuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sementara itu OPD terakhir yang melaksanakan audit keamanan SPBE yakni Puskesmas Bungatan dengan melaksanakan pengecekan penyimpanan data dan pengelolaan data.

9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi saat ini dari manajemen SPBE pada 40 OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Berdasarkan analisa Laporan Hasil Evaluasi kondisi Manajemen SPBE dari 8 Sub manajemen lain seperti manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE. Kabupaten Situbonod

memilki **rata-rata nilai kematangan manajemen SPBE sebesar 1.375** dimana nilai tingkat kematangan untuk manajemen risiko SPBE adalah 1, manajemen keamanan informasi nilai kematangannya 1, manajemen data 1, manajemen aset TIK 1, manajemen sumber daya manusia 1, manajemen pengetahuan 1, manajemen perubahan 1 dan terakhir nilai kematangan untuk manajemen layanan adalah 4. Dari nilai tingkat kematangan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa bahwa predikat untuk tingkat nilai kematangan 1 adalah kurang, 2 predikatnya cukup, 3 predikatnya baik, 4 predikatnya adalah sangat baik dan 5 predikatnya adalah memuaskan. Jadi dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dari 8 sub manajemen SPBE seluruhnya termasuk kedalam kategori kurang kecuali manajemen layanan manajemen layanan dimana predikatnya adalah sangat baik.

Berdasarkan hasil kondisi eksisting manajemen SPBE di Kabupaten Situbondo dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo **belum terdapat OPD yang melaksanakan 8 sub manajemen SPBE**. Hasil eksisting manajemen SPBE dari 40 OPD terdapat **2 OPD yang melaksanakan 6 sub manejemen SPBE** atau dapat dikatakan hampir memenuhi Manajemen SPBE secara sempurna. **2 OPD yakni Puskesmas Bungatan dan Puskesmas Situbondo.** 6 Sub Manajemen yang dilaksanakan oleh Puskesmas Bungatan adalah Manajemen Risiko, Manajemen Kamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM TIK, dan Manajemen layanan SPBE. Sedangkan 6 Sub manajemen yang dilaksanakan oleh Puskesmas Situbondo adalah Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen ASET TIK, Manajemen SDM TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Layanan SPBE. Sedangkan 38 OPD hanya melaksanakan Manajemen SPBE dibawah 6 sub manajemen SPBE.

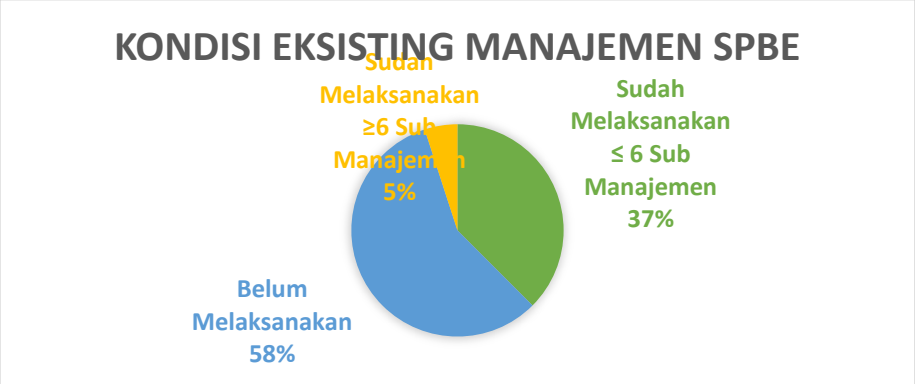

Gambar 9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Dari gambar 9.3 diketahui bahwa dari 40 OPD setidakya 5% atau 2 OPD yang telah menerapkan 6 manajemen SPBE. Selanjutnya ada 37 % atau sebanyak 15 OPD setidaknya telah melaksanakan manajemen SPBE. Namun dari 15 OPD yang telah melaksanakan manajemen SPBE tersebut beberapa OPD hanya

menjalankan 1 sampai 6 sub manajemen SPBE. Sedangkan untuk 58% atau 23 OPD merupakan OPD yang belum menerapkan Manajemen SPBE.

9.3.1 Manajemen Risiko SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen risiko merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

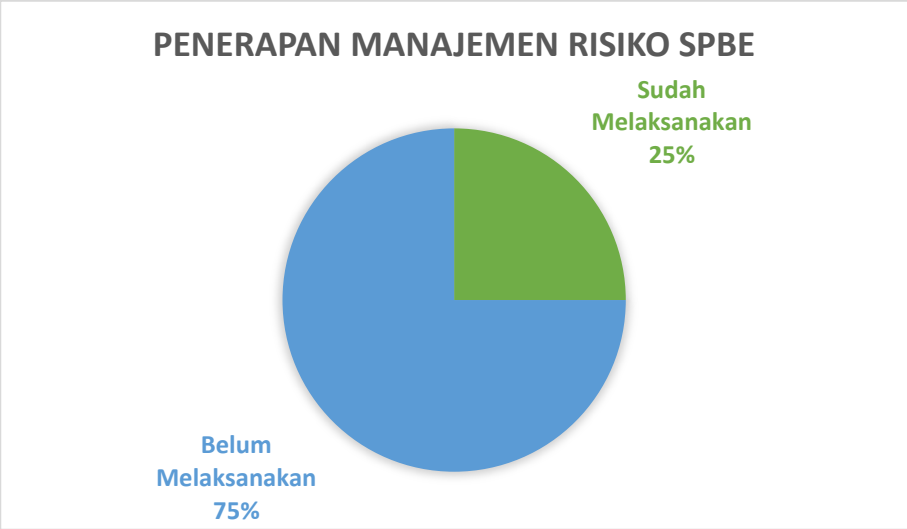

Gambar 9.3 Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini dari 40 OPD **terdapat 10 OPD (25%) yang telah melaksanakan manajemen risiko sedangngkan 30 OPD (75%) belum melaksanakan manajemen risiko**. 10 OPD yang telah melaksanakan Manajemen Risiko yakni Badan Perencanaan dan Keuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, RSUD dr.Abdoer Rahem, Kecamatan Situbondo, Puskesmas Situbondo, dan Puskesmas Bungatan. Namun dari 10 OPD yang melaksanakan manajemen risiko terdapat 5 OPD yang belum mempunyai standar dan bentuk kegiatan dalam melaksanakan manajemen risiko. 5 OPD yang tidak memiliki standart dan bentuk kegiatan manajemen risiko yakni Bagian Perencanaan dan Keuangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dr.Abdoer Rahem, Kecamatan Situbondo, Puskesmas Situbondo.

Bentuk kegiatan manajemen risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah mengevaluasi permasalahan yang ada, sedangkan standar yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memiliki standar pelaksanaan manajemen risiko. Bentuk pelaksanaan manjemen risiko yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan mendukung visi misi dari Bupati Situbondo. Dinas Ketenagakerjaan bentuk

kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat laporan manajemen risiko ke inspektorat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa standart yang digunakan untuk menunjang manajemen risiko adalah Permen-PAN RB No 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penilaian manajemen risiko SPBE. Sedangkan Puskesmas Bungatan bentuk kegiatan Manajemen risiko adalah dengan tiidak membagikan password selain pengelola SPBE.

Dari kegiatan manajemen risiko yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara yang mana ini mengacu pada, Permen-PAN no 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko SPBE menyatakan bahwa pelaksanaan Manajemen risiko dapat diawali dengan penyusunan dan penetapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE yang terintegrasi dengan proses kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kerangka tersebut mencakup prinsip, kepemimpinan dan komitmen, proses Manajemen Risiko SPBE, dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE. Berdasarkan hasil survei dapat dikatakan bahwa OPD belum bisa dikatakan melaksanakan manajemen risiko SPBE. Hal ini karena dalam proses pelaksanaannya belum mencakup pedoman atau aturan PermenPAN Nomor 5 Tahun 2020.

9.3.2 Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Keamanan Informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan. Tujuan manajemen keamanan informasi yaitu untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi SPBE.

Gambar 9.4 Grafik Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Berdasarkan hasil survei saat ini dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat **4 OPD atau 10% yang melaksanakan manajemen Keamanan Informasi SPBE**, sedangkan yang OPD yang belum melaksanakan manajemen keamanan informasi sebanyak 36 OPD atau 90% OPD. OPD yang melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE diantaranya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Puskesmas Bungatan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penggunaan username dan password untuk data urgent. Sedangkan untuk standart yang digunakan untuk memanajemen keamanan informasi SPBE belum ada. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk manajemen keamanan informasi pada masing masing OPD berbeda. Badan Keuangan dan Aset Daerah bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penggunaan username dan password untuk data yang urgent. Dinas Peternakan dan Perikanan bentuk kegiatan mengganti password secara berkala sedangkan OPD Puskesmas Bungatan bentuk kegiatan manajemen keamanan SPBE adalah juga mengganti password secara berkala.

Dari kegiatan manajemen keamanan informasi yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Manajemen risiko SPBE diatur dengan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yang mana ini mengacu pada, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standart Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE. Menyatakan bahwa bahwa acuan dalam melaksanakan proses manajemen keamanan informasi meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jwab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil survei dapat

dikatakan bahwa OPD belum bisa dikatakan melaksanakn manajemen keamanan informasi SPBE. Hal ini dikarenakan dalam proses penerapanya belum sesuai pedoman Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standart Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

9.3.3 Manajemen Data SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Tujuan dari Manajemen Data SPBE sendiri adalah terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

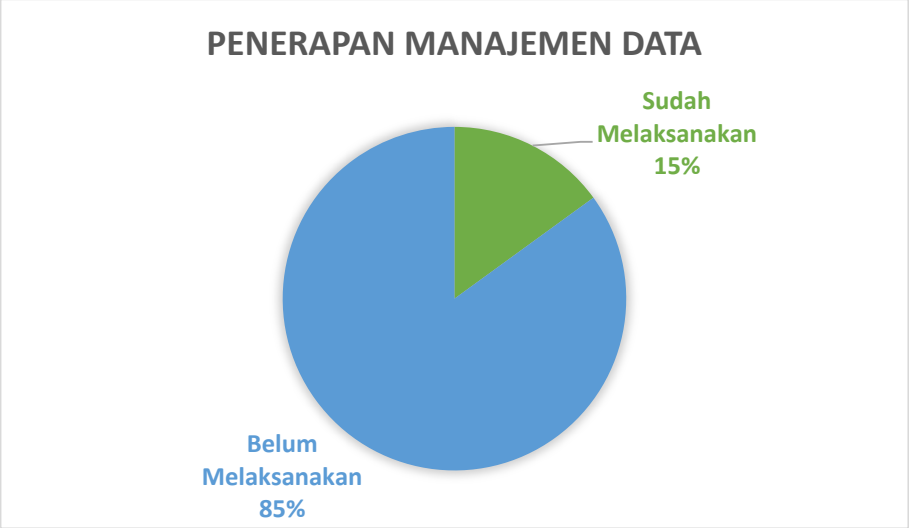

Gambar 9.5 Penerapan Manajemen Data

Berdasarkan hasil survei saat ini dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat **5 OPD yang melaksanakan manajemen data** SPBE diantaranya **Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kecamatan Situbondo dan Puskesmas Bungatan**. Sedangkan terdapat 34 OPD atau 85 % OPD yang belum menerapkan manajemen data. Dari 5 OPD tersebut seluruh OPD belum memiliki standart yang Untuk penerapan manajemen SPBE. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan terhadap manajemen data adalah dengan dibatasinya pengunaan data oleh masing-masing bidang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bentuk kegiatan manajemen data dengan melaksanakan manajemen data sesuai dengan E-Modul, E-Book dan pendaftaran anggota. Bentuk manajemen data yang dilakukan OPD Dinas Peternakan dan Perikanan antara lain adalah dengan memanajemen data dengan excel. OPD keempat yang menjalankan manajemen data adalah Kecamatan Situbondo bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pengelolaan data menggunakan excel. OPD terakhir yang melaksanakan manajemen data adalah Puskesmas Situbondo bentuk kegiatan yang

dilaksanakan Puskesmas Situbondo antara lain adalah dengan men*Download* data secara berkala setiap bulan.

Dari kegiatan manajemen data SPBE yang dilaksanakan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Situbondo antara lain **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 48 ayat 2, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo**, dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022 tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo**

Dalam 3 dokumen tersebut disebutkan bahwa Manajemen data di Kabupaten membentuk Tim produsen data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo pasal 1 butir ke 24. Walaupun, sudah didukung oleh banyak keputusan dan kebijakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan LHE (Laporan Hasil Evaluasi) nilai tingkat Kemantangan indikator manajemen data berada diangka 1, yang mana ini menyatakan bahwa penerapan manajemen Data Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo belum memiliki program kegiatan yang terarah dan terencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini *framework* dan bentuk kegiatan dalam penerapan manajemen data yang telah disebutkan belum dapat dikatakan sebagai penerapan manajemen data SPBE.

9.3.4 Manajemen Aset TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Aset TIK merupakan serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Tujuan dari Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

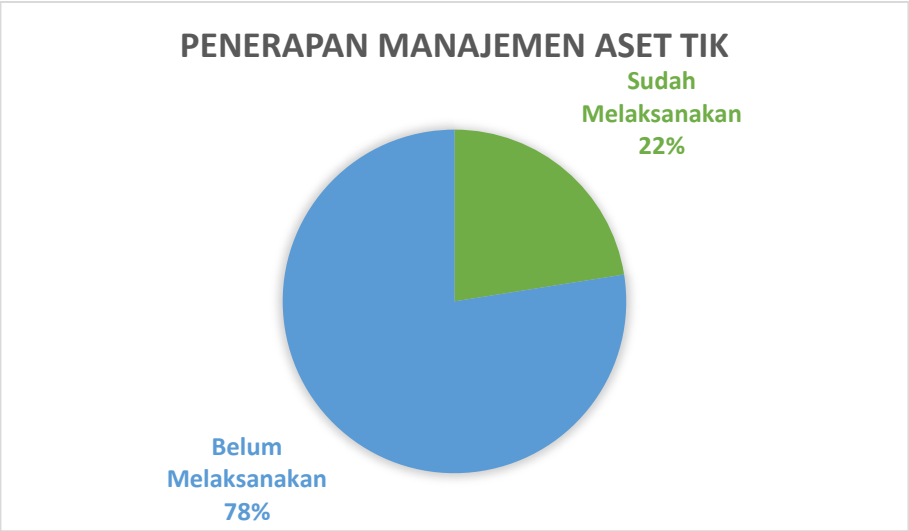

Gambar 9.6 Penerapan Manajemen ASET TIK

Berdasarkan hasil survei saat ini, dari 40 OPD Kabupaten Situbondo terdapat 9 OPD atau 22% yang sudah melaksanakan Manajement Aset TIK yakni **Badan Kesatuan Bangsa dan Poliitik, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesahatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, Puskesmas Situbondo, Puskesmas Bungatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.** Sedangkan terdapat 31 OPD atau 78% OPD belum menerapkan manajemen ASET TIK. Dari 9 OPD tersebut terdapat 6 OPD yang melaksanakan Manajemen Aset TIK namun belum memiliki standart pelaksanaan manajemen aset TIK yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Petrenakan dan Perikanan, Puskesmas Situbondo, Puskesmas Bungatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

OPD yang melaksanakan manajemen aset TIK dan juga memiliki standart manajemen aset TIK antara lain adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil survei, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyatakan bahwa bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah inventaris barang dan pelaporan dengan standar yang digunakan adalah penyesuaian aset dari BKAD. Dinas ketenagakerjaan merupakan OPD yang melaksanakan manajemen data, bentuk kegiatan yang dilaksanakan OPD untuk melaksanakan manajemen data adalah pelabelan aset TIK. Sedangkan untuk standar yang digunakan pada Dinas Ketenagakerjaan belum terdapat standart atau framework kegiatan yang dilaksanakan. Dinas kesehatan merupkan OPD yang melaksanakan manajemen data, bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pembatasan akses TIK atas izin sekertariat sub bidang penyusunan bidang dan informasi sedangkan untuk standart yang digunakan tidak ada.

Dari kegiatan manajemen aset TIK yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan atau pembersihan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SPBE. Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa manajemen ASET TIK dapat dilakukan dengan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dang penghapusan alat elektronik atau TI. Jadi kesimpulannya OPD bisa dikatakan melaksanakan manajemen aset TIK namun standar atau framework kegiatan tidak ada.

9.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri adalah untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

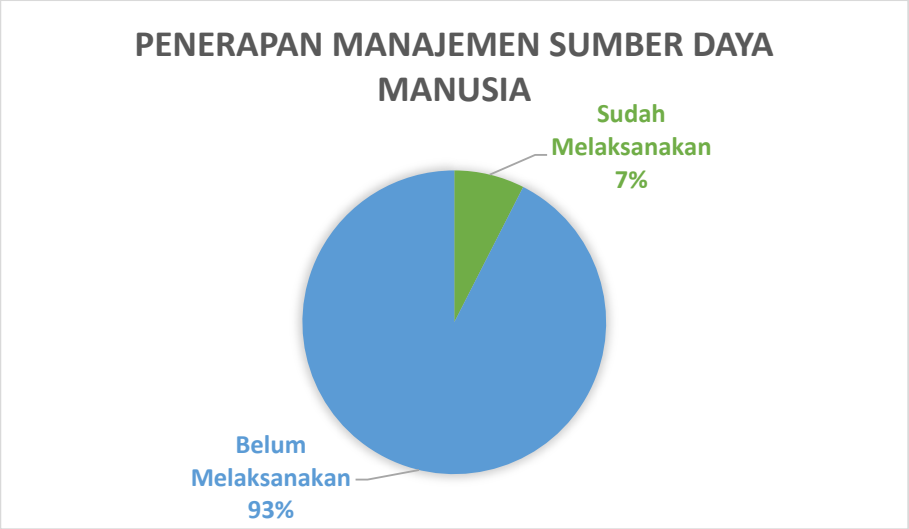

Gambar 9.7 Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE. 3 OPD yang telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia antara lain adalah **Dinas Kesehatan, Puskesmas Situbondo, dan Puskesmas Bungatan**. 3 OPD tersebut sudah menjalankan Manajemen Sumber Daya Manusia namun standart yang digunakan acuan belum ditentukan. Bentuk kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah membagi tugas sesuai admin aplikasi pada dinas kesehatan. Sedangkan untuk puskesmas bungatan bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah melakukan *update* data setiap triwulan di aplikasi SISDMK Kemenkes. Sedangnkan untuk Puskesmas Situbondo dan Puskesmas menyatakan bahwa tidak memiliki bentuk kegiatan

manajemen sumber daya manusia dan standar yang digunakan untuk pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Dari kegiatan manajemen aset TIK yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa OPD belum bisa dikatakan melaksanakan manajemen sumber daya manusia.

9.3.6 Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Pengetahuan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Tujuan dari Manajemen Pengetahuan adalah untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Gambar 9.8 Penerapan Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 2 OPD yang melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE. 2 OPD tersebut adalah **Dinas Kesehatan dan Puskesmas Situbondo**. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Situbondo tidak dilaksanakan dengan mengikuti standar yang digunakan untuk manajemen pengetahuan. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan mengikuti pelatihan yang ada. Namun Dinas Kesehatan tidak menyatakan dengan jelas apakah pelatihan yang diikuti termasuk dalam pelatihan yang berkaitan dengan SPBE/TIK atau pelatihan untuk pengembangan pengetahuan di bidang lain. Sedangkan untuk Puskesmas Situbondo, OPD tidak menyatakan atau

menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan dan standar kegiatan dalam melaksanakan manajemen pengetahuan.

Dari kegiatan manajemen pengetahuan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa Manajemen pengetahuan dapat dilakukan dengen melihat pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dalam pengetahuin mengenai pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa OPD belum bisa dikatakan melaksanakan manajemen pengetahuan. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen pengetahuan belum memuat pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dalam pengetahuin mengenai pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

9.3.7 Manajemen Perubahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Perubahan merupakan serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Tujuan dari Manajemen Perubahan sendiri adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

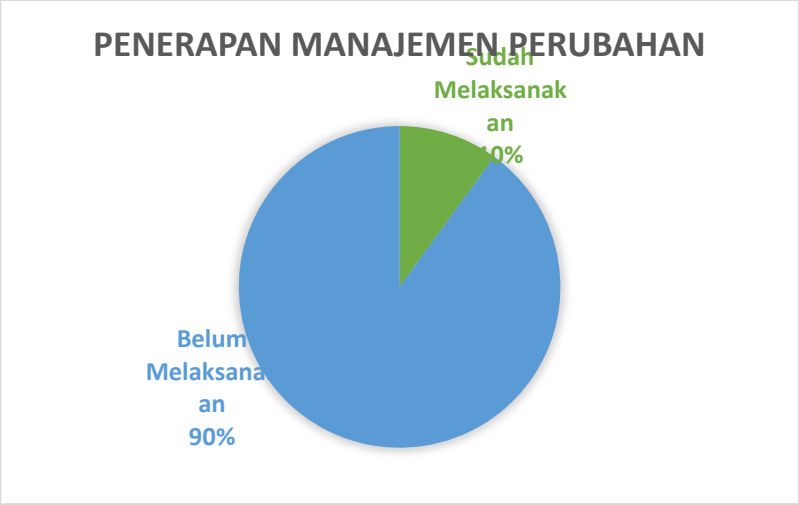

Gambar 9.9 Penerapan Manajemen Perubahan

Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 4 OPD yang melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE. OPD yang melaksanakan Manajemen perubahan adalah **Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja**. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah penunjukkan salah satu ASN sebagai agen perubahan. Bentuk

kegiatan lain pada lain Dinas Kesehatan antara lain adalah pelayanan kesehatan di bidang seksi mutu. Sedangakan bentuk ekgiatan pada Satuan Pamong Praja adalah penunjukan agen perubahan. Dari OPD tersebut standar yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan manajemen perubahan **belum ada**.

Dari kegiatan manajemen perubahan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa Manajemen perubahan dapat dilakukan dengen melihat proses rencana, analisis, pengembangan, implementasi, pemmantauan dan juga melaksanakan evaluasi terhadap SPBE. Dari kegiatan manajemen aset TIK yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa Manajemen pengetahuan dapat dilakukan dengan melihat pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dalam pengetahuin mengenai pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa OPD belum bisa dikatakan melaksanakan manajemen pengetahuan.

9.3.8 Manajemen Layanan SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Layanan SPBE merupakan serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Tujuan lain dari Manajemen Layanan SPBE adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE serta mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik Pemerintah Daerah.

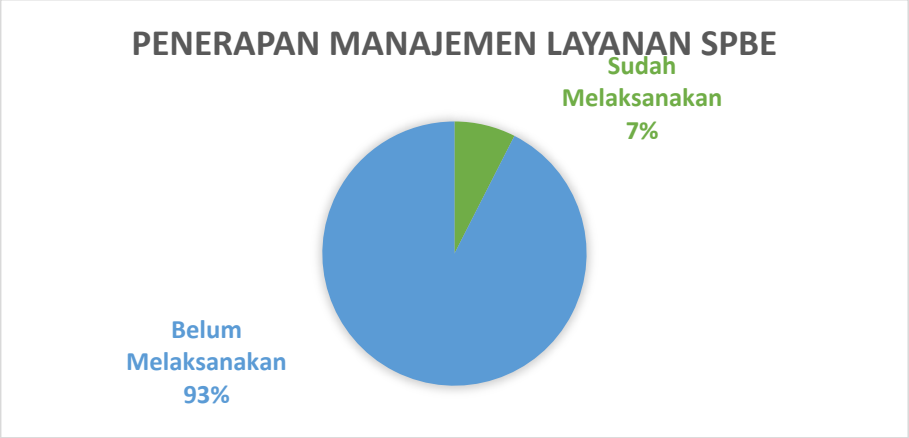

Gambar 9.10 Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Situbondo saat ini **terdapat 2 OPD atau 7% yang sudah melaksanakan Manajemen Layanan SPBE**, sedangkan OPD yang belum melaksanakan manajemen layanan sebanyak 38 OPD atau sebanyak 93%. OPD yang menerapkan Manajemen Layanan adalah **Puskesmas**

Bungatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Puskesmas Bungatan menyatakan bahwa bentuk pelaksanaan Manajemen Layanan antara lain adalah melaksanakan manajemen layanan dengan menggunakan SIKDA dan KIOSK. Sedangkan Dinas Ketenagakerjaan tidak menyatakan dengan jelas mengenai bentuk kegiatan maupun standar yang digunakan dalam menerapkan manajemen layanan.

Dari kegiatan manajemen Layanan SPBE yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana menyatakan bahwa Manajemen Layanan SPBE. Dapat dilakukan dengen melihat atau reviu, proses pelayanan yang menggunakan SPBE. Pengelolaan manajemen Layanan disebutkan dapat dilaksanakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa OPD belum bisa dikatakan melaksanakan manajemen pengetahuan. Karena OPD tidak memenuhi pedoman manajemen layanan berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

9.4 Kondisi Eksisting Rencana dan Anggaran SPBE

Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi eksisting terkait rencana dan anggaran SPBE dari 40 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

9.4.1 Kondisi Eksisting Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diatur dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/34/P/004.22022 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022**. Dalam Keputusan tersebut Bupati Situbondo mengugaskan Tim anggaran Pemerintah Daerah Situbondo sebagaimana dimaksud untuk

a. Membahsan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menyusun dan membahasa eancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. Menyusun dan membahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAD;
d. Melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban APBD;
f. Mmbahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggung jawaban APBD;

g. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
h. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran detail jabatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 9.2.**

Tabel 9.2 Daftar Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Pembina	Bupati Situbondo
2	Pengarah	Wakil Bupati Situbondo
3	Ketua	Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo
4	Wakil Ketua I	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
5	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
6	Sekertaris I	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7	Sekertaris II	Kepala Bidang Akutansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
8	Anggota	Asisten Perekonmian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo
		Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris daerah Kabupaten Situbondo
		Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo
		Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo
		Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
		Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo

9.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE

Ketersediaan Rencana Anggaran SPBE dibagi menjadi 3 kategori, yaitu a) anggaran pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi dan *software* komersial, b) anggaran pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta c) anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial. Untuk detail jumlah anggaran yang ada dapat dilihat pada **Tabel 9.3.**

Tabel 9.3 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE tiap OPD

Kode OPD	Nama OPD	Nilai A (Rp)	Nilai B (Rp)	Nilai C(Rp)	TOTAL(Rp)
1	Bagian Tata Pemerintah dan Kerja Sama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bagian Hukum	Tidak Ada	25,000,000	145,093,440	170,093,440
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Tidak Ada	660,000	100,000	760,000
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	30,747,000	Tidak Ada	Tidak Ada	30,747,000
6	Bagian Umum	Tidak Ada	456,138,811	141,281,000	597,419,811
7	Bagian Organisasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Bagian Protokol	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode OPD	Nama OPD	Nilai A (Rp)	Nilai B (Rp)	Nilai C(Rp)	TOTAL(Rp)
	dan Komunikasi Pimpinan				
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada	13,123,000	13,123,000
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	77,660,000	77,660,000
11	Inspektorat	Tidak Ada	47,000,000	66,880,000	113,880,000
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	160,000,000	Tidak Ada	118,528,000	278,528,000
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000	82,655,020	10,000,000	102,655,020
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Ada	41,900,000	59,800,000	101,700,000
15	Badan Pendapatan Daerah	70,000,000	1,133,147,155	Tidak Ada	1,203,147,155
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,000,000	312,442,500	7,159,500	325,602,000
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	1,120,100,008	Tidak Ada	1,120,100,008
18	Dinas Kesehatan	32,000,000	1,490,094,740	35,001,000	1,557,095,740
19	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak Ada	19,562,400	15,037,000	34,599,400
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	104,406,400	2,052,175,829	460,317,871	2,616,900,100
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,527,000	Tidak Ada	74,918,650	81,445,650
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Tidak Ada	41,748,510	137,899,650	179,648,160
22	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Ada	29,573,730	18,463,000	48,036,730
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada	175,285,820	Tidak Ada	175,285,820
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	80,000,000	172,196,670	38,456,000	290,652,670
25	Dinas Pemberdayaan	Tidak Ada	9,189,400	13,000,000	22,189,400

Kode OPD	Nama OPD	Nilai A (Rp)	Nilai B (Rp)	Nilai C(Rp)	TOTAL(Rp)
	Masyarakat dan Desa				
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Tidak Ada	138,930,00	11,120,000	150,050,000
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66,763,000	170,171,880	12,960,000	249,894,880
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada	11,718,270	97,350,000	109,068,270
29	Dinas Perhubungan	Tidak Ada	49,595,910	28,400,000	77,995,910
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35,000,000	4,958,000	5,680,000	45,638,000
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25,000,000	Tidak Ada	Tidak ada	25,000,000
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tidak Ada	50,512,000	11,509,000	62,021,000
33	Dinas Sosial	Tidak Ada	49,047,900	11,509,000	60,556,900
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak Ada	78,421,500	19,760,000	98,181,500
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Tidak Ada	150,000,000	180,000,000	330,000,000
36	Kecamatan Situbondo	Tidak Ada	Tidak Ada	7,799,000	7,799,000
37	Kecamatan Bungatan	Tidak Ada	8,676,800	10,219,000	18,895,800
38	Puskesmas Situbondo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	Puskesmas Bungatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Ada	26,241,600	7,100,000	33,341,600
41	Pembangunan Sarana Dan Infrastruktur	Tidak Ada	33,917,400	7,100,000	41,017,400

Dari total 40 OPD yang telah disurvei, terdapat **6 OPD yang masih belum memiliki anggaran untuk 3 kegiatan pembangunan aplikasi**, pengadaan

maupun pemeliharaan perangkat keras. 6 OPD tersebut yakni Bagian Tata Peerintahan dan Kerjasama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Puskesmas Bungatan, Puskesmas Situbondo. Berdasarkan data, ada 15 OPD yang telah melaksanakan kegiatan dengan penganggaran dana untuk pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan sodtware komersial. Penganggaran lain untuk pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi infomasi dan komunikasi telah dijalankan oleh 31 OPD. Sedangkan sebanyak 31 OPD juga telah memiliki anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemelihraan perangkat keras teknologi infirmasi dan software komersal.

Total anggaran pengadaan aplikasi dan perangkat lunak terbesar dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan total anggaran sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta ribu rupiah) anggaran ini digunakan untuk pemgembangan atau pembuatan Aplikasi Kepegawaian (SIDAK) dan Aplikasi SIAP. Sedangkan anggaran pengadaan aplikasi dan perangkat lunak terendah dimiliki oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) dimana anggaran ini digunakan untuk pembelian akun zoom 1 tahun subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Anggaran untuk pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan pengeluaran terbesar dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 2.052.175.829 (dua miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh lima depalan ratus dua puluh sembilan rupiah) sedangkan penganggaran terendah untuk anggaran ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ini dilaksanakan untuk pembelian perangkat keras pendkung sarana prasarana SPBE. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam anggaran dilakukan untuk belanja alat tulis dan bahan komputer. Sedangkan anggaran Terakhir untuk anggaran kegiatan pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial penganggaran terbesar dilaksanakan oleh RSUD dr. Abdoer Rahem dengan total anggaran sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana anggaran ini digunakan untuk Pemeliharaan billing sistem informasi farmasi dan informasi persediaan. Sedangkan untuk pengadaan anggaran terendah dilaksanakan oleh oleh Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut dilakukan untuk pemeliharaan wifi.

Total Anggaran untuk pembangunan aplikasi pengadaan maupun pemeliharaan perangkat keras, pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, dan pemeliharaan perangkat keras teknologi

informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial paling besar dilaksanakan oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran dana sebesar Rp. 2.616.900.100 (dua miliar enam ratus enam belas ribu sembilan ratus ribu seratus rupiah). Sedangkan total anggaran dana terendah milik OPD Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Detail anggaran dapat dilihat pada Error! Reference source not found..

Berdasarkan kondisi diatas dan laporan hasil evaluasi Kabupaten Situbondo nilai tingkat kematangan rencana dan anggaran berada di tingkat 2. mengacu pada PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 menyatakan bahwa, nilai tingkat kematangan rencana dan anggaran yang berada pada tingkat 2 memiliki kriteria **berupa terpenuhinya rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah**. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi dan software komersial, pembelian/pengadaan perangkat keras TIK dan pemeliharaan perangkat keras TIK, aplikasi, software komersial di Kabupaten Situbondo, sudah dijalankan dengan baik. Ketersediaan anggaran yang besar (dapat dilihat pada **tabel 9.3**) dapat dimanfaatkan oleh PD untuk melakukan pengadaan pengadaan perangkat lunak, pengadaan perangkat keras TIK serta pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu rencana dan anggaran tahun selanjutnya yang telah direncanakan dapat digunakan untuk mendukung dan memudahkan terlaksananya SPBE yang baik di masing-masing PD. Hal ini juga akan mendukung tercapainya Indikator 13 Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana & Anggaran SPBE sehingga kabupaten/kota dapat mencapai kondisi SPBE yang ideal

9.5 Analisis Gap

Bagian ini akan membahas tentang kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari tata kelola, manajemen serta rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

9.5.1 Analisis Gap Tata Kelola SPBE

Bagian ini menjelaskan tentang analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari komponen **tata kelola SPBE**. Untuk penjelasan gap tata kelola dari Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 9.4.**

Tabel 9.4 Analisis GAP Tatakelola SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Kebijakan SPBE			
Arsitektur SPBE	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 1 ini Pemerintah Kabupaten	Memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE daerah: • Memuat peraturan lengkap mengenai	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan**

	mencapai level nilai kematangan 3 yang tertuang pada **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 1 ayat 14.**	Kebijakan internal Arsitektur SPBE dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). • Mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah • Mereviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE	**Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 1 ayat 14** secara periodik
Peta Rencana SPBE	Memiliki kebijakan internal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 16	Memiliki kebijakan internal Peta Rencana: • Kebijakan internal Peta Rencana SPBE mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK) • Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 16** secara periodik

		Nasional. • Meriviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi	
Manajemen Data	Memiliki kebijakan internal yang tertuang dalam: • Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 48 ayat 2 • Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo. • Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022 tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo	Memiliki kebijakan internal Manajemen Data: • Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data • Mereviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 48 ayat 2** secara periodik. Meriviu kembali Peraturan Bupati tentang satu data indonesia Kabupaten Situbindi dan juga Keputusan Bupati tentang penyelenggara forum dan sekertariat forum satu data indonesia Kabupaten Situbondo
Pembangunan Aplikasi SPBE	Memiliki kebijakan internal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis	Memiliki kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE: • Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan**

	Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 34 ayat 1	mengatur siklus pembangunan aplikasi. • Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE • Mereviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	**Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 34 ayat 1** secara periodik.
Layanan Pusat Data	Memiliki kebijakan internal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 pasal 29 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 29 Ayat 1	Memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data: • Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Mereviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **eraturan Bupati Situbondo Nomor 49 pasal 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 29 Ayat1** dan juga memberikan tambahan peraturan terkait yang mengatur Layanan Pusat Data di Kabupaten Situbondo.
Layanan	Memiliki kebijakan	Memiliki kebijakan internal	Melakukan reviu dan

Jaringan Intra	internal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 pasal 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 ayat 1	Layanan Pusat Data: • Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Meriviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **peraturan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 pasal 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Pemerintah Situbondo,** dan juga memberikan tambahan peraturan terkait yang mengatur Layanan Pusat Data di Kabupaten Situbondo.
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Memiliki kebijakan internal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1	Memiliki kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan: • Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Meriviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** secara periodik

		baru.	
Manajemen Kemanan Informasi	Memiliki kebijakan internal yang tertuang dalam: • Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 47 ayat 1 • Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo Tahun 2021.	Memiliki kebijakan internal Manajemen Kemanan Informasi: • Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mencakup (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). • Meriviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** secara periodik, selain itu dapat juga dilakukan reviu dan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/ 2021 Tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo Tahun 2021
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Memiliki kebijakan internal yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1.	Memiliki kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: • Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). • Meriviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1** secara periodik

		ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	
Tim Koordinasi	Memiliki kebijakan internal yang tertera dalam: • Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 61 ayat 1 • Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten SItubondo Tahun 2022. • Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022	Memiliki kebijakan internal Tim Koordinasi: • Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Meriviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 61 ayat 1** secara periodik. Melakukan reviu dan evaluasi juga terhadap **Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022** dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022**
Pemantauan dan Evaluasi			
Pemantauan dan Evaluasi	7 OPD melaksanakan pemantauan dan	Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan	38 OPD belum melaksanakan

SPBE	evaluasi SPBE secara berkala dalam periode 6 bulan sampai 1 tahun sekali atau jika terjadi kesalahan. bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah monitoring, pencocokan data, monev sesuai Kemenpan-RB	dan evaluasi SPBE secara rutin.	Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Terdapat OPD yang telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi namun kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE	5 OPD melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE seecara berkala dalam periode 6 bulan sampai 1 tahun atau ketika ada kesalahan teknis dengan bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara konvensional, koordinasi dan diskusi, dan juga Monev Audit.	Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Apliaksi SPBE secara rutin.	35 OPD belum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE. Terdapat OPD yang telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi namun kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
Audit TIK			
Audit Aplikasi SPBE	5 OPD melaksanakan Audiit Aplikasii SPBE secara berkala selama 1 tahun sekali. Bentuk audit yang dilaksanakan melakukan pencockan data yang diinputkan di aplikasi, koordinasi penyesuaian fitur, dtd-akp, monev software, brainware, hardware, dan juga audit aplikasi yang dibantu oleh Kominfo.	Audit dilaksanakan dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE	35 OPD belum melaksanakan Audit Aplikasi SPBE Terdapat OPD yang telah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE namun kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
Audit Infrastruktur SPBE	4 OPD melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE secara berkala setahun sekali atau bahkan ketika ada kesalahan teknis. Bentuk audit infrastruktur yang dilaksanakan antara lain adalah pengecekan kabel jaringan, acces point dan server, dan perangkat keras lain serta bantuan audit dari	Audit dilaksanakan dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur SPBE	36 OPD belum melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE. Terdapat OPD yang sudah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE namun kagiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur

	dinas Kominfo.		
Audit Keamanan SPBE	4 OPD melaksanakan Audit Kemanan SPBE hanya dilakuakn sekali oleh menggunakan indeks KAMI bersama BPPT, audit keamanan bersama Kominfo dan pengecekan data dan pengelolaan adata	Audit dilaksanakan dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan SPBE	36 OPD belum melaksanakan Audit Keamanan SPBE. Terdapat OPD yang sudah melaksanakan Audit Keamanan SPBE namun kagiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur

9.5.2 Analisis Gap Manajemen SPBE

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 9.5**

Tabel 9.5 Analisis GAP Manajemen SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Manajemen Risiko	10 OPD melaksanakan Manajemen Risiko. Dari 10 OPD hanya 2 OPD yang memiliki standar atau framework manajemen risiko yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan untuk bentuk kegiatan dari 10 OPD hanya 5 OPD yang memiliki bentuk kegiatan manajemen risiko. Salah satu bentuk kegiatannya adalah evaluasi permasalahan, mendukung visi,	Pengimplementasian Manajemen Risiko pada Seluruh OPD di Kabupaten Situbondo dengan berpedoman pada Manajemen Risiko SPBE	30 OPD belum melaksanakan manajemen risiko. Bentuk kegiatan, framework atau pedoman pelaksanaan belum ada.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	misi bupati, membuat laporana manajemen risiko, penilaian risiko dan tidak membagikan password.		
Manajemen Keamanan	4 OPD melaksanakan Manajemen Keamanan tidak ada satupun OPD yang memiliki standar atau framework untuk manajemen keamanan informasi. Sedangkan OPD menyatakan bahwa bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah mengganti password secara berkala.	Pengimplementasian Manajemen Keamanan pada Seluruh OPD di Kabupaten Situbondo dengan berpedoman pada Manajemen Keamanan SPBE	36 OPD belum melaksanakan manajemen keamanan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Data	5 OPD melaksanakan manajemen data 1 OPD Dinas Perpustakaan dan Perikanan menyatakan bahhwa framework atau standar yang digunakan adalah modul E-katalog, e-book. Sedangkan untuk bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 OPD adalah pengelolaan data perbidang, manajemen data sesuai standar atau framework, pengelolaan menggunakan excel, dan downliad data secara berkala.	Pengimplementasian Manajemen data pada seluruh OPD, pengimplementasian mengacu pada pedoman manajemen keamanan data, data induk, arsitektur data, data referensi, basis data dan kualitas data.	35 OPD belum melaksanakan manajemen data bentuk kegiatan, framework pelaksanaan ada namun belum sesuai pedoman atau peraturan yang ada.
Manajemen Aset TIK	9 OPD melaksanakan	Pengimplementasian manajemen Aset TIK pada	31 OPD belum melaksanakan

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	manajemen Aset TIK 1 OPD Badan Kesatuan Bngsa dan Plitik menyatakan bahwa framework atau standar yang digunakan adalah menyesuaikan bidang aset dari BKAD, sedangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah inventaris pelaporan, pembatasan akses pemakaian aset TIK, pelabelan Aset TIK, Pengelolaan Aset.	seluruh OPD di Kabupaten Situbondo. Manajemen Aset TIK meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunkana dalam SPBE.	manajemen Aset TIK. Bantuk kegiatan dapat dikategorikan menerapkan manajemen Aset TIK namun bentuk belum memiliki standar atau framework yang digunakan belum ada.
Manajemen Sumber Daya Manusia	3 OPD melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan belum memiliki framework atau standart kegiatan pelaksanaan manajemn SDM, sedangakn bentuk kegaitan yang dilaksanakan adalah pembagian tugas sesuai admin aplikasi pada dinas kesehatan, mengupdate data setiap triwulan.	Pengimplementasian Manajemen Sumber Daya Manusia kepada seluruh OPD di Kabupaten Situbondo. Sumber Daya Manusia TIK sendiri setidak harus sesuai kompetensi pada proses bisnis pemerintah, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.	37 OPD belum melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Pengetahuan	2 OPD melaksanakan manajemen pengetahuan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki standar atau framework dalam menerapkan manajemen pengetahuan dan bentuk kegiatan	Pengimplementasian manajemen pengetahuan kepada seluruh OPD di Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan Manajemen pengetahuan mengacu pada Manajemen pengetahuan SPBE.	38 OPD belum melaksanakan manajemen pengetahuan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan sub bidang seksi mutu.		
Manajemen Perubahan	4 OPD melaksanakan manajemen perubahan menyatakan bahwa belum memiliki standar atau framework dalam menerapkan manajemen perubahan. Sedangakn bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah menunjuk ASN sebagai agen perubahan, pelayanan kkesehatan sub bidang seksi mutu.	Pengimplementasian manajemen perubahan kepada seluruh OPD di Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan manajemen Perubahan mengacu pada pedoman manajemen perubahan SPBE.	36 OPD belum melaksanakan manajemen perubahan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Layanan	2 OPD melaksanakan manajemen layanan menyatkan bahwa dalam penerapan manajemen layana belum memiliki standar atau framework yang digunakan, namun bentuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan SIKDA dan KIOSK.	Pengimplementasian manajemen layanan kepada seluruh OPD di Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan manajemen layanan mengacu pada pedoman manajemen layanan SPBE.	38 OPD belum melaksanakan manajemen layanan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada

9.5.3 Analisis Gap Rencana Anggaran SPBE

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 9.6.**

Tabel 9.6 Analisis GAP Rencana dan Anggaran SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Ketersediaan Tim	Sudah Terdapat kebijakan	Terdapat kebijakan	Sudah terdapat SK

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Anggaran SPBE	Pemerintah Daerah mengenai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/34/P/004.22022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo**. Dimana **Dinas Komunikasi dan Informatika belum terlibat dalam pembuatan TAPD** hanya berupa konsultasi mengenai anggaran yang berkaitan dengan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.	tim anggaran SPBE.	Bupati yang mengatur tugas, struktur Tim anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Anggaran untuk pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan *software* komersial.	13 OPD melaksanakan anggaran dana untuk pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi software komersial	Seluruh OPD memiliki anggaran untuk pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial	Terdapat 27 OPD yang belum memiliki anggaran terkait dengan anggaran pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.
Anggaran untuk pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.	29 OPD melaksanakan anggaran dana untuk pembelian/ pengadaan/ perangkat keras TIK	Seluruh OPD memiliki anggaran untuk pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.	Terdapat 11 OPD yang belum memiliki anggaran terkait dengan anggaran pembelian/ pengadaan perangkat keras TIK.
Anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial.	31 OPD melaksanakan anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi aplikasi software komersial	Seluruh OPD memiliki anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras teknologi, informasi dan komunikasi.	Terdapat 9 OPD yang belum memiliki anggaran terkait dengan pemeliharaan peranglat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi dan *software* komersial.

BAB 10
KONDISI EKSISTING PENYELENGGARA SPBE DAN SDM TIK DAN ANALISIS GAP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi eksisting dari penyelenggara SPBE dan sumber daya manusia TIK pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya akan dilakukan Analisa kesenjangan (GAP) antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang hendak dicapai.

10.1 Pengertian Penyelenggara SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Penyelenggara SPBE adalah tim koordinasi yang perlu dibentuk guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah. Penyelenggara SPBE perlu ditetapkan dalam kesatuan tim yang disebut sebagai Tim Koordinasi SPBE. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

10.2 Referensi Penyelenggara SPBE dan SDM TIK

Referensi yang digunakan untuk penyelenggara SPBE dan SDM TIK mengacu pada Peta Okupasi yang diambil dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada area fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peta Okupasi merupakan dokumen pemetaan pengembangan sumber daya manusia yang disusun oleh para pemangku kepentingan sebagai referensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Pihak pemangku kepentingan dimaksud adalah asosiasi industri, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya di samping sejumlah profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Konten dari dokumen peta okupasi diperoleh melalui kajian secara menyeluruh dan komprehensif dengan melihat berbagai tren kebutuhan sumber daya manusia yang mengacu pada kebutuhan nasional, regional, dan internasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pada Peta Okupasi, terdiri dari **16 (enam belas)** fungsi kunci bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Situbondo, terdapat **9 unit kompetensi** yang dimiliki oleh SDM TIK Kabupaten Situbondo. Setelah dipetakan sesuai dengan fungsi kunci dari Peta Okupasi, bisa disimpulkan Kabupaten Situbondo memenuhi **8 fungsi kunci**. Penjabaran pemetaan kompetensi dijabarkan pada **Tabel 10.1**.

Tabel 10.1 Pemetaan Kompetensi SDM TIK dan Peta Okupasi

No	Kompetensi sesuai Okupasi	Kompetensi yang dimiliki OPD

No	Kompetensi sesuai Okupasi	Kompetensi yang dimiliki OPD
1.	Data Management System	Admin *Database*
2.	Programming and Software Development	Programmer
3.	Hardware and Digital Peripherals	Teknisi Komputer
4.	*Network* and Infrastructure	Admin Jaringan
5.	Operation and System Tools	Operator/User Sistem Admin Website
6.	Information System and Technology Development	Analis & Desain Sistem
7.	IT Governance and Management	-
8.	IT Project Management	-
9.	IT Enterprise Architecture	-
10.	IT Security and Compliance	Admin Keamanan TI
11.	IT Services Management System	Service Desk/Help Desk
12.	IT and Computing Facilities Management	-
13.	IT Multimedia	-
14.	IT Mobility and Internet of Things	-
15.	Integration Application System	-
16.	IT Consultancy and Advisory	-

Dari hasil pemetaan pada **Tabel 10.1** terkait kompetensi SDM dengan kompetensi sesuai dengan peta okupasi, menunjukkan hasil bahwa terdapat **8 (delapan) kompetensi yang belum dimiliki oleh OPD** yaitu *IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System,* dan *IT Consultancy and Advisory.*

10.3 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE

Bagian ini akan menjelaskan terkait kondisi eksisting dari penyelenggaraan SPBE di 40 OPD Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

10.3.1 Ketersediaan Tim Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional. Mengacu pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa Tim Koordinasi dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK.** Dimana Tim Koordinasi terdiri dari perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait kelembagaan perangkat daerah, pengelolaan data dan informasi, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, hukum, perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, keuangan, pengadaan barang

dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik daerah, sumber daya manusia, kearsipan, pengawasan dan pelayanan publik. Maka Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan Surat Keputusan yang tertuang dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Tugas Dari Tim Koordinator sebagai berikut yakni:

1. Mengarahkan, Memantau, dan Mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik;
2. Penerapan kebijakan dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Bererbasis Elektronik;
3. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
4. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan TIM Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Mencari, mengumpulkan, megelola dan menyusun bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;
6. Menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
7. Memberikan pendapat dan masukkan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Penjabaran detail jabatan Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 10.2.**

Tabel 10.2 Daftar Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Pengarah	Bupati Situbondo
2	Penanggung Jawab	Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo
4	Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Badan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo
		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo
		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan nasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
		Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komtinikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Infrastmktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Keamanan Informasi Daerah pada Dinas Komonikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
		2 (dua) Orang Staf pada Dinas Komonikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		1 (satu) Orang Tenaga Khusus TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		4 (empat) Orang Tenaga Teknis TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

10.3.2 Ketersediaan Tim Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Mengacu pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa Tim Evaluator dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK.** Dimana Tim Koordinasi terdiri dari perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait kelembagaan perangkat daerah, pengelolaan data dan informasi, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, hukum, perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja,

keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik daerah, sumber daya manusia, kearsipan, pengawasan dan pelayanan publik. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan Surat Keputusan yang tertuang dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022**. Tugas Dari Tim Koordinator sebagai berikut yakni:

1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
2. Mempersiapkan instrumen yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
4. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancra, dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Situbondo;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Situbondo.

Penjabaran detail jabatan Tim Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 10.3.**

Tabel 10.3 Daftar Tim Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Penanggung Jawab	Bupati Situbondo
2	Ketua	Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo
3	Sekertaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
4	Anggota	Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Teknologi Infomasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Situbondo
		Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Pengembangan aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Kemanan Informasi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
		Kepala Seksi Persandian pada Dinas Kabupaten Situbondo

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		1 (satu) orang Unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situdondo
		1 (satu) orang Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
		1 (satu) orang Unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
		1 (satu) orang Unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengebangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Situbondo
		1 (satu) orang Unsur dari Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Situbondo
		1 (satu) orang Unsur dari Bagian Hukum Sekertariat Daerah kabupaten Situbondo
		1 (satu) orang Unsur dari Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekertariat Daerah kabupaten Situbondo
		1 (satu) orang Unsur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah kabupaten Situbondo

10.3.3 Komitmen Pimpinan Daerah

Pada bagian ini akan dibahas mengenai seberapa besar dukungan, komitmen serta keterlibatan pimpinan daerah Kabupaten Situbondo terhadap pelaksanaan SPBE. Pimpinan Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepala Daerah yaitu Bupati, Kepala Dinas serta Sekretaris Dinas. Selain hubungan dengan Pimpinan Daerah, pada sub bab ini akan dibahas mengenai hubungan OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

10.3.3.1 Dukungan Kepala Daerah

Penilaian terhadap dukungan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo terhadap perkembangan SPBE dapat dilihat pada Gambar 10.1 Presentase dukungan kepala daerah. Penilaian ini didapatkan dari aktivitas survei yang sebelumnya telah dilakukan di seluruh OPD Kabupaten Situbondo. Nilai dukungan Kepala Daerah terbagi menjadi 3 tingkatan yakni rendah, sedang dan tinggi.

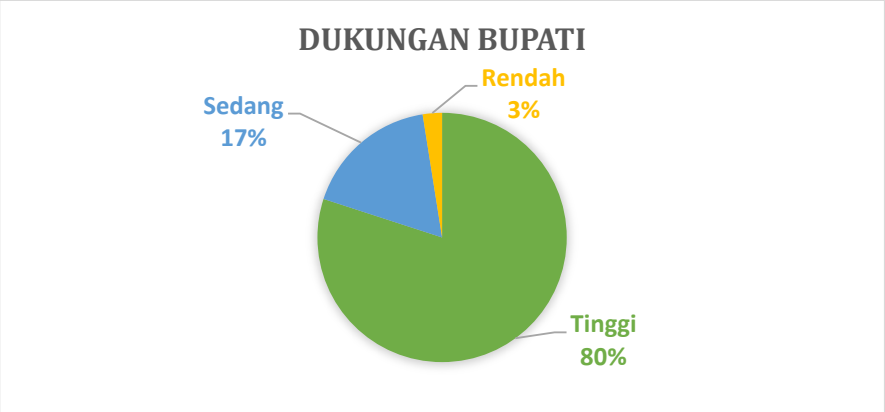

Gambar 10.1 Dukungan Bupati

Dari **Gambar 10.1** dapat diketahui bahwa sebanyak **80 % atau 32 OPD menyatakan bahwa dukungan** Kepala Daerah atau Bupati dalam pelaksanaan SPBE **dinilai tinggi.** Namun sebanyak 17% atau 7 OPD menyatakan bahwa komitmen kepala daerah Kabupaten Situbondo sedang dari 40 OPD hal tersebut. Terakhir 3% OPD atau sebanyak 1 OPD menyatakan bahwa dukungan yang diberikan Bupati terhadap OPD rendah. Dukungan Kepala Daerah atau Bupati Tinggi pernyataan ini dibuktikan dengan ditetapkanya **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo**, selain itu kepala daerah Kabupaten Situbondo sangat mendukung adanya **inovasi terkait SPBE**. Pernyataan tersebut dikutip langsung berdasaran survei yang dilakukan terhadap 40 OPD di Kabupaten situbondo. Selain itu pernyataan dukungan rendah karena dukungan yang diberikan oleh Bupati sendiri hanya berupa pemberian perintah sesuai intruksi dari kementrian dan program yang sedang dijalankan.

10.3.3.2 Dukungan Kepala Dinas

Besar dukungan Kepala Dinas Kabupaten Situbondo terhadap SPBE dapat dilihat pada Gambar 10.2. Hasil ini didapatkan dari survei terhadap 40 OPD di Kabupaten Situbondo. Besar dukungan Kepala Dinas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni mulai dari rendah, sedang dan tinggi.

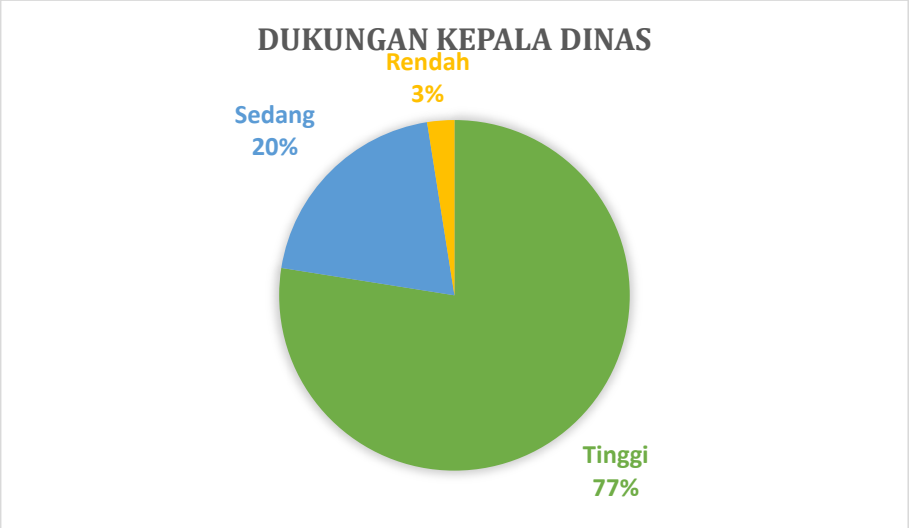

Gambar 10.2 Dukungan Kepala Dinas

Dari **Gambar 10.2** dapat diketahui bahwa sebanyak **77 % atau 31 OPD menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas Tinggi.** Sedangkan **20%** atau sebanyak **8 OPD** menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh kepala daerah sedang. Terakhir sebesar **3%** atau sebanyak **1 OPD** menyatakan bahwa dukungan yang diberikan Kepala Dinas rendah. OPD yang menyatakan bahwa dukungan kepala dinas tinggi Kepala Dinas memberikan arahan, dukungan, sosialsiasi, penganggaran untuk mendukung inovasi-inovasi terbaru mengenai SPBE, Beberapa Kepala Dinas juga dinyatakan ikut serta dalam tim implementasi SPBE. Sedangkan untuk OPD yang menyatakan bahwa Kepala Dinas rendah menyatakan Kepala Dinas hanya melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dan tugas perintah dari Kepala Daerah atau Bupati.

10.3.3.3 Dukungan Sekretaris Dinas

Besar dukungan Sekretaris Dinas Kabupaten Situbondo terhadap SPBE dapat dilihat pada Gambar 10.3. Hasil ini didapatkan dari survei terhadap 40 OPD di Kabupaten Situbondo. Besar dukungan Sekretaris Dinas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni mulai dari rendah, sedang dan tinggi.

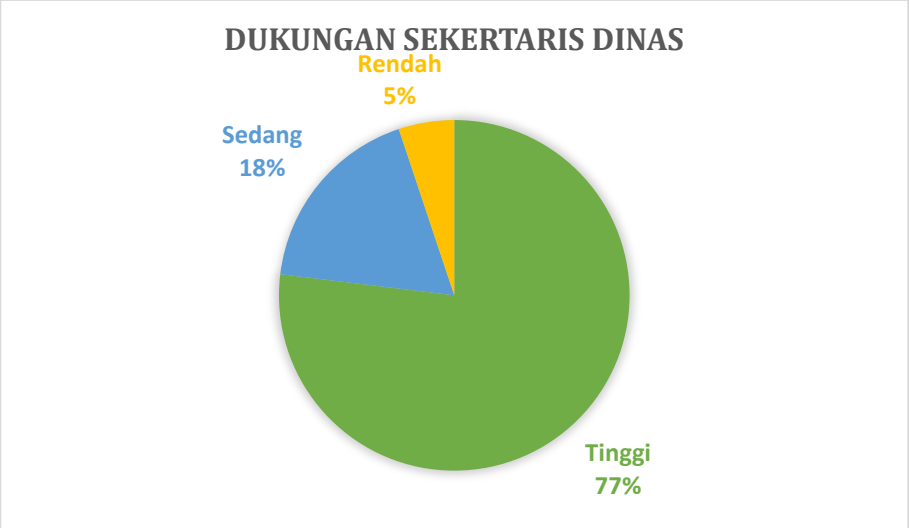

Gambar 10.3 Dukungan Sekertaris Dinas

Dari Gambar 10.3 dapat diketahui bahwa **sebanyak 77 % atau 30 OPD menyatakan bahwa dukungan Sekertaris Dinas tinggi.** Sedangkan **20% atau sebanyak 7 OPD menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Sekertaris Dinas sedang**. Terakhir **sebesar 3% atau sebanyak 2 OPD menyatakan bahwa dukungan yang diberikan Sekertaris Dinas rendah**. Sedangkan **1 OPD tidak menyatakan seberapa besar dukungan sekertaris dinas** yakni OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. OPD yang menyatakan Sekertaris Dinas memberikan dukungan tinggi ini dibuktikan dengan pendampingan, dukungan, izin membuat surat menyurat mudah. Selain itu Sekertaris daerah memberikan dukungan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat proses kerja dan pelaksanaan SPBE. OPD yang menyatakan dukungan Sekertaris Daerah rendah dinyatakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyatakan dukungan yang diberikan sekertaris daerah berupa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran. Sedangkan untuk OPD Kecamatan Situbondo mengatan tidak memiliki Sekertaris Dinas.

10.3.3.3 Hubungan OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil survei, mayoritas OPD di Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa hubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika lancar, baik, dan harmonis, hal ini dapat dilihat dari **penyelenggaraan bimbingan teknis mengenai SPBE dan pendampingan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika** selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan respon

yang cepat apabila terdapat OPD yang membutuhkan koordinasi dalam penyediaan pengembangan aplikasi, jaringan internet, dan pengelolaan server di Kabupaten Situbondo.

10.4 Kondisi Eksisting SDM TIK

Pada bagian ini akan menjelaskan terkait kondisi eksisting dari SDM TIK di 40 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi Eksisting SDM TIK ini mencakup Ketersediaan SDM TIK, Pendidikan Terakhir SDM TIK, Kompetensi SDM TIK yang dimiliki, Status Kepegawaian SDM TIK, Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK.

10.4.1 Ketersediaan SDM TIK

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat survei, dapat diketahui ada atau tidaknya SDM TIK di setiap OPD Kabupaten Situbondo. Ketersediaan SDM TIK pada 40 OPD di Kabupaten Situbondo ditunjukkan pada diagram di **Gambar 10.4**. berikut.

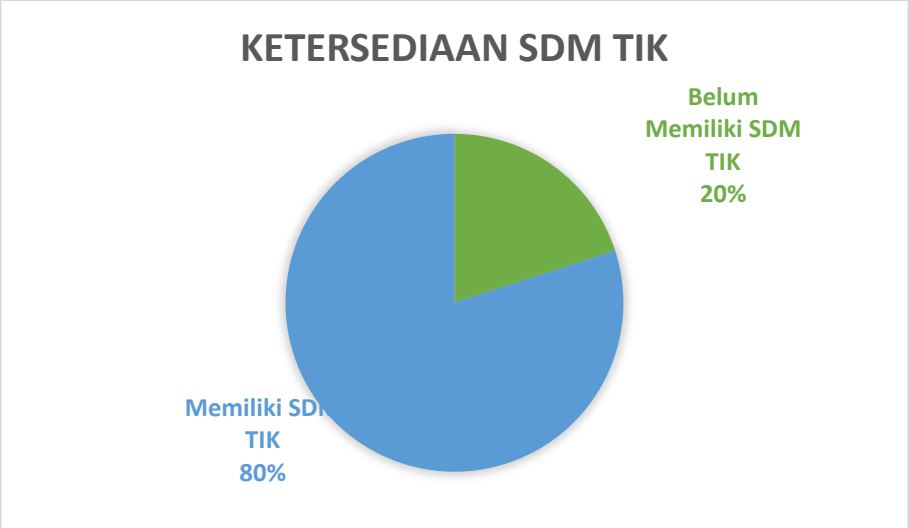

Gambar 10.4 Ketersediaan SDM TIK

Dari **gambar 10.4** dapat disumpulkan bahwa dari 40 OPD yang ada di Kabupaten Situbondo **80%** atau sebanyak **32 OPD telah memiliki SDM TIK**. Sedangkan **20%** atau sebanyak **8 OPD belum memiliki SDM TIK** didalam kepengurusan organisasi. Setidaknya terdapat **223 SDM TIK** di Kabupaten Situbondo dari **32 OPD**.

10.4.2 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 39 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya adalah tingkat SMA, D1, D2, D3, D4, S1 dan S2. Ilustrasi pendidikan terakhir SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 10.5.**

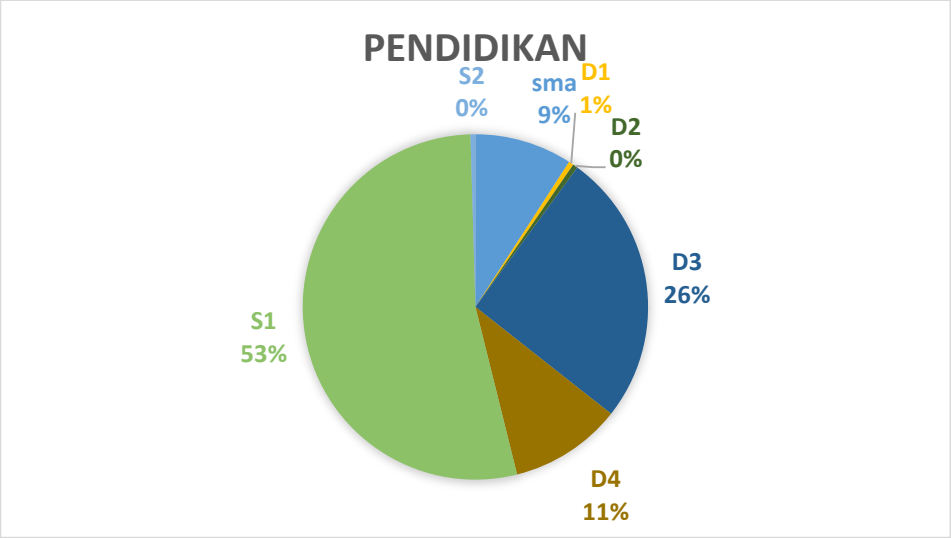

Gambar 10.5 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Berdasarkan **gambar 10.5** pendidikan Terakhir SDM TIK dari 40 OPD terdapat sebanyak 1% pada masing masing pendidikan terakhir yaitu **D1, D2, dan S2 sebanyak masing-masing 1 orang SDM TIK**. **SMA sebesar 9% atau sebanyak 20 orang SDM TIK** kemudian **D4 sebesar 11% atau sebanyak 23 orang SDM TIK**, selanjutnya pendidikan SDM TIK tertinggi kedua adalah **D3 sebesar 26% atau sebanyak 56 orang SDM TIK, pendidikan terakhir SDM TIK terbesar 53% atau sebanyak 117 orang.** Sebanyak **4 SDM TIK tidak menyebutkan pendidikan terakhir** mereka. 4 SDM TIK yang tidak menyebutkan pendidikan terakhir 3 staff dari Badan Pendapatan Daerah dimana 1 staff memiliki lebih dari satu kompetensi pekerjaan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk kompetensi Teknisi Komputer tidak disebutkan lengkap mengenai pendidikan terakhir.

10.4.3 Kompetensi SDM TIK yang dimiliki

Kompetensi SDM TIK yang dimiliki oleh 39 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui Gambar 10.5. Pada beberapa OPD di Kabupaten Situbondo terdapat satu orang yang memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi SDM TIK sendiri dikelompokkan menjadi 9 kelompok yaitu teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan, *service/help desk*, *programmer*, *operator/user sistem*, analisis sistem dan desain, admin *website*, admin *Database* serta admin keamanan TI.

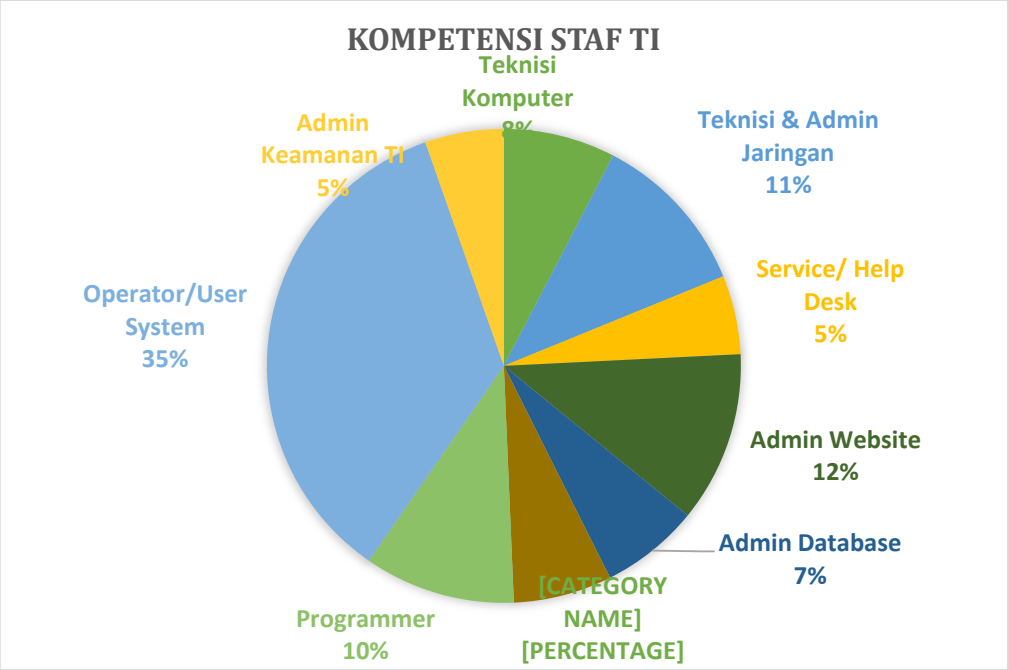

Gambar 10.6 Kompetensi Staff TIK

Pada **Gambar 10.6** dapat diketahui bahwa kompetensi yang memiliki SDM TIK terendah adalah **admin keamanan TI dan service/help desk dengan nilai sebesar 5% atau 12 orang SDM TIK**. Sedangkan untuk **admin *Database* dan analisa sistem dan design sebesar 7% atau sebanyak 15 orang SDM TIK**. **Teknisi Komputer sebesar 8% atau sebanyak 17 orang**. Kompetensi staff TIK **programmer sebanyak 10% atau sebanyak 23 orang. Teknisi dan Admin jaringan** jumlah SDM TIK sebesar **11% atau sebanyak 25 orang**. Kompetensi tertinggi ada pada **admin website yaitu sebesar 12% atau sebanyak 26 orang**. Sedangkan kompetensi yang paling banyak dimiliki oleh SDM TIK pada OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah **Operator/User System** yakni sebesar **35%** atau sebanyak **78 SDM**.

10.4.4 Status Kepegawaian SDM TIK

Setiap pegawai TIK di 39 OPD di Kabupaten Situbondo memiliki status kepegawaian yang dapat dibagi menjadi 2 status, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Ilustrasi pendidikan terakhir SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 10.7.**

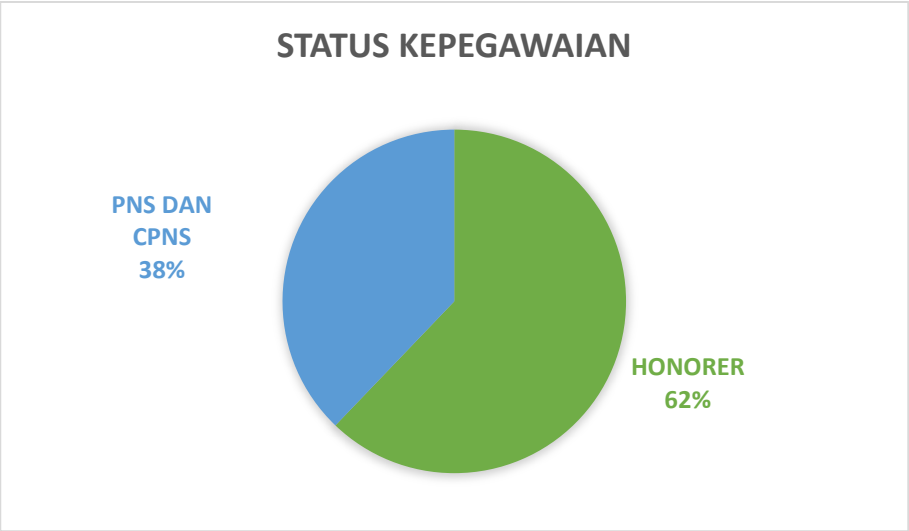

Gambar 10.7 Status Kepegawaian

Berdasarkan **gambar 10.7** dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak **138 (60%)** pegawai SDM TIK di Kabupaten Situbondo merupakan pegawai dengan status **Honorer**. Sedangakan untuk Status **PNS dan CPNS** terdapat sebanyak **84 (36%)** pegawai SDM TIK dan **1 SDM TIK tidak menuliskan status kepegawaian**, Hal ini dikarenakan pada bidang kompetensi teknisi komputer OPD Badan Keuangan Dan Aset Daerah di laksanakan oleh beberapa SDM yang memiliki baground TI dan bisa memperbaiki komputer sehingga tidak dituliskan keterangan lebih lanjut mengenai status kepegawaian. Dari data tersebut dapat Disimpulkan bahwa nerdasarkan hasil survei pegawai SDM TIK di Kabupaten Situbondo saat ini didominasi pegawai dengan status **Honorer.**

10.4.5 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Penunjukan SDM TIK dapat dilakukan melalui SK sehingga SDM TIK dapat dikelompokkan berdasarkan ketersediaan tupoksi yaitu SDM yang ditunjuk melalui SK dan SDM yang ditunjuk secara adhoc tanpa adanya SK. Ketersediaan Tupoksi SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 10.8**.

Gambar 10.8 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Dari jumlah keseluruhan 223 SDM TIK yang ada di Kabupaten Situbondo baik SDM TIK secara struktur dan fungsi, **terdapat 163 (72%) orang yang memiliki tupoksi**. OPD yang memiliki SDM TIK dengan memiliki ketersediaan Tupoksi adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD dr. Abdoer Rahem, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Bungatan, Puskesmas Situbondo, dan Puskesmas Bungatan. Sedangkan SDM TIK yang **tidak memiliki Tupoksi** ada sekitar **54 (28%) orang**. Selain itu terdapat 1 Orang SDM TIK atau staff yang menaungi 3 kompetensi pekerjaan dari OPD Dinas Lingkungan Hidup yang tidak menuliskan kepemilikan tupoksi dan 1 Kompetensi teknisi komputer OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki tupoksi karena staff untuk kompetensi ini dilakukan oleh seluruh pegawai yang memiliki latar belakang TI.

10.4.6 Kompetensi Training dan Sertifikasi SDM TIK

Kompetensi SDM TIK pada 39 OPD di Kabupaten Situbondo dapat dilihat juga dari pengalaman keikutsertaan training di bidang TIK atau kepemilikan sertifikasi di bidang TIK. Ilustrasi kompetensi pelatihan dan kepemilikan sertifikasi SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 10.9.**

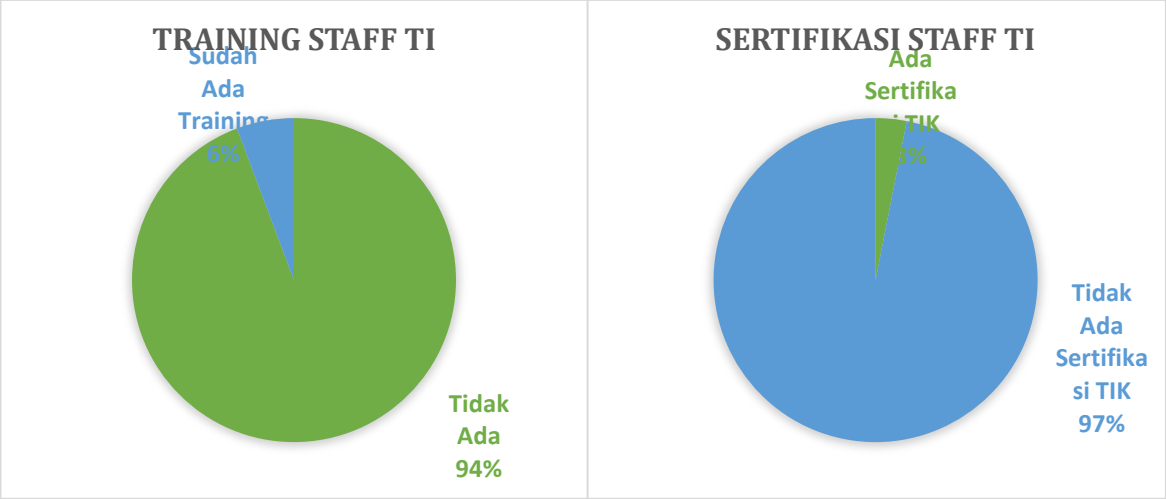

Gambar 10.9 Training dan Sertifikasi SDM TI

Dari hasil survei dari 223 SDM TIK di Kabupaten Situbondo, terdapat **13 (6%) SDM TIK memiliki pengalaman** mengikuti training di bidang TIK, sisanya yakni **94%** atau sebesar **210 SDM TIK belum memiliki** pengalaman training di bidang TIK. Dari 13 orang training yang diikuti antara lain adalah Bimtek dan Diklat Pengelolaan JDIH, *Training Cyber Scurity Esensia*l dari Cisco 2021, *Data Science Fundamental* Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Pelatihan dasar *microtic* manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Situbondo 2020, pelatihan *data science* untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, pelatihan *basic coding* dari UNEJ 2022, dan Pelatihan inixindo *hardware* dan jaringan.

Berdasarkan ilustrasi pada **gambar 10.9** dari 223 SDM TIK di Kabupaten Situbondo terdapat **7 atau sekitar 3% pegawai yang telah bersertifikasi di bidang TIK,** sedangkan sisanya **97% atau sebanyak 216 SDM TIK** menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengalaman sertifikasi berkaitan dengan TIK. Staff yang bersertifikasi diantaranya berkompetensi sebagai Admin *Database*, Admin Website, dan Programmer. Serifikasi yang didapat berupa Sertifikat Peserta Diklat dan Sertifikat untuk *training* Bimtek dan Diklat Programmer dan sertifikat pelatihan inixindo *hardware* dan jaringan.

10.5 Metadata SDM TIK

Berdasarkan sub bab Kompetensi SDM TIK, Kompetensi SDM TIK dikelompokkan menjadi 9 kelompok yang terdiri dari, teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan, service/help desk, programmer, operator/user sistem, analisis sistem dan desain, admin website, admin *Database* serta admin

keamanan TI. Dari 9 kompetensi SDM TIK dipetakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika. Pemetaan ini berguna untuk memenuhi berbagai kompetensi terkait dengan sumber daya manusia Indonesia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika memuat kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, level kompetensi, dan indikator perilaku. Kumpulan kompetensi diperlukan oleh ASN yang menjalankan tugas dan fungsi bidang kominfo. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika diperuntukkan bagi Kementerian Kominfo dan Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub bidang informasi dan komunikasi publik dan sub bidang aplikasi informatika.

Tabel 10.4 Metadata SDM TIK

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
Admin Keamanan TI	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengelolaan Pusat Data	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/15	Kemampuan merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat data beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
Operator/user system	-	-	-	-
Programmer	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengembangan Aplikasi Umum dan Khusus	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/20	Kemampuan mengembangkan aplikasi umum dan/atau khusus (meliputi perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, serta pembaruan) pada instansi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Analisis Sistem dan Desain	Permen Kominfo	Pengembangan Aplikasi Umum	K-STANKOM/KOMI	Kemampuan mengembangkan

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
	No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	dan Khusus	NFO/DJAPTIKA/2020/20	aplikasi umum dan/atau khusus (meliputi perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, serta pembaruan) pada instansi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Admin Website	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengendalian Konten Internet	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/05	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan model pengelolaan dan pengendalian konten internet yang mengintegrasikan aplikasi.
		Pengelolaan Web Portal Milik Pemerintah	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/KONKUREN/2020/02	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi layanan pengelolaan web portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Service/Help Desk	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Manajemen Pelayanan pengujian	K-STANKOM/KOMINFO/DJSDPPI/2020/25	Kemampuan untuk merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan layanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur
Teknisi dan Admin Jaringan	Permen Kominfo No 9 Tahun	Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintahan	-K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/23	-Kemampuan mengelola jaringan intra pemerintahan pada instansi sebagai

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
	2021 tentang Kamus Kompetensi TIK			penghubung dalam menjalankan layanan administrasi di internal pemerintahan,termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Topologi Jaringan Telekomunikasi	K-STANKOM/KOMINFO/DJPPI/2020/17	Kemampuan mengidentifikasi,mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep topologi jaringan telekomunikasi
		Pengelolaan Jaringan Internet	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/24	Kemampuan mengelola jaringan internet pada instansi sebagai penghubung antara pengguna, instansi, serta aplikasi dalam menjalankan layanan publik dan/atau administrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Teknisi Komputer	-	-	-	-
Admin *Database*	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengelolaan Pusat Data	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/15	Kemampuan merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat data beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
		Pengelolaan *Database*	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/17	Kemampuan merencanakan, menyimpan, merekayasa, menyajikan, dan mendistribusikan

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
				basis data.

10.6 Analisis Gap

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari Penyelenggara SPBE dan SDM TIK. Untuk penjelasan gap penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Tabel 10.4.

Tabel 10.5 Analisa Gap Penyelenggara SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Ketersediaan SDM TIK	32 OPD memiliki SDM TIK	Masing-masing OPD memiliki SDM TIK	Terdapat 8 OPD yang belum memiliki SDM TIK
Ketersediaan Tupoksi pada SDM TIK SPBE	135 SDM TIK memiliki tupoksi	Memiliki divisi atau TIM khusus untuk mengelola teknologi informasi dan komunikasi secara terstruktur organisadi dengan memiliki SK/Tupoksi untuk pegawai dengan kompetensi pekerjaan berkaitan dengan TIK.	Terdapat 63 OPD yang belum memiliki tupoksi SDM TIK, dan 3 tidak mengisi kepemilikian Tupoksi
Kompetensi SDM TIK sesuai peta okupasi	Memiliki 9 unit kompetensi yang berada pada 8 domain area.	Pemerintah daerah memiliki SDM TIK yang berkompetensi pada 16 fungsi kunci di Peta Okupasi.	*Terdapat 8 kompetensi yang belum dimiliki oleh OPD yaitu IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System, dan IT Consultancy and Advisory.*
Kompetensi SDM TIK SPBE	Kompetensi paling banyak adalah Operator/ User System sebanyak 78 SDM TIK	Memiliki Kompetensi SDM TIK yang mencakup atau memiliki kompetensi Kompetensi perencanaan SPBE Rekayasa proses bisnis pemerintah, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal Pengelolaan	Masih sedikit SDM TIK yang berkompetensi pada bidang seperti Service Help/Desk dan Admin Keamanan TI.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif.	
Pendidikan SDM TIK SPBE	Pendidikan terakhir rata rata 56 SDM memiliki Pendidikan D3 dan 43 SDM memiliki Pendidikan S1 dengan total 99 pegawai	SDM TIK memiliki keahlian terkait dengan kompetensi atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk adanya standar kompetensi teknis SPBE.	Terdapat beberapa SDM TIK memiliki pendidikan yang kurang sesuai dengan kompetensi pekerjaan
Training SDM TIK SPBE	13 SDM TIK berpengalaman mengikuti training SPBE	Terdapat peningkatan ilmu atau kompetensi baru dengan kegiatan Training TIK	210 SDM TIK di Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa belum memiliki dan melaksanakan training SDM TIK SPBE.
Sertifikasi SDM TIK SPBE	7 SDM TIK bersertifkasi dalam bidang TIK	Terdapat SDM TIK yang bersertifikasi terhadap kompetensi terkait	216 SDM TIK menyatakan bahwa mereka belum memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan TIK.

LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
STB 1.1.1	Pengelolaan administrasi pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan administrasi pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.01 Pengelolaan administrasi pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Bidang administrasi pemerintahan	1
STB 1.1.2	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan administrasi kewilayahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.02 Pengelolaan administrasi kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Bidang administrasi kewilayahan	1
STB 1.1.3	Penyelenggaraan kerja sama	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan kerja sama	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara	RAB.09.07.02.03 Penyelenggaraan kerja sama	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Bidang kerja sama	1
STB 1.1.4	Penyelenggaraan otonomi daerah	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan otonomi daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara	RAB.09.07.02.04 Penyelenggaraan otonomi daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Bidang otonomi daerah	1
STB 2.1.1	Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan	RAB.09.07.07.01 Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bidang kesejahteraan masyarakat	2
STB 2.1.2	Pengelolaan Kesejahteraan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.07 kesekretariatan	RAB.09.07.07 pengembangan	RAB.09.07.07.02 Pengelolaan	Bagian Kesejahteraan	Bidang kesejahteraan	2

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	Sosial	Daerah dengan Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	Umum	negara	nilai-nilai kebangsaan	Kesejahteraan Sosial	Rakyat	sosial	
STB 2.1.3	Pengelolaan Keagamaan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Keagamaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.01 agama	RAB.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan	RAB.09.07.07.03 Pengelolaan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bidang keagamaan	2
STB 3.1.1	Penyelenggaraan Fasilitasi Perundang-undangan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan Fasilitasi Perundang-undangan	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.01 Penyelenggaraan Fasilitasi Perundang-undangan	Bagian Hukum	bidang perundang-undangan	3
STB 3.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.02 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	bidang bantuan hukum	3
STB 3.1.3	Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.03 Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum	bidang dokumentasi dan informasi	3
STB 4.1.1	Pengelolaan Perekonomian	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Perekonomian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.07 manajemen perekonomian	RAB.09.02.07.01 Pengelolaan Perekonomian	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bidang perekonomian	4
STB 4.1.2	Pengelolaan Badan Usaha Milih Daerah	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.02 pengelolaan badan usaha	RAB.02.07.02.02 Pengelolaan Badan Usaha Milih	Bagian Perekonomian, Pembangunan	Bidang pembinaan BUMD dan	4

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	(BUMD)	Pengelolaan BUMD			milik negara	Daerah (BUMD)	dan Sumber Daya Alam	BLUD	
STB 4.1.3	Pengelolaan (Badan Layanan Umum Daerah) BLUD	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan BLUD	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik negara	RAB.02.07.02.03 Pengelolaan (Badan Layanan Umum Daerah) BLUD	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bidang pembinaan BUMD dan BLUD	4
STB 4.1.4	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah denganPenyelenggaraan Administrasi Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.06 strategi pembangunan nasional	RAB.09.05.06.04 Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bidang Pembangunan	4
STB 4.1.5	Pelaksanaan Fasilitasi Sumber Daya Alam	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Fasilitasi Sumber Daya Alam	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	RAB.07.05.01.05 Pelaksanaan Fasilitasi Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bidang sumber daya alam	4
STB 5.1.1	Pengelolaan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.01 Pengelolaan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa	5
STB 5.1.2	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.02 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	bidang Pengelolaan layanan secara elektronik	5
STB 5.1.3	Pengelolaan advokasi pengadaan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.03 Pengelolaan advokasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	bidang advokasi pengadaan barang dan jasa	5

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	barang dan jasa	Pengelolaan advokasi pengadaan barang dan jasa				pengadaan barang dan jasa			
STB 6.1.1.1	Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.01 Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Bagian Umum	bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian	6
STB 6.1.1.2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perlengkapan Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan Fasilitasi Perlengkapan Sekretariat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Penyelenggaraan Fasilitasi Perlengkapan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	bidang perlengkapan	6
STB 6.1.1.3	Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan	RAB.09.07.01.03 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga	Bagian Umum	bidang rumah tangga	6
STB 7.1.1	Pelaksanaan Kelembagaan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Kelembagaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.01 Pelaksanaan Kelembagaan	Bagian Organisasi	bidang kelembagaan dan analisi jabatan	7
STB 7.1.2	Pelaksanaan Analisis Jabatan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Analisis Jabatan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Pelaksanaan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	bidang kelembagaan dan analisi jabatan	7
STB 7.1.3	Penyelenggaraan Pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen	RAB.09.06.06.03 Penyelenggaraan	Bagian Organisasi	bidang pelayanan	7

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	Publik	Daerah dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Umum		pelayanan publik	Pelayanan Publik		publik dan tata laksana	
STB 7.1.4	Penyelenggaraan Tatalaksana	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan dan Tatalaksana	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.04 Penyelenggaraan Tatalaksana	Bagian Organisasi	bidang pelayanan publik dan tata laksana	7
STB 7.1.5	Pengelolaan Peningkatan Kinerja	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Peningkatan Kinerja	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.05 Pengelolaan Peningkatan Kinerja	Bagian Organisasi	bidang kinerja dan reformasi birokrasi	7
STB 7.1.6	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.06 Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	bidang kinerja dan reformasi birokrasi	7
STB 8.1.1	Pengelolaan Komunikasi Pimpinan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik	RAB.09.04.02.01 Pengelolaan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	bidang komunikasi pimpinan	8
STB 8.1.2	Pelaksanaan Dokumentasi Pimpinan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaan Dokumentasi Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.01 pemerintahan dalam negeri	RAB.09.01.01.02 Pelaksanaan Dokumentasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	bidang dokumentasi	8
STB 9.1.1	Penyelenggaraan Perencanaan Program Kerja	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Penyelenggaraan Perencanaan Program	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.01 Penyelenggaraan Perencanaan Program Kerja	Bagian Perencanaan dan Keuangan	bidang perencanaan	9

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Kerja							
STB 9.1.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.02 Pengelolaan Administrasi Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	bidang keuangan	9
STB 9.1.3	Pelaksanaa Pelaporan Program Kerja	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dengan Pelaksanaa Pelaporan Program Kerja	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.03 Pelaksanaa Pelaporan Program Kerja	Bagian Perencanaan dan Keuangan	bidang pelaporan	9
STB 10.1.1	Pengelolaan Persidangan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD dengan Pengelolaan Persidangan	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 perundang-undangan	RAB.05.01.01.01 Pengelolaan Persidangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	bidang persidangan dan perundang undangan	10
STB 10.1.2	Pelaksanaan Penyusunan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD dengan Pelaksanaan Penyusunan Perundang-undangan	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 bantuan hukum	RAB.05.01.01.02 Pelaksanaan Penyusunan Perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	bidang persidangan dan perundang undangan	10
STB 10.1.3	Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD dengan Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.05 penganggaran	RAB.09.02.05.03 Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	bidang alat kelengkapan dewan	10
STB 10.1.4	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD dengan Penyelenggaraan Pengawasan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan	RAB.09.07.05.04 Penyelenggaraan Pengawasan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	bidang penganggaran dan pengawasan serta alat kelengkapan dewan	10

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
STB 11.1.1	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah dengan Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu I	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan	RAB.09.07.05 .01 Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu I	Inspektorat	bidang Inspektur Pembantu I	11
STB 11.1.2	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu II	Penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah dengan Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu III	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan	RAB.09.07.05.02 Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu II	Inspektorat	bidang Inspektur Pembantu II	11
STB 11.1.3	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu III	Penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah dengan Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu III	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan	RAB.09.07.05.03 Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu III	Inspektorat	bidang Inspektur Pembantu III	11
STB 11.1.4	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu IV	Penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah dengan Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu IV	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan	RAB.09.07.05 .04 Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu IV	Inspektorat	bidang Inspektur Pembantu IV	11
STB 11.1.5	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah dengan Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan	RAB.09.07.05.05 Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	bidang Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi	11
STB 12.1.1	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian terkait dengan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN	12
STB	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	RAB.09	RAB.09.06	RAB.09.06.02	RAB.09.06.02.02	Badan	Bidang Kinerja,	12

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
12.1.2	Kesejahteraan ASN	Urusan Kepegawaian terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN	Pemerintahan Umum	aparatur negara	manajemen aparatur sipil negara	Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN	Kepegawaian dan Pengembangan	Kesejahteraan dan Data ASN	
STB 12.1.3	Pengelolaan Data ASN	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian terkait dengan Pengelolaan Data ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Pengelolaan Data ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN	12
STB 12.1.4	Pengelolaan Kepangkatan	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian terkait dengan Pengelolaan Kepangkatan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.04 Pengelolaan Kepangkatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Bidang Mutasi Dan Kepangkatan	12
STB 12.1.5	Penyelenggaraan Mutasi Aparatur	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian terkait dengan Penyelenggaraan Mutasi Aparatur	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.05 Penyelenggaraan Mutasi Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Bidang Mutasi Dan Kepangkatan	12
STB 12.2.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian terkait dengan Pengembangan Kompetensi Aparatur	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.06 Pengembangan Kompetensi Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	12
STB 13.1.1	Pengelolaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Pengelolaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan	RAB.09.07.07.01 Pengelolaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	13
STB 13.1.2	Penyelenggaraan Karakter Bangsa	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.07 pengembangan nilai-nilai	RAB.09.07.07.02 Penyelenggaraan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan	13

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		terkait dengan Penyelenggaraan Karakter Bangsa			kebangsaan			Karakter Bangsa	
STB 13.1.3	Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri	13
STB 13.1.4	Pengelolaan Ketahanan Ekonomi	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Pengelolaan Ketahanan Ekonomi	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.01 pertahanan negara	RAB.01.01.01.04 Pengelolaan Ketahanan Ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	13
STB 13.1.5	Pengelolaan Ketahanan Sosial Budaya	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Pengelolaan Ketahanan Sosial Budaya	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.01 pertahanan negara	RAB.01.01.01.05 Pengelolaan Ketahanan Sosial Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	13
STB 13.1.6	Pengelolaan Ketahanan Agama	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Pengelolaan Ketahanan Agama	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.01 pertahanan negara	RAB.01.01.01.06 Pengelolaan Ketahanan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	13
STB 13.1.7	Pengelolaan Ketahanan Organisasi	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.01 Pertahanan dan Luar	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.01 pertahanan negara	RAB.01.01.01.07 Pengelolaan Ketahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	13

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	Kemasyarakatan	terkait dengan Pengelolaan Ketahan Organisasi Kemasyarakatan	Negeri			Organisasi Kemasyarakatan		Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	
STB 13.1.8	Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.08 Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	13
STB 13.1.9	Pelaksanaan Penanganan Konflik	Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Pelaksanaan Penanganan Konflik	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.09 Pelaksanaan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	13
STB 14.1.1	Pengelolaan Perbendaharaan	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Perbendaharaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.06 perbendaharaan	RAB.09.02.06.01 Pengelolaan Perbendaharaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan	14
STB 14.1.2	Pengelolaan Akutansi	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Akutansi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.06 perbendaharaan	RAB.09.02.06.02 Pengelolaan Akutansi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Akuntansi	14
STB 14.1.3	Pengelolaan Anggaran	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Anggaran	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.05 penganggaran	RAB.09.02.05.03 Pengelolaan Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Anggaran	14
STB 14.1.4	Pengelolaan Aset Daerah	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Aset	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.04 Pengelolaan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah	14

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Daerah							
STB 15.1.1	Pengelolaan Perencanaan PBB-P2 dan BPHTB	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Perencanaan PBB-P2 dan BPHTB	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.09 pengelolaan pajak	RAB.09.02.09.01 Pengelolaan Perencanaan PBB-P2 dan BPHTB	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	15
STB 15.1.2	Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.09 pengelolaan pajak	RAB.09.02.09.02 Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	15
STB 15.1.3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.09 pengelolaan pajak	RAB.09.02.09.03 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	15
STB 15.1.4	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Keuangan terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.09 pengelolaan pajak	RAB.09.02.09.04 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	15
STB 16.1.1	Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerahh	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01.01 Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
STB 16.1.2	Pengelolaan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pengelolaan Pengendalian Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01.02 Pengelolaan Pengendalian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16
STB 16.1.3	Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01.03 Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16
STB 16.1.4	Pelaksanaan Pembangunan Manusia	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Manusia	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.04 pembangunan manusia	RAB.04.02.04.04 Pelaksanaan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16
STB 16.1.5	Pengelolaan Perekonomian	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pengelolaan Perekonomian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.07 manajemen perekonomian	RAB.09.02.07.05 Pengelolaan Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	16
STB 16.1.6	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	RAB.07.05.01.06 Pengelolaan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	16
STB 16.1.7	Penyelenggaraan Kewilayahan	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Penyelenggaraan Kewilayahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01.07 Penyelenggaraan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16
STB	Pembangunan	Penyelenggaraan	RAB.09	RAB.09.05	RAB.09.05.01	RAB.09.05.01.08	Badan	Bidang	16

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
16.1.8	Infrastruktur	Urusan Perencaan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur	Pemerintahan Umum	perencanaan pembangunan nasional	perencanaan pembangunan nasional	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Daerah	Infrastruktur dan Kewilayahan	
STB 16.2.1	Pemberdayaan Penelitian Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan terkait dengan Pemberdayaan Penelitian Pembangunan Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.01 penelitian ilmu dasar	RAB.06.03.01.09 Pemberdayaan Penelitian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan	16
STB 16.2.2	Pengembangan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Perencaan terkait dengan Pengembangan Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01.10 Pengembangan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan	16
STB 17.1.1	penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan regional	RAB.03.07.01.01 penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17
STB 17.1.2	Pengelolaan Pelayanan Pencatatan SIpil	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil terkait dengan Pengelolaan Pelayanan Pencatatan SIpil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan regional	RAB.03.07.01.02 Pengelolaan Pelayanan Pencatatan SIpil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	17
STB 17.1.3	Pengelolaan Informasi Administrasi	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan	RAB.03 Pembangunan dan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan	RAB.03.07.01.03 Pengelolaan Informasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Bidang Pengelolaan Informasi	17

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	Kependudukan	Pecatatan Sipil terkait dengan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kewilayahan		regional	Administrasi Kependudukan	Sipil	Administrasi Kependudukan	
STB 17.1.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil terkait dengan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan regional	RAB.03.07.01.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	17
STB 17.1.5	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil terkait dengan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan regional	RAB.03.07.01.05 Pelaksanaan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	17
STB 18.1.1	Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.01 Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	18
STB 18.1.2	Pelaksanaan Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan Urusan Kesehatan terkait dengan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAB.04.01.05.02 Pelaksanaan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	18
STB 18.1.3	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan Urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.03 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	18
STB	Pengelolaan	Penyelenggaraan	RAB.04	RAB.04.01	RAB.04.01.02	RAB.04.01.02.04	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber	18

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
18.1.4	Sumber Daya Kesehatan	Urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	kesehatan	kefarmasian dan alat kesehatan	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan		Daya Kesehatan	
STB 19.1.1	Pelaksanaa Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Pelaksanaa Pelatihan Kerja dan Produktivitas	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.01 Pelaksanaa Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Transmigrasi	19
STB 19.1.2	Pengelolaan Transmigrasi	Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Pengelolaan Transmigrasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran	RAB.03.02.03.02 Pengelolaan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Transmigrasi	19
STB 19.1.3	Penyelenggaraan Penempatan Tenaga kerja	Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.03 Penyelenggaraan Penempatan Tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	19
STB 19.1.4	Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja	Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.04 Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	19
STB 19.1.5	Pengelolaan Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Pengelolaan Hubungan Industrial	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional	RAB.06.02.01.05 Pengelolaan Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	19
STB 19.1.6	Pelaksaanaan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja	RAB.06 Pendidikan	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.03 pembinaan	RAB.06.02.03.06 Pelaksaanaan	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Hubungan	19

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	tenaga Kerja	terkait dengan Pelaksaanaan Jaminan Sosial tenaga Kerja	dan Tenaga Kerja		keselamatan dan kesehatan kerja	Jaminan Sosial tenaga Kerja		Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
STB 20.1.1	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika terkait dengan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik	RAB.09.04.02.01 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	20
STB 20.2.1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Penyelenggaraan Urusan Statistik terkait dengan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.02 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	20
STB 20.3.1	Penyelenggaraan Persandian	Penyelenggaraan Urusan Persandian terkait dengan Penyelenggaraan Persandian	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.03 Penyelenggaraan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Persandian	20
STB 21.1.1	Pengelolaan Koperasi	Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah terkait dengan Pengelolaan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi	RAB.02.09.01 pembinaan koperasi	RAB.02.09.01.01 Pengelolaan Koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Bidang Koperasi	21
STB 21.1.2	Pemberdayaan Pembinaan Usaha Mikro	Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah terkait dengan Pemberdayaan Pembinaan Usaha Mikro	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	RAB.02.10.04.02 Pemberdayaan Pembinaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Bidang Usaha Mikro	21
STB 21.2.1	Pengelolaan Perindustrian	Penyelenggaraan Urusan Perindustrian terkait dengan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.03 Pengelolaan Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan	Bidang Perindustrian	21

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Pengelolaan Perindustrian					Perdagangan		
STB 21.3.1	Pengembangan Perdagangan	Penyelenggaraan Urusan Perdagangan terkait dengan Pengembangan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.02 pengelolaan perdagangan	RAB.02.02.02.04 Pengembangan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Bidang Pengembangan Perdagangan	21
STB 21.3.2	Pengelolaan Metrologi	Penyelenggaraan Urusan Perdagangan terkait dengan Penyelenggaraan Pengelolaan Metrologi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.02 pengelolaan perdagangan	RAB.02.02.02.05 Pengelolaan Metrologi	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Bidang Metrologi	21
STB 22.1.1	Penyelenggaraan Penataan PPLH	Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup terkait dengan Penyelenggaraan Penataan PPLH	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.01.01 Penyelenggaraan Penataan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan	22
STB 22.1.2	Pelaksanaan Penaatan PPLH	Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup terkait dengan Pelaksanaan Penaatan PPLH	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.02.02 Pelaksanaan Penaatan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan	22
STB 22.1.3	Pengelolaan Sampah	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sampah	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.03.03 Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	22
STB 22.1.4	Pengelolaan Limbah B3	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terkait dengan Pengelolaan Limbah B3	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.04.04 Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan	22

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
								Kapasitas	
STB 22.1.5	Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terkait dengan Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.05.05 Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	22
STB 22.1.6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terkait dengan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.06.06 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	22
STB 22.1.7	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terkait dengan Penyelenggaraan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB 07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB 07.05.01.07.07 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	22
STB 23.1.1	Pengelolaan Kepemudaan	Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga terkait dengan Pengelolaan Kepemudaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga	RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.01 Pengelolaan Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Kepemudaan	23
STB 23.1.2	Pengelolaan Keolahragaan	Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga terkait dengan Pengelolaan Keolahragaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga	RAB.06.05.01 pembudayaan olahraga	RAB.06.05.01.02 Pengelolaan Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Keolahragaan	23
STB 23.2.1	Pengelolaan Pariwisata	Penyelenggaraan Urusan Pariwisata terkait dengan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.03 Pengelolaan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan	Bidang Pariwisata	23

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Pengelolaan Pariwisata					Olahraga		
STB 23.2.2	Pelaksanaan Ekonomi Kreatif	Penyelenggaraan Urusan Pariwisata terkait dengan Pelaksanaan Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.07 pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital	RAB.02.01.07.04 Pelaksanaan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan SDM	23
STB 23.2.3	Pelaksanaan Pengembangan SDM Parekraf	Penyelenggaraan Urusan Pariwisata terkait dengan Pelaksanaan Pengembangan SDM Parekraf	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.05 Pelaksanaan Pengembangan SDM Parekraf	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan SDM	23
STB 24.1.1	Pengelolaan Bina Marga	Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Pengelolaan Bina Marga	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis	RAB.03.04.04.01 Pengelolaan Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Bina Marga	24
STB 24.1.2	Pengelolaan Cipta Karya	Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Pengelolaan Cipta Karya	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan	RAB.03.04.02.02 Pengelolaan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Cipta Karya	24
STB 24.1.3	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan	RAB.03.04.02.03 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	24
STB 24.1.4	Pengelolaan Perumahan	Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Pengelolaan Perumahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.04 Pengelolaan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Perumahan Permukiman	24

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
STB 24.1.5	Pengelolaan Permukiman	Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Pengelolaan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	RAB.03.04.03.05 Pengelolaan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Perumahan Permukiman	24
STB 24.2.1	Pengelolaan Pertanahan	Penyelenggaraan Urusan Pertanahan terkait dengan Pengelolaan Pertanahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan	RAB.03.06.06.06 Pengelolaan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	24
STB 24.2.2	Pengelolaan Bina Konstruksi	Penyelenggaraan Urusan Pertanahan terkait dengan Pengelolaan Bina Konstruksi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.03 pembinaan jasa kontruksi	RAB.03.01.03.07 Pengelolaan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Bina Konstruksi	24
STB 24.3.1	Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyelenggaraan Urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.08 Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Bidang Sumber Daya Air	24
STB 25.1.1	Pelaksanaan Bina Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan Pengelolaan Pelaksanaan Bina Pemerintahan Desa Pertanahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.01 Pelaksanaan Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Bina Pemerintah Desa	25
STB 25.1.2	Pelaksanaan Bina Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan Pelaksanaan Bina Pemberdayaan Masyarakat dan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.02 Pelaksanaan Bina Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan	25

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Lembaga Kemasyarakatan Pengelolaan Pelaksanaan Bina Pemerintahan Desa Pertanahan							
STB 25.1.3	Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.03 Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan	25
STB 25.1.4	Pengelolaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan Pengelolaan Pembangunan Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.04 Pengelolaan Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pembangunan Desa	25
STB 26.1.1	Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02.01 Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	26
STB 26.1.2	Pelaksanaan Kesetaraan Gender	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan Pelaksanaan Kesetaraan Gender	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.03 kesetaraan gender	RAB.04.03.03.02 Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	26

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
							Keluarga Berencana		
STB 26.1.3	Penyelenggaraan perlindungan perempuan	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan Penyelenggaraan perlindungan perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAB.04.03.05.03 Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	26
STB 26.1.4	Penyelenggaraan perlindungan anak	Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan Penyelenggaraan perlindungan anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.04 perlindungan anak	RAB.04.03.04.04 Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	26
STB 26.2.1	Pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan Pelaksanaan Pengendalian Pendudu, Penyuluhan dan Penggerakan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk	RAB.03.07.02.05 Pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	26
STB 26.2.2	Pengelolaan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.03 keluarga berencana	RAB.03.07.03.06 Pengelolaan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan	26

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		dengan Pengelolaan Keluarga Berencana					Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Kesejahteraan Keluarga	
STB 26.2.3	Pengelolaan Ketahanan Keluarga	Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan Pengelolaan Ketahanan Keluarga	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.03 keluarga berencana	RAB.03.07.03.07 Pengelolaan Ketahanan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	26
STB 26.2.4	Pengelolaan Kesejahteraan Keluarga	Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan Pengelolaan Kesejahteraan Keluarga	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.03 keluarga berencana	RAB.03.07.03.08 Pengelolaan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	26
STB 27.1.1	Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal terkait dengan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.01 Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	27
STB 27.1.2	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal terkait dengan Pengelolaan Pelayanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.03 manajemen perizinan penanaman	RAB.02.08.03.02 Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu	Dinas Penanaman Modal Pelayanan	bidang penanaman modal dan pelayanan	27

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Terpadu Satu Pintu			modal	Pintu	Terpadu Satu Pintu	terpadu satu pintu	
STB 28.1.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.02 pendidikan anak usia dini	RAB.06.01.02.01 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	28
STB 28.1.2	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Masyarakat	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 pembinaan pendidikan regional	RAB.06.01.01.02 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	28
STB 28.1.3	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan urusan Pendidikan terkait dengan Pelaksanaan Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.03 pendidikan dasar	RAB.06.01.03.03 Pengelolaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	28
STB 28.1.4	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik	Penyelenggaraan urusan Pendidikan terkait dengan Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 pembinaan pendidikan regional	RAB.06.01.01.04 Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28
STB 28.1.5	Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Kependidikan	Penyelenggaraan urusan Pendidikan terkait dengan Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Kependidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01.05 Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28
STB 28.2.1	Pengelolaan Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan Pendidikan terkait dengan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.01 pembinaan kebudayaan	RAB.08.02.01.06 Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	28

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			regional				
STB 29.1.1	Pengelolaan Lalu Lintas	Penyelenggaraan urusan Perhubungan terkait dengan Pengelolaan Lalu Lintas	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi	RAB.03.03.04.01 Pengelolaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	29
STB 29.1.2	Pengelolaan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan urusan Perhubungan terkait dengan Pengelolaan Angkutan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi	RAB.03.03.04.02 Pengelolaan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	29
STB 29.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penyelenggaraan urusan Perhubungan terkait dengan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi	RAB.03.03.04.03 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan	Bidang Sarana Prasarana Pdan Keselamatan	29
STB 29.1.4	Pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas	Penyelenggaraan urusan Perhubungan terkait dengan Pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselematan transportasi	RAB.03.03.03.04 Pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	29
STB 30.1.1	Pengelolaan Perpustakaan	Penyelenggaraan urusan Perpustakaan terkait dengan Pengelolaan Perpustakaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan kepustakaan	RAB.08.02.04.01 Pengelolaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan	30
STB 30.2.1	Pengelolaan Kearsipan	Penyelenggaraan urusan Kearsipan terkait dengan Pengelolaan Kearsipan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.05 pembinaan kepustakaan dan arsip nasional	RAB.08.02.05.02 Pengelolaan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Kearsipan	30

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
STB 31.1.1	Pengelolaan Tanaman Pangan	Penyelenggaraan urusan Pangan terkait dengan Pengelolaan Tanaman Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.01 Pengelolaan Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bidang Tanaman Pangan	31
STB 31.1.2	Pengelolaan Ketahanan Pangan	Penyelenggaraan urusan Pangan terkait dengan Pengelolaan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.02 Pengelolaan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	31
STB 31.2.1	Pengelolaan Tanaman Hortikultura	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pengelolaan Tanaman Hortikultura	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.03 Pengelolaan Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bidang Hortikultura	31
STB 31.2.2	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Tanaman Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.04 Pengelolaan Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bidang Perkebunan	31
STB 31.2.3	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pelaksanaan Penyuluhan Pertania	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.01 pembinaan pertanian regional	RAB.02.03.01.05 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bidang Penyuluhan	31
STB 32.1.1.1	Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan terkait dengan Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.01 Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan	32
STB 32.1.1.2	Pemberdayaan Nelayan	Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan terkait dengan Pemberdayaan Nelayan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan	RAB.02.06.04.02 Pemberdayaan Nelayan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Pemberdayaan Nelayan	32

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
STB 32.1.1.3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan terkait dengan Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.06 perikanan budidaya	RAB.02.05.06.02 Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya	32
STB 32.1.1.4	Pengelolaan Usaha Perikanan	Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan terkait dengan Pengelolaan Usaha Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.06 perikanan budidaya	RAB.02.05.06.03 Pengelolaan Usaha Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan	32
STB 32.1.1.5	Pengelolaan Pemasaran Pertanian	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pengelolaan Pemasaran Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.04 Pengelolaan Pemasaran Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan	32
STB 32.2.1	Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterine	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterine	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner	RAB.02.05.03.05 Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterine	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	32
STB 32.2.2	Pengelolaan Sarana Peternakan	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pengelolaan Sarana Peternakan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.06 Pengelolaan Sarana Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan	32
STB 32.2.3	Pengelolaan Prasana Peternakan	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pengelolaan Prasana Peternakan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.07 Pengelolaan Prasana Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan	32

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
								Peternakan	
STB 32.2.4	Pemberdayaan Pembibitan Peternakan	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pemberdayaan Pembibitan Peternakan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.08 Pemberdayaan Pembibitan Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan	32
STB 32.2.5	Pemberdayaan Produksi Peternakan	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pemberdayaan Produksi Peternakan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.05 produksi pakan dan ternak	RAB.02.05.05.09 Pemberdayaan Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan	32
STB 32.2.6	Pengelolaan Pemasaran Peternakan	Penyelenggaraan urusan Pertanian terkait dengan Pengelolaan Pemasaran Peternakan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.05 produksi pakan dan ternak	RAB.02.05.05.10 Pengelolaan Pemasaran Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan	32
STB 33.1.1	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Penyelenggaraan urusan Sosial terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.01 pembinaan sosial regional	RAB.04.02.01.01 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	33
STB 33.1.2	Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan urusan Sosial terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.01 pembinaan sosial regional	RAB.04.02.01.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	33
STB 33.1.3	Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	Penyelenggaraan urusan Sosial terkait dengan Pengelolaan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.01 pembinaan sosial regional	RAB.04.02.01.03 Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	33

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Rehabilitasi Sosial	Kesehatan						
STB 33.1.4	Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan urusan Sosial terkait dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.01 pembinaan sosial regional	RAB.04.02.01.04 Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	33
STB 33.1.5	Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin	Penyelenggaraan urusan Sosial terkait dengan Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.05 penanganan fakir miskin	RAB.04.02.05.05 Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	33
STB 34.1.1	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.01 Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	34
STB 34.1.2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.02 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	34
STB 34.1.3	Pelaksanaan Perlindungan	Penyelenggaraan urusan Ketentraman	RAB.05 Ketertiban	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.02 pengayoman	RAB.05.02.02.03 Pelaksanaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Perlindungan	34

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	Masyarakat	dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan	Umum dan Kesehatan		masyarakat	Perlindungan Masyarakat		Masyarakat dan Kebakaran	
STB 34.1.4	Pelaksanaan Perlindungan Kebakaran	Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Perlindungan Kebakaran	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.02 pengayoman masyarakat	RAB.05.02.02.04 Pelaksanaan Perlindungan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	34
STB 35.1.1	Penyelenggaran Pelayanan Keperawatan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaran Pelayanan Keperawatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.01 Penyelenggaran Pelayanan Keperawatan	RSUD dr. Abdoer Rahem	Seksi Keperawatan	35
STB 35.1.2	Penyelenggaran Pelayanan Medis	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaran Pelayanan Medis	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.02 Penyelenggaran Pelayanan Medis	RSUD dr. Abdoer Rahem	Bidang Pelayanan	35
STB 35.1.3	Pengelolaan Penunjang Medis	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Penunjang Medis	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	RAB.04.01.02.03 Pengelolaan Penunjang Medis	RSUD dr. Abdoer Rahem	Bidang Penunjang Medis	35
STB 35.1.4	Pengelolaan Penunjang non Medis	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Penunjang non Medis	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	RAB.04.01.02.04 Pengelolaan Penunjang Non Medis	RSUD dr. Abdoer Rahem	Bidang Penunjang Non Medis	35
STB	Pelaksanaan	Penyelenggaraan	RAB.09	RAB.09.01	RAB.09.01.04	RAB.09.01.04.01	Kecamatan	Seksi	36

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
36.1.1	Pemerintahan	urusan Kecamatan dengan Pelaksanaan Pemerintahan	Pemerintahan Umum	dalam negeri	pemerintahan daerah	Pelaksanaan Pemerintahan	Situbondo	Pemerintahan	
STB 36.1.2	Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Penyelenggaraan urusan Kecamatan dengan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Situbondo	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	36
STB 36.1.3	Pengelolaan Kesejateraan Rakyat	Penyelenggaraan urusan Kecamatan dengan Pengelolaan Kesejateraan Rakyat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Situbondo	Seksi Kesejahteraan Rakyat	36
STB 36.1.4	Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan Kecamatan dengan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	RAB.05 Ketertiban Umum dan Kesehatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.04 Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Situbondo	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	36
STB 37.1.1	Pelaksanaan Pemerintahan	Penyelenggaraan urusan Kecamatan dengan Pelaksanaan Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 Pelaksanaan Pemerintahan	Kecamatan Bungatan	Seksi Pemerintahan	37
STB 37.1.2	Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Penyelenggaraan urusan Kecamatan dengan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Bungatan	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	37
STB 37.1.3	Pengelolaan Kesejateraan Rakyat	Penyelenggaraan urusan Kecamatan dengan Pengelolaan Kesejateraan Rakyat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bungatan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	37
STB 37.1.4	Pelaksanaan Ketentraman	Penyelenggaraan urusan Kecamatan	RAB.05 Ketertiban	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman,	RAB.05.02.01.04 Pelaksanaan	Kecamatan Bungatan	Seksi Ketentraman	37

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
	dan Ketertiban	dengan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	Umum dan Kesehatan		ketertiban umum	Ketentraman dan Ketertiban		dan Ketertiban	
STB 38.1.1	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.01 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan	Puskesmas Situbondo	PJ UKM Esensial	38
STB 38.1.2	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.02 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Puskesmas Situbondo	PJ UKM Pengembang	38
STB 38.1.3	Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	RAB.04.01.02.03 Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium	Puskesmas Situbondo	PJ UKP Kefarmasian dan Laboratorium	38
STB 38.1.4	Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	RAB.04.01.02.04 Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan	Puskesmas Situbondo	PJ Bangunan dan Prasarana Kesehatan	38
STB 38.1.5	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.05 Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan	Puskesmas Situbondo	PJ Jejaring Jaringan	38

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
		Puskesmas				Puskesmas			
STB 39.1.1	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.01 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan	Puskesmas Bungatan	PJ UKM Esensial	39
STB 39.1.2	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.02 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Puskesmas Bungatan	PJ UKM Pengembang	39
STB 39.1.3	Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	RAB.04.01.02.03 Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium	Puskesmas Bungatan	PJ UKP Kefarmasian dan Laboratorium	39
STB 39.1.4	Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	RAB.04.01.02.04 Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan	Puskesmas Bungatan	PJ Bangunan dan Prasarana Kesehatan	39
STB 39.1.5	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Penyelenggaraan urusan Kesehatan terkait dengan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.05 Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Puskesmas Bungatan	PJ Jejaring Jaringan	39
STB	Pelaksanaan	Penyelenggaraan	RAB.02	RAB.04.02	RAB.04.02.06	RAB.04.02.06.01	Badan	Bidang	40

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
40.1.1	Kedaruratan Bencana	urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Kedaruratan Bencana	Ekonomi dan Industri	sosial	penanggulangan bencana	Pelaksanaan Kedaruratan Bencana	Penanggulangan Bencana Daerah	Kedaruratan dan Logistik	
STB 40.1.2	Pelaksanaan Kedaruratan Logistik	Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Kedaruratan Logistik	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.06 penanggulangan bencana	RAB.04.02.06.02 Pelaksanaan Kedaruratan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Kedaruratan dan Logistik	40
STB 40.1.3	Pengelolaan Rehabilitasi Bencana dan Rekonstruksi	Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pengelolaan Rehabilitasi Bencama dan Rekonstruksi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.06 penanggulangan bencana	RAB.04.02.06.03 Pengelolaan Rehabilitasi Bencana dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	40
STB 40.1.4	Pengelolaan Rekonstruksi Bencana	Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait dengan Pengelolaan Rekonstruksi Bencana	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.06 penanggulangan bencana	RAB.04.02.06.04 Pengelolaan Rekonstruksi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	40

Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data dan Informasi

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.001	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Data Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan penyelenggaraaan pemerintah darah yang terdapat inikator kinerja kunci , urusan wajib dan urusan pilihan	mengukur kinerja dari penyelenggaraan daerah di kab. situbondo	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Online	Server Pusat	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.001
D.E.002	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Data Standar Pelayanan Minimal	Data pelaksanaan pelayanan minimal di 6 minimal urusan di pelayanan dasar (urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, keamanan dan ketertiban umum dan sosial)	mengetahui capaian kinerja 6 urusan	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Pusat	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.002
D.E.003	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Data kerjasama Kabupaten	fasilitasi opd atau pihak ketiga untuk melakukan kerja sama (dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerja	pembuatan dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerja sama dari pemerintah daerah ataupun pihak	RAD 09.01 Data dalam negeri	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
				sama)	ketiga yang mengusulkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama						
D.E.006	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data tempat peribadatan	Berisi data tempat peribadatan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan tempat peribadatan	RAD 08.01 Data agama	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.007	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data tempat pendidikan keagamaan	Berisi data tempat pendidikan keagamaan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan tempat pendidikan keagamaan	RAD 08.01 Data agama	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.008	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data kafilah mtq	Berisikan data kaflah mtq di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan kafilah mtq	RAD 08.01 Data agama	Online	Server Pemprov	MySQL Server	Publik	A.E.003
D.E.011	3	Bagian Hukum	Data Peraturan Daerah	Dokumen peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh bupati	Sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah	RAD 05.01 Data hukum	Online	Server OPD di Diskominfo	Microsoft SQL Server	Publik	A.E.007
D.E.012	3	Bagian Hukum	Data Peraturan Bupati	Dokumen peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh bupati	Sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah	RAD 05.01 Data hukum	Online	Server OPD di Diskominfo	Microsoft SQL Server	Publik	A.E.007

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.013	3	Bagian Hukum	Data Laporan Aksi HAM	Dokumen kegiatan rencana aksi HAM yang dilakukan oleh OPD terkait	Mengetahui capaian rencana aksi HAM	RAD 05.03 Data hak asasi manusia	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.014	3	Bagian Hukum	Data Penyelesaian Kasus	Dokumen putusan pengadilan terkait pelaksanaan penyelesaian kasus yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten situbondo	Mengetahui jumlah kasus yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang sudah ditangani	RAD 05.01 Data hukum	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.015	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Data Target dan Realisasi Anggaran	Berisikan data target dan realisasi anggaran	Bertujuan untuk mengetahui target dan realisasi anggaran daerah	RAD 09.02 Data keuangan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	
D.E.016	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Data Kegiatan APBD (Data Pelaporan)	Berisikan Laporan terkait kegiatan APBD yang digunakan dalam menentukan besar pendapatan dan pengeluaran	Bertujuan untuk mengetahui Laporan terkait besarnya Pendapatan dan pengeluaran belanja di lingkungan pemerintah daerah	RAD 09.02 Data keuangan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	
D.E.017	4	Bagian Perekonomian, Pembanguna	Data BUMD	Berisikan data tim pembina bumd di kabupaten, data laporan	Bertujuan unruk pelaporan keuangan dan kinerja BUMD (PT Situbondo	RAD 02.07 Data badan usaha milik negara	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
		n dan Sumber Daya Alam		keuangan, data penliaian kinerja, dan data BUMD	Migas, Perumda Giri Tirta, Perumda BPR Bank Situbondo)						
D.E.020	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pelaku Pengadaan	Berisikan data pelaku pengadaan barang dan jasa	Untuk pengelolaan pelaku pengadaan barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.010 A.E.011 A.E.014
D.E.021	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Penyedia	Berisikan data penyedia pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk pengelolaan kontrak penyedia barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.012
D.E.022	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Produk	Berisikan data produk pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk pendataan produk barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Publik	A.E.009
D.E.025	6	Bagian Umum	Data hibah	Merupakan data hibah yang disalurkan oleh Pemda	Bertujuan untuk pendataan penyaluran hibah	RAD 04.02 Data sosial	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.016
D.E.026	6	Bagian Umum	Data PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	data PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	untuk absensi pegawai dan tunjuangan pegawai	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.047
D.E.027	6	Bagian Umum	Data Pemeliharaan Aset Sekda	pengelolaan data terkait asetsekda seperti kendaraan, komputer, laptop, printer, gedug	memperlancar tugas kedinasan	RAD 09.02 Data keuangan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
				kantor dan rumah dinas							
D.E.034	7	Bagian Organisasi	Data ketatalaksanaan	Merupakan data terkait tata laksanan organisasi pemerintahan	Bertujuan untuk pengelolaan ketatalaksanaan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	Online	Server Pusat dan Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.021 A.E.025
D.E.035	7	Bagian Organisasi	Data Pelayanan Publik	Berisi data pelayanan publik yang ada di Pemda	Bertujuan untuk pengelolaan data pelayanan publik yang ada di Pemda	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Pusat	MySQL Server	Publik	A.E.020 A.E.024 A.E.025
D.E.036	7	Bagian Organisasi	Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Berisi mengenai detail hasil keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan	Bertujuan untuk untuk memperbaiki kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.019
D.E.040	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data Keprotokolan	Berisikan data terkait perencanaan program dan kegiatan keprotokolan	Bertujuan untuk mengetahui data terkait keprotokolan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.041	8	Bagian Protokol dan Komunikasi	Data Agenda Pimpinan	Berisikan data agenda pimpinan, yang memuat	Bertujuan untuk mengetahui agenda pimpinan	RAD 09.07 Data kesekretariata	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
		Pimpinan		kegiatan, jadwal, dan lain-lain		n negara					
D.E.042	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data survey	Berisikan data pra survey terkait agenda pimpinan	Bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan agenda pimpinan	RAD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.048	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data Renstra	Berisi dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian.	Bertujuan untuk pelaporan dan perencanaan kebijakan selama lima tahuanan PEMDA guna memperoleh pendanaan dari Kementerian.	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Komputer OPD	Pdf	Hanya OPD	
D.E.049	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data Renja	Berisi dokumen rancangan awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.	Bertujuan untuk dokumentasi dan perencanaan program dan kegiatan OPD dalam satu tahun.	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Komputer OPD	Pdf	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.050	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data RFK (Realiasasi Fisik dan Keuangan) SETDA	Berisi data pertanggung jawaban realisasi anggaran.	Bertujuan untuk menghindari penyelewengan realisasi keuangan	RAD 09.02 Data keuangan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.063	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Data Pokok Pikiran DPRD	Data berisikan dengan data anggaran data yang di distribusikan kepada masyarakat, data yang disiapkan oleh pemda (data anggaran yang didistribusikan kepada masyarakat) (nama anggota, anggarannya)	Bertujuan untuk pengelolaan dan penyebaran data pokok pikiran DPRD	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.064	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Data Pengawasan Pemerintahan	Data berisikan dengan monitoring kebijakan pemda	masukkan kepada bapeda yang digunakan sebagai saran berapa nominal yang bisa diberikan kepada masyarakat	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.065	10	Sekretariat Dewan Perwakilan	Data Peraturan DPRD	data yang berisikan aturan aturan yang	monitoring kebijakan yang telah dilakukan oleh	RAD 10.01 Data Kebijakan Pemerintah	Online	Komputer OPD dan Server	Microsoft Office dan MySQL	Publik	A.E.007

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
		Rakyat Daerah		diajukan oleh pemerintah daerah ke propemperda (program legislatif daerah)	pemda			Diskominfo	Server		
D.E.066	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Data Hukum	Data keputusan yang dibuat oleh DPRD (peraturan dprd tentang tata tertib, kode etik, tata cara beracara pada badan kehormatan, atau badan lainya)	menentukan arah kebijakan keputusan untuk anggota dewan	RAD 05.01 Data hukum	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.067	11	Inspektorat	Data Tindak Lanjut	Berisikan tindak lanjut hasil pengawasan	Bertujuan untuk pengawasan pelaksanaan tindak lanjut	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Jaringan Lokal	MySQL	Hanya OPD	A.E.030
D.E.068	11	Inspektorat	Data pengaduan	Berisikan data aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang ada di pemda	Bertujuan untuk penanganan aduan masyarakat	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.033 A.E.036
D.E.069	11	Inspektorat	Data Temuan dan Rekomendasi	Berisikan hasil temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit	Bertujuan untuk memeberikan masukan atas temuan saat audit	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.029
D.E.074	12	Badan Kepegawaian dan	Data Kepegawaian	Berisi data diri ASN di Pemerintah Kabupaten	Mengetahui biodata ASN yang ada di Kabupaten	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Pusat dan Server OPD di	MySQL Server	Bagi pakai dengan	A.E.047 A.E.048 A.E.051

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
		Pengembangan Sumberdaya Manusia		Situbondo	Situbondo			ruang server OPD		OPD	A.E.052
D.E.075	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Laporan Kinerja	Berisi capaian kinerja pegawai selama satu periode	Mengetahui capaian kinerja setiap ASN di Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.043 A.E.047
D.E.076	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Mutasi	Berisi data pegawai mutasi masuk dan keluar di Pemerintah Kabupaten Situbondo.	Mengetahui pendataan mutasi jabatan ASN di Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.044 A.E.047
D.E.084	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data organisasi kemasyarakatan	Data seluruh ormas yang terdata pada Kabupaten Situbondo	Untuk pendataan ormas yang ada	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.054
D.E.085	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data pengajuan ijin penelitian	Merupakan data diri peneliti yang akan melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk mengelola pelaksanaan penelitian di lingkup pemda	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.055

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.086	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data RAB barang	Merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Bertujuan sebagai landasan realisasi anggaran dalam periode satu tahun.	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.059
D.E.087	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Merupakan rincian kebutuhan barang pemda dalam satu periode	Bertujuan untuk perencanaan pengadaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	
D.E.088	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Merupakan rincian pemeliharaan BMD	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.057
D.E.103	15	Badan Pendapatan Daerah	Data transaksi pajak	Berisikan data transaksi pembayaran dan penagihan pajak di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan pajak daerah	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.065

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.104	15	Badan Pendapatan Daerah	Data Objek Pajak	Merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak di Kaupaten Situbondo	Bertujuan untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak.	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.068
D.E.105	15	Badan Pendapatan Daerah	Data Subjek pajak	Berisi data perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak di Kabupaten Situbondo.	Bertujuan untuk pencatatan subjek pajak yang ada di Kabupaten Situbondo.	RAD 09.02 Data keuangan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.068
D.E.117	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data inovasi	Berisi terkait usulan inovasi terhadap pelayanan publik di pemerintah daerah	Bertujuan untuk pendataan pengembangan pelayanan publik yang ada	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.073
D.E.118	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Perencanaan	Berisi data perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam satu tahun kedepan.	Bertujuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi dana kegiatan.	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.119	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Pertanian	Berisi data perencanaan program, kegiatan terkait pembangunan bidang pertanian.	Bertujuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi dana kegiatan.	RAD 02.03 Data pertanian	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	
D.E.129	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Adminduk	Berisi data diri pemohon administrasi kependudukan	Memberikan layanan pendaftaran adminduk secara online untuk di desa/kelurahan	RAD 03.07 Data kependudukan	Online	Server Pusat	Oracle	Bagi pakai dengan OPD	A.E.082
D.E.130	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data profil kependudukan	Berupa Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Memberikan Informasi Perkembangan Kependudukan Kabupaten Situbondo	RAD 03.07 Data kependudukan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.131	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kerjasama	Berupa Pemanfaatan Data dan Hak Akses Kependudukan	Mempermudah Hak Akses Data Kependudukan dan Layanan Kependudukan	RAD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server Pusat	Oracle	Hanya OPD	A.E.085
D.E.135	18	Dinas Kesehatan	Data Rekam Medik	Data yang berisikan catatan medis pasien	Bertujuan untuk pengelolaan pasien di puskesmas	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.091
D.E.136	18	Dinas Kesehatan	Data Pasien	Berisikan informasi pribadi, identitas dan	Bertujuan untuk pengelolaan pasien di puskesmas	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Bagi Pakai dengan	A.E.091

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
				status pasien						OPD	
D.E.137	18	Dinas Kesehatan	Data Klaim Pembiayaan	terkait pembiayaan kesehatan	menyajikan informasi pembiayaan	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Hanya OPD	
D.E.144	19	Dinas Ketenagakerjaan	Data Pencari Kerja	Uraian Data Pencari Kerja : Nama, Alamat, No. Hanphone, Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan kompetensi.	Mengetahui pencari kerja terdaftar	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.093
D.E.145	19	Dinas Ketenagakerjaan	Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI	Uraian Data Pencari Kerja : Nama CPMI, Permohonana ID CPMI dan rekom paspor, SIP, SIUP P3MI, Surat Tugas P3MI, KTP, Kartu Keluarga, Ijasah, Akte Lahir, Ijin Keluarga, Keterangan ahli waris, dan surat nikah	Permohonan pembuatan ID PMI dan rekom paspor dari P3MI	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.094
D.E.146	19	Dinas Ketenagakerjaan	Data BKK	Uraian Data Pencari Kerja : Nama sekoalah,	Mengetahui jumlah BKK di Kabupaten Situbondo yang	RAD 06.02 Data ketenagakerja	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
				Surat tanda daftra, surat permohonan, izin operasional pendirian instansi, pas foto penanggungjawab, dan Struktur organisasi Pengelola BKK.	terdaftar dan terkelola.	an					
D.E.163	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Statistik 8 Kelompok Data	8 KELOMPOK DATA SITUBONDO: 1. Data Umum 2. Sosial / Budaya 3. Sumber Daya Alam 4. Infrastruktur 5. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi 6. Ekonomi dan Keuangan 7. Politik, Hukum dan Keamanan 8. Insidensial	Bertujuan untuk publikasi data statistik kelompok data kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.103
D.E.164	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Pengguna Layanan Tanda Tangan Digital	Bersi data diri pengguna layanan tanda tangan elektronik	Untuk menjaga kesahan tanda tangan elektronik	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.096

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.165	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen surat dengan tanda tangan digital	Berisi dokumen yang menggunakan layanan tanda tangan elektronik	Untuk menjaga kesahan tanda tangan elektronik	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.098
D.E.184	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data bantuan usaha mikro	Data NIK, KK, Alamat, Jenis Usaha, Foto Usaha, No Ijin Usaha dari isian form.	Mengetahui mendapatkan data usaha mikro untuk diajukan sebagai calon penerima bantuan	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.112
D.E.185	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data koperasi	Nomor Induk Koperasi, Nama Koperasi, Alamat, NIK Pengusaha, Jenis Usaha, dan Koordinat	Untuk memanajement data koperasi	RAD 02.09 Koperasi	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.113 A.E.115
D.E.186	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data UKM	NIK, Nama, Alamat, No ijin usaha, jenis usaha dari isian form. No Badan Hukum dari ODS (Online Data Sistem)	Untuk manajement data UKM	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.113 A.E.115
D.E.199	22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kualitas sungai	Data yang berisikan terkait dengan Nama Sungai, Kualitas sungai, lokasi sungai	Penggambaran kuliatas sungai	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.200	22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kualitas udara	Data yang berisikan terkait tekanan udara, lokasi	Penggambaran kualitas Udara pada suatu tempat	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.201	22	Dinas Lingkungan Hidup	Data hasil uji laboratorium	Data yang berisikan sampel penelitian pada sebuah lokasi dan berisi data kulitas air, udara, tanah	Penggambaran pengujian kandungan air, tanah, udara seusai dengan hasil uji laboratorium	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.206	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data Destinasi Wisata	Data pengelolaan wisata seperti data kunjungan wisatawan, data aset wisata, datafasilitas wisata, PIC Wisata	Bertujuan untuk pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Situbondo	RAD 02.11 Data pariwisata	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Bagi pakai dengan OPD	
D.E.207	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data penginapan	Data penginapan, Alamat , kontak yang bisa dihubungi, Jumlah kamar yang tersedia, Jumlah kamar yang laku terjual perbulannya.	Bertujuan untuk pendataan penginapan di Kabupaten Situbondo	RAD 02.11 Data pariwisata	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.208	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data pelaku usaha pariwisata	nama pelaku usaha, jenis usaha, alamt, sama kontak,	Bertujuan untuk pengelolaan pelaku usaha pariwisata	RAD 02.11 Data pariwisata	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.2 15	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Badan Usaha Jasa Kontruksi	Berisi daftar badan usaha jasa kontruksi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan badan jasa kontruksi di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.2 16	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jalan	Berisi detail kondisi jalan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan jalan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	Online	Komputer OPD dan Server Pusat	Microsoft Office dan MySQL Server	Hanya OPD	
D.E.2 17	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jembatan	Berisi detail kondisi jembatan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan jembatan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	Online	Komputer OPD dan Server Pusat	Microsoft Office dan MySQL Server	Hanya OPD	
D.E.2 32	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data anggota bpd di kabupaten situbondo	Berisi data diri anggota bpd	pembinaan kepada anggota BOPD yang ada di desa	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.2 33	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data IDM (indeks desa membangun)	informasi terkait kategori desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal)	menentukan status desa dengan penilaian	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.2 34	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Data lembaga bumdes	Merupakan detail lembaga bumdes yang ada di	Untuk pengelolaan lembaga bumdes di Kabupaten	RAD 03.05 Data pembangunan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
		dan Desa		kab.situbondo dan telah dilakukan pembinaan	Situbondo	kawasan atau daerah tertinggal					
D.E.235	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data desa yang tertib mengelola keuangan desa	memberikan informasi terkait pertanggunggjawaban pengelolaan keuangan desa	mempermudah desa dalam menyelesaikan pengelolaan keuangan secara tepat waktu	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Online	Server Pusat	MySQL Server	Bagi pakai dengan OPD	A.E.125 A.E.127
D.E.236	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Data Kegiatan DP3AP2KB	Berupa foto kegiatan DP3AP2KB	Memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.130
D.E.237	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Data Program Pengarusutamaan Gender	data terkait partisipasi perempuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring pembangunan serta pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender	Bertujuan untuk mengetahui data terkait tingkat partisipasi perempuan dan responsivitas daerah terhadap isu gender	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
				pada OPD dan Desa							
D.E.238	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Data Perlindungan Perempuan	data terkait layanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	memberi informasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan ditangani oleh dinas	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.245	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data dokumentasi kegiatan DPMPTSP	Berupa foto kegiatan DPMPTSP	Memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.136
D.E.246	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data profil dinas	Berisi profil lengkap dari DPMPTSP	Memberikan informasi terkait DPMPTSP	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Online	Server OPD di Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.136
D.E.247	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data perizinan	Berisi surat perizinan dan rekomendasi perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP	Bertujuan untuk dokumentasi surat atau rekomendasi perizinan yang telah diterbitkan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Bagi Pakai dengan OPD	A.E.132 A.E.134

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.255	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Siswa	Berisi data terkait kesiswaan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan siswa PAUD hingga SMA yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	Online	Server OPD di ruang server OPD	Microsoft SQL Server	Hanya OPD	A.E.157
D.E.256	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Berisi data terkait tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	Online	Server OPD di ruang server OPD	Microsoft SQL Server	Hanya OPD	A.E.157
D.E.257	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Lembaga/Sekolah	Berisi daftar lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo	Bertujun untuk pendataan lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.153
D.E.275	29	Dinas Perhubungan	Jadwal Trasportasi	Berisi Jadwal keberangkatan dan sampai transportasi umum seperti Bis dan Kapal di Kabupaten Situbondo	Mengetahui Jadwal keberangkatan dan sampai transportasi umum seperti Bis dan Kapal di Kabupaten Situbondo	RAD 03.03 Data transportasi	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Publik	A.E.166
D.E.276	29	Dinas Perhubungan	Data Rambu Lalu Lintas	Berisi lokasi, deskripsi rambu lalu lintas dan kondisi rambu	Bertujuan untuk pengelolaan rambu	RAD 03.03 Data transportasi	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.277	29	Dinas Perhubungan	Data kendaraan	Berisi daftar kendaraan yang telah lulus layak uji	Bertujuan untuk memantau kelayakan kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Situbondo	RAD 03.03 Data transportasi	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.163
D.E.278	29	Dinas Perhubungan	Data CCTV	Berisi video CCTV dari beberapa titik jalan di Kabupaten Situbondo	Untuk memantau lalu lintas di Kabupaten Situbondo	RAD 03.03 Data transportasi	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Publik	A.E.164
D.E.279	30	Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan	Data Kebutuhan Buku	Berisi daftar kebutuhan buku untuk perpustakaan	Bertujuan untuk perencanaan pengadaan buku	RAD 06.01 Data pendidikan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.280	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Buku	Berisi data buku dan koleksi perspustakaan yang ada di Perpustakaan Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk dokumentasi dan manajemen aset perpustakaan	RAD 06.01 Data pendidikan	Online	Server Diskominfo	Microsoft SQL Server	Publik	A.E.168
D.E.281	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data SPJ	Berisi laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran di Dinperpus	Bertujuan untuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran	RAD 09.06 Data aparatur negara	Online	Komputer OPD dan Server Diskominfo	Microsoft Office dan MySQL Server	Hanya OPD	A.E.169

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.285	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Produksi Pertanian	Berisi data hasil produksi pertanian di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan perkembangan hasil produksi pertanian di Kabupaten Situbondo	RAD 02.03 Data pertanian	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.286	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Jenis Varietas Padi unggul	Berisi daftar jenis varietas padi unggul	Bertujuan untuk pendataan varietas padi unggul	RAD 02.03 Data pertanian	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.287	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Luasan Tanaman	Merupakan luas dari lahan yang akan ditanami suatu komoditi perkebunan	Bertujuan untuk pendataan lahan pertanian	RAD 02.03 Data pertanian	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.173 A.E.174
D.E.291	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Data Produksi Perikanan Tangkap	Berisi jumlah produksi perikanan tangkap	Mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.292	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Data Produksi Perikanan Budidaya	Berisi jumlah produksi perikanan budidaya	Mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.293	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Data Hasil produksi perikanan	Berisi jumlah hasil produksi perikanan	Mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	Online	Komputer OPD dan Server Pusat	Microsoft Office dan MySQL Server	Publik	A.E.176

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.306	33	Dinas Sosial	Data Penduduk Masyarakat Yang Membutuhkan Bantuan Sosial	Berisi data diri penduduk Kabupaten Situbondo yang membutuhkan bansos	Bertujuan untuk penyaluran bansos	RAD 04.02 Data sosial	Online	Komputer OPD dan Server Pusat	Microsoft Office dan MySQL Server	Publik	A.E.179
D.E.307	33	Dinas Sosial	Data DTKS	Berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bertujuan untuk penyaluran bansos	RAD 04.02 Data sosial	Online	Server Pusat	MySQL Server	Publik	A.E.178 A.E.180
D.E.308	33	Dinas Sosial	Data PMKS	Berisi data diri seorangan atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Mengangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.	RAD 04.02 Data sosial	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.309	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Sosialisasi	Data berisikan sosialisi yang diadakan oleh Satpol PP (Nama kegiatan sosialisasi, lokasi,	Menginformasikan data sosialisasi yang dilakukan	RAD 05.02 Data keamanan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
				nama pemateri)							
D.E.310	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Pelanggar Perda yang Ditangani	Data data pelanggar PERDA (Peraturan Daerah) yang ditangani oleh OPD (KTP, jenis pelanggaran, presentasi pelanggar)	Mengetahui dan merekap jumlah pelanggar yang	RAD 05.02 Data keamanan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.311	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Rokok Ilegal	Berisi daftar rokok yang tidak bercukai	Bertujuan untuk pemberantasan rokok ilegal	RAD 05.02 Data keamanan	Online	Server Diskominfo	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.182
D.E.317	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data rekam medis pasien RSUD	Berisi NIK, Nama, Alamat, Nama tindakan, kode diagnosa	Menyajikan data rekam medis pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.184 A.E.188 A.E.191
D.E.318	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data kefarmasian	Berisi no RM, Nama pasien, nama obat, harga obat	Bertujuan untuk dokumentasi data pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.190
D.E.319	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data persediaan non-farmasi	Berisi nama barang dan nama ruangan	Bertujuan untuk dokumentasi aset	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server OPD di ruang server OPD	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.185
D.E.327	36	Kecamatan Situbondo	Data surat administrasi penduduk	Berisi surat kependudukan pemohon surat pengantar administrasi	Bertujuan untuk penerbitan surat pengantar administrasi kependudukan	RAD 03.07 Data kependudukan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Bagi Pakai dengan OPD	A.E.192

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.328	36	Kecamatan Situbondo	Data Profil Desa	Data profil desa menyangkut data penduduk dan data yang ada di desa	menyajikan data, memberikan informasi terkait dengan profil desa	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.329	36	Kecamatan Situbondo	Data Musrembang	Hasil data musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan)	menyajikan data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.334	37	Kecamatan Bungatan	Data Kesejahteraan Rakyat	Meliputi informasi data SEHATI, Penerima Bantuan dan Kemiskinan Ekstrem	Tujuan data untuk mengetahui jumlah penerima bantuan	RAD 04.02 Data sosial	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.335	37	Kecamatan Bungatan	Data Musrenbang	Meliputi laporan data musrenbang, KPM, Karang Taruna, Penggilingan Padi dan Jagung, Data Pelaku Usaha	Tujuan data mengetahui data tentang peningkatan pembangunan di desa	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.336	37	Kecamatan Bungatan	Data Pembinaan Keuangan Desa	Berupa laporan, rancangan mengenai kuangan desa	Tujuan data untuk mempermudah akses atau penyelesaian program desa	RAD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server Pusat	MySQL Server	Hanya OPD	A.E.127
D.E.337	37	Kecamatan Bungatan	Data Surat Masuk dan Surat keluar	Meliputi laporan data surat masuk dan surat keluar	Tujuan data untuk mengetahui jumlah surat yg masuk maupun keluar	RAD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
D.E.338	38	Puskesmas Situbondo	Data Vaksinasi	Data Vaksin berupa data jenis vaksin, penerima vaksin, serta distribusinya	Bertujuan untuk pengelolaan distribusi vaksin	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Publik	A.E.200
D.E.339	38	Puskesmas Situbondo	Data Hasil laboratorium	Berisikan hasil pemeriksaan laboratorium	Bertujuan untuk dokumentasi hasil lab pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Bagi Pakai dengan OPD	A.E.195 A.E.201
D.E.340	38	Puskesmas Situbondo	Data BPJS	Data BPJS - Data BPJS berisikan nomor BPJS, Status BPJS, Kelas BPJS dan Keaktifan nomor BPJS yang berisikan nomor asuransi dan identitas pasien	Bertujuan untuk pengelolaan BPJS pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	Online	Server Pusat	MySQL Server	Publik	A.E.199
D.E.353	39	Puskesmas Bungatan	Data Laboran	Berisi hasil pemeriksaan di laboraturium	Bertujuan untuk pendataan pasien di laboraturium	RAD 04.01 Data kesehatan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.354	39	Puskesmas Bungatan	Data ODC Persalinan	Berisi hasil pemeriksaan di ODC persalinan	Bertujuan untuk pendataan pasien di ODC Persalinan	RAD 04.01 Data kesehatan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.355	39	Puskesmas Bungatan	Data IGD	Berisi hasil pemeriksaan di IGD	Bertujuan untuk pendataan pasien di IGD	RAD 04.01 Data kesehatan	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Hanya OPD	
D.E.358	40	Badan Penanggulangan Bencana	Data Kawasan Rawan Bencana	Berisi daftar kawasan rawan bencana di	Bertujuan untuk mitigasi bencana	RAD 04.02 Data sosial	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Referensi Arsitektur Data	Bentuk Data	Tempat Penyimpanan Data	Aplikasi *Database* atau Penyimpanan Data	Akses Data	ID Meta Data Terkait
		Daerah		Kabupaten Situbondo							
D.E.359	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Korban bencana	Berisi data jumlah dan rincian korban pada setiap kejadian bencana di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan jumlah korban yang terkena dampak kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Situbondo.	RAD 04.02 Data sosial	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	
D.E.360	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Kerugian akibat bencana	Berisi total dan penjabaran kerugian atas bencana yang terjadi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pemulihan bencana	RAD 04.02 Data sosial	Offline	Komputer OPD	Microsoft Office	Publik	

Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan fasilitasi PAW DPRD
			Layanan pelantikan bupati dan wakil bupati
			Layanan koordinator pelaporan LPPD
			Layanan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah ormas
			Layanan hibah peribadatan
			Layanan peringatan hari besar keagamaan
3	Bagian Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
			Layanan Penyusunan Peraturan Daerah
			Layanan Peraturan Bupati
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Layanan Pembinanan BUMD
			Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan
			Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Layanan Pengelolaan Pengadaan
			Layanan pembinaan pelaku pengadaan
			Layanan Fasilitasi Penyedia
6	Bagian Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan
			Layanan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan
			Layanan administrasi umum

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
7	Bagian Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan fasilitasi ketatalaksanaan
			Layanan fasilitasi peningkatan pelayanan publik
			Layanan Analisis Kinerja dan Beban Kerja
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Komunikasi Pimpinan
			Layanan Keprotokolan
			Layanan Dokumentasi Agenda Pimpinan
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Perjanjian Kinerja induk dan perubahan
			Layanan verifikasi SPJ
			Layanan Pengajuan SPP dan SPM
10	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Layanan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan
			Layanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran
			Layanan Persidangan dan Risalah
11	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
			Layanan Pengaduan Lembaga Pemerintah Kabupaten Situbondo
			Layanan Audit
11	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Layanan Konsultasi Pengawasan
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Layanan Informasi Seleksi CASN
			Layanan Penerbiatan Surat Izin / Keterangan Perceraian

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
			Layanan Penerbitan Surat Keputusan Perjatuhan Hukuman Disiplin
			Layanan Pemrosesan Pengaduan Permasalahan Pegawai Negeri Sipil
			Layanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Gaji Berkala
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Diklat ASN
			Layanan Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pns Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo
			Layanan Tes Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Layanan pendataan ormas / LSM
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Layanan Forum Kerukunan Umat Beragama
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Layanan Prosedur kewaspadaan dini di daerah
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan penganggaran
			Layanan pembukuan kas
			Layanan Penyusunan Laporan Rekapitulasi Dan Evaluasi Dak
			Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pns

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan manajemen barang daerah
			Layanan Penatausahaan Inventaris Barang Milik Daerah
			Layanan informasi tentang penyusutan barang milik daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan manajemen pajak daerah
			Layanan pengelolaan PBB
			Layanan pengelolaan BPHTB
			Layanan Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retibrusi Daerah
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan perencanaan daerah
			Layanan Data Perencanaan Pembangunan Desa
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan asistensi renja, renstra OPD
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Layanan penelitian dan inovasi
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan KK
			Layanan Penerbitan KTP
			Layanan Perpindahan Penduduk Wni Datang Dari Luar Negeri
			Layanan Pendaftaran Bagi Orang Asing Pemegang Itas Datang Dari Luar Wilayah Nkri
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Layanan penerbitan Akta Kelahiran
			Layanan penerbitan Akta Kematian

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
			Layanan Akta Pengangkatan Anak
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Pelayanan Administrasi Cetak Di Kecamatan
			Layanan kerjasama dan inovasi pelayanan
			Layanan pengembangan aplikasi kependudukan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Layanan pengelolaan profil kependudukan
			Layanan Pencatatan Biodata Wni Dalam Wilayah Nkri
			Layanan Pencatatan Biodata Orang Asing
18	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan sistem kesehatan daerah
			Layanan portal manajemen sistem informasi Dinas Kesehatan
18	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Layanan monitoring dan evaluasi puskesmas
18	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Layanan Pengurusan P-Irt
18	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Layanan pusat kebugaran
			Layanan pondok kesehatan pesantren
			Layanan Rumah Pemulihan Gizi
19	Dinas Ketenagakerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Layanan kartu tenaga kerja luar negeri
			Layanan AK1
			Layanan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
19	Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga	Layanan Pelatihan Kerja

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
		Kerja	
			Layanan BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas)
			Layanan Pendirian LPK
19	Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Layanan Pemagangan Tenaga Kerja
			Layanan Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang Ke Luar Negeri
			Layanan Pemberian rekomendasi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI
19	Dinas Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Layanan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
			Layanan pendaftaran Pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB)
			Layanan Perjanjian kerja (PKWTT)
19	Dinas Ketenagakerjaan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi
			Layanan Pembinan warga resettlemen
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pelayanan Masyarakat Terpadu Kecamatan
			Layanan data terbuka
			Layanan informasi dan profil Pemerintah Kabupaten Situbondo
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Aplikasi Informatika	Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Situbondo
			Layanan Operasional Sistem Keamanan/Firewall
			Layanan Manajemen Sub Domain
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Data Statistik Sektoral
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Layanan Pelatihan IKM
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengembangan UMKM	Layanan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Layanan Rekom Ijin Usaha
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelayanan Kemetrologian
			Layanan Pengawasan Kemetrologian

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pasar Seni dan Pusat Oleh-Oleh Khas Situbondo
			Layanan Pameran Produk Kerajinan Dan Industri Rumah Tangga
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengawasan Lingkungan
			Layanan Uji Lab Lingkungan
			Layanan Pemangkasan pohon
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Layanan pengendalian limbah B3
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Layanan pembuatan AMDAL
			Layanan pembuatan UKL-UPL
			Layanan Penerbitan Rekomendasi IPLC
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan sosialisasi lingkungan hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Layanan pengaduan lingkungan hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Layanan pengolahan sampah
23	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Pembinaan Kepemudaan
23	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Layanan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
23	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan Pengembangan Destinasi Pariwisata
23	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pemasaran Pariwisata	Layanan Promosi Pariwisata
23	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Layanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Layanan Pengendalian Dan Konservasi Sumber Daya Air
			Layanan Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Air Minum
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Air Limbah Rumah Tangga
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan Pembuatan Drainase
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Layanan Pembangunan Bangunan dan Gedung
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Layanan Preservasi Jalan dan Jembatan
			Layanan Pembinaan Jalan Dan Jembatan
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Jasa Kontruksi Pemberdayaan
			Layanan Pengawasan Kontruksi
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
	Permukiman		
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Layanan Perumahan
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan Permukiman Kumuh
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Layanan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa	Layanan pembinaan pengelolaan keuangan desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan monitoring keuangan desa
			Pelayanan dana desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh
			Layanan gerakan desa berdaya
			Layanan Badan Usaha Milik Desa
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Perlindungan Perempuan	Layanan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan
			Layanan pengaduan tindak langsung korban kekeraban perempuan dan anak

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Perlindungan Khusus Anak	Layanan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Layanan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Penyediaan Data di Kampung KB
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Layanan pokjanal Posyandu
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Layanan Promosi Penanaman Modal
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Investasi
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Layanan Ijin Operasional Lembaga/Sekolah
			Layanan Pengadaan Prasarana Pendidikan
			Layanan Pembangunan Sarana Pendidikan

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
			Layanan Dak Bop Paud
			Layanan Rekomendasi Bantuan Hibah Barangjasa Paud Dan Dikmas
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Fasilitasi Diklat Calon Kepala Sekolah
			Layanan Fasilitasi Asesmen Kepala Sekolah
			Layanan Fasilitasi Pengembangan PTK
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Layanan Inventarisasi Koleksi Museum
			Layanan Pengiriman Misi
			Layanan Pembentukan Pusat Seni
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Layanan penetapan cagar budaya
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Layanan Pembinaan Budaya
			Layanan Petik Laut
			Layanan Selamatan Bersih Desa
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Layanan Pendataan Kesenian Lokal
			Layanan Pembinaan Kesenian
			Layanan Fasilitasi Lomba Kesenian
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
29	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLLAJ)	Pelaporan infrastruktur jalan yang bermasalah
			Layanan cctv
			Layanan Jadwal Trasportasi
			Layanan pengelolaan rambu lalu lintas
29	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Jangkar
			Pelayanan Jasa Pelabuhan Besuki/Kalbut

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
			Layanan Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Jangkar
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Layanan Pendaftaran Anggota Perpustakaan
			Layanan Online Publik Akses Katalog
			Layanan E-Book
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Layanan Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno
			Layanan penelusuran naska kuno melestarikan aset sejarah (Penaku)
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Layanan Tanggap Terjamin Dalam Penyelarasan Pencatatan dan Pelaporan Arsip Aset (Tajin Palappa)
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Layanan Restorasi Arsip
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Pelepasan Variatas Padi Unggul
			Layanan Pengembangan Tanaman Porang
			Layanan Penyediaan Jenis Lantai Jemur
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Pembangunan Jaringan Irigasi
			Layanan Pembangunan Jalan Usaha Tani
			Layanan Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
			Layanan Penyediaan Pestisida
			Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	Layanan penyuluhan pertanian
			Layanan Rembuk Tani
			Layanan Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Penanganan Desa Rawan Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Pemantauan Jenis Komoditas Pangan Strategis
			Layanan Penanganan Lumbung Pangan
			Layanan Penyediaan Jenis Lumbung Pangan Masyarakat
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
			Layanan Pemberdayaan Nelayan Kecil
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil
			Layanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
			Layanan Pengembangan Teknologi Perbenihan Dan Budidaya Perikanan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Layanan pendataan hasil produksi perikanan
			Layanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
			Layanan Kampanye Gemar Makan Ikan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
			Layanan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
			Layanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Layanan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
			Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
			Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Layanan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
			Layanan Surat Keterangan Layak Bibit
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Penyuluhan Pertanian	Layanan Pengaduan dan konsultasi budidaya
			Layanan informasi penyuluhan
			Layanan Pembentukan Kelembagaan Peternakan
33	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberian Bantuan kepada Fakir Miskin
			Layanan Rekomendasi Sehati
33	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
33	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
33	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penanggulangan Bencana	Layanan Penanggulangan Bencana
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Call Center Pemadam dan Penyelamatan
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Layanan Penindakan Operasi Bersama Rokok Ilegal
			Layanan Pengaduan Masyarakat
			Layanan Pembinaan Fisik / Samapta
			Layanan Patroli Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
35	RSUD. dr. Abdoer Rahem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan rekam medis
			Layanan Pendaftaran Online
			Layanan Pembuatan Visum Et Repertum Kekerasan Perempuan Dan Anak
			Layanan Pembuatan Visum Et Repertum
35	RSUD. dr. Abdoer Rahem	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
36	Kecamatan Situbondo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Masyarakat
			Layanan Pengaduan Pelayanan
			Pelayanan Non Perizinan (Rekomendasi Keterlambatan Pendaftaran Nikah)
36	Kecamatan Situbondo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Situbondo
36	Kecamatan Situbondo	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Layanan Ketentraman dan Ketertiban
36	Kecamatan Situbondo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Layanan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan

Kode OPD	Nama OPD	Program RPJMD	Nama Layanan
36	Kecamatan Situbondo	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
37	Kecamatan Bungatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Layanan Pembuatan KTP Elektronik
			Layanan Pembuatan KK Elektronik
			Surat Keterangan harga tanah dan bangunan
37	Kecamatan Bungatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Bungatan
37	Kecamatan Bungatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
37	Kecamatan Bungatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
37	Kecamatan Bungatan	Tidak Ada Program Pendukung	Layanan informasi dan profil Kecamatan Bungatan
38	Puskesmas Situbondo	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada UPT	Layanan Penanganan Terpadu
			Layanan Terpadu Dbd
39	Puskesmas Bungatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan JUFE SEKSI (JUMAT MINUM FE SEMINGGU SEKALI)
			Pelayanan Vaksinasi
			Layanan rawat jalan dan inap
39	Puskesmas Bungatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
39	Puskesmas Bungatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tidak Ada Layanan Pendukung Eksisting
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Layanan Informasi Peringatan Dini
			Layanan kedaruratan dan bantuan logistik
			Layanan Perhitungan Kerugian
			Layanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 001	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan fasilitasi PAW DPRD	Bertujuan untuk pengelolaan PAW DPRD	Berfungsi untuk pemberian fasilitasi PAW DPRD	RAL 02.04 Aparatur Negara	Bagi Pakai OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 002	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan pelantikan bupati dan wakil bupati	Bertujuan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati	Berfungsi untuk pengadaan pelantikan bupati dan wakil bupati	RAL 02.04 Aparatur Negara	Bagi Pakai OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 003	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan koordinator pelaporan LPPD	Bertujuan untuk pengelolaan LPPD	Berfungsi untuk mengkoordinasi pelaporan LPPD	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagi Pakai OPD	Tidak Ada	Online	E-LPPD		A.E.001
L.E. 012	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan Rukyatul Hilal	Bertujuan untuk mengelola acara keagamaan	Berfungsi untuk pengadaan acara keagamaan	RAL 01.41 Agama	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 013	2	Bagian Kesejahtera	Layanan hibah pendidikan	Bertujuan untuk pemberian	Berfungsi untuk penyaluran	RAL 01.41 Agama	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		an Rakyat	agama	bantuan hibah	hibah							
L.E. 023	3	Bagian Hukum	Layanan Penyelesaian Kasus Hukum	Untuk memfasilitasi penyelesaian kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten situbondo	membantu menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAL 01.28 Hukum	Publik	Ada	Manual			
L.E. 024	3	Bagian Hukum	Layanan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	untuk memfasilitasi pembinaan kepada Kelompok keluarga sadar hukum di Kabupaten Situbondo	Memberikan pembinaan kepada Kelompok keluarga sadar hukum di Kabupaten Situbondo	RAL 01.28 Hukum	Publik	Ada	Manual			
L.E. 025	3	Bagian Hukum	Layanan Pelaporan Aksi Ham	Untuk memfasilitasi penyampaian laporan rencana Aksi HAM Kabupaten	melaporkan Rencana Aksi HAM yang dilaksanakan oleh PD pelaksana ke kemenkumha	RAL 01.28 Hukum	Publik	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				Situbondo	m							
L.E. 026	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Pembinanan BUMD	Bertujuan untuk Memenuhi tugas dari Amanat Permendagri 118/2017 Untuk meningkatkan kinerja dan layanan BUMD	Berfungsi untuk pemberian pembinaan kepada BUMD	RAL 01.04 Ekonomi	Publik	Ada	Manual			
L.E. 027	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	Menyelesaiakan Suatu Permasalahan Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	Berfungsi melakukan koordinasi di Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 028	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang	Menyelesaiakan Suatu Permasalahan Bidang Pertambangan dan Lingkungan	Berfungsi melakukan koordinasi di Bidang Pertambangan dan	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Daya Alam	Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Hidup	Lingkungan Hidup							
L.E. 038	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Fasilitasi Penyedia	Dilakukan untuk membantu penyedia dalam pembuatan akun LPSE	Berfungsi untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Ada	Online dan Manual	SIKAP		A.E.012
L.E. 039	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi	Dilakukan dengan pelaksanaan mediasi pada pelaku pengadaan yang memiliki sengketa	Berfungsi untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Tidak Ada	Online dan Manual	UKPBJ		A.E.015
L.E. 040	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan fasilitasi rencana umum pengadaan	Dilakukan dengan bimtek dan pendampingan untuk menginput data rencana umum pengadaan	Berfungsi untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Ada	Online dan Manual	SIRUP		A.E.013

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				(RUP)								
L.E. 041	6	Bagian Umum	Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan	untuk seluruh Fasilitasi Kerumahtanggaan	fasilitasi peralatan rumah tangga bupati dan wakil bupati	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 042	6	Bagian Umum	Layanan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan	Dilakukan untuk fasilitasi perjalanan dinas pimpanan yang meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	pembayaran perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 043	6	Bagian Umum	Layanan administrasi umum	Dilakukan untuk fasilitasi perkantoran di bagian umum	surat menyurat untuk disampaikan ke bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah (kelengkapan untuk admisnistrasi	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
					seperti buku)							
L.E. 049	7	Bagian Organisasi	Layanan Analisis Kinerja dan Beban Kerja	Membuatan Analisa jabatan dan Beban Kerja untuk Seluruh PD di Kabupaten Situbondo	Berfungsi untuk penentuan beban kerja	RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Seluruh OPD	Ada	Online dan Manual	SIMONA		A.E.022
L.E. 050	7	Bagian Organisasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja	Berfungsi untuk meningkatkan kinerja organisasi	RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Seluruh OPD	Ada	Online	E-Sakip	e-sakip.situbondokab.go.id	A.E.019
L.E. 051	7	Bagian Organisasi	Pelayanan terpadu bergerak	Bertujuan untuk memberikan pelayanan secara lebih mudah	Berfungsi untuk memberikan pelayanan secara terpadu	RAL 01.24 Pemerintahan daerah	Publik	Tidak Ada	Online	Simpel Puter Online		A.E.023
L.E. 052	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Komunikasi Pimpinan	Bertujuan untuk publikasi agenda pimpinan kepada wartawan maupun iklan	sebagai fasilitasi agenda pimpinan	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E. 053	8	Bagian Protokol	Layanan Keprotokolan	Bertujuan untuk Pendampingan	sebagai penyusunan	RAL 02.05 Kesekretari	Internal OPD	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		dan Komunikasi Pimpinan		agenda bupati, laporan agenda pimpinan	laporan agenda pimpinan	atan Negara						
L.E. 054	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Dokumentasi Agenda Pimpinan	Bertujuan untuk pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan yang berkaitan dengan media luar ruang	sebagai penyebarluasan agenda pimpinan	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E. 061	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan	Bertujuan untuk pelaporan keuangan	Berfungsi untuk penyusunan laporan keuangan	RAL 02.02 Keuangan	Seluruh OPD	Ada	Online dan Manual	SIRKA		A.E.078
L.E. 062	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyusunan Lkjip	Bertujuan untuk pelaporan kinerja	Berfungsi untuk penyusunan LKJIP	RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Seluruh OPD	Ada	Manual			
L.E. 063	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyusunan Rka Dpa	Bertujuan untuk perencanaan anggaran	Berfungsi untuk perencanaan anggaran	RAL 02.02 Keuangan	Seluruh OPD	Ada	Online	SIPD		A.E.106

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
					pemda							
L.E. 064	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	Bertujuan untuk pengelolaan alat kelengkapan dewan	Berfungsi untuk penyediaan alat kelengkapan DPRD	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 065	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran	Bertujuan untuk pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD	Berfungsi untuk fasilitasi pengawasan dan penganggaran	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 066	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Persidangan dan Risalah	Bertujuan utnuk pengadaan persidangan dan risalah	Berfungsi untuk penyelenggaraan persidangan dan risalah	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagi Pakai OPD	Tidak Ada	Online	JDIH Kabupaten Situbondo		A.E.007
L.E. 074	11	Inspektorat	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut	Dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan berdasarkan	Berfungsi untuk monitoring pelaksanaan rokomendasi	RAL 02.04 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Ada	Online dan Manual	E-MATRIK		A.E.030

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	dari hasil audit							
L.E. 075	11	Inspektorat	Layanan pengendalian pemerintah	pengawasan internal pemerintahaan	Berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah	RAL 02.04 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Ada	Online	SPIP		A.E.035
L.E. 076	11	Inspektorat	Layanan informasi Inspektorat	Bertujuan untuk penyebaran informasi kepada masyarakat	Berfungsi untuk publikasi informasi inspektorat	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Website Inspektorat		A.E.037
L.E. 077	11	Inspektorat	Layanan Penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan Apip	Bertujuan untuk pelaporan pengawasan APIP	Berfungsi untuk penyusunan pelaporan pengawasana PAIP	RAL 02.04 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Ada	Online dan Manual	E-MATRIK		A.E.030
L.E. 078	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberday	Layanan Informasi Seleksi CASN	Informasi terkait penerimaan, pendaftaran dan pengumuman hasil tes ASN akurat dan	Untuk memberikan informasi terkait Penerimaan , Pedaftaran	RAL 01.43 Informasi	Publik	Ada	Online	DIKSI	https://diksi.situbondokab.go.id/	A.E.041

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		a Manusia		mudah diakses	dan pengumuman hasil Tes ASN							
L.E. 079	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Kinerja Pegawai	Mengetahui Kinerja Pegawai	untuk pengisian kinerja PNS	RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Seluruh OPD	Ada	Online	E-Kinerja SIKALAP	https://ekinerja.situbondokab.go.id http://usulkp.situbondokab.go.id/	A.E.043
L.E. 080	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Data Kepegawaian	Mengetahui Biodata Pegawai	untuk Pelaporan kinerja dan dokumen pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Ada	Online	Milea Simpeg MySAPK DILAN	http://milea.situbondokab.go.id/	A.E.042
L.E. 081	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan KIP (Kartu Indentitas Pegawai)	Memberikan Kemudahan pengusulan layanan KIP	untuk layanan pembuatan kartu identitas pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Ada	Online dan Manual	KIP	Lokal Server	
L.E.	12	Badan	Layanan SLKS	Memberikan	Untuk	RAL 02.04	Seluruh	Ada	Online	SLKS	http://slks.	A.E.052

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
082		Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(Satya Lencana Karya Satya)	kemudahan pengusulan SLKS	rekomendasi usulan SLKS (Satya Lencana Karya Satya)	Aparatur Negara	OPD				situbondokab.go.id/	
L.E. 083	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Usulan Kartu Istri / Suami	Mempermudah penerbitan usulan Kartu Istri / Suami	Untuk usulan penerbitan Kartu Istri / Suami	RAL 02.04 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Ada	Online	Kartu Sip 1	http://kartusip1.situbondokab.go.id/login	A.E.046
L.E. 123	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Informasi Kegiatan	memberikan informasi tentang kegiatan PD	menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh bangkesbangpol	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Webiste BAKESBANGPOL	https://bakesbangpol.situbondokab.go.id/	A.E.056
L.E. 124	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Forum Kerukunan Umat Beragama	Brtujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama	Berfungsi untuk pengadaaan forum kerukunana umat	RAL 01.41 Agama	Publik	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
					beragama							
L.E. 125	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Prosedur kewaspadaan dini di daerah	Bertujuan untuk menjaga kewaspadaan dini daerah	Berfungsi untuk pengadaan kewaspadaan dini di daerah	RAL 01.29 Keamanan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 126	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	Bertujuan untuk pengelolaan ormas	Berfungsi untuk pengadaan pemberdayaan ormas	RAL 01.03 Kenegaraan	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 127	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan manajemen barang daerah	untuk mengelola barang milik daerah	Berfungsi untuk pendataan barang pemda	RAL 02.02 Keuangan	Seluruh OPD	Ada	Online	E-MASDA SIMBADDA		A.E.057
L.E. 128	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan penganggaran	Untuk menerima usulan Penganggaran	Berfungsi untuk penyusunan anggaran	RAL 02.02 Keuangan	Seluruh OPD	Ada	Online	SIPD		A.E.106
L.E. 129	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan pembukuan kas	untuk pembukuan pemasukan dan pengeluaran kas	Berfungsi untuk pengadaan pembukuan	RAL 02.02 Keuangan	Seluruh OPD	Tidak Ada	Online	SIRKA	SIRKA.situbondokab.go.id	A.E.078

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
					kas							
L.E. 130	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Penerimaan Uang Masuk	Untuk pengelolaan uang masuk	Berfungsi untuk pendataan uang masuk	RAL 02.02 Keuangan	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E. 131	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Penatausahaan Inventaris Barang Milik Daerah	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	Berfungsi untuk tata usaha BMD	RAL 02.02 Keuangan	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E. 166	15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan sosialisasi dan penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	Bertujuan untuk pengelolaan pajak daerah	Berfungsi untuk pengadaan sosialisasi kebijakan pajak	RAL 01.24 Pemerintahan daerah	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 167	15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bertujuan untuk pengelolaan pajak daerah	Berfungsi penyelesaian masalah keberatan pajak	RAL 01.04 Ekonomi	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 168	15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Pelaporan dan verifikasi	Bertujuan untuk pengelolaan pajak daerah	Berfungsi untuk verivikasi	RAL 01.04 Ekonomi	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
			Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		pajak daerah							
L.E. 180	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan RTLH	Bertujuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berfungsi untuk pendataan RTLH	RAL 01.20 Perumahan	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 181	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan perencanaan daerah	Bertujuan untuk pengembangan daerah	Berfungsi untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh OPD	Tidak Ada	Online	SIPD		A.E.106
L.E. 182	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan asistensi renja, renstra PD	Bertujuan untuk perencanaan daerah	Berfungsi untuk pemberian asistensi renja renstra	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 183	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Pelayanan Administrasi Cetak Di Kecamatan	Bertujuan untuk pelayanan administrasi kependudukan	Berfungsi untuk pelayanan administrasi kependudukan di	RAL 01.23 Kependudukan	Publik	Ada	Online	SIPESAT		A.E.107

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
					kecamatan							
L.E. 184	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan KK	Fasilitasi penerbitan KK bagi warga Kab Situbondo	membantu masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga	RAL 01.23 Kependudukan	Publik	Ada	Online dan Manual	SILAO, PETIR, SIAK	silao.situbondokab.go.id	A.E.083 A.E.085 A.E.087
L.E. 185	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan KTP	Sebagai fasilitasi penerbitan kartu tanda penduduk bagi warga Kab Situbondo	membantu masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan yaitu KTP-el	RAL 01.23 Kependudukan	Publik	Ada	Online dan Manual	SILAO, PETIR, SIAK	silao.situbondokab.go.id	A.E.083 A.E.085 A.E.087
L.E. 186	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan SKPWNI	Dilakukan untuk menerbitkan surat keterangan pindah keluar kabupaten atau provinsi	Membantu masyarakat dalam kepengurusan kepindahan keluar antar kabupaten atau provinsi	RAL 01.23 Kependudukan	Publik	Ada	Online dan Manual	SILAO, SIAK	silao.situbondokab.go.id	A.E.085 A.E.087
L.E.	18	Dinas	Layanan	Bertujuan untuk	Berfungsi	RAL 01.25	Publik	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
219		Kesehatan	pembentukan kader kesehatan remaja	peningkatan kesehatan remaja	untuk pembetukan kader remaja	Kesehatan						
L.E. 220	18	Dinas Kesehatan	Layanan pembentukan kader Saka bakti husada	Bertujuan untuk peningkatan kesehatan	Berfungsi untuk pembetukan kader	RAL 01.25 Kesehatan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 221	18	Dinas Kesehatan	Layanan ASMANTOGA (asuhan mandiri tanaman obat keluarga)	Bertujuan untuk peningkatan kesehatan keluarga	Berfungsi untuk pengadaan penyuluhan ASMANTOGA	RAL 01.25 Kesehatan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 222	19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan kartu tenaga kerja luar negeri	Bertujuan untuk menerbitkan KTKLN	Berfungsi untuk pendataan tenaga kerja luar negeri	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 223	19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan AK1	Penerbitan Kartu Pencari Kerja	Menerbitkan Kartu angkatan kerja (kartu kuning) bagi pencari kerja	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Publik	Ada	Online dan Manual	AK 1 Online	disnaker.situbondokab.go.id	A.E.093

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 224	19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan antar kerja	Layanan yang bertujuan untuk penempatan pencari kerja dan Ketenagakerjaan	Aplikasi yang berfungsi menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan pekerjaan	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Publik	Ada	Online dan Manual	Web Disnaker	disnaker.situbondokab.go.id	A.E.095
L.E. 240	19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang Ke Luar Negeri	Bertujuan untuk penerbitan izin pemagangan luar negeri	Berfungsi untuk pendataan pemagangan luar negeri	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 241	19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Transmigrasi	Untuk melengkapi administrasi dan meningkatan kredibilitas instansi guna mempermudah masyarakat meningkatkan kesejahteraan.	Berfungsi untuk pendataan transmigrasi	RAL 01.18 Transmigrasi	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 242	19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Unit layanan disabilitas (DLB)	Layanan bertujuan untuk memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dalma memperoleh layanan ketengakerjaan	Memberikan kemudahan layanan	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 243	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Masyarakat Terpadu Kecamatan	Mempermudah layanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan dan Kecamatan di Kab. Situbondo	Berfungsi untuk pemeberian pelayanan kependudukan terpadu	RAL 01.24 Pemerintahan daerah	Publik	Ada	Online	SIPESAT	sipesat.situbondokab.go.id	A.E.107
L.E. 244	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Data Statistik Sektoral	Bertujuan sebagai keterbukaan data	Berfungsi untuk publikasi data publik kepada masyarakat	RAL 01.43 Informasi	Publik	Ada	Online	PUSDA	pusda.situbondokab.go.id	A.E.103
L.E. 245	20	Dinas Komunikasi dan	Layanan data terbuka	Terwujudnya pelayanan informasi dan	Berfungsi untuk publikasi data	RAL 01.43 Informasi	Publik	Ada	Online	PPID	ppid.situbondokab.go.i	A.E.101

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Informatika		dokumentasi yang transparan serta akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	publik kepada masyarakat						d	
L.E. 278	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengawasan Kemetrologian	untuk mengetahui hasil pengawasan kemtrologian	mengetahui hasil pengawasan kemetrologian	RAL 01.06 Perdagangan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 279	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Penarikan Dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar	Untuk mengetahui hasil pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar	mengetahui hasil pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar	RAL 01.06 Perdagangan	Publik	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 280	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Monitoring Eksport Dan Import	Untuk mengetahui dan memantau jumlah eksport dan import	mengetahui jumlah eksport dan import	RAL 01.06 Perdagangan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 281	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pameran Produk Kerajinan Dan Industri Rumah Tangga	Untuk memasarkan produk kerajinan dan idustri rumah tangga	memfasilitasi keikutsertaan pameran	RAL 01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	Publik	Ada	Manual			
L.E. 282	22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan pengaduan lingkungan hidup	Dilakukan dengan menerima pengaduan terkait lingkungan hidup dan mencari solusi dari aduan yang diterima	Fungsi layanan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup sesuai dnegan pengaduan	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 283	22	Dinas Lingkungan	Layanan sosialisasi lingkungan	Dilakukan kepada pelaku usaha agar usaha	Fungsi layanan mengadakan	RAL 01.40 Lingkungan	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Hidup	hidup	yang dilakukan agar kegiatan usaha tidak mencemari lingkungan	sosisalisasi lingkungan hidup kepada masyarakat	Hidup						
L.E. 284	22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan pembuatan AMDAL	Dilakukan agar masyarakat memiliki ijin lingkungan sebelum memiliki ijin usaha	Fungsi layanan memberi pengetahuan mengenai izin lingkuan untuk usaha	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Publik	Ada	Manual			
L.E. 285	22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan pembuatan UKL-UPL	Dilakukan agar masyarakat memiliki ijin lingkungan sebelum memiliki ijin usaha	Fungsi layanan memberi pengetahuan mengenai izin lingkuan untuk usaha	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Publik	Ada	Manual			
L.E. 299	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pembinaan Kepemudaan	Melaksanakan pembinaan organisasi pemuda, pembinaan generasi muda, peningkatan	Berfungsi untuk penyeleggaraa n pembinaan pemuda	RAL 01.34 Pemuda	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				sarana dan prasana kepemudaan. Fokus pada pemuda pelopor, pasukan pengibar bendera dan pramuka.								
L.E. 300	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Dilakukan sebagai upaya Pengembangan Prestasi Olahraga melalui pembinaan yang dilakukan oleh Komite Olahraga (KONI) dengan anggaran yang dihibahkan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Berfungsi untuk penyeleggaraan pembinaan olahragawan	RAL 01.35 Olahraga	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 301	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi	Memberikan Rekomendasi Jasa Usaha	Berfungsi untuk pendataan	RAL 01.15 Pariwisata	Publik	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Olahraga	TDUP	Pariwisata	TDUP							
L.E. 302	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Retribusi Pemanfaatan Lahan	untuk memberikan Penyewaan aset dan Retribusi Pemanfaatan Lahan kepada masyarakat	Berfungsi untuk penagihan retribusi pemanfaatan lahan	RAL 01.04 Ekonomi	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 303	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Untuk melakukan Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam kepada msayarakat dan petani	Berfungsi untuk penyeleggaraan pembinaan terkait pengelolaan sumber daya air	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Internal OPD	Tidak Ada	Online dan Manual	E-Paksi		A.E.122
L.E. 304	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pemanfaatan Alat Berat	untuk penyewaat alat berat sebagai kepentingan operasional pada kabupaten	Berfungsi untuk pengadaan penyewaan alat berat bagi masyarakat	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Publik	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				situbondo	umum							
L.E. 333	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelayanan dana desa	Menginfentarisasi aset desa	Berfungsi untuk pemberian pembinaan pengelolaan keuangan desa	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Bagi Pakai OPD	Ada	Manual			
L.E. 334	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan monitoring keuangan desa	untuk melakukan monitaring span	Berfungsi untuk monitoring pengelolaan keuangan desa	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Bagi Pakai OPD	Tidak Ada	Online	omspan	spanint.kemenkeu.go.id	A.E.126
L.E. 335	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pemberian Penilaian Lomba Desa/Kelurahan	Bertujuan untuk peningkatan kuaitas desa/kelurahan	Berfungsi untuk penyelenggaraan lomba desa/kelurahan	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Bagi Pakai OPD	Ada	Manual			
L.E. 336	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan informasi dan profil DPMD	Bertujuan untuk pemberian informasi DPMD kepada masyarakat	Berfungsi untuk publikasi informasi DPMD	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Website DPMD		A.E.128
L.E.	26	Dinas	Layanan	Memberikan	menyajikan	RAL 01.43	Publik	Ada	Online	Website	dp3ap2kb.s	A.E.130

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
337		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	informasi dan profil DP3AP2KB	informasi terkait kegiatan yang dilakukan	informasi kegiatan	Informasi				DP3AP2KB Situbondo	itubondokab.go.id	
L.E. 338	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Inforgrafis Kekerasan Anak dan Perempuan	Memberkan informasi terkait jumlah kekerasan anak dan perempuan	penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online dan Manual	Situbondo PAKEM		A.E.108
L.E. 339	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Layanan pendampingan terhadap perempuan	Layanan yang bertujuan untuk memberikan pendampingan	Berfungsi sebagai aplikasi ini menghubungk	RAL 01.27 Pemberdayaan	Publik	Tidak Ada	Online dan Manual	Situbondo PAKEM		A.E.108

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	korban kekerasan	ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP)	an pengguna dengan keluarganya, sehingga dalam kondisi darurat, korban kekerasan dapat menggunakan mengirimkan sinyal GPS darurat untuk mendapatkan pertolongan dari keluarga yang telah dihubungkan dengan aplikasi. Selain itu aplikasi ini juga memberikan konten edukasi tentang pentingnya perlindungan	Perempuan						

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
					diri untuk mengurangi kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.							
L.E. 453	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Dilakukan untuk memberikan fasilitasi pelayanan perizinan terpadu yang meliputi pengkajian dan sosialiasasi perpres, review standar pelayanan perizinan	Berfungsi untuk menerbitakn surat perizinan atau rekomendasi	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Publik	Ada	Online	SIPINTER , SITAJIN		A.E.132 A.E.134
L.E. 454	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu	Layanan evaluasi perizinan	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan	Berfungsi untuk monev terhadap pelayanan	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Internal OPD	Tidak Ada	Online	SKEMA		A.E.135

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Satu Pintu			perizinan							
L.E. 455	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bertujuan untuk pengelolaan data penanaman modal	Berfungsi untuk penyediaan sistem informasi penanaman modal	RAL 01.12 Investasi	Internal OPD	Ada	Online	SITAJIN		A.E.134
L.E. 456	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Promosi Penanaman Modal	Dilakukan sebagai upaya promosi penanaman modal yang meliputi penyelenggaraan pameran, sosialisasi kebijakan dan penyebarluasan informasi potensi investasi daerah	Berfungsi untuk pelaksanaan promosi penanaman modal	RAL 01.12 Investasi	Publik	Ada	Online	SiPoint		A.E.133
L.E. 507	28	Dinas Pendidikan dan	Layanan disposisi surat DISPENDIKB	Bertujuan untuk pengelolaan surat menyurat	Berfungsi untuk disposisi surat	RAL 01.24 Pemerintahan daerah	Publik	Tidak Ada	Online	Sidul		A.E.152

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Kebudayaan	UD	dispendikbud	dispendikbud							
L.E. 508	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan pendataan penduduk buta aksara	Bertujuan untuk pendataan penduduk buta aksara	Berfungsi untuk pendataan penduduk buta aksara	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 509	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen akses hosting domain website sekolah	Bertujuan untuk pengelolaan hosting domain website sekolah	Berfungsi untuk pemberian akses hosting domain website sekolah	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Internal OPD	Tidak Ada	Online	Data Hosting		A.E.142
L.E. 534	29	Dinas Perhubungan	Pelayanan Jasa Pelabuhan Besuki/Kalbut (Pas Masuk Orang/Kendaraan)	Menertibkan pengendara yang melewati area pelabuhan yang hendak menyebrang pulau	melayani masyarakat yang akan melakukan penyebrangan antar pelabuhan	RAL 01.19 Transportasi	Publik	Ada	Manual			
L.E. 535	29	Dinas Perhubungan	Layanan pengelolaan rambu lalu lintas	Pemeliharaan di tiap titik Rambu & traffic apabila mengalami kerusakan atau	memelihara rambu lalu lintas agar tetap prima dan selalu	RAL 01.19 Transportasi	Internal OPD	Tidak Ada	Online	SIRALIN		A.E.165

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				pemeliharaan secara berkala	memberikan manfaat bagi pengguna jalan							
L.E. 536	29	Dinas Perhubungan	Layanan informasi dan profil DISHUB	Memberikan Infromasi terkait Profil Dinas	Memberikan Informasi publik terkait Profil Dinas Perhubungan	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Dishub PKB		A.E.163
L.E. 541	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Restorasi Arsip	Bertujuan untuk pengelolaan arsip	untuk mempermudah dalam proses restorasi dan perbaikan arsip desa Krawangan / Letter C	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 542	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno	Bertujuan untuk pengelolaan arsip	Pelayanan secara Online Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo	RAL 01.31 Pendidikan	Publik	Tidak Ada	Online	TALI PUSAR		A.E.169

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 543	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan penelusuran naskah kuno melestarikan aset sejarah (Penaku)	Bertujuan untuk pengelolaan naskah kuno	Melestarikan naska kuno yang ada di masyarakat melalui alih media	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Ada	Online	Penaku		
L.E. 544	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Tanggap Terjamin Dalam Penyelarasan Pencatatan dan Pelaporan Arsip Aset (Tajin Palappa)	Bertujuan untuk pengelolaan arsip	Mempermudah dan percepat pencarian arsip aset.	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Internal OPD	Ada	Online	Tajin Palappa		
L.E. 586	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Jenis Lantai Jemur	Bertujuan untuk pengelolaan jenis lantai jemur	Berfungsi untuk penyediaan jenis lantai jemur	RAL 01.07 Pertanian	Publik	Tidak Ada	Online	BIMA		A.E.171
L.E. 587	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan	Bertujuan untuk pengelolaan diversifikasi dan ketahanan	Berfungsi untuk peningkatan diversifikasi	RAL 01.07 Pertanian	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		Pangan	Ketahanan Pangan Masyarakat	pangan masyarakat	dan ketahanan pangan masyarakat							
L.E. 588	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan informasi dan profil DTPHP	Bertujuan untuk pemberian informasi dan profil dtphp kepada masyarakat	Berfungsi untuk publikasi informasi dan profil dtphp	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Website DTPHP		A.E.175
L.E. 589	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengaduan dan konsultasi budidaya	memberikan infromasi/pengaduan terkait pembudidaya ikan	memudahkan untuk pembudidaya ikan melaksanakan pengaduan/konsultasi terkait budidaya	RAL 01.10 Perikanan	Publik	Tidak Ada	Online	Website Dinas Peternakan dan Perikanan	https://diskan.situbondokab.go.id/	A.E.177
L.E. 590	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan informasi penyuluhan	Memberi informasi terkait penyuluhan	Memberikan informasi tentang kegiatan penyuluhan	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Website Dinas Peternakan dan Perikanan	https://diskan.situbondokab.go.id/	A.E.177
L.E.	32	Dinas	Layanan	Mengetahui	Untuk	RAL 01.10	Internal	Tidak Ada	Online	Sikembar	https://sik	A.E.176

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
591		Peternakan dan Perikanan	pendataan hasil produksi perikanan	jumlah produksi perikanan	Mengetahui jumlah produksi perikanan	Perikanan	OPD			Ikan	embarikan.situbondokab.go.id/login	
L.E. 623	33	Dinas Sosial	Layanan Pemberian Bantuan kepada Fakir Miskin	Bertujuan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Dilakukan dengan penyaluran Bantun Langsung Tunai	RAL 01.26 Sosial	Publik	Ada	Manual			
L.E. 624	33	Dinas Sosial	Layanan Rekomendasi Sehati	Bertujuan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Dilakukan untuk memberikan keringanan biaya masyarakat dalam pelayanan kesehatan	RAL 01.26 Sosial	Publik	Ada	Online	SIKS-NG		A.E.180
L.E. 625	33	Dinas Sosial	Layanan informasi dan profil dinsos	Bertujuan untuk pemberian informasi dan profil dinsos kepada masyarakat	Berfungsi untuk publikasi informasi dan profil dinsos	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Website Dinsos		A.E.181

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 645	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Pembinaan Fisik / Samapta	Bertujuan untuk penyelenggaraan pembinaan fisik / Samapta	Berfungsi untuk penyelenggaraan pembinaan fisik / Samapta	RAL 02.04 Aparatur Negara	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E. 646	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Patroli Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur	Bertujuan untuk pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur	Berfungsi untuk penyelenggaraan Patroli Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur	RAL 01.29 Keamanan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 647	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Penanggulangan Bencana	Bertujuan untuk penanganan kejadian bencana	Berfungsi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana	RAL 01.26 Sosial	Publik	Ada	Manual			
L.E. 648	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan rekam medis	Integrasi dan efektifitas pelayanan	menyajikan data rekam medis	RAL 01.25 Kesehatan	Internal OPD	Tidak Ada	online	V-Klaim BPJS Aplikasi Billing System	vclaim.BPJS-kesehatan.go.id	A.E.184

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
										SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem		
L.E. 649	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan Pendaftaran Online	efektifitas dan efisiensi	pendaftaran pasien	RAL 01.25 Kesehatan	Publik	Tidak Ada	Online	Whatsap p		
L.E. 650	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan penganggara n rumah sakit	Efektifitas perencanaan	pengelolaan penganggaran	RAL 01.25 Kesehatan	Internal OPD	Tidak Ada	Online	ERENGG AR	https://e-renggar.kemkes.go.id	A.E.187
L.E. 687	36	Kecamatan Situbondo	Pelayanan Non Perizinan (Rekomendas i Keterlambata n Pendaftaran Nikah)	Menerbitkan surat administrasi kependudukan berupa surat izin atau surat keterangan	Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Publik	Ada	Manual			
L.E. 688	36	Kecamatan Situbondo	Layanan informasi dan profil Kecamatan Situbondo	Bertujuan untuk pemberian informasi dan profil Kecamatan Situbondo kepada masyarakat	Berfungsi untuk publikasi informasi dan profil Kecamatan Situbondo	RAL 01.43 Informasi	Publik	Tidak Ada	Online	Website Kecamata n Situbond o		A.E.193

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
L.E. 689	36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Situbondo	Bertujuan untuk pengembangan masyarakat desa	Berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 690	37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Bungatan	Bertujuan untuk pengembangan masyarakat desa	Berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			
L.E. 691	37	Kecamatan Bungatan	Layanan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Bertujuan untuk menjaga ketentraman di wilayah kecamatan	Berfungsi untuk pelaksanaan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	RAL 01.29 Keamanan	Publik	Tidak Ada	Manual			
L.E. 692	37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan	Bertujuan untuk meningktakan kinerja	Berfungsi untuk memberikan pembinaan	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah	Internal OPD	Tidak Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
			Pemerintahan Desa	pemerintah desa	terhadap pemerintah desa	Tertinggal						
L.E.746	38	Puskesmas Situbondo	Layanan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pencegahan Penyakit tidak menular	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Berfungsi untuk menangani masalah kesehatan masyarakat pada tingkat pertama	RAL 01.25 Kesehatan	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E.747	38	Puskesmas Situbondo	Layanan Penyuluhan untuk Kesehatan Masyarakat	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Berfungsi untuk menangani masalah kesehatan masyarakat pada tingkat pertama	RAL 01.25 Kesehatan	Publik	Ada	Online	Website Puskesmas Situbondo		A.E.202
L.E.748	38	Puskesmas Situbondo	Layanan informasi dan profil Puskesmas Situbondo	Bertujuan untuk pemberian informasi dan profil Puskesmas Situbondo kepada	Publikasi ke masyarakat terkait informasi dan profil puskesmas	RAL 01.43 Informasi	Publik	Ada	Online	Website Puskesmas Situbondo		A.E.202

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
				masyarakat								
L.E. 749	39	Puskesmas Bungatan	Layanan informasi dan profil Puskesmas Bungatan	Bertujuan untuk pemberian informasi dan profil Puskesmas Bungatan kepada masyarakat	Publikasi ke masyarakat terkait informasi dan profil puskesmas	RAL 01.43 Informasi	Publik	Ada	Online	Website Puskesmas Bungatan	pkmbungatan.situbondokab.go.id	A.E.203
L.E. 750	39	Puskesmas Bungatan	Layanan JUFE SEKSI (JUMAT MINUM FE SEMINGGU SEKALI)	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Berfungsi untuk menangani masalah kesehatan masyarakat pada tingkat pertama	RAL 01.25 Kesehatan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 751	39	Puskesmas Bungatan	Pelayanan Vaksinasi	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Berfungsi untuk menangani masalah kesehatan masyarakat pada tingkat pertama	RAL 01.25 Kesehatan	Publik	Ada	Manual			
L.E. 766	40	Badan Penanggula	Layanan Rehabilitasi	Bertujuan untuk pemulihan	Berfungsi untuk	RAL 01.26 Sosial	Publik	Ada	Manual			

ID	Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Target Layanan	Katersediaan SOP	Metode Layanan	Nama Aplikasi	Alamat Aplikasi	ID Metadata Terkait
		ngan Bencana Daerah	Dan Rekonstruksi	tempat yang terdampak bencana	penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi tempat terdampak bencana							
L.E. 767	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	Bertujuan untuk pengelolaan kebutuhan pascabencana	Berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pascabencana	RAL 01.26 Sosial	Internal OPD	Ada	Manual			
L.E. 768	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan informasi dan profil BPBD	Bertujuan untuk pemberian informasi dan profil BPBD kepada masyarakat	Berfungsi untuk publikasi informasi dan profil BPBD	RAL 01.43 Informasi	Publik		Online	Website BPBD		A.E.206

Lampiran 6.1 Daftar Aplikasi SPBE

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	A.E.001	E-LPPD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	A.E.002	E-SPM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	A.E.003	Musabaqah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Bina Mental Spiritual
3	Bagian Hukum	A.E.004	ecourt	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum
3	Bagian Hukum	A.E.005	E-Legaldrafting	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Hukum, Sub Bagian Perundang-Undangan
3	Bagian Hukum	A.E.006	E-Perda	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sub Bagian Perundang-undangan
3	Bagian Hukum	A.E.007	JDIH Kabupaten Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Hukum, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
3	Bagian Hukum	A.E.008	Serambi KSP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bappeda
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.009	e-Katalog	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Pengelolaan Pengadaan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.010	e-learning LKPP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	LKPP
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.011	PPSDM LKPP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	LKPP
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.012	SIKAP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang LPSE
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.013	SIRUP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Subbag LPSE
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.014	SPSE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Pengelolaan pengadaan
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	A.E.015	UKPBJ	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6	Bagian Umum	A.E.016	e-Berkah	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Umum
6	Bagian Umum	A.E.017	SIMDA	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Umum
6	Bagian Umum	A.E.018	Website Setda	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Umum

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
7	Bagian Organisasi	A.E.019	E-Sakip	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sub Kordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi
7	Bagian Organisasi	A.E.020	KOVABLIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Organisasi
7	Bagian Organisasi	A.E.021	Silaksa	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sub Kordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana
7	Bagian Organisasi	A.E.022	SIMONA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan
7	Bagian Organisasi	A.E.023	Simpel Puter Online	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Organisasi
7	Bagian Organisasi	A.E.024	SINOVIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Organisasi
7	Bagian Organisasi	A.E.025	SIPP Kemenpan RB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sub tatalaksana dan pelayanan publik
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A.E.026	Website DPRD	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11	Inspektorat	A.E.027	AlaKO	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Inspektorat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
11	Inspektorat	A.E.028	Aplikasi Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Inspektorat
11	Inspektorat	A.E.029	E-Auditee BPK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tim Pengawas
11	Inspektorat	A.E.030	E-MATRIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Analisis dan Evaluasi beserta Tim Tindak Lanjut APIP
11	Inspektorat	A.E.031	E-SKBT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang Analisis dan Evaluasi
11	Inspektorat	A.E.032	KLIK-ON	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Inspektorat
11	Inspektorat	A.E.033	Lapor	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tim pengawas (Sesuai wilayah pengawasan)
11	Inspektorat	A.E.034	SISWASKEUDES	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tim pengawas
11	Inspektorat	A.E.035	SPIP	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Inspektorat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
11	Inspektorat	A.E.036	WBS	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Inspektorat
11	Inspektorat	A.E.037	Website Inspektorat	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Inspektorat
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.038	ABANGSITUR	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.039	Apresiasi	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.040	Arek BKN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.041	DIKSI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.042	Dilan	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.043	e-Kinerja	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.044	Emutasi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Mutasi dan Kepangkatan
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.045	IPASN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.046	Kartu Sip 1	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.047	Milea	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.048	MySAPK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh Bidang
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.049	SIJAKA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.050	SIKALAP	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan untuk sementara	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Mutasi dan Kepangkatan
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.051	Simpeg	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.052	SLKS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Data ASN
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	A.E.053	Usulkp	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Mutasi dan Kepangkatan
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.054	SIORMAS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Ketahanan
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.055	Sriti	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Poldagri
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.056	Webiste BAKESBANGPOL	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bagian Umum
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.057	E-MASDA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aset
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.058	SIMBADDA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aset
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.059	SIPERANG	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	akutansi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.060	SP2D ONLINE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Perbendaharaan
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.061	E-BPHTB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.062	E-PDL	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.063	INTEGRASI BPN / BAPENDA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.064	PAJAK KATERING ONLINE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.065	Simpada	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.066	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PAJAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.067	SITERAS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.068	VTAX	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.069	WEB SERVICE PEMBAYARAN BPHTB DAN PDL	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
								PENDAPATAN DAERAH
15	Badan Pendapatan Daerah	A.E.070	WEB SERVIS PEMBAYARAN PBB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.071	DTD-AKP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.072	Lapor Pak	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.073	PETIS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Penelitian dan Pengembangan
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.074	SIAPP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Perekonomian dan SDA
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.075	SIBESTI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.076	SID	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.077	SIPAM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.078	SIRKA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.E.079	Website Bappeda	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekretariat
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.080	ALADIN	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.081	BALADA AKHIR	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	PDIP
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.082	KENDEDES	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Pelayanan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.083	PETIR	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.084	PEVITA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Pelayanan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.085	SIAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PIAK - Seksi SIAK
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.086	SIKANDA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PDIP
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.087	SILAO	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Pencatatan sipil, pendaftaran penduduk
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.088	Website Dukcapil	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Kesehatan	A.E.089	E Booking	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat - Subbag Sungraminfo
18	Dinas Kesehatan	A.E.090	SIEMON	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat - Subbag Sungraminfo
18	Dinas Kesehatan	A.E.091	Sikda	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat - Subbag Sungraminfo

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
18	Dinas Kesehatan	A.E.092	SIMESSEM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat - Subbag Sungraminfo
19	Dinas Ketenagakerjaan	A.E.093	AK 1 Online	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Ketenagakerjaan
19	Dinas Ketenagakerjaan	A.E.094	SISKOTKLN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Ketenagakerjaan
19	Dinas Ketenagakerjaan	A.E.095	Web Disnaker	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	kominfo
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.096	Aplikasi dari BSSN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.097	APLIKASI RPMT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.098	E-Surat	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang TIK dan Bidang Persandian
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.099	Jarkomdat Network Monitoring	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.100	KIM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.101	PPID	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.102	Quickcount	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.103	Satu Data Kabupaten Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Persandian
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.104	SDTIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.105	SINEWS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.106	SIPD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.107	SIPESAT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.108	Situbondo PAKEM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.109	SP4N Lapor	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.110	Web Covid	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.111	Website Resmi Pemerintah Kabupaten Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.112	BPUM Online	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Usaha Mikro
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.113	SIDT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Usaha Mikro
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.114	Sikembarkepo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Pengembangan Perdagangan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.115	SIMKU	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.116	SIMPELDAGIN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Perdagangan dan Sekretariat
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.117	SiPENAMAS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekertariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	A.E.118	SISDAMALI	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.E.119	SIPESAH	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas - Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.E.120	Website DLH	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas - Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	A.E.121	Website Layanan TIC	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan untuk sementara	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	A.E.122	E-Paksi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	A.E.123	SIMBG	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	A.E.124	SIPDJD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A.E.125	data desa center	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A.E.126	omspan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A.E.127	Siskeudes	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A.E.128	Website DPMD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	A.E.129	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	kominfo
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	A.E.130	Website DP3AP2KB Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana							
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.131	OSS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	PTSP
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.132	SIPINTER	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	PTSP
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.133	SiPoint	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang PM
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.134	SiTajin	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	PTSP

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.135	SKEMA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang DIP
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.136	Website DPMPTSP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	PTSP
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.137	Aplikasi Pengaduan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.138	Aplikasi Web Sekolah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Lembaga/Sekolah Sekreatiat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.139	ARKAS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang DIKDAS dan PAUD DIKMAS
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.140	Buta Aksara	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	bidang PNF - dikmas sekretariat - sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.141	DAPODIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Pusat
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.142	Data Hosting	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	dispendikbud dan lembaga

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.143	E Lapor	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	lembaga/sekolah dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.144	e-Rapor	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.145	MASKAS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang DIKDAS dan PAUD DIKMAS
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.146	Padatiweb	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.147	PMP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.148	PPDB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	bidang dikdas - SMP Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.149	Sarpras	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Dikdas - Sarpras Bidang PNF - Sarpras Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.150	Sebaya	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.151	SiBudi	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	dispendikbud

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.152	Sidul	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekretariat - Umum Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.153	Simpadi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	BIdang PNF - Paud Bidang Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.154	Sinabung	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.155	Singgul	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	bidang pnf - dikmas sekretariat - sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.156	Sipagu	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PPTK - Seksi PPTK TK Bidang PPTK - Seksi PPTK SD Bidang PPTK - Seksi PPTK SMP Bidang Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.157	Sisgur	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PPTK - Seksi PPTK TK Bidang PPTK - Seksi PPTK SD Bidang PPTK - Seksi PPTK SMP Bidang Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.158	SISPENA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang DIKDAS dan PAUD DIKMAS
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.159	Sistem Absensi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PPTK - Seksi PPTK TK Bidang PPTK - Seksi PPTK SD Bidang

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
								PPTK - Seksi PPTK SMP Bidang Sekretariat - Sungram
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.160	VERVAL-PTK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang PPTK
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.161	Web file (cloud)	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	dispendikbud
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A.E.162	Website Dispendik	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekretariat, PPTK, Dikdas, PNF Kebudayaan
29	Dinas Perhubungan	A.E.163	Dishub PKB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
29	Dinas Perhubungan	A.E.164	RTTMC	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang Sarana dan Prasana Perhubungan
29	Dinas Perhubungan	A.E.165	SIRALIN	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Perhubungan
29	Dinas Perhubungan	A.E.166	Website DISHUB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	sekretariat
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.167	E-Pusda Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.168	INLISLITE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.169	TALI PUSAR	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.170	Website Perpus Arsip	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A.E.171	BIMA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang tanaman pangan, bidang perkebunan, bidang ketahanan pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A.E.172	E-DBHCHT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang perkebunan, hortikultra, tanaman pangan dan penyuluhan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A.E.173	E-RDKK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang penyuluhan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A.E.174	SIMLUHTAN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang penyuluhan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A.E.175	Website DTPHP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Kominfo
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	A.E.176	Sikembar Ikan	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	A.E.177	Website Dinas Peternakan dan Perikanan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidang penyusun program dan kegiatan
33	Dinas Sosial	A.E.178	Aplikasi Cek Bansos	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	PEMBERDAYAAN SOSIAL
33	Dinas Sosial	A.E.179	SEHATI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	PEMBERDAYAAN SOSIAL
33	Dinas Sosial	A.E.180	SIKS-NG	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Pemberdayaan Sosial
33	Dinas Sosial	A.E.181	Website Dinsos	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekretariat
34	Satuan Polisi Pamong Praja	A.E.182	siroleg.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Trantibum
34	Satuan Polisi Pamong Praja	A.E.183	Website Satpol PP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekertariat
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.184	Aplikasi Billing System	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seksi Penunjang non Medis
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.185	Aplikasi Persediaan non farmasi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seksi penunjang non medis

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.186	ASPAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RSUD dr. Abdoer Rahem
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.187	ERENGGAR	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Penunjang
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.188	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Penunjang, bidang pelayanan, bidang keuangan
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.189	SIRS ONLINE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RSUD dr. Abdoer Rahem
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.190	Sistem Persediaan Farmasi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seksi Penunjang non Medis
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	A.E.191	V-Klaim BPJS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bidang Penunjang, bidang pelayanan, bidang keuangan
36	Kecamatan Situbondo	A.E.192	TTE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Sekertariat
36	Kecamatan Situbondo	A.E.193	Website Kecamatan Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekertariat
37	Kecamatan Bungatan	A.E.194	Website Kecamatan Bungatan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Kecamatan Bungatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
38	Puskesmas Situbondo	A.E.195	ALRECORD ANTIGEN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	PJ Laboraturium
38	Puskesmas Situbondo	A.E.196	ASIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	PJ PTM
38	Puskesmas Situbondo	A.E.197	DPI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	PJ Farmasi
38	Puskesmas Situbondo	A.E.198	E-CLAIM	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Puskesmas Situbondo
38	Puskesmas Situbondo	A.E.199	P-CARE E-Claim	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	PJ pelayanan pasien
38	Puskesmas Situbondo	A.E.200	P-Care VAKSIN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	PJ Imunasasi
38	Puskesmas Situbondo	A.E.201	SITB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	PJ TB
38	Puskesmas Situbondo	A.E.202	Website Puskesmas Situbondo	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan
39	Puskesmas Bungatan	A.E.203	Website Puskesmas Bungatan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tata Usaha

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Unit Operasional Teknologi
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.E.204	DAKENA	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Bidang Pusat Pengendalian dan Operasional BPBD
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.E.205	Logistik Covid-19	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.E.206	Website BPBD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Sekretariat

Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 001	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	E-LPPD	milik kemendragri sebagai aplikasi untuk mengelola semua urusan yang dilaksanakan oleh kabupaten (32 urusan)	pencatatan dan pelaporan	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.003 D.E.001
A.E. 002	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	E-SPM	pengelolaan 6 urusan wajib pelayanan	pencatatan dan pelaporan	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.002
A.E. 003	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Musabaqah	Musabaqah.com	Aplikasi untuk pendaftaran lomba MTQ tingkat provinsi JATIM	RAA.01.01	Bag.kesra	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.008 D.E.008
A.E. 004	3	Bagian Hukum	ecourt	Aplikasi untuk mendukung Layanan Bantuan Hukum ASN	Aplikasi untuk mendukung Layanan Bantuan Hukum ASN	RAA.01.01	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.019
A.E. 005	3	Bagian Hukum	E-Legaldrafting	Aplikasi untuk mendukung Layanan Penyusunan Peraturan Daerah Layanan Peraturan Bupati	Aplikasi untuk mendukung Layanan Penyusunan Peraturan Daerah Layanan Peraturan Bupati	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.016; L.E.017
A.E. 006	3	Bagian Hukum	E-Perda	Aplikasi untuk mendukung Layanan Penyusunan Peraturan Daerah Layanan Peraturan Bupati	Aplikasi untuk mendukung Layanan Penyusunan Peraturan Daerah Layanan Peraturan Bupati	RAA.01.01	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.016; L.E.017
A.E. 007	3	Bagian Hukum	JDIH Kabupaten Situbondo	Aplikasi berbasis website pencarian Dokumen Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Dokumen Hukum lainnya bagi OPD dan masyarakat	membantu OPD dan Masyarakat dalam mendapatkan dokumen produk hukum daerah dan informasi hukum yang diinginkan	RAA.01.01	publik	Website	Server JDIH KABUPATEN SITUBONDO	Lisensi	-	-	Mandiri PD	L.E.022; L.E.066; L.E.067 D.E.010; D.E.011; D.E.012
A.E. 008	3	Bagian Hukum	Serambi KSP	Secure Web Portal Kantor Staf Presiden Republik Indonesia	Secure Web Portal Kantor Staf Presiden Republik Indonesia	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 009	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	e-Katalog	Digunakan untuk melakukan transaksi melalui metode e-purchasing	sebagai fasilitasi transaksi	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait Penyedia	Website	pusat	pusat	pusat	pusat	Pusat	L.E.036 D.E.022; D.E.024
A.E. 010	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	e-learning LKPP	e-learning LKPP adalah sistem informasi yang digunakan untuk peningkatan kompetensi	Sistem informasi untuk peningkatan kompetensi	RAA.02.02	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.037 D.E.020
A.E. 011	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PPSDM LKPP	PPSDM LKPP adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengembangan dan pembinaan UKPBJ	Mempermudah pengembangan dan pembinaan UKPBJ	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.037 D.E.020
A.E. 012	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIKAP	Digunakan untuk menyampaikan informasi terkait kinerja penyedia	Sebagai informasi penilaian (rating) penyedia yang dinilai oleh PPK berdasarkan riwayat pengadaannya	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait Penyedia	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.038 D.E.021
A.E. 013	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIRUP	Aplikasi yang berisi rencana pengadaan	Sebagai aplikasi pengelolaan data rencana umum pengadaan	RAA.01.02	internal OPD OPD terkait	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.040 D.E.023
A.E. 014	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	Digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa secara langsung, seleksi atau tender, proses pencatatan non tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat	Sebagai fasilitasi pengadaan barang dan jasa	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.036 D.E.020
A.E. 015	5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	UKPBJ	Sistem Informasi yang digunakan untuk Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Sistem Informasi yang digunakan untuk Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	RAA.01.02	internal OPD OPD terkait Penyedia	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.037; L.E.039

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
					Pengadaan Barang/Jasa									
A.E. 016	6	Bagian Umum	e-Berkah	Aplikasi ini merupakan aplikasi pengajuan Hibah dan Bansos baik dari perorangan maupun lembaga di wilayah Kabupaten Situbondo Secara Online.	Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan Hibah dan Bansos serta seluruh proses pengajuan dan realisasi anggaran untuk Hibah Bansos dapat terlihat dan diawasi secara langsung oleh masyarakat.	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.046 D.E.025
A.E. 017	6	Bagian Umum	SIMDA	Aplikasi untuk mendukung Layanan SIMDA	Aplikasi untuk mendukung Layanan SIMDA	RAA.01.02	Internal OPD	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	
A.E. 018	6	Bagian Umum	Website Setda	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	Media publikasi Setda	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	
A.E. 019	7	Bagian Organisasi	E-Sakip	Sistem Informasi yang digunakan dalam penginputan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD Kab, Renstra OPD, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Pengembangan Kinerja Triwulan, LKIP) dan pelaporan	Memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja	RAA.01.02	internal OPD OPD terkait	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.050 D.E.036
A.E. 020	7	Bagian Organisasi	KOVABLIK	Aplikasi untuk mendukung Layanan fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Aplikasi untuk mendukung Layanan fasilitasi peningkatan pelayanan publik	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.048 D.E.035
A.E. 021	7	Bagian Organisasi	Silaksa	Sistem Informasi yang menyediakan data	Menyediakan data publikasi pelayanan	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.047 D.E.034

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				publikasi pelayanan publik dan dokumen ketatalaksanaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo	publik dan dokumen ketatalaksanaan									
A.E. 022	7	Bagian Organisasi	SIMONA	Sistem Informasi yang bertujuan dalam pembuatan Analisa jabatan dan Beban Kerja untuk Seluruh OPD di Kabupaten Situbondo	Membuatan Analisa jabatan dan Beban Kerja untuk Seluruh OPD di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD OPD terkait publik	Website	Kemenpan	Kemenpan	PHP	Kemenpan	Pusat	L.E.049 D.E.037; D.E.038
A.E. 023	7	Bagian Organisasi	Simpel Puter Online	SIMPLE PUTER Online memuat kegiatan pelayanan terpadu dari unit pelayanan serta informasi jadwal mobile/bergerak yang dilaksanakan 2 minggu sekali ditempat yang berbeda beda.	SIMPLE PUTER Online menginfokan kepada masyarakat terkait kegiatan pelayanan terpadu dari unit pelayanan serta informasi jadwal mobile/bergerak yang dilaksanakan 2 minggu sekali ditempat yang berbeda beda.	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.051
A.E. 024	7	Bagian Organisasi	SINOVIK	Aplikasi untuk mendukung Layanan fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Aplikasi untuk mendukung Layanan fasilitasi peningkatan pelayanan publik	RAA.01.01	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.048 D.E.035
A.E. 025	7	Bagian Organisasi	SIPP Kemenpan RB	Sistem Informasi Pelayanan Publik: Mempublikasikan jenis layanan, alur, persyaratan, tarif/ biaya, dan komponen SP SOP pada unit pelayanan publik.	Sebagai media publikasi	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait publik	Website	Pusat kemenpanRB	Pusat kemenpanRB	Pusat kemenpanRB	Pusat kemenpanRB	Pusat	L.E.047; L.E.048 D.E.034; D.E.035
A.E. 026	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Website DPRD	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	Media publikasi	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.068
A.E.	11	Inspektorat	AlaKO	APLIKASI PELAYANAN	SEBAGAI MEDIA	RAA.01.01	internal OPD	Website	-	-	-	-	Tidak	L.E.070

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
027				KONSULTASI ONLINE Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	PELAYANAN KONSULTASI ONLINE Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo		OPD terkait						ada informasi	D.E.073
A.E. 028	11	Inspektorat	Aplikasi Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	Aplikasi untuk melakukan pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Inspektorat	Mempermudah proses pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan	RAA.01.01	OPD terkait	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	
A.E. 029	11	Inspektorat	E-Auditee BPK	Mengetahui tindak lanjut pemeriksaan BPK	Sebagai fasilitasi pemantauan tindak lanjut	RAA.01.02	OPD terkait	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.072 D.E.069
A.E. 030	11	Inspektorat	E-MATRIK	E-Matrik merupakan aplikasi untuk keperluan tindak lanjut temuan sehingga memudahkan dalam rekapitulasi data temuan	Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan ikhtisar	RAA.01.02	OPD terkait	Website	Development	Open Source	php	Laravel	Mandiri PD	L.E.074 D.E.067
A.E. 031	11	Inspektorat	E-SKBT	Aplikasi E-SKBT adalah aplikasi berbasis website untuk melakukan permohonan penerbitan surat keterangan bebas temuan	Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (salah satu syarat untuk pengajuan mutasi)	RAA.02.02	internal OPD OPD terkait	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.069 D.E.072
A.E. 032	11	Inspektorat	KLIK-ON	Klik On	Mempermudah layanan pengaduan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	Publik	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.071
A.E. 033	11	Inspektorat	Lapor	Memfasilitasi pengaduan terkait pelaksanaan pemerintahan	sebagai media pengaduan	RAA.01.01	OPD terkait	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.071; L.E.173; L.E.247; L.E.505 D.E.068; D.E.128; D.E.260
A.E.	11	Inspektorat	SISWASKEU	Digunakan untuk	Sebagai fasilitasi	RAA.01.02	OPD terkait	Desktop	BPKP	BPKP	BPKP	BPKP	Pusat	L.E.072

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
034			DES	melakukan pengawasan keuangan desa	pengawasan keuangan desa				(Pusat)	(Pusat)	(Pusat)	(Pusat)		D.E.070
A.E. 035	11	Inspektorat	SPIP	Aplkasi untuk mendukung Layanan pengendalian pemerintah	Aplkasi untuk mendukung Layanan pengendalian pemerintah	RAA.01.02	Internal OPD	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.075
A.E. 036	11	Inspektorat	WBS	Whistle Blowing System: Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat untuk pihak yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan Kabupaten Situbondo.	Mempermudah pelaporan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan Kabupaten Situbondo.	RAA.01.01	internal OPD OPD terkait	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.071
A.E. 037	11	Inspektorat	Website Inspektorat	Website profil Inspektorat	Portal Website Inspektorat yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, pengaduan dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.076
A.E. 038	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	ABANGSITUR	Aplikasi Pengembangan Kompetensi Aparatur: Aplikasi yang membantu pendataan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Kabupaten Situbondo	Mempermudah pendataan pengembangan kompetensi aparatur di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	
A.E. 039	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Apresiasi	Apresiasi merupakan Aplikasi pencatatan kehadiran ASN yang telah diterapkan di unit-unit kerja Kabupaten Situbondo.	Membantu pencatatan kehadiran ASN Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	Open Source	Python	Django	Mandiri PD	L.E.113
A.E. 040	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Arek BKN	Aplikasi pengusulan K3	Aplikasi pengusulan K3	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Deployment	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.084 D.E.074

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
		Sumberdaya Manusia												
A.E. 041	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	DIKSI	Aplikasi berbasis web yang menampilkan dasbor informasi dan seleksi CASN	Sebagai media Informasi dan Seleksi CASN	RAA.01.01	OPD terkait	Website	Deployment	Open Source	PHP	WordPress	Mandiri PD	L.E.078 D.E.083
A.E. 042	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Dilan	Dashboard Informasi dan Laporan ASN: Dashboard informasi data ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo	Sumber informasi data ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	internal OPD	Website	-	-	-	CI	Mandiri PD	L.E.080
A.E. 043	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	e-Kinerja	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja	Membantu proses analisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.079
A.E. 044	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Emutasi	Sistem informasi dalam pengajuan mutasi pegawai di Kabupaten Situbondo	Mempermudah pengajuan mutasi pegawai di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.087
A.E. 045	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	IPASN	Aplikasi pendataan indeks profesionalitas pegawai	Mendukung Layanan Indeks Profesionalitas ASN	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.086
A.E. 046	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kartu Sip 1	Aplikasi pengusulan K3	Mendukung Layanan Usulan Kartu Istri / Suami	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.083 D.E.074

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 047	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Milea	Laporan Kinerja Pegawai dan Data Kepegawaian	Sebagai rekapitulasi kinerja pegawai dan penyimpanan data pegawai	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Pihak Ketiga	L.E.080; L.E.475 D.E.026; D.E.074; D.E.075; D.E.076; D.E.077; D.E.078; D.E.079; D.E.080; D.E.081
A.E. 048	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	MySAPK	Aplikasi pendataan kepegawaian	Mendukung Layanan Data Kepegawaian	RAA.01.02	Internal OPD	Website dan Mobile	Staging	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.080 D.E.074
A.E. 049	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIJAKA	Aplikasi penjadwalan	Mendukung Layanan Jadwal Kepala BKPSDM	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.089
A.E. 050	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIKALAP	Sistem Aplikasi Pelaporan Sasaran Kerja Pegawai membantu pelaporan SKP yakni kepanjangan dari Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan salah satu unsur Penilaian Prestasi Kerja ASN yang wajib disusun oleh seluruh ASN sesuai dengan rencana kerja organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan langsung	Mempermudah proses pelaporan SKP	RAA.01.02	internal OPD	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.079
A.E. 051	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Simpeg	Aplikasi kepegawaian	Mendukung Layanan Data Kepegawaian	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.080 D.E.074

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
		Manusia												
A.E. 052	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SLKS	Aplikasi untuk pengusulan penghargaan satya lencana	Mendukung Layanan SLKS (Satya Lencana Karya Satya)	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.082 D.E.074
A.E. 053	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Usulkp	Aplikasi Usulan Kenaikan Pangkat untuk mengusulkan kenaikan pangkat pegawai di Kabupaten Situbondo	Membantu pengusulan naik pangkat pegawai di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.085 D.E.080
A.E. 054	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIORMAS	Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan merupakan sarana online dalam melakukan Aktivitas dan Interaksi Antara ORMAS dengan Pemerintah	Mempermudah pelaksanaan aktivitas interkasi ormas dengan pemerintah	RAA.01.01	internal OPD	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.122 D.E.084
A.E. 055	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sriti	Sistem Informasi Ijin Penelitian merupakan aplikasi dalam menyalurkan layanan permohonan surat ijin rekomendasi penelitian diwilayah Kabupaten Situbondo secara online	Mempermudah penyaluran layanan permohonan surat ijin rekomendasi penelitian	RAA.01.01	internal OPD publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.121 D.E.085
A.E. 056	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Webiste BAKESBANGPOL	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	Media publikasi	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.123
A.E. 057	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-MASDA	E-Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Situbondo	E-Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	-	Pihak Ketiga	L.E.127
A.E. 058	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMBADDA	E-Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Situbondo	E-Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Desktop	-	-	-	-	Pihak Ketiga	L.E.127

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 059	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIPERANG	untuk mengetahui informasi penyusutan barang milik daerah	untuk mengetahui informasi penyusutan barang milik daerah	RAA.01.02	internal OPD	Website	Development	Open source	PHP	-	Mandiri PD	L.E.154
A.E. 060	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SP2D ONLINE	Webservis integrasi antara aplikasi Sirka dengan aplikasi BPD Jatim	Webservis integrasi antara aplikasi Sirka dengan aplikasi BPD Jatim	RAA.01.02	internal OPD	Website	Pusat	Pusat	PHP	Native	Pusat	L.E.147
A.E. 061	15	Badan Pendapatan Daerah	E-BPHTB	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN: APLIKASI MANAJEMEN TRANSAKSI BPHTB	APLIKASI MANAJEMEN TRANSAKSI BPHTB	RAA.01.01	internal OPD publik	Website	DEPLOYMENT (LIVE)	LISENSI	PHP	CI	Pihak Ketiga	L.E.157 D.E.107
A.E. 062	15	Badan Pendapatan Daerah	E-PDL	PAJAK DAERAH LAINNYA: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH NON PBB & BPHTB	SISTEM INFORMASI MANAJEMENG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH NON PBB & BPHTB	RAA.01.02	internal OPD publik	Website	DEPLOYMENT (LIVE)	LISENSI	PHP	CI	Pihak Ketiga	L.E.158 D.E.108
A.E. 063	15	Badan Pendapatan Daerah	INTEGRASI BPN / BAPENDA	INTEGRASI ANTARA TRANSAKSI BPHTB DAN KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN	INTEGRASI ANTARA TRANSAKSI BPHTB DAN KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN	RAA.01.02	Internal OPD	Website	STAGING	OPEN SOURCE	GO	-	Mandiri PD	
A.E. 064	15	Badan Pendapatan Daerah	PAJAK KATERING ONLINE	PORTAL UNTUK MEMFASILITASI WAJIB PAJAK UNTUK MENDAFTAR PAJAK KATERING SECARA MANDIRI	PORTAL UNTUK MEMFASILITASI WAJIB PAJAK UNTUK MENDAFTAR PAJAK KATERING SECARA MANDIRI	RAA.01.01	internal OPD publik	Website	DEPLOYMENT (LIVE)	LISENSI	PHP	LARAVEL	Mandiri PD	L.E.159 D.E.109
A.E. 065	15	Badan Pendapatan Daerah	Simpada	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah: Untuk memonitoring pendapatan secara realtime untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir	Untuk memonitoring pendapatan secara realtime untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir	RAA.01.02	internal OPD publik	Website	Production	Lisensi	PHP/Java	CI	Pihak Ketiga	L.E.155 D.E.103
A.E. 066	15	Badan Pendapatan Daerah	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	SISTEM INFORMASI YANG MENYAJIKAN DATA GEOSPASIAL BERISI	SISTEM INFORMASI YANG MENYAJIKAN DATA GEOSPASIAL	RAA.01.01	internal OPD publik	Website	DEPLOYMENT	LISENSI	PHP, JAVASCRIPT	NATIVE	Pihak Ketiga	L.E.161

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
			PAJAK	INFORMASI DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK	BERISI INFORMASI DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK				(LIVE)					
A.E. 067	15	Badan Pendapatan Daerah	SITERAS	SISTEM INFORMASI TRACKING BERKAS PENGAJUAN PBB	SISTEM INFORMASI TRACKING BERKAS PENGAJUAN PBB	RAA.01.01	internal OPD publik	Website	DEPLOYMENT (LIVE)	LISENSI	PHP	NATIVE	Pihak Ketiga	L.E.160 D.E.110
A.E. 068	15	Badan Pendapatan Daerah	VTAX	APLIKASI MANAJEMEN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	APLIKASI MANAJEMEN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	RAA.01.01	internal OPD publik	Website	DEPLOYMENT (LIVE) / PRODUCTION	LISENSI	PHP	NATIVE	Mandiri PD	L.E.156 D.E.104; D.E.105; D.E.106
A.E. 069	15	Badan Pendapatan Daerah	WEB SERVICE PEMBAYARAN BPHTB DAN PDL	LAYANAN UNTUK PEMBAYARAN PAJAK DAERAH LAINNYA DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	LAYANAN UNTUK PEMBAYARAN PAJAK DAERAH LAINNYA DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	RAA.02.02	internal OPD publik	Website	STAGING	OPEN SOURCE	GO	-	Mandiri PD	D.E.106
A.E. 070	15	Badan Pendapatan Daerah	WEB SERVIS PEMBAYARAN PBB	LAYANAN PEMBAYARAN PBB DENGAN BANK JATIM SITUBONDO	LAYANAN PEMBAYARAN PBB DENGAN BANK JATIM SITUBONDO	RAA.02.02	internal OPD publik	Website	STAGING	OPEN SOURCE	GO	-	Mandiri PD	D.E.106
A.E. 071	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DTD-AKP	Aplikasi pendataan dan klasifikasi penduduk di Kabupaten Situbondo	Berfungsi sebagai pendataan dan klasifikasi penduduk di Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.178
A.E. 072	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lapor Pak	Digunakan untuk akuntabilitas kerja	Digunakan untuk akuntabilitas kerja	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.173 D.E.128
A.E. 073	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PETIS	Website yang dijadikan wadah untuk kajian, laporan, dan daftar inovasi di Lingkungan Kabupaten Situbondo	wadah untuk kajian, laporan, dan daftar inovasi di Lingkungan Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	-	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.171
A.E.	16	Badan	SIAPP	Sistem Informasi Anti	Aplikasi dalam	RAA.01.02	internal OPD	Website	Pusat	Pusat	PHP	Laravel	Pusat	L.E.176

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
074		Perencanaan Pembangunan Daerah		Poverty Program adalah aplikasi dalam memantau dan mempermudah pengambilan tindakan kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Situbondo	memantau dan mempermudah pengambilan tindakan kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Situbondo									
A.E. 075	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIBESTI	SI BESTI digunakan untuk memberantas stunting	Digunakan untuk mengantisipasi dan memberantas stunting	RAA.02.02	internal OPD	Website	-	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.172 D.E.121; D.E.122; D.E.123; D.E.124
A.E. 076	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SID	Aplikasi untuk mendukung Layanan Data Perencanaan Pembangunan Desa	Aplikasi untuk mendukung Layanan Data Perencanaan Pembangunan Desa	RAA.01.02	Internal OPD	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.175 D.E.121; D.E.122; D.E.123
A.E. 077	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPAM	Sistem Informasi Akses Air Minum sebagai pendataan ketersediaan akses air minum di Kabupaten Situbondo.	Berfungsi sebagai pendataan ketersediaan akses air minum di Kabupaten Situbondo.	RAA.01.01	publik	Website	-	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.177 D.E.125
A.E. 078	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIRKA	Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual merupakan aplikasi perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo	Aplikasi perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD BPKAD	Website	-	-	PHP	LIVED (BPPT)	Tidak ada informasi	L.E.057; L.E.129
A.E. 079	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Website Bappeda	Website profil dan publikasi Bappeda	Portal Website Bappeda yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.179
A.E. 080	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ALADIN	Aplikasi administrasi kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Situbondo	Aplikasi administrasi kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	-	Tidak ada informasi	D.E.134
A.E. 081	17	Dinas Kependudukan	BALADA AKHIR	Digunakan untuk pendataan bayi baru lahir	Digunakan untuk pendataan bayi baru	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deploy	OS	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.188 D.E.134

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
		dan Pencatatan Sipil			lahir									
A.E. 082	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KENDEDES	Kependudukan Dekat Di Desa: Aplikasi yang digunakan sebagai layanan adminduk di Desa	Layanan Adminduk	RAA.01.02	internal OPD	Website	Development	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.185; L.E.192 D.E.129
A.E. 083	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PETIR	Pelayanan Terintegrasi (termasuk dalam aplikasi SILAO)	Aplikasi pendaftaran layanan Adminduk Online secara paket (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA, Pindah Datang)	RAA.01.01	Publik	Website	-	-	PHP	-	Tidak ada informasi	L.E.184; L.E.185; L.E.188; L.E.189 D.E.134
A.E. 084	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PEVITA	Pelayanan Adminduk Via Whatsapp: Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan seputar Adminduk	Layanan Adminduk	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.196
A.E. 085	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan: Aplikasi terkait Administrasi Kependudukan	Sebagai Layanan Adminduk	RAA.01.02	internal OPD	Desktop	Deployment	Lisensi	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.184; L.E.185; L.E.186; L.E.187; L.E.188; L.E.189; L.E.190; L.E.191; L.E.192; L.E.196 D.E.131; D.E.134
A.E. 086	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIKANDA	Sinergitas dan Integrasi Kementerian Agama dan Data Kependudukan: Aplikasi yang digunakan untuk memproses KK dan KTP bagi Pengantin Baru yang melalui KUA	Layanan Adminduk KK dan KTP	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.191; L.E.197 D.E.134
A.E. 087	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SILAO	sistem informasi layanan adminduk online: Aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengajuan	Aplikasi pengajuan administrasi kependudukan	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	Deploy.	OS.	PHP	CI.	Mandiri PD	L.E.184; L.E.185; L.E.186; L.E.187;

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				administrasi kependudukan										L.E.188; L.E.189; L.E.192 D.E.134
A.E. 088	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website Dukcapil	Website dan portal layanan Dispendukcapil Kabupaten Situbondo	Website dan portal layanan Dispendukcapil Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	-	-	PHP	-	Mandiri PD	L.E.194
A.E. 089	18	Dinas Kesehatan	E Booking	Aplikasi Manajemen Pemesanan Ruang Rapat	Digunakan untuk mengatur penjadwalan ruang rapat di Dinas Kesehatan	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	
A.E. 090	18	Dinas Kesehatan	SIEMON	Aplikasi Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi	Digunakan untuk melakukan penilaian pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi di Puskesmas	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.209 D.E.143
A.E. 091	18	Dinas Kesehatan	Sikda	Sistem Informasi Kesehatan Daerah: Aplikasi elektronik yang dirancang untuk mampu menjembatani komunikasi data antar komponen dalam sistem kesehatan nasional yang meliputi puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.	Aplikasi elektronik yang dirancang untuk mampu menjembatani komunikasi data antar komponen dalam sistem kesehatan nasional yang meliputi puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	CodeIgniter	Mandiri PD	L.E.211; L.E.752 D.E.136; D.E.142; D.E.321
A.E. 092	18	Dinas Kesehatan	SIMESSEM	Sistem Informasi Manajemen Elektronik Sehat Mantap: Aplikasi berbasis web pengelolaan sistem berbasis elektronik	Aplikasi berbasis web pengelolaan sistem berbasis elektronik di Dinas Kesehatan	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	CodeIgniter	Mandiri PD	L.E.210 D.E.123

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo									
A.E. 093	19	Dinas Ketenagakerjaan	AK 1 Online	Aplikasi untuk mendukung Layanan AK1	Aplikasi untuk mendukung Layanan AK1	RAA.01.01	Publik	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.223 D.E.144
A.E. 094	19	Dinas Ketenagakerjaan	SISKOTKLN	Aplikasi untuk mendukung Layanan kartu tenaga kerja luar negeri	Aplikasi untuk mendukung Layanan kartu tenaga kerja luar negeri	RAA.01.01	Publik	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.222 D.E.145
A.E. 095	19	Dinas Ketenagakerjaan	Web Disnaker	Bursa Kerja Online dirancang oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo untuk masyarakat Kabupaten Situbondo yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja. Situs ini adalah sebagai mediator yang menjembatani antar Pencari Kerja dan Penyedia Kerja	sebagai wadah pelayanan publik dari disnaker	RAA.01.01	internal OPD	Website	kominfo	kominfo	kominfo	kominfo	Dinkominfo	L.E.225
A.E. 096	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi dari BSSN	Aplikasi untuk mendukung Layanan Tanda Tangan Digital	Aplikasi untuk mendukung Layanan Tanda Tangan Digital	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.255 D.E.164
A.E. 097	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	APLIKASI RPMT	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Aplikasi yang digunakan untuk pendataan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab Situbondo	Aplikasi yang digunakan untuk pendataan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab Situbondo	RAA.02.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.250 D.E.180
A.E. 098	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-Surat	Aplikasi E-Surat Situbondo adalah sistem aplikasi yang dipakai dalam urusan administrasi persuratan pada seluruh organisasi di Situbondo. Sistem ini dibuat untuk	Aplikasi eSurat ini dibuat dengan maksud untuk mempermudah proses surat menyurat antar SKPD Pemerintah	RAA.01.02	internal OPD	Website	Development	Lisensi	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.045 D.E.165

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				mempermudah masing-masing instansi di pemerintahan situbondo dalam proses perekaman dan pengiriman surat.	Kabupaten Situbondo, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Juga mempermudah dalam proses pengarsipan secara digital.									
A.E. 099	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jarkomdat Network Monitoring	Aplikasi Monitoring Koneksi Jaringan Komunikasi Data Kabupaten Situbondo	Mendukung Layanan Perbaikan Jaringan Internal Kabupaten Situbondo	RAA.02.02	Internal OPD	Website	-	-	-	-	Mandiri PD	L.E.262 D.E.170; D.E.171; D.E.172
A.E. 100	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	KIM	Aplikasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah	- Mitra Pemerintah : Menjadi mitra dialog dalam mendukung kebijakan publik & memonitoringnya - Wahana Informasi : KIM dapat saling bertukar informasi sehingga akan berarti juga saling berbagi pengetahuan. - Nilai Tambah : Dengan kekayaan informasi, hingga mampu memberikan nilai ekonomi tambahan	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.251 D.E.181
A.E. 101	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID	Aplikasi berbasis Website yang digunakan sebagai layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemerintah kabupaten Situbondo	untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemerintah kabupaten Situbondo	RAA.01.01	publik	Website	Deployment	Open Source	PHP	Native	Mandiri PD	L.E.245 D.E.173; D.E.174; D.E.175
A.E. 102	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Quickcount	Aplikasi Hitung cepat hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Situbondo	Aplikasi Hitung cepat hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Situbondo	RAA.02.01	publik	Website	-	-	-	-	Mandiri PD	L.E.253
A.E.	20	Dinas	Satu Data	Aplikasi berbasis Website	untuk penyedia data	RAA.01.01	publik	Website	Deploy	Open	PHP	Laravel	Mandiri	L.E.244

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
103		Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Situbondo	yang digunakan untuk Penyediaan data kepada masyarakat			internal OPD OPD terkait		ment	Source			PD	D.E.179
A.E. 104	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	SDTIK	Aplikasi berbasis Website yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya TIK (Hardware, Software, SDM)	untuk pengelolaan sumber daya TIK	RAA.01.02	internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.248 D.E.176
A.E. 105	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	SINEWS	Aplikasi berbasis Android yang digunakan sebagai pemberitaan dari masyarakat mengenai kondisi berita yang berkembang pada wilayah masing-masing desa dan kelurahan	Sebagai Media Informasi	RAA.01.01	publik	Mobile	Deployment	Open Source	Java	Native	Mandiri PD	L.E.249 D.E.177
A.E. 106	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Website seluruh puskesmas Kabupaten Situbondo	Website seluruh puskesmas Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	-	Mandiri PD	L.E.128; L.E.307; L.E.308; L.E.551
A.E. 107	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	SIPESAT	Aplikasi Berbasis Website yang digunakan untuk pelayanan administrasi masyarakat desa	untuk pelayanan administrasi masyarakat desa	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	Deployment	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.243 D.E.166
A.E. 108	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM	Aplikasi Berbasis Mobile (Android) yang digunakan untuk Portal Pelayanan Masyarakat	untuk Portal Pelayanan Masyarakat	RAA.01.01	publik internal OPD	Mobile	Deployment	Open Source	Java	Native	Mandiri PD	L.E.243 D.E.178
A.E. 109	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	SP4N Lapor	Aplikasi untuk mendukung Layanan pengaduan	Aplikasi untuk mendukung Layanan pengaduan	RAA.01.01	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.247 D.E.183
A.E. 110	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Covid	Aplikasi berbasis web dalam pemaparan informasi terupdate seputar Covid-19 di Kabupaten Situbondo	Aplikasi berbasis web dalam pemaparan informasi terupdate seputar Covid-19 di Kabupaten Situbondo	RAA.02.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Mandiri PD	
A.E. 111	20	Dinas Komunikasi	Website Resmi	Web portal informasi untuk berita-berita yang	Media publikasi	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.252

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
		dan Informatika	Pemerintah Kabupaten Situbondo	mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas										
A.E. 112	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	BPUM Online	Layanan Pendaftaran Calon Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	Pendaftaram Online utk pelaku usaha mikro dalam mengakses/pengajuan bantuan dari pemerintah	RAA.01.01	internal OPD	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.269 D.E.184
A.E. 113	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	SIDT	Sistem informasi data tunggal untuk Koperasi dan Usaha Mikro dikelola oleh kementrian	Untuk mendata koperasi dan Usaga mikro di Kabupaten situbondo	RAA.01.02	internal OPD, Kementrian Koperasi dan UKM	Website	Development	Open Source	PHP	Tidak Tau	Pusat	L.E.270
A.E. 114	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Sikembarkepo	Website Informasi tentang Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Kabupaten Situbondo	Informasi Harga	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.275 D.E.187
A.E. 115	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	SIMKU	Sistem Informasi Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro merupakan aplikasi Tatakelola pemerintahan utk data Koperasi dan Usaha MikroManajemen Data Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Situbondo,	Tatakelola Pemerintahan	RAA.01.02	internal OPD	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.270 D.E.185; D.E.186
A.E. 116	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	SIMPELDAGIN	Pelayanan OPD, Pengaduan dan Buku Tamu	Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat secara Online	RAA.01.01	internal OPD	Website	Development	Open Source	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.271; L.E.272; L.E.273; L.E.274 D.E.068
A.E. 117	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	SiPENAMAS	Web Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Web Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAA.01.01	publik	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.268
A.E. 118	21	Dinas Koperasi,	SISDAMALI	Sistem informasi pendataan pedagang di Kabupaten	Sistem informasi pendataan pedagang	RAA.01.02	publik internal OPD	Website	-	-	-	-	Tidak ada	

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
		Perindustrian, dan Perdagangan		Situbondo	di Kabupaten Situbondo								informasi	
A.E. 119	22	Dinas Lingkungan Hidup	SIPESAH	Sistem Informasi Pengendalian Sampah: Aplikasi pelaporan sampah dan input data seputar sampah di kabupaten	Pelaporan dan Pendataan	RAA.01.01	publik internal OPD	Website	-	Open Source	PHP	tidak tahu	Dinkominfo	L.E.287 D.E.204; D.E.205
A.E. 120	22	Dinas Lingkungan Hidup	Website DLH	Website profil dan publikasi DLH	Portal Website DLH yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.295
A.E. 121	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Website Layanan TIC	Aplikasi yang berperan sebagai pusat informasi tempat wisata yang ada di Kabupaten Situbondo	Aplikasi yang berperan sebagai pusat informasi tempat wisata yang ada di Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.297
A.E. 122	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	E-Paksi	Aplikasi untuk mendukung Layanan Jaringan Irigasi	Aplikasi untuk mendukung Layanan Jaringan Irigasi	RAA.01.01	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.317 D.E.228; D.E.229; D.E.230
A.E. 123	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIMBG	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung	Pengelolaan Bangunan Gedung	RAA.01.01	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.325 D.E.222
A.E. 124	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIPDJD	Aplikasi untuk mendukung Layanan Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Layanan Preservasi Jalan dan Jembatan	Aplikasi untuk mendukung Layanan Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Layanan Preservasi Jalan dan Jembatan	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.307; L.E.308 D.E.216; D.E.217
A.E. 125	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	data desa center	Aplikasi untuk mendukung Layanan gerakan desa berdaya serta Layanan Badan Usaha Milik Desa	Aplikasi untuk mendukung Layanan gerakan desa berdaya serta Layanan Badan	RAA.01.01	Publik	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.329; L.E.330

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
					Usaha Milik Desa									
A.E. 126	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	omspan	Aplikasi untuk mendukung Layanan monitoring keuangan desa	Aplikasi untuk mendukung Layanan monitoring keuangan desa	RAA.01.02	Internal OPD	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.334
A.E. 127	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Siskeudes	Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. https://siskeudes.online/	Pengelolaan dan monitoring keuangan desa	RAA.01.02	internal OPD	Desktop	Pusat	Pusat	Java	Pusat	Pusat	L.E.329; L.E.330; L.E.332 D.E.070
A.E. 128	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Website DPMD	Website profil DPMD	Portal Website DPMD yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.336
A.E. 129	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	aplikasi yang berisikan informasi ALUR PEMBUATAN SPM, ALUR RAWAT JALAN PESERTA BPJS & JAMKESDA dan ALUR RAWAT JALAN PASIEN UMUM	sebagai media informasi prosedur layanan dan berita sesuai kegiatan di PD	RAA.01.01	Publik	Website	kominfo	kominfo	kominfo	kominfo	Dinkominfo	
A.E. 130	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Website DP3AP2KB Situbondo	berisikan pemberi informasi berupa berita dan agenda kegiatan, produk hukum dan pembangunan, dan bantuan untuk masyarakat yang memiliki pertanyaan	untuk memberikan informasi dan berita tentang acara dinas kepada masyarakat	RAA.01.01	publik	Website	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Dinkominfo	L.E.337 D.E.236
A.E. 131	27	Dinas Penanaman Modal	OSS	Portal perijinan berusaha	Sebagai portal perijinan	RAA.01.01	Lembaga/perseorangan internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.348

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
A.E. 132	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIPINTER	Sistem Pelayanan Online Terpadu yang digunakan untuk melakukan pengajuan perijinan non berusaha	Sebagai aplikasi perijinan non berusaha	RAA.01.01	lembaga/perseorangan internal OPD	Website	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	D.E.252
A.E. 133	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SiPoint	Sipoint adalah aplikasi dengan konsep E-Gis yang diharapkan dapat lebih memudahkan Calon Investor Mencari Informasi Potensi, Peluang, Prospektus, Fasilitas pendukung Serta fitur untuk menawarkan lahan dan forum tanya jawab.	Sipoint adalah aplikasi dengan konsep E-Gis yang diharapkan dapat lebih memudahkan Calon Investor Mencari Informasi Potensi, Peluang, Prospektus, Fasilitas pendukung Serta fitur untuk menawarkan lahan dan forum tanya jawab.	RAA.01.01	publik	Website	Deployment	Php	PHP	Laravel	Pihak Ketiga	L.E.456
A.E. 134	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SiTajin	Aplikasi yang digunakan untuk inventarisasi data perijinan	Sebagai inventarisasi data perijinan	RAA.01.02	lembaga/perseorangan internal OPD	Website	Deploy	OS	PHP	CI	Mandiri PD	L.E.348
A.E. 135	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SKEMA	Aplikasi evaluasi pelayanan perijinan DPMPTSP Kabupaten Situbondo	Aplikasi evaluasi pelayanan perijinan DPMPTSP Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	internal OPD	Website	Deployment	Php	PHP	Laravel	Pihak Ketiga	L.E.454 D.E.253
A.E. 136	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website DPMPTSP	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	Media publikasi	RAA.01.01	publik	Website	Deployment	OS	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.347; L.E.349 D.E.245; D.E.246; D.E.248

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 137	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Pengaduan	Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh pejabat di lingkungan dispendikbud seperti Kasie, Kasubag, Kabid dan Kepala Dinas untuk menanggapi terkait pertanyaanm usulan, aduan, kritikan, saran & masukan dari masyarakat di Portal Website Dispendikbud	Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh pejabat di lingkungan dispendikbud seperti Kasie, Kasubag, Kabid dan Kepala Dinas untuk menanggapi terkait pertanyaanm usulan, aduan, kritikan, saran & masukan dari masyarakat di Portal Website Dispendikbud	RAA.01.02	internal OPD lembaga sekolah terkait	Mobile	(Development/Deployment (Live)	Open Source	Java	-	Mandiri PD	L.E.506 D.E.260
A.E. 138	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Web Sekolah	aplikasi berbasis CMS yang dibangun menggunakan Framework laravel untuk digunakan lembaga/sekolah yang ada di lingkungan dispendikbud	berita sekolah, pengumuman sekolah, profile sekolah, kegiatan sekolah dll	RAA.01.01	publik	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	D.E.261
A.E. 139	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ARKAS	Aplikasi untuk mendukung Layanan BOS	Aplikasi untuk mendukung Layanan BOS	RAA.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.484 D.E.271
A.E. 140	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buta Aksara	Aplikasi ini berguna untuk melihat titik lokasi daerah daerah yang memiliki banyak masyarkaat dengan kondisi buta aksara. Sehingga dengan adanya data dari aplikasi ini dapat membantu untuk data pendukung apabila akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan buta aksara	Aplikasi ini berguna untuk melihat titik lokasi daerah daerah yang memiliki banyak masyarkaat dengan kondisi buta aksara. Sehingga dengan adanya data dari aplikasi ini dapat membantu untuk data pendukung apabila akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan buta aksara	RAA.02.02	internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.508 D.E.004; D.E.268
A.E.	28	Dinas	DAPODIK	Aplikasi yang dirilis oleh	Aplikasi yang dirilis	RAA.01.02	lembaga	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.461;

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
141		Pendidikan dan Kebudayaan		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bertujuan untuk mendata secara nasional dan terpadu sebagai sumber data utama dari pendidikan nasional yang menjelaskan/merinci tentang keadaan sekolah secara detail data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Siswa dan Sarana Prasarana Sekolah.	oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bertujuan untuk mendata secara nasional dan terpadu sebagai sumber data utama dari pendidikan nasional yang menjelaskan/merinci tentang keadaan sekolah secara detail data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Siswa dan Sarana Prasarana Sekolah.		sekolah internal OPD							L.E.462; L.E.475; L.E.476; L.E.477; L.E.478; L.E.479 D.E.274
A.E. 142	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Hosting	Aplikasi yang digunakan untuk menampung informasi akun dari data hosting yang dimiliki oleh lembaga/Sekolah yang ada di lingkungan Dispendikbud	Aplikasi yang digunakan untuk menampung informasi akun dari data hosting yang dimiliki oleh lembaga/Sekolah yang ada di lingkungan Dispendikbud	RAA.01.02	Internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP dan Java	Laravel	Mandiri PD	L.E.509 D.E.262
A.E. 143	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	E Lapor	Aplikasi yang mewadahi temuan permasalahan, indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan guru di lingkungan dispendikbud	Aplikasi yang mewadahi temuan permasalahan, indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan guru di lingkungan dispendikbud	RAA.01.01	internal OPD lembaga sekolah terkait	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP dan Java	Laravel	Mandiri PD	L.E.505 D.E.260
A.E. 144	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	e-Rapor	Aplikasi e-Rapor SMP sebagai salah satu instrumen akuntabilitas penilaian oleh pendidik,	Aplikasi e-Rapor SMP sebagai salah satu instrumen akuntabilitas	RAA.01.02	lembaga sekolah internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.471

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				diharapkan dapat membantu dan mempermudah tugas pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, mengolah dan menganalisis hasil penilaian, mencetak rapor, serta melaporkan hasil penilaian peserta didik kepada orang tua/wali murid, hingga disinkronisasikan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).	penilaian oleh pendidik, diharapkan dapat membantu dan mempermudah tugas pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, mengolah dan menganalisis hasil penilaian, mencetak rapor, serta melaporkan hasil penilaian peserta didik kepada orang tua/wali murid, hingga disinkronisasikan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).									
A.E. 145	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MASKAS	Aplikasi untuk mendukung Layanan BOS	Aplikasi untuk mendukung Layanan BOS	RAA.01.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.484 D.E.271
A.E. 146	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Padatiweb	Aplikasi agregat yang sumber data berasal dari Backbone Dapodik untuk mengetahui data lembaga seluruh kabupaten baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Sarana dan Prasarana sekolah.	Aplikasi agregat yang sumber data berasal dari Backbone Dapodik untuk mengetahui data lembaga seluruh kabupaten baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Sarana dan Prasarana sekolah.	RAA.01.02	internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	
A.E. 147	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PMP	Penjaminan Mutu Pendidikan: Sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang	Sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang	RAA.01.02	lembaga sekolah internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.347; L.E.349; L.E.470 D.E.270

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.	mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.									
A.E. 148	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PPDB	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran dan seleksi siswa SD yang akan masuk ke SMP.	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran dan seleksi siswa SD yang akan masuk ke SMP.	RAA.01.01	sekolah peserta didik	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.483 D.E.269
A.E. 149	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sarpras	Aplikasi pengelolaan sarana & prasarana untuk lembaga/sekolah yang ada dibawah dispendikbud	Aplikasi pengelolaan sarana & prasarana untuk lembaga/sekolah yang ada dibawah dispendikbud	RAA.01.02	lembaga sekolah	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP dan Java	Laravel dan Java	Mandiri PD	L.E.461; L.E.462 D.E.267
A.E. 150	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sebaya	Aplikasi ini digunakan untuk mencatat penemuan situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Situbondo agar juga dapat diakses oleh masyarakat, dan dapat diarsipkan secara digital agar berkas tidak hilang.	Aplikasi ini digunakan untuk mencatat penemuan situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Situbondo agar juga dapat diakses oleh masyarakat, dan dapat diarsipkan secara digital agar berkas tidak hilang.	RAA.01.01	publik	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	Php	Laravel	Mandiri PD	L.E.464 D.E.265; D.E.266
A.E. 151	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SiBudi	Aplikasi perpustakaan digital/buku digital yang berisi buku-buku materi pendidikan dari berbagai jenjang. Adanya aplikasi ini gara memudahkan apabila ada yang membutuhkan, maka dapat mendownload buku digital dengan gratis	Aplikasi perpustakaan digital/buku digital yang berisi buku-buku materi pendidikan dari berbagai jenjang. Adanya aplikasi ini gara memudahkan apabila ada yang membutuhkan, maka	RAA.01.01	publik	Mobile	(Development/Deployment (Live)	Open Source	Java	Java	Mandiri PD	

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
					dapat mendownload buku digital dengan gratis									
A.E. 152	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sidul	Aplikasi disposisi surat	pengelolaan disposisi secara digital	RAA.01.02	Internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP dan Java	Laravel	Mandiri PD	L.E.507 D.E.264
A.E. 153	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Simpadi	Sistem Informasi paud dan dikmas	sistem informasi digitalisasi tugas pokok penilik	RAA.01.02	publik	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP dan Java	Laravel dan Java	Mandiri PD	L.E.490 D.E.257
A.E. 154	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sinabung	merupakan aplikasi yang bekerjasama dengan Bank Jatim, salah satu fungsinya untuk siswa. Siswa dapat mengetahui catatan tabungannya yang di setorkan ke Sekolahnya	merupakan aplikasi yang bekerjasama dengan Bank Jatim, salah satu fungsinya untuk siswa. Siswa dapat mengetahui catatan tabungannya yang di setorkan ke Sekolahnya	RAA.02.02	Siswa Bank Jatim	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP dan Java	Laravel	Mandiri PD	
A.E. 155	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Singgul	Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pendaftaran mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa Situbondo Unggul, pada aplikasi ini juga dapat menampung data data scan sebagai bukti dokumen dari pendaftar	Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pendaftaran mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa Situbondo Unggul, pada aplikasi ini juga dapat menampung data data scan sebagai bukti dokumen dari pendaftar	RAA.02.02	Siswa internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.469 D.E.263
A.E. 156	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sipagu	Sistem informasi PAK Guru	sistem administrasi untuk penetapan angka kredit guru di bawah lingkungan dispendikbud	RAA.01.02	lembaga sekolah internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.489 D.E.259

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 157	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sisgur	Sistem Informasi Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dispendikbud	Pengelolaan data Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dispendikbud	RAA.01.02	lembaga sekolah internal OPD	Website	Development /Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel & Java	Mandiri PD	L.E.488 D.E.255; D.E.256
A.E. 158	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SISPENA	Aplikasi untuk mendukung Layanan Peningkatan Mutu PAUD	Aplikasi untuk mendukung Layanan Peningkatan Mutu PAUD	RAA.01.02	Lembaga PAUD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.485 D.E.272
A.E. 159	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Absensi	Sistem Informasi kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dispendikbud	Sistem Informasi kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dispendikbud	RAA.01.02	lembaga sekolah internal OPD	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.491 D.E.273
A.E. 160	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	VERVAL-PTK	Aplikasi untuk mendukung Layanan Fasilitasi Pengusulan NUPTK	Aplikasi untuk mendukung Layanan Fasilitasi Pengusulan NUPTK	RAA.01.02	Seluruh lembaga pendidikan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.476
A.E. 161	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Web file (cloud)	Aplikasi yang menampung data atau file secara terpusat yang dapat di akses kapan saja	Aplikasi yang menampung data atau file secara terpusat yang dapat di akses kapan saja	RAA.01.02	publik	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	D.E.122
A.E. 162	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Website Dispendik	Portal Website dispendikbud yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, pengaduan dan lain-lain	Portal Website dispendikbud yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, pengaduan dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	(Development/Deployment (Live)	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.487 D.E.258
A.E. 163	29	Dinas Perhubungan	Dishub PKB	Aplikasi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Situbondo	Aplikasi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	lembaga internal OPD	Desktop	-	-	-	-	Pihak Ketiga	L.E.536 D.E.277
A.E. 164	29	Dinas Perhubungan	RTTMC	Aplikasi untuk memantau arus lalu lintas	Memantau arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Situbondo	RAA.02.02	Publik	Desktop dan Mobile	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.511 D.E.278
A.E. 165	29	Dinas Perhubungan	SIRALIN	SI Rambu lalu lintas: SIRALIN merupapakan	Sebagai dasar pengambilan	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada	L.E.535

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				sistem informasi yang memetakan Lokasi sarana dan prasarana lalu-lintas (dalam hal ini rambu lalu-lintas).	keputusan terkait peningkatan kualitas / kenyamanan berlalu-lintas di Kabupaten Situbondo								informasi	
A.E. 166	29	Dinas Perhubungan	Website DISHUB	untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait aduan publik dan jadwal transportasi	memberikan informasi kepada masyarakat terkait aduan publik dan jadwal transportasi	RAA.01.01	publik	Website	development	Open Source	PHP	CIlinternal PD	Mandiri PD	L.E.510; L.E.512
A.E. 167	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	E-Pusda Situbondo	Aplikasi untuk mendukung Layanan E-Book	Aplikasi untuk mendukung Layanan E-Book	RAA.01.01	Publik	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	L.E.540 D.E.284
A.E. 168	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	INLISLITE	Aplikasi pendataan dan peminjaman buku perpustakaan daerah Kabupaten Situbondo	Aplikasi pendataan dan peminjaman buku perpustakaan daerah Kabupaten Situbondo	RAA.01.02	publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.538; L.E.539 D.E.280
A.E. 169	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TALI PUSAR	Digitalisasi Perpustakaan dan Arsip	Pelayanan secara Online Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo	RAA.01.01	publik	Website	https://talipusar.situbondokab.go.id/	-	-	-	Dinkominfo	L.E.542
A.E. 170	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website Perpus Arsip	Website profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Portal Website Perpus Arsip yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.537
A.E. 171	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BIMA	Aplikasi untuk mendukung pengusulan kegiatan sumber dana DAK dan APBN	Untuk pengusulan kegiatan sumber dana DAK dan APBN	RAA.01.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.552; L.E.553; L.E.554; L.E.564; L.E.565; L.E.566; L.E.584; L.E.585; L.E.586 D.E.291

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 172	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	E-DBHCHT	Aplikasi untuk mendukung Layanan Penyediaan Perlengkapan Alat Jemur Tanaman Tembakau	Untuk pengusulan dan pelaporan	RAA.02.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.563 D.E.290
A.E. 173	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	E-RDKK	Aplikasi untuk mendukung Layanan Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang	Untuk pendataan penerima pupuk subsidi	RAA.02.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.576
A.E. 174	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	SIMLUHTAN	Aplikasi untuk mendukung Layanan penyuluhan pertanian	Untuk pendataan luas lahan dan petani penggarap	RAA.02.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.545 D.E.288; D.E.289
A.E. 175	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website DTPHP	aplikasi yang berisikan berbagai informasi yang ada dalam dinas pertanian dan ketahanan pangan	media informasi	RAA.01.01	publik	Website	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Dinkominfo	L.E.588
A.E. 176	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Sikembar Ikan	Sistem Informasi Data Perikanan merupakan aplikasi pendataan jumlah produksi ikan di wilayah kabupaten Situbondo	Aplikasi pendataan jumlah produksi ikan di wilayah kabupaten Situbondo	RAA.01.02	internal OPD	Website	-	-	PHP	Laravel	Tidak ada informasi	L.E.591
A.E. 177	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Website Dinas Peternakan dan Perikanan	aplikasi informasi untuk masyarakat, kegiatan penyuluhan, pengaduan konsultasi budidaya	untuk informasi penyuluhan kepada masyarakat, untuk media pengaduan atau konsultasu	RAA.01.01	internal OPD	Website	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Dinkominfo	L.E.589; L.E.590 D.E.297
A.E. 178	33	Dinas Sosial	Aplikasi Cek Bansos	Untuk mengetahui tentang bantuan sosial, memeriksa apakah sudah terdaftar menerima bansos atau BLT	Sebagai aplikasi publik untuk membantu masyarakat melakukan pengecekan status bansos	RAA.01.01	internal OPD publik	Mobile	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.623 D.E.308
A.E. 179	33	Dinas Sosial	SEHATI	Sehati adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengecekan penerbitan DTKS	Membantu pengecekan penerbitan DTKS	RAA.01.02	Internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.307
A.E. 180	33	Dinas Sosial	SIKS-NG	Digunakan untuk mengeluarkan surat keterangan DTKS meliputi	sebagai aplikasi pengolaan data DTKS	RAA.01.02	internal OPD publik/lembaga	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.624 D.E.308

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
				fitur untuk pendataan DTKS, rekap data DTKS, pemadanan DTKS, kelayakan DTKS, pemrosesan usulan baru										
A.E. 181	33	Dinas Sosial	Website Dinsos	Website profil Dinas Sosial	Portal Website Dinas Sosial yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.625
A.E. 182	34	Satuan Polisi Pamong Praja	siroleg.id	Website pendataan dan penyebaran lokasi mengenai rokok illegal	Website pendataan dan penyebaran lokasi mengenai rokok illegal	RAA.02.02	Development	Website	-	Trantibum	Bea Cukai	Tidak tau	Mandiri PD	L.E.627
A.E. 183	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Website Satpol PP	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	Media publikasi	RAA.01.01	publik	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Mandiri PD	L.E.626
A.E. 184	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Aplikasi Billing System	Aplikasi untuk pencatatan pasien, tindakan, rekam medis, tagihan pasien	Pencatatan tindakan pasien, rekam medis pasien, kunjungan pasien	RAA.01.02	pasien terkait internal OPD	Desktop	Live	Lisensi	VB	VB	Pihak Ketiga	L.E.648 D.E.318
A.E. 185	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Aplikasi Persediaan non farmasi	Aplikasi untuk mengelola barang non farmasi, berupa, aset danbarang pakai habis	Aplikasi untuk mengelola barang non farmasi, berupa, aset danbarang pakai habis	RAA.01.02	internal OPD	Desktop	Live	Lisensi	VB	VB	Pihak Ketiga	L.E.652 D.E.320
A.E. 186	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	ASPAK	Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan RS	RAA.01.02	RSUD dr. Abdoer Rahem	Website	Pusat	Pusat	Bidang Penunjang, Bidang Tata Usaha (UMUM) dan Perencanaan	Internal OPD	Pusat	
A.E. 187	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	ERENGGAR	Aplikasi untuk perencanaan penganggaran	pengelolaan penganggaran rumah sakit	RAA.01.02	internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.650

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 188	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem	Aplikasi pengelolaan sistem informasi RSUD Dr. Abdoer Rahem	Aplikasi pengelolaan sistem informasi RSUD Dr. Abdoer Rahem	RAA.01.02	internal OPD	Desktop	-	-	-	-	Pihak Ketiga	L.E.648; L.E.653 D.E.135; D.E.136; D.E.321; D.E.322; D.E.323
A.E. 189	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	SIRS ONLINE	sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan	pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan	RAA.01.02	Internal OPD	Website	-	-	Bidang Penunjag , Bidang Pelayanan, Bagian Perencanaan	Internal OPD	Mandiri PD	L.E.653 D.E.326
A.E. 190	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Sistem Persediaan Farmasi	Aplikasi yang mengelola barang farmasi, mulai pemesanan barang, penerimaan barang di gudang farmasi, distribusi barang ke unit layanan, sampai penjualan barang di depo farmasi	Aplikasi yang mengelola barang farmasi, mulai pemesanan barang, penerimaan barang di gudang farmasi, distribusi barang ke unit layanan, sampai penjualan barang di depo farmasi	RAA.01.02	internal OPD	Desktop	Live	Lisensi	VB	VB	Pihak Ketiga	L.E.651 D.E.319
A.E. 191	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	V-Klaim BPJS	Aplikasi pengelolaan pasien bpjs	pembuatan SEP pasien	RAA.01.02	internal OPD	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	L.E.648 D.E.136; D.E.321
A.E. 192	36	Kecamatan Situbondo	TTE	Digunakan layana surat Elektronik	Mempermudah layanan persuratan	RAA.01.02	Petugas atau OPD	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.667
A.E. 193	36	Kecamatan Situbondo	Website Kecamatan Situbondo	Website profil Kecamatan Situbondo	Media publikasi Kecamatan Situbondo	RAA.01.01	publik	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.688
A.E. 194	37	Kecamatan Bungatan	Website Kecamatan Bungatan	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	Portal Website Kecamatan Bungatan yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	-	-	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.693
A.E.	38	Puskesmas	ALRECORD	Aplikasi Pendukung	Aplikasi Pendukung	RAA.02.02	Puskesmas	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
195		Situbondo	ANTIGEN	pendataan hasil laboratorium	pendataan hasil laboratorium		Situbondo							D.E.340
A.E. 196	38	Puskesmas Situbondo	ASIK	Aplikasi pendataan imunisasi	Aplikasi pendataan imunisasi	RAA.02.02	Puskesmas Situbondo	Mobile	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.346
A.E. 197	38	Puskesmas Situbondo	DPI	DPI (Dynamic Pharmation Inventory)	Membantu pendataan inventory puskesmas	RAA.02.02	Puskesmas Situbondo	Desktop	-	-	-	-	Pihak Ketiga	
A.E. 198	38	Puskesmas Situbondo	E-CLAIM	aplikasi untuk melakukan permohonan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK) untuk tenaga kerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan	aplikasi untuk melakukan permohonan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK) untuk tenaga kerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan	RAA.01.02	Puskesmas Situbondo	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.341
A.E. 199	38	Puskesmas Situbondo	P-CARE E-Claim	Aplikasi pendataan Vaksinasi dan PBJS	Aplikasi pendataan Vaksinasi dan PBJS	RAA.02.01	Puskesmas Situbondo	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.339; D.E.341
A.E. 200	38	Puskesmas Situbondo	P-Care VAKSIN	Aplikasi pendataan Vaksinasi	Aplikasi pendataan Vaksinasi	RAA.02.01	Puskesmas Situbondo	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.339
A.E. 201	38	Puskesmas Situbondo	SITB	Aplikasi Pendukung pendataan hasil laboratorium	Aplikasi Pendukung pendataan hasil laboratorium	RAA.02.02	Puskesmas Situbondo	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.340
A.E. 202	38	Puskesmas Situbondo	Website Puskesmas Situbondo	apikasi pelayanan masyarakat	untuk memudahkan masyarajat dalam mendaftar layanan yang ada di puskesmas	RAA.01.01	internal OPD	Website	-	-	PHP	-	Pihak Ketiga	L.E.748
A.E. 203	39	Puskesmas Bungatan	Website Puskesmas Bungatan	Website profil Puskesmas Bungatan	Portal Website Puskesmas Bungatan yang memuat seluruh informasi, berita, pengumuman, dan lain-lain	RAA.01.01	publik	Website	Kominfo/Development	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.749
A.E. 204	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DAKENA	Dakena adalah sistem informasi yang digunakan untuk pencatatan kejadian bencana	Mendukung Layanan Pencatatan Kejadian Bencana	RAA.02.02	Publik	Website	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	D.E.357

ID	Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Area Aplikasi	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembang	Unit Pengembang	ID Metadata Terkait
A.E. 205	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Logistik Covid-19	Pendataan persebaran sarana dan prasarana untuk penanggulangan covid19	Pendataan persebaran sarana dan prasarana untuk penanggulangan covid19	RAA.02.01	internal OPD Dinas Kesehatan Inspektorat	Website	-	-	-	-	Tidak ada informasi	
A.E. 206	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Website BPBD	website OPD	Sarana layanan informasi dan publikasi	RAA.01.01	publik	Website	Development	Open Source	PHP	Laravel	Dinkominfo	L.E.768

Lampiran 7.1 Ketersediaan *Bandwidth* Kominfo

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	PNS : 8 Non PNS : 4 **Total : 12 Pegawai**	JIP-Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
			Indihome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	10 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	PNS : 8 Non PNS : 6 **Total : 14 Pegawai**	JIP-Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
3	Bagian Hukum	PNS : 10 Non PNS : 5 **Total : 15 Pegawai**	JIP-Bagian Hukum	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Indihome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	PNS : 7 Non PNS : 7 **Total : 14 Pegawai**	JIP-Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PNS : 19 Non PNS : 4 **Total : 23 Pegawai**	JIP-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Gedung LPSE)	Fiber Optik	Biznet	Biznet	Biznet	50	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Telkom	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Gedung UKPBJ)	Fiber Optik	Telkom	Telkom	Telkom	30	Kabel	Up To (Broadband)
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Gedung LPSE)	Fiber Optik	Biznet	Biznet	Biznet	30	Kabel	Up To (Broadband)
			Icon+	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Gedung LPSE)	Fiber Optik	Icon+	Icon+	Icon+	70	Kabel	Up To (Broadband)
6	Bagian Umum	PNS : 29 Non PNS : 86 **Total : 115 Pegawai**	JIP-Bagian Umum	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps dan 80 mbps (internal)	Kabel	Dedicated

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Seluruh Operasional Sub Koordinator TU)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	100 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Untuk Ruang Kabag)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Ruang Sub Koordinator Perlengkapan)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	40 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
7	Bagian Organisasi	PNS : 11 Non PNS : 4 **Total : 15 Pegawai**	JIP-Bagian Organisasi	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PNS : 10 Non PNS : 23 **Total : 33 Pegawai**	JIP-Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (R. Dokumentasi, R. Protokol, R. Komunikasi , R.Kabag)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	PNS : 14 Non PNS : 3 **Total : 17 Pegawai**	JIP-Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PNS : 37 Non PNS : 41 **Total : 78 Pegawai**	VPN JIP-Sekretariat DPRD	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Seluruh Titik terdapat 6 titik dengan pembagian masing-masing 10 Mbps)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	60 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
11	Inspektorat	PNS : 47 Non PNS : 16 **Total : 63 Pegawai**	JIP-Inspektorat	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Megadata	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	Megadata	Megadata	Megadata	UNDUH 10,38 MBPS UNGGAH 14,50 MBPS	Kabel	Up To (Broadband)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	**PNS : 47 Non PNS : 16 Total : 63 Pegawai**	VPN JIP-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PNS : 30 Non PNS : 15 **Total : 45 Pegawai**	VPN JIP-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PNS : 53 Non PNS : 55 **Total : 108 Pegawai**	JIP-Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
			Speedy	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Untuk Satu Ruangan)	Fiber Optik	Speedy	Speedy	Speedy	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			Megadata	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (untuk 1 Gedung)	Fiber Optik	Megadata	Megadata	Megadata	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
15	Badan Pendapatan Daerah	PNS : 90 Non PNS : 42 **Total : 132 Pegawai**	VPN JIP-Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Indihome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (30 Mbps untuk ruangan pelayanan + 20 Mbps untuk bidang dalev + 20 Mbps untuk ruang Kepala Badan + 20 Mbps untuk bidang penagihan + 30 Mbps untuk ruang IT)	Fiber Optik	Indihome	Indihome	Indihome	120 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			Mega Data	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	Mega Data	Mega Data	Mega Data	30 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
				(30 Mbps untuk sekretariat)							
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PNS : 34 Non PNS : 50 **Total : 84 Pegawai**	JIP-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel	Dedicated
			Telkom	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Telkom	Telkom	Telkom	100 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	100 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PNS : 33 Non PNS : 56 **Total : 89 Pegawai**	JIP-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic(Metrolink)+Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel+Nirkabel (Radio)	Broadband
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (30% Mbps untuk OPD dan 70% Mbps untuk Server)	Fiber Optik	Biznet	Biznet	Biznet	80 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
18	Dinas Kesehatan	PNS : 83 PPPK : 5 Non ASN : 79 **Total : 167 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Kesehatan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Telkom	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (untuk server)	Fiber Optic	Telkom	Telkom	Telkom	1 Gbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Untuk Karyawan dan Backup Server)	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
19	Dinas Ketenagakerjaan	PNS : 23 Non PNS : 14 **Total : 37 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Ketenagakerjaan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	30 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Telkom	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Telkom	Telkom	Telkom	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	PNS : 30 Non PNS : 52 **Total : 82 Pegawai**	JIP-Dinas Komunikasi dan Informatika VPN JIP-Dinas Komunikasi dan	460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) + 150 untuk	Kabel	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo (Biznet)	Diskominfo	610 Mbps	Kabel+Nirkabel (Radio) Untuk OPD	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Informatika	WIFI Publik							
			JIP-Dinas Komunikasi dan Informatika VPN JIP-Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Mbps untuk server (Dedicated) + 150 Mbps untuk area publik (Broadband)	Kabel	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo (Megadata)	Diskominfo	250 Mbps	Kabel	Broadband dan Dedicated
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	PNS : 71 Non PNS : 234 **Total : 305 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	85Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Indihome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Keuangan, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Metrologi, Perdagangan, Perindustrian)	Fiber Optic	IndiHome	IndiHome	IndiHome	30 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
22	Dinas Lingkungan Hidup	PNS : 192 Non PNS : 381 **Total : 573 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Indihome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (untuk Seluruh Operasional pada Bidang)	Fiber Optic	IndiHome	IndiHome	IndiHome	50 Mbps x 6 unit	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PNS : 30 Non PNS : 28 **Total : 58 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	PNS : 168 Non PNS : 226 **Total : 394 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Telkom	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Telkom	Telkom	Telkom	300 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PNS : 25 Non PNS : 22 **Total : 47 Pegawai**	JIP-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Fiber Optic	Dedicated
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	120 Mbps (100Mbps + 20 Mbps)	Kabel	Up To (Broadband)
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	PNS : 35 Non PNS : **Total : 39 Pegawai total keseluruhan : 73**	VPN JIP-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PNS : 20 Non PNS : 18 **Total : 38 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Telkom	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Telkom	Telkom	Telkom	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	150 Mbps (2 x 75 Mbps)	Kabel	Up To (Broadband)
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PNS : 72 Non PNS : 54 **Total : 126 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Astinet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Seluruh Untuk Server)	Fiber Optic	Astinet	Astinet	Astinet	50Mbps Internasional (IX) 20Mbps Domestik (IIX)	Kabel	Dedicated
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Seluruh Untuk Server)	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	200Mbps	Kabel	Dedicated
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (30Mbps Ruang Server, 30Mbps Aset, 30Mbps Dikdas, 30Mbps PPTK, 30Mbps Kebudayaan, 30Mbps PNF)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	180Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (150Mbps Ruang Keuangan dan 50Mbps Ruang Umum/Pengadaan)	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	200Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
29	Dinas Perhubungan	PNS : 54 orang Non PNS : 126 orang **Total : 180 Pegawai**	JIP-Dinas Perhubungan VPN JIP-Dinas Perhubungan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic(Metrolink)+Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel+Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Untuk Sekretariat dan seluruh Ruang Bidang)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	200 Mbps (100 Mbps + 100 Mbps)	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PNS : 30 Non PNS : 12 **Total : 42 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (10 Mbps untuk Sekretariat + 50 Utuk Pelayanan	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	60 Mbps (10 Mbps untuk Sekretariat + 50 Utuk Pelayanan)	Kabel	Up To (Broadband)
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PNS : 92 Non PNS : 85 **Total : 177 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Ruang Kepala	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	120 Mbps (50 Mbps Kepala Dinas+ 70 Mbps Keuangan)	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
				Dinas dan Keuangan)							
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Untuk Keperluan - Venus - Penyuluhan - moh joni)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	30 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	PNS : 83 Non PNS : 156 **Total : 239 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Peternakan dan Perikanan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Biznet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optic	Biznet	Biznet	Biznet	75 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
33	Dinas Sosial	PNS : 32 Non PNS : 24 **Total : 56 Pegawai**	VPN JIP-Dinas Sosial	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (50Mbps Seluruh Ruangan, 50Mbps Untuk Conference dan Server)	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	100 Mbps (50Mbps Seluruh Ruangan, 50Mbps Untuk Conference dan Server)	Kabel	Up To (Broadband)
34	Satuan Polisi Pamong Praja	PNS : 100 Non PNS : 171 (Banpol : 160 dan THLP : 11	VPN JIP-Satuan Polisi Pamong Praja	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
		) **Total : 271 Pegawai**	IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	PNS : 295 Non PNS : 501 **Total : 796 Pegawai**	VPN JIP-RSUD dr. Abdoer Rahem	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	10 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			Biznet Metro	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (untuk Client)	Fiber Optik	Biznet Metro	Biznet Metro	Biznet Metro	100Mbps	Kabel	Dedicated
			Telkom Indihome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Client dan Server)	Fiber Optik	Telkom Indihome	Telkom Indihome	Telkom Indihome	Up to 100Mbps (50 Mbps Client + 50 Mbps Server INACBG)	Kabel	Up To (Broadband)

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			Biznet Healthnet	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional (Untuk Server)	Fiber Optik	Biznet Healthnet	Biznet Healthnet	Biznet Healthnet	100Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
36	Kecamatan Situbondo	PNS : 17 Non PNS : 11 **Total : 28 Pegawai**	VPN JIP-Kecamatan Situbondo	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	100 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
37	Kecamatan Bungatan	PNS : 15 Non PNS : 10 **Total : 25 Pegawai**	JIP-Kecamatan Bungatan VPN JIP-Kecamatan Bungatan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Fiber Optic(Metrolink)+Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Kabel+Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	72 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
38	Puskesmas Situbondo	PNS : 36 Non PNS : 42 **Total : 78 Pegawai**	VPN JIP-Puskesmas Situbondo	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	10 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	20 Mbps (10 Mbps Untuk Lantai 1 10 Mbps Untuk Lantai 2)	Kabel	Up To (Broadband)
39	Puskesmas Bungatan	PNS : 20 orang Non PNS : 54 orang **Total : 74 Pegawai**	VPN JIP-Puskesmas Bungatan	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	10 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband

Kode OPD	Nama OPD	Jumlah SDM	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringa	Bandwidth	Tipe Media jaringan	Dedicated/ Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	50 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PNS : 24 Non PNS : 35 Non ASN Prov: 2 **Total : 62 Pegawai pegawai lapangan : 31**	VPN JIP-Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo (Untuk Seluruh OPD)	Wireless	Aset Pemerintah Daerah Situbondo (Diskominfo)	Diskominfo	Diskominfo	20 Mbps	Nirkabel (Radio)	Broadband
			IndiHome	Penambahan Penggunaan Jaringan Internet Mandiri untuk mendukung Operasional	Fiber Optik	IndiHome	IndiHome	IndiHome	100 Mbps	Kabel	Up To (Broadband)

Lampiran 7.2 Kondisi Eksisting Data Perangkat Keras *Server*

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
3	Bagian Hukum	IBM	Server aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo	Web Server	4 GB	1000 GB	low End	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2014	non-RAID	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Internal PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data Dinkominfo	Aplikasi	Ubuntu 20.04 LTS	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Server Production	Aplikasi SPSE	Aplikasi	32	1000	Mid	SPSE	2019	RAID 1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Internal PD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Internal PD	Aplikasi	Ubuntu - Xentos 7	Internal PD
		Server Penyimpanan	Digunakan untuk menyimpan data transaksi pengadaan dan kontrak pengadaan	Database	BIOS	12TB	High	SPSE	2019	RAID 1	Internal PD	Internal PD	Internal PD	Internal PD	Internal PD	Database	BIOS	Internal PD
		Server Backup	Digunakan untuk menyimpan data backup dari data kontrak	Database	16GB	1000	Low	SPSE	2011	RAID 1	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD	Backup	Xentos7	Internal OPD

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
			dan transaksi pengadaan														
		Server Sekretariat	Digunakan untuk menyimpan dokumen administrasi meliputi perencanaan, penganggaran, standarisasi LPSE	Aplikasi dan Database	16GB	1000	Mid	-	2018	RAID 1	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD	Aplikasi	Debian	Internal OPD
		Server Monitoring	Digunakan untuk pemantauan server PBJ	Web Server	4GB	500	Low	-	2012	non RAID	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD	Internal OPD	Monitoring	Xentos 7	Internal OPD
11	Inspektorat	PC Server	Storage Data Aplikasi dan Database Server	Webserver, Aplikasi dan Database	8 gb	1000 gb	High End	E-SKBT Online dan Alako (Aplikasi Layanan Konsultasi)	2018	Non-RAID	Inspektorat	Inspektorat	Diskominfo	Pusat Data Dinkominfo	Aplikasi	Centos 7	Diskominfo
12	Badan Kepeg	Atttendance	Sebagai server	Database	280GB	280GB	Mid End	Attendance	2015	-	BKPSDM	Internal PD	BKPSDM	Internal PD	Aplikasi	Windows	BKPSDM

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
	awaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		yang menyimpan informasi finger seluruh ASN														
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	server kominfo	pusat data	Web serfer	1E+13	1000000giga	Hihg end	Aplikasi	2020	Raid	Diskominfo	internal PD	diskominfo	pusat data diskominfo	aplikasi	web site	Diskominfo
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Proxy SIAK 24	Sebagai proxy SIAK Terpusat untuk layanan adminduk kabupaten	Proxy Server	16 GB	750 GB	High End	Proxy SIAK	2018	non-RAID	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo	Internal PD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo	Internal PD	Aplikasi Proxy	Windows	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Server KTP elektronik	Digunakan sebagai penyimpanan data KTP Elektronik	Database	64	1000	High	KTP Elektronik	2015	.	.	.	.	.	.	.	.

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
		Server Hosting	Digunakan untuk aplikasi SILAO, SIKANDA, BALADA AKHIR, PEVITA, KENDEDES	Aplikasi dan Database	64	1000	High	aplikasi SILAO, SIKANDA, BALADA AKHIR, PEVITA, KENDEDES	2020	.	OPD	OPD	OPD	OPD	Aplikasi	Windows Server	OPD
		Proxy SIAK	Sebagai proxy SIAK Terpusat untuk layanan adminduk kabupaten	Proxy	64	1000	High	SIAK	2020	.	OPD	OPD	OPD	OPD	Aplikasi	Windows Server	OPD
		Server Konsolidasi	Digunakan sebagai penyimpanan data aplikasi konsolidasi data penduduk	Database	8	250	Mid	SIAK Konsolidasi	.	.	OPD	OPD	OPD	OPD	Database	Windows Server	OPD
18	Dinas Kesehatan	HP Proliant DL380 Gen 8	Server utama untuk seluruh aplikasi	Web Server/Database	160GB	4000GB	Mid End	Apache, MySQL, PHP	2019	RAID 1	Dinas Kesehatan	Internal PD	Dinas Kesehatan	Internal PD	Aplikasi	Windows Server 2016	Subbag Sungraminfo

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
			Dinas Kesehatan														
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	KOMINFO_DELL ST: 4T3SZL	"DELL Power Edge R730 (ST: 4T3SZL2), Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	8 GB	1536 GB	High End	Proxmox	2017	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_DELL ST: 77CL9M2	"DELL Power Edge R730 (ST: 77CL9M2), Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	16 GB	1792 GB	High End	Proxmox	2017	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_DELL ST: 2HJJ6Q2	"DELL Power Edge R530 (ST: 2HJJ6Q2), Intel(R) Xeon(R) CPU E5-	Server VPS	16 GB	1536 GB	High End	Proxmox	2017	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
			2620 v4 @ 2.10GHz"														
		KOMINFO_DELL R430	"DELL R430, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 v4 @ 1.70GHz"	Server VPS	64 GB	3584 GB	Mid End	Proxmox	2017	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_DELL R730	"DELL R730, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server VPS	16 GB	2048 GB	High End	Proxmox	2017	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_HP DL380	HP DL380 Gen9, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz"	Server Database	16GB	1792 GB	High End	Proxmox	2018	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Database	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_DELL R540	DELL R540, Intel(R) Xeon(R) Bronze	Server Aplikasi	64 GB	4800 GB	High End	-	2019	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
			3106 CPU @ 1.70GHz"														
		DELL_CPANEL	Cpanel Server WHM, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz"	Cpanel	132 GB	10240 GB	High End	CPANEL	2019	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_IBM	IBM, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407"	Server Aplikasi	4 GB	2048 GB	Low End	-	2014	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Linux	Bidang TIK
		KOMINFO_DELL R540_1	DELL R540, Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz"	Server Aplikasi	64 GB	4800 GB	High End	-	2020	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi dan Notifikasi	Windows	Bidang TIK
		KOMINFO_DELL R540_2	DELL R540, Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @	Server Aplikasi	64 GB	4800 GB	High End	-	2020	Non-RAID	Diskominfo	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Kominfo	Aplikasi	Windows	Bidang TIK

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
			1.70GHz"														
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Server DPMPTSP	Digunakan untuk website DPMPTSP, SIPINTER, SiTajin	Web server dan Database	8GB	500	Mid	website DPMPTSP, SIPINTER, SiTajin	2017	non-RAID	DPMPTSP	Internal PD	Diskominfo	Pusat Data Dinkominfo	Aplikasi	Ubuntu	DPMPTSP
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Server Node A	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART A DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	256 GB	6 TB	High End	Nutanix Enterprise Cloud Platform	2017	Nutanix Acropolis Files Service [AFS]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	DNS Server, Web Server, Mail Server, Dll.	Nutanix OS	Mohammad Saiful Rizal
		Server Node B	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART B DARI HYPERCONVERGED INFRASTR	256 GB	6 TB	High End	Nutanix Enterprise Cloud Platform	2017	Nutanix Acropolis Files Service [AFS]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Web Server, Mail Server, DNS Server Dll.	Nutanix OS	Mohammad Saiful Rizal

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
				UCTURED (HCI)													
		Server Node C	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART C DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	256 GB	6 TB	High End	Nutanix Enterprise Cloud Platform	2017	Nutanix Acropolis Files Service [AFS]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	DNS Server, Web Server, Mail Server, Dll.	Nutanix OS	Mohammad Saiful Rizal
		Server NODE D	NUTANIX HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	PART D DARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURED (HCI)	512 GB	12 TB	High End	Nutanix Enterprise Cloud Platform	2017	Nutanix Acropolis Files Service [AFS]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	DNS Server, Web Server, Mail Server, Dll.	Nutanix OS	Mohammad Saiful Rizal
		Server Database	Server database	Database	-	-	Mid End	SQL SERVER	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	-	Windows Server 2016	Mohammad Saiful Rizal

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
		Server Sync	Server Sync	Sinkronisasi data	-	-	Mid End	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internal PD	-	Windows Server	Mohammad Saiful Rizal
29	Dinas Perhubungan	Server Database CCTV	Sebagai server penyimpanan sementara rekaman RTTMC	Database	4 GB	2TB	Mid End	RTTMC	2019	-	Dinas Perhubungan	Internal PD	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Backup	Windows	Tidak ada
33	Dinas Sosial	CPANEL	Tidak ada	Web Server, Aplikasi, Database	Tidak ada	25 Gb	Mid End	CPANEL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pusat Data Dinkominfo	Dinas Sosial Situbondo	Pusat Data Dinkominfo	Aplikasi	Cpanel	Dinas Sosial Situbondo
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Server billing system	MSSQL database server untuk billing system RS	Database	64GB	1300 GB	High End	MSSQL server	2019	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem	internal	RSUD dr. Abdoerrahem + pihak ketiga	Internal	Aplikasi	Windows Server 2016	Koordinator IT
		Server Farmasi & Persediaan non Farmas	Server database untuk aplikasi Farmasi dan persediaa	Database	32GB	1600GB	High End	MSSQL	2016	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem SItubondo	Internal	rsud dr. Abdoerrahem + pihak ketiga	Internal	Aplikasi	Windows Server 2008	Koordinator IT

Kode OPD	Nama OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jenis Teknologi Prosesor	Software / Aplikasi yang tersedia pada Server	Tahun Pembelian	Teknik Penyimpanan	OPD Pemilik Server	Status Kepemilikan	OPD Pengelola Server	Lokasi Server	Keguna an Server	Operating System yang Digunakan	Penanggung Jawab
		i	n non Farmasi														
		DNS Server	Server untuk DNS	DNS	2GB	80GB	Low End	BIND	2016	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal	Aplikasi	Linux	Koordinator IT
		Server Eklaim	Server Aplikasi Eklaim	Aplikasi	16	1000GB	Mid End	XAMPP	2016	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal	Aplikasi	Windows 7	Koordinator IT
		Server Promedika	Server untuk aplikasi SIMRS	Aplikasi dan Database	32GB	1000GB	Mid End	Proxmox	2016	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal PD	Internal PD + pihak ketiga	Internal PD	Aplikasi	Linux	Koordinator IT
		Server Radius	Server untuk authentikasi radius	aplikasi	2GB	500GB	Low End	Radius	2016	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal	Internal	Internal	Aplikasi	Linux	Koordinator IT
		Server BLUD	Server untuk aplikasi keuangan BLUD	Web server + database	16GB	1000GB	Mid End	Aplikasi BLUD	2020	non RAID	RSUD dr. Abdoerrahem	Internal	Pihak ketiga	Pusat Data Diskominfo	Aplikasi	Windows Server 2016	Bidang Keuangan RS
37	Kecamatan Bungatan	LocalHost	Server yang digunakan untuk layanan hosting domain	Web Server	--	25 Gb	-	Website Kecamatan Bungatan	-	-	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Situbondo	-	Kecamatan Bungatan	Pusat Data Diskominfo	Aplikasi	Linux	Badri, SH

Lampiran 7.3 Kondisi Eksisting Server Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Server	IP	Tipe	Spesifikasi							Kegunaan	Keterangan	Nama Aplikasi	Pemilik	Pengelola	Lokasi
				Merek	Tipe	Memory (GB)	Core	Tipe HDD	Space HDD	Free HDD						
1	KOMINFO_DELL ST: 4T3SZL	192.168.99.64	Fisik	DELL	DELL Power Edge R730	8	8	HDD	1536 GB	1280 GB	Virtualisasi	PROXMOX	Ip-Bkpsdm, Usul-KP	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
2	KOMINFO_DELL ST: 77CL9M2	192.168.99.62	Fisik	DELL	DELL Power Edge R730	16	8	HDD	1792 GB	1664 GB	Backup	PROXMOX	-	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
3	KOMINFO_DELL ST: 2HJJ6Q2	192.168.99.61	Fisik	DELL	DELL Power Edge R530	16	8	HDD	1536 GB	1184 GB	Virtualisasi	PROXMOX	UKPBJ (ULP), E-Sakip, Abangsitur, Banar, RTLH, Website Rumah Sakit, Website OPD, Website KIM, Website Desa/Kelurahan, Aladin, Siagacovid, WBS, PETIS, Talipusar, Klik ON Simami	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
4	KOMINFO_DELL	192.168.99.59	Fisik	DELL	DELL Power	64	6	HDD	3584 GB	3578 GB	Gateway	PROXMOX	Service SP2D	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data

No	Nama Server	IP	Tipe	Spesifikasi							Kegunaan	Keterangan	Nama Aplikasi	Pemilik	Pengelola	Lokasi
				Merek	Tipe	Memory (GB)	Core	Tipe HDD	Space HDD	Free HDD						
	R430				Edge R430											Diskominfo
5	KOMINFO_DELL R730	192.168.99.60	Fisik	DELL	DELL Power Edge R730	16	8	HDD	2048 GB	2012 GB	Virtualisasi	PROXMOX	SIPAM, E-Berkah	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
6	KOMINFO_HP DL380	192.168.99.58	Fisik	HP	HP DL380 Gen9	16	8	HDD	1792 GB	1762 GB	Database			Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
7	KOMINFO_DELL R540	192.168.99.51	Fisik	DELL	DELL Power Edge R540	64	8	HDD	4800 GB	4700 GB	Webserver		Esurat, SIPESAT	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
8	DELL_CPANEL	192.168.99.72	Fisik	DELL	DELL Power Edge R530	132	12	HDD	10240 GB	9500 GB	Webserver	Website OPD & Kecamatan, Website Puskesmas, Sikembarkepo, Sikembarikan, Silaksa, Simpelputer, Simpeldagin, SDTIK, Ralin, Sinews, E-Mutasi, BPUM, Sipenamas, Diksi, RPMT, SIAPP, SLKS, Satudata,		Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo

No	Nama Server	IP	Tipe	Spesifikasi							Kegunaan	Keterangan	Nama Aplikasi	Pemilik	Pengelola	Lokasi
				Merek	Tipe	Memory (GB)	Core	Tipe HDD	Space HDD	Free HDD						
												SIMKU, Siormas, Sinovc, Laporpak, SIBESTI, Sriti-Prima, TKPKD, Sidak, Tajin Palappa, Anjab-Abk				
9	KOMINFO_IBM	192.168.99.56	Fisik	IBM	IBM X3100 M5	4	4	HDD	1024 GB	401 GB	Webserver		PPID	Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
10	KOMINFO_DELL R540_NOTIF	192.168.99.116	Fisik	DELL	DELL R540	64	8	HDD	4800 GB	4700 GB	Webserver	Server Untuk Mengelola Notifikasi		Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo
11	KOMINFO_DELL R540_BACKUP	192.168.99.117	Fisik	DELL	DELL R540	64	8	HDD	4800 GB	4700 GB	Webserver			Diskominfo	Bidang TIK	Pusat Data Diskominfo

Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Komputasi Awan

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Government Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembangan	Unit Operasional	Jangka Waktu Pelayanan
1	I.KA.001	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Google Drive	untuk penyimpanan data	Cloud	Internal OPD	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	free	Google	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Lifetime
2	I.KA.002	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Google Drive	untuk penyimpanan data	Cloud	internal Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Free	Google	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Lifetime
5	I.KA.003	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Google Drive	Digunakan untuk penyimpanan yang didapatkan dari lisensi email google	PaaS	Google	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8.214.000/tahun (4user)	Google	Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa	Periodik - 1tahun
11	I.KA.004	Inspektorat	Google Drive	Penyimpanan SK dan Data Pegawai	Cloud	Inspektorat	Sekretariat	gratis	Google	Sekretariat	Lifetime
16	I.KA.005	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Google Drive	Penyimpanan data perencanaan, dokumentasi foto acara	Cloud	Internal OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Free	Google	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lifetime
19	I.KA.006	Dinas Ketenagakerjaan	Google drive	untuk penyimpanan data	Cloud	Internal OPD	Dinas Ketenagakerjaan	gratis	Google	Dinas Ketenagakerjaan	Lifetime
22	I.KA.007	Dinas Lingkungan Hidup	Google Drive	Penyimpanan backup Data di Google Drive	Cloud	Sendiri	Dinas Lingkungan Hidup	Gratis	Google	Sekretariat	Lifetime
28	I.KA.008	Dinas Pendidikan dan	Dikbudsit	Cloud Computing dalam Paket	Google Drive	Dispendikbud	Dispendikbud	Gratis	Pihak Ketikga - Google	Lingkungan Dispendikbud	Lifetime

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Government Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembangan	Unit Operasional	Jangka Waktu Pelayanan
		Kebudayaan		G-Suite							
38	I.KA.009	Puskesmas Situbondo	Google Drive	Untuk menyimpan backup data	Cloud	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo	free	Google	Tidak ada	Lifetime
39	I.KA.010	Puskesmas Bungatan	Google Drive	web server	Google	Puskesmas Bungatan	Puskesmas Bungatan	free	Google	SIP	Lifetime
40	I.KA.011	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Google Drive	Untuk menyimpan backup data	Cloud	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	free	Google	Tidak ada	Lifetime

Lampiran 7.5 Kondisi Eksisting Fasilitasi Komputasi

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Fasilitas	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitasi (gratis/berbayar)	Sistem Pengaman Fasilitas
12	I.FK. 001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	VPS	20Mbps	20Mbps	Diskominfo	BKPSDM	Diskominfo dan BKPSDM	-	-
20	I.FK. 002	Dinas Komunikasi dan Informatika	NAS	100 Mbps	100 Mbps	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Lisensi (Berbayar)	Firewall Proxmox

Lampiran 7.6 Sistem Penghubung Layanan

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	I.SPL.001	API	Digunakan untuk menghubungkan data transaksi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah	API	Internal	Internal	Jaringan Kominfo	Web API - BKAD
11	Inspektorat	I.SPL.002	Notifikasi Whatsapp	Untuk keperluan Notifikasi / Pemberitahuan aplikasi melalui nomor Whatsapp	Web API Whatsapp	Diskominfo	Diskominfo	-	Aplikasi AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	I.SPL.003	esakip	untuk memberikan penilaian pada asn. seperti skp	esakip	pemkab. situbondo	Bagian organisasi	jaringan web	ke semua opd
15	Badan Pendapatan Daerah	I.SPL.004	Integrasi Data BPHTB Bapenda dengan BPN	Sistmen yang mendukung pertukaran data BPHTB antara BPN dengan Bapenda	WebService Host to Host	Bapenda	Bapenda	-	BPHTB
		I.SPL.005	Pembayaran Elektronik PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya dengan Bank Jatim	Sitstem yang mendukung Pembayaran Elektronik PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya antara Bank Jatim dengan Bapenda	WebService Host to Host	Bapenda	Bapenda	-	BPHTB, PBB dan Pajak Daerah Lainnya
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	I.SPL.006	Data Warehouse Kependudukan (DWH)	-	Web Service	Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	KOMINFO	Data Warehouse Kependudukan (DWH)
18	Dinas Kesehatan	I.SPL.007	Web Service Aplikasi IR	Web Service untuk menghubungkan data dari aplikasi SIMESSEM	Web Service	Diskominfo	Diskominfo	VPN Pemda	SIMESSEM

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
				ke Ruang IR					
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.SPL.008	Satu Data	Sistem Penghubung Layanan berupa service API, data didapatkan bersumber dari aplikasi satudata yang dikelola oleh Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Service API	OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Jaringan Komunikasi Data Kab. Situbondo	satudata.situbondokab.go.id
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	I.SPL.009	DP3AP2KB KABUPATEN SITUBONDO (http://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/agenda/)	terhubungan ke website sibesti	WEB API	OPD	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	VPN_KOMINFO-RO VPN_KOMINFO-2	SIBESTI (https://sibesti.situbondokab.go.id/)
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I.SPL.010	Web Service (NIK)	Untuk menghubungkan penggunaan data perorangan dengan menggunakan NIK	Web	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jaringan Kominfo	SIPINTER - Portal Dispenduk
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I.SPL.011	API KEMENDIKBUDRISTEK API SISGUR API ABSENSI	Sistem penghubung dibuat sebagai integrasi data untuk mendapatkan data valid yang terbarukan.	Web Service / Host To Host / G TO G	KEMENDIKBUDRISTEK Dispendikbud Disdukcapil	KEMENDIKBUDRISTEK Dispendikbud Disdukcapil	Sisgur jaringan Intranet Kominfo	SISGUR (SISTEM INFORMASI SISWA DAN GURU) ABSENSI (SISTEM ABSENSI

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
									TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN)
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	I.SPL.012	Ketersediaan Kamar	bridging ketersediaan kamar SIMRS dengan BPJS	Web Service	BPJS	BPJS	-	SIMRS- Aplicare BPJS
		I.SPL.013	Bridging vclaim	Bridging simrs dengan vclaim bpjs	web service	BPJS	BPJS	-	Billing system - vclaim bpjs
39	Puskesmas Bungatan	I.SPL.014	Bridging vclaim	bridging sikda dengan vclaim bpjs	Web Service	BPJS DAN DINKES	BPJS DAN DINKES	BELUM TERSEDIA	KIOSK DAN VCLAIM BPJS
		I.SPL.015	SIMESSEM	BRIDGING SIKDA DENGAN SI MESSEM	Web Service	BPJS DAN SIKDA	BPJS DAN SIKDA	INDIHOME	SIKDA DENGAN SI MESSEM

Lampiran 7.7 Kondisi Eksisting Perangkat Periferal

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
2	I.PKP. 001	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	-	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	I.PKP. 002		Proyektor	Penampil Gambar	-	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	I.PKP. 003		Tv	Penampil Gambar	-	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	I.PKP. 004		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	-	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	I.PKP. 005		Ht	Alat Komunikasi	-	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	I.PKP. 006		Sound System	Pengeras Suara	-	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	I.PKP. 007	Bagian Hukum	Proyektor	Penampil Gambar	EXTERNAL	1	Bagian Hukum	Bagian Hukum
	I.PKP. 008		Monitor	Penampil Gambar	EXTERNAL	10	Bagian Hukum	Bagian Hukum
	I.PKP. 009		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	EXTERNAL	3	Bagian Hukum	Bagian Hukum
4	I.PKP. 010	Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	Proyektor + Monitor	Penampil Gambar	-	1	Ruang Gudang	Pengurus Barang
5	I.PKP. 011	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Lcd Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Gedung UKPBJ Dan Ruang Lab Komputer LPSE	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP.012		Tv	Penampil Gambar	-	2	Gedung UKPBJ 1, LPSE 1	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
	I.PKP.013		Camera	Penangkap Gambar Dan Video	-	1	LPSE	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
	I.PKP.014		Lensa	Lensa Kamera	-	1	LPSE	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
6	I.PKP.015	Bagian Umum	Led Tv	Penampil Gambar	Panasonic	4	Ruang TU, Ruang RT, Ruang Ka.Bag, Ruang Tengah Bagian Umum	Bagian Umum
	I.PKP.016		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Canon	2	Ruang TU Dan Perlengkapan	Bagian Umum
	I.PKP.017		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	1	Ruang TU	Bagian Umum
	I.PKP.018		Speaker	Pengeras Suara	Logitec	3	Masing Masing Ruang Sub Koordinator	Bagian Umum
7	I.PKP.019	Bagian Organisasi	Ht	HT	HT	3	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
	I.PKP.020		Smart TV	Smart TV	LG Smart TV	1	Ruang Rapat Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
								Kabupaten Situbondo
	I.PKP. 021		Proyektor	Proyektor	Sony Proyektor	1	Ruang Rapat Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
	I.PKP. 022		Scanner	Scanner	Fujitsu Scanner	1	Ruang Kerja Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
	I.PKP. 023		Webcam	Webcam	Logitech Webcam	1	Ruang Rapat Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
	I.PKP. 024		Telfon	Digunakan Sebagai Alat Komunikasi Antar Bagian	-	4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
8	I.PKP. 025	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Scanner	Untuk Scam Data	Ujiksu 1425	1	R Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	I.PKP. 026		Speaker	Disetia Ruangan Sub Bagian	-	3	R. Sub Bagian Protokol R. Sub Bagian Komunikasi R.	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
							Sub Bagian Dokumentasi	
10	I.PKP. 027	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Led Tv	Penampil Gambar	LG	10	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	I.PKP. 028		Proyektor	Penampil Gambar	Panasonic	4	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	I.PKP. 029		Scanner	Pemindai Dokumen Dan Gambar	Epson	2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	I.PKP. 030		Kamera	Penangkap Gambar	Canon	6	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	I.PKP. 031		Speaker	Pengeras Suara	Simbada	22	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
11	I.PKP. 032	Inspektorat	Scanner	Epson	DS-410	10	Inspektorat Daerah Kabupate Situbondo	Bidang Aset BKAD
	I.PKP. 033		Scanner Portable	ALFA LINK	IZZI SCANER AS1212	4	Iinspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	Bidang Aset BKAD
	I.PKP. 034		Scanner	PLUSTEK	PL2550	2	Inspektorat Daerah Kabupetan Situbondo	Bidang Aset BKAD
	I.PKP. 035		Server	HP	ML350pG8-675 Server	1	KOMINFO	Bidang Aset BKAD
12	I.PKP. 036	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Led Tv	Penampil Gambar	Samsung	4	BKPSDM	BKPSDM
	I.PKP. 037		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Fujitsu Dan Brother	5	BKPSDM	BKPSDM
	I.PKP. 038		Proyektor	Penampil Gambar	Epson Dan Sony	4	BKPSDM	BKPSDM

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP.039		Kamera	Penangkap Gambar	Canon	5	BKPSDM	BKPSDM
	I.PKP.040		Handycam	Penangkap Video	Sony	2	BKPSDM	BKPSDM
	I.PKP.041		Speaker	Pengeras Suara	Sekaku	1	BKPSDM	BKPSDM
	I.PKP.042		Finger Print	Alat Sensor	Solution	7	BKPSDM	BKPSDM
13	I.PKP.043	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Smart TV	Perangkat Tambahan	Layar Monitor	1	Ruang Aula	Bakesbangpol
	I.PKP.044		Proyektor	Penampil Gambar	Infocus	1	Sekretariat	Bakesbangpol
	I.PKP.045		Kamera	Penangkap Gambar	Canon	1	Sekretariat	Bakesbangpol
	I.PKP.046		Finger Print	Mesin Absensi	ZEEM600	1	Sekretariat	Bakesbangpol
14	I.PKP.047	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Lcd Projektor	Penampil Gambar	LG, Epson, Infocus, Sony, Benq	17	-	BKAD
	I.PKP.048		Finger Print	Mesin Absensi	Solution X401	8	-	BKAD
	I.PKP.049		Mesin Perforator	Alat Untuk Melubangi Kertas/Kartu	Star Perforator	1	-	BKAD
	I.PKP.050		Led Tv	Sarana Hiburan Dan Penampil Gambar	Panasonic, Samsung, LG, Sony, Sharp	24	-	BKAD
	I.PKP.051		Tape Recorder	Perekam Suara	Sony	7	-	BKAD
	I.PKP.052		Sound System	Penghantar Suara	Sony	8	-	BKAD
	I.PKP.053		Megaphone	Penghantar Suara	TOA	3	-	BKAD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP. 054		Handy Cam	Perekam Gambar	Cannon, Sony	6	-	BKAD
	I.PKP. 055		Camera	Penangkap Gambar	LG, Cannon, Sony, Ricoh	11	-	BKAD
	I.PKP. 056		Camera Conference	Penangkap Gambar	Logitech	1	-	BKAD
	I.PKP. 057		Telephone (PABX)	Sarana Komunikasi	Panasonic,	3	-	BKAD
	I.PKP. 058		Handy Talky (Ht)	Sarana Komunikasi	Bofeng, Alinco	10	-	BKAD
	I.PKP. 059		Scanner	Sarana Percetakan	Panasonic	11	-	BKAD
15	I.PKP. 060	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-
16	I.PKP. 061	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fingerprint	Fingerprint Digunakan Untuk Absensi Pegawai ASN Dan NON ASN	Fingerprint Magicom 200	1	Lantai 1 Bappeda	Bappeda
	I.PKP. 062		Led Tv	Penampil Gambar	Samsung	7	Bappeda	Bappeda
	I.PKP. 063		Proyektor	Penampil Gambar	Panasonic , Infocus	3	Bappeda	Bappeda
	I.PKP. 064		Sound Sistem	Pengeras Suara	Sony	3	Bappeda	Bappeda
17	I.PKP. 065	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Fingerprint	Alat Sensor	Hybrid	2	Sekretariat	
	I.PKP. 066		Proyektor	Penampil Gambar	BENQ	1	Sekretariat	
	I.PKP. 067		Led Monitor	LED Monitor	Monitor	14	Internal Internal OPD	Internal Internal OPD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP. 068		Led Tv	Penampil Gambar	Samsung Dan Polytron	8	Ruang Kadis, Ruang Pelayanan, Sekretariat, Ruang Bidang PIAK, Ruang Sekretaris Dinas, Ruang Bidang Pelayanan	Internal Internal OPD
	I.PKP. 069		Scanner	Scanner	Scanner	3	Internal Internal OPD	Internal Internal OPD
18	I.PKP. 070	Dinas Kesehatan	Led Monitor	LED Monitor	Monitor	14	Internal Internal OPD	Internal Internal OPD
	I.PKP. 071		Tv	TV	TV	5	Internal Internal OPD	Internal Internal OPD
	I.PKP. 072		Scanner	Scanner	Scanner	3	Internal Internal OPD	Internal Internal OPD
19	I.PKP. 073	Dinas Ketenagakerjaan	Tv	Penampil Gambar	-	2	R.Kabag, R.Kadis	Sekretariat - Pengurus Barang Milik Daerah
	I.PKP. 074		Proyektor	Penampil Gambar	-	2	R Kesekratiat	Sekretariat - Pengurus Barang Milik Daerah
	I.PKP. 075		Monitor	Penampil Gambar	-	2	R Subah Umum	Sekretariat - Pengurus Barang Milik Daerah
	I.PKP. 076		Speaker	Pengeras Suara	-	9	Diseluruh Ruangan	Sekretariat - Pengurus Barang Milik Daerah

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
20	I.PKP.077	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Drone	Digunakan Untuk Menggambil Gambar Atau Video	Dji Mavic 2 Pro Gimbal-Stabilized 12MP / 4K	2	Dinas Kominfo Situbondo	Dinas Kominfo Situbondo
	I.PKP.078		Televisi	Digunakan Sebagai Media Conference/Streaming	LG 60 Inch 4K	12	Dinas Kominfo Situbondo	Dinas Kominfo Situbondo
	I.PKP.079		Monitor	Untuk Menampilkan Data Grafis	LG 21 Inch Full HD	5	Dinas Kominfo Situbondo	Dinas Kominfo Situbondo
	I.PKP.080		Proyektor	Sebagai Media Atau Alat Bantu Untuk Menampilkan Gambar/Grafis	BENQ- MS531 3300 Lumens ANSI SVGA	12	Dinas Kominfo Situbondo	Dinas Kominfo Situbondo
	I.PKP.081		Ht	Alat Komunikasi	Kenwood	6	-	Diskominfo
	I.PKP.082		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson	4	Seluruh Bidang	Diskominfo (Seluruh Bidang)
	I.PKP.083		Video Wall	Penampil Gambar	DW	18	Ruang Rapat Bupati (Command Center)	Diskominfo
	I.PKP.084		Video Tron Standing	Penampil Gambar	Tidak Ada Merk	72 Module	Pendopo Kabupaten Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.085		Mobile Video Tron	Penampil Gambar	Tidak Ada Merk	Modul 24m2	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.086		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	Sony Dan Canon	7	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.		Kamera	Penangkap Gambar	Logitec	2	Dinas Kominfo	Diskominfo

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	087		Webcam	Dan Video			Situbondo	
	I.PKP.088		Tablet	Penampil Gambar	Samsung	4	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.089		Speaker	Pengeras Suara	Yamaha	3	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.090		Signature Pen	Alat Penulis Digital	Wacom	1	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.091		Finger Print	Alat Sensor	Fingerspot	2	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
	I.PKP.092		Lemari Penyimpanan Kamera	Penyimpanan	Tidak Ada Merk	1	Dinas Kominfo Situbondo	Diskominfo
21	I.PKP.093	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	Cctv	Alat Pemantau	Hikvision	28	Internal OPD, UPT PASAR	Internal OPD
	I.PKP.094		Lcd/Proyektor	Penampil Gambar	NEC, BENQ, TOSHIBA	6	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP.095		Tv	Penampil Gambar	PANASONIC, POLYTRON, LG, SHARP	26	Internal OPD, UPT PASAR	Internal OPD
	I.PKP.096		Camera Conferense	Penangkap Gambar Dan Video	Logitech	2	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP.097		Soundsystem	Pengeras Suara	JBL, BMB, TENS	10	Internal OPD, UPT PASAR	Internal OPD
	I.PKP.098		Camera Digital	Penangkap Gambar Dan Video	Canon, Sony	11	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP.099		Telepon	Alat Komunikasi	Panasonic	1	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP.100		Ht	Alat Komunikasi	Keenwood, Alinco	9	Internal OPD	Internal OPD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP. 101		Genset	Alat Cadangan Listrik	KRISBOW, HONDA, KUBOTA, DAIMARU	12	Internal OPD	Internal OPD
22	I.PKP. 102	Dinas Lingkungan Hidup	Cctv	Alat Pemantau	-	22	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 103		Lcd/Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 104		Tv	Penampil Gambar	Polytron	6	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 105		Loudspeaker	Pengeras Suara	-	2	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 106		Soundsystem	Pengeras Suara	-	1	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 107		Camera Digital	Penangkap Gambar Dan Video	-	9	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 108		Telepon	Alat Komunikasi	-	1	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 109		Ht	Alat Komunikasi	-	35	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 110		Genset	Alat Cadangan Listrik	-	5	Internal OPD	Internal OPD
23	I.PKP. 111	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Mesin Absensi	Alat Sensor Presensi	-	1	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 112		Lcd	Penampil Gambar	-	2	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 113		Tv	Penampil Gambar	-	5	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 114		Loudspeaker	Pengeras Suara	-	3	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 115		Soundsystem	Pengeras Suara	-	16	Internal OPD	Internal OPD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP. 116		Handy Cam	Alat Kamera Penangkap	-	3	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 117		Mic	Pengeras Suara	-	17	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 118		Camera Digital	Penangkap Gambar Dan Video	-	10	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 119		Telepon	Alat Komunikasi	-	1	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 120		Ht	Alat Komunikasi	-	12	Internal OPD	Internal OPD
24	I.PKP. 121	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Scanner	Scan Dokumen	Brother	2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
	I.PKP. 122		Lcd Projector	Untuk Menampilkan Tampilan Komputer Ke Layar	BEN-Q, Epson	4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
	I.PKP. 123		Serial Printer	Mencetak Di Kertas Rangkap	Epson	9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
25	I.PKP. 124	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Finger Print	Mesih Absen	Magic M 20	1	Loby DPMD	DPMD
	I.PKP. 125		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson	1	DPMD	DPMD
	I.PKP. 126		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	2	Ruang Sekretariat DPMD	DPMD
	I.PKP.		Kamera	Penangkap Gambar	Fuji Film Dan	2	Ruang	DPMD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	127				Canon		Sekretariat DPMD	
	I.PKP. 128		Handy Cam	Penangkap Video	Sony	1	Ruang Sekretariat DPMD	DPMD
26	I.PKP. 129	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Scannner	Scanner	Plustex PL Duplex Series	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
	I.PKP. 130		Finger Print	Mesin Absensi	-	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
	I.PKP. 131		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	-	2		
27	I.PKP. 132	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lcd	Penampil Gambar	-	1	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 133		Tv	Penampil Gambar	-	8	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 134		Sound	Pengeras Suara	-	2	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 135		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	-	2	Internal OPD	Internal OPD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
28	I.PKP. 136	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Smart TV LG	Smart TV LG	TV	3	Dispendikbud - Ruang Sungram Dispendikbud - Ruang Paud Dispendikbud - Ruang Kadis	Dispendikbud
	I.PKP. 137		Cctv	CCTV	CCTV	35	Lingkungan Dispendikbud	Dispendikbud
	I.PKP. 138		Scanner	Scanner	Scanner	9	Dispendikbud	Dispendikbud
29	I.PKP. 139	Dinas Perhubungan	Fingerprint	Alat Sensor Jari	Fingerspot	2	Kantor Induk Dan Pelabuhan Jangkar	Dinas Perhubungan
	I.PKP. 140		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	1	Aula	Dinas Pehubungan
30	I.PKP. 141	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Proyektor	Proyektor	External	2	Pelayanan Perpustakaan Dan Aula Pertemuan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	I.PKP. 142		Scanner	Mesin Scanner	External	5	Tiap-Tiap Bidang	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	I.PKP. 143		Led Tv	Penampil Gambar	LG	3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	I.PKP. 144		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	Sony Dan Canon	2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	I.PKP. 145		Speaker	Pengeras Suara	TENS Dan TUM	2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
31	I.PKP.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan	Proyektor	Penampil Gambar	-	6	-	Dinas

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	146	Pangan						Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	I.PKP. 147		Tv	Penampil Gambar	-	5	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	I.PKP. 148		Speaker	Pengeras Suara	-	7	-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
32	I.PKP. 149	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Aula	Umum Dan Kepegawaian
	I.PKP. 150		Printer	Alat Pencetak Dokumen	-	20	Bidang - Bidang	Semua Bidang
	I.PKP. 151		Speaker	Pengeras Suara	-	2	Aula	Umum Dan Kepegawaian
	I.PKP. 152		Layar Proyektor	Penampil Gambar	-	2	Aula	Umum Dan Kepegawaian
33	I.PKP. 153	Dinas Sosial	Lcd Projector/Infocus	Penampil Gambar	Epson	1	Ruang Kepala Dinas	Dinas Sosial
	I.PKP. 154		Televisi, Monitor	Penampil Gambar	Panasonic, LG	4	R. Kepala Dinas, Resepsionis, Umum	Dinas Sosial
	I.PKP. 155		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson, Plustek	2	Umum, Keuangan	Dinas Sosial
34	I.PKP. 156	Satuan Polisi Pamong Praja	Led Tv	Penampil Gambar	Akari	2	Satpol PP	Satpol PP

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP. 157		Finger Print	Alat Sensor Jari	-	3	Satpol PP	Satpol PP
	I.PKP. 158		Kamera	Penangkap Gambar Dan Video	Canon Dan Sony	6	Satpol PP	Satpol PP
	I.PKP. 159		Speaker	Pengeras Suara	TOA(4) Sunway (1)	5	Satpol PP	Satpol PP
35	I.PKP. 160	RSUD Dr. Abdoer Rahem	Scanner	Scanner Untuk Keperluan Administrasi Kantor, Klaim	Scanner Document	13	Bagian Kantor	RSUD Dr. Abdoerrahem
	I.PKP. 161		Proyektor	Penampil Gambar	Epson EB 400	3	Bagian Keuangan, Diklat, Ruang Pertemuan	RSUD Dr. Abdoerrahem
36	I.PKP. 162	Kecamatan Situbondo	Tv	Penampil Gambar	Polytron	2	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 163		Cctv	Alat Kamera Pemantau	-	4	Internal OPD	Internal OPD
	I.PKP. 164		Proyektor	Penampil Gambar	Benq	2	Internal OPD	Internal OPD
37	I.PKP. 165	Kecamatan Bungatan	Tv	Perangkat Untuk Menonton Layanan Televisi	Elektronik	2	Pelayanan	PD Internal
	I.PKP. 166		Speaker Aktif	Perangkat Elektronik	Elektronik	2	Sekretariat Dan Kepala Seksi	PD Internal
	I.PKP. 167		Monitor	Monitor Perangkat Komputer	Perangkat Komputer	2	Sekretariat	PD Interal
	I.PKP. 168		Proyektor	Penampil Gambar	-	1	Internal OPD	Kecamatan Bungatan
38	I.PKP. 169	Puskesmas Situbondo	Tv	TV	SAMSUNG	1	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo
	I.PKP. 170		Tv	TV	LG	2	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP. 171		Tv	TV	Sanyo	1	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo
	I.PKP. 172		Kamera CCTV	CCTV	Telkom Indonesia	12	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo
	I.PKP. 173		Layar LCD	LCD	Panasonic	1	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo
	I.PKP. 174		Lcd Proyektor	LCD Proyektor	Panasonic	1	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo
	I.PKP. 175		Cctv	CCTV	Aytech	8	Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo
39	I.PKP. 176	Puskesmas Bungatan	Switch Dan Hub	Perangkat Keras Yang Dihubungkan Ke Komputer Untuk Meningkatkan Kegunaannya Dan Membantu Pekerjaan	Tp-Link Dan D-Link	Switch 1 Dan Hub 1	Unit Layanan Dan Tata Usaha	UPT Puskesmas Bungatan
	I.PKP. 177		Fingerprint	Alat Sensor	Fingerspot	1	Unit Layanan	
	I.PKP. 178		Proyektor	Penampil Gambar	Epson	1	Ruang Pertemuan	
	I.PKP. 179		Led Tv	Penampil Gambar	LG Dan Samsung	LG 2, Samsung 1	Unit Layanan Dan Rawat Inap	
40	I.PKP. 180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Led Tv	Penampil Gambar	LG	1	BPBD	BPBD
	I.PKP. 181		Scanner	Pemindai Gambar Dan Dokumen	Epson	3	BPBD	BPBD
	I.PKP. 182		Proyektor	Penampil Gambar	Samsung	1	BPBD	BPBD
	I.PKP. 183		Kamera	Penangkap Gambar	-	2	BPBD	BPBD

Kode OPD	ID	Internal OPD	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat	Lokasi Penempatan	OPD Pengelola
	I.PKP.184		Speaker	Pengeras Suara	-	1 Set	BPBD	BPBD

Lampiran 8.1 Kondisi Eksisting Standar Keamanan

No	OPD	Standar Kemanan Informasi	Implementasi
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bagian Hukum	Standar Kata Sandi/Password	penerapan password untuk admin aplikasi JDIH
		Standar Pegawai Baru (SDM TI)	Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola JDIH
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Standar Kata Sandi/Password	-
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Bagian Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Bagian Organisasi	Standar Kata Sandi/Password	Password e-SAKIP menggunakan NIP
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Standar Kata Sandi/Password	-
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Inspektorat	Standar Kata Sandi/Password	Menggunakan Enkripsi AES-256 dan AES-128 Pada Framework Laravel
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Standar Perangkat UPS	-
		Standar Lainnya...	-
		Standar Perangkat Firewall	-
		Standar Pemindaian Komputer (Daily Scanning)	-
		Standar Software Antivirus	
		Standar Kata Sandi/Password	-
		Standar Pegawai Baru (SDM TI)	-
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Badan Pendapatan Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Standar Kata Sandi/Password	kombinasi huruf dan angka
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Dinas Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Dinas Ketenagakerjaan	Standar Kata Sandi/Password	-
		Standar Software Antivirus	-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Standart Keamanan Dokumen	Menggunakan Tanda Tangan Digital

No	OPD	Standar Kemanan Informasi	Implementasi
			dengan Aplikasi BSSN
		Standar Kata Sandi/Password	Menggunakan Bcrypt untuk pengamanan password pada setiap aplikasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Standar Kata Sandi/Password	encrypt bcrypt
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Dinas Perhubungan	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Standar Kata Sandi/Password	Penggunaan Auser dan Password Anggota Perpustakaan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Standar Kata Sandi/Password	Untuk Wifi
33	Dinas Sosial	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Standar Kata Sandi/Password	-
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Standar Kata Sandi/Password	memberikan peringatan kepada user untuk mengganti password standar yang diberikan
		Standar Pemindaian Komputer (Daily Scanning)	antivirus memindai otomatis
		Standar Perangkat Firewall	mikrotik
		Standar Perangkat UPS	cek baterai setiap 1 tahun
		Standar Software Antivirus	kasperksy internet security
36	Kecamatan Situbondo	Tidak Ada	Tidak Ada
37	Kecamatan Bungatan	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puskesmas Situbondo	Standar Kata Sandi/Password	-
		Standar Pemindaian Komputer (Daily Scanning)	
		Standar Pegawai Baru (SDM TI)	-
		Standar Software Antivirus	-
		Standar Perangkat Firewall	-

No	OPD	Standar Kemanan Informasi	Implementasi
39	Puskesmas Bungatan	Standar Kata Sandi/Password	-
		Standar Perangkat UPS	
		Standar Software Antivirus	-
		Standar Pegawai Baru (SDM TI)	-
		Standar Pemindaian Komputer (Daily Scanning)	-
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada

Lampiran 8.2 Kondisi Eksisting Implementasi Keamanan SPBE

No	OPD	Aspek Keamanan	Standar / Framework yang Digunakan	Keterangan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bagian Hukum	Keamanan Aplikasi SPBE	dilaksanakan oleh tenaga IT Diskominfo	Tenaga It Diskominfo selaku pengembang
		Keamanan Data dan Informasi	menginstal Software Anti-Virus, Firewall, User Name " Password	-
		Keamanan Infrastuktur SPBE	dilaksanakan oleh tenaga IT Diskominfo	server di ruang server diskominfo
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Bagian Umum	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Bagian Organisasi	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Inspektorat	Keamanan Aplikasi SPBE	Enkripsi Login	Menggunakan Pengamanan Enkripsi Login Menggunakan SHA
		Keamanan Data dan Informasi	Jaringan Lokal	Dapat diakses hanya di jaringan yang sama
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Badan Pendapatan Daerah	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keamanan Data dan Informasi	FIREWALL	-
18	Dinas Kesehatan	Keamanan Data dan Informasi	Firewall Kominfo, Antivirus	-
		Keamanan Aplikasi SPBE	Firewall Kominfo, Antivirus	-

No	OPD	Aspek Keamanan	Standar / Framework yang Digunakan	Keterangan
19	Dinas Ketenagakerjaan	Keamanan Infrastuktur SPBE		-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keamanan Aplikasi SPBE	Laravel Web Framework	-
		Keamanan Data dan Informasi	Menggunakan Firewall	-
		Keamanan Infrastuktur SPBE	Menggunakan CCTV, Piket NOC	-
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Keamanan Data dan Informasi	Laravel	SSL
22	Dinas Lingkungan Hidup	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
		Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
		Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Dinas Perhubungan	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Keamanan Aplikasi SPBE	Dilaksanakan oleh Dinas Kominfo	Tenaga IT Dinas Kominfo selaku Pengembang
		Keamanan Data dan Informasi	Install Anti Virus, Penggunaan User dan Password	-
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Dinas Sosial	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Keamanan Aplikasi SPBE	-	menutup port yang tidak perlu
		Keamanan Infrastuktur SPBE	-	rack router, ruang server terkunci
		Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Kecamatan Situbondo	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada

No	OPD	Aspek Keamanan	Standar / Framework yang Digunakan	Keterangan
37	Kecamatan Bungatan	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puskesmas Situbondo	Keamanan Aplikasi SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
		Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada
		Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
39	Puskesmas Bungatan	Keamanan Data dan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keamanan Infrastuktur SPBE	Tidak Ada	Tidak Ada

Lampiran 8.3 Kondisi Eksisting Perangkat Keamanan SPBE

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
1	I.PKK.001	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I.PKK.002	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	I.PKK.003	Bagian Hukum	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	I.PKK.004	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	CCTV	DI lobby	-	Bagian perekonomian, pembangunan, dan SDA	Bagian perekonomian, pembangunan, dan SDA	Bagian umum
5	I.PKK.005	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	CCTV	Digunakan di gedung LPSE sebanyak 9 unit	-	OPD	OPD	OPD
6	I.PKK.006	Bagian Umum	CCTV	Kamera Pematauann	Hik Vision	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum
7	I.PKK.007	Bagian Organisasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	I.PKK.008	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	I.PKK.009	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	I.PKK.010	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	I.PKK.	Inspektorat	CCTV		-	opd	Inspektorat	Inspektorat

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
	011							
12	I.PKK.012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Camera Control Television System	Kamera pengawasan area OPD	Perangkat Pengawasan	BKPSDM	BKPSDM	BKPSDM
13	I.PKK.013	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	I.PKK.014	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CCTV (terdapat 16 kamera)	pengawasan	kamera cctv	Mandiri	BKAD	sub bagian Umum dan kepegawaian
	I.PKK.015		finger Lock	Untuk pengamanan ruang kepala	sensor finger	Madiri	BKAD	Sub bagian umum dan kepegawaian
15	I.PKK.016	Badan Pendapatan Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
16	I.PKK.017	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	CCTV RUSAK (4 Unit Kamera)	Kamera Pemantauan	-	Bappeda	Bappeda	Bappeda
17	I.PKK.018	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	I.PKK.019	Dinas Kesehatan	CCTV (16)			Internal OPD	Dinkes	Dinkes
19	I.PKK.020	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	I.PKK.021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Firewall (1)	Perangkat firewall untuk server di pusat server Dinas Kominfo	Sophos XG310	Milik Sendiri	Dinas Kominfo	Bidang Persandian Dinas Kominfo
	I.PKK.		CCTV (26)	Kamera Pemantauan	HikVision	Diskominfo	Diskominfo	Diskominfo

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
	022							
21	I.PKK.023	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	CCTV	Rekaman Visual	-	Milik OPD	Diskoperindag	Diskoperindag
22	I.PKK.024	Dinas Lingkungan Hidup	CCTV(22)	Kmera Pemantau	Tidak Ada	Milik OPD	Milik OPD	sub bagian Umum dan kepegawaian
23	I.PKK.025	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	CCTV	Alat Pemantauan	Hikvision	OPD	OPD	OPD
24	I.PKK.026	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	CCTV (4 Perangkat)	Kamera Pemantau	Samsung	DPUPP	DPUPP	DPUPP
25	I.PKK.027	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	CCTV (1 PAKET)	Kamera Pemantauan	HikVision	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	I.PKK.028	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27	I.PKK.029	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	CCTV	Digunakan untuk pemantauan ruang sebanyak 6 unit	Hikvision	OPD	OPD	OPD
28	I.PKK.030	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	sophos xg 330 firewall	Network & Web Firewall	Network Firewall, IPS, IDS, Web Protection, Anti virus (Sophos &	dispendikbud	dispendikbud	dispendikbud

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
					Avira)			
28	I.PKK.031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CCTV	Digunakan untuk didalam ruangan dan depan ruangan seluruh kantor	Hikvision	dispendikbud	dispendikbud	dispendikbud
29	I.PKK.032	Dinas Perhubungan	CCTV	Digunakan untuk pemantauan ruang dan Jalan	Hikvision	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
30	I.PKK.033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	CCTV	Digunakan untuk pengwasan, yang terdapat di Luar ruangan dan di dalam ruangan	Hikvision dan Honywel	OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31	I.PKK.034	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	I.PKK.035	Dinas Peternakan dan Perikanan	CCTV (10 unit)	Tidak berfungsi (kena petir)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	I.PKK.036	Dinas Sosial	CCTV (Camera Control Television System)	Ada 15 Camera dan 1 Monitor untuk memantau segala aktivitas kedinasan	Cart Canon PG	Tetap	Dinas Sosial	Umum
34	I.PKK.037	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	I.PKK.038	RSUD dr. Abdoer Rahem	CCTV	Pemantauan ruangan	-	RSUD dr. Abdoer Rahem	RSUD dr. Abdoer Rahem	Bidang Penunjang
36	I.PKK.	Kecamatan Situbondo	CCTV	Digunakan untuk pemantauan	Tidak Ada	Kecamatan situbondo	Kecamatan situbondo	Tidak Ada

Kode OPD	ID	Nama OPD	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
	039			ruangan pendopo kec, ruang camat, rumah dinas, ruang pelayanan				
37	I.PKK.040	Kecamatan Bungatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	I.PKK.041	Puskesmas Situbondo	CCTV Avtech HD Indoor DG103	Camera CCTV Untuk Indoor	-	Milik Puskesmas	Puskesmas Situbondo	Staff IT
39	I.PKK.042	Puskesmas Bungatan	Microtik	untuk keamanan sistem jaringan dan mengatur sistem jaringan yang dipakai	hardware	Mandiri	Puskesmas Bungatan	Pengurus barang
40	I.PKK.043	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CCTV (4)	Kamera Pemantau	Hik Vision	BPBD	BPBD	BPBD

Lampiran 8.4 Kondisi Eksisting Permasalahan Keamanan SPBE

Kode OPD	Nama OPD	Permasalahan keamanan	Frekuensi terjadinya masalah
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bagian Hukum	Kehilangan data	diakibatkan oleh forcemajore/banjir
		Hacker	1 kali
		Terkena virus/malware/trojan horse	Sering Terjadi
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kebocoran Data	Sering Terjadi
6	Bagian Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Bagian Organisasi	Terkena virus/malware/trojan horse	Sering Terjadi
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Inspektorat	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Hacker	Sering Terjadi
		Kehilangan data	Sering Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Sering Terjadi
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hacker	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Penyalahgunaan data	Jarang Terjadi
		Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Permasalahan keamanan lainnya..	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Ketidaksesuaian data	Sering Terjadi
15	Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan keamanan lainnya (Phising)	Jarang Terjadi
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hacker	Jarang Terjadi
		Kebocoran data	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi

Kode OPD	Nama OPD	Permasalahan keamanan	Frekuensi terjadinya masalah
		Penyalahgunaan data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
18	Dinas Kesehatan	Hacker	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
19	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Hacker	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Permasalahan keamanan lainnya..	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
22	Dinas Lingkungan Hidup	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
		Kebocoran data	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Ada	Tidak Ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hacker	Jarang Terjadi
29	Dinas Perhubungan	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi

Kode OPD	Nama OPD	Permasalahan keamanan	Frekuensi terjadinya masalah
33	Dinas Sosial	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
		Kehilangan data	Jarang Terjadi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Hacker	Sering Terjadi
		Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
		Permasalahan keamanan lainnya..	Jarang Terjadi
		Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	sering Terjadi
36	Kecamatan Situbondo	Tidak Ada	Tidak Ada
37	Kecamatan Bungatan	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puskesmas Situbondo	Kehilangan data	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
		Ketidaksesuaian data	Jarang Terjadi
39	Puskesmas Bungatan	Terkena ransomware dan sejenisnya	Jarang Terjadi
		Terkena virus/malware/trojan horse	Jarang Terjadi
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada

Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Anggaran SPBE tahun 2022

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
1	Bagian Tata Pemerintah dan Kerja Sama	T	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bagian Hukum	Y				Rp25.000.000	Pemeliharaan dan tim pengelolaan website JDIH	Rp145.093.440	Rp170.093.440	32%	Ada
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Belanja Alat Tulias Bahan Komputer	Rp660.000	pemeliharaan wifi	Rp100.000	Rp760.000	Nilai dari pagu anggaran sekitar 40% dari 3 Sub. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
										Daya Alam Sekretariat Daerah kabupaten SItubondo	
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Situbondo Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya (SiPP Berjaya)	Rp30.747.000	Tidak Ada	Rp-	Tidak Ada	Tidak Ada	Rp30.747.000	0.05%	Ada
6	Bagian Umum	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembelian Laptop, Printer, PC, cctv, Infocus, NVR, Sreen Vew, Finger Print, Sound	Rp456.138.811	Pemeliharaan Finger, TV, Internet, Software dan Jaringan, Komputer, Printer	Rp141.281.000	Rp597.419.811	(Ada File) - Persentase Nilai Anggaran untuk 3.a, 3.b, 3.c pelaksanaan	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
					Sistem, Televisi,					nya masih pada Triwulan ke 3 dengan persentase 70,02%	
7	Bagian Organisasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Tidak Ada
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemeliharaan printer (isi toner)	Rp13.123.000	Rp13.123.000		Ada
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemeliiharaan PC/Notebook dan Printer	Rp77.660.000	Rp77.660.000	Untuk saat ini hanya pemeliharaan saja sebesar 23.18% yang masuk dalam satu	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
										sub kegiatan	
11	Inspektorat	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Pengadaan 4 buah laptop	Rp47.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp66.880.000	Rp113.880.000		Ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Pembuatan Aplikasi Kepegawaian (SIDAK) dan Aplikasi SIAP	Rp160.000.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemeliharaan Perangkat Keras dan Belanja Internet	Rp118.528.000	Rp278.528.000		Ada
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Y	Sriti (sistem Rekomendasi Ijin Penelitian	Rp10.000.000	PEMBELIAN PERALATAN DAN MESIN SERTA JARINGAN	Rp82.655.020	Sriti Prima (sistem Rekomendasi Ijin Penelitian	Rp10.000.000	Rp102.655.020	3. a 3. b 75% 3. c. 1%	Ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	PC All In One	Rp41.900.000	laptop, printer, dan jaringan	Rp59.800.000	Rp101.700.000	0.3%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
15	Badan Pendapatan Daerah	Y	Pembangunan Aplikai POINT OF SALES	Rp70.000.000	ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	Rp1.133.147.155			Rp1.203.147.155		Tidak Ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Pembelian akun zoom 1 tahun subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp6.000.000	Pembelian PC, printer, Access Point, Switch Hub	Rp312.442.500	Servis PC, laptop, notebook dan printer	Rp7.159.500	Rp325.602.000	325.602.000	Ada
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Y	APLIKASI SILAO, BALADA AKHIR, PEVITA,SIKANDA, SIAK, E SURAT, ANTRIAN, IKM,EKINERJA, MILEA, DILAN, SI-	Tidak Dituliskan	PERANGKAT KERAS	Rp1.120.100.008	Tidak Ada	Tidak Ada	Rp1.120.100.008	12%	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
			EJA,SIBEMO,SIREFLEK CPNS, SIMADUN,USUL KP,SKP,SLKS, ATEENDANCE,SIMONA,PPID, SIPD, ESAKIP,								
18	Dinas Kesehatan	Y	Pengembangan Aplikasi EWS, Mobile Hallo Simessem, Manajemen SDMK, Integrasi Ekohort KIA	Rp32.000.000	pembelian meliputi komputer, webcam, perangkat jaringan, dll	Rp1.490.094.740	pemeliharaan rutin	Rp35.001.000	Rp1.557.095.740	Jumlah anggaran Dinas Kesehatan = Rp. 167.198.519.268 Jumlah anggaran khusus TI = Rp. 1.525.095.740 Jumlah anggaran TI dalam prosentase	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
										= 1.525.095.740 / 167.198.519.268 * 100 = 0.912 %	
19	Dinas Ketenagakerjaan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembelian Desktop PC dan Laptop	Rp19.562.400	Pemeliharaan Personal Computer/Laptop dan Printer	Rp15.037.000	Rp34.599.400	0.55%	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Pembangunan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Rp104.406.400	Pembelian Perangkat Pendukung/Sarana dan Prasarana Pelaksanaan SPBE	Rp2.052.175.829	Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan SPBE	Rp460.317.871	Rp2.616.900.100	Persentase nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE pada bidang TIK adalah	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
										26,22%	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Finger Print dan Tripod	Rp6.527.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp74.918.650	Rp81.445.650	0.32%	
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		Tidak Ada	Tidak Ada	PERANGKAT KERAS	Rp41.748.510	PEMELIHARAAN UNIT PERSONAL KOMPUTER	Rp137.899.650	Rp179.648.160	Tidak dituliskan	Ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembelian Laptop	Rp29.573.730	Perawatan Laptop dan Printer	Rp18.463.000	Rp48.036.730	<1%	Ada
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Y			komputer dan laptop	Rp175.285.820			Rp175.285.820	10852%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset DPUPP	Rp80.000.000	Pembelian PC, Laptop, Scanner	Rp172.196.670	Pemeliharaan Komputer, Lptop dan Printer, Jaringan Komunikasi Data	Rp38.456.000	Rp290.652.670	0.16%	Ada
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Y	Tidak Ada		belanja modal	Rp9.189.400	untuk service	Rp13.000.000	Rp22.189.400	0.024%	Ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencan	Y	Tidak Ada		Belanja Laptop dan Printer	Rp138.930.000	Pemeliharaan PC/Notebook dan Printer	Rp11.120.000	Rp150.050.000	1.02%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
	a										
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Pengembangan SiPinter	Rp66.763.000	Laptop (Intel Core I7, 8GB, 1TB + 128SSD, VGA 2GB, WIN10 14 INCH), ALL IN ONE (Intel core I5, 8GB, SSD 512GB, WIN10, 24INCH)	Rp170.171.880	Pemeliharaan komputer unit personal komputer	Rp12.960.000	Rp249.894.880	1.1%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Laptop (Intel Core I5, 8GB, SSD 512GB, VGA 2GB, WIN10, 14 INCH), PRINTER INKJET	Rp11.718.270	BELANJA SEWA LISENSI MANAJEMEN HOSTING, Belanja Modal Lisensi dan Franchise Spesifikasi : Spesifikasi : TEAM VIEWER CORPORATE SUBSCRIBETION	Rp97.350.000	Rp109.068.270	Rp.97.350.000,00	Ada
29	Dinas Perhubungan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Belanja Modal Komputer (Laptop, Desktop PC,Printer dan Proyektor)	Rp49.595.910	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp28.400.000	Rp77.995.910	0.14%	Ada
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Y	Tajin Palappa	Rp35.000.000	Pembelian Printer	Rp4.958.000	Pemeliharaan Printer dan Komputer	Rp5.680.000	Rp45.638.000	1%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Y	Tali Pusar	Rp25.000.000					Rp25.000.000		
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Laptop, Printer, Proyektor, Layar Proyektor,Speaker	Rp50.512.000	Pemeliharaan komputer, printer, notebook	Rp11.509.000	Rp62.021.000		Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
33	Dinas Sosial	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	1. WEB CAMERA Spesifikasi : 930 C WEBCAM 3 Unit UNIT 2. LAPTOP / NOTEBOOK Spesifikasi : INTEL CORE I5, 8GB, 512GB SSD, VGA 2GB, WIN 10, 14 INCH, Koefisien: 3 Unit, Satuan: UNIT	Rp49.047.900	Jasa Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : Jasa Pemeliharaan CCTV, Koefisien: 5 Unit, Satuan: titik, 2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer atau Notebook 10 Unit / Tahun Unit/Tahun, 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer, Koefisien: 9 Unit Satuan:	Rp11.509.000	Rp60.556.900	0.32%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
							Unit/Tahun				
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembelian Laptop, Proyektor, Kamera, HT	Rp78.421.500	Printer dan Komputer	Rp19.760.000	Rp98.181.500	0.7%	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembelian software SIM RS	Rp150.000.000	Pemeliharaan billing sistem informasi farmasi dan informasi persediaan	Rp180.000.000	Rp330.000.000	0.85%	
36	Kecamatan Situbondo	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	PC ALL IN ONE		Pemeliharaan pc/ notebook	Rp7.799.000	Rp7.799.000		Ada
37	Kecamatan Bungatan	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	Belanja Modal Personal Komputer	Rp8.676.800	Pemeliharaan Komputer	Rp10.219.000	Rp18.895.800		Ada
38	Puskesmas Situbondo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	Puskesmas Bungatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	DekstoPC (Ci5, 4GB,1TB,WIN10 21,5INCH), Notebook (Intel Core	Rp26.241.600	Pemeliharaan komputer sarana prasarana kantor	Rp7.100.000	Rp33.341.600		Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.		TOTAL	Persentase	Bukti DPA
			Deskripsi A	Nilai A	Deskripsi B	Nilai B	Deskripsi C	Nilai C			
					I5, 4GB, 1TB, VGA 2GB, WIN10, 14INCH), PRINTER						
41	Pembangunan Sarana Dan Infrastruktur	Y	Tidak Ada	Tidak Ada	PC, Laptop, Mesin Absensi	Rp33.917.400	PC dan Laptop	Rp7.100.000	Rp41.017.400		

Lampiran 10.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan SDM TIK

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Siti Komariya	Honorer	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Bagian Hukum	Y	Fungsional	Admin Database	Farick Nur Hidayat	Honorer	Y	SMA	Bimtek dan Diklat Pengelolaan JDIH	Sertifikat Peserta Diklat
3	Bagian Hukum	Y	Fungsional	Admin Website	Gusti Muhammad Prayudi	Honorer	Y	SMA	Bimtek dan Diklat Pengelolaan JDIH	Sertifikat Peserta Diklat
3	Bagian Hukum	Y	Fungsional	Programmer	Eko Fendy Hermawan, A.Md	PNS	Y	D3	Bimtek dan Diklat Programmer	Sertifikat Peserta
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Admin Keamanan TI	Slamet Adiwiyono	PNS	T	S2 MANAJEMEN	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Admin Website	Milzammah Ilvi	PNS	Y	S1 Sistem Informasi	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Admin Database	Milzammah Ilvi	PNS	Y	S1 Sistem Informasi	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Milzammah Ilvi	PNS	Y	S1 Sistem Informasi	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Programmer	Milzammah Ilvi	PNS	Y	S1 Sistem Informasi	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Teknisi dan Admin Jaringan	Citra Wahyu	Non PNS	T	SMA	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Citra Wahyu	Non PNS	T	SMA	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Umum	Y	Fungsional	Admin Website	Muhammad Syafiul Anwar	Honorer	T	SMA	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Umum	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Muhammad Syafiul Anwar	Honorer	T	SMA	Tidak ada	Tidak ada
7	Bagian Organisasi	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Awan Dimawan S.Kom	Honorer	Y	S1 ILMU KOMPUTER	Tidak ada	Tidak ada
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Sekretariat Dewan Perwakilan	Y	Ad hoc	Admin Website	Edwin Wira Liyanto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Rakyat Daerah									
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Edwin Wira Liyanto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Syamsul Hadi	Non PNS	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
11	Inspektorat	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Erwan Pujianto S.Kom	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
11	Inspektorat	Y	Fungsional	Admin Database	GAGAH PRAWONO SETYA PUTERA, S.Kom	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Admin Database	Giovani Ardiansyah, S.Kom.	Honorer	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Admin Database	Gavin Liffera Kusuma Putra, S.Kom.	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Admin Database	Muhammad Ikram Farisi, S.Kom.	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Admin Website	Gavin Liffera Kusuma Putra, S.Kom.	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Admin Website	Yudi Zulkarnain, S.Kom.	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Admin Website	Muhammad Ikram Farisi, S.Kom.	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Giovani Ardiansyah, S.Kom.	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Gavin Liffera Kusuma Putra, S.Kom.	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Manusia									
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Bagus Prasetyawan Dewantoro, S.Ap.	PNS	Y	S1 Ilmu Administrasi Publik	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Benny Oktavianto, S.T.	PNS	Y	S1Teknik Elektro	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Rahmad Wahyudi, S.E. M.Si.	PNS	Y	S1 Ilmu Administrasi Publik	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Saiful Rizal, S.Sos.	PNS	Y	S1 Ilmu Administrasi Negara	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Nur Hasyim	PNS	Y	SLTA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Nurfaize	PNS	Y	SLTA	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Yudi Zulkarnain, S.Kom.	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Programmer	Giovani Ardiansyah, S.Kom.	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Y	Fungsional	Programmer	Yudi Zulkarnain, S.Kom.	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Y	Fungsional	Admin Website	Dwitya	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Dwitya	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Rofita	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Fatwa Aulia	Honorer	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Fungsional	Admin Website	Fatwa Aulia	Honorer	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Lia Novita Sari	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Fungsional	Programmer	Zain	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Fungsional	Teknisi dan Admin Jaringan	Fatwa Aulia	Honorer	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Semua Yang Memiliki Baground IT Bisa Memperbaiki				Tidak ada	Tidak ada
15	Badan Pendapatan Daerah	Y	Fungsional	Programmer	Ari Ersanditama	Honorer	Y		Tidak ada	Tidak ada
15	Badan Pendapatan Daerah	Y	Fungsional	Programmer	Yusrolana Firdausah	Honorer	T		Tidak ada	Tidak ada
15	Badan Pendapatan Daerah	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Syamsul Hidayanto	Honorer	Y		Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Fatwa Aulia	Honorer	T	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pembangunan Daerah									
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Fungsional	Admin Website	Fatwa Aulia	Honorer	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Lia Novita Sari	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Fungsional	Programmer	Zain	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Fungsional	Teknisi dan Admin Jaringan	Fatwa Aulia	Honorer	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Gusti Raisa Wibawanti, S.Psi.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Fendi Maulana Noor, S.Kom.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Laras Aprilyanti Santoso, S.Kom.	PNS	T	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pembangunan Daerah									
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Luciano Satrio Himawan Afianto, S.P.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Indro Wahyudi, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Rahmatullah Hendro Aprianto, S.H.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Balia Arief Rachman, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Enesia Fataya, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Nurcholis, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Athfin Syafhan, S.S.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pembangunan Daerah									
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Hendy Aditias Prasetyo, S.Sos	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Hadiatur Rakhman, Sm	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Hari Prasetyo Raharjo, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Anis Sulala, S.St	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Shifatul Maushofi, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Nor Yaqut Rozan, S.Sos	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Nurul Laila Puspitasari, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pembangunan Daerah									
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Miftahus Solihin Yf, Sm	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Dimaz Teddy Sugiarto, S.E	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Febriyadi Suryanata Megantara, S.E., M.M.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Faidul Irfani, S.H	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Jamil, S.E.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Muh. Kurdi Abdurrahman, S.Kom.	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Aditya Wira Nugraha, S.H	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pembangunan Daerah									
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Trio Saputra, S.Sos	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Vita Amalia, A.Md	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Rihlatussholikha, A.Md.Bns.	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Irene Elsa Wahyu Az-Zahra	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Nelson Prasetyo	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Daariin Naurah Al Djufri	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
16	Badan Perencanaan	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Maria Ulva	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pembangunan Daerah									
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Y	Fungsional	Admin Database	Aditya Pradhana Putra, S.Kom	PNS	Y	S1 ILMU KOMPUTER	Tidak ada	Tidak ada
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Y	Ad hoc	Programmer	Rita Putri Saraswati	Non ASN	Y	D4 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Admin Keamanan TI	Iwan Bagus Setyawan P	PNS	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
									UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Admin Website	Musdalifa Ifaliyani	Honorer	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Admin Database	Iwan Bagus Setyawan P	PNS	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
									Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Programmer	Agil Bi Aviv T	CPNS	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
									UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Iwan Bagus Setyawan P	PNS	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Operator / User Sistem	Lukman H	Honorer	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022, Peltihan Aplikasi Perkantoran dari Kemenkominfo 2022	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Service/Help Desk	Rizqa Farihatul	Honorer	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Lukman H	Honorer	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
									Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020, pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
18	Dinas Kesehatan	Y	Fungsional	Teknisi dan Admin Jaringan	Iwan Bagus Setyawan P	PNS	Y	S1	Training Cyber Scurity Esensial dari Cisco 2021, Data Sience Fundamental Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Peltiahn dasar microtic manajemen diskominfo situbondo 2020,	

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
									pelatihan data science untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, platihan basic coding dari UNEJ 2022	
19	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak ada	Ad hoc	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Putra Ahmad Buyung	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Danial Rizky Maulana	PNS	Y	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Dwi Setiyo Raharjo	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Iskandar	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Malinda Yuniarti	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Fery Frandana Putra	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Gita Bagus Lazuardi	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Admin Website	Bayu Indra Wahyono	PNS	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Admin Website	Deny Krismandiyo	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Anggi Fauzan	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Arif Hidayatullah	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Bagus Rizkyal Barkah	Honorer	Y	D4/S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Farid Fajriansah	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Filiannisa Nurillah Makruf	Honorer	Y	D4/S1 SASTRA INGGRIS	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Riezkiyan Sulaika Akbar	Honorer	Y	D4/S1 EKONOMI	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Rindang Raharjo Rozak	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Sirojul Huda	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Operator / User Sistem	Nuris Nuril Hadi	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Programmer	Abdurrahman Hakiem	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Programmer	Hosnol Fawaid	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Programmer	Khalis Alfan Nuri	Honorer	Y	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Programmer	Samsul Aripin	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Programmer	Eko Fendy Hermawan	PNS	Y	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Programmer	Panji Setio Utomo	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Awang Gumilang	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEK	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Gravitas Woidy	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Ahmad Halim	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Alifian Nur Ahzari Halim	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Eka Maretta Adriyan	Honorer	Y	D3 TEKNIK KOMPUTER	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Feri Nurhasan	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Iqbal Hamdani	Honorer	Y	D3 TEKNIK KOMPUTER	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Yongky Fery Kamo	Honorer	Y	D4/S1 MANAJEMEN	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Zainur Ridha	Honorer	Y	D4/S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Razak Syaiful Rochman	Honorer	Y	D4/S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Ad hoc	Teknisi dan Admin Jaringan	Hadi Suryanto	PNS	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Admin Database	Hendra Dwi Siswandri	PNS	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Admin Website	Yanto	PNS	T	D3	Tidak ada	ADA
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Programmer	Muhammad Ramadhani	PNS	T	D3	Tidak ada	ADA
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Programmer	Yanto	PNS	T	D3	Tidak ada	ADA
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Fans Faathir	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Hendra Dwi Siswandri	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Yanto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Muhammad Ramadhani	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Fans Faathir	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Farid	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi & Admin Jaringan	Muhammad Ramadhani	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Y	Ad hoc	Teknisi & Admin Jaringan	Yanto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Y	Ad hoc	Admin Website	Okky Hadi Wibawa	PNS	T	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Okky Hadi Wibawa	PNS		S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Okky Hadi Wibawa	PNS		S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Okky Hadi Wibawa	PNS		S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Admin Website	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Admin Database	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Programmer	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Teknisi & Admin Jaringan	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Taufiq Hidayah	PNS	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Y	Fungsional	Admin Website	Farid Khatibul Umam, S.Kom	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Y	Fungsional	Operator/User Sistem	Farid Khatibul Umam, S.Kom	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga	Y	Fungsional	Admin Website	Rizaldy Ilham Bachtiar	Honorer	Y	D4	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Berencana									
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Ad hoc	Admin Database	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Fungsional	Admin Website	Adella Lagareta Iswanto	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Fungsional	Operator/User Sistem	Adella Lagareta Iswanto	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Ad hoc	Programmer	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu	Y	Ad hoc	Teknisi & Admin Jaringan	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pintu									
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Zendy Robi Junianto	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Admin Database	Hesti Yeni Pranata	Honorer	y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Yanuar Rizki	Honorer	T	D1 TEKNOLOGI INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Ahmad Helwi Dinoto	Honorer	T	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Ad hoc	Admin Website	Ranno Dwi Pahlevi	Honorer	T	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Programmer	Dwi Ranno Pahlevi	Honorer	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Programmer	Wawan Tofik	Honorer	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Programmer	Abdul Aziz Al Ashari	Honorer	Y	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Citra Ridho Suseno	Honorer	T	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Teknisi & Admin Jaringan	Mohammad Saiful Rijal	Honorer	Y	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Teknisi & Admin Jaringan	Ahmad Helwi Dinoto	Honorer	Y	S1 SISTEM INFORMASI	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Fungsional	Teknisi & Admin Jaringan	Miftahul Mujab	Honorer	Y	S1 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Y	Ad hoc	Analis Sistem & Desain	Mohammad Saiful Rijal	Honorer	T	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
29	Dinas Perhubungan	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Y	Fungsional	Admin Website	Firman Haqiki	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Mutmainna	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Y	Tidak ada	Operator/User Sistem	Wildan Fauzan	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Adi Irawan	PNS	Y	D3		
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Febri Basufi Bahtiarrullah	PNS	Y	D3		
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Hasan Basri	Honorer	Y	SMK	Tidak ada	Tidak ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Fery Ahmad	Honorer	Y	SMK	Tidak ada	Tidak ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Muh Alfadani	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Ayunda	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Tita Aulia	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Y	Struktural	Operator/User Sistem	Muh Munalif	Honorer	Y	MAN	Tidak ada	Tidak ada
33	Dinas Sosial	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Dimas Abd. Rahman Wahet	Honorer	T	D2	Tidak ada	Tidak ada
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Y	Fungsional	Admin Database	Irma Yunita	PNS	Y	D3 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Iqbal	Honorer	T	S1 ILMU KOMPUTER	Tidak ada	Tidak ada
34	Satuan Polisi	Y	Ad hoc	Admin	Irsandi	Honorer	T	SMK	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Pamong Praja			Website				MULTIMEDIA		
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Admin Database	Iton Wahyudi, S.Kom	Honorer	Y	S1	Pelatihan inixindo hardware dan jaringan	Ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Rusdi Nurul Hakim	PNS	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Teknisi Komputer	Badik Hadiyanto	Honorer	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Admin Keamanan TI	Edi Basuki Wijaya, S.St	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Teknisi & Admin Jaringan	Rusdi Nurul Hakim	PNS	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Ayat Kurnaedi	Honorer	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Muhammad Ali Abidin	Honorer	Y	SMK	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Roi Ishaq	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Muhammad Yunus	Honorer	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Service/Help Desk	Syaifudin	Honorer	Y	SMA	Tidak ada	Tidak ada
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Y	Ad hoc	Admin Website	Mifttahul Jannah, S.Kom	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
36	Kecamatan Situbondo	Y	Fungsional	Operator/User Sistem	Aprilia Setyoningrum	CPNS	Y	D3 TEKNIK INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
37	Kecamatan Bungatan	Y	Fungsional	Admin Website	Ahmad Sofyan Mustofa, A.Md	PNS	Y	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Service/Help Desk	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Admin Database	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Teknisi & Admin Jaringan	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Admin Website	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Admin Keamanan TI	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
38	Puskesmas Situbondo	Y	Fungsional	Operator/User Sistem	Diri Ikar Hidayatullah	Honorer	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
39	Puskesmas Bungatan	Y	Fungsional	Admin Website	Miftah	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
39	Puskesmas Bungatan	Y	Fungsional	Admin Keamanan TI	Agus Theo Noor	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
39	Puskesmas Bungatan	Y	Fungsional	Operator/User Sistem	Agus Theo Noor	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada
39	Puskesmas Bungatan	Y	Fungsional	Analis Sistem & Desain	Agus Theo Noor	Honorer	Y	S1	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM TIK (Y/T)	Apakah memiliki SDM TIK	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
39	Puskesmas Bungatan	Y	Fungsional	Service/Help Desk	Afifatus S	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
39	Puskesmas Bungatan	Y	Fungsional	Teknisi Komputer	Agus Theo	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Y	Ad hoc	Teknisi & Admin Jaringan	Syamsurrizal	Honorer (PUSDALOP)	T	S1 Komputer	Tidak ada	Tidak ada
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Y	Ad hoc	Operator/User Sistem	Ganang Aji Pambudhi, A.Md	PNS	T	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	Tidak ada	Tidak ada

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 2

ARSITEKTUR PROSES BISNIS DAN SOP

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 2

ARSITEKTUR PROSES BISNIS DAN SOP

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Proses Bisnis 1
1.2 Referensi Arsitektur SPBE 1
1.3 Hasil Penilaian SPBE 5
1.4 Ruang Lingkup 7
BAB 2 METODOLOGI 8
2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE 8
2.1.1 Tahapan Persiapan dan Perencanaan 8
2.1.2 Tahapan Pengembangan 8
2.2 Identifikasi Peta Relasi 10
2.3 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP) 11
BAB 3 ARSITEKTUR PETA PROSES BISNIS 12
3.1 Persiapan dan Perencanaan Proses Bisnis 12
3.2 Pengembangan Peta Proses Bisnis Level Kabupaten 12
3.3 Identifikasi Urusan Pemerintah 15
3.4 Identifikasi Metadata Proses Bisnis SPBE 21
3.5 Pengembangan Peta Proses Bisnis pada tiap OPD 27
3.5.1 Pengkodean Proses Bisnis 27
3.5.2 Hasil Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap OPD 29
3.6 Identifikasi Peta Relasi Kabupaten Situbondo 51
3.7 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur 52
3.7.1 Usulan SOP pada Layanan Eksisting SPBE 52
3.7.2 Usulan SOP pada Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE 66
3.7.3 Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD 66
LAMPIRAN 70
Lampiran Level 1 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Referensi Proses Bisnis 2
Tabel 1.2 Predikat Indeks SPBE 5
Tabel 3.1 Identifikasi Urusan Pemerintahan Kabupaten Situbondo 16
Tabel 3.2 Metadata Proses Bisnis SPBE 21
Tabel 3.3 Kode OPD 27
Tabel 3.4 Pengkodean proses bisnis Level OPD 28
Tabel 3.5 Proses Bisnis Tata Pemerintahan dan Kerjasama (STB-1.1) 29
Tabel 3.6 Proses Bisnis Bagian Kesejahteraan Rakyat (STB-2.1) 29
Tabel 3.7 Proses Bisnis Bagian Hukum (STB-3.1) 30
Tabel 3.8 Proses Bisnis Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (STB-4.1) 30
Tabel 3.9 Proses Bisnis Bagian Barang dan Jasa (STB-5.1) 31
Tabel 3.10 Proses Bisnis Bagian Umum (STB-6.1) 31
Tabel 3.11 Proses Bisnis Bagian Organisasi (STB-7.1) 32
Tabel 3.12 Proses Bisnis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (STB-8.1) 32
Tabel 3.13 Proses Bisnis Bagian Perencanaan dan Keuangan (STB-9.1) 32
Tabel 3.14 Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (STB-10.1) 33
Tabel 3.15 Proses Bisnis Inspektorat (STB-11.1) 33
Tabel 3.16 Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (STB-12.1) 34
Tabel 3.17 Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (STB-12.2) 34
Tabel 3.18 Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (STB-13.1) 35
Tabel 3.19 Proses Bisnis Badan Keuangan dan Aset Daerah (STB-14.1) 35
Tabel 3.20 Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah (STB-15.1) 36
Tabel 3.21 Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (STB-16.1) 36
Tabel 3.22 Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (STB-16.2) 36
Tabel 3.23 Proses Bisnis Level 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (STB-17.1) 37
Tabel 3.24 Proses Bisnis Dinas Kesehatan (STB-18.1) 37
Tabel 3.25 Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan (STB-19.1) 38
Tabel 3.26 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika (STB-20.1) 38
Tabel 3.27 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika (STB-20.2) 38
Tabel 3.28 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika (STB-20.3) 39
Tabel 3.29 Proses Bisnis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (STB-21.1) 39
Tabel 3.30 Proses Bisnis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (STB-21.2) 40

Tabel 3.31 Proses Bisnis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (STB-21.3) 40
Tabel 3.32 Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup (STB-22.1) 40
Tabel 3.33 Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (STB-23.1) 41
Tabel 3.34 Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (STB-23.2) 41
Tabel 3.35 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (STB-24.1) 42
Tabel 3.36 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (STB-24.2) 42
Tabel 3.37 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (STB-24.3) 43
Tabel 3.38 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (STB25.1) 43
Tabel 3.39 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (STB-26.1) 44
Tabel 3.40 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (STB-26.2) 44
Tabel 3.41 Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (STB-27.1) 45
Tabel 3.42 Proses Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (STB-28.1) 45
Tabel 3.43 Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (STB-28.2) 45
Tabel 3.44 Proses Bisnis Level 1 Dinas Perhubungan (STB-28.1) 46
Tabel 3.45 Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (STB-30.1) 46
Tabel 3.46 Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (STB-30.2) 46
Tabel 3.47 Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (STB-31.1) 47
Tabel 3.48 Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (STB-31.2) 47
Tabel 3.49 Proses Bisnis Dinas Peternakan dan Perikanan (STB-32.1) 48
Tabel 3.50 Proses Bisnis Dinas Peternakan dan Perikanan (STB-32.2) 48
Tabel 3.51 Proses Bisnis Dinas Sosial (STB-33.1) 48
Tabel 3.52 Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja (STB-34.1) 49
Tabel 3.53 Proses Bisnis RSUD dr. Abdoer Rahem (STB-35.1) 49
Tabel 3.54 Proses Bisnis Kecamatan Situbondo (STB-36.1) 50
Tabel 3.55 Proses Bisnis Kecamatan Situbondo (STB-37.1) 50
Tabel 3.56 Proses Bisnis Puskesmas Situbondo (STB-38.1) 50
Tabel 3.57 Proses Bisnis Puskesmas Situbondo (STB-39.1) 51
Tabel 3.58 Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (STB-40.1) 51
Tabel 3.59 Usulan SOP Pada Layanan Eksisting SPBE 52
Tabel 3.60 Usulan Layanan terhadap Program RPJMD 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis 2
Gambar 2 Indeks SPBE Kabupaten SitubondoTahun 2021 6
Gambar 3 Penilaian Indikator SPBE Kabupaten SItubondo Tahun 2021 6
Gambar 4 Ilustrasi Peta Proses Bisnis Level 0 9
Gambar 5 Ilustrasi Peta Proses Bisnis Level 1 9
Gambar 6 Peta Proses Bisnis Level 0 Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo 14
Gambar 7 Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupate Situbondo 15
Gambar 8 STB-01 Pemberdayaan Angka Pengangguran 70
Gambar 9 Proses STB-02 Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing 70
Gambar 10 Proses STB-03 Pemberdayaan tingkat Daya Beli Masyarakat 71
Gambar 11 Proses STB-04 Penyelenggaraan Infrastruktur yang Merata dan berkualitas 71
Gambar 12 Proses STB-05 Pengembangan Desa Maju 71
Gambar 13 Proses STB-06 Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan 72
Gambar 14 Proses STB-07 yaitu Pengembangan Akses dan Mutu Kesehatan 72
Gambar 15 Proses STB-08 Penyelenggaraan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 72
Gambar 16 Proses STB-09 Pelaksanaan Solidaritas Sosial Masyarakat 72
Gambar 17 Proses STB-10 yaitu Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 73
Gambar 18 Proses STB-11 Penyelenggaraan Toleransi Sosial kepada masyarakat. 73
Gambar 19 Proses STB-12 Penyelenggaraan Aparatur yang Tangkas dan Profesional 73
Gambar 20 Proses STB-13 Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel 74
Gambar 21 Proses STB-14 Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan PAD 74
Gambar 22 Proses STB-15 Penyelenggaraan Inovasi Layanan yang Berbasis Digital 74
Gambar 23 Proses STB-16 Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas 75

BAB 1
PENDAHULUAN

Visi SPBE yaitu **"**Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi" . Hal ini tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE. Buku ini akan membahas terkait salah satu unsur yang digunakan untuk mewujudkan SPBE, unsur tersebut yaitu unsur arsitektur SPBE yang berisi salah satu domain arsitektur adalah domain arsitektur proses bisnis. Sehingga bab ini akan membahas terkait domain yang ada pada arsitektur SPBE terkait dengan Proses bisnis dan SOP.

1.1 Pengertian Proses Bisnis

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, menjelasakan bahwa yang dimaksud Proses Bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses Bisnis mencerminkan seberapa efisien dan efektif oprasional dalam pelaksanaan kegiatan, Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi, Keamanan dan Layanan SPBE. Proses Bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan, Proses Bisnis juga disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Menurut **Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018** Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

1.2 Referensi Arsitektur SPBE

Identifikasi referensi arsitektur proses bisnis ini merupakan klasifikasi fungsi bisnis yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertujuan untuk melakukan identifikasi kesesuaian proses bisnis yang ada pada Kabupaten Situbondo. Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3(tiga) dan 4 (empat) oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur proses bisnis pada kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat terlihat pada Gambar 3.1. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE

Nasional, melalui Referensi Arsitektur Proses Bisnis dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

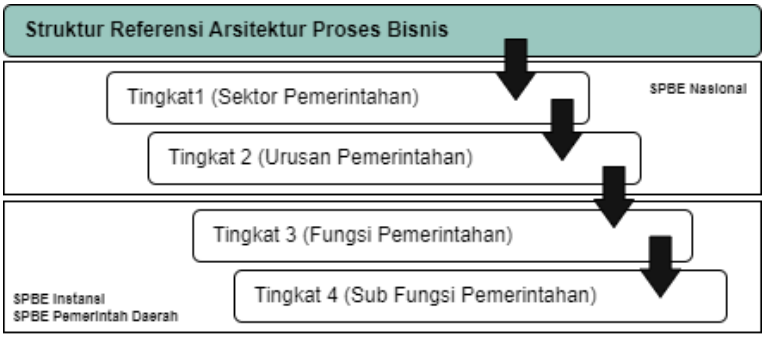

Gambar 1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomer 132 Tahun 2022** Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional telah dijelaskan pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis, bahwa Domain proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di tingkat nasional yang mengacu pada Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait proses bisnis dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 1.1 Referensi Proses Bisnis

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
0102	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tunggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidangkeolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretarian Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara.

1.3 Hasil Penilaian SPBE

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB dengan dasar pelaksanaan evaluasi yaitu indikator penilaian pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Seluruh (K/L/D/I) memiliki indeks penilaian masing-masing. Tujuan dilakukan evaluasi agar pelaksanaan SPBE dapa berjalan untuk mencapai tujuannya. Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari setiap tingkat keamanan diberi nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai indeks. Nilai ini dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Detail nilai Indeks dan predikat dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1.2 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 -< 4,2	Sangat Baik
3	2,6 -< 3,5	Baik
4	1,8 -< 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

(*sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Situbondo*)

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

a) Domain merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b) Aspek, merupakan area spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB, hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 untuk Pemerintahan Kabupaten Situbondo menunjukkan nilai indeks **2,43** dengan predikat **Cukup.** Detail hasil penilaian dapat dilihat pada **Gambar 2**.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	2,43 (Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

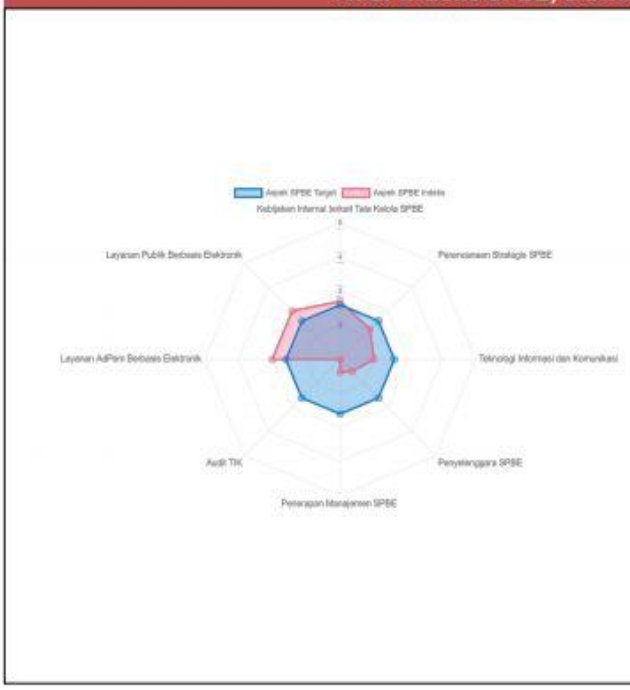

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,43
Domain Kebijakan SPBE	2,70
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,27
Penerapan Manajemen SPBE	1,38
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

Gambar 2Indeks SPBE Kabupaten SitubondoTahun 2021

Hasil Penilaian SPBE Tahun 2021 Kabupaten Situbondo terlihat pada **Domain Tata Kelolan SPBE** memiliki nilai 2,50 yang menunjukkan hasil dengan **predikat "Cukup".** Berdasarkan domain tersebut terdapat aspek Perencanaan Strategis SPBE yang memiliki nilai 2,70 dengan **predikat "Baik".**

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3

Gambar 3 Penilaian Indikator SPBE Kabupaten SItubondo Tahun 2021

Berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi yang ada**.** Pada **Indikator 14 terkait Tingkat kematangan inovasi Proses Bisnis SPBE memiliki nilai kematangan 2**. Verifikasi dan Validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung Pada Infikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis pada pemerintahan Kabupaten Situbondo, dimana dilihat dari Peta Proses milik Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Peta Proses Bisnis belum memiliki dokumen peta proses bisnis, Namun telah sesuai dengan Permen-PANRB No 19 Tahun 2018, dan juga terdapat juga ketidaksesuain dengan setiap prosesnya, karena proses-proses yang terdapat pada peta proses bisnis seharusnya merupakan kalimat proses bukan teknis, sehingga rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, adalah dengan Inovasi yaitu perlunya memiliki dokumen peta rencana secara lengkap dan formal, yang berisikan Peta Proses Bisnis dan penjelasan dari tiap proses bisnis. Serta perbaikan kalimat pada setiap prosesnya yaitu dari proses utama hingga proses pendukung.

1.4 Ruang Lingkup

Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** terdapat **6 (enam) domain**, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE. Pada buku 2 ini Domain yang akan dibahas adalah domain proses bisnis. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan pada domain arsitektur proses bisnis.

- Referensi proses bisnis yang digunakan untuk menyusun arsitektur proses bisnis SPBE.
- Identifikasi urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Identifikasi Metadata Proses Bisnis SPBE.
- Identifikasi peta relasi Kabupaten Situbondo
- Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap OPD, proses manajerial dan proses utama level 0 dan level 1 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD. Ketentuan penyusunan proses bisnis didasarkan pada **Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**.
- Identifikasi Usulan SOP dari Layanan Eksisting, Layanan Administrasi dan Publik, serta dari Program tiap Organisai Perangkat Daerah (OPD).

BAB 2
METODOLOGI

Pada bab ini membahas terkai metodologi dan referensi yang digunakan dalam penyusunan proses bisnis ini. Masing-masing metode akan dijelaskan pada subbab berikut.

2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Penyusunan arsitektur proses bisnis terdapat 8 (delapan) tahapan yaitu identifikasi referensi arsitektur proses bisnis, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi metadata proses bisnis, identifikasi peta proses bisnis di level Kabupaten, identifikasi peta proses bisnis pada masing-masing OPD, identifikasi peta relasi, dan identifikasi usulan standar operasional prosedur (SOP).

2.1.1 Tahapan Persiapan dan Perencanaan

Pada tahapan persiapan dan perencanaan perlu dilakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dari proses inventarisasi tersebut akan dihasilkan proses kerja atau aktivitas-aktivitas yang terdapat pada instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kemudian proses kerja/aktivitas tersebut akan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan diantaranya:

a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

2.1.2 Tahapan Pengembangan

Pada tahapan pengembangan, akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi (business process mapping). Dalam penyusunan peta proses bisnis yang representatif bagi organisasi, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Pada tahapan pengembangan peta proses bisnis dibagi menjadi 2, pengembangan peta proses bisnis Kabupaten Situbondo dan peta proses bisnis pada tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Berikut setiap tahapan dalam penyusunan:

A. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan kemudian sasaran. Penyusunan peta proses bisnis diawali dari proses identifikasi visi, misi dan tujuan kemudian sasaran yang nantinya kalimatnya akan di analisis menjadi kalimat proses. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut

diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis akan dituangkan dalam bentuk peta proses bisnis menggunakan level/ tingkatan.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan dari visi, misi, dan tujuan kemudian sasaran.
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan kemudian sasaran.
3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi yang ada pada lingkup organisasi.

Berikut ilustrasi gambar peta proses bisnis Kabupaten level 0. Detail Ilustrasi Peta proses Bisnis Level 0 dapat dilihat pada **Gambar 2.1** dan Level 1 pada **Gambar 2.2.**

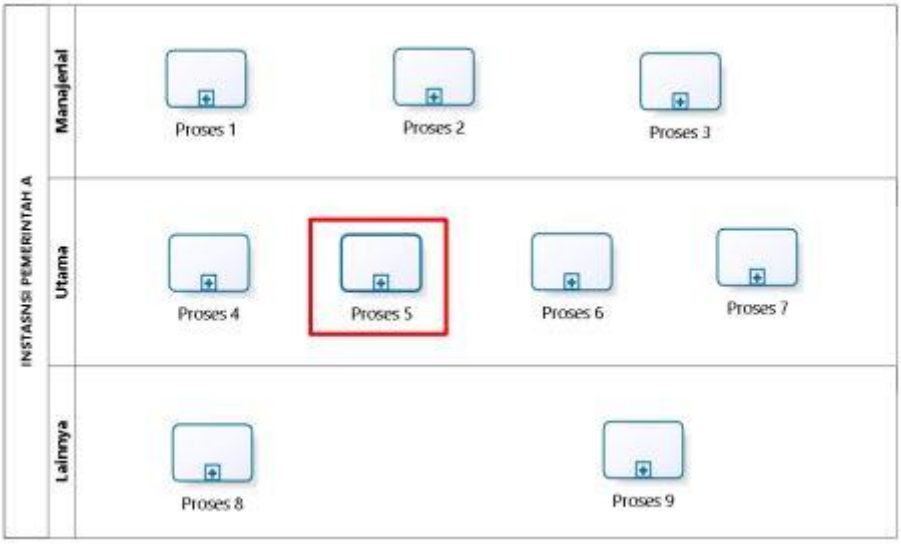

Gambar 4 Ilustrasi Peta Proses Bisnis Level 0

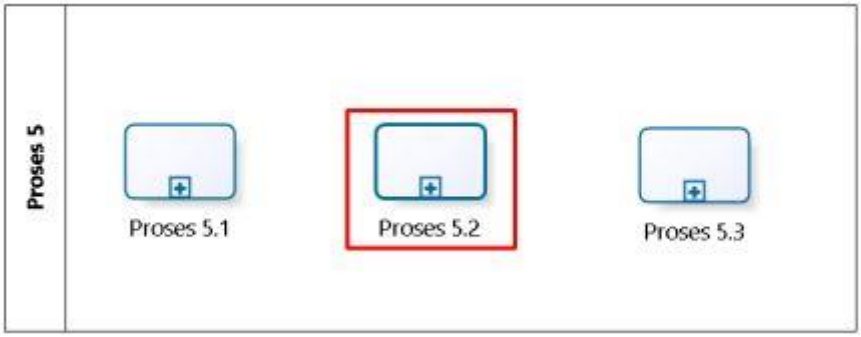

Gambar 5 Ilustrasi Peta Proses Bisnis Level 1

B. Peta Proses Bisnis pada Tiap Perangkat Daerah

Penyusunan peta proses bisnis pada setiap perangkat daerah dimulai dari peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, peta proses bisnis level selanjutnya (level n). Berikut penjelasan setiap level proses bisnis:

1. Peta Proses Bisnis Level 0

   Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis perangkat daerah yang terdiri dari proses bisnis utama dan proses bisnis manajerial.

   a) **Proses Utama** merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama Proses utama memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah.
      - Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi.
      - Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

   b) **Proses Managerial** merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.
      - Proses managerial memenuhi kriteria sebagai berikut: Memenuhi kebutuhan pengguna internal.
      - Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

2. Peta Proses Bisnis Level 1

   Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing- masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

3. Peta Proses Bisnis Level n

   Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

2.2 Identifikasi Peta Relasi

Berdasarkan **Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018** tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. bertujuan untuk memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai luaran yang ditentukan. Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses, peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses peta proses bisnis, penyusunan peta relasi dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan sub proses yang telah dibuat sebelumnya, dan melakukan

finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja – satuan kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya.

2.3 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Merupakan identifikasi usulan SOP baik berdasarkan layanan eksisting yang belum didukung oleh SOP yang terdiri dari layanan dari layanan publik dan layanan administrasi, serta usulan layanan yang mendukung program RPJMD pada masing-masing OPD.

BAB 3
ARSITEKTUR PETA PROSES BISNIS

Pada bab ini membahas terkait proses penyusunan yang dimulai dari referensi arsitektur proses bisnis SPBE, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi metadata proses bisnis PSBE, identifikasi peta proses bisnis tiap perangkat daerah, identifikasi peta relasi, serta identifikasi usulan standar operasional prosedur (SOP).

3.1 Persiapan dan Perencanaan Proses Bisnis

Berdasarkan Permen PANRB 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah, hal pokok yang menjadi landasan utama yakni kegiatan atau aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Perintah Daerah Kabupaten Situbondo menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, proses yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan pemetaan urusan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian dilanjutkan dengan pemetaan terhadap setiap proses bisnis maupun sub-proses bisnis yang dimiliki didasari pada unit dalam organisasi.

Langkah awal dalam penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Sehingga, dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan kedalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dengan hasil pemetaan proses bisnis yang dilakukan, ditemukan **40 urusan** yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang kemudian dipetakan menjadi proses bisnis dan sub-proses bisnis. Penyusunan peta proses bisnis dilakukan dengan memvisualisasikan alur proses sehingga dapat diketahui detail dari proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, peta relasi proses bisnis, dan peta lintas fungsi antar proses bisnis.

3.2 Pengembangan Peta Proses Bisnis Level Kabupaten

Berdasarkan Permen-PANRB 19 Tahun 2018, Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi. Menurut **peraturan menteri**

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, tentang penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Penyusunan peta proses bisnis level Kabupaten diturunkan dari pendeskripsian Tujuan yang tertera dalam RPJMD.

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya diidentifikasi 3 (tiga) tahapan proses, yaitu proses utama, proses manajerial dan proses pendukung. Penjelasan terkait tahap proses dijelaskan di bawah ini :

a. Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dimana proses tersebut berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintahan dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah. Serta memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
b. Proses manajerial merupakan proses untuk mengelola operasional dan manajemen dari suatu sistem dan mestikan proses inti berjalan dengan baik. Memenuhi kebutuhan pengguna internal.
c. Proses pendukung merupakan proses yang memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti guna menghasilkan nilai manfaat. Serta memungkinkan aktivitas pada proses keduanya berjalan lebih optimal.

Berdasarkan pada kondisi eksisting Kabupaten Situbondo memiliki Peta proses bisnis menggunakan jenis gambar dan sudah mengacu permen-PANRB 19 Tahun 2018. Proses bisnis milik Kabupaten Situbondo telah mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang terdiri dari proses pendukung atau manajerial, proses inti, dan proses lainya. Berikut detail peta proses bisnis level Kabupaten, dapat dilihat Pada **Gambar 6**.

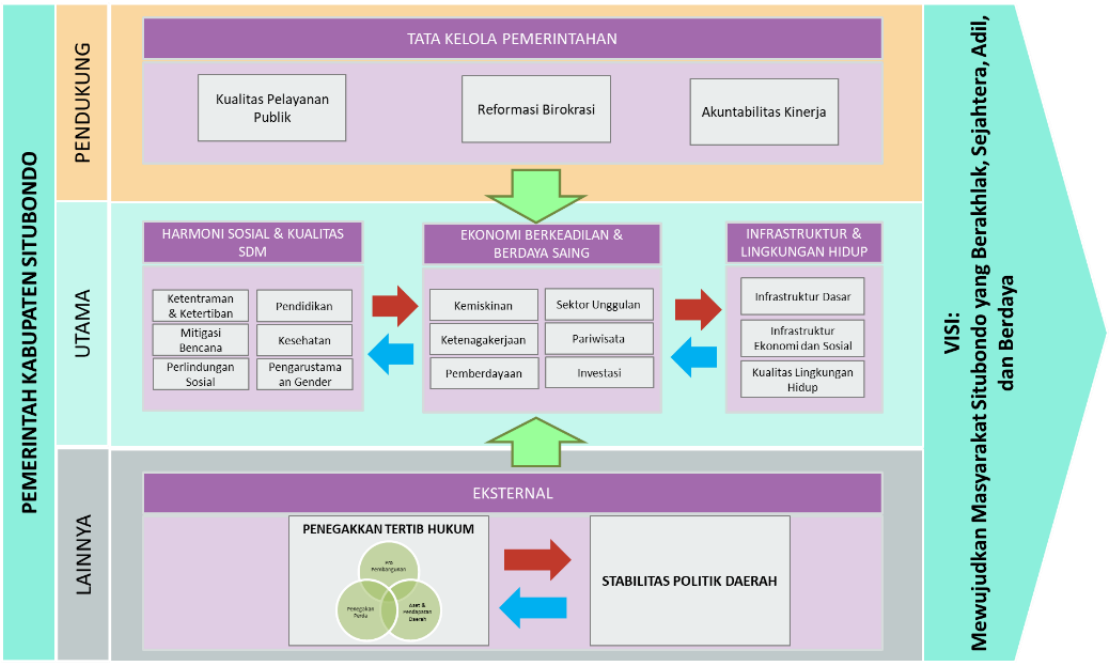

Gambar 6 Peta Proses Bisnis Level 0 Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan kondisi eksisting pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah memiliki peta proses bisnis level kabupaten. Namun, pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Situbondo Pada **indikator 14 tingkat kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE** mendapatkan nilai **tingkat kematangan 2**, Selanjutnya Rekomendasi teknis Penerapan SPBE yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu Menyusun Peta Proses bisnis mengacu pada Peraturan Menteri PANRB no 19 tahun 2018, Sehingga sebagai bentuk langkah perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka saat ini telah disusun peta proses bisnis level Kabupaten sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis agar dapat meningkatkan nilai kematangan. Pada kalimat prosesnya juga belum menunjukkan sebuah proses dan susunan penggambarannya masih belum sesuai pada kerangka yang terdapat pada **Permen-PANRB 19 Tahun 2018**. Sehingga perlu dilakukan inovasi penggambaran ulang untuk perbaikan kalimat pada setiap prosesnya, dari proses utama, majerial dan pendukung. Berikut bentuk gambar perbaikan peta proses bisnis milik Kabupaten Situbondo, dapat dilihat pada **Gambar 7**.

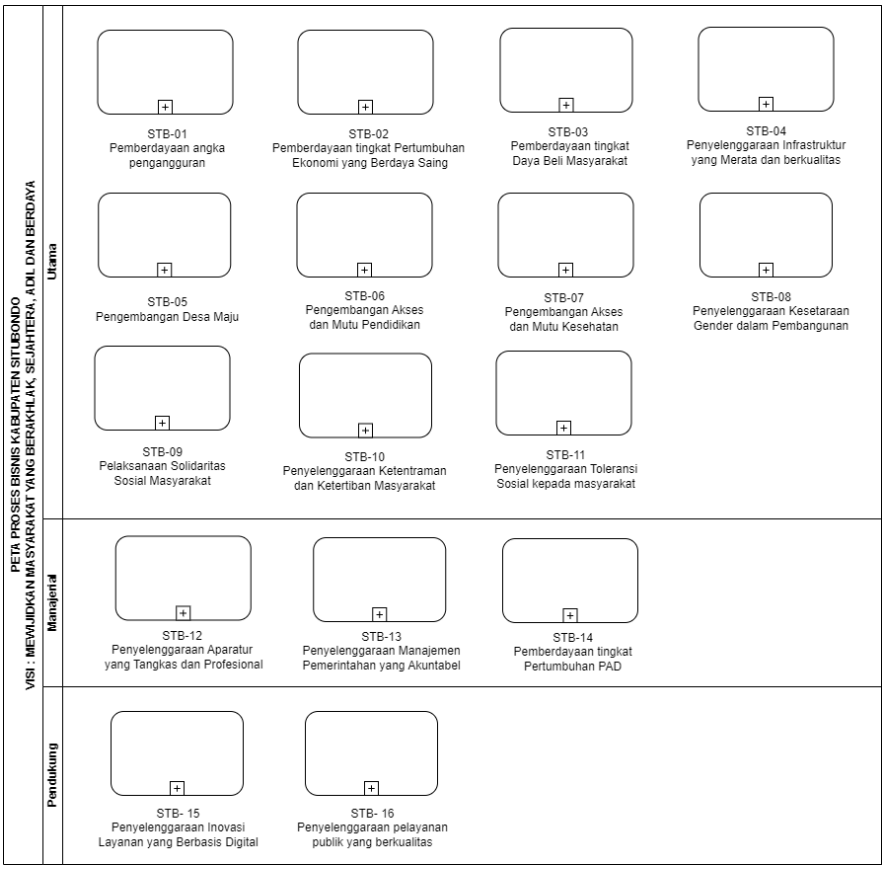

Gambar 7 Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupate Situbondo

Berdasarkan **Gambar 7** Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo terdiri dari 3 Proses yaitu Proses Utama terdiri dari 11 proses, Proses Manajerial terdiri dari 3 proses, dan Proses Pendukung terdiri dari 2 proses. Dari setiap prosesnya diambil dari elaborasi visi, misi, dan tujuan yang diturunkan ke sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Proses utama diidentifikasikan dari sasaran yang merupakan proses yang menunjukkan aliran utama, Proses manajerial berasal dari sasaran yang dapat memastikan proses utama dapat berjalan dengan baik, dan Proses pendukung berasal dari sasaran yang dapat mendukung proses utama agar berjalan dengan baik.

3.3 Identifikasi Urusan Pemerintah

Menurut **UU Nomor 23 Tahun 2014** Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian Berdasarkan **Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 pasal 25** dalam penyusunan proses bisnis kepala daerah berkoordinasi, sehingga dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah pada bidang aparatur negara dan dalam negeri. Pada Urusan di Pemerintahan Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 8

Kelompok Urusan. Delapan kelompok urusan tersebut yaitu terdapat **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 5 urusan dan 9 OPD), **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** (terdapat 18 urusan dan 14 OPD), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (terdapat 6 urusan dan 5 OPD), **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** (terdapat 2 urusan dan 10 OPD), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (terdapat 5 urusan dan 4 OPD), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD), **Unsur Kewilayahan** (terdapat 1 urusan dan 2 OPD), **Unsur Pemerintahan Umum** (terdapat 1 urusan dan 1 OPD). Masing-masing dari kelompok urusan tersebut diuraikan pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1 Identifikasi Urusan Pemerintahan Kabupaten Situbondo

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	RAB 06.01 Pendidikan
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan
		Rsud Dr. Abdoer Rahem	RAB 04.01 Kesehatan
		Puskesmas Situbondo	RAB 04.01 Kesehatan
		Puskesmas Bungatan	RAB 04.01 Kesehatan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 04.01 Kesehatan
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 03.04 Perumahan
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	RAB 05.02 Keamanan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB 05.02 Keamanan
	Sosial	Dinas Sosial	RAB 04.02 Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	RAB 06.02 Ketenagakerjaan
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	RAB 02.03 Pertanian
	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	RAB 03.06 Pertanahan RAB 03.01 Pekerjaan Umum
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAB 07.05 Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB 03.07 Kependudukan
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAB 03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RAB 03.07 Kependudukan
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAB 03.03 Transportasi
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	RAB 09.03 Informasi RAB 09.04 Komunikasi
	Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	RAB 02.09 Koperasi RAB 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah
	Penanaman Modal	Dinas	RAB 02.08

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Investasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata	RAB 06.04 Pemuda RAB 06.05 Olahraga
	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	RAB 09.03 Informasi
	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	RAB 01.01 Pertahanan
	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB 08.02 Kebudayaan
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi RAB 06.01 Pendidikan
	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi RAB 09.06 Aparatur Negara
Urusan Pemerintahan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAB 02.06 Perikanan RAB 07.04 Kelautan RAB 02.05 Peternakan
	Pariwisata	Dinas Pariwisata	RAB 02.11 Pariwisata
	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAB 02.03 Pertanian
		Dinas Pertanian dan Pangan	RAB 02.03 Pertanian
	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan	RAB 02.02 Perdagangan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		Perdagangan	
	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	RAB 02.01 Industri
	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	RAB 03.02 Transmigrasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 08.01 Agama
		Bagian Hukum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 05.01 Hukum
		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 02.07 Badan Usaha Milik Negara
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAB 09.01 Dalam Negeri
		Bagian Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
		Bagian Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.04 Komunikasi
		Bagian Perencanaan dan Keuangan	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.02 Keuangan
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAB 09.02 Keuangan
	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	RAB 09.02 Keuangan
	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	RAB 09.06 Aparatur Negara
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB 06.01 Pendidikan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	Inspektorat	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 09.06 Aparatur Negara
Unsur Kewilayahan	Kecamatan	Kecamatan Bungatan	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		Kecamatan Situbondo	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB 01.01 Pertahanan RAB 05.02 Keamanan

Berdasarkan Tebel 3.3 terdapat 5 (lima) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, 18 (delapan belas) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, 6 (enam) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pemerintahan Pilihan**, 2 (dua) jenis urusan pada kelompok **Urusan Pendukung Pemerintahan**, 5 (lima) jenis urusan pada **kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, 1 (satu) jenis urusan pada 3 kelompok urusan yaitu **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan**, dan **kelompok Unsur Pemerintahan Umum**. Diantara 8 Kelompok Urusan terdapat 3 kelompok urusan yang memiliki jenis urusan paling sedikit yaitu kelompok **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan** yang memiliki jenis urusan **Inspektorat Daerah**, kelompok **Unsur Kewilayahan** yang memiliki jenis urusan **Kecamatan**, dan **kelompok Unsur Pemerintahan Umum** yang memiliki jenis urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik**.

3.4 Identifikasi Metadata Proses Bisnis SPBE

Menurut **UU Nomor 23 Tahun 2014** Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Proses ini merupakan tahapan dalam melakukan pemetaan terkait urusan pada dokumen RPJMD dengan OPD pengampu urusan tersebut. Setiap urusan yang ada, dipetakan ke dalam Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) dengan hasil pemetaan metadata Proses Bisnis dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Metadata Proses Bisnis SPBE

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi
STB-1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.07 Kesekretariatan Negara

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi
			dan otonomi daerah.	
STB-2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 08.01 Agama
STB-3	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 05.01 Hukum
STB-4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 02.07 Badan Usaha Milik Negara
STB-5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	RAB 09.01 Dalam Negeri
STB-6	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.	RAB 09.06 Dalam Negeri RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
STB-7	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.	RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
STB-8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.04 Komunikasi

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi
STB-9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Daerah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.	RAB 09.01 Dalam Negeri RAB 09.02 Keuangan
STB-10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dprd	Penyelenggara Urusan Pemerintahan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
STB-11	Inspektorat	Inspektorat Daerah	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara RAB 09.06 Aparatur Negara
STB-12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kepegawaian	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian	RAB 09.06 Aparatur Negara
		Pendidikan Dan Pelatihan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.	RAB 06.01 Pendidikan
STB-13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang kesatuan bangsa dan politik.	RAB 01.01 Pertahanan RAB 05.02 Keamanan
STB-14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Keuangan	RAB 09.02 Keuangan
STB-15	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Keuangan	RAB 09.02 Keuangan
STB-16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
		Penelitian Dan Pengembangan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang penelitian dan Pengembangan	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
STB-17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB 03.07 Kependudukan
STB-18	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan
STB-19	Dinas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja	RAB 06.02 Ketenagakerjaan
		Transmigrasi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Transmigrasi	RAB 03.02 Transmigrasi

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi
STB-20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi Dan Informatika	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang statistik	RAB 09.03 Informasi RAB 09.04 Komunikasi
		Statistik	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang statistik	RAB 09.03 Informasi
		Persandian	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Persandian.	RAB 01.01 Pertahanan
STB-21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi usaha kecil dan menengah	RAB 02.09 Koperasi RAB 02.10 Usaha Kecil dan Menengah
		Perdagangan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang perdagangan.	RAB 02.02 Perdagangan
		Perindustrian	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang perindustrian	RAB 02.01 Industri
STB-22	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup	RAB 07.05 Lingkungan Hidup
STB-23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan Dan Olahraga	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang pariwisata	RAB 02.11 Pariwisata
		Pariwisata	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang pemuda dan olahraga	RAB 06.04 Pemuda RAB 06.05 Olahraga
STB-24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Kesehatan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Cipta Karya	RAB 04.01 Kesehatan
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	RAB 03.04 Perumahan
		Pertanahan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang pertanahan, Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	RAB 03.06 Pertanahan RAB 03.01 Pekerjaan Umum
STB-25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyelenggara Urusan Pemerintahandi Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	RAB 03.05 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi
STB-26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	RAB 03.07 Kependudukan
STB-27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	RAB 02.08 Investasi
STB-28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.	RAB 06.01 Pendidikan
		Kebudayaan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan.	RAB 08.02 Kebudayaan
STB-29	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang perhubungan.	RAB 03.03 Transportasi
STB-30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RAB 06.01 Pendidikan
		Kearsipan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Kearsipan.	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RAB 09.06 Aparatur Negara
STB-31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pangan	Penyelnggara Urusan Pemerintahan di Bidang pangan.	RAB 02.03 Pertanian
		Pertanian	Penyelnggara Urusan Pemerintahan di Bidang pertanian.	RAB 02.03 Pertanian
STB-32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang kesehatan hewan dan Bidang perikanan.	RAB 02.06 Perikanan RAB 07.04 Kelautan RAB 02.05 Peternakan
		Pertanian	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang pertanian sub peternakan	RAB 02.03 Pertanian
STB-33	Dinas Sosial	Sosial	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang sosial.	RAB 04.02 Pertanian

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi
STB-34	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	RAB 05.02 Keamanan
STB-35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Kesehatan	Penyelenggara Urusan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan.	RAB 04.01 Kesehatan
STB-36	Kecamatan Situbondo	Kecamatan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
STB-37	Kecamatan Bungatan	Kecamatan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
STB-38	Puskesmas Situbondo	Kesehatan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.	RAB 04.01 Kesehatan
STB-39	Puskesmas Bungatan	Kesehatan	Penyelenggara Urusan Pemerintahan sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.	RAB 04.01 Kesehatan
STB-40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.	RAB 05.02 Keamanan

Pada kondisi eksisting, urusan di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 40 urusan dari total 45 urusan Referensi Arsitektur Proses bisnis sesusi Peraturan Presiden, Sehingga terdapat 5 Referensi Arsitektur Proses Bisnis yang terbagi ke dalam urusan yaitu **Hubungan Luar Negeri, Perkebunan, Pertambangan, Energi, dan Kehutanan**.

3.5 Pengembangan Peta Proses Bisnis pada tiap OPD

Tahap pengembangan peta proses bisnis ditunjukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan SPBE berdasarkan salah satu domain yakni Proses Bisnis. Proses pengembangan dilakukan dengan cara pengkodean dan identifikasi peta proses bisnis pada setiap OPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan efisiensi dalam visualisasi pada masing-masing proses bisnis.

3.5.1 Pengkodean Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis pada setiap perangkat daerah terdiri dari peta proses bisnis level 0. Pada penyusunan peta proses bisnis, diperlukan pengkodean pada masing-masing prosesnya. Tujuan dilakukannya pengkodean adalah agar masing-masing proses bisnis yang divisualisasikan lebih efisien. Pada pengkodean untuk Kode OPD diawali dari STB yang merupakan inisialisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kemudian pengkodean dilanjutkan dari urutan OPD ke 1 (satu) hingga 40 (empat puluh) sesuai dengan jumlah OPD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Kode OPD

NO	Nama Dinas
STB-1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
STB-2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
STB-3	Bagian Hukum
STB-4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
STB-5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
STB-6	Bagian Umum
STB-7	Bagian Organisasi
STB-8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
STB-9	Bagian Perencanaan dan Keuangan
STB-10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
STB-11	Inspektorat
STB-12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
STB-13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
STB-14	Badan Keuangan dan Aset Daerah
STB-15	Badan Pendapatan Daerah
STB-16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
STB-17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
STB-18	Dinas Kesehatan
STB-19	Dinas Ketenagakerjaan
STB-20	Dinas Komunikasi dan Informatika
STB-21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
STB-22	Dinas Lingkungan Hidup
STB-23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
STB-24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
STB-25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Nama Dinas
STB-26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
STB-27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
STB-28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
STB-29	Dinas Perhubungan
STB-30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
STB-31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
STB-32	Dinas Peternakan dan Perikanan
STB-33	Dinas Sosial
STB-34	Satuan Polisi Pamong Praja
STB-35	RSUD dr. Abdoer Rahem
STB-36	Kecamatan Situbondo
STB-37	Kecamatan Bungatan
STB-38	Puskesmas Situbondo
STB-39	Puskesmas Bungatan
STB-40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengkodean untuk proses tiap OPD yang diidentifikasikan dari aktivitas yang dilakukan oleh OPD secara keseluruhan. Berikut contoh pengkodean pada tiap OPD. Dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Pengkodean proses bisnis Level OPD

Kode Proses Bisnis	Contoh Nama Proses
STB 28.1.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
STB 28.1.2	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan pada Tabel 3.4. Pada proses bisnis pada tiap perangkat daerah diambil dari masing-masing bidang. Langkah-langkah dalam melakukan pengkodean proses bisnis manajerial adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean proses bisnis dilakukan dengan format STB-X.Y.Z.
2. Variabel X merupakan kode OPD yaitu diawali dengan kode OPD dari mulai OPD ke 1 yaitu STB-1 sampai OPD ke 40 yaitu STB-40;
3. Variabel Y adalah pengkodean urusan, Contoh di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk kedalam 2 urusan yaitu urusan Pendidikan dan urusan kebudayaan. Maka Pengokodean untuk urusan Pendidikan “1” dan urusan kebudayaan “2”.
4. Variabel Z adalah variabel yang menunjukkan urutan proses dalam tiap urusan.

Sehingga jika diimplementasikan Contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 2 urusan yaitu,

a. Urusan Pendidikan STB-28.1.1

“STB-28” merupakan kode OPD, “1” merupakan urusan nomor 1 di OPD tersebut, dan “1” urutan proses nomor 1.

b. Urusan Kebudayaan STB-28.2.1
"STB-28" merupakan kode OPD, "2" merupakan urusan nomor 2 di OPD tersebut, dan "1" urutan proses nomor 1.

3.5.2 Hasil Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap OPD

Hasil Identifikasi peta proses bisnis pada tiap OPD berpedoman pada SOTK. Seluruh Identifikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diidentifikasi sesuai bidang dari masing-masing OPD dan disesuaikan dengan urusan.

3.5.2.1 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.01 Dalam Negeri dan RAB 09.07 Kesekretariatan Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Sekretariat Daerah** pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama adalah STB-1.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. **Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan urusan Sekretariat Daerah yang dimiliki **Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama** pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5 Proses Bisnis Tata Pemerintahan dan Kerjasama (STB-1.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 1.1.1	Pengelolaan administrasi pemerintahan
STB 1.1.2	Pengelolaan administrasi kewilayahan
STB 1.1.3	Penyelenggaraan kerja sama
STB 1.1.4	Penyelenggaraan otonomi daerah

3.5.2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara dan RAB 08.01 Agama. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah STB-2.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Kesejahteraan Rakyat** memiliki 3 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan urusan Sekretariat Daerah yang dimiliki **Bagian Kesejahteraan Rakyat** pada **Tabel 3.6.**

Tabel 3.6 Proses Bisnis Bagian Kesejahteraan Rakyat (STB-2.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 2.1.1	Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat
STB 2.1.2	Pengelolaan Kesejahteraan Sosial
STB 2.1.3	Pengelolaan Keagamaan

3.5.2.3 Bagian Hukum

Bagian Hukum dan Kerjasama menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara dan RAB 05.01 Hukum. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum adalah STB-3.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Hukum** memiliki 3 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Hukum** pada **Tabel 3.7.**

Tabel 3.7 Proses Bisnis Bagian Hukum (STB-3.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 3.1.1	Penyelenggaraan Fasilitasi Perundang-undangan
STB 3.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum
STB 3.1.3	Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

3.5.2.4 Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara, RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional, dan RAB 02.07 Badan Usaha Milik Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam adalah STB-4.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam** memiliki 5 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam** pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3.8 Proses Bisnis Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (STB-4.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 4.1.1	Pengelolaan Perekonomian
STB 4.1.2	Pengelolaan Badan Usaha Milih Daerah (BUMD)
STB 4.1.3	Pengelolaan (Badan Layanan Umum Daerah) BLUD
STB 4.1.4	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan
STB 4.1.5	Pelaksanaan Fasilitasi Sumber Daya Alam

3.5.2.5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.01 Dalam Negeri. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah STB-5.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** memiliki 3 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3.9 Proses Bisnis Bagian Barang dan Jasa (STB-5.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 5.1.1	Pengelolaan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
STB 5.1.2	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
STB 5.1.3	Pengelolaan advokasi pengadaan barang dan jasa

3.5.2.6 Bagian Umum

Bagian Umum menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.06 Aparatur Negara dan RAB 09.07 Kesekretariatan Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Umum adalah STB-6.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Umum** memiliki 3 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Umum** pada **Tabel 3.10.**

Tabel 3.10 Proses Bisnis Bagian Umum (STB-6.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 6.1.1	Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
STB 6.1.2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perlengkapan Sekretariat Daerah
STB 6.1.3	Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga

3.5.2.7 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.06 Aparatur Negara dan RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi adalah STB-7.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Organisasi** memiliki 6 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis

dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Organisasi** pada **Tabel 3.11.**

Tabel 3.11 Proses Bisnis Bagian Organisasi (STB-7.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 7.1.1	Pelaksanaan Kelembagaan
STB 7.1.2	Pelaksanaan Analisis Jabatan
STB 7.1.3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik
STB 7.1.4	Penyelenggaraan Tatalaksana
STB 7.1.5	Pengelolaan Peningkatan Kinerja
STB 7.1.6	Pengelolaan Reformasi Birokrasi

3.5.2.8 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menangani **Urusan Sekretariat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.01 Dalam Negeri dan RAB 09.04 Komunikasi. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah STB-8.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** memiliki 2 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** pada **Tabel 3.12.**

Tabel 3.12 Proses Bisnis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (STB-8.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 8.1.1	Pengelolaan Komunikasi Pimpinan
STB 8.1.2	Pelaksanaan Dokumentasi Pimpinan

3.5.2.9 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan menangani urusan Sekretariat Daerah dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.01 Dalam Negeri dan RAB 09.02 Keuangan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah STB-9.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Bagian Perencanaan dan Keuangan** memiliki 3 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** yang dimiliki **Bagian Perencanaan dan Keuangan** pada **Tabel 3.13.**

Tabel 3.13 Proses Bisnis Bagian Perencanaan dan Keuangan (STB-9.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 9.1.1	Penyelenggaraan Perencanaan Program Kerja
STB 9.1.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan
STB 9.1.3	Pelaksanaa Pelaporan Program Kerja

3.5.2.10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menangani urusan Sekertariat DPRD dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sekretariat DPRD pada Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah STB-10.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya dukungan fasilitasi pengawasan dan penganggaran. Pada **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat DPRD** yang dimiliki **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tabel** pada **3.14.**

Tabel 3.14 Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (STB-10.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 10.1.1	Pengelolaan Persidangan
STB 10.1.2	Pelaksanaan Penyusunan Perundang-undangan
STB 10.1.3	Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran
STB 10.1.4	Penyelenggaraan Pengawasan

3.5.2.11 Inspektorat

Inspektorat menangani **Urusan Inspektorat Daerah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara dan RAB 09.06 Aparatur Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Inspektorat Daerah pada Bagian Inspektorat adalah STB-11.1. Proses bisnis dengan **Urusan Sekretariat Daerah** berada di lingkup sasaran Meningkatnya dukungan fasilitasi pengawasan dan penganggaran. Pada **Inspektorat** memiliki 5 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Inspektorat Daerah** yang dimiliki **Inspektorat Tabel** pada **3.15.**

Tabel 3.15 Proses Bisnis Inspektorat (STB-11.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 11.1.1	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu I
STB 11.1.2	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu II
STB 11.1.3	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu III
STB 11.1.4	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu IV
STB 11.1.5	Pelaksanaan Tugas Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi

3.5.2.12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia menangani **Urusan Kepegawaian** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.06 Aparatur Negara dan **Urusan Pendidikan dan Pelatihan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 06.01 Pendidikan. Pada dua Proses bisnis tersebut berada di lingkup sasaran Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional. Pada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** memiliki 5 proses pada **Urusan Kepegawaian** dan 1 proses pada **Urusan Pendidikan dan Pelatihan**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah STB-12.1. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kepegawaian** yang dimiliki **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tabel** pada **3.16.**

Tabel 3.16 Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (STB-12.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 12.1.1	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur
STB 12.1.2	Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN
STB 12.1.3	Pengelolaan Data ASN
STB 12.1.4	Pengelolaan Kepangkatan
STB 12.1.5	Penyelenggaraan Mutasi Aparatur

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pendidikan dan Pelatihan** pada Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah STB-12.2. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pendidikan dan Pelatihan Daerah** yang dimiliki **Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tabel** pada **3.17.**

Tabel 3.17 Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (STB-12.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 12.2.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur

3.5.2.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menangani **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 01.01 Pertahanan dan RAB 05.02 Keamanan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bagian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah STB-13.1. Proses bisnis dengan **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik** berada di lingkup sasaran Meningkatnya dukungan fasilitasi pengawasan dan penganggaran. Pada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** memiliki 5 proses**.** Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik** yang dimiliki **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** pada **Tabel 3.18.**

Tabel 3.18 Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (STB-13.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 13.1.1	Pengelolaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
STB 13.1.2	Penyelenggaraan Karakter Bangsa
STB 13.1.3	Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
STB 13.1.4	Pengelolaan Ketahanan Ekonomi
STB 13.1.5	Pengelolaan Ketahanan Sosial Budaya
STB 13.1.6	Pengelolaan Ketahanan Agama
STB 13.1.7	Pengelolaan Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan
STB 13.1.8	Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional
STB 13.1.9	Pelaksanaan Penanganan Konflik

3.5.2.14 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah menangani **Urusan Keuangan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.02 Keuangan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah STB-14.1. Proses bisnis dengan **Urusan Keuangan** berada di lingkup sasaran Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel. Pada **Badan Keuangan dan Aset Daerah** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Keuangan** yang dimiliki **Badan Keuangan dan Aset Daerah Tabel** pada **3.19.**

Tabel 3.19 Proses Bisnis Badan Keuangan dan Aset Daerah (STB-14.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 14.1.1	Pengelolaan Perbendaharaan
STB 14.1.2	Pengelolaan Akutansi
STB 14.1.3	Pengelolaan Anggaran
STB 14.1.4	Pengelolaan Aset Daerah

3.5.2.15 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah menangani **Urusan Keuangan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.02 Keuangan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah adalah STB-15.1. Proses bisnis dengan **Urusan Keuangan** berada di lingkup sasaran Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan PAD. Pada **Badan**

Pendapatan Daerah memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Keuangan** yang dimiliki **Badan Pendapatan Daerah** pada **Tabel 3.20.**

Tabel 3.20 Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah (STB-15.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 15.1.1	Pengelolaan Perencanaan PBB-P2 dan BPHTB
STB 15.1.2	Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
STB 15.1.3	Pengelolaan Pendapatan Daerah
STB 15.1.4	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3.5.2.16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menangani **Urusan Perencanaan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional dan **Urusan Penelitian dan Pengembangan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu dan RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada dua Urusan tersebut berada di lingkup sasaran Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel. Pada **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** memiliki 6 proses pada **Urusan Perencanaan** dan 2 proses pada **Urusan Penelitian dan Pengembangan**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Perencanaan pada **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah STB-16.1. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Perencanaan** yang dimiliki **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** pada **Tabel 3.21.**

Tabel 3.21 Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (STB-16.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 16.1.1	Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah
STB 16.1.2	Pengelolaan Pengendalian Pembangunan Daerah
STB 16.1.3	Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah
STB 16.1.4	Pelaksanaan Pembangunan Manusia
STB 16.1.5	Pengelolaan Perekonomian
STB 16.1.6	Pengelolaan Sumber Daya Alam

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Penelitian dan Pengembangan** pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah STB-16.2. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Penelitian dan Pengembangan** yang dimiliki **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** pada **Tabel 3.22.**

Tabel 3.22 Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (STB-16.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 16.2.1	Pemberdayaan Penelitian Pembangunan Daerah
STB 16.2.2	Pengembangan Pembangunan Daerah

3.5.2.17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 03.07 Kependudukan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah STB-17.1. Proses bisnis dengan **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil** berada di lingkup sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** memiliki 5 proses**.** Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil** yang dimiliki **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabel** pada **3.23.**

Tabel 3.23 Proses Bisnis Level 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (STB-17.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 17.1.1	penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
STB 17.1.2	Pengelolaan Pelayanan Pencatatan SIpil
STB 17.1.3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
STB 17.1.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
STB 17.1.5	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan

3.5.2.18 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan menangani **Urusan Kesehatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.01Kesehatan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah STB-18.1. Proses bisnis dengan **Urusan Kesehatan** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan. Pada **Dinas Kesehatan** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kesehatan** yang dimiliki **Dinas Kesehatan** pada **Tabel 3.24.**

Tabel 3.24 Proses Bisnis Dinas Kesehatan (STB-18.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 18.1.1	Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
STB 18.1.2	Pelaksanaan Pengendalian Penyakit
STB 18.1.3	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
STB 18.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

3.5.2.19 Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan menangani **Urusan Tenaga Kerja** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 06.02 Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 03.02 Transmigrasi. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Tenaga Kerja** pada **Dinas Ketenagakerjaan** adalah STB-19.1. Proses bisnis dengan **Urusan Ketenagakerjaan** berada di lingkup sasaran Menurunnya angka pengangguran. Pada **Dinas Ketenagakerjaan** memiliki 6 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Tenaga Kerja** yang dimiliki **Dinas Ketenagakerjaan** pada **Tabel 3.25.**

Tabel 3.25 Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan (STB-19.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 19.1.1	Pelaksanaa Pelatihan Kerja dan Produktivitas
STB 19.1.2	Pengelolaan Transmigrasi
STB 19.1.3	Penyelenggaraan Penempatan Tenaga kerja
STB 19.1.4	Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja
STB 19.1.5	Pengelolaan Hubungan Industrial
STB 19.1.6	Pelaksaanaan Jaminan Sosial tenaga Kerja

3.5.2.20 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika menangani **Urusan Komunikasi dan Informatika** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.03 Informasi dan RAB 09.04 Komunikasi, **Urusan Statistik** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.03 Informasi, serta **Urusan Persandian** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 01.01 Pertahanan. Pada tiga proses tersebut berada di lingkup sasaran Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital. Pada **Dinas Komunikasi dan Informatika** memiliki 1 proses pada **Urusan Komunikasi dan Informatika** , 1 proses pada **Urusan Statistik,** dan 1 proses pada **Urusan Persandian** .ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Komunikasi dan Informatika** pada Bagian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah STB-20.1. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Komunikasi dan Informatika** yang dimiliki **Dinas Komunikasi dan Informatika** pada **Tabel 3.26.**

Tabel 3.26 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika (STB-20.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 20.1.1	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Statistik** pada Bagian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah STB-20.2. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Statistik** yang dimiliki **Dinas Komunikasi dan Informatika** pada **Tabel 3.27.**

Tabel 3.27 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika (STB-20.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan

STB 20.2.1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Persandian** pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah STB-20.3. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan urusan Persandian yang dimiliki **Dinas Komunikasi dan Informatika** pada **Tabel 3.28.**

Tabel 3.28 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika (STB-20.3)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 20.3.1	Penyelenggaraan Persandian

3.5.2.21 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menangani **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.09 Koperasi dan RAB 02.10 Usaha Kecil, **Urusan Perdagangan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.02 Perdagangan, Serta **Urusan Perindustrian** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.01 Industri. Pada **Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan** memiliki 2 proses pada **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,** 1 proses pada **Urusan Perdagangan**, dan 2 proses pada **Urusan Perindustrian**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada Bagian Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan adalah STB-21.1. Proses bisnis dengan **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** berada di lingkup sasaran Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah yang dimiliki Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan **Tabel** Pada **3.29.**

Tabel 3.29 Proses Bisnis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (STB-21.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 21.1.1	Pengelolaan Koperasi
STB 21.1.2	Pemberdayaan Pembinaan Usaha Mikro

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Perdagangan** pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan adalah STB-21.2. Proses bisnis dengan **Urusan Perdagangan** berada di lingkup sasaran Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan. Berikut detail penjabaran proses bisnis

dengan **Urusan Perdagangan** yang dimiliki **Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan** Pada **Tabel 3.30.**

Tabel 3.30

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 21.2.1	Pengelolaan Perindustrian

Proses Bisnis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (STB-21.2)

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Perindustrian** pada Bagian Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan adalah STB-21.3. Proses bisnis dengan **Urusan Perindustrian** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Perindustrian** yang dimiliki **Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan** Pada **Tabel 3.31.**

Tabel 3.31 Proses Bisnis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (STB-21.3)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 21.3.1	Pengembangan Perdagangan
STB 21.3.2	Pengelolaan Metrologi

3.5.2.22 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup menangani **Urusan Lingkungan Hidup** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 07.05 lingkungan hidup. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Lingkungan Hidup** pada Dinas Lingkungan Hidup adalah STB-22.1. Proses bisnis dengan **Urusan Lingkungan Hidup** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan. Pada **Dinas Lingkungan Hidup** memiliki 7 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis **dengan Urusan Lingkungan Hidup** yang dimiliki **Dinas Lingkungan Hidup** Pada **Tabel 3.32.**

Tabel 3.32 Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup (STB-22.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 22.1.1	Penyelenggaraan Penataan PPLH
STB 22.1.2	Pelaksanaan Penaatan PPLH
STB 22.1.3	Pengelolaan Sampah
STB 22.1.4	Pengelolaan Limbah B3
STB 22.1.5	Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
STB 22.1.6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
STB 22.1.7	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

3.5.2.23 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menangani **Urusan Kepemudaan Dan Olahraga** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 06.04 Pemuda dan RAB 06.05 Olahraga dan **Urusan Pariwisata** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.11 Pariwisata. Pada **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** memiliki 2 proses pada U**rusan Kepemudaan Dan Olahraga** dan 3 proses pada U**rusan Pariwisata**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Kepemudaan Dan Olahraga** pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah STB-23.1. Proses bisnis dengan **Urusan Kepemudaan Dan Olahraga** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kepemudaan Dan Olahraga** yang dimiliki **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** Pada **Tabel 3.33.**

Tabel 3.33 Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (STB-23.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 23.1.1	Pengelolaan Kepemudaan
STB 23.1.2	Pengelolaan Keolahragaan

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pariwisata** pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah STB-23.2. Proses bisnis dengan **Urusan Kepemudaan Dan Olahraga** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pariwisata** yang dimiliki **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tabel** Pada **3.34.**

Tabel 3.34

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 23.2.1	Pengelolaan Pariwisata
STB 23.2.2	Pelaksanaan Ekonomi Kreatif
STB 23.2.3	Pelaksanaan Pengembangan SDM Parekraf

Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (STB-23.2)

3.5.2.24 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman menangani **Urusan kesehatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.01 Kesehatan, **Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 03.04 Perumahan, dan **Urusan Pertanahan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 03.06 Pertanahan dan RAB 03.01 Pekerjaan Umum. Pada tiga proses tersebut berada dalam lingkup sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan. Pada **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman** memiliki 1 proses **Urusan kesehatan,** 5 proses **Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman,** dan 2 proses **Urusan Pertanahan**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman adalah STB-24.1. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** yang dimiliki **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Tabel** Pada **3.35.**

Tabel 3.35 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (STB-24.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 24.1.1	Pengelolaan Bina Marga
STB 24.1.2	Pengelolaan Cipta Karya
STB 24.1.3	Penyelenggaraan Penataan Ruang
STB 24.1.4	Pengelolaan Perumahan
STB 24.1.5	Pengelolaan Permukiman

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pertanahan** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman adalah STB-24.2. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pertanahan** yang dimiliki **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman** Pada **Tabel 3.36.**

Tabel 3.36 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (STB-24.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 24.2.1	Pengelolaan Pertanahan
STB 24.2.2	Pengelolaan Bina Konstruksi

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Kesehatan** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman adalah STB-24.3. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kesehatan** yang dimiliki **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman** Pada **Tabel** Pada **3.37.**

Tabel 3.37 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (STB - 24.3)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 24.3.1	Pengelolaan Sumber Daya Air

3.5.2.25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 03.05 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah STB-25.1. Proses Bisnis **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** berada di lingkup sasaran Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing. Pada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** yang dimiliki **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** Pada **Tabel 3.38.**

Tabel 3.38 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (STB25.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 25.1.1	Pelaksanaan Bina Pemerintahan Desa
STB 25.1.2	Pelaksanaan Bina Pemberdayaan Masyarakat
STB 25.1.3	Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan
STB 25.1.4	Pengelolaan Pembangunan Desa

3.5.2.26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menangani **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan dan **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** yaitu RAB 03.07 Kependudukan. Pada **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** memiliki 4 proses pada **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dan 4 proses pada **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga**

Berencana. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah STB-27.1. Proses Bisnis **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** yang dimiliki **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** Pada **Tabel 3.39.**

Tabel 3.39 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (STB-26.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 26.1.1	Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan
STB 26.1.2	Pelaksanaan Kesetaraan Gender
STB 26.1.3	Penyelenggaraan perlindungan perempuan
STB 26.1.4	Penyelenggaraan perlindungan anak

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah STB-26.2. Proses Bisnis **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** yang dimiliki **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** Pada **Tabel 3.40.**

Tabel 3.40 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (STB-26.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 26.2.1	Pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
STB 26.2.2	Pengelolaan Keluarga Berencana
STB 26.2.3	Pengelolaan Ketahanan Keluarga
STB 26.2.4	Pengelolaan Kesejahteraan Keluarga

3.5.2.27 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menangani **Urusan Penanaman Modal** dengan Referensi Arsitektur Bisnis RAB 02.08 Investasi. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah STB-27.1. Proses Bisnis **Urusan Penanaman Modal** berada di lingkup sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada **Dinas**

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Penanaman Modal** yang dimiliki **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Pada **Tabel 3.41.**

Tabel 3.41 Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (STB-27.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 27.1.1	Pelaksanaan Penanaman Modal
STB 27.1.2	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.5.2.28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani **Urusan Pendidikan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 06.01 Pendidikan dan **Urusan Kebudayaan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 08.02 Kebudayaan. Pada **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** memiliki 5 proses pada **Urusan Pendidikan** dan 1 proses pada **Urusan Kebudayaan**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pendidikan** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah STB-28.1. Proses Bisnis **Urusan Pendidikan** berada di lingkup sasaran Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pendidikan** yang dimiliki **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** Pada **Tabel 3.42.**

Tabel 3.42 Proses Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (STB-28.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 28.1.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
STB 28.1.2	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat
STB 28.1.3	Pengelolaan Pendidikan Dasar
STB 28.1.4	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik
STB 28.1.5	Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Kependidikan

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Kebudayaan** pada **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** adalah STB-28.2. Proses Bisnis **Urusan Kebudayaan** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kebudayaan** yang dimiliki **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** Pada **Tabel 3.43.**

Tabel 3.43 Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (STB-28.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 28.2.1	Pengelolaan Kebudayaan

3.5.2.29 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menangani **Urusan Perhubungan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 03.03 Transportasi. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Perhubungan** pada Dinas Perhubungan adalah STB-29.1. Proses Bisnis **Urusan Kebudayaan** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan. Pada **Dinas Perhubungan** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Perhubungan** yang dimiliki **Dinas Perhubungan Tabel 3.44.**

Tabel 3.44 Proses Bisnis Level 1 Dinas Perhubungan (STB-28.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 29.1.1	Pengelolaan Lalu Lintas
STB 29.1.2	Pengelolaan Angkutan Jalan
STB 29.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
STB 29.1.4	Pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas

3.5.2.30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menangani **Urusan Perpustakaan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 06.03 lmu Pengetahuan dan Teknologi dan RAB 06.01 Pendidikan dan **Urusan Kearsipan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 06.03 lmu Pengetahuan dan Teknologi dan RAB 09.06 Aparatur Negara. Pada **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** memiliki 1 proses pada **Urusan Perpustakaan** dan 1 proses pada **Urusan Kearsipan**. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Perpustakaan** pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah STB-30.1. Proses Bisnis **Urusan Perpustakaan** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Perpustakaan** yang dimiliki **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tabel 3.45.**

Tabel 3.45 Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (STB-30.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 30.1.1	Pengelolaan Perpustakaan

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Kearsipan** pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah STB-30.2. Proses Bisnis **Urusan Perpustakaan** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kearsipan** yang dimiliki **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** Pada **Tabel 3.46.**

Tabel 3.46 Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (STB-30.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 30.2.1	Pengelolaan Kearsipan

3.5.2.31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menangani **Urusan Pangan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.03 Pertanian **dan Urusan Pertanian** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.03 Pertanian. Pada **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** memiliki 2 proses **Urusan Pangan** dan 3 proses **Urusan Pertanian.** ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pangan** pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah STB-31.1. Proses Bisnis **Urusan Pangan** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pangan** yang dimiliki **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** Pada **Tabel 3.47.**

Tabel 3.47 Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (STB-31.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 31.1.1	Pengelolaan Tanaman Pangan
STB 31.1.2	Pengelolaan Ketahanan Pangan

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pertanian** pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah STB-31.2. Proses Bisnis **Urusan Pertanian** di lingkup sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan urusan Pertanian yang dimiliki **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tabel** Pada **3.48.**

Tabel 3.48 Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (STB-31.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 31.2.1	Pengelolaan Tanaman Hortikultura
STB 31.2.2	Pengelolaan Tanaman Perkebunan
STB 31.2.3	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.5.2.32 Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan menangani **Urusan Kelautan Dan Perikanan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.06 Perikanan RAB 07.04 Kelautan RAB 02.05 Peternakan dan **Urusan Pertanian** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 02.03 Pertanian. Pada **Dinas Peternakan dan Perikanan** memiliki 5 proses pada **Urusan Kelautan Dan Perikanan** dan 6 proses pada **Urusan Pertanian,** ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Kelautan Dan Perikanan** pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah STB-32.1. Proses Bisnis **Urusan Kelautan Dan Perikanan** di lingkup sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

yang Berdaya Saing. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kelautan Dan Perikanan** yang dimiliki **Dinas Peternakan dan Perikanan** Pada **Tabel 3.49.**

Tabel 3.49 Proses Bisnis Dinas Peternakan dan Perikanan (STB-32.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 32.1.1.1	Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan
STB 32.1.1.2	Pemberdayaan Nelayan
STB 32.1.1.3	Pengelolaan Perikanan Budidaya
STB 32.1.1.4	Pengelolaan Usaha Perikanan
STB 32.1.1.5	Pengelolaan Pemasaran Pertanian

ID Proses Bisnis yang digunakan untuk **Urusan Pertanian** pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah STB-32.2. Proses Bisnis **Urusan Kelautan Dan Perikanan** di lingkup sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Pertanian** yang dimiliki **Dinas Peternakan dan Perikanan** Pada **Tabel 3.50.**

Tabel 3.50 Proses Bisnis Dinas Peternakan dan Perikanan (STB-32.2)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 32.2.1	Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterine
STB 32.2.2	Pengelolaan Sarana Peternakan
STB 32.2.3	Pengelolaan Prasana Peternakan
STB 32.2.4	Pemberdayaan Pembibitan Peternakan
STB 32.2.5	Pemberdayaan Produksi Peternakan
STB 32.2.6	Pengelolaan Pemasaran Peternakan

3.5.2.33 Dinas Sosial

Dinas Sosial menangani **Urusan Sosial** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.02 Sosial. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Sosial pada Dinas Sosial adalah STB-33.1. Proses Bisnis **Urusan Sosial** di lingkup sasaran Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat. Pada **Dinas Sosial** memiliki 5 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Sosial** yang dimiliki **Dinas Sosial Tabel 3.51.**

Tabel 3.51 Proses Bisnis Dinas Sosial (STB-33.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 33.1.1	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
STB 33.1.2	Penyelenggaraan Jaminan Sosial
STB 33.1.3	Pengelolaan Rehabilitasi Sosial
STB 33.1.4	Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial
STB 33.1.5	Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin

3.5.2.34 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja menangani **Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 05.02 Keamanan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah STB-34.1. Proses Bisnis **Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Satuan Polisi Pamong Praja** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** yang dimiliki **Satuan Polisi Pamong Praja Tabel 3.52.**

Tabel 3.52 Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja (STB-34.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 34.1.1	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
STB 34.1.2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
STB 34.1.3	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat
STB 34.1.4	Pelaksanaan Perlindungan Kebakaran

3.5.2.35 RSUD dr. Abdoer Rahem

RSUD dr. Abdoer Rahem menangani **Urusan Kesehatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.01 Kesehatan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Kesehatan pada RSUD dr. Abdoer Rahem adalah STB-35.1. Proses Bisnis **Urusan Kesehatan** di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan. Pada **RSUD dr. Abdoer Rahem** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kesehatan** yang dimiliki **RSUD dr. Abdoer Rahem Tabel 3.53.**

Tabel 3.53 Proses Bisnis RSUD dr. Abdoer Rahem (STB-35.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 35.1.1	Penyelenggaran Pelayanan Keperawatan
STB 35.1.2	Penyelenggaran Pelayanan Medis
STB 35.1.3	Pengelolaan Penunjang Medis
STB 35.1.4	Pengelolaan Penunjang non Medis

3.5.2.36 Kecamatan Situbondo

Kecamatan Situbondo menangani **Urusan Kecamatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Kecamatan pada Kecamatan Situbondo adalah STB-36.1. Proses Bisnis **Urusan Kecamatan** di lingkup sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada **Kecamatan Situbondo** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kecamatan** yang dimiliki **Kecamatan Situbondo Tabel 3.54.**

Tabel 3.54 Proses Bisnis Kecamatan Situbondo (STB-36.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 36.1.1	Pelaksanaan Pemerintahan
STB 36.1.2	Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
STB 36.1.3	Pengelolaan Kesejateraan Rakyat
STB 36.1.4	Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban

3.5.2.37 Kecamatan Bungatan

Kecamatan Bungatan menangani **Urusan Kecamatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 09.07 Kesekretariatan Negara. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Kecamatan pada Kecamatan Bungatan adalah STB-37.1. Proses Bisnis **Urusan Kecamatan** di lingkup sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada **Kecamatan Bungatan** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kecamatan** yang dimiliki **Kecamatan Bungatan Tabel 3.55.**

Tabel 3.55 Proses Bisnis Kecamatan Situbondo (STB-37.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 37.1.1	Pelaksanaan Pemerintahan
STB 37.1.2	Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
STB 37.1.3	Pengelolaan Kesejateraan Rakyat
STB 37.1.4	Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban

3.5.2.38 Puskesmas Situbondo

Puskesmas Situbondo menangani **Urusan Kesehatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.01 Kesehatan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk Urusan Kesehatan pada Puskesmas Situbondo adalah STB-38.1. Proses Bisnis **Urusan Kesehatan** di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan. Pada **Puskesmas Situbondo** memiliki 5 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kesehatan** yang dimiliki **Puskesmas Situbondo Tabel 3.56.**

Tabel 3.56 Proses Bisnis Puskesmas Situbondo (STB-38.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 38.1.1	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan
STB 38.1.2	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
STB 38.1.3	Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium
STB 38.1.4	Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan

STB 38.1.5	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas

3.5.2.39 Puskesmas Bungatan

Puskesmas Bungatan menangani **Urusan Kesehatan** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 04.01 Kesehatan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk Urusan Kesehatan pada Puskesmas Bungatan adalah STB-39.1. Proses Bisnis **Urusan Kesehatan** di lingkup sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan. Pada **Puskesmas Bungatan** memiliki 5 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan **Urusan Kesehatan** yang dimiliki **Puskesmas Bungatan Tabel 3.57.**

Tabel 3.57 Proses Bisnis Puskesmas Situbondo (STB-39.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 39.1.1	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Mayarakat dan Keperawatan Kesehatan
STB 39.1.2	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
STB 39.1.3	Pengelolaan Kefarmasian dan Laboratorium
STB 39.1.4	Pengelolaan Bangunan Prasarana dan Peralatan
STB 39.1.5	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas

3.5.2.40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani **Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** dengan Referensi Arsitektur Bisnis yaitu RAB 05.02 Keamanan. ID Proses Bisnis yang digunakan untuk urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah STB-40.1. Proses bisnis dengan **Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** berada di lingkup sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat. Pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** memiliki 4 proses. Berikut detail penjabaran proses bisnis dengan urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah **Tabel 3.58.**

Tabel 3.58 Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (STB-40.1)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
STB 40.1.1	Pelaksanaan Kedaruratan Bencana
STB 40.1.2	Pelaksanaan Kedaruratan Logistik
STB 40.1.3	Pengelolaan Rehabilitasi Bencana dan Rekonstruksi
STB 40.1.4	Pengelolaan Rekonstruksi Bencana

3.6 Identifikasi Peta Relasi Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Relasi (*Relation Map*) merupakan peta yang

menggambarkan atau menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada proses bisnis. Pada Kabupaten Situbondo belum terdapat identifikasi peta relasi, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 jenis peta proses bisnis tersebut menggunakan jenis gambar Penyusunan peta proses bisnis tersebut telah mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusunan peta proses bisnis Pemerintahan Situbondo digambarkan atau digunakan menggunakan **jenis level atau tingkatan**, sehingga hanya cukup sampai dengan **pengidentifikasian level n**. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan terkait dengan identifikasi peta relasi pada Kabupaten Situbondo **belum tersedia** karena penyesuaiakan dengan peraturan yang saat ini berlaku.

3.7 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur

Identifikasi usulan standar operasional prosedur merupakan proses identifikasi usulan SOP berdasarkan layanan Eksisting, Layanan Administrasi dan Publik, serta terhadap Program RPJMD yang terdapat pada setiap OPD. Namun, Layanan tersebut belum didukung SOP.

3.7.1 Usulan SOP pada Layanan Eksisting SPBE

Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo memiliki **640 Ketersediaan SOP** yang dimiliki oleh 40 OPD, tetapi hanya terdapat 338 (47%) SOP yang **telah mendukung** layanan eksisting sedangkan terdapat 302 (53%) Layanan yang belum didukung SOP. Dari kondisi tersebut dibutuhkan usulan SOP untuk mendukung layanan eksisting tersebut. Adanya SOP dapat memberikan panduan bagi Instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Detail usulan SOP pada Layanan Eksisting SPBE dapat dilihat pada **Tabel 3.59**.

Tabel 3.59 Usulan SOP Pada Layanan Eksisting SPBE

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan fasilitasi PAW DPRD	SOP fasilitasi PAW DPRD
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan pelantikan bupati dan wakil bupati	SOP pelantikan bupati dan wakil bupati
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan koordinator pelaporan LPPD	SOP koordinator pelaporan LPPD
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	SOP Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah ormas	SOP hibah ormas
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah peribadatan	SOP hibah peribadatan
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan peringatan hari besar keagamaan	SOP peringatan hari besar keagamaan
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan pengembangan tilawatil Qur'an	SOP pengembangan tilawatil Qur'an

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan pembinaan rohani	SOP pembinaan rohani
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan pelatihan SDM tempat peribadatan dan pendidikan agama	SOP pelatihan SDM tempat peribadatan dan pendidikan agama
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan isbat nikah	SOP isbat nikah
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan Rukyatul Hilal	SOP Rukyatul Hilal
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah pendidikan agama	SOP hibah pendidikan agama
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan akomodasi jamaah haji	SOP akomodasi jamaah haji
3	Bagian Hukum	Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	SOP Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Hukum	Layanan Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	SOP Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	SOP Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air	SOP Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Percepatan Akses Keuangan Daerah	SOP Percepatan Akses Keuangan Daerah
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah	SOP Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	SOP Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Pemaparan Informasi Mengenai Pembangunan	SOP Pemaparan Informasi Mengenai Pembangunan
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Permintaan Data ke Setiap OPD	SOP Permintaan Data ke Setiap OPD
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Mencukupi Permintaan Data dari Provinsi	SOP Mencukupi Permintaan Data dari Provinsi
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi	SOP Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
6	Bagian Umum	Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan	SOP Fasilitasi Kerumahtanggaan
6	Bagian Umum	Layanan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan	SOP fasilitasi perjalanan dinas pimpinan
6	Bagian Umum	Layanan administrasi umum	SOP administrasi umum
6	Bagian Umum	Layanan Fasilitasi Peminjaman Ruang	SOP Fasilitasi Peminjaman Ruang
6	Bagian Umum	Layanan surat menyurat	SOP surat menyurat
6	Bagian Umum	Layanan Hibah dan Bansos	SOP Hibah dan Bansos
7	Bagian Organisasi	Pelayanan terpadu bergerak	SOP terpadu bergerak
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyediaan jasa Sumber Daya Air dan Listrik	SOP Penyediaan jasa Sumber Daya Air dan Listrik
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pimpinan Daerah	SOP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pimpinan Daerah
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SOP Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	SOP Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran	SOP Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Persidangan dan Risalah	SOP Persidangan dan Risalah
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Bagian Perundang-undangan	SOP Bagian Perundang-undangan
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan informasi Sekretariat DPRD	SOP informasi Sekretariat DPRD
11	Inspektorat	Layanan Konsultasi Pengawasan	SOP Konsultasi Pengawasan
11	Inspektorat	Layanan Monitoring dan Evaluasi	SOP Monitoring dan Evaluasi
11	Inspektorat	Layanan informasi Inspektorat	SOP informasi Inspektorat
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	SOP Indeks Profesionalitas ASN
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan mutasi pegawai	SOP mutasi pegawai
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Jadwal Kepala BKPSDM	SOP Jadwal Kepala BKPSDM
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	SOP Sistem pendataan ORMAS

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	SOP SISTEM PELAYANAN ORGANISASI MASYARAKAT JEMPUT BOLA (Sijempol Pelor)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan pembukuan kas	SOP pembukuan kas
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan informasi tentang penyusutan barang milik daerah	SOP informasi tentang penyusutan barang milik daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan manajemen pajak daerah	SOP manajemen pajak daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pengelolaan PBB	SOP pengelolaan PBB
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pengelolaan BPHTB	SOP pengelolaan BPHTB
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pengelolaan pajak selain PBB dan BPHTB	SOP pengelolaan pajak selain PBB dan BPHTB
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pendaftaran pajak katering	SOP pendaftaran pajak katering
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pelacakan berkas pengajuan PBB	SOP pelacakan berkas pengajuan PBB
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan perubahan data objek atau subyek pajak	SOP perubahan data objek atau subyek pajak
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	SOP pemungutan pajak dan retribusi daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan koordinasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah	SOP koordinasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	SOP pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	SOP penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan sosialisasi dan penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	SOP sosialisasi dan penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	SOP Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Pelaporan dan verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	SOP Pelaporan dan verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retibrusi Daerah	SOP Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retibrusi Daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	SOP Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan penelitian dan inovasi	SOP penelitian dan inovasi

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan bebas stunting	SOP bebas stunting
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanana Lapor kinerja pegawai BAPPEDA	SOP Lapor kinerja pegawai BAPPEDA
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyediaan Air Minum	SOP Penyediaan Air Minum
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Data Perencanaan Pembangunan Desa	SOP Data Perencanaan Pembangunan Desa
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Anti Proverty Program	SOP Anti Proverty Program
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Air Bersih	SOP Air Bersih
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan pendataan dan klasifikasi penduduk	SOP pendataan dan klasifikasi penduduk
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan informasi dan profil BAPPEDA	SOP informasi dan profil BAPPEDA
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan RTLH	SOP RTLH
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan perencanaan daerah	SOP perencanaan daerah (SIPD)
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan perubahan nama dan pewarganegaraan	SOP perubahan nama dan pewarganegaraan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan kerjasama dan inovasi pelayanan	SOP kerjasama dan inovasi pelayanan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	SOP pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
18	Dinas Kesehatan	Layanan sistem kesehatan daerah	SOP sistem kesehatan daerah
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan kartu tenaga kerja luar negeri	SOP kartu tenaga kerja luar negeri
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan informasi Ketenagakerjaan	SOP informasi Ketenagakerjaan
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Pembinan warga resettlemen	SOP Pembinan warga resettlemen
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	SOP Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan pendaftaran Pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB)	SOP pendaftaran Pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB)
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Perjanjian kerja (PKWTT)	SOP Perjanjian kerja (PKWTT)
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Transmigrasi	SOP Transmigrasi
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Unit layanan disabilitas (DLB)	SOP Unit Layanan disabilitas (DLB)
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan manajemen sumber daya TIK	SOP manajemen sumber daya TIK

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan informasi kegiatan desa dan kelurahan	SOP informasi kegiatan desa dan kelurahan
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan pengelolaan menara telekomunikasi	SOP pengelolaan menara telekomunikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan informasi kelompok masyarakat	SOP informasi kelompok masyarakat
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan informasi dan profil Pemerintah Kabupaten Situbondo	SOP informasi dan profil Pemerintah Kabupaten Situbondo
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan perhitungan cepat pemilihan kepala desa	SOP perhitungan cepat pemilihan kepala desa
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Manajemen Sub Domain	SOP Manajemen Sub Domain
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan pengaduan lingkungan hidup	SOP pengaduan lingkungan hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan sosialisasi lingkungan hidup	SOP sosialisasi lingkungan hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Prokasi (Program Kali Bersih)	SOP Prokasi (Program Kali Bersih)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengawasan Lingkungan	SOP Pengawasan Lingkungan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pemangkasan pohon	SOP Pemangkasan pohon
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	SOP Perencanaan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan informasi dan profil DLH	SOP informasi dan profil DLH
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pengembangan Destinasi Pariwisata	SOP Pengembangan Destinasi Pariwisata
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Promosi Pariwisata	SOP Promosi Pariwisata
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SOP Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pembinaan Kepemudaan	SOP Pembinaan Kepemudaan
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	SOP pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi TDUP	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi TDUP
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Retribusi Pemanfaatan Lahan	SOP Retribusi Pemanfaatan Lahan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	SOP Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Jasa Kontruksi Pemberdayaan	SOP Jasa Kontruksi Pemberdayaan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengawasan Kontruksi	SOP Pengawasan Kontruksi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Penyediaan Air Minum	SOP Penyediaan Air Minum
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pembuatan Drainase	SOP Pembuatan Drainase
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Jalan Lingkungan	SOP Jalan Lingkungan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Air Limbah Rumah Tangga	SOP Air Limbah Rumah Tangga
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pembangunan Bangunan dan Gedung	SOP Pembangunan Bangunan dan Gedung
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengelolaan Aset Pengairan	SOP Pengelolaan Aset Pengairan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Perumahan	SOP Perumahan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Permukiman Kumuh	SOP Permukiman Kumuh
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan gerakan desa berdaya	SOP gerakan desa berdaya
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan pokjanal Posyandu	SOP pokjanal Posyandu
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan pembinaan pengelolaan keuangan desa	SOP pembinaan pengelolaan keuangan desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan monitoring keuangan desa	SOP monitoring keuangan desa
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan informasi dan profil DPMD	SOP informasi dan profil DPMD
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Inforgrafis Kekerasan Anak dan Perempuan	Inforgrafis Kekerasan Anak dan Perempuan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	SOP pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Pengelolaan Data Gender dan Anak	SOP Pengelolaan Data Gender dan Anak
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus	SOP pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan informasi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SOP informasi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	SOP pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Penyediaan Data di Kampung KB	SOP Penyediaan Data di Kampung KB
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh	SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan evaluasi perizinan	SOP evaluasi perizinan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengadaan Prasarana Pendidikan	SOP Pengadaan Prasarana Pendidikan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembangunan Sarana Pendidikan	SOP Pembangunan Sarana Pendidikan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembinaan Budaya	SOP Pembinaan Budaya
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pendataan Kesenian Lokal	SOP Pendataan Kesenian Lokal
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembinaan Kesenian	SOP Pembinaan Kesenian
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan beasiswa unggul	SOP beasiswa unggul
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan penjaminan mutu pendidikan	SOP penjaminan mutu pendidikan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan rapor digital SMP	SOP rapor digital SMP
28	Dinas Pendidikan dan	Layanan Fasilitasi Diklat Calon	SOP Fasilitasi Diklat Calon

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
	Kebudayaan	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Fasilitasi Asesmen Kepala Sekolah	SOP Fasilitasi Asesmen Kepala Sekolah
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Fasilitasi Pengusulan NUPTK	SOP Fasilitasi Pengusulan NUPTK
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan fasilitasi pendidikan keaksaraan	SOP fasilitasi pendidikan keaksaraan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan fasilitasi kursus pelatihan	SOP fasilitasi kursus pelatihan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengembangan Kurikulum	SOP Pengembangan Kurikulum
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	SOP Penerimaan Peserta Didik Baru
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan BOS	SOP BOS
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Peningkatan Mutu PAUD	SOP Peningkatan Mutu PAUD
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Peningkatan Kapasitas PTK PAUD	SOP Peningkatan Kapasitas PTK PAUD
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan informasi dinas pendidikan dan kebudayaan	SOP informasi dinas pendidikan dan kebudayaan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen data siswa dan guru	SOP manajemen data siswa dan guru
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan angka kredit guru	SOP angka kredit guru
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen data paud dan pendidikan masyarakat	SOP manajemen data paud dan pendidikan masyarakat
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan absensi guru dan tendik	SOP absensi guru dan tendik
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan pengaduan guru dan tendik	SOP pengaduan guru dan tendik
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan penyelesaian pengaduan	SOP penyelesaian pengaduan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan disposisi surat DISPENDIKBUD	SOP disposisi surat DISPENDIKBUD
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan pendataan penduduk buta aksara	SOP pendataan penduduk buta aksara
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen akses hosting domain website sekolah	SOP manajemen akses hosting domain website sekolah
29	Dinas Perhubungan	Layanan Pelaporan infrastruktur jalan yang bermasalah	SOP Pelaporan infrastruktur jalan yang bermasalah
29	Dinas Perhubungan	Layanan Jadwal Trasportasi	SOP Jadwal Transportasi
29	Dinas Perhubungan	Layanan pengelolaan rambu lalu lintas	SOP pengelolaan rambu lalu lintas
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan informasi dan profil DISHUB	SOP informasi dan profil DISHUB

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan informasi dan profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SOP informasi dan profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Pendaftaran Anggota Perpustakaan	SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Online Publik Akses Katalog	SOP Online Publik Akses Katalog
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan E-Book	SOP E-Book
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Restorasi Arsip	SOP Restorasi Arsip
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno	SOP Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelepasan Variatas Padi Unggul	SOP Pelepasan Variatas Padi Unggul
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan Tanaman Porang	SOP Pengembangan Tanaman Porang
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	SOP Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Hibah Pupuk	SOP Hibah Pupuk
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan Padi Unggul	SOP Pengembangan Padi Unggul
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengadaan Alat Mesin Pertanian	SOP Pengadaan Alat Mesin Pertanian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Jaringan Irigasi	SOP Pembangunan Jaringan Irigasi
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Jalan Usaha Tani	SOP Pembangunan Jalan Usaha Tani
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal atau Dalam	SOP Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal atau Dalam
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Desa Mandiri Benih	SOP Desa Mandiri Benih
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Bantuan Variatas Unggul Baru	SOP Bantuan Variatas Unggul Baru
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Pestisida	SOP Penyediaan Pestisida
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Jaringan	SOP Pengembangan dan Operasionalisasi Jaringan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
		Informasi Agribisnis Hortikultura	Informasi Agribisnis Hortikultura
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan Hidroponik	SOP Pengembangan Hidroponik
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Bibit Hortikultura	SOP Penyediaan Bibit Hortikultura
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengambangan Luasan Tanaman Pestisida	SOP Pengambangan Luasan Tanaman Pestisida
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Perlengkapan Alat Jemur Tanaman Tembakau	SOP Penyediaan Perlengkapan Alat Jemur Tanaman Tembakau
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Irigasi Air Tanam dalam dan Dangkal	SOP Pembangunan Irigasi Air Tanam dalam dan Dangkal
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Jalan Produksi	SOP Pembangunan Jalan Produksi
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian	SOP Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Rembuk Tani	SOP Rembuk Tani
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penilaian Angka kredit	SOP Penilaian Angka kredit
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelatihan Tematik	SOP Pelatihan Tematik
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembuatan Programa	SOP Pembuatan Programa
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Kelembagaan Petani	SOP Kelembagaan Petani
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengelolaan Lahan BPP	SOP Pengelolaan Lahan BPP
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Petihan Pertanian Organik	SOP Petihan Pertanian Organik
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penerapan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati	SOP Penerapan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelatihan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati	SOP Pelatihan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang	SOP Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelaksanaan Sekolah Lapang	SOP Pelaksanaan Sekolah Lapang
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pemantauan Jenis Komoditas Pangan Strategis	SOP Pemantauan Jenis Komoditas Pangan Strategis
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penanganan Lumbung Pangan	SOP Penanganan Lumbung Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Analisa Jenis Bahan Pangan	SOP Analisa Jenis Bahan Pangan
31	Dinas Pertanian dan	Layanan Uji Bahan Pangan	SOP Uji Bahan Pangan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
	Ketahanan Pangan	Segar	Segar
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Analisa Jenis Kelompok Bahan Pangan	SOP Analisa Jenis Kelompok Bahan Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penanganan Desa Rawan Pangan	SOP Penanganan Desa Rawan Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Sarana Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	SOP Penyediaan Sarana Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Jenis Lumbung Pangan Masyarakat	SOP Penyediaan Jenis Lumbung Pangan Masyarakat
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Jenis Lantai Jemur	SOP Penyediaan Jenis Lantai Jemur
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan informasi dan profil DTPHP	SOP informasi dan profil DTPHP
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengaduan dan konsultasi budidaya	SOP Pengaduan dan konsultasi budidaya
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan informasi penyuluhan	SOP informasi penyuluhan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan pendataan hasil produksi perikanan	SOP pendataan hasil produksi perikanan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	SOP Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	SOP Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	SOP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pemberdayaan Nelayan Kecil	SOP Pemberdayaan Nelayan Kecil
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	SOP Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	SOP Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	SOP Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	SOP Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	SOP Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	SOP Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	SOP Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
33	Dinas Sosial	Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial	SOP Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial
33	Dinas Sosial	Layanan informasi dan profil dinsos	SOP informasi dan profil dinsos
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan informasi dan profil satpol pp	SOP informasi dan profil satpol pp
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Penindakan Operasi Bersama Rokok Ilegal	SOP Penindakan Operasi Bersama Rokok Ilegal
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Pengawalan dan Pengamanan	SOP Pengawalan dan Pengamanan
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Sosialisasi	SOP Sosialisasi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan rekam medis	SOP rekam medis
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan Pendaftaran Online	SOP Pendaftaran Online
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan penganggaran rumah sakit	SOP penganggaran rumah sakit
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan pengelolaan farmasi	SOP pengelolaan farmasi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan pengelolaan barang non-farmasi	SOP pengelolaan barang non-farmasi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan pengelolaan rumah sakit	SOP pengelolaan rumah sakit
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SOP Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	SOP Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Kesejahteraan Rakyat	SOP Kesejahteraan Rakyat
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Ketentraman dan Ketertiban	SOP Ketentraman dan Ketertiban
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pengaduan Pelayanan	SOP Pengaduan Pelayanan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
36	Kecamatan Situbondo	Layanan informasi dan profil Kecamatan Situbondo	SOP informasi dan profil Kecamatan Situbondo
37	Kecamatan Bungatan	Layanan informasi dan profil Kecamatan Bungatan	SOP informasi dan profil Kecamatan Bungatan
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Bungatan	SOP Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Bungatan
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar surat keterangan tidak mampu	SOP Pengantar surat keterangan tidak mampu
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar Surat Pindah WNI	SOP Pengantar Surat Pindah WNI
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar ijin keramaian	SOP Pengantar ijin keramaian
37	Kecamatan Bungatan	Pembuatan Surat Keterangan domisili lembaga	SOP Pembuatan Surat Keterangan domisili lembaga
37	Kecamatan Bungatan	Pembuatan surat keterangan Bepergian	SOP Pembuatan surat keterangan Bepergian
37	Kecamatan Bungatan	Pembuatan surat keterangan usaha	SOP Pembuatan surat keterangan usaha
37	Kecamatan Bungatan	pembuatan surat keterangan tidak pernah menikah	SOP pembuatan surat keterangan tidak pernah menikah
37	Kecamatan Bungatan	Surat keterangan kehilangan	SOP Surat keterangan kehilangan
37	Kecamatan Bungatan	surat keterangan kematihan	SOP surat keterangan kematihan
37	Kecamatan Bungatan	Surat keterangan penghasilan	SOP Surat keterangan penghasilan
37	Kecamatan Bungatan	Surat Keterangan harga tanah dan bangunan	SOP Surat Keterangan harga tanah dan bangunan
38	Puskesmas Situbondo	Layanan Claim BPJS	SOP Claim BPJS
38	Puskesmas Situbondo	Layanan Refreshing tentang pengobatan rasional	SOP Refreshing tentang pengobatan rasional
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Informasi Peringatan Dini	SOP Informasi Peringatan Dini
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan kedaruratan dan bantuan logistik	SOP kedaruratan dan bantuan logistik
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Perhitungan Kerugian	SOP Perhitungan Kerugian
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan informasi dan profil BPBD	SOP informasi dan profil BPBD

Berdasarkan Tabel **3.59**, Kabupaten Situbondo memiliki usulan SOP berdasarkan layanan eksisting sebanyak **265 SOP** untuk mendukung layanan eksisting, perlunya usulan SOP karena adanya SOP dapat memberikan panduan bagi Instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Dari beberapa OPD, paling banyak usulan SOP yaitu milik **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 44 SOP**.

3.7.2 Usulan SOP pada Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE

Pada bagian ini akan ditinjau mengenai usulan SOP terhadap layanan Administrasi dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Situbondo, didapatkan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki SOP yang mendukung Layanan Administrasi dan Publik. Sehingga **belum terdapat usulan SOP** terhadap layanan Administrasi dan Layanan Publik.

3.7.3 Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Pada bagian ini akan ditinjau mengenai usulan SOP pada Layanan terhadap Program RPJMD. Usulan ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja terkait program yang ada. Program RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk jangka periode 5 (lima) tahun. Sebanyak **37 (tiga puluh tujuh) SOP** yang diusulkan untuk mendukung usulan layanan terhadap program RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Detail usulan SOP dapat dilihat pada **Tabel 3.60.**

Tabel 3.60 Usulan Layanan terhadap Program RPJMD

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	SOP Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Dinas Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
18	Dinas Kesehatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	SOP Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	SOP Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	SOP Perencanaan Dan Pembangunan Industri
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	SOP Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	SOP Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	SOP Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengembangan Ekspor	SOP Pengembangan Ekspor
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	SOP Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengembangan Permukiman	SOP Pengembangan Permukiman
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Penyelenggaraan Penataan Ruang
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengembangan Perumahan	SOP Pengembangan Perumahan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	SOP Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	SOP Pengurusan Hak Hak Atas Tanah
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Peningkatan Kerjasama Desa	SOP Peningkatan Kerjasama Desa
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	SOP Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	SOP Peningkatan Kualitas Keluarga

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	SOP Pemenuhan Hak Anak (PHA)
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembinaan Sejarah	SOP Pembinaan Sejarah
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perizinan Penggunaan Arsip	SOP Perizinan Penggunaan Arsip
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Perizinan Usaha Pertanian	SOP Perizinan Usaha Pertanian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	SOP Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan
33	Dinas Sosial	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	SOP Perlindungan Dan Jaminan Sosial
33	Dinas Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SOP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SOP Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SOP Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
38	Puskesmas Bungatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
38	Puskesmas Bungatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Berdasarkan Tabel **3.60**, Kabupaten Situbondo memiliki usulan SOP berdasarkan Program sebanyak **37 (tiga puluh tujuh) SOP**, perlunya usulan SOP karena adanya SOP dapat memberikan panduan bagi Instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Dari beberapa OPD, paling banyak usulan SOP yaitu milik **Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan** sebanyak **8 (delapan)** SOP.

LAMPIRAN

Lampiran Level 1 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo

Proses STB-01 Pemberdayaan Angka Pengangguran

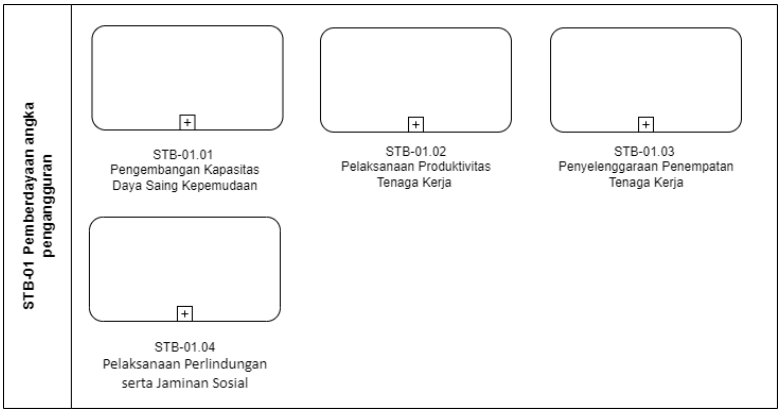

Gambar 8 STB-01 Pemberdayaan Angka Pengangguran

Proses STB-02 Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

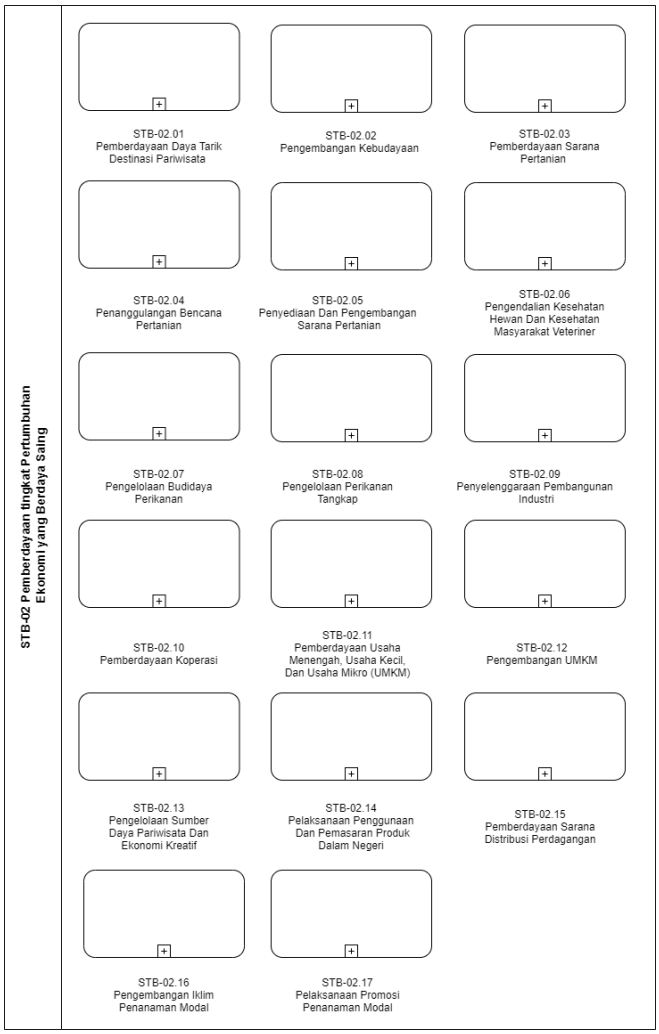

Gambar 9 Proses STB-02 Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

Proses STB-03 Pemberdayaan tingkat Daya Beli Masyarakat

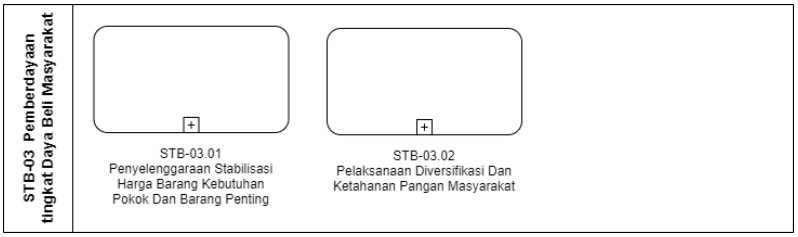

Gambar 10 Proses STB-03 Pemberdayaan tingkat Daya Beli Masyarakat

Proses STB-04 Penyelenggaraan Infrastruktur yang Merata dan berkualitas

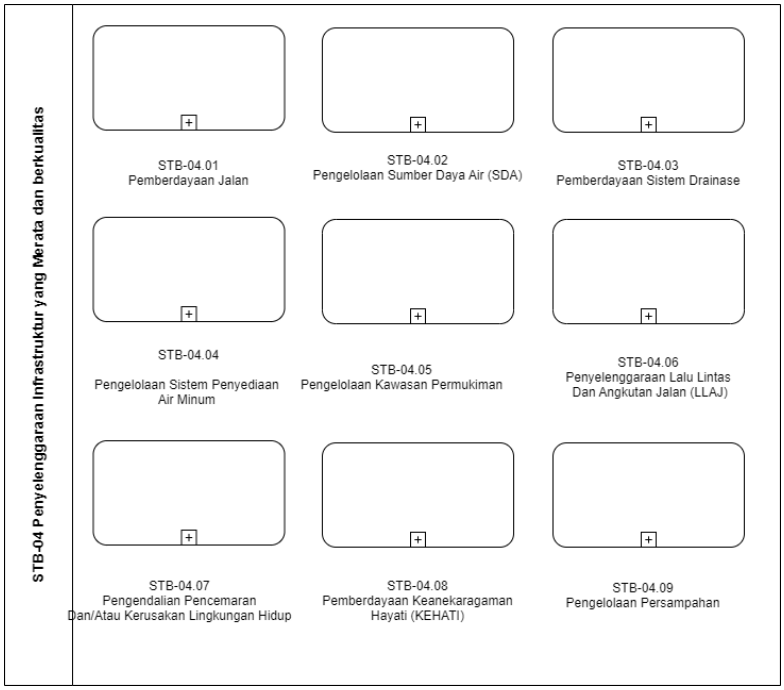

Gambar 11 Proses STB-04 Penyelenggaraan Infrastruktur yang Merata dan berkualitas

Proses STB-05 Pengembangan Desa Maju

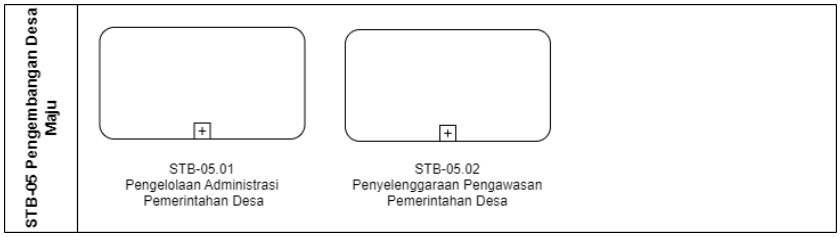

Gambar 12 Proses STB-05 Pengembangan Desa Maju

Proses STB-06 Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan

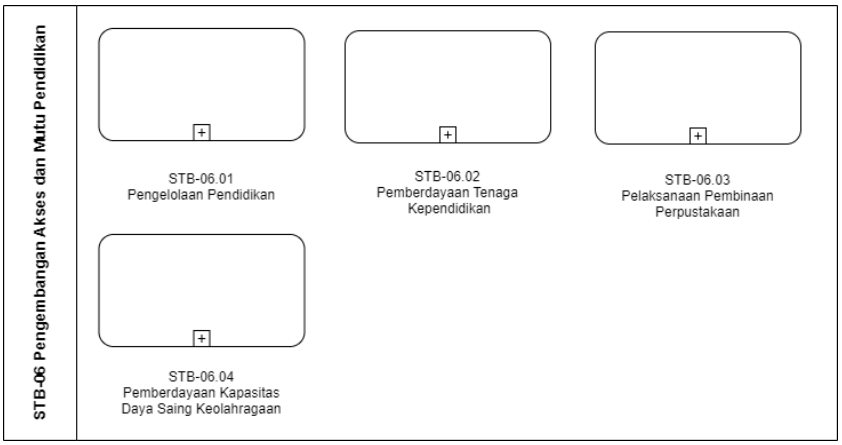

Gambar 13 Proses STB-06 Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan

Proses STB-07 yaitu Pengembangan Akses dan Mutu Kesehatan

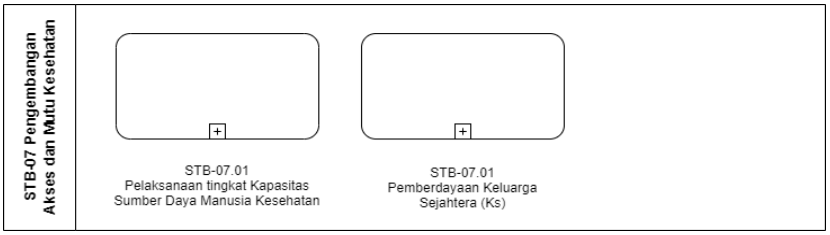

Gambar 14 Proses STB-07 yaitu Pengembangan Akses dan Mutu Kesehatan

Proses STB-08 Penyelenggaraan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

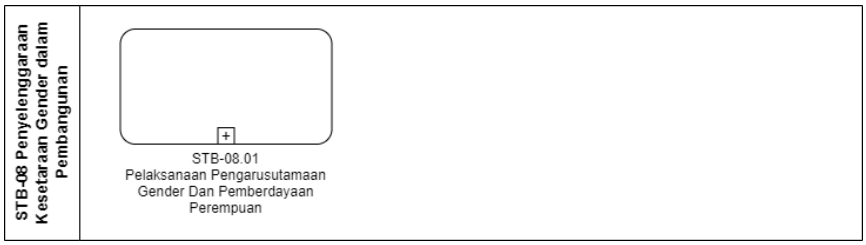

Gambar 15 Proses STB-08 Penyelenggaraan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Proses STB-09 Pelaksanaan Solidaritas Sosial Masyarakat

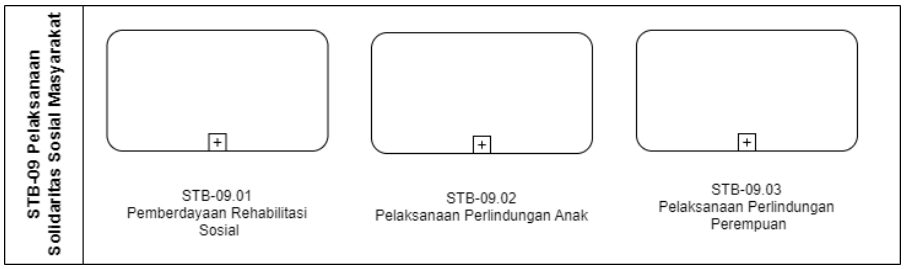

Gambar 16 Proses STB-09 Pelaksanaan Solidaritas Sosial Masyarakat

Proses STB-10 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

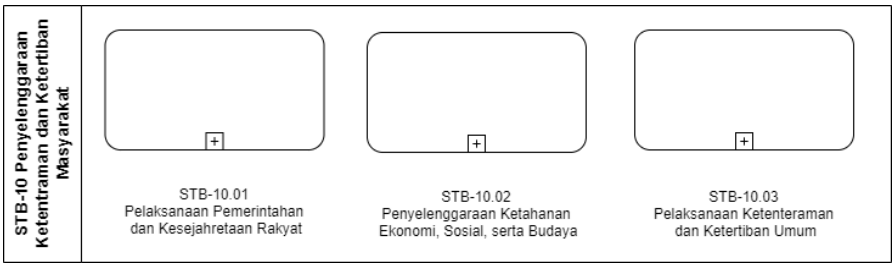

Gambar 17 Proses STB-10 yaitu Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Proses STB-11 Penyelenggaraan Toleransi Sosial kepada masyarakat.

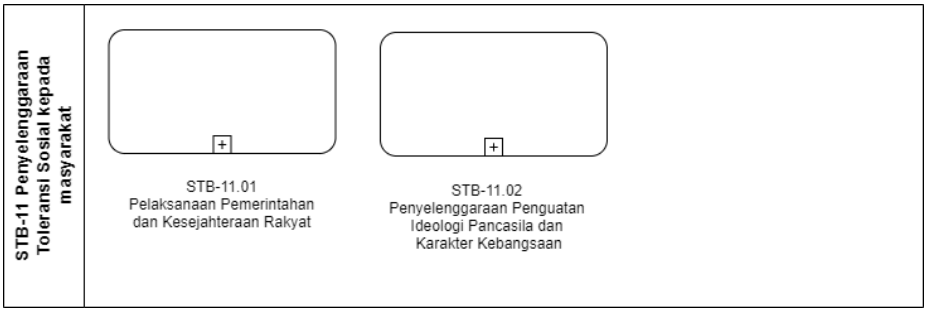

Gambar 18 Proses STB-11 Penyelenggaraan Toleransi Sosial kepada masyarakat.

Proses STB-12 Penyelenggaraan Aparatur yang Tangkas dan Profesional

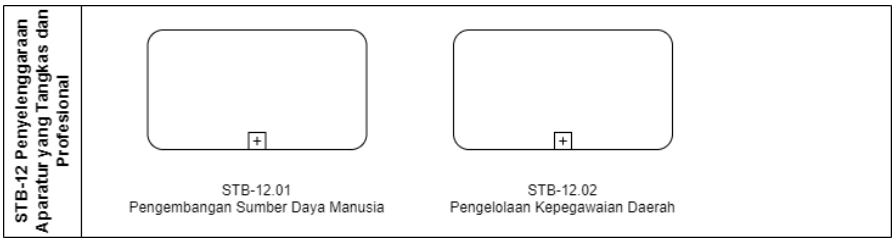

Gambar 19 Proses STB-12 Penyelenggaraan Aparatur yang Tangkas dan Profesional

Proses STB-13 Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.

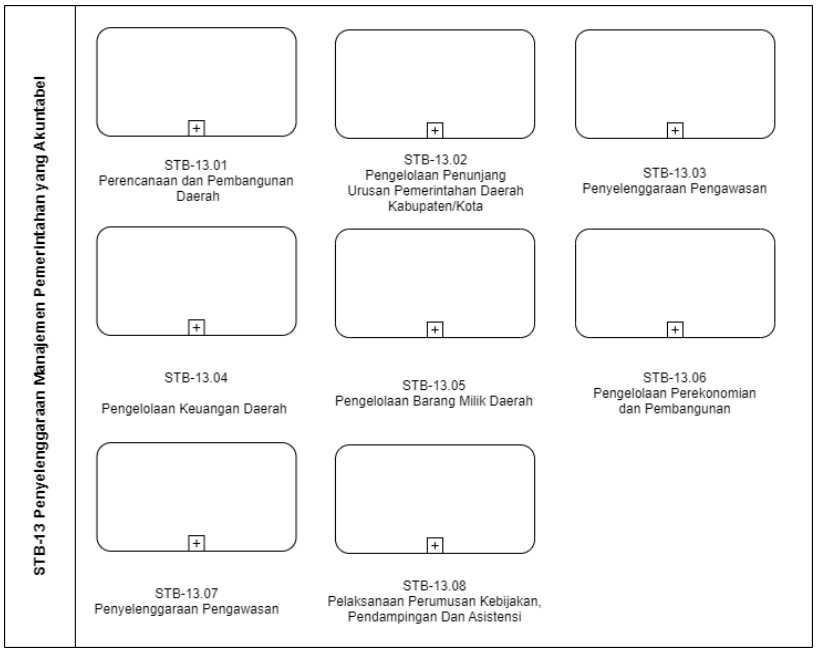

Gambar 20 Proses STB-13 Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.

Proses STB-14 Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan PAD

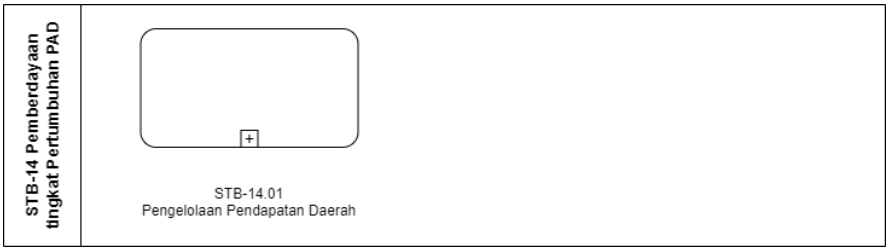

Gambar 21 Proses STB-14 Pemberdayaan tingkat Pertumbuhan PAD

Proses STB-15 Penyelenggaraan Inovasi Layanan yang Berbasis Digital

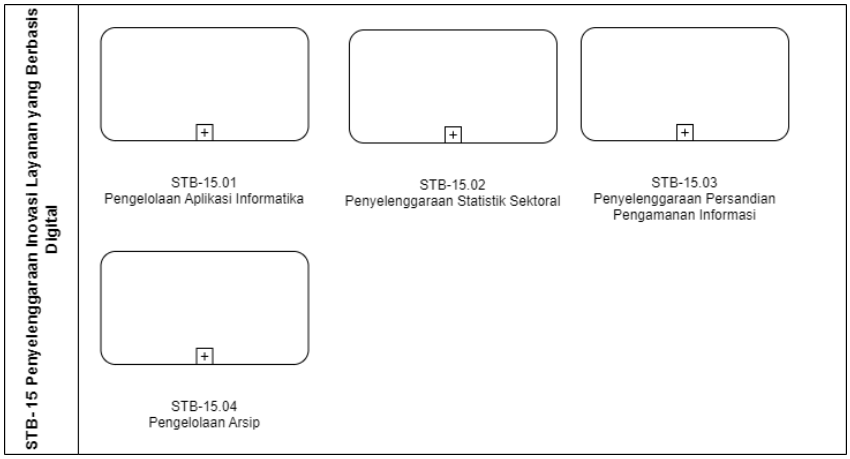

Gambar 22 Proses STB-15 Penyelenggaraan Inovasi Layanan yang Berbasis Digital

Proses STB-16 Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

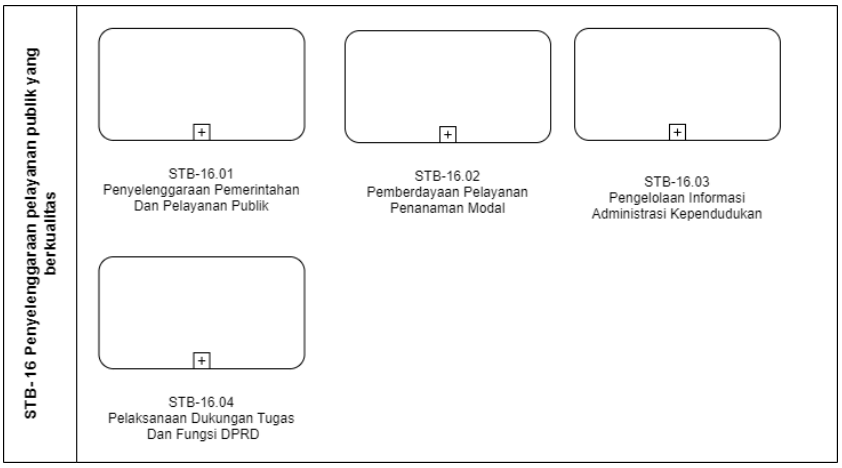

Gambar 23 Proses STB-16 Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 3

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI DAN LAYANAN SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 3

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI DAN LAYANAN SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Data dan Informasi 1
1.2 Pengertian Layanan SPBE 2
1.3 Hasil Penilaian SPBE 2
1.4 Ruang Lingkup 4
BAB 2 METODOLOGI 5
2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi 5
2.1.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi 5
2.1.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi 5
2.1.3 Identifikasi Gap Data dan Informasi 5
2.1.4 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap OPD 5
2.1.5 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi 6
2.1.6 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 6
2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE 6
2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE 6
2.2.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE 6
2.2.3 Identifikasi Gap Layanan SPBE 6
2.2.4 Identifikasi Usulan Layanan SPBE 7
BAB 3 ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI 8
3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi 8
3.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi 11
3.3 Identifikasi Gap Data dan Informasi 12
3.4 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap OPD 14
3.4.1 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama 14
3.4.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat 16
3.4.3 Bagian Hukum 17
3.4.4 Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 18
3.4.5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 19
3.4.6 Bagian Umum 20
3.4.7 Bagian Organisasi 22
3.4.8 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 23
3.4.9 Bagian Perencanaan dan Keuangan 24
3.4.10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 27
3.4.11 Inspektorat 28
3.4.12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 30

3.4.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31
3.4.14 Badan Keuangan dan Aset Daerah 32
3.4.15 Badan Pendapatan Daerah 35
3.4.16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38
3.4.17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 40
3.4.18 Dinas Kesehatan 42
3.4.19 Dinas Ketenagakerjaan 43
3.4.20 Dinas Komunikasi dan Informatika 47
3.4.21 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 51
3.4.22 Dinas Lingkungan Hidup 53
3.4.23 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 55
3.4.24 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman 57
3.4.25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 60
3.4.26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 61
3.4.27 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 63
3.4.28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 65
3.4.29 Dinas Perhubungan 69
3.4.30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 70
3.4.31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 71
3.4.32 Dinas Peternakan dan Perikanan 72
3.4.33 Dinas Sosial 74
3.4.34 Satuan Polisi Pamong Praja 75
3.4.35 RSUD dr. Abdoer Rahem 77
3.4.36 Kecamatan Situbondo 78
3.4.37 Kecamatan Bungatan 80
3.4.38 Puskesmas Situbondo 81
3.4.39 Puskesmas Bungatan 82
3.4.40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 83
3.5 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi 84
3.5.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan 85
3.5.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian 86
3.5.3 Usulan Integrasi Data Keuangan 87
3.5.4 Usulan Integrasi Data Spasial 88
3.6 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 90
BAB 4 ARSITEKTUR LAYANAN SPBE 94
4.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE 94
4.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE 97
4.3 Identifikasi Gap Layanan SPBE 98
4.4 Identifikasi Usulan Layanan SPBE 100
4.4.1 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE 101
4.4.2 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD 101

4.4.3 Usulan Layanan Terhadap Usulan Aplikasi 104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional 8
Tabel 3.2 Metadata Arsitektur Data dan Informasi 11
Tabel 3.3 Gap Arsitektur Data dan Informasi 12
Tabel 3.4 Metadata Data Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama 14
Tabel 3.5 Metadata Data Bagian Kesejahteraan Rakyat 16
Tabel 3.6 Metadata Data Bagian Hukum 17
Tabel 3.7 Metadata Data Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 18
Tabel 3.8 Metadata Data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 19
Tabel 3.9 Metadata Data Bagian Umum 20
Tabel 3.10 Metadata Data Bagian Organisasi 22
Tabel 3.11 Metadata Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 23
Tabel 3.12 Metadata Data Bagian Perencanaan dan Keuangan 24
Tabel 3.13 Metadata Data Sekretariat DPRD 27
Tabel 3.14 Metadata Data Inspektorat 28
Tabel 3.15 Metadata Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 30
Tabel 3.16 Metadata Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31
Tabel 3.17 Metadata Data Badan Keuangan dan Aset Daerah 32
Tabel 3.18 Metadata Data Badan Pendapatan Daerah 35
Tabel 3.19 Metadata Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38
Tabel 3.20 Metadata Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 40
Tabel 3.21 Metadata Data Dinas Kesehatan 42
Tabel 3.22 Metadata Data Dinas Ketenagakerjaan 43
Tabel 3.23 Metadata Data Dinas Komunikasi dan Informatika 47
Tabel 3.24 Metadata Data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 51
Tabel 3.25 Metadata Data Dinas Lingkungan Hidup 54
Tabel 3.26 Metadata Data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 55
Tabel 3.27 Metadata Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman 57
Tabel 3.28 Metadata Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 60
Tabel 3.29 Metadata Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 61
Tabel 3.30 Metadata Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu .. 63
Tabel 3.31 Metadata Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 65
Tabel 3.32 Metadata Data Dinas Perhubungan 69
Tabel 3.33 Metadata Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 70
Tabel 3.34 Metadata Data Dinas Pertanian dan Pangan 71
Tabel 3.35 Metadata Data Dinas Peternakan dan Perikanan 72
Tabel 3.36 Metadata Data Dinas Sosial 74
Tabel 3.37 Metadata Data Satuan Polisi Pamong Praja 75

Tabel 3.38 Metadata Data RSUD dr. Abdoer Rahem 77
Tabel 3.39 Metadata Data Kecamatan Bungatan 78
Tabel 3.40 Metadata Data Kecamatan Bungatan 80
Tabel 3.41 Metadata Data Puskesmas Situbondo 81
Tabel 3.42 Metadata Data Puskesmas Bungatan 82
Tabel 3.43 Metadata Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah 83
Tabel 3.44 Usulan Integrasi Data Kependudukan 85
Tabel 3.45 Usulan Integrasi Data Kepegawaian 86
Tabel 3.46 Usulan Integrasi Data Keuangan 87
Tabel 3.47 Usulan Integrasi Data Spasial 89
Tabel 3.48 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 90
Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Layanan 94
Tabel 4.2 Metadata Arsitektur Layanan SPBE 97
Tabel 4.3 Analisis GAP Layanan SPBE 98
Tabel 4.4 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD 102
Tabel 4.5 Usulan Layanan Terhadap Usulan Aplikasi 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi 8
Gambar 4.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE 94

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 akan menjabarkan penjelasan-penjelasan umum yang akan dibahas pada buku ini. Pertama akan dibahas terkait pengertian dari data dan informasi serta layanan. Pengertian tersebut diambil dari beberapa sumber peraturan yang menjadi landasan penyusunan buku ini. Selanjutnya akan dibahas terkait hasil penilaian SPBE dari domain layanan SPBE dan ditutup dengan penjabaran ruang lingkup pembahsana buku ini.

1.1 Pengertian Data dan Informasi

Pengertian data dan informasi dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sebagai semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antara instansi pusat dan/atau Pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Penggunaan data dan informasi di Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang menjelaskan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

Penjelasan Satu Data juga dimuat pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo**. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Dengan adanya Satu Data Indonesia, harapannya data dapat dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat. Tujuan Satu data Indonesia tersebut dapat dicapai melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia pada Kabupaten Situbondo, saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo telah membentuk Forum Satu Data Indonesia. Hal tersebut dimuat dalam **Surat Keputusan Bupati Situbondo No.179 Tentang Penyelenggaran, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo yang mengatur terkait Forum Satu Data**

Kabupaten Situbondo. SK tersebut memuat susunan anggota Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data.

1.2 Pengertian Layanan SPBE

Menurut peraturan pemerintah yang ada, terdapat dua pengertian dari layanan SPBE. Pertama menurut Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengartikan layanan SPBE sebagai luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Selain itu disebutkan pula bahwa layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.Layanan SPBE dibagi menjadi 2 jenis, yaitu layanan administrasi dan layanan publik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

1.3 Hasil Penilaian SPBE

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB, hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan nilai **indeks 2,43 dengan predikat Cukup.** Penilaian **domain data dan informasi** diambil dari indikator **kebijakan internal manajemen data** yang mendapat **tingkat kematangan 3 (predikat baik)**. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki kebijakan terkait Satu Data Indonesia.

Domain Layanan SPBE (**nilai 3,00**) yang mencakup aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (**nilai 3,00**) dan aspek layanan publik berbasis elektronik (**nilai 3,00**). Keunggulan dan kelemahan penerapan layanan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kab. Situbondo sudah baik dengan dipenuhinya penerapan 10 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik.

- Kekuatan

  Sesuai dengan bukti dukung pada penerapan Layanan Ad.Pem. Berbasis Elektronik terdapat beberapa pemenuhan Indikator yang dapat menjadi kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo karena menggunakan aplikasi dari Pemerintah Pusat yang telah terintegrasi antara lain, Layanan Perencanaan Penganggaran dan Keuangan dengan adanya aplikasi SIPD dari Kemendagri dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya aplikasi SPSE dari LKPP. Selain itu, Kabupaten Situbondo juga memiliki aplikasi Layanan Kearsipan Dinamis yang telah terintegrasi.

- Kelemahan

  Namun dari sisi lain masih banyak penerapan Layanan Ad.Pem. Berbasis elektronik yang masih menjadikelemahan dikarenakan data dukung yang dilampirkan di setiap indikator tidak dapat menunjukkanadanya layanan transkasi ataupun kolaborasi. Adapun Layanan tersebut antara lain: Layanan Kepegawaian, Layanan Pengelolaan BMD, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

2) Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan kriteria berdasarkan tingkat kematangan masing-masing adalah: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

  Sesuai dengan bukti dukung pada penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik terdapat layananpengaduan pelayanan publik menjadi kekuatan Pemerintah Kab. Situbondo dengan penggunaan SP4N -Lapor yang telah terintegrasi dan aplikasi berbasis *cloud* serta telah ditetapkan sebagai aplikasi umum. Selain itu, Kabupaten Situbondo juga memiliki aplikasi SIPESAT dan e-Berkah yang telah terintegrasi sebagai Layanan Publik Sektor.

- Kelemahan

Namun dari sisi lain masih banyak penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang masih menjadikelemahan dikarenakan data dukung yang dilampirkan di setiap indikator tidak dapat menunjukkanadanya layanan transaksi ataupun kolaborasi. Adapun Layanan tersebut antara lain: Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan Layanan Publik Sektor 3: PPID.

Domain Layanan yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan Aplikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahpusat yaitu Layanan Kearsipan Dinamis yaitu SRIKANDI yang dapat berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pada Domain Layanan pada prinsipnya aplikasi yang digunakan telah banyak diterapkan namun pemenuhan bukti dukung yang dilampirkan hanya menyampaikan halaman login saja ataupun tidak melampirkan fungsi-fungsi yang seharusnya ada dan dapat dijadikan bukti dukung untukmeningkatkan level kematangan. Hal ini menjadikan aplikasi tidak dapat dinilai tingkat kematangannya.

1.4 Ruang Lingkup

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat enam domain, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE seperti halnya yang tertulis di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Dua domain diantaranya akan di bahas pada buku ini meliputi Domain Data dan Informasi, serta Domain Layanan SPBE. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan pada setiap domain arsitektur.

A. **Arsitektur Data dan Informasi** membahas,
   - Referensi data dan informasi yang digunakan untuk menyusun arsitektur data dan informasi.
   - Identifikasi metadata data dan informasi.
   - Identifikasi *gap* data dan informasi.
   - Identifikasi daftar data tiap OPD.
   - Identifikasi usulan integrasi data yang terdiri dari data kependudukan, kepegawaian, keuangan, dan data spasial.
   - Usulan tata kelola data dan informasi.

B. **Arsitektur Layanan SPBE** membahas,
   - Referensi layanan SPBE yang digunakan untuk menyusun arsitektur layanan SPBE.
   - Identifikasi metadata layanan SPBE.
   - Identifikasi *gap* layanan SPBE.
   - Identifikasi usulan layanan.

BAB 2
METODOLOGI

Pada bab 2 akan dijabarkan metodologi penyusunan buku ini. Metodologi penyusunan buku dibagi berdasarkan domain arsitektur SPBE yang akan dibahas pada buku ini yaitu, data dan informasi serta layanan SPBE.

2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi

Penyusunan arsitektur data dan informasi terdapat 6 tahapan yaitu identifikasi referensi arsitektur data dan informasi, identifikasi metadata data dan informasi, identifikasi gap data dan informasi, identifikasi data dan informasi tiap OPD, identifikasi usulan integrasi data dan informasi, serta usulan tata kelola data dan informasi.

2.1.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.1.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Identifikasi metadata data dan informasi akan dilakukan mengacu kepada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

2.1.3 Identifikasi Gap Data dan Informasi

Identifikasi gap data dan informasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan data dan informasi yang ada pada suatu pemerintahan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara, membandingkan kondisi data dan informasi yang ada sekarang, dengan parameter dan referensi nasional serta kondisi ideal yang diharapkan.

2.1.4 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap OPD

Identifikasi data dan informasi tiap OPD merupakan proses identifikasi data yang ada pada setiap OPD kemudian data tersebut dipetakan sesuai taksonomi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data yang dikelola pada setiap OPD, bentuk

data tersebut, tempat penyimpanan data tersebut, aplikasi *database* dan jenis akses data yang digunakan pada setiap masing-masing OPD.

2.1.5 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi

Identifikasi integrasi data dan informasi merupakan pembahasan terkait usulan untuk mengintegrasikan atau menghubungkan sekelompok data-data penting yang dikelola Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sekelompok data-data yang dimaksud berupa data mengenai kependudukan, data mengenai kepegawaian, data mengenai keuangan dan data untuk sistem informasi geografis.

2.1.6 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Usulan tata kelola data dan informasi merupakan pembahasan kegiatan-kegiatan untuk menunjang program Satu Data Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait kegiatan, jenis kegiatan dan OPD yang terkait kegiatan tersebut.

2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE

Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE terdapat 4 tahapan yaitu identifikasi referensi arsitektur layanan SPBE, identifikasi metadata layanan SPBE, identifikasi layanan SPBE eksisting, identifikasi gap layanan SPBE eksisting dan identifikasi usulan layanan SPBE.

2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi.

2.2.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Identifikasi metadata layanan SPBE akan dilakukan mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE,.

2.2.3 Identifikasi Gap Layanan SPBE

Identifikasi gap layanan merupakan suatu proses membandingkan data layanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini dengan parameter dan referensi nasional. Dari hasil identifikasi tersebut maka dapat diketahui kesenjangan atau gap apa saja yang kurang pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

2.2.4 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Identifikasi usulan layanan SPBE bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan proses layanan pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan layanan SPBE yang diperoleh dari analisis layanan eksisting dan program pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026. Sehingga dapat diketahui usulan layanan apa saja yang sesuai untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB 3
ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

Bab 3 akan menjelaskan usulan perbaikan dari data dan informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahap awal akan dijelaskan referensi arsitektur serta metadata data dan informasi yang akan digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait gap data dan informasi serta identifikasi data dan informasi tipa OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan akan ditutup dengan penjabaran usulan integrasi data dan informasi.

3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi sebagaimana pada Gambar 3.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data tingkat nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada Tabel 3.1.

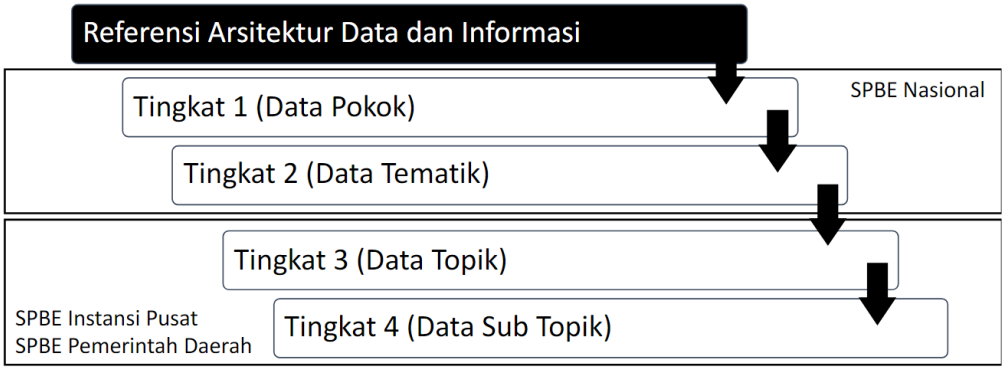

Gambar 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tunggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretarian Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
	Lainnya	tercakup dalam definisi lainnya.

Tabel 3.1 menjabarkan terkait RAD SPBE Nasional di tingkat 1 (satu) yang terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok yaitu informasi pertahanan dan luar negeri hingga data pendukung umum. Sedangkan untuk data tematik di tingkat 2 (dua) terdiri dari 49(empat puluh sembilan) data. Data tersebut merupakan data yang memiliki kode RAD 01.01 hingga RAD 10.04.

3.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Berdasarkan **Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, atribut metadata data dan informasi terdiri dari ID, nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, sifat data, jenis data, validitas data, penghasil data/produsen data, penanggung jawab data/wali data, informasi yang terkait (*output*), informasi yang terkait (*input*), interoperabilitas, serta id metadata terkait. Rincian mengenai metadata arsitektur data dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sedagkan pemetaan metadata arsitektur data dan informasi terhadap data eksisting milik Pemerintah Kabuoaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data dan Informasi.**

Tabel 3.2 Metadata Arsitektur Data dan Informasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang diplih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil	Merupakan penghasil data

No.	Nama Atribut	Keterangan
	Data/Produsen Data	
10	Penanggung Jawab Data/WaIi Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi yang terkait (*output*)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi yang terkait (*input*)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

3.3 Identifikasi Gap Data dan Informasi

Analisis gap dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini dari data dan informasi di Kabupaten Situbondo dengan kondisi idealnyai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Gap Arsitektur Data dan Informasi

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Bentuk data yang dimiliki	Sebanyak 184 data (51%) berbentuk *online*, 163 data (45%) berbentuk *offline* dan ada 13 data (4%) yang berbentuk *online* dan *offline*.	Data berbentuk *online* untuk mendukung Satu Data Indonesia	Terdapat 163 data yang berbentuk *offline*.
Tempat Penyimpanan data	• Komputer OPD:163 • *Server* Diskominfo:56 • *Server* Pusat:48 • *Server* OPD di ruang *server* OPD:41 • *Server* OPD di Diskominfo:24 • Komputer OPD	Penyimpanan data dan informasi dilakukan terpusat pada *server* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga penyimpanan data dan informasi terpusat pada satu *data center* untuk memudahkan data terkontrol dan	Terdapat 163 data yang berbentuk *offline* atau hanya tersimpan di komputer OPD. Untuk penggunaan ruang *server* atau *data center* di lingkup Pemerintah

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	dan *Server* Pusat:8 • Komputer OPD dan *Server* Diskominfo:5 • *Server* Pusat dan *Server* Diskominfo:3 • Cloud:3 • *Server* Pusat dan *Server* OPD di ruang *server* OPD:3 • *Server* Pemprov:3 • Jaringan Lokal:2 • *Server* Pusat dan *Server* OPD di Diskominfo:1	menjaga keamanan data.	Daerah masih belum terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika semua.
Aplikasi *Database*	• Microsoft Office:163 • MySQL *Server*:159 • Microsoft SQL *Server*:17 • Microsoft Office dan MySQL *Server*:13 • Pdf: 3 • Google Drive:3 • Oracle: 2 • MySQL: 2 • Oracle dan MySQL	Pengelolaan data dan informasi menggunakan aplikasi *database* yang digunakan dapat mendukung penggunaan Sistem Penghubung Layanan dan untuk mempermudah pengolahan data.	Terdapat 163 data yang belum menggunkan aplikasi *database online*.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Server:1		
Jenis akses data	Sebagian besar data pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu 208 data (58%) berakses hanya untuk OPD pemilik data atau internal OPD. Sisanya sebanyak 81 data (22%) berakses publik dan 71 data (20%) berakses bagi pakai antar OPD yang bersangkutan.	Jenis akses data dapat digunakan sesuai kebutuhan, namun apabila data milik OPD tertentu dibutuhkan oleh OPD lain atau publik maka seharusnya dapat diakses atau berbagi data dengan pihak lain.	Sebagian besar data hanya dapat diakses oleh OPD pemilik data sendiri (208 data).
Integrasi Data	Terdapat total 34 data yang telah terintegrasi. Data tersebut diampu oleh 13 OPD pada 23 aplikasi.	Setiap OPD memiliki data yang telah terintegrasi dengan instansi lain yang terkait.	Terdapat 27 OPD yang belum melakukan integrasi data.

3.4 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap OPD

Bagian ini akan menjabarkan terkait data-data yang dimiliki tiap OPD. Data akan dijelaskan dari segi uraian data dan referensi arsitektur data. Saat ini Pemrintah Kabupaten Situbondo memiliki total 361 data yang tersebar pada 40 OPD.

3.4.1 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Berdasarkan urusannya, **Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, terdapat **total 5 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama dapat dilihat pada Tabel 3.4**.**

Tabel 3.4 Metadata Data Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Hasil Penyelenggaraa	Laporan penyelenggaraaa	Mengukur kinerja dari	RAD 09.05 Data	RAD.09.05.07 pengelolaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
n Pemerintah Daerah	n pemerintah darah yang terdapat inikator kinerja kunci , urusan wajib dan urusan pilihan	penyelenggaraa n daerah di kab. Situbondo	perencanaan pembanguna n nasional	program kerja organisasi
Data Standar Pelayanan Minimal	Data pelaksanaan pelayanan minimal di 6 minimal urusan di pelayanan dasar (urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, keamanan dan ketertiban umum dan sosial)	Mengetahui capaian kinerja 6 urusan	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data kerjasama Kabupaten	Fasilitasi opd atau pihak ketiga untuk melakukan kerja sama (dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerja sama)	Pembuatan dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerja sama dari pemerintah daerah ataupun pihak ketiga yang mengusulkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	RAD 09.01 Data dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintaha n daerah
Data kecamatan	Data dari kecamatan seperti data kinerja kecamatan, kode dan data wilayah	Sebagai bahan penilaian penyelenggaraa n kecamatan	RAD 10.03 Data Kewilayahan	
Data rupa bumi	Nama-nama rupa bumi (ex. Nama sekolah, gunung, dll) secara legal kepada kemendagri melalui badan informasi geospasial	Untuk satu data indonesia	RAD 10.03 Data Kewilayahan	

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama memiliki 4 yang berbentuk *online,* serta 1 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat dan *cloud*. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* pusat adalah MySQL Server, sedangkan untuk *cloud* yang digunakan adalah Google Drive. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 1 data memiliki akses hanya OPD, 3 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 1 data berakses publik.

3.4.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan urusannya, **Bagian Kesejahteraan Rakyat** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdapat **total 4 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5 Metadata Data Bagian Kesejahteraan Rakyat

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data tempat peribadatan	Berisi data tempat peribadatan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan tempat peribadatan	RAD 08.01 Data agama	RAD.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan
Data tempat pendidikan keagamaan	Berisi data tempat pendidikan keagamaan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan tempat pendidikan keagamaan	RAD 08.01 Data agama	RAD.08.01.02 pendidikan agama
Data kafilah mtq	Berisikan data kaflah mtq di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan kafilah mtq	RAD 08.01 Data agama	RAD.08.01.02 pendidikan agama
Data jamaah haji	Berisikan data jamaah haji di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jmaah haji	RAD 08.01 Data agama	RAD.08.01.04 penyelenggaraan haji dan umroh

Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki 1 yang berbentuk *online,* serta 3 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* milik pemerintah provinsi. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* Pemprov adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline*

dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 3 data memiliki akses hanya OPD seta 1 data berakses publik.

3.4.3 Bagian Hukum

Berdasarkan urusannya, **Bagian Hukum** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Hukum, terdapat **total 5 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Hukum dapat dilihat pada **Tabel 3.6.**

Tabel 3.6 Metadata Data Bagian Hukum

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Dokumen Keputusan Sekda	Dokumen keputusan bupati dan keputusan sekda yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh bupati/sekda	Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan OPD	RAD 10.01 Data Kebijakan Pemerintah	
Data Peraturan Daerah	Dokumen peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh bupati	Sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah	RAD 05.01 Data hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan
Data Peraturan Bupati	Dokumen peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh bupati	Sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah	RAD 05.01 Data hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan
Data Laporan Aksi HAM	Dokumen kegiatan rencana aksi HAM yang dilakukan oleh OPD terkait	Mengetahui capaian rencana aksi HAM	RAD 05.03 Data hak asasi manusia	RAD.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia
Data Penyelesaian Kasus	Dokumen putusan pengadilan terkait pelaksanaan penyelesaian kasus yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten situbondo	Mengetahui jumlah kasus yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang sudah ditangani	RAD 05.01 Data hukum	RAD.05.01.04 penyelenggaraan peradilan

Bagian Hukum memiliki 3 data yang berbentuk *online,* serta 2 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* OPD yang terletak di Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer

milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* OPD di Diskominfo adalah Microsoft SQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 1 data memiliki akses bagi pakai dengan OPD dan 4 data berakses publik.

3.4.4 Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan urusannya, **Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdapat **total 5 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada **Tabel 3.7.**

Tabel 3.7 Metadata Data Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Target dan Realisasi Anggaran	Berisikan data target dan realisasi anggaran	Bertujuan untuk mengetahui target dan realisasi anggaran daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 penganggaran
Data Kegiatan APBD (Data Pelaporan)	Berisikan Laporan terkait kegiatan APBD yang digunakan dalam menentukan besar pendapatan dan pengeluaran	Bertujuan untuk mengetahui Laporan terkait besarnya Pendapatan dan pengeluaran belanja di lingkungan pemerintah daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 penganggaran
Data BUMD	Berisikan data tim pembina bumd di kabupaten, data laporan keuangan, data penliaian kinerja, dan data BUMD	Bertujuan unruk pelaporan keuangan dan kinerja BUMD (PT Situbondo Migas, Perumda Giri Tirta, Perumda BPR Bank Situbondo)	RAD 02.07 Data badan usaha milik negara	RAD.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik negara
Data BLUD	Berisikan data tim kegiatan BLUD di kabupaten, dan data UPT yang telah menerapkan BLUD	Bertujuan unruk pelaporan keuangan dan kinerja BLUD	RAD 02.07 Data badan usaha milik negara	RAD.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik negara

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pemantauan Kebijakan SDA	Berisikan data tim kegiatan pemantauan kebijakan SDA, data koordinasi, dan data monitoring evaluasi kebijakan SDA	Bertujuan untuk mengelola data pemantauan kebijakan SDA	RAD 10.01 Data Kebijakan Pemerintah	

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam memiliki 5 data berbentuk *offline*. Data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses bagi pakai dengan OPD.

3.4.5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan urusannya, **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat **total 5 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3.8 Metadata Data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pelaku Pengadaan	Berisikan data pelaku pengadaan barang dan jasa	Untuk pengelolaan pelaku pengadaan barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Penyedia	Berisikan data penyedia pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk pengelolaan kontrak penyedia barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Produk	Berisikan data produk pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk pendataan produk barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data perencanaan pengadaan	Berisikan data perencanaan pengadaan	Bertujuan untuk merencanakan pengadaan barang	RAD 09.02 Data	RAD.09.02.08 pengadaan dan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	barang dan jasa	dan jasa	keuangan	manajemen aset
Data transaksi	Berisikan data transaksi pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk pendataan transaksi pengadaan barang dan jasa	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 5 data yang berbentuk *online*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* pusat adalah MySQL Server. Sebanyak 3 data memiliki akses hanya OPD dan 2 data berakses publik.

3.4.6 Bagian Umum

Berdasarkan urusannya, **Bagian Umum** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Umum, terdapat **total 9 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Umum dapat dilihat pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3.9 Metadata Data Bagian Umum

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data hibah	Merupakan data hibah yang disalurkan oleh Pemda	Bertujuan untuk pendataan penyaluran hibah	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial
Data PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Data PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Untuk absensi pegawai dan tunjuangan pegawai	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara
Data Pemeliharaan Aset Sekda	Pengelolaan data terkait asetsekda seperti kendaraan, komputer, laptop, printer, gedug kantor dan rumah dinas	Memperlancar tugas kedinasan	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Laporan Pembelian	Data terkait surat pertanggungjawaban SPJ (struk	Pembuatan urat pertanggungjawaban SPJ	RAD 09.02 Data	RAD.09.02.06 perbenda

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
BBM	pembelian BBM)		keuangan	haraan
Data Aset Bagian Umum	Data aset yang dimiliki oleh bagian umum	Pencatatan data aset pada bagian umum	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Honor	Data SK Honor untuk pegawai non ASN	Pembuatan SK Honor untuk pegawai non ASN	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.06 perbenda haraan
Data Perpanjangan Pajak	Data perpanjangan STNK dan KIR	Digunakan untuk pembayaran kendaraan yang ada di sekretariat daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Pegadaan Aset Bagian Umum	Data pengadaan ATK, cetakan, peralatan dan mesin, peralatan rumah tangga bupati dan wakil bupati, pengadaan sarana dan prasarana	Pencatatan pengadaan aset bagian umum	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Rehabilitas /Pembangunan Rumah dinas dan Kantor	Pengelolaan data Rehabilitas/Pembangunan Rumah dinas dan Kantor	Pencatatan data Rehabilitas/Pemban gunan Rumah dinas dan Kantor	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan

Bagian Umum memiliki 2 data yang berbentuk *online,* serta 7 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 1 data disimpan pada *server* Diskominfo dan 1 data pada *server* OPD yang bertempat di Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 8 data memiliki akses hanya OPD dan 1 data berakses bagi pakai dengan OPD.

3.4.7 Bagian Organisasi

Berdasarkan urusannya, **Bagian Organisasi** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Organisasi, terdapat **total 6 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Organisasi dapat dilihat pada **Tabel 3.10.**

Tabel 3.10 Metadata Data Bagian Organisasi

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data ketatalaksanaan	Merupakan data terkait tata laksanan organisasi pemerintahan	Bertujuan untuk pengelolaan ketatalaksanaan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan
Data Pelayanan Publik	Berisi data pelayanan publik yang ada di Pemda	Bertujuan untuk pengelolaan data pelayanan publik yang ada di Pemda	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Berisi mengenai detail hasil keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan	Bertujuan untuk untuk memperbaiki kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja
Data Analisis Jabatan	Berisi data tugas dan tanggung jawab atas sutau jabatan tertentu.	Bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan, tugas, dan tanggung jawab untuk posisi tertentu.	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data Struktur dan Pemangku Jabatan	Merupakan data struktur dan pemangku jabatan yang ada di pemda	Bertujuan untuk dokumentasi struktur dan pemangku jabatan di setiap periode	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data Jenis Pelayanan	Berisi data jenis pelayanan yang ada di pemda	Bertujuan untuk pengelolaan data jenis pelayanan yang ada di pemda	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik

Bagian Organisasi memiliki 6 data yang berbentuk *online*. Untuk data yang berbentuk *online*, 2 data disimpan pada *server* pusat, 1 data pada *server* Diskominfo dan 4 data tersimpan di *server* OPD di Diskominfo. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Sebanyak 4 data memiliki akses bagi pakai dengan OPD dan 2 data berakses publik.

3.4.8 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Berdasarkan urusannya, **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdapat **total 8 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat dilihat pada **Tabel 3.11.**

Tabel 3.11 Metadata Data Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Keprotokolan	Berisikan data terkait perencanaan program dan kegiatan keprotokolan	Bertujuan untuk mengetahui data terkait keprotokolan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi
Data Agenda Pimpinan	Berisikan data agenda pimpinan, yang memuat kegiatan, jadwal, dan lain-lain	Bertujuan untuk mengetahui agenda pimpinan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi
Data survey	Berisikan data pra survey terkait agenda pimpinan	Bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan agenda pimpinan	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data Berita Agenda	Berisikan data berita agenda untuk acara pimpinan	Bertujuan untuk menjadi berita acara untuk agenda pimpinan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi
Data Asosiasi Pers	Berisikan daftar identitas pers	Bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan pers	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik
Data Hubungan Masyarakat	Berisikan data dokumentasi dan data terkait hubungan masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui data terkait kemasyarakatan	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Dokumentasi	Berisikan data dokumentasi agenda pimpinan berupa foto dan video	Bertujuan untuk pendokumentasian agenda pimpinan	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik
Data Media Visual	Berisikan data bahan publikasi media	Bertujuan untuk publikasi media	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki 8 data yang berbentuk *offline*. Data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 7 data memiliki akses hanya OPD dan 1 data berakses publik.

3.4.9 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan urusannya, **Bagian Perencanaan dan Keuangan** menangani urusan **Sekretariat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdapat **total 15 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada **Tabel 3.12.**

Tabel 3.12 Metadata Data Bagian Perencanaan dan Keuangan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Renstra	Berisi dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian.	Bertujuan untuk pelaporan dan perencanaan kebijakan selama lima tahuanan PEMDA guna memperoleh pendanaan dari Kementerian.	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional
Data Renja	Berisi dokumen rancangan awal perencanaan OPD	Bertujuan untuk dokumentasi dan perencanaan	RAD 09.05 Data perencanaa	RAD.09.05.01 perenca

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.	program dan kegiatan OPD dalam satu tahun.	n pembangun an nasional	naan pemban gunan nasional
Data RFK (Realiasasi Fisik dan Keuangan) SETDA	Berisi data pertanggung jawaban realisasi anggaran.	Bertujuan untuk menghindari penyelewengan realisasi keuangan	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.07 manaje men perekon omian
Data Laporan Keuangan Semesteran	Berisikan data pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam satu semester	Untuk pelaporan dan pertanggung jawaban atas keuangan	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.07 manaje men perekon omian
Data Keuangan Akhir tahun	Berisikan data pemasukan dan pengeluaran keuangan selama satu tahun	Untuk pelaporan dan pertanggung jawaban atas keuangan	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.07 manaje men perekon omian
Data Mutasi barang	Berisikan data barang milik daerah yang dimutasi	Bertujuan untuk pengelolaan barang milik daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengada an dan manaje men aset
Data Barang Persediaan	Berisikan data persediaan barang milik daerah	Bertujuan untuk pengelolaan barang milik daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengada an dan manaje men aset
Data Barang Inventaris	Berisikan data barang inventaris milik daerah	Bertujuan untuk pengelolaan barang milik daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengada an dan manaje men aset
Data Penyusutan barang	Berisikan nilai penyusutan barang milik	Bertujuan untuk pengelolaan barang milik daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengada

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	daerah			an dan manaje men aset
Data DPA	Berisi data realisasi anggaran dan rencana penggunaan	Bertujuan untuk pelaporan pelaksanaan anggaran pada OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.05 pengang garan
Data LKJIP (Laporan kinerja internal pemerintahan)	Merupakan pertanggungjawa ban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran.	Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabi litas kinerja
Data Rekapitulasi Gaji ASN	Berisi kumpulan gaji ASN di pemda	Bertujuan untuk pengelolaan gaji ASN	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09. 06.02 manaje men aparatur sipil negara
Data Verifikasi SPJ	Berisi bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawa ban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.	Bertujuan untuk verifikasi kebenaran laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran.	RAD 09.05 Data perencanaa n pembangun an nasional	RAD.09. 05.05 kelemba gaan dan pendana an
Data Honorarium Pengelolah	Berisikan honorarium pengelolaan	Bertujuan untuk pengelolaan keuangan	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.07 manaje

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Keuangan	keuangan			men perekon omian
Data Tagihan	Berisikan tagian listrik, air, telepon, internet, tv berlangganan pemda	Bertujuan untuk pengelolaan tagihan milik pemda	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09. 02.07 manaje men perekon omian

Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 6 data yang berbentuk online, serta 9 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 5 data disimpan pada *server* Diskominfo dan 1 data disimpan pada *server* pusat. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi pengelola Pdf dan Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan urusannya, **Sekretariat DPRD** menangani urusan **Sekretariat DPRD.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Sekretariat DPRD, terdapat **total 4 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Sekretariat DPRD dapat dilihat pada **Tabel 3.13.**

Tabel 3.13 Metadata Data Sekretariat DPRD

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pokok Pikiran DPRD	Data berisikan dengan data anggaran data yang di distribusikan kepada masyarakat, data yang disiapkan oleh pemda (data anggaran yang didistribusikan kepada masyarakat) (nama anggota, anggarannya)	Bertujuan untuk pengelolaan dan penyebaran data pokok pikiran DPRD	RAD 09.07 Data kesekretari atan negara	RAD.09.07.06 pengkajian strategis

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pengawasan Pemerintahan	Data berisikan dengan monitoring kebijakan pemda	masukkan kepada bapeda yang digunakan sebagai saran berapa nominal yang bisa diberikan kepada masyarakat	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.05 pengawasan pemerintahan
Data Peraturan DPRD	data yang berisikan aturan aturan yang diajukan oleh pemerintah daerah ke propemperda (program legislatif daerah)	monitoring kebijakan yang telah dilakukan oleh pemda	RAD 10.01 Data Kebijakan Pemerintah	
Data Hukum	Data keputusan yang dibuat oleh DPRD (peraturan dprd tentang tata tertib, kode etik, tata cara beracara pada badan kehormatan, atau badan lainya)	menentukan arah kebijakan keputusan untuk anggota dewan	RAD 05.01 Data hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan

Sekretariat DPRD memiliki 3 data yang berbentuk online dan 1 data berbentuk *online* dan *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* Diskominfo adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 1 data memiliki akses hanya OPD dan 3 data berakses publik.

3.4.11 Inspektorat

Berdasarkan urusannya, **Inspektorat** menangani urusan **Inspektorat Daerah.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Inspektorat, terdapat **total 7 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Inspektorat dapat dilihat pada **Tabel 3.14.**

Tabel 3.14 Metadata Data Inspektorat

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Tindak Lanjut	Berisikan tindak lanjut hasil pengawasan	Bertujuan untuk pengawasan pelaksanaan tindak lanjut	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara
Data pengaduan	Berisikan data aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang ada di pemda	Bertujuan untuk penanganan aduan masyarakat	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara
Data Temuan dan Rekomendasi	Berisikan hasil temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit	Bertujuan untuk memeberikan masukan atas temuan saat audit	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara
Data keuangan desa	Berisikan laporan keuangan desa di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara
Data Iktisar	Berisikan ringkasan hasil audit	Bertujuan untuk pengelolaan ikhtisar tiap periode	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.06 pengkajian strategis
Data surat keterangan bebas temuan	Berisikan tanda bebas temuan	Bertujuan untuk pembuktian bebas temuan	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara
Data konsultasi	Berisikan hasil konsultasi yang dilakukan OPD	Bertujuan untuk memberikan konsultasi kepada OPD	RAD 09.01 Data dalam negeri	RAD.09.01.03 pembinaan otonomi daerah

Inspektorat memiliki 7 data yang berbentuk online. Untuk data yang berbentuk *online*, 2 data disimpan pada *server* Diskominfo, 3 data pada *server* pusat dan 2 data pada jaringan lokal. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* Diskominfo dan pusat adalah MySQL Server, sedangkan pada jaringan lokal menggunakan MySQL. Sebanyak 5 data memiliki akses hanya OPD dan 2 data berakses bagi pakai dengan OPD.

3.4.12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Berdasarkan urusannya, **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** menangani urusan **Kepegawaian** serta **Pendidikan dan Pelatihan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdapat **total 10 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dapat dilihat pada **Tabel 3.15.**

Tabel 3.15 Metadata Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Kepegawaian	Berisi data diri ASN di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Mengetahui biodata ASN yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data Laporan Kinerja	Berisi capaian kinerja pegawai selama satu periode	Mengetahui capaian kinerja setiap ASN di Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja
Data Mutasi	Berisi data pegawai mutasi masuk dan keluar di Pemerintah Kabupaten Situbondo.	Mengetahui pendataan mutasi jabatan ASN di Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data Pensiun	Berisi terkait data diri PNS yang telah pensiun	Mengetahui dan mengestimasi data ASN yang pensiun	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data SKP	Berisi rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.	Mengetahui Capaian Sasaran Kinerja setiap ASN setiap tahun	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data PNS bermasalah	Berisi data PNS yang melakukan pelanggaran dan diberikan hukuman	Mengetahui informasi pegawai yang bermasalah	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	disiplin.			
Data Kepangkatan	Berisi data kepangkatan PNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Mengetahui data Kepangkatan ASN di Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan
Data Rekomendasi Diklat ASN Kenaikan Pangkat	Berisikan data ASN yang layak megikuti diklat untuk kenaikan pangkat	Mengetahui data ASN yang berhak mengikuti diklat kenaikan pangkat	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data Diklat	Berisikan pelaksanaan diklat dan peserta yang mengikuti diklat	Mengetahui data ASN yang telah mengikuti diklat teknis/profesional	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data calon ASN	Berisikan data diri calon ASN di Pemerintahan Kabupaten Situbondo	Untuk mengelola calon ASN yang akan bekerja di pemda	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia memiliki 10 data yang berbentuk online. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* OPD di ruang *server* OPD dan ada 1 data pada server pusat. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Sebanyak 1 data memiliki akses hanya OPD, 7 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 2 data berakses publik.

3.4.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan urusannya, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** menangani urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat **total 2 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada **Tabel 3.16.**

Tabel 3.16 Metadata Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data organisasi kemasyarakatan	Data seluruh ormas yang	Untuk pendataan ormas yang ada	RAD 10.04 Data Dukung	

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	terdata pada Kabupaten Situbondo		Lainnya	
Data pengajuan ijin penelitian	Merupakan data diri peneliti yang akan melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk mengelola pelaksanaan penelitian di lingkup pemda	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 data yang berbentuk online. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* OPD yang berada di Diskominfo. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.14 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan urusannya, **Badan Keuangan dan Aset Daerah** menangani urusan **Keuangan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat **total 17 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.17.**

Tabel 3.17 Metadata Data Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data RAB barang	Merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Bertujuan sebagai landasan realisasi anggaran dalam periode satu tahun.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Merupakan rincian kebutuhan barang pemda dalam satu	Bertujuan untuk perencanaan pengadaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajem

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	periode			en aset
Data Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Merupakan rincian pemeliharaan BMD	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Standart Satuan Harga Barang	Terdiri dari Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Bertujuan untuk pendataan standar harga yang berlaku di Kabupaten Situbondo.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.03 fiskal
Data Perjanjian Sewa Aset	Berisikan surat perjanjian penyewaan aset yang ada di pemda	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Pinjam Pakai BMD	Berisikan surat perjanjian peminjaman BMD yang ada di pemda	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Penatausahan BMD dan Penghapusan	Berisikan dokumen tata usaha BMD dan BMD yang telah dihapuskan	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data KUA PPAS	Berisi dokumen yang memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.	Bertujuan sebagai landasan penyusunan APBD.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 penganggaran

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Perda APBD	Berisi dokumen Perda yang terkait penyusunan APBD daerah	Bertujuan sebagai landasan penyusunan APBD.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 pengangaran
Data Anggaran	Berisikan dokumen RKA dan DPA tiap OPD	Bertujuan untuk penganggaran daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 pengangaran
Data Penerbitan SP2D	Berisi surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.	Bertujuan untuk mengawasi kinerja dan realisasi atas setiap kegiatan di setiap tingkatan masyarakat.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian
Data Penerbitan SOPD	Berisi surat untuk perangkat daerah yang selaku pengguna anggaran/barang.	Bertujuan untuk pengelolaan anggaran dan barang daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian
Data TPTGR	Berisikan surat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Bertujuan untuk mengajukan untutan melalui TPTGR bagi Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian
Data SPJ Fungsional	Berisi bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.	Merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Daftar Gaji	Berisi daftar gaji pegawai di pemda	Bertujuan untuk pengelolaan gaji pegawai	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian
Data LKPD	Merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara.	Tujuannya adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian
Data Penyusutan BMD	Berisi detail dan nilai BMD yang mengalami penyusutan nilai	Bertujuan untuk pengelolaan BMD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 12 data yang berbentuk online, serta 5 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 7 data disimpan pada *server* pusat dan 8 data pada server Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 10 data memiliki akses hanya OPD dan 7 data berakses bagi pakai dengan OPD.

3.4.15 Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan urusannya, **Badan Pendapatan Daerah** menangani urusan **Keuangan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Badan Pendapatan Daerah, terdapat **total 14 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.18.**

Tabel 3.18 Metadata Data Badan Pendapatan Daerah

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data transaksi pajak	Berisikan data transaksi pembayaran	Bertujuan untuk pengelolaan pajak daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	dan penagihan pajak di Kabupaten Situbondo			
Data Objek Pajak	Merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak di Kaupaten Situbondo	Bertujuan untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Subjek pajak	Berisi data perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak di Kabupaten Situbondo.	Bertujuan untuk pencatatan subjek pajak yang ada di Kabupaten Situbondo.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data wajib pajak	Berisi data perseorangan atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang ada di Kabupaten Situbondo.	Bertujuan untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data BPHTB	Merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.	Tujuan dilaksanakan pendataan BPHTB adalah untuk mendapatkan data jumlah pendapatan BPHTB.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Pajak Daerah Lainnya	Berisi data pungutan pajak selain pajak BPHTB dan PBB	Bertujuan untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pajak Katering Online	Berisi pungutan pajak untuk katering di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data PBB	Berisi pungutan pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.	Tujuan dilaksanakan Pendataan PBB P2 adalah mendapatkan informasi terkait adanya perubahan data baik Obyek maupun Subyek Pajak PBB P2.	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Agenda Sosialisasi / Penyuluhan	Berisi hasil sosialisasi dan materi sosialisasi terkait pajak	Bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait pajak kepada masyarakat	RAD 09.01 Data dalam negeri	RAD.09.01.05 pembinaan keuangan daerah
Data Permohonan Keberatan Wajib Pajak	Berisi surat permohonan keberatan dari wajib pajak	Bertujuan untuk penanganan keberatan wajib pajak	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Realisasi pajak daerah dan retribrusi daerah	Berisi laporan realisasi dan piutang pajak daerah dan retibrusi daerah	Bertujuan untuk pengelolaan realisasi dan piutang pajak	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Berisi Data Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Bertujuan untuk monev terhadap pajak daerah	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Pajak daerah yang terutang	Berisi tagihan pajak daerah yang masih terutang	Bertujuan untuk pengelolaan pajak terutang	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak
Data Pajak Daerah yang tak tertagih di tahun sebelumnya	Berisi tagihan pajak daerah yang masih belum tertagih di tahun lalu	Bertujuan untuk pengelolaan pajak belum tertagih di tahun lalu	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak

Badan Pendapatan Daerah memiliki 8 data yang berbentuk online, serta 6 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 13 data memiliki akses hanya OPD dan 1 data berakses publik.

3.4.16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan urusannya, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** menangani urusan **Perencanaan** serta **Penelitian dan Pengembangan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat **total 12 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdapat dilihat pada **Tabel 3.19.**

Tabel 3.19 Metadata Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data inovasi	Berisi terkait usulan inovasi terhadap pelayanan publik di pemerintah daerah	Bertujuan untuk pendataan pengembangan pelayanan publik yang ada	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data Perencanaan	Berisi data perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam satu tahun kedepan.	Bertujuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi dana kegiatan.	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional
Data Pertanian	Berisi data perencanaan program, kegiatan terkait pembangunan bidang pertanian.	Bertujuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi dana kegiatan.	RAD 02.03 Data pertanian	RAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian
Data Anti Proverti Kemiskinan	Berisi program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan	Penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.05 penanganan fakir miskin

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	pendekatan pemberdayaan masyarakat.	daya beli, melalui pemberdayaan usaha kelompok masyarakat miskin		
Data Kemiskinan	Berisi sebaran penduduk miskin di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengurangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.05 penanganan fakir miskin
Data Pendidikan	Berisi data perencanaan program, kegiatan terkait pembangunan bidang pendidikan.	Bertujuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi dana kegiatan.	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional
Data Kesehatan	Berisi data perencanaan program, kegiatan terkait pembangunan bidang kesehatan.	Bertujuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi dana kegiatan.	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat
Data Tidak Layak Huni	Berisi sebaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni	RAD 03.04 Data perumahan	RAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
Data Sanitasi	Berisi status sanitasi yang dimiliki warga Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk menciptakan sanitasi yang layak bagi seluruh warga	RAD 03.04 Data perumahan	RAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
Data Tunggal Daerah Analisa Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP)	Merupakan basis data spasial desa agregat yang disusun dengan metode partisipatif	Bertujuan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
Data Kajian	Berupa hasil kajian terkait pembangunan	Bertujuan untuk meningkatkan pembangunan	RAD 09.07 Data kesekretariatan negara	RAD.09.07.06 pengkajian strategis

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	yang telah dilakukan			
Data Kinerja Pembangunan Daerah	Berupa laporan kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Bertujuan untuk meningkatkan pembangunan	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.02 pengawasan penyimpangan pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 10 data yang berbentuk online, serta 2 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 9 data disimpan pada *server* OPD di Diskominfo dan 1 data pada server milik Pemprov. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 1 data memiliki akses hanya OPD, 9 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 2 data berakses publik.

3.4.17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan urusannya, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** menangani urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat **total 6 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada **Tabel 3.20.**

Tabel 3.20 Metadata Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Adminduk	Berisi data diri pemohon administrasi kependudukan	Memberikan layanan pendaftaran adminduk secara online untuk di desa/kelurahan	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
Data profil kependudukan	Berupa Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Memberikan Informasi Perkembangan Kependudukan Kabupaten Situbondo	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
Data Kerjasama	Berupa Pemanfaatan Data dan Hak	Mempermudah Hak Akses Data Kependudukan	RAD 09.01 Data dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	Akses Kependudukan	dan Layanan Kependudukan		
Data Konsolidasi Bersih	Data yang terdapat pada database kependudukan Situbondo yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui system informasi Adminidtrasi Kependudukan (SIAK)	Untuk mengetahui jumlah data bersih kependudukan kab. Situbondo	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
Data Inovasi Adminduk	Berupa hasil inovasi terhadap pelayanan kependudukan	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendudukan	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data Kependudukan	Berisi dokumen adminduk masyarakat Kabupaten Situbondo	Memberika pelayanan adminduk kepada pemohon	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 data yang berbentuk online, serta 3 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 3 data disimpan pada *server* pusat dan 1 data pada server OPD di ruang server OPD. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* pusat adalah MySQL Server, sedangkan pada server OPD menggunakan Oracle. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 3 data memiliki akses hanya OPD dan 2 data berakses bagi pakai dengan OPD.

3.4.18 Dinas Kesehatan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Kesehatan** menangani urusan **Kesehatan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Kesehatan, terdapat **total 9 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Tabel 3.21.**

Tabel 3.21 Metadata Data Dinas Kesehatan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Rekam Medik	Data yang berisikan catatan medis pasien	Bertujuan untuk pengelolaan pasien di puskesmas	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Pasien	Berisikan informasi pribadi, identitas dan status pasien	Bertujuan untuk pengelolaan pasien di puskesmas	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Klaim Pembiayaan	Terkait pembiayaan kesehatan	Menyajikan informasi pembiayaan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Obat-Obatan	Data terkait inventari kefarmasian	Sebagai pendukung pencatatan dan pelaporan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan
Data Top 10 Diagnosa Tertinggi	Data agregat penyakit	Pendukung pencatatan dan pelaporan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat
Data Agregat Ibu Hamil	Data jumlah ibu hamil	Pemetaan dan deteksi dini ibu hamil	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat
Data Klasifikasi Ibu Hamil	Klasifikasi risiko ibu hamil	Pemetaan dan deteksi dini ibu hamil	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat
Data kunjungan pasien	Riwayat kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan	Mendukung pencatatan dan pelaporan sistem informasi kesehatan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data monitoring puskesmas	Berisi laporan monev kegiatan puskesmas	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan puskesmas	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara

Dinas Kesehatan memiliki 9 data yang berbentuk online. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* OPD di ruang server OPD. Aplikasi *database*

yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Sebanyak 1 data memiliki akses hanya OPD dan 8 data berakses bagi pakai dengan OPD.

3.4.19 Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Ketenagakerjaan** menangani urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Ketenagakerjaan, terdapat **total 19 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Ketenagakerjaan dapat dilihat pada **Tabel 3.22.**

Tabel 3.22 Metadata Data Dinas Ketenagakerjaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pencari Kerja	Uraian Data Pencari Kerja : Nama, Alamat, No. Hanphone, Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan kompetensi.	Mengetahui pencari kerja terdaftar	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI	Uraian Data Pencari Kerja : Nama CPMI, Permohonana ID CPMI dan rekom paspor, SIP, SIUP P3MI, Surat Tugas P3MI, KTP, Kartu Keluarga, Ijasah, Akte Lahir, Ijin Keluarga, Keterangan ahli waris, dan surat nikah	Permohonan pembuatan ID PMI dan rekom paspor dari P3MI	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.02 manajemen pekerja migran Indonesia
Data BKK	Uraian Data Pencari Kerja : Nama sekoalah, Surat tanda daftra, surat permohonan, izin operasional pendirian instansi, pas foto penanggungjawab, dan Struktur organisasi Pengelola BKK.	Mengetahui jumlah BKK di Kabupaten Situbondo yang terdaftar dan terkelola.	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional
Data Lowongan Kerja	Uraian Data Pencari Kerja :	Menginformasikan	RAD 06.02 Data	RAD.06.02.01 bidang

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Perusahaan	Jenis usaha, nama perusahaan, contack person, alamat perusahaan, posisi yang dibutuhkan, kualifikasi, dan brosur lowongan kerja.	lowongan kerja kepada publik (pencari kerja)	ketenagakerjaan	ketenagakerjaan
Data Peserta Pelatihan	Uraian Data Pencari Kerja : Nama, Alamat, dan No. Whatsapp.	Mengetahui profil peserta pelatihan dan kebutuhan data Dinas Ketenagakerjaan	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional
Data Nama Perusahaan	Nama perusahaan, nama pimpinan, *contact person*, alamat, bidang usaha, status perusahaan, jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas, *range* usia pekerja, koordinat perusahaan	Untuk menyajikan informasi data perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data PKWT	Daftar perusahaan dan nama karyawan beserta dokumen PKWT	Untuk mencatat perusahaan yang memiliki pekerja dengan PKWT	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Daftar perusahaan dan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Untuk mengetahui jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
		Ketenagakerjaan		
Data serikat bekerja	Daftar serikat pekerja, periode kepengurusan, nama pengurus	Untuk mencatat serikat pekerja yang ada di kabupaten situbondo	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	Daftar perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB, periode Peraturan Perusahaan	Untuk mencatat perusahaan yang memiliki PP dan PKB	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data Pengaduan PHK	Berisi laporan pengaduan PHK perusahaan	Bertujuan untuk menanggulangi aduan PHK	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	Data perusahaan dan data tenaga kerja yang diselesaikan perselisihannya	Untuk mencatat penyelesaian perselisihan hubungan industrial	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data UMK	Data UMK kabupaten Situbondo	Untuk menghitung besaran usulan UMK Kabupaten Situbondo	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data Peserta uji kompetensi	Data KTP, Ijazah Terakhir, Nomor HP, Email, Bidang Pelatihan, Pas Foto 3x4	Untuk meningkatkan produktivitas pelatihan berbasis kompetensi agar lebih berpeluang besar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
		bidang kompetensi yang telah diikuti		
Data BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas)	Uraian Data BLKK : Profil BLKK, NPWP, Akta Tanah, Surat Izin (Dari Desa), KTP Penanggung Jawab, Sertifikat Kompetensi, Foto dan dokumentasi sarana dan prasarana	Untuk menerbitkan izin BLKK agar memiliki legalitas hukum yang jelas	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional
Data Peserta Pemagangan	Data KTP, Ijazah Terakhir, Nomor HP, Email, Pas Foto 3x4, Nama dan alamat perusahaan yang akan ditempati	Untuk Membantu mengurangi angkat penangguran di Situbondo dan membantu menambah pengalaman kerja di Perusahaan	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional
Data penerbitan rekomendasi LPK (Izin)	Profil LPK, NPWP, Akta Tanah, Surat Izin (Dari Desa), KTP Penanggung Jawab, Sertifikat Kompetensi, Foto dan dokumentasi sarana dan prasarana	Untuk menerbitkan izin LPK agar memiliki legalitas hukum yang jelas	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan
Data Peserta transmigrasi	Nama Kepala Keluarga dan anggotanya, NIK, Usia, Pekerjaan, Alamat, Keterampilan, Tujuan, Kontrasepsi	Untuk melengkapi administrasi dan meningkatan kredibilitas instansi guna mempermudah masyarakat meningkatkan	RAD 03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
		kesejahteraan.		
Data warga resettlemen	Nama Kepala Keluarga dan anggotanya, NIK, Usia, Pekerjaan, Alamat,	Untuk menampung trasmigran yag kembali ke kota asal karena dampak konflik, dsb.	RAD 03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi

Dinas Ketenagakerjaan memiliki 7 data yang berbentuk online, serta 12 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 5 data disimpan pada *server* pusat, 1 data pada server Diskominfo dan 1 data pada *cloud*. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server, sedangkan *cloud* yang digunakan adalah Google Drive. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 14 data memiliki akses hanya OPD, 4 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 1 data berakses publik.

3.4.20 Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan urusannya, **Dinas Komunikasi dan Informatika** menangani urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik,** serta **Persandian.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat **total 21 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Tabel 3.23.**

Tabel 3.23 Metadata Data Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Statistik 8 Kelompok Data	8 KELOMPOK DATA SITUBONDO: 1. Data Umum 2. Sosial / Budaya 3. Sumber Daya Alam 4. Infrastruktur 5. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi 6.	Bertujuan untuk publikasi data statistik kelompok data kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	Ekonomi dan Keuangan 7. Politik, Hukum dan Keamanan 8. Insidensial			
Data Pengguna Layanan Tanda Tangan Digital	Bersi data diri pengguna layanan tanda tangan elektronik	Untuk menjaga kesahan tanda tangan elektronik	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Dokumen surat dengan tanda tangan digital	Berisi dokumen yang menggunakan layanan tanda tangan elektronik	Untuk menjaga kesahan tanda tangan elektronik	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Dokumen layanan administrasi kependudukan dengan tanda tangan digital	Berisi dokumen administrasi yang menggunakan tanda tangan elektronik	Untuk menjaga kesahan tanda tangan elektronik	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
Data Informasi Publik	Berisi informasi yang bersifat publik untuk dipublikasikan kepada masyarakat	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik
Data Sub Domain situbondokab.go.id	Berisi penggunaan sub domain situbondokab.go.id	Bertujuan untuk pengelolaan sub domain	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data website dan aplikasi dengan domain situbondokab.go.id	Berisi penggunaan sub domain situbondokab.go.id	Bertujuan untuk pengelolaan sub domain	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data titik lokasi jaringan	Berisi sebaran titik lokasi jaringan	Bertujuan untuk pengelolaan jaringan	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data perangkat	Berisi ketersediaan perangkat milik Diskominfo	Bertujuan untuk pengelolaan perangkat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data traffic jaringan internal	Berisi detail traffic jaringan internal	Bertujuan untuk penjagaan traffic jaringan internal	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data Informasi Pemerintahan	Berisi informasi yang bersifat publik untuk dipublikasikan kepada masyarakat	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data Informasi Kegiatan	Berisi informasi yang bersifat publik untuk dipublikasikan kepada masyarakat	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Berisi informasi yang bersifat publik untuk dipublikasikan kepada masyarakat	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data Sumber Daya TIK	Berisi Data SDM, Data Server, Data Aplikasi, Data Perangkat Jaringan, Data Jadwal dan Data Penugasan.	Bertujuan untuk pengelolaan SDM TIK	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data Pemberitaan kegiatan masyarakat desa dan kelurahan	Berisi informasi yang bersifat publik terkait desa dan kelurahan untuk dipublikasikan kepada masyarakat	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data layanan pada aplikasi	Berisi detail pelayanan publik	Bertujuan untuk	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	pendataan layanan publik		informatika
Data capaian OPD	Berisi pencapaian OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan
Data retribusi menara telekomunikasi	Berisi pembayaran retribusi menara telekomunikasi	Bertujuan untuk mengelola retribusi menara telekomunikasi	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika
Data pemberdayaan masyarakat	Berisi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemda	Bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Situbondo	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik
Data Covid-19 di Kabupaten Situbondo	Berisi kondisi covid-19 di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk penyebaran informasi covid -19	RAD 09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik
Data pengaduan layanan	Berisi pengaduan masyarakat terhadap layanan di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk penanganan pengaduan masyarakat	RAD 09.04 Data komunikasi	RAD.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 19 data yang berbentuk online, serta 2 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 1 data disimpan pada *server* pusat dan 18 data pada server Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 7 data memiliki akses hanya OPD, 5 data berakses bagi pakai dengan OPD serta 7 data berakses publik.

3.4.21 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan** menangani urusan **Koperasi, Perdagangan** dan **Perindustrian.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, terdapat **total 15 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dapat dilihat pada **Tabel 3.24.**

Tabel 3.24 Metadata Data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data bantuan usaha mikro	Data NIK, KK, Alamat, Jenis Usaha, Foto Usaha, No Ijin Usaha dari isian form.	Mengetahui mendapatkan data usaha mikro untuk diajukan sebagai calon penerima bantuan	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAD.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
Data koperasi	Nomor Induk Koperasi, Nama Koperasi, Alamat, NIK Pengusaha, Jenis Usaha, dan Koordinat	Untuk memanajement data koperasi	RAD 02.09 Koperasi	RAD.02.09.04 pengawasan koperasi
Data UKM	NIK, Nama, Alamat, No ijin usaha, jenis usaha dari isian form. No Badan Hukum dari ODS (Online Data Sistem)	Untuk manajement data UKM	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah
Data Harga Kebutuhan Pokok	Harga kebutuhan bahan pokok, Nama Bahan pokok.	Untuk menginformasikan Harga Kebutuhan Pokok saat ini	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.02 pengelolaan perdagangan
Data ODS	Data Koperasi Aktif/Tidak Aktif se-Kabupaten Situbondo, baik yang sudah ber NIK (Nomor Induk Koperasi) ataupun belum memiliki NIK	Untuk mengetahui jumlah koperasi aktif dan tidak aktif	RAD 02.09 Koperasi	RAD.02.09.04 pengawasan koperasi

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	serta Volume Usaha			
Data Hasil Pemeriksaan	Kriteria Koperasi, Nama koperasi, Pengurus Koperasi	Untuk mengetahui tingkat Kesehatan Koperasi	RAD 02.09 Koperasi	RAD.02.09.04 pengawasan koperasi
Data Dana Bergulir APBD II	Tentang pembiayaan Dana bergulir/ Penambahan Modal (posisi angsuran bergulir, waktu pinjaman, besar angsuran, nama pinjaman, nama peminjam , biodata peminjam)	Untuk Mengetahui Volume Usaha	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 penganggaran
Data Usaha Mikro Penerima Bantuan	Data Pelaku Usaha Mikro Penerima Bantuan pemerintah (Data NIK, KK, Alamat, Jenis Usaha, Foto Usaha, No Ijin Usaha, nominal bantuan)	Sebagai Filter Data Penerima Bantuan, Untuk mengetahui data UMKM yang telah menerima bantuan	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAD.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
Data IKM Kerajinan Kerang dan handycraft	Pengelompokan IKM berdasar Kerajinan Kerang dan handycraft (biodata IKM)	Mengorganisir IKM yang berhubungan dengan kerajinan	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAD.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah
Data Eksport	Udang dan Mebel (data IKM yang bergerak dalam eksport udang dan mebel)	untuk Mengetahui Volume dan nilai Eksport	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.04 ekspor impor
Data Toko Modern	Indomaret, Alfamart (serta biodata toko tersebut)	Dala Rangka Pengawasan Toko Modern	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.02 pengelolaan perdagangan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pasar	Nama Pasar, Pedagang Pasar, Jumlah kios dan Lapak	Mengetahui Potensi masing-masing pasar	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.02 pengelolaan perdagangan
Data Pasesi	Hasil Produk UMKM (Biodata UMKM, Nama produk unggulan)	Untuk Promosi Produk Lokal Situbondo	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.02 pengelolaan perdagangan
Data Pengguna Layanan Tera / Tera Ulang	Berisi data pemohon dan jenis alat dan jumlah UTTP yang di Tera / Tera Ulang (Biodata Pemohon, jenis alat yang dipakai, jumlah alat)	Menginventarisir Pengguna Layanan Tera / Tera Ulang	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu
Data Perusahaan yang diawasi / Dilakukan Pengukuran	Berisi data perusahaan alat UTTP yang diawasi (Biodata perusahaan, Jumlah dan Hasil Pengawasan)	Laporan Pengawasan Kemetrologian	RAD 02.02 Perdagangan	RAD.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki 6 data yang berbentuk online, serta 9 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 2 data disimpan pada *server* pusat, dan 4 data pada server Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 11 data memiliki akses hanya OPD dan 4 data berakses publik.

3.4.22 Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan urusannya, **Dinas Lingkungan Hidup** menangani urusan **Lingkungan Hidup.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Lingkungan Hidup, terdapat **total 7 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada **Tabel 3.25.**

Tabel 3.25 Metadata Data Dinas Lingkungan Hidup

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data kualitas sungai	Data yang berisikan terkait dengan Nama Sungai, Kualitas sungai, lokasi sungai	Penggambaran kuliatas sungai	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
Data kualitas udara	Data yang berisikan terkait tekanan udara, lokasi	Penggambaran kualitas Udara pada suatu tempat	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
Data hasil uji laboratorium	Data yang berisikan sampel penelitian pada sebuah lokasi dan berisi data kulitas air, udara, tanah	Penggambaran pengujian kandungan air, tanah, udara seusai dengan hasil uji laboratorium	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
Data tutupan vegetasi	Data dengan data data tumbuhan di berbagai daerah berisikan jenis, nama, lokasi tumbuhan	penggambaran data keberagaman tumbuhan	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
Data kawasan konservasi lingkungan	Data berisikan data konservasi tumbuhan dan hewan. nama, lokasi, jenis,	Penggambaran tumbuhan dan hewan yang masuk dalam lingkungan konservasi	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
Data sampah yang tertangani	Data yang berisikan data dari pengolahan organik dan an organik. berisi nama temapt, lokasi, kuantitas sampah yang ditangani.	Penggambaran sampah yang tertangi di sebuah lokasi atau daerah	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
Data Pengaduan dan Pengelolaan Persampahan	Data berisikan nama masyarakat pengadu. data berisikan file	Penggambaran data untuk menindak lanjuti daerah yang dilakukan	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	KTP dan lokasi permasalahan, tidak terintegrasi dengan sumber data manapun	pengaduan		

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 2 data yang berbentuk online, serta 5 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya.

3.4.23 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan urusannya, **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** menangani urusan **Pariwisata** serta **Kepemudaan dan Olahraga.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdapat **total 9 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada **Tabel 3.26.**

Tabel 3.26 Metadata Data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Destinasi Wisata	Data pengelolaan wisata seperti data kunjungan wisatawan, data aset wisata, datafasilitas wisata, PIC Wisata	Bertujuan untuk pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Situbondo	RAD 02.11 Data pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan
Data penginapan	Data penginapan, Alamat , kontak yang bisa dihubungi, Jumlah kamar yang tersedia, Jumlah kamar yang laku terjual perbulannya.	Bertujuan untuk pendataan penginapan di Kabupaten Situbondo	RAD 02.11 Data pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data pelaku usaha pariwisata	nama pelaku usaha, jenis usaha, alamt, sama kontak,	Bertujuan untuk pengelolaan pelaku usaha pariwisata	RAD 02.11 Data pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan
Data atlet berprestasi	Nama atlit, cabang olahraga, prestasi yang diraih,event yang dijuarai	Bertujuan untuk pendataan atlet berprestasi	RAD 06.05 Data olahraga	RAD.06.05.02 peningkatan prestasi olahraga
Data wirausaha pemuda	nama pelaku usaha, jenis usaha, alamt, sama kontak,	Bertujuan untuk pendatan wirausaha	RAD 06.04 Data pemuda	RAD.06.04.01 pemberdayaan pemuda
Data ekonomi kreatif	Nama pelaku ekonomi, jenis ekonomi kreatif, alamat, sama kontak	Bertujuan untuk pendataan ekonomi kreatif	RAD 02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAD.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah
Data pelatih	nama pelatih, cabang olahraga yang dilatih, kompetensi yang dimiliki, alamat , kontak	Bertujuan untuk pendataan pelatih di Kabupaten Situbondo	RAD 06.05 Data olahraga	RAD.06.05.02 peningkatan prestasi olahraga
Data atlet yang dibina	nama atlit, usia, cabang olahraga, alamat , sekolah	Bertujuan untuk pendatan atlet Kabupaten Situbondo	RAD 06.05 Data olahraga	RAD.06.05.02 peningkatan prestasi olahraga
Data organisasi kepemudaan	nama organisasi, alamat kantor organisasi, ketua pengurus, jumlah pengurus,dan kontak,	Bertujuan untuk pendataan organisasi kepemudaan di Kabupaten Situbondo	RAD 06.04 Data pemuda	RAD.06.04.02 pengembangan pemuda

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 9 data berbentuk *offline*. Data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point.

Sebanyak 7 data memiliki akses hanya OPD, 1 data berakses bagi pakai dengan OPD serta 1 data berakses publik.

3.4.24 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Berdasarkan urusannya, **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman** menangani urusan **Kesehatan, Pertanahan ,** serta **Perumahan dan Kawasan Permukiman.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, terdapat **total 17 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dapat dilihat pada **Tabel 3.27.**

Tabel 3.27 Metadata Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Badan Usaha Jasa Kontruksi	Berisi daftar badan usaha jasa kontruksi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan badan jasa kontruksi di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.03 pembinaan jasa kontruksi
Data Jalan	Berisi detail kondisi jalan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan jalan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Jembatan	Berisi detail kondisi jembatan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan jembatan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Air Minum	Berisi detail kondisi air minum di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan air minum di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air
Data Drainase	Berisi detail kondisi drainase di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan drainase di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Jalan Lingkungan	Berisi detail kondisi jalan lingkungan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan jalan lingkungan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Air Limbah RT	Berisi detail kondisi air limbah rumah tangga di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik
Data Bangunan Gedung	Berisi detail kondisi bangunan gedung di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan bangunan gedung di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Aset Pengairan DPUPP	Berisi detail kondisi aset pengairan DPUPP di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan aset pengairan DPUPP di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Pemanfaatan Aset Pengairan	Berisi detail kondisi pemanfaatan aset pengairan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan pemanfaatan aset pengairan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Perumahan	Berisi detail kondisi perumahan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan perumahan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.04 Data perumahan	RAD.03.04.05 penyelenggaraan perumahan
Data Permukiman Kumuh	Berisi detail kondisi permukiman kumuh di Kabupaten	Bertujuan untuk pengelolaan permukiman kumuh di	RAD 03.04 Data perumahan	RAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	Situbondo	Kabupaten Situbondo		
Data PSU Perumahan	Berisi detail kondisi psu perumahan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan psu perumahan di Kabupaten Situbondo	RAD 03.04 Data perumahan	RAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
Data Daerah Irigasi	Berisi detail kondisi daerah irigasi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Jaringan Irigasi	Berisi detail kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
Data Curah Hujan	Berisi detail kondisi curah hujan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan curah hujan di Kabupaten Situbondo	RAD 07.05 Data lingkungan hidup	RAD.07.05.03 manajemen iklim dan cuaca
Data Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Berisi detail kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Situbondo	RAD 03.01 Data pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman memiliki 7 data berbentuk *online* dan *offline,* serta 10 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan urusannya, **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** menangani urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat **total 4 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada **Tabel 3.28.**

Tabel 3.28 Metadata Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data anggota bpd di kabupaten situbondo	Berisi data diri anggota bpd	Pembinaan kepada anggota BPD yang ada di desa	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa
Data IDM (indeks desa membangun)	Informasi terkait kategori desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal)	Menentukan status desa dengan penilaian	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan
Data lembaga bumdes	Merupakan detail lembaga bumdes yang ada di kab.situbondo dan telah dilakukan pembinaan	Untuk pengelolaan lembaga bumdes di Kabupaten Situbondo	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa
Data desa yang tertib mengelola keuangan desa	Memberikan informasi terkait pertanggunggjawaban pengelolaan keuangan desa	Mempermudah desa dalam menyelesaikan pengelolaan keuangan secara tepat waktu	RAD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 1 data yang berbentuk online, serta 3 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 3 data memiliki akses hanya OPD dan 1 data berakses bagi pakai dengan OPD.

3.4.26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Berdasarkan urusannya, **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** menangani urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** serta **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, terdapat **total 9 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada **Tabel 3.29.**

Tabel 3.29 Metadata Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Kegiatan DP3AP2KB	Berupa foto kegiatan DP3AP2KB	Memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	
Data Program Pengarusutamaan Gender	Data terkait partisipasi perempuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring pembangunan serta pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender pada OPD dan Desa	Bertujuan untuk mengetahui data terkait tingkat partisipasi perempuan dan responsivitas daerah terhadap isu gender	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.03 kesetaraan gender
Data Perlindungan Perempuan	Data terkait layanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Memberi informasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan ditangani oleh dinas	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.05 perlindungan hak perempuan
Data Perlindungan Khusus	Data terkait layanan pendampingan	Memberi informasi tentang kasus	RAD 04.03 Data pemberday	RAD.04.03.04 perlindungan anak

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Anak	kasus kekerasan terhadap anak	kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan ditangani oleh dinas	aan perempuan	
Data Program Pengarusutamaan Hak Anak	Berisikan data kabupaten layak anak serta data indikator lain terkait pemenuhan hak anak sesuai lima klaster KLA	Bertujuan untuk untuk mengetahui status pemenuhan hak anak di kabupaten	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.03 kesetaraan gender
Data Rumah Dataku	Data kependudukan dan data lain yang dibutuhkan masyarakat yang dikumpulkan dari, oleh dan untuk masyarakat. Baik data primer maupun data sekunder bekerjasama dengan petugas lapangan kb, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan tenaga sektoral lain yang bertugas di desa.	Menjadi pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung kb	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02 pemberdayaan perempuan
Data Program Keluarga Sejahtera	Berisikan daftar keluarga sejahtera di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk mengetahui data terkait keluarga sejahtera	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02 pemberdayaan perempuan
Data Program Keluarga Berencana	Berisikan penguna program keluarga berencana	Bertujuan untuk mengetahui data terkait keluarga berencana	RAD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02 pemberdayaan perempuan
Data Keluarga	Berisikan status dan detail	Bertujuan untuk menyediakan	RAD 04.03 Data	RAD.04.03.02 pemberdayaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	keluarga yang ada di Kabupaten Situbondo	basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya	pemberdayaan perempuan	perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki 1 data yang berbentuk online, serta 8 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 8 data memiliki akses hanya OPD dan 1 data berakses publik.

3.4.27 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan urusannya, **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu** menangani urusan **Penanaman Modal.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat **total 10 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 3.30.**

Tabel 3.30 Metadata Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data dokumentasi kegiatan DPMPTSP	Berupa foto kegiatan DPMPTSP	Memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	
Data profil dinas	Berisi profil lengkap dari DPMPTSP	Memberikan informasi terkait DPMPTSP	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data perizinan	Berisi surat perizinan dan rekomendasi perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP	Bertujuan untuk dokumentasi surat atau rekomendasi perizinan yang telah diterbitkan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Pengaduan Layanan DPMPTSP	Berisi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP	Bertujuan untuk penanganan pengaduan layanan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Perizinan Berusaha	Berisi surat perizinan dan rekomendasi perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP	Bertujuan untuk dokumentasi surat atau rekomendasi perizinan yang telah diterbitkan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data potensi investasi daerah	Berisi sebaran potensi inestasi yang ada di daerah	Bertujuan untuk pendataan dan pemanfaatan potensi investasi daerah	RAD 02.08 Data investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal
Data Perusahan	Berisi daftar perusahaan yang telah memiliki izin di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan perusahaan di Kabupaten Situbondo	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Perseorangan	Berisi daftar perseorangan yang telah memiliki izin di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan perseorangan di Kabupaten Situbondo	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data evaluasi pelayanan	Berisi laporan hasil evaluasi terhadap pelayanan DPMPTSP	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di DPMPTSP	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data investasi	Berisi daftar investasi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan investasi di Situbondo	RAD 02.08 Data investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 9 data yang berbentuk online, serta 1 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 2 data disimpan pada *server* pusat, 6 data pada server OPD di Diskominfo, serta 2 data pada server OPD di ruang server OPD. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 2 data memiliki akses hanya OPD, 4 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 4 data berakses publik.

3.4.28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** menangani urusan **Pendidikan** dan **Kebudayaan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat **total 20 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada **Tabel 3.31.**

Tabel 3.31 Metadata Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Siswa	Berisi data terkait kesiswaan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan siswa PAUD hingga SMA yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Berisi data terkait tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan
Data Lembaga/Sekolah	Berisi daftar lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo	Bertujun untuk pendataan lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
				dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data kegiatan dinas	Berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh dispendikbud	Bertujuan untuk publikasi kegiatan dispendikbud kepada masyarakat	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	
Data PAK (Penilaian Angka Kredit) Guru	Berisi nilai PAK dari setiap gur di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk manajemen data guru	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan
Data Aduan Masyarakat	Berisi aduan masyarakat terhadap pelayanan dispendikbud	Bertujuan untuk penanganan pengaduan layanan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Profil Sekolah	Berisi profil lengkap sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk publikasi profil sekolah di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data Akun Hosting dan Domain Lembaga/Sekolah	Berisi daftar Akun Hosting dan Domain Lembaga/Sekolah	Bertujuan pengelolaan Akun Hosting dan Domain Lembaga/Sekolah	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional
Data Calon Pengusul Beasiswa Situbondo Unggul/Situbondo Cerdas	Berisi data diri Pengusul Beasiswa Situbondo Unggul/Situbondo Cerdas	Bertujuan untuk pemilihan penerima Beasiswa Situbondo Unggul/Situbondo Cerdas	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data disposisi surat	Berisi surat masuk dan keluar di Dispendikbud	Bertujuan untuk pengelolaan surat masuk keluar di Dispendikbud	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan
Data cagar budaya	Berisi daftar cagar budaya di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Situbondo	RAD 08.02 Data kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya
Data kesenian	Berisi daftar kesenian di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan kesenian di Kabupaten Situbondo	RAD 08.02 Data kebudayaan	RAD.08.02.03 manajemen budaya
Data sarana dan prasarana Lembaga/Sekolah	Berisi ketersediaan sarpas lembaga pendidikan dan sekolah di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan dan pengadaan sarparas	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data buta aksara	Berisi sebaran penduduk buta aksara di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan penduduk buta aksara	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional
Data Peserta Didik Baru untuk jenjang SMP	Berisi data diri peserta didik baru di SMP Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan peserta didik baru	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data mutu pendidikan	Berisi penilaian mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
				dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data BOS	Berisi pencairan dana BOS untuk sekolah di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan dana BOS untuk sekolah di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah
Data 8 standar mutu PAUD	Berisi hasil penilaian dari 8 standar mutu PAUD	Bertujuan untuk peningkatan mutu PAUD di Kabupaten Situbondo	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini
Data Kehadiran Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan	Berisi daftar kehadiran tendik di ingkup Dispendikbud	Bertujuan untuk pengelolaan kehadiran tendik di ingkup Dispendikbud	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan
Data pokok pendidikan	Berisi data sekolah, peserta didik, tendik yang dikelola nasional	Bertujuan untuk pengelolaan data kependidikan secara nasional	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini RAD.06.01.03 pendidikan dasar RAD.06.01.04 pendidikan menengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 19 data yang berbentuk online, serta 1 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 4 data disimpan pada *server* pusat dan 15 data disimpan pada server OPD di ruang server OPD. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* pusat adalah MySQL Server dan Microsoft SQL Server digunakan pada server OPD. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 9 data memiliki akses hanya OPD, 2 data berakses bagi pakai dengan OPD serta 9 data berakses publik.

3.4.29 Dinas Perhubungan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Perhubungan** menangani urusan **Perhubungan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Perhubungan, terdapat **total 4 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Tabel 3.32.**

Tabel 3.32 Metadata Data Dinas Perhubungan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Jadwal Trasportasi	Berisi Jadwal keberangkatan dan sampai transportasi umum seperti Bis dan Kapal di Kabupaten Situbondo	Mengetahui Jadwal keberangkatan dan sampai transportasi umum seperti Bis dan Kapal di Kabupaten Situbondo	RAD 03.03 Data transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transportasi
Data Rambu Lalu Lintas	Berisi lokasi, deskripsi rambu lalu lintas dan kondisi rambu	Bertujuan untuk pengelolaan rambu	RAD 03.03 Data transportasi	RAD.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi
Data kendaraan	Berisi daftar kendaraan yang telah lulus layak uji	Bertujuan untuk memantau kelayakan kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Situbondo	RAD 03.03 Data transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transportasi
Data CCTV	Berisi video CCTV dari beberapa titik jalan di Kabupaten Situbondo	Untuk memantau lalu lintas di Kabupaten Situbondo	RAD 03.03 Data transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselematan transportasi

Dinas Perhubungan memiliki 3 data yang berbentuk online, serta 1 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 2 data disimpan pada *server* Diskominfo dan 1 data disimpan pada server OPD di ruang server OPD. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 2 data memiliki akses hanya OPD dan 2 data berakses publik.

3.4.30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** menangani urusan **Perpustakaan** dan **Kearsipan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdapat **total 6 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada **Tabel 3.33.**

Tabel 3.33 Metadata Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Kebutuhan Buku	Berisi daftar kebutuhan buku untuk perpustakaan	Bertujuan untuk perencanaan pengadaan buku	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional
Data Buku	Berisi data buku dan koleksi perspustakaan yang ada di Perpustakaan Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk dokumentasi dan manajemen aset perpustakaan	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional
Data SPJ	Berisi laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran di Dinperpus	Bertujuan untuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja
Data Surat Menyurat	Berisi surat masuk dan keluar di Dinperpus	Bertujuan untuk pengelolaan surat masuk keluar di Dinperpus	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan
Dokumen Arsip	Berisi detail arsip yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk manajemen arsip aktif dan non-aktif yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data e-book	Berisi data buku digital yang ada di Perpustakaan Kabupaten Situbondo	Bertujuan memberikan pelayanan perpustakaan secara online	RAD 06.01 Data pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 1 data yang berbentuk online, 2 data berbentuk *online* dan *offline,* serta 3 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* Diskominfo adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 3 data memiliki akses hanya OPD, 1 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 2 data berakses publik.

3.4.31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan urusannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menangani urusan **Pertanian dan Pangan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Pertanian dan Pangan, terdapat **total 6 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada **Tabel 3.34.**

Tabel 3.34 Metadata Data Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Produksi Pertanian	Berisi data hasil produksi pertanian di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan perkembangan hasil produksi pertanian di Kabupaten Situbondo	RAD 02.03 Data pertanian	RAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian
Data Jenis Varietas Padi unggul	Berisi daftar jenis varietas padi unggul	Bertujuan untuk pendataan varietas padi unggul	RAD 02.03 Data pertanian	RAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian
Data Luasan Tanaman	Merupakan luas dari lahan yang akan ditanami suatu komoditi perkebunan	Bertujuan untuk pendataan lahan pertanian	RAD 02.03 Data pertanian	RAD.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian
Data Petani	Berisi data diri pentani di	Bertujuan untuk pendataan petani	RAD 02.03 Data	RAD.02.03.01 pembinaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	Kabupaten Situbondo	di Kabupaten Situbondo	pertanian	pertanian regional
Data rencana bantuan penyediaan alat jemur tembakau	Berisi laporan perencanan bantuan penyediaan alat jemur tembakau	Bertujuan untuk memberikan bantuan alat jemur tembakau	RAD 02.03 Data pertanian	RAD.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian
Data calon petani calon lokasi	Berisi daftar calon petani dan calon lokasi pertanian	Bertujuan untuk pendataan calon petani dan calon lokasi pertanian	RAD 02.03 Data pertanian	RAD.02.03.01 pembinaan pertanian regional

Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 3 data yang berbentuk online, 1 data berbentuk *online* dan *offline,* serta 2 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 2 data disimpan pada *server* pusat, 1 data pada server Diskominfo dan 1 data pada server pemprov. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.32 Dinas Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan urusannya, **Dinas Peternakan dan Perikanan** menangani urusan **Kelautan dan Perikanan** serta **Pertanian.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Peternakan dan Perikanan, terdapat **total 15 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dilihat pada **Tabel 3.35.**

Tabel 3.35 Metadata Data Dinas Peternakan dan Perikanan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Produksi Perikanan Tangkap	Berisi jumlah produksi perikanan tangkap	Mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan
Data Produksi Perikanan Budidaya	Berisi jumlah produksi perikanan budidaya	Mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan
Data Hasil produksi	Berisi jumlah hasil produksi	Mengetahui jumlah produksi	RAD 02.06 Data	RAD.02.06.03 pengelolaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
perikanan	perikanan	perikanan tangkap	perikanan	hasil perikanan
Data Budidaya Pembenihan	Berisi jumlah budidaya pembenihan	Mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional
Data Produksi Populasi Ternak	Berisi jumlah produksi populasi ternak	Mengetahui jumlah produksi populasi ternak	RAD 02.05 Data peternakan	RAD.02.05.05 produksi pakan dan ternak
Data berita kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan	Berisi berita kegiatan dinas peternakan dan perikanan	Laporan pembangunan/tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	
Data Populasi Ternak	Berisi jumlah populasi ternak	Mengetahui jumlah populasi ternak	RAD 02.05 Data peternakan	RAD.02.05.05 produksi pakan dan ternak
Data Pelaku Usaha Perikanan	Berisi jumlah pelaku usaha perikanan	Mengetahui jumlah pelaku usaha perikanan	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional
Data Vaksinasi Hewan	Berisi jumlah vaksinasi hewan	Mengetahui jumlah hewan yang sudah divaksinasi	RAD 02.05 Data peternakan	RAD.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner
Data Penyakit Mulut dan GIGI (PMK)	Berisi jumlah penyakit mulut dan gigi (PMK)	Mengetahui jumlah hewan ternak yang terkena penyakit PMK	RAD 02.05 Data peternakan	RAD.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner
Data Luas Tambak ikan	Berisi jumlah luas tambak ikan	Mengetahui jumlah luas tambak ikan	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.01 perikanan budidaya
Data Budidaya air tawar	Berisi jumlah budidaya air tawar	Mengetahui jumlah budidaya air tawar	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.01 perikanan budidaya
Data Budidaya ikan hias	Berisi jumlah budidaya ikan hias	Mengetahui jumlah budidaya ikan hias	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.01 perikanan budidaya
Data Alat Tangkap	Berisi jumlah alat tangkap	Mengetahui jumlah alat tangkap	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.05 pengelolaan konservasi

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
		perikanan		dan keanekaragaman hayati laut
Data Nelayan	Berisi data diri nelayan	Mengetahui jumlah nelayan	RAD 02.06 Data perikanan	RAD.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki 1 data yang berbentuk online, 1 data berbentuk *online* dan *offline,* serta 13 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, 1 data disimpan pada *server* pusat dan 1 data pada server Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses publik.

3.4.33 Dinas Sosial

Berdasarkan urusannya, **Dinas Sosial** menangani urusan **Sosial.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Dinas Sosial, terdapat **total 3 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Dinas Sosial dapat dilihat pada **Tabel 3.36.**

Tabel 3.36 Metadata Data Dinas Sosial

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Penduduk Masyarakat Yang Membutuhkan Bantuan Sosial	Berisi data diri penduduk Kabupaten Situbondo yang membutuhkan bansos	Bertujuan untuk penyaluran bansos	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.05 penanganan fakir miskin
Data DTKS	Berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan	Bertujuan untuk penyaluran bansos	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	Sosial (PSKS)			
Data PMKS	Berisi data diri seorangan atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Mengangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial

Dinas Sosial memiliki 1 data yang berbentuk online, 1 data berbentuk *online* dan *offline,* serta 1 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* pusat adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses publik.

3.4.34 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan urusannya, **Satuan Polisi Pamong Praja** menangani urusan **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat **total 8 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada **Tabel 3.37.**

Tabel 3.37 Metadata Data Satuan Polisi Pamong Praja

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Sosialisasi	Data berisikan sosialisi yang diadakan oleh Satpol PP (Nama kegiatan sosialisasi, lokasi, nama pemateri)	Menginformasi kan data sosialisasi yang dilakukan	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.02 pengayoman masyarakat
Data Pelanggar Perda yang Ditangani	Data data pelanggar PERDA (Peraturan Daerah) yang ditangani oleh	Mengetahui dan merekap jumlah pelanggar yang	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	OPD (KTP, jenis pelanggaran, presentasi pelanggar)			
Data Rokok Ilegal	Berisi daftar rokok yang tidak bercukai	Bertujuan untuk pemberantasa n rokok ilegal	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum
Data LINMAS	Datan nama nama LINMAS yang terlatih	Mengetahui jumlah LINMAS yang terlatih dan untuk digunakan sebagai acuan rekomendasi LINMAS terlatih	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.02 pengayoman masyarakat
Data Kebakaran	Data jumlah kebaran yang terjadi (Nama Lokasi, waktu, Status tertangani)	Mengetahui dan merekap jumlah kebarakaran yang terlapor dan tertangani	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.02 pengayoman masyarakat
Data Operasi rokok ilegal	Data berisikan mengenai persebaran rokok ilegal (nama rokok, daerah)	Mengetahui persebaran dan jumlah rokok ilegal	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum
Data Razia PNS dan Siswa	Data menjelaskan mengenai jumlah PNS dan Siswa yang terjaring diwaktu kerja dan waktu sekolah (Nama, Waktu terjaring, Tempat, Alamat Instansi/Sekolah)	Menginformasi kan dan mendata jumlah PNS dan Siswa yang terjaring oleh SatpolPP	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum
Data Razia Kopeltibkab	Data menjelaskan mengenai terjaringnya masyarakat umum yang menyalahi aturan ketertiban (psk, miras, prostitusi)	Mendata masyarakat yang terjaring operasi Penertiban	RAD 05.02 Data keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	. (nama tempat terjaring, lokasi terjaring, KTP, Waktu) yang melibatkan TNI/POLRI, Kejaksaan			

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 data yang berbentuk online, serta 7 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* Diskominfo adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.35 RSUD dr. Abdoer Rahem

Berdasarkan urusannya, **RSUD dr. Abdoer Rahem** menangani urusan **Kesehatan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas RSUD dr. Abdoer Rahem, terdapat **total 10 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data RSUD dr. Abdoer Rahem dapat dilihat pada **Tabel 3.38.**

Tabel 3.38 Metadata Data RSUD dr. Abdoer Rahem

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data rekam medis pasien RSUD	Berisi NIK, Nama, Alamat, Nama tindakan, kode diagnosa	Menyajikan data rekam medis pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data kefarmasian	Berisi no RM, Nama pasien, nama obat, harga obat	Bertujuan untuk dokumentasi data pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan
Data persediaan non-farmasi	Berisi nama barang dan nama ruangan	Bertujuan untuk dokumentasi aset	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan
Data pasien	Berisi data diri pasien hingga tagihan pasien	Bertujuan untuk pengelolaan pasien di RSUD	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data ruang inap	Berisi ketersediaan ruang inap di RSUD	Bertujuan untuk pengelolaan ruang inap	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data obat	Berisi ketersediaan obat-obatan	Bertujuan untuk pengelolaan obat-obatan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan
Data perencanaan anggaran RSUD	Berisi laporan perencanaan anggaran RSUD	Bertujuan untuk perencanaan anggaran RSUD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.05 penganggaran
Data Sarpras RSUD	Berisi detail sarpras alkes yang dimilki RSUD	Bertujuan untuk pendataan dan manajemen aset atas sarpras alkes milik RSUD	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data ketenagaan	Berisi data terkait kepegawaian di RSUD	Bertujuan untuk pengelolaan pegawai RSUD	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
Data rekapitulasi RSUD	Berisi rangkuman data terkait kesehatan di RSUD	Bertujuan untuk pelaporan RSUD	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.01 pembinaan kesehatan regional

RSUD dr. Abdoer Rahem memiliki 10 data yang berbentuk *online*. Untuk data yang berbentuk *online*, 4 data disimpan pada *server* pusat dan 6 data disimpan pada server OPD di ruang server OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada semua *server* adalah MySQL Server. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.36 Kecamatan Situbondo

Berdasarkan urusannya, **Kecamatan Bungatan** menangani urusan **Kecamatan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Kecamatan Bungatan, terdapat **total 7 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Kecamatan Bungatan dapat dilihat pada **Tabel 3.39.**

Tabel 3.39 Metadata Data Kecamatan Bungatan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data surat administrasi penduduk	Berisi surat kependudukan pemohon surat pengantar administrasi	Bertujuan untuk penerbitan surat pengantar administrasi kependudukan	RAD 03.07 Data kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Profil Desa	Data profil desa menyangkut data penduduk dan data yang ada di desa	Menyajikan data, memberikan informasi terkait dengan profil desa	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Musrembang	Hasil data musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan)	Menyajikan data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.08 penyusunan penganggaran negara dan dukungan strategis program/kebijakan
Data sanksi	Kumpulan dari pelanggaran pelanggaran yang tercatat (data pelanggar hukum di kecamatan)	Menginformasikan pelanggar hukum di kecamatan situbondo	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data kesejahteraan rakyat	Data penduduk yang menerima BLT, Bansos dan penerima Pelayanan Kesehatan	Membantu merekap data dan menginformasikan data kesejahteraan rakyat	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial
Data pelayanan umum	Data pemohon Layanan yang datang ke kantor kecamatan Situbondo (nama pemohon layanan, jenis layanan yang diminta)	Membantu merekap dan menginformasikan jumlah pemohon, nama dan jenis pemohon pelayanan yang datang ke kecamatan situbondo	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik
Data SKM	Data survey kepuasan masyarakat (nama, puas atau ndak)	Menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	

Kecamatan Bungatan memiliki 1 data yang berbentuk online, serta 6 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 5 data memiliki akses hanya OPD, 1 data berakses bagi pakai dengan OPD dan 1 data berakses publik.

3.4.37 Kecamatan Bungatan

Berdasarkan urusannya, **Kecamatan Bungatan** menangani urusan **Kecamatan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Kecamatan Bungatan, terdapat **total 4 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Kecamatan Bungatan dapat dilihat pada **Tabel 3.40.**

Tabel 3.40 Metadata Data Kecamatan Bungatan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Kesejahteraan Rakyat	Meliputi informasi data SEHATI, Penerima Bantuan dan Kemiskinan Ekstrem	Tujuan data untuk mengetahui jumlah penerima bantuan	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial
Data Musrenbang	Meliputi laporan data musrenbang, KPM, Karang Taruna, Penggilingan Padi dan Jagung, Data Pelaku Usaha	Tujuan data mengetahui data tentang peningkatan pembangunan di desa	RAD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.08 penyusunan penganggaran negara dan dukungan strategis program/kebijakan
Data Pembinaan Keuangan Desa	Berupa laporan, rancangan mengenai kuangan desa	Tujuan data untuk mempermudah akses atau penyelesaian program desa	RAD 09.01 Data dalam negeri	RAD.09.01.05 pembinaan keuangan daerah
Data Surat Masuk dan Surat keluar	Meliputi laporan data surat masuk dan surat keluar	Tujuan data untuk mengetahui jumlah surat yg masuk maupun keluar	RAD 09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan

Kecamatan Bungatan memiliki 1 data yang berbentuk online, serta 3 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.38 Puskesmas Situbondo

Berdasarkan urusannya, **Puskesmas Situbondo** menangani urusan **Kesehatan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Puskesmas Situbondo, terdapat **total 8 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Puskesmas Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 3.41.**

Tabel 3.41 Metadata Data Puskesmas Situbondo

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Vaksinasi	Data Vaksin berupa data jenis vaksin, penerima vaksin, serta distribusinya	Bertujuan untuk pengelolaan distribusi vaksin	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Hasil laboratorium	Berisikan hasil pemeriksaan laboratorium	Bertujuan untuk dokumentasi hasil lab pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data BPJS	Data BPJS - Data BPJS berisikan nomor BPJS, Status BPJS, Kelas BPJS dan Keaktifan nomor BPJS yang berisikan nomor asuransi dan identitas pasien	Bertujuan untuk pengelolaan BPJS pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Jejaring	Data Jaringan dibawah puskesmas seperti klinik atau dokter praktek atau praktek mandiri	Bertujuan untuk pengelolaan jejaring	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Survei Kepuasan Masyarakat	Merupakan hasil dari survei kepuasan masyarakat	Bertujuan untuk peningkatan pelayanan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	
Data Sarana - prasarana	Berisi daftar sarana dan	Bertujuan untuk pengelolaan	RAD 09.02 Data	RAD.09.02.08 pengadaan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	prasarana yang ada di Puskesmas Situbondo	sarana dan prasarana yang ada	keuangan	dan manajemen aset
Data Barang dan Jasa	Berisi daftar barang dan jasa yang ada di Puskesmas Situbondo	Bertujuan untuk pengelolaan barang dan jasa yang digunakan	RAD 09.02 Data keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
Data Imunisasi	Berisi distribusi imunisasi yang telah diberikan	Bertujuan untuk pengelolaan ketersediaan imunisasi	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan

Puskesmas Situbondo memiliki 7 data yang berbentuk online, serta 1 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* pusat sebanyak 6 data dan 1 data pada *cloud*. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* pusat adalah MySQL Server, sedangkan untuk cloud yang digunakan adalah Google Drive. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Sebanyak 3 data memiliki akses bagi pakai dengan OPD dan 5 data berakses publik.

3.4.39 Puskesmas Bungatan

Berdasarkan urusannya, **Puskesmas Bungatan** menangani urusan **Kesehatan.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Puskesmas Bungatan, terdapat **total 10 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Puskesmas Bungatan dapat dilihat pada **Tabel 3.42.**

Tabel 3.42 Metadata Data Puskesmas Bungatan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Loket	Berisi pendafataran dan administrasi pasien	Bertujuan untuk pengelolaan administrasi pasien	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Klinik Sanitasi dan Pojok Gizi	Berisi hasil pemerikasaan di klinik sanitasi dan pojok gizi	Bertujuan untuk pendataan sanitasi dan gizi	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Pemeriksaan Lansia	Berisi hasil pemeriksaan lansia	Bertujuan untuk pendataan pasien lansia	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Pemeriksaan Umum	Berisi hasil pemeriksaan di poli umum	Bertujuan untuk pendataan pasien di poli umum	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Pemeriksaan Gigi dan Mulut	Berisi hasil pemeriksaan di poli gigi dan mulut	Bertujuan untuk pendataan pasien di poli gigi mulut	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Pemeriksaan KIA dan Imunisasi	Berisi hasil pemeriksaan di poli KIA dan imunisasi	Bertujuan untuk pendataan pasien di poli KIA dan imunisasi	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Pemeriksaan KB	Berisi pasien yang mengaplikasikan KB di Puskesmas Bungatan	Bertujuan untuk pendataan pengguna KB di daerah Bungatan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data Laboran	Berisi hasil pemeriksaan di laboraturium	Bertujuan untuk pendataan pasien di laboraturium	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data ODC Persalinan	Berisi hasil pemeriksaan di ODC persalinan	Bertujuan untuk pendataan pasien di ODC Persalinan	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan
Data IGD	Berisi hasil pemeriksaan di IGD	Bertujuan untuk pendataan pasien di IGD	RAD 04.01 Data kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan

Puskesmas Bungatan memiliki 10 data berbentuk *offline*. Data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses hanya OPD.

3.4.40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan urusannya, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** menangani urusan **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.** Menurut hasil survei dan identifikasi dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat **total 5 data yang teridentifikasi**. Detail dari daftar metadata data Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.43.**

Tabel 3.43 Metadata Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
Data Kebencanaan	Berisi detail kejadian bencana	Bertujuan untuk pendokumentasian	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.06 penanggulanga

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	RAD Level 2	RAD Level 3
	yang pernah terjadi di Kabupaten Situbondo	atas kejadian bencana di Kabupaten Situbondo, sehingga kedepannya dapat dilakukan mitigasi.		n bencana
Data Logistik Covid-19 Kabupaten Situbondo	Berisi detail terkait barang logistik covid-19 yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk manajemen aset logistik dan kedepannya dapat digunakan untuk perencanaan	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.06 penanggulanga n bencana
Data Kawasan Rawan Bencana	Berisi daftar kawasan rawan bencana di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk mitigasi bencana	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.06 penanggulanga n bencana
Data Korban bencana	Berisi data jumlah dan rincian korban pada setiap kejadian bencana di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pendataan jumlah korban yang terkena dampak kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Situbondo.	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.06 penanggulanga n bencana
Data Kerugian akibat bencana	Berisi total dan penjabaran kerugian atas bencana yang terjadi di Kabupaten Situbondo	Bertujuan untuk pemulihan bencana	RAD 04.02 Data sosial	RAD.04.02.06 penanggulanga n bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 data yang berbentuk online, serta 3 data berbentuk *offline*. Untuk data yang berbentuk *online*, disimpan pada *server* Diskominfo. Sedangkan untuk data *offline* disimpan secara manual pada komputer milik OPD. Aplikasi *database* yang digunakan untuk penyimpanan data pada *server* Diskominfo adalah MySQL Server. Untuk data yang berbentuk *offline* dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word dan Power Point. Semua data memiliki akses publik.

3.5 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi

Integrasi data adalah proses menghubungkan atau menggabungkan beberapa set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu tempat

penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk **mengurangi duplikat atau redudansi** dari data yang ada. Sesuai dengan tujuan dari **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta **mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah**. Pada bagian ini, akan diusulkan integrasi antar data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial. Data yang akan **diusulkan** dilakukan **integrasi** diambil dari **data yang ada pada aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Situbondo.**

3.5.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Integrasi data kependudukan merupakan proses penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan**. Untuk daftar data yang diusulkan untuk diintegrasikan dapat dilihat pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Objek Pajak	VTAX
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Subjek pajak	VTAX
15	Badan Pendapatan Daerah	Data wajib pajak	VTAX
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Kepegawaian	Milea, Simpeg, SLKS
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kependudukan	SIKANDA SILAO PETIR BALADA AKHIR
18	Dinas Kesehatan	Rekam Medik	SIKDA
19	Dinas Ketenagakerjaan	Data Peserta transmigrasi	SIM-TTK (Aplikasi Usulan)
19	Dinas Ketenagakerjaan	Data warga resettlemen	SIM-TTK (Aplikasi Usulan)
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data perizinan	SIPINTER SiTajin
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Siswa	Sisgur
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Sisgur
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Data Pelaku Usaha Perikanan	Sistem Informasi Perikanan (Aplikasi Usulan)

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data pasien	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data rekam medis pasien RSUD	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem

Pada Tabel 3.44 terdapat **14 data** terkait kependudukan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi. Data tersebut diampu oleh **9 OPD** yang memiliki data terkait kependudukan. Usulan ini dapat digunakan dalam pembangunan *dashboard* pemerintahan yang bersangkutan dengan kependudukan.

3.5.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Integrasi data kepegawaian merupakan penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Pegawai**. Untuk detail usulan data-data terkait kepegawaian yang harus diintegrasikan dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung
7	Bagian Organisasi	Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	e-Sakip
7	Bagian Organisasi	Data Analisis Jabatan	SIMONA
7	Bagian Organisasi	Data Struktur dan Pemangku Jabatan	SIMONA
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Kepegawaian	Milea, Simpeg, SLKS
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Laporan Kinerja	Milea, e-kinerja
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Mutasi	Milea, Emutasi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Pensiun	Milea
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data SKP	Milea
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data PNS bermasalah	Milea

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Kepangkatan	Milea, Usulkp
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Rekomendasi Diklat ASN Kenaikan Pangkat	Milea
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Diklat	ABANGSITUR
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Daftar Gaji	SIM GAJI
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Sisgur

Pada 3.45 terdapat **14 data** terkait kepegawaian yang diusulkan untuk dilakukan integrasi. Data tersebut diampu oleh **4 OPD** yang memiliki data terkait kepegawaian. Usulan ini dapat digunakan dalam pembangunan *dashboard* pemerintahan yang bersangkutan dengan kepegawaian.

3.5.3 Usulan Integrasi Data Keuangan

Integrasi data keuangan merupakan proses penggabungan atau penghubungan antar **data-data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, pendapatan daerah dan aset atau barang milik daerah**. Untuk data terkait keuangan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi dapat dilihat pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46 Usulan Integrasi Data Keuangan

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Data Target dan Realisasi Anggaran	Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan (Aplikasi Usulan)
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data Keuangan Akhir tahun	SIRKA
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data RAB barang	siperang
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengembangan SIMBADDA (Aplikasi Usulan)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pemeliharaan Barang Milik Daerah	E-MASDA

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Penerbitan SPD	SIRKA
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data TPTGR	SIRKA
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data SPJ Fungsional	SIRKA
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Daftar Gaji	SIM GAJI
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data LKPD	SIRKA
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Penyusutan BMD	siperang
15	Badan Pendapatan Daerah	Data transaksi pajak	Simpada
15	Badan Pendapatan Daerah	Data BPHTB	E-BPHTB
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak Daerah Lainnya	E-PDL
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak Katering Online	PAJAK KATERING ONLINE
15	Badan Pendapatan Daerah	Data PBB	SITERAS

Pada Tabel 3.46 terdapat **16 data** terkait keuangan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi. Data tersebut diampu oleh **4 OPD** yang memiliki data terkait keuangan. Usulan ini dapat digunakan dalam pembangunan *dashboard* pemerintahan yang bersangkutan dengan keuangan daerah.

3.5.4 Usulan Integrasi Data Spasial

Sistem Informasi Geospasial (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasial atau geografi. Salah satu contoh manfaat pemanfaatan SIG adalah visualisasi. Dengan adanya SIG, data yang termuat dalam peta administrasi dapat divisualisasikan lebih jelas seperti batas-batas administrasi tiap dusun, aksesibilitas jalan dan transportasi, dan data-data lainnya. SIG nantinya akan dikelola oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**. Saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo masih belum memiliki SIG sehingga, diperlukan penataan data-data spasial yang ada untuk pembangunan SIG kedepannya. Pada Tabel 3.47 akan menjelaskan usulan data spasial yang akan diintegrasikan pada aplikasi SIG.

Tabel 3.47 Usulan Integrasi Data Spasial

Kode OPD	OPD	Data Eksisting
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Data rupa bumi
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data tempat peribadatan
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Kemiskinan
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Pertanian
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data UKM
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data Toko Modern
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data Pasar
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kualitas sungai
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kualitas udara
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kawasan konservasi lingkungan
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data Destinasi Wisata
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data penginapan
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data pelaku usaha pariwisata
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jalan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jembatan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Air Minum
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Drainase
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jalan Lingkungan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Air Limbah RT
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Bangunan Gedung
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Perumahan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Permukiman Kumuh
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Daerah Irigasi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jaringan Irigasi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Curah Hujan
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu	Data investasi

Kode OPD	OPD	Data Eksisting
	Satu Pintu	
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Lembaga/Sekolah
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data cagar budaya
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data kesenian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Luasan Tanaman

Pada SIG terdapat dua macam data yang dikelola yaitu data spasial dan data statistik. Data Spasial adalah data yang berupa data keruangan seperti peta yang menampilkan data berupa simbol titik, garis atau poligon. Sedangkan data statistik adalah data yang berupa tabel yang isinya berupa presentasi baik data kuantitatif atau kualitatif. Jika digabungkan antara data spasial dan data statistik maka jadilah basis data yang merupakan sumber atau *input* data dalam organisasi. Tabel 3.47 merupakan usulan untuk data spasial, dimana terdapat **31 data usulan**. Data tersebut diampu oleh **10 OPD** yang memiliki data yang dapat diubah menjadi data spasial.

3.6 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengesahkan beberapa peraturan terkait SDI. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengatur SDI Kabupten Situbondo pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo**. Peraturan tersebut memuat prinsip satu data, penyelenggara satu data, penyelenggaraan hingga ke pendanaan satu data Kabupten Situbondo. Selain itu terdapat **Surat Keputusan Bupati Situbondo No.179 Tentang Penyelenggaran, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo** yang mengatur terkait Forum Satu Data Kabupaten Situbondo. SK tersebut memuat susunan anggota Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data.

Dari kondisi eksisting diatas, maka diusulkan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan SDI. Penyusunan usulan ini diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Detail usulan dapat dilihat pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

No	Kegiatan	Keterangan	OPD Terkait
1.	Perencanaan data	Penentuan daftar data yang memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

No	Kegiatan	Keterangan	OPD Terkait
		rilis dan/atau pemutakhiran data.	
		Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas.	– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bupati Situbondo – Wakil Bupati Situbondo – Sekretaris Daerah Kabuaten Situbondo
		Kesepakatan dan penyampaian daftar data yang telah disusun melalui forum satu data.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		Penyususnan rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup: a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten; b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia; c. kegiatan terkait pengumpulan Data; d. kegiatan terkait pemeriksaan Data; e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.	– Dinas Komunikasi dan Informatika – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	Pengumpulan data	Pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum	– Seluruh OPD – Badan Perencanaan Pembangunan

No	Kegiatan	Keterangan	OPD Terkait
		Satu Data Indonesia, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data.	Daerah.
		Penyampaian data yang telah dikumpulkan oleh produsen data kepada walidata.	– Seluruh OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika.
3.	Pemeriksaan data	Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia oleh walidata.	– Bagian Organisasi – Bagian Tata Pemerintah – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Dinas Komunikasi dan Informatika.
		Pengembalian data yang tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.	Dinas Komunikasi dan Informatika.
		Perbaikan data sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh produsen data.	Seluruh OPD.
4.	Penyimpanan data	Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* menyimpan data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo ke dalam *data warehouse* yang tersimpan di pusat data daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika.
5.	Penyebarluasan data	Pemberian akses data.	Dinas Komunikasi dan Informatika.
		Pendistribusian data dalam bentuk media cetak dan elektronik.	Dinas Komunikasi dan Informatika.

No	Kegiatan	Keterangan	OPD Terkait
		Pembatasan akses data tertentu oleh walidata.	Dinas Komunikasi dan Informatika.
		Pertukaran data.	Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Tabel 3.48 terdapat total **5 tahapan** yang diusulkan untuk **penyelenggaraan SDI di Kabupaten Situbondo**. OPD penanggung jawab sebagian besar diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal tersebut dikarenakan pada Forum Satu Data menjabat sebagai ketua walidata dan koordinator. Susunan OPD penanggung jawab pada Tabel 3.48 telah disesuaikan dengan jabatan pada Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 179 tentang Penyelenggaran, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.

BAB 4
ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Bab 4 akan membahas sekilas mengenai kondisi eksisting layanan SPBE dan penjabaran usulan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pembahasan dimulai dengan pendefinisian refrensi arsitektur serta metadata layanan SPBE. Kondisi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dibahas singkat pada identifikasi gap layanan SPBE. Pembahasan ditutup dengan penjabaran usulan-usulan untuk layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

4.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan telah ditentukan pada Gambar 4.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat nasional. Selanjutnya, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) tingkat nasional yang terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). Referensi arsitektur layanan SPBE dijelaskan lebih detail pada **Tabel 4.1.**

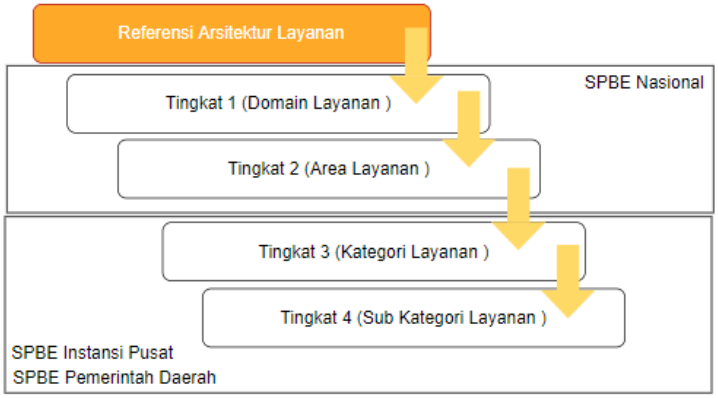

Gambar 4.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Layanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman moda
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan
01.33	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanaan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

Tabel 4.1 menjabarkan terkait RAL SPBE Nasional di tingkat 1 yang terdiri dari 2 domain layanan yaitu layanan publik dan layanan administrasi pemerintah. Sedangkan pada tingkat 2, domain layanan publik terdiri atas 44 area layanan dan domain layanan administrasi pemerintah terdiri atas 9 area layanan.

4.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata layanan SPBE menurut Berdasarkan **Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE terdiri dari ID, nama layanan, tujuan layanan, fungsi layanan, model referensi layanan, unit pelaksana, kementerian / lembaga terkait, urusan pemerintahan terkait, target layanan, metode layanan, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko serta id metadata terkait. Penjabaran metadata layanan dapat menunjukkan bahwa layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE nasional. Detail metadata arsitektur layanan SPBE dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sedangkan penjabaran hasil pemetaan metadata arsitektur layanan dengan layanan eksisting milik Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE.**

Tabel 4.2 Metadata Arsitektur Layanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	Potensi manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE
14	Mitigasi risiko	Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE
15	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

4.3 Identifikasi Gap Layanan SPBE

Setelah pembahasan kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo di atas, maka dilakukan analisis kesenjangan atau gap atas kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil analisis gap layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 4.3.**

Tabel 4.3 Analisis GAP Layanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan layanan	Pemerintah Kabupaten Situbondo mengelola layanan sebanyak 768 layanan. Semua layanan tersebut merupakan layanan aktif yang tersebar di 40 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, saat ini semua OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki layanan yang aktif dikelola.	Seluruh instansi pemerintahan memiliki layanan dan atau mendukung layanan OPD lain	Kondisi ideal telah terpenuhi.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Akses layanan	Dari total 768 layanan, 425 layanan (55%) berakses manual. Sisanya, sebanyak 284 layanan (37%) berakses *online* dan 59 layanan (8%) berakses *online* dan manual.	Layanan didukung oleh aplikasi umum berbagi pakai dan atau aplikasi khusus (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Terdapat 425 layanan (55%) masih berakses manual.
Layanan administrasi	Semua jenis layanan administrasi telah didukung oleh aplikasi. Namun, masih terdapat empat jenis layanan yang masih hanya menggunakan aplikasi khusus atau aplikasi milik daerah.	Layanan didukung oleh aplikasi bagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Terdapat empat jenis layanan yang masih hanya menggunakan aplikasi khusus atau aplikasi milik daerah.
Layanan Publik	Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki semua jenis layanan publik yang semuanya telah didukung aplikasi. Untuk layanan publik, yang telah menggunakan aplikasi umum adalah layanan mengenai pengaduan layanan publik.	Layanan didukung oleh aplikasi bagi pakai dan pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Terdapat 2 layanan publik yang belum menggunakan aplikasi umum.
Layanan Publik Sektoral	Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki semua jenis layanan publik sektoral. Namun, terdapat satu layanan yang belum terpenuhi, yaitu layanan pertanahan pada jenis layanan publik sektor pengelolaan bangunan	Layanan didukung oleh aplikasi bagi pakai dan pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai	Layanan terkait pertanahan masih belum tersedia. Terdapat 11 sektor layanan yang masih bersifat manual. Dari layanan yang telah didukung aplikasi, masih terdapat 7 sektor

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	dan tanah. Pada layanan publik sektoral terdapat 11 sektor layanan yang masih bersifat manual. Selanjutnya pada layanan publik sektoral, telah terdapat 10 sektor layanan yang telah menggunakan aplikasi umum atau pusat dalam mendukung layanannya.	(Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	yang hanya menggunakan aplikasi khusus dalam mendukung layanan.
Ketersediaan layanan terhadap program	Pada RPJMD Kabupaten Situbondo terdapat total 140 program. Dari semua program tersebut, 109 program (78%) telah didukung oleh 585 layanan eksisting di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sisanya, sebanyak 31 program (22%) masih belum didukung layanan dan terdapat 183 layanan yang tidak memiliki program terkait di RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026.	Seluruh program yang tercantum pada RPJMD telah didukung oleh layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Terdapat 31 program yang masih belum didukung layanan.

4.4 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Bagian ini akan membahas usulan-usulan layanan yang diambil dari beberapa sumber. Pertama, usulan layanan akan diambil dari layanan administrasi dan publik yang masih belum didukung layanan. Selanjutnya, usulan layanan diambil dari program pada RPJMD yang belum didukung layanan. Terakhir, akan dibahas usulan layanan yang diambil dari usulan aplikasi yang belum didukung layanan.

4.4.1 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE

Pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu **Layanan Administrasi Berbasis Elektronik** dan **Layanan Publik Berbasis Elektronik.** Aspek layanan administrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terdiri dari **10 indikator layanan** di dalamnya, antara lain:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Keuangan;
4. Pengadaan barang dan jasa;
5. Kepegawaian;
6. Kearsipan dinamis;
7. Pengelolaan barang milik Daerah;
8. Pengawasan internal pemerintah;
9. Akuntabilitas kinerja organisasi, dan
10. Kinerja pegawai.

Sedangkan aspek layanan publik berbasis elektronik dari hasil analisis terdiri dari:

1. Layanan pengaduan layanan publik;
2. Layanan data terbuka;
3. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan
4. Layanan publik sektoral (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, kependudukan, pariwisata, perizinan dst.).

Hasil pemetaan ketersediaan layanan terhadap aspek layanan diatas secara lengkap dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap SPBE Kabupaten SItubondo Sub Bab 4.4**. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah memenuhi semua aspek layanan administrasi** berbasis elektronik. Sehingga **tidak ada usulan untuk layanan administrasi berbasis elektronik**. Untuk **layanan publik berbasis elektronik**, Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah memenuhi semua aspek kecuali layanan terkait pertanahan**. Layanan pertanahan termasuk dalam layanan publik sektoral di sektor pengelolaan bangunan dan tanah. Sehingga **diusulkan** layanan terkait pertanahan berupa **Layanan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah** yang diampu oleh **Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman**.

4.4.2 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Pada RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026 terdapat program-program yang harus dijalankan oleh OPD. Pelaksanaan program dilakukan dengan penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan program RPJMD. Namun, ada beberapa program yang masih belum didukung oleh layanan eksisting pada

Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, setelah dilakukan pemetaan program terhadap layanan, didapatkan usulan layanan yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Kode OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Layanan Pengembangan Ekspor
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Layanan Pengembangan Permukiman
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kode OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan
	Permukiman		
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Layanan Pengembangan Perumahan
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Layanan Pengurusan Hak Hak Atas Tanah
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Layanan Peningkatan Kerjasama Desa
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	Layanan Pembinaan Sejarah
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Layanan Perizinan Penggunaan Arsip
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Layanan Perizinan Usaha Pertanian
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kode OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan
33	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial
33	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
35	RSUD. dr. Abdoer Rahem	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
39	Puskesmas Bungatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
39	Puskesmas Bungatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada RPJMD Kabupaten Situbondo terdapat **total 140 program**. Dari semua program tersebut, **109 program** telah **didukung oleh 585 layanan eksisting** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sisanya, sebanyak **31 program** masih **belum didukung layanan**. Sehingga, terdapat total **31 usulan layanan** pada Tabel 4.4. Usulan layanan tersebut ditujukan **untuk 12 OPD** yang memiliki program tanpa layanan pendukung. OPD yang memiliki usulan terbanyak adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yaitu dengan 8 usulan layanan.

4.4.3 Usulan Layanan Terhadap Usulan Aplikasi

Usulan aplikasi diambil dari hasil analisis dan survei terhadap OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa aplikasi usulan yang tidak memiliki layanan pendukung baik secara eksisting maupun usulan layanan yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya. Lebih jelasnya usulan layanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Usulan Layanan Terhadap Usulan Aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi usulan	Usulan layanan pendukung
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	e-Partner	Layanan pengelolaan kerjasama
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Layanan pelaporan kecamatan

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi usulan	Usulan layanan pendukung
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan	Layanan fasilitasi penyusunan RFK
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	Layanan aspirasi masyarakat
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-AGENDA	Layanan surat dan jadwal internal BAPPEDA
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Geospasial Pembangunan	Layanan informasi geospasial
18	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	Layanan administrasi keuangan BLUD
18	Dinas Kesehatan	SIMPUS	Layanan manajemen kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	layanan rumah Diggital UMKM
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata	Layanan Informasi destinasi pariwisata, akomodasi penginapan , Restoran.
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktifasi *Website* pariwisata.situbondokab.go.id	Layanan Informasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi *Checking* Kebutuhan	Layanan perencanaan anggaran DPUPR
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	Layanan kepegawaian aparatur pemerntah desa
33	Dinas Sosial	Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	Layanan manajemen data PKL pada DINSOS

Terdapat **usulan 14 layanan** terhadap 14 usulan aplikasi. Tabel 4.5 menunjukkan usulan layanan dan aplikasi tersebut ditujukan **untuk 10 OPD**. Usulan layanan diatas akan berjalan bersama dengan implementasi usulan aplikasi terkait.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 4
ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 4

ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Aplikasi SPBE 1
1.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE 1
1.3 Referensi Aplikasi SPBE 2
1.4 Ruang Lingkup 5
BAB 2 METODOLOGI 6
2.1 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE 6
2.2 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE 6
2.3 Analisis Usulan Aplikasi SPBE 6
2.3.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik 6
2.3.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual 7
2.3.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei 7
2.3.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan 7
2.3.5 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi 7
BAB 3 ARSITEKTUR APLIKASI SPBE 8
3.1 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE 8
3.2 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE 8
3.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik 11
3.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual 13
3.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei 23
3.6 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan 28
3.7 Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan 32
3.7.1 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama 32
3.7.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat 33

3.7.3 Bagian Hukum 34
3.7.4 Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 34
3.7.5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 35
3.7.6 Bagian Umum 35
3.7.7 Bagian Organisasi 36
3.7.8 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 36
3.7.9 Bagian Perencanaan dan Keuangan 37
3.7.10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 38
3.7.11 Inspektorat 38
3.7.12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 39
3.7.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 40
3.7.14 Badan Keuangan dan Aset Daerah 41
3.7.15 Badan Pendapatan Daerah 42
3.7.16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 42
3.7.17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43
3.7.18 Dinas Kesehatan 44
3.7.19 Dinas Ketenagakerjaan 45
3.7.20 Dinas Komunikasi dan Informatika 46
3.7.21 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 47
3.7.22 Dinas Lingkungan Hidup 48
3.7.23 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 49
3.7.24 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman 51
3.7.25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 53
3.7.26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 54
3.7.27 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 55
3.7.28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 56
3.7.29 Dinas Perhubungan 57
3.7.30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 58
3.7.31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 59
3.7.32 Dinas Peternakan dan Perikanan 60
3.7.33 Dinas Sosial 60

3.7.34 Satuan Polisi Pamong Praja 61
3.7.35 RSUD dr. Abdoer Rahem 62
3.7.36 Kecamatan Situbondo 63
3.7.37 Kecamatan Bungatan 64
3.7.38 Puskesmas Situbondo 64
3.7.39 Puskesmas Bungatan 65
3.7.40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 66
3.8 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE 67
BAB 4 DAFTAR USULAN APLIKASI SPBE 73
4.1 Daftar Usulan Aplikasi SPBE 73
4.2 Pengelompokan Usulan Aplikasi SPBE 82
4.2.1 Jumlah Aplikasi berdasarkan Jenis Pengembangan 82
4.2.2 Jumlah Aplikasi berdasarkan Fungsi Aplikasi 83
4.2.3 Jumlah Usulan Aplikasi berdasarkan Basis Aplikasi 84
4.2.4 Jumlah Aplikasi berdasarkan Penggunaan Aplikasi 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE 3
Tabel 1.2 Atribut Metadata Aplikasi SPBE 4
Tabel 3.1 Analisa *Gap* Aplikasi SPBE 8
Tabel 3.2 Usulan Aplikasi Layanan Administrasi dan Layanan Publik 11
Tabel 3.3 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual 14
Tabel 3.4 Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei 23
Tabel 3.5 Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan 28
Tabel 3.6 Usulan Aplikasi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama 32
Tabel 3.7 Usulan Aplikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat 33
Tabel 3.8 Usulan Aplikasi Bagian Hukum 34
Tabel 3.9 Usulan Aplikasi gian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 35
Tabel 3.10 Usulan Aplikasi Bagian Umum 36
Tabel 3.11 Usulan Aplikasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 36
Tabel 3.12 Usulan Aplikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan 37
Tabel 3.13 Usulan Aplikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 38
Tabel 3.14 Usulan Aplikasi Inspektorat 39
Tabel 3.15 Usulan Aplikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 39
Tabel 3.16 Usulan Aplikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 40
Tabel 3.17 Usulan Aplikasi Badan Keuangan dan Aset Daerah 41
Tabel 3.18 Usulan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah 42
Tabel 3.19 Usulan Aplikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 42
Tabel 3.20 Usulan Aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43
Tabel 3.21 Usulan Aplikasi Dinas Kesehatan 44
Tabel 3.22 Usulan Aplikasi Dinas Ketenagakerjaan 45
Tabel 3.23 Usulan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 46
Tabel 3.24 Usulan Aplikasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 47
Tabel 3.25 Usulan Aplikasi Dinas Lingkungan Hidup 48
Tabel 3.26 Usulan Aplikasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 49
Tabel 3.27 Usulan Aplikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman 51
Tabel 3.28 Usulan Aplikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 53
Tabel 3.29 Usulan Aplikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 54
Tabel 3.30 Usulan Aplikasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 55
Tabel 3.31 Usulan Aplikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 56
Tabel 3.32 Usulan Aplikasi Dinas Perhubungan 57

Tabel 3.33 Usulan Aplikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan....58
Tabel 3.34 Usulan Aplikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan....59
Tabel 3.35 Usulan Aplikasi Dinas Peternakan dan Perikanan....60
Tabel 3.36 Usulan Aplikasi Dinas Sosial....60
Tabel 3.37 Usulan Aplikasi Satuan Polisi Pamong Praja....61
Tabel 3.38 Usulan Aplikasi RSUD dr. Abdoer Rahem....62
Tabel 3.39 Usulan Aplikasi Kecamatan Situbondo....64
Tabel 3.40 Usulan Aplikasi Puskesmas Situbondo....64
Tabel 3.41 Usulan Aplikasi Puskesmas Bungatan....65
Tabel 3.42 Usulan Aplikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah....66
Tabel 3.43 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE....67
Tabel 4.1 Daftar Usulan Aplikasi SPBE....73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Aplikasi SPBE 2
Gambar 4.1 Persentase Aplikasi Berdasarkan Pengembangan 83
Gambar 4.2 Persentase Aplikasi Berdasarkan Fungsi Aplikasi 84
Gambar 4.3 Persentase Aplikasi Berdasarkan Basis Aplikasi 85
Gambar 4.4 Persentase Aplikasi Berdasarkan Pengguna Aplikasi 86

BAB 1
PENDAHULUAN

Pada buku ini menjelaskan terkait arsitektur aplikasi SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Pada bab satu ini akan membahas terkait pengertian aplikasi SPBE yang terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus, struktur aplikasi SPBE, referensi aplikasi SPBE, serta ruang lingkup bab 4 arsitektur aplikasi SPBE.

1.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah satu atau sekumpulan program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka, namun dalam kondisi tertentu dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE juga dapat menggunakan kode sumber tertutup, dengan syarat bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa Aplikasi SPBE dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aplikasi umum dan khusus. **Aplikasi umum** adalah aplikasi SPBE yang sama, standart, dan digunakan secara berbagai pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan, **aplikasi khusus** adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

1.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, substansi aplikasi SPBE diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkatan ke dalam tingkatan struktur arsitektur aplikasi SPBE, di antaranya:

a. Domain Aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. Area Aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Kategori Aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
d. Sub Kategori Aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Berikut **Gambar 1.1** merupakan ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE.

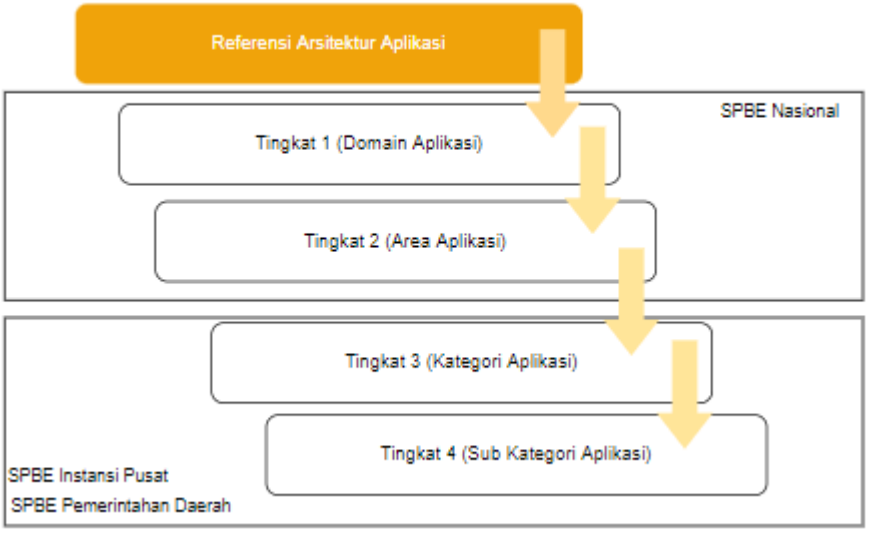

Gambar 1.1 Arsitektur Aplikasi SPBE

1.3 Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE merupakan proses menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara

terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.

Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi. Detail mengenai Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) akan dijabarkan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali. Berdasarkan surat edaran Kementrian PANRB Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, metadata aplikasi memiliki 21 atribut. Detail atribut metadata aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1.2 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisikan keterangan fungsi dan aplikasi terhadap layanan yang didukung
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10	*Supplier* Data	Merupakan identfikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	*Customer* Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (*Desktop*; Web; Cloud; atau *Mobile*).
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (*Open Source/Proprietary*).
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17	Kerangka	Kerangka atau framework yang digunakan

No.	Nama Atribut	Keterangan
	Pengembangan	oleh aplikasi.
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembangan	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
21	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata SPBE terkait.

1.4 Ruang Lingkup

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat enam domain, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE seperti halnya yang tertulis di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu domain akan di bahas pada buku ini yaitu Domain Aplikasi SPBE. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan pada domain Aplikasi SPBE.

- Identifikasi Referensi Aplikasi SPBE
- Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE
- Identifikasi *Gap* Aplikasi SPBE
- Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik
- Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual
- Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei
- Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan
- Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Pemetaan dari Tupoksi Masing-Masing OPD Terhadap Kelompok Urusan

BAB 2
METODOLOGI

Bab ini akan membahas terkait tahapan dalam perencanaan usulan domain aplikasi yang dimulai dari identifikasi metadata aplikasi dan *gap* aplikasi. Setelah itu dilanjutkan identifikasi usulan aplikasi yang dibagi menjadi 5 jenis dan identifikasi usulan integrasi aplikasi.

2.1 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE

Identifikasi metadata aplikasi eksisting SPBE dilakukan dengan tujuan untuk pendataan tentang aplikasi eksisiting yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Data eksisting aplikasi ini didapatkan dari hasil survei *online* dan survei lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen kondisi eksisting aplikasi SPBE beserta metadatanya secara lengkap dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo, BAB 6, Subbab 6.4 hingga Subbab 6.7.**

2.2 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE

Identifikasi *gap* atau kesenjangan diperoleh dari dokumen eksisting dan kondisi mendatang yang ingin dicapai. Dari kondisi eksisting didapatkan data aplikasi eksisting yang dipetakan ke dalam beberapa identifikasi yang dapat dilakukan. Pemetaan dilakukan berdasarkan Program Prioritas RPJMD Pemerintahan Kabupaten Situbondo, kondisi eksisting layanan, urusan hingga data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisis *gap* ini berfungsi agar dapat mengetahui program, data dan informasi, serta layanan yang belum didukung aplikasi. Kemudian, langkah terakhir yang dilakukan yaitu melakukan analisis usulan aplikasi untuk seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.3 Analisis Usulan Aplikasi SPBE

Penyusunan usulan aplikasi SPBE dibagi menjadi 5 jenis identifikasi ditambah dengan identifikasi usulan integrasi aplikasi. Penjelasan analisis usulan aplikasi secara detail sebagai berikut.

2.3.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik

Identifikasi ini didasari pada layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Hal ini ditentukan dengan melakukan pemetaan pada aplikasi eksisting. Pemetaan aplikasi eksisting dilakukan berdasarkan 10 layanan administrasi berbasis elektronik dan 14 layanan publik sektoral berbasis elektronik yang terdapat pada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut dapat ditentukan layanan mana yang operasionalnya sudah didukung aplikasi dan mana yang masih beroperasi secara manual.

2.3.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual merupakan proses pemetaan seluruh aplikasi eksisting yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Situbondo dipetakan dengan seluruh layanan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini bertujuan untuk mengetahui layanan mana yang belum didukung aplikasi, sehingga dapat diusulkan aplikasi untuk mendukung layanan manual tersebut.

2.3.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei merupakan usulan usulan aplikasi yang didapatkan dari hasil survei lapangan dengan wawancara bersama narasumber untuk masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Usulan hasil survei ini kemudian dipertimbangkan untuk menjadi rekomendasi usulan aplikasi SPBE karena dapat mewakili beberapa permasalahan dari masing-masing OPD yang telah disampaikan pada saat pengumpulan data.

2.3.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan pengembangan merupakan usulan aplikasi yang sebenarnya aplikasi tersebut sudah ada, namun dilakukan pengembangan dari aplikasi tersebut karena terdapat fitur yang perlu ditambahkan, serta penggabungan beberapa aplikasi untuk diusulkan menjadi satu kesatuan aplikasi yang terintegrasi.

2.3.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Pemetaan Dari Tupoksi Masing-Masing PD Terhadap Kelompok Urusan

Pada bagian ini dilakukan pemetaan tupoksi dari masing-masing OPD terhadap aplikasi SPBE eksisting, layanan, serta program RPJMD. Setiap OPD akan dipetakan berdasarkan urusan, bidang, serta seksinya. Pemetaan ini akan memenuhi *gap* mengenai bidang yang belum memiliki dukungan aplikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

2.3.6 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi

Identifikasi usulan integrasi aplikasi dilakukan dengan analisis aplikasi eksisting dan juga aplikasi usulan. Penentuan integrasi didasarkan pada kebutuhan aplikasi dan juga usulan dari kebutuhan OPD saat dilakukan survei.

BAB 3
ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Pada bab ini akan membahas mengenai arsitektur aplikasi SPBE secara rinci, dimulai dari identifikasi metadata aplikasi eksisting SPBE, Identifikasi *gap* Aplikasi SPBE, Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual, Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei, identifikasi usulan aplikasi berdasarkan pengembangan, dan Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan.

3.1 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE

Metadata aplikasi dianalisis berdasarkan Surat Edaran Kementerian PANRB No.18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dokumen ini dijadikan sebagai acuan dalam penerapan SPBE yang berkaitan dengan Aplikasi, maka di dalamnya terdapat metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadi suatu informasi yang mudah untuk dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali. Secara lebih detail metadata aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada **Lampiran 5.2 Metadata Aplikasi SPBE Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo.**

3.2 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE

Setelah analisis kondisi eksisting, dilakukan analisis *gap* untuk membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Kondisi ideal dari Arsitektur Aplikasi adalah seluruh Bidang dan Layanan yang ada pada masing-masing OPD didukung oleh aplikasi, sementara analisa *gap* dilakukan dengan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan bidang pada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu akan dilakukan pemetaan antara aplikasi yang ada dengan Layanan di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk penjabaran *gap* ini dapat dilihat pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1 Analisa *Gap* Aplikasi SPBE

Kode OPD	Nama OPD	GAP
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 9 layanan yang belum didukung

Kode OPD	Nama OPD	GAP
		aplikasi
3	Bagian Hukum	Terdapat 7 layanan yang belum didukung aplikasi
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Seluruh layanan dan Bidang belum didukung oleh aplikasi
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh layanan dan Bidang sudah didukung oleh aplikasi
6	Bagian Umum	Seluruh layanan dan Bidang belum didukung oleh aplikasi
7	Bagian Organisasi	Seluruh layanan dan Bidang sudah didukung oleh aplikasi
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Seluruh layanan dan Bidang belum didukung oleh aplikasi
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Terdapat 6 layanan yang belum didukung aplikasi
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terdapat 2 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
11	Inspektorat	Terdapat 1 layanan yang belum didukung aplikasi
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Terdapat 20 layanan yang belum didukung aplikasi
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat 5 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 17 layanan yang belum didukung aplikasi
15	Badan Pendapatan Daerah	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 9 layanan yang belum didukung aplikasi
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terdapat 1 layanan yang belum didukung aplikasi
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terdapat 10 layanan yang belum didukung aplikasi
18	Dinas Kesehatan	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 2 layanan yang belum didukung aplikasi
19	Dinas Ketenagakerjaan	Terdapat 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	GAP
		Terdapat 13 layanan yang belum didukung aplikasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terdapat 10 layanan yang belum didukung aplikasi
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Terdapat 6 layanan yang belum didukung aplikasi
22	Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 12 layanan yang belum didukung aplikasi
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 5 layanan yang belum didukung aplikasi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Terdapat 6 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 21 layanan yang belum didukung aplikasi
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terdapat 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 3 layanan yang belum didukung aplikasi
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Terdapat 5 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 4 layanan yang belum didukung aplikasi
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat 3 layanan yang belum didukung aplikasi
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat 25 layanan yang belum didukung aplikasi
29	Dinas Perhubungan	Terdapat 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 22 layanan yang belum didukung aplikasi
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terdapat 1 layanan yang belum didukung aplikasi
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Terdapat 26 layanan yang belum didukung aplikasi
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Terdapat 29 layanan yang belum didukung aplikasi
33	Dinas Sosial	Terdapat 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 3 layanan yang belum didukung aplikasi
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Terdapat 6 Bidang, 4 Bidang belum didukung oleh aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	GAP
		Terdapat 19 layanan yang belum didukung aplikasi
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Terdapat 13 layanan yang belum didukung aplikasi
36	Kecamatan Situbondo	Terdapat 6 Bidang, 5 Bidang belum didukung oleh aplikasi Terdapat 20 layanan yang belum didukung aplikasi

3.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik

Berdasarkan hasil *gap* layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa seluruh layanan administrasi dan layanan publik di Kabupaten Situbondo sudah didukung oleh aplikasi, namun terdapat **11 (sebelas) layanan publik sektoral** yang belum didukung oleh aplikasi yakni:

1. Pengajaran;
2. Tempat Tinggal;
3. Energi;
4. Sumber Daya Alam;
5. Sosial;
6. Koperasi;
7. Penanggulangan Bencana dan Linmas;
8. Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
9. Pemuda dan Olahraga;
10. Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
11. Pemadam Kebakaran.

Pada sub bab ini akan diusulkan aplikasi untuk mendukung layanan publik sektoral, usulan aplikasi berupa pengembangan untuk aplikasi eksisting sebelumnya dan usulan aplikasi baru yang dapat mendukung layanan publik dan administrasi yang masih manual. Detail usulan aplikasi pada layanan administrasi dan layanan publik dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Usulan Aplikasi Layanan Administrasi dan Layanan Publik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
Layanan Administrasi				
-	Tidak ada	Tidak ada usulan	Tidak ada	Tidak ada usulan

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
	usulan		usulan	
Layanan Publik				
-	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
Layanan Publik Sektoral				
1	Pengajaran	RAL 01.31 Pendidikan	Pengembangan Aplikasi PMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Aplikasi SISPENA	
2	Tempat Tinggal	RAL 01.20 Perumahan	SIM Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
3	Energi	RAL 01.37 Energi	SIM-SDA	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
4	Sumber Daya Alam	RAL 01.37 Energi	SIM-SDA	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		RAL 01.36 Pertambangan	Penggunaan SIPINTER	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
5	Sosial	RAL 01.26 Sosial	SISOS	Dinas Sosial
			SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	Bagian Umum
6	Koperasi	RAL 01.13 Koperasi	Pengembangan SIMKU	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
7	Penanggulangan	RAL 01.26 Sosial	Sistem	Badan

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
	Bencana dan Linmas		Informasi Kebencanaan (SIK)	Penanggulangan Bencana Daerah
		RAL 01.29 Keamanan	SI Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup
9	Cipta Karya dan Tata Ruang	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	e-RTTG	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
10	Pemadam Kebakaran	RAL 01.29 Keamanan	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.34 Pemuda	SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		RAL 01.35 Olahraga		

Berdasarkan **Tabel 3.2** terdapat total **14 (empat belas) usulan aplikasi** pada layanan publik sektoral. Dari 14 usulan aplikasi, 10 aplikasi merupakan aplikasi baru, 3 adalah usulan pengembangan ke aplikasi, dan 1 aplikasi adalah usulan penggunaan aplikasi dari OPD lain. Perlu diketahui bahwa layanan administrasi dan layanan publik pada bagian ini belum terdapat usulan aplikasi, dimana pada kondisi saat ini seluruh layanan eksisting telah memiliki aplikasi pendukung.

3.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual merupakan proses identifikasi layanan eksisting pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo yang belum didukung oleh aplikasi. Tujuan dari identifikasi ini yaitu untuk

memberikan usulan penggunaan aplikasi guna mendukung layanan eksisting yang masih manual. Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo terdapat total **425 (empat ratus dua puluh lima) layanan eksisting yang masih manual,** sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan aplikasi untuk mendukung layanan yang masih manual. Perlu diketahui bahwa usulan aplikasi tidak diberikan kepada seluruh layanan yang masih manual, hal ini menimbang adanya beberapa layanan manual yang operasionalnya tidak membutuhkan aplikasi sama sekali. Seperti contoh Layanan Pelatihan Anggota Linmas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, layanan tersebut merupakan layanan yang tidak membutuhkan aplikasi pendukung karena pelaksanaan layanan harus dilaksanakan secara langsung atau manual. Berkaitan dengan hal tersebut, sebanyak total 113 layanan manual tidak diberikan usulan aplikasi. Untuk sisanya yakni **312 (tiga ratus dua belas)** layanan diberikan usulan aplikasi dengan jumlah **95 (sembilan puluh lima) usulan aplikasi**. Dalam **satu usulan aplikasi dapat memuat beberapa layanan manual**. Dari total 95 usulan aplikasi yang mendukung layanan ini, terdapat **23 (dua puluh tiga) aplikasi baru** yang diusulkan untuk mendukung layanan manual, **2 (dua) aplikasi yang diaktifkan** dari aplikasi sebelumnya berstatus nonaktif, serta **3 (tiga) aplikasi penggunaan dari aplikasi milik OPD lain**. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SIM-IBRO	- Layanan hibah ormas; - Layanan hibah peribadatan; - Layanan peringatan hari besar keagamaan; - Layanan pembinaan rohani; - Layanan pelatihan SDM tempat peribadatan dan pendidikan agama; - Layanan isbat nikah; - Layanan Rukyatul Hilal; - Layanan hibah pendidikan agama; - Layanan akomodasi jamaah haji
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	SIM-SDA	- Layanan Pembinanan BUMD; - Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan; - Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			Pertambangan dan Lingkungan Hidup; - Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air; - Layanan Percepatan Akses Keuangan Daerah; - Layanan Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah; - Layanan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; - Layanan Pemaparan Informasi Mengenai Pembangunan; - Layanan Permintaan Data ke Setiap OPD; - Layanan Mencukupi Permintaan Data dari Provinsi
6	Bagian Umum	SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	- Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan; - Layanan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan; - Layanan administrasi umum; - Layanan Fasilitasi Peminjaman Ruang; - Layanan surat menyurat; - Layanan Hibah dan Bansos
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	*Website* BKPSDM	- Layanan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; - Layanan Pendokumentasian Dan Penyajian Informasi Kegiatan Bkpsdm Kabupaten Situbondo
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aktivasi SIMDA	- Layanan Penerimaan Uang Masuk; - Layanan Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (Tptgr); - Layanan Penyusunan Laporan Perbendaharaan; - Layanan Penyetoran Penerimaan Ke Kas Umum Daerah; - Layanan Penyusunan Laporan Rekapitulasi Dan

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			Evaluasi Dak;
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan)	- Layanan Penyusunan Draft Sk Bupati Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Pajak Atau Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga; - Layanan Penerimaan Laporan Penggunaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Pajak Atau Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Geospasial Pembangunan	- Layanan informasi geospasial
18	Dinas Kesehatan	E-Health Dinkes	- Layanan Rumah Pemulihan Gizi; - Layanan Pengurusan P-Irt - Layanan SEHATI - Layanan kesehatan primer - Layanan kesehatan lingkungan - Layanan Pencegahan penyakit menular
19	Dinas Ketenagakerjaan	SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	- Layanan Pembinan warga resettlemen; - Layanan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; - Layanan Perjanjian kerja (PKWTT); - Layanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; - Layanan Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang Ke Luar Negeri; - Layanan Transmigrasi
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi HelOPDesk	- Layanan Pusat Data (Hosting Aplikasi); - Layanan Pusat Data (Co-Location/Penempatan Server); - Layanan Pemanfaatan Dan Pengembangan Aplikasi E-

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			Government; - Layanan Pemeliharaan Dan Akses Data Center; - Layanan Perbaikan Jaringan Internal Kabupaten Situbondo; - Layanan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Aplikasi Dan Soft Program Komputerisasi
22	Dinas Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	- Layanan Uji Lab Lingkungan; - Layanan Prokasi (Program Kali Bersih); - Layanan Pengawasan Lingkungan; - Layanan Pemangkasan pohon; - Layanan pengaduan lingkungan hidup; - Layanan sosialisasi lingkungan hidup; - Layanan pembuatan AMDAL; - Layanan pembuatan UKL-UPL; - Layanan pembuatan SPPL; - Layanan Penerbitan Rekomendasi IPLC
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	E-Kontruksi	- Layanan Jasa Kontruksi Pemberdayaan; - Layanan Pengawasan Kontruksi
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Penggunaan SIPINTER	- Layanan Retribusi Pemanfaatan Lahan; - Layanan Pemanfaatan Alat Berat; - Layanan Sewa Lahan, Rumah Dinas Dan Kios - Layanan Pemberian Rekomendasi Penambangan Bahan Galian C Untuk Ijin Pertambangan Rakyat; - Layanan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	SIM Perumahan	- Layanan Perumahan ; - Layanan Permukiman Kumuh

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
	Permukiman		
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIMVEST	- Layanan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Investasi; - Layanan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; - Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
29	Dinas Perhubungan	Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	- Layanan Rekomendasi Ijin Trayek Angkutan Perkotaan/Pedesaan; - Layanan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Perkotaan/Pedesaan; - Layanan Rekomendasi Ijin Usaha Angkutan; - Layanan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Usaha Angkutan Barang/Orang Berbadan Hukum; - Layanan Rekomendasi Ijin Isidentil; - Layanan Rekomendasi Ijin Operasi; - Layanan Ijin Angkutan Khusus; - Layanan Rekomendasi Ijin Angkutan Pariwisata; - Layanan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Angkutan Pariwisata; - Layanan Ijin Peremajaan Angkutan Barang/Orang; - Layanan Perpanjangan Izin Angkutan Khusus; - Layanan Pembuatan Kartu Asuransi Juru Parkir - Layanan Penerbitan Rekomendasi Pengguna Badan Jalan Kebupaten/Kota;
29	Dinas Perhubungan	Penggunaan SIMPADA	- Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Berlangganan Dan Konvensional); - Layanan Pemungutan Retribusi Parkir;

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
29	Dinas Perhubungan	SITRANS	- Layanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Jangkar; - Layanan Jasa Pelabuhan Besuki/Kalbut; - Layanan Jasa Terminal Tipe C (Besuki); - Layanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Jangkar; - Layanan Jasa Pelabuhan Besuki/Kalbut (Pas Masuk Orang/Kendaraan)
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SRIKANDI	- Layanan Restorasi Arsip - Layanan Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan)	- Layanan Pelaksanaan Sekolah Lapang; - Layanan Pemantauan Jenis Komoditas Pangan Strategis; - Layanan Penanganan Lumbung Pangan; - Layanan Analisa Jenis Bahan Pangan; - Layanan Uji Bahan Pangan Segar; - Layanan Analisa Jenis Kelompok Bahan Pangan; - Layanan Penanganan Desa Rawan Pangan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI Nelayan	- Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya; - Layanan Pemberdayaan Nelayan Kecil; - Layanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); - Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya; - Layanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan ; - Layanan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan - Layanan Pembinaan Kepada Kelompok Pengolahan Dan

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			Pemasaran Hasil Perikanan; - Layanan Kampanye Gemar Makan Ikan - Layanan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil; - Layanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; - Layanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul ; - Layanan Pendampingan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan; - Layanan Pendampingan Kesehatan Perikanan Budidaya; - Layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Hama Penyakit Perikanan Budidaya; - Layanan Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat; - Layanan Pengembangan Teknologi Perbenihan Dan Budidaya Perikanan
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI-Ternak	- Layanan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak; - Layanan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular ; - Layanan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ; - Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner; - Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; - Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan; - Layanan Pemotongan

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			Ternak Di Rumah Potong Hewan; - Layanan Bimbingan Teknis Peternakan; - Layanan Pembentukan Kelembagaan Peternakan; - Layanan Permohonan Bantuan Hibah Ib; - Layanan Surat Keterangan Layak Bibit
33	Dinas Sosial	SISOS	- Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS; - Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial; - Layanan Pemberian Bantuan kepada Fakir Miskin
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Si Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	- Layanan Pengawalan dan Pengamanan; - Layanan Sosialisasi ; - Layanan Operasi PNS dan Siswa; - Layanan Penindakan Hiburan dan Hotel; - Layanan Pengamanan Pimpinan Daerah; - Layanan Pemberantasan PKL; - Layanan Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba; - Layanan Operasi Gabungan Trantib ; - Layanan Penertiban Ijin Ho, Imb Dan Reklame; - Layanan Pengamanan Hari Besar Agama Dan Hari Besar Nasional; - Layanan Operasi Rutin Pkl,Orgil,Gepeng Dan Anjal /Punk; - Layanan Monitoring Dan Evaluasi Anggota Sat Pol Pp Dan Pmk Kabupaten Situbondo; - Layanan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kopeltib Kab Situbondo;

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			- Layanan Pembinaan Fisik / Samapta; - Layanan Patroli Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
34	Satuan Polisi Pamong Praja	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	- Layanan Call Center Pemadam dan Penyelamatan
36	Kecamatan Situbondo	Penggunaan SP4N LAPOR	- Layanan Pengaduan Pe-Layanan
38	Puskesmas Situbondo	SIMPUS	- Layanan Penanganan Terpadu; - Layanan Terpadu Dbd ; - Layanan Rujukan; - Layanan Kesehatan Anak Usia Remaja; - Layanan Kesehatan Jiwa; - Layanan Kesehatan Tradisional; - Layanan Kesehatan Olahraga; - Layanan Kesehatan Indera; - Layanan Kesehatan Lansia; - Layanan Kesehatan Kerja; - Layanan Kesehatan Matra; - Layanan HIV; - Layanan Ispa Diare; - Layanan DOPD; - Layanan Kesehatan Pada penderita Kusta - Layanan Canting Oma; - Layanan Konsling Gizi dan Laktasi; Lyanan Keperawatan Masyarakat; - Layanan Program Gizi; - Layanan Refreshing Simulasi Bantuan Hidup Dasar dan kegawatdaruratan; - Layanan untuk Peningkatan kapasitas SDM manajemen fasilitas kesehatan dan kesehatan kerja; - Layanan Refreshing tentang pengobatan rasional; - Layanan Peningkatan Pengetahuan SDM tentang PPI (Pengendalian dan

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi Pendukung Usulan	Layanan Eksisting
			Pencegahan Penyakit Inveksi); - Layanan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Keselamatan Pasien; - Layanan Peningkatan Manajemen untuk Puskesmas; - Layanan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pencegahan Penyakit tidak menular
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	- Layanan kedaruratan dan bantuan logistik; - Layanan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana; - Layanan Informasi Peringatan Dini - Layanan kaji cepat kejadian bencana

Pada Tabel 3.3 didapatkan **usulan 28 (dua puluh delapan) aplikasi untuk 21 OPD** di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Aplikasi pada Tabel 3.3 merupakan aplikasi baru, aktivasi aplikasi lama, dan penggunaan aplikasi dari OPD lain untuk layanan manual yang tidak diusulkan aplikasi oleh OPD dan bukan merupakan pengembangan dari aplikasi yang telah ada.

3.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei merupakan proses identifikasi usulan aplikasi yang didapatkan dari hasil survei pada masing-masing OPD di Pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk mendukung layanan pada OPD tersebut. Pada usulan aplikasi, dalam satu aplikasi dapat memuat beberapa layanan. Dari hasil penggabungan dan survei yang telah dilakukan maka didapatkan usulan aplikasi pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	e-Partner	Aplikasi yang memfasilitasi pelaksanaan kerjasama
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	untuk menilai proses penyelenggaraan dikecamatan
1	Bagian Tata	Penggunaan Sipesat	Aplikasi untuk mendukung

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
	Pemerintahan dan Kerja Sama		pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan di kecamatan, publikasi PAW DPRD dan dokumentasi pelantikan bupati/wakil bupati
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan	Aplikasi yang menyediakan layanan untuk OPD agar dapat menyusun laporan RFK melalui aplikasi dan membantu bagian perekonomoian dalam melihat laporan yang di kirimkan dari OPD
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	Aplikasi layanan kritik dan saran dari masyarakat
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI JAPIN	Sistem Informasi Jadwal Pimpinan, aplikasi yang mencatatat jadwal agenda pimpinan
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Masda	Aplikasi untuk memudahkan penginputan data mutasi barang dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi SIRKA	Aplikasi laporan rincian fisik keuangan lingkup sekda
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Sakip	Aplikasi laporan kinerja instansi pemerintah lingkup sekda
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	E-Risalah	Aplikasi berbasis *mobile* dan *Website* yang mana didalamnya mencakup seluruh Ringkasan kegiatan rapat DPRD
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	*Website* Internal DPRD	Aplikasi *Website* DPRD yang bersikan seluruh Informasi dan UOPDate berita terkait DPRD
11	Inspektorat	AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)	Aplikasi AlaKO digunakan untuk media konsultasi Inspektorat dengan OPD/Kecamatan/Desa terkait Pengawasan
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIAP - SIAKSI	Aplikasi untuk pengelolaan dan pelaporan presensi pegawai serta perhitungan tunjangan berdasarkan presensi pegawai
12	Badan	SIDAK	Aplikasi untuk mengelola

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
	Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		informasi pegawai di Pemerintah Kabupaten Situbondo
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-AGENDA	Aplikasi digunakan untuk pengarsipan surat masuk dan keluar, jadwal internal BAPPEDA dan SPOPD
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian Online	Aplikasi antrian online digunakan oleh pemohon agar memudahkan pemohon untuk mengetahui no antrian yang sedang di layani ketika pemohon meninggalkan kantor dispendukcapil situbondo disaat pemohon telah mendapatkan nomor antrian.
18	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	Manajemen Keuangan Puskesmas dan laborat BLUD
18	Dinas Kesehatan	SIMPUS	Sistem Informasi Puskesmas: Digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset TIK Kabupaten Situbondo	Untuk mengelola aset TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, memantau penggunaan anggaran OPD untuk aset TIK. Terintegrasi dengan aplikasi e-masda
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	Sebagai katalog Online UMKM di Kabupaten Situbondo
22	Dinas Lingkungan Hidup	Sipesah v.2 *Mobile*	Pelaporan sampah yang mudah diakses melalui aplikasi android HP dan sistem pelaporan yang mudah
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan *website* TIC)	Aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola data kunjungan wisata bagi pengelola tempat wisata
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	SIPORA adalah sistem informasi pengelolaan data kepemudaan dan olah raga yang meliputi pengelolaan paskibra, kepramukaan, dan kompetensi olah raga, seta data atlit.
23	Dinas	Aktifasi *Website*	*Website* pariwisata adalah

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
	Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	pariwisata.situbondokab.go.id	*website* yang menyediakan informasi mengenai pariwisata, pemuda dan olahraga
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	Mendapatkan laporan keluhan pada jalan dan jembatan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	Data jalan dan jembatan yang didapat dari survei diubah menjadi peta berformat shf (shapefile). Data tersebut nantinya memuat nomor, nama, dan panjang, koordinat ruas, dll. Peta berformat shf dikonversi menjadi file kmz agar dapar dibuka di Google earth baik melalui PC atau android.
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-RTTG	Optimalisasi pelayanan air irigasi. Pengendalian Pemanfaatan dan daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah. Mengetahui titik lokasi kerusakan terkini pada wilayah sungai, pantai, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah. Mengetahui titik lokasi kerusakan terkini pada wilayah sungai, pantai, bendung, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Checking Kebutuhan	Checking kebutuhan kegiatan dan anggaran
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	Data persebaran kegiatan operasi dan pemeliharaan Dinas. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Dinas
24	Dinas Pekerjaan Umum dan	Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu	Untuk mengetahui aset DPUPP dan aset Pendapatan Asli

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
	Perumahan Permukiman	Inventaris Barang	Daerah
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	Kemudahan administrasi dalam pembuatan SPJ yang masih bersifat manual. Di dalamnya juga terdapat fitur verifikasi berkas spj yang sudah diverifikasi oleh verifikator keuangan sebelum diserahkan ke bendahara pengeluaran, sehingga memudahkan dalam proses verifikasi berkas spj dan pencairan. dan juga bisa digunakan untuk mengetahui realisasi anggaran pada setiap bidang
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	Aplikasi untuk menyimpan data profil lembaga kemasyarakatan desa, data perangkat desa dan data anggota BPD. Untuk mempermudah pencarian data-data lembaga kemasyarakatan desa, perangkat desa dan anggota BPD.
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Antrian	Digunakan untuk pengaturan antrian di tempat pelayanan (MPP Kab Situbondo)
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TAJINPALAPPA	Digunakan untuk aset Kearsipan yang direncanakan dapat terintegrasi dengan OPD lain.
33	Dinas Sosial	Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	Untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi tentang pelayanan sosial
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	REKAM MEDIS ELEKTRONIK	Pencatatan rekam medis pasien secara elektronik untuk menggantikan kertas, sesuai peraturan kementrian kesehatan untuk semua faskes paling lambat akhir 2023 untuk implementasi RME
39	Puskesmas Bungatan	SIMPUS	untuk mengintegrasikan laporan bulanan dan uOPDate secara berkala pada *website* puksesmas
40	Badan Penanggulangan	Aplikasi Laporan Kejadian Bencana	Aplikasi yang dapat mengakomodir laporan

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
	Bencana Daerah		kejadian bencana oleh masyarakat
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	Sistem yang dapat Mendukung Pengelolaan Gudang Logistik BPBD

Dari Tabel 3.4 didapatkan **total 35 (tiga puluh lima) aplikasi baru dan 4 (empat) aplikasi bagi pakai dengan OPD lain dari hasil survei** untuk 22 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Aplikasi pada Tabel 3.4 merupakan aplikasi hasil survei yang bukan pengembangan dari aplikasi yang telah ada.

3.6 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan pengembangan merupakan usulan pengembangan aplikasi pada aplikasi eksisting di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari pengembangan aplikasi tersebut yaitu agar penggunaan aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo lebih efisien dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada, dan dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung beberapa layanan yang masih manual. Sehingga dengan adanya pengembangan aplikasi, tidak memperbanyak penggunaan aplikasi lain. Detail lengkap usulan pengembangan aplikasi dapat dilihat pada **Tabel 3.5**. Layanan yang tertera pada Tabel 3.5 merupakan layanan yang akan ditambahkan pada pengembangan aplikasi tersebut.

Tabel 3.5 Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

No	Nama OPD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
3	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	Pengembangan Aplikasi JDIH dengan Fitur Scan Barcode untuk Autentifikasi Produk Hukum Daerah serta Tracking Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah
11	Inspektorat	Pengembangan E-Matrik	Penambahan fitur yang membantu layanan monitoring dan evaluasi
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan aplikasi SIDAT	Penambahan fitur pendataan dan publikasi forum kerukunan umat beragama
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda)	Penambahan fitur yang dapat mendukung layanan seputar surat-menyurat, penataan inventaris barang milik daerah, serta retribusi

No	Nama OPD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			pemakaian kekayaan daerah
15	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan E-PDL	Penambahan fitur untuk mendukung layanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih dilaksanakan secara *offline*
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Aplikasi SILAO	Penambahan Dashboard utk mengetahui laporan pendaftar, penambahan fitur-fitur administrasi seputar kependudukan yang masih beroperasional secara *offline*
19	Dinas Ketenagakerjaan	Pengembangan Web Disnaker	Penambahan fitur program pelatihan kerja, pelatihan kerja BKK dan BLKK, serta pengajuan pendirian LPK
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SDTIK	Aplikasi juga mendata seluruh sub domain serta sistem keamanan firewall yang di kelola diskominfo ke dalam aplikasi ini
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SINEWS	Menambahkan publikasi dan pendataan konten negatif media sosial atau media elektronik dalam aplikasi ini
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan/upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	Pengembangan aplikasi e-surat dan penambahan fitur e-sign untuk pengajuan tandatangan elektronik sebagai keperluan instansi Pemerintah Daerah
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIMKU	Penambahan fitur pendataan pusat oleh-oleh khas situbondo, pendataan gudang hasil panen petani, pendataan retribusi pelayanan pasar, pendataan ekspor dan impor, serta pendataan pameran produk kerajinan dan industri rumah tangga
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIPENAMAS	Penambahan fitur pendataan pengawasan kemetrologian
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktivasi dan pengembangan *Website* TIC	Penggunaan kembali aplikasi TIC sebagai pusat informasi pariwisata,

No	Nama OPD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			pendataan pengunjung, dan penambahan dukungan layanan pengembangan destinasi sumber daya pariwisata
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan Data Desa Center	Penambahan fitur pendataan dana desa
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pengembangan Pakem Situbondo	Penambahan fitur layanan pengelolaa data gender dan anak serta pengaduan tindak langsung korban kekerasan
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan SIPINTER	Perluasan ijin yang disediakan di dalam aplikasi SIPINTER, penambahan perizinan yang masih manual di dinas terkait yang berujung ke dpmptsp seperti izin praktik infusi darah
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi PMP	Penambahan fitur pendataan fasilitasi diklat calon kepala sekolah, asesmen kepala sekolah dan pengembangan PTK
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sebaya	Penambahan fitur agar mendukung pendataan layanan terkait budaya dan kesenian yang masih dijalankan secara *offline*
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi SISPENA	Penambahan fitur pendataan layanan-layanan berkaitan dengan PAUD yang sebelumnya masih terdata secara manual menjadi terdata secara online
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi	Penambahan fitur yang dapat mendkung layanan izin operasional lembaga/sekolah
29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	Penambahan fitur pendataan pengujian kendaraan bermotor secara online
29	Dinas Perhubungan	Pengembangan *Website*	Penambahan fitur

No	Nama OPD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
		Dishub	pendataan pinjam buku data perhubungan secara online
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Tali Pusar	Penambahan fitur pendataan restorasi dan perbaikan arsip desa
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan *Website* Satpol PP	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Aplikasi SIMRS	Penambahan fitur pendataan rujukan pasien RSAR dan pendataan jenazah
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi	Merupakan sistem informasi untuk mengelola data kefarmasian. Aplikasi diorganisir untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Aplikasi memiliki fitur pemesanan obat dan alat kesehatan ke supplier, penerimaan obat dan alat kesehatan dari supplier, pendataan lokasi obat dan alat kesehatan, penjualan obat dan alat kesehatan pakai resep, rekapitulasi penjualan obat dan alat kesehatan, dan rekapitulasi sisa obat dan alat kesehatan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan simesem	Pengembangan di kegiatan pemantauan bumil risiko tinggi
38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan sikda *mobile*	Pengembangan sikda *mobile*

Pada Tabel 3.5 Terdapat **total 28 (dua puluh delapan) usulan pengembangan aplikasi** yang dijabarkan. Usulan pengembangan aplikasi tersebut ditujukan untuk total 19 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten

Situbondo. Usulan pengembangan aplikasi ini didapatkan baik dari hasil survei ataupun hasil analisis dari layanan manual yang ada.

3.7 Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan

Setelah pelaksanaan identifikasi pad subbab 3.3-3.6 didapatkan **total 95 (sembilan puluh lima) usulan aplikasi.** Usulan aplikasi tersebut terdiri dari **28 (dua puluh delapan) usulan yang berasal dari hasil analisis layanan manual, 39 (tiga puluh sembilan) usulan aplikasi dari hasil survei, dan 28 (dua puluh delapan) usulan pengembangan aplikasi**. Data usulan yang dihasilkan, dipetakan ke dalam identifikasi bidang, program, layanan, dan aplikasi eksisting. Identifikasi dilakukan dengan melakukan pemetaan urusan, serta tupoksi pada masing-masing OPD untuk menghasilkan data dan informasi. Sebelumnya, aplikasi eksisting harus dipetakan terlebih dulu pada pemetaan data dan informasi yang telah di lakukan. Tujuannya agar aplikasi yang di usulkan nantinya tidak tumpang tindih dengan aplikasi eksisting yang dimiliki masing-masing OPD. Selain itu, identifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan hingga bidang dapat didukung oleh aplikasi. Hasilnya dapat melihat bidang mana yang telah didukung aplikasi dan bidang mana yang belum didukung penggunaan aplikasi.

Hasil identifikasinya menghasilkan keseluruhan usulan aplikasi untuk seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan pemetaan usulan aplikasi di setiap OPD dengan **total usulan aplikasi sejumlah 95 (sembilan puluh lima) aplikasi**. Pembahasan usulan aplikasi akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

3.7.1 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Berdasarkan urusan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama memiliki total 4 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **2 (dua) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu e-Partner, Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, dan Penggunaan Sipesat. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Usulan Aplikasi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
e-Partner	Aplikasi yang memfasilitasi pelaksanaan kerjasama	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi	*Website*	Seluruh OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		Pemerintahan		
Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	untuk menilai proses penyelenggaraan dikecamatan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
Penggunaan Sipesat	pelayanan administrasi terpadu kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan di kecamatan, publikasi PAW DPRD dan dokumentasi pelantikan bupati/wakil bupati	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.6**, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama diusulkan untuk memiliki **1 (dua) Aplikasi Layanan Publik** dan **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Seluruh OPD** dan **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.7.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan urusan, Bagian Kesejahteraan Rakyat menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki total 10 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **9 (sembilan) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Kesejahteraan Rakyat, maka diusulkan untuk membangun **1 (satu) aplikasi**, yaitu SIM-IBRO. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Usulan Aplikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIM-IBRO	SIM-IBRO (Sistem Infromasi Manajemen Peribadatan dan Kerohanian) merupakan sistem informasi yang membantu dalam pengelolaan dan manajemen program hibah, kerohanian, dan peribadatan.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.7**, Bagian Kesejahteraan Rakyat diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3.7.3 Bagian Hukum

Berdasarkan urusan, Bagian Hukum menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Hukum memiliki total 11 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **7 (tujuh) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Hukum, maka diusulkan untuk mengembangkan **1 (satu) aplikasi**, yaitu Pengembangan JDIH. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3.8 Usulan Aplikasi Bagian Hukum

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan JDIH	Pengembangan Aplikasi JDIH dengan Fitur Scan Barcode untuk Autentifikasi Produk Hukum Daerah serta Tracking Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.8**, Bagian Hukum diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Bagian Hukum.

3.7.4 Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan urusan, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam memiliki total 10 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **10 (sepuluh) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam juga memiliki **3 (tiga) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Saat ini, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam belum memiliki aplikasi eksisting. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu SIM-SDA serta Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Usulan Aplikasi gian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIM-SDA	SIM-SDA (Sistem Informasi Monitoring Sumber Daya Alam dan Energi) merupakan sistem yang berperan dalam manajemen dan pengawasan SDA dan Energi pada Pemerintah Daerah Berfungsi juga sebagai media permintaan data oleh pihak berkepentingan, serta pendataan rapat koordinasi	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan	Aplikasi yang menyediakan layanan untuk OPD agar dapat menyusun laporan RFK melalui aplikasi dan membantu bagian perekonomoian dalam melihat laporan yang di kirimkan dari OPD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Semua OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.9**, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD** serta **semua OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

3.7.5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan urusan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki total **5 (lima) Layanan** yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD, tidak ada layanan yang masih beroperasi secara manual. Oleh karena itu, setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, maka **belum diusulkan** untuk membangun maupun mengembangkan aplikasi.

3.7.6 Bagian Umum

Berdasarkan urusan, Bagian Umum menangani urusan Sekretariat Daerah. Bagian Umum memiliki total 6 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **6 (enam) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Bagian Umum juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Umum, maka

diusulkan untuk membangun **1 (satu) aplikasi**, yaitu SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10 Usulan Aplikasi Bagian Umum

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	SIM-BU merupakan aplikasi yang membantu pendataan layanan yang berjalan di Bagian Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.10**, Bagian Umum diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Bagian Umum.

3.7.7 Bagian Organisasi

Berdasarkan urusan, Bagian Organisasi menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Organisasi memiliki total **5 (lima) Layanan** yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, tidak ada layanan yang masih beroperasi secara manual. Sehingga setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Organisasi, maka **belum diusulkan** untuk membangun maupun mengembangkan aplikasi.

3.7.8 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Berdasarkan urusan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki total 3 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **3 (tiga) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Saat ini Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum memiliki aplikasi eksisting. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu Aplikasi Saran dan kiritikan serta SI JAPIN. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Usulan Aplikasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Saran	Aplikasi layanan kritik dan	RAA.01.01	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
dan kiritikan	saran dari masyarakat	Aplikasi Layanan Publik		
SI JAPIN	Sistem Informasi Jadwal Pimpinan, aplikasi yang mencatatat jadwal agenda pimpinan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.11**, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3.7.9 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan urusan, Bagian Perencanaan dan Keuangan menangani urusan **Sekretariat Daerah**. Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki total 9 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **6 (enam) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Saat ini Bagian Perencanaan dan Keuangan belum memiliki aplikasi eksisting. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Bagian Perencanaan dan Keuangan, maka diusulkan untuk menggunakan **3 (tiga) aplikasi**, yaitu Penggunaan Aplikasi E-Masda, Penggunaan Aplikasi SIRKA, serta Penggunaan Aplikasi E-Sakip. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Usulan Aplikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Penggunaan Aplikasi E-Masda	Untuk memudahkan penginputan data mutasi barang dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Penggunaan Aplikasi SIRKA	Aplikasi laporan rincian fisik keuangan lingkup sekda	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Penggunaan Aplikasi E-Sakip	Aplikasi laporan kinerja instansi pemerintah lingkup sekda	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.12**, Bagian Perencanaan dan Keuangan diusulkan untuk memiliki **3 (tiga) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi.

3.7.10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan urusan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menangani urusan **Sekretariat DPRD**. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki total 5 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **2 (dua) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki **1 (satu) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu E-Risalah dan *Website* Internal DPRD. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Usulan Aplikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-Risalah	Aplikasi berbasis *mobile* dan *Website* yang mana didalamnya mencakup seluruh Ringkasan kegiatan rapat DPRD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *Mobile*	Internal OPD
Website Internal DPRD	Aplikasi *Website* DPRD yang bersikan seluruh Informasi dan UOPDate berita terkait DPRD	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.13**, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***Mobile***. Pengguna aplikasi yakni **Internal OPD** dan **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.7.11 Inspektorat

Berdasarkan urusan, Inspektorat menangani urusan **Inspektorat Daerah**. Inspektorat memiliki total 9 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **1 (satu) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Inspektorat, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua)**

aplikasi, yaitu AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online) dan Pengembangan E-Matrik. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.14.**

Tabel 3.14 Usulan Aplikasi Inspektorat

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)	Aplikasi AlaKO digunakan untuk media konsultasi Inspektorat dengan OPD/Kecamatan/Desa terkait Pengawasan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Pengembangan E-Matrik	Penambahan fitur yang membantu layanan monitoring dan evaluasi	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.14,** Inspektorat diusulkan untuk **memiliki 1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** serta pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Inspektorat.

3.7.12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Berdasarkan urusan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia menangani urusan **Kepegawaian**, **Pendidikan Dan Pelatihan**. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia memiliki total 43 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **20 (dua puluh) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu SIAP - SIAKSI, SIDAK, dan *Website* BKPSDM. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.15 Usulan Aplikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIAP - SIAKSI	Aplikasi untuk pengelolaan dan pelaporan presensi pegawai serta perhitungan tunjangan berdasarkan presensi pegawai	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIDAK	Aplikasi untuk mengelola informasi pegawai di Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
Website BKPSDM	Pembuatan *website* BKPSDM untuk mendukung layanan survei kepuasan masyarakat dan dokumentasi serta publikasi kegiatan BKPSDM	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.15**, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Seluruh OPD** dan **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

3.7.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan urusan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menangani urusan **Kesatuan Bangsa Dan Politik**. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki total 6 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **3 (tiga) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka diusulkan untuk mengembangkan **1 (satu) aplikasi**, yaitu Pengembangan aplikasi SIDAT. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3.16 Usulan Aplikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan aplikasi SIDAT	Penambahan fitur pendataan dan publikasi forum kerukunan umat beragama	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.16**, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.7.14 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan urusan, Badan Keuangan dan Aset Daerah menangani urusan **Keuangan**. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki total 28 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **17 (tujuh belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki **1 (satu) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu Aktivasi SIMDA, SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan), dan Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.17**.

Tabel 3.17 Usulan Aplikasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aktivasi SIMDA	SIMDA merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan)	SIM BanKeu adalah sistem informasi yang menunjang pencairan bantuan keuangan (sosial, dana bos, dan sejenis).	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda)	Penambahan fitur yang dapat mendukung layanan seputar surat-menyurat, penataan inventaris barang milik daerah, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.17**, Badan Keuangan dan Aset Daerah diusulkan untuk memiliki **3 (tiga) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Seluruh OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3.7.15 Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan urusan, Badan Pendapatan Daerah menangani urusan **Keuangan**. Badan Pendapatan Daerah memiliki total 16 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **9 (sembilan) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah, maka diusulkan untuk mengembangkan **1 (satu) aplikasi**, yaitu Pengembangan E-PDL. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.18.**

Tabel 3.18 Usulan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan E-PDL	Penambahan fitur untuk mendukung layanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih dilaksanakan secara *offline*	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *Mobile*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.18**, Badan Pendapatan Daerah diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***Mobile*** serta pengguna aplikasi yakni **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Pendapatan Daerah.

3.7.16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan urusan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menangani urusan **Perencanaan**, **Penelitian Dan Pengembangan.** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki total 12 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **2 (dua) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu E-AGENDA dan Aplikasi Geospasial Pembangunan. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.19.**

Tabel 3.19 Usulan Aplikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-AGENDA	Aplikasi digunakan untuk pengarsipan surat masuk dan keluar, jadwal	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi	*Website*	Internal OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	internal BAPPEDA dan SPOPD	Pemerintahan		
Aplikasi Geospasial Pembangunan	Aplikasi ini akan menyajikan data geospasial terkait pembangunan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara umum.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.19**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD.** Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.7.17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan urusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani urusan **Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki total 24 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **11 (sebelas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu Antrian Online dan Pengembangan Aplikasi SILAO. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

Tabel 3.20 Usulan Aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Antrian Online	Aplikasi antrian online digunakan oleh pemohon agar memudahkan pemohon untuk mengetahui no antrian yang sedang di layani ketika pemohon meninggalkan kantor dispendukcapil situbondo disaat pemohon telah mendapatkan nomor antrian.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Pengembangan Aplikasi SILAO	Penambahan Dashboard utk mengetahui laporan	RAA.01.02 Aplikasi	*Website*	Internal OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	pendaftar, penambahan fitur-fitur administrasi seputar kependudukan yang masih beroperasional secara *offline*	Administrasi Pemerintahan		

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.20**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.7.18 Dinas Kesehatan

Berdasarkan urusan, Dinas Kesehatan menangani urusan **Kesehatan**. Dinas Kesehatan memiliki total 15 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **12 (dua belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Kesehatan, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu E-Health Dinkes, Sistem Informasi Keuangan BLUD, dan SIMPUS. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21 Usulan Aplikasi Dinas Kesehatan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-Health Dinkes	Aplikasi untuk mendukung layanan terkait pemulihan gizi dan pengurusan P-IRT, Pengurusan layak higien, pengurusan klaim pembiayaan kesehatan gratis, telemedicine, early warning system (penyakit menular)	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website* dan *mobile*	Internal OPD dan Publik
Sistem Informasi Keuangan BLUD	Manajemen Keuangan Puskesmas dan laborat BLUD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD dan UPT terkait
SIMPUS	Sistem Informasi Puskesmas: Digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *mobile*	Internal OPD dan UPT terkait

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.21**, Dinas Kesehatan diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***mobile*** serta pengguna aplikasi yakni **Internal OPD, Publik**, dan **UPT terkait**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Kesehatan.

3.7.19 Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan urusan, Dinas Ketenagakerjaan menangani urusan **Tenaga Kerja, Transmigrasi**. Dinas Ketenagakerjaan memiliki total 21 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **14 (empat belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga memiliki **1 (satu) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Ketenagakerjaan, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu Pengembangan Web Disnaker dan SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.22**.

Tabel 3.22 Usulan Aplikasi Dinas Ketenagakerjaan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Web Disnaker	Penambahan fitur program pelatihan kerja, pelatihan kerja BKK dan BLKK, serta pengajuan pendirian LPK	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	SIM-TKK adalah sistem informasi manajemen transmigrasi dan tenaga kerja. Sistem ini mendukung pelaksanaan pendataan terkait transmigrasi yang meliputi pencatatan penyelesaian dan mediasi permasalahan ketenaga kerjaan, penctatan mitra kerjasama, pencatatan perjanjian kerja, informasi kompensi, dan hal lainnya yang terkait ketenaga kerjaan dan transmigrasi.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.22**, Dinas Ketenagakerjaan diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Ketenagakerjaan.

3.7.20 Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan urusan, Dinas Komunikasi dan Informatika menangani urusan **Komunikasi Dan Informatika**, **Statistik, dan Persandian**. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki total 22 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **11 (sebelas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika, maka diusulkan untuk membangun atau mengembangkan **5 (lima) aplikasi**, yaitu Aplikasi HelOPDesk, Aset TIK Kabupaten Situbondo, Pengembangan SDTIK, Pengembangan SINEWS, dan Pengembangan/upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.23**.

Tabel 3.23 Usulan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi HelOPDesk	Aplikasi helOPDesk adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pintu untuk memberikan layanan penyelesaian masalah pada pemerintah daerah oleh Diskominfo. Perangkat daerah akan mengirim pertanyaan atau menyampaikan masalah/kendala melalui sistem ini kepada diskominfo.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Aset TIK Kabupaten Situbondo	Untuk mengelola aset TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, memantau penggunaan anggaran OPD untuk aset TIK. Terintegrasi dengan aplikasi e-masda	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
Pengembangan SDTIK	Aplikasi juga mendata seluruh	RAA.01.02 Aplikasi	*Website*	Internal OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	sub domain serta sistem keamanan firewall yang di kelola diskominfo ke dalam aplikasi ini	Administrasi Pemerintahan		
Pengembangan SINEWS	Menambahkan publikasi dan pendataan konten negatif media sosial atau media elektronik dalam aplikasi ini	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Pengembangan/upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	Pengembangan aplikasi e-surat dan penambahan fitur e-sign untuk pengajuan tandatangan elektronik sebagai keperluan instansi Pemerintah Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.23**, Dinas Komunikasi dan Informatika diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **4 (empat) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Seluruh OPD**, **Publik**, serta **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.7.21 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Berdasarkan urusan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menangani urusan **Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Perdagangan, serta Perindustrian**. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki total 17 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **9 (sembilan) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu E-KATALOG UMKM, Pengembangan SIMKU, dan Pengembangan SIPENAMAS. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.24**.

Tabel 3.24 Usulan Aplikasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-KATALOG	Sebagai katalog Online	RAA.01.01	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
UMKM	UMKM di Kabupaten Situbondo	Aplikasi Layanan Publik		
Pengembangan SIMKU	Penambahan fitur pendataan pusat oleh-oleh khas situbondo, pendataan gudang hasil panen petani, pendataan retribusi pelayanan pasar, pendataan ekspor dan impor, serta pendataan pameran produk kerajinan dan industri rumah tangga	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Pengembangan SIPENAMAS	Penambahan fitur pendataan pengawasan kemetrologian	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.24**, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan.** Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

3.7.22 Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan urusan, Dinas Lingkungan Hidup menangani urusan **Lingkungan Hidup**. Dinas Lingkungan Hidup memiliki total 14 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **12 (dua belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu Sipesah v.2 *Mobile* dan SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3.25 Usulan Aplikasi Dinas Lingkungan Hidup

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sipesah v.2 *Mobile*	Pelaporan sampah yang mudah diakses melalui aplikasi android HP dan sistem pelaporan yang mudah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
SIPOMALI	Aplikasi Berbasis *Website* untuk	RAA.02.02	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
(Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Aplikasi ini memberikan kemudahaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, seperti persetujuan teknis, pengawasan lingkungan hidup, serta penanganan permasalahan lingkungan hidup. Aplikasi ini juga membantu layanan rekomendasi dan sosialisasi lingkungan yang masih beroperasi secara *offline*	Aplikasi Fungsi Tertentu		

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.25**, Dinas Lingkungan Hidup diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Lingkungan Hidup.

3.7.23 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan urusan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menangani urusan **Kepemudaan Dan Olahraga, serta Pariwisata**. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki total 6 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **5 (lima) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, maka diusulkan untuk membangun atau mengembangkan **4 (empat) aplikasi**, yaitu Aktivasi dan pengembangan *Website* TIC, Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan *website* TIC), SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga), serta Aktivasi *Website* pariwisata.situbondokab.go.id. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.26**.

Tabel 3.26 Usulan Aplikasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aktivasi dan pengembangan *Website* TIC	Penggunaan kembali aplikasi TIC sebagai pusat informasi pariwisata, pendataan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	pengunjung, dan penambahan dukungan layanan pengembangan destinasi sumber daya pariwisata			
Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan *website* TIC)	Aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola data kunjungan wisata bagi pengelola tempat wisata	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal
SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	SIPORA adalah sistem informasi pengelolaan data kepemudaan dan olah raga yang meliputi pengelolaan paskibra, kepramukaan, dan kompetensi olah raga, seta data atlit.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Aktifasi *Website* pariwisata.situbondokab.go.id	*Website* pariwisata adalah *website* yang menyediakan informasi mengenai pariwisata, pemuda dan olahraga	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.26**, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diusulkan untuk memiliki **3 (tiga) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

3.7.24 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Berdasarkan urusan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman menangani urusan **Kesehatan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan**. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman memiliki total 27 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **21 (dua puluh satu) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, maka diusulkan untuk membangun atau mengembangkan **10 (sepuluh) aplikasi**, yaitu Aplikasi keluhan jalan dan jembatan, e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan), E-Kontruksi, e-RTTG, Penggunaan SIPINTER, SIM Perumahan, Sistem Informasi Checking Kebutuhan, Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan, Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang, serta Sistem Informasi Pengelolaan SPJ. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.27**.

Tabel 3.27 Usulan Aplikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	Mendapatkan laporan keluhan pada jalan dan jembatan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	Data jalan dan jembatan yang didapat dari survei diubah menjadi peta berformat shf (shapefile). Data tersebut nantinya memuat nomor, nama, dan panjang, koordinat ruas, dll. Peta berformat shf dikonversi menjadi file kmz agar dapar dibuka di Google earth baik melalui PC atau android.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
E-Kontruksi	Sistem ini adalah aplikasi yang mendukung pengelolaan kontruksi mulai dari perencanaan, penyewaan alat berat dan laboratorium, pelatihan tukang, hingga justifikasi pelaksanaan teknis.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Internal OPD
e-RTTG	Optimalisasi pelayanan air	RAA.01.01	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	irigasi. Pengendalian Pemanfaatan dan daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah. Mengetahui titik lokasi kerusakan terkini pada wilayah sungai, pantai, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah. Mengetahui titik lokasi kerusakan terkini pada wilayah sungai, pantai, bendung, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah	Aplikasi Layanan Publik		
Penggunaan SIPINTER	Penggunaan aplikasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk keperluan perizinan dan retribusi	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
SIM Perumahan	Aplikasi pendataan kawasan perumahan serta pendataan kawasan permukiman kumuh	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Sistem Informasi Checking Kebutuhan	Checking kebutuhan kegiatan dan anggaran	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	Data persebaran kegiatan operasi dan pemeliharaan Dinas. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Dinas	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang	Untuk mengetahui aset DPUPP dan aset Pendapatan Asli Daerah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	Kemudahan administrasi dalam pembuatan SPJ yang masih bersifat manual. Di dalamnya juga terdapat fitur verifikasi berkas spj yang sudah diverifikasi oleh verifikator keuangan sebelum diserahkan ke bendahara pengeluaran, sehingga memudahkan dalam proses verifikasi berkas spj dan pencairan. dan juga bisa digunakan untuk mengetahui realisasi anggaran pada setiap bidang	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	seluruh OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.27**, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman diusulkan untuk memiliki **5 (lima) Aplikasi Layanan Publik**, **4 (empat) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu.** Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni berbentuk **Publik**, **Internal OPD** serta **seluruh OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.7.25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan urusan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani urusan **Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki total 8 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **3 (tiga) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memiliki **1 (satu) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu Pengembangan Data Desa Center serta SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.28**.

Tabel 3.28 Usulan Aplikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan	Penambahan fitur	RAA.01.01	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Data Desa Center	pendataan dana desa	Aplikasi Layanan Publik		
SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	Aplikasi untuk menyimpan data profil lembaga kemasyarakatan desa, data perangkat desa dan data anggota BPD. Untuk mempermudah pencarian data-data lembaga kemasyarakatan desa, perangkat desa dan anggota BPD.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.28**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.7.26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Berdasarkan urusan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menangani urusan **Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki total 10 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **4 (empat) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana juga **memiliki 1 (satu) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, maka diusulkan untuk membangun **1 (satu) aplikasi**, yaitu Pengembangan Pakem Situbondo. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.29**.

Tabel 3.29 Usulan Aplikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Pakem Situbondo	Penambahan fitur layanan pengelolaan data gender dan anak serta pengaduan tindak langsung korban kekerasan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Mobile*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.29**, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik**. Usulan aplikasi berbasis ***Mobile*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

3.7.27 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan urusan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menangani urusan **Penanaman Modal**. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki total 113 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **3 (tiga) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diusulkan untuk membangun atau mengembangkan **3 (tiga) aplikasi**, yaitu Pengembangan SIPINTER, SIMVEST, dan Sistem Antrian. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.30**.

Tabel 3.30 Usulan Aplikasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan SIPINTER	Perluasan ijin yang disediakan di dalam aplikasi SIPINTER, penambahan perizinan yang masih manual di dinas terkait yang berujung ke dpmptsp seperti izin praktik infusi darah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
SIMVEST	Sistem Informasi Investasi merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan data penanam modal, membantu pengawasan investasi, serta analisis iklim penanaman modal	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Antrian	Digunakan untuk pengaturan antrian di tempat pelayanan (MPP Kab Situbondo)	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.30**, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.7.28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan urusan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani urusan **Pendidikan dan Kebudayaan**. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki total 50 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **25 (dua puluh lima) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka diusulkan untuk mengembangkan **4 (empat) aplikasi**, yaitu Pengembangan Aplikasi PMP, Pengembangan Aplikasi Sebaya, Pengembangan Aplikasi SISPENA, dan Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.31.**

Tabel 3.31 Usulan Aplikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Aplikasi PMP	Penambahan fitur pendataan fasilitasi diklat calon kepala sekolah, asesmen kepala sekolah dan pengembangan PTK	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Sekolah dan Internal OPD
Pengembangan Aplikasi Sebaya	Penambahan fitur agar mendukung pendataan layanan terkait budaya dan kesenian yang masih dijalankan secara *offline*	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Pengembangan Aplikasi SISPENA	Penambahan fitur pendataan layanan-layanan berkaitan dengan PAUD yang sebelumnya masih terdata secara manual menjadi terdata	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	secara online			
Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi	Penambahan fitur yang dapat mendkung layanan izin operasional lembaga/sekolah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Sekolah dan Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.31**, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan untuk mengembangkan **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik** dan **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Sekolah**, **Internal OPD** serta **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.7.29 Dinas Perhubungan

Berdasarkan urusan, Dinas Perhubungan menangani urusan **Perhubungan**. Dinas Perhubungan memiliki total 27 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **22 (dua puluh dua) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memiliki **1 (satu) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Perhubungan, maka diusulkan untuk membangun atau mengembangkan **5 (lima) aplikasi**, yaitu Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan, Pengembangan Aplikasi Dishub PKB, Pengembangan *Website* Dishub, Penggunaan SIMPADA, serta SITRANS. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.32**.

Tabel 3.32 Usulan Aplikasi Dinas Perhubungan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	Sistem ini digunakan untuk pengajuan dan penerbitan dokumen surat rekomendasi pada sektor transportasi darat dan laut yang meliputi , rekomendasi trayek, andalalin, rekomendasi izin usaha tranportasi darat dan laut.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik
Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	Penambahan fitur pendataan pengujian kendaraan bermotor secara online	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Desktop*	Internal OPD
Pengembangan	Penambahan fitur	RAA.01.01	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Website Dishub	pendataan pinjam buku data perhubungan secara online	Aplikasi Layanan Publik		
Penggunaan SIMPADA	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah: Untuk memonitoring pendapatan secara realtime untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
SITRANS	SI Transportasi: Aplikasi pelayanan jasa transportasi, baik darat, udara, maupun laut	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.32**, Dinas Perhubungan diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik**, **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***Desktop***. Pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah.

3.7.30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan urusan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menangani urusan **Perpustakaan dan Kearsipan**. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki total 8 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **1 (satu) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka diusulkan untuk membangun, menggunakan atau mengembangkan **3 (dua) aplikasi**, yaitu Pengembangan Tali Pusar, TAJINPALAPPA, dan SRIKANDI. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.33**.

Tabel 3.33 Usulan Aplikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Tali Pusar	Penambahan fitur pendataan restorasi dan perbaikan arsip desa	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
TAJINPALAPPA	Digunakan untuk aset Kearsipan yang direncanakan dapat	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	terintegrasi dengan OPD lain.			
SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, aplikasi dari pusat untuk penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip sampai dengan penyusutan arsip.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.33**, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD** dan **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3.7.31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan urusan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menangani urusan **Pangan dan Pertanian**. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki total 44 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **27 (dua puluh tujuh) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka diusulkan untuk melakukan aktivasi pada **1 (satu) aplikasi**, yaitu Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.34.**

Tabel 3.34 Usulan Aplikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan)	E-KEPANG (Ketahanan Pangan) adalah sistem informasi yang mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga dengan baik.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.34,** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diusulkan untuk mengaktifkan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

3.7.32 Dinas Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan urusan, Dinas Peternakan dan Perikanan menangani urusan **Kelautan Dan Perikanan serta Pertanian**. Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki total 32 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **29 (dua puluh sembilan) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Peternakan dan Perikanan, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu SI Nelayan dan SI-Ternak. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.35.**

Tabel 3.35 Usulan Aplikasi Dinas Peternakan dan Perikanan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SI Nelayan	Aplikasi yang membantu pendataan terkait nelayan, kawasan ternak ikan, hingga pendataan tempat pemasaran	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
SI-Ternak	SI-Ternak ini adalah sistem informasi yang menyajikan data bidang peternakan dan mendukung berbagai bentuk pelayanan dan kegiatan peternakan.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.35**, Dinas Peternakan dan Perikanan diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Peternakan dan Perikanan.

3.7.33 Dinas Sosial

Berdasarkan urusan, Dinas Sosial menangani urusan **Sosial**. Dinas Sosial memiliki total 5 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **3 (tiga) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki **2 (dua) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Dinas Sosial, maka diusulkan untuk membangun **2 (dua) aplikasi**, yaitu Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo serta SISOS. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.36**.

Tabel 3.36 Usulan Aplikasi Dinas Sosial

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	Untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi tentang pelayanan sosial	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*website*	Internal OPD
SISOS	Aplikasi yang mendukung layanan sosial seperti pendataan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS, pemberian bantuan korban bencana alam dan sosial, serta pendataan bantuan kepada fakir miskin.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.36**, Dinas Sosial diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD** dan **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Sosial.

3.7.34 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan urusan, Satuan Polisi Pamong Praja menangani urusan **Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki total **22 Layanan** yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **20 (dua puluh) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki **4 (empat) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu Pengembangan *Website* Satpol PP, Si Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum), dan SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api). Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.37.**

Tabel 3.37 Usulan Aplikasi Satuan Polisi Pamong Praja

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan *Website* Satpol PP	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Si Trantibum	Aplikasi ini dirancang untuk	RAA.01.01	*Website*	Publik

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
(Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	menyajikan data titik-titik kerusahan dan rawan rusuh. Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi sarana masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait permasalah ketertiban umum sehingga petugas lapangan (SATPOL PP) lebih cepat datang ke lokasi yang bermasalah. Aplikasi ini juga dapat mendokumentasikan pelaksanaan penegakan perda.	Aplikasi Layanan Publik	dan *Mobile*	
SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	Sistem ini dirancang untuk pemantauan kebakaran di wilayah pemerintah daerah sehingga titik-titik lokasi rawan kebakaran dan kejadian kebakaran dapat dimonitoring dengan baik	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website* dan *Mobile*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.37,** Satuan Polisi Pamong Praja diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***Mobile*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Satuan Polisi Pamong Praja.

3.7.35 RSUD dr. Abdoer Rahem

Berdasarkan urusan, RSUD dr. Abdoer Rahem menangani urusan **Kesehatan**. RSUD dr. Abdoer Rahem memiliki total 19 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **13 (tiga belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal RSUD dr. Abdoer Rahem, maka diusulkan untuk membangun atau mengembangkan **3 (tiga) aplikasi**, yaitu Pengembangan Aplikasi SIMRS, REKAM MEDIS ELEKTRONIK, dan Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.38**.

Tabel 3.38 Usulan Aplikasi RSUD dr. Abdoer Rahem

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SIMRS	Penambahan fitur pendataan rujukan pasien RSAR dan pendataan jenazah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Rekam Medis Elektronik	Pencatatan rekam medis pasien secara elektronik untuk menggantikan kertas, sesuai peraturan kementrian kesehatan untuk semua faskes paling lambat akhir 2023 untuk implementasi RME	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi	Merupakan sistem informasi untuk mengelola data kefarmasian. Aplikasi diorganisir untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Aplikasi memiliki fitur pemesanan obat dan alat kesehatan ke supplier, penerimaan obat dan alat kesehatan dari supplier, pendataan lokasi obat dan alat kesehatan, penjualan obat dan alat kesehatan pakai resep, rekapitulasi penjualan obat dan alat kesehatan, dan rekapitulasi sisa obat dan alat kesehatan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.38**, RSUD dr. Abdoer Rahem diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan** dan **1 (satu) Aplikasi Fungsi Tertentu**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik RSUD dr. Abdoer Rahem.

3.7.36 Kecamatan Situbondo

Berdasarkan urusan, Kecamatan Situbondo menangani urusan **Kecamatan**. Kecamatan Situbondo memiliki total 23 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **21 (dua puluh satu) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Kecamatan Situbondo juga memiliki **5 (lima) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Kecamatan Situbondo, maka diusulkan untuk membangun **1**

(satu) aplikasi, yaitu Penggunaan SP4N LAPOR. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.39**.

Tabel 3.39 Usulan Aplikasi Kecamatan Situbondo

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Penggunaan SP4N LAPOR	Aplikasi untuk mendukung Layanan pengaduan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.39**, Kecamatan Situbondo diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan pengguna aplikasi yakni **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Kecamatan Situbondo.

3.7.37 Kecamatan Bungatan

Berdasarkan urusan, Kecamatan Bungatan menangani urusan **Kecamatan**. Kecamatan Bungatan memiliki total 19 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **18 (delapan belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Kecamatan Bungatan, maka **belum diusulkan** untuk membangun maupun mengembangkan aplikasi.

3.7.38 Puskesmas Situbondo

Berdasarkan urusan, Puskesmas Situbondo menangani urusan **Kesehatan**. Puskesmas Situbondo memiliki total 40 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **27 (dua puluh tujuh) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Puskesmas Situbondo juga memiliki **3 (tiga) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Puskesmas Situbondo, maka diusulkan untuk membangun atua mengembangkan **3 (tiga) aplikasi**, yaitu SIMPUS, Pengembangan simesem, dan Pengembangan sikda *mobile*. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.40.**

Tabel 3.40 Usulan Aplikasi Puskesmas Situbondo

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIMPUS	Simpus kepanjangan dari Sistem Infromasi Manajemen Puskesmas, dan merupakan program	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *mobile*	Internal OPD

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	aplikasi yang didesain khusus untuk membantu memudahkan pencatatan data pasien, pengolahan dan penyajian data menjadi informasi dalam waktu yang cepat dan tepat.			
Pengembangan SIMESEM	pengembangan di kegiatan pemantauan bumil risiko tinggi	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Pengembangan SIKDA *mobile*	Pemutakhiran aplikasi sikda *mobile*	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Mobile*	Publik

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.40**, Puskesmas Situbondo diusulkan untuk memiliki **2 (dua) Aplikasi Layanan Publik** dan **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***mobile***. Pengguna aplikasi yakni **Internal OPD** dan **Publik**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Kesehatan.

3.7.39 Puskesmas Bungatan

Berdasarkan urusan, Puskesmas Bungatan menangani urusan **Kesehatan**. Puskesmas Bungatan memiliki total 14 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **12 (dua belas) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Puskesmas Bungatan, maka diusulkan untuk menggunakan **1 (satu) aplikasi**, yaitu SIMPUS dari Dinas Kesehatan. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.41**.

Tabel 3.41 Usulan Aplikasi Puskesmas Bungatan

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIMPUS	untuk mengintegrasikan laporan bulanan dan uOPDate secara berkala pada *website* puksesmas	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *mobile*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.41**, Puskesmas Bungatan diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan ***mobile*** dan pengguna aplikasi yakni **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Dinas Kesehatan.

3.7.40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan urusan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani urusan **Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki total 6 Layanan yang mendukung urusannya. Dari seluruh layanan yang berjalan di OPD ini, terdapat **5 (lima) layanan** yang masih beroperasi secara *offline*. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memiliki **3 (tiga) Bidang** yang operasionalnya belum didukung oleh aplikasi apa pun. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka diusulkan untuk membangun **3 (tiga) aplikasi**, yaitu Aplikasi Laporan Kejadian Bencana, Sistem Informasi Kebencanaan (SIK), dan Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana. Penjabaran lengkap dari usulan aplikasi ini dapat dilihat pada **Tabel 3.42**.

Tabel 3.42 Usulan Aplikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Aplikasi Pendukung Usulan	Deskripsi Aplikasi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Laporan Kejadian Bencana	Aplikasi yang dapat mengakomodir laporan kejadian bencana oleh masyarakat	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	Sistem Informasi Kebencanaan ini merupakan sistem informasi yang menyajikan dan mengelola data terkait kebencanaan. Sistem ini akan menyajikan informasi titik pos kebencanaan dan data tim reaksi cepat, titik-titik rawan bencana, data statistik dampak dan korban bencana, peringatan dini fenomena alam, serta informasi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	Sistem yang dapat Mendukung Pengelolaan Gudang Logistik BPBD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Melalui penjabaran pada **Tabel 3.42**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah diusulkan untuk memiliki **1 (satu) Aplikasi Layanan Publik** dan **2 (dua) Aplikasi Administrasi Pemerintahan**. Usulan aplikasi berbasis ***Website*** dan

pengguna aplikasi yakni **Publik** dan **Internal OPD**. Aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.8 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

Dari seluruh aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, diketahui memiliki total **95 aplikasi usulan**. Setelah dilakukan analisis terhadap SOTK serta uraian serta fungsi masing-masing aplikasi yang dimiliki, diketahui bahwa terdapat beberapa aplikasi yang memiliki fungsi yang sama, mengelola data yang sama, maupun secara fungsi sebaiknya di integrasikan agar meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan layanan. Jabaran usulan integrasi aplikasi dijabarkan pada **Tabel 3.43.**

Tabel 3.43 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Bagian Hukum	JDIH Kabupaten Situbondo	Bagian Hukum	JDIHN, Website Kabupaten Situbondo	Integrasi Eksisting
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	e-Katalog	Pusat	SIKAP, SIRUP, SPSE	Integrasi Eksisting
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIKAP	Pusat	SIRUP, SPSE, E-Katalog	Integrasi Eksisting
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIRUP	Pusat	SIKAP, SIRUP, SPSE	Integrasi Eksisting
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	Pusat	SIKAP, SIRUP, e-Katalog	Integrasi Eksisting
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI JAPIN	Usulan Integrasi
Bagian Perencanaan dan Keuangan	E-Masda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIRKA	Usulan Integrasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	E-Risalah	Bagian Hukum	Intergrasi dengan JDIH	Usulan Integrasi
Inspektorat	AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)		Web API Whatsapp	Usulan Integrasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	MILEA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	USULKP, SIKALAP, SIAP-SIAKSI	Usulan Integrasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan	SIDAK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	MySAPK & SAPK	Usulan Integrasi

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Sumberdaya Manusia		Manusia		
Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA, SIRKA (SIRKA: Data Laporan Pertanggung Jawaban)	Usulan Integrasi
Badan Pendapatan Daerah	E-BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN)	-	KKP (BPN), BANK JATIM	Integrasi Eksisting
Badan Pendapatan Daerah	INTEGRASI BPN / BAPENDA	-	ATR/BPN	Integrasi Eksisting
Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan E-PDL	Badan Pendapatan Daerah	BANK JATIM SIMPADA VTAX Pajak Gathering Online Web Service BPHTB dan PDL	Usulan Integrasi
Badan Pendapatan Daerah	Simpada (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah)	-	e-Pajak (Pajak Daerah Lainnya)	Integrasi Eksisting
Badan Pendapatan Daerah	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PAJAK	Badan Pendapatan Daerah	E-BPHTB, VTAX	Integrasi Eksisting
Badan Pendapatan Daerah	VTAX	-	BANK JATIM SITUBONDO	Integrasi Eksisting
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIBESTI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DTD-AKP	Integrasi Eksisting
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIBESTI	Dinas Desa	SID	Integrasi Eksisting
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPAM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DTD-AKP	Integrasi Eksisting
Badan Perencanaan	Aplikasi Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Kabupaten	Usulan Integrasi

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Pembangunan Daerah	Pembangunan		Situbondo	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SILAO (sistem informasi layanan adminduk online)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK	Integrasi Eksisting
Dinas Kesehatan	E Booking	Dinkes	Terintegrasi dengan Agenda Harian Website Official Dinkes	Integrasi Eksisting
Dinas Kesehatan	E-Health Dinkes	RSUD dr. Abdoer Rahem Puskesmas Situbondo	SIMRS SIMPUS	Usulan Integrasi
Dinas Kesehatan	Sikda	Dinkes Provinsi Jawa Timur	Terintegrasi dengan Center View Dinkes Provinsi	Integrasi Eksisting
Dinas Kesehatan	SIMESSEM	Dinas Kominfo	Terintegrasi dengan Intelligence Room Bupati Situbondo	Integrasi Eksisting
Dinas Kesehatan	SIMESSEM	Ekohort KIA	Terintegrasi dengan Aplikasi eKohort KIA Kemenkes	Integrasi Eksisting
Dinas Kesehatan	SIMPUS	Puskesmas Situbondo	PCare BPJS, Data Kependudukan Kemendagri, Mobile JKN, e-Kohort KIA, MPDN	Usulan Integrasi
Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Puskesmas	Usulan Integrasi
Dinas Kesehatan	SIMESSEM	GFK	DPI	Integrasi Eksisting
Dinas Kesehatan	SIKDA	BPJS	P-CARE E-Claim	Integrasi Eksisting
Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset TIK Kabupaten Situbondo	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Aplikasi Milea, Emasda	Usulan Integrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	E-Surat		Kepegawaian	Integrasi Eksisting

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan /upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Balai Sertifikasi Elektronik	Milea, Tanda Tangan Digital BSRE	Usulan Integrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Situbondo PAKEM		PPID, JDIH, SIMRS, Sikembarkepo, Berita, Layanan TIC, SIKEMBARIKAN, SIAGACOVID	Integrasi Eksisting
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	SIMKU	Usulan Integrasi
Dinas Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup	Sipesah v.2 Mobile	Usulan Integrasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Website Disporapar pariwisata.situbondokab.go.id	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Website TIC, SIPORA	Usulan Integrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	Usulan Integrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	Usulan Integrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang	-	Integrasi dengan perbankan	Usulan Integrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIRKA	Usulan Integrasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu	SIMVEST	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIPINTER modul penanaman modal	Usulan Integrasi

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Pintu				
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIPINTER	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SiTajin	Integrasi Eksisting
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Pengaduan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Portal website dispendikbud	Integrasi Eksisting
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	E Lapor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sisgur	Integrasi Eksisting
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sisgur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAPODIK	Integrasi Eksisting
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Website Dispendik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Web Sekolah	Integrasi Eksisting
Dinas Perhubungan	Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	Usulan Integrasi
Dinas Perhubungan	SITRANS	Dinas Perhubungan	Website Dishub	Usulan Integrasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TAJINPALAPPA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Berintegrasi dengan Tali Pusar	Usulan Integrasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TALI PUSAR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inslite3/opac	Integrasi Eksisting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TALI PUSAR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	E-PUSDA	Integrasi Eksisting
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	SIMLUHTAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	E-RDKK	Integrasi Eksisting
Satuan Polisi Pamong Praja	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	Usulan Integrasi
RSUD dr. Abdoer Rahem	Aplikasi Billing System	BPJS	Vclaim BPJS, Aplicare BPJS	Integrasi Eksisting
RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Aplikasi SIMRS	RSUD dr. Abdoer Rahem	Sistem Persediaan Farmasi	Usulan Integrasi
RSUD dr. Abdoer Rahem	REKAM MEDIS ELEKTRONIK	Kementerian Kesehatan	Integrasi dengan kemenkes	Usulan Integrasi
RSUD dr. Abdoer Rahem	Sistem Persediaan Farmasi		Aplikasi billing system	Integrasi Eksisting
Puskesmas	https://pkmsit	Dinas Kesehatan	Web DINKES	Integrasi

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Situbondo	ubondo.situbondokab.go.id/			Eksisting
Puskesmas Bungatan	SIMPUS	Puskesmas Bungatan	Terintegrasi dengan web puskesmas	Usulan Integrasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi Laporan Kejadian Bencana Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	Usulan Integrasi

Pada **Tabel 3.43** terdapat **63 (enam puluh tiga)** usulan integrasi aplikasi dari 58 (lima puluh delapan) aplikasi eksisting dan aplikasi usulan. Berdasarkan 63 integrasi ini, 33 (tiga puluh tiga) integrasi aplikasi adalah integrasi eksisting, dan sisanya yakni 30 (tiga puluh) usulan integrasi aplikasi adalah integrasi usulan. Mayoritas OPD diusulkan untuk melakukan integrasi aplikasi dengan aplikasi dengan aplikasi terkait di internal OPD masing-masing. Seperti contoh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang diusulkan melakukan integrasi usulan Website Disporapar dengan aplikasi TIC dan SIPORA yang sama-sama dikelola oleh OPD tersebut.

BAB 4
DAFTAR USULAN APLIKASI SPBE

Pada bab ini akan membahas mengenai usulan aplikasi yang diusulkan untuk masing-masing OPD di Pemerintahan Kabupaten Situbondo secara keseluruhan. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan penjabaran daftar semua usulan aplikasi SPBE. Kemudian usulan tersebut dirangkum dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengembangan, basis aplikasi, fungsi aplikasi dan pengguna aplikasi.

4.1 Daftar Usulan Aplikasi SPBE

Setelah dilakukan pembahasan detail mengenai usulan aplikasi pada Bab 3, pada sub bab ini akan dirangkum semua usulan aplikasi yang ada. Daftar usulan aplikasi terkait OPD Pengelola, nama usulan aplikasi, kategori usulan, referensi aplikasi, basis aplikasi dan pengguna aplikasi dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Daftar Usulan Aplikasi SPBE

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU. 001	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	e-Partner	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 002	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 003	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penggunaan Sipesat	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 004	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SIM-IBRO	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 005	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 006	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	SIM-SDA	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 007	Bagian Perekonomian,	Aplikasi laporan realisasi fisik	Hasil Survei	RAA.01.02 Aplikasi	*Website*	Seluruh OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Pembangunan dan Sumber Daya Alam	dan keuangan		Administrasi Pemerintahan		
AU. 008	Bagian Umum	SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 009	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 010	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI JAPIN	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 011	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Masda	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 012	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi SIRKA	Hasil Survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 013	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Sakip	Hasil Survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 014	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	E-Risalah	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *Mobile*	Internal OPD
AU. 015	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	*Website* Internal DPRD	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 016	Inspektorat	AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 017	Inspektorat	Pengembangan E-Matrik	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 018	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIAP - SIAKSI	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU. 019	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIDAK	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 020	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	*Website* BKPSDM	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan aplikasi SIDAT	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aktivasi SIMDA	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan)	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 024	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda)	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 025	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan E-PDL	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *Mobile*	Internal OPD
AU. 026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-AGENDA	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Geospasial Pembangunan	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 028	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian Online	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 029	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Pengembangan Aplikasi SILAO	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi	*Website*	Internal OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Sipil			Pemerintahan		
AU. 030	Dinas Kesehatan	E-Health Dinkes	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website* dan *mobile*	Internal OPD publik
AU. 031	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 032	Dinas Kesehatan	SIMPUS	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *mobile*	Internal OPD
AU. 033	Dinas Ketenagakerjaan	Pengembangan Web Disnaker	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 034	Dinas Ketenagakerjaan	SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik
AU. 035	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi HelOPDesk	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 036	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset TIK Kabupaten Situbondo	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 037	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SDTIK	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 038	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SINEWS	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 039	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan /upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 040	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 041	Dinas Koperasi, Perindustrian,	Pengembangan SIMKU	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi	*Website*	Internal OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	dan Perdagangan			Administrasi Pemerintahan		
AU. 042	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIPENAMAS	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 043	Dinas Lingkungan Hidup	Sipesah v.2 *Mobile*	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 044	Dinas Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik
AU. 045	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktivasi dan pengembangan *Website* TIC	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 046	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan *website* TIC)	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 047	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 048	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktifasi *Website* pariwisata.situbondokab.go.id	Hasil Survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 049	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 051	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	E-Kontruksi	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Internal OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Permukiman					
AU. 052	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-RTTG	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 053	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Penggunaan SIPINTER	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 054	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIM Perumahan	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 055	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Checking Kebutuhan	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 056	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 057	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 058	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Seluruh OPD
AU. 059	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan Data Desa Center	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 060	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 061	Dinas Pemberdayaan	Pengembangan Pakem	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi	*Mobile*	Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Situbondo		Layanan Publik		
AU. 062	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan SIPINTER	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 063	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIMVEST	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 064	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Antrian	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 065	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi PMP	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 066	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sebaya	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 067	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi SISPENA	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 068	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 069	Dinas Perhubungan	Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik
AU. 070	Dinas Perhubungan	Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Desktop*	Internal OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU. 071	Dinas Perhubungan	Pengembangan *Website* Dishub	Pengembangan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 072	Dinas Perhubungan	Penggunaan SIMPADA	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 073	Dinas Perhubungan	SITRANS	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 074	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Tali Pusar	Pengembangan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 075	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TAJINPALAPPA	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 095	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SRIKANDI	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 076	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan)	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik
AU. 077	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI Nelayan	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 078	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI-Ternak	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Publik
AU. 079	Dinas Sosial	Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*website*	Internal OPD
AU. 080	Dinas Sosial	SISOS	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU.	Satuan Polisi	Pengembangan	Pengemb	RAA.01.01	*Website*	Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
081	Pamong Praja	*Website* Satpol PP	angan	Aplikasi Layanan Publik		
AU. 082	Satuan Polisi Pamong Praja	Si Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website* dan *Mobile*	Publik
AU. 083	Satuan Polisi Pamong Praja	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	Hasil analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website* dan *Mobile*	Publik
AU. 084	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Aplikasi SIMRS	Pengemb angan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 085	RSUD dr. Abdoer Rahem	REKAM MEDIS ELEKTRONIK	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal
AU. 086	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi	Pengemb angan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	*Website*	Internal OPD
AU. 087	Kecamatan Situbondo	Penggunaan SP4N LAPOR	Hasil analisis	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 088	Puskesmas Situbondo	SIMPUS	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *mobile*	Internal OPD
AU. 089	Puskesmas Situbondo	Pengembangan simesem	Pengemb angan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik
AU. 090	Puskesmas Situbondo	Pengembangan sikda *mobile*	Pengemb angan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Mobile*	Publik
AU. 091	Puskesmas Bungatan	SIMPUS	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website* dan *mobile*	Internal OPD
AU. 092	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	Aplikasi Laporan Kejadian Bencana	Hasil survei	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	*Website*	Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU. 093	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	Hasil analisis	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD
AU. 094	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	Hasil survei	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	*Website*	Internal OPD

Pada **Tabel 4.1** Terdapat total **95 usulan aplikasi** untuk 40 OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Usulan didapatkan dari hasil survei kepada OPD, hasil analisis dari layanan manual serta usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting. Aplikasi yang diusulkan bisa berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh OPD untuk layanan yang mencangkup beberapa OPD. Hal tersebut untuk meringkas pengadaan aplikasi di tiap OPD dan memudahkan dalam integrasi data. Usulan aplikasi yang ada juga dapat menampung beberapa layanan, yang memiliki tujuan untuk meringkas pengadaan aplikasi di OPD.

4.2 Pengelompokan Usulan Aplikasi SPBE

Setelah dilakukan penjabaran terkait usulan aplikasi pada pembahasan sebelumnya, pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengelompokan usulan aplikasi yang ada. Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 4 kelompok usulan aplikasi berdasarkan jenis pengembangan, fungsi aplikasi, basis aplikasi dan pengguna aplikasi.

4.2.1 Jumlah Aplikasi berdasarkan Jenis Pengembangan

Kategori aplikasi berdasarkan jenis usulan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu aplikasi usulan hasil survei, aplikasi usulan hasil analisis, dan aplikasi pengembangan.

- **Aplikasi usulan hasil survei** adalah jenis pengembangan aplikasi yang didasarkan pada usulan hasil survei yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- **Aplikasi usulan hasil analisis** adalah jenis pengembangan aplikasi yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi program prioritas RPJMD, identifikasi potensi aplikasi yang diperoleh dari hasil pemetaan antara proses bisnis, dan data dan informasi, identifikasi layanan SPBE dengan akses manual, dan identifikasi 14 layanan.
- **Aplikasi pengembangan** adalah jenis pengembangan aplikasi SPBE eksisting berupa usulan pengembangan fitur dan fungsi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan ataupun usulan perbaikan dari aplikasi

eksisting yang bermasalah, dan juga usulan pengintegrasian suatu aplikasi dengan aplikasi lain.

Gambar 4.1 Persentase Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

Pada Gambar 4.1 Terdapat total usulan aplikasi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) usulan aplikasi. Dengan usulan aplikasi dari **hasil survei** sebanyak **39 (41%)** usulan aplikasi, usulan aplikasi dari **hasil analisis** sebanyak **28 (30%)** usulan aplikasi, dan usulan aplikasi dari **pengembangan aplikasi eksisting** sebanyak **28 (29%)** usulan aplikasi. Mayoritas usulan aplikasi didapatkan dari hasil survei yang mana berasal dari pengajuan oleh masing-masing OPD terkait kebutuhan aplikasi mereka.

4.2.2 Jumlah Aplikasi berdasarkan Fungsi Aplikasi

Kategori aplikasi berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu aplikasi layanan administrasi pemerintahan, aplikasi layanan publik, Aplikasi Misi Tertentu, dan Aplikasi Fungsi Tertentu. Hal ini mengacu pada Lampiran Perpres No 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **RAA 01.01 Aplikasi layanan publik** berbasis elektronik merupakan aplikasi yang akan dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan terkait pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasi layanan publik berbasis elektronik diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun tetap diutamakan untuk mengembangkan aplikasi umum berbagai pakai. **RAA 01.02 Aplikasi layanan administrasi pemerintahan** berbasis elektronik merupakan aplikasi yang akan dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam implementasi layanan administrasi

pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum yang akan digunakan secara berbagi pakai. **RAA 02.01 Aplikasi Misi Tertentu** merupakan aplikasi yang pengembangannya berdasarkan misi tertentu pada OPD, dimana aplikasi ini akan mendukung instansi dalam mencapai misi yang akan dicapai. **RAA 02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu** merupakan aplikasi yang pengembangannya berdasarkan Fungsi tertentu pada OPD, dimana fungsi-fungsi khusus pada OPD dapat di tentukan oleh SOTK di setiap OPD Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

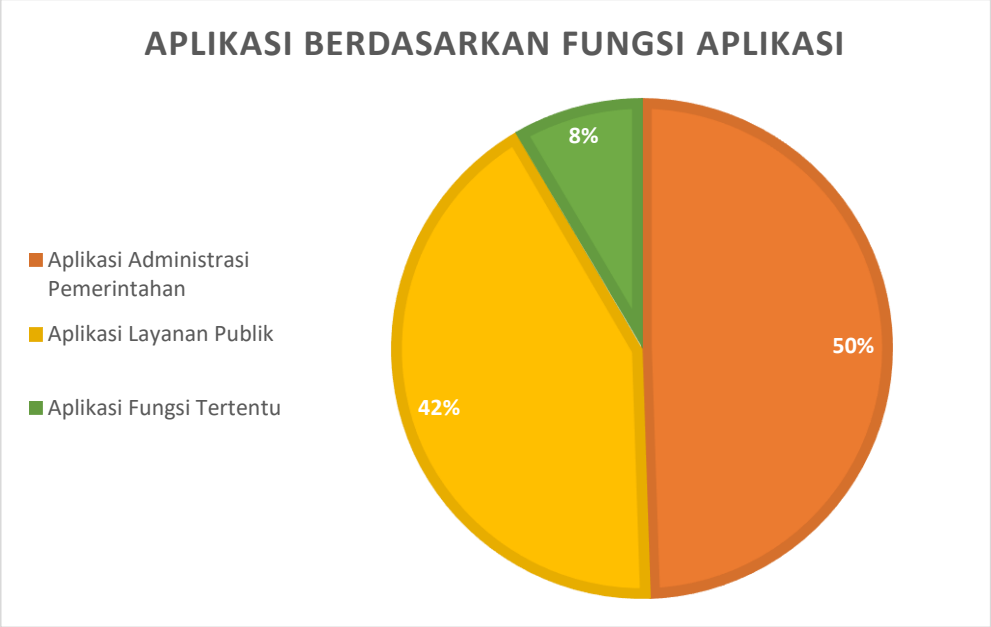

Gambar 4.2 Persentase Aplikasi Berdasarkan Fungsi Aplikasi

Pada Gambar 4.2 fungsi aplikasi yang paling banyak merupakan **Aplikasi Administrasi Pemerintahan (RAA 01.02) dengan 47 (50%)** usulan aplikasi. Untuk fungsi aplikasi usulan lainnya yaitu fungsi **Aplikasi Layanan Publik (RAA 01.01)** terdapat **40 (42%)** usulan aplikasi, **dan Aplikasi Fungsi Tertentu (RAA 02.02)** terdapat sebanyak **8 (8%)** usulan aplikasi. Pada usulan aplikasi ini belum terdapat usulan aplikasi yang memiliki fungsi sebagai Aplikasi Misi Tertentu (RAA 02.01). Adapun OPD yang semua usulan aplikasinya untuk mendukung administrasi pemerintahan adalah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Puskesmas Bungatan. Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah OPD dengan usulan aplikasi administrasi pemerintahan terbanyak di antara OPD tersebut yakni sebanyak 3 aplikasi.

4.2.3 Jumlah Usulan Aplikasi berdasarkan Basis Aplikasi

Basis aplikasi terbagi menjadi 3 basis, yaitu ***Mobile, Dekstop,*** dan ***Website***. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi usulan memiliki lebih dari 1 basis. Pada usulan aplikasi di Pemerintahan Kabupaten Situbondo

terdapat delapan aplikasi yang memiliki **dua basis aplikasi** yaitu E-Risalah untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, E-PDL untuk Badan Pendapatan Daerah Pengembangan, E-Health Dinkes dan SIMPUS untuk Dinas Kesehatan, Si Trantibum untuk Satuan Polisi Pamong Praja, serta SIAGA API untuk Satuan Polisi Pamong Praja yang diusulkan berbentuk **basis aplikasi *website*** dan ***mobile***. Persentase Basis aplikasi dapat dilihat pada **Gambar 4.3.**

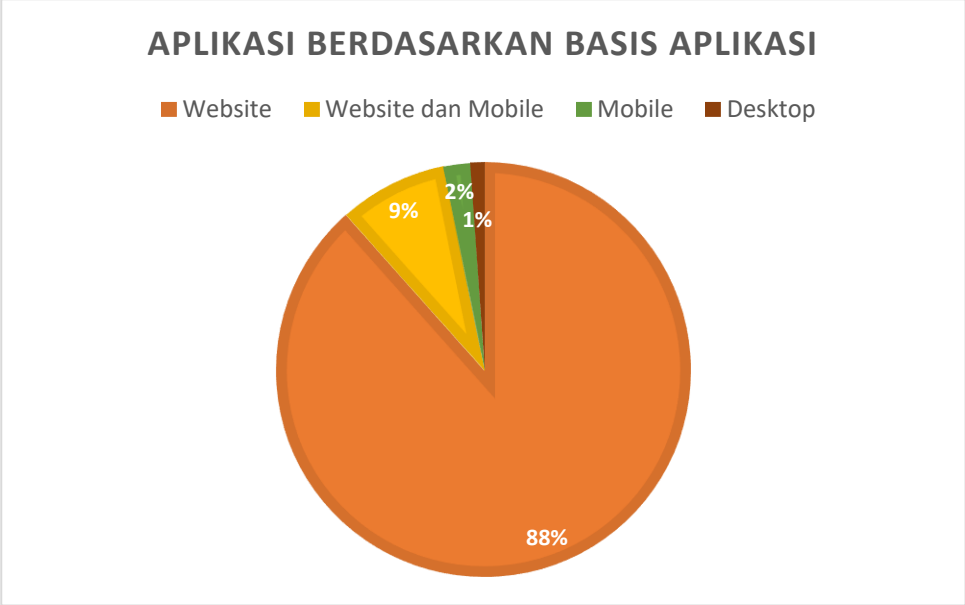

Gambar 4.3 Persentase Aplikasi Berdasarkan Basis Aplikasi

Pada Gambar 4.3 menunjukkan mayoritas basis aplikasi pada usulan aplikasi di Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah usulan aplikasi berbasis *website* dengan jumlah **84 (88%)** usulan aplikasi, sedangkan untuk usulan aplikasi berbasis *website* dan *mobile* yakni **8 (9%)** usulan aplikasi, usulan aplikasi berbasis *mobile* dengan jumlah **2 (2%)** usulan aplikasi. Untuk basis aplikasi yang paling sedikit yaitu usulan aplikasi berbasis dekstop yakni **1 (1%)** usulan aplikasi merupakan milik Dinas Perhubungan dengan usulan Pengembangan Aplikasi Dishub PKB.

4.2.4 Jumlah Aplikasi berdasarkan Penggunaan Aplikasi

Pengguna aplikasi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu **Publik, Internal OPD, dan Seluruh OPD**. Persentase pengguna aplikasi dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.

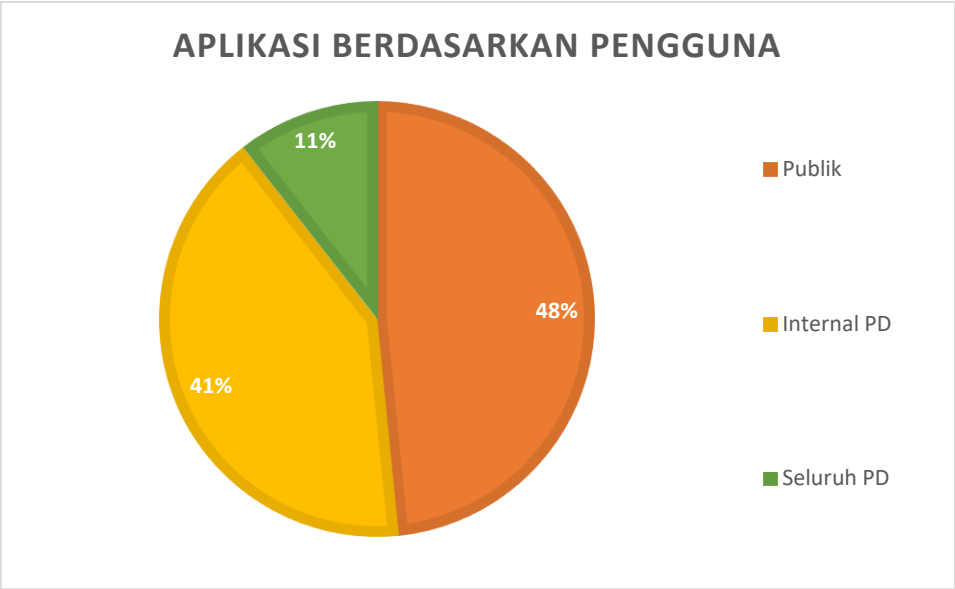

Gambar 4.4 Persentase Aplikasi Berdasarkan Pengguna Aplikasi

Pada Gambar 4.4 usulan aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo paling banyak merupakan **aplikasi yang dapat diakses oleh publik**, yaitu sebanyak **46 (48%) usulan aplikasi.** Selanjutnya sebanyak **39 (41%)** usulan aplikasi merupakan aplikasi yang hanya dapat diakses oleh internal OPD yang bersangkutan. Sisanya sebanyak **10 (11%)** usulan aplikasi merupakan aplikasi yang dapat diakses seluruh OPD. Adapun OPD yang paling banyak diusulkan untuk memiliki aplikasi dengan pengguna publik yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sejumlah 5 aplikasi, dilanjutkan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang masing-masingnya berjumlah 3 aplikasi.

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU.001	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	e-Partner	Aplikasi yang memfasilitasi pelaksanaan kerjasama	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.002	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	untuk menilai proses penyelenggaraan dikecamatan	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.003	1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penggunaan Sipesat	pelayanan administrasi terpadu kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan di kecamatan, publikasi PAW DPRD dan dokumentasi pelantikan bupati/wakil bupati	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.004	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SIM-IBRO	SIM-IBRO (Sistem Infromasi Manajemen Peribadatan dan Kerohanian) merupakan sistem informasi yang membantu dalam pengelolaan dan manajemen program hibah, kerohanian, dan peribadatan.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.005	3	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	Pengembangan Aplikasi JDIH dengan Fitur Scan Barcode untuk Autentifikasi Produk Hukum Daerah serta Tracking Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.006	4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	SIM-SDA	SIM-SDA (Sistem Informasi Monitoring Sumber Daya Alam dan Energi) merupakan sistem yang berperan dalam manajemen dan pengawasan SDA dan Energi pada Pemerintah Daerah Berfungsi juga sebagai media permintaan data oleh pihak berkepentingan, serta pendataan rapat koordinasi	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.007	4	Bagian	Aplikasi laporan	Aplikasi yang menyediakan layanan untuk	RAA.01.02	Seluruh PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	realisasi fisik dan keuangan	OPD agar dapat menyusun laporan RFK melalui aplikasi dan membantu bagian perekonomoian dalam melihat laporan yang di kirimkan dari OPD	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	
AU.008	6	Bagian Umum	SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	SIM-BU merupakan aplikasi yang membantu pendataan layanan yang berjalan di Bagian Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.009	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	Aplikasi layanan kritik dan saran dari masyarakat	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.010	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI JAPIN	Sistem Informasi Jadwal Pimpinan, aplikasi yang mencatatat jadwal agenda pimpinan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.011	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Masda	UNTUK MEMUDAHKAN PENGINPUTAN DATA MUTASI BARANG DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.012	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi SIRKA	Aplikasi laporan rincian fisik keuangan lingkup sekda	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.013	9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Sakip	Aplikasi laporan kinerja instansi pemerintah lingkup sekda	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.014	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	E-Risalah	Aplikasi berbasis mobile dan Website yang mana didalamnya mencakup seluruh Ringkasan kegiatan rapat DPRD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU.015	10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Website Internal DPRD	Aplikasi Website DPRD yang bersikan seluruh Informasi dan UOPDate berita terkait DPRD	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.016	11	Inspektorat	AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)	Aplikasi AlaKO digunakan untuk media konsultasi Inspektorat dengan OPD/Kecamatan/Desa terkait Pengawasan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.017	11	Inspektorat	Pengembangan E-Matrik	Penambahan fitur yang membantu layanan monitoring dan evaluasi	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.018	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIAP - SIAKSI	Aplikasi untuk pengelolaan dan pelaporan presensi pegawai serta perhitungan tunjangan berdasarkan presensi pegawai	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.019	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIDAK	Aplikasi untuk mengelola informasi pegawai di Pemerintah Kabupaten Situbondo	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.020	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Website BKPSDM	Pembuatan website BKPSDM untuk mendukung layanan survei kepuasan masyarakat dan dokumentasi serta publikasi kegiatan BKPSDM	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.021	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan aplikasi SIDAT	Penambahan fitur pendataan dan publikasi forum kerukunan umat beragama	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.022	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aktivasi SIMDA	SIMDA merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU.023	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan)	SIM BanKeu adalah sistem informasi yang menunjang pencairan bantuan keuangan (sosial, dana bos, dan sejenis).	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.024	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda)	Penambahan fitur yang dapat mendukung layanan seputar surat-menyurat, penataan inventaris barang milik daerah, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.025	15	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan E-PDL	Penambahan fitur untuk mendukung layanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih dilaksanakan secara offline	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.026	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-AGENDA	Aplikasi digunakan untuk pengarsipan surat masuk dan keluar, jadwal internal BAPPEDA dan SPOPD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.027	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Geospasial Pembangunan	Aplikasi ini akan menyajikan data geospasial terkait pembangunan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara umum.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.028	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian Online	Aplikasi antrian online digunakan oleh pemohon agar memudahkan pemohon untuk mengetahui no antrian yang sedang di layani ketika pemohon meninggalkan kantor dispendukcapil situbondo disaat pemohon telah mendapatkan nomor antrian.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.029	17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Aplikasi SILAO	Penambahan Dashboard utk mengetahui laporan pendaftar, penambahan fitur-fitur administrasi seputar kependudukan yang	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi	Internal PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				masih beroperasional secara offline	Pemerintahan	
AU.030	18	Dinas Kesehatan	E-Health Dinkes	Aplikasi untuk mendukung layanan terkait pemulihan gizi dan pengurusan P-IRT, Pengurusan layak higien, pengurusan klaim pembiayaan kesehatan gratis, telemedicine, early warning system (penyakit menular)	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.031	18	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	Manajemen Keuangan Puskesmas dan laborat BLUD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.032	18	Dinas Kesehatan	SIMPUS	Sistem Informasi Puskesmas: Digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.033	19	Dinas Ketenagakerjaan	Pengembangan Web Disnaker	Penambahan fitur program pelatihan kerja, pelatihan kerja BKK dan BLKK, serta pengajuan pendirian LPK	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.034	19	Dinas Ketenagakerjaan	SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	SIM-TKK adalah sistem informasi manajemen transmigrasi dan tenaga kerja. Sistem ini mendukung pelaksanaan pendataan terkait transmigrasi yang meliputi pencatatan penyelesaian dan mediasi permasalahan ketenaga kerjaan, penctatan mitra kerjasama, pencatatan perjanjian kerja, informasi kompensi, dan hal lainnya yang terkait ketenaga kerjaan dan transmigrasi.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik
AU.035	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi HelOPDesk	Aplikasi helOPDesk adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pintu untuk memberikan layanan penyelesaian masalah pada pemerintah daerah oleh Diskominfo.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				Perangkat daerah akan mengirim pertanyaan atau menyampaikan masalah/kendala melalui sistem ini kepada diskominfo.		
AU.036	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset TIK Kabupaten Situbondo	Untuk mengelola aset TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, memantau penggunaan anggaran OPD untuk aset TIK. Terintegrasi dengan aplikasi e-masda	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.037	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SDTIK	Aplikasi juga mendata seluruh sub domain serta sistem keamanan firewall yang di kelola diskominfo ke dalam aplikasi ini	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.038	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SINEWS	Menambahkan publikasi dan pendataan konten negatif media sosial atau media elektronik dalam aplikasi ini	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.039	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan/upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	Pengembangan aplikasi e-surat dan penambahan fitur e-sign untuk pengajuan tandatangan elektronik sebagai keperluan instansi Pemerintah Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD
AU.040	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	Sebagai katalog Online UMKM di Kabupaten Situbondo	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.041	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIMKU	Penambahan fitur pendataan pusat oleh-oleh khas situbondo, pendataan gudang hasil panen petani, pendataan retribusi pelayanan pasar, pendataan ekspor dan impor, serta pendataan pameran produk kerajinan dan industri rumah tangga	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.042	21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan	Pengembangan SIPENAMAS	Penambahan fitur pendataan pengawasan kemetrologian	RAA.01.02 Aplikasi	Internal PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		Perdagangan			Administrasi Pemerintahan	
AU.043	22	Dinas Lingkungan Hidup	Sipesah v.2 Mobile	Pelaporan sampah yang mudah diakses melalui aplikasi android HP dan sistem pelaporan yang mudah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.044	22	Dinas Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Aplikasi Berbasis Website untuk Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Aplikasi ini memberikan kemudahaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, seperti persetujuan teknis, pengawasan lingkungan hidup, serta penanganan permasalahan lingkungan hidup. Aplikasi ini juga membantu layanan rekomendasi dan sosialisasi lingkungan yang masih beroperasi secara offline	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik
AU.045	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktivasi dan pengembangan Website TIC	Penggunaan kembali aplikasi TIC sebagai pusat informasi pariwisata, pendataan pengunjung, dan penambahan dukungan layanan pengembangan destinasi sumber daya pariwisata	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.046	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan website TIC)	Aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola data kunjungan wisata bagi pengelola tempat wisata	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.047	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	SIPORA adalah sistem informasi pengelolaan data kepemudaan dan olah raga yang meliputi pengelolaan paskibra, kepramukaan, dan kompetensi olah raga, seta data atlit.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU.048	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktifasi Website pariwisata.situbondokab.go.id	Website pariwisata adalah website yang menyediakan informasi mengenai pariwisata, pemuda dan olahraga	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.049	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	Mendapatkan laporan keluhan pada jalan dan jembatan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.050	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	Data jalan dan jembatan yang didapat dari survey diubah menjadi peta berformat shf (shapefile). Data tersebut nantinya memuat nomor, nama, dan panjang, koordinat ruas, dll. Peta berformat shf dikonversi menjadi file kmz agar dapar dibuka di Google earth baik melalui PC atau android.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.051	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	E-Kontruksi	Sistem ini adalah aplikasi yang mendukung pengelolaan kontruksi mulai dari perencanaan, penyewaan alat berat dan laboratorium, pelatihan tukang, hingga justifikasi pelaksanaan teknis.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD
AU.052	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-RTTG	Optimalisasi pelayanan air irigasi. Pengendalian Pemanfaatan dan daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah. Mengetahui titik lokasi kerusakan terkini pada wilayah sungai, pantai, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah. Mengetahui titik lokasi kerusakan terkini pada wilayah sungai,	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				pantai, bendung, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah		
AU.053	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Penggunaan SIPINTER	Penggunaan aplikasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk keperluan perizinan dan retribusi	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.054	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIM Perumahan	Aplikasi pendataan kawasan perumahan serta pendataan kawasan permukiman kumuh	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.055	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Checking Kebutuhan	Checking kebutuhan kegiatan dan anggaran	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.056	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	Data persebaran kegiatan operasi dan pemeliharaan Dinas. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Dinas	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.057	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang	Untuk mengetahui aset DPUPP dan aset Pendapatan Asli Daerah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.058	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	Kemudahan administrasi dalam pembuatan SPJ yang masih bersifat manual. Di dalamnya juga terdapat fitur verifikasi berkas spj yang sudah diverifikasi oleh verifikator keuangan sebelum diserahkan ke bendahara pengeluaran, sehingga memudahkan dalam	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				proses verifikasi berkas spj dan pencairan. dan juga bisa digunakan untuk mengetahui realisasi anggaran pada setiap bidang		
AU.059	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan Data Desa Center	Penambahan fitur pendataan dana desa	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.060	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	Aplikasi untuk menyimpan data profil lembaga kemasyarakatan desa, data perangkat desa dan data anggota BPD. Untuk mempermudah pencarian data-data lembaga kemasyarakatan desa, perangkat desa dan anggota BPD.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.061	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pengembangan Pakem Situbondo	Penambahan fitur layanan pengelolaa data gender dan anak serta pengaduan tindak langsung korban kekerasan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.062	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan SIPINTER	Perluasan ijin yang disediakan di dalam aplikasi SIPINTER, penambahan perizinan yang masih manual di dinas terkait yang berujung ke dpmptsp seperti izin praktik infusi darah	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.063	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIMVEST	Sistem Informasi Investasi merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan data penanam modal, membantu pengawasan investasi, serta analisis iklim penanaman modal	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
AU.064	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Antrian	Digunakan untuk pengaturan antrian di tempat pelayanan (MPP Kab Situbondo)	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.065	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi PMP	Penambahan fitur pendataan fasilitasi diklat calon kepala sekolah, asesmen kepala sekolah dan pengembangan PTK	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.066	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sebaya	Penambahan fitur agar mendukung pendataan layanan terkait budaya dan kesenian yang masih dijalankan secara offline	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.067	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi SISPENA	Penambahan fitur pendataan layanan-layanan berkaitan dengan PAUD yang sebelumnya masih terdata secara manual menjadi terdata secara online	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.068	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi	Penambahan fitur yang dapat mendkung layanan izin operasional lembaga/sekolah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.069	29	Dinas Perhubungan	Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	Sistem ini digunakan untuk pengajuan dan penerbitan dokumen surat rekomendasi pada sektor transportasi darat dan laut yang meliputi , rekomendasi trayek, andalalin, rekomendasi izin usaha tranportasi darat dan laut.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik
AU.070	29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	Penambahan fitur pendataan pengujian kendaraan bermotor secara online	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.071	29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Website Dishub	Penambahan fitur pendataan pinjam buku data perhubungan secara online	RAA.01.01 Aplikasi	Publik

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
					Layanan Publik	
AU.072	29	Dinas Perhubungan	Penggunaan SIMPADA	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah: Untuk memonitoring pendapatan secara realtime untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.073	29	Dinas Perhubungan	SITRANS	SI Transportasi: Aplikasi pelayanan jasa transportasi, baik darat, udara, maupun laut	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.074	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Tali Pusar	Penambahan fitur pendataan restorasi dan perbaikan arsip desa	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.075	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TAJINPALAPPA	Digunakan untuk aset Kearsipan yang direncanakan dapat terintegrasi dengan PD lain.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.095	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, aplikasi dari pusat untuk penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip sampai dengan penyusutan arsip.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.076	31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan)	E-KEPANG (Ketahanan Pangan) adalah sistem informasi yang mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga dengan baik.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik
AU.077	32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI Nelayan	Aplikasi yang membantu pendataan terkait nelayan, kawasan ternak ikan, hingga pendataan tempat pemasaran	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.078	32	Dinas Peternakan	SI-Ternak	SI-Ternak ini adalah sistem informasi yang	RAA.02.02	Publik

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		dan Perikanan		menyajikan data bidang peternakan dan mendukung berbagai bentuk pelayanan dan kegiatan peternakan.	Aplikasi Fungsi Tertentu	
AU.079	33	Dinas Sosial	Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	Untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi tentang pelayanan sosial	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.080	33	Dinas Sosial	SISOS	Aplikasi yang mendukung layanan sosial seperti pendataan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS, pemberian bantuan korban bencana alam dan sosial, serta pendataan bantuan kepada fakir miskin.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.081	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan Website Satpol PP	Web portal informasi untuk berita-berita yang mencakup informasi sop dan pelayanan dari dinas serta profil dinas	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.082	34	Satuan Polisi Pamong Praja	Si Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Aplikasi ini dirancang untuk menyajikan data titik-titik kerusahan dan rawan rusuh. Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi sarana masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait permasalah ketertiban umum sehingga petugas lapangan (SATPOL PP) lebih cepat datang ke lokasi yang bermasalah. Aplikasi ini juga dapat mendokumentasikan pelaksanaan penegakan perda.	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.083	34	Satuan Polisi Pamong Praja	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	Sistem ini dirancang untuk pemantauan kebakaran di wilayah pemerintah daerah sehingga titik-titik lokasi rawan kebakaran dan kejadian kebakaran dapat dimonitoring	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				dengan baik		
AU.084	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Aplikasi SIMRS	Penambahan fitur pendataan rujukan pasien RSAR dan pendataan jenazah	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.085	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	REKAM MEDIS ELEKTRONIK	Pencatatan rekam medis pasien secara elektronik untuk menggantikan kertas, sesuai peraturan kementrian kesehatan untuk semua faskes paling lambat akhir 2023 untuk implementasi RME	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.086	35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi	Merupakan sistem informasi untuk mengelola data kefarmasian. Aplikasi diorganisir untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Aplikasi memiliki fitur pemesanan obat dan alat kesehatan ke supplier, penerimaan obat dan alat kesehatan dari supplier, pendataan lokasi obat dan alat kesehatan, penjualan obat dan alat kesehatan pakai resep, rekapitulasi penjualan obat dan alat kesehatan, dan rekapitulasi sisa obat dan alat kesehatan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD
AU.087	36	Kecamatan Situbondo	Penggunaan SP4N LAPOR	Aplikasi untuk mendukung Layanan pengaduan	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.088	38	Puskesmas Situbondo	SIMPUS	Simpus kepanjangan dari Sistem Infromasi Manajemen Puskesmas, dan merupakan program aplikasi yang didesain khusus untuk membantu memudahkan pencatatan data	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD

ID	Kode PD	Nama PD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				pasien, pengolahan dan penyajian data menjadi informasi dalam waktu yang cepat dan tepat.		
AU.089	38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan simesem	pengembangan di kegiatan pemantauan bumil risiko tinggi	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.090	38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan sikda mobile	Pemutakhiran aplikasi sikda mobile	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.091	39	Puskesmas Bungatan	SIMPUS	untuk mengintegrasikan laporan bulanan dan uOPDate secara berkala pada website puksesmas	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.092	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi Laporan Kejadian Bencana	Aplikasi yang dapat mengakomodir laporan kejadian bencana oleh masyarakat	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Publik
AU.093	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	Sistem Informasi Kebencanaan ini merupakan sistem informasi yang menyajikan dan mengelola data terkait kebencanaan. Sistem ini akan menyajikan informasi titik pos kebencanaan dan data tim reaksi cepat, titik-titik rawan bencana, data statistik dampak dan korban bencana, peringatan dini fenomena alam, serta informasi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD
AU.094	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	Sistem yang dapat Mendukung Pengelolaan Gudang Logistik BPBD	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 5

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 5

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.3 Infrastruktur SPBE 1
1.4 Struktur Referensi Infrastruktur SPBE (RAI) 2
1.5 Metadata Infrastruktur SPBE (RAI) 3
BAB 2 METODOLOGI 10
2.1 Analisis Kondisi Eksisting 10
2.2 Analisis Kesenjangan 10
2.3 Analisis Usulan 10
BAB 3 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE 12
3.1 Kondisi Eksisting Infrastruktur 12
3.1.1 Jaringan Intra Pemerintah 12
3.1.2 Ruang Server 15
3.1.3 Komputasi 16
3.1.4 Sistem Penghubung Layanan 18
3.1.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 18
3.1.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE 24
3.2 Kondisi Eksisting Kesenjangan Infrastruktur 27
3.3 Usulan Infrastruktur SPBE 27
3.3.1 Jaringan Intra Pemerintah 28
3.3.2 Ruang Server 43
3.3.3 Sistem Penghubung Layanan 61
3.3.4 Komputasi Awan 67
3.3.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 69
3.3.6 Command Center 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) 3
Tabel 1.2 Atribut Metadata Komputasi Awan 4
Tabel 1.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform 4
Tabel 1.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server 5
Tabel 1.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan 5
Tabel 1.6 Atribut Metadata Perangkat Jaringan 6
Tabel 1.7 Atribut Metadata Perangkat Keamanan 7
Tabel 1.8 Atribut Perangkat Keras Periferal 7
Tabel 1.9 Atribut Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 7
Tabel 1.10 Atribut Jaringan Intra Pemerintah 8
Tabel 1.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi 8
Tabel 3.1 Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo 28
Tabel 3.2 Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo 38
Tabel 3.3 Usulan Ruang Server 43
Tabel 3.4 Usulan pengembangan aspek ruang server sesuai TIA-942 50
Tabel 3.5 Perangkat Pendukung Ruang Server / *Data Center* 50
Tabel 3.6 Usulan Ruang Server 56
Tabel 3.7 Rekomendasi Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional (PDN) 60
Tabel 3.8 Usulan Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Situbondo 61
Tabel 3.9 Amanat Regulasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 62
Tabel 3.10 Usulan Penerapan SPLP Pemerintah Kabupaten Situbondo 64
Tabel 3.11 Usulan Kegiatan Penerapan Komputasi Awan 68
Tabel 3.12 Usulan Perangkat Keras dan Lunak 70
Tabel 3.13 Usulan Perangkat Keras Komputer (PC) 71
Tabel 3.14 Usulan Perangkat Keras Laptop 74
Tabel 3.17 Usulan Perangkat Keras Printer 76
Tabel 3.16 Total Keseluruhan Usulan Perangkat Keras Utama 78
Tabel 3.17 Usulan Perangkat Keras Periferal 78
Tabel 3.18 Usulan Perangkat Jaringan *Modem* 92
Tabel 3.19 Usulan Perangkat Jaringan *Hub/Switch* 94
Tabel 3.20 Usulan Perangkat Jaringan Gateway Router 96
Tabel 3.21 Usulan Perangkat Jaringan *Access Point* 98
Tabel 3.22 Usulan Perangkat Jaringan *Repeater Wifi* 101
Tabel 3.23 Usulan Perangkat Jaringan *Antena Outdoor Wireless* 103
Tabel 3.24 Total Usulan Peremajaan Perangkat Jaringan Intra Pemerintah 105
Tabel 3.25 Usulan Perangkat Media Penyimpanan 107
Tabel 3.26 Usulan Perangkat Lunak *Platform* 108
Tabel 3.27 Usulan Perangkat Lunak *Platform* 118
Tabel 3.28 Peremajaan Perangkat *Command Center* Kabupaten Situbondo 120

Tabel 3.29 Kebutuhan SDM *Command Center* Kabupaten Situbondo..... 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE 3
Gambar 3.1 Ilustrasi *Demilitarized Zone* (DMZ) 30
Gambar 3.2 Ilustrasi Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah 32
Gambar 3.3 Ilustrasi Sistem Pendingin 46
Gambar 3.4 Rekomendasi Sistem Keamanan Fisik 47
Gambar 3.5 Ilustrasi *Environment* Monitoring System 49
Gambar 3.6 Ilustrasi Sistem Penanganan Kebakaran 49
Gambar 3.7 Ilustrasi Konsep DRC (*Disaster Recovery Center*) 55
Gambar 3.8 Rekomendasi SAN IBM FlashSystem 5015 (6x4TB) 106

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas secara umum terkait Arsitektur Infrastruktur SPBE yang akan menjadi dasar acuan dalam penyusunan Buku 5. Penjelasan diawali dengan pengertian infrastruktur SPBE, dilanjutkan dengan penjabaran struktur referensi Arsitektur dan metadata Infrastruktur SPBE yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Draft Arsitektur SPBE Nasional.

1.3 Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang mana merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (Tiga) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Jaringan Intra Pemerintah** merupakan jaringan inter koneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. **Pusat Data nasional** merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5) Berbasis standar umum (*open standard*);
6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

1.4 Struktur Referensi Infrastruktur SPBE (RAI)

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 3 (tiga) tingkat teratas, yaitu:

1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama);1
2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua);
3) Kategori, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam kategori sesuai dengan masing-masing area infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 3 (ketiga).

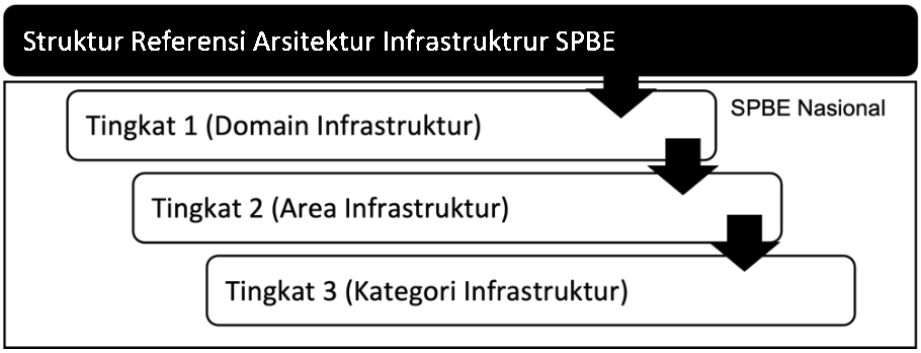

Gambar 1.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

1.5 Metadata Infrastruktur SPBE (RAI)

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.18 Tahun 2022 tentang Keterapaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (tujuh) area ditingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada **Gambar 1.1**. Terkait dengan penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur infrastruktur SPBE akan dijabarkan pada **Tabel 1.1** dan atribut metadata infrastruktur SPBE dijabarkan pada **Tabel 1.2 hingga Tabel 1.11.**

Tabel 1.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitasi Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara sub sistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi *Cloud* untuk lingkungan kerja aplikasi.

Tabel 1.2 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Government Cloud*	Nama *government Cloud* yang digunakan.
3.	Deskripsi *Government Cloud*	Penjelasan dari *government Cloud* yang digunakan.
4.	Tipe *Government Cloud*	Jenis dari *government Cloud* yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS).
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *government Cloud* yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *government Cloud* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan *government Cloud.*
8.	Unit Pengembang *Government Cloud*	Unit yang melakukanpembangunan dan pengembangan *government Cloud.*
9.	Unit Operasional *Government Cloud*	Unit operasional *government Cloud* yang digunakan.
10.	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan *government Cloud.*
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Perangkat Lunak	Nama perangkat lunak yang digunakan.
3.	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari perangkat lunak yang digunakan.
4.	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari perangkat lunak yang digunakan (sistem operasi, sistem utilitas atau sistem *Database*).
5.	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, *Windows*, *Networking* OS atau Lainnya)
6.	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2	(Dos, Unix, MacOS, *Windows*, Networking OS, atau Lainnya)

No.	Nama Atribut	Keterangan
	pada No. 3)	
7.	Jenis Sistem *Database* (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, *Windows, Networking* OS, atau Lainnya)
8.	Jenis Lisensi	Jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan (lisensi seumur hidup, lisensi periodik, atau kode sumber terbuka).
9.	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak.
10.	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3.	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4.	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut antara lain *web server, mail server*, aplikasi, *Database*, file server, *active directory*, dan keamanan informasi.
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *data storage* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola *Server*	Unit pengelola server yang digunakan.
8.	Lokasi *Data Storage*	Lokasi dari data *storage* yang digunakan, pilihanlokasididapatdari metadata fasilitas.
9.	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10.	Kapasitas Penyimpanan	Kapasitas memori atau *Random Access Memory* (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB).
11.	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: *High End, Mid End, Low End*.
12.	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam *Gigabyte* (GB).
13.	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID.
14.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Data Storage*	Nama dari *data storage* yang digunakan.
3.	Deskripsi *Data Storage*	Berisi deskripsi dari *data storage* yang digunakan.
4.	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data dan informasi.
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *data storage* yang digunakan, diisijika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola *Data Storage*	Unit pengelola *data storage* yang digunakan.
8.	Lokasi *Data Storage*	Lokasi dari *data storage* yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9.	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh *data storage*, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10.	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada *data storage*, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
11.	Metode Akses Data *Sharing*	Metodeakses data sharing yang digunakan pada *data storage* (*Direct Attached Storage*/DAS atau *Network Attached Storage*/NAS).
12.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.6 Atribut Metadata Perangkat Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Network/ Communication Device*	Nama *Network/Communication Device* yang digunakan
3.	Deskripsi *Network/ Communication Device*	Penjelasan dari *Network/Communication Device* yang digunakan
4.	Tipe *Network/ Communication Device*	Jenis dari *Network/Communication Device* yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *Network/Communication Device* yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *Network/ Communication Device* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri

No.	Nama Atribut	Keterangan
7.	Unit Pengelola *Network/ Communication Device*	Unit pengelola *Network/ Communication Device* yang digunakan
8.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.7 Atribut Metadata Perangkat Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama *Security Device*	Nama dari *Security Device* yang digunakan
3.	Deskripsi *Security Device*	Penjelasan dari *Security Device* yang digunakan
4.	Tipe *Security Device*	Jenis dari *security device* yang digunakan (*Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control*)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *Security Device* yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik *Security Device* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola *Security Device*	Unit pengelola *Security Device* yang digunakan
8.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.8 Atribut Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Periferal	Nama periferal yang digunakan.
3.	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari periferal yang digunakan.
4.	Tipe Periferal	Jenis dari periferal yang digunakan (*input, output, input/output*).
5.	Lokasi Penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6.	Unit Pengelola *Network/ Communication Device*	Unit pengelola periferal yang digunakan
7.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.9 Atribut Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3.	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4.	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / sistem penghubung non pemerintah).
5.	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik data *storage* yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra pemerintah.
8.	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.10 Atribut Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3.	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan.
4.	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan.
5.	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan.
6.	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan.
7.	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan.
8.	*Bandwidth*	Merupakan jumlah *bandwidth* yang tersedia.
9.	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan.
10.	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 1.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3.	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih.
4.	*Bandwidth* Intranet	Merupakan jumlah *bandwidth* internet yang tersedia selama 1 tahun.
5.	*Bandwidth* Internet	Merupakan jumlah *bandwidth* internet yang tersedia selama 1 tahun.
6.	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas.

No.	Nama Atribut	Keterangan
7.	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas.
8.	Unit Kerja Penanggungjawab	Merupakan unit kerja/perangkatdaerah yang bertanggungjawab atas fasilitas.
9.	Klasifikasi *Tier* Fasilitas	Merupakan klasifikasi *tier* fasilitas.
10.	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

BAB 2
METODOLOGI

Pada bab ini membahas terkait metodologi yang digunakan dalam melakukan analisis Arsitektur Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Buku 5 Infrastuktur SPBE terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang dimulai analisis kondisi eksisting, analisis kesenjangan, dan analisis usulan.

2.1 Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk mengetahui terkait kondisi terkini penerapan infrastruktur yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Proses analisis kondisi eksisting terdiri dari input berupa data yang dihasilkan pelaksanaan survei *online* dan *Offline*, yang kemudian di proses dengan melakukan analisa dan review data. Sehingga, dari proses pengolahan data dapat menghasilkan kondisi eksisting yang secara detail dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 7.**

2.2 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan merupakan proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi terkait tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau tindakan untuk mencapai kinerja yang diharapkan di masa mendatang. Analisis kesenjangan juga membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal terkait infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Input yang digunakan pada tahap ini yaitu berupa data terkait dengan kondisi eksisting dan selanjutnya dilakukan proses membandingkan dari hasil analisis antara kondisi eksisting dengan kondisi infrastruktur SPBE yang diharapkan di masa mendatang.

2.3 Analisis Usulan

Analisis usulan infrastruktur SPBE merupakan saran perbaikan atau rekomendasi pengembangan untuk peningkatan penerapan Infrastruktur dan nilai indeks SPBE domain infrastruktur SPBE yang akan diterapkan pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo. *Input* pada tahap ini merupakan hasil dari analisis kesenjangan yang telah didapatkan dan selanjutnya dilakukan proses Analisa untuk mendapatkan

solusi berupa usulan prioritas infrastruktur. Dari usulan prioritas infrastruktur, nantinya digunakan untuk membantu meningkatkan nilai indeks SPBE yang ingin dicapai pada setiap indikatornya. Adapun indikator capaian keberhasilan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB 3
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Bab ini menjelaskan terkait Arsitektur Infrastruktur SPBE, dimulai dari pembahasan kondisi eksisting infrastruktur SPBE, permasalahan infrastruktur, kondisi kesenjangan infrastruktur, dan usulan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo. Adapun pembahasan infrastruktur yang dimaksudkan yaitu jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang server, komputasi, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak.

3.1 Kondisi Eksisting Infrastruktur

Kondisi Eksisting Infrastruktur sebagaimana dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Bab 7.** Bahwasanya seluruh data Kondisi Eksisting didapatkan dari Hasil Survei *Online*, Survey Lapangan dan dokumen bukti pendukung yang diberikan oleh seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi Eksiting yang akan dijelaskan pada sub-sub dibawah ini terkait dengan pembahasan infrastruktur yang terdiri dari jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang server, komputasi, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak serta dilengkapi dengan permasalahan dan Analisis Kesenjangan dari kondisi eksisting yang didapatkan. Penjabaran kondisi eksisting Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada subbab dibawah ini.

3.1.1 Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi **ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan *bandwidth*** yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo . Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang

ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo **cukup baik** dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah **terpusat** yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan **Fiber Optik dan Wireless PTP** dalam integrasi Jaringan yang digunakan, **keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** . Keseluruhan data eksisting terkait infrastruktur Jaringan didapatkan dari proses pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh surveyor berdasarkan dengan kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjabaran kondisi eksisting jaringan intra pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan pada subbab dibawah ini.

3.1.1.1 Ketersediaan Topologi Jaringan

Kondisi eksisting terkait dengan ketersediaan topologi jaringan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah terintegrasi menggunakan Jaringan Intra Pemerintah melalui **Kabel Fiber Optik** dan ***Wireless* PTP** yang terhubung pada seluruh OPD dan Kecamatan. Penerapan jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan *provider* yang diperuntukan sebagai kebutuhan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah. Terdapat 2 *Provider* (ISP) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Integrasi Jaringan Intra Pemerintah antara lain yaitu:

1. ***Provider* (ISP) Biznet dengan kapasitas 610 Mbps** yang mana penggunaan terbagi dari 460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) + 150 untuk WIFI Publik.
2. ***Provider* (ISP) Megadata dengan kapasitas 250Mbps** yang mana penggunaannya terbagi dari 100 Mbps untuk server (*Dedicated*) + 150 Mbps untuk area publik (*Broadband*).

Saat ini Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat 2 Topologi yaitu Topologi Umum dan Topologi Distribusi. Untuk Topologi Distribusi terdiri dari 4 pendetailan distribusi jaringan

yang terdiri dari Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet OPD, Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik Lingkungan Kantor Bupati, Topologi Distribusi *Wireless* Kecamatan dan Topologi Pusat Server (*Data Center*). Adapun detail terkait dengan Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.1**.

3.1.1.2 Ketersediaan *Bandwidth*

Kondisi eksisting yang didapatkan dari pengumpulan data survei yang dilakukan sebelumnya, diperoleh data terkait dengan ketersediaan *bandwidth* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Adapun Kondisi Eksisting terkait dengan ketersediaan *Bandwidth* pada Pemerintah Kabupaten Situbondo antra lain:

1. Alokasi *bandwidth* yang ada di seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telat terpusat dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
2. Distribusi *Bandwidth* pada masing-masing OPD melalui Jaringan Intra Pemerintah dengan menggunakan media *Fiber optic* dan *Wireless*.
3. Masih terdapat OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa Bandwidth secara mandiri untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD dikarenakan Alokasi Bandwidth yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo melalui Jaringan Intra Pemerintah tidak mencukupi.
4. Tidak adanya pemusataan Anggaran yang dilakukan oleh OPD terkait dengan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *bandwidth* mandiri sehingga terdapat meningkatnya anggaran dan tidak adanya optimalisasi penggunaan *bandwidth*.

Detail terkait dengan Ketersediaan *Bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah pada masing-masing OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.2 Tabel 7.12** dan Daftar

OPD yang melakukan Pengadaan Belanja Internet/Sewa *Bandwidth* secara mandiri dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.2 Tabel 7.13.**

3.1.2 Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022, Ruang Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Kondisi Eksisting terkait Ruang Server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan Server pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang server yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa OPD yang telah meletakkan pada Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server yang dititipkan oleh OPD dan **Belum menerapkan penyimpanan pada Pusat Data Nasional (PDN)**. Penjelasan secara detail terkait dengan Daftar server dan Aspek pusat data akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

3.1.2.1 Daftar Server

Kondisi eksisting terkait dengan data server yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa daftar server yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa OPD. Dari hasil pengumpulan data survei yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat **43 Server** yang dimiliki oleh **14 OPD.** Detail penjabaran daftar server yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.5.1 Tabel 7.14.**

3.1.2.2 Aspek *Data Center* (Ruang Server)

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pusat Data atau Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Tolak ukur kelayakan atau kesiapan sebuah ruang server dalam memenuhi fungsinya salah satunya adalah Aspek pusat data. Terutama apabila ruang server tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data pemerintah daerah. Aspek ruang server perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada **TIA-942 untuk standar yang baik dalam pembuatan serta pemusatan data pada Ruang Server**. Kondisi Eksisting saat ini terkait penerapan Aspek Ruang Server yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu terdapat **10 OPD** yang memiliki Ruang Server dan menerapkan Aspek pada ruang server. Detail terkait Aspek Pusat Data yang diterapkan pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika dan beberapa OPD yang memiliki ruang server dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.5.2 Tabel 7.15.**

3.1.3 Komputasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 pada sub domain Infrastruktur disebutkan komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu **komputasi awan dan fasilitas komputasi**. **Komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem *Cloud*. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih komplek seperti halnya *Cloud computing* ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem *Cloud*.

3.1.3.1 Komputasi Awan

Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS). Salah satu yang sering ditemukan dan paling populer adalah *Google Drive*, yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya. Kondisi eksisting terdapat data penggunaan Komputasi Awan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain penggunaan *Google Drive*, NAS, dan *One Drive*. **Penggunaan Google Drive** sebesar **84%** pada **11 OPD, Penggunaan NAS** sebesar **8%** pada **1 OPD**, dan **Penggunaan *Cloud*** sebesar **8%** pada **1 OPD.** Detail penerapan penggunaan Komputasi Awan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di masing-masing OPD dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.1 Tabel 7.16** dan Grafik Persentase Total Penerapan Penggunaan Komputasi Awan dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.1 Gambar 7.5.**

3.1.3.2 Fasilitas Komputasi (Server)

Kondisi eksisting OPD yang terdapat pada Kabupaten Situbondo hingga saat ini terkait penerapan komputasi awan **belum menyeluruh menerapkan dan hanya terdapat beberapa OPD yang telah menggunakan dan menerapkan**. Detail Penerapan Fasilitas Komputasi dapat diihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.2 Tabel 7.17.**

3.1.4 Sistem Penghubung Layanan

Kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Situbondo Belum **menerapka**n Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan Web Service**. Detail sistem penghubung layanan Komputasi dapat diihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.7 Tabel 7.18.**

3.1.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. **Pengklasifikasian infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perangkat keras dan perangkat lunak**. Perangkat Keras terdiri dari perangkat keras utama, perangkat keras periferal, perangkat jaringan dan perangkat media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada masing-masing OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo .

3.1.5.1 Ketersediaan Perangkat Keras

Ketersediaan perangkat keras pada Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan untuk menunjang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketersediaan Perangkat Keras dibedakan menjadi 4 poin pembahasan yaitu Perangkat Periferal Utama, Perangkat Periferal Pendukung, Perangkat Jaringan dan Perangkat Media Penyimpanan. Berikut penjelasan detail terkait macam-macam perangkat keras

a. Perangkat Periferal Utama

Kondisi eksisting perangkat ***Personal Computer*** **(PC)** yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **1105 PC** dimana mayoritas PC berusia >5 tahun yaitu sejumlah **727 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat PC terbanyak yaitu **RSUD dr. Abdoer Rahem** dengan total perangkat **173 Unit**. Saat ini **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan PC**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan**. Secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.19.**

Kondisi eksisting perangkat ***Laptop*** yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **953 Unit Laptop** dimana mayoritas Laptop berusia >5 tahun yaitu sejumlah **449 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat Laptop terbanyak yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan total perangkat **116** Unit. Saat ini **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan Laptop**, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan**. Secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.20.**

Kondisi eksisting perangkat ***Printer*** yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat *Printer* sejumlah **1307 Unit Printer** dimana mayoritas Laptop berusia >5 tahun yaitu sejumlah **670 Unit**. Adapun OPD yang memiliki Perangkat Printer terbanyak yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan total perangkat **153 Unit**. Saat ini **masih terdapat OPD yang tidak memenuhi terkait dengan Data Ketersediaan *Printer***, berikut OPD yang masih belum memenuhi antara lain **Badan Pendapatan Daerah dan Dinas**

Perhubungan. Secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.21.**

Jumlah total perangkat keras dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.1 Tabel 7.22**, terdapat perangkat keras dengan usia penggunaan lebih dari 5 tahun. Hal tersebut dapat menjadi dasar usulan untuk pengadaan pembaharuan perangkat, dengan usia penggunaan diatas 5 tahun untuk mendukung kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari. Perangkat dengan usia penggunaan tersebut adalah usia optimal untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru, keadaptifan dalam membuka *browser* atau melakukan hal berat pada perangkat keras dengan membuka aplikasi baru, serta menurunnya performa perangkat keras.

b. Perangkat Periferal Pendukung

Perangkat Keras Periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai, mikrofon dan pengeras suara. Detail terkait dengan Perangkat Periferal yang diperoleh dari hasil survei pada **40 OPD** disajikan pada keras dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.2 Tabel 7.23**.

c. Perangkat Jaringan

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 pada pasal 27 ayat (1) huruf b** menjelaskan bahwa jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra pusat dan pemerintah daerah. Agar terlaksananya jaringan intra pemerintah harus memenuhi infrastruktur terkait perangkat konektivitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya infrastruktur jaringan intra pemerintah, Adapun perangkat yang digunakan meliputi ***Modem, Hub/Switch, Gateway-Router, Access Point, Repeater Wifi dan Antena Outdoor.***

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Modem* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 22 (Dua puluh dua) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Modem***. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Modem* Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.24.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Hub/Switch* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh lima) OPD, **terdapat 21 (Dua Puluh Satu) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Hub/Switch***. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Hub/Switch* Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.25.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *gateway/router* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh lima) OPD, **terdapat 27 (Dua puluh tujuh) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Gateway/Router***. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Gateway/Router* Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.26.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Access Point* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 26 (Dua puluh enam) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Access Point***. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Access Point* Kabupaten Situbondo dapat

dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3Tabel 7.27.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *Repeater Wifi* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 6 (Enam) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Repeater Wifi***. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Repeater Wifi* Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3Tabel 7.28.**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 40 (empat puluh) OPD, penggunaan perangkat jaringan *antena outdoor* dari tiap OPD berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun. Dari 40 (empat puluh) OPD, **terdapat 8 (Delapan) OPD yang menggunakan perangkat jaringan *Antena Outdoor***. Detail rincian jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Antena Autdoor* Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.29.**

Disimpulkan dari kondisi eksisting perangkat jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo bahwa tidak seluruh perangkat Jaringan terdapat pada masing-masing OPD dan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat pada masing-masing OPD. Detail data keseluruhan perangkat keras Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1.3 Tabel 7.28.**

d. Perangkat Media Penyimpanan

Kondisi Eksisting yang didapatkan dari hasil survei, pada beberapa OPD terdapat perangkat media penyimpanan yang digunakan antara lain seperti Hardisk *Eksternal* dan *Flashdisk* yang bertujuan untuk menyimpan *backup* data perkantoran ataupun data penting. Detail perangkat media penyimpanan yang ada pada OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo

Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.1 Tabel 7.31.**

3.1.5.2 Ketersediaan Perangkat Lunak

Dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang infrastruktur SPBE adalah tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo . Pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Nasional** disebutkan bahwa **perangkat lunak platform terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi perkantoran** (pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, *tools programming*, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan *video conference*).

Ketersediaan perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Sistem operasi terdiri dari *windows, linux, mac, dual os,* dan lainnya. Sedangkan aplikasi perkantoran terdiri dari *Ms. Office, Google Doc, Google Sheet, Google Slide*, dan lainnya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan lebih detail di bawah ini.

a. Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program booting. bahwa mayoritas penggunaan Sistem Operasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu menggunakan ***Windows*** **dengan Persentase 72%.** Adapun penggunaan sistem operasi lainnya yang digunakan oleh beberapa OPD yaitu **Linux** dengan **Persentase 21%**, **Mac** dengan **Persentase 5%** dan **Dual OS** dengan **Persentase 2%.** Detail terkait dengan penggunaan Sistem Operasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi**

Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.2.1 Gambar 7.10.

b. Aplikasi Perkantoran

Perangkat lunak aplikasi perkantoran digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dari masing-masing OPD. Penggunaan perangkat lunak aplikasi perkantoran dibagi beberapa bagian yaitu Aplikasi perkantoran pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, tools programming, DBMS, penyuntingan *video, browser, dan video conference*. Mayoritas penggunaan aplikasi perkantoran yaitu ***Browser*** yang terdiri dari penggunaan (*Crome,Mozilla Firefox, Internet Explore* dan beberapa Aplikasi *Browser* lainnya) dengan persentase **20%**. Adapun aplikasi perkantoran lainnya yang digunakan yaitu **Editing Foto** dengan **persentase 15%**, **Pemrosesan Kata dan Permrosesan Angka** dengan **persentase 14%**, **Pemrosesan Visual** dengan persentase **11%**, ***Video Conference*** dengan **Persentase 9%, Tools Programming** dengan **persentase 8%, *Tools DBMS*** dengan **persentase 6%** dan **Editing Foto** dengan **persentase 3%**. Detail terkait dengan penggunaan Aplikasi Perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.8.2.2 Gambar 7.11.**

3.1.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kabupaten Situbondo yang didapatkan dari Hasil Pengumpulan Data Survei terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah, Permasalahan Ruang Server/Server, Permasalahan Sistem Penghubung Layanan, Permasalahan Perangkat Keras dan Lunak (Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran). Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur dibahas pada sub bab berikut.

a. Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Permasalahan Jaringan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Jaringan Intra yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Putus, Jaringan Internet Lambat, dan Kerusakan Perangkat Keras Jaringan. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase terjadinya jaringan internet lambat 44%, Internet Putus sebanyak 36**%**, kerusakan perangkat keras lainnya 11% dan kerusakan *Modem* 9**%**. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Jaringan yang mayoritas dihadapi oleh OPD di Kabupaten Situbondo yaitu **Permasalahan terkait jaringan internet lambat** dengan persentase **44%**. Detail terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.1 Gambar 7.12.**

b. Permasalahan Ruang Server

Permasalahan Ruang Server / Server yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Ruang Server yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Server *Down*, Kelistrikan, Kehilangan data, Perangkat dan Peralatan Rusak, Ruang Server tidak memenuhi Aspek dan Permasalahan Jaringan. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Ruang Server yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase terjadinya **Perangkat dan Peralatan Server Rusak** sebanyak **36%**, **Ruang Server tidak memenuhi aspek** sebanyak **23%**, **Permasalahan Jaringan** sebanyak **14%**, **Server *Down* (*Down Time*)** sebanyak **9%**, **Kelistrikan (sering mati)** sebanyak **9%**, dan **Kehilangan Data** sebanyak **9%**. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Ruang Server yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Perangkat dan Peralatan Server Rusak** dengan Persentase sebanyak **36%** dan **Ruang Server Kurang Memenuhi Aspek** dengan Persentase sebanyak **23%**. Detail terkait dengan

permasalahan Ruang Server di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.2 Gambar 7.13.**

c. Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk saat ini yang dialami cukup signifikan dikarenakan **belum menerapkan** Sistem Penghubung layanan yang melalui Web API secara menyeluruh serta efisien dan **belum menerapkan penggunaan SPLP** yang disediakan oleh pusat (Kemkominfo).

d. Permasalahan Perangkat Keras

Permasalahan Perangkat Keras yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Kerusakan *Keyboard/mouse*, Kerusakan Komputer, Kerusakan Laptop, Kerusakan Printer. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Keras yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu persentasi **kerusakan *printer*** sebanyak **27%**, **kerusakan laptop** sebanyak **26%**, **kerusakan komputer** sebanyak **25%** dan **kerusakan *keyboard/mouse*** sebanyak **22%**, Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Keras yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Kerusakan *Printer*** dengan persentase sebanyak **27%**. Detail terkait dengan permasalahan Perangkat Keras di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.4 Gambar 7.14.**

e. Permasalahan Perangkat Lunak

Permasalahan Perangkat Lunak yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Aplikasi Perkantoran yang *hang* dan *Update* OS terlalu sering. Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain yaitu Persentase *Update* OS terlalu sering sebanyak 53% dan Aplikasi Perkantoran yang *hang* sebanyak

47%. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Lunak yang mayoritas di Kabupaten Situbondo yaitu **Update OS terlalu sering** dengan Persentase sebanyak 53%. Detail terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.9.5 Gambar 7.15.**

3.2 Kondisi Eksisting Kesenjangan Infrastruktur

Analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisis kesenjangan diperlukan untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.10 Tabel 7.32.**

3.3 Usulan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan hasil analisis yang didapatkan dari pengumpulan data kondisi eksisiting Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka terdapat usulan terkait dengan Infrastruktur SPBE yang terdiri dari **jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang server, komputasi awan, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak.** Rekomendasi Usulan terkait dengan Infrastruktur SPBE yang berkaitan dengan Ruang Server yaitu berdasarkan dengan standar **TIA-942 dan SNI Pusat Data terkait Standar Pusat Data**. Dalam usulan infrastruktur didasari dengan kondisi infrastruktur yang digunakan saat ini dengan mempertimbangkan usia perangkat dan efisiensi penggunaannya, maka dari itu diperlukan peremajaan infrastruktur. Terdapat usulan infrastruktur SPBE yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam membangun Infrastruktur SPBE yang lebih baik, efisien, dan berintegrasi sesuai dengan tujuan selama 5 tahun kedepan. Berikut merupakan usulan pembangunan infrastruktur dan penjabaran detail pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dijelaskan pada **sub bab 3.3.1-3.3.6.**

3.3.1 Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapatkan dari data survei dan analisis terkait Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini telah menerapkan jaringan intra pemerintah yang telah terintegrasi dan didistribusikan pada seluruh OPD yang ditunjukkan dengan adanya Topologi Jaringan dalam bentuk Fisik ataupun *Logic*, kepemilikan perangkat Jaringan yang dimiliki, penggunaan *fiber optic* dan *Wireless* dalam integrasi Jaringan, dan pemusatan jaringan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan usulan jaringan intra yang ditampilkan pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1 Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
JARINGAN INTRA PEMERINTAH				
1	DED Jaringan Intra Pemerintah	Perancangan *blueprint* jaringan intra pemerintah Kabupaten Situbondo yang mencakup spesifikasi umum, spesifikasi teknis dan gambar teknis.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023-2024**
2	Pengelompokan *Area Demilitarized Zone* (DMZ) Server	Penerapan DMZ (*Demilitarized Zone*) pada server digunakan untuk keamanan pada server yang digunakan saat terhubung dengan Jaringan luar server dan dalam server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023-2024**
3	Kajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023**
4	Optimalisasi Topologi Jaringan Intra	Melakukan *Update* terkait dengan beberapa elemen integrasi tambahan yang terhubung dengan Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023**
5	Belanja internet terpusat dan Optimalisasi *Bandwidth*	Penambahan Alokasi *Bandwidth* untuk Jaringan Intra Pemerintah (Belanja Internet Tepusat).	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**Setiap Tahun (2023-2027)**
6	Reviu Kebijakan dan Tatakelola	Melakukan Reviu Kebijakan Perbub ataupun peraturan	Dinas Komunikasi	**2023-2027**

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
JARINGAN INTRA PEMERINTAH				
	Jaringan Intra Pemerintah yang telah disesuaikan dengan KEPMEN 962	terkait yang berhubungan dengan penerapan jaringan intra pemerintah Kabupaten Situbondo apakah sudah sesuai dan relevan atau tidaknya.	dan Informatika Kabupaten Situbondo	
		Memastikan Penerapan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah telah Mencakup seluruh kebutuhan penerapan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo		

Berdasarkan dengan **Tabel 3.1** menjelaskan terkait dengan usulan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang mana terdapat 6 usulan, detail setiap usulan akan dijelaskan pada sub-sub bab dibawah ini.

3.3.1.1 Usulan DED Jaringan Intra Pemerintah

Detail Engineering Design (DED) adalah perencanaan yang lebih rinci dan lengkap dalam bentuk gambar-gambar desain beserta spesifikasinya yang siap dilaksanakan di lapangan yang hasilnya berupa produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED Jaringan Intra juga digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan infrastruktur jaringan yang telah dibangun ataupun yang akan dibangun.

Perancangan DED Jaringan Inta Pemerintah harus sesuai dengan kondisi riil yang ada pada lapangan. Perancangan DED Jaringan Intra Pemerintah sekurang-kurangnya mencakup beberapa spesifikasi antara lain:

a. Spesifikasi Umum

Spesifikasi umum meliputi penjabaran mengenai sasaran pekerjaan, ruang lingkup pengerjaan, sistematika pelaporan, dan teori umum terkait aspek yang akan dibahas terkait Jaringan Intra Pemerintah.

b. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis meliputi penjabaran teknis komponen jaringan yang direkomendasikan oleh perencana yang sekurang-kurangnya mencakup kegunaan, gambar perangkat, dan detail spesifikasi perangkat. Selain itu,

spesifikasi teknis juga meliputi pedoman teknis pekerjaan jaringan, dan kerangka acuan kerja dalam penerapan jaringan intra pemerintah.

c. Gambar Teknis

Gambar teknis merupakan gambaran/*blueprint* dari pekerjaan yang direncanakan termasuk didalamnya adalah usulan topologi jaringan dan usulan peta distribusi jaringan intra pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada.

3.3.1.2 Usulan Pengelompokan Area Demilitarized Zone (DMZ)

DMZ adalah standar pengamanan jaringan dari trafik yang tidak tepercaya seperti keamanan jaringan lokal yang, berfungsi melindungi sistem dari peretas yang ingin mencoba memaksa masuk ke dalamnya tanpa memiliki izin akses. DMZ *network* jika dianalogikan adalah sebuah area sub jaringan yang digunakan untuk alasan keamanan. Penggunaan DMZ berarti telah memberikan izin akses kepada pihak yang tepercaya, seperti internet, dan dengan terus menjaga jaringan lokal tetap aman yang digunakan digunakan untuk menyimpan sumber daya, server untuk DNS, FTP, VoIP, dan layanan eksternal.

Penerapan DMZ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu sebagai sebagai penyaring bagi jaringan internal karena peretas hanya memiliki akses *host* di DMZ saja dan untuk mencegah serta melindungi sistem internal dari *hacker* yang menyerang server yang disimpan di dalam DMZ, hanya dapat mendapatkan akses *host* yang berada di DMZ, bukan pada jaringan internal. Rekomendasi terkait dengan **Penerapan Demilitarized Zone (DMZ) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat diterapkan pada rentan Tahun 2023 hingga 2024.** Berikut merupakan Ilustrasi penggunaan DMZ yang dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

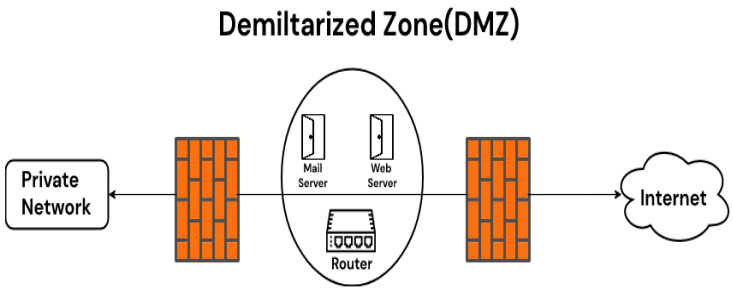

Gambar 3.1 Ilustrasi *Demilitarized Zone* (DMZ)

3.3.1.3 Usulan Kajian Penerapan Jaringan Intra

Berdasarkan dengan kondisi eksiting diperlukan kegiatan **Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah** yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana kesesuaiaan dan tingkat optimal dari penerapan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa dokumen perencanaan jaringan intra pemerintah. Dengan adanya Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo maka dapat mengetahui kebutuhan yang akan mendatang terkait ketidaksesuaian Jaringan Intra Pemerintah yang telah diterapkan dan permasalahan yang terjadi selama ini. Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah didalamnya membahas beberapa **pembahasan teknis yang meliputi Analisis topologi jaringan intra yang dimiliki saat ini, Optimalisasi penggunaan perangkat jaringan, penerapan DMZ, optimalisasi penerapan jaringan pada seluruh OPD, integrasi koneksi jaringan pada OPD yang belum terkoneksi dan menentukan kebutuhan *bandwidth* masing-masing OPD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. **Kajian penerapan Jaringan Intra Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo diusulkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023** oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo selaku penanggungjawab penerapan Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Situbondo.

3.3.1.4 Usulan Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah

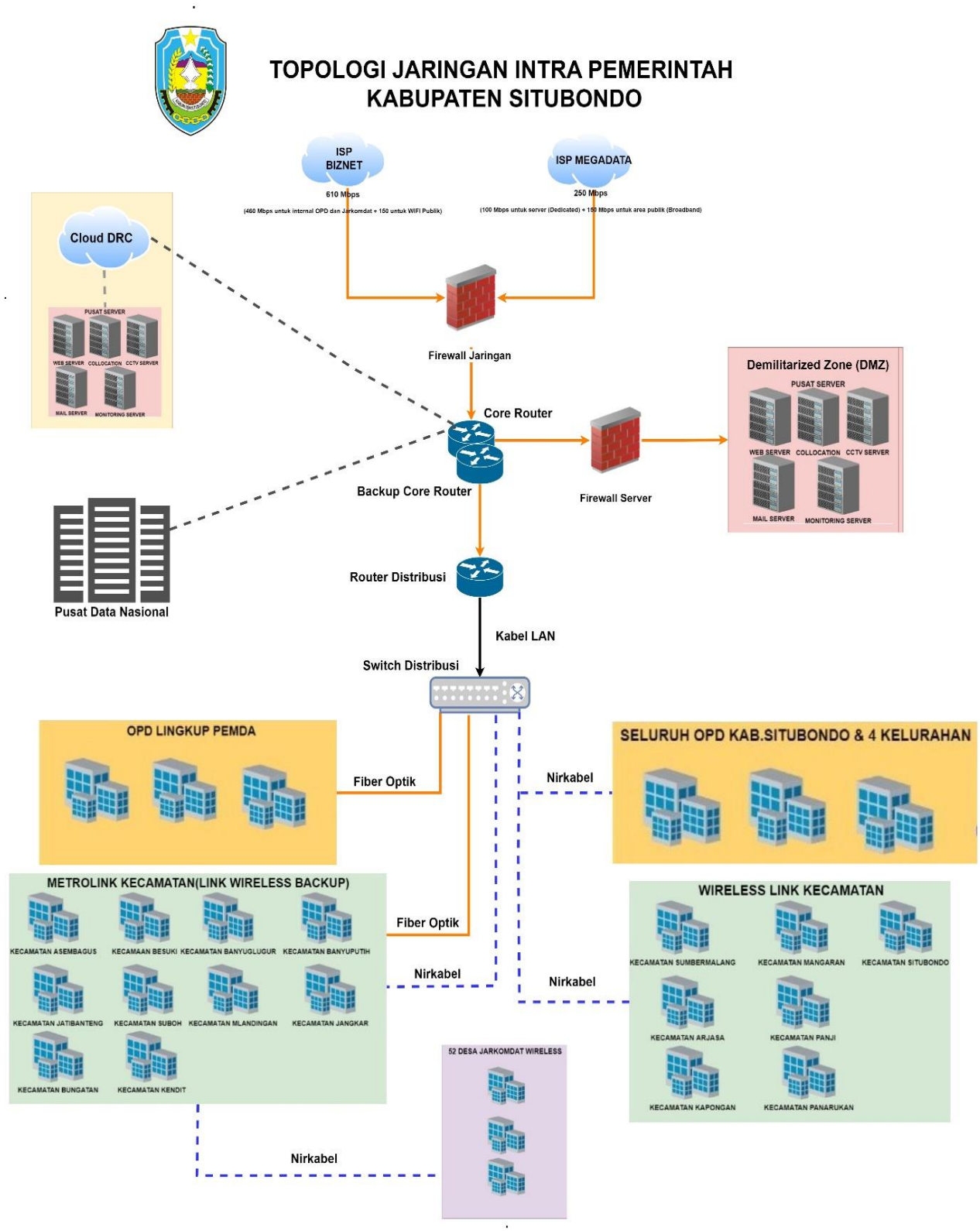

Gambar 3.2 Ilustrasi Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan Topologi Jaringan Eksisting yang dimiliki saat ini terdapat beberapa Rekomendasi Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah pada **Gambar 3.2** yang didapatkan dari hasil analisis untuk lebih efisien terkait Topologi Jaringan yang digunakan, antara lain yaitu:

1. **Penambahan Perangkat *Firewall***

   Tujuan dari penambahan *Firewall* sebagai bentuk penerapan keamanan pada jalur distribusi Jaringan Intra Pemerintah yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Situbondo. Penempatan dari perangkat *Firewall* yaitu pada setelah *Core Router* yang mana jaringan akan menuju ke Server. Penempatan *Firewall* disini bertujuan untuk melakukan penyaringan terhadap masuk keluarnya aktifitas data dari server ke luar server. Dan sebagai management pintu akses ip yang boleh dan yang tidak boleh mengakses data pada server atau bisa disebut pengontrol lalu lintas data tersebut.

2. **Penambahan *Backup Core Router*.**

   Pada kondisi eksisting masih belum mempertimbangkan perangkat ganda pada titik vital atau tingkat resiko tinggi. maka dari itu adanya pengusulan perangkat *Backup Core Router* yang bersifat otomatis *backup* apabila terjadi permasalahan pada *Core Router* maka *Backup router* akan berfungsi sebagai pengganti *Core Router* yang mengatur mengatur seluruh aktifitas Jaringan.

3. **Melakukan DMZ (*Demilitarized Zone*) Server**

   Penerapan DMZ (*Demilitarized Zone*) pada server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yaitu untuk keamanan pada server yang digunakan yang terhubung dengan Jaringan. Dikarenakan web server maupun juga mail server termasuk server yang bisa diakses dari luar, maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika yang saat ini memiliki atau menggunakan mail server dan web server harus mampu melindunginya server yang ada dengan perlindungan yang berlapis-lapis di dalam jaringan komputer yang bertujuan agar orang lain atau pihak luar tidak sampai berhasil mendapatkan data-data penting yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan semua pengguna yang terkoneksi pada server.

4. **Penambahan Jalur Koneksi ke DRC**

   Penggunaan DRC diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang nantinya digunakan untuk memulihkan infrastruktur pasca bencana ataupun terjadinya insiden tidak terduga pada *Data Center* sehingga dapat menyelamatkan dan menduplikasi data yang tersimpan di *Data Center* utama. Maka diperlukan koneksi pada *Cloud* DRC yang terhubung melalui *Core Router* yang nantinya dapat langsung terkoneksi pada *Data Center*.

5. **Penambahan koneksi ke PDN**

   Penambahan koneksi ke Pusat Data Nasional bertujuan untuk mempersiapkan jalur khusus yang nantinya apabila *Data Center* dari Pemerintah Kabupaten Situbondo terkoneksi pada Pusat Data Nasional maka sudah ada jalur yang telah disediakan sebelumnya.

3.3.1.5 Usulan Belanja internet terpusat dan Optimalisasi *Bandwidth*

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, untuk mengurangi terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan, maka perlu adanya integrasi penganggaran bagi kebutuhan berbasis elektronik. Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah perlu dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Pemerintah Daerah. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE menjadi salah satu indikator penilaian dalam pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE yang tercantum dalam **Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik** pada **Indikator 13** "Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE". Sehingga, rekomendasi yang diberikan untuk mendukung penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu untuk dapat **menerapkan belanja internet terpusat setiap tahunnya**, sebagai upaya dalam menciptakan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE.

Bandwidth adalah maksimal besar *transfer* yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Terkait *bandwidth* internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Kebutuhan *bandwidth* berbeda-beda untuk jaringan komputer yang berbeda. Dalam konteks koneksi Internet, makin banyak Pengguna yang membutuhkan Kecepatan Koneksi Internet yang sama, makin Besar *Bandwidth* yang dibutuhkan kantor tersebut. Guna menghitung Kebutuhan *Bandwidth* sebuah kantor maka perlu menghitung hal berikut ini:

1. Jumlah perangkat yang terkoneksi internet
2. Jumlah SDM yang mengakses Internet pada masing-masing OPD
3. Batas maksimal *bandwidth* yang diijinkan untuk setiap perangkat

Berdasarkan Kondisi Eksisting terkait *bandwidth* yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini dapat dikatakan masih kurang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pada masing-masing OPD, maka dari itu diperlukan usulan penambahan *bandwidth* pada masing-masing OPD secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing OPD yang sangat banyak dan melihat jumlah SDM pada OPD tersebut. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pembagian di seluruh OPD antara lain yaitu banyak yang mengeluhkan untuk akses internet (*banwidth*) yang lambat, kondisi OPD yang jauh (terhubung *wireless*) dan beberapa keluhan tersebut dikarenakan kurang adanya Tim IT pada OPD. Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan perhatian khusus antara lain:

1. Melakukan kajian kembali terkait penyediaan *bandwidth* yang diberikan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan mempertimbangkan meningkatnya kebutuhan penggunaan jaringan dan aplikasi yang ada pada masing-masing OPD. Selain itu adanya pengelolaan *Data Center* dan atau Ruang Server pada beberapa OPD yang ada di Kabupaten Situbondo perlu dipertimbangkan sebagai prioritas penambahan jumlah *bandwidth* pada OPD tersebut guna memastikan terpenuhinya kebutuhan internet.

2. Memastikan perangkat Jaringan yang digunakan dapat mendukung untuk memperluas cakupan akses internet pada setiap ruangan OPD dikarenakan tidak memperbolehkan untuk mengadakan perangkat Jaringan dan penyewaan *provider* selain yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo maka dari itu bertanggung jawab atas keseluruhan akses internet yang terhubung sebagai bentuk upaya maksimal Jaringan Intra Pemerintah yang baik.
3. Memperhatikan OPD yang terhubung Jaringan Intra Pemerintah menggunakan media *Wireless* dikarenakan lokasi yang cukup jauh, serta mengintegrasikan seluruh OPD yang belum terhubung menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Ketiga usulan tersebut menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan *bandwidth* secara baik dan efisien untuk digunakan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menunjang kinerja dan operasional seluruh OPD. Adapun beberapa pertimbangan dalam melakukan pemetaan pembagian bandwidth pada masing-masing OPD antara lain:

1. Melihat OPD yang memiliki Layanan Publik yang lebih banyak dan yang mana konsen pelayanannya membutuhkan alokasi bandwidth cukup banyak.
2. Melihat urgensi dari tingkat kebutuhan OPD yang memiliki prioritas utama untuk dilakukan penambahan alokasi *bandwidth*.
3. Melihat data kepemilikan aplikasi yang ada di masing-masing OPD, Jumlah pengguna, dan Intensitas penggunaan Aplikasi.

Berdasarkan dengan empat pertimbangan diatas, maka hal tersebut menjadi bentuk pertimbangan dalam pemanfaatan *bandwidth* secara baik dan efisien untuk digunakan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menunjang kinerja dan operasional seluruh OPD. Oleh karena itu dalam pengusulan kebutuhan *bandwidth* perlu adanya kajian dalam penambahan jumlah *bandwidth* untuk mengetahui jumlah kedepannya yang dibutuhkan oleh setiap OPD.

Adapun beberapa hal yang dapat menentukan jumlah kebutuhan bandwidth yaitu:

a. Melakukan Perhitungan Jumlah *Traffic* Rata-Rata

   Jumlah *traffic* rata-rata didapatkan berdasarkan data kondisi eksiting yang diterima melalui aplikasi monitoring jaringan yang digunakan (MRTG/PRTG). Hasil dari *traffic* monitoring jaringan akan digunakan untuk mengetahui jumlah penggunaan *Bandwidth* pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo pada rentan waktu tertentu.

b. Melakukan Perhitungan*Traffic* Puncak

   Perhitungan *Traffic* puncak digunakan untuk mengantisipasi penggunanan internet secara berlebih ketika melakukan akses server daerah dan nasional. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bentuk pertimbangan dalam memperkirakan seberapa besar penggunaan jumlah *bandwidth* yang harus digunakan untuk mengkases server daerah dan nasional.

c. Melakukan Perhitungan Jumlah Perangkat yang terhubung Jaringan

   Setiap perangkat yang terhubung jaringan akan menggunakan *bandwidth* dari jaringan tersebut sehingga perlu dijumlah untuk total pengguna. Berikut merupakan rata-rata penggunaan *bandwidth* yag dapat digunakan sebagai referensi perhitungan rata-rata:

   1. *Browsing Website* : 1-5 Mbps
   2. *Streaming Video* : 3 - 10 Mbps
   3. *Video Call (Zoom)* : 5-20 Mbps
   4. *Download File* : 5-50 Mbps

   Perhitungan diatas dengan mempertimbangkan berapa banyak orang yang terhubung, apabila semakin banyak yang terhubung pada jaringan maka akan semakin besar kebutuhan *bandwidth* yang diperlukan pada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

d. Menghitung Jumlah Aplikasi yang Digunakan

   Aplikasi yang digunakan juga mempengaruhi kebutuhan *bandwidth*. Semakin banyak aplikasi yang digunakan dan berjalan maka diperlukan *bandwidth* yang cukup.

Dari 4 aspek diatas maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan pengusulan **penambahan jumlah *bandwidth* idealnya** sebesar **10%** berdasarkan *best practice* untuk setiap tahunnya guna mengetahui apakah penambahan *bandwidth* sudah ideal atau belum. Berikut merupakan detail penambahan jumlah bandwidth pada masing-masing OPD yang dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo

Kode OPD	Nama OPD	Bandwidth (Mbps)		Jenis Koneksi
		Upload	Download	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
3	Bagian Hukum	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
6	Bagian Umum	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
7	Bagian Organisasi	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
11	Inspektorat	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	50 Mbps	50 Mbps	Wireless
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50 Mbps	50 Mbps	*Fiber optic*
15	Badan Pendapatan Daerah	50 Mbps	50 Mbps	Wireless
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50 Mbps	50 Mbps	*Fiber optic*
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 Mbps	50 Mbps	*Fiber optic* (Metrolink)+Wireless
18	Dinas Kesehatan	40 Mbps	40 Mbps	Wireless
19	Dinas Ketenagakerjaan	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
20	Dinas Komunikasi dan	150 Mbps	150 Mbps	Fiber Optik

Kode OPD	Nama OPD	Bandwidth (Mbps)		Jenis Koneksi
		Upload	Download	
	Informatika			
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
22	Dinas Lingkungan Hidup	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic*
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60 Mbps	60 Mbps	Wireless
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
29	Dinas Perhubungan	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic* (Metrolink)+Wireless
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
33	Dinas Sosial	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
34	Satuan Polisi Pamong Praja	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	50 Mbps	50 Mbps	Wireless
36	Kecamatan Situbondo	30 Mbps	30 Mbps	Wireless
37	Kecamatan Bungatan	30 Mbps	30 Mbps	*Fiber optic* (Metrolink)+Wireless
38	Puskesmas Situbondo	20 Mbps	20 Mbps	Wireless
39	Puskesmas Bungatan	20 Mbps	20 Mbps	Wireless
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30 Mbps	30 Mbps	Wireless

Berdasarkan dengan **Tabel 3.2** menjelaskan bahwa Penambahan *bandwidth* pada masing-masing OPD didapati berdasarkan dengan dengan hasil pemetaan dan

mempertimbangkan beberapa aspek dalam usulan penambahan alokasi *bandwidth*. Berikut detail terkait dengan penambahan alokasi bandwidth pada masing-masing OPD antara lain:

1. **Penambahan 10 Mbps**

   Penambahan 10 Mbps saat ini diusulkan pada 31 OPD dikarenakan kondisi yang sebelumnya (Eksisting) yaitu sebesar 20 Mbps maka dari itu untuk mendukung operasional dan pelayanan pada 31 OPD tersebut maka diperlukan penambahan, maka total bandwidth yang didapatkan sebesar 30 Mbps untuk upload dan download.

2. **Penambahan 20 Mbps**

   Penambahan 20 Mbps saat ini diusulkan pada 1 OPD yaitu Dinas Kesehatan, dikarenakan kondisi yang sebelumnya (Eksisting) yaitu sebesar 20 Mbps maka dari itu untuk mendukung operasional dan pelayanan pada Dinas Kesehatan maka diperlukan penambahan, maka total bandwidth yang didapatkan sebesar 40 Mbps untuk upload dan download.

3. **Penambahan 30 Mbps**

   Penambahan 30 Mbps saat ini diusulkan pada 5 OPD yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi yang sebelumnya (Eksisting) yaitu sebesar 20 Mbps maka dari itu untuk mendukung operasional dan pelayanan pada 5 OPD tersebut maka diperlukan penambahan dengan pertimbangan 5 OPD tersebut memiliki Potensi terkait dengan Pelayanan yang ada pada OPD, maka total bandwidth yang didapatkan sebesar 50 Mbps untuk upload dan download.

4. **Penambahan 40 Mbps**

   Penambahan 40 Mbps saat ini diusulkan pada 2 OPD yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RSUD dr. Abdoer Rahem. Kondisi yang sebelumnya (Eksisting) yaitu sebesar 20 Mbps untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 10 Mbps untuk RSUD dr. Abdoer Rahem. Pertimbangan untuk mendukung operasional dan pelayanan pada 2

OPD tersebut maka diperlukan penambahan dikarenakan OPD tersebut memiliki Potensi terkait dengan Pelayanan yang ada pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka total bandwidth yang didapatkan sebesar 60 Mbps upload dan download untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 50 Mbps Upload dan Download untuk RSUD dr. Abdoer Rahem.

5. **Penambahan 50 Mbps**

   Penambahan 50 Mbps saat ini diusulkan pada 1 OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan kondisi yang sebelumnya (Eksisting) yaitu sebesar 100 Mbps maka dari itu untuk mendukung operasional dan pelayanan pada seluruh OPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo diperlukan penambahan alokasi bandwidth dengan mempertimbangkan kebutuhan terkait Pusat Data, Aplikasi, Command Center dan Jaringan intra Pemerintah, maka total bandwidth yang didapatkan sebesar 150 Mbps untuk upload dan download.

Adapun usulan terkait dengan Pembagian *bandwidth* pada masing-masing OPD yaitu mengoptimalkan penggunaan *bandwidth* dan diperlukan **manajemen *bandwidth*** untuk membagi *bandwidth* yang tersedia secara maksimal.

3.3.1.6 Usulan Reviu Kebijakan dan Tatakelola Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,** setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah. Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:

a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah.

b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, penilaian terkait kebijakan dan tata kelola jaringan intra pemerintah diatur pada **Indikator 6** terkait "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah". Mengacu pada peraturan tersebut, kebijakan internal jaringan intra pemerintah harusnya mengatur terkait pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penilaian terkait kebijakan dan tata kelola jaringan intra pemerintahan dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Probolingo telah mendapatkan **nilai 4,10** pada **Domain Kebijakan SPBE** dan **nilai 1.8** pada **Domain Tata Kelola SPBE** yang dibuktikan dengan adanya **Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang SPBE yaitu pada pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 halaman 8 s/d 10 tentang Arsitektur SPBE. Kebijakan Internal Jaringan Intrapada pasal 27 ayat (2) dan (3), hal 16 tentang Jaringan Intra.** dimana diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan **Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, usulan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk dapat meningkatkan nilai pada indikator 6 yaitu dengan menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3.3.2 Ruang Server

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait Ruang Server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan *Data Center*** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, kondisi ruang server yang belum memenuhi aspek secara menyeluruh dan belum dilengkapi dengan adanya standard keamanan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang diterapkan pada ruang server.** Pedoman untuk penggunaan dan penerapan pusat data secara umum adalah TIA 942 dan SNI Pusat data. Kedua standar tersebut dapat menjadi acuan dalam standarisasi Gedung pusat data dan penerapan aspek-aspek pusat data. Usulan terkait dengan Ruang server terdiri dari usulan DED Ruang Server, Pemenuhan Aspek Ruang Server, Manajemen dan Tata Kelola Ruang Server, Pengadaan Perangkat Penyimpanan/*Storage*, Pemusatan Server pada *Data Center*, Pengadaan Perangkat Keamanan dan Penerapan standard Keamanan. Seluruh Usulan Ruang Server (*Data Center*) akan dijelaskan pada **Tabel 3.3** dan penjelasan sub sub bab dibawah ini.

Tabel 3.3 Usulan Ruang Server

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
RUANG SERVER (*DATA CENTER*)				
1	DED Ruang Server (*Data Center*)	Perancangan *Blueprint* Ruang Server dan Pemenuhan aspek Ruang Server Sesuai TIA 942.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023-2024**
2	Pemusatan Server OPD pada Ruang Server Diskominfo	Memastikan seluruh OPD yang memiliki server untuk melakukan pemusatan server pada ruang server diskominfo sebagai penerapat pusat data	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023**
4	Reviu Kebijakan dan	Melakukan Reviu Kebijakan Perbub ataupun peraturan	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023-2027**

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
RUANG SERVER (*DATA CENTER*)				
	Tatakelola	terkait yang berhubungan dengan penerapanPusat Data/*Data Center*/Ruang Server pemerintah Kabupaten Situbondo apakah sudah sesuai dan relevan atau tidaknya.	Kabupaten Situbondo	
		Memastikan Penerapan Tata Kelola Pusat Data/*Data Center*/Ruang Server Pemerintah telah Mencakup seluruh kebutuhan penerapan Pusat Data/*Data Center*/Ruang Server yang ada di Kabupaten Situbondo.		
4	Penerapan Penggunanan DRC (Disaster Recovery Center)	Penggunaan *Media Backup* Data untuk menyelamatkan dan menduplikasi data yang tersimpan di *Data Center* utama	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2025**
PUSAT DATA NASIONAL (PDN)				
1	Penggunaan Fasilitas Pusat Data Nasional	Melakukan Penerapan Pusat Data Nasional sesuai dengan Arahan Pusat dalam pemanfaatannya dan Sesuai dengan pemenuhan aspek dalam penerapan PDN.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023-2027**

3.3.2.1 Usulan DED Ruang Server

Pembangunan/Pemenuhan aspek pada Ruang Server sebagai pusat data yang ada di Pemerintahan Kabupaten Situbondo harus memenuhi beberapa aspek terkait dengan ruang server. Maka dari itu diperlukan peningkatan yang dapat dilakukan pada ruang server yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Situbondo diantaranya dengan Melakukan Pemenuhan Aspek Standar Ruang Server sesuai dengan standar TIA 942 untuk pengamanan Ruang Server. Sesuai dengan Standar TIA 942 terkait dengan Aspek yang harus dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo terkait Ruang Server sebagai *Data*

Center antara lain dengan menerapkan Standar minimum yang ditentukan dalam TIA 942 memiliki delapan (8) komponen sebagai berikut:

1. **Penentuan Lokasi**

   Penentuan lokasi untuk ruang server atau ruang server mensyaratkan bahwa lokasi harus dapat dikembangkan *(expandable)*. Sebuah ruang server atau ruang server dapat menempati satu ruangan dari sebuah bangunan, satu atau lebih lantai, atau seluruh bangunan. Pertimbangan lokasi merupakan syarat terpenting yang harus dipenuhi untuk mengantisipasi kebutuhan IT yang selalu meningkat, terutama pertambahan perangkat keras *(hardware)*. Dalam Standar TIA 942 disyaratkan bahwa lokasi ruang server atau ruang server harus bebas dari interferensi peralatan elektronik yang dapat menimbulkan gangguan elektromagnetis. Untuk ukuran ruangan, standar TIA 942 mensyaratkan agar ruangan ruang server atau ruang server disesuaikan dengan kebutuhan sekarang dan pengembangan *(expendable)*. Tata letak ruang server terdiri dari pembagian Ruang tamu/kunjungan/kantor, ruang monitoring, ruang server, ruang penyimpanan dan ruang kelistrikan.

2. **Penggunaan Raised Floor**

   Raised floor berfungsi sebagai akses jaringan kabel data serta membantu dalam mengatur sirkulasi udara. Ketinggian lantai perlu diperhatikan menyesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan ukuran dan bentuk ruangan, berapa banyak udara dingin yang ingin dialirkan dan berapa banyak perangkat yang akan dilewatkan. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kemampuan lantai dalam menahan beban sehingga pembangunan raised floor menjadi lebih efektif. Tinggi dari *raised floor* yang dapat dibuat pada ruang server Dinas KomunikasI, Informatika, Statistik dan Persandian setinggi 5-7 cm dengan luas panel menyesuaikan eksisting ruangan. Disarankan untuk tidak meletakkan kabel dibagian *raised floor* tetapi dibagian langit-langit.

3. **Sistem Pendinginan**

   Sistem pendinginan menjadi salah satu faktor yang penting mengingat banyaknya perangkat yang digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau bahkan selalu dalam keadaan menyala seperti server. Salah satu perangkat

pendingin yang sering digunakan adalah *Air Conditioner* atau AC. Jumlah AC yang digunakan dipastikan memberikan suhu dingin yang dapat mendinginkan seluruh ruangan server bahkan hingga ke setiap rak server yang ada. Penggunaan AC dengan jenis *Down Flow* atau CRAC akan lebih mendukung. Penggunaan sistem pendingin denga AC biasa berisiko terjadi kebocoran yang dapat merusak perangkat elektronik pada ruang server. Dipastikan untuk melakukan perawatan AC agar tidak terjadi kebocoran, frekuensi perawatan dapat disesuaikan dengan kondisi Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Detail ilustrasi sistem pendingin yang dapat dijadikan rekomendasi dapat dilihat pada gambar **Gambar 3.3.**

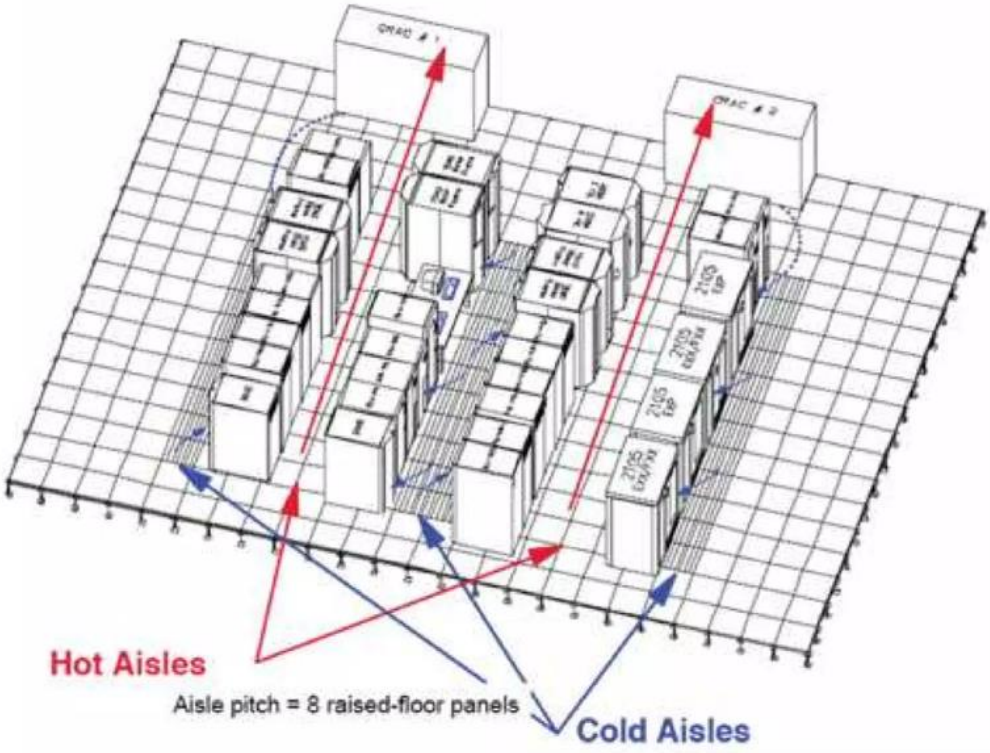

Gambar 3.3 Ilustrasi Sistem Pendingin

4. Sistem Listrik

Dalam perancangan sistem listrik *(power)* akan dipergunakan *tray* yang berada di dalam *raised floor* serta *tray* yang letaknya tepat di bawah atap utama. Kabel yang digunakan bertipe NYY karena dianggap cukup untuk dapat menghantarkan listrik ke setiap perangkat, dan juga lebih aman karena ada sistem pengait yang bisa memperkuat dudukan kabel pada konektor.

5. Sistem Keamanan

Sistem keamanan terdiri dari pengamanan fisik dan non-fisik. Fitur sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke ruang server. Akses berupa kunci untuk memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik). Akses diberikan juga untuk petugas keamanan yang mengawasi keadaan ruang server (baik di dalam maupun di luar). Pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada seperangkat infrastruktur dengan melakukan penguncian dengan kunci gembok tertentu. Pengamanan non fisik dilakukan terhadap bagian *software* atau sistem yang berjalan pada perangkat tersebut, antara lain dengan memasang beberapa perangkat lunak keamanan seperti *access control list, Firewalls*, IDSs dan host IDSs, fitur fitur keamanan pada Layer 2 *(datalink layer)* dan Layer 3 *(network layer)* disertai dengan manajemen keamanan. Detail Rekomendasi Keamanan Fisik dapat dilihat pada **Gambar 3.4.**

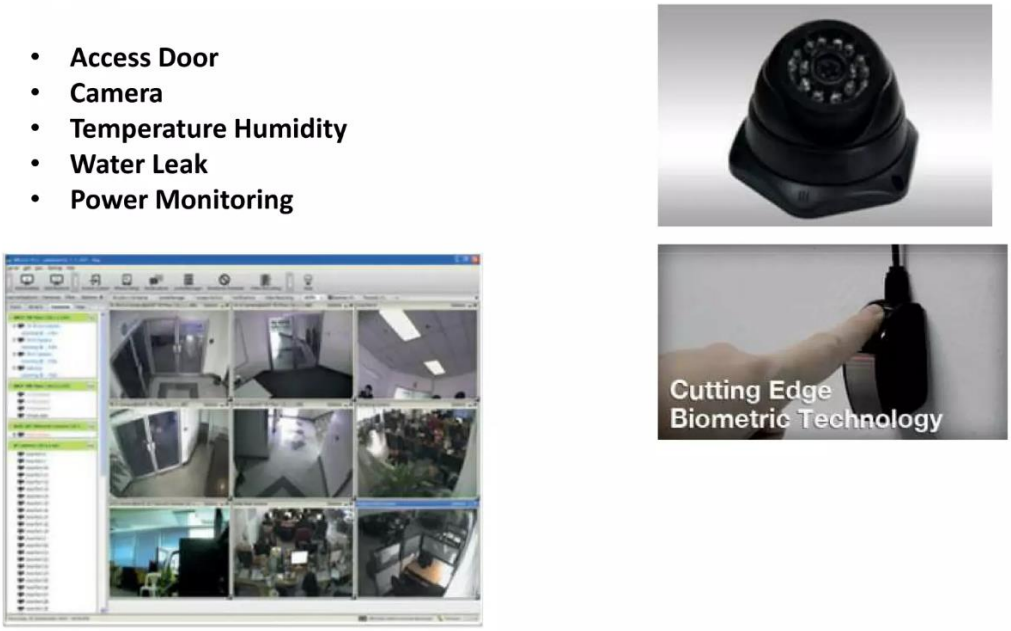

Gambar 3.4 Rekomendasi Sistem Keamanan Fisik

Perancangan sistem keamanan fisik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pemasangan akses keamanan pada ruang di ruang server yang terdiri dari:

1. Menggunakan pintu akses *(access door)* baik yang menggunakan finger scan maupun yang menggunakan smart card dan memastikan bahwa akses untuk kedalam ruang server terbatas pada SDM yang memiliki akses tersebut.

2. Dilakukan Monitoring aktivitas pada ruang server menggunakan kamera CCTV *(Closed Circuit Television)* yang diletakkan pada area-area strategis untuk dapat memonitor segala kegiatan pada ruang ruang server.
3. *Temperature Humidity* digunakan untuk mengukur kelembapan, aliran udara, dan tingkat suhu yang ada pada Ruang Server.
4. *Water Leak* merupakan kabel penginderaan yang dipasang dengan modul lokasi (A-LLM1) atau kabel yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi intrusi air, memicu alarm, dan menentukan lokasi pada ruang server.
5. *Power Monitoring* digunakan sebagai sistem yang dapat memantau tegangan (panel surya dan baterai), arus (panel surya), daya (panel surya) dan suhu alat secara *realtime* serta *online* untuk mengetahui optimalisasi panel surya yang digunakan sebagai sumber listrik utama dari *smart open parking*.

6. Sistem Monitoring

Diperlukan Sistem monitoring yang dipergunakan untuk memonitor perangkat dari segi suhu, kelembapan, dan memberi peringatan apabila terdapat kerusakan atau bencana (kebakaran, banjir, hubungan arus pendek, dll). Sistem yang digunakan adalah EMS *(Environment Monitoring System)*. Apabila terjadi masalah atau gangguan maka sistem tersebut akan memberikan peringatan pada pengelola ruang ruang server. Sistem pendeteksi air merupakan salah satu dari EMS yang digunakan untuk mendeteksi air di sekitar ruang server. Kebocoran air bisa terjadi akibat dari *Air Conditioning*, maupun bocor pada atap. Untuk meminimalisir terjadinya konslet karena air, maka sistem pendeteksi air akan ditempatkan pada sekeliling ruang ruang server. Jenis perangkat sensor untuk monitoring adalah sensor suhu, kelembaban dan aliran udara seperti *Display* Sensor Suhu Ruangan *Temperature Humidity Hygrothermograph* HTC2. Detail terkait dengan Ilustrasi Sistem moniroting dapat dilihat pada **Gambar 3.5.**

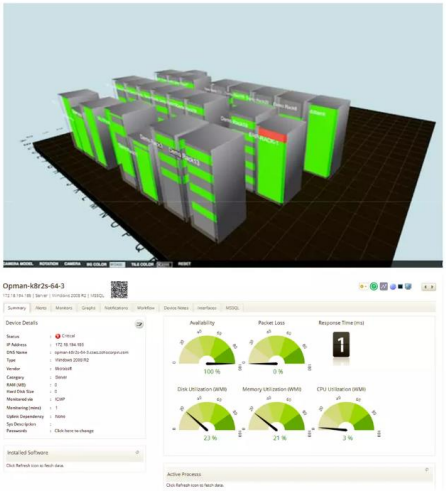

Gambar 3.5 Ilustrasi *Environment Monitoring System*

7. Sistem Penanganan Kebakaran

Peralatan penangan kebakaran pada ruang server menggunakan gaseous suppressant yang tidak akan melukai server. Material suppression yang umum adalah Inergen dan Argonite (dua jenis gas mulia). FM-200 dan HFC227 (dibuat dari *heptafluoropropane*) dan FE13 atau HFC-23 (yang menyerap panas dari api). Untuk mendeteksi api digunakan *smoke detector* dengan tipe *ionization* dan *photoelectric smoke detector*. *Smoke detector* diletakkan pada baris server masing – masing satu buah, yang terinstal pada atap ruang ruang server, sejalur dengan instalasi sistem penyemprot air *(sprinkler)*. Suplai air akan dikirimkan ke ruangan melalui rute pipa yang telah disesuaikan untuk penanganan kebakaran. Ilustrasi penanganan kebakaran dapat dilihat pada **Gambar 3.6.**

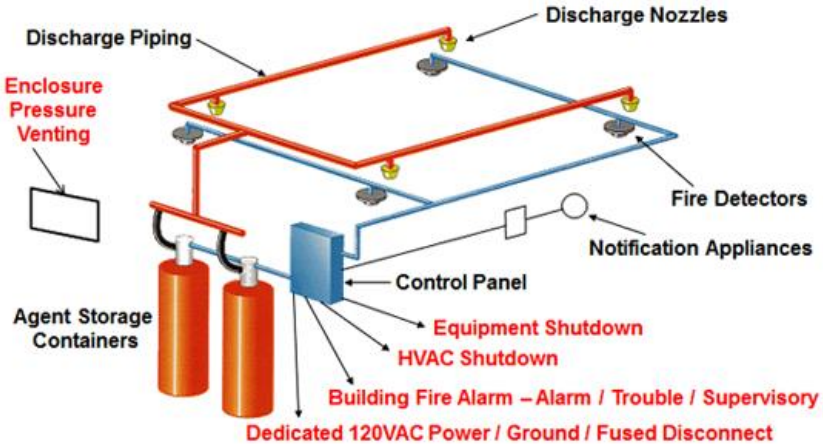

Gambar 3.6 Ilustrasi Sistem Penanganan Kebakaran

Maka dari itu berdasarkan dengan Standart TIA 942 dapat disimpulkan secara ringkas terkait kebutuhan aspek yang harus dipenuhi sebagai ruang server ditampilkan pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4 Usulan pengembangan aspek ruang server sesuai TIA-942

No	Kategori Usulan	Kuantitas Usulan	Spesifikasi
1	Penentuan Lokasi	- Pembagian ruangan menjadi ruangan dengan fungsi tertentu - Peletakan server dengan posisi row oriented	- Ruang Akses Utama - Ruang server - Ruang monitoring - Ruang kelistrikan - Ruang Network - Ruang penyimpanan (*Loading Dock*)
2	Penggunaan Raised Floor	Menyesuaikan luas ruangan	Perforated tiles atau steel concrete
3	Sistem Pendinginan	CRAC atau AC dengan Down flow	AC dengan kapasitas 2 PK
4	Sistem Listrik	- Penggunaan *Tray* untuk kabel	*Straight Tray (Type U)*
5	Sistem Keamanan	- *Access control list* - Penambahan *Firewall* - IDSs dan host IDSs	*Fortine, OEM Dows 8820 smart door lock finger print* dan sejenisnya.
6	Sistem Monitoring	Sensor suhu, kelembaban dan aliran udara	*Display* Sensor Suhu Ruangan *Temperature Humidity Hygrothermograph HTC2*
7	Sistem Penanganan Kebakaran	*Sprinkle* dan *smoke detector* atau *Fire smoke detector*	Sesuai dengan kebutuhan

Adapun beberapa usulan pemenuhan aspek pada Ruang Server / *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo diperlukan usulan terkait dengan perangkat pendukung yang dibutuhkan untuk pemenuhan aspek penggunaan *Data Center* dan sebagai perangkat pendukung untuk melakukan monitoring Server. Berikut merupakan usulan terkait perangkat pendukung Ruang Server/ *Data Center* yang ditampilkan pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5 Perangkat Pendukung Ruang Server / *Data Center*

No	Perangkat Pendukung Ruang Server	Deskripsi Perangkat Pendukung Ruang Server	Nama Perangkat dan Pendukung Ruang Server	OPD Pengelola Pendukung Ruang Server	Jumlah	Tahun Usulan
1	Pemenuhan Bangunan dan Interior	Penyesuaian Bangunan yang saat ini	adapun penerapan Aspek Interior yang diusulkan sesuai TIA	Dinas Komunikasi dan	1 Set Pemenuhan Aspek	**2023-2024**

No	Perangkat Pendukung Ruang Server	Deskripsi Perangkat Pendukung Ruang Server	Nama Perangkat dan Pendukung Ruang Server	OPD Pengelola Pendukung Ruang Server	Jumlah	Tahun Usulan
	Ruang Server	mengalami Kebocoran, disarankan untuk dilakukan pembenahan atap Ruang Server dan Saluran Air. Pemenuhan Interior Ruang Server	942 terdiri dari: 1. Partisi & Pintu 2. *Ceiling* 3. Pengecatan	Informatika Kabupaten Situbondo		
2	Pembelian Cadangan Baterai UPS	Belum pernah dilakukan pembelian yang terbaru untuk cadangan baterai	Yoshiga *Battery* 12v 7ah 6-Fm-7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	4 Unit	**2023 dan 2024**
3	Monitor LED	Perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual	Smart TV 75 Inch	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2 Unit	**2023 dan 2024**

3.3.2.2 Usulan Pemusatan Server OPD pada *Data Center*

Berdasarkan dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** menjelaskan bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib melakukan pemusatan server pada Ruang Server Diskominfo (*Data Center*). Tujuan dari pemusatan *Data Center* sebagai bentuk upaya penerapan Pusat Data (*Data Center*) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo

sesuai dan sesuai dengan arahan Pusat Data Nasional bahwasanya Wajib bagi seluruh OPD pada masing-masing pemerintahan daerah/kota yang memiliki server untuk memusatkan servernya pada Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika atau *Data Center* Pemerintah Kabupaten Situbondo. Tugas utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yaitu bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server yang dititipkan oleh OPD serta **telah dilengkapi dengan adanya standart keamanan yang diterapkan pada ruang server serta memenuhi Aspek Ruang Server.** Adapun usulan tambahan terkait dengan penunjang terealisasinya pemusatan server OPD pada *Data Center* Diskominfo yaitu **memastikan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah (Bupati) dan Regulasi ataupun Peraturan Bupati yang mana didalamnya bersikan terkait aturan yang mewajibkan seluruh Server OPD harus dipusatkan, yang mana peraturan bupati tersebut sebagai pedoman dan dasar untuk memusatkan server seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo**.

3.3.2.3 Usulan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Ruang Server (*Data Center*)

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama. Mengacu pada arah kebijakan SPBE Nasional terkait percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effective* salah satunya yaitu dengan menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data.

Dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan

terkait Kebijakan Layanan Pusat Data yang merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. Penilaian terkait kebijakan dan tata kelola pusat data atau ruang server dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal. Penilaian terkait kebijakan dan tata kelola pusat data diatur pada **Indikator 5** terkait "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data".

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Probolingo telah mendapatkan **nilai 4,10** pada **Domain Kebijakan SPBE** dan **nilai 1.8** pada **Domain Tata Kelola SPBE** yang dibuktikan dengan adanya **Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang SPBE yaitu pada pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 halaman 8 s/d 10 tentang Arsitektur SPBE. Kebijakan Internal Layanan Pusat data pada pasal 23 s/d 25 hal 15-16**.

Maka dari itu dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan **Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**, usulan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk dapat meningkatkan nilai pada indikator 5 yaitu perlu adanya arah kebijakan interkoneksi Layanan Pusat Data yang digunakan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Layanan Pusat Data Nasional atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

3.3.2.4 Usulan Penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*)

DRC (*Disaster Recovery Center*) dapat diartikan sebagai salah satu perencanaan kontingensi dalam menghadapi situasi bencana dan kejadian luar biasa lainnya, dengan penempatan perangkat TI, sistem, aplikasi dan data – data cadangan Instansi Pemerintah pada suatu tempat atau lokasi yang terpisah untuk mengantisipasi kerusakan atau kehilangan data. DRC (*Disaster Recovery Center*) harus berada di lokasi yang cukup berjarak dari *Data Center* utama, namun tidak terlalu jauh. Pemilihan lokasi yang tidak terlalu jauh ini berguna untuk memastikan agar latensi jaringan tidak terlalu tinggi sehingga proses *backup* dan restore data dapat berlangsung tanpa halangan. Terdapat alasan usulan yang disarankan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menerapkan DRC (*Disaster Recovery Center*), yaitu:

1. **Faktor kesalahan manusia**

   Pencegahan human error dengan adanya penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebagai langkah bijak dalam pengamanan data, maka dari itu dengan adanya Penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat mencadangkan data dan mengembalikannya lagi seperti sebelum apabila terjadi kesalahan ataupun Insiden yang terjadi pada *Data Center*.

2. **Faktor alam yang tak bisa diprediksi**

   Faktor alam menjadi salah satu point yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penerapan dan pengamanan *Data Center*. Diperlukan adanya pertimbangan apabila terjadi bencana alam yang berpotensi mempengaruhi *Data Center* Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka dari itu diperlukan adanya Penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*) untuk mencegah adanya faktor alam yang terjadi yang berpotensi terhadap *Data Center*.

3. **Layanan Realtime**

   Memiliki DRC (*Disaster Recovery Center*) berarti memberikan layanan masyarakat yang baik. Rekomendasi penggunaan DRC (*Disaster Recovery Center*) yaitu tujuannya untuk mendapatkan layanan cepat, dan bisa infrastruktur bisa diakses kapan saja.

Dalam membangun DRC (*Disaster Recovery Center*) diperlukan strategi yang matang dan terdapat faktor yang mempengaruhi dari pembangunan sistem tersebut. Strategi membangun DRC (*Disaster Recovery Center*) harus dikembangkan untuk sistem IT, aplikasi dan data. Hal tersebut mencakup jaringan, server, desktop, laptop, perangkat mobile data dan konektivitas. Sistem informasi teknologi harus meliputi *hardware, software*, data dan konektivitas. Adapun faktor-faktor yang diperlukan saat membangun DRC (*Disaster Recovery Center*) adalah sebagai berikut:

1. Sistem lingkungan dari ruangan komputer (ruang komputer yang aman dengan kontrol iklim, AC dan cadangan *power supply*, dan lain-lain).
2. *Hardware* (jaringan, server, komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel dan periferal)
3. Konektivitas ke penyedia layanan (fiber, kabel, *nirkabel*, dan lain-lain).
4. *Software* (pertukaran data elektronik, surat elektronik, manajemen sumber daya perusahaan, produktivitas, dll).
5. Data dan *restorasi*.

Adapun ilustrasi dari Konsep penggunaan DRC (*Disaster Recovery Center*) yang dapat digunakan sebagai langkah selanjutnya dan pemahaman dalam penerapan DRC (*Disaster Recovery Center*) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail konsep DRC (*Disaster Recovery Center*) dapat dilihat pada **Gambar 3.7.**

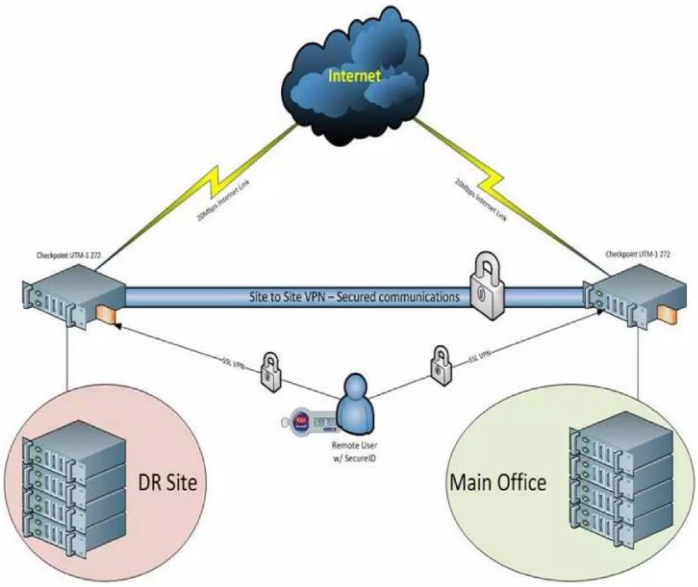

Gambar 3.7 Ilustrasi Konsep DRC (*Disaster Recovery Center*)

Berikut merupakan Layanan DRC (*Disaster Recovery Center*) berdasarkan dengan SC-06/IT/2017/Daftar Layanan TIK (*Service Catalog*) dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Layanan DRC (*Disaster Recovery Center*)

<table>
<tr><th colspan="3">TSM.4 Layanan Disaster Recovery Center (DRC)</th></tr>
<tr><td>Definisi dan Penjelasan Layanan</td><td>Layanan ini adalah layanan terkait DRC mencakup :
4.1 Permintaan Replikasi Sistem di DRC
4.1.1 Replikasi Hosting Aplikasi dan Database
4.1.2 Sinkronisasi DB to DB
4.2 Co-Location DRC
4.2.1 Co-Location Server
4.2.2 Penyediaan Infrastruktur VM untuk Replikasi
4.2.3 Penarikan Perangkat Co-Location
4.3 Permintaan Akses Fisik DRC.</td><td>Layanan ini tidak mencakup:
1. Penyediaan fasilitas yang tidak dimiliki oleh Pusintek
2. Pemantauan sinkronisasi yang tidak dikembangkan oleh Pusintek
3. Permintaan Backup dan Sinkronisasi ke DRC (kecuali untuk production).</td></tr>
<tr><td>Spesifikasi Layanan</td><td colspan="2">Penyediaan kapasitas di DRC
1. Untuk sistem dengan tingkat kritikalitas sangat kritis:
a. Kapasitas yang diberikan 75-100% dari kapasitas total yang ada di Data Center
b. Kapasitas yang diberikan 125% dari penggunaan total yang ada di Data Center.
2. Untuk sistem dengan tingkat kritikalitas kritis: a. Kapasitas yang diberikan 50-75% dari kapasitas total yang ada di Data Center; atau b. Kapasitas yang diberikan 120% dari penggunaan total yang ada di Data Center.</td></tr>
<tr><td>Keterkaitan Layanan</td><td>Layanan Penunjang:
ITSM.9 Layanan Koneksi Internet
ITSM.1 Layanan Hosting Aplikasi dan/atau Data
ITSM.2 Layanan Co-Location.</td><td>Layanan yang didukung: ITSM.10 Layanan Koneksi Internet
ITSM.1 Layanan Hosting Aplikasi dan/atau Data
ITSM.2 Layanan Co-Location.</td></tr>
<tr><td>Komponen Layanan</td><td colspan="2">Komponen layanan meliputi penyediaan:
1. Hosting :
a. Koneksi intranet dan/atau internet termasuk penyediaan IP address
b. Sistem operasi : Windows Server dan open source yaitu:Sun Solaris, Linux Red Hat, Linux Centos, Linux Ubuntu
c. Basisdata : Ms.SQL 2008 atau Ms.SQL 2012, My SQL, Oracle (jika lisensi tersedia)
d. Web server : IIS, Apache
e. Aplikasi load balancer untuk web : F5
f. FTP : IIS (windows), VSFTP (linux)
g. Server DNS
h. Perangkat Komunikasi : Switch, Router, Core Switch
i. Fasilitas infrastruktur keamanan informasi : Firewall, anti virus, CCTV, biometrik access, IPS
j. Alamat IP
k. Perangkat keamanan jaringan: Firewall, IPS, dan IDS.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">TSM.4 Layanan Disaster Recovery Center (DRC)</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. Co-Location
a. Server virtual : Prosesor, Memori, Storage
b. 1 vNIC (virtual Network Interface Card)
c. DNS
d. Koneksi intranet dan/atau internet
e. Alamat IP
f. Perangkat keamanan jaringan: Firewall, IPS, dan IDS.</td></tr>
<tr><td>Persyaratan</td><td colspan="2">4.1 Permintaan Replikasi Sistem di DRC
4.1.1 Replikasi Hosting Aplikasi dan Database
a. Formulir Hosting - Sinkronisasi yang ditandatangani minimal eselon III dan surat permintaan dari eselon II
b. Dokumen DRP yang ditandatangani minimal eselon III
c. Hasil Uji Drill.
4.1.2 Sinkronisasi DB to DB
a. Formulir Sinkronisasi DB to DB yang ditandatangani minimal eselon III dan surat permintaan dari eselon II
b. Dokumen DRP yang ditandatangani minimal eselon III
c. DBMS yang digunakan mendukung replikasi Database
d. Hasil Uji Drill.
4.2 Permintaan Replikasi Sistem di DRC
4.2.1 Replikasi Hosting Aplikasi dan Database
a. Formulir Hosting - Sinkronisasi yang ditandatangani minimal eselon III dan surat permintaan dari eselon II
b. Dokumen DRP yang ditandatangani minimal eselon III
c. Hasil Uji Drill.
4.2.2 Sinkronisasi DB to DB
a. Formulir Sinkronisasi DB to DB yang ditandatangani minimal eselon III dan surat permintaan dari eselon II
b. Dokumen DRP yang ditandatangani minimal eselon III
c. DBMS yang digunakan mendukung replikasi Database
d. Hasil Uji Drill.
4.3 Permintaan Akses Fisik DRC Permintaan melalui surat atau email ke Service Desk yang berisi informasi
a. Nama PIC unit eselon I
b. Pegawai dan/atau pihak ketiga (wajib didampingi oleh PIC unit eselon I)
c. Rencana kegiatan
d. Waktu pelaksanaan kunjungan.</td></tr>
<tr><td>Garansi Layanan</td><td>Ketersediaan Layanan:
98%</td><td>Kehandalan Layanan:
Kerusakan infrastruktur Hosting maksimal 6 kali/ tahun.</td></tr>
<tr><td>Norma Waktu</td><td colspan="2">4.1 Permintaan Replikasi Sistem di DRC :
4.1.1 Replikasi Hosting Aplikasi dan Database - 5 hari kerja
4.1.2 Sinkronisasi DB to DB - 10 hari kerja
4.2 Co-Location DRC :
4.2.1 Co-Location Server - 6 hari kerja
4.2.2 Penyediaan Infrastruktur VM untuk Replikasi - 3 hari kerja.
4.2.3 Penarikan Perangkat Co-Location - 6 hari kerja.
4.3 Permintaan Akses Fisik DRC - 1 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.</td></tr>
</table>

TSM.4 Layanan Disaster Recovery Center (DRC)		
Dukungan	**Layanan:** 1. Dukungan layanan (*Service Desk* dan Dukungan Teknis) adalah 7 x 24 jam. 2. Prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak dan kepentingan.	**Keamanan:** Perlindungan jaringan dan server menggunakan *Firewall*, Intrusion Prevention System (IPS), antivirus, dan update patch.
Mekanisme Permintaan	Mekanisme Permintaan ditujukan kepada Kepala Pusintek melalui Formulir Layanan yang ditandatangani sesuai yang tercantum pada kolom Persyaratan dan dibubuhi stempel instansi, kemudian dikirimkan ke *Service Desk*.	
	Pelaksanaan: 1. Setiap hari kerja 2. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai dengan SOP Layanan DRC.	

3.3.2.5 Pusat Data Nasional (PDN)

Berdasarkan dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwasanya penggunaan menjelaskan bahwa Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesiia Nomor 132 Tahun 2022** dan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022,** Pusat Data nasional atau PDN merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung dimana akan diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penerapan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ayat (1)** dimana harus:

1. Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data

2. Menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
3. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Berdasarkan dengan Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 34 dan 35 menjelaskan terkait dengan Keamanan Pusat Data dimana didalamnya terdapat terkait beberapa standar teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi.

a. Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021 Pasal 34

Standar teknis keamanan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas terpenuhinya:

1. Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional.
2. Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.

b. Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021 Pasal 35

Terpenuhinya persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan prosedur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan Pusat Data. Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan prosedur:

1. Memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional.
2. Memutus akses fisik atau *logic* dari perangkat yang tidak terotorisasi
3. Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*.
4. Memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional.

5. Melakukan *backup* informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala.
6. Memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari *virus* dan *malware.*
7. Melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data Nasional.
8. Memastikan pengaktifan konfigurasi *port* universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang.
9. Memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan internet *protocol address* dan *hostname* yang telah ditentukan.
10. Menerapkan server perantara saat client mengakses server *Database* dalam rangka pemeliharaan.

Adapun Rekomendasi Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional (PDN) yang dapat dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo ditampilkan pada **Tabel 3.7.**

Tabel 3.7 Rekomendasi Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional (PDN)

No	Pemenuhan Aspek PDN	Usulan	Tahun
1	Memastikan perangkat yang terkoneksi ke PDN	PC Monitoring Server	**2023-2024**
2	Memutus Koneksi akses fisik atau logic dari koneksi yang tidak terkotorisasi.	Monitoring seluruh Akses	**2023**
3	Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama.	Monitoring seluruh Akses	**2023**
4	Tidak diperkenankan untuk dilakukan secara *remote*	Pembagian Jadwal Monitoring Server	**2023**
5	Memastikan hanya personil yang berwenang untuk berada diarea penggunaan Komputer PDN	SK Pegawai IT (Server PDN)	**2023**
6	Melakukan *Backup* data dan informasi secara berkala	*Backup* Data dan informasi	**2023-2027**
7	Memastikan Komputer/Perangkat Dinas yang tersambung pada PDN terbebas dari Virus dan Malware ataupun Trojan.	Melakukan Pemasangan Software Antivirus dan melakukan Pembersihan Perangkat	**2023-2027**
8	Melakukan pembatasan akses pemanfaatan *removable media* di area pusat data nasional	Melakukan Pembuatan SOP / Prosedur pada Area Akses Pusat Data Nasional	**2023-2024**
9	Memastikan pengaktifan konfigurasi *port* universal dengan menggunakan Internet	Melakukan Konfirgurasi Jaringan Internet untuk	**2023-2027**

No	Pemenuhan Aspek PDN	Usulan	Tahun
	Protokol dan *Host name* yang telah ditentukan dan dilakukan oleh personil yang berwenang.	akses ke PDN	
10	Menerapkan Server Perantara dan memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke Infrastruktur Pusat Data menggunakan Internet yang telah ditentukan.	Melakukan Penerapan DRC	**2025-2027**

3.3.3 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan kondisi eksisting terkait dengan penggunaan Sistem Penghubung Layanan saat ini **Telah Menerapkan** Sistem Penghubung Layanan dengan menggunakan teknologi Layanan Berbasis Web (*Web services*) dan Web API pada beberapa aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun penggunaan dan penerapan Sistem Penghubung Layanan dari Pusat atau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) masih **Belum Diterapkan** oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Usulan terkait Sistem Penghubung Layanan ditujukan untuk dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan penerapan Sistem Penghubung Layanan guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Berikut merupakan rekomendasi sistem pengubung layanan yang ditampilkan pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3.8 Usulan Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Situbondo

No	Usulan	Bentuk Kegiatan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN					
1	Sistem Penghubung Layanan SPLP (*API Management*)	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan SPLP (*API Management*)	Melakukan Penerapan SPLP dengan mengikuti seluruh prosedur dan pengajuan yang sesuai.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023-2025**
2	Reviu Kebijakan dan Tatakelola Sistem Penghubung Layanan	Pelaksanaan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola PSistem Penghubung Layanan yang Telah Disesuikan Dengan KEPMEN 962	Melakukan Reviu Kebijakan Perbub ataupun peraturan terkait yang berhubungan dengan penerapanSistem Penghubung Layanan pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023-2027**

No	Usulan	Bentuk Kegiatan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN					
			Kabupaten Situbondo apakah sudah sesuai dan relevan atau tidaknya.		
			Memastikan Penerapan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah Mencakup seluruh kebutuhan penerapan Sistem Penghubung Layanan yang ada di Kabupaten Situbondo.		

3.3.3.1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Amanat Regulasi yang digunakan sebagai pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yaitu:

1. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024

Berikut merupakan isi dari amanat regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPLP yang ditampilkan pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3.9 Amanat Regulasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	membahas terkait dengan **Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**
Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi **Layanan Berbagi Pakai** (*Cloud Service*, Integrasi Kanal Layanan)	
Penerapan **Big Data Pemerintah** dan Penerapan	

Sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE dimana setiap instansi pusat dan daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah. Salah satu tujuan utama penerapan sistem penghubung layanan adalah adanya keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah. Dalam konteks ini, sistem penghubung layanan akan difokuskan pada **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Definisi dari interoperabilitas yang dimaksudkan dalam rencana penerapan sistem penghubung layanan pemerintah terdiri dari **3 (tiga)** poin utama yaitu:

1. **Layanan Interoperabilitas Data (LID)** adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai tugas dan wenenangnya untuk memberikan **Interoperabilitas Data** secara andal, akuntabel, dan aman.
2. **Interoperabilitas Data** adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan **Karakteristik** yang **berbeda** untuk **berbagi pakai** data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaranaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** adalah Sistem Elektronik untuk melakukan **pertukaran layanan** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan **Pengendalian Keterhubungan** antara Sistem Elektronik Penyedia LID dan Pengguna LID Secara Nasional.

Dalam penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan menggunakan API Manager terdapat beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu:

1. Keamanan berbagi pakai melalui sumberdaya internal maupun eksternal.
2. Kemudahan dalam membuat API dari berbagai layanan dan sumber data.
3. Mendukung berdagam jenis API untuk diaplikasikan kedalam sistem.
4. Fleksibilitas pengaplikasian melalui *Cloud* yang didukung server yang handal.
5. Penghematan sumber daya dan biaya yang diperlukan untuk seluruh pengguna.

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan yang telah dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP**

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo **belum menerapkan Sistem Penghubung Layanan**, maka dari itu terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan penerapan SPLP pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Tabel 3.10.**

Tabel 3.10 Usulan Penerapan SPLP Pemerintah Kabupaten Situbondo

No.	Nama Usulan Kegiatan Sistem Penghubung Layanan	Tahun Pelaksanaan
1	Kegiatan Bimtek dan Pelatihan SPLP	**2023-2027**
2	Kajian Terkait penggunaan API	**2023**
3	Kajian untuk Konsolidasi data	**2024**

Berdasarkan dengan **Tabel 3.10** terkait usulan Sistem Penghubung Layanan yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dijelaskan secara detail dibawah ini:

1. **Kegiatan Bimtek dan Pelatihan SPLP**

   Mengikuti kegiatan terkait dengan Bimtek dan Pelatihan penggunaan SPLP yang dilakukan oleh pemerintah pusat (KEMENKOMINFO) yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Situbon sebagai bentuk keikutsertaan dalam bagaimana tata cara penggunaannya SPLP yang nantinya dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2. **Kajian tekait Penggunaan SPLP**

   Melakukan kegiatan Kajian terkait Data yang nantinya akan diintegrasikan dan bertujuan untuk mengetahui data apakah yang akan diintegrasikan melalui SPLP dengan memanfaatkan *API Management* yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam proses mengakses satu pintu data dan mempercepat dalam memberikan pelayanan.

3. **Kajian terkait Konsolidasi Data**

   Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan konsolidasi data untuk data yang akan diintegrasikan yang dapat mendukung layanan. Kajian ini mengacu kepada penyimpanan data atau sumber daya server yang dibagi kepada benyak pengguna serta diakses oleh banyak aplikasi, untuk

memastikan siapa saja yang dapat memanfaatkan data yang telah diintegrasikan pada SPLP. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

a. Melakukan **Konsolidasi Data** dari **Source** ke **Staging**, proses ini meliputi proses mapping dan transforming menyesuaikan Structure di Tujuan.
b. Pengguna bisa melakukan **kroscek** hasil konsolidasi data di Staging.
c. *Environment* Bimtek dan fitur sangat sama dengan Production, ditujukan untuk **Latihan** dalam penggunaan Aplikasi Umum. (Tim Aplikasi Umum)
d. Aplikasi Umum – sudah siap digunakan untuk **aktivitas** harian. (Tim Aplikasi Umum).

3.3.3.2 Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Dimana penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Untuk dapat menerapkan Sistem Penghubung Layanan pemerintah, harus memenuhi syarat dimana adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah. Pasal yang mengatur terkait dengan Penerapan Sistem Penghubung Layanan antara lain yaitu:

1. **Pasal 33 Ayat 1** menjelaskan bahwa penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
2. **Pasa 33 Ayat 3** menjelaskan bahwa dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dan akses jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah dengan jaringan intra pemerintah yang memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE serta mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari

Menteri yang menyelenggaran urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan yaitu tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan *point-to-point*), tersedia metadata *repository*, dan tersedia *service directory*.

Kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan yang mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tercantum pada **Indikator 7** terkait "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah". Penilaian kebijakan dan tata kelola Sistem Penghubung Layanan dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Probolingo telah mendapatkan **nilai 4,10** pada **Domain Kebijakan SPBE** dan **nilai 1.8** pada **Domain Tata Kelola SPBE** yang dibuktikan dengan adanya **Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang SPBE yaitu pada pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 halaman 8 s/d 10 tentang Arsitektur SPBE. Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan pada pasal 28, hal 17 tentang Sistem Penghubung Layanan**. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik. Sehingga berdasarkan **Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**, usulan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk dapat meningkatkan nilai pada indikator 7 yaitu perlu menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem

Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Adapun alasan diperlukan penijauan ulang atau Reviu yang bertujuan untuk memenuhi serta memperbaiki kekurangan terutama terkait dengan Penerapan Sistem Penghubung Layanan yang dapat dimulai **dari tahun 2023 hingga 2027**.

3.3.4 Komputasi Awan

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan, bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan dan Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

Komputasi Awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet. Pemanfaatan komputasi awan dapat mendukung kebutuhan operasional organisasi baik dari sisi teknis maupun non teknis. Salah satu contoh komputasi awan yang cukup familiar dengan masyarakat diantaranya adalah *Google Drive* ataupun *One Drive*. Dimana kedua perangkat komputasi tersebut selain dapat digunakan sebagai media penyimpanan, dapat juga digunakan sebagai media pemrosesan angka, kata dan visual.

Rekomendasi usulan Komputasi dapat menggunakan *Cloud Computing* dimana digunakan sebagai sistem komputerisasi yang dapat mencakup semua peralatan *(gadget)*, dan dapat digunakan dimana saja yang nantinya akan disimpan dalam sebuah *Storage (Data Center).* Komputasi awan dapat digunakan untuk mempermudah dalam membuka sebuah file dimana saja dan kapan saja dan semuanya disimpan dalam sebuah *storage (Data Center).* Pertimbangan usulan tambahan terhadap penggunaan komputasi dapat menggunakan ***Google Drive, One Drive, dan Own Cloud*** dimana ketiga platform tersebut merupakan fasilitas komputasi yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan data dan pelayanan sinkronisasi, yang dimana setiap pengguna dapat menggunakan *Cloud computing*

berbentuk file sharing dan Kolaborasi edit untuk *file sharing*, penyimpanan data, dan sistem peng-edit-an sebuah file dengan cara berkolaborasi, serta dapat memanfatkan penggunaan dari **Media Penyimpanan NAS/SAN yang dimiliki saat ini**.

Berikut ini usulan kegiatan penerapan Komputasi Awan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Usulan Kegiatan Penerapan Komputasi Awan

No	Usulan	Detail Usulan	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
KOMPUTASI AWAN				
1	Masterplan Penggunaan dan Penerapan Komputasi Awan	Pembuatan dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan pengembangan. Dalam hal ini yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rencana mengembangakan Teknologi Komputasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023-2024**
		Melakukan Migrasi aplikasi yang telah dibuat harus menjadi penyimpanan berbasis *Cloud base* dan tidak monolitic dikarenakan akan dapat memberatkan penyimpanan *Database*.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2025**
		Penerapan Komputasi awan sebagai bentuk Konsolidasi pada *Data Center* agar lebih modern dengan memanfaatkan Teknologi Yang baru. Pemanfaatandengan manfaatkan Native *Cloud*, Multi *Cloud* dan Work *Cloud*.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2025-2027**

3.3.4.1 Usulan Masterplan Penggunaan dan Penerapan Komputasi Awan

Berdasarkan dengan **Tabel 3.11,** menjelaskan bahwa Masterplan merupakan dokumen rancangan besar (Induk) yang mana didalmnya mencakup rencana strategis pemerintah daerah dalam mengimplementasi dan membangun digitalisasi Teknologi. Pada dokumen masterplan yang diusulkan yaitu berkaitan dengan penggunaan dan penerapan Komputasi Awan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mana nantinya akan membahas terkait beberapa poin, antara lain:

1. **Rancangan Besar (Induk)**

   Pembuatan dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan pengembangan. Dalam hal ini yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rencana mengembangakan Teknologi Komputasi dimana didalamnya berisikan Ide, Rekomendasi Penggunaan *Cloud*, Anggaran Biaya, Petunjuk Teknis, dan beberapa kebutuhan data pendukung dalam penggunaan dan penerapan Komputasi awan.

2. **Migrasi Penyimpanan Data Aplikasi**

   Merubah penyimpanan aplikasi yang telah dibuat menjadi penyimpanan berbasis *Cloud base* dan tidak monolitic dikarenakan akan dapat memberatkan penyimpanan *Database*. Migrasi penyimpanan terdiri dari pemindahan data dari satu perangkat penyimpanan ke perangkat penyimpanan baru atau yang berbeda. Migrasi dapat melibatkan pemindahan semua data, aplikasi, dan layanan ke *Cloud*, atau mungkin hanya memindahkan beberapa hal tertentu untuk memenuhi tujuan strategis atau kebutuhan bisnis.

3. **Implementasi Fasilitas Komputasi dan Komputasi Awan**

   Penerapan Komputasi awan sebagai bentuk konsolidasi pada *Data Center* agar lebih modern dengan memanfaatkan teknologi yang baru. Contohhnya yaitu dengan pemanfaatan *Native Cloud*, *Multi Cloud* dan *Work Cloud*.

3.3.5 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Usulan terkait perangkat keras mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah dari SDM yang ada dan usulan SDM yang baru, selain itu untuk mengusulakan perangkat baru ini dikategorikan berdasarkan usia dari perangkat yang lebih dari 5 tahun akan tetapi perlu dicek kembali ke masing-masing OPD tentang kondisi pada perangakat keras yang dimiliki. Apabila terdapat kerusakan, dapat untuk dilakukan pengusulan pergantian perangkat yang baru. Sedangkan untuk Perangkat Lunak diusulan sebagai acuan dalam penggunaan perangkat lunak yang dapat mendukung pengoperasian layanan yang terpasang pada perangkat keras.

Usulan terkait dengan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak terbagi menjadi 5 usulan perangkat yaitu Perangkat Keras Periferal Utama, Perangkat Keras Periferal Lainnya, Perangkat Keras Jaringan, Perangkat Keras Media Penyimpanan dan

Perangkat Lunak *Platform*. Berikut merupakan penjabaran secara detail terkait Usulan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan akan dijelaskan pada **Sub bab 3.3.5.1-3.3.5.5** dibawah ini.

Tabel 3.12 Usulan Perangkat Keras dan Lunak

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak				
1	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Periferal Utama	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Utama untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD yang terdiri dari perangkat PC, Laptop dan Printer yang telah disesuaikan dengan usia perangkat	Seluruh OPD Kabupaten Situbondo	**Setiap Tahun (2023-2027)**
2	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Periferal Pendukung	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Periferal untuk mendukung operasional penunjang pada masing-masing OPD yang terdiri dari perangkat Scanner, LED TV, Proyektor, Kamera, HT, Speaker.	Seluruh OPD Kabupaten Situbondo	**2023-2027**
3	Pengadaan Perangkat Media Penyimpanan (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan tambahan Perangkat Keras *Storage* (Nas atau San) / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2024**
4	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Jaringan (Teknis)	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Jaringan pendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (*Router, Switch/Hub, Access Poin, Repeater Wifi, Antena Outdoor Wireless*) disesuaikan dengan usia perangkat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	**2023-2024**
5	Pengadaan/Peremajaan Perangkat Lunak Platform	Pengadaan/Peremajaan Lisensi Perangkat Lunak Platform pada masing-masing perangkat keras	Seluruh OPD Kabupaten Situbondo	**2023-2027**

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak				
		pada OPD yang masih belum memiliki lisensi dan beberapa tambahan lisensi aplikasi perkantoran		

3.3.5.1 Perangkat Keras Periferal Utama

Usulan Perangkat Keras Utama bertujuan untuk menunjang pelaksanaan layanan yang ada di masing-masing OPD, dan usulan terkait perangkat keras utama terdiri dari 3 perangkat yaitu Perangkat Komputer (PC), Perangkat Laptop, dan Perangkat Printer. Detail terkait dengan usulan perangkat Keras Utama akan dijelaskan pada Sub dibawah ini.

a. Perangkat Keras Komputer (PC)

Berdasarkan kondisi eksisting pada perangkat keras komputer (pc) pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat komputer (pc) **sebesar 1316 Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur perangkat yang lebih dari 5 tahun. Usulan terbanyak pada **tahun 2023 dan 2026**, OPD terbanyak **yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem.** Detail usulan perangkat keras komputer (pc) dapat dilihat pada **Tabel 3.13.**

Tabel 3.13 Usulan Perangkat Keras Komputer (PC)

Kode OPD	Nama OPD	Usulan PC					Jumlah Usulan PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	2	1	2	1	0	6
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	0	4
3	Bagian Hukum	2	1	1	1	0	5
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1	2	0	0	0	3
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	7	7	2	2	21
6	Bagian Umum	3	2	3	4	3	15

Kode OPD	Nama OPD	Usulan PC					Jumlah Usulan PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
7	Bagian Organisasi	2	3	2	3	4	14
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	3	2	4	3	15
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	2	2	2	1	9
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	8	7	8	7	39
11	Inspektorat	6	7	6	6	6	31
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	6	5	7	8	7	33
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	6	3	4	5	22
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	6	5	3	6	25
15	Badan Pendapatan Daerah	12	12	11	13	18	66
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	8	12	9	9	47
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	8	9	8	7	32
18	Dinas Kesehatan	15	15	16	15	18	79
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	6	3	2	3	14
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	7	9	12	5	41
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	6	8	9	7	5	35
22	Dinas Lingkungan Hidup	35	16	17	16	12	96
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9	6	8	7	0	30
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	20	14	12	20	18	84
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	5	5	6	4	24
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	9	8	6	5	7	35
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	3	3	4	3	19
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	7	9	6	2	32
29	Dinas Perhubungan	5	6	5	6	4	26

Kode OPD	Nama OPD	Usulan PC					Jumlah Usulan PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	6	5	6	0	22
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	12	10	6	7	35
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	2	2	2	2	10
33	Dinas Sosial	5	7	5	6	5	28
34	Satuan Polisi Pamong Praja	9	10	14	9	8	50
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	32	28	26	32	30	148
36	Kecamatan Situbondo	2	2	3	4	4	15
37	Kecamatan Bungatan	2	3	2	3	3	13
38	Puskesmas Situbondo	9	7	9	8	6	39
39	Puskesmas Bungatan	5	5	5	5	5	25
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	9	8	4	4	29

Berdasarkan data keseluruhan pengusulan Komputer (PC) diatas, dapat didapatkan bahwa dari 40 OPD membutuhkan penganggaran untuk peremejaan perangkat Komputer (PC) dikarenakan banyak terdapat perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak. Beberapa OPD lain memiliki kebutuhan perangkat Komputer (PC) yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 40 OPD yaitu **1316 Unit** selama 5 tahun kedepan. Pengajuan pengusulan perangkat keras Komputer (PC) diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan OPD masing-masing.

b. Perangkat Keras Laptop

Berdasarkan kondisi eksisting pada perangkat keras Laptop pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat Laptop **sebesar 1291 Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur perangkat yang lebih dari 5 tahun. Usulan terbanyak pada **tahun 2026**, OPD terbanyak **yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem.** Detail usulan perangkat keras Laptop dapat dilihat pada **Tabel 3.14.**

Tabel 3.14 Usulan Perangkat Keras Laptop

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Laptop					Jumlah Usulan Laptop
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	2	1	2	1	1	7
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	0	1	2	0	4
3	Bagian Hukum	1	2	1	1	0	5
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1	1	1	1	0	4
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	5	5	5	5	23
6	Bagian Umum	3	2	3	4	2	14
7	Bagian Organisasi	2	2	2	2	2	10
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	3	3	3	4	15
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	2	2	1	1	8
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	7	7	9	8	39
11	Inspektorat	7	6	7	6	6	32
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7	7	5	5	6	30
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	4	3	5	5	24
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	4	4	5	6	22
15	Badan Pendapatan Daerah	14	12	13	15	12	66
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	7	9	8	8	38
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	7	6	9	14	36
18	Dinas Kesehatan	15	15	15	20	14	79
19	Dinas Ketenagakerjaan	2	3	2	4	3	14
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	6	8	9	8	41
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	9	8	5	8	6	36
22	Dinas Lingkungan Hidup	20	18	25	17	16	96

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Laptop					Jumlah Usulan Laptop
		2023	2024	2025	2026	2027	
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	6	8	9	0	30
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	17	19	20	16	12	84
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	4	5	3	5	23
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6	8	7	9	8	38
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	3	4	5	2	19
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	7	6	7	7	32
29	Dinas Perhubungan	6	5	7	4	4	26
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	5	3	4	20
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7	6	8	12	7	40
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	2	2	2	2	10
33	Dinas Sosial	6	5	7	4	6	28
34	Satuan Polisi Pamong Praja	12	8	7	14	9	50
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	26	28	34	36	24	148
36	Kecamatan Situbondo	1	1	1	1	1	5
37	Kecamatan Bungatan	2	3	2	2	2	11
38	Puskesmas Situbondo	3	7	6	8	9	33
39	Puskesmas Bungatan	6	5	4	3	6	24
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	5	7	6	8	27

Berdasarkan data keseluruhan pengusulan Laptop diatas, dapat didapatkan bahwa dari 40 OPD membutuhkan penganggaran untuk peremejaan perangkat Laptop dikarenakan banyak terdapat perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak. Beberapa OPD lain memiliki kebutuhan perangkat Laptop yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 40 OPD yaitu **1291 Unit** selama 5 tahun kedepan. Pengajuan pengusulan perangkat keras Laptop diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan OPD masing-masing.

c. Perangkat Keras Printer

Berdasarkan kondisi eksisting pada perangkat keras Printer pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat Printer **sebesar 1250Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur perangkat yang lebih dari 5 tahun. Usulan terbanyak pada **tahun 2023**, OPD terbanyak **yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem.** Detail usulan perangkat keras Printer dapat dilihat pada **Tabel 3.17.**

Tabel 3.15 Usulan Perangkat Keras Printer

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Printer					Jumlah Usulan Printer
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	1	2	2	1	1	7
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	2	0	1	0	5
3	Bagian Hukum	1	2	1	1	0	5
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1	1	1	0	0	3
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	5	5	4	4	21
6	Bagian Umum	4	2	2	2	2	12
7	Bagian Organisasi	4	2	2	2	2	12
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	2	4	3	3	15
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	2	3	2	2	11
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	8	9	7	9	39
11	Inspektorat	7	6	8	5	5	31
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2	2	2	2	2	10
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	4	3	5	7	24
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	4	5	3	6	21
15	Badan Pendapatan Daerah	12	15	13	14	12	66
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	8	9	10	9	42
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	12	8	10	5	35
18	Dinas Kesehatan	13	15	16	18	17	79

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Printer					Jumlah Usulan
19	Dinas Ketenagakerjaan	2	4	2	3	5	16
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	8	9	6	9	41
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	2	4	4	4	6	20
22	Dinas Lingkungan Hidup	22	18	19	17	20	96
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	7	9	6	0	30
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	18	19	17	16	14	84
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	6	5	7	2	24
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	7	8	6	9	8	38
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	3	4	2	4	19
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	5	8	9	3	32
29	Dinas Perhubungan	6	7	5	6	2	26
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	6	3	4	3	21
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	8	6	9	11	36
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	2	2	2	2	10
33	Dinas Sosial	6	4	7	5	6	28
34	Satuan Polisi Pamong Praja	9	8	14	10	9	50
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	34	28	25	37	22	146
36	Kecamatan Situbondo	1	1	1	1	1	5
37	Kecamatan Bungatan	3	2	3	2	2	12
38	Puskesmas Situbondo	3	9	7	8	0	27
39	Puskesmas Bungatan	6	5	7	4	3	25
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	7	5	6	7	26

Berdasarkan data keseluruhan pengusulan printer diatas, dapat didapatkan bahwa dari 40 OPD membutuhkan penganggaran untuk peremejaan perangkat Printer dikarenakan banyak terdapat perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak. Beberapa OPD lain memiliki kebutuhan perangkat Printer yang beragam. Total

kebutuhan perangkat keras dari 40 OPD yaitu **1250 Unit** selama 5 tahun kedepan. Pengajuan pengusulan perangkat keras Printer diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan OPD masing-masing.

Total Keseluruhan dari usulan pangadaan Perangkat Keras Utama yang terdiri dari Perangkat Keras Komputer, Laptop dan Printer pada seluruh OPD Kabupaten Situbondo dijelaskan pada **Tabel 3.16.**

Tabel 3.16 Total Keseluruhan Usulan Perangkat Keras Utama

No	Perangkat Keras Utama	Total
1	Komputer (PC)	1316 Unit
2	Laptop	1291 Unit
3	Printer	1250 Unit
Total		**2262 Unit**

3.3.5.2 Perangkat Keras Periferal Pendukung

Usulan perangkat keras periferal yang akan diusulkan berdasarkan dengan hasil analisis terhadap pemenuhan kebutuhan yang berguna sebagai penunjang penyediaan operasional pada masing-masing OPD. Perangkat pedukung yang diusulkan terkait tambahan perangkat periferal yang terdiri dari LED TV, Proyektor, Scanner, Kamera, Monitor, HT. Berikut merupakan usulan mengenai perangkat keras periferal yang ditampilkan pada **Tabel 3.17.**

Tabel 3.17 Usulan Perangkat Keras Periferal

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Scanner F4	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**3 Unit**	**2024**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian	**2 Unit**	**2023 dan 2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital		
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**3 Unit**	**2023 dan 2024**
		Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2023**
7	Bagian Organisasi	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2023**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2023**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2023**
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**
11	Inspektorat	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**2 Unit**	**2023 dan 2025**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**3 Unit**	**2023**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
		Scanner F4	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024**
15	Badan Pendapatan Daerah	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**3 Unit**	**2024**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	**Deskripsi**	**Jumlah Usulan**	**Tahun**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2023 dan 2024**
18	Dinas Kesehatan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**5 unit**	**2024**
		Kamera	Alat Penangkap Gambar dan Video	**1 Unit**	**2023**
		Drone	Alat Terbang Penangkap Gambar dan Video	**1 Unit**	**2023**
		monitor	Penampil Gambar dan Video	**10 unit**	**2023 dan 2024**
19	Dinas Ketenagakerjaan	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**4 Set Unit**	**2023**
		Scanner	Alat elektronik	**4 Unit**	**2023**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital		
		core switch	Alat yang berperan sebagai inti penghubung antara perangkat dengan internet, terletak di bagian backbone atau inti fisik jaringan	**1 Unit**	**2024**
		Server Blade	Komputer server sederhana dengan desain modular yang dioptimalkan untuk meminimalkan penggunaan ruang fisik dan energi	**1 Unit**	**2024**
		Pemancar (*Radio Wireless*)	Alat yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik	**20 Unit**	**2024**
		DSLR, mirrorless	Perangkat kamera yang memanfaatkan cermin untuk mengarahkan cahaya dari lensa ke viewfinder	**4 Unit**	**2023**
		Tripod	Alat stand untuk membantu agar badan kamera bisa berdiri dengan tegak dan tegar	**2 Unit**	**2023**
		Stabilizer camera	Perangkat yang dirancang untuk menahan kamera dengan cara yang mencegah atau	**2 Unit**	**2023**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			mengimbangi gerakan kamera yang tidak diinginkan		
		Drone	Pesawat tanpa awak (unmanned) yang dikendalikan oleh komputer atau *remote* control dan memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh	**3 Unit**	**2024 - 2026**
		Mikrofon	Alat untuk membantu komunikasi manusia dan dipakai pada banyak alat seperti alat perekam dan pengudaraan radio serta televisi	**6 Unit**	**2023**
		Lighting	Perangkat untuk pengolahan cahaya atau pencahayaan yang digunakan dalam fotografi	**3 Unit**	**2023**
		Memori Server	Perangkat yang digunakan untuk pengingat, penyimpanan data atau program yang bersifat sementara pada server	**256 GB**	**2024**
		Prosesor Server	Komponen komputer yang merupakan otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerjasama dengan perangkat komputer lainnya	**128 core**	**2024**
		HDD/SSD Server	Komponen perangkat keras yang menyimpan	**10 TB**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			semua konten digital		
		Kabel *Fiber optic*	Kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain	**150 KM**	**2025 - 2027**
		Handhole	Tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel *fiber optic*	**20 Unit**	**2025**
		Joint Closure	Tempat atau box untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik.	**20 Unit**	**2025**
		Optical Termination Box (OTB)	Kotak yang digunakan untuk menghubungkan kabel fiber optik indoor maupun outdoor dan konektor	**41 Unit**	**2025**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024 dan 2025**
22	Dinas Lingkungan Hidup	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024 dan 2025**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau	**1 Set Unit**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			permukaan serupa.		
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2023 dan 2024**
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2023 dan 2024**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam	**2 Unit**	**2023 dan 2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			bentuk digital		
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024**
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	server 1	SSD	**1 Unit**	**2024**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Kamera	Alat Penangkap Gambar dan Video	**1 Set Unit**	**2024**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	server 1	SSD	**1 Unit**	**2024**
29	Dinas Perhubungan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**
30	Dinas Perpustakaan dan	Scanner A3	Alat elektronik yang memiliki	**2 Unit**	**2023**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
	Kearsipan		fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital		
		Kamera	Alat Penangkap Gambar dan Video	**2 Unit**	**2024**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2Unit**	**2024**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**2 Unit**	**2024**
33	Dinas Sosial	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**3 Unit**	**2024**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Scanner	alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**3 Unit**	**2023 dan 2024**
36	Kecamatan Situbondo	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2023**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2023**
37	Kecamatan Bungatan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda	**1 Unit**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital		
38	Puskesmas Situbondo	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2024**
39	Puskesmas Bungatan	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2025**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital	**1 Unit**	**2023**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Proyektor + LCD	Alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa.	**1 Set Unit**	**2024**
		Scanner	Alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan	**1 Unit**	**2024**

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras			
		Nama Perangkat	Deskripsi	Jumlah Usulan	Tahun
			disimpan dalam bentuk digital		
		Monitor LED TV	Alat Penampil Gambar dan Video	**1 Unit**	**2024**
		Kamera	Alat Penangkap Gambar dan Video	**3 Unit**	**2024**
		HT	Alat Komunikasi Frekuensi	**20 unit**	**2024**

3.3.5.3 Perangkat Keras Jaringan

Usulan perangkat keras jaringan yang akan diusulkan berdasarkan dengan hasil analisis terhadap usia pakai perangkat tersebut dan kebutuhan perangkat yang digunakan, terdapat kategori yang bisa di lakukan pembaruan perangkat keras jaringan seperti umur sudah lebih dari 5 tahun. Perangkat Jaringan Intra yang digunakan di seluruh OPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dikarenakan pengadaan Internet telah terpusat maka dari itu diperlukan usulan terkait tambahan perangkat Jaringan untuk mendukung distribusi Jaringan. Berikut akan dipaparkan terkait usulan mengenai perangkat keras jaringan pada **Tabel 3.20 hingga Tabel 3.26.**

a. Perangkat Jaringan *Modem*

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait dengan Perangkat Jaringan *Modem*, bahwasanya tidak seluruh OPD yang memiliki perangkat *Modem* serta tidak harus dilakukan peremajaan ataupun pengadaan perangkat *Modem* dikarenakan masih banyak perangkat *Modem* yang dimiliki oleh pihak provider bukan milik OPD atau yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, total usulan peremajaan dan pengadaan perangkat *Modem* sebanyak **20 Unit dan Usulan terbanyak tahun 2024, dinas terbanyak yang melakukan pengadaan yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,**

dan Keluarga Berencana. Detail terkait dengan Usulan Perangkat Keras *Modem* dapat dilihat pada **Tabel 3.18.**

Tabel 3.18 Usulan Perangkat Jaringan *Modem*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Modem*					Jumlah Usulan *Modem*
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	1	0	0	0	0	**1**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	**0**
3	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	**0**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	**0**
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	**0**
6	Bagian Umum	0	0	0	0	0	**0**
7	Bagian Organisasi	0	0	0	0	0	**0**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	0	**0**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	**0**
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	0	0	**0**
11	Inspektorat	0	0	0	0	0	**0**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	1	1	1	0	**3**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	**0**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	1	0	**1**
15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	**0**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	**0**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	0	0	0	**1**
18	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	**0**
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	**0**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	1	1	0	**3**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1	0	0	0	**1**
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	**0**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	0	**0**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Modem*					Jumlah Usulan *Modem*
		2023	2024	2025	2026	2027	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	1	0	1	0	**2**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	0	1	0	**2**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	1	1	1	**3**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	**0**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	**0**
29	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	**0**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	**0**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	**0**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	1	0	1	**2**
33	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	**0**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	**0**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	0	0	0	0	**0**
36	Kecamatan Situbondo	0	0	1	0	0	**1**
37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
38	Puskesmas Situbondo	0	0	0	0	0	**0**
39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	**0**

b. Perangkat Jaringan *Hub/Switch*

Hub berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Sedangkan untuk jaringan switch, adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer.

Usulan perangkat Jaringan *Hub/Switch* di setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 perangkat. Peremajaan perangkat *Hub/Switch* mempertimbangan kondisi perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun. Total usulan peremajaan dan pengadaan perangkat *Hub/Switch* sebanyak **89 Unit dan Usulan terbanyak tahun 2024, dinas terbanyak yang melakukan pengadaan yaitu RSUD dr. Abdoer Rahem**. Detail usulan Perangkat Jaringan *Hub/Switch* dapat dilihat pada **Tabel 3.19.**

Tabel 3.19 Usulan Perangkat Jaringan *Hub/Switch*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Hub/Switch*					Jumlah Usulan *Hub / Switch*
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	0	0	**0**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	**0**
3	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	**0**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	**0**
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	1	1	0	**3**
6	Bagian Umum	0	0	0	0	0	**0**
7	Bagian Organisasi	0	1	0	1	0	**2**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	0	**0**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	1	1	1	**5**
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	1	0	0	0	**1**
11	Inspektorat	0	1	0	0	1	**2**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	1	2	1	2	**6**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	0	**1**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	2	1	1	**5**
15	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	1	0	**2**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	1	1	2	**6**
17	Dinas Kependudukan dan	0	2	2	1	1	**6**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Hub/Switch*					Jumlah Usulan *Hub / Switch*
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Pencatatan Sipil						
18	Dinas Kesehatan	0	1	0	1	2	**4**
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	**0**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	0	1	1	**3**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0	1	0	0	**1**
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	0	0	0	**1**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	0	**0**
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	1	1	1	1	**4**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	0	1	**2**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	0	**0**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	1	1	1	**5**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	2	1	2	1	**6**
29	Dinas Perhubungan	0	1	1	2	0	**4**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	2	0	1	**3**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	**0**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	0	0	**0**
33	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	**0**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	0	0	0	**1**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	3	3	2	4	**12**
36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	0	0	**0**
37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
38	Puskesmas Situbondo	0	0	1	0	1	**2**
39	Puskesmas Bungatan	0	0	1	0	0	**1**
40	Badan Penanggulangan	0	0	1	0	0	**1**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Hub/Switch*					Jumlah Usulan *Hub / Switch*
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Bencana Daerah						

c. Perangkat Jaringan Gateway Router

Gateway Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai perutean atau mengkoneksikan jaringan satu dengan yang lain dalam protokol yang berbeda. Usulan perangkat Jaringan *Gateway Router* di setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 perangkat. Peremajaan perangkat *Gateway Router* mempertimbangan kondisi perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun. Total usulan peremajaan dan pengadaan perangkat *Gateway Router* sebanyak sebanyak **80 Unit dan Usulan terbanyak tahun 2025, dinas terbanyak yang melakukan pengadaan yaitu**, Detail usulan Perangkat Jaringan *Gateway Router* dapat dilihat pada **Tabel 3.20.**

Tabel 3.20 Usulan Perangkat Jaringan *Gateway Router*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Gateway Router*					Jumlah Usulan *Gateway Router*
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	1	0	0	0	**1**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	0	**1**
3	Bagian Hukum	0	0	1	0	0	**1**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	1	0	0	**1**
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	0	0		**1**
6	Bagian Umum	0	0	1	0	0	**1**
7	Bagian Organisasi	0	1	0	0	0	**1**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	1	0	0	0	**1**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	1	0	0	0	**1**
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	1	0	0	**1**
11	Inspektorat	0	1	0	1	0	**2**
12	Badan Kepegawaian dan	0	1	0	2	1	**4**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Gateway Router*					Jumlah Usulan *Gateway Router*
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Pengembangan Sumberdaya Manusia						
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	0	**1**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	1	0	**1**
15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	1	0	0	**1**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	0	1	1	**3**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	0	1	0	**2**
18	Dinas Kesehatan	0	0	1	0	1	**2**
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	1	0	0	**1**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	5	6	4	5	**20**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0	1	0	0	**1**
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	1	0	0	**1**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	1	0	0	0	**1**
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	1	0	0	1	**2**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	0	0	**1**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	1	0	0	**1**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	0	1	1	**3**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	0	1	0	**2**
29	Dinas Perhubungan	0	1	0	0	0	**1**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	1	0	0	**1**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	1	0	0	**1**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	1	0	0	**1**
33	Dinas Sosial	0	1		0	0	**1**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	1	0	0	**1**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	2	2	4	2	**10**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Gateway Router*					Jumlah Usulan *Gateway Router*
		2023	2024	2025	2026	2027	
36	Kecamatan Situbondo	0	0	1	0	0	**1**
37	Kecamatan Bungatan	0	0	1	0	0	**1**
38	Puskesmas Situbondo	0	0	1	0	0	**1**
39	Puskesmas Bungatan	0	0	1	0	0	**1**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	**1**

d. Perangkat Jaringan *Access Point*

Access Point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Usulan perangkat Jaringan *Access Point* di setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 perangkat. Peremajaan perangkat *Access Point* mempertimbangan kondisi perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun. Total usulan peremajaan dan pengadaan perangkat *Access Point* **73 Unit dan Usulan terbanyak tahun 2024, dinas terbanyak yang melakukan pengadaan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika**.Detail usulan Perangkat Jaringan *Access Point* dapat dilihat pada **Tabel 3.21.**

Tabel 3.21 Usulan Perangkat Jaringan *Access Point*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Access Point*					Jumlah Usulan *Access Point*
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	1	0	0	0	**1**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	1	0	0	0	**1**
3	Bagian Hukum	0	0	1	0	0	**1**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	1	0	0	**1**
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	0	1		**2**
6	Bagian Umum	0	1	0	0	0	**1**
7	Bagian Organisasi	0	0	1	0	0	**1**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	1	0	0	0	**1**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	1	0	0	**1**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Access Point*					Jumlah Usulan *Access Point*
		2023	2024	2025	2026	2027	
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	1	0	0	**1**
11	Inspektorat	0	0	1	0	0	**1**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	1	0	0	1	**2**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	0	**1**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	2	0	0	1	**3**
15	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	1	0	**2**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	1	0	**2**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	2	0	**2**
18	Dinas Kesehatan	0	0	1	0	0	**1**
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	1	0	0	**1**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	2	3	3	4	**12**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1	0	0	0	**1**
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	1	0	0	**1**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	1	0	0	**1**
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	1	0	1	0	**2**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	0	0	**1**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	1	0	0	**1**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	1	2	1	**6**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	0	1	0	**2**
29	Dinas Perhubungan	0	0	1	0	0	**1**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	1	0	0	**1**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	1	0	0	**1**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	1	0	0	**1**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Access Point*					Jumlah Usulan *Access Point*
		2023	2024	2025	2026	2027	
33	Dinas Sosial	0	0	1	0	0	**1**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	0	0	1	**3**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	0	2	2	3	**7**
36	Kecamatan Situbondo	0	0	1	0	0	**1**
37	Kecamatan Bungatan	0	0	1	0	0	**1**
38	Puskesmas Situbondo	0	0	0	1	0	**1**
39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	1	0	**1**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	0	**1**

e. Perangkat Jaringan *Repeater Wifi*

Repeater Wifi adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menyebarluaskan jaringan WiFi secara menyeluruh dengan cara menangkap sinyal WiFi dan dipancarkan kembali. Usulan perangkat Jaringan *Repeater Wifi* di setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 perangkat. Peremajaan perangkat *Repeater Wifi* mempertimbangan kondisi perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun. Total usulan peremajaan dan pengadaan perangkat *Repeater Wifi* **7 Unit dan Usulan terbanyak tahun 2024, dinas terbanyak yang melakukan pengadaan yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan**. Detail usulan Perangkat Jaringan *Repeater Wifi* dapat dilihat pada **Tabel 3.22.**

Tabel 3.22 Usulan Perangkat Jaringan *Repeater Wifi*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Repeater Wifi*					Jumlah Usulan *Repeater Wifi*
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	0	0	**0**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	**0**
3	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	**0**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	**0**
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	**0**
6	Bagian Umum	0	0	0	0	0	**0**
7	Bagian Organisasi	0	0	0	0	0	**0**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	0	**0**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	**0**
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	0	0	**0**
11	Inspektorat	0	0	0	0	0	**0**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	0	0	0	0	**0**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	1	0	**1**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0	**0**
15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	**0**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	**0**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	**0**
18	Dinas Kesehatan	0	0	1	0	1	**2**
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	**0**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	**0**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0	1	1	0	**2**
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	**0**
23	Dinas Pariwisata,	0	0	0	0	0	**0**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Repeater Wifi*					Jumlah Usulan *Repeater Wifi*
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Pemuda dan Olahraga						
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	0	0	0	0	**0**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	**0**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	0	**0**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	**0**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	**0**
29	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	**0**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	**0**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	**0**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	0	0	**0**
33	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	**0**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	0	0	0	**1**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	0	0	0	0	**0**
36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	0	0	**0**
37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
38	Puskesmas Situbondo	0	0	1	0	0	**1**
39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	**0**

f. Perangkat Jaringan *Antena Outdoor Wireless*

Antena Outdoor Wireless adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memperkuat serta mengarahkan sinyal WiFi untuk melakukan koneksi point to point, ataupun multi point. Usulan perangkat Jaringan *Antena Outdoor Wireless* di setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 perangkat. Peremajaan perangkat *Antena Outdoor Wireless* mempertimbangan kondisi perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun. Total usulan peremajaan dan

pengadaan perangkat *Antena Outdoor Wireless* sebanyak **8 Unit dan semua Usulan setiap tahunnya berjumlah sama, dinas yang melakukan pengadaan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika**. Detail usulan Perangkat Jaringan *Antena Outdoor Wireless* dapat dilihat pada **Tabel 3.23.**

Tabel 3.23 Usulan Perangkat Jaringan *Antena Outdoor Wireless*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Antena Outdoor Wireless*					Jumlah Usulan *Antena Outdoor Wireless*
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	0	0	0	0	0	**0**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	**0**
3	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	**0**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	**0**
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	**0**
6	Bagian Umum	0	0	0	0	0	**0**
7	Bagian Organisasi	0	0	0	0	0	**0**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	0	**0**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	**0**
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	0	0	**0**
11	Inspektorat	0	0	0	0	0	**0**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0	0	0	0	0	**0**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	**0**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0	**0**
15	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	**0**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	**0**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	**0**
18	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	**0**
19	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	**0**
20	Dinas Komunikasi dan	0	2	2	2	2	**8**

Kode OPD	Nama OPD	Usulan *Antena Outdoor Wireless*					Jumlah Usulan *Antena Outdoor Wireless*
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Informatika						
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0	0	0	0	**0**
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	**0**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	0	**0**
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	0	0	0	0	0	**0**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	**0**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	0	**0**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	**0**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	**0**
29	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	**0**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	**0**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	**0**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	0	0	**0**
33	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	**0**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	**0**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	0	0	0	0	0	**0**
36	Kecamatan Situbondo	0	0	0	0	0	**0**
37	Kecamatan Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
38	Puskesmas Situbondo	0	0	0	0	0	**0**
39	Puskesmas Bungatan	0	0	0	0	0	**0**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	**0**

Total Keseluruhan dari usulan pangadaan Perangkat Keras Jaringan, pada seluruh OPD Kabupaten Situbondo dijelaskan pada **Tabel 3.24.**

Tabel 3.24 Total Usulan Peremajaan Perangkat Jaringan Intra Pemerintah

No	Nama Perangkat Jaringan	Usulan Perangkat Per-Tahun					Jumlah Usulan Perangkat Jaringan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	***Modem***	1	6	5	6	2	**21**
2	***Hub/Switch***	1	25	24	18	21	**89**
3	**Gateway Router**	0	23	28	17	12	**80**
4	***Access Point***	0	18	28	16	11	**73**
5	***Repeater Wifi***	0	1	3	2	1	**7**
6	***Antena Outdoor Wireless***	0	2	2	2	2	**8**
Total Perangkat Jaringan		**2**	**75**	**90**	**61**	**49**	**277**

3.3.5.4 Perangkat Keras Media Penyimpanan

Rekomendasi penggunaan *Storage Area Network* (SAN) sebagai solusi konfigurasi masa depan dalam media penyimpanan data dalam jumlah besar (Tera Byte) dalam berbagai servis yang berbasis *online* di Internet maupun Intranet yang dapat di terapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai bentuk implementasi Komputasi awan secara terpusat yang nantinya disedikan oleh diskominfo terkait optimalisasi penggunaan *Cloud* melalui NAS. *Storage Area Network* (SAN) adalah sebuah jaringan berkecepatan sangat tinggi yang khusus, terdiri dari server dan penyimpan (*storage*). Tujuan utama SAN adalah untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antara server dan peralatan penyimpan, tanpa mengurangi *bandwidth* yang ada di LAN/WAN. Media penyimpanan SAN tersambung melalui Fiber Channel, sebuah teknologi komunikasi data berkecepatan sangat tinggi yang nantinya menjadikan SAN sebuah jaringan *dedicated* yang platform-independent yang beroperasi di belakang server.

SAN terdiri dari infrastruktur komunikasi, yang memberikan sambungan fisik, dan lapisan manajemen, yang mengatur sambungan, elemen penyimpan, dan sistem komputer sehingga menghasilkan transfer data yang sangat aman dan handal.

Gambar 3.8 Rekomendasi SAN IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)

SAN merupakan sebuah sistem dimana 2 atau lebih server bisa mengakses sebuah *storage* (bisa juga lebih dari 1), komponen 2 SAN itu terdiri dari :

1. Server : Melakukan semua operasi ke client dan ke *storage*
2. SAN Switch : Menghubungkan *storage* ke server dan mengatur pembagian akses
3. *Storage* : Sebuah media dimana data disimpan.

Perlu diingat kalau yang digunakan SAN maka protokol yang digunakan adalah *block* jadi tidak sembarangan *client* yang bisa mengkases, biasanya hanya server saja yang bisa mengkases data di SAN.

Adapun Keuntungan dari penggunaan SAN sebagai media penyimpanan berdasarkan aspek yang ada antara lain:

1. *Availability*:

   satu copy dari data jadi dapat di akses oleh semua host melalui jalur yang berbeda dan semua data lebih efisien di manage-nya.
2. *Reliability*:

   infrastruktur trans*port* data yang dapat menjamin tingkat kesalahan yang sangat minimal, dan kemampuan dalam mengatasi kegagalan.
3. *Scalability*:

   server maupun media penyimpanan (*storage*) dapat ditambahkan secara independent satu dan lainnya, dengan tanpa pembatas harus menggunakan sistem yang *proprietary*.

4. *Performance*:

   Fibre Channel (standar enabling teknologi untuk interkonektifitas SAN) mempunyai *bandwidth* 100 MBps *bandwidth* dengan overhead yang rendah, dan SAN akan memisahkan trafik *backup* dengan trafik standar LAN/WAN.

5. *Manageability*:

   Berkembangnya perangkat lunak dan standar baik untuk FC-AL (*Fibre Channel Arbitrated Loop*) maupun Fibre Channel fabric memungkinkan *management* dilakukan secara terpusat dan koreksi dan deteksi kesalahan yang proaktif.

6. *Return On Information Management*:

   Karena bertambahkan tingkat redudansi dan kemampuan managemen yang baik, maupun kemampuan untuk di tambahkan server dan media penyimpan (*storage*) secara independen. SAN pada akhirnya memungkinan biaya kepemilikan yang rendah pada saat yang sama menaikan *Return on Information Management* (ROIM) di bandingkan metoda penyimpanan tradisional.

Rekomendasi Penggunaan SAN yaitu dengan type **IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)**yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penggunan SAN pada Pemerintah Kabupaten Situbondo , detail gambar perangkat SAN dengan type **IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)** ditampilkan pada **Gambar 3.8 dan Tabel 3.25** .

Tabel 3.25 Usulan Perangkat Media Penyimpanan

No	Perangkat Media Penyimpanan	Deskripsi Media Penyimpanan	Spesifikasi Media Penyimpanan	OPD Pengelola Media Penyimpanan	Jumlah	Tahun Usulan
1	IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)	Perangkat Media penyimpanan yang menjadi solusi konfigurasi masa depan dalam media penyimpanan data dalam jumlah besar (*TeraByte*) dalam berbagai servis	1x FlashSystem 5015 LFF Control Enclosure 6x 4TB 7.2K 3.5Inch NL HDD 1x 16Gb FC Card Adapter Pair	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2 Unit	**2024**

No	Perangkat Media Penyimpanan	Deskripsi Media Penyimpanan	Spesifikasi Media Penyimpanan	OPD Pengelola Media Penyimpanan	Jumlah	Tahun Usulan
		yang berbasis *online* di Internet maupun IntraNet yang dapat di terapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo				

3.3.5.5 Perangkat Lunak Platform

Berdasarkan dengan hasil Analisa dari data eksisting yang didapatkan melalui proses survei pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam bentuk *free Trial* dan masih belum berlesensi pada perangkat yang ada di setiap OPD dan terdapat beberapa perangkat lunak yang terpasang serta digunakan bersifat *crack*. Penggunaan perangkat trial juga tidak boleh dilakukan proses *crack* yang merupakan bentuk kegiatan illegal dan perangkat lunak dengan lisensi trial akan bergantung pada masa trial yang normalnya relatif pendek. Jika sudah berakhir masa trial maka perangkat tersebut tidak dapat digunakan atau fitur yang tersedia akan dibatasi penggunaannya. Berikut merupakan usulan terkait dengan Perangkat Lunak Platform berdasarkan dengan prioritas penggunaan yang ditampilkan pada **Tabel 3.26.**

Tabel 3.26 Usulan Perangkat Lunak *Platform*

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Windows Server	Sistem Operasi berbasis *windows* yang pemanfaatannya mendukung enterprise-level	Sistem Operasi	*Windows* Server	Trialware, SaaS atau volume licensing	Microsoft	Tahunan

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	management, data *storage*, applications, and communications.					
Net Framework	Sebuah perangkat lunak kerangka kerja yang berjalan terutama pada sistem operasi Microsoft *Windows*	Sistem Utilitas	Framework Class Library	Licensing	Microsoft	Free
XAMPP	perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program untuk mengkonfigurasi pengaturan *Database* pada phpmy admin.	Sistem *Database*	*Database* Management	Open Source	OPD / General Public License	Free
Android Studio	Integrated Development Enviroment untuk sistem operasi Android, yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA dan didesain khusus untuk pengembangan Android.	Sistem Utilitas	Pemrograman	Open Source	OPD / General Public License	Free
MariaDB	relational *Database* management system (DBMS) open-source yang merupakan pengganti drop-in yang kompatibel.	Sistem *Database*	*Database* Management	Open Source	OPD / General Public License	Free
Adobe Premiere Pro	sebuah program penyunting video berbasis non-linier	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Adobe License	Free Trial

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	dari Adobe Systems.					
Lightwork	Software editor untuk mengedit Video berbasis open source yang memiliki fitur lengkap untuk mendukung proses editing videografis	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Open Source	OPD / General Public License	Free
Blender	Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif dan permainan video	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Open Source	OPD / General Public License	Free
Adobe Photoshop	Perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Adobe License	Free Trial
GIMP	Perangkat lunak editor citra yang dikhususkan untuk proses editing foto atau gambar dan pembuatan efek berbasis open source	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Open Source	General Public License	Free Trial
WHM dan CPANEL	Perangkat lunak berbayar untuk mengelola domain dan hosting	Sistem Utilitas	Hosting management	Purchase / Trial	Cpanel licence	Tahunan
Microsoft Office	Perangkat lunak paket aplikasi perkantoran	Sistem Utilitas	Aplikasi Perkantoran	Purchase / Trial	Microsoft	Free Trial
Visual Studio Code	Perangkat lunak penyunting source code, menyediakan fitur seperti penyorotan	Sistem Utilitas	Pemrograman	Open Source	Microsoft	Free

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, dan Git					
Winbox	Perangkat lunak untuk mengatur jaringan internal	Sistem Utilitas	Networking	Open Source	MikroTik	Free
Foxit Reader	Aplikasi pembaca, pencari, dan pencetak dokumen PDF multilingual. Perangkat lunak ini memungkinkan penggunanya untuk mendesain form PDF yang interaktif, memasukkan gambar, menambah jaringan, menambahkan keterangan pada PDF, mengirim PDF, dan lain sebagainya	Sistem Utilitas	Aplikasi Perkantoran	Purchase / Trial	Foxit Corporation	Free Trial
CorelDraw	Perangkat lunak untuk editor grafis vektor	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Corel	Free Trial
SPSS	Singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences, merupakan program komputer yang dipakai untuk analisis statistika	Sistem Utilitas	Aplikasi Statistik	Purchase / Trial	IBM	Free Trial
FileZilla	Dikenal dengan sebutan FileZilla Client, adalah salah satu software FTP yang mendukung FTP, SFTP, dan FTPS	Sistem Utilitas	Hosting management	Open Source	Tim Kosse	Free
Proxmox	Merupakan sebuah	Sistem	Server	Open	Proxmox Server	Free

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	platform virtualisasi open source untuk menjalankan aplikasi dan mesin virtual	Utilitas	management	Source	Solutions GmbH	
Zimbra	Aplikasi mailing yang memunculkan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi SOAP untuk semua fungsi dan juga merupakan sebuah IMAP dan POP3 server	Sistem Utilitas	Mailing management	Open Source	Zimbra Inc	Free
Kinemaster Pro	Perangkat lunak ponsel pintar yang khusus digunakan untuk keperluan pengeditan video	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Nex Streaming	Free Trial
OBS Studio	Perangkat lunak untuk perekaman dan streaming langsung, transmisi data terutama dilakukan melalui Real Time Messaging Protocol (RTMP) dan dapat dikirim ke tujuan pendukung RTMP mana pun, termasuk banyak preset untuk situs web streaming seperti YouTube, Twitch, Instagram, dan Facebook	Sistem Utilitas	Video Streamer	Open Source	Project OBS	Free
Audacity Pro	Aplikasi editor audio digital, pengguna bisa mengoreksi berkas	Sistem Utilitas	Audio Editor	Purchase / Trial	The Audacity Team	Free Trial

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	suara tertentu, atau sekedar menambahkan berbagai efek yang disediakan.[5] Selain itu, pengguna juga dapat berkreasi dengan suara yang dimiliki sendiri					
Zoom	Perangkat lunak telekonferensi, dengan fitur konferensi video grup, berbagi layar, plugin, ekstensi browser, dan kemampuan untuk merekam rapat dan membuatnya secara otomatis ditranskripsi	Sistem Utilitas	Telekonferensi	Purchase / Trial	Zoom Video Communications	Free Trial
Xsplit	Aplikasi streaming langsung dan aplikasi video-mixing yang sebagian besar digunakan untuk menangkap gameplay untuk streaming langsung atau keperluan perekaman video	Sistem Utilitas	Video Streamer	Purchase / Trial	SplitmediaLabs	Free Trial
ArcGIS	Paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis, meliputi perangkat lunak berbasis *Windows* yaitu ArcReader yang memungkinkan	Sistem Utilitas	GIS	Open Source	Esri	Free

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	pengguna menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ArcGIS lainnya					
Zabbix	perangkat lunak pemantauan beragam komponen TI, termasuk jaringan, server, mesin virtual, dan layanan *Cloud*. Menyediakan metrik - metrik pemantauan, antara lain pemanfaatan jaringan, beban CPU, dan konsumsi ruang disk	Sistem Utilitas	Network Monitoring	Open Source	Zabbix LLC	Free
Wireshark	Aplikasi penganalisis lalu lintas jaringan, digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak dan pengembangan protokol komunikasi	Sistem Utilitas	Network Monitoring	Open Source	The Wireshark Team	Free
KeePassX	Perangkat lunak manajemen akun	Sistem Utilitas	Account Management	Open Source	KeePassX Team	Free
MacOS 11	Sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan disediakan untuk komputer Macintosh	Sistem Operasi	MacOS	Purchase / Trial	Apple Inc.	Free Trial
Ubuntu 20.04 LTS	Sistem Operasi berbasis Linux Debian yang ditawarkan dalam	Sistem Operasi	Linux	Open Source	Canonical Ltd., Ubuntu Community	Free

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	tiga edisi resmi: Ubuntu Desktop untuk komputer pribadi, Ubuntu Server untuk server dan *Cloud* computing, dan Ubuntu Core untuk IoT, perangkat kecil dan robot					
Canva Pro	Platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Canva	Free Trial
Google Drive Premium	Layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas	Sistem Utilitas	Aplikasi Perkantoran	Purchase / Trial	Google LLC	Free Trial
Trello	Aplikasi ini dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan bisnis termasuk manajemen real estat, manajemen proyek perangkat	Sistem Utilitas	Aplikasi Manajemen	Purchase / Trial	Fog Creek Software	Free Trial

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	lunak, papan buletin sekolah, perencanaan pelajaran, akuntansi, desain web, permainan, dan manajemen kasus kantor hukum					
ViPlex Express	Merupakan aplikasi untuk pemutaran video, terutama dengan monitor besar seperti LED, NEC, dan Videotron	Sistem Utilitas	Perangkat Multimedia	Open Source	Nova Star	Free
Navicat	serangkaian perangkat lunak manajemen dan pengembangan basis data grafis yang diproduksi oleh CyberTech Ltd. untuk MySQL, MariaDB, MongoDB, Oracle, SQLite, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server.	Sistem *Database*	*Database* Management	Purchase / Trial	CyberTech Ltd.	Free Trial
Jetbrain (Php Storm)	Editor untuk PHP, HTML dan JavaScript dengan analisis kode dengan cepat, pencegahan kesalahan dan pemfaktoran ulang otomatis untuk kode PHP dan JavaScript. Penyelesaian kode PhpStorm kompatibel dengan berbagai versi PHP,	Sistem Utilitas	Editor Pemrograman	Purchase / Trial	jetbrains	Free Trial

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ *Database*)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	termasuk generator, coroutine, kata kunci terakhir, daftar depan, namespace, closures, traits, dan sintaks larik pendek. Selain itu, ini termasuk editor SQL lengkap dengan hasil kueri yang dapat diedit.					
VMWare	Software yang menampilkan virtualisasi dan *Cloud* computing untuk server, komputer, dan perangkat keras lainnya.	Sistem Operasi	Manajemen Server	Purchase	VMware, Inc	Free Trial

3.3.6 Command Center

Command Center merupakan fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Manegement* atau *Business Continuity Management*. *Command Center* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, di mana seorang pimpinan bersama dengan tim melakukan rapat, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respons terhadap suatu hal yang dihadapi yang mana meliputi tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan, dan langkah penyediaan informasi publik.

Tujuan dibangunnya *Command Center* yaitu untuk:

1. *Data Center management*, mengatur manajemen pusat dan pengendalian operasi untuk sistem komputer yang biasanya berbentuk pusat data.
2. *Business application management*, memantau dan menampilkan data dan aplikasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk eperluan pengambilan keputusan.

3. *Civil management*, mengatur manajemen pusat dan pengendalian fungsi fungsi operasi sipil. Para staf selalu memonitor lingkungan di Kabupaten Situbondo agar dapat menjamin keamanan masyarakat.
4. *Emergency (crisis) management*, pusat komando untuk menangani dan mengendalikan kejadian untuk mencegah suatu krisis/kondisi darurat serta meminimumkan berbagai dampak dari suatu kejadian.

Untuk *display* dari *Command Center* terdiri dari 3-layer utama, yaitu

1. ***Wall Space***

   : display utama yang menyajikan seluruh pantauan aktivitas dan komunikasi secara *realtime.*
2. **PC Desktop/Laptop**

   : tempat pengoperasian dan pengaturan laulintas data dan informasi dan pesan sehingga mudah dikases dan disebarkan dengan efektif dan efisien.
3. **Tablets/smartphone**

   : mobil device yang dibutuhkan setiap pengambil keputusan terkait *Command Center*.

Keberadaan *Data Center* penting dalam pengimplementasian *Command Center*. *Data Center* merupakan pusat perangkat *server, storage* dan jaringan berada. *Data Center* melayani pengembangan aplikasi dan akses jaringan Intranet dan Internet. Data-data yang diperlukan oleh *Command Center* ditampung dan diakses dari *Data Center*, yang kemudian akan ditampilkan dalam suatu ruangan yang terdiri dari banyak *display* (layar monitor) yang menampilkan *dashboard/reporting* dari aplikasi.

Berikut merupakan Rekomendasi terkait pembangunan dan pemenuhan aspek pendukung *Command Center* yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang dapat dilaksanakan pada tahun 2023 hingga tahun 2025, penjelasan secara rinci terkait usulan *Command Center* ditampilkan pada **Tabel 3.27.**

Tabel 3.27 Usulan Perangkat Lunak *Platform*

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Command Center				
1	Pengkajian atau Roadmaps Penerapan	Melakukan Pengkajian terhadap Penggunaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2023

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Command Center	dan Penerapan Command Center (Intelegent Room dan Pendopo) dan menganalisis semua kebutuhan serta permasalahan yang ada saat ini	Kabupaten Situbondo	
2	Pengadaan Perangkat Pendukung Command Center	Melakukan Pengadaan perangkat yang dibutuhkan pada Command Center berdasarkan permasalahan dan kebutuhan pemenuhan perangkat Command Center	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
3	Penerapan Aspek Command Center	Menerapkan seluruh aspek Ruang Command Center sesuai dengan usulan yang dilakukan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024

3.3.6.1 Pengkajian atau Roadmaps Penerapan *Command Center*

Berdasarkan dengan kondisi eksiting diperlukan kegiatan **Kajian Penerapan *Command Center*** yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana kesesuaiaan dan tingkat optimal dari penerapan *Command Center* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa dokumen perencanaan Command Center. Dengan adanya Kajian Penerapan *Command Center* Kabupaten Situbondo maka dapat mengetahui kebutuhan yang akan mendatang terkait ketidaksesuaian ataupun kekurangan dan kerusakan pada ***Command Center*** yang telah diterapkan dan permasalahan yang terjadi selama ini. Kajian Penerapan *Command Center* didalamnya membahas beberapa **pembahasan teknis yang meliputi Analisis topologi jaringan Command Center, Optimalisasi penggunaan perangkat Jaringan dan perangkat pendukung *command center* dan beberapa pembahasan teknis dalam pengembangan *Command Center*** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. **Kajian penerapan *Command Center* pada Pemerintah Kabupaten Situbondo diusulkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023** oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

3.3.6.2 Pengadaan Perangkat Pendukung Command Center

Peremajaan perangkat *Command Center* dilakukan untuk menjaga optimalisasi penggunaan perangkat pada *Command Center*. **Peremajaan perangkat *Command Center* diusulkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024**. **Tabel 3.28** menjabarkan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan pada *Command Center* Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.28 Peremajaan Perangkat *Command Center* Kabupaten Situbondo

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Video Wall Monitor 4x3	Screen Size 55 inch Bezel Width 0.44 mm (Even) Panel Technology IPS Aspect Ratio 16:9 Brightness 500nits Viewing Angle (H x V) 178 x 178 Operation Hours 24 Hrs Life Time (Typ.) 60,000 Hrs Response Time 8 ms (G to G) Surface Treatment Haze 28% Input HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 Output DP, Audio External Control RS232C In/out, RJ45 (LAN) In/out, IR In Operation Temperature 0°C to 40°C Operation Humidity 10 % to 80 % Power Supply 100-240V~, 50/60Hz Power Type Built-In Power
2	Bracket	Push Out Front Access Wall Mount Bracket
3	Struktur Backdrop	Custom multiplex 18ml dilapisi HPL
4	Video Wall Processor	Case specification 3.5U Input card HDMI Output card HDMI Input slot 4 slot Output slot 4 slot 4 input HDMI 3 card input 4 output HDMI 3 card output Maximum power (W) 300W Working temperature -10~60°C
5	Kabel HDMI	HDMI Cable 10m Max Resolution 4K@60Hz (4:4:4) Premium High-Speed HDMI Cable Jacket Material PVC Conductors Material Tinned Copper/Bare Copper
6	Rack Server	Standing Close Rack 20U Glass Door 19-inch Cabinet Rack

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
		Dimension (DxWxH) 1150 x 600 x 1100 mm Weight ± 97kg
7	Audio Mixer	12 Channel Mixing Console Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo) 1-Knob compressors 24-bit / 192kHz 2in / 2out USB Audio functions IPAD switch on mono inputs +48V phantom power XLR balanced outputs Internal universal power supply for world-wide use Optional Rack Mount Kit RK-MG12 Available Metal chassis Operating Temperature 0 to +40˚C Power Consumption 22 W Power Requirements AC 100 – 240 V, 50/60 Hz Phantom Power Voltage +48 V Frequency Response +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz), refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min PAD (Mono) 26 dB Equivalent Input Noise -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ω, GAIN knob: Max)
8	Audio Amplifier	Multi-channel power amplifiers Frequency Response 0dB, ±1.0dB S/N Ratio ≥ 100dB Input Impedance 20kΩ (balanced), 10kΩ (unbalanced) Cooling 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow Power Requirements 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz Network RJ45x1 Input Sensitivity +4dBu (RL=8Ω)
9	Speaker	System Type 2-way, Acoustic suspension Components LF 8" Cone HF 1" Soft dome Frequency Range (-10dB) 55Hz-20kHz Impedance 8Ω Sensitivity (1W, 1m) 90dB SPL Maximum SPL (Calculated, 1m) 116dB SPL Material, Finish, Colour Black, White
10	Microphone Wireless	Transmitter Type Handheld RF Output Power 1 Battery, endurance 10h Audio Input Level –20 dBV maximum Input Impedance 22 kΩ Audio Output Level (Ref. ±48

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
		kHz deviation with 1 kHz tone) XLR connector into 100 kΩ load: -16 dBV (MIC) Output Impedance XLR connector: 600 Ω Sensitivity –105 dBm for 12 dB SINAD, typical Power Requirements 12 to 18 V DC @ 130 mA, supplied by external power supply
11	Switch Hub	Gigabit PoE 24 *port* 24 x 10/100/1000 *ports* Maximum power rating 160 W2 Frequency 50/60 Hz Voltage 100–240 VAC
12	All In One PC	Processor Intel Core i5-1135G7 Form Factor All-in-One Memory 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 4 GB) Network Interface Integrated 10/100/1000 GbE LAN I/O *Port* Location Rear Graphics Intel® Iris® X^e Graphics *Storage* Type SSD Internal *Storage* 512 GB PCIe® NVMe™ SSD *Windows* 11 Monitor 23,8 inch
13	PC	Processor Intel Core i5-12400 Memory 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) Memory Slots 2 DIMM Internal *Storage* 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD *Storage* Type SSD Graphics AMD Radeon™ RX 550 Graphics (2 GB GDDR5 *dedicated*) I/O *Port* Location Front *Ports* 4 USB 2.0 Type-A; 1 audio-in; 1 audio-out; 1 RJ-45; HP Serial *Port* Adapter Network Interface Integrated 10/100/1000 GbE LAN
14	Intelligent Operations Platform	Web-based Data visualization (White-Labelled Option) Web-based Data-Driven Dashboard Web-Based GIS (Dengan Batas Wilayah) Integrated Geospatial Services AES128 & AES 256 Data Encryption (Including Geospatial Data) Dataset Builder Features (Form & Data sources)

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
		View boards Builder Features (Data Transform & Load) Indoor Map Services (Draw & Connect) Unlimited Thematic Point, Area & Path (With Analytic View) 360° View Image Collector & Viewer Kemampuan GIS Batas Wilayah Pemerintahan Level Kota/Kab., Kecamatan, Kelurahan/Desa, hingga RW/RT (bila ada data) Fitur Custom Polygon IOT to Area & Indoor map Assignment 10GB *Cloud Storage* (Shared *Storage* Across Features) Seamless IOT, Surveillance Camera, & Analog-to-Digital Devices IOT Quick Register & Assigning IOT View & Control Unlimited Surveillance Camera Integration (On User's Bare Metal Machine) Seamless Stream File to Streaming Engine Connection Include Perpetual License Streaming Engine (Including 1 year M & S) Seamless Integration to View boards Seamless Image Processing Module Automatic License Plate Recognition on 6 Surveillance Cameras Vehicle Object Detection on 6 Surveillance Cameras Crowd Analysis on 6 Surveillance Cameras 1 Year Image Computing License (Modelling Update) Seamless Integration to View boards Paperclip Integrated Content management System 10GB *Cloud Storage* (Shared *storage* Across Features) Layout Management (Multi Ratio for Various Display Device) Integrated *Offline* & *Online* Media Assignment Multi-Platform Player Display (Android, *Windows*, Linux Powered Devices) Manage *Cloud* Services & System maintenance 1 Year Manage *Cloud*-Services Include Virtualization For Application & Services 1 Secure Virtualization For DB Join-Development untuk Transfer Knowledge External App, API, and Data Source Integration

3.3.6.3 Penerapan Aspek Command Center

Aspek yang dibutuhkan pada Ruang *Command Center* disesuaikan dengan hasil kajian Manajemen *Command Center* Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Kebijakan, Operasional, dan Pengawasan *Command Center*. **Penerapan aspek *Command Center* diusulkan pada rentang tahun 2023 – 2024**. Penjabaran aspek *Command Center* dijelaskan di bawah ini.

a. Sumber Daya Manusia (SDM) *Command Center*

Kebutuhan akan SDM ditentukan oleh proses yang dilakukan dalam sistem tersebut. Setiap personel akan memiliki tanggung jawab terhadap proses tertentu. Dalam Tata Kelola *Command Center*, terdapat 2 struktur yaitu sistem dan data, sehingga pengelompokan SDM disesuaikan dari 2 struktur tersebut. **Tabel 3.29** menjabarkan kebutuhan SDM berdasarkan *Job Role* pada *Command Center* Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.29 Kebutuhan SDM *Command Center* Kabupaten Situbondo

No	*Job Role*	Tanggung Jawab / Skill	Persyaratan
1	*Data Scientist*	• Menjawab pertanyaan *stakeholder* akan analisa mulai dari *descriptive, diagnostic, predictive* dan *prescriptive* • Memanfaatkan karakteristik big data untuk menghasilkan analisa yang tepat • Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk analisa melalui permodelan • Menemukan pattern /pola yang tersembunyi • Menceritakan hasil analisa kepada *stakeholder*	• Pendidikan S1 /S2, Statistik • Memahami *Business Process* • Memahami Data dan Statistik • Memahami DBMS • Memahami bahasa pemrograman python
2	*Data Engineer*	• Membangun, menguji dan mengelola Arsitektur • Memastikan arsitektur sesuai dengan kebutuhan • Menemukan peluang peluang insight dari data yang diperoleh • Mengembangkan proses untuk dataset untuk kebutuhan data modeling dan data mining. • Menggabungkan berbagai macam tools dan bahasa pemrograman yang dibutuhkan	• Pendidikan S1, Statistik • Memahami *Business Process* • Memahami Data • Memahami Statistik

No	*Job Role*	Tanggung Jawab / Skill	Persyaratan
3	*Data Analyst*	Mengumpulkan, mengorganisir dan menginterpretasikan data dengan menggunakan tools data analitik biasa.	• Pendidikan S1, Statistik • Memahami *Business Process* • Memahami Data • Memahami Statistik
4	*Platform Engineer*	Mengoperasikan platform yang digunakan dalam *Command Center*	• Pendidikan S1, Ilmu Komputer • Memahami *Business Process* • Memahami Data • Memahami Pemrograman

b. Kebijakan Command Center

Kerangka kebijakan yang akan dibuat dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, sekurang-kurangnya memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Definisi dan rangkaian Proses dalam Tata Kelola *Command Center*
2. Struktur Organisasi yang mengelola *Command Center*
3. Budaya, etika dan perilaku dalam pemanfaatan data
4. Jenis dan Tingkatan Informasi yang dihasilkan oleh *Command Center*
5. Layanan, Infrastruktur dan aplikasi dalam *Command Center*
6. Kompetensi SDM *Command Center*

c. Operasional Command Center

Tujuan utama operasional adalah memastikan layanan *Command Center* selalu dalam kondisi terjaga dan sesuai dengan *Service Level Agreement* yang telah disepakati. Sudut pandang yang digunakan adalah manajemen layanan SPBE, dimana *Command Center* adalah salah satu jenis Layanan IT. Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu metode pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara filosofis terpusat pada

perspektif Pengguna Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap proses bisnis organisasi. Manajemen TIK pada *Command Center* terdiri dari atas 2 (dua) area yaitu:

1. *Service Support* yang bersifat sebagai level operasional dengan satu fungsi yaitu *Service Desk* dan sejumlah proses yang meliputi:
    a. Manajemen Gangguan Layanan TIK (*Incident Management*);
    b. Manajemen Masalah Layanan TIK (*Problem Management*);
    c. Manajemen Konfigurasi Layanan TIK (*Configuration Management*);
    d. Manajemen Perubahan Layanan TIK (*Change Management*); dan
    e. Manajemen Rilis Layanan TIK (*Release Management*)
2. *Service Delivery* yang bersifat sebagai level taktis dengan proses yang meliputi:
    f. Manajemen Tingkat Layanan TIK (*Service Level Management*);
    g. Manajemen Keuangan Layanan TIK (*Financial Management*);
    h. Manajemen Kapasitas Layanan TIK (*Capacity Management*);
    i. Manajemen Kelangsungan Layanan TIK (*IT Service Continuity Management*);
    j. Manajemen Ketersediaan Layanan TIK (*Availability Management*)

Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selanjutnya disebut sebagai Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Manajemen Layanan SPBE sesuai dengan konsepsi **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Dokumen Kebijakan Manajemen Layanan SPBE adalah Dokumen kebijakan Layanan Teknologi Informasi (TI) yang berisikan rencana tindak Pengelola Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Kabupaten Situbondo, sebagaimana persyaratan ISO 20000, yang mencakup :

1. Tujuan manajemen layanan TI;
2. Ruang lingkup manajemen layanan TI
3. Kebutuhan layanan (*service requirements*);
4. Keterbatasan yang ada (*known limitations*);
5. Persyaratan standar, kebijakan, hukum, peraturan dan kewajiban kontraktual;

6. Kerangka kewenangan, tugas dan tanggung jawab;
7. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
8. Pengelolaan proses yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga;
9. Hubungan interaksi antar proses manajemen layanan;
10. Manajemen resiko; dan
11. Teknologi yang digunakan untuk mendukung *Information Technology Service Management* (ITSM).

d. Pengawasan *Command Center*

Command Center sebagai salah satu jenis layanan TI, perlu adanya rekomendasi terkait pada pengawasan *Command Center* yang merujuk pada Audit TIK, mulai dari audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Pelaksanaan Audit TIK mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 didukung oleh draft Peraturan BPPT tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/. Berikut penjelasan lebih detail terkait dengan Audit TIK mengacu pada draft Peraturan BPPT tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit, yaitu:

1. Audit Aplikasi (Tata Kelola, Manajemen, dan Fungsionalitas Kinerja aplikasi);
2. Audit Infrastruktur (Tata Kelola, Manajemen, dan Fungsionalitas Kinerja Infrastruktur); dan
3. Audit Keamanan, merujuk pada ISO/ IEC 27001.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

BUKU 6

ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 6

ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Keamanan SPBE 1
1.2 Struktur Referensi Keamanan SPBE 2
1.3 Referensi Keamanan SPBE 4
BAB 2 METODOLOGI 9
2.1 Analisis Kondisi Eksisting 9
2.2 Analisis Kesenjangan 10
2.3 Analisis Usulan 10
BAB 3 ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE 11
3.1 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE 11
3.1.1 Tata Kelola dan Manajemen Keamanan SPBE 12
3.1.2 Keamanan Teknis SPBE 13
3.1.3 Audit Keamanan SPBE 13
3.2 Permasalahan Keamanan SPBE 13
3.3 Kondisi Kesenjangan SPBE 14
3.4 Usulan Keamanan SPBE 14
3.4.1 Tahapan Perencanaan 16
3.4.2 Tahapan Implementasi 33
3.4.3 Tahapan Evaluasi 34
3.4.4 Tahapan Tindak Lanjut 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE 2
Tabel 1.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan 4
Tabel 1.3 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE 5
Tabel 1.4 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE 5
Tabel 1.5 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE 6
Tabel 1.6 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE 6
Tabel 1.7 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE 6
Tabel 1.8 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE 7
Tabel 1.9 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE 8
Tabel 3.1 Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE 17
Tabel 3.2 Rekomendasi Standar Keamanan SPBE 19
Tabel 3.3 Usulan Kategori Ruang Lingkup Keamanan SPBE 20
Tabel 3.4 Rekomendasi Keamanan Teknis 24
Tabel 3.5 Rekomendasi Perangkat Keamanan 25
Tabel 3.6 Rekomendasi SOP / Prosedur *Data Center* 27
Tabel 3.7 Usulan Kebutuhan Pedoman/SOP Jaringan 31
Tabel 3.9 Usulan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE 33
Tabel 3.10 Rekomendasi Kelaikan Keamanan SPBE 35
Tabel 3.10 Rekomendasi Kegiatan Pengujian Keamanan SPBE 41
Tabel 3.11 Rekomendasi Kegiatan Pengujian Keamanan Aplikasi 41
Tabel 3.12 Rekomendasi Penanganan Insiden Keamanan SPBE 45
Tabel 3.13 Usulan Peningkatan Keamanan SPBE 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE 3
Gambar 3.1 Konsep PDCA Keamanan SPBE 16
Gambar 3.2 Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit 37
Gambar 3.3 Monitoring Jaringan melalui Integrasi Topologi 51
Gambar 3.4 Monitoring Grafik Aktivitas Penggunaan Jaringan 51
Gambar 3.5 Monitoring Log Aktifitas dan Grafik penggunaan Jaringa 52

BAB 1
PENDAHULUAN

Pada bab 1 akan menjelaskan terkait penyusunan arsitektur Keamanan SPBE, yang didalamnya akan membahas dasar acuan atau referensi SPBE serta Taksonomi dan Metadata Keamanan SPBE yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022.

1.4 Keamanan SPBE

Keamanan SPBE Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pengendalian keamanan yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan *(nonrepudiation)* sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam penerapan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

1.5 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Referensi Keamanan SPBE (RAK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Tabel 1.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi Lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuain penerapan standar keamanan SPBE
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Aplikasi Umum	dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022, didalamnya memuat beberapa hal yang bertujuan untuk melengkapi rencana penerapan SPBE. Pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Arsitektur SPBE, terdapat Taksonomi atau pengelompokan Referensi Arsitektur SPBE dimana salah satunya adalah taksonomi Keamanan SPBE.

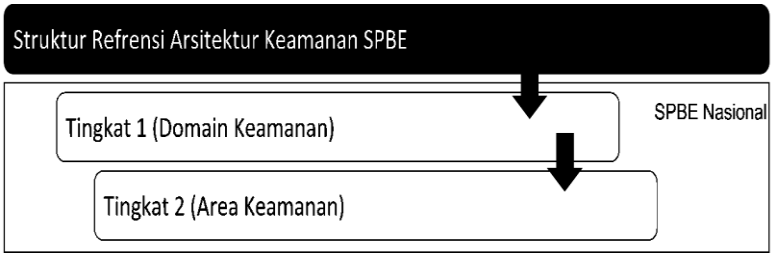

Gambar 1.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RK tingkat 1 (pertama).
2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen didalamnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

1.6 Referensi Keamanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur untuk memudahkan mendeskripsikan, menjelaskan, menjadi suatu informasi yang mudah ditemukan kembali. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat kemanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian pada aspek Manajemen Keamanan merupakan penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit keamanan secara keseluruhan. Penjabaran atribut Metadata Keamanan yang dalam penyusunan metadata keamanan SPBE dijabarkan pada **Tabel 1.2 sampai Tabel 1.9.**

Tabel 1.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama *Security Device*	Nama dari *Security Device* yang digunakan
3	Deskripsi *Security Device*	Penjelasan dari *Security Device* yang digunakan
4	Tipe *Security Device*	Jenis dari *security device* yang digunakan (*Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control*)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari *Security Device* yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik dari *Security Device* yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
7	Unit Pengelola *Security Device*	Unit pengelola *Security Device* yang digunakan

No	Nama Atribut	Keterangan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.3 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: 1. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE. 2. Standar internasional terkait keamanan informasi. 3. Regulasi lainnya.
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal diakhirinya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 1.4 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan *Output*, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 1.5 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 1.6 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan
3	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan keamanan.
4	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan peningkatan keamanan.
5	Nilai Kematangan Keamanan Siber	Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi.
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 1.7 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
5	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 1.8 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE.
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari: a. belum/tidak dilaksanakan; b. memadai; c. perlu peningkatan; d. tidak memadai.
4	Jenis Audit Keamanan SPBE	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: a. *Internal* , yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi *Internal* Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; b. *Eksternal*, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi *Eksternal* yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti; b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%; c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak

No	Nama Atribut	Keterangan
		lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%; d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 1.9 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan keamanan
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

BAB 2
METODOLOGI

Pada bab 2 ini akan menjabarkan terkait metodologi yang digunakan pada penyusunan Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE. Metodologi yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu analisis kondisi eksisting, analisis kesenjangan dan analisis usulan keamanan SPBE. Masing-masing tahapan akan dijabarkan pada subbab 2.1, 2.2, dan 2.3.

2.1 Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk menindaklanjuti terkait dengan kondisi terkini Arsitektur Keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Proses analisis kondisi eksisting terdiri dari tahap *input* berupa data yang didapatkan dari hasil survei *online* dan *offline* yang kemudian diproses dengan melakukan analisa dan reviu data. Sehingga menghasilkan kondisi eksisting yang secara detail dimana telah dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis Kesenjangan Kabupaten Situbondo** berdasarkan dengan Kondisi Eksisting.

- ***Input***

  Input dari tahapan ini, yaitu hasil dari tahapan sebelumnya. Analisa kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dan hasil analisa penentuan ekspektasi atau target yang ingin dituju terkait Keamanan SPBE.

- **Proses**

  Proses dalam tahapan ini dilakukan dengan membandingkan antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan target atau tujuan Kondisi keamanan infrastruktur yang ingin dituju.

- ***Output***

  Output yang dihasilkan berupa list Kesenjangan dari ketidaksesuaian antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan kondisi yang ingin dituju pada setiap indikatornya.

2.2 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa mendatang dari kondisi eksisting yang dibandingkan dengan kondisi ideal untuk Keamanan SPBE. *Input* pada tahapan kesenjangan berdasarkan analisa kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dan hasil analisa kondisi ideal terkait kemanan SPBE. Selanjutnya, membandingkan antara kondisi eksisting kemanan infrastruktur saat ini dengan target atau tujuan kondisi keamanan infrastruktur yang akan dicapai. Dari *input* dan proses analisis kesenjangan didapatkan list kesenjangan dari ketidaksesuaian antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan kondisi yang ingin dituju pada setiap parameter indikatornya.

2.3 Analisis Usulan

Analisis Keamanan SPBE ini melakukan analisis terkait kebutuhan yang mendukung penerapan Keamanan SPBE. Proses analisis usulan Keamanan SPBE terdiri dari:

- ***Input***

  Pada analisis kesenjangangan, berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapat sebelumnya akan digunakan sebagai *input* data pada tahapan awal yang digunakan sebagai usulan keamanan SPBE.

- **Proses**

  Setiap indikator yang ada diperoleh dari Kesenjangan, kemudian Proses selanjutnya dilakukan pencarian terkait solusi berupa usulan untuk memenuhi kondisi yang ingin dicapai dari setiap indikator Keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- ***Output***

  Hasil dari tahapan ini adalah daftar berupa rekomendasi kebutuhan Keamanan SPBE sesuai dengan rekomendasi Usulan Keamanan yang ditujukan dan diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB 3
ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Pada Bab 3 menjelaskan mengenai usulan untuk keamanan SPBE pada Kabupaten Situbondo. Usulan ini berdasarkan kesenjangan kondisi eksisting dengan kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu dalam Bab 3 membahas juga tentang usulan penerapan keamanan yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut.

3.1 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018, seluruh instansi pemerintah wajib Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana telah dijelaskan bahwa faktor keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*Nonrepudiation)* terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Secara umum Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **belum menerapkan secara keseluruhan** terkait standar keamanan yang sesuai dengan standar keamanan baik standar nasional maupun internasional. Dari segi **keamanan fisik**, Pemerintah Kabupaten Situbondo **telah menerapkan** adanya penggunaan ***Firewall*** untuk keamanan jaringan dan Server, perangkat keamanan pendukung dan Prosedur/SOP keamanan serta dilengkapi dengan implementasi **CCTV** di setiap OPD dan beberapa titik area publik sebagai bentuk sarana pendukung keamanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dari segi Tata Kelola Keamanan, Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan** menggunakan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.** Begitupun dengan Peraturan Keamanan yang **belum diterapkan** oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **Peraturan Keamanan seperti Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk**

Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Beberapa Peraturan tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan implementasi keamanan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengampu utama terkait dengan Keamanan SPBE.

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **Telah** melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan **Indeks KAMI**. Detail terkait dengan penerapan Indeks KAMI pada pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo.**

3.1.1 Tata Kelola dan Manajemen Keamanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur dan memastikan terselenggaranya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE. Sedangkan Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

3.1.1.1 Standar Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan kondisi eksiting yang didapatkan dari hasil Survey Lapangan dan pengumpulan Bukti Pendukung yang diberikan serta dikonfirmasi oleh Seluruh OPD terkait penerapan Standar Keamanan Informasi bahwasanya saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum Menerapkan Standar Keamanan.** Sehingga hingga saat ini **terdapat Keluhan yang dialami oleh Seluruh OPD** terkait apa standar yang wajib diterapkan dan bagaimana penerapannya dikarenakan **belum adanya sosialisi pada seluruh OPD** terkait pentingnya Penerapan Standar Keamanan.

3.1.1.2 Prosedur/SOP Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan kondisi eksiting terkait dengan Prosedur/SOP Keamanan Informasi yang didapatkan dari hasil survei Lapangan dan

pengumpulan Bukti Pendukung yang diberikan oleh beberapa OPD serta telah dikonfirmasi, bahwasanya saat ini yang **Telah Menerapkan Prosedur / SOP Keamanan Informasi hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika**. Detail terkait Prosedur / SOP Keamanan Informasi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo subbab 8.4.2.**

3.1.2 Keamanan Teknis SPBE

Berdasarkan dengan pengumpulan data hasil survei terkait Penerapan Keamanan Teknis yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, saat ini **telah menerapkan Keamanan Teknis** pada beberapa Aspek Keamanan, diantaranya dengan adanya perangkat keamanan pendukung yaitu CCTV, *Fingerlock, Firewall, Fingerprint*, Sensor Pintu/*Access Kontrol.* Detail penerapan keamanan teknis pada masing-masing OPD yang dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.5 Tabel 8.9.**

3.1.3 Audit Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari hasil survei yang dilakukan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, hingga saat ini masih banyak yang belum melakukan Audit. Kegiatan Penilaian mandiri terkait penerapan Keamanan **Telah diterapkan** menggunakan **Indeks KAMI** pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD. Evaluasi menggunakan Indeks KAMI bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi dan tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail Kegiatan Penerapan Indeks KAMI pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.6 Tabel 8.10.**

3.2 Permasalahan Keamanan SPBE

Permasalahan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi

eksisting keamanan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat beberapa permasalahan keamanan SPBE yang didapatkan. Permasalahan Keamanan SPBE terdapat 7 (Tujuh) Permasalahan Keamanan SPBE yang ada pada OPD di Kabupaten Situbondo antara lain Terkena *virus/malware/trojan horse* dengan persentase 25 %, Kehilangan Data dengan persentase 24%, Terkena *ransomware* dan sejenisnya dengan persentase 15%, Hacker dengan persentase 14%, Ketidaksesuaian Data dengan persentase 13%, Kebocoran Data dengan persentase 5%, dan Penyalahgunaan Data dengan persentase 4%. Detail terkait dengan Permasalah Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.7 Tabel 8.11 dan Gambar 8.3.**

3.3 Kondisi Kesenjangan Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan kondisi Eksiting terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur Keamanan SPBE yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas keamanan yang semuanya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan usulan yang dilakukan untuk perbaikan Keamanan yang ada dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo Sub bab 8.8 Tabel 8.10.**

3.4 Usulan Keamanan SPBE

Seiring berkembangnya era digital, faktor keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam banyak bidang. Begitu pula dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada sub bab ini akan dibahas terkait salah satu domain SPBE, yaitu Keamanan SPBE. Sebagaimana pelaksanaan Keamanan SPBE ini telah mengacu kepada Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No. 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No.10 Tahun 2019 serta ISO 27001; 2022. Adapun yang **wajib** diterapkan terkait standar keamanan pada Pemerintah Kabupaten

Situbondo, yaitu Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No. 4 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No.10 Tahun 2019. Detail Standar Keamanan SPBE yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.**

   Dalam peraturan BSSN 10/2019 lebih membahas terkait dengan persandian serta pengamanan data dan informasi. Beberapa keamanan yang disebutkan dalam BSSN 10/2019 diantaranya adalah keamanan Sumber Daya TI, akses kontrol, jaringan, surat elektronik dan lainnya. Dalam setiap konteks keamanan dapat diturunkan menjadi bentuk kegiatan kecil seperti halnya pembagian hak akses, penerapan standar kata sandi dan lain sebagainya.

b) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.**

   Peraturan BSSN 4/2021 secara spesifik membahas terkait dengan Keamanan SPBE. Dimana panduan yang disebutkan didalamnya mengacu pada konsep *Plan, Do, Check,* dan *Act* (PDCA). Pada masing-masing tahapan terdapat strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan keamanan.

c) **ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.**

   ISO 27001:2022 merupakan standar internasional yang juga merupakan acuan dari pembentukan banyak standar lain seperti Indeks KAMI dan bahkan Peraturan BSSN 4/2021 pun merupakan sebuah turunan dari ISO 27001:2022.

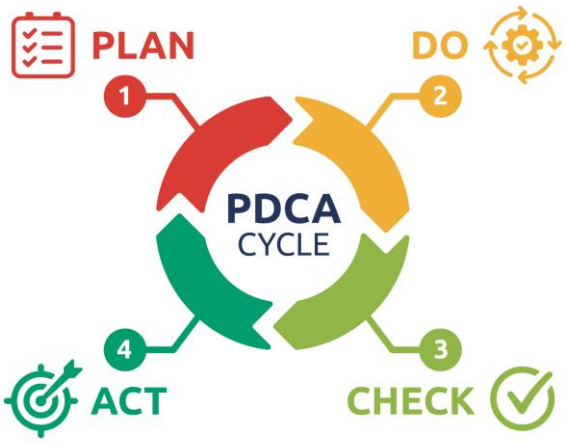

Gambar 3.1 Konsep PDCA Keamanan SPBE

Dalam penerapan keamanan, salah satu acuan yang digunakan adalah Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjelaskan aspek yang harus dilakukan terkait dengan Manajemen Keamanan yang harus dilakukan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa program Keamanan SPBE yang dapat dilakukan berdasarkan aspeknya adalah edukasi kesadaran keamanan SPBE, penilaian kerentanan Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE, penanganan insiden Keamanan SPBE dan Audit Keamanan SPBE. Berikut merupakan usulan penerapan keamana yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan kerangka kerja keamanan informasi yang kemudian dilakukan proses *cascading* dengan template abacus dimana merupakan acuan atau ketentuan dari Kementerian PANRB. Pembahasan secara detail terkait dengan usulan keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dibagi menjadi **4 (empat)**, yaitu tahapan tersebut meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut yang akan dijelaskan pada **Sub Sub Bab 3.4.1-3.4.4.**

3.4.1 Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan menjadi komponen penting dalam pemantauan dan evaluasi indeks SPBE, dimana mengacu pada **2 pedoman** yang pertama, yaitu **ISO 27001** klausul 4 hingga 6 serta **Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021** tentang

Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 8 dan Pasal 9. Pelaksanaan edukasi kesadaran merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap aspek keamanan. Kegiatan edukasi kesadaran perlu dilakukan pada setiap kegiatan dengan menerapkan perencanaan, dimana salah satu kegiatan yang dapat dilakukan selain membentuk Tim Audit adalah dengan menentukan ruang lingkup pada fase perencanaan. Dengan adanya isu-isu terkait keamanan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini, maka perlu dilaksanakan peningkatan kesadaran keamanan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.4.1.1 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran atau yang sering kali dikenal dengan ***Awareness*** dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu. Dengan dilakukannya edukasi kesadaran, diharapkan dapat mengurangi ancaman yang berasal dari *Internal* organisasi. Beberapa contoh kegiatan edukasi kesadaran Keamanan SPBE pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Kesadaran Keamanan SPBE	Usulan Tahun
1	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi Data	Memberikan edukasi kesadaran pada seluruh OPD di Kabupaten Situbondo terkait dengan Keamanan Data	**2023**
2	Sosialisasi Keamanan Hak Akses	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan Keamanan Hak Akses	**2023**
3	Sosialisasi Pedoman Pembuatan *Password* dan Penggantian	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan pedoman pembuatan *Password* dan penggantian	**2023**
4	Melakukan *reminder* penggantian *Password* secara berkala	Melakukan *reminder* secara berkala pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten	**2023-2027 (Setiap 3-6**

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Kesadaran Keamanan SPBE	Usulan Tahun
		Situbondo terkait dengan penggantian *Password*	**bulan sekali)**
5	Pelatihan keamanan siber dari ancaman *hacker*	Melaksanakan pelatihan mengenai beberapa keamanan siber seperti keamanan aplikasi /*website*	**2024**
6	Pelatihan Standar Keamanan	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan standar keamanan	**2024**
7	Pembatasan penggunaan *internet*	Melakukan pembatasan penggunaan *internet* sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari serangan *virus/ malware /trojan* dari situs yang telah dibuka	**2023-2027**
8	Penggunaan *Software* Berlisensi	Menggunakan *software* yang telah berlisensi sebagai Langkah pencegahan adanya serangan keamanan.	**2024-2027**
9	Bimbingan Teknis Standar Keamanan SPBE	Melakukan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.	**2024-2026**

Peningkatan kesadaran keamanan dapat dilakukan secara rutin untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko keamanan. Misalnya saja sosialisasi untuk penggantian *Password* secara berkala dan sosialisasi terkait kebijakan keamanan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.4.1.2 Standar Keamanan SPBE

Dalam Penerapan Standar Keamanan SPBE diperlukan beberapa Peraturan yang dibuat sebagai pedoman atau acuan serta memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan **inventarisir** ulang standar keamanan yang sudah dimiliki masing-masing **perangkat daerah**, sehingga dapat dilakukan pemenuhan standar keamanan yang dibutuhkan atau melakukan pembaharuan dokumen

standar keamanan yang sudah ada. Berikut daftar standar keamanan yang dapat dijadikan acuan dalam kebutuhan standar keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang wajib diterapkanoleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Seperti pada **Tabel 3.2** setidaknya terdapat rekomendasi usulan penerapan standar keamanan tambahan yang dapat diterapkanoleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan menggunakan **2 Standar Keamanan**.

Tabel 3.2 Rekomendasi Standar Keamanan SPBE

No	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi Standar Keamanan	Penerapan	Tahun Usulan Standar Keamanan
1	Indeks KAMI	Keamanan Informasi	untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan	Belum Diterapkan	**2023-2027 (Dilakukan setiap Tahunnya)**
2	ISO 27001:2022	Keamanan Informasi	Standar *information security* yang memuat prinsip-prinsip dasar *Information Security Management Systems* (Sistem Manajemen Keamanan Informasi – SMKI)	Belum Diterapkan	**2027**

3.4.1.3 Penerapan Aspek Keamanan SPBE

Selain pelaksanaan edukasi kesadaran, sesuai dengan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tahapan pertama yang dilakukan dalam hal perencanaan adalah menentukan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup untuk menentukan fokus atau arah kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terbentuk rencana strategis dan solusi pengembangan yang fokus pada penyelesaian masalah. Adapun usulan kategori ruang lingkup keamanan yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo ditampilkan pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Usulan Kategori Ruang Lingkup Keamanan SPBE

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
1	**Keamanan Umum**	Keamanan Sumber Daya Teknologi Informasi	Pengadaan Antivirus Terpusat	**2025**
			Pembuatan Standar Antivirus	**2024**
			Pembuatan Standar Pemindaian Komputer *(Daily Scanning)*	**2023**
			Pengadaan CCTV Di Ruang Publik	**2023**
			Pembuatan Prosedur Pengawasan CCTV	**2023**
		Keamanan Akses kontrol	Pembuatan Daftar DNS Atau IP Yang Diperbolehkan	**2023**
			Pembuatan Standar Hak User *(User Acces Right)*	**2023**
			Pembuatan Pembagian Hak User	**2023**
			Pembuatan Standar Kata Sandi	**2023-2024**
			Pembuatan Frekuensi Pengubahan Kata Sandi	**2023-2027 (Setiap 3-6 bulan sekali)**

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
			Prosedur Penambahan/Pergantian/ Penghapusan Hak Akses	**2023**
		Keamanan Sumber daya manusia	Pendayagunaan SDM untuk bidang keamanan informasi	**2023-2027**
			Peningkatan kompetensi SDM bidang keamanan informasi	**2023-2027**
			Pembuatan Prosedur rekrut Pegawai	**2024**
2	**Keamanan Data dan Informasi**	*Confidentiality* (kerahasiaan)	Pembatasan akses untuk kategori data dan informasi tertentu	**2023**
		Integrity (keutuhan)	Menerapkan proses enkripsi dan dekripsi	**2023**
		Availability (ketersediaan akses)	Didukung dengan DRC atau layanan manual jika layanan *online* mengalami kegagalan	**2025**
		Authentication (keaslian)	Melakukan verifikasi manual sebagai langkah verifikasi akhir	**2023-2027**
		Inevitability (kenirsangkalan)	Menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi	**2023-2027**
		keamanan Data dan Informasi	Pembuatan Standar klasifikasi data dan informasi	**2024**
			Pembuatan pelabelan data dan informasi	**2023**
			Pembuatan Kebijakan keamanan informasi	**2023**
3	**Keamanan Aplikasi SPBE**	keamanan Perangkat Informasi / Aplikasi	Penerapan *Public Key Infrastructure* (PKI)	**2023-2024**
			Pembuatan Standart *Public Key Infrastructure* (PKI)	**2023**
			ProsedurPemadaman/memutus/ mengaktifkan/ meyalakan Aplikasi	**2023**
4	**Keamanan Sistem Penghubung**	Keamanan Surat Elektronik	Pembuatan Prosedur *Digital Signature*	**2024**
		Keamanan Komunikasi	Implementasi *Encryption Techniques*	**2023**
			Kebijakan Komunikasi	**2023**
			Prosedur Berkomunikasi yang Aman	**2024**
			Prosedur *Teleworking*	**2023**
5	**Keamanan Jaringan**	Keamanan Jaringan	Pembuatan Kebijakan Jaringan (*Network Policy*)	**2023**

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
	Intra		Pembuatan Kebijakan Pengiriman Informasi	**2024**
			Pembuatan Prosedur Pengiriman Informasi	**2023**
6	**Keamanan *Data Center* (Ruang Server)**	Keamanan *Data Center*	Penyesuaian Ruang Server dengan Standar Keamanan dengan mempertimbangkan Aspek Keamanan	**2023-2025**
			Penyewaan DRC (*Disaster Recovery Center*) sebagai *backup* server	**2025**
			Pembuatan Prosedur Perawatan Rutin Perangkat UPS	**2023**
			Penerapan Teknologi *Face regconize*	**2023**
			Implementasi ruang situs dan tata letak (*site spave and layout*)	**2024**
			Implementasi Infrastruktur Pengkabelan	**2023**
			Prosedur Akses *Data Center*	**2023**
			Prosedur menambah/mengurangi perangkat pada server di ruang server	**2023**
			Prosedur Remote server	**2023**
			Prosedur Perawatan Server	**2023**
			Prosedur Insiden Manajemen	**2023**

3.4.1.4 Rekomendasi Keamanan Teknis

Dengan adanya standar keamanan yang sudah dibuat dan ditetapkan, maka diharapkan setiap pelaksana keamanan mematuhi dan menggunakan standar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terlebih dalam hal penanganan insiden. Setiap terjadi insiden, perlu adanya pencatatan dalam bentuk catatan aktivitas sistem, sehingga terdapat pencatatan atau dokumentasi terkait dengan insiden yang terjadi. Adapun penerapan ataupun implementasi keamanan Teknis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk pendukung seluruh penerapan Keamanan SPBE. Detail Usulan Implementasi Keamanan Teknis ditampilkan pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4 Rekomendasi Keamanan Teknis

No	Aspek	Kegiatan	Pelaksanaan	Tahun
1	Keamanan Teknis Jaringan Intra Pemerintah	Melakukan Pengaturan *Role Permission* untuk IP *Adress* tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing *role*, berdasarkan jabatan dan ranah kerja.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023**
2	Keamanan Teknis Infrastruktur	Melakukan *Update* terhadap lisensi terbaru pada tiap perangkat lunak dan dilakukan pengecekan secara berkala	Seluruh OPD	**2024-2027**
		Melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara berkala terhadap kondisi kontruksi bangunan, salah satunya ruang server	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2024-2027**
		Memonitoring kondisi fisik perangkat TI seperti CCTV, UPS, Switch dan lainya yang perlu dilakukan pengecekan secara berkala pada masing-masing OPD.	Seluruh OPD	**2023-2027**
3	Keamanan Teknis Aplikasi	Menerapkan fungsi validasi *input* pada sisi server	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023**
		Menerapkan mekanisme penolakan *input* jika terjadi kesalahan validasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023**
		Memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023-2024**
		Melakukan validasi dan *filter* terhadap data yang masuk, termasuk untuk data yang tidak terpercaya.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023-2025**
		Menerapkan kode yang dinamis untuk mengakomodir perubahan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2025**
		Menerapkan fungsi kriptografi.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2024**
4	Keamanan Teknis Pendukung	Melakukan pelatihan, bimbingan teknis maupun	Seluruh OPD	**2024-2027**

No	Aspek	Kegiatan	Pelaksanaan	Tahun
		sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam pengembangan kompetensi TIK.		
		Melakukan reviu pada setiap SOP/Prosedur yang berlaku secara berkala, untuk memastikan bahwa SOP/prosedur yang berlaku masih relevan dengan kondisi eksisting.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2024-2027**

3.4.1.5 Rekomendasi Perangkat Keamanan SPBE

Terdapat usulan perangkat keras keamanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mendukung penerapan Keamanan pada *Data Center*/*Data Center* dan sebagai acuan referensi atau kebutuhan dikonsultasikan ke kominfo terkait dengan Pengadaan Perangkat Keamanan *Firewall*. Berikut merupakan usulan terkait dengan perangkat keras keamanan yang ditampilkan pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5 Rekomendasi Perangkat Keamanan

No	Usulan Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	Deskripsi Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	Spesifikasi Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	OPD Pengelola Keamanan SPBE	Jumlah	Tahun Usulan
1	*Firewall* (Fisik)	Alat keamanan jaringan yang bisa digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan serta memberikan perizinan bahkan membantu memblokir lalu lintas tertentu berdasarkan	SOPHOS XGS 4500 SOPHOS XGS 5500 FORTINET Fortigate FG-201F FORTINET ForManager -300 Centralized Management *Firewall* NG*FIREWALL Firewall* - N8420 NG*FIREWALL Firewall* -	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2 Unit Diusulkan untuk dapat mengadakan 2-unit perangkat. (Terdapat beberapa Rekomendasi sebagai acuan dan Referensi dalam pengadaannya)	2024-2025

No	Usulan Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	Deskripsi Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	Spesifikasi Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	OPD Pengelola Keamanan SPBE	Jumlah	Tahun Usulan
		aturan.	N7210			
2	Akses Masuk (*Finger Lock*)	alat pengunci pintu yang berbasis sidik jari atau kode tertentu	ZKTeco F18 (Access Control)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2 Unit	2023
3	Sistem Kebakaran	Sistem proteksi kebakaran yang dirancang untuk memadamkan api secara aktif dalam mendeteksi api maupun dalam usaha pemadaman, baik secara otomatis maupun manual	A. *Detection & Control System* (Paket Fire Alarm	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	1 Set	2023-2024
			B. Alat Pemadam (Apar): 1. SERVVO Fire Extinguisher FE-36 Metronic System SMT 1100 SV 36 2. TONATA Apar ABC Powder 12 kg Set Komplit TNT-12P		2 Unit	2023-2024
4	Sistem Monitoring Server	Sistem yang digunakan untuk memantau kondisi dan kinerja server serta dilakukan secara rutin agar kinerja	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	1 Unit Sistem	2024

No	Usulan Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	Deskripsi Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	Spesifikasi Perangkat dan Pendukung Keamanan SPBE	OPD Pengelola Keamanan SPBE	Jumlah	Tahun Usulan
		server dapat dipastikan dalam kondisi baik.				

3.4.1.6 Rekomendasi Pedoman/SOP Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang dimiliki dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, saat ini Penerapan Pedoman Keamanan atau SOP Keamanan saat ini masih minim dikarenakan kurang adanya dukungan terkait kebijakan yang mewajibkan setiap penerapan harus didukung dengan adanya pedoman atau SOP. Terdapat 2 poin usulan **pembuatan pedoman dan SOP** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan **Ruang Server dan Jaringan Intra Pemerintah** yang dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

a. Pedoman / SOP Ruang Server

Usulan terkait Pedoman/SOP Ruang server yang bertujuan untuk mendukung aktivitas pengelolaan keamanan yang mana merupakan tanggung jawab SDM yang ada di organisasi terutama pada lingkup Ruang Server (*Data Center*), maka **dibutuhkan SOP untuk standarisasi pelaksanaan seluruh aktivitas ruang server (*Data Center*)**. Berdasarkan kondisi eksisting, Penerapan Manajemen dan Tata Kelola Ruang server yang dimiliki saat ini belum diterapkan secara maksimal, maka dari itu diperlukan penambahan pembuatan SOP yang dapat diterapkan pada Ruang Server *(Data Center).* Berikut merupakan rekomendasi pembuatan SOP *Data Center* yang ditampilkan pada **Tabel 3.6** sebagai bentuk penerapan standarisasi *Data Center*.

Tabel 3.6 Rekomendasi SOP / Prosedur *Data Center*

No	Nama Prosedur / SOP Ruang Server	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
1	SOP Akses ke Ruang *Data Center*	Pedoman yang digunakan untuk Prosedur pengelolaan data	**2023**

No	Nama Prosedur / SOP Ruang Server	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
		center tentang kebijakan kontrol akses	
2	SOP Audit *Internal*	Pedoman yang digunakan untuk proses dan prosedur dalam audit *Internal* dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi tentang kebijakan keamanan.	**2023**
3	SOP Backup dan Restore	Pedoman yang digunakan untuk pemahaman terhadap database, server dan perangkat lain pendukung backup data tentang kebijakan keamanan	**2023**
4	SOP Keamanan Infrastruktur TIK	Pedoman yang digunakan untuk konsep keamanan server tentang kebijakan keamanan informasi dan kebijakan keamanan fisik	**2023**
5	SOP Keamanan Kabel	Pedoman yang digunakan untuk keamanan kabel teknis dan hardware tentang perawatan peralatan TI	**2023**
6	SOP Media yang Dapat Dilepas (*Removable Media*)	Pedoman yang digunakan untuk penggunaan media yang dapat dilepas dan penanganan aset	**2023**
7	SOP Pelabelan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan informasi dengan baik dan proses bisnis instansi tentang kebijakan keamanan tentang pelabelan informasi	**2023**
8	SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan pengujian	Pedoman yang digunakan untuk mengasah kemampuan dalam memahami pemisahan lingkungan pengembangan dan pengujian dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ketika akan di pindahkan dari server development ke server production (*live*).	**2023**
9	SOP Pemeliharaan Server	Pedoman yang digunakan untuk mengontrol pemeliharaan perangkat TI tentang pemeliharaan perangkat TI dan perawatan peralatan.	**2023**
10	SOP Pengelolaan Risiko	Pedoman yang digunakan untuk mengelola seluruh risiko yang terjadi pada ruang server.	**2023**

No	Nama Prosedur / SOP Ruang Server	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
11	SOP Penanganan Aset	Pedoman yang digunakan untuk megetahui tentang Prosedur dan teknis dalam penanganan aset.	**2023**
12	SOP Pengelolaan Akses Server	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui dan memahami Prosedur dan teknis tentang pengelolaan akses server dengan mengetahui kebijakan kontrol akses.	**2023**
13	SOP Pengelolaan Hak Akses	Pedoman yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik, proses bisnis dan penggunaan sistem yang baik dengan mengetahui kebijakan kontrol akses.	**2023**
14	SOP Pengelolaan Password	Pedoman yang digunakan untuk pengelolaan password dengan menerapkan kontrol keamanan sistem.	**2023**
15	SOP Pengelolaan Perubahan	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui secara teknis dan prosedur dalam pengelolaan perubahan pada kebijakan keamanan informasi.	**2023**
16	SOP Penilaian Kerentanan Teknis	Pedoman yang digunakan untuk penilaian terhadap kerentanan teknis pada *Data Center*.	**2023**
17	SOP Perawatan Peralatan TI	Pedoman yang digunakan untuk memahami tentang perawatan peralatan hardware sehingga peralatan yang TI yang dimiliki terjaga.	**2023**
18	SOP Permintaan Hak Akses	Pedoman yang digunakan untuk langkah dalam permintaan pada hak akses untuk memenuhi kebijakan terhadap kontrol akses.	**2023**
19	SOP Pertukaran Data dan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk mengamankan seluruh langkah dalam pertukaran data dan informasi.	**2023**
20	SOP Transfer Media Fisik	Pedoman yang digunakan untuk memahami secara teknis dan prosedur dalam transfer media fisik Instansi.	**2023**
21	SOP Untuk Berkerja di Area yang aman	Pedoman yang digunakan untuk memberikan panduan yang jelas tentang mengakses atau	**2023**

No	Nama Prosedur / SOP Ruang Server	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
		bekerja dengan area fisik yang telah ditetapkan sebagai aman.	
22	SOP Perawatan Genset	Pedoman yang digunakan untuk perawatan genset sehingga mendapatkan 0% dalam kesalahan.	**2023**
23	SOP Pemadaman Listrik	Pedoman yang digunakan untuk langkah teknis dalam penanganan ketidaksesuaian dan insiden pemadaman listrik	**2023**
24	SOP Pengelolaan Akses Non Fisik (*Logic*)	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui alur dalam pengelolaan akses non fisik (*Logic*) pada ruang server	**2023**
25	SOP Perawatan Rutin Perangkat UPS	Pedoman yang digunakan untuk langkah perawatan rutin pada perangkat UPS	**2023**
26	SOP Pengawasan CCTV	Pedoman yang digunakan untuk mengatur seluruh aktifitas pegawasan CCTV yang ada pada Ruang Server	**2023**
27	SOP Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Pedoman yang digunakan untuk penanganan Insiden dan Ketidak sesuaian yang ada pada Ruang Server.	**2023**
28	SOP Penilaian Kejadian Keamanan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk melakukan skala prioritas sehingga meminimalisir terganggunya proses bisnis yang berjalan.	**2024**
29	SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Pedoman yang digunakan untuk penilaian uji tuntas pemasok dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kebijakan tentang hubungan pemasok.	**2024**
30	SOP Pembuangan Media	Pedoman yang digunakan untuk penanganan aset tentang Pedoman dan teknis pembuangan media	**2024**
31	SOP Penanganan Insiden	Pedoman yang digunakan untuk teknis penanganan ketidaksesuaian dan insiden yang terjadi.	**2024**
32	SOP Pengelolaan Perangkat Hilang	Pedoman yang digunakan untuk teknis pengelolaan terhadap perangkat yang hilang	**2024**
33	SOP Penilaian dan	Pedoman yang digunakan untuk	**2024**

No	Nama Prosedur / SOP Ruang Server	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
	Penanganan Risiko	penilaian dan penganganan risiko yang ada pada ruang server sebagai bentuk cara dalam melakukan penilaian dan penanganan risiko.	
34	SOP Tinjauan Manajemen	Pedoman yang digunakan untuk Peninjauan dalam penerapan manajeman yang telah diterapkan	**2025**
35	SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Pedoman yang digunakan untuk pemahaman mengenai tanggap dalam penanganan terhadap insiden.	**2025**
36	SOP Manajemen Kapasitas	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui cara kerja pelaksanaan manajemen kapasitas dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	**2025**

b. Pedoman / SOP Jaringan Intra Pemerintah

Mengingat aktivitas pengelolaan Jaringan Intra adalah tanggung jawab SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo maka **dibutuhkan SOP untuk standarisasi pelaksanaan seluruh aktivitas Jaringan Intra**. Berdasarkan kondisi eksisting untuk saat ini terkait penerapan SOP Jaringan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan SOP yang dapat diterapkan pada penerapan Jaringan. Berikut merupakan rekomendasi pembuatan SOP Jaringan yang ditampilkan pada **Tabel 3.7.**

Tabel 3.7 Usulan Kebutuhan Pedoman/SOP Jaringan

No	Nama Prosedur / SOP Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
1	SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan	Pedoman yang digunakan untuk manajemen Pengelolaan dan Pemeliharaan jaringan untuk mengontrol seluruh aktivitas jaringan.	**2023**
2	SOP Penanganan Gangguan Jaringan	Pedoman yang digunakan untuk mengatasi seluruh permasalahan dan Penanganan Gangguan Jaringan	**2023**

No	Nama Prosedur / SOP Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
3	SOP Pemeliharaan Perangkat Jaringan	Pedoman yang diterapkan untuk mengatur seluruh Pemeliharaan Perangkat Jaringan yang dimiliki saat ini dan memastikan perangkat jaringan telah sesuai dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.	**2023-2024**
4	SOP Keamanan Kabel	Pedoman yang diterapkan untuk penerapan penggunaan jaringan dan penerapan jaringan intra, memastikan seluruh penggunaan kabel telah memenuhi keamanan penggunaannya	**2023**
5	SOP *Maintenance* Gangguan Jaringan	Pedoman yang diterapkan untuk Seluruh kegiatan terkait dengan *Maintenance* Gangguan Jaringan harus diperhatikan dan terdokumentasi dalam pelaksanaannya	**2023**
6	SOP Layanan *Troubleshooting* Gangguan Jaringan	Pedoman yang diterapkan untuk menangani *Troubleshooting* Gangguan Jaringan yang digunakan saat ini	**2023**
7	SOP Pengeblokan Jaringan (*Tissue Embedding*)	Pedoman yang diterapkan untuk memastikan jaringan yang digunakan harus sesuai dengan akses yang telah terdata dan yang tidak memiliki akses akan dilakukan pengeblokan	**2023**
8	SOP Manajemen dan Akses Jaringan	Pedoman yang diterapkan untuk memastikan seluruh akses jaringan yang digunakan telah terdata dan dikelola dengan baik	**2024**
9	SOP *Networking*	Pedoman yang diterapkan untuk memberikan gambaran tentang beberapa Pedoman dan teknik dalam membangun *Local Area Network* (LAN) atau jaringan komputer	**2024**
10	SOP Instalasi Jaringan *Internet*, Intranet dan Wireless Access	Pedoman yang diterapkan untuk mengawal dan mengawasi jalannya instalasi jaringan *internet* dan *wireless access point* di area Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo	**2023**
11	SOP Pengelolaan Hak Akses	Pedoman yang diterapkan untuk mengetahui seluruh *resource* dan tanggung jawab terkait hak akses jaringan	**2023**

No	Nama Prosedur / SOP Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi	Tahun Usulan SOP/Prosedur
12	SOP ISP Mati	Pedoman yang diterapkan untuk penanganan apabila terjadi ISP yang digunakan mengalami gangguan / mati	**2024**

3.4.2 Tahapan Implementasi

Pada tahap implementasi, yaitu merupakan tahapan yang dimana didalamnya terdapat beberapa elemen pendukung dimana terdiri dari **Standar Keamanan, Peningkatan Keamanan dan Perangkat Keamanan**. Dalam tahapan implementasi keamanan dapat dilakukan dengan menentukan dan membuat standar yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE. Acuan dapat berupa Peraturan dari pusat seperti halnya Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020, Standar Internasional seperti ISO 27001, Peraturan Bupati, Surat Keputusan dan lain sebagainya.

3.4.2.6 Kerentanan Keamanan SPBE

Berdasarkan ketentuan format ABACUS, setiap insiden yang terjadi perlu dicatat sehingga terdapat dokumentasi insiden apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana kerentanan yang terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kerentanan keamanan SPBE yang ada di Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3.8 Usulan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Usulan Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Detail Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Usulan Tahun Kegiatan
1	Monitoring dan Evaluasi Kerentanan Keamanan SPBE	Inventarisasi Seluruh Aset SPBE	Melakukan inventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	**2023-2027**
		Identifikasi Kerencanan melalui *penetration*	Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE dengan cara melakukan *penetration testing* dan *vulnerability assessment*	**2023-2027**

ID	Nama Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Usulan Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Detail Kegiatan Kerentanan Keamanan SPBE	Usulan Tahun Kegiatan
		testing dan *vulnerability assessment*	pada data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur yang ada pada Kabupaten Situbondo	
		Pengukuran Tingkat Resiko Keamanan SPBE	Melakukan pengukuran tingkat risiko terkait penerapan seluruh aspek keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	**2024-2027**

3.4.3 Tahapan Evaluasi

Dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam peningkatan Kelaikan Keamanan SPBE, Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan kegiatan seperti Audit *Internal* disetiap tahunnya dan Audit *Eksternal* setiap 2 tahun sekali, dimana secara perangkat audit sudah ditentukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Indeks KAMI dapat dilakukan sebagai bentuk penilaian mandiri untuk melihat kesiapan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelum nantinya melaksanakan sertifikasi ISO 27001:2022.

3.4.3.1 Kelaikan Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemberian pertimbangan kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap

pengendalian data dan informasi, persyaratan keamanan Aplikasi Umum SPBE, dan persyaratan keamanan Infrastruktur SPBE.

Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Tabel 3.9 Rekomendasi Kelaikan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Deskripsi Kelaikan Keamanan SPBE	Standart /*Framework* yang digunakan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Usulan Tahun Kegiatan
1	Audit *Internal* Aplikasi	Melakukan Audit *Internal* terkait khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo	*Tools* Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat	Seluruh OPD pemilik aplikasi	**2023-2027**
2	Audit *Internal* Infrastruktur	Melakukan Audit *Internal* terkat Infrastruktur Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT/BRIN	*Tools* Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat	Seluruh OPD	**2023-2027**
3	Audit *Internal* Keamanan	Melakukan Audit *Internal* terkait Keamanan Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT / BRIN	*Tools* Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat	Seluruh OPD	**2023-2027**
4	Audit Aplikasi - Badan Riset dan Inovasi Nasional (*Eksternal*)	Melakukan Audit Aplikasi Umum dilakukan oleh BPPT sebagai Lembaga Audit TIK (LATIK) Pemerintah, sedangkan Audit Aplikasi Khusus dilakukan oleh Lembaga Audit TIK Swasta Terakreditasi	*Tools* Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2023, 2025 dan 2027**

ID	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Deskripsi Kelaikan Keamanan SPBE	Standart /*Framework* yang digunakan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Usulan Tahun Kegiatan
5	Audit Infrastruktur - Badan Riset dan Inovasi Nasional (*Eksternal*)	Melakukan Audit *Eksternal* terkait Infrastruktur Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT/BRIN	*Tools* Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	**2023, 2025 dan 2027**
6	Audit Keamanan - Badan Riset dan Inovasi Nasional (*Eksternal*)	Melakukan Audit *Eksternal* terkait Keamanan Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT/BRIN	*Tools* Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	**2023, 2025 dan 2027**
7	Penilaian Indeks KAMI	Melakuan Penilaian Mandiri terkait Penerapan Kemanan yang ada Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo	Indeks KAMI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	**2023-2027 (dilakukan setiap tahunnya)**
8	Sertifikasi ISO 27001:2022	Melakukan Audit ISO tahap 1 (Audit Sertifikasi)	ISO27001:2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2026**
9	Surveilance ISO 27001:2022 Tahap 1	*Stage* 1 (Dokumen Kebijakan dan SOP)	ISO27001:2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2027**
10	*Surveilance* ISO 27001:2022 Tahap 2	*Stage* 2 (Pengecekan Lapangan)	ISO27001:2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2027**
11	Re-Sertifikasi ISO 27001:2022	Melakukan Audit ISO Tahap 2 (Resertifikasi) untuk *update* pada versi yang terbaru ISO27001:2022	ISO27001:2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	**2028**

Secara menyeluruh usulan Kelaikan Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Tabel 3.9**. Berkaitan dengan *Surveilance* ISO 27001 **tahap 1** dan **tahap 2** merupakan kegiatan yang tidak bisa dilewatkan dikarenakan merupakan syarat wajib bagi pemegang sertifikat **ISO 27001**. *Surveilance* merupakan kegiatan pemantauan implementasi ISO 27001 yang sudah ditetapkan, apakah dijalankan atau tidak. Tahapan *Surveilance* dilakukan oleh pihak *Eksternal* yang menerbitkan sertfikat dengan memilih beberapa poin pada ruang lingkup yang sudah

bersertifikasi. Serupa dengan tahapan audit pada umumnya, pada kegiatan *Surveilance* terdapat laporan temuan yang nantinya perlu dilakukan tindak lanjut perbaikan.

Audit SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres no. 95 tahun 2018 adalah audit yang dilakukan terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE. Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE diamanatkan kepada BPPT dan Audit Keamanan SPBE diamanatkan kepada BSSN. Terdapat 3 jenis audit (audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan), dapat dijelaskan terkait 3 jenis audit tersebut. Dijelaskan (*step by step*) pelaksanaan auditnya, dan perangkat audit yang digunakan menggunakan perangkat audit yang dimiliki oleh BPPT (untuk audit infrastruktur dan aplikasi). Berikut merupakan standart dan tata cara pelaksanaan Audit yang ditampilkan pada **Gambar 3.2.**

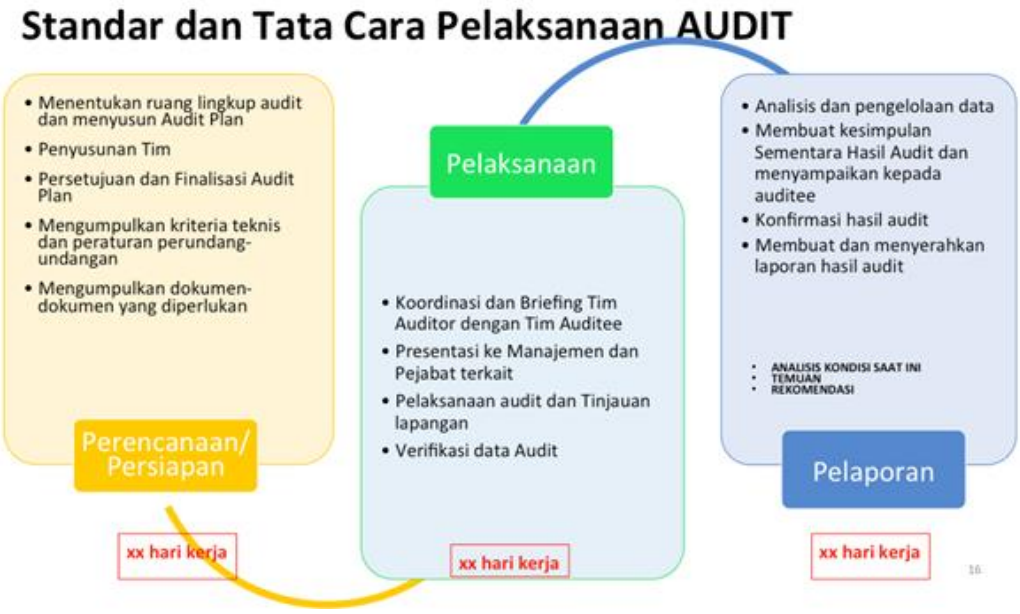

Gambar 3.2 Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit

Audit dilakukan dalam bentuk Audit *Internal* dan Audit *Eksternal*. Audit *Eksternal* adalah Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah dan Swasta Terakreditasi, sedangkan Audit *Internal* adalah audit yang dilakukan oleh pegawai IPPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Utama Instansi. Untuk **Audit Aplikasi** terdiri dari **124 Indikator** penilaian dimana setiap indikator memiliki 4 level penilaian dimulai dengan **level 0** hingga **level 3.** Sedangkan untuk **Audit Infrastruktur** terbagi

kedalam 3 kategori, yaitu *Data Center* dimana terdiri dari **183 Indikator**, Jaringan Intra Pemerintah terdiri dari **47 Indikator**, dan Sistem Penghubung Layanan sebanyak **49 Indikator**. Setiap kategori terdiri dari **2 Domain,** yaitu Fungsionalitas dan Kinerja *Data Center* serta Aspek Lain *Data Center*. Audit SPBE ini bersifat lebih rinci (detail) dan bersifat lebih teknis jika dibandingkan dengan Evaluasi SPBE. Berikut penjelasan secara detail terkait Audit SPBE, antara lain:

1. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE dimana di dalamnya terdapat proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan / atau standar yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan audit keamanan yang dapat dilaksanakan antara lain:
    1. Melakukan *review* terhadap standar, kontrol dan SOP yang sudah ada.
    2. Melakukan *Penetration Testing*.
2. Audit Aplikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit Aplikasi mencakup Aplikasi umum dan Aplikasi khusus SPBE yang mana **Audit Aplikasi** terdiri dari **124 Indikator** penilaian dimana setiap indikator memiliki 4 level penilaian dimulai dengan **level 0** hingga **level 3**.
    1. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Umum ditentukan oleh Kemenpan-RB.
    2. Aplikasi khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Aplikasi khusus ditentukan oleh IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).

Lingkup (domain) dari Audit Aplikasi adalah Tata kelola, Manajemen, dan Fungsionalitas Kinerja aplikasi. Adapun kegiatan audit Aplikasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan proses *review* secara berkala terkait fitur yang ada dalam aplikasi.
2. Membuat kuisioner secara berkala kepada user pengguna aplikasi.
3. Melakukan pembuatan aplikasi atau sistem yang bertujuan untuk menunjang seluruh aktivitas layanan SPBE.
4. Diperlukan adanya integrasi antar aplikasi atau sistem.

3. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan mencakup Infrastruktur Nasional dan Infrastruktur IPPD. Lingkup (domain) dari Audit Infrastruktur SPBE adalah Tata kelola, dan Fungsionalitas Kinerja Infrastruktur. Fungsionalitas Kinerja Infrastruktur dikelompokkan menjadi *Data Center* (Ruang Server), Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan. **Audit Infrastruktur** terbagi kedalam 3 kategori, yaitu *Data Center* dimana terdiri dari **183 Indikator**, Jaringan Intra Pemerintah terdiri dari **47 Indikator**, dan Sistem Penghubung Layanan sebanyak **49 Indikator**. Adapun Usulan Pelaksanaan Audit Infrastruktur yang dapat dilakukan antara lain dengan melalui kegiatan berikut ini:

    1. Melakukan peremajaan lisensi untuk jenis aplikasi yang memiliki masa berlaku lisensi.
    2. Peningkatan kompetensi terkait pengetahuan infrastruktur.
    3. Membentuk tim *Internal* Audit.
    4. Perawatan Infrastruktur (Perangkat TI)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan bahwa terkait dengan Audit SPBE perlu direncanakan setidaknya 2 tahun sekali untuk Audit *Eksternal* dan Audit *Internal* dilakukan dalam 1 tahun sekali. Bentuk tindak lanjut dapat dilakukan dengan penerapan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur menggunakan *Tools* Audit BPPT/BRIN melalui *https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/*.

3.4.4 Tahapan Tindak Lanjut

Pada tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang dilakukan setelah melalui beberapa tahapan yang terdiri dari tahapan perencanaanm, implementasi dan Evaluasi. Pada tahapan ini terdapat 3 identifikasi untuk mengindentifikasi seluruh Keamanan SPBE yang telah diterapkan dan dilakukan penanganan atau tindak lanjut dari hasil permasalahan keamanan yang didapatkan serta mencegah adanya serangan keamanan. Berikut detail dari tahapan tindak lanjut yang dijelaskan pada **Sub Bab 3.4.4.1-3.4.4.3**

3.4.4.1 Pengujian Keamanan SPBE

Pengujian Keamanan (*Security Testing*) merupakan jenis pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kerentanan keamanan dari sistem yang dikembangkan. Tidak hanya itu pengujian keamanan juga memastikan bahwa data dan infromasi serta sumber daya yang berada di dalam sistem telah memiliki perlindungan yang baik dari pada penyusup. Dengan menemukan semua celah dan keamanan dari sistem yang diterapkan atau sedang dikembangkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat mencegah akan hilangnya data dan informasi yang penting serta kerugian lainnya.

Pengujian keamanan terhadap sistem operasional bisnis harus dilakukan setiap ada perubahan pada sistem yang dikembangkan. Dengan melakukan pengujian keamanan secara rutin maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat menjamin bahwa sistem yang digunakan dan diterapkandalam proses operasional bisnis mereka memiliki tingkat keamanan yang baik. Berikut merupakan Rekomendasi terkait dengan area utama yang dapat dilakukan tes keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.**

Tabel 3.10 Rekomendasi Kegiatan Pengujian Keamanan SPBE

No	Nama *Security Testing*	Deskripsi	Usulan Tahun
1	*Network Security*	Pengujian ini berfokus pada pencarian kerentanan pada bagian infrastruktur jaringan.	2023-2027 (Dilaksanakan setiap tahun untuk mencegah terjadinya kerentanan serangan pada jaringan)
2	*System Software Security*	Pengujian ini bertujuan untuk memastikan tingkat kelemahan sistem perangkat lunak terutama di bagian *database* dan *operating system*.	2023-2027 (Dilaksanakan setiap tahun untuk mencegah terjadinya kerentanan serangan pada *System Software*)
3	*Client-Side Application Security*	Pengujian ini cenderung mengarah ke sisi client guna memastikan browser yang digunakan tidak mudah dimanipulasi.	2023-2027 (Dilaksanakan setiap tahun untuk mencegah terjadinya kerentanan serangan padaPengguna Aplikasi)
4	*Server- Side Application Security*	Pengujian ini menitikberatkan keamanan server untuk mengatasi berbagai gangguan dan ancaman serangan.	2023-2027 (Dilaksanakan setiap tahun untuk mencegah terjadinya kerentanan serangan pada Server)

Tabel 3.11 Rekomendasi Kegiatan Pengujian Keamanan Aplikasi

No	Usulan Pengujian Aplikasi Server	Deskripsi	Tahun Usulan Pengujian
Aplikasi / Software			
1	*Performance Testing*	*integration* dan *usability test* yang digunakan untuk menentukan apakah *system or subsystem* dapat memenuhi kriteria kinerja berbasis waktu seperti *response time* atau *throughput*.	**2023**
2	*System Testing*	*Integration test* dari *behavior* seluruh sistem atau independent *subsystem* yang biasanya dilakukan pertama kali oleh pengembang atau personil pengujian untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem tidak	**2023**

No	Usulan Pengujian Aplikasi Server	Deskripsi	Tahun Usulan Pengujian
		berfungsi dan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna (*user requirement*).	
3	*Unit Testing*	Proses metode pengujian individual, *class*, atau komponen sebelum mereka terintegrasi dengan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebanyak mungkin sebelum modul – modul digabungkan menjadi unit perangkat lunak yang lebih besar, seperti program, class dan subsistem.	**2023**
4	*Integration Testing*	Mengevaluasi behavior dari kelompok method atau class. Tujuan dari integration test adalah untuk mengidentifikasi kesalahan yang tidak dapat dideteksi oleh unit testing.	**2024**
5	*Usability Testing*	Pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah method, class, subsistem, atau sistem telah memenuhi persyaratan pengguna dan dilakukan untuk mendapatkan *feedback* yang cepat dalam meningkatkan *interface* dan mengkoreksi kesalahan dalam komponen perangkat lunak	**2024**
6	*Smoke Testing*	Sistem test yang biasanya dilakukan setiap hari atau beberapa kali per minggu. *Build and smoke test* sangat penting karena menyediakan *feedback* yang cepat dalam masalah yang signifikan	**2025**
7	*Stress testing*	Pengujian yang biasanya dilakukan dalam membuat sebuah website, dimana stress testing dilakukan untuk mengetahui sekuat apa server website yang digunakan	**2026**

No	Usulan Pengujian Aplikasi Server	Deskripsi	Tahun Usulan Pengujian
		menampung visitor dalam website tersebut, dengan cara melakukan hit dummy ke website menggunakan *Tools*	
8	*User Acceptence Test (UAT)*	Pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna.	**2023-2027**
Security Testing			
1	*Vulnerability scanning*	Proses pemindaian untuk menguji keamanan sistem aplikasi web melalui *software* pemindai otomatis.	**2023**
2	*Ethical hacking*	*Security* testing yang menggunakan berbagai teknik peretasan untuk menguji tingkat keamanan aplikasi yang memiliki cakupan lebih luas dan menjangkau seluruh infrastruktur IT.	**2024**
3	*Security scanning*	Pengujian yang dilakukan dengan cara memindai seluruh berkas atau file dalam aplikasi berbasis web, website, jaringan, dan sistem untuk menemukan kerentanan berupa manipulasi atau modifikasi file yang tidak sah.	**2024**
4	*Penetration testing*	Pengujian keamanan yang dilakukan dengan cara mensimulasikan serangan *cyber* terhadap sistem untuk menemukan celah kerentanan sedini mungkin sehingga proses perbaikan dapat dilakukan sebelum peretas menemukannya.	**2023-2027 (Minimal Setiap Tahun harus dilakukan)**
5	*Security auditing*	Metode terstruktur dalam mengevaluasi keamanan sistem informasi dan dilakukan secara rutin dan efektif dikarenakan untuk mengidentifikasi kelemahan infrastruktur IT.	**2024**
6	*Risk assessment*	Pengujian yang menganalisis dan	**2025**

No	Usulan Pengujian Aplikasi Server	Deskripsi	Tahun Usulan Pengujian
		mengidentifikasi setiap risiko keamanan pada perangkat lunak dan jaringan.	
7	*Posture assessment*	*posture assessment* yang merupakan penilaian untuk mencari tahu kondisi keamanan keseluruhan dengan penilaian yang didapatkan dari informasi berharga tentang status keamanan instansi yang lebih kompleks.	**2026**

3.4.4.2 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Berdasarkan Standar SNI ISO-IEC 27001: 2022 pada klausul 10 terkait Tindak Lanjut untuk proses tindak lanjut yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tingkat penanganan insiden, dimana kesiapan penanganan dinilai berdasarkan tiga level, tinggi sedang dan rendah. Tindak lanjut adalah tindakan korektif untuk memastikan perbaikan pada temuan sudah dilaksanakan atau tidak. Dalam konsep kerangka kerja keamanan informasi, tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir sebelum nantinya kembali pada siklus pertama, yaitu perencanaan. Dalam pembahasan terkait Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif yang didapatkan beberapa tindakan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksi terjadinya ketidaksesuaian serta menangani konsekuensi yang terjadi.
2. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk mengilangkan/mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang terulang kembali dan di tempat lain dengan melakukan Reviu ketidaksesuaian, Menentukan penyebab ketidaksesuaian, dan Menentukan ketidaksesuaian yang serupa atau potensi terjadinya kembali.

3. Melaksanakan tindakan pencegahan dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
4. Mereviu efektivitas tindakan korektif apapun yang diambil
5. Membuat perubahan pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi apabila diperlukan.

Sedangkan dalam perbaikan berkelanjutan bertujuan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Instansi untuk selalu melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap penerapan SPBE dapat melalui *penetration testing* dan *vulnerability assessment* pada data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur yang ada pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya peretasan dan kehilangan data. Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

1. Mengidentifikasi sumber serangan keamanan.
2. Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.
3. Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi.
4. Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi.
5. Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Adapun beberapa Rekomendasi terkait dengan Penanganan Insiden Keamanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Rekomendasi Penanganan Insiden Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Detail Usulan
1	Terjadinya serangan pada server	Pedoman dan pencatatan (*Log Activity Attack*) apabila terjadi serangan pada server, seperti misalnya *malware*, *hacker* dan lainnya	Diusulkan untuk dilakukan Pembelian Perangkat Keamanan baru (*Firewall*) mengingat usia perangkat dan lisensi yang digunakan.
2	Penanganan terjadinya	Prosedur dan Penangan akan apabila terjadi	Diusulkan untuk dilakukan manajemen kelistrikan sesuai

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Detail Usulan
	pemadaman	pemadaman listrik	dengan kebutuhan dan menyediakan *supply* listrik (*genset*) yang sesuai dan dapat memenuhi semua kebutuhan pada lingkup pemerintahan daerah dan ruang server.
3	Penanganan kegagalan UPS	Berisikan pedoman jika terjadi kegagalan UPS	diusulkan untuk dilakukan peremajaan ups yang usia lebih dari 5 tahun dan dilakukan pembuatan prosedur perawatan rutin perangkat ups untuk mencegah adanya kegagalan dari perangkat ups
4	Penanganan kerusakan infrastruktur	pedoman masalah yang terjadi untuk mencegah terakit kerusakan infrastruktur	Diusulkan untuk dilakukan pengecekan terhadap semua infrastruktur yang ada dan memastikan apabila perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun dilakukan peremajaan perangkat dan didukung dengan adanya Standar dan Prosedur terkait penanganan kerusakan pada infrastruktur yang diterapkan.
5	Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Berisikan pedoman jika terjadi insiden dan ketidaksesuaian	Diusulkan untuk dilakukan pengecekan terhadap semua insiden dan ketidaksesuaian yang diterapkan pada seluruh OPD serta didukung dengan adanya Standar dan Prosedur terkait Insiden dan Ketidaksesuaian
6	Penanganan Kehilangan Aset atau Data	Berisikan pedoman jika terjadi kehilangan aset atau data	diusulkan untuk dilakukan penanganan yang terdiri dari: 1. Melakukan pengecekan terhadap semua aset yang ada dan data apa saja yang dikelola. 2. Memastikan seluruh aset dan data yang dimiliki terlabeling dan dimanajemen dengan baik 3. Didukung dengan adanya penerapan manajemen data dan manajemen aset 4. Didukung dengan adanya standar dan prosedur terkait penanganan aset dan data yang dimiliki

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Detail Usulan
7	Jaringan *Internet* Down disebabkan oleh Perangkat Router/*Firewall* Rusak dengan Perawatan terencana pada Perangkat	Melakukan perawatan dan pembelian perangkat router/*firewall* baru untuk *backup* serta pembuatan jadwal perawatan dan pembelian perangkat router/*firewall* baru	Diusulkan untuk melakukan monitoring seluruh jaringan *internet* / Intra yang digunakan serta melakukan Audit terkait dengan Seluruh Perangkat jaringan yang dimiliki serta yang masih bisa digunakan
8	SSL *Expire* dikarenakan tidak ada monitoring terhadap masa *expire* SSL dengan dilakukan Kontrol aktivasi SSL	Membuat sistem notifikasi masa berlaku SSL dan memastikan Aktivasi SSL *Lifetime*	Diusulkan untuk selalu memonitoring terkait penggunaan SSL pada aplikasi yang ada pada pemerintah Kabupaten Situbondo
9	Kebocoran Data (*Database* Basis Data) dengan dilakukan Kontrol terhadap pengamanan file data	Melakukan penutupan *Port* yg tidak terpakai dan mudah diretas, *Update* OS dan Aplikasi Database, melakukan *backup* data berkala serta didukung dengan *Logbook* Konfigurasi Sistem, *Update* dan *Backup* Data	Diusulkan untuk melakukan Seluruh Pengujian keamanan untuk mencegah terjadinya kebocoran data
10	Kebocoran Data (Aplikasi) melalui kerentanan Aplikasi berbasis Web dengan dilakukan penganganan melalui Kontrol terhadap pengembangan dan pengelolaan aplikasi	Menutup *Port* kecuali https (*Port* 443), *Vurneability Asessment* (*Penetration Test*) dan diwujudkan melalui *Logbook* Konfigurasi Sistem, Laporan VA /*Pentest*	Diusulkan untuk menerapkan keamanan pada Aplikasi yang digunakan serta mempertimbangkan hak akses pada aplikasi tersebut
11	Kehilangan Data Akibat Kerentanan Fasilitas *Data Center* yang disebabkan Gangguan Sistem Kelistrikan dan dilakukan penanganan Kontrol terhadap sistem kelistrikan	Menyediakan *Power Supply* Cadangan dengan Penambahan Kapsitas UPS dan Penggunaan *Power Redundant*	Diusulkan untuk memperhatikan terkait ketersediaan listrik yang digunakan untuk *Data Center* dan menyediakan cadangan daya apabila terjadi gangguan kelistrikan.
12	Pembuatan catatan atau laporan penanganan insiden, *check list* dan *Logbook* yang dilakukan secara	Melakukan Pembuatan catatan atau laporan penanganan insiden, *check list* dan *Logbook* yang dilakukan secara	Diusulkan untuk selalu membuat pencatatan dan laporan terakit dengan penanganan Insiden yang terjadi

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Detail Usulan
	berkala	berkala terkait seluruh penerapan keamanan yang ada di masing-masing OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	

3.4.4.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Dari seluruh Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan muncul beberapa insiden yang terjadi dan wajib dicatat hingga pada tahap kematangan untuk penanganan insiden Keamanan SPBE dan tanggal kegiatan. Berikut merupakan usulan beberapa peningkatan keamanan SPBE yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditampilkan pada **Tabel 3.13.**

Tabel 3.13 Usulan Peningkatan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Keamanan SPBE	Penerapan	Usulan Tahun Kegiatan
1	*Configuration Management*	*Configuration management* dibutuhkan untuk mencatat setiap aset TIK yang terhubung dengan *internet*. Sehingga lebih mudah dalam pendataan aset dan IP yang digunakan	Belum dilaksanakan	**2023-2024**
2	*Update Patch* server secara berkala	Proses pembaharuan *patch* untuk memastikan mendapatkan fitur dan kondisi terbaru dari server	Belum dilaksanakan	**2023-2027**
3	Memperbaharui lisensi perangkat keras dan lunak berkala	Proses pembaharuan lisensi perangkat untuk mendapatkan fitur terbaru	Belum dilaksanakan	**2023-2027**
4	Implementasi DRC	DRC digunakan sebagai cadangan server untuk meminimalisir *downtime* jika terjadi	Belum dilaksanakan	**2025**

ID	Nama Kegiatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Keamanan SPBE	Penerapan	Usulan Tahun Kegiatan
		insiden		
5	Penerapan Proses Enkripsi dan Dekripsi	Proses enkripsi dan dekripsi untuk memastikan data atau *Password* tetap aman ketika melakukan komunikasi	Belum dilaksanakan	**2023-2024**
6	Menerapkan metode Verifikasi Data	Tahapan verifikasi untuk memastikan data yang masuk merupakan data yang sudah sesuai	Belum dilaksanakan	**2023-2024**
7	Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang Keamanan Informasi	Peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan personil terkait tetap *Update* dengan kondisi terkini	Belum dilaksanakan	**2024-2025**
8	Peremajaan Perangkat TIK	Untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan perangkat, terutama pada perangkat yang sudah berusia lebih dari 5 tahun.	Belum dilaksanakan	**2023-2027**
9	Penerapan SOP/Prosedur Keamanan	Menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE	Belum dilaksanakan	**2023-2027**
10	Bimbingan Teknis Keamanan SPBE	Melakukan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.	Belum dilaksanakan	**2023-2027**
11	Peningkatan Keamanan SPBE	Melakukan Peningkatan keamanan lingkup ruang server kepada OPD yang memiliki server	Belum dilaksanakan	**2023-2027**

Adapun beberapa bentuk peningkatan tambahan terkait dengan Keamanan SPBE yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana salah satunya menerapkan Manajemen Keamanan Jaringan. Manajemen jaringan adalah proses pengadministrasian dan pengelolaan jaringan komputer. Layanan yang diberikan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyediaan jaringan, dan pemeliharaan kualitas layanan. Perangkat lunak manajemen jaringan digunakan oleh administrator jaringan untuk

membantu menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Manajemen jaringan memiliki fungsi untuk memonitor, mengontrol jaringan komputer dan komponen sistem. Manajemen jaringan mencoba menggunakan kekuatan komputer dan jaringan untuk mengatur dan mengelola sistem serta jaringan itu sendiri. Fungsi manajemen jaringan terdiri sebagai berikut:

a. Manajemen Kesalahan (*Fault Management*)

   Menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui kesalahan (*Fault*) pada perangkat yang dikelola, jaringan, dan operasi jaringan, agar dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan (perbaikan).

b. Manajemen Konfigurasi (*Configuration Management*)

   Memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras atau pun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik.

c. Pelaporan (*Accounting*)

   Mengukur utilisasi jaringan dari pengguna atau grup tertentu untuk membantu dalam menjaga performa jaringan pada level tertentu yang dapat diterima.

d. Manajemen Performa (*Performance Management*)

   Mengukur berbagai aspek dari performa jaringan termasuk pengumpulan dan analisis dari data statistik sistem sehingga dapat dikelola dan dipertahankan pada level tertentu yang dapat diterima.

e. Manajemen Keamanan (*Security Management*)

   Mengatur akses ke sumber daya jaringan sehingga informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin.

Rekomendasi dari Penerapan Manajemen Jaringan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang lebih tepatnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo di **rentan tahun 2023-2027** dan **dilakukan secara bertahap dalam penerapan Manajemen Jaringan.**

Penerapan Jaringan Intra Pemerintah Pemerintah diperlukan Sistem Monitoring Jaringan yang dapat memonitoring seluruh aktifitas Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan. **Rekomendasi Sistem Monitoring Jaringan, yaitu menggunakan *Tools Zabbix***, yang mana pada *Tools* Zabbix menawarkan

performa yang baik untuk monitoring sistem operasi dan metrik aplikasi yang spesifik dalam penggunaan monitoring server. Penggunaan Zabbix lebih mudah dikarenakan dapat di-*Update* dengan sendirinya dan tidak perlu perubahan apa pun pada *back-end database*. Selain itu penggunaan Zabbix akan lebih fleksibilitas dalam melakukan integrasi dua arah dengan aplikasi yang mengakses menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo pada monitoring aktivitas. Berikut merupakan contoh dari penggunaan *Tolls Zabbix* sebagai *Tools* Sistem Monitoring Jaringan yang ditampilkan pada **Gambar 3.3 sampai Gambar 3.5.**

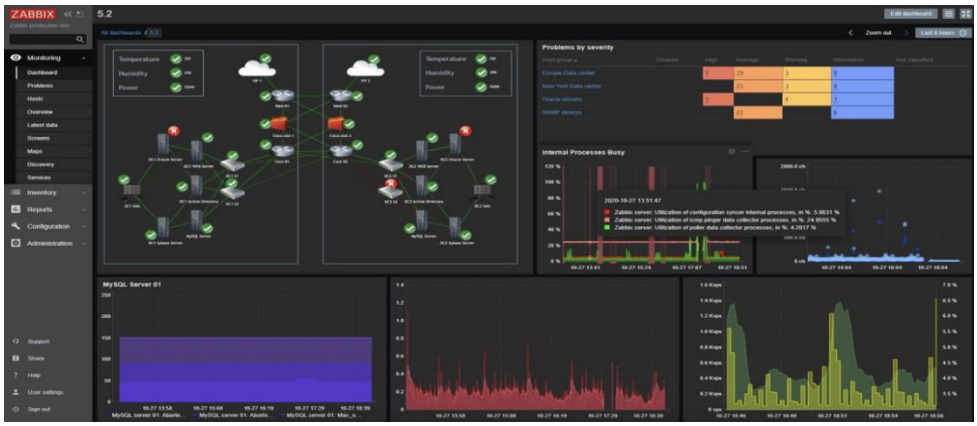

Gambar 3.3 Monitoring Jaringan melalui Integrasi Topologi

Gambar 3.4 Monitoring Grafik Aktivitas Penggunaan Jaringan

Gambar 3.5 Monitoring Log Aktifitas dan Grafik penggunaan Jaringan

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 7

ARSITEKTUR TATA KELOLA & MANAJEMEN SPBE, DAN PENYELENGGARA SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 7

ARSITEKTUR TATA KELOLA & MANAJEMEN SPBE, DAN PENYELENGGARA SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Hasil Penilaian SPBE 2
1.3 Ruang Lingkup 4
BAB 2 METODOLOGI DAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE 7
2.1 Metodologi Penyusunan Tata Kelola SPBE 7
2.1.1 Identifikasi Refrensi Hukum Tata Kelola SPBE 7
2.1.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE 7
2.1.3 Identifikasi Kondisi Eksisting 8
2.1.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE 8
2.1.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE 8
2.1.6 Analisis Usulan PD Mandiri TIK 8
2.1.7 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI 8
2.1.8 Analisis Usulan Audit TIK 9
2.2 Metodologi Penyusunan Manajemen SPBE 9
2.2.1 Identifikasi Refrensi Hukum Manajemen SPBE 9
2.2.2 Identifikasi Kondisi Eksisting 9
2.2.3 Identifikasi Gap Manajemen SPBE 9
2.2.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE 9
2.3 Metodologi Penyusunan Penyelenggara SPBE 10
2.3.1 Identifikasi Refrensi Hukum Penyelenggara SPBE 10
2.3.2 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE 10
2.3.3 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE 10
2.3.4 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE 11
BAB 3 ARSITEKTUR TATAKELOLA SPBE 13
3.1 Identifikasi Refrensi Hukum Tata Kelola SPBE 13
3.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE 14
3.3 Identifikasi Kondisi Eksisting 18
3.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE 21

3.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE 24
3.6 Analisis Usulan PD Mandiri TIK 27
3.7 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI 33
3.8 Analisis Usulan Audit TIK 35
3.8.1 Audit Infrastruktur SPBE 36
3.8.2 Audit Aplikasi SPBE 39
3.8.3 Audit Keamanan SPBE 43
BAB 4 ANALISIS MANAJEMEN SPBE 47
4.1 Identifikasi Refrensi Hukum Manajemen SPBE 47
4.2 Identifikasi Kondisi Eksisting 47
4.3 Identifikasi Gap Manajemen SPBE 49
4.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE 50
4.4.1 Manajemen Risiko 50
4.4.2 Manajemen Keamanan Informasi 56
4.4.3 Manajemen Data 58
4.4.4 Manajemen Aset TIK 62
4.4.5 Manajemen Sumber Daya Manusia 63
4.4.6 Manajemen Pengetahuan 65
4.4.7 Manajemen Perubahan 67
4.4.8 Manajemen Layanan SPBE 70
4.4.9 Kesimpulan Manajemen SPBE 77
BAB 5 ANALISIS PENYELENGGARA SPBE 86
5.1 Identifikasi Refrensi Hukum Penyelenggara SPBE 86
5.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE 86
5.3 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE 87
5.4 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE 87
5.4.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE 88
5.4.2 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 91
5.5 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE 92
5.5.1 Analisis Kompetensi SDM SPBE 92
5.5.2 Pengadaan SDM SPBE 96
5.5.3 Analisis Kebutuhan Training SDM 99
5.5.4 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM 121

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kondisi Eksisting Kebijakan Tata Kelola SPBE 18
Tabel 3.2 Gap Tata Kelola SPBE 21
Tabel 3.3 Usulan Kebijakan SPBE 25
Tabel 3.4 Pembagian Peran PD terhadap Pengelolaan TI 34
Tabel 4.1 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE 48
Tabel 4.2 Analisa Gap Manajemen SPBE 49
Tabel 4.3 Usulan Manajemen SPBE 78
Tabel 5.1 Gap Penyelenggara SPBE 87
Tabel 5.2 Usulan Tugas Tim Koordinasi SPBE berdasarkan Kepmen 965 tahun 2021 88
Tabel 5.3 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Info Informatika Kabupaten Situbondo dengan ITIL 92
Tabel 5.4 Usulan SDM TIK untuk setiap OPD 96
Tabel 5.5 Analisi Kebutuhan Training Kompetensi SDM TIK 100
Tabel 5.6 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 20221 2
Gambar 5.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Inforrmatika Kabupaten Situbondo 91

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penyusunan buku arsitektur tata kelola, manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE. Selain itu akan dibahas juga mengenai hasil penilaian dari Evaluasi SPBE Pemerintahan Kabupaten Situbondo tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terakhir pada bab ini akan dibahas mengenai ruang lingkup pembahasan buku Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE.

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintaahn berbasis elektronik.

Mengacu pada peraturan presiden yang sama disebutkan bahwa Tata Kelola merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Perbaikan terhadap tata kelola dapat dilaksanakan dengan melakukan penguatan terhadap kapasitas pengeloolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE, serta kebijakan SPBE untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicpai dengan membentuk tim koordinasi SPBE di tingkat Pemerintahan Dasar, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijkan SPBE yang terpadu baik kepada kebijakan makro, kebijakan meso maupun kebijakan SPBE lainya.

Untuk mengetahui pelaksanaan SPBE apakah sudah terlaksana sesuai dengan tujuan, maka Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB) melakukan evaluasi secaa berkala untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah Daerah/Pusat. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Dalam hal ini Kabupaten Situbondo menyusun secara mandiri Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada buku ini dibahas secara detail tentang kebijakan SPBE, arsitektur tata kelola SPBE dan manajemen SPBE, serta SDM dan penyelenggara SPBE Pemkab Situbondo.

1.2 Hasil Penilaian SPBE

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE oleh Kementrian PANRB pada tahun 2021 dengam menggunakan Instrumen yang telag dilsesuaikan. Pemerintah memiliki Indeks SPBE Sebesar 2,43 atau dengan predikat "cukup". Detail nilai indeks penilaian SPBE dapay dilihat pada gambar

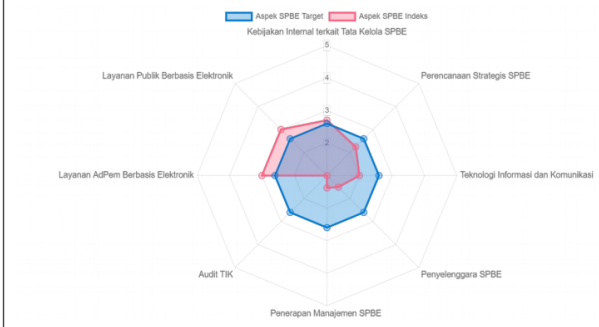

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,43
Domain Kebijakan SPBE	2,70
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,27
Penerapan Manajemen SPBE	1,38
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

Gambar 1.1 Indeks SPBE Kabupaten Situbondo Tahun 20221

Pada buku ini akan berfokus pada pembahasan mengenai domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Dapat dilihat pada **gambar 1.1** bahwa domain kebijakan Internal SPBE mendapat nilai sebesar 2,70 dengan predikat **"baik"** , sedangkan domain tata kelola mendapat nilai sebesar 2.00 dengan predikat **"cukup",** sedangkan untuk domain manajemen SPBE mendapat nilai sebesar 1,27 yang berarti bepredikat **"kurang"** dan masih belum mencapai target penilaian. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran, usulan serta penjelasan mengenai proses untuk dapat meningkatkan nilai yang ada saat ini menjadi predikat sangat baik hingga ke tingkat memuaskan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. **Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE**

   Secara keseluruhan penerapan terhadap Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Kabupaten Situbondo sudah terpenuhi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Situbondo sendiri dapat dikatakan baik namun untuk lebih baik lagi dapat dilaksanakan riviu dan evaluasi kebijakan yang dapat diimplementasikan kepada kebijakan selanjutnya. Beberapa penerapan mengenai tata kelola dapat dikatakan belum memenuhi ketentuan standart. Rekomendasi yang diberikan pada aspek ini dapat dilihat pada Bab 3 Subbab 3.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE.

2. Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE Kabupaten Situbondo belum terpenuhi. Pada Perencanaan Strategis SPBE yang belum dimiliki oleh Kabupaten Situbondo adalah Kematangan Peta Rencana SPBE. Analisis rekomendasi yang dapat diberikan berupa pembuatan dokumen peta rencana secara lengkap dan formal.

3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan peneraan aspek Teknologi Informasi dn Komunikasi SPBE Kabupaten Situbondo belum terpenuhi. Pada Aspek TIK yang belum dimiliki oleh Kabupaten Situbondo antara lain adalah kematangan dalam pembangunan Aplikasi SPBE, Kemantangan Layanan Pusat Data, Kematangan Jaringan Intra Instansi dan Kemangtangan Sistem Penghubung Layanan. Seluruh aspek pada dasarnya telah memiliki kebijakan yang mengatur masing-masing namuan belum memnuhi sesuai standart yang ada. Analisis rekomendasi yang dapat diberikan berupa pengaturan kebijakan dalam kebijakan internal yang lebih mendukung lagi.

4. Aspek Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo sudah terpenuhi. Pada penyelenggara SPBE juga telah dilaksanakan pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Evaluator mengenai SPBE yang telah diatur pemerintah Kabupeten Situbondo. Aspek ini merupakan faktor penting dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE mengingat Tim Koordinasi dan Tim Evaluator dapat melakukan komunikasi dan mengavaluasi pelaksanaan seluruh Indikator. Rekomendasi yang diberikan pada aspek ini dapat dilihat pada Bab 5 Subbab 5.4 Analisisi Usulan Penyelenggaran SPBE.

5. Aspek Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapana Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan belum terpenuhi. Penerapan manajemen memiliki kebijakan. Namun kebijakan yang ada dapat dikatakan masih bersifat umum dan belum memenuhi standart analisis rekomendasi yang diberikan mengenai Aspek Manajeen SPBE dapat dilihat pada Bab 4 Subbab 4.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE.

6. Aspek Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK Kabupaten Situbondo belum terpenuhi. Namun pada Audit TIK Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Kematangan Pelaksanaan Audit

Aplikasi SPBE sudah terdapat kebijakan namun belum memenuhi ketentuan standar. Rekomendasi yang diberikan pada aspek ini dapat dilihat pada Bab 3 subbab 3.8 **Error! Reference source not found.**.

7. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kab. Situbondo sudah baik dengan dipenuhinya penerapan 10 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan Layanan Ad.Pem. Berbasis Elektronik terdapat beberapa pemenuhan Indikator yang dapat menjadi kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo karena menggunakan aplikasi dari Pemerintah Pusat yang telah terintegrasi antara lain, Layanan Perencanaan Penganggaran dan Keuangan dengan adanya aplikasi SIPD dari Kemendagri dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya aplikasi SPSE dari LKPP. Selain itu, Kabupaten Situbondo juga memiliki aplikasi Layanan Kearsipan Dinamis yang telah terintegrasi. Rekomendasi mengenai Aspek ini dapat dilihat pada Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Bab 4 Subbab 4.4.1 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE.

8. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan kriteria berdasarkan tingkat kematangan masing-masing adalah: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3. Rekomendasi mengenai Aspek ini dapat dilihat pada Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Bab 4 Subbab 4.4. Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE.

1.3 Ruang Lingkup

Pada bagian ini menyajukan cakupan arau ruang lingkup pengerjaan dari asristektut tata kelola dan manajemen, penyelenggara SPBE dan SDM S[BE. Adapun ruang lingkup dari Buku Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen SPBE, penyelenggara SPBE, strutur dan SDM SPBE, antara lain:

1. Tata Kelola SPBE membahas mengenai strategi manajemen kapasita keamanan informasi, analisa mandiri TIK Kabupaten Situbondo, pembagian peran pengelola TI dan sistem dan layanan *service desk* TI.
2. Manajemen SPBE membahas mengenai manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.

3. Penyelenggara SPBE membahas mengenai tim koordinasi SPBE, Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, pembahasan mengenai kompetensi SDM SPBE, dan rekomendasi training dan sertifikasi SDM SPBE.

BAB 2
METODOLOGI DAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk menyusun Buku 7 Tata Kelola dan Manajemen, serta SDM dan penyelenggara SPBE. Buku ini disusun berdasarkan hasil analisa kondisi eksisting dan hasil analisa gap yang dituliskan dalam Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa Gap Arsitektur SPBE Kabupatene Situbondo.

Tinggi nilai capaian pada domain tata kelola menunjukan keteraturan tata kelola dan maanjemen SPBE Kabupaten Situbondo. Untuk menjamin kualitas penerapan setiap pelaksanaan SPBE di Indonesia, dibentuklah Permen PAN-RB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Permen PAN-RB tersebut berisi tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Buku ini fokus membahas rekomendasi pada domain kebijakan SPBE yang mencakup aspek kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE yang mencakup aspek Perencanaan strategi SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Penyelenggara SPBE. Serta domain manajemen SPBE yang mencakup aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK. Berikut penjelasan dari setiap langkah yang digunakan untuk menyusun rekomendasi pada ketiga domain tersebut.

2.1 Metodologi Penyusunan Tata Kelola SPBE

Metodologi penyusunan Arsitektur tata kelola SPBE dimulai dari identifikasi dasar-dasar hukum yang dijadikan referensi penyusunan atat kelola SPBE hingga analisa usulan audit teknologi informasi di Kabupaten Situbondo.

2.1.1 Identifikasi Refrensi Hukum Tata Kelola SPBE

Tahapan Identifikasi Referensi Hukum Tata Kelola SPBE dilakukan pengidentifikasian dasar hukum yang akan digunakan dalam penyusunan arsitektur tata kelola SPBE. referensi hukum yang diambil dapat berasal dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati.

2.1.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE

Tahapan Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE akan dibandingkan antara kondisi tata kelola SPBE yang sudah diterapkan dengan kondisi ideal tata kelola SPBE. Identifikasi gap tata kelola SPBE diperlukan untuk mrngrtahui kesenjangan kondisi antar tata kelola SPBE di Kabupaten Situbondo.

2.1.3 Identifikasi Kondisi Eksisting

Tahapan identifikasi kondisi eksisting dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi pelaksanaan tata kelola SPBE saat ini pada Kabupaten Situbondo. Hal ini dilakukan agar kedepannya dapat dibandingkan dengan kondisi tata kelola SPBE yang ideal.

2.1.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE

Tahapan indentifikasi kondisi tata kelola SPBE dilakukan untuk mengetahui kesenjangan kondidi tata kelola SPBE pada Kabupaten Situbondo. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi tata kelola SPBE saat ini dengan kondisi tata kelola SPBE yang ideal.

2.1.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE

Kebijakan internal SPBE adalah komponen penting dalam penerapan SPBE pada suatu Pemerintah Daerah. Kebijakan internal SPBE berperan sebagai landasan hukun yang dijadikan pedoman hukum yang mengatur dan mengelola penyelenggaraan kebijakan SPBE di Pemerintahan Kabupeten Situbondo. Berdasarkan Permen PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek kebijakan SPBE terdiri dari Kebijakan internal tata kelola SPBE. Analisa meliputi ketentuan bagaimana kebijakan internal SPBE yang perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memenuhi indikator pada domain Kebijakan SPBE. Analisis urusan kebijakan SPBE dilakukan untuk memberikan saran terhadap pernaikan kebijakan SPBE pada Kabupaten Situbondo. Usulan dan Saran yang di berikan ini didasarkan pada analisis Gap Kebijakan Tata Kelola SPBE pada tahap sebelumnya. Rencana pembangunan kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail mengenai Usulan Kebijakan akan dijelaskan lebih detail pada BAB III.

2.1.6 Analisis Usulan PD Mandiri TIK

Pada bagian ini menganalisa usulan PD Mandiri TIK dilakukan dengan memberikan saran bagi PPD Mandiri TIK yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisa usulan PD Mandiri TIK ini diharapkan agar PD yang diusulkan dapat menerapkan sejumlah tata kelola dan manajeen demi meningkatkan kualitas PD Mandiri. Tahapan ini dilakukan untuk mencapai kondisi idea dari PD Mandiri TIK.

2.1.7 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Pada Bagian ini menganalisa usulan audit TIK bertujuan untuk membagi peran terhadap pengelolaan TI bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam membagi peran pengelola TI yang ideal. Hasil kegiatan ini yaitu pembagian penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.1.8 Analisis Usulan Audit TIK

Pada bagian ini menganalisa Usulan Audit TIK dilakukan mendukun pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kegiatan audit TIK mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan. Hasil dari kegiatan ini yaitu penjelasan mengenai bentuk kegiatan dan standar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo demi meningkatkan kualitas layanan SPBE.

2.2 Metodologi Penyusunan Manajemen SPBE

Bagian penyusunan Manajemen SPBE dimulaidari mengidentifikasi referensi hukum yang berkaitan dengan manejemen SPBE hingga mengalisis usulan manajemen SPBE yang tepat untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.2.1 Identifikasi Refrensi Hukum Manajemen SPBE

Bagian identifikasi referesi hukum bertujuan untuk mengetahui acuan atau dasar hukum yang digunakan pada penyusunan arsitektur manajemen SPBE. Referensi hukum yang digunakan berasal dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati. Detail mengenai Identifikai Referensi Hukum Manajemen SPBE akan dijelaskan lebih detail pada BAB III.

2.2.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Bagian ini identifikasi dilakukan untuk mengetahui penerapan manajemen SPBE di Pemkab. Situbondo saat ini. Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar dalam memberikan usulan atau rekomendasi bagi Pemkab. Situbondo agar mencapai kondisi ideal manajemen SPBE.

2.2.3 Identifikasi Gap Manajemen SPBE

Bagian identifikasi *gap* manajemen SPBE bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kondisi manajemen SPBE di Kab. Situbondo. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi manajemen SPBE saat ini dengan kondisi manajemen SPBE yang ideal, yakni berdasarkan **Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE** yang mencakup pada 8 jenis manajemen.

2.2.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE

Setelah membahas proses analisa gap, selanjutnya yaitu menjabarkan hasil analisis usulan manajemen SPBE untuk Pemkab. Situbondo. Manajemen SPBE menurut **Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE** terdapat 8 jenis manajemen yang selanjutnya akan dibahas pada sub-bab ini, antara lain:

1. Manajemen Risiko
2. Manajemen Keamanan Informasi

3. Manajemen Data
4. Manajemen Aset TIK
5. Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Manajemen Pengetahuan
7. Manajemen Perubahan
8. Manajemen Layanan SPBE

2.3 Metodologi Penyusunan Penyelenggara SPBE

Bagian ini menyusun Arsitektur Penyelenggara SPBE dimulai dari identifikasi hukum yang berkaitan dengan penyelenggara SPBE hingga analisis usulan terhadap sumber daya manusia SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.3.1 Identifikasi Refrensi Hukum Penyelenggara SPBE

Bagian ini mengidentifikasi referensi yang bertujuan mengetahui pedoman atau landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan arsitektur manajemen SPBE. Referensi hukum yang digunakan berasal dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Peratiran Badan Siber dan Sandi Negara, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati. Detail mengenai Identifikasi Refrensi Hukum Penyelenggara SPBE akan dijelaskan lebih detail pada BAB III

Identifikasi Kondisi Eksisting

Pada bagian ini menganalisa dan mengidentifikasi kondisi eksisting untuk mengetahui penyelenggara SPBE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya hasil dari identifikasi dan analisa pada tahap ini akan digunakan sebagai dasar usulan atau rekomendasi peran penyelenggaran SPBE di Kabupaten Situbondo.

2.3.2 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE

Pada bagian ini menganalisa dan mengidentifikasi mengenai Gap Penyelenggaraan SPBE untuk mengetahui kesenjangan kondisi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Situbondo dengan kondisi ideal yang harus dicapai. Hasil identifikasi Gap Penyelenggara SPBE ini diharapkan akan memunculkan rekomendasi penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.3.3 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE

Pada bagian ini dilakukan analisa secara garis besar terhadap kondisi eksisting penyelenggaran SPBE dengan hasil analisis GAP yang dilaksanakan. Proses ini dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan kondisi yang dilaksanaka sekarang dengan kondisi ideal yang harus dicapai maupun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisa arsitektur penyelenggaraan SPBE ini terdiri dari beberapa bagian yakni Analisis Tim Koordninasi dan Analisa struktur anggota atau

Staff dalam beberapa organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.3.4 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE

Pada bagian ini berisi hasil kondisi eksisting sumber daya manusia SPBE secara garis besar dengan disertai hasil analisis GAP yang dilakukan untuk mengetahui perbdaan kondisi masa kini dengan kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Analisa Sumber Daya Manusia SPBE terdiri dari nalisa kompetensi SDM SPBE. Pengadaan SDM SPBE, Analisa kebutuhan trainging SDM, DAN Analisa kebutuhan sertifikasi SDM.

BAB 3
ARSITEKTUR TATAKELOLA SPBE

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja untuk memastikan memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tujuan pembangunan arsitektur tata kelola SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Fungsi tata kelola SPBE pada pemerintah daerah adalah kepala daerah dan sekretaris daerah. Penyusunan arsitektur tata kelola SPBE selanjutnya harus memenuhi 3 aspek dengan sejumlah indikator pada masing-masing aspek. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan SPBE, PD Mandiri TIK, Pembagian peran terhadap pengelolaan TIK dan Audit TIK yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.1 Identifikasi Refrensi Hukum Tata Kelola SPBE

Pelaksanaan Tata kelola SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo dibuat dengan mengacu dan memenuhi beberapa peraturan. Peraturan-peraturan terkait yang digunakan sebagai referensi hukum terkini adalah:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022** tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022** Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
7. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2022** tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.
8. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021** tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.
9. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022** tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo

10. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022** Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten SItubondo Tahun 2022

3.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja Tata Kelola SPBE yang digunakan atau dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesua Nomor 95 Tahun 2018, menyatakan bahwa tata kelola bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Rancana strategis SPBE pada aspek tata kelola mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE
2. Penguatan Kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu, dan;
3. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

Penjelasan secara rinci mengenai unsur unsur SPBE dan bentuk penerapanya di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

a. Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari arsitektur SPBE dalah memberikan pedoman untuk melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Pelaksanaan Arsitektur SPBE setidaknya harus memuat referensi arsitektur dan 6 domain arsitektur. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku, sedangkan domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur.

Pemerintahan Kabupaten Situbondo saat ini **hanya memiliki kebijakan internal mengenai arsitektur SPBE dan belum memiliki asrsitektur itu sendiri.** Dimana kebijakan internal mengenai arsitektur SPBE itu sendiri masih diatur secara umum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa arsitektur SPBE sudah diatur lengkap mengenai referensi arsitektur dan 6 domain arsitektur SPBE. Namun meskipun demikian peraturan yang ada masih bersifat secara umum dan kurang mengkerucut.

b. Peta Rencana SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa dokumen yang

mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Peta Rencana SPBE adalah memetakan arah atau menyiapkan langkah dalam melaksanakan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 Tahun. Pelaksanaan Peta Rencana harus memuat Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemerintahan Kabupaten Situbondo saat ini **hanya memiliki kebijakan internal mengenai Peta Rencana SPBE dan belum memiliki dokumen Peta Rencana SPBE itu sendiri.** Dimana kebijakan internal mengenai Peta Rencana SPBE itu sendiri masih diatur secara umum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Peta Rencana disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Selain itu Peta Rencana berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 tahun 2022 juga menyatakan bahwa Peta Rencana sudah diatur memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Arsitektur SPBE, Aplikasi SPBE, Kkemanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun meskipun demikian peraturan yang ada masih bersifat secara umum dan kurang mengkerucut.

c. Rencana dan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Rencana dan nggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Rencana Anggaran SPBE dibagi menjadi 3 kategori, yaitu anggaran pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial, anggaran pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial. Berdasarkan hasil survei di Pemerintahan Kabupaten Situbondo dari 40 PD di Kabupaten Situbondo masih terdapat 6 PD yang masih belum memiliki rencana dan anggaran untuk 3 kegiatan pembangunan aplikasi. Penjelasan mengenai anggaran dapat dilihat pada Buku 1 Sub-bab 9.4.2. Selain itu Pemerintah Kabupaten Situbondo juga telah melaksanakan pembentukan Tim Anggaran. Hal ini juga didukung dengan dibuatnya **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/34/P/004.22022 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Penjelasan mengenai Tugas dan Jabatan Tim anggaran dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 9.4.**

d. Proses Bisnis SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Proses Bisnis

merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Tujuan dilaksanakanya Proses Bisnis adalah untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Prose Bisnis disusun saling berkaitan dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Berdasarkan hasil survei Pemerintah Kabupaten Situbondo dari 40 PD terdapat **38 Perangkat Daerah (PD) (95%) di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang sudah memiliki Peta Proses Bisnis** Sedangkan **2 PD (5%) belum memiliki Peta Proses Bisnis**. Dimana proses pembuatan proses bisnis di Kabupaten Situbondo ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 Tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Penjelasan lebih detail mengenai Proses Bisnis dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 3.4.**

e. Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Data dan Informasi merupakan seluruh data dan informasi yang mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antara instansi pusat dan atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standart interoperabilitas data dan informasi. Berdasarkan hasil survei di Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini mengelola data dan informasi sejumlah total **361 Data**. Dimana sebanyak **184 data** berbentuk ***online***, **164 data** berbentuk ***offline***, dan **13 data** berbentuk ***online* dan *offline***. Sedangkan untuk penyimpanannya data online paling banyak data tersimpan pada server Diskominfo yaitu sebanyak **56 Data**, pada **server pusat** sebanyak **48 data**, pada **server PD** masing-masing sebanyak **41 data,** pada **server PD di Diskominfo** sebanyak **24 data**. Sedangkan yang terakhir **data *offline*** sebesar **164 data** disimpan pada komputer masing-masing **komputer PD**. Penjelasan mengenai detail data dan informasi dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 4.4.**

f. Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (tiga)

Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil survei untuk Jaringan Intra Instansi Pusat dan Daerah di Kabupaten Situbondo penerapan pelaksanaan jaringan intra pemerintah ini sudah cukup baik. sedangkan untuk pusat data nasional berdasarkasan hasil kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan **menerapkan Pemusatan Server pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.** Yang terakhir untuk penerapan atau pelaksanaan sistme penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo belum menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan Web Service**. Detail mengenai Infrastruktur SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 7.4, 7.5, dan 7.7.**

g. Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyatakan bahwa Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Berdasarkasn hasil analisa di Kabupaten Situbondo saat ini dari **40 PD di Pemerintah Kabupaten Situbondo**, diperoleh **207 (dua ratus tujuh) aplikasi** yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan layanan dan program PD. PD yang memiliki aplikasi paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni sebanyak **26 (dua puluh enam) aplikasi**. Disusul oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sama-sama memiliki **16 (enam belas) aplikasi.** Detail mengenai Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 6.4.**

h. Kemanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyatakan bahwa Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalaan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Berdasarkan hasil analisa di Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.** Begitupun dengan Peraturan Keamanan yang belum diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu Peraturan Keamanan seperti Peraturan BSSN

No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan BSSN No 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah**.** Detail mengenai Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 8.3 dan 8.4.**

i. Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyatakan bahwa Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE terdiri atas Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Layanan Publik berbasis Elektronik. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada seluruh PD di pemerintahan Kabupaten Situbondo, diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo **mengelola layanan sebanyak 768 layanan**. **Semua layanan tersebut merupakan layanan aktif yang tersebar di 40 PD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga, saat ini semua PD di Pemerintah Kabupaten Situbondo **memiliki layanan yang aktif dikelola.** Detail mengenai Layanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub-bab 5.4 dan 5.5.**

3.3 Identifikasi Kondisi Eksisting

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi saat ini dari tata kelola SPBE di Kabupaten Situbondo. Kondisi eksisting Tata Kelola SPBE secara jelas dapat dilihat pada Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa Gap Kabupaten Situbondo Bab 9. Penjelasan singkat dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Kondisi Eksisting Kebijakan Tata Kelola SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting
Kebijakan Internal SPBE	
1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 1 ayat 14 menjelaskan tentang kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	• Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 11 ayat 1 menjelaskan tentang pedoman peta rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana

Parameter	Kondisi Eksisting
	strategis Pemerintah Daerah. • Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 1 Ayat 16 tentang peta rencana yang merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
3. Manajemen Data	• Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 48 ayat 2 menjelaskan tentang manajemen data yang dilakukan melalui pengelolaan aristektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data. • Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo. • Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022 tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo
4. Pembangunan Aplikasi SPBE	Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 34 ayat 1 menjelaskan tentang pembangunan aplikasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Aplikasi khusus, pemerintah daerah melakukan perencananaan, pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
5. Layanan Pusat Data	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 pasal 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 29 Ayat 1 menjelaskan tentang penempatan atau penyimpanan data pada setiap lingkungan pemerintah daerah pada servernya di pusat data.
6. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 ayat 1 mengenai penggunaan jaringan intra pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam pemerintah daerah
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1 menjelaskan tentang penggunaan sistem layanan sebagai penghubung layanan untuk mempermudah pemerintah dalam

Parameter	Kondisi Eksisting
	melakukan integrasi antar layanan SPBE
8. Manajemen Keamanan Informasi	• Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 47 ayat 1 menjelaskan tentang tujuan manajemen keamanan data informasi yaitu untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. • Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang *Computer Security Incident Respons Team* Kabupaten Situbondo Tahun 2021
9. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1 menjelaskan tentang audit teknologi, informasi dan komunikasi secara berkala demi memastikan kehandalan dan keamanan data. audit teknologi, informasi dan komunikasi meliputi audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE
10.Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	• Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 61 ayat 1 menjelaskan terkait dengan pembentukan Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah. • Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten SItubondo Tahun 2022 • Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022
Pemantauan dan Evaluasi SPBE	
1. Pemantauan dan Evaluasi SPBE	7 OPD melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara berkala dalam periode 6 bulan sampai 1 tahun sekali atau jika terjadi kesalahan. bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah monitoring, pencocokan data, monev sesuai Kemenpan-RB.
2. Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi	5 OPD melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE seecara berkala dalam periode 6 bulan sampai 1 tahun atau ketika ada kesalahan teknis dengan bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara konvensional, koordinasi dan diskusi, dan juga Monev Audit.
Audit TIK	
1. Audit Infrastruktur SPBE	5 OPD melaksanakan Audiit Aplikasii SPBE secara

Parameter	Kondisi Eksisting
	berkala selama 1 tahun sekali. Bentuk audit yang dilaksanakan melakukan pencockan data yang diinputkan di aplikasi, koordinasi penyesuaian fitur, dtd-akp, monev software, brainware, hardware, dan juga audit aplikasi yang dibantu oleh Kominfo.
2. Audit Aplikasi SPBE	4 OPD melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE secara berkala setahun sekali atau bahkan ketika ada kesalahan teknis. Bentuk audit infrastruktur yang dilaksanakan antara lain adalah pengecekan kabel jaringan, acces point dan server, dan perangkat keras lain serta bantuan audit dari dinas Kominfo.
3. Audit Keamanan SPBE	4 OPD melaksanakan Audit Kemanan SPBE hanya dilakuakn sekali oleh menggunakan indeks KAMI bersama BPPT, audit keamanan bersama Kominfo dan pengecekan data dan pengelolaan data

3.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang harus dicapai dari tata kelola SPBE di Kabupaten Situbondo. Perbedaan dari kondisi saat ini dan kondisi ideal dijelaskan melalui gap tata kelola SPBE. Penjelasan secara jelas dan detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa Gap Kabupaten Situbondo Bab 9**. Penjelasan singkat dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Gap Tata Kelola SPBE

Parameter	Gap
Kebijakan Internal SPBE	
1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Kebijakan yang mengatur Arsitektur SPBE Pemerintah sudah ada namun perlu melaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 1 ayat 14** secara periodik
2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kebijakan yang mengatur mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sudah ada namun perlu melaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo** Pasal **11 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 16** secara periodik
3. Manajemen Data	Kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen sudah ada dan tergolong lengkap. Namun perlu melaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan**

Parameter	Gap
	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 48 ayat 2 secara periodik dan juga meriviu kembali peraturan bupati dan keputusan bupati terkait manajemen data dalam hal ini **Peraturan Bupati tentang satu data indonesia Kabupaten Situbondo dan juga Keputusan Bupati tentang penyelenggara forum dan sekertariat forum satu data indonesia Kabupaten Situbondo**
4. Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan yang mengatur mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE sudah ada namun perlu melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo** Pasal **34 ayat 1** secara periodik.
5. Layanan Pusat Data	Kebijakan yang mengatur mengenai Layanan Pusat Data sudah ada namun perlu dilaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **peraturan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 29 Ayat 1** menjelaskan tentang penempatan atau penyimpanan data pada setiap lingkungan pemerintah daerah pada servernya di pusat data.
6. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kebijakan yang mengatur mengenai Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sudah ada Namun perlu dilakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 Ayat 1** Secara periodik
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kebijakan yang mengatur mengenai Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sudah ada namun perlu dilaksankaan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** secara periodik
8. Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen Kemanan Informasi sudah ada namaun peru dilaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** secara periodik, selain itu dapat juga dilakukan **reviu**

Parameter	Gap
	dan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo Tahun 2021
9. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Kebijakan mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah ada namun perlu dilaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1** secara periodik.
10. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	Kebijakan yang mengatur Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sudah ada namun perlu dilaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini Peraturan **Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 61 ayat 1** secara periodik. Melakukan reviu dan evaluasi juga terhadap **Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022** dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022**
Pemantauan dan Evaluasi SPBE	
1. Pemantauan dan Evaluasi SPBE	38 OPD belum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Terdapat OPD yang telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi namun kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
2. Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi	35 OPD belum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE. Terdapat OPD yang telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi namun kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
Audit TIK	
1. Audit Infrastruktur SPBE	35 OPD belum melaksanakan Audit Aplikasi SPBE Terdapat OPD yang telah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE namun kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur.
2. Audit Aplikasi SPBE	36 OPD belum melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE. Terdapat OPD yang sudah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE namun kagiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur
3. Audit Keamanan SPBE	36 OPD belum melaksanakan Audit Keamanan SPBE.

Parameter	Gap
	Terdapat OPD yang sudah melaksanakan Audit Keamanan SPBE namun kagiatan tidak dilaksanakan secara rutin dan terstruktur

3.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE

Berdasarkan hasil analisis terhdapat kondisi eksisiting, kondisi ideal yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, dan juga Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo. Dari Indikator 1 sampai 10 yakni

1.) Arsitektur SPBE,
2.) Peta Rencana SPBE,
3.) Manajemen Data,
4.) Pembangunan Aplikasi SPBE,
5.) Layanan Pusat Data,
6.) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah,
7.) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah,
8.) Manajemen Keamanan Informasi,
9.) Audit Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan
10.) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Berdasarkan buku Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Indikator yang telah disebutkan memperoleh nilai tiingkat kematangan dari rentang 1 hingga 3. Dimana Indikator yang mendapatkan nilai tingkat kematangan 1 adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Indikator yang mendapatkan nilai tingkat kematangan 2 adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE. Untuk itu pada bagian ini akan diberikan hasil analissi usulan untuk mencapai kondisi yang ideal berdasarkan atau mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020.

Melihat hasil Kondisi eksisting pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo saat ini, Pemerintahan Kabupaten Situbondo telah memiliki Peraturan yang mengatur seluruh domain arsitektur dan kebijakan terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana peraturan tersebut tertuang pada **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.** Sehingga hanya perlu dilakukan **reviu dan evaluasi** agar mendapatkan nilai kematangan yang lebih tinggi dari kondisi saat ini. Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,** dihasilkan usulan yang dapat dilaksanakan untuk tahun selanjutnya. Penjelasan mengenai usulan dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Usulan Kebijakan SPBE

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Saran Perbaikan
Domain 1	**Kebijakan Internal SPBE**		
Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			
1	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 1 ayat 14** secara periodik
2	Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 16** secara periodik
3	Manajemen Data Pemerintah Daerah	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 48 ayat 2** secara periodik serta dapat meriviu kembali **Peraturan Bupati tentang satu data indonesia Kabupaten Situbondo dan juga Keputusan Bupati tentang penyelenggara forum dan sekertariat forum satu data indonesia Kabupaten Situbondo**
4	Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	2	Kebijakan mengatur proses siklus pembangunan Aplikasi SPBE yang telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan TIK. Serta dapat melanjutkan melaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam

No	Indikator	Nilai Tingkat	Saran Perbaikan
			hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo** Pasal **34 ayat 1** secara periodik.
5	Layanan Pusat Data	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 ayat 1** Secara Periodik
6	Layanan Jaringan Intra	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 Ayat 1** Secara periodik
7	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** secara periodik
8	Manajemen Keamanan Informasi	1	Menetapkan Kebijakan terkait Manajemen Keamanan Informasi dimana kebijakan tersebut mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Selanjutnya dapat dilaksanakan riviu dan evaluasi **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat**

No	Indikator	Nilai Tingkat	Saran Perbaikan
			1 secara periodik, selain itu dapat juga dilakukan **reviu dan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo Tahun 2021**
9	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1** secara periodik.
10	Tim Koordinasi SPBE	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo** Pasal 61 ayat 1 secara periodik. Melakukan reviu dan evaluasi juga terhadap **Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022** dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022**

3.6 Analisis Usulan PD Mandiri TIK

Pengukuran tercapainya PD mandiri TIK dilihat dari bobot atau skor yang didapatkan oleh setiap PD. Metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari perumusan dan identifikasi *Key Performance Indikator* (KPI) dengan berdasarkan

pada kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau kebutuhan organisasi. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan diantaranya:

1. **Menentukan variabel dan indikator penilaian (KPI)**
   Berikut ini merupakan daftar variabel dan indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja tercapainya PD yang mandiri TIK meliputi:
   a. **Ketersediaan SDM TIK**
      Variabel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya unit atau divisi dari SDM yang khusus mengurusi atau mengelola TI di setiap PD. Beberapa indikatornya antara lain:
      - Memiliki SDM TIK secara tertulis (formal)
      - Memiliki SDM TIK sebagian formal dan sebagian ad hoc
      - Memiliki SDM TIK ad hoc
      - Tidak memiliki SDM TIK

   b. **Ketersediaan tupoksi SDM TIK pada PD**
      Adanya tupoksi dari setiap PD terkait SDM TIK bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab SDM TIK terhadap permasalahan dan pengelolaan TI di setiap PD sehingga dapat mempermudah dalam evaluasi dan monitoring peran setiap SDM TI. Terdapat beberapa indikator untuk ketersediaan tupoksi SDM TIK antara lain:
      - PD memiliki tupoksi SDM TIK
      - PD tidak memiliki tupoksi SDM TIK

   c. **Adanya anggaran TI**
      Pelaksanaan kegiatan SPBE tentu didukung dari ketersediaan atau alokasi anggaran. Jika ada terkendala dengan anggaran atau tidak sesuai antara perencanaan anggaran yang dibutuhkan maka dapat menghambat proses implementasi SPBE. Terdapat beberapa indikator untuk variabel ini yaitu:
      - PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI > 1.000.000.000
      - PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI > 500.000.000 dan < 1.000.000.000
      - PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI > 200.000.000 dan < 500.000.000
      - PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI > 50.000.000 dan < 200.000.000
      - PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI < 50.000.000

   d. **Kemampuan dalam membuat aplikasi**
      Variabel ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan SDM TIK yang dimiliki oleh setiap PD dalam pembuatan, pengelolaan, dan

pengembangan aplikasi yang digunakan secara mandiri. Indikator untuk variabel ini yaitu:

- PD mampu membuat aplikasi secara mandiri >=3 aplikasi
- PD mampu membuat aplikasi secara mandiri 1-2 aplikasi
- PD tidak mampu membuat aplikasi secara mandiri

e. Jumlah aplikasi yang dimiliki

Jumlah aplikasi yang dimiliki setiap PD akan menunjukkan seberapa besar kemampuan PD tersebut dalam mengelola TI secara mandiri. Semakin banyak aplikasi maka semakin besar pula usaha untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan aplikasi yang dimiliki. Indikator untuk variabel ini meliputi:

- PD mampu membuat aplikasi sebanyak > 5
- PD mampu membuat aplikasi >= 2 dan < 5
- PD mampu membuat aplikasi < 2
- PD tidak mampu membuat aplikasi

f. Ketersediaan server

Ketersediaan server dari setiap PD dalam menunjang tata kelola SPBE bagian TIK dapat menunjukkan kemampuan PD tersebut dalam mengelola urusan TIK secara mandiri. Indikator dari variabel ini yaitu:

- PD memiliki server sendiri
- PD memiliki server di pihak ketiga (Diskominfo)
- PD sama sekali tidak memiliki server

2. Melakukan pembobotan nilai variabel

Proses pemberian bobot dari setiap variabel untuk mengukur kinerja pengelolaan TI secara mandiri oleh setiap PD dengan melakukan beberapa level pembobotan yaitu

- **level 1** digunakan sebagai landasan utama terbentuknya mandiri TIK di setiap PD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Level ini memiliki **bobot 20**, dengan indikator
  - ✓ Adanya anggaran khusus TI akan mendukung tercapainya mandiri TI setiap PD.
  - ✓ ketersediaan SDM TI
  - ✓ ketersediaan server,
- **level 2** ini merupakan level yang memuat kriteria atau karakteristik untuk mencapai tujuan utama. Level 2 memiliki nilai **bobot 15** dengan indikator
  - ✓ ketersediaan tupoksi SDM TI
  - ✓ jumlah aplikasi yang dimiliki dan

- **level 3** merupakan level yang mewakili suatu tindakan yang dapat dipilih dalam mencapai tujuan atau dapat disebut sebagai pendukung. Level ini memiliki **bobot 10** dengan indikator
  - ✓ kemampuan membuat aplikasi

  Tingkatan level ini ditentukan berdasarkan analisis kondisi PD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, jadi dimungkinnya pembobotan bisa berubah di daerah lainnya.

3. Melakukan penilaian indikator

Proses penilaian atau pemberian skor ini dilakukan untuk seluruh indikator dari setiap variabel untuk tercapainya PD mandiri TIK di setiap PD yaitu:

a. Ketersediaan SDM TIK

- Skor 4 = jika PD memiliki SDM TIK secara tertulis (formal)
- Skor 2 = Jika SDM TIK sebagian formal dan sebagian ad hoc
- Skor 1 = Jika SDM TIK secara ad hoc
- Skor 0 = Jika tidak memiliki SDM TI

b. Ketersediaan tupoksi SDM TIK

- Skor 5 = Jika terdapat tupoksi SDM TIK di setiap PD
- Skor 0 = Jika tidak ada tupoksi SDM TIK di setiap PD

c. Adanya anggaran TIK

- Skor 4 = Jika PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI > 1.000.000.000
- Skor 3 = Jika PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI < 1.000.000.000 dan >= 500.000.000
- Skor 2 = Jika PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI < 500.000.000 dan >= 200.000.000
- Skor 1 = Jika PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI >= 50.000.000 dan < 200.000.000
- Skor 0 = Jika PD telah mengeluarkan anggaran SI/TI < 50.000.000

d. Kemampuan dalam membuat aplikasi

- Skor 4 = PD mampu membuat aplikasi secara mandiri >=3 aplikasi
- Skor 2 = PD mampu membuat aplikasi secara mandiri 1 – 2 aplikasi
- Skor 0 = PD tidak mampu membuat aplikasi secara mandiri

e. Jumlah aplikasi yang dimiliki

- Skor 4 = Jika PD mampu membuat aplikasi sebanyak > 5
- Skor 2 = Jika PD mampu membuat aplikasi > 2 dan < 5

- Skor 1 = Jika PD mampu membuat aplikasi < 2
- Skor 0 = Jika PD tidak mampu membuat aplikasi

f. Ketersediaan server

- Skor 3 = Jika PD memiliki server
- Skor 2 = Jika PD memiliki server di pihak ketiga (Diskominfo)
- Skor 0 = Jika PD tidak memiliki server

4. Menghitung variabel dan indikator

Dalam melakukan perhitungan variabel dan indikator dengan menggunakan rumus seperti berikut:

$$\boldsymbol{Nilai\ Variabel = \frac{Total\ Skor}{Skor\ maksimal} \times Bobot}$$

Untuk perhitungan lebih jelas, maka dapat diambil contoh untuk perhitungan variabel pertama yaitu ketersediaan SDM TI. Jika variabel ketersediaan SDM TIK ini mendapatkan skor 2, maka skor tersebut dibagi dengan skor maksimal sebesar 4 dan dikali dengan 15 yang merupakan bobot dari variabel atau kriteria ini. Cara perhitungan ini juga berlaku untuk semua variabel atau kriteria dengan berdasarkan skor dan bobot dari masing-masing variabel dan indikator.

5. Menetapkan PD mandiri TIK

Berdasarkan hasil analisis PD mandiri TIK yang telah dilakukan pada masing-masing PD dengan berdasarkan 6 Variabel yaitu Ketersediaan SDM TIK, Ketersediaan Tupoksi SDM TIK, Adanya Anggaran TIK, Membuat Aplikasi, Aplikasi yang dimiliki, dan Ketersediaan Server. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 PD yang termasuk ke dalam PD mandiri TIK yang dapat dilihat dari nilai/skor akhir yang sudah diakumulasikan dari setiap indikator **lebih dari 40.** 13 PD tersebut yakni **Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. Abdoer Rahem**.

Sedangkan berdasarkan analisis kondisi eksisting SDM TIK. Pada Pemerintahan Kabupaten Situbodo terdapat 11 PD yang harus dan wajib PD Mandiri TIK. Berdasarkan hasil survei dengan Dinas Komunikasi dan Informatika PD Tertentu yang memiliki wewenang membuat aplikasi sendiri, *set-up* jaringan LAN sendiri termasuk belanja infrastruktur jaringan LAN dan server sendiri, dan *set-up* operasional dan pengembangan, dapat membangun

aplikasi dan mengembangkan khusus aplikasi sendiri maka termasuk kedalam PD Mandiri TIK. Adapun syarat-syarat PD Mandiri TIK adalah sebagai berikut:

1. Minimal 1 orang staff memiliki 3 Kompetensi (Programming, Teknisi Jaringan dan Admin Keamanan TI)
2. Minimal memiliki pengalaman training dan sertifikasi programming, teknisi komputer dan jaringan.
3. Memiliki pengalaman membuat aplikasi sendiri dan set up jaringan sendiri.

11 PD wajib Mandiri TIK yakni **Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. Abdoer Rahem, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.**

Berdasarkan analisa berkaitan dengan syarat-syarat PD Mandiri TIK diatas dapat diketahui bahwa, Dari 40 PD dan 11 PD yang wajib TIK dapat diketahui bahwa terdapat 7 PD Wajib dan Layak menjadi Mandiri TIK, 4 PD Harus tapi tidak layak dan 1 PD layak tapi tidak harus. 7 PD yang harus dan layak Mandiri TIK yakni Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RSUD dr. Abdoer Rahem. Kategori Harus dan Layak PD Mandiri TIK merupakan PD yang memenuhi syarat diantaranya adalah terpenuhinya kompetensi perkerjaan yang berkaitan dengan TIK, Kepemilikan SK, Kepemilikan sertifikasi dan pengalaman training pada masing staff TIK dan Pengalaman membuat aplikasi. 4 PD yang Harus tapi tidak layak PD mandiri TIK dikarenakan kurang memenuhi syarat Mandiri TIK yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selain hal tersebut terdapat 1 PD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman yang memenuhi syarat PD Mandiri TIK namun tidak harus Mandiri TIK. Ringkasan mengenai usulan PD Mandiri TIK dapat dilihat pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.1 Usulan PD Mandiri TIK

Kode PD	Nama PD
18	Dinas Kesehatan

27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	RSUD dr. Abdoer Rahem
15	Badan Pendapatan Daerah
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Dinas Perhubungan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

PD yang termasuk ke dalam PD mandiri TIK masih perlu berkoordinasi dengan Diskominfo dalam melakukan pengelolaan TI sedangkan pihak Diskominfo melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SDM TIK di setiap PD dalam melakukan pengelolaan TI. Untuk PD yang belum memenuhi kriteria sebagai PD mandiri TIK tetap berada di bawah pemantauan dari pihak Diskominfo. Terdapat beberapa tugas dari PD Mandiri TIK diantaranya:

1. Melakukan perencanaan aplikasi, membuat dokumen user requirement untuk kebutuhan pengembangan aplikasi khusus PD.
2. Memiliki peran sebagai *Quality Assurance* untuk pengembangan aplikasi khusus di PD.
3. Melakukan uji coba aplikasi yang sedang dikembangkan oleh PD.
4. Melakukan pemeliharaan aplikasi khusus yang telah dikembangkan oleh PD.
5. Melakukan perencanaan, dan pemeliharaan database yang dimiliki setiap PD.
6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam seluruh proses manajemen TIK,
7. Mengadakan server dan melakukan konfigurasi, operasional, dan perawatan server secara mandiri.

3.7 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Didalam peraturan yang sama juga diatur bahwa pengelolaan IT juga mengembangkan SDM yang berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi,

mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Analisa Usulan Pembagian Peran terhadap pengelolaan TI ini dilaksanakan untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat pemenuhan permintaan sistem berbasis elektronik di semua PD. Usulan yang digunakan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dan Peta Okupasi TIK. Pemetaan Kompetensi dilaksanakan dengan SI/TI yang ada pada peta Okupasi TIK. Berdasarkan tanggung jawab yang ada dalam pengelolaan TI, maka terdapat 4 peran yang direkomendasikan yaitu: Pembangunan, Operator, Pemeliharaan, dan juga Pengembangan sistem. Berikut penjelasan untuk masing masing peran yang direkomendasikan:

1. Pembangunan sistem: Merancang dan membangun sistem baru
2. Operator dan admin sistem mengoperasikan sistem umumnya memiliki kewenangan untuk melakukan konfigurasi sistem, menambah pengguna dan menetapkan peran pengguna sistem
3. Pemeliharaan atau Perawat Sistem Melakukan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan sistem
4. Pengembang Sistem mengembangkan sistem yang dibangun sebelumnya.

Tabel 3.4 Pembagian Peran PD terhadap Pengelolaan TI

Jenis SI/TI	Pembangun Sistem	Operator & Admin Sistem	Pemelihara atau Perawat Sistem	Pengembang Sistem
Perangkat keras dan Piranti Digital	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD
Perangkat lunak dan pemrograman	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap PD	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Jaringan LAN (internal PD di belakang router)	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap PD (dibantu pihak ketiga)	Setiap PD (dibantu pihak ketiga)	PD (kewajiban koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika)
Infrastruktur dan Jaringan WAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Server	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengelola TI jenis SI/TI Perangkat keras dan Piranti Digital merupakan pengelolaan TI yang berkaitan dengan kemampuan PD dalam merancang, mendesain, merakit, mengoperasikan, mengendalikan, dan memelihara perangkat keras

komputer maupun piranti digital lainnya (*hardware*). Pengelolaan perangkat keras dilakukan oleh semua PD karena setiap PD harus bisa mengoperasikan hingga memelihara perangkat TI yang dimiliki oleh PD tersebut.

Pengelola TI jenis SI/TI Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemrograman berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, mendesain, mengonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (software) maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan. Spektrum kemampuan ini berhubungan erat dengan metodologi atau life cycle pembuatan perangkat lunak, yaitu: perencanaan, perancangan, pemrograman, pengujian, perbaikan, penerapan, dan penilaian. Aspek ini dikelola oleh PD mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika karena PD mandiri TIK merupakan PD yang mampu melakukan pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan aplikasi yang digunakan secara mandiri. Sedangkan untuk operator sistem dilakukan oleh PD yang menggunakan sistem tersebut.

Pengelola TI jenis SI/TI Infrastruktur dan Jaringan WAN berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi berbagai komponen teknis jaringan infrastruktur dan telekomunikasi di Kabupaten Situbondo yang menghubungkan setiap PD. Aspek ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas Bidang Penyelenggaraan e-Government yang mengelola infrastruktur TIK.

Pengelola TI jenis SI/TI jaringan LAN berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi berbagai komponen teknis jaringan LAN untuk internal PD di belakang router. Aspek ini dikelola oleh Setiap PD dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan instalasi dan pemeliharaannya. Aspek ini diperlukan manakala Jaringan Intra pemerintah yang tersedia masih belum memadai kapasitas bandwidthnya, sehingga membutuhkan penambahan.

Pembagian peran pada pengelolaan jenis SI/TI Server berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi server yang dimiliki. Aspek ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas Bidang Penyelenggaraan e-Government yang mengelola infrastruktur dan teknologi informasi. Selain itu, PD Mandiri TIK yang memang sudah memiliki server dan wajib memiliki server sendiri karena ketentuan dari Kementerian pusat, dapat melakukan pengelolaannya secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan Diskominfo ataupun pihak ketiga.

3.8 Analisis Usulan Audit TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan

komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit TIK terdiri atas Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo. Indikator 29 hingga 31 masing-masing Indikator memiliki Nilai Tingkat kematangan yang berbeda, Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebesar 1, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebesar 1, dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebesar 1. Dari 3 Indikator tersebut rata-rata nilai tingkat kematangannya adalah 1.

Menurut Peraturan Menteri **Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebelum dilakukan audit oleh eksternal, dapat dilakukan audit oleh internal oleh auditor internal pemerintah daerah. Audit internal dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Inspektorat. Hal tersebut sesuai dengan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang yaitu melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fungsi Inspektorat yang menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu. Pelaksanaan audit internal dapat mengacu kepada peraturan audit eksternal yang akan dijelaskan pada subbab 3.8.1 – 3.8.2.

3.8.1 Audit Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, menyatakan bahwa Audit Infrastruktur adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit Infrastruktur SPBE terdiri dari Audit Jaringan Intra Pemerintah dan Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Ruang lingkup panduan teknis audit Jaringan Intra Pemerintah atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri atas:

1. **Perencanaan**
   Perencanaan mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Perencanaan jaringan intra pemerintah mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan dan rancangan jaringan.

2. **Pengembangan**
   Pengembangan dapat dilakukan oleh tim internal organisasi atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan.

3. **Pengoperasian**

Konfigurasi jaringan SPBE/sistem penghubung layanan pemerintah dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Uji coba terhadap jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (test plan), rancangan pengujian (test design), prosedur pengujian (test procedures) dan laporan pengujian (test report). jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi baik untuk operator maupun administrator.

4. **Pemeliharaan**
   Pemeliharaan harus didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan/sistem penghubung layanan dan manajemen konfigurasi jaringan/sistem penghubung layanan

Pada peraturan yang sama Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh LATIK SPBE atau Lembaga Pelaksana Audit SPBE. Audit Infrastruktur secara garis besar dilaksanakan dengan mengikuti **tata cara audit**, dimana secara garis besar dibagi menjadi **3 kelompok tahapan, yakni Tahap Perencanaan (pre-audit), Tahap Pelaksanaan lapangan (*onsite* audit), dan Tahap Analisa data dan pelaporan (post audit)**. Maing-masing kelompok masih meliputi beberapa hal, dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penyiapan Tim Audit**
   Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilakukan dengan mempersiapkan pembentukan Tim Audit yang terdiri dari posisposisi dan uraian tugas masing-masing posisi sebagai berikut:
   1. Penanggung Jawab berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit
   2. Lead Auditor bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi.
   3. Auditor bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara /dengan Auditor teknologi muda;
   4. Asisten Auditor bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi
   5. Teknisi bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan
   6. Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan

2. **Quick assessment**

Tahap Quick assesment dilaksanakan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

3. **Penyiapan rencana audit**;

   Dalam melaksanakan audit perlu mempersiapkan rencana tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

   1. Tujuan audit;
   2. Lingkup;
   3. Pendekatan;
   4. Kriteria;
   5. Parameter;
   6. Acuan;
   7. Metode pengumpulan data;
   8. Penentuan objek;
   9. Data primer dan sekunder;
   10. Metode analisa;
   11. Deliverable; dan
   12. Perkiraan jadwal pelaksanaan.

4. **Penyepakatan rencana audit**;

   Setelah melaksanakan penyiapan rencana audit dapat dilakukan penyepakatan rencana audit dimana ketua tim audit dan auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

5. **Penyiapan protokol audit;**

   Protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain daftar data, pertanyaan dan pengujian; formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.

6. **Penetapan parameter acuan;**

   Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembanding

7. **Pertemuan pembukaan;**

   Tim Audit Aplikasi SPBE Melakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee.

8. **Pelaksanaan lapangan;**

Melaksanakan audit lapangan, melalui Penelaahan dokumen; Wawancara; Observasi lapangan; Pengujian; dan Verifikasi bukti

9. **Pertemuan penutupan;**

Tim Audit Aplikasi SPBE Melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee

10. **Analisa data;**

Tim Audit Aplikasi SPBE melakukan analisa terkait dokumen.

11. **Pengelolaan data;**

Pengelolaan data primer dan sekunder hasil audit untuk bahan penyusunan laporan hasil audit.

12. **Penyusunan laporan;**

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan LATIK SPBE. Laporan meliputi latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

13. **Proof-read laporan;**

Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh pimpinan LATIK SPBE.

14. **Penyerahan laporan; dan**

Laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan LATIK SPBE kepada Auditee dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan Auditee.

15. **Evaluasi aktivitas Audit Infrastruktur SPBE**

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

3.8.2 Audit Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja aplikasi SPBE terdiri atas tahapan berikut.

1. **Perencanaan**
   Perencanaan mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Perencanaan jaringan intra pemerintah mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan dan rancangan jaringan.

2. **Pengembangan**
   Pengembangan dapat dilakukan oleh tim internal organisasi atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan.

3. **Pengoperasian**
   Konfigurasi jaringan SPBE/sistem penghubung layanan pemerintah dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Uji coba terhadap jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (test plan), rancangan pengujian (test design), prosedur pengujian (test procedures) dan laporan pengujian (test report). jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi baik untuk operator maupun administrator.

4. **Pemeliharaan**
   Pemeliharaan harus didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan/sistem penghubung layanan dan manajemen konfigurasi jaringan/sistem penghubung layanan

Pada peraturan yang sama Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh LATIK SPBE atau Lembaga Pelaksana Audit SPBE. Audit Infrastruktur secara garis besar dilaksanakan dengan mengikuti **tata cara audit**, dimana secara garis besar dibagi menjadi **3 kelompok tahapan, yakni Tahap Perencanaan (pre-audit), Tahap Pelaksanaan lapangan (onsite audit), dan Tahap Analisa data dan pelaporan (post audit)**. Masing-masing kelompok masih meliputi beberapa hal, dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penyiapan Tim Audit**
   Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilakukan dengan mempersiapkan pembentukan Tim Audit yang terdiri dari posisposisi dan uraian tugas masing-masing posisi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit
2. Lead Auditor bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi.
3. Auditor bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara /dengan Auditor teknologi muda;
4. Asisten Auditor bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi
5. Teknisi bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan
6. Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan

2. **Quick assessment**

Tahap Quick assesment dilaksanakan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

3. **Penyiapan rencana audit;**

Dalam melaksanakan audit perlu mempersiapkan rencana tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

1. Tujuan audit;
2. Lingkup;
3. Pendekatan;
4. Kriteria;
5. Parameter;
6. Acuan;
7. Metode pengumpulan data;
8. Penentuan objek;
9. Data primer dan sekunder;
10. Metode analisa;
11. Deliverable; dan
12. Perkiraan jadwal pelaksanaan.

4. **Penyepakatan rencana audit;**

Setelah melaksanakan penyiapan rencana audit dapat dilakukan penyepakatan rencana audit dimana ketua tim audit dan auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

5. **Penyiapan protokol audit;**

   Protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain daftar data, pertanyaan dan pengujian; formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.

6. **Penetapan parameter acuan;**

   Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembanding

7. **Pertemuan pembukaan;**

   Tim Audit Infrastruktur SPBE Melakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee.

8. **Pelaksanaan lapangan;**

   Melaksanakan audit lapangan, melalui Penelaahan dokumen; Wawancara; Observasi lapangan; Pengujian; dan Verifikasi bukti

9. **Pertemuan penutupan;**

   Tim Audit Infrastruktur SPBE Melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee

10. **Analisa data;**

    Tim Audit Infrastruktur SPBE melakukan analisa terkait dokumen.

11. **Pengelolaan data;**

    Pengelolaan data primer dan sekunder hasil audit untuk bahan penyusunan laporan hasil audit.

12. **Penyusunan laporan;**

    Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan LATIK SPBE. Laporan meliputi latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

13. **Proof-read laporan;**

    Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh pimpinan LATIK SPBE.

14. **Penyerahan laporan; dan**

Laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan LATIK SPBE kepada Auditee dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan Auditee.

15. **Evaluasi aktivitas Audit Infrastruktur SPBE**

    Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

3.8.3 Audit Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Audit Keamanan adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Domain Audit Keamanan SPBE terdiri atas:

1. **Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE**

   Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam perencanaan Aplikasi SPBE; pengembangan Aplikasi SPBE; operasional Aplikasi SPBE; dan pemantauan Aplikasi SPBE.

2. **Audit atas manajemen kemanan SPBE**

   Audit atas Keamanan Infrastruktur SPBE terdiri atas: audit atas Sistem Penghubung Layanan; dan audit atas Jaringan Intra.

3. **Audit atas Manajemen Keamanan SPBE**

   Audit atas manajemen keamanan SPBE terdiri atas audit atas tata kelola keamanan SPBE; audit atas sistem manajemen keamanan SPBE; dan audit atas pengendalian keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE harus dilakukan menggunakan tata cara yang sudah baku dan teruji. Tata cara Audit Keamanan SPBE terdiri atas:

1. **Permintaan**

   Permintaan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan Audit Keamanan SPBE kepada LATIK cakupan Keamanan SPBE.

2. **Penugasan**

   Penugasan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh pimpinan LATIK cakupan Keamanan SPBE dengan menerbitkan surat tugas Audit Keamanan SPBE.

3. **Perencanaan**

Perencanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Perencanaan Audit Keamanan SPBE. Perencanaan Audit Keamanan SPBE mencakup:

1. Analisis risiko keamanan SPBE, merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko keamanan SPBE yang relevan dengan domain Audit Keamanan SPBE.
2. Penentuan kriteria Audit Keamanan SPBE, merupakan proses identifikasi dan pemetaan kriteria kontrol keamanan SPBE yang sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.
3. Rencana pengujian Audit Keamanan SPBE, berisikan rencana prosedur pengujian yang harus dilakukan Auditor atas kontrol keamanan SPBE termasuk alokasi waktu, personel dan alat bantu Audit Keamanan SPBE

4. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebagaimana **paling minimal harus mencakup prosedur berikut**.

1. Pemahaman kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor dalam mengidentifikasi informasi terdokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang kontrol keamanan SPBE.
2. Evaluasi desain kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa desain kontrol keamanan SPBE telah sesuai dengan kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan.
3. Pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.
4. Pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE. Merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.
5. Supervisi, prosedur ini mencakup supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE dan supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE.
6. Pelaporan, dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Laporan Hasil Audit. Laporan Hasil Audit mencakup:
   a. kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah;
   b. risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi;

c. kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE;
d. rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
e. rencana tindak lanjut dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Tindak lanjut

BAB 4
ANALISIS MANAJEMEN SPBE

Pada Bagian ini akan dijelaskan, mengenai kondisi eksisiting dari arsiterktur manajemen SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan yang akan dibahas pada bab ini meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen Aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan.

4.1 Identifikasi Refrensi Hukum Manajemen SPBE

Pelaksanaan Manajemen SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo dibuat dengan mengacu dan memenuhi beberapa peraturan. Peraturan-peraturan terkait yang digunakan sebagai referensi hukum terkini adalah:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020** Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. **Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
6. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022** Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
8. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021** tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.
9. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/179/P/001.3/2022** tentang Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.
10. **Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021** tentang *Computer Security Incident Respons Team* Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

4.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil survei dan analisa terhadap kondisi eksisting pelaksanaan manajemen SPBE di Pemerintahan Kabupaten

Situbondo. Kondisi eksisting manajemen SPBE secara detail dan jelas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa Gap Kabupaten Situbondo Bab 9**. Berikut rangkuman mengenai kondisi eksisting pada setiap manajemen SPBE dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Parameter	Eksisting
Manajemen Risiko	10 OPD melaksanakan Manajemen Risiko. Dari 10 OPD hanya 2 OPD yang memiliki standar atau framework manajemen risiko yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan untuk bentuk kegiatan dari 10 OPD hanya 5 OPD yang memiliki bentuk kegiatan manajemen risiko. Salah satu bentuk kegiatannya adalah evaluasi permasalahan, mendukung visi, misi bupati, membuat laporana manajemen risiko, penilaian risiko dan tidak membagikan password.
Manajemen Keamanan	4 OPD melaksanakan Manajemen Keamanan tidak ada satupun OPD yang memiliki standar atau framework untuk manajemen keamanan informasi. Sedangkan OPD menyatakan bahwa bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah mengganti password secara berkala.
Manajemen Data	5 OPD melaksanakan manajemen data 1 OPD Dinas Perpustakaan dan Perikanan menyatakan bahhwa framework atau standar yang digunakan adalah modul E-katalog, e-book. Sedangkan untuk bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 OPD adalah pengelolaan data perbidang, manajemen data sesuai standar atau framework, pengelolaan menggunakan excel, dan downliad data secara berkala.
Manajemen Aset TIK	9 OPD melaksanakan manajemen Aset TIK 1 OPD Badan Kesatuan Bngsa dan Plitik menyatakan bahwa framework atau standar yang digunakan adalah menyesuaikan bidang aset dari BKAD, sedangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah inventaris pelaporan, pembatasan akses pemakaian aset TIK, pelabelan Aset TIK, Pengelolaan Aset.
Manajemen Sumber Daya Manusia	3 OPD melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan belum memiliki framework atau standart kegiatan pelaksanaan manajemn SDM, sedangakn bentuk kegaitan yang dilaksanakan adalah pembagian tugas sesuai admin aplikasi pada dinas kesehatan, mengupdate data setiap triwulan.
Manajemen Pengetahuan	2 OPD melaksanakan manajemen pengetahuan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki standar atau framework dalam menerapkan manajemen pengetahuan dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan sub

Parameter	Eksisting
	bidang seksi mutu.
Manajemen Perubahan	4 OPD melaksanakan manajemen perubahan menyatakan bahwa belum memiliki standar atau framework dalam menerapkan manajemen perubahan. Sedangakn bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah menunjuk ASN sebagai agen perubahan, pelayanan kkesehatan sub bidang seksi mutu.
Manajemen Layanan	2 OPD melaksanakan manajemen layanan menyatkan bahwa dalam penerapan manajemen layana belum memiliki standar atau framework yang digunakan, namun bentuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan SIKDA dan KIOSK.

4.3 Identifikasi Gap Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang harus dicapai dari manajemen SPBE di Kabupaten Situbondo. Perbedaan dari kondisi saat ini dan kondisi ideal dijelaskan melalui gap manajemen SPBE. Penjelasan secara jelas dan detail dapat dilihat pada Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisa Gap Kabupaten Situbondo Bab 9. Penjelasan singkat dapat dilihat pada **Tabel 4.2.**

Tabel 4.2 Analisa Gap Manajemen SPBE

Parameter	Gap
Manajemen Risiko	30 OPD belum melaksanakan manajemen risiko. Bentuk kegiatan, framework atau pedoman pelaksanaan belum ada.
Manajemen Keamanan	36 OPD belum melaksanakan manajemen keamanan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Data	35 OPD belum melaksanakan manajemen data bentuk kegiatan, framework pelaksanaan ada namun belum sesuai pedoman atau peraturan yang ada.
Manajemen Aset TIK	31 OPD belum melaksanakan manajemen Aset TIK. Bantuk kegiatan dapat dikategorikan menerapkan manajemen Aset TIK namun bentuk belum memiliki standar atau framework yang digunakan belum ada.
Manajemen Sumber Daya Manusia	37 OPD belum melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Pengetahuan	38 OPD belum melaksanakan manajemen pengetahuan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Perubahan	36 OPD belum melaksanakan manajemen perubahan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada
Manajemen Layanan	38 OPD belum melaksanakan manajemen layanan bentuk kegiatan, framework pelaksanaan belum ada

4.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo. Indikator Manajemen SPBE yakni indikator 21 hingga 28 memperoleh rata-rata 1.37. Dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik didaptkan bahwa nilai tingkat kematangan untuk manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan adalah 1. Sedangkan Manajemen layanan SPBE sudah memiliki nilai tingkat kematangan 4.

4.4.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Maksud risiko disini adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian penerapan SPBE. Salah satu kerangka kerja manajemen risiko yang dapat digunakan adalah kerangka kerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tujuan dari Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
4. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE; dan
5. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

Selain itu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 juga disebutkan mengenai **tahapan pelaksanaan manejemen risiko** yaitu sebagai berikut:

1. **Komunikasi dan Konsultasi**

   Proses ini merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Bentuk kegiatan pada tahap ini antara lain adalah rapat berkala, rapat insidental dan FGD (*Focus Grub Discussion*)

2. **Penetapan Konteks Risiko SPBE**

Pada proses ini dilakukan identifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Terdapat beberapa tahapan dalam proses ini, yaitu:

a) **Inventarisasi Informasi Umum**

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Inventarisasi infromasi umum ini dilakukan dengan mencantumkan nama unit pemilik risiko (UPR) SPBE, Tugas UPR dan Fungsi UPR SPBE, dan Periode waktu pelaksanaan manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun.

b) **Identifikasi Sasaran SPBE**

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Identifikasi sasaran SPBE ini dilakukan dengan mencantumkan Sasaran UPR SPBE, Sasaran SPBE, Indikator Kinerja SPBE, Target Kinerja SPBE

c) **Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE**

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi Unit Pemilik Risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, Pengelola Risiko SPBE.

d) **Identifikasi Pemangku Kepentingan**

Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas

e) **Identifikasi Peraturan Perundang-undangan**

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.

f) **Penetapan Kategori Risiko SPBE**

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis, rencana dan anggaran, inovasi, kepatuhan terhadap peraturan, pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan/pengembangan sistem, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, layanan SPBE, layanan SPBE, SDM SPBE, dan bencana alam

g) **Penetapan Area Dampak Risiko SPBE**

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Pemerintah Daerah. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi finansial, reputasi, kinerja, layanan organisasi, operasional dan aset TIK, hukum dan regulasi, sumber daya manusia.

h) **Penetapan Kriteria Risiko SPBE**

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas kriteria kemungkinan dan dampak SPBE.

i) **Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE**

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka.

j) **Selera Risiko SPBE**

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE baik Risiko SPBE Positif maupun Risiko SPBE Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

3. **Penilaian Risiko SPBE**

Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap Sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:

1. **Identifikasi Risiko SPBE**

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang

dicantumkan meliputi jenis risiko SPBE, kejadian, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak.

2. **Analisa Risiko SPBE**

   Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi sistem pengendalian, level kemungkinan, level dampak, besaran risiko SPBE dan level risiko SPBE.

3. **Analisa Risiko SPBE**

   Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah ditentukan. Prioritas penanganan Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas *berdasarkan expert judgement*.

4. **Penanganan Risiko SPBE**

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi prioritas risiko, rencana penanganan risiko, rencana aksi penanganan risiko, keluaran, jadwal implementasi, penanggung jawab dan risiko residual.

5. **Pemantauan dan Reviu**

Pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE. Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan dan reviu dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (insidental) sesuai dengan kesepakatan dari Pemerintah Daerah.

6. **Pencatatan dan Pelaporan**

Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal

interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.

Selain itu, terdapat **framework lain** yang dapat digunakan untuk melaksanakan **Manajemen Risiko diantaranya adalah ISO 31000**. ISO 31000 mrupakan model proses tampaknya berlaku untuk manajemen risiko. Setiap organisasi akan menerapkan ISO 31000 dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, ada kerangka pokok yang akan selalu ditemukan di dalam setiap proses manajemen risiko organisasi. Kerangka pokok tersebut mencakup.

1. **Kepemimpinan dan Komitmen**

   Peran manajemen dari berbagai level sangatlah besar untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko yang efektif di dalam organisasi. Manajemen teratas terutama perlu menunjukkan perilaku kepemimpinan dan komitmen untuk meminimalisasi dampak negatif yang dapat terjadi di perusahaan. Manajemen bertugas untuk:

   - Mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh organisasi.
   - Memastikan bahwa sebanyak mungkin risiko telah dipertimbangkan dalam penyusunan tujuan organisasi.
   - Memastikan sistem yang mengelola risiko tersebut berjalan dengan baik.
   - Memastikan jika semua anggota organisasi memahami risiko dan cara mengelolanya.

2. **Integrasi**

   Di dalam melakukan integrasi ISO 31000, perlu ada pemahaman menyeluruh mengenai struktur organisasi dan juga konteksnya. Penyesuaian manajemen risiko dengan budaya dan kebutuhan organisasi harus dilakukan dengan baik

3. **Design atau Rancangan**

   Untuk merancang pengelolaan manajemen secara matang, pihak manajemen organisasi perlu mengimplementasikan langkah-langkah berikut:

   - Analisis konteks internal dan eksternal dari organisasi
   - Demonstrasi komitmen untuk menerapkan manajemen risiko, salah satunya dengan membuat kebijakan organisasi
   - Penentuan peran, tugas, akuntabilitas, dan otoritas setiap individu di dalam organisasi
   - Alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
   - Pembentukan jaringan komunikasi dua arah di dalam organisasi

4. **Implementasi**

Desain yang sudah dibuat oleh pihak manajemen kemudian diimplementasikan oleh organisasi. Agar implementasi dapat berjalan dengan lancar, stakeholder perlu memiliki kesadaran dan rasa keterlibatan untuk memastikan kesuksesannya.

5. **Evaluasi**

   Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah desain yang diimplementasikan sudah efektif. Evaluasi harus dilakukan secara rutin dengan mengkaji rencana implementasi, indikator evaluasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan perilaku yang muncul saat implementasi.

6. **Pengembangan**

   Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan nilai organisasi. Organisasi akan dihadapkan pada perubahan situasi yang bisa terjadi dengan tiba-tiba. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan itulah yang akan membantu organisasi untuk berkembang dengan optimal.

Kerangka ISO 3100 yang dijelaskan tersbut kemudian dapat dikembangan menjadi **proses yang bersifat lebih konkert.** Proses yang dimaksud anatar lain adalah:

1. **Penentuan Konteks Risiko**

   Bagian ini untuk mentukan risiko pada masing-masing Sub Bidang dalam Pemerintahan Daerah.

2. **Identifikasi Risiko**

   Tahap ini dilaksanakan Identifikasi terkait dengan risiko yang mungkin dapat terjadi. Identifikasi ini perlu didukung oleh data atau suaru kejadian yang telah terjadi

3. **Analisi Risiko**

   Tahap ini menganalisa hasil dari identifikasi risiko pada tahap identifikasi risiko. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan cara cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi risiko.

4. **Evaluasi Risiko**

   Berdasarkan hasil Analisa risiko tersebut dapat dibuat sebuah evaluasi atau penentuan cara agar tidak terjadi kesalahan dalam manejemn risiko.

5. **Penanganan Risiko**

   Bagian ini akan melaksanakan pemilihan metode penangan yang paling tepat untuk mengatasi manajemen risiko. Keputusan disesuaikan dnegan berdasarkan evaluasi risiko

6. **Komunikasi dan Konsultasi**

   Melakukan komunikasi dan konsultasi untuk mencegah terjadinya risiko.

7. **Monitoring dan reviu**

   Meriviu ulang kegiatan tersbut sudah berjalan dengan sesuai atau sudah dapat melkukan oencegahan terkait dengan risiko.

Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Situbondo satt ini. Terdapat sebanyak 10 OPD telah melaksanakan Manajemen Risiko sedangkan berdasarkan dari **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh unit OPD. Mengacu pada peraturan tersebut bahwa seluruh PD** perlu melakukan manajemen risiko untuk pada layananya. Sedangkan PD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah **inspektorat.** Hal ini selaras dengan fungsi inspektorat yakni melaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, **Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis manajemen risiko**. Hal ini selaras dengan fungsinya yaitu melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika.

4.4.2 Manajemen Keamanan Informasi

Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dapat menggunakan standar **ISO/IEC 27001**. Standar ini menetapkan persyaratan untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, peningkatan dan pemeliharaan Sistem Manajemen keamanan informasi (SMKI). ISO/IEC 27001 mengadopsi model *Plan* (Perencanaan dan mengimplementasikan), *Do* (Memonitoring dan melakukan pengecekan), *Check* (melihat, meninjau dan melakukan peningkatan dan mengembangkan), dan *Act* (memelihara SKMI). PDCA yang diterapkan untuk membentuk seluruh proses SMKI. Aspek dari SMKI juga ditinjau untuk meningkatkan dan menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi yang ada. Tahapan proses Sistem Manajemen Keamanan Informasi menurut ISO/IEC 27001 yakni, sebagai berikut:

1. Plan (Penetapan SMKI)
   Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SKMI yang sesuai untuk mengelola risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi hingga evaluasi dan penanganan risiko, dimana proses tersebut merupakan pelaksanaan manajemen risiko.
2. DO (Penerapan dan Pengoperasian SKMI)
   Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, pengendalian, proses dan prosedur SKMI.
3. *Check* (Pemantauan dan pengkajianSKMI)
   Mengakses dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SKMI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.
4. Act (Peningkatan dan Pemeliharaan SKMI)
   Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit SKMI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya, untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dalam SKMI

Proses penghitungan tingkat kematangan dari standarisasi ISO/IEC 27001 dapat dilihat dengan menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI merupakan alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI ditujukan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi bukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Peraturan atau pedoman Manajemen keamanan informasi juga mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang** Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pedoman pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi:

1. **Penetapan Ruang Lingkup**
   Penetapan Ruang Lingkup dilakukan dengan mendefinisikan isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi dan isu ekstrenal keamanan informasi SPBE. Proses ini jika pada ISO/IEC:27001 dapat dikatakn setara dengan proses penetapan SMKI.
2. **Penetapan Penanggung Jawab**
   Penetapan Penanggung Jawab dilakukan dengan menetapkan penanggung jawab manajemen keamanan informasi. Penanggung jawab memuliki salah satu tugas untuk menetapkan pelaksanaan teknis keamanan SPBE. Proses ini dalam ISO/IEC:27001 dapat dikatan setara dengan proses Penetapan SMKI.
3. **Perencanaan**
   Perencanaan dilakukan dengan merusmuskan program kerja keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko keamanan SPBE. Proses ini pada ISO/IEC:27001 setara proses penetapan SMKI.
4. **Dukungan Pengoperasian**
   Dukungan pengoperasian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kapasitas terhadap sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan anggaran Keamanan SPBE. Proses ini setara dengan proses penerapan dan pengoperasian SMKI pada ISO/IEC: 27001.
5. **Evaluasi Kerja**
   Evaluasi kerja dilaksanakan untuk mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko keamanan SPBE yang tinggi, menetapkan indikator kinerja pada area proses, memformulasi pelaksanaan keamanan SPBE,

menganalisis efektivitas pelaksanaan keamanan SPBE dan mendukung serta merealisasikan program audit keamanan SPBE. Proses ini setara dengan proses pemantauan dan pengkajian SMKI pada ISO/IEC: 27001.

6. **Perbaikan Berkelanjutan**
   Perbaikan Berkelanjutan dilaksanakan untuk Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE, dan memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik. Proses ini setara dengan proses peningkatan dan pemeliharaan SMKI pada ISO/IEC: 27001.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan manajemen keamanan di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat sebanyak 4 OPD yang melaksanakan Manajemen Keamanan sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen keamanan informasi adalah 1. Kondisi ideal yang untuk penerapan manajemen keamanan informasi mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk naik ketingkat 2 dan 3 dapat dilaksanakan pengendalian keamanan informasi pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan terpenuhi, terkendalinya keamanan informasi dilakukan melalui strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh tim Koordinasi**. PD yang bertanggung jawab atas manajemen keamanan informasi adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika.** Hal ini selaras dengan tugas dari **Bidang Persandian yaitu sebagai pelaksana** perumusan kebijakan pengelolaan keamanan data informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

4.4.3 Manajemen Data

Pelaksanaan manajemen data telah diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. Berikut prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai Satu Data Indonesia berdasarkan PERPRES Nomor 39 Tahun 2019:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Selanjutnya berdasarkan Pada PERPRES Nomor 39 Tahun 2019, terdapat beberapa **rangkaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia** yaitu meliputi:

1. **Perencanaan Data**

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Dalam menyusun daftar data yang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya harus menghindari duplikasi data. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau rekomendasi Pembina Data.

Daftar data yang dikumpulkan harus memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan usulan Walidata tingkat pusat dan arahan dari Dewan Pengarah. Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
2. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. memenuhi kebutuhan mendesak.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia meliputi:

1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. kegiatan terkait pengumpulan Data;
4. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
5. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
6. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

2. **Pengumpulan Data**

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata. Penyampaian Data disertai data yang telah dikumpulkan, standar data

yang berlaku untuk data tersebut, dan metadata yang melekat pada data tersebut.

3. **Pemeriksaan Data**

   Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Apabila data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data. Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud selanjutnya diperiksa kembali oleh Pembina Data. Apabila Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata. Selanjutnya Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.

4. **Penyebarluasan Data**

   Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu manajemen data juga disebutkan oleh ***The Data Management Association*** **(DAMA) dalam** ***Data Management Body of Knowledge*** **(DMBOK).** Tata kelola data dinyatakan sebagai bagian dari manajemen data yang memberikan pendekatan model tata kelola data secara fungsional. Adapun **11 fungsi manajemen** data pada DAMA yaitu meliputi:

1. **Tata Kelola Data:** Meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan penggunaan data.
2. **Manajemen Arsitektur Data:** Merupakan bagian mengintegrasikan arsitektur enterprise. Dalam hal ini yang dilakukan adalah mereview memvalidasi, menyetujui, dan filterisasi ulang arsitektur data.
3. **Pembangunan Data:** Meliputi analisis, perancangan, pembangunan dan pengujian, pendistribusian serta pemeliharaan. Dalam hal ini melakukan mendefinisikan kebutuhan dan spesifikasi data yang diorganisasikan analis dan arsitek data kedalam model data lojik. Dalam hal ini juga memvalidasi model fisik data dan desain basis data, berpartisipasi dalam pengujian dan konversi basisdata, dan memastikan konsistensi penggunaan istilah dalam dokumentasi dan pelatihan.
4. **Manajemen Operasional Basis Data:** Mendukung struktur fisik aset data mendefinisikan kebutuhan untuk pemulihan dan performansi data, dan

membantu layanan level di area ini. Pada fungsi ini juga termasuk mengidentifikasi, memperoleh dan mengawasi sumber data eksternal.

5. **Manajemen Keamanan Data:** Menjamin privasi, kepercayaan dan hak akses. Dalam hal ini menyediakan kebutuhan keamanan, kepercayaan dan privasi, mengidentifikasi isu keamanan data, membantu dalam audit keamanan data, dan mengklasifikasikan kerahasiaan dalam dokumen dan produk informasi lainnya.
6. **Manajemen Integrasi Data dan Interoperabilitas:** Melakukan integrasi data dengan merubah data menjadi bentuk yang konsisten, baik secara fisik maupun virtual. Sedangkan interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dapat berkomunikasi dengan beberapa sistem.
7. **Manajemen Referensi dan Data Master:** Mengelola versi utama dan replika data, mengawasi pembuatan, pengubahan dan penghapusan kode dan data referensi lain, mendefinisikan kebutuhan manajemen master data, mengidentifikasi isu manajemen master data.
8. **Manajemen Data *Warehouse* dan Intelijen Bisnis:** Membuka akses dalam memberikan data yang mendukung keputusan dalam hal pelaporan dan analisis. Menyediakan kebutuhan intelijen bisnis dan metrik manajemen, dan mengidentifikasi isu intelijen bisnis.
9. **Manajemen Dokumen dan Konten:** Meliputi penyimpanan, perlindungan, indeks dan hak akses untuk menemukan data yang tidak terstruktur. Membuat dan mengelola metadata bisnis (nama, arti, aturan bisnis), mendefinisikan akses metadata dan kebutuhan integrasi, dan menggunakan metadata untuk membuat kepengurusan data dan keputusan tata kelola yang efektif. Mendefinisikan dan mengelola metadata bisnis merupakan jantung kepengurusan data.
10. **Manajemen Metadata:** Mengintegrasikan, mengendalikan dan mendistribusikan metadata.
11. **Manajemen Kualitas Data:** Mendefinisikan, mengawasi dan melakukan improvisasi kualitas data. Mendefinisikan kebutuhan kualitas data dan aturan bisnis, edit dan validasi aplikasi tes, membantu analisa, sertifikasi, audit kualitas data, memimpin usaha pembersihan data, mengidentifikasikan cara yang proaktif untuk mensolusikan penyebab utama rendahnya kualitas data, mempromosikan kesadaran tentang kualitas data dan memastikan kebutuhan kualitas data ditemukan. secara efektif menampilkan dan menganalisis kualitas data dalam hubungan dengan profesional data.

Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Situbondo satt ini. Terdapat sebanyak 5 OPD telah melaksanakan Manajemen Risiko sedangkan berdasarkan dari **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh unit OPD. Mengacu pada peraturan tersebut bahwa** kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. dan **seluruh OPD**, mengimplementasikan

mengacu pada pedoman manajemen keamanan data, data induk, arsitektur data, data referensi, basis data dan kualitas data. Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo terdapat Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo. Pada peraturan ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pelaksanaan satu data indonesia. Jadi berdasarkan hasil analisa Seluruh PD memiliki kewajiban untuk melakukan manajemen data. Selain itu perumusan kebijakan pengelolaan keamanan data informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk penanggung jawab pelaksanaan manajemen data adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.** Hal tersebut selaras dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dari **Bidang Persandian** yaitu perumusan kebijakan pengelolaan keamanan data informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. sedangkan untuk **tugas dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dari Bagian Umum dan Kepegawaian** merupakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi kepegawaian.

4.4.4 Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen Aset TIK merupakan manajemen yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK dalam SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan manajemen aset TIK adalah **ITIL 4.0 *"Asset Management"*.** Pelakasanaan manajemen aset TIK berdasarkan ITIL meliputi semua perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, *cloud services* dan perangkat client. Manajemen aset mencangkup pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pembuangan dari aset organisasi yang kritikal. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur daur hidup aset dan pengeluaran biaya dari peralatan dan infrastruktur TI. Kebutuhan aktivitas manajemen aset dapat berbeda tergantung jenis aset tersebut, seperti:

1. **Perangkat Keras**
   Pada tahapan ini dilakukan pemberian label perangkat keras Aset harus diberi label untuk kejelasan dalam identifikasi. Informasi yang perlu diketahui adalah lokasi aset untuk dapat melindungi aset dari pencurian atau kerusakan.
2. **Perangkat Lunak**
   Pada tahapan ini dilakukan pelindungan dari penyalinan aset TIK yang tak sesuai peraturan. Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan lisensi dipatuhi dan lisensi hanya digunakan kembali dengan cara yang diizinkan berdasarkan kontrak.
3. ***Cloud-based***
   Pada tahapan ini aset harus terdaftar di spesifik produk atau kelompok, sehingga biayanya dapat dikelola. Biaya harus dikelola sehingga organisasi memiliki fleksibilitas untuk meminta fitur baru atau

penggunaan cloud saat dibutuhkan, dan untuk menghapus fitur yang tidak diperlukan, tanpa risiko biaya yang tidak terkendali.

4. **Perangkat client**
   Pada tahapan ini aset harus diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas perawatan mereka. Proses diperlukan untuk mengelola perangkat yang hilang atau dicuri, dan alat mungkin diperlukan untuk menghapus data sensitif darinya atau memastikan bahwa data ini tidak hilang atau dicuri dengan perangkat.

Berdasarkan **ITIL 4.0 "*Asset Manajement*",** Terdapat bebrapa aktivitas yang harus dilakukan dalam melaksanakan manajemen aset yaitu meliputi:

1. Mendefinisikan, mengisi, dan memelihara daftar aset dalam hal struktur dan konten, dan fasilitas penyimpanan untuk aset dan media terkait.
2. Mengontrol siklus hidup aset (misalnya, memutakhirkan perangkat lunak usang atau memasukkan anggota staf baru dengan laptop dan ponsel) dan mencatat semua perubahan aset (status, lokasi, karakteristik, penugasan, dll).
3. Menyediakan data terkini dan historis, laporan, dan dukungan untuk praktik lain tentang aset TI.
4. Mengaudit aset, media terkait, dan kesesuaian (terutama dengan peraturan, dan syarat dan ketentuan lisensi) dan mendorong perbaikan korektif dan preventif untuk menangani masalah yang terdeteksi.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 9 OPD yang melaksanakan manajemen Aset TIK. berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen keamanan informasi adalah 1. Kondisi ideal yang untuk penerapan manajemen keamanan informasi mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen Aset TIK harus dilaksanakan pada seluruh OPD. Sedangkan OPD yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen aset TIK adalah **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. Hal tersebut selaras dengan Tugas dari PD Badan Keuangan dan Aset daerah yaitu melaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

4.4.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan manajemen Sumber Daya Manusia adalah ITIL 4.0 "*Workforce & Talent Management*" dan Peta Okupasi Nasional area fungsi TIK BNSP. Praktik manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dan dalam peran yang benar untuk mendukung tujuan bisnisnya. Hal ini bermanfaat bagi organisasi untuk mengurangi backlog,

meningkatkan kualitas, menghindari pengerjaan ulang yang disebabkan oleh cacat, dan mengurangi waktu tunggu sambil juga menutup kesenjangan pengetahuan dan keterampilan.

Manajemen Sumber Daya Manusia memungkinkan organisasi, pemimpin, dan manajer untuk fokus dalam menciptakan strategi orang yang efektif dan dapat ditindaklanjuti, dan untuk menjalankan strategi itu di berbagai tingkatan dalam organisasi. Strategi yang baik harus mendukung identifikasi peran dan pengetahuan terkait, serta keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjaga organisasi tetap berjalan dari hari ke hari. Hal ini juga harus mengatasi teknologi yang muncul dan kepemimpinan dan kemampuan perubahan organisasi yang diperlukan untuk memosisikan organisasi untuk pertumbuhan di masa depan. Aktivitas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia meliputi:

1. **Perencanaan Tenaga Kerja**
   Menerjemahkan strategi dan tujuan organisasi ke dalam kemampuan organisasi yang diinginkan, dan kemudian menjadi kompetensi dan peran.
2. **Rekrutmen**
   Akuisisi karyawan dan kontraktor baru untuk mengisi kesenjangan yang teridentifikasi terkait dengan kemampuan yang diinginkan.
3. **Pengukuran Kinerja**
   Penyampaian pengukuran dan penilaian kinerja reguler terhadap peran pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya.
4. **Pengembangan Pribadi**
   Penggunaan peran pekerjaan dan kerangka kompetensi yang dipublikasikan oleh karyawan untuk secara proaktif merencanakan pertumbuhan dan kemajuan pribadi.
5. **Pembelajaran dan Pengembangan**
   Pendidikan yang ditargetkan dan kesempatan belajar berdasarkan pengalaman menggunakan berbagai metode formal dan non-formal.
6. **Pendampingan dan Prencanaan Suksesi**
   Pendampingan formal, keterlibatan, dan kegiatan perencanaan suksesi disediakan oleh pimpinan.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia, berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Sumber Daya Manusia adalah 1. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Sumber Daya Manusia mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** menyatakan bahwa kriteria ideal merupakan terpenuhinya kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis memerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. PD yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya**

Manusia. Hal ini selaras dengan tugas dari **Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** dengan tugas sebagai pelaksanaan urusan kepegawaian.

4.4.6 Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan TIK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah ITIL 4.0 "Knowledge Management". Pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam ITIL bertujuan untuk membantu membuat keputusan selama proses layanan dengan mengontrol dan mengelola aliran informasi. Manajemen pengetahuan dapat memastikan bahwa pengetahuan yang didistribusikan kepada karyawan akurat, andal, dan dapat dipercaya. Meningkatkan kualitas informasi mempersiapkan karyawan untuk membuat keputusan yang efektif, dan hasil akhirnya adalah tim yang lebih efisien. Proses manajemen pengetahuan dipecah menjadi aktivitas kunci yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proses, yaitu:

1. **Strategi Manajemen Pengetahuan**

   Membuat startegi untuk mengidentifikasi informasi yang harus diproses melalui manajemen pengetahuan. Strategi harus didokumentasikan untuk memastikan semua anggota paham terhadap tujuan yang diharapkan. Langkah pertama untuk menciptakan strategi manajemen pengetahuan adalah mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada di tim layanan TI. Kesenjangan pengetahuan didefinisikan sebagai perbedaan antara pengetahuan yang dibutuhkan service desk TI dan pengetahuan yang ada yang digunakannya saat ini. Beberapa cara untuk mendapatkan data yang relevan secara internal dari *service desk* TI adalah mengenali pola dan tren dalam insiden yang berulang, mengidentifikasi kategori/sub kategori dengan insiden terbanyak, dan survei dari pengguna akhir atau pelanggan. Pengetahuan dari sumber eksternal dapat diperoleh dari database, situs web, pelanggan, pemasok, pesaing, dan mitra.

2. **Transfer Pengetahuan**

   Tahap ini akan menjelaskan bagaimana memustuskan pengetahuan akan ditransfer di antara anggota tim dan antar departemen. Pengetahuan yang dikumpulkan, dianalisis, dan disimpan perlu dibagikan ke tim lain ketika mereka menggunakan berbagai proses di service desk seperti insiden, masalah, manajemen proyek, dll. Dalam hal ini, transfer pengetahuan dapat terjadi melalui program pendampingan, *work shadowing* serta bekerja berpasangan.

3. **Manajemen Informasi**

   Pengelolaan informasi dilakukan denggan mendistribusikan data dnegan benar kepada seluruh tim. Akses informasi sangat penting untuk proses manajemen pengetahuan. Manajemen informasi merupakan bagian dari proses dari proses yang melibatkan pengumpulan data, pengelolaan informasi, dan menentukan bagaimana informasi ini akan diterjemahkan menjadi pengetahuan. Kebijakan dan prosedur dapat dibuat menggunakan informasi, tetapi harus terlebih dahulu membuat proses untuk mengatur informasi ini ke dalam prosedur dan mencatatnya dalam manual yang dapat diakses oleh anggota tim sesuai kebutuhan.

4. **SMKS**

   Service Knowledge Manajement System (SKMS) merupakan kumpulan sistem, alat, dan database yang digunakan untuk manajemen pengetahuan.

   Ada dua bagian penting dari SKMS, yaitu CMS dan CMDBs. *Configuration Management System* (CMS) mengelola semua informasi konfigurasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Laporan insiden, kesalahan yang dibuat, dan umpan balik adalah bagian dari sistem ini. *Configuration Management Databases* (CMDBs) berisi potongan-potongan kunci dari data konfigurasi yang telah dimasukkan ke dalam database. SKMS juga berisi beberapa lapisan yang memungkinkan informasi diproses sebagai pengetahuan dan tersedia untuk anggota tim dan orang lain dalam organisasi melalui alat dan basis data. Berikut adalah 4 lapisan SMKS:

   1. **Lapisan Presentasi**

      Lapisan ini pengguna disajikan dengan metri visual yang memungkinkan mereka untuk mencari, menelusuri, dan memperbaharui informasi mereka yang ditemukan dalam sistem.

   2. **Lapisan Pemrosesan**

      Lapisan ini memungkinakan pengguna untuk melaporkan informasi yang dapat dianalisis. Manajemen kinerja juga merupakan bagian dari lapisan ini dan dapat digunakan untuk menentukan apakah anggota tim memenuhi sasaran kinerja.

   3. **Lapisan Integrasi Informasi**

      Mengintegrasikan semua informasi dari bagian organisasi yang relevan di satu tempat. Jika organisasi memiliki mitra, informasi yang terkait dengan mitra ini juga dapat ditemukan di lapisan ini.

   4. **Lapisan Integrasi Data**

      Mengintegrasikan data yang harus dikelola untuk proses Manajemen Pengetahuan yang sukses dengan mengelola aplikasi, dokumen, dan file. Sumber data ditemukan di lapisan

ini, serta alat yang dapat digunakan anggota tim untuk menerapkan data sebagai pengetahuan dengan benar

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan manajemen Pengetahuan, berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Pengetahuan adalah 1. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Pengetahuan mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** bahwa kondisi ideal untuk manajemen pengetahuan yaitu dengan telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa **seluruh PD** harus melaksanakan manajemen pengetahuan. Penanggung jawan dari pelaksanaan manajemen pengetahuan adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika** khususnya Bidang Persandian yakni mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar, **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan tugas sesuai SOTK yakni melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Penanggung jawab lain yakni **Sekretariat di setiap PD**. Hal tersebut selaras dengan tugas dari **Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur** yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur, kesejahteraan aparatur. Sekretariat sendiri memiliki tugas untuk pengelolaan urusan kepegawaian.

4.4.7 Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan TIK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 menyatakan bahwa manajemen perubahan merupakan manajemen yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan adalah **adalah ITIL 4.0 *"Change Control"* dan *"Organization Change Management"*.** Misi dari proses manajemen perubahan TI adalah untuk menerapkan perubahan dengan cara yang paling efisien, sambil meminimalkan dampak negatif pada pelanggan ketika perubahan diterapkan. Sebelum menggunakan prosedur ITIL, terlebih dahulu harus ditetapkan peran sebagai berikut:

1. **Inisiator Perubahan**: mengakui dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan. Inisiator perubahan harus seseorang yang bekerja secara langsung dengan alat layanan dukungan.
2. **Koordinator Perubahan**: menilai permintaan untuk perubahan yang berasal dari manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen rilis, atau manajemen kontinuitas. Koordinator perubahan mendaftarkan

perubahan yang diperlukan untuk menangani permintaan perubahan atau menerima permintaan perubahan dari pemrakarsa perubahan lainnya; menentukan risiko dan dampak perubahan yang diminta; menyiapkan rencana implementasi dengan membuat tugas; dan memantau kemajuan perubahan.

3. **Manajer perubahan**: umumnya diperlukan dalam organisasi menengah dan besar. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengelola prosedur perubahan, menerima dan memprioritaskan permintaan perubahan, mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan permintaan, dan menyimpan catatan menyeluruh tentang hasil setiap perubahan.
4. **Dewan Penasehat Perubahan**: bertanggung jawab untuk otorisasi perubahan dan selanjutnya mengevaluasi permintaan ketika manajer perubahan menentukan bahwa ada resiko tinggi yang terkait dengan permintaan ini. Dewan memperhitungkan dampak perubahan yang diminta terhadap semua pihak yang terkena dampak. Ketika perubahan berisiko tinggi ini menjadi perhatian dewan penasehat perubahan, dewan akan menjadwalkan pertemuan dengan agenda terperinci untuk menentukan bagaimana melanjutkannya.
5. ***Approver:*** memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak perubahan.
6. **Tim Implementasi**: Perubahan merupakan tim yang bertanggung jawab untuk benar-benar membuat perubahan. Manajer TI, akan sering bertanggung jawab untuk mengawasi perubahan.

Terdapat berbagai jenis permintaan perubahan atau kelas perubahan yang biasanya dikelola dengan cara yang benar. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengelola permintaan perubahan atau kelas perubahan yaitu:

1. **Perubahan standar** adalah perubahan pada layanan atau infrastruktur TI di mana proses implementasi dan risikonya diketahui di muka. Perubahan ini dikelola sesuai dengan kebijakan yang sudah dimiliki oleh organisasi TI. Karena perubahan ini tunduk pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, perubahan tersebut adalah yang paling mudah untuk diprioritaskan dan diterapkan, dan seringkali tidak memerlukan persetujuan dari perspektif manajemen risiko.
2. **Perubahan normal** adalah perubahan yang harus melalui proses perubahan sebelum disetujui dan diimplementasikan. Jika berisiko tinggi, dewan penasihat perubahan harus memutuskan apakah perubahan akan diterapkan atau tidak.
3. **Perubahan darurat** muncul ketika terjadi kesalahan atau ancaman yang tidak terduga, seperti ketika cacat pada infrastruktur yang terkait dengan layanan perlu segera ditangani. Ancaman keamanan adalah contoh lain dari situasi darurat yang mengharuskan perubahan segera dilakukan.

Berikut merupakan **prosedur** yang merupakan bagian dari proses menajamen perubahan menggunakan framework ITIL.

1. **Membuat Permintaan Perubahan**

   Detail yang dapat ditemukan dalam permintaan perubahan meliputi:

   1. Insiden yang memerlukan perubahan
   2. Deskripsi tentang bagaimana perubahan akan diterapkan
   3. Dampak perubahan itu pada semua sistem terkait
   4. Sebuah penilaian risiko
   5. Informasi kontak untuk semua orang yang terlibat dalam perubahan
   6. Garis besar tentang siapa yang perlu menyetujui permintaan
   7. Rencana cadangan untuk diikuti jika perubahan tidak berhasil

2. **Meninjau dan Menilai Permintaan Perubahan**
   Mengevaluasi permintaan berdasarkan kepraktisan dan prioritasnya. Proses menentukan apakah permintaan tersebut masuk akal dan memberikan umpan balik terkait permintaan tersebut. Jika permintaan terkait dengan masalah yang telah ditangani atau tidak praktis untuk diterapkan, permintaan tersebut akan dikesampingkan. Permintaan praktis akan dievaluasi sesuai dengan pencetus permintaan, dampak perubahan yang akan terjadi pada perusahaan, perkiraan pengembalian investasi yang dilakukan sehubungan dengan permintaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Selain itu ditentukan pula siapa yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, dan kemampuan pelaksana untuk mendedikasikan waktu untuk membuat perubahan.
3. **Merencanakan Perubahan**
   Setelah permintaan perubahan dibuat, perlu direncanakan perubahan seolah-olah itu akan terjadi. Rencana perubahan menguraikan arah perubahan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perubahan, dan timeline untuk implementasi.
4. **Menguji Perubahan**
   Jika perubahan terkait dengan debugging perangkat lunak atau mengubah sistem, mungkin perlu menguji perubahan sebelum disetujui. Tes skala kecil akan menunjukkan prosedur yang harus diikuti jika permintaan perubahan disetujui. Menguji perubahan juga memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah apa pun dalam prosedur yang telah dikembangkan.
5. **Membuat Proposal Perubahan**
   Proposal perubahan menguraikan jenis perubahan, prioritas yang terkait dengan permintaan perubahan, dan hasil yang dapat terjadi jika perubahan tidak dilakukan. Proposal akan diberikan kepada orang yang diberi wewenang untuk mengizinkan perubahan, jadi penting bagi untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang mengapa perubahan perlu dilakukan. Misalnya, perubahan dengan tingkat prioritas tinggi dapat mengakibatkan

pemadaman yang akan mempengaruhi pelanggan dan mengakibatkan kerugian pendapatan. Orang-orang yang mengizinkan perubahan juga harus menyadari beratnya dampak jika perubahan tidak dilakukan.

6. **Menerapkan Perubahan**
   Menerapkan perubahan bukanlah proses yang sederhana. Perubahan harus dibangun selama proses perencanaan, dan implementasi hanyalah salah satu langkah dalam proses manajemen perubahan. Setelah perubahan dibuat, pengujian harus dilakukan untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Jika perubahan tidak berhasil, metode remediasi dapat digunakan untuk menentukan apa yang salah dan menerapkan rencana pencadangan untuk mengatasi masalah yang memerlukan permintaan perubahan.
7. **Meninjau Perubahan Kinerja**
   Tinjauan pasca-implementasi adalah bagian penting dari proses manajemen perubahan. Ini bertujuan untuk memahami apakah prosedur perubahan Anda berfungsi seperti yang diharapkan. Ini termasuk meninjau catatan untuk menentukan apakah perubahan berhasil atau gagal, dan mencatat rincian tentang waktu dan biaya perubahan untuk menentukan keakuratan perkiraan yang dibuat sebelum permintaan dipenuhi. Meninjau kinerja perubahan memberi kesempatan untuk menyempurnakan proses manajemen perubahan Anda untuk hasil yang lebih baik di masa depan.
8. **Menutup Proses**
   Setelah proses perubahan selesai, seluruh proses harus telah didokumentasikan dalam database yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Setelah dokumentasi ini dibuat, proses ditutup.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 4 OPD yang melaksanakan manajemen Perubahan, berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Perubahan adalah 1. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Penrubahan mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** menyatakan bahwa Kegiatan Manajemen Perubahan dilaksanakan oleh **seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait.** Dengan Penanggung jawab **Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat di setiap PD**. Hal ini selaras dengan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta fungsi Sekretariat yaitu melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika kepada Pemeritah Daerah. Pada Manajemen Perubahan ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia sistem atau platform untuk PD -PD melaksanakan manajemen pengetahuan secara tersistem atau elektronik.

4.4.8 Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

Dalam rangka mewujudkan layanan SPBE yang baik, dapat menggunakan *best pratice* yang disediakan oleh ITIL. Pelaksanaan manajemen layanan dapat mengacu dari beberapa proses yang ada di ITIL 4.0 yaitu ***service desk, incident management, problem management, monitoring & event management*** **dan** ***service request management***.

1. **Service Desk**

   Service desk menyediakan berbagai saluran untuk akses termasuk telepon, portal layanan dan aplikasi mobile, chatting, email, service desk langsung, dan media sosial. Betapa pun efisiennya service desk dan orang-orangnya, akan selalu ada masalah yang membutuhkan eskalasi dan dukungan pendukung dari tim lain. Tim dukungan dan pengembangan perlu bekerja sama erat dengan service desk untuk menyajikan dan memberikan pendekatan 'kombinasi' kepada pengguna dan pelanggan.

   Staf service desk memerlukan pelatihan dan kompetensi dalam keterampilan teknis dan bisnis, terutama keterampilan layanan pelanggan seperti empati, analisis insiden dan penentuan prioritas, komunikasi yang efektif, dan kecerdasan emosional. Keterampilan utama adalah untuk dapat sepenuhnya memahami dan mendiagnosis insiden tertentu dalam hal prioritas bisnis, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya, menggunakan keterampilan, pengetahuan, orang, dan proses yang tersedia.

2. **Manajemen Insiden**

   Manajemen insiden tidak diharapkan untuk melakukan analisis akar penyebab untuk mengidentifikasi mengapa suatu insiden terjadi. Sebaliknya, fokusnya adalah melakukan apa pun yang diperlukan untuk memulihkan layanan. Ini sering membutuhkan penggunaan perbaikan sementara, atau solusi. Di ITIL, insiden melalui alur kerja terstruktur yang mendorong efisiensi dan hasil terbaik bagi penyedia dan pelanggan. Proses insiden memberikan penanganan insiden yang efisien, yang pada gilirannya memastikan waktu kerja layanan yang berkelanjutan. **ITIL merekomendasikan proses manajemen insiden untuk mengikuti langkah-langkah berikut**:

   - **Identifikasi Insiden**

     Sumber pelaporan insiden termasuk walk-up, layanan mandiri, panggilan telepon, email, obrolan dukungan, dan pemberitahuan otomatis, seperti perangkat lunak pemantauan jaringan atau utilitas pemindaian sistem. Service desk kemudian memutuskan apakah masalah tersebut benar-benar insiden atau permintaan. Permintaan dikategorikan dan ditangani secara berbeda dari insiden, dan mereka termasuk dalam pemenuhan permintaan.

   - **Pencatatan Insiden**

Setelah diidentifikasi sebagai insiden, service desk mencatat insiden tersebut sebagai tiket. Tiket harus menyertakan informasi, seperti nama pengguna dan informasi kontak, deskripsi insiden, serta tanggal dan waktu laporan. Proses logging juga dapat mencakup kategorisasi, prioritas, dan langkah-langkah yang diselesaikan oleh service desk.

- **Kategorisasi Insiden**

  Kategorisasi insiden merupakan langkah penting dalam proses manajemen insiden. Kategorisasi melibatkan menetapkan kategori dan setidaknya satu subkategori untuk insiden tersebut. Tindakan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, memungkinkan service desk untuk mengurutkan dan memodelkan insiden berdasarkan kategori dan subkategorinya. Kedua, memungkinkan beberapa masalah untuk diprioritaskan secara otomatis. Tujuan ketiga adalah untuk menyediakan pelacakan insiden yang akurat.

- **Prioritas Insiden**

  Prioritas insiden penting untuk kepatuhan respons SOP. Prioritas insiden ditentukan oleh dampaknya terhadap pengguna dan bisnis serta urgensinya. Urgensi adalah seberapa cepat resolusi diperlukan; dampak adalah ukuran sejauh mana potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh insiden tersebut.

- **Tanggapan Insiden**

  Setelah diidentifikasi, dikategorikan, diprioritaskan, dan dicatat, service desk dapat menangani dan menyelesaikan insiden tersebut. Penyelesaian insiden melibatkan lima langkah:

  1. Diagnosa awal. Ini terjadi ketika pengguna menjelaskan masalahnya dan menjawab pertanyaan pemecahan masalah.
  2. Eskalasi insiden. Ini terjadi ketika insiden memerlukan dukungan lanjutan, seperti mengirim teknisi di lokasi atau bantuan dari staf pendukung.
  3. Investigasi & diagnosis. Proses ini berlangsung selama pemecahan masalah ketika hipotesis insiden awal dikonfirmasi sebagai benar. Setelah insiden didiagnosis, staf dapat menerapkan solusi, seperti mengubah pengaturan perangkat lunak, menerapkan patch perangkat lunak, atau memesan perangkat keras baru.
  4. Resolusi & pemulihan. Ini adalah saat service desk mengonfirmasi bahwa layanan telah dipulihkan.
  5. Penutupan insiden. Pada titik ini, insiden dianggap selesai dan proses insiden berakhir.

3. **Manajemen Masalah**

Ketika pengguna terus menghadapi insiden yang sama tanpa penyelesaian, mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan service desk

untuk menyelesaikan masalah apa pun. Oleh karena itu tujuan utama dari manajemen masalah adalah untuk mengidentifikasi, memecahkan masalah, mendokumentasikan, dan menyelesaikan akar penyebab insiden berulang. Proses manajemen masalah ITIL memiliki beberapa langkah, yaitu:

1. **Mendeteksi Masalah**

   Masalah muncul baik melalui eskalasi dari service desk, atau melalui evaluasi proaktif pola insiden dan peringatan dari manajemen event atau proses peningkatan layanan berkelanjutan. Tanda-tanda masalah termasuk insiden yang terjadi di seluruh organisasi dengan kondisi serupa, insiden yang berulang meskipun pemecahan masalah berhasil, dan insiden yang tidak dapat diselesaikan di service desk.

2. **Mencatat Masalah**

   Data masalah terkait, seperti waktu dan tanggal kejadian, insiden terkait, gejala, langkah pemecahan masalah sebelumnya, dan kategori masalah, semuanya membantu tim manajemen masalah meneliti akar masalahnya.

3. **Mengategorikan Masalah**

   Kategorisasi masalah harus sesuai dengan kategorisasi insiden. Kategorisasi insiden (dan masalah) melibatkan penetapan kategori utama dan sekunder untuk masalah tersebut.

4. **Memprioritaskan Masalah**

   Prioritas masalah ditentukan oleh dampaknya terhadap pengguna dan bisnis serta urgensinya.

5. **Penyelidikan & Diagnosis Masalah**

   Kecepatan di mana masalah diselidiki dan didiagnosis tergantung pada prioritas yang ditetapkan. Masalah dengan prioritas tinggi harus selalu ditangani terlebih dahulu, karena dampaknya terhadap layanan adalah yang terbesar. Kategorisasi yang benar membantu di sini, karena mengidentifikasi tren lebih mudah ketika kategori masalah berkorelasi dengan kategori insiden. Diagnosis biasanya melibatkan analisis insiden yang mengarah ke laporan masalah serta pengujian lebih lanjut yang mungkin tidak dapat dilakukan di tingkat service desk, seperti analisis log lanjutan.

6. **Mengidentifikasi Solusi Untuk Masalah**

   Solusi harus selalu ditunjukkan, karena masalah tidak diselesaikan di tingkat insiden. Solusi memungkinkan service desk untuk memulihkan layanan kepada pengguna saat masalah sedang diselesaikan. Masalah dianggap terbuka sampai diselesaikan, jadi solusi hanya boleh dianggap sebagai tindakan sementara.

7. **Meningkatkan Catatan Kesalahan Yang Diketahui**

   Setelah solusi telah diidentifikasi, itu harus dikomunikasikan kepada staf dalam organisasi sebagai kesalahan yang diketahui. Ini praktik yang baik untuk merekam kesalahan yang diketahui baik di

basis pengetahuan insiden dan apa yang disebut ITIL sebagai known error database (KEDB). Mendokumentasikan solusi memungkinkan service desk untuk menyelesaikan insiden dengan cepat dan menghindari masalah lebih lanjut yang diangkat pada masalah yang sama.

8. **Menyelesaikan Masalah**

   Masalah harus diselesaikan bila memungkinkan. Resolusi menyelesaikan penyebab yang mendasari serangkaian insiden dan mencegah insiden tersebut berulang. Beberapa resolusi mungkin memerlukan dewan manajemen perubahan, karena dapat memengaruhi tingkat layanan. Semua risiko harus dievaluasi dan diperhitungkan sebelum menerapkan resolusi. Dokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dalam basis pengetahuan organisasi.

9. **Menutup Masalah**

   Langkah ini seharusnya hanya terjadi setelah masalah diangkat, dikategorikan, diprioritaskan, diidentifikasi, didiagnosis, dan diselesaikan. Sementara banyak organisasi berhenti pada langkah ini, itu bukan yang terakhir menurut ITIL.

10. **Meninjau Masalah**

    Ini juga dikenal sebagai tinjauan masalah utama. Tinjauan masalah utama adalah kegiatan organisasi yang mencegah masalah di masa depan. Selama peninjauan, tim manajemen masalah mengevaluasi dokumentasi masalah dan mengidentifikasi apa yang terjadi dan mengapa. Tinjauan masalah ini harus menghasilkan proses yang lebih baik, pelatihan staf, atau dokumentasi yang lebih lengkap.

4**. Event Manajement**

Selama fase desain layanan TI organisasi, organisasi harus menentukan jenis peristiwa mana yang perlu dibuat, dan bagaimana peristiwa itu akan dihasilkan, untuk setiap jenis item konfigurasi (CI) yang terlibat dalam penyampaian layanan. Siklus hidup event management adalah:

1. **Terjadinya Event**

   Dalam event management ITIL, kuncinya adalah menentukan jenis kejadian yang signifikan bagi operasinal dan memastikan memiliki sistem untuk mendeteksinya.

2. **Notifikasi Event**

   Notifikasi biasanya dikirim oleh alat pemantauan atau CI (*configuration item*). Pada tahap ini, ini hanyalah pemberitahuan bahwa suatu peristiwa telah terjadi dan biasanya belum ditafsirkan atau dikorelasikan untuk memahami makna atau dampaknya.

3. **Deteksi Event**

Pada langkah ini, sistem pemantauan, agen otomatis, atau solusi manajemen sistem menerima pemberitahuan dan menentukan arti peristiwa tersebut.

4. **Log Event**
   Catatan peristiwa dibuat, bersama dengan tindakan selanjutnya yang diambil.
5. **Pemfilteran dan Korelasi**
   Langkah pertama dari proses ini hanyalah memfilter peristiwa mana yang harus diabaikan versus diteruskan ke sistem manajemen peristiwa. Di tingkat korelasi kedua, mesin korelasi menggunakan aturan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan pentingnya peristiwa peringatan dan pengecualian, dan memutuskan langkah selanjutnya yang sesuai
6. **Tanggapan Peristiwa/ Tindakan Lebih Lanjut**
   Semua peristiwa (dan tanggapan) harus dicatat. Selain itu, berdasarkan jenis dan tingkat keparahan peristiwa, mesin korelasi dapat menentukan apakah peristiwa itu pantas untuk ditingkatkan ke tim atau individu, atau dalam kasus peringatan dan pengecualian yang lebih parah, bahkan secara otomatis membuat insiden, masalah, atau perubahan.
7. **Menutup Event**
   Jika suatu peristiwa menghasilkan insiden, masalah, atau perubahan yang dibuat, penutupan event harus ditangani melalui proses masing-masing. Mereka dapat "ditutup" dalam sistem manajemen event dengan memastikan event dicatat dengan benar serta tindakan selanjutnya yang diambil, dan termasuk tautan ke insiden, masalah, atau permintaan perubahan yang sesuai.

5. **Manajemen Permintaan Layanan**

Tujuan dari praktik manajemen permintaan layanan adalah untuk mendukung kualitas layanan yang disepakati dengan menangani semua permintaan layanan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimulai oleh pengguna dengan cara yang efektif dan ramah pengguna. Manajemen permintaan layanan bergantung pada proses dan prosedur yang dirancang dengan baik, yang dioperasionalkan melalui alat pelacakan dan otomatisasi untuk memaksimalkan efisiensi praktik. Berikut hal yang digunakan ITIL dalam proses Pemenuhan Permintaan untuk mewakili output proses dan masukan:

1. **Permintaan Layanan**
   Permintaan formal dari pengguna untuk sesuatu yang akan diberikan – misalnya, permintaan informasi atau saran; untuk mengatur ulang kata sandi; atau menginstal workstation untuk pengguna baru. Rincian Permintaan Layanan dicatat oleh Pemenuhan Permintaan dalam Catatan Permintaan Layanan .

2. **Model Permintaan Layanan**
   Model Permintaan (Layanan) mendefinisikan langkah-langkah spesifik yang disepakati yang akan diikuti untuk Permintaan Layanan dari jenis (atau kategori) tertentu.
3. **Catatan Permintaan Layanan**
   Catatan yang berisi semua detail dari Permintaan Layanan. Permintaan Layanan adalah permintaan formal dari pengguna untuk menyediakan sesuatu – misalnya, permintaan informasi atau saran; untuk mengatur ulang kata sandi; atau menginstal workstation untuk pengguna baru.
4. **Informasi Status Permintaan Layanan**
   Pesan yang berisi status saat ini dari Permintaan Layanan yang dikirim ke pengguna yang sebelumnya dilaporkan meminta layanan. Informasi status biasanya diberikan kepada pengguna di berbagai titik selama siklus hidup Permintaan Layanan

Standar ISO 20000-1:2018 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan atau service management system (SMS). Persyaratan yang ditentukan dalam standar ini termasuk perencanaan, desain, transisi, pengiriman dan peningkatan layanan untuk memenuhi persyaratan layanan dan memberikan nilai. Kerangka kerja praktik terbaik ITIL memberikan panduan yang sangat baik untuk transformasi TI menjadi organisasi berorientasi layanan TI, yang memberikan layanan yang selaras dengan kebutuhan bisnis dengan cara yang hemat biaya. Namun, implementasi ITIL tidak memberikan jaminan bahwa implementasi itu sendiri dilakukan dengan cara yang paling konsisten dan sebaik mungkin di seluruh portofolio layanan. Ini hanya memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan, dan tidak ada pernyataan "harus dilakukan" di dalamnya. Ini membuat kualitas implementasi ITIL sulit untuk diukur, dan sertifikasi ITIL untuk organisasi menjadi tidak mungkin. ISO 20000, di sisi lain, adalah standar dengan persyaratan yang jelas yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa minimal standar praktik terbaik terpenuhi. ISO 20000 berbasis ITIL, dan ITIL dirancang dengan mempertimbangkan ISO 20000; oleh karena itu, mereka saling melengkapi dengan baik.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 3 OPD yang melaksanakan manajemen Layanan SPBE berdasarkan Laporan Hasil Evalusai Nilai tingkat kematangan untuk manajemen Layanan SPBE adalah 4. Sedangkan kondisi ideal untuk penerapan manajemen Layanan SPBE mengacu pada **PermenpPAN RB Nomor 59 Tahun 2020** bahwa kondisi ideal pelaksanaan manajemen layanan SPBE antara lain yakni terpenuhi dan terlaksananya manajemen Layanan SPBE pada seluruh unit pelaksana daerah. PD penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen layanan SPBE adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut selaras dengan fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik** yaitu pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah, Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai penanggung jawab harus memiliki *service desk tier 2* yang dapat menangani masalah TI secara mendalam. Sedangkan PD lainnya cukup memiliki *service desk tier 1* yang menangani masalah TI dasar.

4.4.9 Kesimpulan Manajemen SPBE

Setelah penjelasan dari analisis usulan manajemen SPBE maka dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen SPBE yang disajikan dalam **Tabel 4.3.**

Tabel 4.3 Usulan Manajemen SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
A.	**Manajemen Risiko SPBE**		
	Referensi Hukum : Peraturan Menteri RB 5/2020, ISO 31000		
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manaejemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya risiko SPBE	Inspektorat
2	Penentuan struktur pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE	Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah	Inspektorat
3	Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi	Penerapan Manajemen Risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD	Inspektorat
4	Penetepan Konteks Risiko SPBE	Inventarisasi Informasi Umum Penerapan Manajemen Risiko	Inspektorat
		Identifikasi Sasaran SPBE dengan menguraikan sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE	Inspektorat
		Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dengan menguraikan unit oemilik risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE	Inspektorat
		Identifikasi Pemangku Kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah atau non instansi pemerintah	Inspektorat
		Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Manajemen Risiko	Inspektorat
		Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Inspektorat

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		Penyusun dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat
5	Penilaian Risiko SPBE	Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat
		Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat
		Penetapan Kategori Risiko SPBE	Inspektorat
		Penetapan Area Dampak Risiko SPBE	Inspektorat
		Penetapan Kriteria Risiko SPBE	Inspektorat
		Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat
6	Evaluasi Risiko SPBE	Penyusunan evaluasi risiko SPBE	Inspektorat
7	Penanganan Risiko SPBE	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan peanggung jawabnya	Inspektorat
8	Pencatatan dan Pelaporan	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat
B.	**Manajemen Keamanan Informasi**		
	Referensi Hukum : BSSN 4/2020, BSSN 10/2019, ISO 27001, Indeks KAMI		
1	Penyusunan Dokumen Mananjemen Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pembuatan Kerangka Kerja Keamanan	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
	Informasi	informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Pengelolaan Aset informasi	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentaan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Penyusunan kebijakan peangamanan informasi	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pembinaan dan pengawasan teknis	Pelaksanaan sosialisasi, pelatiihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
C.	**Manajemen Data**		
	Referensi Hukum : Peraturan Bapenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019		
1	Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah	Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Manajemen arsitektur data	Perencanaan data induk dan data referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Manajemen Data Induk dan Data Referensi	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeriksaan data induk dan data referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Manajemen Basis Data	Penyimpanan data pada pusat data nasional	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Manajemen Kualitas Data	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
D	**Mananjemen Aset TIK**		
	Referensi Hukum : Perpres Nomer 95 Tahun 2018, ITIL		
1	Pengelolaan Aset TIK	Menginventarisasi aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan infrastruktur)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Dokumen pedoman Perencanaan Aset TIK	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Dokumen pedoman pengadaan aset TIk	Penyusunan laporan pengadaan aset TIk	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Dokumen pedoman penghapusan Aset TIK	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
E	**Mananjemen Sumber Daya Manusia SPBE**		
	Referensi Hukum : Perperes Nomor 59 Tahun 2018, Permenpan Nomor 59 Tahun 2021, Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2021		
1	Perencanaan Kegiatan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
2	Penyusunan Struktur berdasarkan kompetensi	Penyusunan peta jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
3	Pembuatan Dokumen Pencatatan dan Pelaporan	Proses Manajemen SDM SPBE meliputi beberapa proses yaitu: - Perencanaan SDM SPBE (Kebutuhan Kompetensi & Analisis Jabatan) - Pengadaan Kompetensi SDM SPBE (Perekrutan/Seleksi/Sertifikasi/Bintek/Training) - Pengelolaan Karir & Evaluasi/Penilaian Kinerja SDM SPBE - Penghargaan/Kesejahteraan SDM SPBE - Hubungan Kerja (Kontrak, Penghentian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4	Pembinaan Sumber daya manusia SPBE	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK dengan tahapan pelaksanaan ▪ Perencanaan & Strategi ▪ Pengumpulan ▪ Pengolahan ▪ Penyimpanan ▪ Penggunaan ▪ Alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
F	**Mananjemen Pengetahuan**		
	Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018		
1	Penyusunan Dokumen pedoman	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
	Manajemen pengetahuan	pengetahuan	Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD
2	Dokumen perencanaan manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD
3	Pembinaan Manajemen Pengetahuan	Pelaksanaan pendampingan manajemen pengetahuan	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD
4	Evaluasi dan Monitoring Manajemen Pengetahuan	Laporan pelaksanaan pengembangan manajemen pengetahuan	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD
G	**Mananjemen Perubahan SPBE**		
	Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018		
1	Penyusunan Log Manajemen perubahan	Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja pusat data dan informasi	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD
2	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Penerapan dokumen kebijakan dan Pedoman untuk seluruh proses dan dokumen yang ada diseluruh unit kerja (versi baru)	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD
3	Pembinaan Manajemen Perubahan	Sosialisasi kebijakan dan pedoman	- Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		manajemen perubahan yang telah dibuat untuk seluruh unit kerja	- Seluruh PD
4	Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	Laporan pelaksanaan manajemen perubahan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD
H	**Mananjemen Layanan SPBE**		
	Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL		
1	Perencanaan Manajemen Layanan	▪ Penyusunan Klasifikasi SIstem ▪ Penetapan Target Pelayanan Pengguna ▪ Penetapan Target Pengoprasian Layanan ▪ Perumusan Katalog Layanan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD
2	Pelayanan Pengguna	Permintaan Layanan dan Perumusan penanganan gangguan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD
3	Pengoprasian Layanan	▪ Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan ▪ Pemulihan Layanan ▪ Sosialisasi Pembentukan Service / Help Desk	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD
4	Evaluasi	Penyusunan Laporan Evaluasi	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh PD

BAB 5
ANALISIS PENYELENGGARA SPBE

Pada Bagian ini akan dijelaskan, mengenai kondisi eksisiting dari Penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan yang akan dibahas pada bab ini meliputi tim koordinasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.

5.1 Identifikasi Refrensi Hukum Penyelenggara SPBE

Pelaksanaan Manajemen SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo dibuat dengan mengacu dan memenuhi beberapa peraturan. Peraturan-peraturan terkait yang digunakan sebagai referensi hukum terkini adalah:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Beebasis Elektronik.
4. **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022** tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022** tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.
6. **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022** tentang Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

5.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE

Berdasarkan kondisi eksisting penyelenggaran SPBE, Kabupaten Situbondo telah memiliki Tim Koordinasi yang tertuang pada **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo** yang telah didukung oleh **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo,** kemudian ketersediaan Tim Evaluator yang tertuang dalam **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Kemudian, terkait dengan ketersediaan SDM TIK dari **40 PD** sebanyak **32 OPD**

(80%) telah memiliki SDM TIK, sedangkan **8 OPD (20%) belum memiliki SDM TIK.** Dari 32 OPD (80%) jumlah keseluruhan SDM TIK adalah sebanyak **223 SDM TIK** di Kabupaten Situbondo. Penjabaran secara detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitekktur SPBE Kabupaten Situbondo Bab 10.**

5.3 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kondisi eksisiting penyelenggara SPBE secara jelas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisiting dan Analisis Gap Kabupaten Situbondo Bab 10**. Untuk rangkuman kondisi eksisting pada setiap manajemen SPBE dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut.

Tabel 5.1 Gap Penyelenggara SPBE

Parameter	Gap
Ketersediaan SDM TIK	Terdapat 8 OPD yang belum memiliki SDM TIK
Ketersediaan Tupoksi pada SDM TIK SPBE	Terdapat 63 OPD yang belum memiliki tupoksi SDM TIK, dan 3 tidak mengisi kepemilikian Tupoksi
Kompetensi SDM TIK sesuai peta okupasi	Terdapat 8 kompetensi yang belum dimiliki oleh OPD yaitu *IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System, dan IT Consultancy and Advisory.*
Kompetensi SDM TIK SPBE	Masih sedikit SDM TIK yang berkompetensi pada bidang seperti Service Help/Desk dan Admin Keamanan TI.
Pendidikan SDM TIK SPBE	Terdapat beberapa SDM TIK memiliki pendidikan yang kurang sesuai dengan kompetensi pekerjaan
Training SDM TIK SPBE	210 SDM TIK di Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa belum memiliki dan melaksanakan training SDM TIK SPBE.
Sertifikasi SDM TIK SPBE	216 SDM TIK menyatakan bahwa mereka belum memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan TIK.

5.4 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa penyelenggara SPBE merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.

5.4.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo yakni pada Nilai Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah atau Indikator 19 memperoleh nilai tingkat kematangan 2. **Berdasarkan Kondisi Hasil Survei dan Eksisting saat ini, Kabupaten Situbondo teleh memiliki Tim Koordninasi SPBE dengan Tugas dan Wewenang yang telah ditetapkan oleh Bupati Situbondo melalui Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022.** Selain itu kebijakan mengenai Tim Koordinasi juga diatur pada Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun dalam Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Bupati Situbondo, tidak disebutkan dengan jelas mengenai tugas jabatan dalam dinas pada Tim Koordinator. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menyatakan bahwa Tim Koordinasi Tingkat Pratama terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan SPBE. Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional berdasarkan struktur Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat pertama di bagi menjadi 9 Kelompok kerja dapat dilihat pada **Tabel 5.2.**

Tabel 5.2 Usulan Tugas Tim Koordinasi SPBE berdasarkan Kepmen 965 tahun 2021

No	Kelompok Jabatan	OPD Penanggug Jawab	Tugas Kelompok Kerja
1	Koordinator	Sekretariat Daerah	melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan SPBE.
2	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital,	- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Inspektorat - Kepala Dinas Komunikasi dan	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada

No	Kelompok Jabatan	OPD Penanggug Jawab	Tugas Kelompok Kerja
	Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia	Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara yang terkait dengan lingkup SPBE
3	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah	- Kepala Bagian Sub Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang terkait dengan lingkup SPBE
4	Kelompok Kerja Penganggaran SPBE	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang terkait dengan lingkup SPBE
5	Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, terkait dengan lingkup SPBE.
6	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Kepala Inspektorat Kabupaten Situbondo - Kepala Seksi Bagian Sumberdaya Teknologi Informasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang

No	Kelompok Jabatan	OPD Penanggug Jawab	Tugas Kelompok Kerja
		- Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan lingkup SPBE
7	Kelompok Kerja Perencanaan SPBE	- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup SPBE
8	Kelompok Kerja Manajemen Data	- Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup SPBE.
9	Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi	- Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo - Kepala Seksi Keamanan Informasi Daerah Pada Dinas Komunikasi dan	Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yang terkait dengan lingkup SPBE

No	Kelompok Jabatan	OPD Penanggug Jawab	Tugas Kelompok Kerja
		Informatika Kabupaten Situbondo	
10	Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo	Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi yang terkait dengan lingkup SPBE

5.4.2 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, menyatakan bahwa tugas dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur sebagaimana pada **Gambar 5.1.**

Gambar 5.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Inforrmatika Kabupaten Situbondo

Dalam ITIL, dijelaskan bahwa peran dalam suatu departemen TI dapat dibagi menjadi CIO, *Information security, System development, Service delivery* dan *System*

support. Pemetaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo terhadap peran pada ITIL 3 tahun 2011 dapat dilihat pada **Tabel 5.3** berikut.

Tabel 5.3 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Info Informatika Kabupaten Situbondo dengan ITIL

No	Peran dalam ITIL 3	Peran dalam Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	CIO	- Kepala Dinas - Sekretariat - Sub Bagian Umum Kepegawaian - Sub Bagian Keuangan - Kelompok Jabatan Fungsional
2.	*Information Security*	- Bidang Persandian - Kelompok Jabatan Fungsional
3.	*System Development*	- Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Kelompok Jabatan Fungsional
4.	*Service Delivery*	- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik - Kelompok Jabtaan Fungsional
5.	*System Support*	- Bidang Persandian - Kelompok Jabatan Fungsional

5.5 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai usulan dan perbaikan sumber daya manusia SPBE berdasarkan hasil analisis gap dari sumber daya manusia SPBE di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Usulan yang diberikan meliputi usulan tentang kompetensi SDM SPBE, pengadaan SDM SPBE, kebutuhan training dan sertifikasi SDM SPBE.

5.5.1 Analisis Kompetensi SDM SPBE

Bagian ini membahas mengenai Kompetensi SDM SPBE yang dibuat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Okupasi. Dalam peraturan tersebut didapatkan menyatakan bahwa kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Kompetensi tersebut jika dijabarkan menurut Peta Okupasi TIK maka akan didapatkan beberapa kompetensi sebagai berikut.

1. Kompetensi Perencanaan SPBE

   Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi perencanaan SPBE meliputi:

   1. Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi

      Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam merencanakan, merancang, mengadakan, membangun, menerapkan,

menjalankan, dan mengendalikan tata kelola sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Hal utama pada aspek ini yaitu berkaitan dengan isu seputar pemerintahan dan manajemen.

2. Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuang individu dalam hal merencanakan, mempersiapkan, menjalankan, mengelola, menilai, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas proyek sistem dan teknologi informasi. Hal utama dari aspek ini yaitu manajemen ruang lingkup, kualitas, waktu, biaya, risiko, komunikasi, pengadaan, sumber daya manusia, pemangku kepentingan, dan integrasi

2. Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan

Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi proses bisnis pemerintahan adalah :

1. Arsitektur Teknologi Informasi Korporasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan/ mengimplementasikan, mengkaji, mereviu, menilai, mengelola, dan mengendalikan arsitektur enterprise beserta sub-sistem pembentuknya. Adapun sub-sistem pembentuknya berupa arsitektur bisnis (proses), arsitektur aplikasi, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, arsitektur organisasi, dan arsitektur kebijakan (policy).

3. Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman dan Andal

Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi pengelolaan TIK terdiri dari:

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemograman

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam merancang, mendesain, mengonfigurasi, dan membuat perangkat lunak maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer piranti digital, maupun jaringan. Spektrum kemampuan ini berkaitan dengan metodologi pembuatan perangkat lunak yaitu perencanaan, perancangan, pemrograman, pengujian, perbaikan, penerapan, dan penilaian. Selain itu, aspek ini juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam membuat dan mengembangkan program komputer yang dapat dijalankan dalam berbagai lingkungan komputasi, baik menggunakan bahasa tingkat rendah hingga tingkat tinggi, dan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

2. Sistem Manajemen Data

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem basis data dan/atau informasi (konten digital). Ruang lingkup dan jenis model database dimaksud beraneka ragam, seperti berbasis struktur, relasional, objek, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam domain ini adalah kemampuan mengolah data tidak terstruktur seperti yang dikembangkan dalam konsep big data dan business intelligence.

3. Perangkat Keras dan Piranti Digital

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, merakit, mengoperasikan, mengendalikan, dan memelihara perangkat keras komputer maupun piranti digital lainnya (*hardware*). Yang dimaksud dengan piranti digital lain adalah notebook, Tabelt, telepon pintar (*smartphone*), dan beraneka ragam gawai lainnya.

4. Infrastruktur dan Jaringan
   Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi berbagai komponen teknis jaringan infrastruktur dan telekomunikasi. Yang dimaksud dengan infrastruktur telekomunikasi di sini adalah medium transmisi atau koneksi berbasis digital/elektronik, yang beroperasi melalui darat (*terestrial*), laut (kabel laut), maupun udara (*satelit*).
5. Sistem Operasi dan Aplikasi Pendukung
   Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam mengembangkan, menginstalasi, mengonfigurasi, menggunakan, dan memelihara sistem operasi komputer – baik untuk sistem mandiri (*stand-alone*) maupun dalam bentuk jaringan (*network*). Sistem operasi yang dimaksud melingkupi berbagai jenis baik yang bersifat terbuka (*open source*) maupun tertutup (*proprietary*).
6. Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
   Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merencanakan, merancang, membangun, menguji coba, menerapkan, mengembangkan, menilai, dan mengendalikan sistem informasi. Sistem informasi pada dasarnya dibangun oleh sejumlah komponen yang saling terkait satu dan lainnya.
   Elemen pembentuknya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: manusia (organisasi), proses, dan teknologi. Dalam tataran implementasinya, terdapat berbagai jenis variasi sistem dimaksud, misalnya sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi korporat, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi pengendalian, dan lain sebagainya
7. Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan
   Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, membangun, menerapkan, mengelola, menilai, mengukur, dan mengendalikan sistem keamanan data, informasi, sistem, dan/atau internet. Spektrum ruang lingkup kapabilitas ini bervariasi dari yang sangat konseptual hingga teknis, dan mulai dari yang teoritis hingga terapan. Disamping itu, aspek ini berkaitan pula dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi atau mematuhi beragam peraturan/regulasi teknis di bidang keamanan informasi.
8. Multimedia
   Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membuat, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi dan/atau konten berbasis multimedia dalam platform antarmuka (*user interface*) yang beragam. Multimedia merupakan representasi digital dalam berbagai format media seperti: teks, gambar/citra/grafis, suara/audio, film/video, atau kombinasi di antaranya. Beragam media ini dikembangkan untuk kebutuhan pengguna yang menginginkan

adanya model navigasi aplikasi (input maupun output) yang menarik, mudah digunakan (*user friendly*), dan ergonomis.

9. Teknologi *Mobile* dan *Internet of things*
   Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membuat, mengembangkan, mengonfigurasi, menerapkan, dan mengendalikan teknologi yang berhubungan dengan kanal akses (*access channels* atau *distribution channels*). Belakangan ini telah dikenal sejumlah teknologi kanal akses yang dikenal masyarakat seperti: ATM, kios, TV digital, *Tabelt, smart phone, gadget*, kamera, dan lain sebagainya – baik yang berdiri sendiri maupun yang telah dirakit (*embedded*) dalam entitas lain seperti: mobil, pesawat, kereta api, motor, mesin cuci, lemari es, dan lain sebagainya (*internet-of-things*).
10. Sistem Informasi Terintegrasi
    Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merencanakan, merancang, membangun, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan terpadu yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen penting berupa komponen teknologi, proses, dan manusia. Ruang lingkup yang ditangani sangatlah luas, mulai yang bersifat strategis hingga teknis – termasuk di dalamnya isu-isu penting seperti: manajemen perubahan, dinamika sosial, strategi implementasi, dan lain sebagainya.

4. Pengelolaan Layanan yang Inovatif, Adaptif, dan Responsif
   Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi pengelolaan layanan meliputi:
   1. Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi
      Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan mengevaluasi beragam layanan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Layanan dimaksud melingkupi aspek-aspek utama seperti: ketersediaan, dukungan bantuan, kualitas, keberlanjutan, kebersinambungan, dan lain sebagainya.
   2. Sistem Manajemen Fasilitas Teknologi Informasi
      Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, membangun, menjalankan/ menerapkan/ mengimplementasikan, mengelola, dan mengendalikan beragam fasilitas, sarana prasarana, dan teknologi pendukung sistem informasi. Fasilitas maupun sarana prasarana dimaksud antara lain*: data center, call center, disaster recovery center, server room, cloud computing facilities*, dan lain sebagainya.
   3. Konsultasi dan layanan Jasa SDM Teknologi Informasi
      Aspek ini berkaitan erat dengan kemampuan seorang individu dalam memberikan beragam jasa layanan terkait dengan teknologi informasi, seperti konsultasi, pendampingan, pelatihan, penelitian, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya mereka yang ingin menekuni bidang digital *entrepreneurship.*

5.5.2 Pengadaan SDM SPBE

Setelah analisis kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka pada bagian ini akan dijabarkan usulan penanggung jawab dan pengadaan SDM TIK yang wajib ada pada setiap PD.

1. Kompetensi Perencanaan SPBE
   Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 rencana SPBE dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu penanggung jawab terkait perencanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo. Untuk perencanaan kompetensi SDM maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan
   Rekayasa proses bisnis pemerintahan dikelola oleh Bagian Organisasi karena mengacu pada tugas Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana yaitu menyusun pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Oleh karena itu, Kelapa Sekretariat Bagian Organisasi dan Kepala Sekretariat Daerah harus memiliki kompetensi terkait rekayasa proses bisnis pemerintahan dalam melaksanakan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkoordinasi dan berperan dalam menentukan prosedur pendokumentasian terkait proses bisnis pemerintahan.
3. Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal
   Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun pelaksanaan dari pengelolaan TIK haruslah dilakukan oleh semua PD di Pemerintahan Kabupaten Situbondo. Untuk kedepannya pemenuhan kebutuhan pengelolaan sistem digital akan meningkat, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan dalam pengelolaan TIK. Dalam hal ini penambahan kompetensi tidak sama dengan penambahan pegawai, karena bisa saja satu pegawai menguasai beberapa kompetensi TIK yang diperlukan.
   Untuk PD yang sudah termasuk ke dalam PD mandiri TIK, terdapat 9 kompetensi yang harus dimiliki yaitu Teknisi Komputer, Teknisi & Admin Jaringan, Service/Help Desk, Admin Website, Admin Database, Analis Sistem & Desain, Programmer, Operator/User Sistem, Dan Admin Keamanan TI. Sedangkan untuk PD yang masih belum termasuk ke dalam PD mandiri TIK, terdapat kompetensi yang setidaknya dimiliki yaitu operator/user sistem, Teknisi Komputer, Admin Website dan service/help desk. Untuk usulan kompetensi lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 5.4.**

Tabel 5.4 Usulan SDM TIK untuk setiap OPD

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Kompetensi SDM TIK
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Teknisi Komputer
		Admin Website

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Kompetensi SDM TIK
		Service / Help Desk
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
3	Bagian Hukum	Service / Help Desk
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Operator / User Sistem
		Service / Help Desk
		Programmer
6	Bagian Umum	Service / Help Desk
		Teknisi Komputer
7	Bagian Organisasi	Admin Website
		Service / Help Desk
		Teknisi Komputer
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
11	Inspektorat	Programmer
		Teknisi & Admin Jaringan
		Admin Keamanan TI
		Admin Website
		Analis Sistem & Desain
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Teknisi & Admin Jaringan
		Admin Keamanan TI
		Admin Website
		Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Service / Help Desk
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Service / Help Desk
15	Badan Pendapatan Daerah	Teknisi & Admin Jaringan
		Admin Keamanan TI
		Admin Database

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Kompetensi SDM TIK
		Admin Website
		Analis Sistem & Desain
		Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Admin Keamanan TI
		Admin Database
		Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teknisi & Admin Jaringan
		Admin Keamanan TI
		Admin Website
		Analis Sistem & Desain
		Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
18	Dinas Kesehatan	Programmer
		dev op
		Data Science
19	Dinas Ketenagakerjaan	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin Database
		Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Admin Keamanan TI
		Analis Sistem & Desain
		Service / Help Desk
		Operator/User Sistem
		Admin Website
22	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Ada
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Tidak Ada
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Service / Help Desk
		Teknisi Komputer

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Kompetensi SDM TIK
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Ada
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Teknisi Komputer
29	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
		Operator / User Sistem
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Operator/User Sistem
		Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
		Admin Website
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Teknisi Komputer
		Service / Help Desk
33	Dinas Sosial	Service / Help Desk
		Admin Website
		Operator/User Sistem
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Service / Help Desk
		Teknisi Komputer
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Programmer
		Analis Sistem & Desain
36	Kecamatan Situbondo	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
37	Kecamatan Bungatan	Teknisi Komputer
		Operator/User Sistem
		Service / Help Desk
38	Puskesmas Situbondo	Programmer
39	Puskesmas Bungatan	Programmer
		Teknisi & Admin Jaringan
		Admin Database
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi Komputer
		Admin Website
		Service / Help Desk
		Programmer

5.5.3 Analisis Kebutuhan Training SDM

Training atau pelatihan dibutuhkan untuk untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK sehingga setiap PD dapat memiliki SDM TIK yang handal. Dari kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Situbondo diketahui bahwa masih sedikit SDM

TIK yang telah melakukan training terkait bidang TIK. Berikut pada **Tabel 5.5** dijabarkan usulan *training* dari kompetensi SPBE yang telah dianalisis sebelumnya.

Tabel 5.5 Analisi Kebutuhan Training Kompetensi SDM TIK

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
3	Bagian Hukum	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
4	Bagian Perekonomian,	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
	Pembangunan dan Sumber Daya Alam			(CCDA) (Online)	
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
6	Bagian Umum	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT
7	Bagian Organisasi	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
11	Inspektorat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
15	Badan Pendapatan Daerah	Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
					PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
			Kepatuhan	Security)	
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
18	Dinas Kesehatan	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	pentest (CompTIA PenTest+ (Ethical Hacking))	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
19	Dinas Ketenagakerjaan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
22	Dinas Lingkungan Hidup	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
	Desa	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
				(CompTIA ITF+) (Online)	
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
29	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
33	Dinas Sosial	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
36	Kecamatan Situbondo	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
37	Kecamatan Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
38	Puskesmas Situbondo	Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online)*	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
39	Puskesmas Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		programmer	Pemrograman	IoT (Online)	Programmer PD

5.5.4 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM TIK di bidang masing-masing maka diperlukan sertifikasi SDM TIK. Dari kondisi eksisting di Pemerintahan Kabupaten Situbondo masih sedikit SDM TIK yang telah melakukan sertifikasi terkait bidang TIK. Berikut pada **Tabel 5.6** adalah usulan sertifikasi dari kompetensi SPBE yang telah dianalisis sebelumnya.

Tabel 5.6 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT
3	Bagian Hukum	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
				(CompTIA ITF+) (Online)	
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
6	Bagian Umum	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT
7	Bagian Organisasi	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
				(CompTIA ITF+) (Online)	
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
11	Inspektorat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer	Kepala Bidang Aset

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
				(CCNA Routing and Switching)	
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
					PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
15	Badan Pendapatan Daerah	Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help	Sistem	Service Desk	Service Desk

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Desk	Manajemen Layanan TI (Service Desk)	(CompTIA A+) (Online)	Tier 1
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
18	Dinas Kesehatan	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
			Kepatuhan	Security)	
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Pentest	Staff IT
19	Dinas Ketenagakerjaan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen	Web Content Management	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
			Layanan TI	and social media	
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help	Sistem	Service Desk	Service Desk

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Desk	Manajemen Layanan TI (Service Desk)	(CompTIA A+) (Online)	Tier 1
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
22	Dinas Lingkungan Hidup	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	Programmer	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
				(OCA, OCP)	
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
27	Dinas	Admin	Keamanan	Teknis	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
	Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Keamanan TI	Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Keamanan Informasi (CCNA Security)	
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
29	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
30	Dinas	Admin Website	Sistem	Web Content	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
	Perpustakaan dan Kearsipan		Manajemen Layanan TI	Management and social media	
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
33	Dinas Sosial	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
			Layanan TI (Service Desk)	(Online)	
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI,	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
				ISO27001, CISM, CISSP)	
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
36	Kecamatan Situbondo	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
37	Kecamatan Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
			Layanan TI (Service Desk)	(Online)	
38	Puskesmas Situbondo	Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online)*	Staff IT
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
39	Puskesmas Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM
				(Online)	
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO

BUKU 8

PETA RENCANA DAN PERKIRAAN BIAYA KEGIATAN SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Situbondo
Tahun 2023-2027

Buku 8

PETA RENCANA DAN PERKIRAAN BIAYA KEGIATAN SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo
Tahun 2022

Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan
PT. Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 METODOLOGI DAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE 7
2.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE 9
2.2 Peta Rencana Manajemen SPBE 9
2.3 Peta Rencana Data dan Informasi 9
2.4 Peta Rencana Layanan SPBE 10
2.5 Peta Rencana Aplikasi SPBE 10
2.6 Peta Rencana Infrastruktur SPBE 10
2.7 Peta Rencana Keamanan SPBE 10
2.8 Peta Rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 11
2.9 Rencana Anggaran 11
BAB 3 PRIORITAS DAN PETA RENCANA SPBE 13
3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE 13
3.1.1 Penguatan Kapasitas Pengelolaan SPBE 13
3.1.2 Penguatan Kebijakan SPBE 18
3.1.3 Peta Rencana Penyelenggara SPBE 22
3.1.4 Inovasi Proses Bisnis 82
3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE 83
3.3 Peta Rencana Usulan Integrasi Data 94
3.3.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan 94
3.3.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian 95
3.3.3 Usulan Integrasi Data Keuangan 96
3.3.4 Usulan Integrasi Data Spasial 97
3.4 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi 100
3.5 Peta Rencana Layanan SPBE 103
3.5.1 Peta Rencana Layanan SPBE sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 103
3.5.2 Peta Rencana Pembuatan Standar Operasional Prosedur 103
3.5.3 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program 125

3.6 Peta Rencana Aplikasi SPBE 128
3.7 Peta Rencana Infrastruktur SPBE 134
3.7.1 Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya 140
3.7.2 Peta Rencana Ruang Server (*Data Center*) dan Pelengkapnya 141
3.7.3 Peta Rencana Sistem Penguhubung Layanan 142
3.7.4 Peta Rencana Komputasi 143
3.7.5 Peta Rencana Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 143
3.7.6 Peta Rencana *Command Center* 145
3.8 Peta Rencana Keamanan SPBE 145
3.8.1 Perencanaan Keamanan SPBE 155
3.8.2 Implementasi Keamanan SPBE 157
3.8.3 Evaluasi Keamanan SPBE 157
3.8.4 Tindak Lanjut Keamanan SPBE 158
3.9 Peta Rencana Audit SPBE 159
BAB 4 RENCANA ANGGARAN 161
4.1 Rencana Anggaran Penyelenggara dan SDM SPBE 161
4.1.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggaran SPBE 161
4.1.2 Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE 162
4.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE 164
4.3 Rencana Anggaran Pembuatan SOP Layanan SPBE 165
4.4 Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE 165
4.5 Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur 172
4.5.1 Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya 172
4.5.2 Anggaran Ruang Server (*Data Center*) dan Pelengkapnya 173
4.5.3 Anggaran Komputasi 174
4.5.4 Anggaran Perangkat Keras (*Hardware*) 174
4.5.5 Anggaran *Command Center* 183
4.6 Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE 184
4.7 Rencana Anggaran Audit TIK 186
4.8 Rencana Anggaran Peta Rencana Perangkat Daerah (OPD) 187
LAMPIRAN 191

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Usulan OPD Mandiri TIK....14
Tabel 3.2 Hasil Pembagian Usulan Peran Pengelola TI....15
Tabel *3*.3 Rekomendasi Usulan Service Desk....16
Tabel 3.4 Peta Rencana Penguatan Kebijakan SPBE....18
Tabel 3.5 Usulan Kompetensi SDM TIK....24
Tabel 3.6 Prioritas Usulan Kebutuhan *Training* SDM....33
Tabel 3.7 Prioritas Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM....58
Tabel 3.8 Peta Rencana Manajemen SPBE....84
Tabel 3.9 Peta Rencana Integrasi Data Kependudukan....94
Tabel 3.10 Peta Rencana Integrasi Data Kepegawaian....95
Tabel 3.11 Peta Rencana Integrasi Data Keuangan....96
Tabel 3.12 Peta Rencana Integrasi Data Spasial....99
Tabel 3.13 Peta Rencana Usulan Tata Kelola Data....101
Tabel 3.14 Usulan Peta Rencana SOP pada Layanan Eksisting SPBE....104
Tabel 3.15 Peta Rencana Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD....122
Tabel 3.16 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program....126
Tabel 3.17 Prioritisasi Usulan Aplikasi SPBE....129
Tabel 3.18 Peta Rencana Infrastruktur SPBE....134
Tabel 3.19 Peta Rencana Infrastruktur SPBE....144
Tabel 3.20 Aspek Penerapan Keamanan SPBE....147
Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE....161
Tabel 4.2 Rencana dan Anggaran Pelatihan....162
Tabel 4.3 Kisaran Biaya Sertifikasi....163
Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya Manajemen SPBE....165
Tabel 4.5 Perhitungan Aplikasi....167
Tabel 4.6 Rencana Anggaran Aplikasi....167
Tabel 4.7 Rencana Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya....172
Tabel 4.8 Rencana Anggaran Ruang Server (*Data Center*) dan pelengkapnya....173
Tabel 4.9 Rencana Anggaran Komputasi dan pelengkapnya....174
Tabel 4.10 Rencana Anggaran Perangkat Keras (*Hardware*)....174
Tabel 4.11 Rencana Anggaran *Command Center*....183
Tabel 4.12 Rencana Anggaran Keamanan SPBE....184
Tabel 4.13 Rencana Anggaran Audit TIK....186
Tabel 4.14 Rencana Anggaran Tiap OPD....187

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan 9
Gambar 3.1 Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupate Situbondo 82

BAB 1
PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta rencana merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintahan Daerah melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang dilakukan beserta indicator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Dimana peta rencana SPBE ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional. Dalam pelaksanaan pelaksanaan peta rencana ini perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari:

1. Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Insiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
3. Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu:
    a. Tata Kelola SPBE;
    b. Manajemen SPBE;
    c. Layanan;
    d. Aplikasi;
    e. Infrastruktur TIK;
    f. Keamanan;
    g. Audit TIK
4. Program, merupkan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis.
5. Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

Pelaksanaan peta rencana tidak terlepas dari penyusunan rencana strategis. Dimana rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE, yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam **Tabel 1.1.**

1. **Tahap Pembangunan Fondasi SPBE**

Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang SPBE pada 2018-2022 dengan fokus pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini untuk Pemerintah Daerah ditandai dengan tersedianya:

a) Sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
b) Tim Koordinasi SPBE Nasional, tim koordinasi Instansi Pusat, dan tim koordinasi Pemerintah Daerah;
c) Kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini;
d) Evaluasi SPBE Nasional dan evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
e) Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
f) Portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;
g) Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
h) Manajemen Layanan SPBE;
i) Infrastruktur SPBE;
j) Sistem keamanan informasi; dan
k) Standar kompetensi teknis SPBE.

2. **Tahap Pengembangan SPBE**

Tahapan pengembangan SPBE berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang SPBE dilaksanakan tahun 2023 – 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsive dan adaptif terhadap kebutuhan penggunaan layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

a) Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data
b) Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah
c) Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna
d) Peningkatan kualitas keamanan informasi
e) Peningkatan kapasitas SDM SPBE
f) Pembentukan forum kolaborasi antar OPD

Sedangkan untuk inisaitif strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang mana diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan SDM SPBE

sebagaimana tertuang dalam **Tabel 1.1** yang telah disesuaikan dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo.

Tabel 1.1 Rencana Strategis SPBE

No.	Inisiatif Strategi	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
A.	**Tata Kelola**			
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	2022	Bupati Kabupaten Situbondo
2	Penguatan Kebijakan SPBE	Kebijakan Mikro	2023-2027	Bupati Kabupaten Situbondo
3	Penguatan Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	2023	Bupati Kabupaten Situbondo
4	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Evaluasi SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK	2023-2027	- Bupati Kabupaten Situbondo - Dinas Komunikasi dan Informatika
B.	**Layanan SPBE**			
5	Survei Pengguna SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2023-2027	Bupati Kabupaten Situbondo
6	Penyelenggaraan Layanan Kearsipan Dinamis	Penyelenggaraan Layanan **Srikandi**	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	2023-2027	Dinas Komunikasi dan Informatika
C.	**Teknologi Informasi dan Komunikasi**			
8	Optimalisasi Jaringan Intra	Pengoptimalan Jaringan Intra	2023-2027	Dinas Komunikasi

No.	Inisiatif Strategi	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
	Pemerintah	Pemerintah		dan Informatika
9	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan SPLP (API *Management*)	Sistem Penghubung Layanan SPLP	2023-2025	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi	• Manajemen Keamanan Informasi • Teknologi Keamanan Informasi • Budaya Keamanan Informasi	20233-2027	Dinas Komunikasi dan Informatika
D.	**Sumber Daya Manusia SPBE**			
11	Promosi Literasi SPBE	Sosialisasi dan Pelatihan	2022-2026	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah
12	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggaraan SPBE	• Standar Kompetensi Teknis SPBE • Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi • Pola Remunerasi Bidang SPBE	2023-2027	- Bupati Kabupaten Situbondo - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Pembentukan Forum Kolaborasi ntar PD	Kegiatan pertemuan antar PD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kebutuhan penyelenggaraan SPBE Forum	2023-2027	- Bupati Kabupaten Situbondo - Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Inisiatif Strategi	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual		

BAB 2
METODOLOGI DAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

Pada bab ini menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Anggaran Biaya Tiap Kegiatan. Penetapan metodologi dalam rangka penyusunan Peta Rencana SPBE, bertujuan untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

1) Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2) Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
3) Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
4) Penentuan Program dan Kegiatan.

1) Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis Perangkat Daerah yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE. Dokumen strategis yang diacu adalah RPJMD bagi Pemerintah Daerah dan Renstra pada Perangkat Daerah. Penentuan ini mencakup indikator serta target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu**.**

2) Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat pada dokumen **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Perangkat Daerah, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE yaitu, aplikasi, layanan, tata kelola, manajemen, infrastruktur TIK, keamanan dan Audit TIK.

3) Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pengkategorian sessuai muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut:

1) **Tata Kelola SPBE**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
2) **Manajemen SPBE**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** Tentang SPBE;

3) **Layanan**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
4) **Aplikasi**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
5) **Infrastruktur TIK**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
6) **Keamanan**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
7) **Audit TIK**, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.

4) Penentuan Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** Tentang SPBE, Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2027 sesuai dengan penyusunan arsitektur SPBE, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

1) Efektivitas program;
2) Kelayakan program;
3) Efisiensi program

Pemilihan program/kegiatan merupakan faktor yang penting dalam menentukan program yang akan dipilih dengan memperhatikan kriteria kelayakan dan efisiensi program. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan efektivitas yang serupa. Seperti halnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada **Gambar 2.1.**

Gambar 2.1 Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

2.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Peta Rencana Tata Kelola SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendekatan tertentu dalam setiap komponen yang telah dianalisis. Pada Tata Kelola SPBE ini juga dijelaskan Penyelenggara SPBE. Peta Rencana Tata Kelola SPBE terdiri dari:

- Penguatan Kapasitas Pengelolaan SPBE
- Penguatan Kebijakan SPBE
- Penyusunan Kegiatan Tata Kelola SPBE
- Proses dan Dokumen Tata Kelola SPBE
- Peta Rencana Pelaksanaan Penyelenggara SPBE

2.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Berdasarkan Perpres 95/2018 dan Permen PAN-RB 59/2020 peta rencana Manajemen SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam setiap komponen yang telah dilakukan analisis. Proses penentuan peta rencana manajemen terdiri dari:

- Analisis paket pekerjaan yang akan dilakukan.
- Analisis *framework*, kebijakan, atau pendekatan tertentu dalam pelaksanaan peta rencana.
- Analisis tahun pengembangan setiap pekerjaan.

2.3 Peta Rencana Data dan Informasi

Peta rencana integrasi data terbagi menjadi 4 peta rencana yaitu, integrasi data kependudukan, integrasi data kepegawaian, integrasi data keuangan, dan integrasi data spasial. Analisis usulan tahun integrasi diambil dengan pendekatan pengelompokan data yang sejenis diadakan pada tahun yang sama. Kemudian kelompok data tersebut akan diurutkan berdasarkan kelompok data yang paling krusial terlebih dahulu. Selain peta rencana integrasi data, terdapat pula usulan peta rencana terkait tata kelola data dan informasi. Peta rencana tersebut akan menjelaskan kegiatan-kegiatan penunjang program Satu Data Indonesia yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupten Situbondo setiap tahunnya.

2.4 Peta Rencana Layanan SPBE

Peta rencana Layanan SPBE didasarakan pada layanan SPBE yang termuat dalam **Perpres Nomor 95 Tahun 2018** dan **PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020** yang belum terlaksana. Pelaksanaan peta rencana layanan SPBE berkaitan dengan ketersediaan SOP sebagai standar pelayanan atau kegiatan operasional instansi. Sehingga, dengan adanya keterkaitan antara SOP maka hal tersebut berpengaruh pada usulan pembuatan SOP. Kisaran rencana dan anggaran yang dibutuhkan dalam pengadaan SOP layanan disusun berdasarkan kompleksitas penyusunan SOP atau proses yang terjadi dalam suatu kegiatan, sehingga dapat diklasifikasikan dari rendah sampai tinggi.

2.5 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Berdasarkan aplikasi yang diusulkan untuk menunjang proses bisnis pada setiap OPD di Kabupaten Situbondo, maka dilakukan penyusunan peta rencana berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing OPD untuk menentukan impelementasi aplikasi yang akan dibangun atau diimplemetasikan lebih awal dengan melakukan berbagai pertimbangan. Pada peta rencana aplikasi dilakukan penilaian terhadap masing-masing aplikasi dengan indikator penilaian untuk masing-masing aplikasi yaitu:

1) Analisis dampak dengan memberikan penilaian atas dampak yang diberikan oleh masing-masing aplikasi terhadap OPD. Dampak yang dinilai adalah dampak investasi dan layanan dasar.
2) *Warrant Mc Farlan's Strategic Matrix* merupakan metode dalam menentukan atau memetakan aplikasi atau sistem informasi pada organisasi dalam hal ini masing-masing perangkat daerah yang ada di Kabupaten Situbondo.
3) Potensi integrasi dengan menilai apakah aplikasi yang diusulkan memiliki potensi integrasi dengan OPD yang lainnya.

2.6 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Berdasarkan hasil analisa infrastruktur jaringan Pemerintahan Kabupaten Situbondo maka dilakukan usulan untuk pengembangan, perbaikan ataupun peremajaan infrastruktur sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Usulan infrastruktur yang diberikan meliputi sebagai berikut:

- Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah.
- Peta Rencana Perangkat Operasional.
- Peta Rencana Pengadaan Server dan Pelengkapnya.
- Peta Rencana Infrastruktur Lainnya

2.7 Peta Rencana Keamanan SPBE

Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki beberapa permasalahan terkait dengan keamanan sistem informasi seperti serangan virus, peretasan (*hacking*),

hingga pencurian data secara manual. Adanya permasalahan tersebut, memberikan kewaspadaan terhadap keamanan SPBE, sehingga terdapat usulan terkait pengamanan sistem informasi pada aspek keamanan sumber daya teknologi informasi, akses kontrol, keamanan sumber daya manusia, *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (keutuhan), *Availability* (ketersediaan akses), *Authentication* (keaslian) dan *Non-Repudation* (kenirsangkalan).

2.8 Peta Rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prioritas pelaksanaan audit TIK di lingkup Pemerintahan Kabupaten Situbondo disusun berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang SPBE dengan urutan:

- Audit aplikasi SPBE yaitu audit aplikasi sesuai dengan aplikasi pendukung layanan administrasi SPBE, kemudian aplikasi pendukung layanan publik SPBE, dan aplikasi lainnya di audit sesuai dengan urgensi tiap OPD.
- Audit infrastruktur SPBE yaitu audit server, dan audit jaringan
- Audit keamanan SPBE diutamakan audit keamanan infrastruktur dan audit keamanan aplikasi khusus yang mendukung layanan publik SPBE, karena aplikasi merupakan komponen penting dalam penilaian indeks SPBE dengan menggunakan Permen PAN-RB No 59 Tahun 2020.

2.9 Rencana Anggaran

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap pemerintah daerah menyusun peta rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah daerah dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Guna keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Tujuan identifikasi rencana dan anggaran ini adalah untuk menunjukkan kisaran anggaran pada masing-masing kegiatan yang akan dilakukan:

- Analisis paket pekerjaan
- Analisis anggaran berdasarkan referensi
- Analisis anggaran masing-masing paket pekerjaan
- Analisis Anggaran masing-masing OPD

BAB 3
PRIORITAS DAN PETA RENCANA SPBE

Peta Rencana SPBE setiap paket pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo disusun untuk **5 tahun mendatang dari tahun 2023 hingga 2027.** Setiap prioritasi setiap domain memiliki standar masing-masing yang digunakan. Penjelasan masing-masing standar dapat dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Salah satu tujuan dari SPBE ini yaitu untuk **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel**. Beberapa cara dalam mencapai tujuan tersebut antara lain dengan membentuk tim koordinasi SPBE, adanya pembangunan Arsitektur SPBE, proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi, dan adanya penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu. Tata Kelola SPBE Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tatakelola juga didasarkan pada **Permen PAN-RB No 59 tahun 2020**, guna melihat sejauh mana tingkat kematangan yang diperoleh. Dari kondisi eksisting tingkat kematangan, akan menjadi usulan prioritas pertahunnya.

3.1.1 Penguatan Kapasitas Pengelolaan SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan SPBE terdiri dari pembentukan OPD Mandiri TIK, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengelola TI, pembentukan service desk serta Peningkatan Kompetensi SDM TI.

1) Pembentukan OPD Mandiri TIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, menyatakan bahwa OPD (Perangkat Daerah) Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE. Dalam peraturan yang sama pula disebutkan bahwa Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data pelaksana Mandiri TIK dilaksanakan oleh Dinas maupun Perangkat Daerah Mandiri TIK. Tidak seluruh OPD pada di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori Mandiri TIK. Detail lebih jelas mengenai pembentukan OPD Mandiri TIK dapat dilihat pada buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE di lingkungan Kabupaten Situbondo Sub-bab 3.6. Dalam buku tersbut disebutkan bahwa penilaian atau pengukuran tercapainya OPD Mandiri TIK dilihat dari bobot atau skor didapatkan oleh setiap OPD. Metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari perumusan dan identifikasi *Key Performance Indikator* (KPI) dengan berdasarkan

pada kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau kebutuhan organisasi.

Namun di Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo dar 40 PD yang ada, di tugaskan ada **11 OPD yang wajib melaksanakan OPD Mandiri TIK**. 11PD Wajib Mandiri TIK adalah **Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. Abdoer Rahem, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**. Adapun syarat terkait dimana OPD Dikategorikan untuk melaksanakan OPD Manndiri TIK yakni Pemenuhan Kompetensi perkerjaan yang berkaitan dengan TIK, Kepemilikan SK, Kepemilikan sertifikasi dan pengalaman training pada masing staff TIK dan Pengalaman membuat aplikasi sendiri. Sehingga dari 40 OPD di Kabupaten Situbondo terdapat 7 OPD Wajib dan Layak menjadi Mandiri TIK, 4 OPD Harus tapi tidak layak dan 1 OPD layak tapi tidak harus. Detail lebih jelas mengenai pembentukan OPD Mandiri TIK dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE di lingkungan Kabupaten Situbondo Sub-bab 3.6**. Berikut merupakan Usulan OPD Mandiri TIK berdasarkan 11 OPD Wajib Mandiri TIK dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Usulan OPD Mandiri TIK

Kode OPD	Nama OPD
18	Dinas Kesehatan
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	RSUD dr. Abdoer Rahem
15	Badan Pendapatan Daerah
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Dinas Perhubungan
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam OPD mandiri TIK masih perlu berkoordinasi dengan Diskominfo dalam melakukan pengelolaan TI sedangkan pihak Diskominfo melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SDM TIK di setiap OPD dalam melakukan pengelolaan TI. Untuk OPD yang belum memenuhi kriteria sebagai

OPD mandiri TIK tetap berada di bawah pemantauan dari pihak Diskominfo. Terdapat beberapa tugas dari OPD Mandiri TIK diantaranya:

1) Melakukan perencanaan aplikasi, membuat dokumen user requirement untuk kebutuhan pengembangan aplikasi khusus OPD.
2) Memiliki peran sebagai *Quality Assurance* untuk pengembangan aplikasi khusus di OPD.
3) Melakukan uji coba aplikasi yang sedang dikembangkan oleh OPD.
4) Melakukan pemeliharaan aplikasi khusus yang telah dikembangkan oleh OPD.
5) Melakukan perencanaan, dan pemeliharaan *Database* yang dimiliki setiap OPD.
6) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam seluruh proses manajemen TIK.
7) Mengadakan server dan melakukan konfigurasi, operasional, dan perawatan *server* secara mandiri.

2) Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengelola TI

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil analisis usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI. Usulan ini didapatkan dari **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** dan **Peta Okupasi TIK**. Dimana pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** menyatakan bahwa kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Selanjutnya, kompetensi tersebut akan dipetakan dengan SI/ TI yang ada pada Peta Okupasi TIK. Berikut adalah hasil usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI yang dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Hasil Pembagian Usulan Peran Pengelola TI

Jenis SI/TI	Pembangun Sistem	Operator & Admin Sistem	Pemelihara atau Perawat Sistem	Pengembang Sistem
Perangkat keras dan Piranti Digital	Setiap OPD	Setiap OPD	Setiap OPD	Setiap OPD
Perangkat lunak dan pemrograman	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap OPD	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Jaringan LAN (internal OPD di belakang router)	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap OPD (dibantu pihak ketiga)	Setiap OPD (dibantu pihak ketiga)	OPD (kewajiban koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan

Jenis SI/TI	Pembangun Sistem	Operator & Admin Sistem	Pemelihara atau Perawat Sistem	Pengembang Sistem
				Informatika)
Infrastruktur dan Jaringan WAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Server	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika

3) Membangun Sistem dan Layanan *Service Desk*

Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif merupakan tanggung jawab setiap OPD terhadap layanan yang dimiliki masing-masing. Kondisi eksisting di Kabupaten Situbondo masih banyak OPD yang belum memiliki *service/help desk* guna menangani insiden dalam layanan. Untuk itu diusulkan dua jenis service desk yang ada di Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

1) *Service Desk* Tier 1

Service desk tier 1 berfungsi untuk menangani **masalah yang bersifat dasar**. *Service desk* ini digunakan untuk dukungan masalah tingkat dasar seperti memecahkan masalah penggunaan dan memenuhi permintaan *service desk* yang memerlukan keterlibatan TI. Jika tidak ada solusi yang tersedia, personil *tier* 1 mengeskalasi insiden ke tingkat yang lebih tinggi. Personil yang dibutuhkan pada tier 1 adalah personil teknis tingkat bawah yang dilatih untuk memecahkan masalah yang diketahui dan untuk memenuhi permintaan layanan dengan mengikuti SOP atau panduan. *Service desk tier* 1 harus ada di setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2) *Service Desk* Tier 2

Service desk tier 2 ini berfungsi untuk dukungan **teknis yang mendalam.** Personil yang dibutuhkan pada tier 2 adalah teknisi yang berpengalaman dan berpengetahuan menilai masalah dan memberikan solusi untuk masalah yang tidak dapat ditangani oleh tingkat 1 serta personel dengan pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan. *Service desk* tier 2 harus diadakan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Situbondo. Berikut rekomendasi pengadaan *Service Desk* untuk OPD Kabupaten Situbondo. Detail data dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel *3*.3 Rekomendasi Usulan Service Desk

Kode OPD	Nama OPD	Target Pelaksanaan *Service Desk* 1	Target Pelaksanaan *Service Desk* 2
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	2023	-
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2023	-
3	Bagian Hukum	2023	-
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	2023	-
6	Bagian Umum	2023	-
7	Bagian Organisasi	2023	-
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2023	-
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2023	-
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2023	-
11	Inspektorat	2023	-
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2023	-
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2023	-
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2023	-
15	Badan Pendapatan Daerah	2023	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2023	-
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2023	-
19	Dinas Ketenagakerjaan	2023	-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	2023	2024
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	2023	-
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2023	-
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2023	-
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	2023	-
29	Dinas Perhubungan	2023	-
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2023	-
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2023	-
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	2023	-
33	Dinas Sosial	2023	-
34	Satuan Polisi Pamong Praja	2023	-
36	Kecamatan Situbondo	2023	-

Kode OPD	Nama OPD	Target Pelaksanaan *Service Desk* 1	Target Pelaksanaan *Service Desk* 2
37	Kecamatan Bungatan	2023	-
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2023	-

4) Peningkatan Kompetensi SDM TI

Strategi peningkatan kompetensi SDM TI ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK yang dimiliki dari setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo, melalui program kegiatan training dan sertifikasi bidang TI. Penjabaran secara detail akan dijelaskan secara rinci pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Situbondo Bab 5 Sub Bab 5.5.3 dan 5.5.4 tentang Analisis Kebutuhan Training dan Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM.**

3.1.2 Penguatan Kebijakan SPBE

Penguatan kebijakan SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dengan tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Rekomendasi pembuatan kebijakan yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan nilai indeks pada domain kebijakan SPBE yang tertuang pada **Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Tahun 2021 Kabupaten Situbondo**. Rekomendasi penguatan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4 Peta Rencana Penguatan Kebijakan SPBE

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan Perbaikan	Tahun
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE			
Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE				
1	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal**	2023

No	Indikator	Nilai Tingkat	Usulan Perbaikan	Tahun
			1 ayat 14 secara periodik	
2	Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 16** secara periodik	2023
3	Manajemen Data Pemerintah Daerah	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 48 ayat 2** secara periodik serta dapat meriviu kembali **Peraturan Bupati tentang satu data indonesia Kabupaten Situbindi dan juga Keputusan Bupati tentang penyelenggara forum dan sekertariat forum satu data indonesia Kabupaten Situbondo**	2023
4	Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	2	Kebijakan mengatur proses siklus pembangunan Aplikasi SPBE yang telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan TIK. Serta	2023

No	Indikator	Nilai Tingkat	Usulan Perbaikan	Tahun
			dapat melanjutkan melaksanakan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini peraturan **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang 23020Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Situbondo Pasal 34 ayat 1** secara periodik.	
5	Layanan Pusat Data	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 ayat 1** Secara Periodik	2023
6	Layanan Jaringan Intra	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 27 Ayat 1** Secara periodik	2023
7	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal**	2023

No	Indikator	Nilai Tingkat	Usulan Perbaikan	Tahun
			28 ayat 1 secara periodik	
8	Manajemen Keamanan Informasi	1	Menetapkan Kebijakan terkait Manajemen Keamanan Informasi dimana kebijakan tersebut mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Selanjutnya dapat dilaksanakan riviu dan evaluasi **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 28 ayat 1** secara periodik, selain itu dapat juga dilakukan **reviu dan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Nomor: 188/75/431.216.1/SK/2021 Tentang Computer Security Incident Respons Team Kabupaten Situbondo Tahun 2021**	2023

No	Indikator	Nilai Tingkat	Usulan Perbaikan	Tahun
9	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Pasal 57 ayat 1** secara periodik.	2023
10	Tim Koordinasi SPBE	3	Melakukan reviu dan evaluasi pada kebijakan bupati dalam hal ini **Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo** Pasal 61 ayat 1 secara periodik. Melakukan reviu dan evaluasi juga terhadap **Keputusan Bupati SItubondo Nomor: 188/169/P/001.3/2022 Tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022** dan **Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/170/P/001.3/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik Kabupaten Situbondo Tahun 2022**	2023

3.1.3 Peta Rencana Penyelenggara SPBE

Setelah dilakukan analis terhadap kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka tahap selanjutnya yaitu perlu adanya pengusulan pengadaan SDM TIK yang harus ada pada setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1) Tim Koordinasi SPBE

Berdasarkan kondisi saat ini atau pada Laporan Hasil Evaluasi pada Indikator 10 dan 19, yakni nilai Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah 3 dan Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah 2. Dikarenakan nilia tingkat kematangan Tim Koordinasi SPBE adalah 2 mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemanauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa untuk naik ke nilai tingkat kematangan yang tinggi dapat dilaksanakan pemenuhan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi, dan melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik yang bisa dilaksanakan juga menindaklanjuti dengan kebijakan baru serupa. Penjelasan lebih detail dan lengkap dapat dilihat pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE pada Bab 5.4 Analisa Usulan Penyelenggara SPBE**.

2) Peta Rencana Pengadaan SDM SPBE

Setelah melakukan analisis kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka selanjutnya perlu dilakukan pengusulan penanggung jawab dan pengadaan SDM TIK yang harus ada di setiap OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1. **Kompetensi Perencanaan SPBE**

   Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** rencana SPBE dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanggung jawab terkait perencanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo. Untuk perencanaan kompetensi SDM maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. **Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan**

   Rekayasa proses bisnis pemerintahan dikelola oleh **Bagian Organisasi** pada Sekretariat Daerah yaitu menyusun pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Oleh karena itu, Kepala Sekretariat Biro Organisasi dan Kepala Sekretariat Daerah harus memiliki kompetensi terkait rekayasa proses bisnis pemerintahan dalam melaksanakan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkoordinasi dan berperan dalam menentukan prosedur pendokumentasian terkait proses bisnis pemerintahan.

3. **Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal**

   Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun pelaksanaan dari pengelolaan TIK haruslah dilakukan oleh semua OPD di Pemerintahan

Kabupaten Situbondo. Untuk kedepannya pemenuhan kebutuhan pengelolaan sistem digital akan meningkat, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan dalam pengelolaan TIK. Dalam hal ini penambahan kompetensi tidak sama dengan penambahan pegawai, karena bisa saja satu pegawai menguasai beberapa kompetensi TIK yang diperlukan. Untuk OPD yang sudah termasuk ke dalam OPD mandiri TIK, terdapat 9 kompetensi yang harus dimiliki yaitu Teknisi Komputer, Teknisi & Admin Jaringan, Service/Help Desk, Admin Website, Admin *Database*, Analis Sistem & Desain, Programmer, Operator/User Sistem, Dan Admin Keamanan TI. Untuk usulan kompetensi lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5 Usulan Kompetensi SDM TIK

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Operator / User Sistem	Teknisi Komputer	2023
			Admin Website	2025
			Service / Help Desk	2023
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2023
3	Bagian Hukum	Admin *Database*	Service / Help Desk	2025
		Admin Website		
		Programmer		
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2025
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2023
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Keamanan TI	Operator / User Sistem	2023
		Admin Website	Service / Help Desk	2023
		Admin *Database*	Programmer	2024-2025
		Analis Sistem & Desain		

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
		Teknisi dan Admin Jaringan		
		Teknisi Komputer		
6	Bagian Umum	Admin Website	Service / Help Desk	2023
		Operator / User Sistem	Teknisi Komputer	2024
7	Bagian Organisasi	Operator / User Sistem	Admin Website	2025
			Service / Help Desk	2023
			Teknisi Komputer	2024
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2025
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2024
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2025
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2024
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website	Teknisi Komputer	2024
		Analis Sistem & Desain	Service / Help Desk	2023
		Operator / User Sistem		
11	Inspektorat	Teknisi Komputer	Programmer	2024
			Teknisi & Admin Jaringan	2024
			Admin Keamanan TI	2023 dan 2025
		Admin *Database*	Admin Website	2023
			Analis Sistem & Desain	2023
			Service / Help Desk	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
			Operator / User Sistem	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Programmer	Teknisi & Admin Jaringan	2023
		Admin *Database*	Admin Keamanan TI	2023
		Analis Sistem & Desain	Admin Website	2023
		Operator / User Sistem	Teknisi Komputer	2023
			Service / Help Desk	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Website	Service / Help Desk	2023
		Teknisi Komputer		
		Operator / User Sistem		
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analis Sistem & Desain	Service / Help Desk	2023
		Admin Website		
		Operator / User Sistem		
		Programmer		
		Teknisi dan Admin Jaringan		
		Teknisi Komputer		
15	Badan Pendapatan Daerah	Programmer	Teknisi & Admin Jaringan	2023
			Admin Keamanan TI	2023
			Admin *Database*	2023 dan 2024
		Operator / User Sistem	Admin Website	2024
			Analis Sistem & Desain	2023
			Teknisi Komputer	2023
			Service / Help Desk	2023
16	Badan Perencanaan	Analis Sistem & Desain	Admin Keamanan TI	2023 dan 2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
	Pembangunan Daerah	Admin Website	Admin *Database*	2023
		Operator / User Sistem	Teknisi Komputer	2023
		Programmer	Service / Help Desk	2023
		Teknisi dan Admin Jaringan		
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin *Database*	Teknisi & Admin Jaringan	2024
			Admin Keamanan TI	2023 dan 2024
			Admin Website	2023
			Analis Sistem & Desain	2024
		Programmer	Teknisi Komputer	2023
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2023
18	Dinas Kesehatan	Admin Keamanan TI	Programmer	2023
		Admin Website		
		Admin *Database*		
		Programmer	dev op	2023
		Analis Sistem & Desain		
		Operator / User Sistem		
		Service/Help Desk	Data Science	2023
		Teknisi Komputer		
		Teknisi dan Admin Jaringan		
19	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2023
			Admin Website	2024
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
			Sistem	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin Keamanan TI	Admin *Database*	2023 dan 2024
		Analis Sistem & Desain		
		Admin Website	Teknisi Komputer	2023
		Operator / User Sistem		
		Programmer	Service / Help Desk	2023
		Teknisi dan Admin Jaringan		
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Admin *Database*	Admin Keamanan TI	2023 dan 2024
		Programmer	Analis Sistem & Desain	2024
		Teknisi Komputer	Service / Help Desk	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Operator/User Sistem	2024
		Admin Website	Admin Website	2023
		Operator/User Sistem		
22	Dinas Lingkungan Hidup	Service/Help Desk	Tidak ada usulan	Tidak Ada Usulan
		Teknisi Komputer		
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2023
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Admin Keamanan TI	Tidak Ada Usulan	Tidak Ada Usulan
		Admin Website		
		Admin *Database*		
		Analis Sistem & Desain		

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
		Programmer		
		Operator/User Sistem		
		Service/Help Desk		
		Teknisi & Admin Jaringan		
		Teknisi Komputer		
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2023
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Admin Website	Service / Help Desk	2023
		Operator/User Sistem	Teknisi Komputer	2024
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin Keamanan TI	Tidak Ada Usulan	Tidak Ada Usulan
		Admin *Database*		
		Admin Website		
		Service/Help Desk		
		Operator/User Sistem		
		Programmer		
		Teknisi & Admin Jaringan		
		Teknisi Komputer		
		Analis Sistem & Desain		
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Admin *Database*	Teknisi Komputer	2023
		Operator/User Sistem		
		Admin Keamanan TI		

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
		Admin Website		
		Programmer		
		Service/Help Desk		
		Teknisi & Admin Jaringan		
		Analis Sistem & Desain		
29	Dinas Perhubungan	Tidak Ada	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2023
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2024
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Admin Website	Teknisi Komputer	2023
			Service / Help Desk	2023
			Operator / User Sistem	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Operator/User Sistem	2024
			Teknisi Komputer	2024
			Service / Help Desk	2023
			Admin Website	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Operator/User Sistem	Teknisi Komputer	2024
		Admin Website	Service / Help Desk	2023
33	Dinas Sosial	Teknisi Komputer	Service / Help Desk	2023
			Admin Website	2023
			Operator/User Sistem	2024
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Admin *Database*	Service / Help Desk	2023
		Operator/User Sistem	Teknisi Komputer	2023
		Admin Website		
35	RSUD dr. Abdoer	Admin *Database*	Programmer	2023 dan

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
	Rahem	Operator/User Sistem		2024
		Teknisi Komputer		
		Admin Keamanan TI		
		Teknisi & Admin Jaringan	Analis Sistem & Desain	2024
		Service/Help Desk		
		Admin Website		
36	Kecamatan Situbondo	Operator/User Sistem	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2023
			Service / Help Desk	2023
37	Kecamatan Bungatan	Admin Website	Teknisi Komputer	2024
			Operator/User Sistem	2024
			Service / Help Desk	2023
38	Puskesmas Situbondo	Service/Help Desk	Tidak Ada Usulan	Tidak Ada Usulan
		Admin *Database*		
		Teknisi & Admin Jaringan		
		Admin Website		
		Teknisi Komputer		
		Admin Keamanan TI		
		Analis Sistem & Desain		
		Operator/User Sistem		
39	Puskesmas Bungatan	Admin Website	Teknisi & Admin Jaringan	2023
		Admin Keamanan TI		
		Operator/User Sistem		
		Analis Sistem & Desain	Admin *Database*	2025
		Service/Help Desk		

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan SDM TIK	Tahun
		Teknisi Komputer		
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi & Admin Jaringan	Teknisi Komputer	2024
			Admin Website	2023
		Operator/User Sistem	Service / Help Desk	2023
			Programmer	2024

3) Analisis Kebutuhan Training SDM

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini dari 223 SDM TIK hanya **13 orang SDM TIK** yang **memiiki pengalaman mengikuti training**. Dan **210 SDM TIK belum memiliki pengalaman training** di bidang TIK. Dari 13 orang training yang diikuti antara lain adalah Bimtek dan Diklat Pengelolaan JDIH, *Training Cyber Scurity Esensia*l dari Cisco 2021, *Data Science Fundamental* Penyelenggara Kemenkominfo 2022, Pelatihan dasar *microtic* manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Situbondo 2020, pelatihan *data science* untuk proses pengambilan keputusan oleh UNEJ 2022, pelatihan *basic coding* dari UNEJ 2022, dan Pelatihan inixindo *hardware* dan jaringan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak SDM TIK yang belum memiliki pengalaman training di bidang TIK. Berikut usulan kebutuhan training yang di usulkan untuk masing masing OPD seperti pada **table 3.6.**

Tabel 3.6 Prioritas Usulan Kebutuhan *Training* SDM

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
3	Bagian Hukum	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer	2025

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
					OPD	
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen	Administrasi Jaringan	Kepala Bidang Aset	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
			Fasilitas TI	Komputer (CCNA Routing and Switching)		
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database)	Staff IT	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
6	Bagian Umum	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT	2024
7	Bagian Organisasi	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				(CCDA) (*Online*)		
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2027
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help	Sistem	Service Desk	Service Desk	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Desk	Manajemen Layanan TI	(CompTIA A+) (Online)	Tier 1	
11	Inspektorat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2025
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)		2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				(*Online*)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				(*Online*)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				Komputer (CCDA) (*Online*)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer PD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				(*Online*)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
18	Dinas Kesehatan	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	pentest (CompTIA PenTest+ (Ethical Hacking))	Staff IT	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				ITF+) (Online)		
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2025
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2025
19	Dinas Ketenagakerjaan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi dan Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2025
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2025
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer PD	2024
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
29	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
33	Dinas Sosial	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2026
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
			Layanan TI	(Online)		
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
36	Kecamatan Situbondo	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
37	Kecamatan Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
38	Puskesmas Situbondo	Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online)*	Staff IT	2025
		Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2026
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2026
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2025
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
39	Puskesmas Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan	Teknis Keamanan Informasi	Staff IT	2026

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Training Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
			Kepatuhan	(CCNA Security)		
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2025
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)		2024
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi & Admin Jaringan	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (Online)	Programmer OPD	2024

4) Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Situbondo saat ini dari 223 SDM TIK hanya **terdapat 7 atau sekitar 3% pegawai yang telah bersertifikasi di bidang TIK, sedangkan sisanya 97% atau sebanyak 216 SDM TIK menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengalaman sertifikasi berkaitan dengan TIK.** Staff yang bersertifikasi diantaranya berkompetensi sebagai Admin Database, Admin Website, dan Programmer. Serifikasi yang didapat berupa Sertifikat Peserta Diklat dan Sertifikat untuk training Bimtek dan Diklat Programmer dan sertifikat pelatihan inixindo hardware dan jaringan. Berikut usulan kebutuhan training yang di usulkan untuk masing masing OPD seperti pada **Table 3.7.**

Tabel 3.7 Prioritas Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1	2023
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT	2023
3	Bagian Hukum	Admin	Sistem	Desain Basis	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Database	Manajemen Data	Data (Database)		
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	IoT	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Staff IT	2023
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database)	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
6	Bagian Umum	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Staff IT	2024
7	Bagian Organisasi	Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				ITF+) (Online)		
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2025
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2027
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
11	Inspektorat	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2025
		Admin	Keamanan	Teknis	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Keamanan TI	Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Keamanan Informasi (CCNA Security)		
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				Security)		
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				ITF+) (Online)		
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database)	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				(*Online*)		
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi	Manajemen Keamanan	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
			Informasi dan Kepatuhan	Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)		
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin	Sistem	Web Content	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Website	Manajemen Layanan TI	Management and social media		
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
18	Dinas Kesehatan	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2025
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				Testing		
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2025
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2025
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Pentest	Staff IT	2023
19	Dinas Ketenagakerjaan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi	Manajemen Keamanan	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
			Informasi dan Kepatuhan	Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)		
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Teknisi dan Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Admin	Sistem	Web Content	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Website	Manajemen Layanan TI	Management and social media		
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				ITF+) (Online)		
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin	Sistem	Big Data Anayst	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Database	Manajemen Data	(Online)		
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Staff IT	2025
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti	Teknisi Komputer	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
	Penduduk, dan Keluarga Berencana		digital	(CompTIA ITF+) (Online)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2025
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Staff IT	2024
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	Kepala Bidang Aset	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				and Switching)		
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	Kepala Bidang Aset	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				and Switching)		
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
29	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Operator / User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi	Infrastruktur	Desain Jaringan	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Komputer	dan Jaringan	Komputer (CCDA) (*Online*)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
33	Dinas Sosial	Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data	Staff IT	2026

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				(Database) (*Online*)		
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Big Data Anayst (Online)	Staff IT	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2023
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2023
		Teknisi & Admin	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan	Kepala Bidang	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
		Jaringan		Komputer (CCNA Routing and Switching)	Aset	
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Programmer	Pemrograman	IoT (*Online*)	Programmer OPD	2024
		Programmer	Pemrograman	Programmer (OCA, OCP)	Programmer OPD	2023
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2024
36	Kecamatan Situbondo	Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
37	Kecamatan Bungatan	Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA	Staff IT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
				ITF+) (Online)		
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
38	Puskesmas Situbondo	Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Admin Database	Sistem Manajemen Data	Desain Basis Data (Database) (*Online)*	Staff IT	2025
		Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2025
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2026
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Staff IT	2026
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2025
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
39	Puskesmas	Admin	Sistem	Web Content	Staff IT	2023

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan Usulan SDM TIK	Detail	Usulan Sertifikasi Spesifik Kompetensi	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
	Bungatan	Website	Manajemen Layanan TI	Management and social media		
		Admin Keamanan TI	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Staff IT	2026
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2024
		Analis Sistem & Desain	Analis dan Desain Sistem	Analisis dan Sofware Testing	Staff IT	2025
		Service/Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi & Admin Jaringan	Infrastruktur dan Jaringan	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Kepala Bidang Aset	2024
		Operator/User Sistem	Perangkat keras dan piranti digital	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Staff IT	2023
		Teknisi Komputer	Infrastruktur dan Jaringan	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Staff IT	2024
		Admin Website	Sistem Manajemen Layanan TI	Web Content Management and social media	Staff IT	2023
		Service / Help Desk	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk Tier 1	2023

3.1.4 Inovasi Proses Bisnis

Peta proses bisnis milik Kabupaten Situbondo sudah mengacu permen-PANRB 19 Tahun 2018. Tetapi pada setiap kalimat proses belum menunjukkan sebuah proses dan susunan penggambarannya masih belum sesuai pada kerangka yang terdapat pada **Permen-PANRB 19 Tahun 2018**. Sehingga perlu dilakukan inovasi penggambaran ulang untuk perbaikan kalimat pada setiap prosesnya, dari proses utama, majerial dan pendukung. Berikut bentuk gambar perbaikan peta proses bisnis milik Kabupaten Situbondo, dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

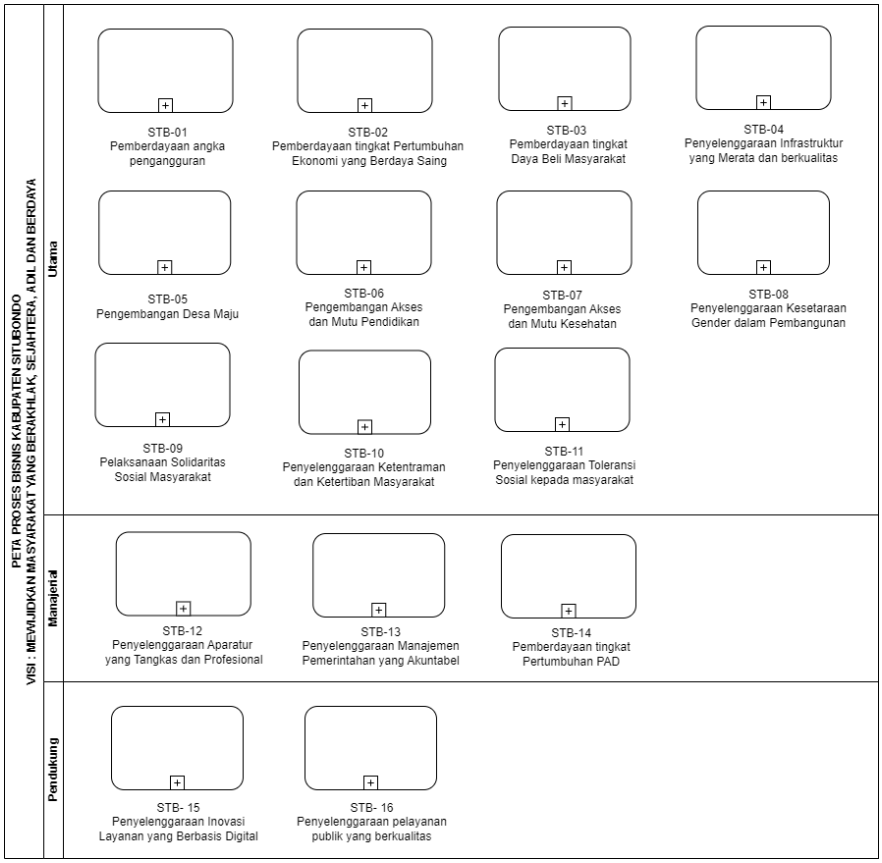

Gambar 3.1 Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupate Situbondo

Berdasarkan **Gambar 3.1** Penyusunan Inovasi Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo dilakukan dengan mengacu **Permen-PANRB 19 Tahun 2018.** Peta Proses bisnis diatas terdiri dari Proses Utama, Proses Manajerial, dan Proses Pendukung. Dari setiap prosesnya diambil dari visi, misi, dan tujuan yang diturunkan ke Sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Pada **Gambar 3.1** Proses utama diidentifikasikan dari sasaran yang merupakan proses yang menunjukkan aliran utama, Proses manajerial berasal dari sasaran yang dapat memastikan proses utama dapat berjalan dengan baik, dan Proses pendukung berasal dari sasaran yang dapat mendukung proses utama agar berjalan dengan baik. Inovasi proses bisnis Kabupaten Situbondo disusun sampai level 1 yang di identifikasikan dari program yang terdapat pada masing-masing sasaran, lebih detail gambar level 1 dapat dilihat pada **Buku 2 Arsitektur**

Proses Bisnis dan SOP Lampiran Level 1 Peta Proses Bisnis Kabupaten Situbondo.

3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai usulan prioritasi untuk setiap manajemen SPBE. Usulan tersebut berdasarkan dari analisis gap dan bertujuan untuk menjadikan kondisi manajemen SPBE yang ada saat ini mampu untuk mencapai kondisi yang ideal. Usulan-usulan diambil dari beberapa *best pratice* dan peraturan-peraturan terkait yang dijelasakan secara detail pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3.8 Peta Rencana Manajemen SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
A.	**Manajemen Risiko SPBE**							
	Referensi Hukum : Peraturan Menteri RB 5/2020, ISO 31000							
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manaejemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya risiko SPBE	Inspektorat	v				
2	Penentuan struktur pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE	Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah	Inspektorat	v	v			
3	Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi	Penerapan Manajemen Risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD	Inspektorat	v	v	v	v	
4	Penetepan Konteks Risiko SPBE	Inventarisasi Informasi Umum Penerapan Manajemen Risiko	Inspektorat	v	v			
		Identifikasi Sasaran SPBE dengan menguraikan sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE	Inspektorat	v	v			
		Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dengan menguraikan unit oemilik risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE	Inspektorat	v	v			
		Identifikasi Pemangku Kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah atau non instansi pemerintah	Inspektorat	v	v			
		Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Manajemen Risiko	Inspektorat	v	v			
		Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
		Penyusun dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat		v	v		
5	Penilaian Risiko SPBE	Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat	v	v			
		Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat	v	v			
		Penetapan Kategori Risiko SPBE	Inspektorat	v	v			
		Penetapan Area Dampak Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v		
		Penetapan Kriteria Risiko SPBE	Inspektorat	v	v			
		Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Inspektorat	v	v			
		Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat	v	v			
6	Evaluasi Risiko SPBE	Penyusunan evaluasi risiko SPBE	Inspektorat			v	v	v
7	Penanganan Risiko SPBE	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan peanggung jawabnya	Inspektorat			v	v	v
8	Pencatatan dan Pelaporan	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat			v	v	v
B.	**Manajemen Keamanan Informasi**							
	Referensi Hukum : BSSN 4/2020, BSSN 10/2019, ISO 27001, Indeks KAMI							
1	Penyusunan Dokumen Mananjemen Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v			
2	Pembuatan Kerangka Kerja	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi	Dinas Komunikasi	v	v	v		

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Keamanan Informasi	SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	dan Informatika					
3	Pengelolaan Aset informasi	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentaan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		v	v	v	v
4	Penyusunan kebijakan peangamananinformasi	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v			
5	Pembinaan dan pengawasan teknis	Pelaksanaan sosialisasi, pelatiihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
C.	**Manajemen Data**							
	Referensi Hukum : Peraturan Bapenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019							
1	Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v			
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah	Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan	v	v			

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
			Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika					
3	Manajemen arsitektur data	Perencanaan data induk dan data referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v			
4	Manajemen Data Induk dan Data Referensi	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v		
		Pemeriksaan data induk dan data referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
		Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh	- Badan		v	v	v	

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang	Perencanaan Pembangunan Daerah					
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
		Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
5	Manajemen Basis Data	Penyimpanan data pada pusat data nasional	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
6	Manajemen Kualitas Data	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		v	v	v	
			- Dinas Komunikasi dan					

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
			Informatika					
D	**Mananjemen Aset TIK**							
	Referensi Hukum : Perpres Nomer 95 Tahun 2018, ITIL							
1	Pengelolaan Aset TIK	Menginventarisasi aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan infrastruktur)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
2	Dokumen pedoman Perencanaan Aset TIK	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v	v			
3	Dokumen pedoman pengadaan aset TIk	Penyusunan laporan pengadaan aset TIk	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
4	Dokumen pedoman penghapusan Aset TIK	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
E	**Mananjemen Sumber Daya Manusia SPBE**							
	Referensi Hukum : Perperes Nomor 59 Tahun 2018, Permenpan Nomor 59 Tahun 2021, Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2021							
1	Perencanaan Kegiatan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	v	v			
2	Penyusunan Struktur berdasarkan kompetensi	Penyusunan peta jabatan	Badan Kepegawaian dan	v				v

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
			Pengembangan Sumberdaya Manusia					
3	Pembuatan Dokumen Pencatatan dan Pelaporan	Proses Manajemen SDM SPBE meliputi beberapa proses yaitu: - Perencanaan SDM SPBE (Kebutuhan Kompetensi & Analisis Jabatan) - Pengadaan Kompetensi SDM SPBE (Perekrutan/Seleksi/ Sertifikasi/Bintek/Training) - Pengelolaan Karir & Evaluasi/Penilaian Kinerja SDM SPBE - Penghargaan/Kesejahteraan SDM SPBE - Hubungan Kerja (Kontrak, Penghentian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	v	v	v	v	v
4	Pembinaan Sumber daya manusia SPBE	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK dengan tahapan pelaksanaan ▪ Perencanaan & Strategi ▪ Pengumpulan ▪ Pengolahan ▪ Penyimpanan ▪ Penggunaan ▪ Alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	v	v	v	v	v
F	**Mananjemen Pengetahuan**							
	Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018							
1	Penyusunan Dokumen pedoman Manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen pengetahuan	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	v	v			

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
			- Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD					
2	Dokumen perencanaan manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD	v	v			
3	Pembinaan Manajemen Pengetahuan	Pelaksanaan pendampingan manajemen pengetahuan	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD	v	v	v	v	v
4	Evaluasi dan Monitoring	Laporan pelaksanaan pengembangan	- Badan	v	v	v	v	v

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Manajemen Pengetahuan	manajemen pengetahuan	Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretaris OPD					
G	**Mananjemen Perubahan SPBE**							
	Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018							
1	Penyusunan Log Manajemen perubahan	Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja pusat data dan informasi	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v			
2	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Penerapan dokumen kebijakan dan Pedoman untuk seluruh proses dan dokumen yang ada diseluruh unit kerja (versi baru)	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v	v	v	v
3	Pembinaan Manajemen Perubahan	Sosialisasi kebijakan dan pedoman manajemen perubahan yang telah dibuat untuk seluruh unit kerja	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v	v	v	v
4	Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	Laporan pelaksanaan manajemen perubahan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD		v			v
H	**Mananjemen Layanan SPBE**							

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL							
1	Perencanaan Manajemen Layanan	▪ Penyusunan Klasifikasi SIstem ▪ Penetapan Target Pelayanan Pengguna ▪ Penetapan Target Pengoprasian Layanan ▪ Perumusan Katalog Layanan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v	v	v	v
2	Pelayanan Pengguna	Permintaan Layanan dan Perumusan penanganan gangguan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v	v	v	v
3	Pengoprasian Layanan	▪ Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan ▪ Pemulihan Layanan ▪ Sosialisasi Pembentukan Service / Help Desk	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v	v	v	v
4	Evaluasi	Penyusunan Laporan Evaluasi	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Seluruh OPD	v	v	v	v	v

3.3 Peta Rencana Usulan Integrasi Data

Integrasi data adalah proses menghubungkan atau menggabungkan beberapa set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu tempat penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk **mengurangi duplikat atau redudansi** dari data yang ada. Sesuai dengan tujuan dari **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta **mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah**. Pada bagian ini, akan diusulkan peta rencana integrasi antar data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial.

3.3.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Integrasi data kependudukan merupakan proses penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan**. Untuk usulan peta rencana integrasi data kependudukan dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Peta Rencana Integrasi Data Kependudukan

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Objek Pajak	VTAX	2024
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Subjek pajak	VTAX	2024
15	Badan Pendapatan Daerah	Data wajib pajak	VTAX	2024
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Kepegawaian	Milea, Simpeg, SLKS	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kependudukan	SIKANDA SILAO PETIR BALADA AKHIR	2023
18	Dinas Kesehatan	Rekam Medik	SIKDA	2023
19	Dinas Ketenagakerjaan	Data Peserta transmigrasi	SIM-TTK (Aplikasi Usulan)	2025
19	Dinas Ketenagakerjaan	Data warga resettlemen	SIM-TTK (Aplikasi Usulan)	2025
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data perizinan	SIPINTER SiTajin	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Siswa	Sisgur	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Sisgur	2023

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Data Pelaku Usaha Perikanan	Sistem Informasi Perikanan (Aplikasi Usulan)	2025
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data pasien	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Data rekam medis pasien RSUD	SIMRS RSUD dr. Abdoer Rahem	2023

Total terdapat 14 usulan integrasi data terkait kependudukan. Pelaksanaan integrasi data kependudukan pada tahun **2023 diusulkan untuk 7 data**. Pada tahun **2024 diusulkan untuk** melakukan integrasi pada **4 data** dan pada tahun **2025 diusulkan** melakukan integrasi **untuk 3 data**. Usulan tahun diambil berdasarkan tingkat kepentingan dan kemiripan data.

3.3.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Integrasi data kepegawaian merupakan penggabungan atau penghubungan **data-data yang berkaitan dengan Nomor Induk Pegawai**. Untuk detail peta rencana usulan data-data terkait kepegawaian yang harus diintegrasikan dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10 Peta Rencana Integrasi Data Kepegawaian

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
7	Bagian Organisasi	Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	e-Sakip	2024
7	Bagian Organisasi	Data Analisis Jabatan	SIMONA	2024
7	Bagian Organisasi	Data Struktur dan Pemangku Jabatan	SIMONA	2024
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Kepegawaian	Milea, Simpeg, SLKS	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Laporan Kinerja	Milea, e-kinerja	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Mutasi	Milea, Emutasi	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Pensiun	Milea	2023

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data SKP	Milea	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data PNS bermasalah	Milea	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Kepangkatan	Milea, Usulkp	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Rekomendasi Diklat ASN Kenaikan Pangkat	Milea	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Data Diklat	ABANGSITUR	2025
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Daftar Gaji	SIM GAJI	2025
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Sisgur	2025

Total terdapat 14 usulan integrasi data terkait kepegawaian. Pelaksanaan integrasi data kepegawaian pada tahun **2023 diusulkan untuk 8 data**. Pada tahun **2024 diusulkan untuk** melakukan integrasi pada **3 data** dan pada tahun **2025 diusulkan** melakukan integrasi **untuk 3 data**. Usulan tahun diambil berdasarkan tingkat kepentingan dan kemiripan data.

3.3.3 Usulan Integrasi Data Keuangan

Integrasi data keuangan merupakan proses penggabungan atau penghubungan antar **data-data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, pendapatan daerah dan aset atau barang milik daerah**. Untuk peta rencana data terkait keuangan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Peta Rencana Integrasi Data Keuangan

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Data Target dan Realisasi Anggaran	Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan (Aplikasi Usulan)	2024
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data Keuangan Akhir tahun	SIRKA	2024

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data RAB barang	siperang	2024
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengembangan SIMBADDA (Aplikasi Usulan)	2024
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pemeliharaan Barang Milik Daerah	E-MASDA	2024
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Penerbitan SPD	SIRKA	2025
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data TPTGR	SIRKA	2025
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data SPJ Fungsional	SIRKA	2025
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Daftar Gaji	SIM GAJI	2025
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data LKPD	SIRKA	2024
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Penyusutan BMD	siperang	2024
15	Badan Pendapatan Daerah	Data transaksi pajak	Simpada	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Data BPHTB	E-BPHTB	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak Daerah Lainnya	E-PDL	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak Katering Online	PAJAK KATERING ONLINE	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Data PBB	SITERAS	2023

Total terdapat 16 usulan integrasi data terkait keuangan. Pelaksanaan integrasi data keuangan pada tahun **2023 diusulkan untuk 5 data**. Pada tahun **2024 diusulkan untuk** melakukan integrasi pada **7 data** dan pada tahun **2025 diusulkan** melakukan integrasi **untuk 4 data**. Usulan tahun diambil berdasarkan tingkat kepentingan dan kemiripan data.

3.3.4 Usulan Integrasi Data Spasial

Sistem Informasi Geospasial (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasial atau geografi. SIG nantinya akan dikelola oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**. Saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo masih belum memiliki SIG sehingga, diperlukan penataan data-data spasial yang ada untuk pembangunan SIG kedepannya. Pada **Tabel 3.12** akan

menjelaskan peta rencana usulan data spasial yang akan diintegrasikan pada aplikasi SIG.

Tabel 3.12 Peta Rencana Integrasi Data Spasial

Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Tahun
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Data rupa bumi	2023
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data tempat peribadatan	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Kemiskinan	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Pertanian	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data koperasi	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data UKM	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data Toko Modern	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Data Pasar	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kualitas sungai	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kualitas udara	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kawasan konservasi lingkungan	2023
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data Destinasi Wisata	2023
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data penginapan	2023
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Data pelaku usaha pariwisata	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jalan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jembatan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Air Minum	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Drainase	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jalan Lingkungan	2023

Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Tahun
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Air Limbah RT	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Bangunan Gedung	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Perumahan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Permukiman Kumuh	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Daerah Irigasi	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Jaringan Irigasi	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Data Curah Hujan	2023
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data investasi	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Lembaga/Sekolah	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data cagar budaya	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data kesenian	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Luasan Tanaman	2023

Terdapat **31 data usulan** yang diampu oleh **10 OPD**. Tahun integrasi diusulkan berdasarkan peta rencana pembangunan SIG pada Kabupaten Situbondo. Pada peta rencana aplikasi, **SIG diusulkan dibangun pada tahun 2023**. Sehingga, semua data spasial yang akan ada pada SIG diusulkan dilakukan integrasi pada tahun 2023.

3.4 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. Dari kondisi eksisting SDI Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka diusulkan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan SDI. Penyusunan usulan ini diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Detail usulan dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Peta Rencana Usulan Tata Kelola Data

No	Kegiatan	Keterangan	OPD Terkait	Tahun
1.	Perencanaan data	Penentuan daftar data yang memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	2023
		Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas.	– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bupati Situbondo – Wakil Bupati Situbondo – Sekretaris Daerah Kabuaten Situbondo	2023
		Kesepakatan dan penyampaian daftar data yang telah disusun melalui forum satu data.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	2023
		Penyususnan rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup: a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten; b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia; c. kegiatan terkait pengumpulan Data; d. kegiatan terkait pemeriksaan Data; e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.	– Dinas Komunikasi dan Informatika – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	2023
2.	Pengumpulan data	Pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal pemutakhiran data atau	– Seluruh OPD – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	2024

No	Kegiatan	Keterangan	OPD Terkait	Tahun
		rilis data.		
		Penyampaian data yang telah dikumpulkan oleh produsen data kepada walidata.	– Seluruh OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika.	2024
3.	Pemeriksaan data	Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia oleh walidata.	– Bagian Organisasi – Bagian Tata Pemerintah – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Dinas Komunikasi dan Informatika.	2025
		Pengembalian data yang tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	2025
		Perbaikan data sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh produsen data.	Seluruh OPD.	
4.	Penyimpanan data	Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* menyimpan data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo ke dalam *data warehouse* yang tersimpan di pusat data daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	2026
5.	Penyebarluasan data	Pemberian akses data.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	2026
		Pendistribusian data dalam bentuk media cetak dan elektronik.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	2026
		Pembatasan akses data tertentu oleh walidata.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	2026
		Pertukaran data.	Dinas Komunikasi dan Informatika.	2026

Berdasarkan **Tabel 3.13** terdapat total **5 tahapan** yang diusulkan untuk **penyelenggaraan SDI di Kabupaten Situbondo**. Masing-masing tahapan diusulkan untuk dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, kecuali tahapan penyimpanan dan penyebarluasan data yang diusulkan dilakukan dalam tahun yang sama. Sehingga pada tahun 2023-2025 melakukan tahapan perencanaan data hingga ke pemeriksaan data. Dilanjutkan pada tahun 2026 dilakukan tahapan penyimpanan dan penyebarluasan data.

3.5 Peta Rencana Layanan SPBE

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan SPBE adalah serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Pada bagian ini akan membahas Peta Rencana layanan SPBE yang meliputi Peta Rencana Layanan Administrasi, Layanan Publik SPBE, dan Peta Rencana Layanan terhadap Program RPJMD.

3.5.1 Peta Rencana Layanan SPBE sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018

Pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu Layanan Administrasi Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Hasil pemetaan ketersediaan layanan terhadap aspek layanan diatas secara lengkap dapat dilihat pada Buku 1. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memenuhi semua aspek layanan administrasi berbasis elektronik. Sehingga **tidak ada peta rencana untuk layanan administrasi berbasis elektronik**.

Untuk layanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memenuhi semua aspek kecuali layanan terkait pertanahan. Sehingga diusulkan layanan terkait pertanahan berupa Layanan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman. Namun, **peta rencana dari usulan layanan** tersebut **akan dimasukkan pada peta rencana usulan layanan terhadap program**. Hal tersebut dikarenakan kesamaan usulan layanan.

3.5.2 Peta Rencana Pembuatan Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Perlu adanya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, hal ini guna agar penyelenggaraan aktivitas pemerintahan berjalan dengan baik.

1) Usulan SOP pada Layanan Eksisting

Pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo memiliki **640 Ketersediaan SOP** yang dimiliki oleh 40 OPD, tetapi hanya terdapat 338 (47%) SOP yang **telah mendukung** layanan eksisting sedangkan terdapat 302 (53%) Layanan yang belum didukung SOP. Dari kondisi tersebut dibutuhkan usulan SOP untuk mendukung layanan eksisting tersebut. Adanya SOP dapat memberikan panduan bagi Instansi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Detail usulan Peta Rencana SOP pada Layanan Eksisting SPBE dapat dilihat pada **Tabel 3.14.**

Tabel 3.14 Usulan Peta Rencana SOP pada Layanan Eksisting SPBE

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan fasilitasi PAW DPRD	SOP fasilitasi PAW DPRD	2024
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan pelantikan bupati dan wakil bupati	SOP pelantikan bupati dan wakil bupati	2023
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan koordinator pelaporan LPPD	SOP koordinator pelaporan LPPD	2024
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Layanan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	SOP Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	2024
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah ormas	SOP hibah ormas	2025
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah peribadatan	SOP hibah peribadatan	2024
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan peringatan hari besar keagamaan	SOP peringatan hari besar keagamaan	2023
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan pengembangan tilawatil Qur'an	SOP pengembangan tilawatil Qur'an	2025
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan pembinaan rohani	SOP pembinaan rohani	2025
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan pelatihan SDM tempat peribadatan dan pendidikan agama	SOP pelatihan SDM tempat peribadatan dan pendidikan agama	2024
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan isbat nikah	SOP isbat nikah	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan Rukyatul Hilal	SOP Rukyatul Hilal	2023
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan hibah pendidikan agama	SOP hibah pendidikan agama	2024
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layanan akomodasi jamaah haji	SOP akomodasi jamaah haji	2025
3	Bagian Hukum	Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	SOP Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	2023
3	Bagian Hukum	Layanan Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah	2024
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	SOP Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	2025
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	SOP Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2025
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air	SOP Rapat Koordinasi dan Menfasilitasi Bidang Energi dan Air	2025
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Percepatan Akses Keuangan Daerah	SOP Percepatan Akses Keuangan Daerah	2023
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah	SOP Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah	2023
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	SOP Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2023
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Pemaparan Informasi Mengenai Pembangunan	SOP Pemaparan Informasi Mengenai Pembangunan	2024
4	Bagian Perekonomian,	Layanan Permintaan Data ke Setiap OPD	SOP Permintaan Data ke Setiap OPD	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Pembangunan dan Sumber Daya Alam			
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layanan Mencukupi Permintaan Data dari Provinsi	SOP Mencukupi Permintaan Data dari Provinsi	2023
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi	SOP Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi	2023
6	Bagian Umum	Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan	SOP Fasilitasi Kerumahtanggaan	2024
6	Bagian Umum	Layanan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan	SOP fasilitasi perjalanan dinas pimpinan	2023
6	Bagian Umum	Layanan administrasi umum	SOP administrasi umum	2024
6	Bagian Umum	Layanan Fasilitasi Peminjaman Ruang	SOP Fasilitasi Peminjaman Ruang	2024
6	Bagian Umum	Layanan surat menyurat	SOP surat menyurat	2023
6	Bagian Umum	Layanan Hibah dan Bansos	SOP Hibah dan Bansos	2023
7	Bagian Organisasi	Pelayanan terpadu bergerak	SOP terpadu bergerak	2025
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyediaan jasa Sumber Daya Air dan Listrik	SOP Penyediaan jasa Sumber Daya Air dan Listrik	2023
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pimpinan Daerah	SOP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pimpinan Daerah	2023
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layanan Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SOP Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2023
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	SOP Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	2024
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran	SOP Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran	2023
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Persidangan dan Risalah	SOP Persidangan dan Risalah	2026
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Bagian Perundang-undangan	SOP Bagian Perundang-undangan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan informasi Sekretariat DPRD	SOP informasi Sekretariat DPRD	2024
11	Inspektorat	Layanan Konsultasi Pengawasan	SOP Konsultasi Pengawasan	2024
11	Inspektorat	Layanan Monitoring dan Evaluasi	SOP Monitoring dan Evaluasi	2026
11	Inspektorat	Layanan informasi Inspektorat	SOP informasi Inspektorat	2024
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	SOP Indeks Profesionalitas ASN	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan mutasi pegawai	SOP mutasi pegawai	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Jadwal Kepala BKPSDM	SOP Jadwal Kepala BKPSDM	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Informasi Kegiatan	SOP Informasi Kegiatan	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	SOP Sistem pendataan ORMAS	2023
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	SOP SISTEM PELAYANAN ORGANISASI MASYARAKAT JEMPUT BOLA (Sijempol Pelor)	2023
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan pembukuan kas	SOP pembukuan kas	2023
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan informasi tentang penyusutan barang milik daerah	SOP informasi tentang penyusutan barang milik daerah	2024
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan manajemen pajak daerah	SOP manajemen pajak daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pengelolaan PBB	SOP pengelolaan PBB	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pengelolaan BPHTB	SOP pengelolaan BPHTB	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pengelolaan pajak selain PBB dan BPHTB	SOP pengelolaan pajak selain PBB dan BPHTB	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pendaftaran pajak katering	SOP pendaftaran pajak katering	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pelacakan berkas pengajuan PBB	SOP pelacakan berkas pengajuan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
			PBB	
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan perubahan data objek atau subyek pajak	SOP perubahan data objek atau subyek pajak	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	SOP pemungutan pajak dan retribusi daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan koordinasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah	SOP koordinasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	SOP pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	SOP penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan sosialisasi dan penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	SOP sosialisasi dan penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	SOP Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Pelaporan dan verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	SOP Pelaporan dan verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retibrusi Daerah	SOP Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retibrusi Daerah	2023
15	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	SOP Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan penelitian dan inovasi	SOP penelitian dan inovasi	2024
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan bebas stunting	SOP bebas stunting	2023
16	Badan Perencanaan	Layanana Lapor kinerja	SOP Lapor kinerja	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Pembangunan Daerah	pegawai BAPPEDA	pegawai BAPPEDA	
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyediaan Air Minum	SOP Penyediaan Air Minum	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Data Perencanaan Pembangunan Desa	SOP Data Perencanaan Pembangunan Desa	2024
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Anti Proverty Program	SOP Anti Proverty Program	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Air Bersih	SOP Air Bersih	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan pendataan dan klasifikasi penduduk	SOP pendataan dan klasifikasi penduduk	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan informasi dan profil BAPPEDA	SOP informasi dan profil BAPPEDA	2024
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan RTLH	SOP RTLH	2024
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan perencanaan daerah	SOP perencanaan daerah (SIPD)	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan perubahan nama dan pewarganegaraan	SOP perubahan nama dan pewarganegaraan	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan kerjasama dan inovasi pelayanan	SOP kerjasama dan inovasi pelayanan	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	SOP pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan pengembangan aplikasi kependudukan	SOP pengembangan aplikasi kependudukan	2023
18	Dinas Kesehatan	Layanan sistem kesehatan daerah	SOP sistem kesehatan daerah	2023
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan kartu tenaga kerja luar negeri	SOP kartu tenaga kerja luar negeri	2024
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan informasi Ketenagakerjaan	SOP informasi Ketenagakerjaan	2024
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Pembinan warga resettlemen	SOP Pembinan warga resettlemen	2025
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan	SOP Pencegahan dan penyelesaian	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
		hubungan industrial.	perselisihan hubungan industrial.	
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan pendaftaran Pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB)	SOP pendaftaran Pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB)	2023
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Perjanjian kerja (PKWTT)	SOP Perjanjian kerja (PKWTT)	2023
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Transmigrasi	SOP Transmigrasi	2024
19	Dinas Ketenagakerjaan	Layanan Unit layanan disabilitas (DLB)	SOP Unit Layanan disabilitas (DLB)	2023
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan manajemen sumber daya TIK	SOP manajemen sumber daya TIK	2023
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan informasi kegiatan desa dan kelurahan	SOP informasi kegiatan desa dan kelurahan	2023
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan pengelolaan menara telekomunikasi	SOP pengelolaan menara telekomunikasi	2025
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan informasi kelompok masyarakat	SOP informasi kelompok masyarakat	2024
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan informasi dan profil Pemerintah Kabupaten Situbondo	SOP informasi dan profil Pemerintah Kabupaten Situbondo	2024
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan perhitungan cepat pemilihan kepala desa	SOP perhitungan cepat pemilihan kepala desa	2023
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Manajemen Sub Domain	SOP Manajemen Sub Domain	2025
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan pengaduan lingkungan hidup	SOP pengaduan lingkungan hidup	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan sosialisasi lingkungan hidup	SOP sosialisasi lingkungan hidup	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Prokasi (Program Kali Bersih)	SOP Prokasi (Program Kali Bersih)	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengawasan Lingkungan	SOP Pengawasan Lingkungan	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pemangkasan pohon	SOP Pemangkasan pohon	2024
22	Dinas Lingkungan	Layanan Perencanaan	SOP Perencanaan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan informasi dan profil DLH	SOP informasi dan profil DLH	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pengembangan Destinasi Pariwisata	SOP Pengembangan Destinasi Pariwisata	2025
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Promosi Pariwisata	SOP Promosi Pariwisata	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SOP Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pembinaan Kepemudaan	SOP Pembinaan Kepemudaan	2025
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	SOP pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi TDUP	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi TDUP	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Retribusi Pemanfaatan Lahan	SOP Retribusi Pemanfaatan Lahan	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	SOP Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Jasa Kontruksi Pemberdayaan	SOP Jasa Kontruksi Pemberdayaan	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengawasan Kontruksi	SOP Pengawasan Kontruksi	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Penyediaan Air Minum	SOP Penyediaan Air Minum	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan Pembuatan Drainase	SOP Pembuatan Drainase	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Permukiman			
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Jalan Lingkungan	SOP Jalan Lingkungan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Air Limbah Rumah Tangga	SOP Air Limbah Rumah Tangga	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pembangunan Bangunan dan Gedung	SOP Pembangunan Bangunan dan Gedung	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengelolaan Aset Pengairan	SOP Pengelolaan Aset Pengairan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Perumahan	SOP Perumahan	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Permukiman Kumuh	SOP Permukiman Kumuh	2023
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan gerakan desa berdaya	SOP gerakan desa berdaya	2024
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan pokjanal Posyandu	SOP pokjanal Posyandu	2024
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan pembinaan pengelolaan keuangan desa	SOP pembinaan pengelolaan keuangan desa	2023
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan monitoring keuangan desa	SOP monitoring keuangan desa	2023
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan informasi dan profil DPMD	SOP informasi dan profil DPMD	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Inforgrafis Kekerasan Anak dan Perempuan	Inforgrafis Kekerasan Anak dan Perempuan	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan	Layanan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	SOP pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Keluarga Berencana			
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Pengelolaan Data Gender dan Anak	SOP Pengelolaan Data Gender dan Anak	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus	SOP pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan informasi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SOP informasi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	SOP pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Penyediaan Data di Kampung KB	SOP Penyediaan Data di Kampung KB	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh	SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh	2023
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan evaluasi perizinan	SOP evaluasi perizinan	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengadaan Prasarana Pendidikan	SOP Pengadaan Prasarana Pendidikan	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembangunan Sarana Pendidikan	SOP Pembangunan Sarana Pendidikan	2023
28	Dinas Pendidikan	Layanan Pembinaan	SOP Pembinaan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	dan Kebudayaan	Budaya	Budaya	
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pendataan Kesenian Lokal	SOP Pendataan Kesenian Lokal	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembinaan Kesenian	SOP Pembinaan Kesenian	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan beasiswa unggul	SOP beasiswa unggul	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan penjaminan mutu pendidikan	SOP penjaminan mutu pendidikan	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan rapor digital SMP	SOP rapor digital SMP	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Fasilitasi Diklat Calon Kepala Sekolah	SOP Fasilitasi Diklat Calon Kepala Sekolah	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Fasilitasi Asesmen Kepala Sekolah	SOP Fasilitasi Asesmen Kepala Sekolah	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Fasilitasi Pengusulan NUPTK	SOP Fasilitasi Pengusulan NUPTK	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan fasilitasi pendidikan keaksaraan	SOP fasilitasi pendidikan keaksaraan	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan fasilitasi kursus pelatihan	SOP fasilitasi kursus pelatihan	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengembangan Kurikulum	SOP Pengembangan Kurikulum	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	SOP Penerimaan Peserta Didik Baru	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan BOS	SOP BOS	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Peningkatan Mutu PAUD	SOP Peningkatan Mutu PAUD	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Peningkatan Kapasitas PTK PAUD	SOP Peningkatan Kapasitas PTK PAUD	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan informasi dinas pendidikan dan kebudayaan	SOP informasi dinas pendidikan dan kebudayaan	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen data siswa dan guru	SOP manajemen data siswa dan guru	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan angka kredit guru	SOP angka kredit guru	2025
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen data paud dan pendidikan masyarakat	SOP manajemen data paud dan pendidikan masyarakat	2025
28	Dinas Pendidikan	Layanan absensi guru dan	SOP absensi guru	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	dan Kebudayaan	tendik	dan tendik	
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan pengaduan guru dan tendik	SOP pengaduan guru dan tendik	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan penyelesaian pengaduan	SOP penyelesaian pengaduan	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan disposisi surat DISPENDIKBUD	SOP disposisi surat DISPENDIKBUD	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan pendataan penduduk buta aksara	SOP pendataan penduduk buta aksara	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan manajemen akses hosting domain website sekolah	SOP manajemen akses hosting domain website sekolah	2023
29	Dinas Perhubungan	Layanan Pelaporan infrastruktur jalan yang bermasalah	SOP Pelaporan infrastruktur jalan yang bermasalah	2023
29	Dinas Perhubungan	Layanan Jadwal Trasportasi	SOP Jadwal Transportasi	2023
29	Dinas Perhubungan	Layanan pengelolaan rambu lalu lintas	SOP pengelolaan rambu lalu lintas	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan informasi dan profil DISHUB	SOP informasi dan profil DISHUB	2024
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan informasi dan profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SOP informasi dan profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2024
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Pendaftaran Anggota Perpustakaan	SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Online Publik Akses Katalog	SOP Online Publik Akses Katalog	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan E-Book	SOP E-Book	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Restorasi Arsip	SOP Restorasi Arsip	2024
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno	SOP Perpustakaan dan Arsip Naskah Kuno	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelepasan Variatas Padi Unggul	SOP Pelepasan Variatas Padi Unggul	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan Tanaman Porang	SOP Pengembangan Tanaman Porang	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	SOP Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Hibah Pupuk	SOP Hibah Pupuk	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan Padi Unggul	SOP Pengembangan Padi Unggul	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengadaan Alat Mesin Pertanian	SOP Pengadaan Alat Mesin Pertanian	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Jaringan Irigasi	SOP Pembangunan Jaringan Irigasi	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Jalan Usaha Tani	SOP Pembangunan Jalan Usaha Tani	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal atau Dalam	SOP Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal atau Dalam	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Desa Mandiri Benih	SOP Desa Mandiri Benih	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Bantuan Variatas Unggul Baru	SOP Bantuan Variatas Unggul Baru	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Pestisida	SOP Penyediaan Pestisida	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Jaringan Informasi Agribisnis Hortikultura	SOP Pengembangan dan Operasionalisasi Jaringan Informasi Agribisnis Hortikultura	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengembangan Hidroponik	SOP Pengembangan Hidroponik	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Bibit Hortikultura	SOP Penyediaan Bibit Hortikultura	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengambangan Luasan Tanaman Pestisida	SOP Pengambangan Luasan Tanaman Pestisida	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Perlengkapan Alat Jemur Tanaman Tembakau	SOP Penyediaan Perlengkapan Alat Jemur Tanaman	2025

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
			Tembakau	
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Irigasi Air Tanam dalam dan Dangkal	SOP Pembangunan Irigasi Air Tanam dalam dan Dangkal	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Jalan Produksi	SOP Pembangunan Jalan Produksi	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian	SOP Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Rembuk Tani	SOP Rembuk Tani	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penilaian Angka kredit	SOP Penilaian Angka kredit	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelatihan Tematik	SOP Pelatihan Tematik	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pembuatan Programa	SOP Pembuatan Programa	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Kelembagaan Petani	SOP Kelembagaan Petani	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengelolaan Lahan BPP	SOP Pengelolaan Lahan BPP	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Petihan Pertanian Organik	SOP Petihan Pertanian Organik	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penerapan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati	SOP Penerapan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelatihan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati	SOP Pelatihan Teknologi Pupuk dan Agensi Hayati	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang	SOP Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pelaksanaan Sekolah Lapang	SOP Pelaksanaan Sekolah Lapang	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pemantauan Jenis Komoditas Pangan Strategis	SOP Pemantauan Jenis Komoditas Pangan Strategis	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penanganan Lumbung Pangan	SOP Penanganan Lumbung Pangan	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Analisa Jenis Bahan Pangan	SOP Analisa Jenis Bahan Pangan	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Uji Bahan Pangan Segar	SOP Uji Bahan Pangan Segar	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Analisa Jenis Kelompok Bahan Pangan	SOP Analisa Jenis Kelompok Bahan	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
			Pangan	
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penanganan Desa Rawan Pangan	SOP Penanganan Desa Rawan Pangan	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Sarana Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	SOP Penyediaan Sarana Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Jenis Lumbung Pangan Masyarakat	SOP Penyediaan Jenis Lumbung Pangan Masyarakat	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyediaan Jenis Lantai Jemur	SOP Penyediaan Jenis Lantai Jemur	2025
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan informasi dan profil DTPHP	SOP informasi dan profil DTPHP	2025
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengaduan dan konsultasi budidaya	SOP Pengaduan dan konsultasi budidaya	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan informasi penyuluhan	SOP informasi penyuluhan	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan pendataan hasil produksi perikanan	SOP pendataan hasil produksi perikanan	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	SOP Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	SOP Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	SOP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pemberdayaan Nelayan Kecil	SOP Pemberdayaan Nelayan Kecil	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	SOP Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
			Rawa, dan Genangan Air Lainnya	
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	SOP Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	SOP Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	SOP Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	SOP Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	SOP Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	SOP Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	2024
33	Dinas Sosial	Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial	SOP Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial	2023
33	Dinas Sosial	Layanan informasi dan profil dinsos	SOP informasi dan profil dinsos	2024
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan informasi dan profil satpol pp	SOP informasi dan profil satpol pp	2024
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Penindakan Operasi Bersama Rokok Ilegal	SOP Penindakan Operasi Bersama Rokok Ilegal	2024
34	Satuan Polisi Pamong	Layanan Pengawalan dan	SOP Pengawalan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Praja	Pengamanan	dan Pengamanan	
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Sosialisasi	SOP Sosialisasi	2024
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan rekam medis	SOP rekam medis	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan Pendaftaran Online	SOP Pendaftaran Online	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan penganggaran rumah sakit	SOP penganggaran rumah sakit	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan pengelolaan farmasi	SOP pengelolaan farmasi	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan pengelolaan barang non-farmasi	SOP pengelolaan barang non-farmasi	2024
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan pengelolaan rumah sakit	SOP pengelolaan rumah sakit	2024
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SOP Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2023
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	SOP Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	2023
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Kesejahteraan Rakyat	SOP Kesejahteraan Rakyat	2023
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Ketentraman dan Ketertiban	SOP Ketentraman dan Ketertiban	2023
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pengaduan Pelayanan	SOP Pengaduan Pelayanan	2023
36	Kecamatan Situbondo	Layanan informasi dan profil Kecamatan Situbondo	SOP informasi dan profil Kecamatan Situbondo	2024
37	Kecamatan Bungatan	Layanan informasi dan profil Kecamatan Bungatan	SOP informasi dan profil Kecamatan Bungatan	2024
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Bungatan	SOP Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Bungatan	2023
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar surat keterangan tidak mampu	SOP Pengantar surat keterangan tidak mampu	2023
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar Surat Pindah WNI	SOP Pengantar Surat Pindah WNI	2023
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pengantar ijin keramaian	SOP Pengantar ijin keramaian	2023
37	Kecamatan Bungatan	Pembuatan Surat Keterangan domisili	SOP Pembuatan Surat Keterangan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
		lembaga	domisili lembaga	
37	Kecamatan Bungatan	Pembuatan surat keterangan Bepergian	SOP Pembuatan surat keterangan Bepergian	2023
37	Kecamatan Bungatan	Pembuatan surat keterangan usaha	SOP Pembuatan surat keterangan usaha	2023
37	Kecamatan Bungatan	pembuatan surat keterangan tidak pernah menikah	SOP pembuatan surat keterangan tidak pernah menikah	2023
37	Kecamatan Bungatan	Surat keterangan kehilangan	SOP Surat keterangan kehilangan	2023
37	Kecamatan Bungatan	surat keterangan kematihan	SOP surat keterangan kematihan	2023
37	Kecamatan Bungatan	Surat keterangan penghasilan	SOP Surat keterangan penghasilan	2023
37	Kecamatan Bungatan	Surat Keterangan harga tanah dan bangunan	SOP Surat Keterangan harga tanah dan bangunan	2023
38	Puskesmas Situbondo	Layanan Claim BPJS	SOP Claim BPJS	2023
38	Puskesmas Situbondo	Layanan Refreshing tentang pengobatan rasional	SOP Refreshing tentang pengobatan rasional	2023
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Informasi Peringatan Dini	SOP Informasi Peringatan Dini	2023
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan kedaruratan dan bantuan logistik	SOP kedaruratan dan bantuan logistik	2023
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Perhitungan Kerugian	SOP Perhitungan Kerugian	2023
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan informasi dan profil BPBD	SOP informasi dan profil BPBD	2024

Pada **Tabel 3.9** terdapat **269 usulan SOP** Layanan Publik yang ada di Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2023 sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) usulan sop. Pada tahun 2024 terdapat 92 (Sembilan puluh dua) usulan sop. Pada

tahun 2025 terdapat 32 (tiga puluh dua) usulan SOP dan pada tahun 2026 terdapat 2(dua) usulan SOP.

2) Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Pada bagian ini akan ditinjau mengenai usulan SOP pada Layanan terhadap Program RPJMD. Usulan ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja terkait program yang ada. Program RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk jangka periode 5 (lima) tahun. Sebanyak 37 SOP yang diusulkan untuk mendukung usulan layanan terhadap program RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Detail Peta Rencana usulan SOP dapat dilihat pada **Tabel 3.15.**

Tabel 3.15 Peta Rencana Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	SOP Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2023
18	Dinas Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2023
18	Dinas Kesehatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	SOP Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	SOP Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2024
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	SOP Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2025
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	SOP Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2025

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	SOP Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2026
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	SOP Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2026
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Layanan Pengembangan Ekspor	SOP Pengembangan Ekspor	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	SOP Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengembangan Permukiman	SOP Pengembangan Permukiman	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Penyelenggaraan Penataan Ruang	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengembangan Perumahan	SOP Pengembangan Perumahan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	SOP Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Layanan Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	SOP Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	2024
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Peningkatan Kerjasama Desa	SOP Peningkatan Kerjasama Desa	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	SOP Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
	Penduduk, dan Keluarga Berencana			
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	SOP Peningkatan Kualitas Keluarga	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	SOP Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pembinaan Sejarah	SOP Pembinaan Sejarah	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perizinan Penggunaan Arsip	SOP Perizinan Penggunaan Arsip	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Perizinan Usaha Pertanian	SOP Perizinan Usaha Pertanian	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	SOP Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	2023
33	Dinas Sosial	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	SOP Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan Nama SOP	Tahun Pembuatan
33	Dinas Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SOP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2023
36	Kecamatan Situbondo	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2023
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2023
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SOP Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2023
37	Kecamatan Bungatan	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SOP Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2024
38	Puskesmas Bungatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2023
38	Puskesmas Bungatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	SOP Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2024

Pada **Tabel 3.15** terdapat **37 usulan SOP** yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) usulan SOP, tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) usulan SOP, tahun 2025 terdapat 3 (tiga) usulan SOP, dan pada tahun 2026 terdapat 3 (tiga) usulan SOP.

3.5.3 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program

Pada Buku 1 telah diidentifikasi layanan-layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo, hasilnya masih terdapat beberapa program pada RPJMD yang belum didukung oleh layanan. Selanjutnya pada Buku 3 diusulkan layanan terhadap program RPJMD yang belum didukung oleh layanan. Pada bagian ini akan dibahas prioritisasi pengadaan usulan layanan yang telah diberikan. Secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 3.16.**

Tabel 3.16 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program

Kode OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2024
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2025
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2025
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2026
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2026
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Layanan Pengembangan Ekspor	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Layanan Pengembangan Permukiman	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Layanan Pengembangan Perumahan	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Layanan Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	2024
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Layanan Peningkatan Kerjasama Desa	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2023
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	Layanan Pembinaan Sejarah	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Layanan Perizinan Penggunaan Arsip	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Layanan Perizinan Usaha Pertanian	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2023
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2024
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	2023
33	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2023
33	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2023
35	RSUD. dr. Abdoer Rahem	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2023
39	Puskesmas Bungatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2023
39	Puskesmas Bungatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2024

Terdapat total **31 usulan layanan** yang ada pada Tabel 3.16. Pada tahun 2023 diusulkan untuk mengadakan 16 layanan. Selanjutnya pada tahun 2024, diusulkan untuk mengadakan 9 layanan. Tahun 2025 diusulkan untuk mengadakan 3 layanan dan 3 layanan pada tahun 2026.

3.6 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Peta rencana aplikasi disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor, yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Prioritasi ini menjadi acuan bagi masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penerapan aplikasi. Untuk lebih detailnya, metode dan faktor-faktor yang diperhitungkan dalam prioritisasi usulan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. ***Warrent McFarlan's Strategic Matrix***

Rekomendasi aplikasi dikelompokkan menjadi 4 jenis aplikasi berdasarkan dukungannya terhadap organisasi, yaitu:

- ***Key Operational***, yaitu sifat aplikasi yang dapat membantu operasional OPD sehingga OPD sangat bergantung pada aplikasi tersebut.
- ***Support,*** yaitu sifat aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja OPD.
- ***Strategic,*** yaitu sifat aplikasi yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan OPD di masa mendatang.
- ***High Potential*****,** yaitu sifat aplikasi yang belum terbukti dapat mendukung aktivitas dari OPD.

2. Analisis Potensi Integrasi Antar Aplikasi

Pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan tahun implementasi aplikasi dengan melihat seberapa banyak OPD yang dapat didukung dalam pembuatan suatu aplikasi. Semakin banyak suatu aplikasi dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas beberapa OPD, maka aplikasi tersebut akan diprioritaskan untuk dibangun terlebih dahulu.

3. Analisis *Impact*/Dampak.

Sebuah aplikasi akan memiliki prioritas pembangunan yang tinggi apabila terkait dengan layanan dasar masyarakat dan dapat menghasilkan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- Aplikasi layanan dasar merupakan semua aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan rakyat, dan sosial akan mendapat angka prioritas lebih tinggi.
- Aplikasi investasi merupakan semua aplikasi yang keberadaannya mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap investasi pemerintah akan diberi angka prioritas yang lebih tinggi.

Daftar aplikasi yang telah dianalisis sesuai kriteria di atas dan persetujuan OPD terkait selanjutnya dipetakan ke dalam rekomendasi tahun kegiatan 2023 hingga 2027. Prioritisasi pembangunan dan pelaksanaan aplikasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.17**

Tabel 3.17 Prioritisasi Usulan Aplikasi SPBE

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	2025
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penggunaan Sipesat	2025

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	e-Partner	2025
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SIM-IBRO	2026
3	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	2025
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	SIM-SDA	2024
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan	2024
6	Bagian Umum	SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	2026
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	2025
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI JAPIN	2025
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Masda	2023
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi SIRKA	2023
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Sakip	2023
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	E-Risalah	2023
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Website Internal DPRD	2026
11	Inspektorat	AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)	2023
11	Inspektorat	Pengembangan E-Matrik	2025
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIAP - SIAKSI	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIDAK	2023
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Website BKPSDM	2026
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan aplikasi SIDAT	2023
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aktivasi SIMDA	2023
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen	2023

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
		Bantuan Keuangan)	
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda)	2024
15	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan E-PDL	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-AGENDA	2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Geospasial Pembangunan	2023
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian Online	2025
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Aplikasi SILAO	2024
18	Dinas Kesehatan	E-Health Dinkes	2023
18	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	2023
18	Dinas Kesehatan	SIMPUS	2025
19	Dinas Ketenagakerjaan	Pengembangan Web Disnaker	2026
19	Dinas Ketenagakerjaan	SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	2025
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi HelODesk	2025
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset TIK Kabupaten Situbondo	2025
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SDTIK	2026
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SINEWS	2026
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan/upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	2026
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	2023
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIMKU	2025
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIPENAMAS	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Sipesah v.2 Mobile	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	2024
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktivasi dan pengembangan Website TIC	2025

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan website TIC)	2026
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	2026
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktifasi Website pariwisata.situbondokab.go.id	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Aplikasi keluhan jalan dan jembatan	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	E-Kontruksi	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-RTTG	2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Penggunaan SIPINTER	2025
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIM Perumahan	2024
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Checking Kebutuhan	2026
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	2026
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang	2026
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	2026
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan Data Desa Center	2025
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pengembangan Pakem Situbondo	2023
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan SIPINTER	2024
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIMVEST	2023
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Antrian	2025

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi PMP	2025
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sebaya	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi SISPENA	2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi	2024
29	Dinas Perhubungan	Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	2023
29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	2023
29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Website Dishub	2025
29	Dinas Perhubungan	Penggunaan SIMPADA	2023
29	Dinas Perhubungan	SITRANS	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Tali Pusar	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TAJINPALAPPA	2023
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SRIKANDI	2024
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan)	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI Nelayan	2023
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI-Ternak	2024
33	Dinas Sosial	Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	2026
33	Dinas Sosial	SISOS	2025
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan Website Satpol PP	2026
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Si Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	2025
34	Satuan Polisi Pamong Praja	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Aplikasi SIMRS	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	REKAM MEDIS ELEKTRONIK	2023
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi	2023
36	Kecamatan Situbondo	Penggunaan SP4N LAPOR	2024

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
38	Puskesmas Situbondo	SIMPUS	2023
38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan simesem	2023
38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan sikda mobile	2024
39	Puskesmas Bungatan	SIMPUS	2023
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi Laporan Kejadian Bencana	2024
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	2024
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	2024

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Situbondo diusulkan untuk mengembangkan **37 (tiga puluh tujuh)** aplikasi di tahun **2023**, **21 (dua puluh satu)** aplikasi di tahun **2024**, **21 (dua puluh satu)** aplikasi di tahun **2025**, dan sisanya yakni **16 (enam belas)** aplikasi di tahun **2026**. Jika dilihat pada rencana masing-masing tahun, Dinas Perhubungan memiliki usulan pengembangan paling banyak di tahun 2023 yakni sebanyak 4 (empat) aplikasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki usulan aplikasi terbanyak di tahun 2024 yakni masing-masingnya sebanyak 3 (tiga) aplikasi. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama memiliki usulan aplikasi terbanyak di tahun 2025 dengan jumlah 3 (tiga) aplikasi. Terakhir yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman memiliki usulan aplikasi terbanyak di tahun 2026 sebanyak 4 (empat) aplikasi. Secara keseluruhan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman adalah dinas yang memiliki usulan aplikasi terbanyak yakni 10 (sepuluh) aplikasi.

3.7 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data eksisting, kesenjangan dan usulan yang telah dijabarkan secara detail pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo** dan **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Situbondo**. Maka, perlu dilakukan Peta Rencana untuk Infrastruktur yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Prioritas Usulan Infrastruktur SPBE dapat dilihat pada **Tabel 3.18.**

Tabel 3.18 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
JARINGAN INTRA PEMERINTAH				
1	DED Jaringan Intra	Perancangan blueprint	Dinas	2023-2024

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Pemerintah	jaringan intra pemerintah Kabupaten Situbondo yang mencakup spesifikasi umum, spesifikasi teknis dan gambar teknis.	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	
2	Pengelompokan *Area Demilitarized Zone* (DMZ) Server	Penerapan DMZ (*Demilitarized Zone*) pada server digunakan untuk keamanan pada server yang digunakan saat terhubung dengan Jaringan luar server dan dalam server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
3	Kajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023
4	Optimalisasi Topologi Jaringan Intra	Melakukan *Update* terkait dengan beberapa elemen integrasi tambahan yang terhubung dengan Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023
5	Belanja *Internet* terpusat dan Optimalisasi *Bandwidth*	Penambahan Alokasi *Bandwidth* untuk Jaringan Intra Pemerintah (Belanja *Internet* Tepusat).	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Setiap Tahun (2023-2027)
6	Reviu Kebijakan dan Tatakelola Jaringan Intra Pemerintah yang telah disesuaikan dengan KEPMEN 962	Melakukan Reviu Kebijakan Perbub ataupun peraturan terkait yang berhubungan dengan penerapan jaringan intra pemerintah Kabupaten Situbondo apakah sudah sesuai dan relevan atau tidaknya.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
		Memastikan Penerapan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah telah Mencakup seluruh kebutuhan penerapan Jaringan Intra		

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		Pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo		
RUANG SERVER (*DATA CENTER*)				
1	DED Ruang Server (*Data Center*)	Perancangan *Blueprint* Ruang Server dan Pemenuhan aspek Ruang Server Sesuai TIA 942.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
2	Pemusatan Server OPD pada Ruang Server Diskominfo	Memastikan seluruh OPD yang memiliki server untuk melakukan pemusatan server pada ruang server diskominfo sebagai penerapan pusat data sesuai dengan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023
3	Pengadaan Perangkat Pendukung Ruang Server	Melakukan Pengadaan Perangkat Pendukung yang dibutuhkan dalam pemenuhan Aspek Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
4	Pemenuhan aspek Ruang Server Sesuai TIA 942 dan SNI Pusat Data	Melakukan Pemenuhan Aspek ruang server yang terdiri dari Interior hingga eksterior pada ruang server sesuai standart TIA 942 dan SNI Pusat Data Adapun beberapa Usulan Pemenuhan aspek Ruang Server Berdasarkan Standar TIA 942 dan SNI Pusat data antara lain: 1. Pemenuhan Aspek Interior 2. Pemenuhan Aspek Kelistrikan 3. Pemenuhan Aspek Sistem Pendinginan 4. Pemenuhan Aspek Sistem Pemadam Kebakaran 5. Pemenuhan Aspek Jaringan dan Rack	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2025

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		6. Pemenuhan Sistem Keamanan 7. Pemenuhan Aspek Monitoring Ruangan		
5	Reviu Kebijakan dan Tatakelola	Melakukan Reviu Kebijakan Perbub ataupun peraturan terkait yang berhubungan dengan penerapanPusat Data/*Data Center*/Ruang Server pemerintah Kabupaten Situbondo apakah sudah sesuai dan relevan atau tidaknya. Memastikan Penerapan Tata Kelola Pusat Data/*Data Center*/Ruang Server Pemerintah telah Mencakup seluruh kebutuhan penerapan Pusat Data/*Data Center*/Ruang Server yang ada di Kabupaten Situbondo.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
6	Penerapan Penggunanan DRC (Disaster Recovery Center)	Penggunaan Media *Backup* Data untuk menyelamatkan dan menduplikasi data yang tersimpan di *Data Center* utama	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2025
PUSAT DATA NASIONAL (PDN)				
1	Penggunaan Fasilitas Pusat Data Nasional	Melakukan Penerapan Pusat Data Nasional sesuai dengan Arahan Pusat dalam pemanfaatannya dan Sesuai dengan pemenuhan aspek dalam penerapan PDN.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN				
1	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan SPLP (API Management)	Melakukan Penerapan SPLP dengan mengikuti seluruh prosedur dan pengajuan yang sesuai dengan aturan Pusat.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2025
2	Pelaksanaan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola PSistem	Melakukan Reviu Kebijakan Perbub ataupun peraturan	Dinas Komunikasi dan	2023-2027

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Penghubung Layanan yang Telah Disesuikan Dengan KEPMEN 962	terkait yang berhubungan dengan penerapanSistem Penghubung Layanan pemerintah Kabupaten Situbondo apakah sudah sesuai dan relevan atau tidaknya.	Informatika Kabupaten Situbondo	
		Memastikan Penerapan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah Mencakup seluruh kebutuhan penerapan Sistem Penghubung Layanan yang ada di Kabupaten Situbondo.		
KOMPUTASI AWAN				
1	Masterplan Penggunaan dan Penerapan Komputasi Awan	Pembuatan dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan pengembangan. Dalam hal ini yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rencana mengembangakan Teknologi Komputasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
		Melakukan Migrasi aplikasi yang telah dibuat harus menjadi penyimpanan berbasis *Cloud base* dan tidak *monolitic* dikarenakan akan dapat memberatkan penyimpanan *Database*.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2025
		Penerapan Komputasi awan sebagai bentuk Konsolidasi pada *Data Center* agar lebih modern dengan memanfaatkan Teknologi Yang baru. Pemanfaatandengan manfaatkan *Native Cloud, Multi Cloud dan Work Cloud*.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2025-2027
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak				

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Periferal Utama	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Utama untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD yang terdiri dari perangkat PC, Laptop dan Printer yang telah disesuaikan dengan usia perangkat	Seluruh OPD Kabupaten Situbondo	Setiap Tahun (2023-2027)
2	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Periferal Pendukung	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Keras Periferal untuk mendukung operasional penunjang pada masing-masing OPD yang terdiri dari perangkat Scanner, LED TV, Proyektor, Kamera, HT, Speaker.	Seluruh OPD Kabupaten Situbondo	2023-2027
3	Pengadaan Perangkat Media Penyimpanan (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan tambahan Perangkat Keras *Storage* (Nas atau San) / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2024
4	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Jaringan (Teknis)	Peremajaan/Pengadaan Perangkat Jaringan pendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (Router, Switch/Hub, *Access Poin, Repeater Wifi, Antena Outdoor Wireless*) disesuaikan dengan usia perangkat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
5	Pengadaan/Peremajaan Perangkat Lunak *Platform*	Pengadaan/Peremajaan Lisensi Perangkat Lunak *Platform* pada masing-masing perangkat keras pada OPD yang masih belum memiliki lisensi dan beberapa tambahan lisensi aplikasi perkantoran	Seluruh OPD Kabupaten Situbondo	2023-2027
Command Center				
1	Pengkajian atau	Melakukan Pengkajian	Dinas	2023

No	Usulan	Detail Usulan	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Roadmaps Penerapan *Command Center*	terhadap Penggunaan dan Penerapan *Command Center* (*Intelegent Room* dan Pendopo) dan menganalisis semua kebutuhan serta permasalahan yang ada saat ini	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	
2	Pengadaan Perangkat Pendukung *Command Center*	Melakukan Pengadaan perangkat yang dibutuhkan pada *Command Center* berdasarkan permasalahan dan kebutuhan pemenuhan perangkat *Command Center*	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
3	Penerapan Aspek *Command Center*	Menerapkan seluruh aspek Ruang *Command Center* sesuai dengan usulan yang dilakukan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024

Detail terkait dengan Peta Rencana usulan Infrastruktur SPBE terdiri dari 5 (lima) point pembahasan antara lain, yaitu Jaringan Intra Pemerintah, Ruang Server (*Data Center*), Sistem Penghubung Layanan, Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, dan *Command Center*. Penjabaran setiap point usulan dapat dilihat pada **Buku 5 terkait Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Situbondo** dan **Peta Rencana Infrastruktur SPBE** akan dijelaskan pada **sub bab 3.7.1-3.7.5.**

3.7.1 Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya

Berdasarkan dengan Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo cukup **baik** dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah **terpusat** yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan **Fiber Optik dan *Wireless* PTP** dalam integrasi Jaringan yang digunakan, **keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo**.

Ketersediaan **Topologi Jaringan Intra Pemerintah** yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terdapat **2 Topologi** yaitu **Topologi Umum dan Topologi Distribusi**. Untuk **Topologi Distribusi terdiri dari 4 pendetailan distribusi** jaringan yang terdiri dari Topologi Jaringan Komunikasi Data Intranet

OPD, Topologi Jaringan Komunikasi Data Fiber Optik Lingkungan Kantor Bupati, Topologi Distribusi *Wireless* Kecamatan dan Topologi Pusat Server (*Data Center*). Detail penjelasan kondisi eksisting Topologi Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1.1**.

Ketersediaan ***Bandwidth*** yang digunakan untuk Jaringan Intra Pemerintah saat ini menggunakan 2 *Provider* (ISP), yaitu ***Provider*** **(ISP) Biznet dengan kapasitas 610 Mbps** yang mana penggunaan terbagi dari 460 Mbps untuk internal OPD dan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) + 150 untuk WIFI Publik dan ***Provider*** **(ISP) Megadata dengan kapasitas 250Mbps** yang mana penggunaannya terbagi dari 100 Mbps untuk server (*Dedicated*) + 150 Mbps untuk area publik (*Broadband*). Detail penjelasan kondisi eksisting ketersediaan *Bandwidth* dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.4.1**.2 **Tabel 7.13.**

Peta Rencana Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah ini telah dianalisis berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapatkan dari dokumen hasil survei, dan dokumen eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga didapatkan **Peta Rencana terkait infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang terdiri dari DED Jaringan intra Pemerintah, Pengelompokan *Area Demilitarized Zone* (DMZ) Server, Kajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah, Optimalisasi Topologi Jaringan Intra Pemerintah, Belanja *Internet* Terpusat dan Optimalisasi Bandwidth, dan Reviu Kebijakan dan Tatakelola Jaringan Intra Pemerintah** dimana nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan atapun menyesuaikan dengan kondisi kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo yang bertujuan agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan penerapan jaringan intra pemerintah dalam mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail dari setiap Peta Rencana usulan Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.1 Jaringan Intra Pemerintah.**

3.7.2 Peta Rencana Ruang Server (*Data Center*) dan Pelengkapnya

Berdasarkan Kondisi Eksisting terkait Ruang Server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah menerapkan Pemusatan Server pada *Data Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang server yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa OPD yang telah meletakkan pada Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server yang dititipkan oleh OPD. Saat ini terdapat terdapat **43 Server** yang dimiliki oleh **14 OPD** dan terdapat **10 OPD** yang memiliki Ruang Server dan menerapkan Aspek pada ruang server. Pemerintah Kabupaten

Situbondo hingga saat ini **Belum menerapkan penyimpanan pada Pusat Data Nasional (PDN)**. Detail terkait kondisi Eksisting Ruang Server (*Data Center*) dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.5.**

Peta Rencana Infrastruktur Ruang Server (*Data Center*) ini telah dianalisis berdasarkan dengan Kondisi Eksisting pada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dokumen hasil survei dan dokumen eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga didapatkan **Peta Rencana terkait infrastruktur Ruang Server yang terdiri dari Usulan DED Ruang Server, Pemusatan Server OPD pada *Data Center*, Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Ruang Server (*Data Center*), Penerapan Penggunaan DRC (*Disaster Recovery Center*) dan Penggunaan fasilitas Pusat Data Nasional (PDN)**. Seluruh Peta Rencana Usulan Ruang Server nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan ataupun menyesuaikan dengan kondisi kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana peta rencana tersebut bertujuan agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan aspek pada ruang server guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail terkait dengan usulan Ruang Server (*Data Center*) dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.2 Ruang Server (*Data Center*).**

3.7.3 Peta Rencana Sistem Penguhubung Layanan

Berdasarkan dengan Kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Situbondo **Belum menerapkan** Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh pusat, tetapi saat ini terdapat beberapa sistem penghubung yang digunakan pada beberapa OPD yaitu terdapat **12 OPD** yang menggunakan Sistem Penghubung layanan dengan memanfaatkan **Web API dan Web *Service***. Detail sistem penghubung layanan Komputasi dapat diihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.7 Tabel 7.18.**

Peta Rencana Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan ini telah dianalisis berdasarkan dengan kondisi eksisting pada pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dokumen hasil survei, dan dokumen Eksisting. Seluruh Peta Rencana Usulan Sistem Penghubung Layanan nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan ataupun menyesuaikan dengan kondisi kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana bertujuan agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan penerapan Sistem Penghubung Layanan guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail terkait dengan usulan Sistem Penghubung Layanan yang terdiri dari Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Reviu Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur**

SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.3 Sistem Penghubung Layanan.

3.7.4 Peta Rencana Komputasi

Berdasarkan kondisi eksisting, **Tidak semua** OPD menerapkan Komputasi awan yang disebabkan karena **kurangnya pemahaman** dari pentingnya penggunaan komputasi awan, saat ini **Penggunaan *Google Drive*** sebesar **84%** pada **11 OPD, Penggunaan NAS** sebesar **8%** pada **1 OPD**, dan **Penggunaan *Cloud*** sebesar **8%** pada **1 OPD.** Adapun OPD yang menerapkan **Penyimpanan melalui NAS**, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan mayoritas Pemanfaatkan Komputasi hanya sebatas penyimpanan data OPD. Detail Kondisi eksisting Komputasi dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo sub bab 7.6.**

Peta Rencana usulan terkait dengan penggunaan komputasi awan yang dapat diterapkan pada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu **dengan menerapkan penyimpanan pada *Cloud, Google Drive* yang dibuat dengan akun resmi dinas dan beberapa penggunaan *Cloud* berlisensi lainnya serta memanfaatkan penggunaan NAS/SAN sebagai media penyimpanan**. Tujuan penggunaan Komputasi awan yaitu untuk mempermudah dalam penyimpanan data yang dapat diakses secara *realtime* dan kapan saja apabila dibutuhkan secara cepat dan membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan penerapan Komputasi Awan guna mewujudkan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ideal. Detail terkait dengan usulan Komputasi Awan yang mencakup Masterplan Penggunaan dan Penerapan Komputasi Awan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.4 Komputasi Awan.**

3.7.5 Peta Rencana Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Usulan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak mempertimbangkan beberapa aspek dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah jumlah SDM yang ada dan usulan SDM terbaru hasil analisis yang dijabarkan pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola, Manajemen SPBE dan Penyelenggara SPBE**. Selain itu, usulan perangkat juga mempertimbangkan jumlah perangkat dan usia perangkat yang dimiliki oleh OPD saat ini. Usulan pengadaan/peremajaan perangkat keras bertujuan mengoptimalkan perangkat yang digunakan untuk mendukung operasional pada masing-masing OPD Kabupaten Situbondo dan mendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan dari setiap usulan dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.** Adapun Peta Rencana dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1) Peta Rencana Perangkat Keras

Peta rencana Perangkat Keras terdiri dari Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras Periferal Utama, Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras Periferal Pendukung, Pengadaan Perangkat Keras Media Penyimpanan, Pengadaan/Peremajaan Perangkat Keras Jaringan. Detail peta rencana Perangkat Keras dapat dilihat pada **Tabel 3.19.**

Tabel 3.19 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

No	Nama Perangkat	Tahun Usulan					
		2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah Usulan
Perangkat Periferal Utama							
1	*Personal Computer (PC)*	270	274	271	268	233	**1316**
2	Laptop	247	248	269	284	243	**1291**
3	Printer	238	263	261	263	225	**1250**
Perangkat Periferal Pendukung							
1	Drone	1	1	1	1	0	**4**
2	Kamera (DSLR/Mirrorless)	5	6	0	0	0	**11**
3	Handhole	0	0	20	0	0	**20**
4	*Handy Talkie* (HT)	0	20	0	0	0	**20**
5	*Joint Closure*	0	0	20	0	0	**20**
6	Kabel *Fiber Optic*	0	0	50 Km	50 Km	50 Km	**150 Km**
7	*Lighting*	3	0	0	0	0	**3**
8	*Stabilizer camera*	2	0	0	0	0	**2**
9	Mikrofon	6	0	0	0	0	**6**
10	Monitor LED TV	0	5	6	0	0	**11**
11	*Optical Termination Box* (OTB)	0	0	41	0	0	**41**
12	Pemancar (*Radio Wireless*)	0	20	0	0	0	**20**
13	Prosesor Server	0	2	0	0	0	**2**
14	Proyektor + LCD	7	16	2	0	0	**25**
15	Tripod	2	0	0	0	0	**2**
Perangkat Jaringan							
1	*Modem*	1	6	5	6	2	**21**
2	*Hub/Switch*	1	25	24	18	21	**89**
3	*Gateway Router*	0	23	28	17	12	**80**
4	*Access Point*	0	18	28	16	11	**73**
5	*Repeater Wifi*	0	1	3	2	1	**7**
6	*Antenna Outdoor Wireless*	0	2	2	2	2	**8**
Perangkat Media Penyimpanan							
1	SAN (*Storage Area Network*)	2	2	2	2	2	2
2	HDD/SSD Server & SAN	0	12	0	0	0	12
3	Memori Server	0	1	0	0	0	1

Penjelasan setiap usulan perangkat keras untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5.1 -3.3.5.4.**

2) Peta Rencana Perangkat Lunak

Peta rencana perangkat lunak diberikan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan secara legal dengan lisensi resmi. **Terdapat 38** usulan perangkat lunak bersifat *Free* dan berlisensi yang nantinya dapat dijadikan referensi penggunaan Perangkat Lunak pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penjelasan perangkat lunak dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.5. Tabel 3.26.**

3.7.6 Peta Rencana *Command Center*

Berdasarkan kondisi eksisting, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini **telah memiliki *Command Center*** dengan aspek dan perangkat yang memadai. Usulan terkait *Command Center* ditujukan untuk dapat membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo meningkatkan Infrastruktur SPBE terkait dengan mengoptimalkan *Command Center* di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Detail terkait dengan usulan *Command Center* yang mencakup peremajaan Perangkat *Command Center* dapat dilihat pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.3.6.**

3.8 Peta Rencana Keamanan SPBE

Keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam banyak bidang. Begitu pula dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada sub bab ini akan dibahas terkait salah satu domain SPBE yaitu Keamanan SPBE. sebagaimana yang tertuang pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **harus** menerapkan Keamanan SPBE. Pelaksanaan keamanan SPBE ini mengacu kepada Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No.10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan ISO 27001; 2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penerapan keamanan SPBE yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dalam peraturan BSSN 10/2019 lebih membahas terkait dengan persandian serta pengamanan data dan informasi. Beberapa keamanan yang disebutkan dalam BSSN 10/2019 diantaranya adalah keamanan Sumber Daya TI, akses kontrol, jaringan, surat elektronik dan lainnya. Dalam setiap konteks keamanan dapat diturunkan menjadi bentuk kegiatan kecil seperti halnya pembagian hak akses, penerapan standar kata sandi dan lain sebagainya.

b) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.**
Peraturan BSSN 4/2021 secara spesifik membahas terkait dengan Keamanan SPBE. Dimana panduan yang disebutkan didalamnya mengacu pada konsep *Plan, Do, Check,* dan *Act* (PDCA). Pada masing masing tahapan terdapat strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan keamanan.

c) **ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.**
ISO 27001:2022 merupakan standar internasional yang juga merupakan acuan dari pembentukan banyak standar lain seperti Indeks KAMI dan bahkan Peraturan BSSN 4/2021.

Dalam penerapan Keamanan SPBE menggunakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 sebagai pedoman pada aspek Manajemen Keamanan yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Usulan Keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari **5 aspek** yaitu Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE, Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE, Peningkatan Keamanan SPBE, Penanganan Keamanan SPBE, dan Kelaikan Keamanan SPBE yang dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

Tabel 3.20 Aspek Penerapan Keamanan SPBE

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi Data	Memberikan edukasi kesadaran pada seluruh OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan Keamanan Data	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023
	Sosialisasi Keamanan Hak Akses	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan Keamanan Hak Akses	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023
	Sosialisasi Pedoman Pembuatan *Password* dan Penggantian	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan pedoman pembuatan *password* dan penggantian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023
	Melakukan *reminder* penggantian *password* secara berkala	Melakukan *reminder* secara berkala pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan penggantian *password*	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027 (Setiap 3-6 bulan sekali)
	Pelatihan keamanan siber dari ancaman hacker	Melaksanakan pelatihan mengenai beberapa keamanan siber seperti keamanan aplikasi /website	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2024

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
	Pelatihan Standar Keamanan	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan standar keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2024
	Pembatasan penggunaan *Internet*	Melakukan pembatasan penggunaan *Internet* sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari *serangan virus/ malware /trojan* dari situs yang telah dibuka	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027
	Penggunaan *Software* Berlisensi	Menggunakan *Software* yang telah berlisensi sebagai Langkah pencegahan adanya serangan keamanan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2024-2027
	Bimbingan Teknis Standar Keamanan SPBE	Melakukan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2024-2026
Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	Inventarisasi Seluruh Aset SPBE	Melakukan inventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur yang ada pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
	Identifikasi Kerencanan melalui *penetration testing* dan *vulnerability assessment*	Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE dengan cara melakukan *penetration testing* dan *vulnerability assessment* pada data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur yang ada pada Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027
	Pengukuran Tingkat Resiko Keamanan SPBE	Melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2024-2027
Peningkatan Keamanan SPBE	*Configuration Management*	*Configuration management* dibutuhkan untuk mencatat setiap aset TIK yang terhubung dengan *Internet*. Sehingga lebih mudah dalam pendataan aset dan IP yang digunakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027
	Update Patch server secara berkala	Proses pembaharuan *patch* untuk memastikan mendapatkan fitur dan kondisi terbaru dari server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2024
	Memperbaharui lisensi perangkat keras dan lunak berkala	Proses pembaharuan lisensi perangkat untuk mendapatkan fitur terbaru	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
	Implementasi DRC	DRC digunakan sebagai cadangan server untuk meminimalisir *downtime* jika terjadi insiden	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Penerapan Proses *Enkripsi* dan *Dekripsi*	Proses *enkripsi* dan *dekripsi* untuk memastikan data atau *password* tetap aman ketika melakukan komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2025
	Menerapkan metode Verifikasi Data	Tahapan verifikasi untuk memastikan data yang masuk merupakan data yang sudah sesuai	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2024
	Implementasi tanda tangan digital	Untuk mempermudah proses layanan elektronik dan mencegah terjadinya penggunaan tanda tangan tanpa izin	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2024
	Pemanfaatan CCTV di ruang publik	Memantau lokasi lokasi publik yang dirasa berpotensi terjadi insiden atau pada akses akses utama	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Berjalan mulai tahun-
	Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang Keamanan Informasi	Peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan personil terkait tetap *Update* dengan kondisi terkini	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Peremajaan Perangkat TIK	Untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan perangkat,	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Seluruh OPD	2024-2025

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
		terutama pada perangkat yang sudah berusia lebih dari 5 tahun.	Situbondo		
	Penerapan SOP/Prosedur Keamanan	Menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Bimbingan Teknis Keamanan SPBE	Melakukan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Peningkatan Keamanan SPBE	Melakukan Peningkatan keamanan lingkup ruang server kepada PD yang memiliki server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
Penanganan Keamanan SPBE	Terjadinya serangan pada server	Pedoman dan pencatatan (*Log Activity Attack*) apabila terjadi serangan pada server, seperti misalnya *malware, hacker* dan lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Penanganan terjadinya pemadaman	Prosedur dan Penangan akan apabila terjadi pemadaman listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2024-2025
	Penanganan kegagalan UPS	Berisikan pedoman jika terjadi kegagalan UPS	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2024
	Penanganan kerusakan infrastruktur	pedoman masalah yang terjadi untuk	Dinas Komunikasi dan	Seluruh OPD	2023

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
		mencegah terakit kerusakan infrastruktur	Informatika Kabupaten Situbondo		
	Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Berisikan pedoman jika terjadi insiden dan ketidaksesuaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023
	Penanganan Kehilangan Aset atau Data	Berisikan pedoman jika terjadi kehilangan aset atau data	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027
	Jaringan *Internet* Down disebabkan oleh Perangkat *Router/Firewall* Rusak dengan Perawatan terencana pada Perangkat	Melakukan Perawatan dan Pembelian Perangkat *Router/Firewall* Baru untuk *backup* serta pembuatan Jadwal Perawatan dan Pembelian Perangkat *Router/Firewall* Baru	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2024
	SSL Expire dikarenakan tidak ada monitoring terhadap masa *expire SSL* dengan dilakukan Kontrol aktivasi SSL	Membuat sistem notifikasi masa berlaku SSL dan memastikan Aktivasi SSL *Lifetime*	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Kebocoran Data (*Database* Basis Data) dengan dilakukan Kontrol terhadap pengamanan file data	Melakukan penutupan *Port* yg tidak terpakai dan mudah diretas, *Update* OS dan Aplikasi *Database*, melakukan *backup* data berkala serta didukung dengan *Logbook* Konfigurasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
		Sistem, *Update* dan *Backup* Data			
	Kebocoran Data (Aplikasi) melalui kerentanan Aplikasi berbasis Web dengan dilakukan penganganan melalui Kontrol terhadap pengembangan dan pengelolaan aplikasi	Menutup *port* kecuali https (*port* 443), *Vurneability Asessment* (*Penetration Test*) dan diwujudkan melalui *Logbook* Konfigurasi Sistem, Laporan VA /*Pentest*	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Kehilangan Data Akibat Kerentanan Fasilitas Pusat Data yang disebabkan Gangguan Sistem Kelistrikan dan dilakukan penanganan Kontrol terhadap sistem kelistrikan	Menyediakan *Power Suply* Cadangan dengan Penambahan Kapsitas UPS dan Penggunaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
	Pembuatan catatan atau laporan penanganan insiden, *check list* dan *logbook* yang dilakukan secara berkala	Melakukan Pembuatan catatan atau laporan penanganan insiden, *check list* dan *logbook* yang dilakukan secara berkala terkait seluruh penerapan keamanan yang ada di masing-masing OPD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	2023-2027
Audit SPBE	Audit Aplikasi	Melakukan Audit Internal terkait khusus yang	Inspektorat dan Dinas Komunikasi	Seluruh OPD pemilik aplikasi	2023-2024

Aspek	Usulan Kegiatan	Detail Usulan Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Tahun
		dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo	dan Informatika Kabupaten Situbondo		
		Melakukan Audit Aplikasi Umum dilakukan oleh BPPT sebagai Lembaga Audit TIK (LATIK) Pemerintah, sedangkan Audit Aplikasi Khusus dilakukan oleh Lembaga Audit TIK Swasta Terakreditasi	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	BPPT / BRIN	2023-2027
	Audit Internal Infrastruktur	Melakukan Audit internal terkat Infrastruktur Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT/BRIN	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027
		Melakukan Audit Eksternal terkait Infrastruktur Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT/BRIN	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	BPPT / BRIN	2023, 2025, dan 2027
	Audit Internal Keamanan	Melakukan Audit Internal terkait Keamanan Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT / BRIN	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	Seluruh OPD	2023-2027
		Melakukan Audit Eksternal terkait Keamanan Kabupaten Situbondo menggunakan *Tools* BPPT/BRIN	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo	BPPT / BRIN	2023, 2025, dan 2027

Berdasarkan kerangka kerja keamanan informasi yang kemudian dilakukan proses *cascading* dengan template ABACUS sebagai pedoman dari Kementerian PAN-

RB. Pembahasan secara detail terkait dengan usulan keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo akan dibagi menjadi **4 (empat)**, diantaranya meliputi Perencanaan, Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut yang akan dijelaskan pada **sub bab 3.8.1 hingga sub bab 3.8.4.**

3.8.1 Perencanaan Keamanan SPBE

Tahap perencanaan menjadi kompoonen penting dalam pemantauan dan evaluasi indeks SPBE, dimana mengacu pada **2 pedoman** yang pertama yaitu **ISO 27001** klausul 4 hingga 6 serta **Peraturan BSSN 4/2021 Pasal 8 dan Pasal 9**. Pelaksanaan edukasi kesadaran merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap aspek keamanan. **Kegiatan edukasi kesadaran perlu dilakukan pada setiap kegiatan** dengan menerapkan perencanaan, dimana salah satu kegiatan yang dapat dilakukan selain membentuk Tim Audit adalah dengan menentukan ruang lingkup pada fase perencanaan. Dengan adanya isu isu terkait keamanan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini, maka **perlu dilaksanakan peningkatan kesadaran keamanan** pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam Tahapan Perencanaan Keamanan SPBE terbagi menjadi 4 kategori:

a) Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran atau yang sering kali dikenal dengan ***awareness*** dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu. Pelaksanaan edukasi kesadaran diharapkan dapat mengurangi ancaman yang berasal dari internal organisasi. Detail kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dapat dilihat pada Buku **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.1 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE Tabel 3.1.**

b) Standar Keamanan SPBE

Dalam Penerapan Standar Keamanan SPBE diperlukan beberapa Peraturan yang dibuat sebagai pedoman atau acuan serta memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan **inventarisir** ulang standar keamanan yang sudah dimiliki masing-masing O**PD**, sehingga dapat dilakukan pemenuhan standar keamanan yang dibutuhkan atau melakukan pembaharuan dokumen standar keamanan yang sudah ada. Standar keamanan yang wajib diterapakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Innformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik** dan **Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Detail kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.2 Standar Keamanan SPBE Tabel 3.2.**

c) Ruang Lingkup Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Innformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tahapan pertama yang dilakukan dalam hal perencanaan adalah **menentukan ruang lingkup**. Penentuan ruang lingkup untuk menentukan fokus atau arah kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terbentuk rencana strategis dan solusi pengembangan yang fokus pada penyelesaian masalah. Detail terkait dengan ruang lingkup keamanan SPBE yang dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.3 Ruang Lingkup Keamanan SPBE Tabel 3.3.**

d) Keamanan Teknis SPBE

Dengan adanya standar keamanan yang sudah dibuat dan ditetapkan, maka diharapkan setiap pelaksana keamanan mematuhi dan menggunakan standar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terlebih dalam hal penanganan insiden. Setiap terjadi insiden, perlu adanya pencatatan dalam bentuk catatan aktivitas sistem, sehingga terdapat pencatatan atau dokumentasi terkait dengan insiden yang terjadi. Adapun detail **penerapan** ataupun **implementasi keamanan Teknis** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk pendukung seluruh penerapan Keamanan SPBE dapat dilihat **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada subsubbab 3.4.1.4 Keamanan Teknis SPBE Tabel 3.4.**

e) Perangkat Keamanan SPBE

Perangkat keras keamanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang lebih tepatnya untuk kebutuhan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk mendukung penerapan Keamanan pada Pusat Data/ *Data Center*. Detail usulan Perangkat Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.1.5 Perangkat Keamanan SPBE Tabel 3.5**.

f) Pedoman / SOP Keamanan SPBE

Penerapan Pedoman Keamanan atau SOP Keamanan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini masih belum maksimal karena kurang adanya dukungan terkait kebijakan yang mewajibkan setiap penerapan harus didukung dengan adanya pedoman atau SOP. Terdapat 2 kelompok usulan pembuatan SOP sebagai **pedoman** dalam **pelaksanaan Keamanan SPBE** yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu terkait **Ruang server** dan **Jaringan Intra Pemerintah**. Detail usulan pedoman/SOP dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo pada**

subsubbab 3.4.1.5 Pedoman / SOP Keamanan SPBE Tabel 3.6. untuk Ruang Server dan Tabel 3.7 untuk Jaringan Intra Pemerintah.

Usulan Detail kegiatan disetiap kategori dalam **Tahapan Perencanaan Keamanan SPBE** dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.1 Tahapan Perencanaan**.

3.8.2 Implementasi Keamanan SPBE

Pada tahap implementasi yaitu merupakan tahapan yang dimana didalamnya terdapat beberapa elemen pendukung dimana terdiri dari **Standar Keamanan, Peningkatan Keamanan dan Perangkat Keamanan**. Dalam tahapan implementasi keamanan dapat dilakukan dengan menentukan dan membuat standar yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE. Acuan dapat berupa Peraturan dari pusat seperti halnya Peraturan Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No.10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan ISO 27001; 2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Peraturan Bupati atau Surat Keputusan dan lainnya.

Berdasarkan ketentuan format ABACUS, setiap insiden yang terjadi perlu dicatat sehingga terdapat dokumentasi insiden apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana kerentanan yang terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kerentanan keamanan SPBE yang ada di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subbab 3.3.2 Tahapan Implementasi pada sub sub bab 3.4.2.1 Kerentanan Keamanan SPBE Tabel 3.8**.

3.8.3 Evaluasi Keamanan SPBE

Tahapan Evaluasi Keamanan SPBE dilakukan dengan menerapkan Audit SPBE pada Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE, hal tersebut telah tertuang pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan kegiatan Audit *Internal* dan *Eksternal* dalam meningkatkan Kelaikan Keamanan SPBE, dimana secara pedoman dan perangkat audit telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagaimana penerapan Indeks KAMI dapat dilakukan sebagai bentuk penilaian mandiri dalam melihat kesiapan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelum menerapkan sertifikasi ISO 27001.

Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah

mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. Secara menyeluruh usulan Kegiatan Evaluasi Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subsubbab 3.4.3 Tahapan Evaluasi Subsubsubbab 3.4.3.1 Kelaikan SPBE Tabel 3.9.**

3.8.4 Tindak Lanjut Keamanan SPBE

Tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang dilakukan setelah tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahapan ini terdapat 3 identifikasi untuk mengindentifikasi seluruh Keamanan SPBE yang telah diterapkan dan dilakukan penanganan atau tindak lanjut dari hasil permasalahan keamanan yang didapatkan serta mencegah adanya serangan keamanan.

a) Pengujian Keamanan SPBE

Pengujian Keamanan (*Security Testing*) bertujuan untuk mengetahui kerentanan keamanan dari sistem yang dikembangkan juga memastikan bahwa data dan infromasi serta sumber daya yang berada di dalam sistem telah memiliki perlindungan yang baik dari pada penyusup. Dengan menemukan seluruh celah dan keamanan dari sistem yang diterapkan atau sedang dikembangkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat melakukan pencegahan terhadap hilangnya data dan informasi yang penting serta kerugian lainnya. Rekomendasi terkait dengan area utama yang dapat dilakukan Pengujian keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.4.1 Pengujian Keamanan SPBE Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.**

b) Penanganan Insiden

Penanganan Insiden terjadi berdasarkan dengan waktu terjadinya insiden dan jika hanya terdapat insiden keamanan, setiap insiden yang terjadi **harus** tetap **didokumentasikan** mulai dari kegiatan insiden hingga penanganan insiden yang dapat disusun dalam bentuk excel maupun word. Pendokumentasian insiden keamanan juga dapat mengacu pada pedoman ISO 27001. Adapun beberapa **contoh** terkait dengan Penanganan Insiden Keamanan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo subsubbab 3.4.4.2 Penanganan Insiden Tabel 3.12.**

c) Peningkatan Keamanan SPBE

Berdasarkan kerentanan Keamanan SPBE yang dapat terjadi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan menimbulkan beberapa insiden yang terjadi dan **wajib dicatat** hingga pada tahap kematangan untuk penanganan insiden

Keamanan SPBE dan detail kegiatan. Berikut merupakan rekomendasi kegiatan peningkatan keamanan SPBE yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Subsubbab 3.4.4.3 Peningkatan Keamanan SPBE Tabel 3.13.**

3.9 Peta Rencana Audit SPBE

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Audit SPBE merupakan audit yang dilakukan terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE. Terdapat 3 jenis audit yaitu Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan, dimana Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE diamanatkan kepada BPPT atau BRIN. Sedangkan Audit Keamanan SPBE diamanatkan kepada BSSN. Pelaksanaan audit dan perangkat audit yang digunakan mengacu pada perangkat audit BPPT atau BRIN (untuk audit infrastruktur dan aplikasi).

Audit dilaksanakan dalam bentuk Audit Internal dan Audit Eksternal. Audit eksternal adalah Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah dan Swasta Terakreditasi yang mana Proses Pelaksanaannya **setiap 2 tahun sekali**, sedangkan Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pegawai IPPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Utama Instansi yang mana Proses Pelaksanaannya di **setiap tahunnya**. Untuk **Audit Aplikasi** terdiri dari **124 Indikator** penilaian dimana setiap indikator memiliki 4 level penilaian dimulai dengan **level 0** hingga **level 3.** Sedangkan untuk **Audit Infrastruktur** terbagi kedalam 3 kategori yaitu, Pusat Data dimana terdiri dari **183 Indikator**, Jaringan Intra Pemerintah terdiri dari **47 Indikator**, dan Sistem Penghubung Layanan sebanyak **49 Indikator**. Setiap kategori terdiri dari **2 Domain** yaitu Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data serta Aspek Lain Pusat Data.

Audit SPBE ini bersifat lebih rinci (detail) dan bersifat lebih teknis jika dibandingkan dengan Evaluasi SPBE. Usulan pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Situbondo telah dijelaskan pada **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo Sub bab 3.4.3.1 Kelaikan Keamanan SPBE Tabel 3.9 Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE.**

BAB 4
RENCANA ANGGARAN

Pada bab 4 ini akan membahas terkait perencanaan anggaran mulai dari pengadaan dalam penyelenggara dan SDM SPBE, aplikasi dan anggaran paket pekerjaan.

4.1 Rencana Anggaran Penyelenggara dan SDM SPBE

Rencana anggaran Penyelenggara SDM SPBE merupakan kisaran rincian anggaran dalam pemenuhan dan penyelenggaraan SDM yang diusulkan. Kisaran anggaran ini diperoleh berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kisaran anggaran ini agar dapat memberikan tunjangan terkait SDM usulan dan membantu proses manajemen pada masing-masing Pemerintah Kabupaten Situbondo. Anggaran tertulis dalam dokumen ini bisa disesuaikan Kembali dengan kompleksitas kebutuhan dan manajemen dari setiap OPD Kisaran Biaya Pengadaan SDM Penyelenggaran SPBE

4.1.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggaran SPBE

Rencana anggaran Penyelenggara SDM SPBE merupakan kisaran rincian anggaran dalam pemenuhan dan penyelenggaraan SDM yang diusulkan. Kisaran anggaran ini diperoleh berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kisaran anggaran ini agar dapat memberikan tunjangan terkait SDM usulan dan membantu proses manajemen pada masing-masing Pemerintah Kabupaten Situbondo. Anggaran tertulis dalam dokumen ini bisa disesuaikan Kembali dengan kompleksitas kebutuhan dan manajemen dari setiap OPD Kisaran Biaya Pengadaan SDM Penyelenggaran SPBE dapat dilihat pada **tabel 4.1.**

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

No	Kompetensi	Job Level		
		Entry Level	Experienced	Senior
1	Operator User Sistem	Rp3,852,342	Rp4,078,846	Rp5,485,518
2	Programmer	Rp4,804,681	Rp6,002,875	Rp6,568,613
3	Admin Website	Rp3,021,329	Rp3,635,049	Rp4,185,717
4	Admin *Database*	Rp3,088,769	Rp4,012,100	Rp4,524,008
5	Analisis dan Desain Sistem	Rp6,158,207	Rp7,634,429	Rp8,509,205
6	Teknisi Komputer	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
7	Service/Help Desk	Rp4,147,070	Rp6,000,000	Rp7,000,000
8	Admin Jaringan	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
9	Administrator Keamanan TI	Rp10,000,000	Rp12,000,000	Rp15,000,000

Sumber: https://gajimu.com/

4.1.2 Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

Rencana anggaran pengembangan kompetensi SDM SPBE merupakan acuan dalam perencanaan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM SPBE baik yang dimiliki maupun yang diusulkan. Bentuk pengembangan kompetensi SDM SPBE yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi. Tujuan diadakan nya pengembangan kompetensi ini adalah guna menunjang tugas dari teknisi dalam melakukan operasional TIK.

A) Rencana Anggaran Pelatihan

Rencana anggaran biaya pelatihan pada **Tabel 4.2** dibawah ini, dapat menjadi acuan untuk pengadaan pada masing-masing teknisi. Detail kisaran anggaran didapatkan pada beberapa Lembaga penyedia pelatihan.

Tabel 4.2 Rencana dan Anggaran Pelatihan

Pelatihan	Kisaran Harga Pelatihan	Sumber
Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp8.000.000	itgid.org
Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12.000.000	itgid.org
Manajemen Proyek (PMP)	Rp6.500.000	pmexcellent.com
Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp4.950.000	trainingcenter.co.id
Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp11.000.000	itgid.org
Business Process Re-Engineering	Rp3.900.000	e-trainingonline.com
Business Process Management	Rp3.900.000	trainingcenter.co.id
Analisis dan Sofware Testing	Rp799.000	expertindo-training.com
Programmer (OCA, OCP)	Rp2.000.000	reed.co.uk
Desain Basis Data (Database) (*Online*)	Rp799.000	udemy.com
Big Data Anayst (*Online*)	Rp279.000	udemy.com
Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp981.376-Rp5.153.533	newhorizons.com
Integrasi Data	Rp799.000	udemy.com
Desain Jaringan Komputer (CCDA) (*Online*)	Rp279.000	udemy.com
Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp429.000	skillacademy.com

Pelatihan	Kisaran Harga Pelatihan	Sumber
Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Rp279.000	udemy.com
Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Rp5.692.134	udemy.com
GIS (Geographic Information System)	Rp42.798.000	esri.com
Artificial Intelligence (AI)	Rp1.599.000	towardsdatascience.com
Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp11.412.800	netcampus.co.id
Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12.000.000	itgid.org
Desainer Multimedia	Rp6.500.000	indo-asia.com
Desainer Grafis	Rp2.150.000	netcampus.co.id
IoT (*Online*)	Rp799.000	udemy.com
Cloud Computing (AWS) (*Online*)	Rp359.436	digitalcloud.training
ERP Analis	Rp18.545.800	indo-asia.com
Web Content Management Social Media (Online)	Rp799.000	udemy.com
Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Rp4.279.800	netcampus.co.id
IT Disaster Recovery	Rp9.000.000	itgid.org

B) Kisaran Biaya Sertifikasi

Kisaran biaya sertifikasi pada **Tabel 4.3** dibawah ini, dapat menjadi acuan untuk pengadaan pada masing-masing teknisi. Detail kisaran anggaran didapatkan pada beberapa Lembaga penyedia sertifikasi.

Tabel 4.3 Kisaran Biaya Sertifikasi

Sertifikasi	Kisaran Harga Sertifikasi	Sumber
Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp6.900.000	itgid.org
Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp8.500.000	itgid.org
Manajemen Proyek (PMP)	Rp7.917.630	pmexcellent.com
Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp4.950.000	itamorg.com
Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp10.500.000	itgid.org

Sertifikasi	Kisaran Harga Sertifikasi	Sumber
Business Process Re-Engineering	Rp5.450.000	bpminstitute.org
Business Process Management	Rp5.750.000	bpminstitute.org
Analisis dan Sofware Testing	Rp3.595.750	iccp.org
Programmer (OCA, OCP)	Rp 3,530,450	blogs.oracle.com
Desain Basis Data (Database)	Rp 3,530,450	education.oracle.com
Big Data Anayst	Rp3.000.000	theproductcompany.com
Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp 1.711.92	newhorizons.com
Integrasi Data	Rp2.000.000	talend.com
Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Rp279.000	cbtnuggets.com
Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp5.150.000	cbtnuggets.com
Service Desk (CompTIA A+)	Rp9.258.634	comptia.org
Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Rp.5.692.134	comptia.org
GIS (Geographic Information System)	Rp5.000.000	esri.com
Artificial Intelligence (AI)	Rp7.846.300	towardsdatascience.com
Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp4.636.450	cbtnuggets.com
Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12.000.000	itgid.org
Desainer Multimedia	Rp6.500.000	indo-asia.com
Desainer Grafis	Rp2.150.000	netcampus.co.id
IoT	Rp2.000.000	docs.microsoft.com
Cloud Computing (AWS)	Rp286,22	digitalcloud.training
ERP Analis	Rp799.000	indo-asia.com
Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Rp4.279.800	cbtnuggets.com
IT Disaster Recovery	Rp9.000.000	itgid.org
Web Content Management and social media	Rp . 899.000	Udemy.com

4.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

Rencana anggaran manajemen ini didapat dengan melakakukan *benchmark* dari bebrapa vendor konsultan TI. Manajemen SPBE disini dilakukan dengan pendampingan penyiapan dokumen kebutuhan manajemen dana pemberian bimtek terhada SDM terkait. Kisaran harga ini berlaku untuk pelaksanaan manajemen di satu

OPD. Harga dapat bertambah tergantung dari lingkup pelaksanaan manajemen tersebut. Detail anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.4** berikut.

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya Manajemen SPBE

Manajemen SPBE	Kisaran Anggaran
Manajemen Risiko	100 – 150 jt
Manajemen Keamanan Informasi	150 – 175 jt
Manajemen Data	150 – 175 jt
Manajemen Aset TIK	100 – 150 jt
Manajemen SDM	100 – 150 jt
Manajemen Pengetahuan	100 – 150 jt
Manajemen Perubahan	100 – 150 jt
Manajemen Layanan SPBE	150 – 175 jt

4.3 Rencana Anggaran Pembuatan SOP Layanan SPBE

Rencana anggaran dalam pembuatan SOP didasarkan pada seberapa kompleks alur proses bisnis yang akan direncanakan. Umumnya anggaran dalam pembuatan SOP berkisar di angka 36 sampai 50 juta. Kisaran anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran ini untuk, penyusunan form, jumlah *user* pengguna aplikasi, berapa kali proses pelaksanaan sosialisasi SOP dan jumlah SOP pelengkapnya. Penentuan kisaran SOP terbagi menjadi 3 yaitu kompleksitas sedang rendah dan tinggi. Penjelasannya seperti di bawah ini:

- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **rendah**, maka anggarannya berkisar **antara 36-40 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 2 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **sedang**, maka anggarannya berkisar antara **40-45 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 3 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas **tinggi**, maka anggarannya berkisar antara **45-50 juta**. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 4 SOP pendukung, kerena SOP ini pendukung layanan yang didukung oleh aplikasi dengan memiliki beberapa modul dan beberapa alur yang berbeda namun tetap dalam satu layanan SPBE.

4.4 Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE

Rencana anggaran arsitektur aplikasi SPBE yang dibahas pada sub bab ini merupakan perkiraan anggaran, di mana dalam dokumen ini bersifat prediksi dan dibuat dengan metode perbandingan dengan harga saat ini (*benchmark*) sehingga tentu secara fleksibel dapat berubah menyesuaikan standar harga pada tahun

berjalan. Aktivitas ini menghasilkan daftar prakiraan biaya untuk setiap aplikasi yang direkomendasikan. Hasil prakiraan diperoleh dari hasil analisis dengan sembilan indikator perhitungan, yaitu:

1) **Potensi integrasi dengan OPD lain**. Jika terdapat potensi integrasi dengan OPD lain maka diberi nilai 2, jika tidak maka diberi nilai 1.
2) **Jumlah tabel *Database***. Jika jumlah tabel lebih dari 50 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 2, sedangkan jika kurang dari 50 tabel diberikan nilai 1.
3) **Jumlah aplikasi yang terintegrasi**. Jika terdapat minimal 3 aplikasi yang terintegrasi maka diberikan nilai 2, sedangkan jika integrasi kurang dari 3 diberikan nilai 1.
4) **Jumlah kelompok user**. Jika kelompok user lebih dari 4 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 2, sedangkan jika kurang dari 4 kelompok user maka diberikan nilai 1.
5) **Jumlah fitur**. Jika terdapat sekurang-kurangnya 10 fitur maka diberikan nilai 2, sedangkan jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.
6) **Jumlah pengguna**. Jika pengguna berjumlah lebih dari sama dengan 200 maka diberikan nilai 2, jika pengguna kurang dari 200 maka diberikan nilai 1.
7) **Besar data pertransaksi**. Jika terdapat tautan file data yang dilampirkan maka diberikan nilai 2, jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.
8) **Panjang alur proses bisnis**. Jika proses bisnis usulan SI/ pengembangan SI eksisting lebih dari 4 langkah maka diberikan nilai 2, jika kurang dari 4 langkah diberikan nilai 1.
9) **Konsistensi *maintenance***. Jika aplikasi yang diusulkan perlu untuk dilakukan pengembangan berkala, misal dalam kurun waktu satu (1) tahun sekali dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi tersebut, maka diberikan nilai 2. Sedangkan jika tidak diperlukan pengembangan berkala diberikan nilai 1.

Penentuan nilai kompleksitas dari sebuah aplikasi ini dikelompokkan menjadi 4 tipe berdasarkan kompleksitas pembangunan aplikasi, diantara-nya sebagai berikut :

- **Pengembangan minor:** pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan *Update* data yang pengembangannya dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Internal OPD yang memiliki OPD Mandiri TIK. Aplikasi usulan menggunakan aplikasi dari pusat juga termasuk dalam kategori ini. Untuk kategori pengembangan minor tidak membutuhkan biaya **(Rp 0)**
- **Dasar**: Halaman dengan informasi statis dan biayanya sekitar **75 juta (75 – 100 juta)**.

- **Kompleksitas Sedang**: Halaman dengan informasi statis, beberapa unit fungsional dan API, juga integrasi pihak ketiga. Biaya aplikasi berbasis web di tingkat kompleksitas sedang **sekitar 125 juta (101 – 175 juta)**.
- **Sangat Kompleks**: Semua fitur dari "Kompleksitas Sedang", ditambah aktivitas multi pengguna, *high user load*, dan statistik khusus. Biayanya bisa mencapai **200 juta (176 – 300 juta).**

Sehingga, hasil perhitungan *benchmark* dan *range* anggaran dapat dilihat seperti pada **Tabel 4.5** di bawah ini.

Tabel 4.5 Perhitungan Aplikasi

Skor	Kompleksitas	Rentang Harga
0	Pengembangan minor	0
1 - 16	Kompleksitas Dasar	75 - 100 juta
32 - 64	Kompleksitas Sedang	101 - 175 juta
128 - 256	Sangat Kompleks	176 - 300 juta

Aplikasi rentang harga 0 diberikan jika pengembangan aplikasi minor, yaitu pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan *Update* data yang pengembangannya dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Internal OPD yang memiliki OPD Mandiri TIK. Aplikasi Rentang harga 0 juga berlaku untuk usulan menggunakan aplikasi dari pusat. Kisaran anggaran untuk masing-masing aplikasi yang diusulkan akan disajikan pada **Tabel 4.6.**

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Rentang Harga
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Penilaian Laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	75-100 juta
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Sipesat	101-175 juta
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	e-Partner	75-100 juta
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SIM-IBRO	75-100 juta
3	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	50-75 juta
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	SIM-SDA	101-175 juta
4	Bagian Perekonomian,	Aplikasi laporan realisasi fisik	101-175 juta

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Rentang Harga
	Pembangunan dan Sumber Daya Alam	dan keuangan	
6	Bagian Umum	SIM-BU (Sistem Informasi Bagian Umum)	75-100 juta
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Aplikasi Saran dan kiritikan	75-100 juta
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI JAPIN	75-100 juta
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Masda	75-100 juta
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi SIRKA	0 juta
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penggunaan Aplikasi E-Sakip	0 juta
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	E-Risalah	75-100 juta
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Website Internal DPRD	75-100 juta
11	Inspektorat	AlaKO (Aplikasi Layanan Konsultasi Online)	75-100 juta
11	Inspektorat	Pengembangan E-Matrik	75-100 juta
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIAP - SIAKSI	0 juta
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIDAK	0 juta
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Website BKPSDM	75-100 juta
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan aplikasi SIDAT	75-100 juta
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aktivasi SIMDA	0 juta
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM BanKeu (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan)	101-175 juta
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIMBADDA (1 aplikasi dengan e-masda)	75-100 juta
15	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan E-PDL	101-175 juta
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-AGENDA	75-100 juta
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Geospasial Pembangunan	75-100 juta

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Rentang Harga
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian Online	75-100 juta
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Aplikasi SILAO	75-100 juta
18	Dinas Kesehatan	E-Health Dinkes	75-100 juta
18	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Keuangan BLUD	75-100 juta
18	Dinas Kesehatan	SIMPUS	101-175 juta
19	Dinas Ketenagakerjaan	Pengembangan Web Disnaker	75-100 juta
19	Dinas Ketenagakerjaan	SIM-TTK (Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	101-175 juta
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi HelODesk	75-100 juta
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset TIK Kabupaten Situbondo	75-100 juta
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SDTIK	75-100 juta
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan SINEWS	75-100 juta
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan/upgrade aplikasi Naskah Dinas Elektronik	75-100 juta
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	E-KATALOG UMKM	75-100 juta
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIMKU	75-100 juta
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengembangan SIPENAMAS	75-100 juta
22	Dinas Lingkungan Hidup	Sipesah v.2 Mobile	101-175 juta
22	Dinas Lingkungan Hidup	SIPOMALI (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	101-175 juta
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktivasi dan pengembangan Website TIC	101-175 juta
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Pengelolaan Kunjungan Wisata (satu aplikasi dengan website TIC)	75-100 juta
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	SIPORA (Sistem Informasi Kepemudaan dan Olah Raga)	75-100 juta
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aktifasi Website pariwisata.situbondokab.go.id	0 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum	Aplikasi keluhan jalan dan	75-100 juta

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Rentang Harga
	dan Perumahan Permukiman	jembatan	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-DILAN (Evaluasi Data Jalan dan Jembatan)	101-175 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	E-Kontruksi	75-100 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	e-RTTG	101-175 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIPINTER	101-175 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	SIM Perumahan	75-100 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Checking Kebutuhan	75-100 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan	75-100 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pemanfaatan Aset dan Kartu Inventaris Barang	101-175 juta
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Sistem Informasi Pengelolaan SPJ	75-100 juta
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan Data Desa Center	75-100 juta
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAP Desa (Sistem Informasi Aparatur Pemerintahan Desa)	75-100 juta
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pengembangan Pakem Situbondo	75-100 juta
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan SIPINTER	101-175 juta
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu	SIMVEST	101-175 juta

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Rentang Harga
	Pintu		
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Antrian	75-100 juta
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi PMP	75-100 juta
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sebaya	75-100 juta
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi SISPENA	75-100 juta
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Aplikasi Sistem Absensi	75-100 juta
29	Dinas Perhubungan	Aplikasi Rekomendasi Bidang Perhubungan	75-100 juta
29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Aplikasi Dishub PKB	75-100 juta
29	Dinas Perhubungan	Pengembangan Website Dishub	75-100 juta
29	Dinas Perhubungan	SIMPADA	101-175 juta
29	Dinas Perhubungan	SITRANS	101-175 juta
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Tali Pusar	75-100 juta
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TAJINPALAPPA	75-100 juta
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SRIKANDI	0 juta
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aktivasi SI-KEPANG (Ketahanan Pangan)	75-100 juta
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI Nelayan	75-100 juta
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	SI-Ternak	75-100 juta
33	Dinas Sosial	Aplikasi Pengumpul Data Siswa/Mahasiswa yang magang / PKL di Dinsos Situbondo	75-100 juta
33	Dinas Sosial	SISOS	75-100 juta
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan Website Satpol PP	75-100 juta
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Si Trantibum (Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	101-175 juta
34	Satuan Polisi Pamong Praja	SIAGA API (Sistem Informasi Siaga Api)	75-100 juta
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Aplikasi SIMRS	101-175 juta

Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Rentang Harga
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	REKAM MEDIS ELEKTRONIK	75-100 juta
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengembangan Sistem Persediaan Farmasi	75-100 juta
36	Kecamatan Situbondo	SP4N LAPOR	75-100 juta
38	Puskesmas Situbondo	SIMPUS	0 juta
38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan simesem	75-100 juta
38	Puskesmas Situbondo	Pengembangan sikda mobile	75-100 juta
39	Puskesmas Bungatan	SIMPUS	0 juta
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi Laporan Kejadian Bencana	75-100 juta
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	176-300 juta
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Manajemen Logistik Bencana	75-100 juta

4.5 Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasul analisis dan hasil usulan yang ada yang telah dijelaskan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo**. Rencana dan anggaran terbagi menjadi anggaran pengadaan server dan pelengkapnya serta anggaran untuk pengadaan *hardware*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini.

4.5.1 Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya

Anggaran Jaringan Intra Pemerintah didasarkan pada kebutuhan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 5 tahun kedepan. Detail Kisaran Anggaran Jaringan Intra Pemerintah ditampilkan pada **Tabel 4.7.**

Tabel 4.7 Rencana Anggaran Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	DED Jaringan Intra Pemerintah	Pembuatan DED Jaringan terkait dengan Rekomendasi Jalur Jaringan, Perangkat, dan Monitoring Jaringan	**Rp 250.000.000**
2	Pengkajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah kab Situbondo telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya	**Rp 200.000.000**

4.5.2 Anggaran Ruang Server (*Data Center*) dan Pelengkapnya

Anggaran server didasarkan pada kebutuhan server yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 5 tahun kedepan, **Tabel 4.8** menjelaskan rencana anggaran untuk pengadaan Ruang server, dan perangkat pendukung.

Tabel 4.8 Rencana Anggaran Ruang Server (*Data Center*) dan pelengkapnya

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	DED Ruang Server	Melakukan perancangan DED Ruang Server yang bertujuan untuk mengetahui Bluprint Ruang server dan aspek yang sesuai dengan TIA 942 dan SNI Pusat Data	Rp 185.000.000
2	Pengadaan /Peremajaan Perangkat Pendukung Ruang Server dan Pemenuhan Aspek	Pemenuhan Bangunan dan Interior Ruang Server	Rp 250.000.000
		Pengadaan/Peremajaan Cadangan Baterai UPS (4 Unit)	Rp 20.000.000
		Pengadaan / Peremajaan Monitor LED Smart TV (1 unit 74 inch)	Rp 75.000.000
3	Server Blade	Pengadaan Server Blade untuk penghematan konsumsi energi; khususnya dari sisi power, cooling, physical space, management, server provisioning, dan connectivity (Server I/O) Server Blade 10 Slot Full SFP 1GB	Rp 750.000.000
4	SAN (*Storage Area Network*)	Penegadaan SAN yang berfungsi untuk menghubungkan storage ke server dan mengatur pembagian akses. Desain modular dan tanpa kabel serta struktur SBB 2.0. Prosesor multi-core 64-bit. Cache berkecepatan tinggi 4 GB. Empat antarmuka jaringan 1000M. Saluran transmisi berkecepatan tinggi 12G SAS. Desain redundan untuk modul kunci. Deteksi HDD dan perbaikan/ Pengoptimalan RAID Deteksi sebelum operasi. Deteksi dalam operasi. Perbaikan kesalahan. RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, dan VRAID. Cadangan panas global dan lokal. Pembuatan RAID cepat Kemampuan mengalirkan hingga dua penutup penyimpanan di belakang satu port SAS.	Rp. 369.870.000
5	Memory Server	Memory Server merupakan Random Access Memory (RAM) yang memproses data dari HDD ke CPU. Spesifikasi Memory Server IBM/System X P/N 00D5016 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM Compatible for Server:	Rp. 3.520.000

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
		System x3100 M5-5457 System x3250 M5-5458 System x3650 M4 HD-5460 System x3650 M4 BD-5466 System x3630 M4-7158-8103 System x3530 M4-7160 Compute Node - x240 (Flex) - 7162 - 8737 System x3500 M4 - 7383 System x3650 M4 - 7915 - 8061	
6	Prosesor Server	komponen komputer yang merupakan otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerjasama dengan perangkat komputer lainnya. Spesifikasi Intel Xeon E5-2695v4 18 Cores, 36 Threads Clockspeed 2.10GHz, turbo up to 3.30GHz L3 Cache 45MB TDP 120W Socket LGA2011-3 Support DDR4 2400T RDIMM	Rp. 5,225,000

4.5.3 Anggaran Komputasi

Anggaran Komputasi didasarkan pada kebutuhan dalam penerapan komputasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 5 tahun kedepan, **Tabel 4.9** menjelaskan rencana anggaran untuk penerapan Komputasi.

Tabel 4.9 Rencana Anggaran Komputasi dan pelengkapnya

No	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	Masterplan Penggunaan dan Penerapan Komputasi Awan	Melakukan Perancangan masterplank dalam pnenerapan Komputasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	Rp 180.000.000

4.5.4 Anggaran Perangkat Keras (*Hardware*)

Anggaran *hardware* merupakan kebutuhan perangkat yang digunakan yang terdiri dari rencana anggaran untuk pengadaan printer, PC, Laptop, Printer dan beberapa perangkat keras lainnya dengan berbagai tipe. Kisaran anggaran ini didapatkan dari perbandingan e-katalog dan juga dari web resmi brand tersebut untuk harga dari perangkat *hardware*. Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.10.**

Tabel 4.10 Rencana Anggaran Perangkat Keras (*Hardware*)

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
Perangkat Keras Periferal Utama			
1	PC	System: WIN 10 HOME Processor: Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM): 8GB DDR4 Graphics: NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives: 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive: INTEGRATED Audio: HD AUDIO Networking: LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector: Front: 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack	Rp21.888.000
2	PC	Processor : Intel Core i5-10400 Processor 2.9 GHz (12M Cache, up to 4.3 GHz, 6 cores) RAM: 8GB DDR4 U-DIMM Storage : 1TB SATA 7200RPM 3.5 HDD VGA Integrated Graphic: Sistem Operasi Windows 10 Home DeskripsiInclude Monitor 23,8 inch FHD / Size : 20L (Mini Tower) / Color : Black / Form Factor : Tower / Processor : Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (12M Cache, up to 4.3 GHz, 6 cores) / Operating System : Windows 10 Home / Chipset : Intel® B560 Chipset / DIMM Memory : 8GB DDR4 U-DIMM / Memory Max. : 64GB / Graphic : UMA / Storage : 1TB SATA 7200RPM 3.5"" HDD / Optical Drive : DVD reader 8X / LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro / Audio : High Definition 7.1 Channel Audio / Wireless :	Rp11.999.000,00

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 / Power Supply : 300W power supply (peak 350W) / Rear I/O Port : 1x RJ45 Gigabit Ethernet + 1x HDMI 1.4 + 1x VGA Port + 1x DVI-D + 2x PS2 + 1x Serial port + 3 x Audio jacks + 2x USB 2.0 Type-A + 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / Front I/O Port : 1x Headphone + 1x MIC in + 2x USB 2.0 Type-A + 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / Drive Bay : 3.5" x 2 / Serial ATA : 4 x SATA 6.0Gb/s ports / Expansion Slot(includes used) : 1x PCIe® 4.0 x 16 + 2x PCIe® 3.0 x 1 + 1x M.2 connector for WiFi + 1x M.2 connector for storage + 2x DDR4 U-DIMM slot / Keyboard & Mouse : Wired keyboard + Wired optical mouse / Accessory (Optional) : 1 x COM port + 1 x Parallel port / Dimension (WxDxH) : 16 x 38 x 35.5 cm / Weight : 7kg / My ASUS features : System diagnosis , Fan profile / AppDeals : Link to MyASUS / Built-in Apps : MyASUS + ASUS Business Manager / Security : BIOS Booting User *Password* Protection + HDD User *Password* Protection and Security + Kensington Security Slot™ + Trusted *Platform* Module (Firmware TPM) Keterangan LainnyaWarranty 3 years (3/3/3) Type/ModelExpertCentre D500TC	
3	Laptop	ASUS A409FJ-EK751T Processor Intel® Core™ i7-8565U 1.8 GHz Memory 4GB (onboard) + 4GB (DRAM DDR4) Hard Disk Storage PCIEG3x2 NVME 512GB M.2 SSD Display Size 14.0' Graphic NVIDIA® GeForce® MX230 Resolution 1920x1080 Optical Drive - Operating System Windows 10 Dimension (W x D x H) 32.5(W) x 21.6(D) x 2.29 (H) cm Est. Weight 1.65 KG Warranty 2 Year I/O Port "1x USB 3.1 Gen 1 Type A 1x USB 3.1 Gen1 Type-C " Audio - Camera VGA Web Camera (Fixed type) Interface - Wifi 802.11ac Bluetooth Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 Power 32WHrs, 2S1P Battery 2-cell Li-ion	Rp13.650.000
4	Printer	- Up to 24 pages per minute print speed - Automatic 2-sided print - 9.3cm colour touchscreen - Wired and wireless network - 50 sheet Auto Document Feeder	Rp8.400.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		- Inbox toners - Bk: 1,000 pages, CMY: 1,000 pages	
Perangkat Keras Periferal Pendukung			
1	LCD Proyektor	Projector NEC MC331XG MC331XG Type : LCD Brightness [ANSI Lumen] : 3300 Contrast : 15000:1 Resolution : 1280 x 800 Light Source : Lamp Lamp Life [h] : 6000	Rp12.500.000
2	SMART TV (LED)	- Screen size : 50 inch - Resolution : 4K UHD (3,840 x 2,160) - HDR 10+ : Yes - Object Tracking Sound : OTS Lite - Dolby Digital Plus : Yes - HDMI : 3 - USB : 2 - Audio Out : Optical - Sistem operasi : TIZEN OS - Aplikasi yang tersedia : YouTube, Netflix, Browser Web	Rp9.009.000
3	Camera Digital	Spesifikasi: 24.1MP APS-C CMOS Sensor DIGIC 8 Image Processor UHD 4K and HD 720p120 Video Recording Dual Pixel CMOS AF with Eye Detect AF 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen Wi-Fi and Bluetooth; Webcam Capability Extended ISO 51200, 10 fps Shooting Combination 5-Axis Image Stabilization EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lens	Rp10.180.000
4	Webcam	Spesifikasi: Resolusi Maks.: 1080 p/30 fps - 720p/ 30 fps Kamera mega pixel: 3 Jenis fokus: Autofocus Jenis lensa: Kaca Mikrofon internal: Stereo Jangkauan mikrofon: Maksimal 1 m Bidang pandang diagonal (dFoV):: 78° Universal clip yang kompatibel dengan tripod ini cocok dengan berbagai laptop, LCD, atau monitor 1Tripod tidak disertakan Dimensi termasuk fixed mounting clip Tinggi: 43,3 mm Lebar: 94 mm Tebal: 71 mm Panjang kabel: 1,5 m Berat: 162 g	Rp1.850.000
5	Drone	Spesifikasi: Dengan menampilkan sensor	Rp34.806.825

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		CMOS 1 inci, fungsi otonom canggih, dan bodi kompak dengan berat kurang dari 600 g, DJI Air 2S adalah drone terbaik yang dirancang bagi para fotografer udara yang senang berpergian. Rasakan pengalaman merekam dunia yang menakjubkan. Sistem Kamera Luar Biasa Dilengkapi dengan sensor gambar 1 inci dan piksel 2,4µm yang besar, DJI Air 2S mampu menghasilkan video 5.4K / 30fps dan 4K / 60fps. Abadikan momen apa pun dengan kejernihan yang memukau. Aksesoris Hebat Untuk Kreativitas Tanpa Batas The Fly More Combo mencakup aksesoris praktis seperti Battery Charging Hub, tas bahu, ND Filters Set, tiga baterai penerbangan cerdas, dan lainnya. Nikmati peningkatan fleksibilitas ND Filter ND 4/8/16/32 dan ND 64/128/256/512. DJI Smart Controller mempermudah melihat hasil rekaman dari drone dengan tingkat kecerahan layar 1080p 5.5 inci. Kompatibel dengan DJI GO 4 dan DJI FLY ataupun aplikasi pihak ketiga. Aircraft x1 DJI RC-N1 Remote Controller x1 Intelligent Flight Battery x3 Battery Charger x1 AC Power Cable x1 Low-Noise Propellers (Pair) x6 Gimbal Protector x1 Type-C Cable x1 DJI RC-N1 RC Cable (USB Type-C Connector) x1 DJI RC-N1 RC Cable (Lightning Connector) x1 DJI RC-N1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) x1 Spare DJI RC-N1 Control Sticks (Pair) x1 ND Filters Set (ND4/8/16/32) x1 Battery Charging Hub x1 Battery to Power Bank Adaptor x1 Shoulder Bag x1	
6	- Fingerprint Scanner BIOMORF Scan Tenprint 1051 - Iris Scanner Cmitech BMT 20 - Signature Pad - Topaz LCD 1X5 T-L (BK) 462	Fingerprint Scanner : Perangkat perekaman sidik jari ini mampu mmerekam 4 jari sekaligus.Finger sacnner : Plain four finger up to 3,2""x3,0"" - Two plan thumb up to 3,2""x3,0"" - Rolled finger up to 1,6""x1,6"". Interface/Power Supply : USB 2.0. Dimension 148 x 152 x 148 mm. Weight : 1,5 kg. Support OS : Microsoft Windows XP, Vista and 7, Linux	Rp61.930.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		Iris Scanner : Perangkat ini berfungsi untuk merekam IRIS mata, alat perekaman ini memiliki fitur flash yang hanya membutuhkan waktu 1 detik untuk pengambilan gambar. Deskripsi: Meets or exceeds ISO 19794-6 Typically arround 1 second, from time of head placement (0 to 50°C) USB 2.0 High Speed | USB 2.0 (500 Ma AT 5v) No additional power required Windows 7, 8 and 8,1 (32 and 64-bit) Linux Ubuntu 12.04 distributions Android 4.0 and above Signature Pad : Topas SignatureGeM TM LCD 1X5 adalah sistem untuk menangkap tanda tangan yang digunakan di meja, desktop, atau aplikasi portabel. LCD ini juga dapat digunakan untuk menampilkan teks dan grafis dari komputer host dan pen-tap hot spot yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi atau memeriksa opsi pilihan. Topas SignatureGeM TM LCD 1X5 memiliki fitur menangkap tanda tangan elektronik pad dengan fitur tambahan dari sebuah layar LCD interaktif, yang memungkinkan pengguna untuk melihat ""tinta elektronik"" di bawah ujung pena. Memiliki layar kaca tempered membuat alat ini serbaguna. Spesifikasi Signature Pad - Topaz LCD 1X5 T-L (BK) 462 : - Jenis Sensor: Permukaan kaca tempered, Nilai hingga 2 juta tanda tangan, Digitizer E / M berkinerja tinggi - Jenis Pena: Pena tanpa baterai E / M yang kokoh dan berdaya rendah - Resolusi & Tingkat Konversi Melebihi standar industri PPI yang Dapat Diprogram - Kemampuan Otentikasi: Data .SIG kualitas forensik yang mampu diperiksa dan diautentikasi dengan perangkat lunak Topaz - Merk : TOPAZ - Type : TM LCD 1x5	

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		- Jenis : Signaturepad - *Platform* : TOPAZ signatureGem - Interface : USB 2.0 powered (standard cable) - Sensor : Active electromagnetic Sensor - Pen type : Active Energized - Part Number: T-LBK462-HSB-R - Sensor type: Active Electromagnetic - Pen type: Active Energized - Data conversion: 377 - Resolutions: 410 - Supported OS: Windows/Linux - Data interface: USB Standards	
7	LCD	SCREEN PROJEKTOR Wall Layar Proyektor merupakan layar proyektor berukuran 70 x 70 Inch (178 x 178 cm) untuk digantung di dinding. Layar proyektor ini terbuat dari bahan yang tidak mudah robek. Layar proyektor ini mudah dipasang dan mudah diatur panjang-pendeknya. Mudah dipasang dan mudah diatur panjang-pendeknya	Rp1,210,000
8	Scanner	Merek : EPSON EPSON WORKFORCE DS-530II A4 SHEET-FED DOCUMENT SCANNER" A4 Duplex Sheet-fed Document Scanner. Scanning speed of up to 35 ppm / 70 ipm. Automatic Document Feeder (ADF) of up to 50 sheets. Daily duty cycle of 4,000 One-pass duplex scanning. Paper protection function and image sensor glass dirt detection. Max Document Size: 215.9 x 6096 mm. 50 sheets (80g/m2)	Rp11,657,000
9	Scanner EPSON SCANNER ES50 (A4)	SCANNER ES50 (A4), Document Scanner	Rp2,810,000
10	Pemancar (Radio Wireless)	Berfungsi untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Spesifikasi Antenna Characteristics - Model RD-5G34 - Dimensions: 1050 x 1050 x 421 mm (41.34 x 41.34 x 16.57")	Rp 8,972,700

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		- Weight** : 13.5 kg (29.76 lb) - Frequency Range: 5.1 - 5.8 GHz - Gain: 34 dBi - HPOL Beamwidth: 3 (3 dB) - VPOL Beamwidth: 3 (6 dB) - F/B Ratio: 42 dB - Max. VSWR: 1.4:1 - Wind Loading: N @ 200 km/h (400 lbf @ 125 mph) - Wind Survivability: 200 km/h (125 mph) - Polarization: Dual-Linear - Cross-pol Isolation: 35 dB Min. - ETSI Specification: EN DN2 - Mounting: Universal Pole Mount, Rocket Bracket, and Weatheroof RF Connectors Included	
Perangkat Keras Jaringan			
1	Modem Advan CPE Start 4G LTE	Secure WPS Encryption + 1 Device 3 SSID, jangkauan sinyal yang lebih luas hingga 125m dengan Router Advan CPE Start, frekuensi 2.4GHz	Rp2,000,000
2	Gateway Router	DHCP, VLAN. CCR2216-1G-12XS-2XQ	Rp41.488.980
3	Gateway Router	Architecture ARM 64bit CPU AL32400 CPU core count 4 CPU nominal frequency 1700 MHz Dimensions 443 x 224 x 44 mm RouterOS license 6 Operating System RouterOS v7 Size of RAM 4 GB Storage size 128 MB Storage type NAND MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -20°C to 60°C	Rp8.984.500
4	Switch Management Bandwidth	SFP Port, 2Port. CCR2216-1G-12XS-2XQ	Rp41.488.980
5	Distribution switch	VLAN, 1GB,4-SFP, 24port. CRS328-24P-4S+RM	Rp7.260.060
6	Router	Managed, 12Port, VLAN. CCR1016-12S-1S+ (Rp12,099,572) dan CCR1036-12G-4S (Rp16,259,655)	Rp28.359.227
7	Access Point	SKU: UAP-AC-SHD-US 802.11ac Wave 2 WiFi technology 5 GHz (4x4 MU-MIMO) band with a 1.7 Gbps throughput rate 2.4 GHz (4x4 MIMO) band with a 800 Mbps throughput rate *Dedicated* security radio for persistent network threat management	Rp8.400.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		Powered with PoE+* (2) GbE RJ45 ports (1) USB port	
8	Antenna Outdoor	Assembled Sleeve30 dimensions 700x700x220mm Box dimensions 720x715x230mm Weight netto 2.95 kg Weight bruto 5.520kg Box contents aluminum shell, front cover, fasteners, silicone sealan	Rp2.249.900
9	Repeater Wifi	Kecepatan maksimal : 300 Mbps Frekuensi : 2.4 GHz Ports : 1 x Ethernet port Fitur : SSID Hiding	Rp307.000
10	MIKROTIK CRS317-1G-16S+RM	RouterBoard CRS317-1G-16S+RM Adalah Switch Layer 3 dari Mikrotik yang berbasis SFP+ (10G). Switch ini Bisa menggunakan SwOS/RouterOS untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan 10G Anda. Sudah menggunakan standart Rackmount Case. Spesifikasi CRS317-1G-16S+RM Product Code CRS317-1G-16S+RM Architecture ARM CPU Marvell 98DX8216B0 800MHz Dual Core Current Monitor No Main Storage/NAND 16 MB RAM 1 GB SFP Ports 16 LAN Ports 1 Gigabit Yes Switch Chip 1 MiniPCI 0 Integrated Wireless No MiniPCIe 0 SIM Card Slots No USB No Memory Cards No Power Jack Yes 802.3af Support No POE Input Yes (Ether1) POE Output No Serial Port Yes (RJ45) Voltage Monitor No Temperature Sensor Yes Dimentions 443 x 224 x 44 mm Operating System RouterOS/SwOS Temperature Range -30C .. +70C RouterOS License Level6	Rp15.210.000
11	Core Switch	Core switch atau switch inti merupakan switch yang berperan sebagai inti penghubung antara perangkat dengan internet. Core switch terletak di bagian backbone atau inti fisik jaringan. Spesifikasi Switch (24 Port Gigabit + 4 SFP)	Rp. 11.000.000
Perangkat Media Penyimpanan			
1	IBM FlashSystem 5015 (6x4TB)	1x FlashSystem 5015 LFF Control Enclosure 6x 4TB 7.2K 3.5Inch NL HDD 1x 16Gb FC Card Adapter Pair	Rp146.318.500

4.5.5 Anggaran *Command Center*

Anggaran *Command Center* didasarkan pada kebutuhan peremajaan perangkat pada *Command Center* yang ada di Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. **Tabel 4.11** menjabarkan kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan peremajaan perangkat pada *Command Center*.

Tabel 4.11 Rencana Anggaran *Command Center*

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Harga Perangkat
1	Pengkajian atau Roadmaps Penerapan *Command Center*	Melakukan Pengkajian terhadap Penggunaan dan Penerapan *Command Center* (Intelegent Room dan Pendopo) dan menganalisis semua kebutuhan serta permasalahan yang ada saat ini	Rp 150.000.000
2	TV Videowall	Brightness (Typ.) : 500 cd/m^2 Bezel : 2.25 mm (T/L), 1.25 mm (B/R) Depth : 93.1 mm Interface : HDMI (2)/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR 55" 49"	Rp 55.800.000
3	TV Touchscreen	Brightness : 1,500 cd/㎡ (Typ.) Life Time : 50,000 hours Bezel : 10.9 mm (L/R), 16.1 mm (T), 23.2 mm (B) Depth : 95 mm Interface: HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR	Rp 66.500.000
4	PC	Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack Type : PC HP SLIM Operating System : WIN 10 HOME Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O	Rp 17.000.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Harga Perangkat
		Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack	
5	UPS (kapasitas 2.2 KVA)	Smart-UPS SRT 2200VA 230V Capacity1980Watt/2200VA Spesifikasi Teknis But Half : 11 menit, But Full : 3 menit Waktu pemindahan0 ms Battery capacity12V 5.1Ah x 6 Waktu pengisian baterai3 hours DeskripsiAPC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Keterangan LainnyaSurge Energy : 340 Joules, Topology : Double Conversion Online, Waveform : Sinewave, Output : 230V, Input : 230V, Port : USB, Smart Slot, Output Connection : 8 x C13 | 2 x C19, Warranty : 36 bulan (excld. Battery), 24 bulan (battery), Weight : 30.84 KG	Rp 36.380.300

4.6 Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE

Rencana anggaran Keamanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo** Informasi kisaran anggaran didapatkan dari beberapa perbandingan *e-commerce.* Penyusunan kebijakan ini menjadi satu kesatuan dengan pengadaan SOP pendukungnya. Kisaran rencana anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.12.**

Tabel 4.12 Rencana Anggaran Keamanan SPBE

No	Usulan Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Kisaran Harga
1	*Firewall*	SOPHOS XGS 4500	Rp1,014,480,000
		SOPHOS XGS 6500	Rp965,250,000
		SOPHOS XGS 5500	Rp1,135,890,000
		FORTINET Fortigate FG-201F	Rp287,573,500
		FORTINET ForManager-300 Centralized Management *Firewall*	Rp1,370,944,000
		NG*FIREWALL Firewall* - N8420	Rp1,646,196,020
		NG*FIREWALL Firewall* - N7210	Rp905,412,020.00
2	Akses Masuk (Finger Lock)	ZKTeco F18 (Access Control)	Rp2,371,600
3	Pemenuhan Bangunan dan Interior Ruang Server	1. PARTISI & PINTU: -. Dinding Gypsum Tahan Api (Jayaboard Fire Stop 13MM) -. Dinding Kaca Tempered	Rp250,000,000

No	Usulan Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Kisaran Harga
		(Partisi Kaca ketebalan 15mm) -. Pintu Kaca Tempered Single Door (Partisi Kaca ketebalan 15mm) -. Pintu Kayu Single Door bersertifikat tahan API (Pintu Utama Platindo WPC Amazon DUCO - S) 2. CEILING: -.Metal Ceiling dan Drop Ceiling (Penempatan Pada Ruang Monitoring) 3. PENGECATAN: -. Plafon dan dinding dengan ketahanan cat minimal 5 tahun (Untuk Lapisan Luar Gedung dan Dalam Gedung/Dinding)	
4	Pembelian Cadangan Baterai UPS	Nominal Voltage: 12V Nominal Capacity: 7AH Terminal F1\F2 Unit Utama	Rp5,000,000
5	Sistem Kebakaran	A. DETECTION & CONTROL SYSTEM (Paket Fire Alarm Conventional - ALBOX): -. 1 unit Master Control Fire Alarm 10 Zone ALBOX -. 2 pcs Battery Back up 12V-7.2A -. 1 unit Annuanciator -. 2 pcs RoR Heat Sensor -. 25 pcs Smoke Detector Sensor -. 2 pcs Emergency Push Button -. 2 pcs Emergency Lamp -. 2 pcs Sirene Bell 6 inch -. 2 Roll Kabel NYA Hitam + 2 Roll Kabel NYA Merah -. 2 Roll Kabel NYA 3.5x1.5mm -. 1 lot Matterial Instalasi -. Instalasi Pemasangan, Setting, Testing and Commisioning	Rp145,000,000
		B. ALAT PEMADAM (APAR): -. SERVVO Fire Extinguisher FE-36 Metronic System SMT 1100 SV 36 -. TONATA Apar ABC Powder	Rp50,000,000

No	Usulan Perangkat	Spesifikasi Perangkat	Kisaran Harga
		12 kg Set Komplit TNT-12P	
6	Monitor LED	SAMSUNG 75 Inch Smart TV QLED 4K UHD QA75Q95T	Rp60,000,000
		LG 75 Inch Smart TV NanoCell 4K UHD 75NANO91	Rp75,000,000
7	Sistem Monitoring Server	-	Rp100,000,000
8	Pengadaan SSL	SSL certificate from THAWTE (*Software* 1 tahun)	Rp5,000,000
9	Pengadaan Antivirus Server	Antivirus Kaspersky Small Office Security 10 PC+ 10 Server 1 Year	Rp5,000,000
10	Pengadaan Antivirus Client	Antivirus Kapersky Small Office Security (10 Client + 1 Server) 1 Year	Rp2,700,000
11	Kebijakan Keamanan Informasi	Konsultan Keamanan Informasi	Rp200,000,000
12	SOP	Pelatihan atau pembekalan untuk SDM dalam rangka meningkatkan Keamanan SPBE	Rp50,000,000 s/d Rp150,000,000

4.7 Rencana Anggaran Audit TIK

Rencana anggaran audit TIK pada sub bab ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.13.**

Tabel 4.13 Rencana Anggaran Audit TIK

Audit TIK	Jenis Kegiatan	Kisaran Anggaran
Audit Infrastruktur SPBE	Audit Server	200 – 250 jt
	Audit Jaringan	200 – 250 jt
Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi Khusus	200 – 250 jt
Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan Infrastruktur	200 – 250 jt
	Audit Keamanan Aplikasi Khusus	200 – 250 jt

4.8 Rencana Anggaran Peta Rencana Perangkat Daerah (OPD)

Rencana dan anggaran masing-masing OPD disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Buku 2 sampai dengan Buku 6. Rencana dan anggaran pada terbagi menjadi anggaran pembangunan aplikasi, pengadaan perangkat keras (Jaringan Intra Pemerintah dan Pelengkapnya, Perangkat Ruang Server (*Data Center*), dan pelengkapnya, Perangkat Komputasi, Perangkat Periferal, Perangkat Pendukung, dan Media Penyimpanan), audit TIK, pengadaan SDM, training, dan sertifikasi. Penjabaran lebih detail dapat dilihat pada **Tabel 4.14.**

Tabel 4.14 Rencana Anggaran Tiap OPD

Kode PD	Nama PD	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Rp75.228.268	Rp47.878.000	Rp444.926.999	Rp34.049.000	Rp22.050.000	Rp624.132.267
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp61.719.902	Rp28.799.000	Rp27.447.000	Rp125.649.000	Rp47.699.000	Rp291.313.902
3	Bagian Hukum	Rp50.377.450	Rp68.736.450	Rp136.848.000	Rp34.049.000	Rp-	Rp290.010.900
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rp44.144.634	Rp397.846.000	Rp27.629.000	Rp13.650.000	Rp-	Rp483.269.634
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp183.809.852	Rp228.102.900	Rp200.321.000	Rp134.248.000	Rp134.248.000	Rp880.729.752
6	Bagian Umum	Rp120.084.634	Rp80.140.134	Rp119.543.000	Rp219.396.000	Rp80.097.000	Rp619.260.768
7	Bagian Organisasi	Rp111.235.634	Rp92.039.268	Rp81.895.000	Rp80.097.000	Rp92.096.000	Rp457.362.902
8	Bagian Protokol dan Komunikasi	Rp98.034.634	Rp105.689.268	Rp300.346.000	Rp114.146.000	Rp115.797.000	Rp734.012.902

Kode	Nama PD	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
	Pimpinan						
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp178.534.634	Rp80.040.268	Rp78.296.000	Rp54.448.000	Rp42.449.000	Rp433.767.902
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp384.136.639	Rp385.642.268	Rp275.498.000	Rp285.600.000	Rp285.600.000	Rp1.616.476.907
11	Inspektorat	Rp379.875.752	Rp228.849.000	Rp358.156.000	Rp195.894.000	Rp195.894.000	Rp1.358.668.752
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Rp428.673.418	Rp179.467.700	Rp169.043.000	Rp356.042.000	Rp182.693.000	Rp1.315.919.118
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp308.823.902	Rp1.601.990.000	Rp102.147.000	Rp115.996.000	Rp186.050.000	Rp2.315.006.902
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp354.572.902	Rp340.724.450	Rp163.788.700	Rp127.347.000	Rp204.299.000	Rp1.190.732.052
15	Badan Pendapatan Daerah	Rp275.950.302	Rp462.865.000	Rp421.438.000	Rp478.337.000	Rp480.582.000	Rp2.119.172.302
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp303.007.802	Rp282.465.000	Rp445.237.000	Rp292.791.000	Rp292.791.000	Rp1.616.291.802
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp51.186.252	Rp416.685.700	Rp360.370.000	Rp302.842.000	Rp401.093.000	Rp1.532.176.952
18	Dinas Kesehatan	Rp754.678.458	Rp717.408.750	Rp540.070.000	Rp604.185.000	Rp549.082.000	Rp3.165.424.208
19	Dinas Ketenagakerjaan	Rp149.195.634	Rp159.726.268	Rp255.097.000	Rp103.790.000	Rp118.947.000	Rp786.755.902
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.365.538.507	Rp267.565.700	Rp2.710.495.000	Rp617.238.000	Rp994.795.000	Rp5.955.632.207

Kode	Nama PD	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rp244.446.334	Rp390.228.018	Rp409.841.000	Rp226.793.000	Rp192.295.000	Rp1.463.603.352
22	Dinas Lingkungan Hidup	Rp1.234.300.634	Rp600.826.268	Rp704.833.000	Rp566.834.000	Rp530.388.000	Rp3.637.181.902
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp457.076.634	Rp224.636.268	Rp479.792.000	Rp457.263.000	Rp-	Rp1.618.767.902
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rp639.453.884	Rp611.573.018	Rp437.779.700	Rp592.780.000	Rp497.382.000	Rp2.778.968.602
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp174.831.634	Rp192.787.036	Rp370.245.000	Rp171.744.000	Rp133.046.000	Rp1.042.653.670
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Rp355.026.635	Rp284.334.268	Rp217.944.000	Rp258.445.000	Rp260.393.000	Rp1.376.142.903
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp206.667.084	Rp490.208.718	Rp251.476.000	Rp133.146.000	Rp96.897.000	Rp1.178.394.802
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp268.580.468	Rp453.006.758	Rp457.091.000	Rp193.144.000	Rp144.748.000	Rp1.516.570.226
29	Dinas Perhubungan	Rp203.630.634	Rp210.986.268	Rp197.545.000	Rp176.994.000	Rp119.396.000	Rp908.551.902
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp367.930.634	Rp193.941.268	Rp153.445.000	Rp146.544.000	Rp79.800.000	Rp941.660.902

Kode	Nama PD	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp128.685.634	Rp304.042.268	Rp279.590.000	Rp311.394.000	Rp179.543.000	Rp1.203.254.902
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp79.433.634	Rp80.040.268	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp363.767.902
33	Dinas Sosial	Rp203.630.634	Rp6.163.009.134	Rp314.345.000	Rp343.594.000	Rp192.295.000	Rp7.216.873.768
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp534.284.634	Rp5.721.752.000	Rp481.935.000	Rp561.621.450	Rp294.442.000	Rp7.594.035.084
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Rp1.387.184.034	Rp999.894.000	Rp1.152.474.000	Rp1.123.168.000	Rp971.070.000	Rp5.633.790.034
36	Kecamatan Situbondo	Rp162.174.634	Rp46.604.000	Rp58.047.000	Rp70.046.000	Rp70.046.000	Rp406.917.634
37	Kecamatan Bungatan	Rp87.834.533	Rp105.689.268	Rp76.498.000	Rp80.097.000	Rp80.097.000	Rp430.215.801
38	Puskesmas Situbondo	Rp285.476.634	Rp273.056.474	Rp317.051.718	Rp412.440.450	Rp122.850.000	Rp1.410.875.276
39	Puskesmas Bungatan	Rp303.630.634	Rp181.908.134	Rp147.994.134	Rp142.993.450	Rp191.934.000	Rp968.460.352
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp586.960.634	Rp252.513.718	Rp233.542.000	Rp180.296.000	Rp215.996.000	Rp1.469.308.352

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian dan Rencana Anggaran Tiap OPD

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Pengadaan Perangkat	Rp59.720.000	Rp42.449.000	Rp68.128.000	Rp34.049.000	Rp22.050.000	Rp226.396.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp375.000.000	Rp-	Rp-	Rp375.000.000
		Training	Rp5.971.134	Rp279.000	Rp899.999	Rp-	Rp-	Rp7.150.133
		Sertifikasi	Rp9.537.134	Rp5.150.000	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp15.586.134
		Total	**Rp75.228.268**	**Rp47.878.000**	**Rp444.926.999**	**Rp34.049.000**	**Rp22.050.000**	**Rp624.132.267**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pengadaan Perangkat	Rp40.798.000	Rp28.799.000	Rp25.649.000	Rp25.649.000	Rp47.699.000	Rp168.594.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp5.971.134	Rp-	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp6.870.134
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp-	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp15.849.768
		Total	**Rp61.719.902**	**Rp28.799.000**	**Rp27.447.000**	**Rp125.649.000**	**Rp47.699.000**	**Rp291.313.902**
3	Bagian Hukum	Pengadaan Perangkat	Rp46.048.000	Rp56.129.000	Rp34.049.000	Rp34.049.000	Rp-	Rp170.275.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp799.000	Rp3.178.000	Rp799.000	Rp-	Rp-	Rp4.776.000
		Sertifikasi	Rp3.530.450	Rp9.429.450	Rp2.000.000	Rp-	Rp-	Rp14.959.900
		Total	**Rp50.377.450**	**Rp68.736.450**	**Rp136.848.000**	**Rp34.049.000**	**Rp0**	**Rp290.010.900**
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Pengadaan Perangkat	Rp34.049.000	Rp46.048.000	Rp22.050.000	Rp13.650.000	Rp-	Rp115.797.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp350.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp350.000.000
		Training	Rp558.000	Rp899.000	Rp429.000	Rp-	Rp-	Rp1.886.000
		Sertifikasi	Rp9.537.634	Rp899.000	Rp5.150.000	Rp-	Rp-	Rp15.586.634
		Total	**Rp44.144.634**	**Rp397.846.000**	**Rp27.629.000**	**Rp13.650.000**	**Rp0**	**Rp483.269.634**
5	Bagian	Pembangunan Aplikasi	Rp102.147.000	Rp194.243.000	Rp194.243.000	Rp134.248.000	Rp134.248.000	Rp759.129.000

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Perangkat	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
		Training	Rp19.789.934	Rp14.799.000	Rp1.078.000	Rp-	Rp-	Rp35.666.934
		Sertifikasi	Rp61.872.918	Rp19.060.900	Rp5.000.000	Rp-	Rp-	Rp85.933.818
		Total	**Rp183.809.852**	**Rp228.102.900**	**Rp200.321.000**	**Rp134.248.000**	**Rp134.248.000**	**Rp880.729.752**
6	Bagian Umum	Pengadaan Perangkat	Rp110.547.000	Rp68.098.000	Rp117.745.000	Rp119.396.000	Rp80.097.000	Rp495.883.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp279.000	Rp6.071.000	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp7.249.000
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp120.084.634**	**Rp80.140.134**	**Rp119.543.000**	**Rp219.396.000**	**Rp80.097.000**	**Rp619.260.768**
7	Bagian Organisasi	Pengadaan Perangkat	Rp101.698.000	Rp80.097.000	Rp80.097.000	Rp80.097.000	Rp92.096.000	Rp434.085.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	Rp-
		Training	Rp279.000	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp111.235.634**	**Rp92.039.268**	**Rp81.895.000**	**Rp80.097.000**	**Rp92.096.000**	**Rp457.362.902**
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pengadaan Perangkat	Rp88.497.000	Rp93.747.000	Rp98.548.000	Rp114.146.000	Rp115.797.000	Rp510.735.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp200.000.000	Rp-	Rp-	Rp200.000.000
		Training	Rp279.000	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp98.034.634**	**Rp105.689.268**	**Rp300.346.000**	**Rp114.146.000**	**Rp115.797.000**	**Rp734.012.902**
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengadaan Perangkat	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp76.498.000	Rp54.448.000	Rp42.449.000	Rp309.591.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp8.048.134
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp178.534.634**	**Rp80.040.268**	**Rp78.296.000**	**Rp54.448.000**	**Rp42.449.000**	**Rp433.767.902**

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengadaan Perangkat	Rp273.700.000	Rp273.700.000	Rp273.700.000	Rp285.600.000	Rp285.600.000	Rp1.392.300.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp200.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp8.048.134
		Sertifikasi	Rp9.258.639	Rp5.971.134	Rp899.000	Rp-	Rp-	Rp16.128.773
		Total	**Rp384.136.639**	**Rp385.642.268**	**Rp275.498.000**	**Rp285.600.000**	**Rp285.600.000**	**Rp1.616.476.907**
11	Inspektorat	Pengadaan Perangkat	Rp226.344.000	Rp216.293.000	Rp234.744.000	Rp195.894.000	Rp195.894.000	Rp1.069.169.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp200.000.000
		Training	Rp22.159.934	Rp1.507.000	Rp11.412.000	Rp-	Rp-	Rp35.078.934
		Sertifikasi	Rp31.371.818	Rp11.049.000	Rp12.000.000	Rp-	Rp-	Rp54.420.818
		Total	**Rp379.875.752**	**Rp228.849.000**	**Rp358.156.000**	**Rp195.894.000**	**Rp195.894.000**	**Rp1.358.668.752**
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengadaan Perangkat	Rp184.344.000	Rp145.045.000	Rp169.043.000	Rp181.042.000	Rp182.693.000	Rp862.167.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp200.000.000	Rp-	Rp-	Rp175.000.000	Rp-	Rp375.000.000
		Training	Rp21.789.934	Rp13.877.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp35.666.934
		Sertifikasi	Rp22.539.484	Rp20.545.700	Rp-	Rp-	Rp-	Rp43.085.184
		Total	**Rp428.673.418**	**Rp179.467.700**	**Rp169.043.000**	**Rp356.042.000**	**Rp182.693.000**	**Rp1.315.919.118**
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Perangkat	Rp185.546.000	Rp1.601.990.000	Rp102.147.000	Rp115.996.000	Rp186.050.000	Rp2.191.729.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp7.149.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp16.128.768	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp308.823.902**	**Rp1.601.990.000**	**Rp102.147.000**	**Rp115.996.000**	**Rp186.050.000**	**Rp2.315.006.902**
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Perangkat	Rp126.145.000	Rp160.194.000	Rp156.595.000	Rp127.347.000	Rp204.299.000	Rp774.580.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp200.000.000	Rp175.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp375.000.000
		Training	Rp7.149.134	Rp2.000.000	Rp1.598.000	Rp-	Rp-	Rp10.747.134
		Sertifikasi	Rp21.278.768	Rp3.530.450	Rp5.595.700	Rp-	Rp-	Rp30.404.918

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
		Total	**Rp354.572.902**	**Rp340.724.450**	**Rp163.788.700**	**Rp127.347.000**	**Rp204.299.000**	**Rp1.190.732.052**
15	Badan Pendapatan Daerah	Pengadaan Perangkat	Rp43.588.000	Rp433.788.000	Rp418.639.000	Rp478.337.000	Rp480.582.000	Rp1.854.934.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp175.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp175.000.000
		Training	Rp21.689.934	Rp13.178.000	Rp799.000	Rp-	Rp-	Rp35.666.934
		Sertifikasi	Rp35.672.368	Rp15.899.000	Rp2.000.000	Rp-	Rp-	Rp53.571.368
		Total	**Rp275.950.302**	**Rp462.865.000**	**Rp421.438.000**	**Rp478.337.000**	**Rp480.582.000**	**Rp2.119.172.302**
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengadaan Perangkat	Rp240.291.000	Rp258.742.000	Rp342.438.000	Rp292.791.000	Rp292.791.000	Rp1.427.053.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp22.377.134	Rp12.490.800	Rp799.000	Rp-	Rp-	Rp35.666.934
		Sertifikasi	Rp40.339.668	Rp11.232.200	Rp2.000.000	Rp-	Rp-	Rp53.571.868
		Total	**Rp303.007.802**	**Rp282.465.000**	**Rp445.237.000**	**Rp292.791.000**	**Rp292.791.000**	**Rp1.616.291.802**
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Perangkat	Rp-	Rp292.342.000	Rp257.091.000	Rp302.842.000	Rp401.093.000	Rp1.253.368.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp200.000.000
		Training	Rp21.360.134	Rp13.598.000	Rp279.000	Rp-	Rp-	Rp35.237.134
		Sertifikasi	Rp29.826.118	Rp10.745.700	Rp3.000.000	Rp-	Rp-	Rp43.571.818
		Total	**Rp51.186.252**	**Rp416.685.700**	**Rp360.370.000**	**Rp302.842.000**	**Rp401.093.000**	**Rp1.532.176.952**
18	Dinas Kesehatan	Pengadaan Perangkat	Rp493.935.000	Rp510.735.000	Rp531.134.000	Rp604.185.000	Rp549.082.000	Rp2.689.071.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp200.000.000	Rp175.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp375.000.000
		Training	Rp27.139.137	Rp13.078.000	Rp1.507.000	Rp-	Rp-	Rp41.724.137
		Sertifikasi	Rp33.604.321	Rp18.595.750	Rp7.429.000	Rp-	Rp-	Rp59.629.071
		Total	**Rp754.678.458**	**Rp717.408.750**	**Rp540.070.000**	**Rp604.185.000**	**Rp549.082.000**	**Rp3.165.424.208**
19	Dinas Ketenagakerjaan	Pengadaan Perangkat	Rp44.100.000	Rp146.544.000	Rp80.097.000	Rp103.790.000	Rp118.947.000	Rp493.478.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp175.000.000	Rp-	Rp-	Rp275.000.000
		Training	Rp558.000	Rp6.591.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
		Sertifikasi	Rp4.537.634	Rp6.591.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp11.128.768
		Total	**Rp149.195.634**	**Rp159.726.268**	**Rp255.097.000**	**Rp103.790.000**	**Rp118.947.000**	**Rp786.755.902**
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Perangkat	Rp557.092.000	Rp233.093.000	Rp1.760.495.000	Rp317.238.000	Rp244.795.000	Rp3.112.713.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp200.000.000	Rp300.000.000	Rp-	Rp500.000.000
		Training	Rp21.789.934	Rp13.877.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp35.666.934
		Sertifikasi	Rp36.656.573	Rp20.595.700	Rp-	Rp-	Rp-	Rp57.252.273
		Pelaksanaan Audit	Rp750.000.000	Rp-	Rp750.000.000	Rp-	Rp750.000.000	Rp2.250.000.000
		Total	**Rp1.365.538.507**	**Rp267.565.700**	**Rp2.710.495.000**	**Rp617.238.000**	**Rp994.795.000**	**Rp5.955.632.207**
21	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Pengadaan Perangkat	Rp211.644.000	Rp238.792.000	Rp209.841.000	Rp226.793.000	Rp192.295.000	Rp1.079.365.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp-	Rp-	Rp300.000.000
		Training	Rp15.668.800	Rp19.998.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp35.666.934
		Sertifikasi	Rp17.133.534	Rp31.437.884	Rp-	Rp-	Rp-	Rp48.571.418
		Total	**Rp244.446.334**	**Rp390.228.018**	**Rp409.841.000**	**Rp226.793.000**	**Rp192.295.000**	**Rp1.463.603.352**
22	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Perangkat	Rp877.965.000	Rp588.884.000	Rp704.833.000	Rp566.834.000	Rp530.388.000	Rp3.268.904.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp350.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp350.000.000
		Training	Rp5.157.634	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp11.128.768
		Sertifikasi	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Total	**Rp1.234.300.634**	**Rp600.826.268**	**Rp704.833.000**	**Rp566.834.000**	**Rp530.388.000**	**Rp3.637.181.902**
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengadaan Perangkat	Rp270.741.000	Rp212.694.000	Rp280.792.000	Rp257.263.000	Rp-	Rp1.021.490.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp175.000.000	Rp-	Rp175.000.000	Rp200.000.000	Rp-	Rp550.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp12.000.000	Rp-	Rp-	Rp19.149.134
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.134	Rp12.000.000	Rp-	Rp-	Rp28.128.768
		Total	**Rp457.076.634**	**Rp224.636.268**	**Rp479.792.000**	**Rp457.263.000**	**Rp-**	**Rp1.618.767.902**
24	Dinas Pekerjaan	Pengadaan Perangkat	Rp623.230.800	Rp586.936.000	Rp416.200.000	Rp592.780.000	Rp497.382.000	Rp2.716.528.800

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
	Umum dan Perumahan Permukiman	Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
		Training	Rp2.256.000	Rp7.199.134	Rp13.412.800	Rp-	Rp-	Rp22.867.934
		Sertifikasi	Rp13.967.084	Rp17.437.884	Rp8.166.900	Rp-	Rp-	Rp39.571.868
		Total	**Rp639.453.884**	**Rp611.573.018**	**Rp437.779.700**	**Rp592.780.000**	**Rp497.382.000**	**Rp2.778.968.602**
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengadaan Perangkat	Rp163.496.000	Rp164.995.000	Rp170.245.000	Rp171.744.000	Rp133.046.000	Rp803.526.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp200.000.000	Rp-	Rp-	Rp200.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp21.820.902	Rp-	Rp-	Rp-	Rp31.978.536
		Total	**Rp174.831.634**	**Rp192.787.036**	**Rp370.245.000**	**Rp171.744.000**	**Rp133.046.000**	**Rp1.042.653.670**
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pengadaan Perangkat	Rp248.691.000	Rp272.392.000	Rp217.944.000	Rp258.445.000	Rp260.393.000	Rp1.257.865.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp5.157.635	Rp5.971.134	Rp-	Rp-		Rp11.128.769
		Total	**Rp355.026.635**	**Rp284.334.268**	**Rp217.944.000**	**Rp258.445.000**	**Rp260.393.000**	**Rp1.376.142.903**
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadaan Perangkat	Rp190.644.000	Rp102.147.000	Rp124.197.000	Rp133.146.000	Rp96.897.000	Rp647.031.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp350.000.000	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp450.000.000
		Training	Rp2.056.000	Rp20.327.934	Rp12.279.000	Rp-	Rp-	Rp34.662.934
		Sertifikasi	Rp13.967.084	Rp17.733.784	Rp15.000.000	Rp-	Rp-	Rp46.700.868
		Total	**Rp206.667.084**	**Rp490.208.718**	**Rp251.476.000**	**Rp133.146.000**	**Rp96.897.000**	**Rp1.178.394.802**
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perangkat	Rp223.042.000	Rp221.534.000	Rp257.091.000	Rp193.144.000	Rp144.748.000	Rp1.039.559.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp-	Rp-	Rp400.000.000
		Training	Rp21.784.934	Rp13.877.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp35.661.934

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
		Sertifikasi	Rp23.753.534	Rp17.595.758	Rp-	Rp-	Rp-	Rp41.349.292
		Total	**Rp268.580.468**	**Rp453.006.758**	**Rp457.091.000**	**Rp193.144.000**	**Rp144.748.000**	**Rp1.516.570.226**
29	Dinas Perhubungan	Pengadaan Perangkat	Rp192.295.000	Rp199.044.000	Rp197.545.000	Rp176.994.000	Rp119.396.000	Rp885.274.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp203.630.634**	**Rp210.986.268**	**Rp197.545.000**	**Rp176.994.000**	**Rp119.396.000**	**Rp908.551.902**
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Perangkat	Rp156.595.000	Rp181.999.000	Rp153.445.000	Rp146.544.000	Rp79.800.000	Rp718.383.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp200.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp200.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp367.930.634**	**Rp193.941.268**	**Rp153.445.000**	**Rp146.544.000**	**Rp79.800.000**	**Rp941.660.902**
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan Perangkat	Rp117.350.000	Rp292.100.000	Rp279.590.000	Rp311.394.000	Rp179.543.000	Rp1.179.977.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp128.685.634**	**Rp304.042.268**	**Rp279.590.000**	**Rp311.394.000**	**Rp179.543.000**	**Rp1.203.254.902**
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pengadaan Perangkat	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp68.098.000	Rp340.490.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp79.433.634**	**Rp80.040.268**	**Rp68.098.000**	**Rp68.098.000**	**Rp68.098.000**	**Rp363.767.902**
33	Dinas Sosial	Pengadaan Perangkat	Rp192.295.000	Rp185.843.000	Rp214.345.000	Rp168.594.000	Rp192.295.000	Rp953.372.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp100.000.000	Rp175.000.000	Rp-	Rp275.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.195.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp5.972.373.000

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.128.768
		Total	**Rp203.630.634**	**Rp6.163.009.134**	**Rp314.345.000**	**Rp343.594.000**	**Rp192.295.000**	**Rp7.216.873.768**
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Perangkat	Rp347.391.000	Rp29.339.000	Rp381.136.000	Rp383.091.000	Rp294.442.000	Rp1.435.399.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp175.000.000	Rp-	Rp100.000.000	Rp175.000.000	Rp-	Rp450.000.000
		Training	Rp1.457.000	Rp5.692.134.000	Rp799.000	Rp-	Rp-	Rp5.694.390.000
		Sertifikasi	Rp10.436.634	Rp279.000	Rp-	Rp3.530.450	Rp-	Rp14.246.084
		Total	**Rp534.284.634**	**Rp5.721.752.000**	**Rp481.935.000**	**Rp561.621.450**	**Rp294.442.000**	**Rp7.594.035.084**
35	RSUD dr. Abdoer Rahem	Pengadaan Perangkat	Rp1.024.468.000	Rp973.372.000	Rp1.152.474.000	Rp1.123.168.000	Rp971.070.000	Rp5.244.552.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp300.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp300.000.000
		Training	Rp22.377.000	Rp13.289.800	Rp-	Rp-	Rp-	Rp35.666.800
		Sertifikasi	Rp40.339.034	Rp13.232.200	Rp-	Rp-	Rp-	Rp53.571.234
		Total	**Rp1.387.184.034**	**Rp999.894.000**	**Rp1.152.474.000**	**Rp1.123.168.000**	**Rp971.070.000**	**Rp5.633.790.034**
36	Kecamatan Situbondo	Pengadaan Perangkat	Rp46.046.000	Rp46.046.000	Rp58.047.000	Rp70.046.000	Rp70.046.000	Rp290.231.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp6.870.000	Rp279.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.000
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp279.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp9.537.634
		Total	**Rp162.174.634**	**Rp46.604.000**	**Rp58.047.000**	**Rp70.046.000**	**Rp70.046.000**	**Rp406.917.634**
37	Kecamatan Bungatan	Pengadaan Perangkat	Rp76.498.000	Rp93.747.000	Rp76.498.000	Rp80.097.000	Rp80.097.000	Rp406.937.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp7.149.134
		Sertifikasi	Rp10.158.533	Rp5.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp16.129.667
		Total	**Rp87.834.533**	**Rp105.689.268**	**Rp76.498.000**	**Rp80.097.000**	**Rp80.097.000**	**Rp430.215.801**
38	Puskesmas Situbondo	Pengadaan Perangkat	Rp174.141.000	Rp255.143.000	Rp195.759.000	Rp272.392.000	Rp122.850.000	Rp1.020.285.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp-	Rp300.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp11.942.134	Rp6.920.134	Rp23.412.000	Rp-	Rp43.452.268

Kode OPD	Nama OPD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.971.340	Rp14.372.584	Rp16.636.450	Rp-	Rp47.138.008
		Total	**Rp285.476.634**	**Rp273.056.474**	**Rp317.051.718**	**Rp412.440.450**	**Rp122.850.000**	**Rp1.410.875.276**
39	Puskesmas Bungatan	Pengadaan Perangkat	Rp192.295.000	Rp170.245.000	Rp143.600.000	Rp126.145.000	Rp191.934.000	Rp824.219.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp100.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp100.000.000
		Training	Rp1.178.000	Rp5.971.000	Rp799.000	Rp12.212.000	Rp-	Rp20.160.000
		Sertifikasi	Rp10.157.634	Rp5.692.134	Rp3.595.134	Rp4.636.450	Rp-	Rp24.081.352
		Total	**Rp303.630.634**	**Rp181.908.134**	**Rp147.994.134**	**Rp142.993.450**	**Rp191.934.000**	**Rp968.460.352**
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Perangkat	Rp70.046.000	Rp235.041.000	Rp233.542.000	Rp180.296.000	Rp215.996.000	Rp934.921.000
		Pembangunan Aplikasi	Rp500.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp500.000.000
		Training	Rp1.607.000	Rp7.971.134	Rp-	Rp-	Rp-	Rp9.578.134
		Sertifikasi	Rp15.307.634	Rp9.501.584	Rp-	Rp-	Rp-	Rp24.809.218
		Total	**Rp586.960.634**	**Rp252.513.718**	**Rp233.542.000**	**Rp180.296.000**	**Rp215.996.000**	**Rp1.469.308.352**

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

KABUPATEN SITUBONDO